

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

PENGHARGAAN GCG 2023

Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang 14th IICD *Corporate Governance Conference* and Awards 2023, Bank Mandiri meraih penghargaan dalam kategori **"Best Overall".**

Pada tahun 2023, keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program Corporate *Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG), berhasil mempertahankan predikat **"Sangat Terpercaya" selama 17 (tujuh belas)** kali berturut-turut.

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat **"Sangat Terpercaya"**, 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat **"Terpercaya"**, dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat **"Terpercaya"** dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



Bank Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

Sebagai Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, Bank Mandiri berupaya untuk mendorong penciptaan nilai keberlanjutan melalui pola pikir yang terintegrasi yang menghubungkan data, proses, analisis keuangan dan keberlanjutan. Bank Mandiri percaya, pola pikir terintegrasi akan meningkatkan kualitas informasi dan proses keberlanjutan serta mampu menghubungkan pelaporan keuangan dengan nilai bisnis bank.

Pola pikir yang terintegrasi diperlukan untuk menyampaikan informasi berkualitas tinggi dan berguna dalam pengambilan keputusan kepada Manajemen, Direksi, dan Investor. Di samping itu, pola pikir terintegrasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kehandalan data serta memajukan keberlanjutan dan meningkatkan pelaporan perusahaan sehingga informasi yang diberikan konsisten, sebanding, handal, terjamin, dan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kemampuan Bank dalam menciptakan nilai berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Bank Mandiri meyakini, tanpa pola pikir terintegrasi, memasukkan isu-isu keberlanjutan ke dalam cara berpikir perusahaan tidak mungkin dilakukan. Pola pikir yang terintegrasi adalah jalan untuk mewujudkan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pemahaman mengenai isu-isu keberlanjutan yang material sangat penting dimiliki oleh Manajemen Bank sebagai dasar pengambilan keputusan. Bank Mandiri berkomitmen untuk menghubungkan informasi dan proses pelaporan yang berkaitan dengan tata kelola, risiko, keberlanjutan, dan pelaporan keuangan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penciptaan nilai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dengan pola pikir terintegrasi mampu memberikan energy baik bagi Bank Mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjadi fondasi kuat dalam memberikan nilai tambah bagi setiap pemangku kepentingan. Selain itu, Bank Mandiri sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Selaras dengan hal tersebut, Bank Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

No.	Peraturan
1.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK")
3.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

No.	Peraturan
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain:
	• POJK No, 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
	• POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) a. POJK Tata Kelola mencabut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. b. Materi ketentuan dalam POJK lain yang mengatur topik terkait aspek tata kelola, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. c. Ketentuan pelaksana POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate *Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. d. POJK Tata Kelola mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	• POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
	• POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
	• POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
	• POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
	• POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
	• POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
	• POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
	• SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
	• SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
	• SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
	• SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG.
4. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
5. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
6. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision.*
7. ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

TRANSPARANSI

1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan *(stakeholders)*.
2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola Perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

AKUNTABILITAS

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan.
5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Core Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

INDEPENDENSI

1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

KEWAJARAN

1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PENERAPAN PRINSIP GCG

Untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola yang baik, Bank Mandiri berpegang pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Penerapan Prinsip GCG di Perusahaan

Prinsip-prinsip GCG	Penjelasan	Penerapan di Perseroan
Perilaku Beretika	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	1. Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika, hal tersebut dibuktikan dengan penerapan prinsip – prinsip kepatuhan yang antara lain di dukung dengan : a. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; b. Penerapan praktik dan budaya anti korupsi; c. Implementasi pengendalian Gratifikasi; d. Implementasi *Whistleblowing System* 2. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). 3. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders.* 2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan. 3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. 4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan. 5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Core Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system.*

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Penerapan Prinsip GCG di Perusahaan

Prinsip-prinsip GCG	Penjelasan	Penerapan di Perseroan
Transparansi	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). 2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	1. Perseroan telah membentuk *dedicated* ESG Unit dibawah supervisi Wakil Direktur Utama untuk menjalankan fungsi koordinator pelaksanaan program-program keberlanjutan. 2. Perseroan telah menetapkan daftar negatif investasi dan menerapkan *Industry Acceptance Critieria* (IAC) sebagai bagian pemenuhan konsep ESG. 3. Perseroan telah menetapkan Bank Mandiri ESG *Governance Structure*, diantaranya untuk menetapkan arah *sustainability* Bank terkait *climate change* dan pencapaian SDGs; mengawasi implementasi ESG, pemenuhan target dan inisiatif *sustainability*; dan mengawasi implementasi tata kelola terintegrasi *Sustainability* Bank Mandiri dan Entitas Anak. 4. Perseroan menyelenggarakan program pelatihan khusus aspek-aspek keberlanjutan yang wajib diikuti oleh perwakilan fungsi-fungsi terkait pemberian kredit, pengawasan kredit, manajemen risiko dan sebagainya. 5. Perseroan menyelenggarakan rapat berkala yang khusus membahas kemajuan program-program keberlanjutan.



ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan telah dilakukan secara terstruktur dengan *roadmap* sebagai berikut:

1998
Awal Merger

Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat praktik *"bad governance"* yang menyeluruh di industri perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-*bailout* dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.

2000 – 2001
Peletakan Dasar-Dasar *Governance Commitment, Structure, and Mechanisms*

Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain:

1. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip- prinsip GCG.
2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang *Code of Conduct* yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai.
3. Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan kegiatan operasional Bank di bidangnya masing-masing.
4. Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan *diagnostic review* atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga *Rating* Independen telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.

2003
***Initial Public Offering* (IPO) Bank Mandiri**

Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan beberapa Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu:
   - Komite Audit
   - Komite Pemantau Risiko
   - Komite Remunerasi dan Nominasi
   - Komite GCG
2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*.
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.
4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material.
5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.

2005
Transformasi Budaya

1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (*shared values*) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan.
2. Penyusunan *Charter* GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri.
3. *Rating* GCG dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) meraih predikat "Sangat Terpercaya" untuk pertama kalinya.

2008 – 2010
Transformasi Budaya Lanjutan

1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan *prudential banking*, GCG serta *internal control* melalui pengembangan *website* GCG, *Compliance Risk Management System*, Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Risk Based Audit Tools* dan Sistem Informasi Manajemen Audit.
2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair, Culture Seminar,* dan *Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan *change agent* terbaik dalam implementasi program budaya.

2011 – 2013

1. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain:
   a. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat *"Best Financial"*.
   b. *Rating GCG oleh Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG.
   c. Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan *Gift*.
3. *Disclosure* tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

2014
1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. *Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia* "sebagai *Icon on Corporate Governance*.
3. Good Corporate Citizen (GCC) sejalan dengan *corporate plan* Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya *adalah social economic impact*, salah satu komponen yaitu *role model corporate citizen*. Bank Mandiri telah melakukan *diagnostic review* terhadap penerapan GCC di Perseroan.
4. Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* sesuai dengan himbauan KPK.

2015
1. Melakukan transformasi tahap 3.
2. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*".
3. *Rating* GCG oleh *Corporate Governance Asia* (CGA), Bank Mandiri meraih predikat *"The Best of Asia"* sebagai *Icon on Corporate Governance*.
4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
   a. Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
   b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
   c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan *launching* Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

2016
1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2017
1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.
2. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang ASEAN CG *Scorecard* 2016, Bank Mandiri meraih kategori *"The Best Overall"*.
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

2018
1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award* 2018 yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.
2. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs* Indonesia dalam ajang *2nd ASEAN Corporate Governance Scorecard (CG) Awards*.
3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

2019
1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG* Scorecard 2019, Bank Mandiri meraih kategori *"The Best Overall"*.
2. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 16 (enam belas) tahun berturut- turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award* 2019 yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs Indonesia*.
4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS*.

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

2020

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan CEO Forum.
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan *oleh IICG,* kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" 14 (empat belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam *ASEAN Asset Class* pada pemeringkatan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* oleh *ASEAN Capital Market Forum.*
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS.*

2021

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance* 2021 (*Digital & Wholesale Banking*) dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021 yang digelar oleh Majalah *Business News* Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum.
2. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Compliance Officer* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021.
3. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Risk Management Officer* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021.
4. Bank Mandiri meraih *The Best Chairman in Banking Industries* 2021 dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award* 2021.
5. Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.
6. Bank Mandiri berhasil meraih kategori *Best Financial Sector* dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.

2022

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2022, Bank Mandiri meraih kategori *"The Best Financial Sector".*
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG), berhasil mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 16 (enam belas) kali berturut-turut.
3. Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat ASEAN *Asset Class* dan masuk dalam daftar 50 perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan ASEAN *Corporate Governance* Scorecard (ACGS) serta mendapatkan penghargaan *Best Financial Sector* dalam ajang The 13th Institute for Corporate Directorship (IICD) *Corporate Governance Award* 2022.
4. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya" dan 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
5. Bank Mandiri telah melakukan Penyesuaian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/17/2022 tanggal 18 April 2022.
6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP. KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022.
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 25 November 2022.

2023

1. *Rating* GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dalam ajang 14th IICD *Corporate Governance Conference and Awards* 2023, Bank Mandiri meraih kategori *"Best Overall".*

2. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance* (IICG), berhasil dalam mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut.

3. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya", 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya", dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat "Terpercaya dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022.

4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Anggota Komite TKT melalui SK Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023.

PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2023 & RENCANA 2024

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan tata kelola perusahaan guna menjaga keberlangsungan bisnis, perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2023 telah dilakukan.

Hal ini dilaksanakan antara lain melalui:

1. ***Self-Assessment* Tata Kelola secara Individu**

   Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember).

   Hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola secara Individu Semester I 2023 memperoleh nilai 1 (satu), namun OJK memberikan *feedback* pada tanggal 5 Desember 2023 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Mandiri.

   Hasil *Self-Assessment* semester I 2023 dengan nilai 1 (satu) kemudian mendapatkan *feedback* OJK, dengan nilai 2 (dua). Hal ini menunjukkan manajemen Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Sedangkan hasil *Self-Assessment* penerapan tata Kelola secara individu di semester II 2023 adalah nilai 1 (satu), mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan tata Kelola yang secara umum sangat baik. Bank Mandiri belum mendapatkan *feedback* dari OJK untuk *Self-Assessment* semester II 2023.

2. ***Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi**

   Selain melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* Penerapan Tata Kelola secara Individu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi. *Self assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

Untuk penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2023 diperoleh nilai 1 (satu), yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/ atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2023 juga memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

3. **ASEAN *Corporate Governance Scorecard***
   Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola, Bank Mandiri telah mengadopsi penilaian implementasi Tata Kelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market* Forum (ACMF) yang disebut ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

   ASEAN *Corporate Governance Scorecard* digunakan untuk menilai praktik tata kelola perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keberlanjutan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

   a. Hak-hak Pemegang Saham
   b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
   c. Peran Pemangku Kepentingan
   d. Pengungkapan dan Transparansi
   e. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

4. ***Corporate Governance Perception Index***
   Dalam rangka menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu *rating Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Tema CGPI adalah "Membangun Ketangkasan Perusahaan dalam Kerangka GCG". Tahapan penilaian CGPI meliputi *self-assessment*, penilaian kelengkapan dokumen dan observasi. Aspek penilaian CGPI meliputi *Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Keikutsertaan Bank Mandiri kali ini merupakan keikutsertaan yang ke-20 sejak tahun 2003 sampai dengan 2023, Bank Mandiri berhasil mempertahankan dengan predikat sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya" selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut dengan skor 95,22.

Rencana Tahun 2024

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah menyusun rencana kerja di tahun 2024, antara lain:

1. Keikutsertaan Mandiri Group dalam pemeringkatan/ penilaian *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
3. Pelaksanaan penilaian sendiri *(self-assessment)* Tata Kelola secara Individu dan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

PENILAIAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang telah dilakukan, yang dilaksanakan secara semesteran. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan *assessment* terhadap implementasi GCG melalui pihak eksternal independen dengan mengikuti pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

SELF-ASSESSMENT

Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri *((self-assessment)* terhadap penerapan tata kelola perusahaan secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan tata kelola perusahaan secara Individu adalah Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness)* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. *Governance Structure*
   Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perseroan agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. *Governance Process*
   Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
3. *Governance Outcome*
   Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
   a. Kecukupan transparansi laporan.
   b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
   c. Perlindungan konsumen.
   d. Obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit.
   e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
   f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

PENILAIAN TATA KELOLA

Penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan tata kelola perusahaan secara Individu meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposure)*.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Proses penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan tata kelola perusahaan secara Individu Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada semester I 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* Tata Kelola secara individu dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan *feedback* penilaian sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* Tata Kelola secara individu dengan nilai 1. Adapun OJK belum memberikan *feedback* untuk hasil *self-assessment* periode Semester II 2023. Penilaian dimaksud adalah sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

STRENGTH	*WEAKNESS*
STRUKTUR	
1. Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dari OJK. 3. Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023. b. Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023. c. Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023. d. Komite Audit melalui SK Direksi No. KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023.	Tidak Ada
PROSES	
1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2023 telah diadakan 30 (tiga puluh) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 49 (empat puluh sembilan) kali Rapat Direksi. 2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri 2023 – 2025 telah dibahas pada forum Rapat Direksi dan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Adapun pada tahun 2023 Komite dibawah Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan rincian sebagai berikut a. Komite Audit: 28 (dua puluh delapan) Kali b. Komite Pemantau Risiko: 25 (dua pulih lima) Kali c. Komite Remunerasi dan Nominasi:12 (dua belas) Kali d. Komite Tata Kelola Terintegrasi: 6 (enam) Kali	Tidak Ada

STRENGTH	WEAKNESS
HASIL	
1. Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" *(The Most Trusted Companies)* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut dan mendapatkan nilai 95,22. 2. *Annual Audit Plan* 2023 Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 3. Laporan Direktur Kepatuhan periode semester I tahun 2023 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2023.	Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Bank Mandiri juga secara aktif melakukan penilaian Tata Kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan *feedback* dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank.

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 20 (dua puluh) kali berturut-turut sejak tahun 2003.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2022/2023 meliputi:

1. *Governance Structure*
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek struktur tata kelola ini meliputi:
   a. Indikator Pemegang Saham dan RUPS
   b. Indikator Dewan Komisaris
   c. Indikator Direksi
   d. Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
   e. Indikator Organ Kelengkapan Direksi
   f. Indikator Manajemen Fungsional

2. *Governance Process*
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
   a. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham serta pelaksanaan RUPS.
   b. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi.
   c. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian.
   d. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
   e. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
   f. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Visi Bersama Perusahaan.
   g. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi.
   h. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi.
   i. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
   j. Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dunia Usaha dan Industri.

3. *Governance Outcome*
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kualitas capaian dan manfaat yang berhasil serta berdaya guna untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:
   a. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Organ Perusahaan
   b. Indikator Hasil dan Dampak Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
   c. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
   d. Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
   e. Indikator Hasil dan Dampak Membangun Ketangguhan Perusahaan.

PENILAIAN TATA KELOLA

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" dalam penilaian CGPI tahun 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan nilai 95,22. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-17 (tujuh belas) kali berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
Governance Structure	25,70	33,76	26,65	31,53
Governance Process	34,50	34,26	36,24	31,24
Governance Outcome	34,74	26,99	32,22	32,45
Nilai	**94,94**	**95,01**	**95,11**	**95,22**

Hasil penilaian CGPI selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

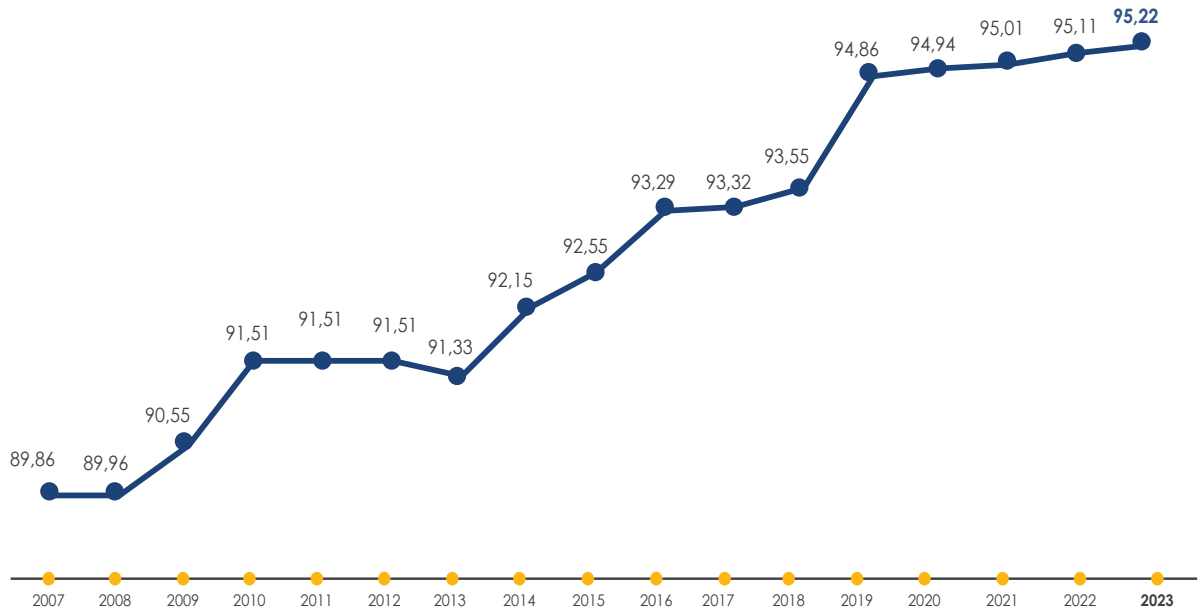

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian CGPI 2023, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi Tata Kelola di Bank Mandiri.

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
STRUKTUR TATA KELOLA	
Bank perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan, kelengkapan dan efektivitas struktur organisasi yang selaras dengan perwujudan strategi perusahaan yang adaptif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.	Bank Mandiri telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan, kelengkapan dan efektivitas struktur organisasi. Untuk mendukung aspirasi Bank Mandiri sebagai *partner* finansial pilihan utama nasabah dan juga perwujudan strategi perusahaan, Bank Mandiri mengelompokkan unit-unit kerja di struktur organisasinya menjadi 3 kelompok besaran yaitu : • *Business Units* • *Support Functions* • Bisnis & Jaringan
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kompetensi SDM terutama untuk posisi kunci dalam struktur organisasi dengan sertifikasi berstandar nasional maupun internasional.	Bank Mandiri telah melakukan optimalisasi kompetensi SDM pada posisi kunci dan juga jajaran Bank pada fungsi lainnya dengan sertifikasi yang berstandar nasional maupun internasional. Selain itu untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas, SDM Bank Mandiri senantiasa mengikuti training/pelatihan yang relevan dengan perkembangan industri perbankan saat ini.
Bank Mandiri perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala dan hati – hati di setiap dinamika perubahan yang terjadi dengan mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.	• Proses Penyesuaian dan penyempurnaan Kebijakan Bank Mandiri telah senantiasa dilakukan dengan memperhatikan aspek ketentuan Regulator yang berlaku, Strategi Bank dan juga kebutuhan bisnis. • Strategi Bank Mandiri disusun dengan komprehensif sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Bank, mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan juga penerapan manajemen risiko.
PROSES TATA KELOLA	
• Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan kepatuhan dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan • Bank Mandiri dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 *Governance of Organization* (Tata Kelola Organisasi). • Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran (*whistleblowing system*/WBS) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang *Whistleblowing Management* System.	• Bank Mandiri telah mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan kepatuhan, risiko dan Tata Kelola secara Terintegrasi termasuk pengelolaan di Mandiri Group • Bank Mandiri telah menjalankan kepatuhan, Risiko dan Tata Kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Bank Mandiri telah mengoptimalkan *Whistleblowing System* (WBS) dan secara terus menerus meningkatkan efektivitas implementasinya. Pada tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan terhadap WBS yaitu integrasi dengan WBS KPK.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penguatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas SDM yang selalu siap beradaptasi secara cepat, akurat dan tepat dengan dinamika perubahan; bersemangat dan lincah; serta dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi yang sesuai.	Bank Mandiri berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan, pengembangan serta penguatan kualitas, Kapasitas dan Kapabilitas SDM, sehingga para SDM Bank Mandiri memiliki daya saing tinggi dan resiliensi, serta mampu mengantisipasi tren perkembangan di industri khususnya di era digital. Peningkatan, pengembangan serta penguatan dimaksud dilakukan melalui : • Pelatihan tatap muka dan virtual • *E-learning* • Sertifikasi nasional dan internasional untuk mendukung fungsinya dalam lini perusahaan.
Bank Mandiri perlu melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap pemangku kepentingan perusahaan diantaranya dengan mempertimbangkan adopsi dari kriteria AA1000SES 2015 *(Stakeholder Engagement Standard)* guna menjalankan pelibatan yang efektif dan mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan perusahaan.	• Bank Mandiri senantiasa berupaya menerapkan *corporate governance practice* sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. • Bank Mandiri juga senantiasa bertransformasi menjadi *strategic partner* yang mampu melakukan inovasi dan solusi sehingga memberikan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan.
Bank Mandiri perlu mengembangkan struktur dan sistem terkait perlindungan dan pemberdayaan konsumen yang andal	Sebagai bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung terciptanya sistem perlindungan konsumen yang andal serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Bank Mandiri memiliki Kebijakan Operasional Bank yang mengatur penerapan fungsi perlindungan konsumen. Bank Mandiri juga telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen.
HASIL TATA KELOLA	
Bank Mandiri perlu menumbuhkan budaya tangguh dan tangkas dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing.	Dalam membangun Mandirian yang Tangguh, Bank Mandiri mengimplementasikan Nilai-nilai utama *(core values)* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif & Kolaboratif) melalui program-program budaya yang diselenggarakan untuk membentuk *mindset* dan perilaku setiap pegawai, sehingga Mandirian dapat senantiasa cepat beradaptasi dan menciptakan karakter Mandirian yang tangguh.

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kapabilitas, kapasitas, kompetensi utama perusahaan melalui capaian implementasi strategi yang adaptif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan	• Bank Mandiri fokus menjadi *wholesale* Bank terdepan dengan memanfaatkan kekuatan Bank Mandiri sebagai Bank Wholesale yang mampu mengakuisisi potensi sumber pendapatan baru. • Bank Mandiri telah secara konsisten melanjutkan inovasi dalam mempertajam strategi di setiap segmen bisnis.
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.	Bank Mandiri telah mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.
Bank Mandiri perlu melakukan penanganan secara baik atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas gugatan-gugatan hukum, serta mencegah terjadinya kembali perkara hukum.	Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan serta mitigasi atas risiko gugatan hukum.

Pada CGPI 2022 yang diselenggarakan tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat "Sangat Terpercaya", 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	PT Bank Syariah Indonesia	"Sangat Terpercaya"	91,50
2.	PT Bank Mandiri Taspen	"Sangat Terpercaya"	90,06
3.	PT Mandiri Sekuritas	"Sangat Terpercaya"	85,78
4.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	"Terpercaya"	84,02
5.	PT Mandiri Tunas Finance	"Terpercaya"	83,10
6.	PT AXA Mandiri Financial Services	"Terpercaya"	83,04
7.	PT Mandiri Utama Finance	"Terpercaya"	81,55
8.	PT Mandiri Manajemen Investasi	"Terpercaya"	82,20

ASEAN *CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD* (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* lainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD *Principles* dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yaitu *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).

Skor Penilaian Pihak Independen

Bank Mandiri masuk dalam daftar Perusahaan yang meraih predikat ASEAN *Asset Class Public Listed Companies* dalam penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan melaksanakan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Berikut uraian penerapan terkait POJK No. 21/POJK/04/2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015:

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
A. ASPEK 1: HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
A.1.1 Rekomendasi 1 :	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS.
Penjelasan :	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)*. Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara *(voting)* secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara *(voting)* secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan khusus untuk mata acara perubahan susunan pengurus dilakukan secara tertutup yang dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS. **Keterangan : *Comply***.
A.1.2. Rekomendasi 2:	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.
Penjelasan :	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	**Keterangan : *Comply***

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
A.1.3. Rekomendasi 3:	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2023, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun *Highlight* RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri dan bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.980/2023 tanggal 16 Maret 2023 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia. **Keterangan : *Comply***
Penjelasan :	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	
A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
A.2.1. Rekomendasi 4:	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary* (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: 1. Pelaporan baik berkala maupun insidentil kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 3. Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) 4. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi: a. Pemaparan Kinerja (triwulanan) b. *Public Expose* (Tahunan) c. *Analyst Meeting* (triwulanan) Pemaparan Kinerja, *Public Expose* dan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan. Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor. **Keterangan : *Comply***
Penjelasan :	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	
A.2.2. Rekomendasi 5:	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary* (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan. **Keterangan : *Comply***
Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
B. ASPEK 2: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
B.1.1. Rekomendasi 6:	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang serta Pasal 35 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Per 31 Desember 2023, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen. **Keterangan : *Comply***
Penjelasan :	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	
B.1.2. Rekomendasi 7:	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri. **Keterangan : *Comply***
Penjelasan :	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	
B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
B.2.1. Rekomendasi 8:	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme *Self assessment* berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan. **Keterangan : *Comply***
Penjelasan	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
B.2.2. Rekomendasi 9:	Kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
Penjelasan :	Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya- upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	**Keterangan : *Comply***
B.2.3. Rekomendasi 10:	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.
Penjelasan :	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. **Keterangan : *Comply*** **Keterangan : *Comply***
B.2.4. Rekomendasi 11:	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain: • Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. • Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.
Penjelasan :	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program *Talent and Succession Management*, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan *Good Corporate Governance* (GCG). **Keterangan : *Comply***

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
C. ASPEK 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
C.1.1.Rekomendasi 12: **Penjelasan :**	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi serta Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang. Per 31 Desember 2023, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi. **Keterangan : *Comply*** **Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.**
C.1.2. Rekomendasi 13: **Penjelasan :**	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	**Keterangan : *Comply***
C.1.3. Rekomendasi 14: **Penjelasan :**	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan *(stakeholders)* sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan *treasury*. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar negeri. **Keterangan : *Comply*** **Keterangan : *Comply***

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
C.2.1 Rekomendasi 15: **Penjelasan :**	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *self assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri *(self assessment)*. Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme *Self Assessment* untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi. **Keterangan : *Comply*** **Keterangan : *Comply***
C.2.2. Rekomendasi 16: **Penjelasan :**	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi. **Keterangan : *Comply***
C.2.3. Rekomendasi 17: **Penjelasan :**	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. **Keterangan : *Comply***

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
D. ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
D.1.1. Rekomendasi 18: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan pencegahan terjadinya *insider trading* diatur dalam SP SDM • Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai *Code of Conduct* dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari- hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja. • Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai. SP *Corporate Secretary* • Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur: a. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham b. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM) c. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku **Keterangan : *Comply***
D.1.2. Rekomendasi 19: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip- prinsip Tata Kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	**Pengendalian Gratifikasi** Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Pegawai dan sejak tahun 2015, Bank Mandiri memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh Pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis saat ini agar Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari tetap dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri secara periodik telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terakhir disempurnakan pada tanggal 8 Desember 2023. **Sistem Manajemen Anti Penyuapan** Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *(Anti-Bribery Management System)* pada tanggal 10 Agustus 2020 dan ruang lingkup sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah berhasil diperluas menjadi *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process* pada tanggal 20 September 2022.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
		Penerapan Strategi Anti-*Fraud*

Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi Anti *Fraud* sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 bagi Bank Umum. Sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan Internal Control, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.

Strategi *Anti Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:

1. Pilar 1 (Pencegahan)
   Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:
   a. *Anti Fraud Awareness*, seperti sosialisasi *Anti Fraud Statement, Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program*. *Employee Awareness Program* dilakukan dengan cara pemberian *training*, sosialisasi, publikasi *fraud awareness* melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban *block leave* bagi setiap pegawai. *Customer Awareness Program* dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis.
   b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam *job description* masing- masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan *Annual Disclosure* oleh seluruh pegawai di awal tahun.
   c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau *Know Your Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.

2. Pilar 2 (Deteksi)
   Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
   Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:
   a. *Whistleblowing System-Letter to CEO*, yang dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan *conflict of interest* dan memberi rasa aman pada pelapor.
   b. *Fraud Detection System*, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi *fraud* transaksional dan *fraud* non transaksional.
   c. *Surprise Audit*, yang pelaksanaannya diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
   d. *Surveillance System*, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud)*.

3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum)
   Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
		4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan. **Keterangan : *Comply***
D.1.3. Rekomendasi 20: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu: 1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan *(Procurement)* 2. Standar Pedoman Operasional (SPO) *Procurement* yang mengatur antara lain (Bab III): a. Ketentuan umum meliputi: i) Prinsip-Prinsip Procurement ii) Etika Procurement iii) Tujuan Proses Procurement iv) Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri v) Perencanaan *Procurement* vi) Pedoman Pembebanan b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi: i) Cara Pengadaan Barang dan Jasa ii) Proses Pengadaan iii) Tahapan Proses Pengadaan iv) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan v) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan konstruksi. vi) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu. vii) Dokumen dan Proses Pembayaran. 3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III): a. Ketentuan Pelaksanaan i) Akreditasi Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa • Umum meliputi pelaksanaan kualifikasi calon penyedia barang dan jasa • Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) meliputi aspek rekomendasi rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan • Monitoring Rekanan meliputi : » Monitoring Data Rekanan » Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari: » Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik a) Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak b) Peningkatan Kompetensi Rekanan » Sanksi Bagi Rekanan **Keterangan : *Comply***
D.1.4. Rekomendasi 21: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak- hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak kreditur antara lain : 1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit; 2. Menerima laporan perkembangan kredit/penggunaan pinjaman; 3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan; 4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan secara tertulis. **Keterangan : *Comply***

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
D.1.5. Rekomendasi 22: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*. Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	1. Implementasi *Whistleblowing system* di Bank Mandiri disebut *Letter to CEO* (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan *fraud* atau indikasi *fraud* dari pegawai maupun *stakeholder* Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri. 2. LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dengan pengaturan LTC pada Petunjuk Teknis Operasional *Letter to CEO* (LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 03 Oktober 2022. 3. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan maupun *stakeholder* untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara *anonymous* (identitas hanya diketahui pihak independen). 4. Penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut; Website ke https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/ Email ke bmri- wbsltc.tipoffs.info Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 SMS dan WA ke 0811-9007777 **Keterangan : *Comply***
D.1.6. Rekomendasi 23: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka Panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan *(Clawback)* kepada pejabat yang tergolong Material *Risk* Taker (MRT). **Keterangan : *Comply***

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	*COMPLY* ATAU *EXPLAIN*
E. ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI		
E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1. Rekomendasi 24: **Penjelasan :**	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan X untuk media keterbukaan informasi. **Keterangan : *Comply*** **Keterangan : *Comply***
E.1.2. Rekomendasi 25: **Penjelasan :**	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. **Keterangan : *Comply***

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut:

PRINSIP	PENJELASAN	IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI
Prinsip 1 **Tanggung Jawab Dewan Komisaris**	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 **Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris**	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance,* serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 **Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris**	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 **Direksi**	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 **Struktur *Governance* Kelompok Usaha**	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari *Fit and Proper Test*. Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 **Fungsi Manajemen Risiko**	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy*. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 **Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko**	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara *bankwide* dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE*

PRINSIP	PENJELASAN	IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI
Prinsip 8 **Komunikasi Risiko**	Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) setiap semester disampaikan kepada *Integrated Risk Committed* (IRC) yang beranggotakan Direksi Bank Mandiri serta Entitas Anak. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 **Kepatuhan**	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Prinsip 10 **Audit Internal**	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan *internal control, risk management* dan *governance process* dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 **Kompensasi**	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management.*	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 **Pengungkapan dan Transparansi**	Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa menginikan *website* Bank Mandiri www.bankmandiri.co.id, untuk memastikan tersedianya informasi paling *update* bagi *stakeholder*. Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose*.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Perseroan.

RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Sedangkan sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya bertanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Sedangkan Dewan Komisaris dibantu oleh organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian rekomendasi.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Organ Perusahaan

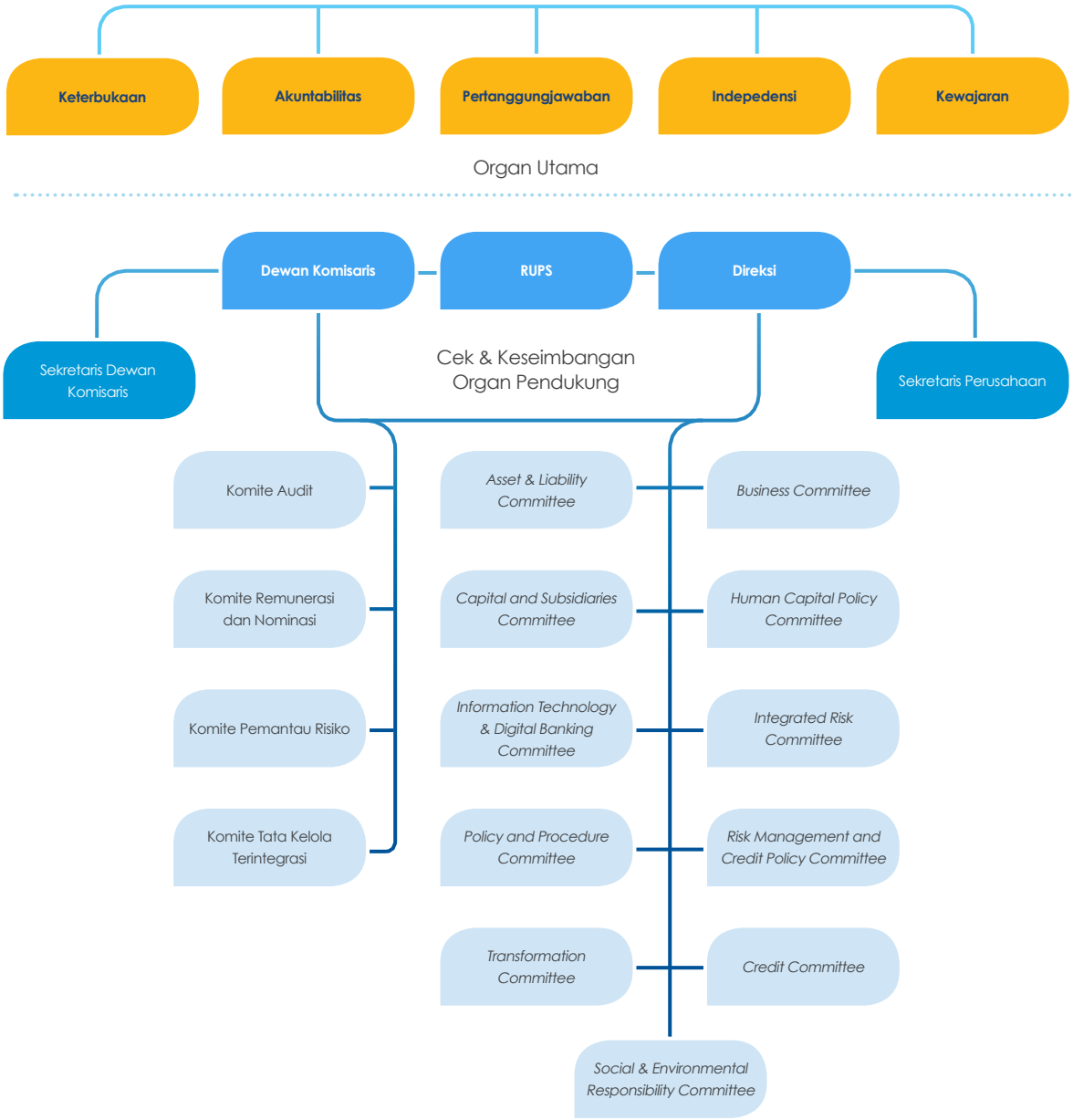

STRUKTUR TATA KELOLA

Untuk terus meningkatkan kualitas dan ruang lingkup Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yaitu Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur ini merupakan hierarki/tatanan kebijakan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan tata kelola dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki Mandiri Group *Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

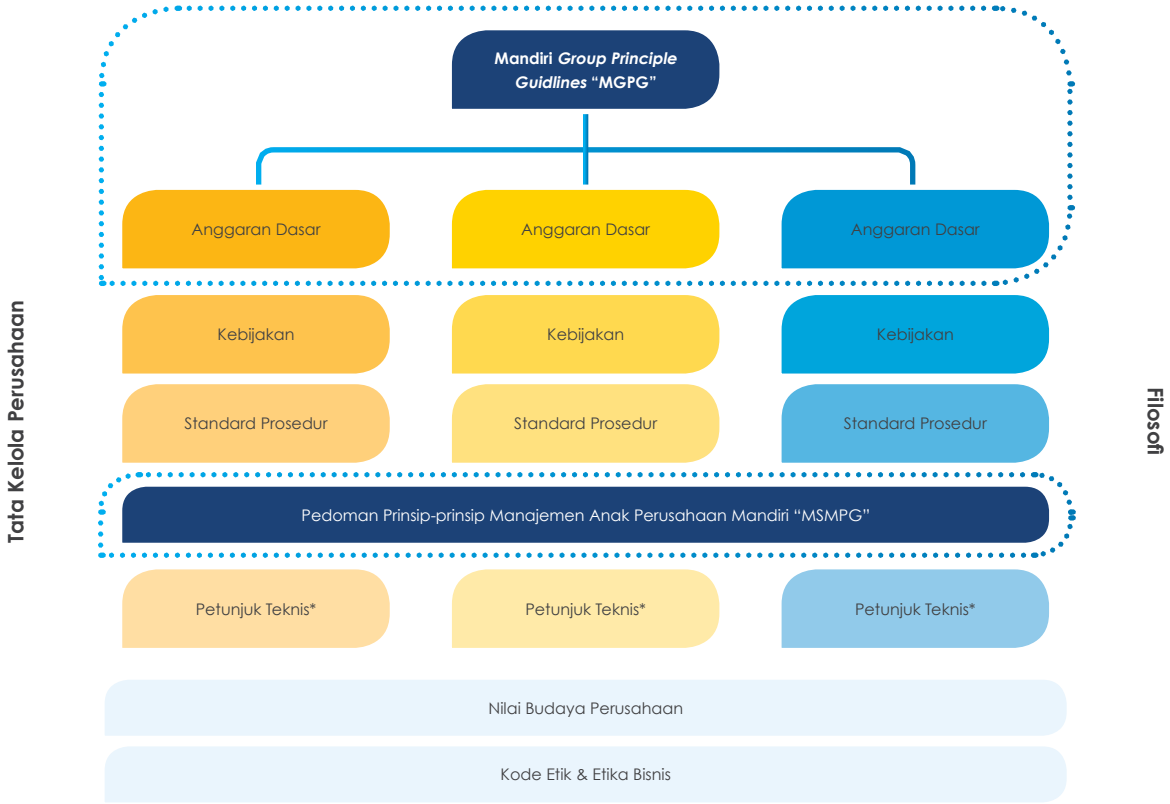

Governance soft structure yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0041000 dan surat keputusan Nomor AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 2023 keduanya tanggal 16 Maret 2023 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0054153.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 19 Agustus 2021.
3. Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) pada tanggal 24 Februari 2022.
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.
5. Kebijakan Manajemen Risiko tanggal 3 April 2023.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023.
7. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 pada tanggal 15 Oktober 2021.
8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 1 November 2022.
9. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/005/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
10. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

11. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
12. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
13. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 April 2023.
14. Kebijakan Hukum, Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 November 2023.
15. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 Januari 2023.
16. Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 02 Maret 2023.
17. Standar Prosedur Operasional *Procurement* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Desember 2023.
18. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 Desember 2023.
19. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 September 2023.
20. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 September 2022.
21. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 23 Agustus 2023.
22. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 02 Oktober 2023.
23. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 12 Oktober 2023.
24. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 Desember 2023.
25. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Tata Kelola Secara Individu dan Terintegrasi yyang telah dimutakhirkan pada tanggal 14 November 2023.
26. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 30 Oktober 2023.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN



Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada *ex-legacy* Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 52% atau sejumlah 48.533.333.334 lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
   h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

Hak Pemegang Saham Umum

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme voting dilakukan dengan metode *polling*.

5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik- praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal- hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
   b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu *(ultimate shareholders)* wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya *(ultimate shareholders)* atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.
4. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

RUPS juga merupakan forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan di dalam Perseroan. RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerjanya dalam satu tahun buku.

Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

RUPS Perseroan

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sesuai Pasal 20 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut "e-RUPS") dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;
2. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS; atau
3. Perseroan; sebagaimana diatur khusus dalam peraturan dibidang Pasar Modal.

Wewenang RUPS

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
7. Menunjuk akuntan publik;
8. Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan (*corporate action*) sehubungan dengan pengurusan Perseroan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/atau pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak Pemegang Saham Dalam RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, berikut adalah hak pemegang saham dalam RUPS:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
   a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
   b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara



Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, kecuali untuk mata acara perubahan pengurus dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2023 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2023, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2023 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	12 Januari 2023	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/4/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2023.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	3 Februari 2023	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: • Situs Web Bank Mandiri. • Situs Web Bursa Efek Indonesia. • Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.428/2023 tanggal 3 Februari 2023.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	20 Februari 2023	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: • Situs Web Bank Mandiri. • Situs Web Bursa Efek Indonesia. • Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.629/2023 tanggal 20 Februari 2023.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4	Pelaksanaan RUPS	14 Maret 2023	RUPS dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Januari 2023.
			Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.
			Pemegang Saham dan Kuasa Wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 42.004.733.985 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 90,0101443% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui *scan barcode* serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
			Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
5	Pengumuman Hasil RUPS	16 Maret 2023	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada: • Situs Web Bank Mandiri. • Situs Web Bursa Efek Indonesia. • Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
			Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.980/2023 tanggal 16 Maret 2023 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	Penyampaian Risalah RUPS	12 April 2023	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1324/2022 tanggal 12 April 2023 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

RUPS Tahunan 2023 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Hadir
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
4.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir
5.	Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
6.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir
7.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Hadir
8.	Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Hadir
9.	Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	Hadir
10.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
11.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir
12.	Timothy Utama	Direktur Information Technology	Hadir
13.	Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	Hadir
14.	Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
15.	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Hadir
16.	Boedi Armanto	Komisaris Independen	Hadir
17.	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Hadir
18.	Rionald Silaban	Komisaris	Hadir
19.	Nawal Nely	Komisaris	Hadir

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
20.	Arif Budimanta	Komisaris	Hadir
21.	Faried Utomo	Komisaris	Hadir
22.	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Hadir

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
Mata Acara 2	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Mata Acara 3	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara 4	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.
Mata Acara 5	Persetujuan atas Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* Perseroan.
Mata Acara 6	Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan *(Stock Split)* dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
Mata Acara 7	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Mata Acara 8	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung dan terdapat 2 (dua) penanya, namun oleh karena pertanyaan tidak relevan maka pertanyaan tidak dibacakan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan maka pertanyaan tidak dibacakan dan dalam Mata Acara Keenam sampai dengan Kedelapan Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara Pemegang Saham atau kuasanya.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., M.Kn. yang pada pok oknya memutuskan sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2023

MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,3199920% % termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,6247232%
Tidak Setuju : 0,0552848%

Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 41.981.511.760 saham atau merupakan 99,9447152% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya No. 00023/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
   b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya Nomor 00027/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan:
   Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
   a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.628/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
   b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 99,6409688% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,3590312%
Tidak Setuju : 0%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp41.170.637.183.351,00 (empat puluh satu triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari Laba Bersih Perseroan Konsolidasi Tahun Buku 2022 atau sejumlah Rp24.702.382.310.010,60 (dua puluh empat triliun tujuh ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu sepuluh Rupiah dan enam puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. khusus dividen untuk Negara Republik Indonesia yang merupakan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 52% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sebesar Rp12.845.238.801.205,50 (dua belas triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima Rupiah dan lima puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   b. atas kepemilikan 48% saham publik senilai Rp11.857.143.508.805,10 (sebelas triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus lima Rupiah dan sepuluh sen) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.
   c. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau sejumlah Rp16.468.254.873.340,40 (enam belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Rupiah dan empat puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 12 April 2023.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 3

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 93,9451294% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,5604907%
Tidak Setuju : 5,4943799%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.696.834.321 saham atau merupakan 94,5056201% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.

Tindak lanjut
Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau *benefit* lainnya untuk tahun 2023, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 4

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 99.6392633% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0.3590385%
Tidak Setuju : 0.0016981%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.020.685 saham atau merupakan 99,9983019% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)untuk Tahun Buku 2023.

Tindak lanjut
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/254/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Status: Terealisasi

MATA ACARA 5

Persetujuan atas Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 99,6043763% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,3956237%
Tidak Setuju : 0%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Tindak Lanjut
Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bukti persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atas Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan.

Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari LPS yang disampaikan melalui Surat LPS No. S-50/DKRB/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Persetujuan atas Hasil Penilaian Rencana Resolusi dan Uji Resolvabilitas serta Rekomendasi kepada Bank.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

MATA ACARA 6

Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan *(Stock Split)* dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 99.6409574% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0.3590328%
Tidak Setuju : 0.0000098%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara *(abstain)* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.729.885 saham atau merupakan 99,9999902% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham *(Stock Split)* Perseroan dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal sebagai berikut:
      i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham; dan.
      ii) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
   b. saham Seri B dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Saham *(Stock Split)* tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham *(Stock Split)*, menyatakan kembali keputusan mengenai Mata Acara Keenam tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut
Bank Mandiri telah menyampaikan surat permohonan pencatatan saham hasil *stock split* kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1013/2023 pada tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil *Stock Split* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Surat tersebut PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui permohonan pencatatan sesuai Surat No. S-02587/BEI.PP1/03-2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham *(Stock Split)*. Dengan demikian, per tanggal 6 April 2023, saham hasil *stock split* telah dicatat di PT Bursa Efek Indonesia

Status : Terealisasi

MATA ACARA 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 83,1014191% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,3649022%
Tidak Setuju : 16,5336786%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara *(abstain)* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 35.059.806.251 saham atau merupakan 83,4663214% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham *(Stock Split)* Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1031/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1003/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Status : Terealisasi

MATA ACARA 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 73.5487457% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 1.7759612%
Tidak Setuju : 24.6752932%

Keputusan
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara *(abstain)* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 31.639.942.737 saham atau merupakan 75,3247068% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
   b. Bapak Panji Irawan sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
   c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
   d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
   e. Bapak Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen;
   yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
   b. Ibu EKA FITRIA sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
   c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
   d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
   e. Bapak Heru Kristiyana sebagai Komisaris Independen;
   f. Bapak Zainudin Amali sebagai Komisaris Independen;
3. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
   a. Direksi
      - Direktur Utama : Darmawan Junaidi;
      - Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar;
      - Direktur *Corporate Banking* : Susana Indah Kris Indriati;
      - Direktur *Commercial Banking* : Riduan;
      - Direktur *Treasury* dan *International Banking* : Eka Fitria;
      - Direktur Jaringan dan *Retail Banking* : Aquarius Rudianto;
      - Direktur *Operation* : Toni Eko Boy Subari;
      - Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya;
      - Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas;
      - Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin;
      - Direktur *Information Technology* : Timothy Utama;
      - Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo.

   b. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri;
      - Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago;
      - Komisaris : Rionald Silaban;
      - Komisaris : Nawal Nely;
      - Komisaris : Arif Budimanta;
      - Komisaris : Faried Utomo;
      - Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh;
      - Komisaris Independen : Heru Kristiyana;
      - Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina;
      - Komisaris Independen : Muliadi Rahardja;
      - Komisaris Independen : Zainudin Amali.

MATA ACARA 8

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Pr oper Test)* OJK dimaksud.
6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut

1. Bapak Heru Kristiyana telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-98/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
2. Bapak Zainudin Amali telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-139/D.03/2023 tanggal 06 November 2023 dan Surat OJK No. SR-250/PB.02/2023 tanggal 06 November 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 06 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1428/2023 tanggal 08 November 2023.
3. Ibu Eka Fitria telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-97/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
4. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN SEBELUMNYA DAN REALISASINYA

Pada tahun 2022, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2022, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan telah dilakukan dengan hasil dan realisasi sebagai berikut:

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2022

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 98,0527965% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,0513776%
Tidak Setuju : 1,8958259%

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.694.198.687 saham atau merupakan 98,1041741% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229- 1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
   b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak lanjut
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:
Penyampaian Laporan Keuangan:

1. Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
   a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.295/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
   b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 97,5818916% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,0958159%
Tidak Setuju : 2,3222925%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.521.644.855 saham atau merupakan 97,6777075% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52% saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut
Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 pada tanggal 14 Maret 2022 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 6 April 2022.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 94,4040145% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,1097642%
Tidak Setuju : 5,4253146%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.266.122.581 saham atau merupakan 94,5746854% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Tindak lanjut
Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau *benefit* lainnya untuk tahun buku 2022, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 97,2862924% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 1,1937518%
Tidak Setuju : 1,5199558%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.846.280.527 saham atau merupakan 98,4800442% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1.
   a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

Tindak lanjut
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/203/2022 tanggal 22 Maret 2022.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat menyatakan Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 99,3189839% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,0912332%
Tidak Setuju : 0,5897829%%

Keputusan
Dengan demikian:
1. Rapat dengan suara terbanyak yaitu 40.222.640.348 saham atau merupakan 99,4102171% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Tindak Lanjut
Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 88,9700295% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,0549906%
Tidak Setuju : 10,7840498%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.097.910.054 saham atau merupakan 89,2159502% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Tindak Lanjut
Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 75,2911571% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,8237754%
Tidak Setuju : 23,8850675%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.797.071.409 saham atau merupakan 76,1149325% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

Tindak Lanjut
Proses pengalihan saham hasil *buyback* telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai Surat No. HBK.CSC/CMA.1513/2022 tanggal 17 Juni 2022 kepada pemegang saham.

Status : Terealisasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Mata Acara Rapat Kedelapan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Hasil Pemungutan Suara
Setuju : 84,0649390% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 1,8403107%
Tidak Setuju : 14,0947504%

Keputusan
Dengan demikian:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 34.758.358.444 saham atau merupakan 85,9052496% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;
   b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama;
   yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Tahun 2019 dan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;
   b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

   a. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
      - Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago
      - Komisaris : Rionald Silaban
      - Komisaris : Nawal Nely
      - Komisaris : Arif Budimanta
      - Komisaris : Faried Utomo
      - Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
      - Komisaris Independen : Boedi Armanto
      - Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
      - Komisaris Independen : Muliadi Rahardja

   b. Direksi
      - Direktur Utama : Darmawan Junaidi
      - Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
      - Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris Indiarti Indiarti
      - Direktur *Commercial Banking* : Riduan
      - Direktur *Treasury dan International Banking* : Panji Irawan
      - Direktur Jaringan dan *Retail Banking* : Aquarius Rudianto
      - Direktur *Operation* : Toni E. B. Subari
      - Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
      - Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
      - Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
      - Direktur *Information Technology* : Timothy Utama
      - Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* dan memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Tindak Lanjut
1. Bpk. Muliadi Rahardja telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 40/KDK.03/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat OJK No. SR-119/PB.12/2022 tanggal 23 Juni 2022, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1703/2022 tanggal 27 Juni 2022.
2. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan Perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal pengawasan kebijakan Direksi terhadap pengelolaan Perseroan secara umum.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)*, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian *(prudential banking)*, kode etik profesi dan *code of conduct*, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan *(compliance)* pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang perbankan.

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan *(conflict of interest)* yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *Ftit and Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, RUPST menyetujui untuk:
1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat Bpk. Heru Kristiyana dan Bpk. Zainudin Amali, masing-masing sebagai Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	RUPSLB tanggal 9 Desember 2019	29 Mei 2020	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	RUPST tanggal 19 Februari 2020	23 Juni 2020	2020-2025
Boedi Armanto*)	Komisaris Independen	RUPST tanggal 19 Februari 2020	3 Juli 2020	2020 - 2023
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	RUPST tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020	2020 - 2025
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	RUPST tanggal 10 Maret 2022	22 Juni 2022	2022 - 2027
Heru Kristiyana**)	Komisaris Independen	RUPST tanggal 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023 - 2028
Zainudin Amali**)	Komisaris Independen	RUPST tanggal 14 Maret 2023	6 November 2023	2023 - 2028
Rionald Silaban	Komisaris	RUPSLB tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020	2019 - 2024
Faried Utomo	Komisaris	RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Arif Budimanta	Komisaris	RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Nawal Nely	Komisaris	RUPST tanggal 19 Februari 2020	24 Agustus 2020	2020 - 2025
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	RUPST tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021	2021 - 2026

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja, yaitu Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah diperbaharui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023. Pedoman ini mengatur tentang petunjuk Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
   a. Tugas dan Tanggung Jawab
   b. Hak dan Wewenang
   c. Keterbukaan Informasi, Benturan Kepentingan, dan Larangan
   d. Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
2. Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris
   a. Komite Dewan Komisaris
   b. Sekretaris Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
   a. Ketentuan Rapat
   b. Peserta Rapat
   c. Pimpinan Rapat
   d. Pemanggilan Rapat
   e. Bahan Rapat
   f. Kuorum dan Keputusan Rapat
   g. Risalah Rapat
4. Mekanisme Kerja
   a. Pembidangan Tugas
   b. Laporan
   c. Waktu Kerja Komisaris
   d. Penandatanganan Dokumen

e. Perjalanan Dinas
f. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

5. Lain-lain
   a. Pendidikan Berkelanjutan
   b. Perubahan
6. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. penyediaan dana kepada pihak terkait, sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum, POJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
   b. hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
7. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
   a. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
   b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
   c. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta rencana kerja dan hal strategis lainnya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
   d. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan;
   e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan;
   f. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
   g. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
   h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
   i. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
   j. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan komisaris, termasuk usulan ketentuan internal yang menurut ketentuan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
   k. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:

i) Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
ii) Penerapan fungsi kepatuhan;
iii) Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
iv) Efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
v) Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
vi) Penerapan kebijakan Remunerasi;
vii) Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI;
viii) Kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber;
ix) Rencana Aksi *(Recovery Plan)* dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan; dan
x) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perseroan.

l. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
i) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
ii) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

m. Memastikan penerapan Sistem Pengendalian Intern baik secara individu maupun terintegrasi. Khusus dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
i) Memastikan bahwa Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai, efektif, dan efisien;
ii) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
iii) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

n. Dalam kaitannya dengan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan:
i) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses pengadaan calon KAP sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya; dan
ii) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan AP dan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

o. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk:
a. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat; dan
b. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang- barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris telah ditetapkan. Pembidangan tugas ini tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berikut pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rionald Silaban	Komisaris	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Faried Utomo	Komisaris	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Arif Budimanta	Komisaris	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nawal Nely	Komisaris	• Anggota Komite Pemantau Risiko
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatanya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan terakhir diubah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
   a. Mantan Direksi BUMN.
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
   d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral.
4. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan melalui cara:
   a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
   b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup *(curriculum vitae)* calon anggota Dewan Komisaris BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih.
12. Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat- pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
17. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep Keputusan Menteri/RUPS tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN untuk mendapatkan penetapan.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN sebelum berakhir masa jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.

4. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan maka Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
5. Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
7. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
8. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
11. Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/ atau Sekretaris Kementerian.
12. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri.
13. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BUMN dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
14. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
15. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dalam RUPS secara luring dan/atau daring dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS yang dimaksud maka Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
16. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
17. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/ atau Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
18. Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan harus tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
19. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
20. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/ RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 70:

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/atau
   d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
2. Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d maka:
   a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
   b. berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.

Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Hubungan Kepengurusan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen		√		√		√		√		√		√		√
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen		√		√		√		√		√		√		√
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Rionald Silaban	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Arif Budimanta	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Nawal Nely	Komisaris		√		√	√			√		√		√		√
Faried Utomo	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai berikut:

Rangkap Jabatan

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.

DEWAN KOMISARIS

Larangan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
7. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	Komisaris Utama/Independen	PT XL Axiata Tbk
		Dosen Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Dosen Ilmu Politik	Universitas Indonesia
Boedi Armanto*)	Komisaris Independen	-	-
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	-	-
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Komisaris	PT XL Axiata Tbk
Heru Kristiyana**)	Komisaris Independen	Direktur Utama	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Komisaris	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Zainudin Amali**)	Komisaris Independen	Wakil Ketua Umum I	Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
		Dosen	Universitas Negeri Semarang
		Dosen	Universitas Negeri Surabaya
		Dosen	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Rionald Silaban	Komisaris	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI
Arif Budimanta	Komisaris	Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi	Tim Presiden RI
Faried Utomo	Komisaris	Deputi Bidang Administrasi	Sekretariat Kabinet RI
Nawal Nely	Komisaris	Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko	Kementerian BUMN RI
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
   a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
   b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
   c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya (<5%) baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	2.017.700 saham (0,0021618 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Arif Budimanta	Komisaris	1.703.900 saham (0,0018256 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Nawal Nely	Komisaris	1.703.900 saham (0,0018256 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Faried Utomo	Komisaris	1.703.900 saham (0,0018256 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	1.261.100 saham (0,0013512 %)	Nihil	Nihil	Nihil

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang anggota dengan 6 (enam) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 54,5% dari total Komisaris yang ada.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto*)	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana**)	Zainudin Amali**)
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto*)	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana**)	Zainudin Amali**)
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.

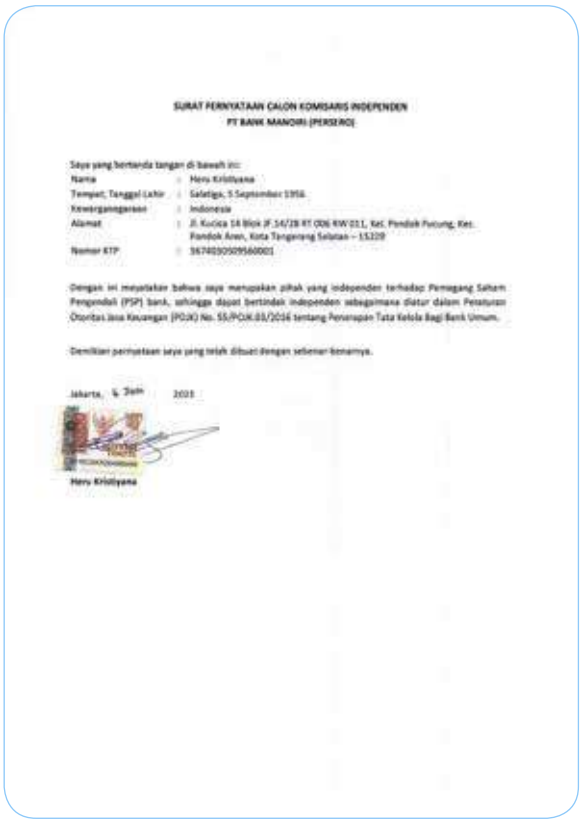

SURAT PERNYATAAN CALON KOMISARIS INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Heru Kristiyana
Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 5 September 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kucica 14 Blok JF 14/28 RT 006 RW 011, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan – 15229
Nomor KTP : 3674050509560001

Dengan ini menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank, sehingga dapat bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Demikian pernyataan saya yang telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 6 Juni 2023

Heru Kristiyana



SURAT PERNYATAAN CALON KOMISARIS INDEPENDEN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Zainudin Amali
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 Maret 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kompleks TNI AU Wirabuaii Blok L No. 13 RT 009 RW 007, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur – 13620
Nomor KTP : 3175081603620007

Dengan ini menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap kepemilikan Bank atau PSP (Pemegang Saham Pengendali).

Demikian pernyataan saya yang telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 7 Juni 2023

Zainudin Amali

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan serta kebijakan, prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh Direktur yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*.
Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan *Board Manual*, yaitu suatu dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
1	Heru Kristiyana	Komisaris Independen	29 Maret 2023	PSAK 71	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			29 Maret 2023	RKAP 2023, RBB 2023-2025, Corporate Plan 2020-2024, dan Kinerja Keuangan	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			31 Maret 2023	Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Rencana Transformasi 10 tahun Bank Mandiri	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Tata kelola perusahaan yang baik, Tata Kelola Terintegrasi, dan APU-PPT	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
2	Zainudin Amali	Komisaris Independen	29 Maret 2023	PSAK 71	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			29 Maret 2023	RKAP 2023, RBB 2023-2025, Corporate Plan 2020-2024, dan Kinerja Keuangan	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			31 Maret 2023	Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Rencana Transformasi 10 tahun Bank Mandiri	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tata Kelola Terintegrasi, dan APU-PPT	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			29-30 Mei, 5 Juni 2023	Pembekalan Manajemen Risiko untuk Calon Komisaris Bank Umum	LPPI

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan mengacu POJK No. 33/2014, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar secara langsung atau melihat serta berpartisipasi dalam rapat.
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau seorang anggota Komisaris terpilih, jika Komisaris Utama berhalangan hadir. Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat (secara sirkuler) dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai usulan yang diajukan. Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dari rapat Dewan Komisaris.

Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2023, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

Triwulan I	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 *(Audited)*.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk Tahun 2023.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2023.
Triwulan II	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2024.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan I/2024.
Triwulan III	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan II/2024
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2024.
	Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025.
Triwulan IV	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan III/2024.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2024.
	Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029, Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2024, dan Penginian *Resolution Plan* Tahun 2024.

Frekuensi & Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 29 rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	5 Januari 2023	Update Rencana RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	90%,	Absen: Muhammad Yusuf Ateh (Izin)
2.	19 Januari 2023	Persetujuan Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).	100%	
3.	24 Januari 2023	• Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 *(Audited)*. • Persetujuan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2023.	100%	
4.	2 Februari 2023	• Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait. • Persetujuan Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	100%	
5.	9 Februari 2023	Persetujuan Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	100%	
6.	16 Februari 2023	Persetujuan Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	100%	
7.	23 Februari 202	Persetujuan Usulan *Talent Pool.*	100%	
8.	27 Februari 2023	Persetujuan Usulan *Talent Pool.*	100%	
9.	9 Maret 2023	• Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023. • Persetujuan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 serta Tantiem dan *Long Term Incentive* (LTI) Tahun Buku 2022. • Persetujuan Usulan Penunjukan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/*Quality Assurance Review* (QAR) Tahun 2023.	100%	
10.	16 Maret 2023	Persetujuan Penetapan Keanggotaan Komite Dekom Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.	89%,	Absen: Faried Utomo (Izin)
11.	30 Maret 2023	Persetujuan Usulan Penginian Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR).	78%,	Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Faried Utomo (izin)
12.	17 April 2023	Persetujuan Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	89%,	Absen: Nawal Nely (Izin)
13.	18 April 2023	Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Maret 2023.	100%	
14.	11 Mei 2023	• Persetujuan Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri. • Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%	
15.	22 Mei 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%	
16.	25 Mei 2023	Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	100%	
17.	13 Juni 2023	Persetujuan Revisi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 – 2025.	100%	
18.	13 Juli 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	67%,	Absen: Rionald Silaban (Izin), Nawal Nely (Izin), Faried Utomo (izin)
19	20 Juli 2023	• Penelahaan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2023. • Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	89%,	Absen: Nawal Nely (Izin)
20	27 Juli 2023	• Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Direksi Entitas Anak. • Persetujuan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri.	100%	
21	3 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	89%	Absen: Arief Budimanta (Izin)
22	31 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	100%	
23	14 September 2023	• Persetujuan Usulan LTI. • Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait. • Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	100%	
24	21 September 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%	
25	26 Oktober 2023	• Persetujuan Usulan Penginian *Recovery Plan* Tahun 2023. • Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Per 30 September 2023.	100%	
26.	16 November 2023	• Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026. • Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024-2028. • Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	91%	Absen: Heru Kristiyana (Izin)

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
27.	23 November 2023	Persetujuan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan *Group Head Corporate Secretary*.	100%	
28.	13 Desember 2023	• Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak. • Persetujuan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023.	91%	Absen: Nawal Nely (Izin)
29.	21 Desember 2023	• Persetujuan Usulan Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. • Persetujuan Usulan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024.	82%	Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Nawal Nely (Izin)

Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2023 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	24 Januari 2023	Kinerja Keuangan Tahun 2022	100%	
2.	23 Februari 2023	Kinerja Keuangan Bulan Januari 2023	80%	Absen: Muliadi Rahardja (Izin)
3.	16 Maret 2023	Kinerja Keuangan bulan Februari 2023	78%	Absen: Rionald Silaban (Izin), Faried Utomo (Izin)
4.	18 April 2023	Kinerja Keuangan bulan Maret 2023	100%	
5.	25 Mei 2023	Kinerja Keuangan bulan April 2023	100%	
6.	13 Juni 2023	Kinerja Keuangan bulan Mei 2023	100%	
7.	20 Juli 2023	Kinerja Keuangan bulan Juni 2023	100%	
8.	24 Agustus 2023	Kinerja Keuangan bulan Juli 2023	100%	
9.	27 September 2023	Kinerja Keuangan bulan Agustus 2023	100%	
10.	26 Oktober 2023	Kinerja Keuangan bulan September 2023	100%	
11.	22 November 2023	Kinerja Keuangan bulan Oktober 2023	100%	
12.	21 Desember 2023	Kinerja Keuangan bulan November 2023	73%	Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Nawal Nely (Izin), Zainudin Amali (Izin)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	29	29	100	12	12	100
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	29	29	100	12	12	100
Boedi Armanto*)	Komisaris Independen	9	9	100	2	2	100
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	29	27	93	12	12	100
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	29	29	100	12	11	92
Heru Kristiyana**)	Komisaris Independen	8	7	88	5	5	100
Zainudin Amali**)	Komisaris Independen	4	4	100	2	2	100
Rionald Silaban	Komisaris	29	28	97	12	11	92
Arif Budimanta	Komisaris	29	28	96,6	12	12	100
Nawal Nely	Komisaris	29	24	83	12	11	92
Faried Utomo	Komisaris	29	27	93	12	11	92
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	29	27	93	12	12	100

*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara triwulanan menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

No.	OJK	Kementerian BUMN
1.	Surat No. KOM/019/2023 tanggal 19 Februari 2023 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2022 – 2024 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester II Tahun 2022.	Surat No. KOM/009/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2022.
2.	Surat No. KOM/094/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2023 – 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester I Tahun 2023.	Surat No. KOM/053/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan I/2023.
		Surat No. KOM/085/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan II/2023.
		Surat No. KOM/129/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan III/2023.

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan *(capital)*, rentabilitas *(earnings)*, profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja, serta Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama Komite penunjang Dewan Komisaris. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2023, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 – 2025, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023-2027, dan Rencana Strategis TI.
2. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:
   a. tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
   b. penerapan fungsi kepatuhan;
   c. penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
   d. efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
   e. penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   f. penerapan kebijakan Remunerasi;
   g. rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI;
   h. kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan;
   i. Rencana Aksi *(Recovery Plan)* dan Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan; dan
   j. pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan.
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM *(Manpower Planning)* yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT, Kredit dan *Risk*.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan beberapa Aksi Korporasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2023.
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak/Cucu, serta pengembangan sinergi selama tahun 2023.
7. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan antara lain terhadap usulan RKAP Tahun 2024, RBB Tahun 2024-2026, RAKB Tahun 2024-2028, dan Penginian *Recovery Plan* Tahun 2023.
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2023.
9. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.
10. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan 2023 Bank Mandiri.
11. Melakukan reviu pada *talent pool* dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2023 secara berkala serta mereviu pencapaian KPI Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Melakukan reviu dan memberikan keputusan terhadap setiap usulan/tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
14. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.

15. Menyetujui usulan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan.
16. Memberikan persetujuan terhadap usulan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/*Quality Assurance Review* (QAR) Tahun 2023 serta usulan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Alokasi Anggaran Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2024.
17. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
18. Mengadakan 29 (dua puluh sembilan) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite Penunjang Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja *(On site Visit)* Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 35 surat persetujuan dan 8 (delapan) surat keputusan antara lain tentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan aksi korporasi, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	24 Januari 2023	Persetujuan Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)
2.	6 Februari 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
3.	28 Februari 2023	Persetujuan Konsultan Independen untuk Mengkaji Usulan Long Term Incentive (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri Tahun 2023
4.	7 Maret 2023	Persetujuan Usulan Penginian *Recovery Plan* Bank Mandiri Tahun 2022-2023
5.	13 Maret 2024	Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023
6.	3 April 2023	Persetujuan Usulan Penginian Kebijakan Operasional dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri
7.	18 April 2023	Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2023
8.	18 April 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
9.	18 April 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
10.	15 Mei 2023	Persetujuan Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri
11.	24 Mei 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
12.	29 Mei 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
13.	29 Mei 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
14.	16 Juni 2023	Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2023 dan Revisi RBB Tahun 2023 - 2025
15.	20 Juni 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
16.	24 Juli 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
17.	24 Juli 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
18.	31 Juli 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
19.	31 Juli 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
20.	7 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
21.	18 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
22.	6 September 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri.
23.	22 September 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
24.	25 September 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
25.	12 Oktober 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
26.	22 November 2023	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024 – 2028
27.	22 November 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

No.	Tanggal Surat	Perihal
28.	28 November 2023	Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
29.	29 November 2023	Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024 – 2026
30.	11 Desember 2023	Persetujuan Penginian Kebijakan Treasury, Dana, dan Jasa serta Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri
31.	19 Desember 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
32.	19 Desember 2023	Persetujuan Usulan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023
33.	21 Desember 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
34.	22 Desember 2023	Persetujuan Usulan *Annual Audit Plan* dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024
35.	22 Desember 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	29 Maret 2023	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2.	25 Agustus 2023	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3.	13 September 2023	Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8.	30 November 2023	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	Tingkat 5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:
1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	11 Februari 2020	11 Februari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Februari 2020	21 Februari 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	26 Juli 2023	26 Juli 2024

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 April 2017	8 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 April 2017	21 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	*Refreshment*	Manajemen Risiko	25 September 2020	25 September 2022
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	11 November 2022	11 November 2024
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	*Refreshment*	Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	1 November 2019	1 November 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	20 April 2020	20 April 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	26 Juli 2023	26 Juli 2024
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 Juni 2022	14 Juni 2026
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Juni 2022	21 Juni 2026
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	26 Juli 2023	26 Juli 2024
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	5	Manajemen Risiko	7 Juni 2022	7 Juni 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025
		IBI - MBE UGM	*Refreshment*	Manajemen Risiko	5 November 2023	5 November 2025
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	*Refreshment*	Manajemen Risiko	29 November 2023	29 November 2024
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Pembekalan	Manajemen Risiko	5 Juni 2023	5 Juni 2025
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024
Rionald Silaban	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 November 2019	14 November 2023
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024
Faried Utomo	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 Mei 2020	8 Mei 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024
Arif Budimanta	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
		BSMR	*Refreshment*	Manajemen Risiko	22 Februari 2023	22 Februari 2024

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Nawal Nely	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 April 2020	21 April 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025
		IBI - MBA UGM	*Refreshment*	Manajemen Risiko	5 November 2023	5 November 2024
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 Juni 2021	14 Juni 2024
		BARA *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko

SEOJK No.28/SEOJK.03/2022 tersebut juga mengatur penyetaraan dan penyelarasan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum dengan:

1. SKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan; dan
2. KKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui *self assessment* dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Prosedur *Self-Assessment* Kinerja Dewan Komisaris



1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance*
3. Rentabilitas
4. Permodalan Bank

Remunerasi (Tantiem)

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha. Berikut capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2023:

No	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai	Pencapaian
I. Aspek Perencanaan								
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dekom 2022	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10	100%
Sub Total I				**10**			**10**	**100%**
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat								
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kpd Pemegang Saham thd:							
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	5	100%
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	5	100%
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/ Risalah	10	10	30	11	110%
3	Rapat Dewan Komisaris							
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	12	41	13,2	110%
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	96	4,8	96%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	12	41	5,5	110%
4	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	6	8,8	110%
Sub Total II				**60**			**63,3**	**106%**
III. Aspek Pelaporan								
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10	100%
Sub Total III				**10**			**10**	**100%**
IV. Aspek Dinamis								
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, dll.	Tahunan	Kali	10	2	5	11	110%
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (*self assessment*/Konsultan Independen)	Tahunan	Kategori	5	Baik	Sangat Baik	5	110%
Sub Total IV				**20**			**21**	**105%**
Grand Total				**100**			**104,3**	**104%**

Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara mandiri (*self- assessment*).

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Kerja masing-masing komite.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Secara umum, dari seluruh program kerja keempat Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja tiap Komite di 2023, Dewan Komisaris menilai telah melaksanakan fungsinya dan terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi masing-masing Komite juga telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Demikian pula dari sisi aspek komunikasi keempat Komite selama 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan termasuk pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 28 kali.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Audit dapat dilihat pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2023, melalui 12 kali rapat, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2023.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait evaluasi atas pengelolaan risiko yang dilakukan Direksi. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 25 kali.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Hasil rapat baik berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

ORGAN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh M. Syaiful Anam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2022 tanggal 21 Oktober 2022.



M. Syaiful Anam
Sekretaris Dewan Komisaris
Usia: 39 tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Master of Management (Finance) Melbourne University (2021)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2010)
- Diploma Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005)

Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian BUMN (Maret 2022 - sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Angkasa Pura II (Januari 2022-September 2022)
- Koordinator pada Keasdepan Energi, Minyak dan Gas Kementerian BUMN (September 2021-Maret 2022)
- Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Oktober 2021-Januari 2022)
- Plt. Kepala Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN (Januari 2019-September 2019)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (Juli 2019-September 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (Maret 2017-Juli 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN (Juli 2017- Januari 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Konstruksi dan Saran dan Prasarana Perhubungan Ia1 Kementerian BUMN (Oktober 2015- Juli 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo III (Persero) Maret 2014-Maret 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Askes (Persero)/BPJS Kesehatan (Juli 2012-Maret 2014)

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Mandiri Investment Forum 2023	Bank Mandiri	1 Februari 2023
2.	*Sharing Session: Cyber Attack*	Bank Mandiri	8 Juni 2023
3.	*Refreshment Program: Cyber Security*	BARa *Risk* Forum	26 Juli 2023
4.	BOC *Retreat: Economy Outlook* 2024 & m-DNA	Bank Mandiri	15 Desember 2023

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2023 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2023, penerapan manajemen risiko, tata kelola TI, keamanan siber, pengembangan inisiatif digital, penerapan GCG, ESG, pengembangan SDM, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan KAP untuk audit tahun buku 2023, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan RKAP tahun 2024 dan RBB tahun 2024-2026, usulan RKAB tahun 2024-2028, usulan penginian *Recovery Plan* tahun 2023, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
7. Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris baik pada area Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, maupun Kepatuhan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya;
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Audit yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit, adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Heru Kristiyana*)	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2020-2025
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota Non-Komisaris dari Pihak Independen.



Rasyid Darajat
Anggota Komite Audit, Pihak Independen
Usia: 60 Tahun
Domisili: Tangerang Selatan
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
2 Agustus 2021 – sekarang

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen dari Binus Business School (2022)
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
- Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2021

Pengalaman Kerja
- Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2020)
- Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009 - 2014)
- Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005-2009)
- Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia (2002 - 2005)
- Direktur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)
- Konsultan SGV-Utomo/Andersen Consulting (1989-1996)

KOMITE AUDIT



Rubi Pertama
Anggota Komite Audit, Pihak Independen
Usia: 60 Tahun
Domisili: Jakarta
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
1 Oktober 2021 – sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2021.

Pengalaman Kerja
- Anggota Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Eximbank Indonesia (2020 – September 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial Bank of Korea Indonesia (2019 – 2020)
- *Risk* Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2019)
- Manajer Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A (2013 – 2018)
- Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010 – 2013)
- Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)
- Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990 – 2007)

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/005/2023 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit berisi antara lain:
1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
   a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
      i) Kredibilitas dan obyektivitas Laporan dan informasi keuangan Perseroan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
      ii) Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
      iii) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
      iv) Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
      v) Proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
   b. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
   c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Internal dan Eksternal) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Pengendalian Intern
   a. Proses dan Sistem Pengendalian Intern
      i) Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
         » Sistem pengendalian intern (internal control system) Perseroan yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
         » Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Eksternal yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
         » Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Regulator.
         » Kecukupan pengendalian intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Audit Intern
      i) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas:
         » Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
         » Pelaksanaan kegiatan dan hasil audit intern serta efektivitas pelaksanaan audit intern.
         » Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
         » Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
         » Kesesuaian penerapan kebijakan Audit Intern Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
         » Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN yang berlaku.
      ii) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara obyektif, independen, dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
      iii) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
      iv) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Regulator.
      v) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
         » Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
         » Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
         » Pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
         » Tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
         » Penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
      vi) Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal - hal antara lain sebagai berikut:
         » Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Satuan Kerja Audit Intern.
         » Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
         » Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.
   c. Audit Ekstern
      i) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP.
      ii) Memastikan objektivitas dan independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
      iii) Memberikan rekomendasi atas:
         » Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:

KOMITE AUDIT

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP
- Ruang lingkup Audit;
- Imbalan jasa Audit;
- Keahlian dan pengalaman AP,KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut – turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

» Pengakhiran AP dan KAP.

iv) Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
» Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
» Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.

v) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
» Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
» Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
» Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
» Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

vi) Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri guna membahas hal - hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
» Progres pelaksanaan pemeriksaan.
» Temuan - temuan penting.
» Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
» Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
» Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.

vii) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
» Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan Auditor Eksternal serta institusi pemeriksa lainnya.
» Tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.

viii) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.

ix) Khusus pengadaan jasa non audit yang akan mengundang KAP yang sedang mengaudit laporan keuangan Perseroan pada tahun berjalan beserta afiliasinya, dan berdasarkan kajian Manajemen tidak terdapat conflict of interest, maka Manajemen wajib mengajukan usulan persetujuan kepada Komite Audit terkait rekanan yang diundang pada pengadaan jasa konsultan tersebut.

3. Kepatuhan
Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit - unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Menyusun Piagam Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan.
3. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta institusi pengawas/ pemeriksa lainnya.
4. Menugaskan Auditor Intern dan/atau Auditor Eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
   c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

KOMITE AUDIT

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heru Kristiyana	Ketua Merangkap Anggota	21 Agustus - 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ekonomi • Master of *Business Administration* di bidang *Economic Development* • Ph.D di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Muliadi Rahardja	Anggota	10 Maret – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Akuntansi • Master of *Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rasyid Darajat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Teknik Sipil • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan IT
Rubi Pertama	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Heru Kristiyana	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Komite Audit

Pada tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan 28 kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	12 Januari 2023	Progress Pasar Digital (PaDi) UMKM Tahun 2022.	100%
2.	19 Januari 2023	1. Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). 2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan IV/2022	100%
3.	24 Januari 2023	Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 (*Audited*).	85,7%
4.	2 Februari 2023	1. Pengelolaan Agunan. 2. Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	100%
5.	23 Februari 2023	Laporan Direktur Kepatuhan Semester II/2022.	100%
6.	2 Maret 2023	Progress Kinerja Reksadana Terproteksi PT Mandiri Manajemen Indonesia (MMI).	85,7%
7.	9 Maret 2023	Usulan Penunjukan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/ *Quality Assurance Review* (QAR) Tahun 2023.	100%
8.	13 April 2023	1. Progress Penyelesaian Tunggakan Klaim Penjaminan Kredit Retail. 2. Kepatuhan Penyampaian Laporan dan Koordinasi dengan PPATK. 3. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan I/2023	83,3%
9.	11 Mei 2023	Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%
10.	17 Mei 2023	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan I/2023.	66,7%
11.	22 Mei 2023	Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%
12.	31 Mei 2023	Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan I/2023	100%
13.	13 Juni 2023	Usulan Revisi RKAP Tahun 2023 dan RBB Tahun 2023-2025	100%
14.	15 Juni 2023	Strategi Digital Marketing	100%
15.	26 Juni 2023	Ketahanan Siber Entitas Anak	100%
16.	6 Juli 2023	IT *Risk* & Audit	100%
17.	13 Juli 2023	Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%
18.	27 Juli 2023	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan II/2023	100%
19.	24 Agustus 2023	Update Hasil *Quality Assurance Review* SKAI Tahun 2023.	100%
20.	21 September 2023	1. Laporan Direktur Kepatuhan Semester I/2023 2. Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK	85,7%
21.	5 Oktober 2023	Perbaikan Proses Pelaporan SLIK dan LBUT.	100%
22.	12 Oktober 2023	Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	85,7%
23.	19 Oktober 2023	Ketahanan Siber Entitas Anak	100%
24	26 Oktober 2023	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan III/2023.	71,4%
25.	16 November 2023	Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026.	85,7%
26.	30 November 2023	1. Persiapan *Exit Meeting* Pemeriksaan OJK tahun 2023 dan *Prudential Meeting* tanggal 5 Desember 2023. 2. Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan III/2023.	100%
27.	13 Desember 2023	Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	85,7%
28.	21 Desember 2023	1. Usulan Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. 2. Usulan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024.	85,7%

KOMITE AUDIT

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Heru Kristiyana	Ketua merangkap Anggota	10	9	90
M. Chatib Basri	Anggota	28	22	78,6
Andrinof A. Chaniago	Anggota	28	28	100
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	28	25	89,3
Muliadi Rahardja	Anggota	28	27	96,4
Rasyid Darajat	Anggota	28	28	100
Rubi Pertama	Anggota	28	27	96,4

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Audit

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/0023/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2023

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Audit tahun 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. *Mandatory*/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit oleh KAP, penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan RKAP dan RBB, hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta kegiatan internal Komite Audit lainnya.
2. Non Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang efektivitas implementasi Strategi 3-3-1, kualitas perkreditan, TI & operasional, penguatan SPI, dan sinergi antara Mandiri Group

Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 28 kali Rapat Komite Audit, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 107 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik *in-house/unaudited* maupun *audited* yang akan dipublikasikan.
4. Menelaah lebih dari 30 Laporan/Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Usulan Penunjukan AP dan KAP yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, serta Usulan *Annual Audit Plan* dan *Budget Internal Audit* Tahun 2024.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC).
7. Melakukan 5 (lima) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region VII-Area DI Yogyakarta (12-14 April 2023), Region X-Morowali (16 Mei 2023), CISO Office & Lab. Forensic (08 Juni 2023), Mandiri University (25 Juli 2023), dan Region I-Area Batam (21-22 Agustus 2023).
8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024.
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. *Mandatory*/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kepatuhan, Internal Audit, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta kegiatan Internal Komite Audit lainnya.
2. Non Reguler, yang mencakup concern dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang bisnis dan perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan proses penetapan besaran remunerasi berjalan secara obyektif, efektif dan efisien. Peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 orang Komisaris dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau 1 orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, maka mayoritas anggota merupakan Komisaris Independen.
4. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi, adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2020-2025
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2022 - 2027
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	2023 - 2028
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Steven A. Yudiyantho	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	SEVP/Group Head *Human Capital*	1 Januari - 30 November 2023
Votivia Mardinna	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	SEVP/Group Head *Human Capital*	1-31 Desember 2023

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Non-Komisaris, pihak *Non-Voting* Merangkap Sekretaris:



Votivia Mardinna
Anggota *Non-Voting* Merangkap Sekretaris
Usia: 37 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Dasar Penunjukkan
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2008)

Pengalaman Kerja
- Group Head Performance & Remuneration (2023 - sekarang)
- Department Head Performance & Career Development (2019-2023)
- Department Head Organization Development (2018-2019)
- Pj. Department Head Organization Development (Mei 2017)

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi
   a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas.
   c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
   e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   f. Memberikan usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisa data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
   h. Memiliki data base dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
   i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
   j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pendukung Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

2. Terkait Fungsi Pengelolaan Kinerja
   a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja inidividu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   c. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) individu anggota Direksi.
   d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

3. Terkait Fungsi Remunerasi
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
   c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
   d. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
f. Menyampaikan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.

4. Terkait Fungsi Pengembangan
   a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Pengawas.
   b. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta *(Talent Management System)* Perseroan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya
   c. Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur Pengklasifikasian Talenta *(Talent Classification)* yang dilakukan Direksi
   d. Melakukan validasi dan kaliberasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *(Selected Talent)* untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN *(Nominated Talent)*.
   e. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Lembaga jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, sebelum diajukan kepada RUPS/ Menteri BUMN.

5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi BUMN untuk diketahui.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
   b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ekonomi. • *Master of Business Administration* di bidang *Economic Development.* • Ph.D di bidang Ekonomi.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Muliadi Rahardja	Anggota	10 Maret – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Akuntansi • Master of *Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana bidang Hukum. • Master bidang *Law Center.*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan *human capital.*
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ilmu Tanah • *Master of Sains* di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Votivia Mardinna	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	01– 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang *human capital.*

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Muliadi Rahardja	Rionald Silaban	Arif Budimanta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Muliadi Rahardja	Rionald Silaban	Arif Budimanta
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	9 Februari 2023	Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	100%
2.	23 Februari 2023	Usulan *Talent Pool.*	100%
3.	9 Maret 2023	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 serta Tantiem dan *Long Term Incentive* (LTI) Tahun Buku 2022.	100%
4.	14 Maret 2023	Usulan Pengurus Bank Mandiri pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.	100%
5.	17 April 2023	1. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak. 2. Wawancara Calon Direktur Entitas Anak.	100%
6.	11 Mei 2023	Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri	100%
7.	25 Mei 2023	Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	100%
8.	27 Juli 2023	1. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Direksi Entitas Anak. 2. Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi di Direktorat *Information Technology* dan Direktorat *Treasury & International Banking.*	100%
9.	14 September 2023	Usulan LTI.	80%
10.	23 November 2023	1. Usulan Pemberhentian dan pengangkatan Group *Head Corporate Secretary.* 2. Wawancara Kandidat Group Head Corporate Secretary.	100%
11.	28 November 2023	Konsultasi Anggaran Tantiem dalam RKAP Tahun 2024.	100%
12.	13 Desember 2023	1. Usulan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023. 2. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	100%

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	12	12	100
Andrinof A. Chaniago	Anggota	12	12	100
Muliadi Rahardja	Anggota	12	12	100
Rionald Silaban	Anggota	12	11	92
Arif Budimanta	Anggota	12	12	100

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2023.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024 terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi Nominasi, Remunerasi, pembahasan *issue* tertentu dan kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi. Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2024.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Prinsip Dasar

Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

1. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
3. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Manajemen Suksesi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 30, dasar dari Manajemen Suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta *(talent pool)* Kementerian BUMN atau sumber lain yang ditentukan oleh Menteri.
2. Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Komite Suksesi dan/atau mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
   b. Mematuhi peraturan perudang-undangan yang berlaku.
   c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
   d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
   b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
   c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
   d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
   e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
   a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
   b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
   c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
   a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
   b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
   c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar pegawai *top talent* level BoD-1 kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya Kementerian BUMN akan mengevaluasi daftar *top talent* tersebut dan menunjuk salah satu lembaga penyelenggara asesmen talenta Direksi KBUMN. Nama- nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon yang akan diajukan dalam RUPS.

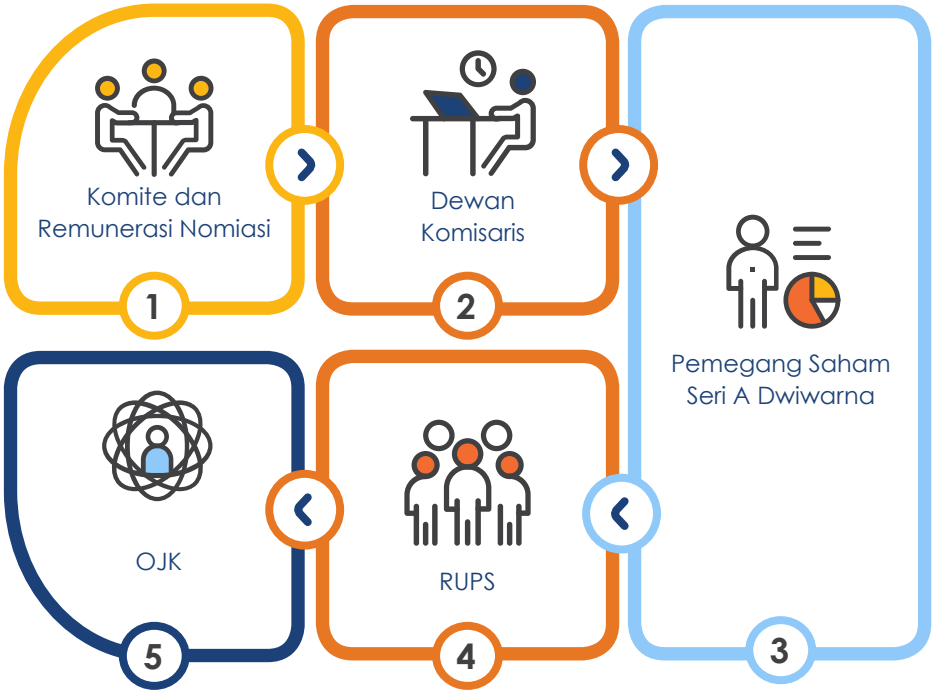

1. Menyusun dan mengusulkan Rekomendasi Suksesi Direksi
2. • Mengkaji Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi
   • Mengusulkan Suksesi Direksi kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna
3. • Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota Direksi
   • Persetujuan Suksesi Direksi
4. Pengangkatan dan Penetapan Suksesi Direksi
5. • Melakuan *Fit and Proper Test*
   • Persetujuan Calon Pengurus Perseroan

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris.
2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis, 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
   b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
   b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2020-2025
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Heru Kristiyana*)	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	2021 - 2026
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	2019 - 2024
Caroline Halim	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.



Chrisna Pranoto
Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen
Usia: 61 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
30 April 2019 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
- Magister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 30 April 2019 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2019.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 – Oktober 2021)
- Group Head Compliance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2018)
- Pegawai Pimpinan Change Management Office PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014)
- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015)
- Group Head Distribution Network II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014)
- Group Head Central Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012 – 2013)
- Group Head Credit Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2012)
- Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 – 2011)

KOMITE PEMANTAU RISIKO



Caroline Halim
Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen
Usia: 61 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
02 Agustus 2021 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021.

Pengalaman Kerja
- Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (2020 -Juli 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Rabobank International Indonesia (2018 –2020)
- Group Head *Risk* Management PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012 –2017)
- Group Head *Risk* Management PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 – 2011)
- Group Head Credit *Risk* Analytic PT CIMB Niaga (1988 – 2010)

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2023. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
   d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
   a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
   b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
   c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
   d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
   a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak- pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan Perseroan.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
   c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
   e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Heru Kristiyana	Anggota	21 Agustus - 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
Nawal Nely	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Akuntansi. • Executive Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, manajemen risiko, dan pengawasan.
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Ilmu Tanah • Master of Science di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Chrisna Pranoto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister Manajemen Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko dan kepatuhan.
Caroline Halim	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	• Sarjana di bidang Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, dan audit.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Andrinof A. Chaniago	Heru Kristiyana	Loeke Larasati Agoestina	Nawal Nely	Arif Budimanta	Chrisna Pranoto	Caroline Halim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, telah diselenggarakan 25 kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	12 Januari 2023	*Outstanding Legal Case* Tahun 2022.	100%
2.	2 Februari 2023	Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait.	100%
3.	2 Maret 2023	Debitur *Watchlist* dan Kondisi Portfolio Debitur BUMN Triwulan IV/2022.	85,7%
4.	9 Maret 2023	Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023.	100%
5.	16 Maret 2023	*Lesson Learned* dari Kasus Silicon Valey Bank (SVB)	100%
6.	Maret 2023	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2022 dan *Risk Dashboard* Februari 2023. 2. Usulan Penginian Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR).	83,3%
7.	5 April 2023	1. Optimalisasi Aset Tetap 2. *Outstanding Legal Case* Triwulan I/2023	100%
8.	3 Mei 2023	Rencana Aksi Korporasi Entitas Anak.	83,3%
9.	11 Mei 2023	Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester II/2022.	100%
10.	15 Juni 2023	1. Debitur *Watchlist* dan Kondisi Kredit BUMN Triwulan I/2023 2. *Risk Dashboard* April 2023.	100%
11.	6 Juli 2023	Kinerja Retail Banking Semester I/2023.	100%
12.	13 Juli 2023	*Outstanding Legal Case* Triwulan II/2023	100%
13.	20 Juli 2023	Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait	83,3%
14.	3 Agustus 2023	1. Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait. 2. Strategi Jaringan.	83,3%
15.	16 Agustus 2023	1. Kinerja Kantor Luar Negeri Semester I/2023. 2. Kinerja *Special Asset Management* Semester I/2023.	100%
16.	31 Agusutus 2023	1. Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester I/2023. 2. Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait.	100%
17.	14 September 2023	Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	100%
18	12 Oktober 2023	Kinerja *Transaction Banking Wholesale Product* Triwulan III/2023.	100%
19	19 Oktober 2023	Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2023 dan *Risk Dashboard* Agustus 2023.	100%
20	26 Oktober 2023	Usulan Penginian *Recovery Plan* Tahun 2023	85,7%
21	9 November 2023	Debitur *Watchlist* dan Kondisi Debitur BUMN Triwulan III/2023.	100%
22	16 November 2023	1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024-2028. 2. Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait.	85,7%
23	23 November 2023	*Outstanding Legal Case* Triwulan III/2023.	85,7%
24	30 November 2023	Tata Kelola Pembentukan CKPN.	85,7%
25	13 Desember 2023	Progress Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi.	85,7%

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	25	25	100
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	25	23	92
Heru Kristiyana	Anggota	10	9	90
Nawal Nely	Anggota	25	20	80
Arif Budimanta	Anggota	25	22	88
Chrisna Pranoto	Anggota	25	25	100
Caroline Halim	Anggota	25	25	100

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Pemantau Risiko

Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Pemantau Risiko telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. *Mandatory*/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*, penelaahan RKAP dan RBB, penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang manajemen risiko, terutama terkait efektivitas implementasi strategi 3-3-1, perkreditan, operasional & TI, kecukupan SOP, dan kualitas kinerja Entitas Anak/Cucu.

Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 25 kali Rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 85 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit Kredit atas Rp3 triliun secara Individual, Laporan Debitur *Watchlist* Segmen *Wholesale*, dan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*.
4. Menelaah lebih dari 15 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), serta Usulan Penginian *Recovery Plan*.

5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan 6 (enam) kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region X- Palu (05 April 2023), Region VII-Area DI Yogyakarta (12-14 April 2023), Region X-Morowali (16 Mei 2023), CISO Office & Lab. Forensic (08 Juni 2023), Mandiri University (25 Juli 2023), dan Region I-Area Batam (21-22 Agustus 2023).
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler sebagai berikut:

1. *Mandatory*/Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit di atas Rp3 Triliun, Laporan Debitur *Wholesale* Kategori Watchlist, Hasil *Stress Test*, Laporan Realisasi Strategi *Anti-Fraud*, realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain bisnis dan perkreditan, operasional & TI, dan GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Selain itu, Komite juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Selain itu, Komite juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan dan menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.

6. Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen Non Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
8. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, adalah sebagai berikut:

Komposisi Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Period
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Zainudin Amali*)	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
M. Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	2021 - 2026
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	2019 - 2024
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Boedi Armanto	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	2023 - 2026
Hoesen	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	2023 - 2026
Agus Retmono	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	2023 - 2026
Fendy Eventius Mugni	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	2023 - 2026
Kusman Yandi	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	2023 - 2026
Alamanda Shantika	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	2023 - 2026
Prastoeti Soewondo	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	2023 - 2024
Mohamad Nasir	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	2023 - 2025
Mohamad Hidayat	Anggota Non-Voting	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	2023 - 2026

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Non-Komisaris/Pihak Independen.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Boedi Armanto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 64 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
25 Oktober 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Agronomi Institut Pertanian Bogor
- Master of Applied Economics University of Minnesota
- Doktor Ekonomi Universitas Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen No. KEP.DEKOM/007/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen (2023-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-14 Maret 2023)
- Staf Ahli Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2019-2020)
- Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2019-2018)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (2017-2019)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2017-2017)
- Pt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2015-2017)
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (2014-2015)
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Bank Indonesia (2013-2013)
- Kepala Departemen Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2008-2012)
- Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (2008-2008)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Internal Bank Indoenesia (2005-2008)
- Analis Eksekutif Senior Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia (2005-2005)
- Project Leader Unit Khusus Program Transformasi Bank Indonesia (2003-2005)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2002-2003)
- Kepala Bagian Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (1999-2002)
- Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-1999)



Hoesen
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 57 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
25 Mei 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Pertanian Universitas Padjadjaran (1991)
- Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan (2005)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Mei 2023.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Samudra Indonesia Tbk. (2023-sekarang)
- Komisaris Utama Penjamin Efek Indonesia (KPEI) (2023-sekarang)
- Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (2023-sekarang)
- Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (2022-sekarang)
- Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (2017-2022)
- Komisaris PT Danareksa Capital (2015-2017)
- Komisaris PT Danareksa Investment Management (2015-2017)
- Direktur PT Danareksa (2015-2017)
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2012-2015)

*) Mulai menjabat sejak Mei 2023

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Agus Retmono
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 61 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
24 Juni 2021 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
- MBA dari University of Illinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021 No. 002/AMFS-BOC/VI/2021.

Pengalaman Kerja
- Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019-2020)
- Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019)
- Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) (2015-2018)
- Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
- Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Ketua I Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014-2016)



Fendy Eventius Mugni*
Anggota Komite Tata Kelola Terintegras
Usia: 51 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
12 Desember 2023 - Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi di Universitas Kristen Indonesia (2001)
- Magister Teknik Elektro di Universitas Kristen Indonesia (2020)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat didasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham pada tanggal 28 Juni 2023, dimana beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen yang juga mewakili Perusahaan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengalaman Kerja
- Investigator di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2001-2003)
- Program Officer di Suara Hak Asasi Manusia (2004-2005)
- Project Engineer di Nokia Siemens Network Indonesia (2006- 2012)
- Country Manager di PT. Eflag Solutions Indonesia (2012-2014)
- Komisaris Independen di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-Sekarang)
- Komisaris Independen di PT. Mandiri Tunas Finance (2023- Sekarang)

*) Mulai menjabat sejak Desember 2023

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Kusman Yandi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 58 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
13 November 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi, Universitas Riau (1989)
- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Surat Nomor Skel.0209/BOD/CORSEC/MUF/XI/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Pemberitahuan Komisaris Independen MUF selaku Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance (November 2023 - sekarang)
- Direktur Wholesale & Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari 2021 – Mei 2022)
- Direktur Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (April 2015 – Januari 2021)
- Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (Januari 2015 – Maret 2015)
- Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale, Treasury & International Banking PT Bank Syariah Mandiri (Mei 2014 – Januari 2015)
- Executive Business Officer (EBO) di Direktorat Commercial Banking and Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2014 – Mei 2014)
- Commercial Banking Center Manager (CBC Manager/Vice President) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2007 – Agustus 2013)

*) Mulai menjabat sejak Juni 2023



Alamanda Santika
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 35 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
4 September 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang *Computer Science and Mathematics* dari Universitas Bina Nusantara (2013)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Blue Bird Tbk (2022-sekarang)
- Product Design and Engineering Lead Berrybenka (2010-2021)
- Anggota Tim Kajian Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Digital Dewan Pertimbangan Presiden (2019)
- Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia (2019-sekarang)
- Senior Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2012-2013)
- Supervisor Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013-2014)
- Assistant Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014-2015)
- Head Product Development (Scrum of Scrums) PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2015)
- Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015-2016)
- Vice President of Talent Management-People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2016)
- Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tbk (November 2017- sekarang)
- Direktur Utama Binar Academy (2017-sekarang)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Prastoeti Soewondo*
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 68 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
27 Januari 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - Ilmu Akuntansi
- S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas California, Los Angeles, USA
- S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas California, Los Angeles, USA

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. SK-01/DK-AJII/0123 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. (2021-Sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia (2018 – sekarang)
- Country Director dan Chairperson Thinkwell (2020 – sekarang)
- Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (1986 – sekarang)
- Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Kantor Wakil Presiden (2016 – 2019)
- Anggota Dewan Pengawas Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (2014 – 2016)
- Anggota Komite Audit PT Asuransi Kesehatan (2008-2010)
- Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia (2004-2008)

*) Mulai menjabat sejak Januari 2023



Mohamad Nasir
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 63 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
5 Desember 2023– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akuntansi
- Magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bidang Akuntansi
- *Doctor University of Science* Malaysia Bidang Akuntansi

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No. 03/519-KEP/DIR.

Pengalaman Kerja
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang)
- Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Reformasi Birokrasi (2019-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022)
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja RI (2014-2019)
- Rektor Universitas Diponegoro (2014)

*) Mulai menjabat sejak Juni 2023

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI



Mohammad Hidayat
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Usia: 56 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia

Periode Jabatan
19 Maret 2021– Sekarang

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah.
- Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management bidang Ilmu Hukum
- Magister Business Administration IPWI Jakarta
- Doktor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR.

Pengalaman Kerja
- Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2019- sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018- sekarang)
- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017-sekarang)
- Dosen S2 PSTTI Universitas Indonesia (2016-2017)
- Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015-2017)
- Dosen S2 Islamic Economic & Finance Universitas Trisakti (2015-2016)
- DPS UUS Allianz Syariah (2010-sekarang)
- DPS UUS Manulife Syariah (2010-sekarang)
- Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005-sekarang)
- DPS UUS BTN Syariah (2005-sekarang)
- Ketua DPS Bank Syariah Indonesia (1 Februari -1 Juni 2021)
- DPS PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun (1999-2010)

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2023. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
   a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
      - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
      - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
      - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
      - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal- hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
      - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
   b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
      - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
      - Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
      - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
      - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
      - Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.

3. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	• Sarjana di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic Development. • Ph.D di bidang Ekonomi.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	• Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Zainudin Amali	Anggota	• Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi) • Magister di bidang Kebijakan Publik • Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan • Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.
Faried Utomo	Anggota	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
M. Yusuf Ateh	Anggota	• Diploma 3 di Bidang Akuntansi • Diploma 4 di Bidang Akuntansi • Master of Business Administration (MBA) • Doktor di Bidang Administrasi Negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang Akuntansi dan Audit
Chrisna Pranoto	Anggota	• Sarjana di bidang Agronomi • Magister Manajemen Bisnis Internasional	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Rasyid Darajat	Anggota	• Sarjana Akuntansi. • Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis.	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Boedi Armanto	Anggota	• Sarjana Agronomi • Master of Applied Economics • Doktor Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Hoesen	Anggota	• Sarjana Pertanian • Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Agus Retmono	Anggota	• Sarjana Ekonomi • Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Fendy Eventius Mugni	Anggota	• Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi • Magister Teknik Elektro	Memiliki pengalaman bekerja di bidang HAM, Pengawasan, Pemberian Nasihat, Audit, dan Teknik Elektro.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Kusman Yandi	Anggota	• Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Konvensional dan Syariah, dengan keahlian utama di bidang Manajemen Stratejik, Analisa Keuangan, Manajemen Risiko, Strategi Pengembangan Bisnis, dan Keuangan Syariah.
Alamanda Shantika	Anggota	• Sarjana di bidang *Computer Science and Mathematics*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, Teknologi Informasi.
Prastoeti Soewondo	Anggota	• Sarjana Ilmu Akuntansi • Magister Ilmu Administrasi Kesehatan • Doktor Ilmu Administrasi Kesehaan	Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan.
Mohamad Nasir	Anggota	• Sarjana Bidang Akuntansi • Magister Bidang Akuntansi • Doktor Bidang Akuntasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pengawasan, Pemberian Nasihat, Birokrasi, Pendidikan, dan Akuntansi.
Mohamad Hidayat	Anggota	• Sarjana bidang Syariah • Master of Business Administration • Master di bidang Hukum • Doktor bidang *Islamic Economic and Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan legal

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Entitas Anak.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati Agoestina	Zainudin Amali	Faried Utomo	M. Yusuf Ateh	Chrisna Pranoto	Rasyid Darajat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan baik.
7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual melalui media elektronik.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian agenda rapat sebagai berikut.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

	Boedi Armanto	Hoesen	Agus Retmono	Fendy Eventius Mugni	Kusman Yandi	Alamanda Shantika	Prastoeti Soewondo	Mohamad Nasir	Mohamad Hidayat
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1	16 Maret 2023	1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 14 Desember 2022 2. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Terintegrasi (Realisasi Rencana Kerja 2022, Rencana Kerja 2023) 3. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester II/2022 4. Strategi Konglomerasi Keuangan/Mandiri Group Tahun 2023	100%
2	25 Mei 2023	1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 16 Maret 2023 2. Perkembangan Implementasi Program Penguatan APU-PPT di Mandiri Group 3. Pelaksanaan *Stress Test* Mandiri Group	100%
3	13 Juli 2023	1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 25 Mei 2023 2. Penerapan *Environmental, Social & Governance* (ESG) di Entitas Anak	88,89%
4	27 September 2023	1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 13 Juli 2023 2. Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Semester I/2023 3. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester I/2023	100%
5	2 November 2023	1. Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 27 September 2023 2. Perkembangan Digitalisasi Entitas Anak	100%
6	7 Desember 2023	1. Tindaklanjut Masukan Rapat Komite tanggal 02 November 2023 2. Ketahanan Siber Mandiri Group	100%

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	6	6	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	6	6	100%
Loeke Larasari Agoestina	Anggota	6	6	100%
Zainudin Amali*	Anggota	6	6	100%
Faried Utomo	Anggota	6	6	100%
M. Yusuf Ateh	Anggota	6	6	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	6	6	100%
Rasyid Darajat	Anggota	6	6	100%
Hoesen**	Anggota Non-Voting	4	4	100%
Adie Soesetyantoro***	Anggota Non-Voting	6	2	100%
Boedi Armanto**	Anggota Non-Voting	6	4	100%
Agus Retmono	Anggota Non-Voting	6	6	100%
Ravik Karsidi***	Anggota Non-Voting	2	2	100%
Fendy Eventius Mugni**	Anggota Non-Voting	4	3	75%
Mansyur Syamsuri Nasution***	Anggota Non-Voting	2	2	100%
Kusman Yandi**	Anggota Non-Voting	4	4	100%
Alamanda Shantika	Anggota Non-Voting	6	5	83%
Prastoeti Soewondo	Anggota Non-Voting	6	6	100%
M. Arief Rosyied Hasan***	Anggota Non-Voting	6	5	83%
Mohamad Nasir**	Anggota Non-Voting	1	1	100%
Mohamad Hidayat	Anggota Non-Voting	6	6	100%

*Mulai menjabat sejak Maret 2023 & Efektif Menjabat per November 2023
** Mulai Menjabat sejak Mei 2023, Juni 2023 dan Desember 2023
***Berhenti menjabat sejak Juni 2023 dan November 2023

Pencapaian *Key Performance Indicators* Komite Tata Kelola Terintegrasi

KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan.

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara *Group Head*

Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 9 (sembilan) kali Diskusi Internal dan Diskusi dengan Unit Kerja terkait.
3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah Menyusun rencana kerja tahun 2024, dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory*/Reguler dan Non Reguler, sebagai berikut:
1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan Komisaris terkait Mandiri Group.

Prosedur Penggantian Komite Penunjang Dewan dari Komisaris

Bagan berikut menggambarkan prosedur penggantian Anggota komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman Dewan komisaris dan Direksi Perseroan didasarkan pada berbagai latar belakang yang berbeda, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan serta pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri.

Pada 2023, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	56 Tahun	Pria	• Ph.D. di bidang Ekonomi. • Master of Business Administration di bidang Economic • Development Sarjana di bidang Ekonomi.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.	*Macroeconomic, Finance*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	59 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik. • Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	*Macroeconomic*
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	62 Tahun	Wanita	• Sarjana di bidang Hukum. • Magister di bidang Manajemen.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.	*Legal*
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Akuntansi • Master of *Business Administration* di bidang *Finance*	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	*Banking, Accounting*
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	67 tahun	Pria	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan	*Banking, Finance, Legal*
Zainudin Amali	Komisaris Independen	61 tahun	Pria	• Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi) • Magister di bidang Kebijakan Publik • Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan • Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.	*Finance, Kebijakan Publik.*
Rionald Silaban	Komisaris	55 Tahun	Pria	• Sarjana bidang Hukum. • Master bidang Law Center.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan *human capital.*	*Human Capital, Finance, Legal*
Arif Budimanta	Komisaris	53 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Ilmu Tanah • Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam • Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik	Memiliki pengalaman Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	*Finance*
Nawal Nely	Komisaris	48 Tahun	Wanita	• Sarjana di bidang Akuntansi • Executive Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan audit.	*Accounting, Banking*
Faried Utomo	Komisaris	57 Tahun	Pria	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	*Legal*
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	57 Tahun	Pria	• Diploma 3 di bidang Akuntansi • Diploma 4 di bidang Akuntansi • Master of Business Administration (MBA) • Doktor di bidang Administrasi Negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.	*Accounting, Audit*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Keberagaman komposisi Direksi seperti yang diatur dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2023, keberagaman komposisi Direksi tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertambangan.	*Treasury & International Banking, Risk Management, Funding & Lending, Finance, Special Asset Management, Credit Recovery, Legal*
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	50 tahun	Perempuan	• Sarjana di bidang Ekonomi. • *Master of Business Administration* (MBA) di bidang *Finance*.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	*Corporate Banking, Special Assets Management, Structured Finance, Government & Institutional.*
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	57 tahun	Laki-laki	• Sarjana Teknik Kimia. • *Master of Business Administration (MBA)* di bidang Sistem Informasi Manajemen.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.	Manajemen risiko kredit, strategi penanganan risiko, analisa risiko, manajemen dan strategi *collection*, manajemen risiko *fraud*, akuisisi maupun penutupan/penjualan bisnis dan portfolio, manajemen *scorecard* portfolio, manajemen risiko operasional, proses *selfassessment* untuk kontrol risiko, manajemen agen *collection* eksternal, dan berbagai program *training* terkait manajemen risiko.
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	52 tahun	Laki-laki	• Sarjana di bidang Akuntansi. • *Master of Business Administration (MBA) di bidang Strategy & Finance.*	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	*Human Capital, Finance, Strategy and Performance*
Eka Fitria*)	Direktur Treasury dan International Banking	45 tahun	Perempuan	• Sarjana di bidang Hukum • Magister di bidang Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, treasury, sumber daya manusia	Treasury, *Human Capital*
Riduan	Direktur Commercial Banking	52 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi. Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	*Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	55 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah manajemen risiko, asuransi, pengawasan perusahaan, dan ekonomi.	*Corporate & Commercial Credit, Retail Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management, Commercial Banking,* dan *Commercial Sales.*
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	58 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, pasar modal, manajemen risiko, dan ekonomi.	*Credit Recovery, Corporate Banking, Business Banking,* dan *Special Asset Management.*
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	57 tahun	Perempuan	Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, ekonomi dan manajemen risiko.	*Corporate Banking, Commercial Banking, Credit Analyst, Commodities Trading,* dan *Wholesale Risk.*
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	61 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, konsultan, sekretaris perusahaan, hubungan kelembagaan, dan hubungan masyarakat.	*Brain Mapping, Manajemen Risiko, Marketing, Corporate Relation,* dan *Corporate Secretary.*
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	51 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Geografi/Perencanaan Wilayah Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, dan pengawasan perusahaan.	*Treasury Dealer,* Manajemen Risiko, Analis Kredit, Penganggaran, dan Keuangan.
Timothy Utama	Direktur Information Technology	57 tahun	Laki-laki	*Bachelor of Business Administration* di bidang akuntansi dan keuangan	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, *treasury, trade service* dan teknologi dan system informasi	*Banking operation, treasury, trade service* dan teknologi informasi

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

3. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
   a. Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
   b. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
   b. Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
   c. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
   d. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI



Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
   a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
   b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total *reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 *percentile*.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 *percentile*.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan total *rewards* Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, *General Check Up*, kacamata serta program kesehatan pensiunan Bank Mandiri.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan kepengawasan.

Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri untuk selanjutnya akan diusulkan dalam Rapat Direksi agar dapat disetujui.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:
1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Kebijakan Remunerasi kepada Karyawan

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis *(peer group)*.
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:
1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perubahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan. Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan • Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama • Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama • Komisaris 90% dari Komisaris Utama	Besarnya faktor jabatan • Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama • Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama • Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama
2.	**Tunjangan**		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	**Fasilitas**		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta
Remunerasi				
Gaji	11 Orang	31.671	12 Orang	91.326
Tunjangan Perumahan	-		2 Orang	859
Tantiem	11 Orang	162.483	12 Orang	410.650
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-		10 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	5.648	12 Orang	-
Asuransi Penuh (dapat dimiliki)	-	4.533	12 Orang	11.311
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	11 Orang	538	12 Orang	4.060
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	11 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Dasar adanya bonus saham:

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Dewan Komisaris		
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	Nihil
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	552.300 saham
Faried Utomo	Komisaris	552.300 saham
Arif Budimanta	Komisaris	552.300 saham
Nawal Nely	Komisaris	552.300 saham
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	552.300 saham
Direksi		
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1.363.700 saham
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1.227.400 saham
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1.159.200 saham
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1.159.200 saham
Eka Fitria*)	Direktur Treasury & International Banking	Nihil
Riduan	Direktur Commercial Banking	1.159.200 saham
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	1.159.200 saham
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	1.159.200 saham
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	1.159.200 saham
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1.159.200 saham
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	1.159.200 saham
Timothy Utama	Direktur Information Technology	1.159.200 saham

*) Diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Total	12	185.916	11	73.562

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention* program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah yang Menjadi Material *Risk* Taker

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah material *risk takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2023 sejumlah 23 (dua puluh tiga orang). Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2023.

Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2023.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Secara rinci informasi terkait rasio gaji tertinggi dan terendah telah dijelaskan pada Bab Laporan Keberlanjutan.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2023, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

1. Saham dengan total 81.830.200 lembar saham.
2. Tunai dengan total Rp57.900.729.883.

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp32.829.571.326	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	30.091.400 lembar saham	-	-	-

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolektif berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk Kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundangan. Direksi juga memiliki wewenang untuk mengatur jalannya Perseroan, mengambil tindakan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan kelancaran operasional Perseroan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

Direksi menjalankan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)*, kode etik profesi dan *code of conduct*, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan (*compliance*) pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi.

KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2023, Komposisi anggota Direksi Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, RUPST menyetujui untuk:
1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Panji Irawan sebagai Direktur.
2. Mengangkat Ibu Eka Fitria, sebagai Direktur.

Komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023 tetap berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Darmawan Junaidi*)	Direktur Utama	RUPSLB 21 Agustus 2017	23 Desember 2020	2022-2027
Alexandra Askandar*)	Wakil Direktur Utama	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2018-2023
Ahmad Siddik Badruddin*)	Direktur Manajemen Risiko	RUPST 19 Februari 2020	25 Juni 2015	2020 – 2025
Agus Dwi Handaya*)	Direktur Kepatuhan dan SDM	RUPST 21 Maret 2018	12 September 2018	2018-2023
Panji Irawan**)	Direktur *Treasury* dan *International Banking*	RUPST 21 Maret 2018	4 September 2018	2018-2023
Riduan*)	Direktur *Commercial Banking*	RUPSLB 7 Januari 2019	15 Mei 2019	2019-2023
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan *Retail Banking*	RUPST 19 Februari 2020	2 September 2020	2020-2025
Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*	RUPSLB 21 Oktober 2020	15 Januari 2021	2020-2025
Susana Indah K. Indriarti	Direktur *Corporate Banking*	RUPSLB 21 Oktober 2020	21 Januari 2021	2020-2025
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020-2025
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020-2025
Timothy Utama	Direktur *Infromation Technology*	RUPST 15 Maret 2021	24 Mei 2021	2021-2026
Eka Fitria***)	Direktur *Treasury* dan *International Banking*	RUPST 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023-2027

*) Menjabat sebagai Anggota Direksi untuk Periode Kedua.
**) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
***) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri Tbk. Adapun isi dari Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.
4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/ kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/ keuangan, kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.
12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tata kelola perusahaan yang baik.

Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Supervisi
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	*Internal Audit (Wholesale & Corporate Center Audit, Retail Audit, IT Audit, Senior Investigator).*
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	*Special Asset Management, Legal, Digital Marketing dan Environmental, Social and Governance*
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	*Wholesale Risk, Corporate Risk, Commercial Risk, Credit Control & Supervision, Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy & Procedure, Consumer Credit Risk & Analytics, SME & Micro Risk, Retail Collection & Recovery, Retail Product Delivery & Fraud Risk*
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	*Compliance* & AML – CFT, *Human Capital*, Mandiri *University, Office of The Board*
Eka Fitria*)	Direktur *Treasury* dan *International Banking*	*Treasury, International Banking & Financial Institution, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement*
Riduan	Direktur *Commercial Banking*	*Commercial Banking, Commercial Solution*
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan *Retail Banking*	*Micro Development & Agent Banking, Micro Personal Loan, Credit Cards, Consumer Loans, SME Banking, Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking Retail Sales, Retail Deposit Product & Solution*
Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*	*Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash & Trade Operations, Electronic Channel Operations, Customer Care, Business Continuity Management*

Nama	Jabatan	Supervisi
Susana Indah K. Indriarti	Direktur *Corporate Banking*	*Corporate Banking, Corporate Solution*
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	*Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate, Government Project*
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	*Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Strategic Investment & Subsidiaries Management, Business Transformation, Corporate Transformation*
Timothy Utama	Direktur *Infromation Technology*	*Information Technology, Digital Banking, Enterprise Data Analytics*

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan

KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
      - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
      - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
   e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
   f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.

b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan.

2. Peraturan OJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain; pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	–	–
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	–	–
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	–	–
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	–	–
Eka Fitria	Direktur *Treasury* dan *International Banking*	–	–
Riduan	Direktur *Commercial Banking*	–	–
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan *Retail Banking*	–	–
Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*	–	–
Susana Indah K. Indriarti	Direktur *Corporate Banking*	–	–
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	–	–
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	–	–
Timothy Utama	Direktur *Infromation Technology*	-	–

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Direksi yang telah habis masa jabatanya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Direksi antara lain:

1. Sumber bakal calon Direksi/Direksi BUMN berasal dari:
   a. Mantan Direksi BUMN.
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
   d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
4. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

6. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
   a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
   b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup *(curriculum vitae)* calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
12. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
17. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 ini.

Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru maupun yang diangkat kembali.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
   f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   g. Mengundurkan diri;
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

DIREKSI

3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
   a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
   b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    a. Pengunduran dirinya telah efektif;
    b. Meninggal dunia;
    c. Masa jabatannya berakhir;
    d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
    b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
    c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
    d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
    e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
    f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
       - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
       - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
j. Dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
    - Keputusan pemberhentian sementara; dan
    - Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan *(conflict of interest)*.
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Orientasi diadakan oleh Perseroan kepada anggota Direksi yang baru guna memberikan pemahaman antara lain tentang:

1. Strategi, kebijakan dan rencana kerja Perseroan.
2. Nilai-nilai, visi dan misi Perseroan.
3. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Kebijakan terkait tata kelola perusahaan.
5. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
6. Program lainnya yang dianggap relevan.

DIREKSI

Program orientasi bagi Direksi baru dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program orientasi bagi Direktur baru sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
Eka Fitria	Direktur Treasury & International Banking	Rapat Bidang Treasury & International Banking	1. Treasury Group 2. Transaction Banking Wholesale Group 3. Strategic Procurement Group 4. International Banking & FI Group 5. Office of Chief Economist Group 6. Bank Mandiri Cayman Island Branch 7. Bank Mandiri Singapore Branch 8. Bank Mandiri Shanghai Branch 9. Bank Mandiri Hong Kong Branch 10. Bank Mandiri Dili Branch 11. Bank Mandiri (Europe) Limited 12. Mandiri International Remittance	21 Maret 2023
		Mandiri Institute	Office of Chief Economist Group	28 Februari 2023
		Rapat Bidang Treasury & International Banking	1. Treasury Group 2. Transaction Banking Wholesale Group 3. Strategic Procurement Group 4. International Banking & FI Group 5. Office of Chief Economist Group 6. Bank Mandiri Cayman Island Branch 7. Bank Mandiri Singapore Branch 8. Bank Mandiri Shanghai Branch 9. Bank Mandiri Hong Kong Branch 10. Bank Mandiri Dili Branch 11. Bank Mandiri (Europe) Limited 12. Mandiri International Remittance	29 Maret 2023
		Diskusi Pembinaan Region XII	Direktur Teknologi & Informasi	11 April 2023
		Rapat Bidang Treasury & International Banking	1. Treasury Group 2. Transaction Banking Wholesale Group 3. Strategic Procurement Group 4. International Banking & FI Group 5. Office of Chief Economist Group 6. Bank Mandiri Cayman Island Branch 7. Bank Mandiri Singapore Branch 8. Bank Mandiri Shanghai Branch 9. Bank Mandiri Hong Kong Branch 10. Bank Mandiri Dili Branch 11. Bank Mandiri (Europe) Limited 12. Mandiri International Remittance	12 April 2023
		Strategic Meeting Procurement Group	Strategic Procurement Group	13 April 2023
		Strategic Meeting International Banking & FI Group	International Banking & FI Group	27 April 2023
		Strategic Meeting Office of Chief Economist Group	Office of Chief Economist Group	5 April 2023
		Strategic Meeting Treasury Group	Treasury Group	8 May 2023
		Diskusi Pembinaan Region XII	RCEO Region XII	9 Juni 2023
		Transaction Banking Wholesale Forum	Transaction Banking Wholesale Group	25 Agustus 2023
		Workshop Strategic Procurement Group	Strategic Procurement Group	21 November 2023

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan *(Refreshment)* secara berkala paling kurang:
1. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 Triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Adapun Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	3 Februari 2021	7 Oktober 2023
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko : *Risk Management Certification Refresher Program*: COVID *Loan Restructuring After Implementation of* POJK 48 2020	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	*Refreshment*	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Mei 2018	21 Mei 2020
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	Manajemen Risiko : Penerapan Basel II Reform Basel IV untuk Perhitungan ATMR pada Risiko Kredit	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	*Refreshment*	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	11 April 2015	11 April 2017
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Refreshment* Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Refreshment* at Prague 17 – 18 Oktober 2017	17 Oktober 2017	18 Oktober 2019
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Refreshment* Manajemen Risiko	19 Maret 2018	19 Maret 2020
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Refreshment* Manajemen Risiko	13 Juli 2018	13 Juli 2020
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Refreshment* Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2022
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Loan* COVID *Restructuring after Implementation* of POJK 48 2020	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	ERM and Cyber Security : How to mitigate and Protect	26 Juli 2023	26 Juli 2025

DIREKSI

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	9 Mei 2022	2 Mei 2024
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	*Risk Management Certification Refreshment Program – Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model*	12 – 13 Maret 2020	12 – 13 Maret 2022
		LPPI	*Refreshment*	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	29 November 2023	29 November 2024
Riduan	Direktur *Commercial Banking*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2013	18 Februari 2021
					9 Februari 2021	18 Februari 2023
		ASTA Consulting	*Refreshment*	Mengelola Kredit Komersial Menghadapi Potensi Resesi 2023	6 Januari 2023	6 Januari 2024
		BARa Risk Forum (2023)	*Refreshment*	Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon	7 Desember 2023	7 Desember 2024
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan *Retail Banking*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2020	13 Mei 2022
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024
		BARa *Risk* Forum	*Refreshment*	Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon	7 Desember 2023	7 Desember 2024
Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	23 Oktober 2019	17 Juni 2021
					28 Juni 2021	17 Juni 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	*Refreshment*	Pelatihan Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	29 November 2023	29 November 2024
Susana Indah K. Indriarti	Direktur *Corporate Banking*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
		ASTA Consulting	Level 5	Manajemen Risiko-Jurus Baru *Member*dayakan Governance, *Risk* & *Compliance* (GRC) dan *Risk Appetite* Statement (RAS) PADA Masa Pandemi	16 Februari 2022	16 Februari 2024
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
		Maisa Citra Edukasi	*Refreshment*	Manajemen Risiko Perbankan	21 Juli 2022	21 Juli 2024
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) *Banking* Profession Certification Institution (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2015	24 Juni 2017
			Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Manajemen Risiko dalam Kondisi Ketatnya Likuiditas Saat Ini	14 Maret 2017	14 Maret 2019
			Refreshment	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – *Cyber Security Awareness in Industry* 4.0	2 Mei 2019	2 Mei 2021
		Ikatan Bankir Indonesia	*Refreshment*	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Implementasi *Operational Risk Management* pada Periode Covid-19	21 Juli 2020	21 Juli 2022
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	*Refreshment*	Manajemen Risiko Perbankan	24 Februari 2021	24 Juni 2023
		Maisa Citra Edukasi	*Refreshment*	Pentingnya *Cyber Security* dalam Digitalisasi Bank dan Kaitannya dengan Risiko Operasional	22 Februari 2023	22 Februari 2024
Timothy Utama	Direktur *Infromation Technology*	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	1 Agustus 2018	13 Juli 2020
			Refreshment	*Risk Management* Certification Refreshment Program – Implementation of Governance, *Risk, Compliance* (GRC) in *Banking* for Indonesia Context	13 Juli 2020	13 Juli 2022
		Maisa Citra Edukasi	*Refreshment*	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Eka Fitria*)	Direktur *Treasury and International Banking*	LPPI	Pembekalan	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Direksi	22 Juni 2023	22 Juni 2024

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	(%) Kepemilikan			
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	6.762.300	0,0072453%	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	7.425.200	0,0079556%	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	8.715.900	0,0093385%	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	6.755.100	0,0072376%	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Eka Fitria	Direktur *Treasury* dan *International Banking*	170.000	0,0001821%	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Riduan	Direktur *Commercial Banking*	7.000.000	0,0075000%	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan *Retail Banking*	4.137.300	0,0044328%	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*	3.117.500	0,0033402%	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Susana Indah K. Indriati	Direktur *Corporate Banking*	4.438.400	0,0047554%	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	3.000.500	0,0032148%	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	6.305.100	0,0067555%	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Timothy Utama	Direktur *Information Technology*	3.621.900	0,0038806%	Nihil	Nihil	Nihil
Total			**61.449.200**	**0,0658384%**			

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan dalam bentuk:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali
3. Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

DIREKSI

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Darmawan Junaidi	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko		√		√		√		√		√		√		√
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM		√		√		√		√		√		√		√
Eka Fitria*)	Direktur *Treasury* dan *International Banking*		√		√		√		√		√		√		√
Riduan	Direktur *Commercial Banking*		√		√		√		√		√		√		√
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan *Retail Banking*		√		√		√		√		√		√		√
Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*		√		√		√		√		√		√		√
Susana Indah K. Indriarti	Direktur *Corporate Banking*		√		√		√		√		√		√		√
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan		√		√		√		√		√		√		√
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi		√		√		√		√		√		√		√
Timothy Utama	Direktur *Information Technology*		√		√		√		√		√		√		√

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi, Anggaran Dasar dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Rapat Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota Direksi. Materi rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Pengganti Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama berhalangan hadir, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Pengganti kedua Direktur Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi tentang Direktur Pengganti/*Alternate*.

Dalam hal Direktur Utama dan Direktur Pengganti Direktur Utama berhalangan hadir, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

Rencana Rapat Awal Tahun Direksi

Direksi menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2023, dan telah diunggah pada *website* Bank Mandiri, sebagai berikut:

Triwulan I	*Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2022.
	Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2023.
Triwulan II	*Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
	Diskusi dan Persetujuan RKAP 2023 Revisi & RBB 2023-2025 Revisi.
Triwulan III	*Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
Triwulan IV	*Review* bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
	Diskusi dan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan *Recovery Plan*.
	Diskusi dan Persetujuan RKAP 2024 & RBB 2024-2026.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	3 Januari 2023	1. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
2	16 Januari 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Office of Chief Economist* 2. *Update Operations* 3. *Update Stress Testing* Bank Mandiri Triwulan III 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Tidak Hadir	Cuti
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
			Timothy Utama	Hadir	
3	24 January 2023	1. Diskusi Umum : *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Desember 2022 3. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir tgl 31 Desember 2022 *(Audited)* 4. Pengadaan KAP *(External Auditor)* Bank Mandiri Tahun 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
4	24 Januari 2023 (Radirkom)	1. *Update Stress Testing* Bank Mandiri Triwulan III 2022 2. Kinerja Keuangan Desember 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
5	30 Januari 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Office of Chief Economist* c. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. Persiapan *Public Expose & Analyst Meeting* Q4 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
6	6 Februari 2023	Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Cuti
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Cuti
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
7	13 Februari 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
8	20 Februari 2023	1. Diskusi Umum : *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Januari 2023 3. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
9	6 Maret 2023	1. Diskusi Umum : *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan *Recovery Plan* 3. Usulan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2023 4. Usulan *Human Capital* 5. Usulan SISM	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
10	13 Maret 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi c. Usulan *Digital Platform* 2. Kinerja Keuangan Februari 2023 3. *Update Distribution Strategy*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
11	20 Maret 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan c. *Update* Perkembangan Digital *Platform* 2. *Update Market Risk*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
12	27 Maret 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi 2. *Update* IBFI 3. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
13	3 April 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
14	10 April 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi 2. Persiapan Sistem IT & Operasional Menjelang Idul Fitri 1444 H 3. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
15	17 April 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform c. Usulan *Treasury* 2. Kinerja Keuangan Maret 2023 3. *Update* Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q1 2023 4. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
16	2 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. *Update Project* Transformasi	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
17	8 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. *Update* Kredit Segmen Retail 3. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	

DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
18	15 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Office of Chief Economist* c. *Update Project* Transformasi 2. Kinerja Keuangan April 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
19	22 Mei 2023	• Diskusi Umum: • *Update* Perkembangan Terkini Perseroan • *Update* Office of Chief Economist • *Update Project* Transformasi • Kinerja Keuangan April 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
20	25 Mei 2023 (Radirkom)	Kinerja Keuangan April 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Sakit
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Tidak Hadir	Sakit
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
21	29 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Persiapan Mandiri Jogja Marathon 2023 c. IR Market *Update* d. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
22	5 Juni 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi c. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. Usulan RKAP 2023 Revisi & RBB 2023-2025 Revisi	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
23	12 Juni 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Mei 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
24	19 Juni 2023	Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
25	27 Juni 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	

DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
26	3 Juli 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
27	11 Juli 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
28	17 Juli 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Juni 2023 3. *Update* Persiapan *Public Expose & Analyst Meeting* Q2 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
29	24 Juli 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Izin
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
30	31 Juli 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi c. *Update* Perkembangan Digital Platform	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
31	7 Agustus 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi 2. *Update* Stress Testing Bank Mandiri Triwulan I 2023 3. Usulan *Risk Management*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
32	14 Agustus 2023	Diskusi Umum : *Update* Perkembangan Digital Platform	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
33	28 Agustus 2023	1. Diskusi Umum: a. Efektif Jabatan Direksi b. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan c. *Update Project* Transformasi d. *Update* Strategi IT	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	

DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
34	12 September 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Rangkaian Acara HUT Bank Mandiri Ke-25 tahun 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
35	25 September 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update* Perkembangan Digital Platform 2. Kinerja Keuangan Agustus 2023 3. *Update* Tindak Lanjut *Risk Management*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
36	27 September 2023 (Radirkom)	Kinerja Keuangan Agustus 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
37	03 October 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi 2. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
38	9 Oktober 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. *Update Project* Transformasi	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
39	16 Oktober 2023	1. Diskusi Umum: a. *Update* Perkembangan Terkini Perseroan b. Tindak Lanjut Pengisian Posisi c. *Update Project* Transformasi 2. Kinerja Keuangan September 2023 3. *Kick-Off* RKAP 2024 dan RBB 2024-2026	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
40	23 Oktober 2023	1. *Update* Persiapan *Public Expose & Analyst Meeting* Q3 2023 2. Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2023-2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
41	30 Oktober 2023	Diskusi Umum : *Update* Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	

DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
42	6 November 23	1. Usulan *Human Capital* 2. Usulan IT	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
43	13 November 2023	1. Usulan *Human Capital* 2. Diskusi Umum: a. *Update Project* Transformasi b. *Update* Perkembangan Digital Platform 3. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028 4. Usulan RKAP 2024 dan RBB 2024-2026	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Sakit
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
44	20 November 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Oktober 2023 3. Usulan *Human Capital*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
45	27 November 2023	1. Usulan *Human Capital* 2. Diskusi Umum: *Update Project* Transformasi 3. *Update* Strategi Terkait Dana 4. Usulan *Corporate Real Estate*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
46	4 Desember 2023	Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
47	12 Desember 2023	1. Diskusi Umum: *Update* Perkembangan Terkini Perseroan 2. *Update* Pelaksanaan Rakernas Bank Mandiri 3. *Review* BCC 4. *Update* Treasury	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	
48	18 Desember 2023	1. Usulan *Human Capital* 2. Kinerja Keuangan November 2023 3. *Update Stress Testing* Bank Mandiri Triwulan III 2023 4. Usulan *Risk Management*	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Cuti
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria	Hadir	

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		Total Rapat	Total Jumlah Kehadiran	%
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	45	45	3	3	48	48	100%
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	45	43	3	2	48	45	94%
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	45	41	3	3	48	44	92%
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan & SDM	45	44	3	3	48	47	98%

DIREKSI

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		Total Rapat	Total Jumlah Kehadiran	%
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			
Eka Fitria*)	Direktur *Treasury & International Banking*	36	34	2	2	38	36	95%
Riduan	Direktur *Commercial Banking*	45	43	3	3	48	46	96%
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	45	42	3	3	48	45	94%
Toni E. B. Subari	Direktur *Operation*	45	44	3	3	48	47	98%
Susana Indah K. Indriati	Direktur *Corporate Banking*	45	45	3	2	48	47	98%
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	45	43	3	3	48	46	96%
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	45	44	3	3	48	47	98%
Timothy Utama	Direktur *Information Technology*	45	45	3	3	48	48	100%

*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Rapat Gabungan Direksi Dengan Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel frekuensi di atas.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2023 telah diadakan sebanyak 45 (empat puluh lima) kali Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2023 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 14 Maret 2023.
8. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
9. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
10. Penyusunan mengenai pengelolaan/pengembangan inisiatif TI dan ketahanan siber.
11. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu *first movers* dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
12. Penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
13. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan..

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2023 antara lain:

Tanggal	Perihal
24 Januari 2023	Inisiatif non IT
24 Januari 2023	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
25 Januari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024
30 Januari 2023	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
31 Januari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender
31 Januari 2023	Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah dan/atau Bangunan
20 Februari 2023	Pengangkatan Pegawai Menjadi Anggota Direksi BUMN
23 Februari 2023	Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2023
27 Februari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan
28 Februari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan
24 Maret 2023	Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah dan/atau Bangunan
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
18 April 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Renovasi
10 Mei 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi
10 Mei 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pembangunan Gedung Kantor
12 Mei 2023	Penetapan susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Modernisasi Genset dan Sistem Kelistrikan
17 Mei 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender
31 Mei 2023	Struktur Organisasi
24 Juli 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Konstruksi Pembangunan Rumah Fungsional
24 Juli 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Fungsional
02 Agustus 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi
02 Agustus 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
04 Agustus 2023	Struktur Organisasi
24 Agustus 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
11 September 2023	Penetapan Tim dan *Reviewer* Pengadaan Jasa Limited *Review* Atas Laporan Keuangan Bank Mandiri Per 31 Agustus 2023 Dalam Rangka Aksi Korporasi Bank Mandiri
12 September 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
13 September 2023	Pembentukan Tim Perunding dan Pemberian Kuasa Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
22 September 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
25 September 2023	Penunjukan dan Penetapan *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
25 September 2023	Penunjukan dan Penetapan *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
29 September 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Interior Gedung Kantor
19 Oktober 2023	Penetapan Tim dan *Reviewer* Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Penugasan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 ("Pengadaan Jasa AP dan KAP Bank Mandiri Tahun 2024")
23 Oktober 2023	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
27 Oktober 2023	*Policy & Procedure Committee*

Tanggal	Perihal
13 November 2023	Penetapan Tim Pengadaan Jasa Konsultan Inisiatif *Climate Risk Stress Testing*
22 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung
22 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Flat
23 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Cluster
23 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Cluster
01 Desember 2023	Pengangkatan *Group Head Corporate* Secretary
05 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) *Operational* Tahun 2024-2025
20 Desember 2023	Pembidangan SEVP dan Penetapan SEVP Pengganti
20 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor
20 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung
21 Desember 2023	Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2024
21 Desember 2023	Pelaksanaan Inisiatif Non IT Tahun 2024
22 Desember 2023	Penunjukan dan Penetapan *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
22 Desember 2023	Penunjukan dan Penetapan *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
22 Desember 2023	Penunjukan dan Penetapan *Senior Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
28 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat
28 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat

Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perusahaan

Direksi terus mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Pada tahun 2023 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

Evaluasi Atas Strategis Perusahaan

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta kolegial yang dinilai oleh Pemegang Saham dan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian Kinerja Direksi Individu

Direktur Utama

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegial.
2. Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
3. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
4. Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
5. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* di wilayah.
6. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
7. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

Wakil Direktur Utama

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegial.
2. Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*.
4. Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
5. Penyelesaian Kredit Non-*Performing Loans*.
6. Meningkatkan Kualitas Kredit Non-*Performing Loans* menjadi *Performing Loans*.

Direktur *Commercial Banking*
1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Commercial Banking*.
2. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Commercial Banking*.
3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Commercial Banking*.
4. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

Direktur *Corporate Banking*
1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Corporate Banking*.
2. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Corporate Banking*.
3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Corporate Banking*.
4. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

Direktur Jaringan & *Retail Banking*
1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Retail Banking*.
2. Tercapainya target akuisisi *agent banking* dan *financial inclusion* turunan agen.
3. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Retail Banking*.
4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Retail Banking*.
5. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

Direktur Hubungan Kelembagaan
1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan.
2. Tercapainya Penyaluran TJSL untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja.
3. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen Kelembagaan.
4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan.
5. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

Direktur Manajemen Risiko
1. Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
2. Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.

Direktur *Information Technology*
1. Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
2. Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi.
3. Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan *project charter*.
4. Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.

Direktur *Operation*
1. Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi.
2. Terlaksananya strategi *operations*, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan.
3. Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.
4. Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.

Direktur *Treasury* & *International Banking*
1. Menjaga likuiditas Perseroan.
2. Terlaksananya pengelolaan *banking book*, aktivitas *trading*, dan aktivitas *dealing* maupun *marketing* yang meliputi transaksi *foreign exchange*, surat berharga, produk derivatif *treasury*, dan *trade services* sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.

Direktur Keuangan & Strategi
1. Menjaga tingkat kesehatan bank.
2. Menjaga rasio CAR antara 20%-21%.
3. Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB.
4. Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan.
5. Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

Direktur Kepatuhan & SDM
1. Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri.
2. Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
3. Tercapainya strategi dan target pengelolaan *Human Capital*.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia		**45%**		**49,03**
Finansial				28,42
1	*Pre-Provision Operating Profit* (PPOP) Nominal	5%	Sesuai RKAP	5,47
2	*Pre-Provision Operating Profit* (PPOP) *Growth*	5%	Sesuai RKAP	5,50
3	*Percentile Total Shareholder Return* (TSR).	6%	Sesuai Target	6,60
4	*Market Capitalization*	2%	Sesuai Target	2,20
5	*Return on Equity* (ROE) *Tier* 1	4%	Sesuai RKAP	4,40
6	*Capital Adequacy Ratio* (CAR)	4%	Sesuai RKAP	4,24
Operasional				13,00
1	*Loan Risk* (LaR)	3%	Sesuai RKAP	3,30
2	CKPN to Loan at *Risk* (LaR Coverage)	3%	Sesuai RKAP	3,10
3	Cost of Credit (CoC)	3%	Sesuai RKAP	3,30
4	BOPO	3%	Sesuai RKAP	3,30
Sosial				7,62
1	Penyaluran KUR.	4%	Sesuai Plafond Pemerintah	4,40
2.	Rasio Klaim KUR terhadap Ending Balance KUR YtD	3%	Sesuai Target	3,22
B. Inovasi Model Bisnis		**24%**		**25,46**
1	*Average Balance* Dana Murah	5%	Sesuai RKAP	4,98
2	CASA Ratio	5%	Sesuai RKAP	5,07
3	*Active* User Livin'	7%	Sesuai Target	7,70
4	*Active* User Kopra	7%	Sesuai Target	7,70
C. Kepemimpinan Teknologi		**11%**		**11,06**
1	Implementasi Integrasi ATM (*Project* Jalin) dan EDC Payment	5%	Sesuai Milestone	5,00
2	*Implementasi Roadmap Master Plan* Teknologi Informasi.	3%	Sesuai Threshold	3,06
3	Cyber Security Breach Incident (untuk kerugian >Rp 50 M)	3%	Jumlah = 0	3,00
D. Peningkatan Investasi		**10%**		**10,93**
1	*Rating Environment, Social, Government* (ESG)	3%	*Rating*	3,30
2	*Risk Management Maturity Index*	3%	Sesuai Threshold	3,30
3	Kontribusi Entitas Anak terhadap NPAT Konsolidasi	4%	Lebih baik dari tahun lalu	4,33
E. Pengembangan Talenta		**10%**		**10,80**
1	*Development & Career Path System* di lingkup *Holding/Cluster*	2%	Sesuai *Timeline*	2,20
2	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	2%	Sesuai Target	2,00
3	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti.	2%	Sesuai Target	2,20
4	Perempuan dalam *nominated talent*	2%	Sesuai Target	2,20
5	Milenial (<=42 tahun) dalam nominated talent. Implementasi/penyusunan kebijakan terkait talent	2%	Sesuai Target	2,20
Total		**100%**		**107,28%**

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 11 (sebelas) Komite, yaitu:

1. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
2. *Business Committee* (BC)
3. *Capital & Subsidiaries Committee* (CSC)
4. *Human Capital Policy Committee* (HCPC)
5. *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC)
6. *Integrated Risk Committee* (IRC)

7. *Policy & Procedure Committee* (PPC)
8. *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC)
9. *Transformation Committee* (TFC).
10. *Credit Committee*/Rapat Komite Kredit (RKK)
11. *Social & Environmental Responsibility Committee* (SERC)

Berikut penjabaran hasil penilaian kinerja Komite Di bawah Direksi selama tahun 2023.

Asset & Liability Committee

Pada tahun 2023, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *asset* dan *liability*, menetapkan suku bunga dan menjaga likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *asset* dan *liability* Perseroan, serta memantau indikator keuangan yang tercantum dalam *Recovery Plan*. Selama tahun 2023, ALCO telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian ALCO.

Business Committee

Pada tahun 2023, *Business Committee* (BC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, mengatur produk dan/atau aktivitas Perseroan serta menetapkan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang *Wholesale banking* dan *Retail Banking*. Selama tahun 2023, BC telah mengadakan 8 (delapan) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian BC.

Capital & Subsidiaries Committee

Pada tahun 2023, *Capital and Subsidiaries Committee* (CSC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam Pengelolaan Permodalan Perseroan dan pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan permodalan, merekomendasikan aksi korporasi, menetapkan strategi dan pengelolaan Entitas Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Selama tahun 2023, CSC telah mengadakan 25 (dua puluh lima) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian CSC.

Human Capital Policy Committee

Pada tahun 2023, *Human Capital Policy Committee* (HCPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*. Selama tahun 2023, HCPC telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian HCPC.

Information Technology & Digital Banking Committee

Pada tahun 2023, *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menetapkan portofolio inisiatif IT, alokasi anggaran IT, penyelarasan IT *Strategy & Execution Plan* (ISP), dan rencana pengembangan TI. Selama tahun 2023, ITDC telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian ITDC.

Integrated Risk Committee

Pada tahun 2023, Integrated *Risk Committee* (IRC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Selama tahun 2023, IRC telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian IRC.

Policy & Procedure Committee

Pada tahun 2023, *Policy & Procedure Committee* (PPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan serta membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan *(ex-officio)*. Selama tahun 2023, PPC telah mengadakan 49 (empat puluh sembilan) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian PPC.

Risk Management & Credit Policy Committee

Pada tahun 2023, *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan membantu Direksi dalam melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan menetapkan strategi manajemen risiko, kemudian juga membantu merumuskan dan mengawasi kebijakan perkreditan, memantau perkembangan portofolio serta memberikan saran langkah perbaikan. Pemenuhan tugas tersebut dirumuskan melalui pelaksanaan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat RMPC secara daring dan 9 (sembilan) rapat sirkuler.

Transformation Committee

Pada tahun 2023, *Transformation Committee* (TFC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank, dengan dasar penilaian kinerja yang tercapai melalui pelaksanaan rapat TFC sebanyak 2 (dua) kali. Selain dibahas dalam rapat TFC, pembahasan mengenai Transformasi Bisnis juga dilakukan dalam Rapat Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali selama tahun 2023.

Credit Committee

Pada tahun 2023, *Credit Committee*/Rapat Komite Kredit (RKK) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business* Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Selama tahun 2023 RKK telah memutus 3.219 kredit yang terdiri dari segmen *Corporate* 541 keputusan, segmen *Commercial* 2.366 keputusan, segmen *Financial Institution* 76 keputusan, segmen Kelembagaan 42 keputusan *Special Asset Management* (SAM) 194 keputusan.

Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)

Pada tahun 2023, *Social & Environmental Responsibility Committee* (SERC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL. Selama tahun 2023, SERC telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian SERC.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Bank Mandiri memiliki Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif *(Executive Committee)* sebanyak 11 (sebelas) Komite sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Keputusan Direksi No. KEP. DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penyesuaian Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee*.

Dalam kapasitas sebagai komite, seluruh Executive *Committee* tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *asset* dan *liability*, penetapan suku bunga dan menjaga likuiditas serta hal-hal lain yang terkait pengelolaan *asset* dan *liability* Perseroan. Selain itu pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun pada periode krisis keuangan dan ekonomi, ALCO menjalankan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan*.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *ASSET & LIABILITY COMMITTEE*

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Asset & Liability Committee*, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ANGGOTA *ASSET & LIABILITY COMMITTEE*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	*Group Head Market Risk*
Sekretaris Pengganti I	*Group Head Treasury*
Sekretaris Pengganti II	*Group Head Strategy & Performance Management*
Sekretaris Pengganti III	*Group Head Credit Portfolio Risk*
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur *Treasury & International Banking* 5. Direktur *Commercial Banking* 6. Direktur Jaringan & *Retail Banking* 7. Direktur *Corporate Banking* 8. Direktur Hubungan Kelembagaan 9. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* yang hadir terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *ASSET & LIABILITY COMMITTEE*

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Asset & Liability Committee*, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Treasury & International Banking*	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Commercial Banking*	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Corporate Banking*	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Piagam *Asset & Liability Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Asset & Liability Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Asset & Liability Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets* dan *liabilities* Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi *Assets & Liabilities Management* (ALM) guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.
4. Melakukan evaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Melakukan evaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
6. Membahas dan menetapkan batasan *liquidity management, gap management, pricing management*, dan FX *management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk Entitas Anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.
9. Melakukan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan* sebagai berikut:
10. Memantau indikator-indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.
11. Melakukan eskalasi ke Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan *(trigger level)* yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.

PELAKSANAAN TUGAS *ASSET & LIABILITY COMMITTEE* TAHUN 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ALCO menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah menyelenggarakan

rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	3 Januari 2023	Strategi Pengelolaan Surat Berharga 2023	89%	
2	24 Maret 2023	Optimalisasi Neraca Mendukung Pencapaian Laba 2023	89%	
3	4 Desember 2023	1. Strategi Pengelolaan Surat Berharga dan *Wholesale* Funding 2024 2. Penerbitan Surat Berharga Mendukung Program Kredit Perumahan dari Pemerintah	100%	

RENCANA KERJA *ASSET & LIABILITY COMMITTEE* TAHUN 2024

1. Strategi *pricing* untuk Dana Pihak Ketiga & Kredit
2. Strategi pengelolaan likuiditas dan *funding*
3. Strategi pengelolaan surat berharga
4. Penginian kalau sesuai KBBI *Recovery Plan* tahun 2024-2025 dan penginian *Resolution Plan* tahun 2024

BUSINESS *COMMITTEE*

Business Committee (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang *Wholesale banking* dan *Retail banking*.

Struktur dan Keanggotaan *Business Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/015/2022 tanggal 12 April 2022 tentang *Business Committee*, struktur dan keanggotaan BC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota *Business Committee*

1. BC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen *Wholesale*)	*Group Head Transaction Banking Wholesale*
Sekretaris (Segmen Retail)	*Group Head Retail Deposit Product & Solution*
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur *Treasury* & *International Banking* 5. Direktur *Commercial Banking* 6. Direktur Jaringan & *Retail Banking* 7. Direktur *Corporate Banking* 8. Direktur Hubungan Kelembagaan
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	*Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

2. BC Kategori B

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen *Wholesale*)	*Group Head Transaction Banking Wholesale*
Sekretaris (Segmen Retail)	*Group Head Corporate Banking* 4
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur *Treasury* & *International Banking* 5. Direktur Jaringan & *Retail Banking* 6. Direktur *Corporate Banking* 7. Direktur Keuangan & Strategi 8. SEVP *Corporate Banking* 9. SEVP *Wholesale Risk* 10. SEVP *Micro & Consumer Finance*
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	*Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahasSpada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil *Business Committee*

Profil anggota *Business Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. BC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Treasury & International Banking*	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Commercial Banking*	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Corporate Banking*	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	

2. BC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Treasury* & *International Banking*	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Corporate Banking*	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Arief Ariyana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP *Corporate Banking*	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Adi Pranantias	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP *Wholesale Risk*	
Josephus Koernianto Triprakoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Micro & Consumer Finance	

Piagam *Business Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Business Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/15/2022, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Business Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

BC Kategori A

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan bisnis segmen *Wholesale* dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen Retail.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan Entitas Anak atau perusahaan entitas di bawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan serta penghentian produk baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

BC Kategori B

Membahas dan menetapkan agenda khusus *Management* Limit.

Pelaksanaan Tugas *Business Committee* Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya BC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023, BC telah melaksanakan rapat sebanyak sebanyak 8 (delapan) dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1.	17 Maret 2023	Pencabutan dan Penyusunan Manual Produk Segmen SME	100%	Sirkuler
2.	18 April 2023	Revisi Manual Produk Kredit Agunan Surat Berharga (KASB)	100%	Sirkuler
3.	21 Juni 2023	Revisi Manual Produk *Trade Financing*	100%	Sirkuler

BUSINESS COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
4.	11 Juli 2023	Revisi Manual Produk Fasilitas Pembiayaan Kepada/Melalui Perusahaan Pembiayaan dan Integrasi Memorandum Prosedur Kerja Sama Pembiayaan Bersama Melalui Multifinance Entitas Anak	100%	Sirkuler
5.	2 Agustus 2023	Revisi Manual Produk (MP) Fasilitas Intraday (IBFI) dan Penggabungan 6 MP *Treasury*	100%	Sirkuler
6.	2 Oktober 2023	Penyesuaian Manual Produk Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) & Pembiayaan Plasma Kemitraan Komersial	100%	Sirkuler
7.	22 November 2023	Revisi Manual Produk Mandiri Notional Pooling (MNP)	100%	Sirkuler
8.	30 November 2023	*Update* Manual Produk (MP) Mandiri Tabungan Mitra Usaha (TabunganMU)	100%	Sirkuler

RENCANA KERJA *BUSINESS COMMITTEE* TAHUN 2024

BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2024 antara lain:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen Retail.

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

Capital & Subsidiaries Committee (CSC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan permodalan Perseroan dan menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak.

Struktur dan Keanggotaan *Capital & Subsidiaries Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/021/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang *Capital and Subsidiaries Committee*, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota *Capital & Subsidiaries Committee*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris I	*Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management*
Sekretaris II	*Group Head Strategy Performance and Management*
Sekretaris III	*Group Head Credit Portfolio Risk*
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	*Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu *Senior Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil *Capital & Subsidiaries Committee*

Profil anggota *Capital & Subsidiaries Committee* per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Piagam *Capital & Subsidiaries Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Capital & Subsidiaries Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/021/2022, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membahas, merekomendasikan, dan menetapkan strategi pengelolaan modal Perseroan termasuk di antaranya rencana aksi korporasi dan perencanaan struktur modal yang optimal untuk mempertahankan posisi modal Perseroan di atas ketentuan minimum.
2. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
3. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui rencana penyertaan modal Entitas Anak termasuk tambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal/divestasi.
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
5. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan yang telah direkomendasi oleh unit kerja *Human Capital* penanggung jawab materi remunerasi.
6. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Kewenangan CSC sebagaimana diatur dalam butir 5 dan 6 tanpa mengurangi kewenangan Rapat Direksi untuk tetap dapat memutus pencalonan/nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak dan perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.
8. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
9. Membahas, merekomendasikan, menetapkan/memutus pelaksanaan, serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
10. Menetapkan Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Entitas Anak (Kuasa Pemegang Saham).

Pelaksanaan Tugas *Capital & Subsidiaries Committee*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya CSC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, CSC telah melaksanakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali baik melalui rapat maupun sirkuler dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	6 Maret 2023	Persetujuan Rencana Perubahan Shareholder Agreement (SHA) dan Anggaran Dasar (AD) PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) dan Pelepasan Status Pengendalian Bank Mandiri pada MAGI (Non Sirkuler)	100%	-
2	30 Maret 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%	-
3	30 Maret 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance	100%	-
4	10 April 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak	100%	-
5	12 April 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak	100%	-
6	17 April 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Mandiri Sekuritas	100%	-
7	17 April 2023	Persetujuan *Project* Sydney (Non Sirkuler)	100%	-

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
8	15 Mei 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST")Tahun Buku 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	100%	-
9	22 Mei 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST")Tahun Buku 2022 Entitas Anak	100%	-
10	15 Mei 2023	Usulan Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak (Non Sirkuler)	100%	-
11	29 Mei 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 PT Mandiri *Capital* Indonesia	100%	-
12	5 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 PT Mandiri Utama Finance	100%	-
13	5 Juni 2023	Persetujuan *Project* Melbourne	100%	-
14	12 JUni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 Bank Mandiri (Europe) Limites ("BMEL")	100%	-
15	19 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan/atau Pengawas PT Mandiri *Capital* Indonesia dan PT Mitra Transaksi Indonesia	100%	-
16	19 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengawas PT Mandiri Utama Finance dan Pelaporan Perubahan PT Bank Mandiri Taspen	100%	-
17	26 Juli 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%	-
18	1 Agustus 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Penetapan Usulan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak dan Cucu	100%	-
19	1 September 2023	Persetujuan Izin Prinsip Pelaksanaan *Project* Istambul	100%	-
20	25 September 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance	100%	-
21	16 Oktober 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri Taspen	100%	-
22	20 November 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan *Operation* Director Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.	100%	-
23	20 November 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Komisaris Utama PT Mandiri Utama Finance dan Kuasa Pemegang Saham Entitas Anak	100%	-
24	4 Desember 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Tanggapan terkait Penawaran Pelepasan 10% Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia atas nama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	100%	-
25	14 Desember 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Tanggapan terkait Rencana Pemisahan Unit Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)	100%	-

Rencana Kerja *Capital & Subsidiaries Committee* Tahun 2024

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Entitas Anak
2. Penetapan Remunerasi Entitas Anak
3. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Entitas Anak
4. Persetujuan Penambahan Modal ke Entitas Anak
5. Perubahan Pengurus Entitas Anak

Catatan : Pelaksanaan CSC dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Entitas Anak

HUMAN CAPITAL POLICY *COMMITTEE*

Human Capital Policy Committee (HCPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.

Struktur dan Keanggotaan *Human Capital Policy Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/018/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang *Human Capital Policy Committee*, struktur keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota *Human Capital Policy Committee*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	*Group Head HC Performance & Remuneration*
Sekretaris Pengganti	*Group Head HC Strategy & Talent Management*
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur *Information Technology* 5. Direktur Kepatuhan & SDM 6. Direktur Jaringan & *Retail Banking* 7. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	*Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	*Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	SEVP *Internal Audit**) atau *Group Head* Direktorat *Internal Audit* atau pejabat Direktorat *Internal Audit* yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

Profil *Human Capital Policy Committee*

Profil anggota *Human Capital Policy Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Information Technology*	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Piagam *Human Capital Policy Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Human Capital Policy Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/005/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Human Capital Policy Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, HCPC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan *Human Capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Entitas Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM), Yayasan serta Entitas Anak dari Entitas Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.
4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan pelatihan *Human Capital* sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Menetapkan individual *performance management* & *rewards, talent & succession management*, serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen *Human Capital*.
7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *Human Capital* yang bersifat strategis.

Pelaksanaan Tugas *Human Capital Policy Committee* Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya HCPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023 pelaksanaan tugas HCPC dilakukan dengan membahas terkait kepegawaian dan diputus dalam Rapat Direksi. Materi-materi terkait kepegawaian yang dibahas dalam Rapat Direksi antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	13 Februari 2023	Usulan Alokasi Bonus Kinerja Tahun 2022	100%	-
2	20 Februari 2023	*Annual People Performance Review* dan *Top Talent* BoD-1 KBUMN 2023	100%	-
3	15 Mei 2023	*Salary Increment* Tahun 2023	100%	-
4	13 November 2023	*Lunar Stream 1: Create Business Leader*	100%	-

Rencana Kerja *Human Capital Policy Committee* Tahun 2024

HCPC telah menetapkan rencana kerja untuk membahas kebijakan/strategi *Human Capital*, di antaranya terkait *performance, reward*, dan *talent management*.

INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan hal-hal yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI.

Struktur dan Keanggotaan *Information Technology & Digital Banking Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2021 tanggal 24 November 2021 tentang *Information Technology & Digital Banking Committee*, struktur dan keanggotaan ITDC sebagai berikut:

Susunan Anggota ITDC

1. ITDC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	*Group Head IT Strategy & Architecture*
Sekretaris Pengganti	*Group Head IT Application Development*
Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur *Information Technology* 4. Direktur Keuangan & Strategi 5. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Invitee	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* yang terkait materi. 2. Sekretaris Komite.

2. ITDC Kategori B

Ketua	Direktur *Information & Technology*
Sekretaris	*Group Head IT Strategy & Architecture*
Sekretaris Pengganti	*Group Head IT Application Development*
Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur *Information Technology* 2. Direktur Manajemen Risiko 3. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Invitee	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* yang terkait materi. 2. Sekretaris Komite.

Profil Anggota *Information Technology & Digital Banking Committee*

Profil anggota *Information Technology & Digital Banking Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. ITDC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Information Technology*	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Daniel Setiawan Subianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

2. ITDC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Information Technology*	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Daniel Setiawan Subianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam *Information Technology & Digital Banking Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada Information *Technology & Digital Banking Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas dan Tanggung Jawab *Information Technology & Digital Banking Committee*

ITDC memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Teknologi Informasi (TI) dan *Digital Banking* sebagai berikut:

ITDC Kategori A

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait TI:
   a. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
   b. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputus oleh Direksi.
   c. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan, dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
   d. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
   e. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI, serta arah investasi bidang TI (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan Entitas Anak).
   f. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional TI.
   g. Memastikan ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi *(information security management system)* yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait *Digital Banking*:
   a. Membahas, menetapkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
      i) *Roadmap*/strategi untuk menghasilkan kapabilitas *Digital Banking* yang mendukung strategi bisnis Bank.
      ii) Perencanaan, pengembangan dan eksekusi inisiatif *Digital Banking* yang bersifat strategis.
      iii) Manfaat yang diperoleh saat Inisiatif *Digital Banking* diterapkan, dan (namun tidak terbatas).
      iv) Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Inisiatif *Digital Banking*.
   b. Memastikan dan memonitor pelaksanaan Inisiatif *Digital Banking* termasuk apabila dibutuhkan strategi pemasaran/*roll-out*, risiko yang mungkin timbul, aspek kepatuhan dan *regulatory* dari *Digital Banking*.
   c. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional *Digital Banking*.

ITDC Kategori B

Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati *(project charter)*.
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar Investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Dan SEVP

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ITDC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Pelaksanaan Tugas *Information Technology & Digital Banking Committee* Tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Keputusan Komite	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	24 Januari 2023	Rekomendasi Usulan Persetujuan Alokasi CAPEX IT 2023 dan Persetujuan *Project* IT 2023 Kewenangan ITDC kepada ITDC Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
2	24 Januari 2023	Usulan Persetujuan Alokasi CAPEX IT 2023 dan Persetujuan *Project* IT 2023 Kewenangan ITDC	100%	Sirkuler Kategori A
3	23 Mei 2023	Rekomendasi Usulan Addendum Inisiatif Livin' 2.0 *Next Release* Kepada ITDC Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
4	23 Mei 2023	Persetujuan Usulan Addendum Inisiatif Livin' 2.0 *Next Release*	100%	Sirkuler Kategori A
5	14 Juni 2023	Rekomendasi Usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2023 ke OJK Kepada ITDC Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
6	14 Juni 2023	Persetujuan Usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2023 ke OJK	100%	Sirkuler Kategori A
7	25 September 2023	Rekomendasi Usulan *Project Operations Processing Shared Services* (Orion) kepada ITDC Sirkuler Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
8	25 September 2023	Persetujuan Usulan *Project Operations Processing Shared Services* (Orion)	100%	Sirkuler Kategori A
9	20 November 2023	Rekomendasi Usulan atas Alokasi CAPEX IT 2024, *Project* IT 2024 Kewenangan ITDC, dan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) 2024 kepada ITDC Sirkuler Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
10	20 November 2023	Persetujuan Usulan atas Alokasi CAPEX IT 2024, *Project* IT 2024 Kewenangan ITDC, dan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) 2024	100%	Sirkuler Kategori A
11	7 Desember 2023	Rekomendasi atas Usulan Pengesahan terkait Penyelarasan IT *Strategy & Execution Plan* (ISP) 2020 – 2024 kepada ITDC Sirkuler Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
12	7 Desember 2023	Persetujuan atas Usulan Pengesahan terkait Penyelarasan IT *Strategy & Execution Plan* (ISP) 2020 – 2024	100%	Sirkuler Kategori A

Rencana Kerja *Information Technology & Digital Banking Committee* Tahun 2024

ITDC telah menetapkan rencana kerja yang dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ITDC di tahun 2024 antara lain:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi
2. Penyusunan/Penyelarasan *Portfolio* Inisiatif IT
3. Laporan Rencana Pengembangan TI
4. *Architecture Capabilities Update*

INTEGRATED *RISK COMMITTEE*

Integrated Risk Committee (IRC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Struktur dan Keanggotaan Integrated *Risk Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/006/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Integrated *Risk Committee*, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Integrated *Risk Committee*

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	*Group Head Credit Portfolio Risk*
Sekretaris Pengganti I	*Group Head Market Risk*
Sekretaris Pengganti II	*Group Head Operational Risk*
Anggota Tetap Perseroan (Bank Mandiri)	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur *Information Technology* 3. Direktur *Operation* 4. Direktur Keuangan & Strategi 5. SEVP *Wholesale Risk*
Anggota Tetap Entitas Anak	1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia. 2. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas 3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance 4. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services
Anggota Tidak Tetap (Sesuai Materi Pembahasan)	1. Anggota Direksi/SEVP Perseroan selain Anggota Tetap Perseroan 2. Direktur Entitas Anak selain Anggota Tetap Entitas Anak
Anggota Pemberi Kontribusi	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya dari Perseroan dan Entitas Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite 2. Sekretaris Komite
Undangan Tetap	1. Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau Pejabat *Compliance* & AML-CFT Group dari Perseroan yang ditunjuk 2. SEVP Internal Audit atau *Group Head* Bidang Internal Audit atau Pejabat Bidang Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan 3. Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan

Profil Anggota Integrated *Risk Committee*

Profil anggota Integrated *Risk Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua merangkap Anggota Tetap Perseroan	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap Perseroan	Direktur *Information Technology*	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap Perseroan	Direktur *Operation*	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Keuangan & Strategi	
Adi Pranantias	Anggota Tetap	SEVP *Wholesale Risk*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Piagam *Integrated Risk Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Integrated Risk Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/006/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Integrated Risk Committee*

IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Komite lainnya antara lain mengenai:

1. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Kecukupan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

Pelaksanaan Tugas *Integrated Risk Committee* Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IRC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan Anggota Tetap Perseroan atau atas permintaan Anggota Tetap Entitas Anak dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2023, IRC telah merekomendasikan usulan melalui rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan secara sirkuler sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	17 Januari 2023	*Review* Metodologi Tingkat Kesehatan Mandiri Manajemen Investasi (MMI)	100%	Rapat Daring
2	2 Februari 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan *Risk-Based* Bank *Rating* (RBBR)/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2022	100%	Rapat Daring
3	31 Maret 2023	Pengajuan Rekomendasi atas *Framework* dan Formula Perhitungan *Consolidated Counterparty Limit* (CCL) Mandiri Group	100%	Rapat Daring
4	14 April 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan I 2023	100%	Rapat Daring
5	27 Juni 2023	*Review* Metodologi Tingkat Kesehatan Entitas Anak dalam rangka *Review* Metodologi Profil Risiko Terintegrasi dan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR)/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi	-	Sirkuler
6	2 Agustus 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan *Risk-Based* Bank *Rating* (RBBR)/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I 2023	100%	Rapat Daring

INTEGRATED RISK COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
7	14 Oktober 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan III 2023	100%	Rapat Daring
8	9 November 2023	Pengajuan Rekomendasi atas *Consolidated Counterparty Limit* (CCL) dan Bank Counterparties Universe Mandiri Group Tahun 2024	100%	Rapat Daring
9	15 Desember 2023	Pengajuan Rekomendasi atas Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	-	Sirkuler
10	15 Desember 2023	Pengajuan Rekomendasi atas Revisi *Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG)	-	Sirkuler
11	15 Desember 2023	*Review* Metodologi Tingkat Kesehatan Entitas Anak dalam rangka *Review* Metodologi Profil Risiko Terintegrasi dan *Risk-Based* Bank *Rating* (RBBR)/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi	-	Sirkuler

Rencana Kerja *Integrated Risk Committee* Tahun 2024

IRC telah menetapkan rencana kerja tahun 2024 yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Kecukupan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Kecukupan Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Hal lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group.

POLICY & *PROCEDURE COMMITTEE*

Policy & Procedure Committee (PPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Kebijakan dan/atau Prosedur serta membantu Direksi dalam pengaturan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

Struktur dan Keanggotaan *Policy & Procedure Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang *Policy* and Procedure *Committee*, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

1. PPC Kategori A

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	*Group Head Policy & Procedure*
Sekretaris Pengganti	*Group Head Compliance* & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & *Retail Banking* 3. Direktur *Operation* 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara[1)]	1. SEVP Internal Audit *) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. 2. Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam Hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

[1)] Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023 tanggal 27 Oktober 2023

2. PPC Kategori B

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	*Group Head Policy* & Procedure
Sekretaris Pengganti	*Group Head Compliance* & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. *Group Head Policy* & Procedure 3. *Group Head* Legal 4. *Group Head Compliance* & AML-CFT 5. Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara [1)]	SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam Hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

[1)] Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023 tanggal 27 Oktober 2023

Profil Anggota *Policy & Procedure Committee*

Profil anggota *Policy & Procedure Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

PPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Operation*	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

PPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Mardiana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head Policy* & Procedure	-
Dedy Teguh Krisnawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head* Legal	-
Juliser Sigalingging	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head Compliance* & AML-CFT	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil *Group Head Compliance* & AML-CFT.
Syafelda Indrayuni	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior *Operational Risk Head Corporate* Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Mindha Erdismina*)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior *Operational Risk Head Wholesale Banking* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Jhon R.H. Pangaribuan**)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior *Operational Risk Head Wholesale Banking* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Tina Setiawati Sentoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SORH Distribution & Consumer terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Rori Achir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior *Operational Risk Head Operation* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Wafdan Metha Firdaus	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior *Operational Risk Head Information Technology* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

*) efektif sejak tanggal 09 Januari 2017 s.d 12 Juli 2023
**) efektif sejak tanggal 13 Juli 2023

Piagam *Policy & Procedure Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Policy & Procedure Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas dan Tanggung Jawab *Policy & Procedure Committee*

PPC memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PPC Kategori A:
   a. Membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan:
      - Mandiri Group Principles Guideline (MGPG).
      - Mandiri *Subsidiaries Management* Principle Guideline (MSMPG).
      - Kebijakan Perseroan diluar Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Perkreditan.
   b. Membahas dan menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.
   c. Membahas dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT).
2. PPC Kategori B:
   a. Membahas dan menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan prosedur Perseroan.
   b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

Pelaksanaan Tugas *Policy & Procedure Committee* Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, PPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023, PPC telah melaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. PPC Kategori A sebanyak 3 keputusan.
2. PPC Kategori B sebanyak 46 keputusan.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	11 Januari 2023	SPO Cabang dan SPO Jaringan Kantor	100%	PPC B-Sirkuler
2	16 Januari 2023	SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah	100%	PPC B-Sirkuler
3	17 Januari 2023	Standar Prosedur *Recovery Plan*	100%	PPC B-Sirkuler
4	30 Januari 2023	Standar Prosedur Kredit (SPK) *Small Medium Enterprise* (SME)	100%	PPC B-Sirkuler
5	16 Februari 2023	Standar Prosedur *Corporate* Secretary	100%	PPC B-Sirkuler
6	17 Februari 2023	Standar Prosedur Pengelolaan Entitas Anak (SPPPA)	100%	PPC B-Sirkuler
7	04 April 2023	SPO Credit *Operation* (SPO CO) *Wholesale*	100%	PPC B-Sirkuler

POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
8	06 April 2023	SPO Teknologi Informasi	100%	PPC B-Sirkuler
9	06 April 2023	SPO Akreditasi Rekanan Perkreditan	100%	PPC B-Sirkuler
10	17 Mei 2023	SPK *Corporate*, SPK Commercial dan SPK FI	100%	PPC B-Sirkuler
11	22 Mei 2023	SPO Pengelolaan Dokumen	100%	PPC B-Sirkuler
12	22 Mei 2023	Kebijakan *Treasury*, Dana, dan Jasa (KTDJ)	100%	PPC A-Sirkuler
13	08 Juni 2023	Kebijakan Internal Control (KICN)	100%	PPC A-Sirkuler
14	08 Juni 2023	Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (KHKA)	100%	PPC A-Sirkuler
15	14 Juni 2023	SPK Micro	100%	PPC B-Sirkuler
16	14 Juni 2023	SPO Credit Collection & Recovery Retail	100%	PPC B-Sirkuler
17	23 Juni 2023	SP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	100%	PPC B-Sirkuler
18	05 Juli 2023	Standar Prosedur Perhitungan Kecukupan Modal	100%	PPC B-Sirkuler
19	06 Juli 2023	SPO Procurement	100%	PPC B-Sirkuler
20	14 Juli 2023	SPO Produk Dana	100%	PPC B-Sirkuler
21	17 Juli 2023	SPO Cabang Luar Negeri	100%	PPC B-Sirkuler
22	31 Juli 2023	SPO Penyusunan Kebijakan dan Prosedur	100%	PPC B-Sirkuler
23	31 Juli 2023	SPO Pengelolaan Model	100%	PPC B-Sirkuler
24	03 Augustus 2023	SPK Micro & SPO Credit Collection & Recovery Retail	100%	PPC B-Sirkuler
25	14 Augustus 2023	SPK *Corporate*	100%	PPC B-Sirkuler
26	25 Augustus 2023	SPO Teknologi Informasi	100%	PPC B-Sirkuler
27	28 Augustus 2023	Standar Prosedur Internal Audit	100%	PPC B-Sirkuler
28	01 September 2023	*Policy* & Procedure Manual (PPM) IT security *Policy* BMHK	100%	PPC B-Sirkuler
29	05 September 2023	SPO Produk Dana	100%	PPC B-Sirkuler
30	26 September 2023	Standar Prosedur Akuntansi	100%	PPC B-Sirkuler
31	26 September 2023	SPO Layanan Perbankan Digittal (LPD)	100%	PPC B-Sirkuler
32	03 Oktober 2023	SPO Layanan Wealth *Management*	100%	PPC B-Sirkuler
33	03 Oktober 2023	Standar Prosedur Pelaksanaan *Risk Based* Bank *Rating* (RBBR)	100%	PPC B-Sirkuler
34	17 Oktober 2023	SPO *Performance Management*	100%	PPC B-Sirkuler
35	06 Oktober 2023	SPK Small Medium Enterprise	100%	PPC B-Sirkuler
36	15 November 2023	SPK Consumer	100%	PPC B-Sirkuler
37	23 November 2023	SPK Commercial	100%	PPC B-Sirkuler
38	23 November 2023	SPK *Corporate* & *Financial* Institutions	100%	PPC B-Sirkuler
39	29 November 2023	SPO Procurement	100%	PPC B-Sirkuler
40	29 November 2023	SPO Pengelolaan Transformasi dan Inovasi	100%	PPC B-Sirkuler
41	30 November 2023	SPO *Asset* Tetap Tidak Bergerak (ATTB)	100%	PPC B-Sirkuler
42	07 Desember 2023	SPO Credit Collection Recovery *Wholesale*	100%	PPC B-Sirkuler
43	14 Desember 2023	SPO Layanan Nasabah	100%	PPC B-Sirkuler
44	14 Desember 2023	SPO *Marketing* Komunikasi Produk & Jasa	100%	PPC B-Sirkuler
45	15 Desember 2023	Standar Prosedur Hukum (SPH)	100%	PPC B-Sirkuler
46	15 Desember 2023	SPO Pengelolaan Uang Tunai	100%	PPC B-Sirkuler
47	19 Desember 2023	SPO Credit *Operation* Retail	100%	PPC B-Sirkuler
48	19 Desember 2023	SP *Asset* Liability *Management*	100%	PPC B-Sirkuler
49	20 Desember 2023	Standar Prosedur *Corporate* Secretary	100%	PPC B-Sirkuler

Rencana Kerja *Policy & Procedure Committee* Tahun 2024

PPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja PPC di tahun 2024 antara lain:

1. Penyesuaian/penyempurnaan Ketentuan Mandiri Group
2. Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan
3. Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan regulator maupun kebutuhan bisnis/operasional.

RISK MANAGEMENT & *CREDIT POLICY COMMITTEE*

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko, merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran langkah perbaikan.

Struktur dan Keanggotaan *Risk Management* & Credit *Policy Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Risk Management* & Credit *Policy Committee*, struktur dan keanggotaan RMPC adalah sebagai berikut:

RMPC Kategori A – *Risk Management*

Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	*Group Head Credit Portfolio Risk*
Sekretaris Pengganti I	*Group Head Market Risk*
Sekretaris Pengganti II	*Group Head Operational Risk*
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Jaringan & *Retail Banking* 4. Direktur *Operation* 5. Direktur Keuangan & Strategi 6. SEVP *Wholesale Risk*
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	1. Anggota Direksi lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan. 2. Anggota SEVP lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau Pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*. 2. Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

RMPC Kategori B – Credit *Policy*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	*Group Head* Credit Portfolio *Risk*
Sekretaris Pengganti I	*Group Head Policy* & Procedure
Sekretaris Pengganti II	SORH *Wholesale Banking*
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur *Operation* atau *Group Head Wholesale* Credit *Operations*/*Group Head* Retail Credit *Operations* (sesuai segmen) 4. SEVP Internal Audit atau Chief Internal Audit terkait
Anggota Tidak Tetap	1. Direktur Perkreditan sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. 2. SEVP bidang *Risk* sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. 3. Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Pemberi Kontribusi	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap	1. Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk. 2. Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* sesuai dengan segmen pembahasan.

Profil Anggota *Risk Management* & Credit *Policy Committee*

Profil anggota *Risk Management* and Credit *Policy Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

RMPC Kategori A – *Risk Management*

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Alexandra Askandar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & *Retail Banking*	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Operation*	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Adi Pranantias	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP *Wholesale Risk*	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

RMPC Kategori B – Credit *Policy*

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap	Direktur *Operation*	
Sugiharto	Anggota Tetap	*Group Head Wholesale* Credit *Operations**	-
Harsono Rudi Firnadi	Anggota Tetap	*Group Head* Retail Credit *Operations**	-
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	SEVP Internal Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Mindha Erdimina	Anggota Tetap	Chief Auditor *Wholesale* & *Corporate* Center Audit**	-
Ade Hasballah Abdullah	Anggota Tetap	Chief Auditor Retail Audit**	-
Deni Hendra Permana	Anggota Tetap	Chief Auditor IT Audit**	-
Asep Syaeful Rochman	Anggota Tetap	Chief Auditor Senior Investigator**	-

*Sesuai segmen
**Saling menggantikan

Piagam *Risk Management & Credit Policy Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada komite *Risk Management* & Credit *Policy* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas dan Tanggung Jawab *Risk Management & Credit Policy Committee*

1. **RMPC Kategori A – *Risk Management***
   RMPC Kategori A memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
   b. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi *stress* dan *contigency plan*.
   c. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
   d. Membahas dan menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di Entitas Anak.
   e. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti pelampauan alokasi dan limit dalam pengelolaan portofolio kredit).
   f. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
      i) Penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
      ii) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
      iii) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal.
   g. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

2. **RMPC Kategori B – Credit *Policy***
   RMPC Kategori B memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
   b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
   c. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
   d. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
   e. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit, serta penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.
   f. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
   g. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.

Pelaksanaan Tugas *Risk Management and Credit Policy Committee* Tahun 2023

Di tahun 2023, RMPC melaksanakan pengambilan keputusan melalui rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	13 Januari 2023	Hasil Evaluasi *Risk Appetite Statement* (RAS) Bank Mandiri	100 %	Sirkuler
2	17 Januari 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko dan RBBR Bank Mandiri secara Individu periode Semester II/Desember 2022 dan Pengajuan Persetujuan Usulan Perubahan Metodologi Tingkat Kesehatan MMI	100 %	Rapat Daring
3	2 Februari 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan RBBR Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II/Desember 2022	100 %	Rapat Daring
4	8 Februari 2023	*Update* Kinerja RAKB Q4 2022 dan Persetujuan *Green Bond Framework* Bank Mandiri	100 %	Rapat Daring
5	31 Maret 2023	Persetujuan Mekanisme & Formula Penetapan *Consolidated Counterparty Limit* Mandiri Group	100 %	Rapat Daring
6	14 April 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Triwulan I 2023	100 %	Rapat Daring
7	17 Mei 2023	Persetujuan *Bottom-Up Stress Testing* (BUST) 2023	100 %	Rapat Daring
8	29 Mei 2023	Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Bank Mandiri secara Individu	100 %	Sirkuler
9	7 Juni 2023	Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD)	100 %	Sirkuler
10	14 Juni 2023	Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi	100 %	Sirkuler
11	15 Juni 2023	Persetujuan *Sustainability Bond Report* dan ESG *Repo Report* 2023	100 %	Rapat Daring
12	14 Juli 2023	*Self-assessment* Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode Semester I 2023	100 %	Rapat Daring
13	2 Agustus 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I/Juni 2023	100 %	Rapat Daring
14	4 Agustus 2023	Revisi Dokumen Strategi Anti *Fraud* (SAF)	100 %	Sirkuler
15	13 September 2023	*Review* Limit Risiko Pasar *Banking Book* dan *Trading Book* serta *Review* Limit Risiko Likuiditas	100 %	Sirkuler
16	17 Oktober 2023	*Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan III	100 %	Rapat Daring
17	9 November 2023	Pengajuan *Consolidated Counterparty Limit* Mandiri Group	100 %	Rapat Daring
18	20 November 2023	Revisi Kebijakan Manajemen Risiko	100 %	Sirkuler
19	27 November 2023	*Review* Metodologi RBBR/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu	100 %	Sirkuler
20	13 Desember 2023	Persetujuan Usulan Mandiri ESG *Guiding Principal*	100 %	Rapat Daring
21	20 Desember 2023	*Review* Metodologi RBBR/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi	100%	Sirkuler

Rencana Kerja *Risk Management & Credit Policy Committee* Tahun 2024

RMPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun rencana kerja RMPC di tahun 2024 antara lain:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

TRANSFORMATION *COMMITTEE*

Transformation Committee (TFC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank, menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank, menetapkan inisiatif/ proyek transformasi yang akan dijalankan dan dikelola dengan strategi bisnis Bank, membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis, serta menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

Struktur dan Keanggotaan *Transformation Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/66/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang *Transformation Committee*, struktur keanggotaan TFC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota *Transformation Committee*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	*Head of Business Transformation*
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	*Head of Corporate Transformation*
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	*Group Head* Strategic Investment & *Subsidiaries Management*
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Keuangan & Strategi 4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur *Information Technology* 6. Direktur *Operation* 7. Direktur Kepatuhan & SDM
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	*Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang *operational risk*, yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil Anggota *Transformation Committee*

Profil anggota *Transformation Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Information Technology*	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur *Operation*	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	

Piagam *Transformation Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Transformation Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/66/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Tugas dan Tanggung Jawab *Transformation Committee*

TFC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank.
2. Menetapkan inisiatif/proyek transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

Pelaksanaan Tugas *Transformation Committee* Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, TFC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023, TFC menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	5 Juli 2023	Pemaparan dan permohonan persetujuan usulan *Key Success Indicators* Transformasi Bisnis tahun 2023	100%	Luring
2	20 Oktober 2023	Pemaparan dan permohonan persetujuan alokasi kebutuhan anggaran biaya operasional tahun 2023	100%	Luring

Selain 2 (dua) pertemuan yang telah diadakan dalam forum khusus TFC di atas, atas Permintaan Direksi, pembahasan mengenai Transformasi Bisnis juga dilakukan dalam Rapat Direksi sebanyak 15 kali selama tahun 2023.

Rencana Kerja *Transformation Committee* Tahun 2024

TFC akan menetapkan rencana kerja dalam satu tahun. Adapun rencana kerja TFC untuk tahun 2024 antara lain:

1. Menetapkan hasil *review* atas *progress* transformasi Bank tahun 2023.
2. Menetapkan strategi transformasi Bank tahun 2024.
3. Menyelesaikan isu pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi.

RAPAT KOMITE KREDIT

Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Sejak awal Bank Mandiri berdiri telah diterapkan *Credit Committee* yang terdiri dari fungsi *Business* Unit dan *Risk* Unit dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, namun pada tahun 2005 telah dilakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental dalam rangka menjamin pemberian kredit yang lebih *prudent* serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko dan *best practice* serta untuk mempertegas penerapan prinsip GCG.

Setiap pemberian kredit di segmen *Wholesale* dapat dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four–eyes principle* serta proses *check and balance* antara *Business Unit* sebagai *unit Inisiator* dengan *Risk Unit* selaku Unit Mitigasi Risiko.

Dalam RKK, *Legal Group* dan *Compliance Group* juga hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit kerja, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan bebas tekanan. Dalam hal salah satu anggota komite kredit menjalankan fungsi *credit recovery* disebut Komite Kredit Restrukturisasi.

Struktur dan Keanggotaan *Credit Committee*

RKK dibentuk sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021. Sedangkan susunan anggota RKK diatur dengan mengacu *Four Eyes Principles* (komposisi secara proporsional antara pemegang kewenangan bisnis dengan pemegang kewenangan risiko kredit). Dalam pelaksanaannya, *Credit Committee* dilengkapi Sekretaris Komite.

Piagam *Credit Committee*

Bank Mandiri memiliki Piagam *Credit Committee* yang diatur pada Standar Prosedur Kredit untuk masing-masing segmen bisnis.

Piagam *Credit Committee* antara lain mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang *Credit Committee* serta struktur dan keanggotaannya yang mewakili fungsi bisnis dan fungsi risiko kredit secara proporsional.

Tugas dan Tanggung Jawab *Credit Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, Credit *Committee* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit
   Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business* Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

2. Komite Kredit – Restrukturisasi
   Komite Kredit–Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:

a. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola *Credit Recovery Unit.*
b. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *Watclist.*
c. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
d. Hapus buku dan hapus tagih kredit.

3. Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada individu bukan jabatan dimana masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.
4. Kewenangan pemutusan kredit digunakan sesuai ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.
5. Perpanjangan jangka waktu kredit hanya dapat dilakukan setelah penyaluran transaksi debitur secara proporsional telah dilaksanakan ke *operating account* debitur di Bank Mandiri. Apabila penyaluran transaksi debitur ke *operating account* belum dilakukan secara proporsional, maka perpanjangan fasilitas kredit harus diajukan dan dimintakan persetujuan kepada Komite Kredit/Komite Kredit Restrukturisasi sesuai limit kewenangan dengan menginformasikan kondisi tersebut.

Pelaksanaan Tugas *Credit Committee* Tahun 2023

Pada tahun 2023, Credit *Committee* telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 3.219 keputusan, terdiri dari segmen *Corporate* 541 keputusan, segmen Commercial 2.366 keputusan, segmen *Financial* Institution 76 keputusan, dan segmen Kelembagaan 42 keputusan dan SAM 194 keputusan.

Rencana Kerja *Credit Committee* Tahun 2024

Credit Committee telah menetapkan rencana kerja tahun 2024, antara lain merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business* Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (SERC)

Social & Environmental Responsibility Committee (SERC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri, melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri, dan membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

Struktur dan Keanggotaan *Social & Environmental Responsibility Committee*

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/049/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Social & Environmental Responsibility Committee*, struktur dan keanggotaan SERC adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota *Social & Environmental Responsibility Committee*

Ketua	Direktur Hubungan Kelembagaan
Sekretaris	*Group Head Corporate Secretary*
Sekretaris Pengganti	*Head of Government Project 3*
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Hubungan Kelembagaan 2. *Group Head Corporate* Secretary 3. *Group Head* Environment, Social & Governance 4. *Group Head* Strategy & *Performance Management* 5. *Group Head* Distribution Strategy 6. *Head* of Government *Project* 3
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau *Group Head Compliance* & AML-CFT atau pejabat *Compliance* & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	*Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

Profil *Social & Environmental Responsibility Committee*

Profil anggota *Social & Environmental Responsibility Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Rohan Hafas	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Teuku Ali Usman	Sekretaris/Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head Corporate* Secretary	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
Citra Amelya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head* Environment, Social & Governance	-
Antonius Kunta Widyatmaka	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head* Strategy & *Performance Management*	-
Trilaksito Singgih Hudanendra	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Group Head* Distribution Strategy	-
Hendrianto Setiawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	*Head* of Government *Project* 3	-

Piagam *Social & Environmental Responsibility Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Social & Environmental Responsibility Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/049/2022, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Social & Environmental Responsibility Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, SERC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri; dan
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

Pelaksanaan Tugas *Social & Environmental Responsibility Committee* Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya SERC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, SERC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	13 Desember 2023	Kinerja TJSL 2023	100%	
2	13 Desember 2023	Program Kerja TJSL 2024	100%	

Rencana Kerja *Social & Environmental Responsibility Committee* Tahun 2024

1. Penetapan *framework* penyaluran TJSL Bank Mandiri
2. Evaluasi Pelatihan & Sosialisasi TJSL kepada Pejabat Regional 1-12 Bank Mandiri
3. Evaluasi kinerja penyaluran TJSL Bank Mandiri Tahun 2023 dan 2024.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan regulasi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memastikan bahwa para pemegang saham, otoritas pasar modal, analis dan publik memperoleh seluruh informasi penting yang terkait dengan Perseroan secara tepat waktu, lengkap dan akurat, dan memastikan bahwa pengungkapan informasi serta komunikasi internal dan eksternal Perseroan dilakukan secara transparan. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank di mata para pemangku kepentingan secara luas.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Bank Mandiri telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja *Corporate Secretary Group* dan dipimpin oleh pejabat setingkat minimal *Senior Vice President.*

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020.
6. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan berada di bawah Supervisi Hubungan Kelembagaan, serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Perseroan mengangkat Rudi As Aturridha sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020 untuk periode jabatan 10 November 2020 hingga 30 November 2023. Pada tanggal 1 Desember 2023, Perseroan mengangkat Teuku Ali Usman sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023, Profil Rudi As Aturridha dan Teuku Ali Usman sebagai Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bawah ini:

SEKRETARIS PERUSAHAAN



Rudi As Aturridha
Sekretaris Perusahaan
Usia: 51 Tahun.
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 3

Riwayat Pendidikan
Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti (1996)

Pengalaman Kerja
- Department *Head Corporate Communication* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020)
- Area *Head* Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 – 2018)



Teuku Ali Usman
Sekretaris Perusahaan
Usia: 55 Tahun.
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 4

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi di Universitas Sriwijaya (1992)
- Magister di bidang Manajemen di A.I.P Perbanas Jakarta (2022)

Pengalaman Kerja
- *Group Head Government & Institutional* 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mei 2022 – Desember 2023)
- Regional CEO III/Jakarta 1 (Januari 2019 – Mei 2022)
- Regional CEO V/Jakarta 3 (September 2015 – Januari 2019)
- Regional CEO VI/Jawa 1 (Juli 2015 – September 2015)
- Pj. Regional CEO VI Bandung (Januari 2015 – Juli 2015)
- Pj. Regional *Manager* Medan (Maret 2014 – Januari 2015)
- Deputy Regional *Manager* 1 (September 2013 – Maret 2014)
- Pj. Deputy Regional *Manager* 1 (Januari 2013 – September 2013)
- Area *Manager* Surabaya Niaga (November 2011 – Januari 2013)
- Pj. Area *Manager* Surabaya Niaga (Januari 2011 – November 2011)
- Area *Manager* Bekasi Juanda (Januari 2006 – Januari 2011)
- *Officer* Wealth *Management* Consumer *Banking Treasury* (Maret 2005 – Januari 2006)
- SR *Treasury* Mark. *Officer Corporate Treasury Marketing* (Januari 2003 – Maret 2005)
- Professional Staff *Treasury Management* (Agustus 2001 – Januari 2003)
- *Officer* Global Market (Maret 2000 – Agustus 2001)
- *Officer* Global Market & Sales – *Relationship Manager Corporate* (Juni 1999 – Maret 2000)
- Pegawai Pimpinan Pengelolaan Dana KKJT *International Banking* UK. Institusi Fin. (Oktober 1995 – Juni 1999)

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Hubungan Kelembagaan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.

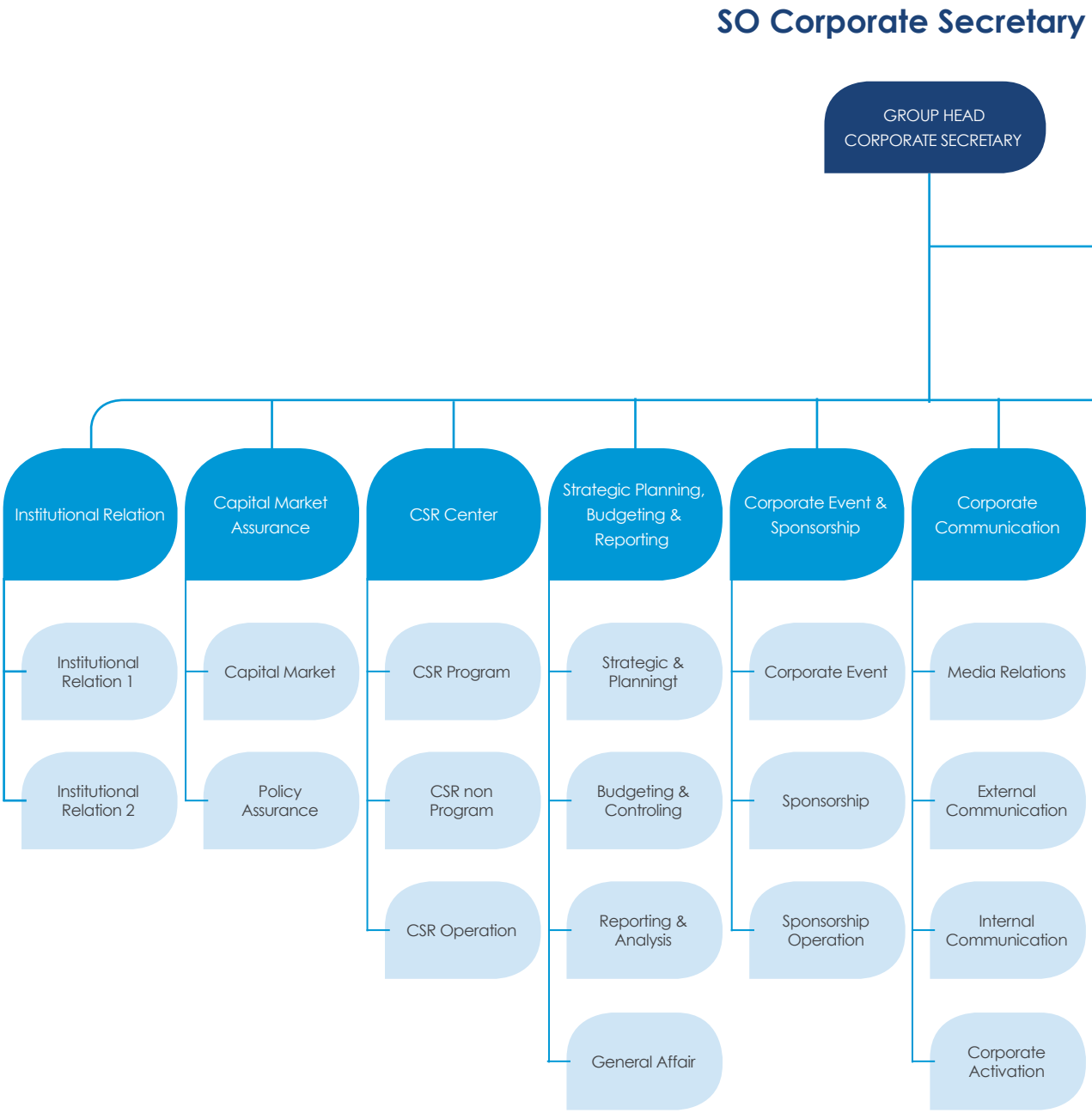

4. Aktivitas Pengamananan
5. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
6. Aktivitas Lain

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*.

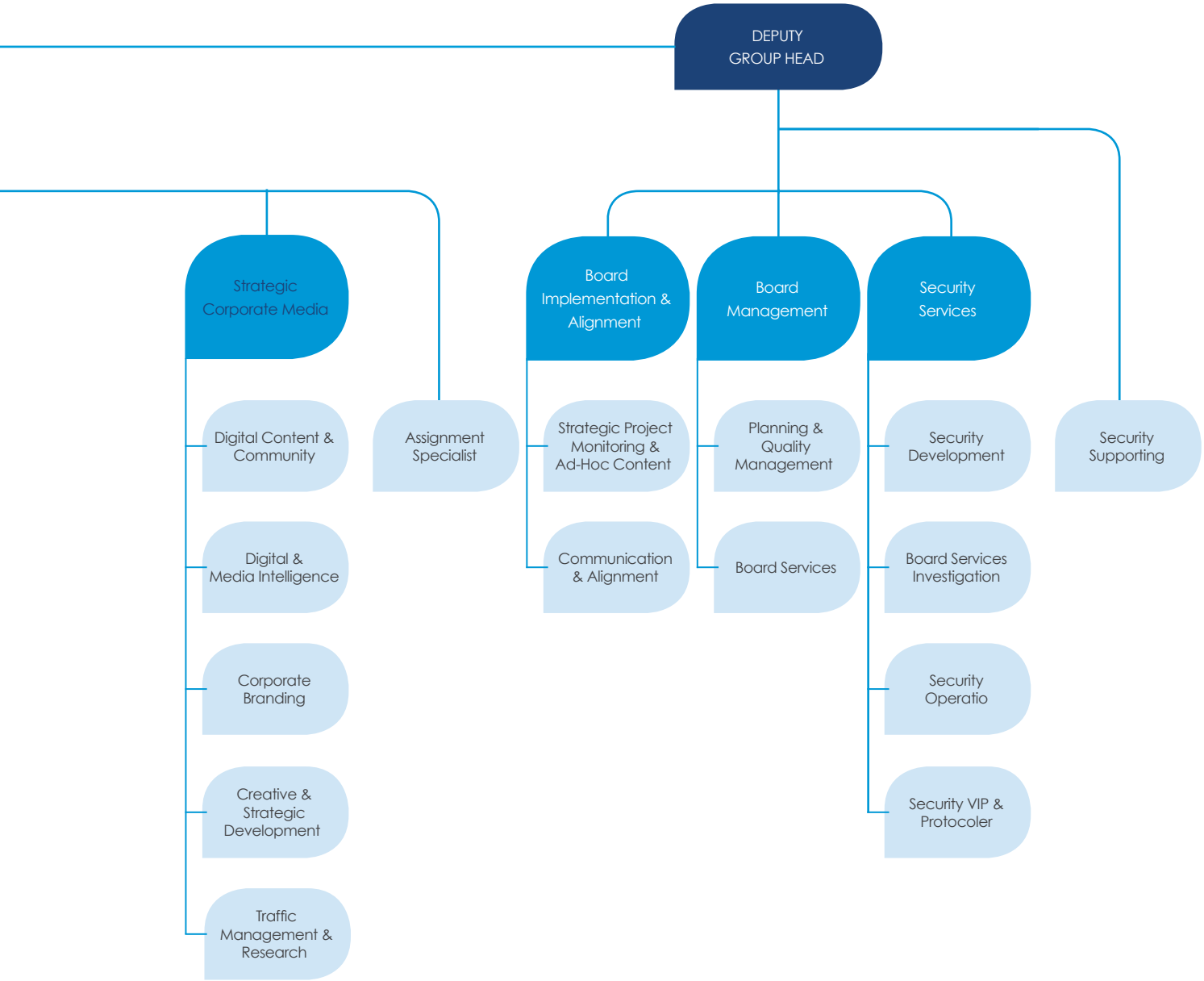

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
   a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
   b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
   c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
   d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
   e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
   f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
   a. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholders bank.
   b. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi.
   c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. *event*/acara/*sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
   d. Melakukan *monitoring* dan memperbaharui isi materi *brand guideline* dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan terkini.
   e. Menyusun dan melaksanakan strategi *marketing* komunikasi produk dan jasa berdasarkan peraturan internal yang berlaku.
3. Aktivitas Kesekretariatan
   a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi , Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris.
   b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
   c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
   d. Mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:
      i) Penyelenggaraan protokoler.
      ii) Pengelolaan administrasi, fasilitas dan tunjangan.
4. Aktivitas Pengamanan
   Melaksanakan kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan operasional Perseroan termasuk mengatur dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan pengamanan Bank.
5. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
   a. Menyusun perencanaan TJSL sebagai strategi danpetunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan TJSL
   b. Melaksanakan aktivitas TJSL dalam bentuk:
      i) Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (Program Pendanaan UMK); dan/atau
      ii) Pemberian Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan (Program Non Pendanaan UMK).

c. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Aktivitas TJSL Bank untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada Bank maupun kepada lingkungan.
d. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Aktivitas TJSL.

6. Aktivitas Lain
Melaksanakan Penugasan Khusus dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Di tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan, seminar dan *workshop* guna memperluas pengetahuan serta mengikuti perkembangan pasar modal terkini. Informasi detail pelatihan dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan, Bagian Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan di bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan dan pelaporan serta aktif berpartisipasi dalam seminar/sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2023

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 POJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. HBK. CSC/CMA.192/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penyampaian Buku Laporan Fungsi dan Tugas *Corporate Secretary* Group Tahun Buku 2022 dan Surat kepada Dewan Komisaris No. HBK.CSC/CMA.284/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2022.

Siaran Pers

Bank Mandiri secara proaktif menyediakan berita-berita terbaru terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk Siaran Pers. Berikut rincian Siaran Pers selama tahun 2023:

Siaran Pers Tahun 2023

No	Tanggal	Siaran Pers
1	3 Januari 2023	Dukung Pemerintah Kendalikan Pandemi, Kopra by Mandiri Salurkan Dana Klaim ke ribuan RS Rujukan
2	4 Januari 2023	Lewat Kopra by Mandiri, Bank Mandiri Perkuat Sektor Kesehatan
3	5 Januari 2023	Garap Segmen Retail, Bisnis Kartu Kredit Bank Mandiri Tumbuh Positif
4	6 Januari 2023	Bisnis Pengelolaan Keuangan Bakal Prospektif
5	6 Januari 2023	Pacu Inovasi Digital! Bank Mandiri Optimis Bisnis Kartu Kredit Tumbuh di 2023
6	9 Januari 2023	Hadir di Los Angeles, Bank Mandiri Kenalkan Layanan Livin' Around The Word
7	13 Januari 2023	Capai Target 2022, Penyaluran KUR Bank Mandiri Fokus ke Sektor Produktif
8	20 Januari 2023	Terapkan ESG, Bank Mandiri Kolaborasi dengan PT Juara Bike (SELIS) *Serahkan 36 Unit Kendaraan Listrik ke 11 Area Region III/Jakarta 1*
9	20 Januari 2023	Dukung Target *Net Zero Emission* Operasional, Bank Mandiri Kolaborasi dengan PT Juara Bike (SELIS)
10	20 Januari 2023	Bank Mandiri Fasilitasi Pemberian Apartemen Bandaraya
11	22 Januari 2023	Penyerahan Kartu Kredit Fengshui
12	24 Januari 2023	Hadirkan Peluang Investasi, Bank Mandiri Kembali Gelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 Hadirkan puluhan ribu peserta dan ribuan investor dengan total dana kelolaan US$ 12 Triliun
13	26 Januari 2023	Gandeng Bank Mandiri, JNTO Kembali Gelar Japan Travel Fair 2023
14	26 Januari 2023	Gairahkan Kembali Pariwisata, Bank Mandiri Ikut Ramaikan Japan Travel Fair (JTF) 2023
15	31 Januari 2023	Pecah Rekor ! Bank Mandiri Cetak Laba *All Time High* Rp 41,2 Triliun
16	31 Januari 2023	Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik, Bank Mandiri Rayakan Imlek 2574 bersama Nasabah Utama
17	1 Februari 2023	Optimis Tangkap Peluang, Bank Mandiri Dorong Keran Investasi Melalui Mandiri Investment Forum (MIF) 2023
18	2 Februari 2023	Ratusan Investor Global dan Domestik Komitmen Berinvestasi di IKN Nusantara *Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 turut mendorong hilirisasi SDA, Optimalisasi Energi Bersih dan Ekonomi Hijau*
19	08 Februari 2023	Perkuat Ekosistem Digital Tanah Air, Bank Mandiri Dukung Peresmian Solo Technopark

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
20	09 Februari 2023	Dukungan Pengembangan UMKM, Bank Mandiri Meresmikan Rumah BUMN Bogor
21	09 Februari 2023	Rumah BUMN Bank Mandiri untuk Pemberdayaan UMKM
22	09 Februari 2023	Genjot UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Optimalkan Rumah BUMN Relokasi Rumah BUMN Bogor
23	10 Februari 2023	Dukung Pemerintah, Bank Mandiri Komitmen Dorong Sektor Hilirisasi
24	13 Februari 2023	Dorong Bisnis KPR, Bank Mandiri Gelar *Find Your Property* (FYP) Fest 2023
25	14 Februari 2023	Rangkul Talenta Muda Berprestasi, Bank Mandiri Serahkan Penghargaan di Ajang *My Digital Academy*
26	15 Februari 2023	Bank Mandiri Dorong Sektor Hilirisasi
27	15 Februari 2023	Asyik! Bank Mandiri (BMRI) Hadirkan ATM Pecahan Rp10.000 di Sulawesi
28	17 Februari 2023	Tingkatkan Transaksi, Livin' by Mandiri Rilis Fitur Transfer ke Luar Negeri
29	17 Februari 2023	Bank Mandiri Proyeksikan Penyaluran KPR Bisa Tumbuh Dua Digit di 2023
30	17 Februari 2023	Bank Mandiri Dukung Jakarta Open Championship Pencak Silat 2023
31	18 Februari 2023	PLN Icon Plus-Bank Mandiri Optimalisasi Kerja Sama Channel Pembayaran
32	20 Februari 2023	Ekonom Bank Mandiri: Defisit Transaksi Berjalan Diprediksi 1,1% dari PDB Tahun 2023
33	22 Februari 2023	Bank Mandiri Bangun Sistem Pengolahan Beras Terpadu
34	23 Februari 2023	Bank Mandiri raih Indonesia's Best FX Bank 2023 versi Global Finance
35	26 Februari 2023	Bank Mandiri: Aplikasi Livin' by Mandiri Sudah Kembali Normal
36	28 Februari 2023	Bank Mandiri Bukukan Pertumbuhan DPK Valas 52% Jadi Rp 262,82 Triliun pada Tahun Lalu
37	28 Februari 2023	Ekonom Bank Mandiri Perkirakan Inflasi Februari di 0,13%
38	28 Februari 2023	Bank Mandiri Catatkan Pertumbuhan Kredit Sebesar 11,5% pada Januari
39	28 Februari 2023	Terapkan *Prudential Banking*, Kualitas Kredit Bank Mandiri Tumbuh Positif pada 2022
40	28 Februari 2023	Sejumlah Bank Catatkan Pertumbuhan Bisnis *Trade Finance*
41	28 Februari 2023	Begini Strategi Bank Mandiri Dorong Penyaluran Kredit UMKM di 2023
42	28 Februari 2023	Suku Bunga KPR Bank Mandiri Mulai 3,65 Persen Fix 3 Tahun
43	28 Februari 2023	Strategi Perbankan Ikut Berperan Menghadirkan SDM Bidang Digital
44	01 Maret 2023	Bebas Antre, Bank Mandiri Gandeng Wise Sediakan Layanan Transfer Uang ke Luar Negeri
45	01 Maret 2023	Bank Mandiri dukung berbagai ajang di Sirkuit Mandalika NTB
46	01 Maret 2023	Dukung Penyelenggaraan WSBK 2023, ITDC dan Bank Mandiri Tandatangani Perjanjian Kerjasama Naming Right Bale Mandiri
47	01 Maret 2023	Gandeng Wise, Bank Mandiri Targetkan Layani Transaksi Remitansi US$ 1 Juta Per Hari
48	02 Maret 2023	Bank Mandiri *Support Event* Internasional World Superbike Dan MotoGP 2023
49	02 Maret 2023	Penempatan Dana Bank Mandiri di SBN Capai Rp 283,65 Triliun pada Januari
50	02 Maret 2023	Bank Mandiri serahkan bantuan ke Posyandu dan grup rebana di Riau
51	05 Maret 2023	Bank Mandiri Catat Lebih dari 250 Juta Transaksi Gunakan BI Fast pada Tahun Lalu
52	06 Maret 2023	Pelan-Pelan Keluar Restrukturisasi Kredit
53	06 Maret 2023	Bank Mandiri sematkan fitur pemesanan SBN Ritel di aplikasi Livin'
54	07 Maret 2023	Bank Mandiri Optimistis Pemesanan SR018 Melalui Livin' Tembus Rp 4 Triliun
55	07 Maret 2023	Dorong Transaksi Digital Masyarakat, Bank Mandiri Gandeng 11 BPR
56	08 Maret 2023	Sisa Portofolio Kredit Restrukturisasi Bank Mandiri (BMRI) Rp35,9 T
57	09 Maret 2023	Gandeng Bank Mandiri, Lamudi.co.id Sosialisasi Beri Kemudahan Pada Aplikasi KPR Online
58	09 Maret 2023	Sempat Tertunda, Mandiri ITB Ultra Marathon 2022 Siap Digelar
59	09 Maret 2023	Sambut Musim Libur, Bank Mandiri Gelar Travel Fair 2023 di PVJ
60	11 Maret 2023	Siap-siap, sinergi PLN-Himbarab akal permudah masyarakat miliki Motlis
61	11 Maret 2023	Hari Musik Nasional, Indah Kurnia Geber Mobil Caravan di Livin Land by Mandiri
62	14 Maret 2023	Bank Mandiri Mau *Stock Split* Saham 1:2, Harganya Jadi Lebih Murah
63	14 Maret 2023	Jangan Panik! Bank Raksasa AS Kolaps, RI Aman
64	14 Maret 2023	Tok! RUPST Bank Mandiri Sepakat Tebar Dividen Rp 24,7 Triliun
65	14 Maret 2023	Dorong Pertumbuhan Organik, Bank Mandiri Kaji Emisi Green Bond
66	14 Maret 2023	Bank Mandiri Tebar Dividen Rp 24,7 T
67	14 Maret 2023	Digitalisasi Topang Kinerja Bank Mandiri
68	14 Maret 2023	Setoran Bank Mandiri ke Negara Naik 46,7%
69	15 Maret 2023	*Stock Split* 1:2, Bos Mandiri Harap Tingkatkan Likuiditas Pasar Saham di BEI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
70	15 Maret 2023	Dukung Transisi Energi, Pembiayaan Hijau Bank Mandiri Capai Rp106 Triliun
71	15 Maret 2023	Strategi Bank Mandiri Jaga NIM Tetap Stabil
72	15 Maret 2023	Bos Bank Mandiri (BMRI) Beberkan Rencana Aksi Korporasi, Merger dan Akuisisi Masuk Radar
73	16 Maret 2023	Greeneration Mengolah Sampah Menjadi Biogas
74	21 Maret 2023	Kementerian ATR/BPN bersama Bank Mandiri meluncurkan e-PNBP
75	21 Maret 2023	Jelang *Stock Split*, Saham Bank Mandiri (BMRI) Melesat 5%
76	21 Maret 2023	GOTF Kembali Digelar, Garuda Beri Diskon Sampai 80 Persen
77	21 Maret 2023	Olahraga Semakin Mudah dengan Mandiri Golf Kredit Card
78	22 Maret 2023	Bank Mandiri (BMRI) Salurkan Kredit Kendaraan Listrik Rp316 Miliar hingga Februari 2023
79	23 Maret 2023	Bank Mandiri (BMRI) Masuki Periode Cum Dividen Rp24,7 Triliun, Simak Tanggalnya!
80	24 Maret 2023	Laju Ekspansi Kredit Semakin Kencang
81	24 Maret 2023	Kementerian ATR/BPN Gandeng Mandiri Tingkatkan PNBP
82	24 Maret 2023	Efek The Fed Kerek Suku Bunga, Pasar Keuangan RI Kebal?
83	24 Maret 2023	Hari Ini Cum Date Dividen BMRI, Sahamnya Melesat 3%
84	25 Maret 2023	Februari, AUM Bank Mandiri Tumbuh 13,4%
85	25 Maret 2023	Baznas: Bisa Jadi Jaring Pengaman Sosial, Potensi Zakat di Tanah Air Rp 300 Triliun
86	25 Maret 2023	Top! Bank Mandiri Bangun Sistem Anti Diskriminasi Gender
87	26 Maret 2023	Pendistribusian dan Pendayagunaan MAI Foundation Meningkat
88	27 Maret 2023	Ini Pesan Penting Wadirut Mandiri Untuk Wanita Karier
89	28 Maret 2023	Dorong Implementasi Bisnis Berbasis ESG, Bank Mandiri Pasang 556 Unit Panel Surya
90	29 Maret 2023	Rekor ! Global Bond Bank Mandiri US$ 300 juta oversubscribed 10,3 kali
91	30 Maret 2023	Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Jelang Idul Fitri 1444 H, Bank Mandiri Siapkan Rp 49,6 Triliun
92	31 Maret 2023	Optimalkan Channel Digital, Bank Mandiri Gandeng Prudential Indonesia Percepat Pembayaran Klaim
93	05 April 2023	Stock Split, Bank Mandiri Tingkatkan Likuiditas Saham BMRI
94	05 April 2023	Ramadan dan Idulfitri akan Dongkrak Transaksi QRIS Bank Mandiri (BMRI)
95	06 April 2023	Mandiri: Kolapsnya SVB tak terlalu berdampak tapi tetap harus waspada
96	06 April 2023	Bank Mandiri Siapkan Infrastuktur IT Hadapi Peningkatan Transaksi Jelang Lebaran 2023
97	07 April 2023	Bank Mandiri (BMRI) Catat Transaksi Digital Tumbuh Dobel Digit pada Kuartal I/2023
98	09 April 2023	BI-Fast Telah Mengubah Peta Transaksi Sistem Pembayaran
99	10 April 2023	Tingkatkan Aksesibilitas Kendaraan Listrik Bagi Nasabah Bank Mandiri melalui Penjualan Motor Listrik dan Voucher Volta pada Aplikasi Livin' By Mandiri
100	12 April 2023	Bank Mandiri Tekan NPL Sektor Pengembang Properti Jadi 0,01%
101	17 April 2023	Dukung UMKM Go Digital, Bank Mandiri Teken Kerjasama Dengan Batumbu
102	17 April 2023	Mudik Gratis Bank Mandiri Antar 7.000 Pemudik
103	17 April 2023	Tayang Serentak di Bioskop pada 19 April 2023, Jin & Jun The Movie Hadirkan Tontonan Nostalgia untuk Keluarga
104	18 April 2023	Bank Mandiri Torehkan Kinerja Impresif di Kuartal I 2023
105	18 April 2023	Bank Mandiri salurkan KUR hingga Rp6 triliun di kuartal I 2023
106	28 April 2023	Patuhi Peraturan Kominfo, Bank Mandiri Perbaharui Nomor SMS Resmi
107	28 April 2023	Bank Mandiri Proyeksikan Investasi Tumbuh hingga 6% di 2023
108	02 Mei 2023	Konsisten Lahirkan SDM Berkualitas, Bank Mandiri Puncaki Peringkat LinkedIn Top Companies 2023
109	05 Mei 2023	Gandeng Bank Mandiri, Dwidayatour Carnival 2023 Tebar Diskon Travel Pakai Mandiri Kartu Kredit
110	10 Mei 2023	Dorong Bisnis KPR, Bank Mandiri Kolaborasi dengan Agung Podomoro Land Gelar Find Your Property with Easy Pay 2023
111	11 Mei 2023	Bank Mandiri Incar Bisnis Kartu Kredit Tumbuh 40%
112	11 Mei 2023	Bank Mandiri Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 150% pada Tahun Ini
113	16 Mei 2023	Rajin Inovasi, Bank Mandiri Tambah Fitur Buka Rekening Tambahan di Livin'
114	17 Mei 2023	Nilai Transaksi Livin' Bank Mandiri Tumbuh 68%
115	22 Mei 2023	Pacu Transaksi Digital, Bank Mandiri Layani Penjualan Tiket Formula E 2023 di Livin' Sukha
116	23 Mei 2023	Komitmen Bangun Bisnis Berkelanjutan, Bank Mandiri Incar Rp5 Triliun dari Penerbitan Green Bond
117	24 Mei 2023	Respek Atas Capaian Medali Emas Sea Games, Bank Mandiri Group Berikan Apresiasi Pembinaan buat Timnas Basket Putri
118	26 Mei 2023	Sukses Catat Kinerja Apik, Bank Mandiri Raih Pengakuan Bank Terbaik dari Majalah Investor *Jadi Bank Terbaik di Indonesia Kategori KBMI 4*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
119	30 Mei 2023	Konsisten Dorong Aspek ESG, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan Volta, MCAS Group *Hadirkan layanan pembelian motor listrik bagi masyarakat layak subsidi*
120	03 Juni 2023	Ramai Utang Jumbo BUMN Karya, Bank Mandiri (BMRI) Pastikan Pencadangan Terjaga
121	04 Juni 2023	Rasio Kredit Berisiko di Sejumlah Bank Menurun, Ini Penopangnya
122	08 Juni 2023	Komitmen Terapkan ESG, Bank Mandiri Perbesar Portofolio Hijau
123	09 Juni 2023	Bank Mandiri: Kesetaraan gender harus dijaga dalam jajaran eksekutif
124	13 Juni 2023	Seleksi Ketat Himbara untuk Kredit BUMN Karya
125	14 Juni 2023	Bikin Takjub Sekaligus Bangga! Bank Mandiri Sabet Gelar Bank BUMN Nomor Wahid versi Forbes
126	15 Juni 2023	Bank Mandiri Edukasi Pengelolaan Sampah & Kampanye Kebersihan di FIFA Match Day
127	15 Juni 2023	Promosikan ESG dan Ekowisata, Bank Mandiri Kembali Gelar Mandiri Jogja Marathon 2023
128	18 Juni 2023	Mandiri Jogja Marathon 2023 Meriah, Pelari Kenya Dominasi Podium di Kategori Marathon Open
129	20 Juni 2023	Bank Mandiri Genjot Kepemilikan Kendaraan Listrik Melalui Kopra dan Livin' *Gandeng Multifinance Entitas Anak tebar promo menarik*
130	23 Juni 2023	Oversubscribed 3,74 kali, Green Bond Bank Mandiri Himpun Dana Sebesar Rp 5 Triliun
131	27 Juni 2023	Jadwal Operasional Bank Mandiri Selama Cuti Bersama Idul Adha 2023
132	28 Juni 2023	Sstt.. ! Bank Mandiri Boyong 10 Penghargaan dari FinanceAsia *Jadi Terbaik dalam kategori Sustainable Bank dan ESG*
133	29 Juni 2023	Usung Semangat Berbagi untuk Negeri, Bank Mandiri Salurkan 760 Hewan Kurban di Idul Adha 1444 H
134	30 Juni 2023	Dua Olympian Indonesia Kembali Gelar Oceanman Asian Championship Bali 2023
135	03 Juli 2023	Bangga ! Bank Mandiri Salurkan Bonus Atlet dan Pelatih ASEAN Para Games 2023
136	03 Juli 2023	Upaya Bank Mandiri Hadapi Ketidakpastian Global Sekaligus Dorong Aspek Keberlanjutan
137	04 Juli 2023	Laba Bank Mandiri (BMRI) Tembus Rp18,44 Triliun per Mei 2023
138	04 Juli 2023	Bank Mandiri Buka Suara soal Premi Program Restrukturisasi Perbankan
139	05 Juli 2023	Injak Gas Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Salurkan Fasilitas Channeling Rp 1 Triliun ke Kredivo
140	08 Juli 2023	We The Fest 2023 Kembali Hadir, Gigi Bakal Sajikan Mini Konser
141	09 Juli 2023	Tangkap Potensi Transaksi Digital, Bank Mandiri Kenalkan Livin' Around The World di Hong Kong
142	09 Juli 2023	Mandiri Sahabatku Lahirkan Wirausaha Potensial dari Pekerja Migran Indonesia *Sebanyak 17.000 PMI telah mengikuti Mandiri Sahabatku di enam negara*
143	10 Juli 2023	Lengkapi Kebutuhan Transaksi PMI, Bank Mandiri Perkuat Layanan Remitansi
144	12 Juli 2023	Getol Garap ESG, Bank Mandiri Luncurkan Digital Carbon Tracking dan Kartu Plastik Daur Ulang untuk NZE 2060
145	18 Juli 2023	Tangkap Potensi Ekosistem Pendidikan, Bank Mandiri Optimalkan Kolaborasi dengan Ruang Guru
146	21 Juli 2023	Konsisten Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Puncaki Pangsa Pasar Sindikasi Indonesia
147	25 Juli 2023	Sah Jadi Bank Terbaik! Bank Mandiri Sabet Gelar Best Bank in Indonesia di 2023 versi Euromoney
148	25 Juli 2023	Hadirkan Solusi Transaksi Finansial Nasabah, Bank Mandiri Raih Dua Penghargaan ABF *Retail Banking* Awards 2023
149	27 Juli 2023	Gandeng Indonesia Diaspora Network Global, Bank Mandiri Dorong Ekonomi Inklusif Lewat Digital
150	28 Juli 2023	Jawab Kebutuhan Nasabah Korporasi, Bank Mandiri Perkuat Layanan Trade Finance dan Cash *Management*
151	31 Juli 2023	Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Kucurkan Kredit Mencapai Rp 1.272,07 triliun hingga Kuartal II 2023
152	01 Agustus 2023	Bertabur Bintang, Turnamen Golf Mandiri Indonesia Open 2023 Resmi Digelar
153	04 Agustus 2023	Dorong Investasi ke Tanah Air, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan BKPM
154	09 Agustus 2023	Hadirkan Solusi Keuangan, Bank Mandiri Teken MoU dengan Otorita Ibu Kota Negara
155	10 Agustus 2023	Penuhi Kebutuhan Investasi Nasabah, Bank Mandiri Pasarkan Reksa Dana dari Trimegah *Asset Management*
156	10 Agustus 2023	Wajib Catat ! Beli Wuling di Livin' by Mandiri Dapat Potongan Uang Muka Rp 5 juta
157	11 Agustus 2023	Makin Lengkap, Bank Mandiri Layani Penjualan Tiket Majestic Fast Ferry Batam-Singapura via Livin' Sukha *Tanam 2.000 Bibit Pohon Kayu Merah di Kawasan Ecoedupark Panbil Nature Reserve Batam*
158	12 Agustus 2023	Bank Mandiri Mendorong untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Finansial para Diaspora Indonesia *Sebanyak 17.000 PMI telah mengikuti Mandiri Sahabatku di enam negara sejak 2011*
159	15 Agustus 2023	Rayakan Semangat Kemerdekaan, Bank Mandiri Dorong Peningkatan Kesehatan di Jayapura
160	16 Agustus 2023	Demi KEJAR OJK, Bank Mandiri Gelorakan Semangat Menabung ke 15.000 Pelajar se-Indonesia
161	18 Agustus 2023	Rayakan Semangat Kemerdekaan, Bank Mandiri Dorong Peningkatan Kesehatan di Jayapura
162	18 Agustus 2023	Respek, Bank Mandiri Group Berikan Apresiasi buat Anggota Paskibraka Tingkat Pusat
163	20 Agustus 2023	Perbanyak Transaksi di Luar Negeri, Bank Mandiri Kenalkan Fitur Livin' Around the World di 3 Negara
164	22 Agustus 2023	Fundamental Solid, Ekonom Bank Mandiri Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5,04% di 2023
165	24 Agustus 2023	Sambangi Universitas Brawijaya, Srikandi BUMN Inspirasi 1.200 Mahasiswa Bangun Negeri

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
166	28 Agustus 2023	Gelorakan Semangat Wirausaha Jelang HUT-25, Bank Mandiri Gelar Entrepreneur Expo
167	29 Agustus 2023	Berkah Hemat Energi, Gedung Plaza Mandiri Jadi Retrofitted Building Terbaik se-ASEAN
168	01 September 2023	Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)
169	04 September 2023	Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Beberkan Promo Harpelnas 2023
170	06 September 2023	Bank Mandiri Bidik Investasi Pembiayaan Hijau di AIPF 2023
171	07 September 2023	Joss! Bank Mandiri Sabet Lima Penghargaan Alpha Southeast Asia Awards 2023
172	12 September 2023	25 Tahun Komitmen Bank Mandiri Menyemai Kebaikan Lewat CSR
173	13 September 2023	Dukung Sektor Penyeberangan, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama Layanan Perbankan bagi ASDP
174	14 September 2023	Incar Gelar SuperApp Nomor 1 di Bidang Finansial dan Lifestyle, Bank Mandiri Galakkan Program #SuperAPPSuperLengkAPP di Livin' Fest
175	18 September 2023	Dorong Pemerataan Pembangunan, Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 267,92 Triliun
176	19 September 2023	Fitur Super Lengkap! Transfer Valas di Livin' by Mandiri Makin Diminati
177	20 September 2023	Dukung UMKM Go Digital, Bank Mandiri Menandatangani Kerja Sama Dengan FishLog
178	20 September 2023	Bank Mandiri Targetkan Salurkan Pembiayaan Senilai Rp 50 Miliar kepada UMKM Perinakan di Ekosistem FishLog
179	21 September 2023	Pacu Transaksi *Wholesale Banking*, Bank Mandiri Perluas Layanan Kopra by Mandiri
180	25 September 2023	Genjot Inklusi Keuangan Digital, Bank Mandiri Gandeng Pasar Jaya dan Yokee Digitalisasi Pasar di Jakarta *Dorong Sinergi BUMN dan BUMN Untuk Perluas Ekosistem Digital*
181	26 September 2023	Sukses Dorong Transformasi Digital, Bank Mandiri Kembali Sabet Penghargaan Asiamoney 2023
182	27 September 2023	Genjot Minat Berwirausaha di Tanah Air, Bank Mandiri Kembali Gelar Wirausaha Muda Mandiri 2023
183	01 Oktober 2023	Buruan Serbu ! Bank Mandiri Tebar Promo Rayakan HUT Ke-25 Sepanjang Oktober 2023
184	02 Oktober 2023	Menuju Masa Depan ! Bank Mandiri Orbitkan Kontribusi Untuk Negeri di HUT Ke-25
185	03 Oktober 2023	Melaju untuk Menuju Masa Depan, Bank Mandiri Menjadi Pionir Perdagangan Bursa Karbon
186	04 Oktober 2023	Permudah Transaksi Masyarakat, Bank Mandiri dan Indomaret Luncurkan e-Money Point Co*ffee*
187	05 Oktober 2023	Melesat Menuju Masa Depan, Bank Mandiri Injak Gas Transaksi QRIS dan BI-Fast
188	06 Oktober 2023	Memeriahkan HUT ke-25, Bank Mandiri Gelar Dwidayatour Carnival Bandung
189	07 Oktober 2023	Bombastis ! Rayakan HUT ke-25 Bank Mandiri Gelar Mandiri Karnaval 2023 *Hadirkan puluhan musisi dan ratusan merchant dengan program promo serba 25*
190	09 Oktober 2023	Totalitas Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Sematkan Fitur Lifestyle Baru di Livin' Sukha
191	10 Oktober 2023	Easy Peasy ! Bank Mandiri Luncurkan Kopra Beyond Borders untuk Transaksi di Luar Negeri
192	12 Oktober 2023	Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Jalin Kerja Sama dengan Kwarnas Gerakan Pramuka
193	12 Oktober 2023	Pacu Pertumbuhan UMKM, Bank Mandiri Injak Gas Penyaluran KUR *Optimalkan Potensi Bisnis UMKM di Wilayah*
194	16 Oktober 2023	Perluas Layanan di Sektor Pendidikan, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Universitas Indonesia
195	25 Oktober 2023	Dukung Nasabah bertransisi menuju Low Carbon Ekonomi, Bank Mandiri Salurkan *Sustainability Linked Loan ke DSNG*
196	27 Oktober 2023	Perluas Akses Pasar, Bank Mandiri Gelar Bazaar UMKM Sarinah 2023
197	28 Oktober 2023	Luncurkan BUMN School of Excellence, Kementerian BUMN Akselerasi Kompetensi dan Profesionalisme Insan BUMN
198	28 Oktober 2023	Lewat Livin' Pasar, Bank Mandiri Perluas Akseptasi Pembayaran Digital UMKM di Jayapura
199	28 Oktober 2023	UMKM Naik Kelas Bersama Bank Mandiri Lewat Program Livin' Pasar
200	28 Oktober 2023	Menuju Masa Depan, Bank Mandiri Digitalisasikan Sistem Pembayaran UMKM di Makassar
201	30 Oktober 2023	Fenomenal ! Bank Mandiri Catatkan Total Aset di Kuartal III 2023 Tembus Rp 2.007 Triliun, Rekor Baru di Indonesia
202	31 Oktober 2023	Cetak Talenta Digital Tanah Air, Bank Mandiri Kembali Gelar My Digital Academy Batch 2
203	01 November 2023	Dukung Nasabah bertransisi menuju Low Carbon Ekonomi, Bank Mandiri Salurkan Sustainability Linked Loan ke DSNG
204	03 November 2023	Rasakan Sensasi Kopi Nusantara, Bank Mandiri Gelar Jacoweek 2023
205	13 November 2023	Makin Digital ! Bank Mandiri Luncurkan Kartu Kredit Virtual Livin' Everyday *Sasar Mahasiswa pada ajang Jazz Goes To Campus di UI*
206	14 November 2023	Bank Mandiri dan Jaringan PRIMA Gelar UMKM Merah Putih 2023: Inovasi Digital untuk Kemajuan UMKM *targetkan 2.000 UMKM Go Digital baru*
207	17 November 2023	Transfer Valas Makin Mulus, Bank Mandiri Perkuat Fitur Transaksi di Livin' by Mandiri
208	17 November 2023	Fokus Penuhi Kebutuhan Nasabah, Bank Mandiri Sabet Penghargaan *Marketing* Company of the Year 2023 versi AMF
209	21 November 2023	Tingkatkan Inklusivitas, Bank Mandiri Bagikan 10.000 Rekening Tabungan kepada Penyandang Disabilitas
210	22 November 2023	Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, Bank Mandiri Bersinergi dengan Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML)
211	27 November 2023	Konsisten Catat Kinerja Positif, Bank Mandiri Optimis Pertumbuhan Berlanjut Sampai Akhir 2023
212	27 November 2023	Konsisten Jaga Transparansi, Bank Mandiri Raih Juara 1 Perusahaan Go Publik Keuangan Annual Report Award (ARA) 2022

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
213	28 November 2023	Tingkatkan Minat Anak Muda terhadap Dunia Bisnis Digital, Bank Mandiri Bawakan Program Edukasi Bertema *Financial* Technology with Venture *Capital*
214	28 November 2023	Genjot Industri Pariwisata, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Taman Safari Indonesia Group
215	30 November 2023	Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia
216	30 November 2023	Program TJSL Bank Mandiri, Sebarkan Manfaat untuk Masyarakat dan UMKM
217	01 Desember 2023	Bank Mandiri Jadi Mitra Bank Terbaik BI dalam Pengembangan Pasar Uang Valas dan Rupiah
218	05 Desember 2023	Dukung Kedaulatan NKRI, Bank Mandiri Biayai Pembangunan Dua Kapal AL Senilai Rp 66 Miliar
219	05 Desember 2023	Konsisten Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Jadi Mitra Kreditur/Investor Terbaik Kementerian BUMN
220	05 Desember 2023	Ditjen Imigrasi Gandeng Bank Mandiri Kembangkan Layanan Keimigrasian via Livin' by Mandiri *Siapkan Program Golden Visa bagi WNA Tinggal di Indonesia*
221	07 Desember 2023	Gelar MSF 2023, Bank Mandiri Ajak Pelaku Usaha Gencarkan Aksi untuk Ekonomi Berkelanjutan
222	11 Desember 2023	Super Cepat ! Permudah Transaksi, Bank Mandiri Hadirkan Fitur Tap To Pay di Livin'
223	13 Desember 2023	Inovatif ! Bank Mandiri Luncurkan Livin' Paylater, Solusi Transaksi Praktis Nasabah
224	14 Desember 2023	Penuhi Kebutuhan Nasabah Pada Musim Libur Nataru, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai secara net sebesar Rp 23,2 Triliun
225	15 Desember 2023	Super Cepat! Permudah Transaksi, Bank Mandiri Hadirkan Fitur Tap To Pay di Livin'
226	18 Desember 2023	Dukung Pasar Surat Berharga, Bank Mandiri Sabet Empat Penghargaan dari Kementerian Keuangan
227	19 Desember 2023	Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Pamer Layanan Mandiri Contactless
228	19 Desember 2023	Bank Mandiri Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 5,06% di 2024
229	21 Desember 2023	Bank Mandiri dan OttoDigital Berkolaborasi Memperluas Akses Pembiayaan bagi UMKM
230	27 Desember 2023	Kebut Pembangunan Infrastruktur, Bank Mandiri Salurkan Kredit kepada Supplier/Subkontraktor JMTM Rp 100 Miliar
231	29 Desember 2023	Tegak Lurus Dorong Ekonomi ! Bank Mandiri Raih Posisi Teratas dalam Kredit Sindikasi

Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahunnya. Berikut buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2023:

No	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1	515	Januari	Menginspirasi dengan Karya dan Kontribusi Nyata
2	516	Februari	Kolaborasi Mendukung Keberlanjutan (Komitmen Percepatan Pertumbuhan Keberlanjutan dengan Prinsip ESG)
3	517	Maret	Kebersamaan dan Kebahagiaan di Hari Kemenangan
4	518	April	Menggerakkan Indonesia Maju
5	519	Mei	Perempuan Maju, Indonesia Tangguh
6	520	Juni	Sinergi Keamanan Siber Bersama Mewujudkan Solusi Keuangan yang Aman dan Nyaman
7	521	Juli	Lingkungan Sehat, Produktivitas Kuat (Pemantapan Prinsip ESG)
8	522	Agustus	Terus Melaju Untuk Indonesia Maju
9	523	September	3 Investasi Terbaik : Kesehatan Tubuh, Mental, dan Finansial
10	524	Oktober	Menuju Masa Depan
11	525	November	Mencatat Prestasi : Menembus Nilai Aset Tertinggi
12	526	Desember	Bingkai Akhir Tahun dengan Prestasi dan Sukacita

Transparansi Penyampaian Laporan

Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Tahunan	OJK, BEI, Kementerian Perdagangan	Tahunan	1
2	Laporan Keberlanjutan	OJK, BEI	Tahunan	1

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
3	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
4	Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, & Wali Amanat	Tahunan	1
5	Laporan Komposisi Kepemilikan Saham/Registrasi Pemegang Efek	OJK, BEI	Bulanan	12
6	Laporan Hutang Valuta Asing	OJK, BEI	Bulanan	12
7	Laporan Hasil *Rating*/Pemeringkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1
8	Laporan Kinerja Perusahaan	Kementerian BUMN	Triwulanan	4
9	Laporan Kinerja Perusahaan	Kementerian BUMN	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
1	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu/Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Januari – Desember 2023	OJK & BEI	42
2	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Pemaparan Kinerja Perseroan	31 Januari 2023, 18 April 2023, 31 Juli 2023, 31 Oktober 2023	OJK & BEI	4
3	Laporan Informasi atau Fakta Material Pemecahan Saham	Februari 2023	OJK & BEI	1
4	Keterbukaan Informasi terkait Rencana Pemecahan Saham	3 Februari 2023	OJK & BEI	1
5	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan	Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
6	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan	3 Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
7	Pemanggilan RUPS Tahunan	20 Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
8	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan	20 Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
9	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	16 Maret 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
10	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Dividen Tunai	17 Maret 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
11	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	17 Maret 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
12	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	24 Maret 2023	OJK	1
13	Keterbukaan Informasi terkait Pelaksanaan Pemecahan Saham	29 Maret 2023	OJK & BEI	1
14	Pengumuman Harga Teoretis Saham	3 April 2023	OJK, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), KSEI, Indonesian *Capital* Market Electronic Library	1
15	Pengumuman Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai Saham Perseroan	3 April 2023	OJK, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), KSEI, Indonesian *Capital* Market Electronic Library	1
16	Laporan Informasi atau Fakta Material Penerbitan Surat Utang dalam Mata Uang USD	6 April 2023	OJK & BEI	1
17	Perubahan Komite Audit	12 April 2023, 12 September 2023	OJK & BEI	2
18	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Kesiapan Dana untuk Pembayaran Medium Term Notes Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018	22 Juni 2023	OJK & BEI	1
19	Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa	22 Juni 2023	OJK & BEI	1
20	Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan/Pembayaran Pokok Medium Term Notes Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018	31 Juli 2023	OJK & BEI	1
21	Laporan Informasi atau Fakta Material Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2018	30 Agustus 2023	OJK & BEI	1
22	Laporan Informasi atau Fakta Material Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	5 September 2023	OJK & BEI	1
23	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	16 September 2023	OJK, BEI, & Wali Amanat	1

SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
24	Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan/Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2018	21 September 2023	OJK & BEI	1
25	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek Bersifat Utang da/atau SUKUK	2 Oktober 2023	OJK & BEI	1
26	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengalihan Saham pada PT AXA Insurance Indonesa	4 Oktober 2023	OJK & BEI	1
27	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan	10 November 2023	OJK & BEI	1
28	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan	22 November 2023	OJK & BEI	1
29	Perubahan Sekretaris Perusahaan	28 November 2023, 1 Desember 2023	OJK & BEI	2
30	Penyampaian Laporan Hasil Public Expose Tahunan	30 November 2023	OJK & BEI	1

HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor merupakan salah satu organ penghubung antara Perseroan dengan investor maupun potensi investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan dan menjembatani komunikasi antara manajemen Perseroan dan investor. Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Secara proaktif unit kerja Hubungan Investor melakukan komunikasi dengan para investor dan analis tentang Perseroan. Sarana komunikasi dan penyampaian informasi ini dapat dalam bentuk pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *road show*, siaran pers, *newsletter* atau laporan-laporan lainnya, serta berpartisipasi pada konferensi dan forum pertemuan investor baik domestik maupun internasional.

Perseroan membentuk unit kerja Hubungan Investor untuk menyediakan akses yang memadai guna memberikan informasi mengenai kinerja Perusahaan bagi komunitas investasi dan para pemangku kepentingan.

Hubungan Investor merupakan salah satu organ penghubung antara Perseroan dengan investor maupun potensi investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan dan menjembatani komunikasi antara manajemen Perseroan dan investor.

Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Secara proaktif unit kerja Hubungan Investor melakukan komunikasi dengan para investor dan analis tentang Perseroan. Sarana komunikasi dan penyampaian informasi ini dapat dalam bentuk pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *road show*, siaran pers, *newsletter* atau laporan-laporan lainnya, serta berpartisipasi pada konferensi dan forum pertemuan investor baik domestik maupun internasional.

Adapun tugas dan tanggung jawab Investor *Relations* meliputi:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers, buy-side & sell-side Analysts, Stock Brokers, Investments Bankers,* dan *Rating Agencies*.
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri melalui beberapa sarana antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call, Investor Conference, Teleconference, Web-Casts, IR Website, Broker Sponsorship, Road Show & Non-Deal Road Show both Local* maupun *International.*
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feed*back strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.

HUBUNGAN INVESTOR

5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan *(disclosure)* informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Adapun kontak untuk Investor *Relations* Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Investor *Relations* Group

Menara Mandiri II Lt. 26,
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Indonesia
Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207
Email: ir@bankmandiri.co.id
Website: https://www.bankmandiri.co.id/web/ir

Profil *Group Head* Investor *Relations*



Laurensius Teiseran
Group Head Investor Relations
Usia: 36 tahun.
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Pengalaman Kerja
- *Group Head* Investor *Relations* di Bank Mandiri (2021-present)
- Senior Vice President di CGS CIMB Securities (2019-2021)
- Vice President di Credit Suisse Securities (2014-2019)
- *Equity Research Analyst* di Bahana Sekuritas (2013-2014)
- *Research Asisstant* di United Nation Development Program (2012-2013)

Kegiatan Hubungan Investor 2023

Untuk mengkomunikasikan strategi dan kegiatan bisnis Perseroan kepada pemangku kepentingan, Hubungan Investor aktif menyebarluaskan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada komunitas investasi sehingga para investor dapat mengikuti perkembangan strategi, kinerja, dan kegiatan bisnis utama Perseroan. Penyebarluasan informasi secara transparan dan merata adalah salah satu prinsip pengungkapan informasi Perseroan.

Hubungan Investor secara aktif berkomunikasi dengan para investor dan pemegang saham serta menyelenggarakan *road show* dan pertemuan investor baik di tingkat lokal maupun internasional. Hubungan Investor secara rutin melakukan penyebarluasan informasi melalui siaran pers, presentasi, penyelenggaraan paparan publik, serta pertemuan analis dan investor yang dilakukan secara berkala.

Berikut rincian aktivitas Hubungan Investor selama tahun 2023:

Aktivitas Hubungan Investor

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi
1	*Investor Conference*	18 kali	*Conferences related to the Company's performance updates*	Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Dubai, Australia, United Kingdom, United States of America
2	*Virtual Investor Conference*	6 kali	*Virtual conference related to the Company's performance updates*	Jakarta
3	*Non-Deal Roadshow*	8 kali	*Meeting at the Shareholders' office location for the Company's performance updates*	Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Japan, United States of America, United Kingdom, Europe
4	*Virtual Non-Deal Roadshow*	0 kali	*Virtual meeting with Shareholders for the Company's performance updates*	Jakarta
5	*Adhoc Investor Meeting*	±200 kali	*The Company's performance updates*	Jakarta
6	*Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting*	4 kali	*Presentation of quarterly financial performance reports*	Jakarta
7	*Review Meeting with Credit Rating Agencies*	4 kali	*The Company's meeting with Credit Rating Agencies (CRA) to update Bank Mandiri's rating every year*	Jakarta

Pelatihan Hubungan Investor 2023

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan	Penyelenggara
1	*Co Creating Future Mandirian 2023: Business Leaders Who Always Deliver and Ahead*	29 Agustus 2023	*Mandiri University/Classroom*
2	*Workshop SPC Group Tahun 2023*	28 Februari 2023	*Mandiri University/Hybrid Classroom*
3	*Webinar Road to Mandiri Investment Forum 2023*	10 Januari 2023	*Mandiri University/Virtual Classroom*

INTERNAL AUDIT

Audit Internal memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu manajemen Perseroan terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen risiko serta pengendalian internal untuk memastikan penerapan praktik tata kelola berjalan dengan optimal di lingkungan Perseroan dan Unit-unit bisnisnya.

Internal Audit memiliki akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.

Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Profil Kepala Internal Audit



Danis Subyantoro
Senior Executive Vice President/
SEVP Internal Audit
Usia: 56 tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada.

Dasar Hukum Pengangkatan
Sejak 2021 menjabat sebagai *Senior Executive Vice President*/SEVP Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/045/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Pengalaman Kerja
- *Senior Executive Vice President* Internal Audit (2021-sekarang)
- *Senior Executive Vice President Wholesale Risk* (2020-2021)
- *Group Head Corporate Risk* (2018-2020)
- Executive Credit *Officer* Kategori B (2017-2018)

Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit

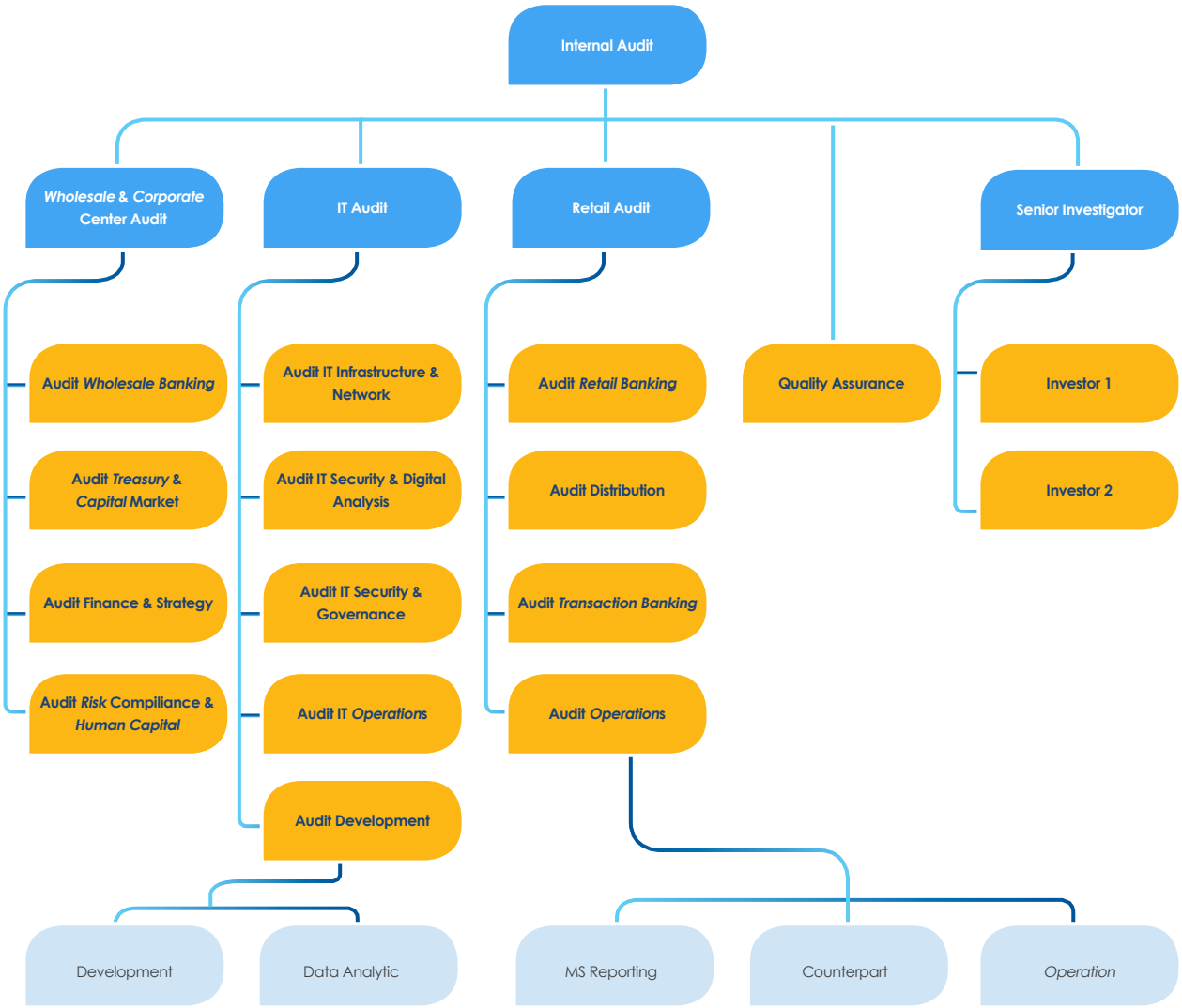

INTERNAL AUDIT

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangannya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu *Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator.* Selain itu, Internal Audit juga memiliki 1 (satu) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada *Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive* yaitu *Quality Assurance Department.*

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan *Chief Audit Executive* Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 2 September 2021.

Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki *Internal Audit Charter* yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 Februari 2022. *Internal Audit Charter* memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam *Internal Audit Charter* telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, komersiasl, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui audit.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
7. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	11
Investigator Head	2
Department Head	3
Specialist Investigator	3
Specialist	4
Lead Auditor	28

Jabatan	Jumlah Pegawai
Team Leader	3
Section Head	1
Investigator	5
Senior Auditor	26
Auditor	30
Junior Investigator	2
Officer	6
Supporting	13

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program *attachment* dan *training* di dalam maupun luar negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh personil Internal Audit hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor – Dasar	3
Qualified Internal Auditor – Lanjutan	1
Qualified Internal Auditor – Manajerial	5
Audit Intern Bank – Auditor	26
Audit Intern Bank – Supervisor	30
Audit Intern Bank – Manajer	2
General Banking	6

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant	3
Certified Legal Auditor	1
Certification In Audit Committee Practices	0
Certified Internal Audit Executive	2
Sertifikat Manajemen Risiko Level I	103
Sertifikat Manajemen Risiko Level II	47
Sertifikat Manajemen Risiko Level III	18
Sertifikat Manajemen Risiko Level IV	4

Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Internal Auditor	0
Certified Fraud Examiner	8
Certified Bank Auditor	1
Certified Information System Auditor	8
Certified Financial Services Auditor	0
Certified in Risk Management Assurance	1
Certified Information Security Manager	1
Certified in the Governance of Enterprise IT	1
Control Objectives for Information and Related Technology	2
Information Technology Infrastructure Library	4
Certified Information Systems Security Professional	1

Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
EnCase Certified Examiner	1
Cisco Certified Network Associate	1
Certified Master of Handwriting Analyst	1
Certified Anti-Fraud Manager	3
Certified Handwriting Analyst	2
Certified Risk Governance Professional	0
Certified Forensic Auditor	10
Computer Hacking Forensic Investigator	8
Certification in Audit Committee Practices	0

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Internal Audit

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

Nama Kegiatan/ Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Satu orang Audit *Manager* (AM) Internal Audit sebagai Wakil Sekretaris Jendral.	2020-2023
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Satu orang *Chief Audit Executive* (CAE) Internal Audit sebagai Dewan Pengawas.	2023-2026

Di tahun 2023, beberapa institusi melakukan *benchmark* ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar institusi yang melakukan benchmarking adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	10 Januari 2023	Direktorat Jendral Perbendaharaan	Tugas dan fungsi pengawasan intern dan Continuous Auditing/ Continuous Monitoring (CACM)

INTERNAL AUDIT

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
2	14 Februari 2023	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	SKAI Terintegrasi, tata kelola dan proses audit, IT audit, proses investigasi, *data analytics & continuous* audit, dan implementasi GRC
3	16 Mei 2023	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Organisasi dan peran IT Audit
4	6 September 2023	PT Jasa Raharja	IA sebagai *Strategic Business Partner*, CACM, dan investigasi

Kode Etik Auditor

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. **Integritas *(Integrity)***
   Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust)* yang menjadi dasar untuk membuat penilaian *(judgement)* yang handal.

2. **Objektivitas *(Objectivity)***
   Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian *(judgement)* secara seimbang *(balanced)* dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

3. **Kerahasiaan *(Confidentiallity)***
   Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

4. **Kompetensi *(Competency)***
   Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Sistem Informasi Internal Audit

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang pengembangannya dilakukan secara internal sebagai sistem pencatatan & monitoring hasil audit & investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Metode Audit

Internal Audit menerapkan metodologi *Risk Based* Audit (RBA) dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Organisasi, ketentuan Regulator dan *best practices*.

Penerapan metodologi *Risk Based* Audit (RBA) membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.

Berikut adalah *grand design* penerapan *Risk Based Audit* (RBA) di Bank Mandiri.



Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2023, Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 41 (empat puluh satu) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit *Mandatory*, Audit Entitas Anak dan *Consulting*. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja *Wholesale* & *Corporate* Center Audit Group, Retail Audit Group, dan Information & Technology Audit Group. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.

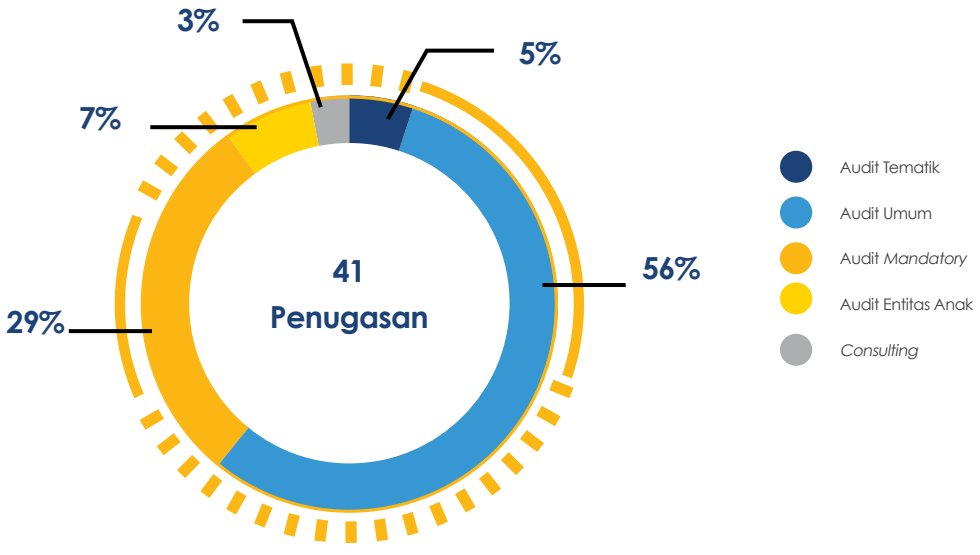

INTERNAL AUDIT

Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2023

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit *(audit plan)* yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Tahun	Outstanding	Closed	Total
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
2020	0	357	357
2021	0	660	660
2022	0	761	761
2023	528*)	468	996

Catatan:
*) 528 DMTL dalam "Proses Penyelesaian", dengan komitmen penyelesaian mulai bulan 31 Januari 2024.

Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi *Audit Intern* pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah mengadopsi regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu *Internal Audit Charter*, Kebijakan *Internal Control* Bank Mandiri (KICN), Standar Pedoman Internal Audit (SPIA) dan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA). Perubahan atas Kebijakan *Internal Control* tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris pada bulan November tahun 2023. Perubahan terakhir atas ketentuan internal lainnya disetujui oleh Manajemen Bank Mandiri (dhi. Direksi dan *Group Head*) pada tahun 2023.

Peraturan OJK No.POJK 11/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap *The International Standars for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik, untuk memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal, termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, Rapat telah menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Tahun buku 2023, merupakan periode tahun audit ketiga bagi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Adapun kronologis proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengadaan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang ditetapkan oleh Direksi, melakukan pengadaan dengan berpedoman pada POJK No. 9 Tahun 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya.
2. Berdasarkan proses evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan, Direksi menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan rekomendasi atas hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk menyampaikan usulan penunjukan KAP dalam RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
4. Penetapan KAP oleh RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
5. Bank Mandiri menyampaikan hasil RUPST tanggal 14 Maret 2023 mengenai penetapan KAP kepada KAP Peserta Pengadaan.

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal) yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta *Fee* Audit dan Jasa Lainnya

Total Fee pekerjaan jasa audit dan jasa lainnya yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik selama tahun 2023 adalah sebesar Rp33.514.444.813 (termasuk OPE dan PPN).

1. *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2023 sebesar Rp16.380.000.000 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam satu pengadaan dan *engagement letter* yang sama.
2. *Fee* Jasa KAP Lainnya untuk *Agreed Upon Procedure* (AUP) terhadap Information Package dan Struktur Korporasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2022 sebesar Rp499.000.000 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam pengadaan dan *engagement letter* tersendiri.
3. *Fee* Jasa KAP lainnya yang terkait dengan *Corporate Action* Bank Mandiri tahun 2023 sebesar Rp16.635.444.813 (termasuk OPE dan PPN).

Adapun rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2023 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya

No.	Jenis Jasa	*Fee* (termasuk OPE dan PPN)
A. Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2023		
Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).	Rp13.969.357.500
2.	Reviu Laporan Publikasi Bank.	Rp56.887.500
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen *(Management Letter)*.	Rp113.164.500
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dili, Timor Leste.	Rp449.827.500
5.	Audit atas Kepatuhan Bank terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) BPK-RI.	Rp169.663.500
6.	Audit atas Kegiatan *Trust* sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp96.126.000
Jasa Audit Laporan Keuangan TJSL dan PUMK		
	Audit atas Laporan Keuangan PUMK sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia, ketentuan Kementerian BUMN dan Pedoman Akuntansi Program PUMK.	Rp98.179.500
Jasa Lainnya		
1.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja Bank.	Rp162.948.000
2.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas Sistem Pelaporan Bank ke BI.	Rp131.535.000
3.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa kustodian sesuai Peraturan OJK.	Rp128.316.000
4.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) atas *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Kolegial dan Individual.	Rp504.495.000
5.	Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) terhadap *Information Package* dan Struktur Korporasi Bank.	Rp499.500.000
Sub Total		Rp16.380.000.000
B. Prosedur yang Disepakati (*Agreed Upon Procedures*/AUP) terhadap *Information Package* dan Struktur Korporasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2022		
Sub Total		Rp 499.000.000
C. Jasa lainnya terkait Corporate Action PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2023		
1.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (Comfort Letter) dan Penerbitan Kembali (Reissue) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022 dan 2021, terkait Penerbitan Global Bond USD Bank Mandiri Tahun 2023	Rp 6.250.000.000
2.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan (Comfort Letter) dan Penerbitan Kembali (Reissue) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022 dan 2021, terkait Penerbitan Green Bond Bank Mandiri Tahun 2023	Rp3.750.000.000
3.	Limited Review atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023	Rp 6.635.444.813
Sub Total		Rp16.635.444.813
Total		**Rp33.514.444.813**

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri selama 9 (sembilan) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)/ Signing Partner	Periode AP	*Fee**) (Dalam Rp Ribuan)
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-3	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-3	16.380.000
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-2	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-2	15.943.636
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-1	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-1	14.700.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-6	Benyanto Suherman	Periode ke-3	13.232.827
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-5	Benyanto Suherman	Periode ke-2	12.607.100
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-4	Benyanto Suherman	Periode ke-1	11.990.000
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-3	10.000.000
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-2	7.850.000
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-1	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-1	7.330.000

Keterangan:
*) *Fee* termasuk OPE & PPN Rincian *Fee* dijelaskan pada Tabel Rincian *Fee* Jasa Audit dan Jasa Lainnya

Informasi imbalan auditor

Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, berikut adalah imbalan yang telah dibayar atau terutang kepada PwC Indonesia dan Firma PwC lainnya yang berlokasi di luar Indonesia:

Sifat Imbalan yang telah dibayarkan atau terutang kepada PwC	Besaran (dalam Rupiah sebelum PPN)*
Audit laporan keuangan • Audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. • Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bank Mandiri cabang Shanghai, dan Bank Mandiri cabang Singapore (Entitas Anak dan KLN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. • Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Entitas Anak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.	33.282.204.104
Audit laporan keuangan bertujuan khusus, reviu laporan keuangan, dan jasa non-audit lainnya • Jasa reviu laporan keuangan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Capital Indonesia) yang dikendalikannya yang masuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023. • Audit bertujuan khusus, reviu laporan keuangan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak yang dikendalikannya yang masuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	35.927.890.639

Catatan:
Imbalan yang telah dibayarkan atau terutang kepada PwC dari jasa yang diberikan untuk Bank Mandiri cabang Hong Kong dan Bank Mandiri cabang Shanghai adalah sebelum pajak pertambahan nilai.

AKUNTAN PUBLIK

Opini Audit

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015-2023 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2023	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan Akuntan Publik. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik terpilih mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan progres audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait pengendalian internal.

Secara berkala, Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Komponen ini meliputi kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional yang bertujuan untuk melindungi aset Perseroan. Penerapan pengendalian internal dirancang untuk mencapai informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, efektivitas dan efisiensi dalam operasi, serta kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan menjaga dan mengamankan aset Bank, menjamin tersedianya informasi laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan dan ketentuan intern Bank, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan *(fraud)*, dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya, dan meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi Bank secara menyeluruh. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN).

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi *(risk appetite)*, untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

1. **Tujuan Kepatuhan**
   Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Bank.

2. **Tujuan Informasi**
   Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Bank.

3. **Tujuan Operasional**
   Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian *fraud (fraud event)*.

4. **Tujuan Budaya Risiko**
   Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian *(Management Oversight and Control Culture)*

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Bank melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Bank memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bank memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
6. Pengambilan keputusan Bank ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom-up* dan *top-down*.
8. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
9. Bank menerapkan prinsip keterbukaan sehingga pegawai dapat mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.
10. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
11. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
12. Direksi menetapkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran Bank.
13. Seluruh jajaran Bank wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
14. Manajemen menjadi role model, selalu meningkatkan *engagement level* dari seluruh pegawai dan memiliki komitmen Pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
15. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko *(risk culture)* yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan budaya pengendalian, Bank menetapkan strategi & sasaran *(strategy & objective setting)* sebagai persyaratan bagi proses *event identification, risk assessment* dan *risk response* yang efektif, terdiri dari:

1. *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat *high level* dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dan *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Bank memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

Identifikasi dan Penilaian Risiko *(Risk Recognition and Assessment)*

Direksi mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (risiko) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank. Identifikasi juga dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Direksi dalam penyusunan strategi guna mencapai sasaran Bank.

Direksi mempertimbangkan seluruh aspek organisasi dalam mengidentifikasi *potential events*.

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dihadapi, penetapan limit dan teknik pengendalian risiko dimaksud, penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data yang dapat dikinikan secara periodik. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat Risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun Risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional dan organisasi Bank.

Direksi menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Aktivitas pengendalian *(control activities)* adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi *(segregation of duties)*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten, serta merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Bank, yang meliputi:

   a. Kaji Ulang oleh Direksi *(Top Level Review)*
      Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
   b. Kaji Ulang Kinerja Operasional *(Functional Review)*
      Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:
      i) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      ii) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
      iii) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja (Group/Cabang), guna:
         » Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
         » Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan *(corrective actions)*.
   c. Pengendalian Sistem Informasi
      i) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
      ii) Bank melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
      iii) Pengendalian sistem informasi meliputi:
         » Pengendalian terhadap operasional pusat data *(database)*, sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap *server*, dan *user work station*, serta jaringan.
         » Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

d. Pengendalian Aset Fisik *(Physical Controls)*
   i) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.
   ii) Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
   iii) Bank harus melakukan pengecekan nilai aktiva *(appraisal)* secara berkala.
e. Dokumentasi
   i) Bank memformalkan dan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur, sistem dan standar kerja secara memadai.
   ii) Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang *actual*, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
   iii) Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
   iv) Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi *(Segregation of Duties)*
   a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
   b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional *(segregation of duties)*, sehingga tercipta suatu sistem dual control, dual custody dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan *(conflict of interest)*.
   c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah antara lain:
      i) Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/ informasi Bank atau penyalahgunaan aset Bank.
      ii) Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
         » persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
         » rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
         » transaksi dalam pembukuan Bank.
         » pemberian informasi kepada nasabah Bank.
         » penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
         » kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
         » independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
   d. Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
   e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan *(conflict of interest)*.

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi *(Accountancy, Information and Communication)*

1. Sistem Akuntansi
   a. Bank memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
   b. Sistem Akuntansi Bank meliputi metode dan pencatatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan seluruh transaksi dan aktivitas Bank.
   c. Sistem Akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan persisten untuk seluruh transaksi Bank.
   d. Bank wajib melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan sistem informasi manajemen setiap bulan. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan secara tertib.
   e. Setiap Unit Kerja yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi, wajib mencatat transaksi secara segera, teliti dan saksama, serta melakukan proses control dan monitoring untuk:
      i) Mereviu setiap transaksi telah dibuku sesuai dengan buku besar yang seharusnya.
      ii) Mereviu setiap buku besar telah sesuai dengan rinciannya.
      iii) Menyelesaikan *outstanding* rekening yang belum dibuku ke buku besar yang seharusnya (rekening sementara/penampungan) secara segera.
   f. Setiap Unit Kerja yang menggunakan formulir atau kertas kerja, harus menggunakan formulir atau kertas kerja yang baku (standard) dan mengandung unsur-unsur pengamanan yang layak serta didukung dengan dokumentasi yang memadai.

2. Informasi
   a. Bank memiliki Sistem Informasi yang harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya meliputi penyediaan sistem informasi yang handal/memadai mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor internal) dan didukung oleh program kontingensi yang memadai.
   c. Bank memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan *(confidentiality)*, integritas *(integrity)* dan ketersediaannya *(availability)*.

3. Komunikasi
   a. Bank memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) baik intern maupun ekstern, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank.
   b. Sistem Pengendalian Intern memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
   c. Manajemen menyelenggarakan saluran/jalur komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan *(Monitoring Activities and Correcting Deficiencies)*

Direksi melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja *(risk taking unit)*, Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Manajemen, dan yang material juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kesesuaian dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum

SPI terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Komponen SPI yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan Regulator serta mempertimbangkan prinsip/praktik internal *control* yang berlaku secara internasional *(international best practices)*.

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapannya, yaitu:
1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan reviu dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri telah memadai.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 (lima) komponen seperti telah disebutkan di atas, satu sama lainnya saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan SPI di Perseroan.

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk* culture) yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif.

Manajemen berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan dengan efektif, namun masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin berkembang serta kompleks usaha.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Bank Mandiri dibentuk sebagai serangkaian Tindakan atau Langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis Bank Mandiri yang semakin besar serta pesatnya kemajuan teknologi, merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, semua transaksi yang dilakukan Bank Mandiri sudah berbasis teknologi, hal ini menuntut Bank bergerak cepat dan maju berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Untuk menghadapi eksposur risiko tersebut, diperlukan penerapan fungsi kepatuhan untuk meminimalisir timbulnya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan adalah Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.

Satuan Kerja Kepatuhan

Unit Kerja yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah *Compliance* & AML-CFT Group. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), *Compliance* & AML-CFT Group telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Independensi.
2. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

FUNGSI KEPATUHAN

Selain itu, dalam rangka menerapkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, *Compliance* & AML-CFT Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group.

Untuk menjalankan fungsi kepatuhan tersebut, *Compliance* & AML-CFT Group memiliki 5 (lima) departemen dan 3 (tiga) unit fungsional *Compliance Officer* dengan struktur sebagai berikut:

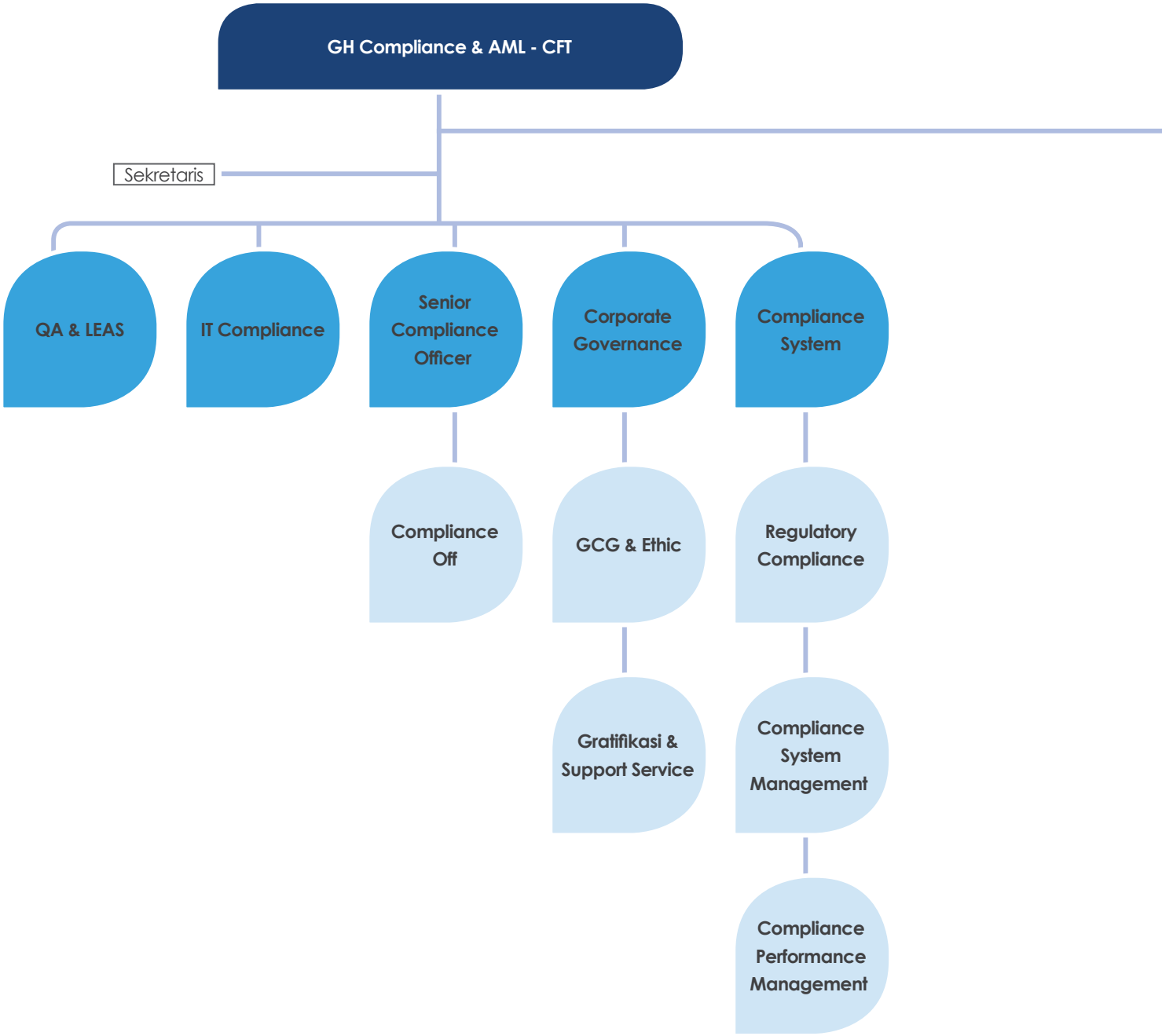

FUNGSI KEPATUHAN

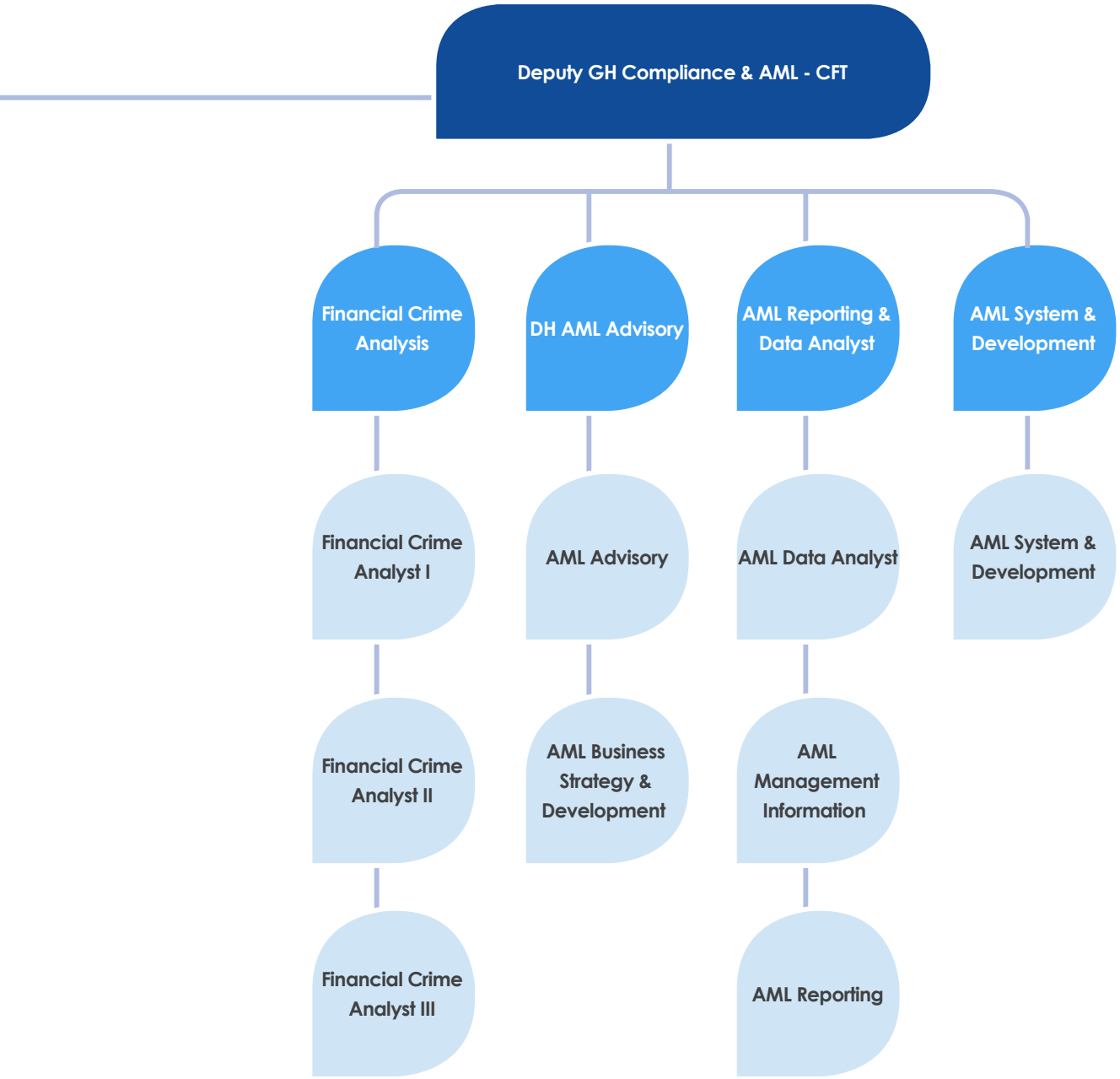

FUNGSI KEPATUHAN

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Penunjukan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator. Bapak Juliser Sigalingging diangkat sebagai *Group Head Compliance* & AML-CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.459/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.

Profil *Group Head Compliance* & AML-CFT



Juliser Sigalingging
Group Head Compliance & AML-CFT
Usia: 51 tahun.
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000).

Pengalaman Kerja
- *Group Head Compliance* & AML CFT Group (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab *Group Head Compliance* & AML-CFT dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2023, pegawai Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti beberapa pelatihan dan edukasi sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
1	*Building Growth Mindset*	04 Januari 2023
2	*Webinar Road to Mandiri Investment Forum 2023*	10 Januari 2023
3	PRA Raker KPS 2023	12 Januari 2023
4	Materi KPS PRA Raker HCSTM	17 Januari 2023
5	*Webinar* Edukasi Investasi	20 Januari 2023
6	*Video Tutorial*-APUPPT Implementasi APUPPT Pada Pembukaan Rekening	25 Januari 2023
7	*Update* Regulasi Sektor Jasa Keuangan (Perlindungan Data Pribadi)	31 Januari 2023
8	*Bechmarking* UGM Di SISM Group Dengan Topik "Pengelolaan Entitas Anak Di Mandiri Group"	03 Januari 2023
9	Pembekalan Pra Purnabakti	09 Februari 2023
10	*Training To Trainer IPPS (Integrated Policy & Procedure Systems)*	09 Februari 2023
11	Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan	15 Februari 2023
12	*Women Leadership Program*	15 Februari 2023
13	Kopra *Talk: Emerging Banking Ecosystem Model Through Transaction Banking*	22 Februari 2023
14	Mandirian Siap Jadi Digital 2023: Tingkatkan Kompetensi Digitalmu Melalui MSJD 2023	22 Februari 2023
15	*Master Class* Vol. 15-*Driving Sustainable Ecosystem All Rounder Business*	24 Februari 2023
16	*Workshop* SPC Group Tahun 2023	27 Februari 2023
17	Mandirian Siap Jadi Digital: *Collaborative Iteration Skills*	01 Maret 2023
18	*Skill Up Digital Transaction Training Amlo*	06 Maret 2023
19	*Bronze-Collaborative Iteration Skill*	08 Maret 2023
20	*Workshop* Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pengukuran FIR ML/TF	13 Maret 2023
21	Raker Dir. Kepatuhan & Sdm	21 Maret 2023
22	Keamanan Data/Informasi & Tanggung Jawab Seluruh Individu	28 Maret 2023
23	*Workshop Business Transformation Plan 2023-2032*	28 Maret 2023
24	Mandirian Siap Jadi Digital: UX Analysis	29 Maret 2023
25	Pengelolaan Data Dengan *Power Query*	31 Maret 2023
26	*Workshop Esg Financing & Energy Transition Mechanism Financing*	05 April 2023
27	*Financial Accounting for Lenders (FAL)*	10 April 2023
28	*Commercial Loans to Business (CLB)*	12 April 2023
29	*Woman Talks*	14 April 2023
30	Esg *Awareness* Level 1-Tahap 2 (Periode Perpanjangan Akses)	27 April 2023
31	Mandirian Siap Jadi *Digital: Data Analytics*	03 April 2023
32	*E-Learning Mandatory End to End Project Management Capex Initiatives-Modul 1 Prioritisasi*	04 April 2023
33	*Business Transformation Plan 2023-2032*	09 Mei 2023
34	Mandiri *Advanced First Leaders Program* (MAFLP)	09 Mei 2023
35	*Bronze-Digital Marketing*	15 Mei 2023
36	*Training Catalogue 2023*	15 Mei 2023
37	Mandirian Siap Jadi *Digital: Artificial Intelligence*	17 Mei 2023
38	*Webinar* Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Tppu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Yang Beritegritas dan Akuntabel	17 Mei 2023
39	*Business Turnaround*	26 Mei 2023
40	Sertifikasi *Security Awareness Level 2 (Leaders)*	29 Mei 2023

FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
41	*Mandirian Siap Jadi Digital: Cyber Security*	31 Mei 2023
42	*Bronze-Cyber Security*	07 Juni 2023
43	Mandirian Siap Jadi *Digital: Digital Governance*	14 Juni 2023
44	*Data Analytic Basic*	19 Juni 2023
45	*Webinar* Edukasi Investasi *Road to Livin* Investasi SBN	20 Juni 2023
46	*Live Event Podcast* 3 Tahun Akhlak	23 Juni 2023
47	ESG *Awareness* Level 1	26 Juni 2023
48	*The Rising Tide of Third-Party (Vendor) Risk (Operapodcast)*	26 Juni 2023
49	*Effective Facilitating for Facilitator*	27 Juni 2023
50	*Webinar* Legal Series "Aspek Hukum Dan Teknis Pengadaan Kapal Asing: Pengukuran, Pendaftaran, Kebangsaan Kapal, Pembebanan Hipotek Dan Mitigasi Risikonya"	03 Juni 2023
51	*Building Resilience* in Tuna World-Konferensi Internal Audit 2023	05 Juli 2023
52	*Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges to Their Implementation*	12 Juli 2023
53	Mandirian Siap Jadi Digital: Digital *Risk Management*	12 Juli 2023
54	*Effective Communication Strategy*	13 Juli 2023
55	Industri *Ekspertise* Sektor Industri Sawit	13 Juli 2023
56	*End To End Project Management Capex Initiatives-Modul 2 Monitoring*	20 Juli 2023
57	*Podcast Popcorn: Integrated Policy & Procedure System*	20 Juli 2023
58	Mandirian DNA *Retreat* Direktorat Kepatuhan Dan Sdm	21 Juli 2023
59	*Sprint Thinking*	24 Juli 2023
60	Mandirian Siap Jadi *Digital : Digital Regulatory Compliance*	26 Juli 2023
61	*Refreshment* ISO SMAP-Resertifikasi ISO SMAP	28 Juli 2023
62	*Industry Expertise* Energi Baru Dan Terbarukan	03 Agustus 2023
63	ESG *Industry Risk Assessment*	09 Agustus 2023
64	Resertifikasi Auditor ISO SMAP 37001:2016	11 Agustus 2023
65	*Industry Expertise Metal Mining*	14 Agustus 2023
66	Peluit Integritas : Pembelajaran Interaktif Untuk Pengelolaan *Whistleblowing System* Pengaduan Korupsi Yang Berintegritas Tahun	14 Agustus 2023
67	*Mandiri Advanced Leaders Program (MALP) Modul 1*	21 Agustus 2023
68	*Mandiri Facilitator Forum*	22 Agustus 2023
69	*Bronze-Digital Based Product & Services*	23 Agustus 2023
70	*Bronze-Digital Regulatory Compliance*	23 Agustus 2023
71	*Bronze-Digital Risk Management*	23 Agustus 2023
72	*Important Key Point Pada Project Finance & Choice of Law Pada Personal Guarantee*	23 Agustus 2023
73	Mandirian Siap Jadi Digital: Digital *Marketing*	23 Agustus 2023
74	Bara *Risk Forum: "Creating Value in A Fast-Changing Banking World"*	24 Agustus 2023
75	*Bronze-Data Analytics*	24 Agustus 2023
76	*Refreshment* BSMR Jenjang 4,5,6, & 7-*Asset* Liability *Management*	24 Agustus 2023
77	*Webinar Wholesale* Bankers Club Vol. 7-Seaport	24 Agustus 2023
78	*People Analytics*	27 Agustus 2023
79	*Video Tutorial-Leadership Speaking*	28 Agustus 2023
80	*Co Creating Future Mandirian 2023: Business Leaders Who Always Deliver and Ahead*	29 Agustus 2023

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
81	*Personal Leadership*	29 Agustus 2023
82	*Series-17: Analisa Data & Visualisasi Dengan Excel & Power Point*	30 Agustus 2023
83	*General Bankers All Modul*	02 September 2023
84	*Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business*	05 September 2023
85	*Creative Inspirations: Dale Herigstad & Schematic, Interactive Design Agency*	05 September 2023
86	*Developing Assertive Leadership*	05 September 2023
87	*Risk-Taking For Leaders*	05 September 2023
88	*Bronze-User Experience Analysis*	06 September 2023
89	*Creating A Keynote Presentation*	06 September 2023
90	*Finance Foundations: Risk Management*	06 September 2023
91	*Strategic Planning Foundations*	06 September 2023
92	*Transitioning From Manager to Leader*	06 September 2023
93	*Video Tutorial-Compliance-Gratifikasi Kedinasan*	06 September 2023
94	*Balancing Innovation and Risk*	07 September 2023
95	*Bronze-Artificial Intelligence Literacy*	07 September 2023
96	*Bronze-Digital Governance*	07 September 2023
97	*Webinar Risk Series*	07 September 2023
98	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	11 September 2023
99	*Webinar* Legal Series "Mitigasi Risiko Dan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan Berbasis Digital"	12 September 2023
100	*Bill George on Self-Awareness, Authenticity, And Leadership*	13 September 2023
101	*Creative Inspirations: Rick Morris, Motion Graphics Designer*	13 September 2023
102	*Database Foundations: Application Development*	13 September 2023
103	*Emerging Leader Foundations*	13 September 2023
104	*Emerging Leaders Facilitators*	13 September 2023
105	*Getting Started with Technology: Think Like An Engineer*	13 September 2023
106	*HR and Digital Transformation*	13 September 2023
107	*Masterclass Vol 09 Intrapreneurship-Building Strategic Cooperation to Escalate Business Performance*	14 September 2023
108	*The Future of Workplace Learning*	14 September 2023
109	*Foundations of Learning Management Systems (LMS) (2018)*	15 September 2023
110	*CSS: Design Systems and Architectures*	20 September 2023
111	Mandirian Siap Jadi Digital: Digital *Based* Product & Service	20 September 2023
112	Mandirian Tangguh	20 September 2023
113	*Mastering Self-Leadership*	20 September 2023
114	*Webinar Industry Series-Sektor Konstruksi*	21 September 2023
115	*The Data Science of Using People Analytics*	30 September 2023
116	*Operalearning: Operational Risk Management*	01 Agustus 2023 sd 16 Agustus 2023
117	*Sertifikasi Security Awareness Level 1 (Foundation) 2023.*	03 April 2023 sd 28 April 2023
118	Uji Kepatuhan 2023	04 September 2023 sd 21 September 2023
119	Pengenalan Mandiri Agen	07 Juli 2023 sd 12 Juli 2023
120	*Podcast Tb Tech Talk*	07 Agustus 2023 sd 20 September 2023
121	Penyelenggaraan Produk Baru (PPB)	16 Januari 2023 sd 30 Januari 2023

FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
122	Strategi *Anti Fraud*	22 Mei 2023 sd 30 Mei 2023
123	*Refreshment* Kopra *By* Mandiri	22 Agustus 2023 sd 01 September 2023
124	Mengenal UU PDP (Pelindungan Data Pribadi)	24 Juli 2023 sd 04 Agustus 2023
125	Series-4 : Bangkitkan Jiwa Inovasimu	28 Agustus 2023 sd 14 September 2023

Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan Perseroan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan standar prosedur dimaksud dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan Bank serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Secara umum, Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri memuat pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan meliputi: Kebijakan Umum, Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pelaporan, dan Monitoring. Dalam Kebijakan Kepatuhan tersebut juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya *(mandatory)*.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan *(role model)* yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan *(starts from the top)*.
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Kebijakan Kepatuhan yang memuat pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi organisasi, tugas dan tanggung jawab, tata kelola dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, *compliance tools*, peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan dan pengelolaannya, mitigasi risiko kepatuhan, serta hubungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dalam bentuk *Compliance Assurance Services* (CAS), yaitu *Supervisory services, Review/examination services, Consultation services, Regulatory services.*

Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan. Khusus untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan terkait sesuai POJK No.8 Tahun 2023 jadi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM), berlaku Kebijakan dan Standar Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tersendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki Mandiri Group *Principle Guideline* (MGPG) dan Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai Entitas Utama, mewajibkan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing industri masing-masing LJK dimaksud. Sedangkan untuk Cabang Luar Negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di negara setempat.

Strategi Kepatuhan 2023

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2023, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Peningkatan *Awareness* Budaya Kepatuhan
5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
6. Pelaksanaan Program APU-PPT
7. Penerapan Tata Kelola
8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
9. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2023

Peningkatan *Compliance Culture Awareness*

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
   Terhadap Infrastruktur dan sistem kepatuhan yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri akan dilakukan penguatan dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. *Review* dan penajaman materi kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan.
   b. Penyempurnaan Pengelolaan *Knowledge Management* System (KMS)
      Knowledge Management yang dikelola oleh *Compliance* & AML-CFT Group adalah sistem pengelolaan dokumen regulasi internal dan eksternal, advis/opini *compliance*, dan *sharing knowledge* terkait regulasi.
   c. Untuk mendorong terlaksananya implementasi kode etik dan mendukung penerapan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), Bank juga memiliki kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* serta media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System - Letter to CEO (WBS-LTC)*. *WBS - LTC* tersebut bertujuan untuk mendeteksi tindakan menyimpang dan/atau perbuatan atau indikasi *fraud* di lingkungan Bank Mandiri, serta mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.
   d. Pengembangan Aplikasi Internal Pendukung implementasi program APU-PPT.

2. Peningkatan Budaya Kepatuhan
   Dalam rangka membangun budaya kepatuhan Bank telah melaksanakan program uji kepatuhan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
   Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank akan melakukan program Sertifikasi Kepatuhan pada level nasional yang akan diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja.

4. Peningkatan *Awareness* Budaya Kepatuhan
   Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terkait pentingnya Budaya Kepatuhan yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan, Bank melakukan program peningkatan *awareness* melalui pembuatan daftar kewajiban laporan.

5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
   Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara rutin guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:
   a. Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan prudential meeting dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
   b. Sosialisasi resume ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik.

6. Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM
   Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dalam peningkatan kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang selaras dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dan perundang-undangan terkait yang berlaku, termasuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang mengacu pada International *Best Practices*, dan Bank *Business Plan*.

   Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya ekspektasi dari Regulator/Otoritas Berwenang atas pelaksanaan rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam rangka pencapaian Indonesia menjadi anggota pada *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering*, mendorong Bank untuk terus menerus melakukan upaya penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan atas seluruh aspek yang mendukung efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan FATF *Recommendations*, *National Risk Assessment* (NRA), dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA).

   Sepanjang tahun 2023, Bank Mandiri telah melakukan serangkaian program penguatan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, diantaranya :

a. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta mitigasi risikonya;
b. Pembahasan mengenai implementasi program APU, PPT, dan PPPSPM bersama Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas Kebijakan dan Prosedur terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
d. Penyempurnaan Sistem Dan Aplikasi Pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
e. Pelaksanaan audit internal dan eksternal terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
f. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
g. Pemenuhan kewajiban pelaporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM;
h. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Terintegrasi;
i. Peningkatan Kualitas Data Nasabah; dan
j. Program lain untuk mendukung peningkatan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

7. Penerapan Tata Kelola
Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, Bank Mandiri melakukan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan Tata Kelola secara individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
Sinergi kepatuhan dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU-PPT dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi
a. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank akan menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
b. Dalam hal kaitannya dengan penerapan APU – PPT terintegrasi, Bank Mandiri secara penuh berkomitmen untuk mewujudkan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko yang berintegritas dalam Konglomerasi keuangan, dengan senantiasa memberikan asistensi kepada Entitas Anak yang meliputi aspek Organisasi, Kebijakan & Prosedur dan Sumber Daya Manusia.
c. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri *(self-assesment)* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. *Self-assessment* ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Entitas Anak.
d. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri menghimbau Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian *Good Corporate Governance* oleh pihak independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

9. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan
Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka telah disusun parameter *Internal Control Score* (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing – masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan – peraturan yang berlaku.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi serta dinilai oleh Direktur Kepatuhan untuk kepentingan peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja/Kegiatan Kerja *Non Key Performance Indicator* (Non KPI). Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek *Financial Perspective, Customer Prespective, Internal Business Perspective* dan *Development Perspective.*



PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Bank Mandiri menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan efektif dan efisien melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan keandalan sistem pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Bank terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan sistem melalui adopsi teknologi baru yang fleksibel dan relevan, yang merupakan hal penting dilakukan sejalan dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital dan perkembangan Bank di masa kini.

Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di Sektor Jasa Keuangan, mendorong Bank Mandiri untuk melakukan transformasi bisnis melalui digitalisasi. Hal tersebut tertuang sebagai salah satu aspek dari strategi jangka panjang Bank Mandiri yaitu *"Game Changing Technology"* yang perlu diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, keamanan, kerahasiaan, dan kecukupan mitigasi risiko dalam pencegahan Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Sejalan dengan hasil FATF *Plenary Meeting* di Paris pada Oktober 2023, Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh FATF yang yang dalam hal ini kontirbusi aktif Bank Mandiri dalam proses MER membuahkan hasil positif. Hal ini sekaligus menjadikan tantangan baru bagi Bank Mandiri untuk terus konsisten mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM di indonesia sebagai wujud partisipasi untuk membangun Negeri

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penguatan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Ketentuan, Peraturan, Manajemen Risiko, Rencana Bisnis Bank, dan *International Best Practices* untuk mewujudkan aspirasi Bank Mandiri "Menuju Masa Depan Sektor Jasa Keuangan yang Berintegritas". Adapun komitmen untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui serangkaian strategi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, dengan fokus pada aspek *Procedure & Process, System & Technology*, dan *Human Resources* secara berkelanjutan.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan International Best Practices yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara tahunan;

3. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC, yang antara lain mencakup Diaspora Indonesia dan Perseroan Perorangan;
4. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*, termasuk terhadap Calon Nasabah yang mengaku tidak memiliki penghasilan dan Instansi Pemerintahan/ Lembaga Negara/Perusahaan Publik;
5. Pemeliharaan dan pengkinian DTTOT & DPPSPM untuk kebutuhan pelaksanaan screening terhadap Calon Nasabah dan Nasabah Bank Mandiri;
6. Kewajiban memastikan Jasa Profesi Penunjang telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPATK;
7. Prosedur *pre-employee screening* pegawai dan *know your employee* pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris;
8. Prosedur Transfer Dana;
9. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
10. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
11. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
12. Pengendalian Internal;
13. Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi; dan
14. Kewajiban penyampaian data untuk kebutuhan pengawasan OJK

Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM

Efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM tidak terlepas dari peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang menjadi kunci utama dalam pengawasan atas pelaksanaan budaya kepatuhan termasuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris secara langsung terwujud dalam Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang membahas, antara lain *review* kebijakan dan prosedur, pengelolaan kualitas data nasabah, penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, tata kelola Konglomerasi Keuangan, dan program lainnya yang mendukung peningkatan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank Mandiri

Fungsi APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri dijalankan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan. Adapun pengukuran efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Cabang dilakukan oleh AMLO yang berada di setiap Region, yang secara rutin berkoordinasi dengan UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat sebagai pembina program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga melakukan pengawasan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di jaringan kantor yang berkedudukan di luar negeri dan Entitas Anak sebagai entitas utama dalam Konglomerasi Keuangan yang dilakukan berkesinambungan melalui program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko dalam 5 (lima) pilar yang dijalankan dengan metode review on-desk dan forum diskusi secara berkala.

Adapun Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Adapun Struktur Organisasi APU-PPT dapat digambarkan sebagai berikut:

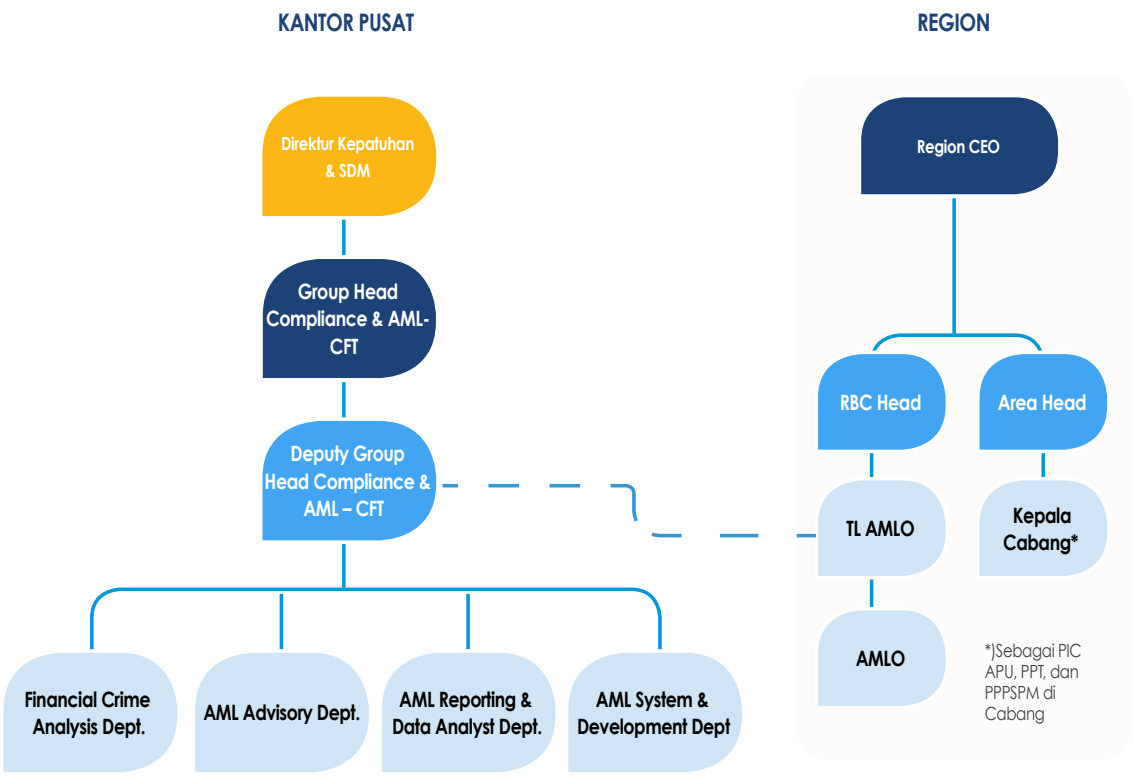

Komposisi UKK APU, PPT dan PPSPPM
- Kantor Pusat : 33 Pegawai
- Region : 70

Program APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM Bank (*Individual Risk Assessment*/IRA) yang mengacu pada hasil penilaian risiko secara nasional *(National Risk Assessment/NRA*) dan sektoral *(Sectoral Risk Assessment/SRA)* terkini yang menilai berdasarkan 4 (empat) faktor, berupa Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi;
2. Penyusunan, penyesuaian, pembaharuan, dan memastikan kecukupan APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh ketentuan internal Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dijalankan oleh Unit Kerja/Bisnis, Cabang, dan Cabang Luar Negeri (CLN);
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
5. Peningkatan kualitas dan *monitoring* terhadap kewajiban pelaporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan Regulator;

6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain:
   a. Pengembangan sistem aplikasi goAML internal yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement* goAML PPATK;
   b. *Enhancement* pada aplikasi AML System eksisting beserta aplikasi pendukung;
   c. *Enhancement* New AML System untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi pada penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dan kewajiban pelaporan sesuai *requirement* Regulator;
   d. Pembuatan aplikasi Mandiri Screening Portal (MSP) yang merupakan *tools screening* profil Calon Nasabah dan Nasabah Bank Mandiri terhadap database *sanction list* (DTTOT, DPPSPM, OFAC, EU, dan UN), PEP, dan informasi negatif internal Bank Mandiri.
   e. Penyempurnaan System aplikasi Monitoring Transaksi Kartu Kredit Mencurigakan;
7. Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat dan Region, antara lain melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
8. Penunjukan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam pelaksanaan *Benchmark* dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan;
9. Peningkatan Kualitas Data Nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi Nasabah yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh);
10. Menjalin dan membina kerja sama maupun koordinasi dengan pihak Regulator, Aparat Penegak Hukum, dan S*takeholder* lainnya, dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
11. Pengawasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui:
    a. *Review* ketentuan program APU, PPT, dan PPPSPM Entitas Anak dan Cabang Luar Negeri (CLN).
    b. Monitoring pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Entitas Anak dan CLN terkait kewajiban pelaporan, pemenuhan audit terkait APU, PPT, dan PPPSPM, dan penyesuaian ketentuan internal dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
    c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Entitas Anak dan CLN.
    d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM Terintegrasi.
    e. Monitoring implementasi APU, PPT, dan PPPSPM Entitas Anak dan CLN melalui laporan rutin secara triwulanan.
12. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
    a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2023 kepada Penyedia Jasa Keuangan
    b. Penunjukan sebagai Responden terkait penyusunan SRA TPPU dan TPPT yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM), dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja (TPTK) Tahun 2023.
    c. Penunjukan sebagai responden dalam penyusunan Indeks Efektivitas PPATK 2023.
    d. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan *Benchmarking*, webinar dan *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK dan Instansi lainnya.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bank Mandiri telah mengalokasikan dana untuk pembangunan masyarakat dan lingkungan pada tahun 2023 sebesar Rp174,6 miliar.

No.	Uraian	Biaya Pelaksanaan (Rp)			
		2023	2022	2021	2020
1	Bidang Pendidikan	48,4 Miliar	40,3 Miliar	30,5 Miliar	28,3 Miliar
2	Sosial Kemasyarakatan	79,5 Miliar	49,8 Miliar	30,1 Miliar	10,8 Miliar
3	Bidang Sarana Ibadah	11,7 Miliar	12,6 Miliar	19,3 Miliar	18,1 Miliar
4	Bidang Sarana Umum	17,0 Miliar	12,6 Miliar	13,4 Miliar	9,5 Miliar
5	Bidang Bencana Alam	0,9 Miliar	3,8 Miliar	5,5 Miliar	54,9 Miliar
6	Bidang Kesehatan	15,7 Miliar	17,8 Miliar	33,5 Miliar	11,8 Miliar
7	Bidang Pelestarian Alam	1,4 Miliar	0,6 Miliar	0,9 Miliar	0,4 Miliar
	Total	**174,6 Miliar**	**137,6 Miliar**	**132,4 Miliar**	**133,9 Miliar**

Lebih lengkapnya untuk uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mandiri disampaikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini, serta secara terpisah pada Laporan Keberlanjutan tahun 2023.

Selama tahun 2023 Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Pada tahun 2023 Bank Mandiri menghadapi sejumlah perkara penting, baik telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) maupun yang masih dalam proses penyelesaian.

Jumlah total perkara perdata posisi 31 Desember 2023 dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	198
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	178

PERKARA PENTING TAHUN 2023

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 3 (tiga) kasus perdata yang secara signifikan mempengaruhi Perseroan. Adapun kelima perkara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kasus Perdata

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No. 59/Pdt.G/2021/PN.Kds antara Moch Imam Rofi'i dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan telah menyerahkan memori peninjauan kembali	Tidak ada	Materiil: Rp5.800.090.000 Immateriil: Rp50.000.000.000
2.	Perkara No. 615/Pdt.G/2023/PN Sby antara Samsuduri dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, menyerahkan jawaban, dan akan mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Materiil: Rp2.000.000.000,- Immateriil: Rp48.000.000.000,-
3.	Perkara No. 649/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel antara Wida Murtini Soedibyo dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, menyerahkan jawaban, dan akan mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Materiil: Rp3.762.500.000,- DM2.311.042,- Immateriil: Rp6.323.134.536,-

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Dampak permasalahan hukum yang diterima Bank Mandiri melalui proses hukum tidak signifikan karena Bank Mandiri telah melakukan mitigasi sesuai dengan risiko yang muncul.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama periode tahun 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PERKARA PENTING

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Permasalahan Hukum

Pada tahun 2023, Entitas Anak menghadapi sejumlah permasalahan hukum, baik yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian, seperti yang disajikan tabel berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	320	4
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	240	3

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 14 (empat belas) kasus perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan (Entitas Anak), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kasus Perdata

1.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** • Penggugat: Angga Nur Charistiawan • Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia **Objek Perkara** Perbuatan Melawan Hukum penolakan Klaim AJK **Pokok Gugatan:** Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar klaim sebesar Rp524.882.000 dan Kerugian Imateriil sebesar Rp500.000.000
Status Penyelesaian	Tingkat Pertama: Mediasi Para Pihak
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko *Financial* dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp1.024.882.000
Sanksi yang dikenakan	-

2.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** • Penggugat: Ertha H. • Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia • Turut Tergugat: PT Mandiri Tunas Finance **Objek Perkara** Klausul Incontestability pada asuransi jiwa kredit **Pokok Gugatan:** Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp494.487.000
Status Penyelesaian	• Tingkat Pertama : Mandiri Inhealth Kalah • Tingkat Banding : Mandiri Inhealth Kalah • Tingkat Kasasi: Proses di tingkat Kasasi
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko *Financial* dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp494.487.000
Sanksi yang dikenakan	Rp494.487.000

3.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak** • Para Penggugat: Hijrawati, Nur Indah, Mohammad Kamarudin, Moh. Akbar, Moh. Fajar, Dea Dinda Berlian, Syahsa Mutiara • Para Tergugat: • PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia • PT Mandiri Tunas Finance • PT Asuransi Ciputra Indonesia • OJK Sulawesi Tengah **Objek Perkara** Perbuatan Melawan Hukum penolakan Klaim AJK **Pokok Gugatan:** Penggugat menuntut PT Asuransi Ciputra Indonesia membayar manfaat asuransi sebesar Rp30.000.000 dan menuntut Mandiri Inhealth untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp55.302.000
Status Penyelesaian	Selesai
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko *Financial* dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp85.302.000
Sanksi yang dikenakan	Putusan N.O

4.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat.
Status Penyelesaian	• PN menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. • PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN. • PA Jakarta Pusat telah memanggil/aanmaning kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri panggilan sidang annmaning, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima relaas Panggilan/aanmaning kembali.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: • Materiil sebesar Rp9.441.701.946 • Immateriil sebesar Rp300.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Putusan N.O

5.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 647/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp10 miliar kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut.
Status Penyelesaian	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: • Materiil sebesar Rp13.916.000.000 • Immateriil sebesar Rp10.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

PERKARA PENTING

6.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 360/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih.
Status Penyelesaian	PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: • Materiil sebesar Rp31.645.822.960 • Immateriil sebesar Rp100.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

7.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 519/Pdt.G/2023/PN.Bdg antara Sukmawati selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan perlawanan upaya fiat eksekusi pengadilan yang diajukan oleh BSI.
Status Penyelesaian	Masih proses di Pengadilan Negeri.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: • Materiil sebesar Rp350.000.000.000,00 • Immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00
Sanksi yang dikenakan	Masih proses di Pengadilan Negeri

8.	PT Mandiri Utama Finance
Pokok Perkara atau Gugatan	**Para Pihak:** • Penggugat/Pemohon Banding : Drs. Agung Sunaryo (Debitur) • Tergugat 1 : MUF Kantor Pusat • Tergugat 2 : MUF Yogyakarta • Tergugat 3 : Eko Wibowo/Eko Ari Wibowo (Karyawan MUF Yogyakarta) • Tergugat 4 : MABES POLRI qq. POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRATA qq. Ditreskrimum Polda DIY qq. Subdit IV Ditreskrimum polda DIY qq. Kanit III Subdit IV Ditreskrimum Polda DIY **Objek Perkara:** Perjanjian Pembiayaan, Obyek Pembiayaan, dan Laporan Polisi di Polda DIY Yogyakarta (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum)
Status Penyelesaian	Telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan
Nilai Gugatan	Materil sebesar Rp1.021.000.000
Sanksi yang dikenakan	Masih proses upaya hukum Banding

9.	PT Bank Mandiri Taspen
Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps 06 Desember 2023	**Para Pihak** • **Penggugat** : Ni Wayan Mudiasni • **Tergugat I** : PT Bank Mandiri Taspen (KCP Sempidi) • **Tergugat II** : PT Balai Lelang Bali **Objek Perkara** • Sertipikat tanah dan bangunan (SHM) No. 5246/Desa Batubulan seluas 173 m2 • Penggugat keberatan dengan pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit yang mengikat; • Penggugat merasa tidak pernah menyetujui adanya proses pelelangan atas objek perkara; • Penggugat merasa bahwa kreditnya belum bisa dikatakan macet dikarenakan belum jatuh tempo, walaupun kolektibilitas kredit sudah macet; • Penggugat mendalilkan dalam gugatannya meminta untuk membatalkan kredit yang sudah disepakati para pihak (debitur & Bank)
Status Penyelesaian	• Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mandiri Taspen menang). • Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi (Bank Mandiri Taspen menang) • Perkara masih dalam proses di Mahkamah Agung.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	Nilai tuntutan kerugian materiil untuk para tergugat yaitu sebesar Rp30.000.000 dan ditambah kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp875.000.000 secara tanggung renteng.
Sanksi yang dikenakan	Bank Mandiri Taspen menang ditingkat PN dan PT. Saat ini masih proses Kasasi di MA. Tidak ada tuntutan ganti rugi.

10.	PT Bank Mandiri Taspen
Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 6/Pdt.G/2020/PN Pbg 07 Februari 2020	**Para Pihak** • **Penggugat**: Taspen Abadi Sentosa • **Tergugat I** : Kusworo • **Tergugat II** : Bank BTN • **Turut Tergugat I** : PT Bank Mandiri Taspen (KC Purwokerto) • **Turut Tergugat II** : PT Pos Indonesia (Persero) **Objek Perkara** • Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pegawai PT TAS (**TERGUGAT I**) yang mengakibatkan kerugian PT TAS • Sdr Kusworo (Tergugat I) merupakan tenaga pemasar PT TAS (Penggugat) yang bertugas untuk mencari dan menawarkan Produk Bank Mandiri Taspen (Turut Tergugat I); • Tergugat I diduga menipu calon debitur, dimana nominal pinjaman yang diajukan oleh calon debitur berbeda dengan nominal pinjaman pada aplikasi pengajuan/permohonan kredit.
Status Penyelesaian	Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri pada tanggal 03 November dengan putusan, sebagai berikut : • Menyatakan tuntutan provisi Pengguggat tidak dapat diterima; • Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.436.962.487,-(dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). • Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 21 Januari 2021dengan putusan sebagai berikut : • Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan dari Pembanding II semula Tergugat I; • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut; • Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara peradilan di tingkat banding; • Perkara sudah di proses di Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 20222 dengan putusan sebagai berikut : • Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Kasasi II (Kusworo & Bank BTN Cabang Purwokerto) • Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar perkara yang timbul pada tingkat Kasasi. • Tergugat II mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada tanggal 26 Juli 2023, dengan permohonan sebagai berikut : • Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK untuk seluruhnya; • Membatakan Putusan Kasasi dan Putusan ditingkat Banding.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.

PERKARA PENTING

10.	PT Bank Mandiri Taspen
Nilai Gugatan	Meminta Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian dengan rincian : • Kerugian materiil : Rp2.436.962.487 • Kerugian immaterial : Rp10.000.000.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara belum diputus pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang diajukan oleh **TERGUGAT II** pada tanggal 26 Juli 2023.

11.	PT Bank Mandiri Taspen
Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 1220/Pdt.G/2023/PN Dps 07 November 2023	**Para Pihak** • **Penggugat** : Emiliana Wilujeng • **Tergugat I** : Kadek Radika • **Tergugat II** : Ketut Alit Nariasih Dadu, SH • **Turut Tergugat I** : BPN Gianyar • **Turut Tergugat II** : Bank Mandiri Taspen (KCP Ubud) **Objek Perkara** Terjadi proses jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Tergugat II. Proses jual beli yang terjadi tidak berjalan lancar karena tidak dilakukan penyerahan sertifikat tanah dengan SHM No 1548 Desa Taro an. Kadek Redika dengan luas 1850m2 sedangkan pembayaran sudah selesai dilakukan. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa sebidang tanah tsb masih dibebankan Hak Tanggungan atas nama Turut Tergugat II
Status Penyelesaian	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	Tidak ada potensi kerugian pada perkara ini
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri

12.	PT Bank Mandiri Taspen
Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 462/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst 25 Juli 2023	**Para Pihak** • **Penggugat** : Undang Siregar dan 14 Debitur lainnya • **Tergugat I** : Elmamber Petamu Sinaga (Bank Mandiri Taspen) • **Tergugat II** : Mahendra Siregar (OJK) **Objek Perkara** Klausul dalam Perjanjian Kredit dimana Penggugat pada Petitum Gugatannya meminta untuk mencabut pokok dan bunga kredit pada pinjaman serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
Status Penyelesaian	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	Rp 18.000.000.000 terdiri dari gugatan kerugian materiil + kerugian imateriil
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri

13.	PT AXA Mandiri *Financial* Services
Pokok Perkara atau Gugatan	No. 3/Pdt.G/2021/PN Bjm
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp2.200.000.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung

14.	PT AXA Mandiri *Financial* Services
Pokok Perkara atau Gugatan	No. 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp1.102.800.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan

15.	PT AXA Mandiri *Financial* Services	
	Pokok Perkara atau Gugatan	No. 54/Pdt.G/2023/PN Pal-PN Palu
	Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses banding di PT Palu
	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Reputasi
	Nilai Gugatan	Rp0
	Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam pemeriksaan di PT Palu

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Selama periode tahun 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Pengungkapan Sanksi Administrasi dari OJK kepada Entitas Anak

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Entitas Anak serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

Perkara Penting dari Masing-Masing Entitas Anak dan Entitas Cucu

Perkara penting yang dihadapi masing-masing Entitas Anak selama tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. AXA Mandiri *Financial* Services

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	6	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	8	0

2. Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

3. PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

4. PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	24	3
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	60	2

5. Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	4	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

PERKARA PENTING

6. PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	21	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	23	0

7. Mandiri Inhealth

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	2	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0

8. Mandiri *Capital* Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

9. Bank Syariah Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	263	1
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	148	1

10. Mandiri International Remittance

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

11. Bank Mandiri Europe Ltd.

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Mandiri berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan dengan menyediakan akses dan sarana informasi yang memadai. Selama tahun 2023, Perseroan senantiasa menyediakan informasi penting dan data perusahaan yang membutuhkan sosialisasi kepada publik baik melalui website perusahaan (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) kepada pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Akses informasi dan data perusahaan kepada publik secara eksternal dapat diakses melalui situs web resmi Bank, media cetak, forum komunikasi internal dan media elektronik lainnya.

Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai sarana antara lain Media Massa, Website Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Teuku Ali Usman
Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
Tel : 021 524 5299
Website : www.bankmandiri.co.id
Email : *corporate*.secretary@bankmandiri.co.id

SITUS WEB
www.bankmandiri.co.id

1400-(021) 5299 7777

ALAMAT KANTOR PUSAT

Plaza Mandiri
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
INDONESIA
Tel : 62-21 5265045
Fax : 62-21 5274477, 527557

CONTACT ADDRESS

Corporate Secretary
corporate.secretary@bankmandiri.co.od

Contact Care
Email : mandiricare@bankmandiri.co.id

Media Social
facebook : https://id/facebook.com/officialbankmandiri/
twitter : @bankmandiri
Instagram : @bankmandiri

KODE ETIK

Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

Perseroan menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik merupakan aturan tertulis yang menjadi pedoman nilai-nilai etika/moral yang sesuai dengan budaya Perseroan. Pedoman Kode Etik berisi komitmen Perseroan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan Perseroan untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan etika kerja insan Perseroan. Pedoman Kode Etik berlaku bagi segenap insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu atau institusi lain yang terkait dengan bisnis Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku keseharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal Ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

1	**Benturan kepentingan *(Conflict of interest)***	Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran Bank: 1. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari. 2. Dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk: a. Dirinya sendiri. b. Keluarganya. 3. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan. 4. Dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator. 5. Dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank. 6. Dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya. 7. Hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.
2	**Kerahasiaan**	1. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, sesuai ketentuan yang berlaku. 2. menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank. 3. Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. 5. Dilarang menyebarluaskan informasi kepada pihak luar mengenai: a. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia. b. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank. c. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan d. Data Pegawai, baik yang masih aktif maupun tidak 6. Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan. 7. Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.
3	**Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi**	1. Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk: a. Keuntungan pribadi. b. Keuntungan bagi anggota keluarganya. c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya. 2. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 4. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank. 5. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila: a. Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, dan b. Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan. 6. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada UPG dengan tembusan Kepala Unit Kerja. 7. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima. 8. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Bank. 9. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah. 10. Dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Bank untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Bank.

KODE ETIK

4	**Perilaku insiders**	1. Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya. 2. Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik. 3. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan. 4. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank.
5	**Integritas dan Akurasi Data Bank**	1. Harus meyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi. 3. Hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank. 4. Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.
6	**Integritas Sistem Perbankan**	5. Harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan. 6. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti *money laundering, terrorism financing,* korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

1	**Perilaku individu**	1. Integritas Pribadi a. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat. b. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku. c. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank. d. Menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni. e. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya. f. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan. g. Baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia. 2. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. b. Mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya. c. Tindakan Pelecehan Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Tindakan pelecehan Wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
2	**Perlindungan terhadap Harta Milik Bank**	1. Harta Milik Bank a. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud. b. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank. c. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukkannya. 2. Perlindungan Informasi Rahasia a. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian. b. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum. c. Hak Milik Intelektual Bank 3. Menjaga hak milik intelektual Bank. a. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank. b. Pencatatan dan Pelaporan 4. Bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.

3	**Penyelenggaraan Bisnis Bank**	1. Mis-representasi a. Jajaran Bank yang mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya. b. Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar. c. Jajaran Bank menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain. 2. Hubungan dengan Mitra Kerja a. Senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja. b. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja. c. Dalam bekerja sama dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik. 3. Perilaku dalam Berkompetisi a. Bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis. b. Menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya. 4. Hubungan dengan Organisasi Lain a. Dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank. b. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain. 5. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga a. Menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut. b. Tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor. 6. Hubungan dengan Regulator Memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja/Respectful Workplace *Policy* (RWP) merupakan kebijakan mengenai lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya baik mental maupun fisik bagi seluruh jajaran Bank termasuk pihak-pihak yang berhubungan dengan Bank.

RWP disusun untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif sehingga dapat mendorong keberlanjutan bisnis Bank dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip RWP, seluruh jajaran Bank wajib menghargai kesetaraan dan perbedaan (dilarang berperilaku/melakukan tindakan diskriminasi), serta menghindari berperilaku tidak hormat, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku yang akan menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan orang lain, dan/atau berbagai bentuk pelecehan, perundungan serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kepala Unit Kerja memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif di unit kerjanya masing-masing.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroan dan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner, flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut Knowledge *Management* System (KMS).

KODE ETIK

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system* yang disebut *Letter to* CEO (LTC). Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Bank Mandiri dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

1. **Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri**
   Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".
2. **Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri**
   Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan *website* Perseroan.
3. **Annual Disclosure Benturan Kepentingan**
   Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.
4. **Pakta Integritas**
   Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.
5. **Program *Awareness***
   Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program *jump start*, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	• Teguran Tertulis Pertama • Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	• Peringatan Tertulis Pertama • Peringatan Tertulis Kedua
Sanksi Berat	• Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir • Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Di tahun 2023, telah terjadi 326 pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi	2023	2022	2021
Teguran Tertulis Pertama	155	134	112
Teguran Tertulis Kedua	54	62	26
Peringatan Tertulis Pertama	55	69	47
Peringatan Tertulis Kedua	10	19	29
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	10	11	14
Pemutusan Hubungan Kerja	42	41	50
Total	**326**	**336**	**278**

Adapun jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2023	2022	2021
Ringan	209	196	138
Sedang	65	88	76
Berat	52	52	64
Total	**326**	**336**	**278**

PROGRAM ANTI KORUPSI

Bank Mandiri senantiasa menerapkan praktik dan budaya anti korupsi dan anti penyuapan dalam lingkungan Perseroan dengan menanamkan nilai-nilai dasar *(core values)* perusahaan dan menetapkan beberapa peraturan dan/atau kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, seperti kebijakan internal kontrol, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, Etika Bisnis serta tercermin dalam menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan antara lain menanamkan value integrity dari setiap jajaran Bank Mandiri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal.
2. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit "*cash loan* dan *non cash loan*", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Bank.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
   a. Keuntungan pribadi
   b. Keuntungan bagi anggota keluarganya
   c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
4. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggar larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

1. Membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2023.
3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan pemangku kepentingan Bank Mandiri.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian Gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan menanamkan value integrity kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup *Procurement & Vendor Management* sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan penambahan lingkup *Internal Audit Process* sehingga menjadi Procurement, *Vendor Management and Internal Audit Process* sejak tanggal 20 September 2022. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Managemen Anti Penyuapan ter*update* dengan lingkup *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process* diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2023.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup Procurement & Vendor *Management* untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 2020. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ter*update* diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan lingkup *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process.*

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu *Compliance* & AML-CFT Group. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/196A/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Regional Business Control* (RBC) – *Anti Money Laundering Officer* (AMLO).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:

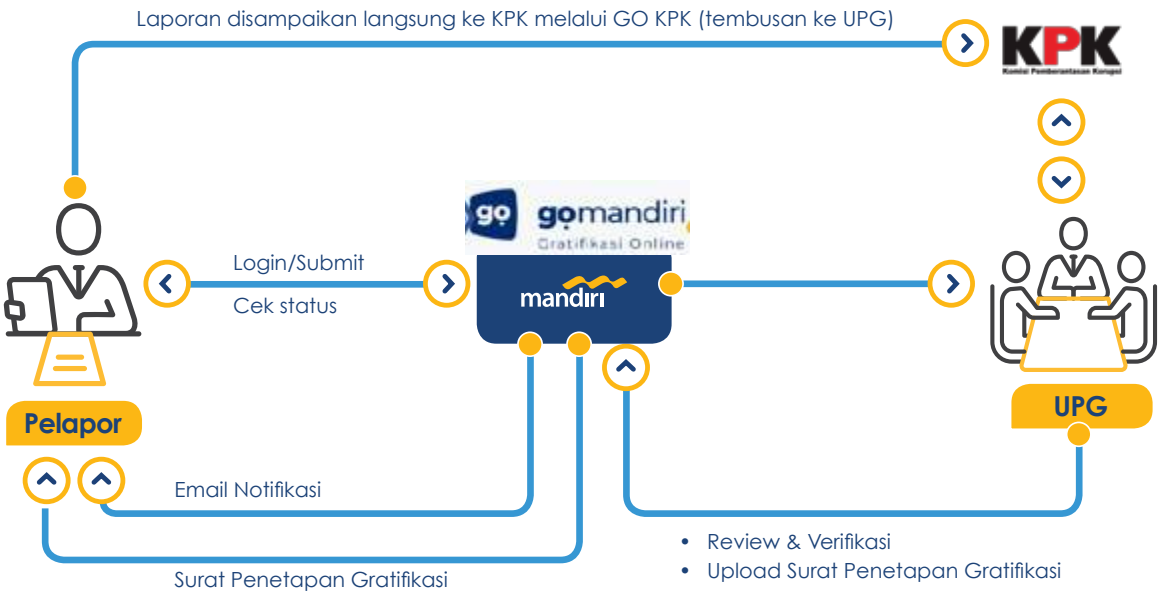

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan RBC-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/SDP/BBMC.

Selama tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai Bank Mandiri, pihak ketiga (*vendor meeting*), serta menerima kunjungan *benchmark* dari Entitas Anak secara daring/*online*.

Media lain yang digunakan dalam menyebarluaskan kebijakan pengendalian gratifikasi yaitu:

1. Pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada *email blast, screen saver, home page website* internal pegawai Bank Mandiri, Majalah Mandiri, selasar lift Plaza Mandiri dan penayangan video pengendalian gratifikasi di lift gedung kantor Bank Mandiri serta pemajangan barang gratifikasi pada lemari pajang barang gratifikasi di lobi selatan Plaza Mandiri.
2. Himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Mandiri (Story Instagram Bank Mandiri, Twitter Bank Mandiri, dan Facebook Bank Mandiri) serta Nota dan Surat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri di Kantor Pusat dan Region serta Entitas Anak.

Laporan Gratifikasi Tahun 2023

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL *(Gratifikasi Online)* dengan alamat *http://gol.kpk.go.id* atau UPG melalui aplikasi Gratifikasi *Online* Mandiri (GO Mandiri) dengan alamat *https://ipa.corp.bankmandiri.co.id/GOMandiri/*.

Selama tahun 2023, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 68 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, dan honorarium dalam rangka kedinasan.

PELANGGARAN INTERNAL *(FRAUD)*

Penerapan Anti *Fraud* di Bank Mandiri didasarkan pada strategi 4 pilar, yaitu (1) pencegahan, (2) deteksi, (3) Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum, serta (4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi Anti *Fraud* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 bagi Bank Umum. Sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan Internal Control, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.

Strategi Anti *Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:

1. Pilar 1 (*Pencegahan*)
   Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:
   a. *Anti Fraud Awareness*, seperti sosialisasi Anti *Fraud Statement*, *Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program*. *Employee Awareness Program* dilakukan dengan cara pemberian *training*, sosialisasi, publikasi fraud awareness melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban *block leave* bagi setiap pegawai. *Customer Awareness Program* dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis
   b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam job description masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan Annual Disclosure oleh seluruh pegawai di awal tahun.
   c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau Know Your *Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.

2. Pilar 2 (Deteksi)
   Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga of defense dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:
   a. *Whistleblowing System-Letter to* CEO, yang telah dilakukan dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan *conflict of interest* dan *memberi* rasa aman pada pelapor.

PELANGGARAN INTERNAL *(FRAUD)*

b. *Fraud Detection System*, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi *fraud* transaksional dan *fraud* non transaksional.
c. *Surprise Audit*, yang diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
d. *Surveillance System*, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud)*.

3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum)
Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.

4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)
Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *Fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	**2023**	2022	**2023**	2022
Total *Fraud*	-	-	49	62	39	33
Telah Diselesaikan	-	-	49	62	39	33
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	1	-	1	2

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM *(INSIDER TRADING)*

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan mengenai *Insider Trading* yang tertuang pada Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri dan Standar Pedoman *Corporate* Secretary. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri mengatur bahwa seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *Insider Trading* dari Otoritas Pasar Modal dan peraturan lainnya.

Dalam Standar Pedoman *Corporate* Secretary, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai *insider information*, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure*/Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2023, tidak terdapat *insider trading* yang terjadi di lingkungan Bank Mandiri.

WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti- *Fraud* (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko yang dilaksanakan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System - Letter to CEO* (WBS-LTC). WBS-LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*.

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan WBS-LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Perbankan, tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri. Selain untuk melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, WBS-LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran norma dan etika maupun pelanggaran *respectful workplace policy*.

Perkembangan *Whistleblowing System-Letter to CEO* (WBS-LTC)

Pengembangan dan penyempurnaan WBS-LTC terus dilakukan untuk senantiasa meningkatkan efektivitas implementasinya. Pada tahun 2023 penyempurnaan juga telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	2023
Harus ada identitas pelapor Hanya untuk pegawai Media hanya melalui surat, email dan sms WBS-LTC dikelola oleh pihak internal	Diperbolehkan tidak mencantumkan identitas pelapor Vendor dapat melapor Media Pelaporan ditambah dengan website WBS-LTC Laporan WBS-LTC meliputi laporan fraud/indikasi fraud WBS-LTC dikelola oleh pihak internal	Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak independen Pihak yang melaporkan berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal Pelapor dapatt mencatumkan identitas lengkap atau *anonymous* (idenntitas hanya diketahui pihak independen) Media pelaporan: SMS/WA, email, website dan surat Laporan WBS-LTC yang lebih luas meliputi laporan fraud/indikasi, non fraud dan masukan/ide perbaikan proses bisnis	Perjanjian kerja sama (PKS) Bank Mandiri dengan KPK No. 83 tahun 2021, No. Dir. PKS/6/2021 tanggal 2 maret 2021 tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh Direktur kepatuhan & SDM Penguatan implementasi program WBS LTC pada anggota konglomerasi keuangan	Bank Mandiri telah dapat mengakses ke dalam aplikasi *Whistleblowing System* KPK (KWS) untuk melaporkan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Maksud dan Tujuan WBS-LTC

Program WBS-LTC sebagai salah satu program Strategi Anti-Fraud (SAF), bertujuan untuk:

1. Mendeteksi indikasi atau perbuatan fraud dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki *(sense of belonging)* pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders* khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

Pengelolaan WBS-LTC

Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:

1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan *(conflict of interest)*.
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan WBS-LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS-LTC yang disampaikannya.

Media Laporan

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non-fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

Website:
https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/

Email:
bmri-wbsltc@tipoffs.info

Surat:
PO BOX 1007 JKS 12007

SMS dan WA:
0811-900-7777

Kerahasiaan Pelapor

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan yang berisi informasi yang berkaitan adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/peraturan yang berlaku sepanjang informasi yang disampaikan oleh Pegawai adalah benar, sesuai fakta dan bukan merupakan laporan palsu termasuk tidak terdapat keterlibatan Pelapor.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui WBS-LTC, antara lain terdiri dari:

1. *Fraud*, yang terdiri dari:
   a. Kecurangan
   b. Penipuan
   c. Penggelapan Aset
   d. Pembocoran Informasi
   e. Tindak Pidana Perbankan
   f. Tindak Pidana Korupsi
   g. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri.
2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran ketentuan eksternal maupun internal termasuk pelanggaran norma dan etika *(code of conduct)*, dengan contoh antara lain:
   a. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan.
   b. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Bank.
   c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank.
   d. Pelecehan.
   e. Diskriminasi, kekerasan dan perundungan *(bullying)* di tempat kerja
   f. Penggunaan narkoba.
   g. Pelanggaran etika termasuk dalam penggunaan media sosial.

Sosialisasi WBS-LTC

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS-LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, screen saver PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS-LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

Mekanisme Pelaporan WBS-LTC

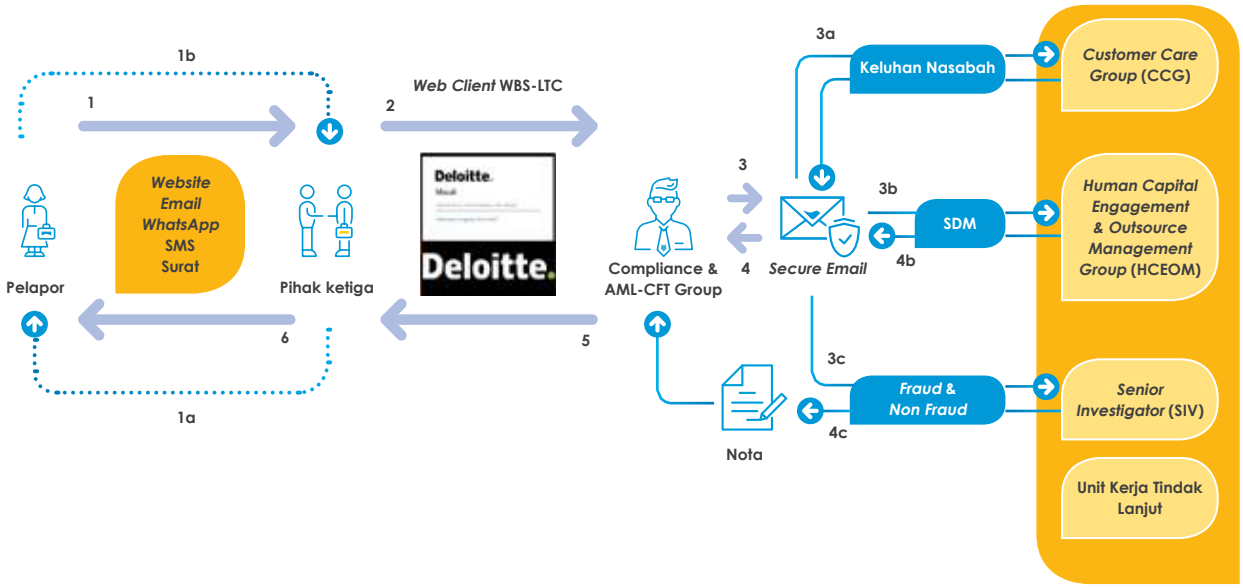

Keterangan:

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS-LTC melalui media *website, email, Whatsapp* & SMS atau Surat PO BOX kepada Pihak Ketiga.
   a. Pihak Ketiga meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H.
   b. Pelapor melengkapi informasinya.
2. Pihak Ketiga menyampaikan laporan WBS-LTC kepada *Compliance* & AML – CFT Group.
3. *Compliance* & AML – CFT Group menganalisa laporan WBS-LTC dan meneruskannya kepada Unit Kerja terkait (CCG, HCEOM atau SIV) sesuai klasifikasi jenis laporan.
4. Unit Kerja yang menindaklanjuti laporan WBS-LTC, menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada *Compliance* & AML – CFT Group.
5. *Compliance* & AML – CFT Group meneruskan kepada pihak ketiga.
6. Pihak Ketiga menginformasikan hasil tindak lanjut kepada Pelapor

Hasil Penanganan WBS-LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media WBS-LTC baik melalui website, e-mail, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian					Klasifikasi Laporan			Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
	Surat	Email	Website	SMS/WA	Call	Fraud	Non Fraud	Lainnya		
2023	**9**	**42**	**55**	**60**	**1**	**46**	**43**	**78**	**167**	**167**
2022	1	47	66	23	0	30	55	52	137	137
2021	2	28	30	17	0	26	29	22	77	77
2020	4	24	38	9	0	29	22	24	75	75
2019	4	24	10	10	0	23	8	17	48	48
2018	0	7	1	0	0	2	2	4	8	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2023

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR/037/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri dan berkewarganegaraan Indonesia yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Perseroan
4. Direksi serta Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi, yang terkonsolidasi dengan Perseroan.

Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah *Corporate Secretary* Group dan *Human Capital Services Group* dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
   b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat *Corporate* Secretary Group dan *Human Capital Services* Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
   b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

Pelaporan LHKPN Tahun 2023

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2023, dari jumlah wajib lapor sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang terdapat 205 (dua ratus lima) orang atau sebesar 99,033% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Adapun persentase ketepatan pelaporan untuk para pejabat yang melapor adalah sebesar 100%.

BUYBACK SAHAM DAN *BUYBACK* OBLIGASI

Selama tahun 2023 tidak terdapat *buy back* saham dan *buy back* obligasi

PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan dan juga penyediaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Mengacu pada kebijakan internal Bank Mandiri pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau pun kelompok, termasuk pejabat eksekutif, Direksi dan Komisaris Perseroan) telah dilaksanakan secara wajar dengan syarat yang wajar dan persetujuan Dewan Komisaris.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris di bidang perkreditan, pemberian kredit di atas Rp3 Triliun secara individual harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Dewan Komisaris. Kredit yang dilaporkan adalah kredit yang diputus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode laporan.

Informasi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait telah terdapat dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Posisi Desember 2023

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait		
	a. Pihak Terkait – Anak Perusahaan	15	5.000.835
	b. Pihak Terkait - Individu	364	414.660
	c. Pihak Terkait - Perusahaan	4	278.535
2.	Kepada Debitur Inti (Group Kelompok Peminjam)	20	325.366.539

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah dijelaskan pada bagian Strategi tahun 2023 Bab Analisis dan Pembahasaan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Bank Mandiri memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank Mandiri.

Berikut rincian penyampaian dan publikasi informasi:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs web Bank Mandiri.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan surat kabar atau media elektronik lain.
3. Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik.
4. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
5. Informasi tata kelola perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan tata kelola perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
6. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
7. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
8. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dengan 11 (sebelas) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Cucu, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh LJK yang berada di dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Bank Mandiri juga telah menyempurnakan organ Tata Kelola dengan membentuk Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian sendiri (*self-assessment*) Bank Mandiri dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral masing-masing LJK.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur, proses dan hasil *(outcome)* pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan TKT berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap semester dengan melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan *Corporate Secretary* serta seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Berikut hasil penilaian TKT selama tahun 2023:

Skor Penilaian

Pada semester I 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan nilai 1.

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Pada semester II 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan di nilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri telah melakukan penerapan TKT yang secara umum baik, yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek TKT yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil.

Dari aspek struktur, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/18/2023 tanggal 11 April 2023.

Dari aspek proses, Bank Mandiri telah melaksanakan rapat Komite TKT sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2023 dimana pelaksanaan rapat dimaksud telah melebihi dari ketentuan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Adapun pembahasan rapat komite dimaksud diantaranya mengenai hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* penerapan TKT, rencana kerja Satuan Kerja Terintegrasi, *Risk Based Bank Rating* Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi.

Dari aspek hasil, Mandiri Group telah mengikuti program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (*CGPI) 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023 oleh Pihak Independen. Terdapat 8 (delapan) Perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang ikut serta dalam pemeringkatan CGPI di tahun 2023. Pada penilaian CGPI dimaksud, 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mantap dan PT Mandiri Sekuritas, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Sangat Terpercaya" dan 5 (lima) Perusahaan yaitu PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Mandiri Utama Finance dan PT Mandiri Manajemen Investasi, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Terpercaya".

Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Entitas Utama, serta 10 (sepuluh) Entitas Anak dan 4 (empat) Entitas cucu yang bergerak di berbagai sektor. Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

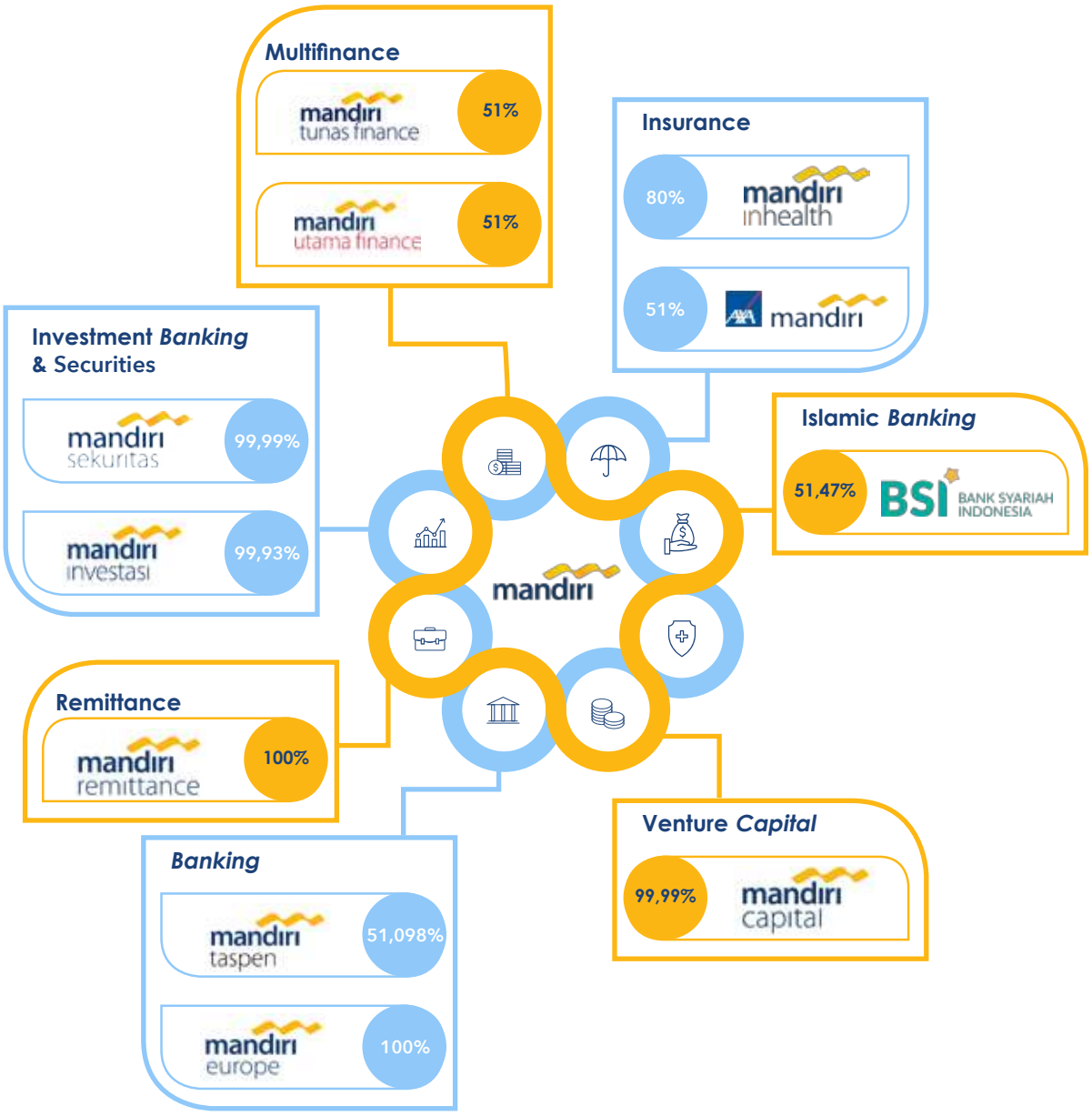

Struktur Konglomerasi Keuangan

Per 31 Desember 2023, struktur kepemilikan saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Bank Syariah Indonesia	51,47%
2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
3	Bank Mandiri Europe Ltd.	100,00%
4	PT Mandiri Tunas Finance	51,00%
5	PT Mandiri Utama Finance	51,00%
6	PT AXA Mandiri *Financial* Services	51,00%
7	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	80,00%
8	PT Mandiri Sekuritas	99,99%
9	PT Mandiri *Capital* Indonesia	99,99%
10	Mandiri International Remittance	100,00%

No.	Perusahaan Cucu	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Mandiri Manajemen Investasi	99,93%
2	Mandiri Securities Pte. Ltd.	100,00%
3	PT Mitra Transaksi PT	99,99%
4	PT FitAja Digital Nusantara	60,00%

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait TKT yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.

Direksi:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
2. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan penerapan TKT dalam konglomerasi keuangan.
4. Menyusun dan menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh Entitas Anak.
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
6. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Selain Bank Mandiri, Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindaklanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Direksi:

1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
2. Menyusun Pedoman tata kelola perusahaan.
3. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi.
5. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.

4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

Bank Syariah Indonesia

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama/Komisaris Independen: Muliaman D. Hadad • Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Adiwarman Azwar Karim • Komisaris: Suyanto • Komisaris: Masduki Baidlowi • Komisaris: Imam Budi Sarjito • Komisaris: Sutanto • Komisaris: Abu Rokhman • Komisaris Independen: Mohamad Nasir • Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan* • Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat **Direksi** • Direktur Utama: Hery Gunardi • Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta • Direktur: Ngatari • Direktur: Moh. Adib • Direktur: Zidan Novari • Direktur: Anton Sukarna • Direktur: Saladin D. Effendi • Direktur: Grandhis • Direktur: Tribuana Tunggadewi • Direktur: Ade Cahyo Nugroho **Dewan Pengawas Syariah** • Ketua: Hasanudin • Anggota: Oni Sahroni • Anggota: Mohamad Hidayat • Anggota: Didin Hafidhuddin

*Telah mengajukan pengunduran diri tanggal 6 November 2023

Bank Mandiri Taspen

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama: Mustaslimah • Komisaris Independen: Suhajar Diantoro* • Komisaris Independen: Boedi Armanto • Komisaris Independen: vacant • Komisaris: Hendrika Nora Osloi Sinaga **Direksi** • Direktur Utama: Elmamber Petamu Sinaga • Direktur: Widi Nugroho* • Direktur: Atta Alva Wanggai • Direktur: Maswar Purnama • Direktur: Judhi Budi Wirjanto

*Masih menunggu hasil F&P Test OJK

Bank Mandiri Europe Limited

Pengurus Perusahaan	**Direksi** • Independent Non-Executive Director (NED) & Chairman: Dian Triansyah Djani • Independent NED: Geoffrey McDonald • NED: Venda Yuniarti • Executive Director & Chief Executive: Aries Syamsul Arifien

Mandiri Sekuritas

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Hoesen • Komisaris: Vacant • Komisaris: Arief Ariyana **Direksi** • Direktur Utama: Mohamad Oki Ramadhana • Direktur: Alex Widi Kristono • Direktur: Harold Tjiptadjadja • Direktur: Silva Halim • Direktur: Theodora Vinca Natalie Manik

Mandiri *Capital* Indonesia

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama: Daniel Setiawan Subianto • Komisaris Independen: Alamanda Shantika Santoso **Direksi** • Direktur Utama: Ronald Samuel Simorangkir • Direktur: I Made Putera Pratistha • Direktur: Wisnu Setiadi

Mandiri Tunas Finance

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan • Komisaris: Totok Priyambodo • Komisaris Independen: Fendy Eventius Mugni** **Direksi** • Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi • Direktur: R. Eryawan Nurhariadi • Direktur: William Francis Indra

Mandiri Utama Finance

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama: Ignatius Susatyo Wijoyo* • Komisaris: Erida • Komisaris Independen: Kusman Yandi **Direksi** • Direktur Utama: Stanley Setia Atmadja • Direktur: Rita Mustika • Direktur: Rully Setiawan **Dewan Pengawas Syariah:** • Ketua: Abdul Gofarrozin • Anggota: M. Ziyad Ulhaq

*Telah mengajukan pengunduran diri tanggal 20 Oktober 2023

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mandiri International Remittance

Pengurus Perusahaan	**Direksi** • Presiden Direktur: Fitri Wahyu A • Direktur Operasional: Mohd Fodli Hamzah • Direktur Non-Eksekutif: Rolland Setiawan • Direktur Non-Eksekutif: Boniangga Anugrah

AXA Mandiri *Financial* Services

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Presiden Komisaris: Trilaksito Singgih Hudanendra • Komisaris: Sally Joy O'Hara • Komisaris Independen: Agus Retmono • Komisaris Independen: Choky Leonard Tobing **Direksi** • Presiden Direktur: Handojo Gunawan Kusuma • Direktur Kepatuhan: Rudy Kamdani • Direktur: Rudi Nugraha • Direktur: Uke Giri Utama • Direktur: Aayush Poddar Dewan Pengawas Syariah • Ketua: Zainut Tauhid Sa'adi

Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama: Mochamad Rizaldi • Komisaris Independen: Fathema Djan Rachmat • Komisaris Independen: Prastuti Soewondo • Komisaris: Hernando Wahyono **Direksi** • Direktur Utama: Budi Tua Arifin Tampubolon • Direktur: Rahmat Syukri • Direktur: Bugi Riagandhy • Direktur: Jenni Wihartini • Direktur: Marihot Halomoan Tambunan

Mandiri Manajemen Investasi

Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama: Mochamad Rizaldi • Komisaris Independen: Fathema Djan • Komisaris Independen: Prastoeti Soewondo • Komisaris: Hernando **Direksi** • Direktur Utama: Budi Tua Arifin Tampubolon • Direktur: Bugi Riagandy • Direktur: Jenni Wihartini • Direktur : Rahmat Syukri • Direktur: Marihot Halomoan Tambunan

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank Mandiri telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan Komisaris Independen Bank Mandiri (selaku Entitas Utama) dan Komisaris Independen perwakilan setiap industri pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
   a. Hasil evaluasi pelaksanaan TKT;
   b. Penyempurnaan Pedoman TKT.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Sejalan dengan implementasi POJK No. 18/POJK.03/2014, Bank Mandiri telah menetapkan *Compliance* & AML-CFT Group sebagai SKKT yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Mandiri Group. Adapun tugas dan tanggung jawab SKKT adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2023, SKKT Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan TKT yaitu sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
4. Melakukan *review* dan evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF).
5. Forum diskusi dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan *(forward looking)* dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
6. Pencantuman *framework* pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
7. Penyampaian *resume* regulasi baru kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan monitoring pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Entitas Utama telah menetapkan Internal Audit sebagai SKAIT yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAIT, dalam hal ini Internal Audit, juga telah berkolaborasi dengan 1st line dan 2nd line Bank Mandiri serta Internal Audit Entitas Anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi internal control berjalan efektif di Mandiri Group.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari SKAI Entitas Anak.
2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
   a. Evaluasi rencana audit SKAI Entitas Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
   b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Pada tahun 2023, SKAIT Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 6 (enam) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun Annual Audit Plan (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan *review* terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Di samping itu, SKAIT Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala SKAIT pada sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi SKAIT.
2. Forum peningkatan kapabilitas Audit Internal SKAIT dan SKAI Entitas Anak melalui training, workshop, benchmarking, attachment, dan auditor SKAI PA ikut serta sebagai guest auditor dalam beberapa penugasan audit SKAI Induk.
3. Forum penyelarasan Internal Audit Charter PA.
4. Penyelenggaraan forum SKAI Mandiri Group secara berkala.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio *Risk* Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
   a. Profil risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
   c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress testing*.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2023, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/ terintegrasi yaitu antara lain:

1. Penyusunan *Consolidated Counterparty Limit* (CCL)
2. Pelaksanaan Stress Testing Mandiri Group secara rutin setiap Semester
3. Pelaksanaan *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) setiap Triwulan.
4. Operational Risk Management Alignment
5. *Alignment* Perhitungan dan Monitoring Risiko Pasar Trading Book pada Entitas Anak *Insurance*, Sekuritas, dan Multifinance.

Kebijakan Transaksi Intragroup

Pengembangan Bank Mandiri dan Entitas Anak secara agresif pada berbagai segmen bisnis membuat Bank serta Entitas Anak senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam satu ekosistem bisnis. Hal tersebut menimbulkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank senantiasa menjaga agar Transaksi Intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Seluruh proses transaksi intragroup serta kerja sama yang terjalin di dalam Mandiri Group, dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), Petunjuk Teknis Operasional Penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan senantiasa berpedoman pada Mandiri Subsidiary *Management* Principles Guideline, yaitu pedoman bagi Mandiri Group dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Adapun kebijakan mengenai risiko transaksi intragroup di Bank Mandiri mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03./2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap kinerja bisnis maupun risiko yang timbul atas sinergi bisnis Bank dengan Entitas Anak. Dalam hal ini, Bank selalu memastikan bahwa Transaksi Intragroup dalam Mandiri Group senantiasa sesuai dengan aturan serta limit yang telah ditetapkan Regulator.

Mandiri *Subsidiaries Management Principle Guideline* (MSMPG) Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) merupakan pedoman bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis melalui budaya kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak secara berkesinambungan, dengan tetap berpegang kepada prinsipprinsip GCG dan Anggaran Dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Prinsip pengelolaan Entitas Anak Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan MSMPG meliputi aktivitas Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keuangan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Sumber Daya Manusia, *Procurement*, Sinergi Bisnis Entitas Anak, *Strategy & Performance Corporate Culture Values*, Kerjasama Teknologi Informasi, Manajemen Data, *Corporate Sustainability Principles*, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Entitas Anak sebagaimana berikut:
1. Entitas Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri.
2. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Entitas Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.

PRAKTIK *BAD* *CORPORATE GOVERNANCE*

Terjadinya praktik-praktik *bad corporate governance* dalam sebuah perusahaan akan mengganggu sistem GCG yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri, dengan menyadari hal tersebut, Bank Mandiri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak ada
2	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak ada
3	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Tidak ada
4	Tidak menyampaikan kasus/perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Tidak ada
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Tidak ada
6	Ketidaksesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara hardcopy dan softcopy di website	Tidak ada
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/ Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Tidak ada

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah dijelaskan *(explained)* dalam website Bank Mandiri.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan praktik tata Kelola perusahaan yang baik dengan menjadikan pencapaian keberlanjutan sebagai tujuan jangka panjang, Bank Mandiri menerapkan pengelolaan risiko terkini yang mengintegrasikan mitigasi risiko bisnis Bank dengan mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dilakukan secara proaktif demi mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang seimbang dengan pencapaian kinerja pada aspek lingkungan maupun sosial. Bank kemudian menetapkan tingkat *risk-adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel, pemberlakuan IFRS S2 *Climate Related Disclosure* dan *international best practices* lainnya. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, kondisi internal Bank dan dampak sosial maupun lingkungan sekitar.

Proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi di sepanjang tahun 2023, masih diwarnai berbagai ketidakpastian akibat berlarutnya perang Rusia – Ukraina, memanasnya konflik di Timur Tengah, gangguan rantai pasok dan intensifnya gejala perubahan iklim skala global yang memicu terjadinya inflasi tinggi. Kenaikan suku bunga acuan (*benchmark rate*) negara-negara maju yang diberlakukan untuk meredam inflasi pada akhirnya memicu terjadinya *capital outflow* dari *Emerging Markets* (EMs) dan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan perekonomian global.

Berbagai faktor tersebut meningkatkan risiko yang harus diatasi oleh Bank, seperti potensi naiknya NPL, depresiasi Rupiah terhadap eksposur valas, pelemahan *Net Interest Income*, turunnya valuasi portofolio surat berharga, kecukupan likuiditas, berkurangnya ketahanan permodalan ditambah dengan meningkatnya eksposur risiko investasi akibat menguatnya sentimen perubahan iklim bersamaan dengan naiknya risiko sosial akibat meningkatnya harga pangan. Untuk mengukur dampak pemburukan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial yang kini telah semakin terintegrasi, Bank melakukan *stress testing* internal secara berkala, sekaligus mempersiapkan mitigasi yang relevan atas setiap potensi risiko yang muncul.

Sebagai Langkah antisipasi terhadap menurunnya stabilitas makroekonomi, memburuknya dampak perubahan iklim dan kondisi sosial yang menyertainya, Bank Mandiri secara internal telah melaksanakan *stress testing* berkala baik secara individu maupun terintegrasi dengan Perusahaan Anak, berdasarkan skenario makroekonomi yang disusun oleh *Office of Chief Economist*, serta mempertimbangkan skenario meningkatnya risiko perubahan iklim dan kondisi sosial yang disampaikan oleh pihak internal terkait. Selain *stress testing* internal, Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam *regulatory Bottom-up Stress Testing* yang dilakukan secara berkala, dan *ad hoc stress testing* seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) *Risk & Vulnerability Group stress testing* yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian Bank atas ketahanan perbankan regional atas potensi tantangan yang muncul pasca-pemulihan pandemi dan terhambatnya pertumbuhan perekonomian akibat berlanjutnya berbagai faktor pemicu ketidakpastian tersebut diatas.

Bank Mandiri telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan *(Recovery Options)* untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. *Recovery Plan* yang disusun meliputi analisis terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis kondisi krisis (*reverse stress testing*) yang dapat terjadi pada Bank secara *idiosyncratic, market-wide shock*, maupun dampak perubahan iklim dan *social shock* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non-viability*).

Di tahun 2023 Bank Mandiri kembali menyampaikan dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Rencana Resolusi adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank, yang sejalan dengan Rencana Aksi, serta analisa strategi resolusi yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. Bank bertekad memenuhi kewajiban untuk melakukan pengkinian dokumen Rencana Resolusi serta menyampaikan hasil pengkinian tersebut kepada otoritas resolusi setiap 2 (dua) tahun. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan bagi Bank Selain Bank Sistemik yang ditunjuk oleh otoritas resolusi diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
6. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* bagi Bank Umum.
10. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
11. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
12. Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio)* bagi Bank Umum.
13. Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
14. Peraturan OJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum.
15. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
17. Peraturan OJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
18. Peraturan OJK No. 11/ POJK.03/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
19. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
20. Peraturan OJK OJK No. 27/POJK.03/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

MANAJEMEN RISIKO

21. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
22. Peraturan Bank Indonesia No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
23. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
24. Surat Edaran OJK No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
25. Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi *(Recovery Plan)* bagi Bank Sistemik.
26. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
27. Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
28. Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko Pasar Bagi Bank Umum.
29. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
30. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
31. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
32. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
33. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
34. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
35. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
36. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book (Interest Rate Risk In Banking Book)* Bagi Bank Umum.
37. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
38. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
39. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
40. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

Manajemen risiko Bank diatur dalam kebijakan manajemen risiko yang disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel, dan *international best practices*. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kondisi usaha, regulasi, dan kondisi internal Bank. Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan berfungsi sebagai pedoman utama dan pengaturan tertinggi di bidang manajemen risiko di Bank Mandiri. KMNR merupakan acuan untuk kebijakan, prosedur dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Permodalan
   Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi
   Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
3. Independensi
   Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
4. Terintegrasi
   Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
5. Berkesinambungan
   Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.
6. Akuntabilitas
   Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.
7. Responsibilitas
   Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kewajaran
   Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi dengan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practices* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
   a. Identifikasi risiko
      Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
   b. Pengukuran risiko
      Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.
   c. Pemantauan risiko
      Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.
   d. Pengendalian Risiko
      Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Bank Mandiri *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight, Risk Policy and Management,* dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control.* Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit sebagai *Independent Assurance* dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

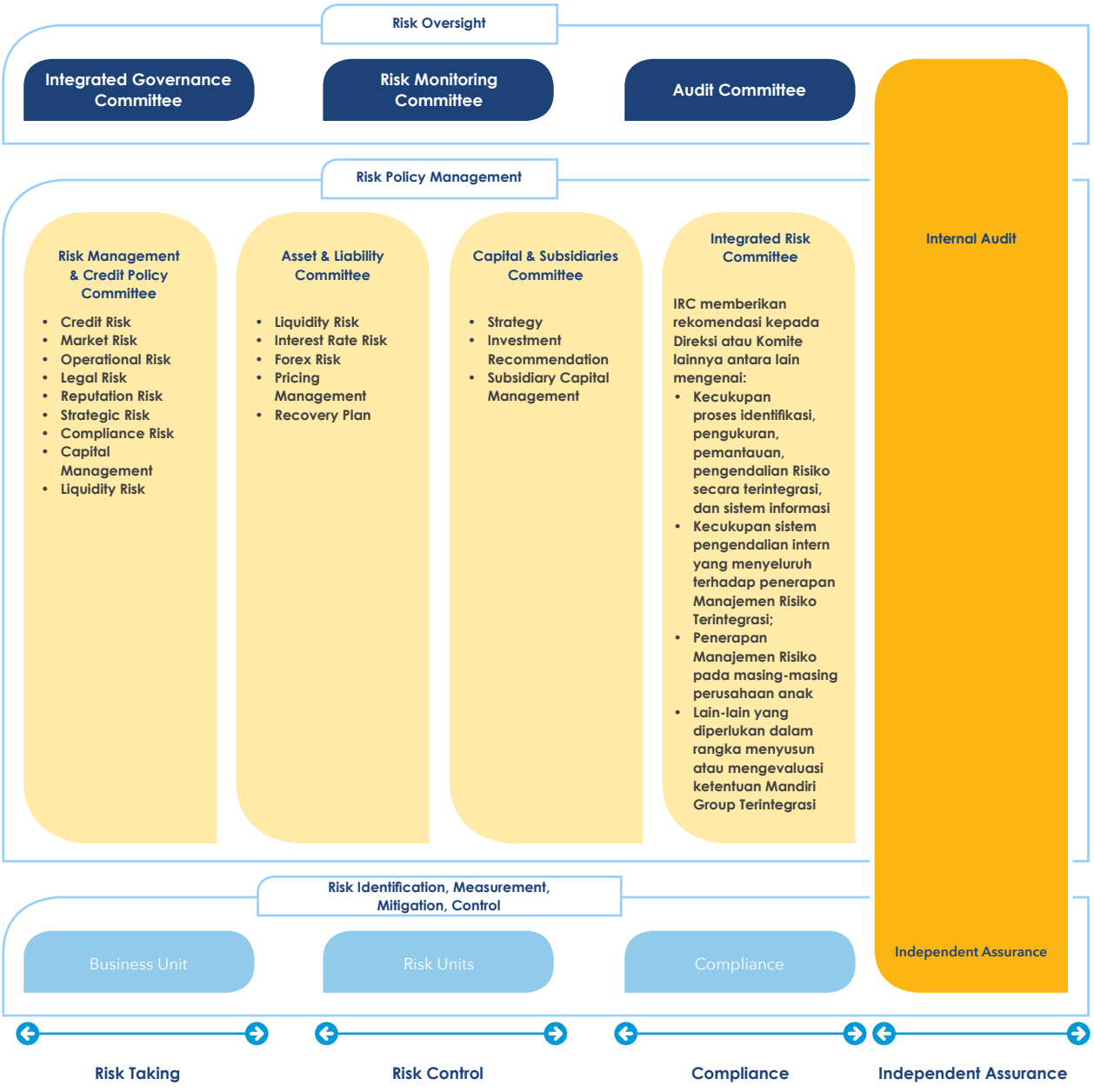

Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy & management*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management & Credit Policy Committee*, *Asset & Liability Committee* (singular), *Capital & Subsidiaries Committee*, dan *Integrated Risk Committee*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi strategi yang disusun dan ditetapkan Direksi dalam mengelola risiko-risiko sesuai taksonomi regulasi maupun risiko-risiko lainnya seperti *country risk* dan *cyber risk*
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar tertentu;
6. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait;
7. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
8. Melakukan pengawasan aktif terkait anti *Fraud* paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
   b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank;
   c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
   d. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
   e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
   f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
   g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.
9. Menyetujui, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
10. Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Dewan Komisaris wajib:
    a. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
    b. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Bank dalam Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
    c. Melakukan evaluasi atas rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun oleh Direksi;
    d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
11. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;

Dalam rangka penerapan manajemen risiko sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian BUMN, Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk menetapkan klasifikasi Risiko Bank berdasarkan tingkat Intensitas Risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas Bank atas usulan Direksi, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

3. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:
1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang;
5. Pengawasan aktif Direksi terkait anti *Fraud* sama dengan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
7. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan;
   a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
   c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko *(risk limit)* dan/ ambang batas *(threshold)*.
9. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
10. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank, yang mencakup:
    a. Menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
    b. Menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
    c. Mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank;
    d. Melakukan evaluasi dan pengujian (*Stress Testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
    e. Mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.
11. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang mencakup:
    a. Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
    b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
    c. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan;
    d. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
    e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
12. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
13. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN.

Dalam hal penerapan manajemen risiko sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian BUMN, Direksi juga memiliki tugas untuk menetapkan klasifikasi Risiko Perusahaan Anak berdasarkan tingkat Intensitas Risiko, dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif;
2. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
3. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
4. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
6. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk komite yang mengacu pada peraturan regulator yang berlaku

Organ Pengelola risiko di Bank Mandiri terdiri atas:
1. Dewan Komisaris
2. Komite Di Bawah Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite Di Bawah Direksi
5. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
7. Satuan Kerja Operasional *(risk-taking unit);*
8. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
9. Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja *Audit Intern* (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Mandiri merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi dan di-*update* minimal sekali dalam setahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*). Tingkat risiko/*Risk Appetite* merupakan jenis & tingkat risiko yang dapat diambil/dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dalam rangka mencapai/melebihi tujuan bisnis.

Risk Appetite Bank Mandiri diwujudkan melalui *Risk Appetite Framework* yang merupakan suatu *strategic decision-making* yang menggambarkan *risk strategy* Bank Mandiri. *Risk Appetite* tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Risk appetite diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Mandiri terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.

Sistem Pengendalian Intern

Bank Mandiri menjalankan Sistem Pengendalian Internal atas fungsi Manajemen Risiko dengan menerapkan kebijakan *Three Lines Models* dimana dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama baik lini pertama, lini kedua maupun lini ketiga.

Satuan Kerja *Audit Intern* sebagai lini ketiga melakukan kegiatan *assurance* dan *consulting* terhadap kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola Bank secara berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Bank

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi di Bank Mandiri telah diterapkan sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Dalam implementasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank Mandiri juga berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu kepada POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/ Terintegrasi dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip Manajemen Risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi Otoritas/Pengawas setempat. Adapun Perusahaan Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri (Europe) Ltd, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri Inhealth, Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital Indonesia dan Mandiri International Remittance.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Entitas Utama terhadap penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi, Bank Mandiri memiliki *Integrated Risk Committee*/IRC (Komite Manajemen Risiko Terintegrasi) yang beranggotakan Direksi serta pejabat Perseroan bersama dengan Direksi dan/atau Pejabat dari Perusahaan Anak. Bank Mandiri juga memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Bank Mandiri secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Mandiri Group (*self-assessment*), dengan menggunakan sistem informasi terpadu yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator* (RACER) *System* untuk mendukung proses pelaksanaan *self-assessment* dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/Risk Based Bank Rating (RBBR) secara Konsolidasi, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola Terintegrasi, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2023, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2022 dan Semester I 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Stratejik dan Kepatuhan). Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah melaporkan hasil self-assessment Profil Risiko Konsolidasi periode Triwulan IV 2022 dan Triwulan I, II, III 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko Terintegrasi yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko (8 jenis risiko ditambah Risiko Transaksi Intra-Group dan Asuransi). Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah melaporkan Profil Risiko Terintegrasi periode Semester II 2022 dan Semester I 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.

Usulan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/ Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi direkomendasikan oleh *Integrated Risk Committee* (IRC) dan persetujuannya diputus oleh *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC) Kategori A. Selanjutnya, hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi yang telah disetujui oleh RMPC dilaporkan kepada Regulator dan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Dalam rangka mewujudkan visi Bank Mandiri menjadi *"We aim to be your preferred financial partner"* Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko diterapkan di seluruh lapisan, baik pada lapisan tertinggi organisasi hingga seluruh pegawai. *Risk Appetite Statement* (RAS) yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Bank sebagai tingkat risiko yang sanggup diterima Perseroan, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Upaya peningkatan budaya sadar risiko juga tercermin dalam perkembangan produk dan teknologi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dimana selalu diimbangi oleh Sistem Manajemen Risiko yang memadai untuk menjaga *sustainability* business dan menyertakan *risk assessment* serta mitigasi risiko sebelum produk atau aktivitas tersebut diluncurkan/ dijalankan. Hal ini juga berlaku dalam penyusunan ketentuan internal Bank, baik level kebijakan hingga petunjuk teknis.

Keberhasilan budaya sadar risiko ini juga tentunya harus didukung penuh oleh seluruh pegawai Bank Mandiri, oleh karena itu *risk awareness* juga dilekatkan pada program internalisasi budaya *(corporate culture)*. Budaya AKHLAK sebagai *core values* Bank Mandiri diterapkan untuk memastikan menjadi *attitude* (perilaku) sehari-harian dalam bekerja, dimana setiap insan Bank Mandiri diharapkan dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Strategi komunikasi yang baik juga turut berperan penting dalam peningkatan budaya sadar risiko. Bank Mandiri menggunakan beragam media komunikasi untuk memastikan pesan tersampaikan dalam cakupan yang luas. Penggunaan beragam media ini juga dilakukan secara menyeluruh, *adaptive* dan berkelanjutan sehingga budaya risiko dapat diwujudkan dalam *framework* pengelolaan risiko yang terbuka, efisien dan efektif.

RISK AWARENESS *PROGRAM*

Fondasi pengelolaan risiko yang efektif adalah membangun budaya sadar risiko dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan budaya sadar risiko *(risk awareness)* khususnya risiko operasional di kalangan pegawai, Bank Mandiri telah memiliki sejumlah program unggulan yaitu *operational risk awareness* (OPERA), *fraud awareness, security awareness, compliance awareness*, dan *business continuity awareness*. Program ini didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengelolaan risiko oleh setiap level pegawai Bank Mandiri. Program awareness ini diselenggarakan secara berkala dan menyeluruh secara *bankwide*, termasuk untuk Perusahaan Anak dan Cabang Luar Negeri. Rangkaian program *awareness* disusun secara *thematic based* yang adaptif terutama dalam merespon adanya tren emerging risk yaitu peningkatan risiko eksisting maupun munculnya potensi risiko baru, antara lain *Cyber Resilience & Data Security, significant event internal* maupun eksternal, berita terkini seputar risiko operasional, *top global risk*, hasil *Control Testing*, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023, terdapat inisiatif penyelarasan *(alignment)* program *risk awareness bankwide* yang bertujuan agar seluruh program *awareness* dapat tersampaikan dengan baik sesuai ketentuan Regulator dan pada akhirnya akan meminimalisir kerugian Bank akibat risiko operasional. Inisiatif ini mencakup standarisasi bentuk penyampaian program, media atau *channel*, dan *target audiens*.

Secara umum, program *risk awareness* terbagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan dimensi yaitu:

1. Buzz
   Buzz adalah sebutan program *risk awareness* yang bersifat *one-way* dan tidak memerlukan tanggapan dari pegawai, misalnya poster, komik, video, dan sebagainya.
2. School
   School merupakan program *risk awareness* yang bersifat *two-way* dan memerlukan tanggapan atau respon yang diisi oleh pegawai, misalnya survei dan *e-learning*.

No.	Program Buzz	Frekuensi	Target Audiens
1	**Toon** Komik berkarakter kartun pendek dengan konten sehari-hari yang ringan dan kekinian.	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri *Region* dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
2	**Poster** Poster satu halaman berisi *quotes*/kalimat ajakan bagi pegawai untuk aware terhadap risiko.	Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri *Region* dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
3	***Infographics*** Artikel/ infografis berisi penjelasan isu risiko dan tips & tricks secara komprehensif.	Dua Bulanan	• Pegawai Bank Mandiri *Region* dan Kantor Pusat • Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
4	**Video** Video singkat yang mengangkat isu atau tren suatu risiko beserta mitigasinya.	Adhoc	Pegawai organik, kontrak, TAD
5	**Modul** Materi berisi framework manajemen risiko sebagai pedoman pegawai *(handbook)*.	Adhoc	Pegawai organik, kontrak, TAD

No.	Program School	Frekuensi	Target Audiens
1	**Forum** Siaran/forum/ *workshop* yang membahas isu/tren seputar risiko dan mitigasinya.	Triwulanan	Pegawai organik, kontrak, TAD
2	**Survei** Survei/ceklis berisi pertanyaan singkat kepada pegawai melalui Ms. Form.	Bulanan	Pegawai Bank Mandiri *Region* dan Kantor Pusat Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
3	***E-learning*** Pembelajaran kepada pegawai berisi materi beserta *post test* yang harus dikerjakan.	Tahunan	Pegawai organik

Dengan adanya program *risk awareness*, pegawai menjadi lebih mudah dalam memahami pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga penerapannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

PENGELOLAAN RISIKO BANK

Pengelolaan risiko bank dilakukan secara terintegrasi melalui kerangka kerja Enterprise *Risk Management* yang menghubungkan antara *strategic planning, risk appetite, execution, risk assessment* dan *performance evaluation,* dalam upaya memaksimalkan shareholder value. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan shareholder untuk mewujudkan *Corporate Plan*. Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong,* yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:

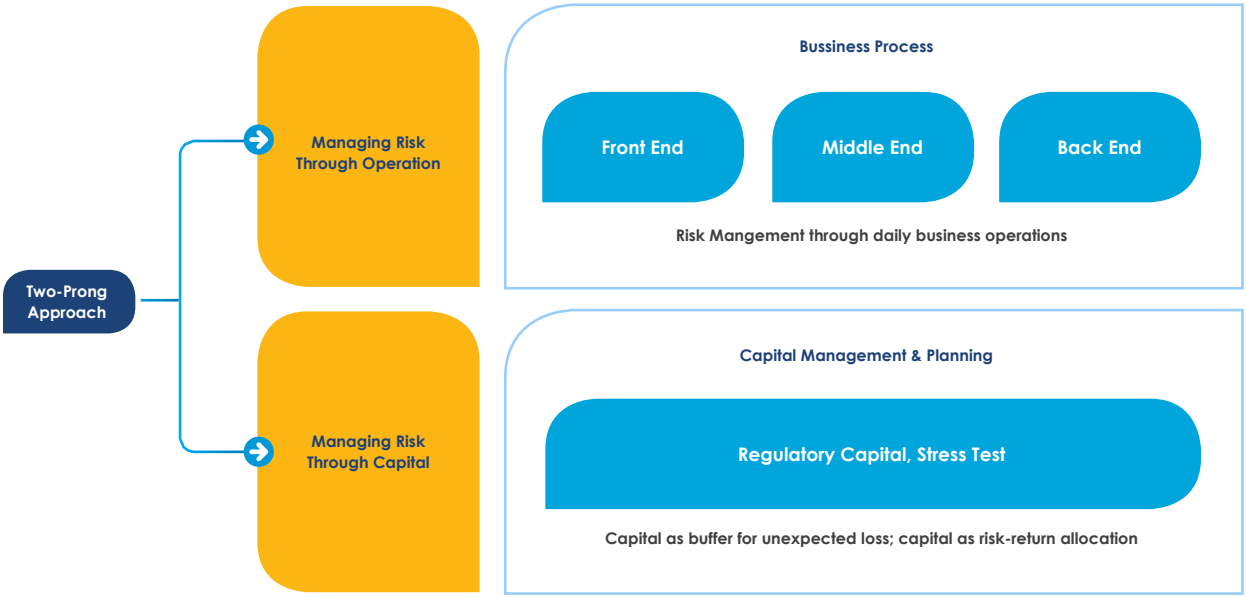

RISK AWARENESS PROGRAM

Dalam penerapan pendekatan *two-prong* terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung, antara lain:

1. Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mandiri bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy* ataupun melalui pemanfaatan tenaga kerja asing di bidang *risk management* sehingga terjadi *transfer of knowledge* kepada pegawai Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin mengadakan sosialisasi minimal sekali dalam setahun, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

Struktur Manajemen Risiko di Bank Mandiri terdiri dari Direktorat Manajemen Risiko yang membawahi unit Independent Risk *Management, Credit Approval Risk* yang terdiri dari *Wholesale Risk* dan *Retail Risk*. Direktorat Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko yang dibantu oleh SEVP *Wholesale Risk*.

2. Kebijakan & Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

a. Prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta early warning system.
b. Manajemen Risiko, antara lain melalui penyusunan *Risk Appetite, Risk Profile*, Tingkat Kesehatan Bank, *Stress Testing, Recovery Plan*, dan *Resolution Plan*, serta Manajemen Risiko Terintegrasi.
c. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
d. Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/ metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

3. Sistem & Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan *Integrated Processing System* dan *Loan Origination System* untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di segmen *Corporate, Commercial* maupun Retail. Untuk meningkatkan produktivitas aktivitas *collection* khususnya di segmen *Consumer* dan Retail, Bank mengimplementasikan *Integrated Collection System*. Bank Mandiri menggunakan *Summit System* dan NTCS (*Front Arena*) untuk mengelola risiko *trading book* dan pelaporan FRTB, serta *Ambit Focus System* (FIS) untuk mengelola risiko banking book dalam kegiatan *treasury* dan *liability management*.

Sebagai sistem informasi pengelolaan risiko secara terintegrasi yang digunakan dalam penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri, baik secara individu, terkonsolidasi dan terintegrasi, Bank telah mengimplementasikan *web-based tools Risk Assessment Consolidation Generator System* (RACER), sehingga proses penilaian risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akurat, akuntable dan kewenangan akses ke dalam sistem yang lebih terjaga.

4. Metodologi/Model & *Analytics*

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating, scoring, Value at Risk* (VaR), portofolio *management, stress testing, fraud model* dan model lainnya sebagai pendukung *judgemental decision making*.

Secara periodik, model yang ada divalidasi oleh Unit Model Validator yang independen untuk meyakini kualitas dan validitas model. Hal lainnya yang juga diterapkan terkait pengelolaan risiko model (model risk) dari model-model risiko tersebut adalah melalui kerangka tata kelola pengelolaan model (*Model*

Risk Management) yang melekat pada fungsi Unit Pembina Tata Kelola Model. Pengelolaan atas risiko model dilakukan untuk memastikan adanya suatu kontrol terhadap setiap komponen model yang digunakan dalam proses bisnis dan juga pengambilan keputusan. Kerangka tata kelola pengelolaan model ini meliputi:

a. *Inventory Model*
   Melalui *inventory model* dilakukan inventarisasi model yang ada di Bank Mandiri. Inventarisasi model ini mencakup informasi yang berkaitan dengan model diantaranya deskripsi atas hasil statistik model, tujuan penggunaan model, model *owner*, model *developer*, model *user*, hasil validasi, dan dokumentasi terkait model. Selain itu, pada sistem atas model Inventori, kita dapat melihat suatu model akan berada pada siklus model tertentu sesuai Model *Lifecycle*, diantaranya inisiasi model, pengembangan model, validasi model, implementasi model, penggunaan model dan monitoring model.

b. Model *Risk Assessment*
   Assessment terhadap tingkat risiko model berdasarkan pendekatan yang dapat dikuantifikasi dengan melihat kepada materialitas dan kompleksitas model.

c. Model Control
   Proses *monitoring* model serta kontrol terhadap model bersifat *continous assessment*. Proses kontrol dilaksanakan melalui validasi model baik yang bersifat *first-time validation* maupun *on-going validation*. *First-time validation*, validasi yang dilakukan pertama kali setelah proses pengembangan model untuk memastikan model yang dikembangkan telah sesuai dengan kaidah akademis, *best practice* serta memenuhi persyaratan regulator. *On-going validation*, validasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kinerja model.

Dengan adanya penerapan kerangka tata kelola pengelolaan model ini terlihat adanya proses *segregation of duties* diantara *first line* (*model owner, model developer, model user*), *second line* (*model validator*, unit pembina tata kelola model), dan *third line* (Internal Audit) sesuai dengan *three lines model.*

Bank Mandiri juga terus melaksanakan implementasi Basel II, III dan ERM, baik dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision)* maupun *best practices*, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book Position,* Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), pelaksanaan *Stress Testing*, serta *Recovery Plan* dan *Resolution Plan.*

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola oleh Bank Mandiri secara terintegrasi, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Transaksi Intra-Group
10. Risiko Asuransi
11. Risiko Keberlanjutan/ESG

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Pengelolaan dan mitigasi risiko kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit. Proses pengelolaan risiko kredit Bank Mandiri untuk segmen *Wholesale* diawali dengan penentuan target pasar yang mengacu pada *Loan Portfolio Guideline*, yang membagi sektor industri ke dalam *Industry Classification* (menarik, netral, selektif, waspada) berdasarkan *outlook* dan kualitas portofolio, serta *Industry Limit* yang bertujuan untuk meminimalisir risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu.

Selanjutnya, untuk memperoleh *pipeline* calon debitur yang berkualitas, dilakukan proses *pre-approval* melalui sejumlah tahapan menggunakan *credit risk tools*. Tahapan-tahapan tersebut di antaranya proses *Clearance* yang mencakup analisa awal terhadap *targeted customer* yang meliputi reputasi, bisnis, keuangan yang kemudian dilanjutkan dengan *credit risk assessment* dengan memperhatikan peringkat, kondisi keuangan, analisa calon debitur, dsb. Hasil asesmen ini kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit dengan *four-eyes principle* yang melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen.

Setelah proses pencairan/*disbursement* kredit, secara reguler dilakukan *monitoring* (*early warning signal*) untuk mendeteksi lebih dini debitur yang berpotensi bermasalah sehingga dapat disusun *action plan* secara tepat sasaran antara lain mencakup aktivitas *collection, recovery* maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail, karena sifatnya adalah *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses *monitoring* dilakukan secara portofolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang dapat dilanjutkan dengan proses *collection* dan *recovery* untuk bagian portofolio yang bermasalah.

Untuk mengantisipasi pemburukan kondisi makroekonomi maka dilakukan *what-if analysis* terhadap portofolio wholesale dan retail melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa skenario makroekonomi tertentu.

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan *Management Limit* untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit, Credit Operation Unit* dan *Credit Risk Management Unit*.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian Bank terhadap risiko lingkungan serta sebagai salah satu wujud penerapan prinsip tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mandiri telah mengintegrasikan aspek Lingkungan,

Sosial dan Tata Kelola (LST) ke dalam Petunjuk Teknis *Industry Acceptance Criteria* yang digunakan untuk menyeleksi calon debitur yang berkualitas serta calon debitur yang telah menerapkan prinsip LST dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur bahwa penilaian prospek usaha debitur juga mempertimbangkan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup. Selain itu dalam rangka pemeliharaan lingkungan, Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four-eyes principle* yaitu setiap pemutusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk* Management Unit secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dengan proses pemutusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur maupun produk telah di-*cover* dan dicadangkan melalui CKPN yang saat ini dihitung berdasarkan PSAK 71 per 1 Januari 2020, serta dipantau melalui *indicator cost of credit*.

Sepanjang tahun 2023, Bank terus melakukan monitoring rutin atas portofolio debitur terdampak pandemi Covid-19. Posisi Oktober 2023 baki debet portofolio restrukturisasi covid sudah mengalami perbaikan secara cukup signifikan menjadi sebesar Rp21,1 Triliun dibandingkan posisi Desember 2022 sebesar Rp35,9 Triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari debitur yang melakukan pembayaran normal seperti sebelum pandemi sehingga dapat dilakukan penghilangan flag restrukturisasi Covid-19 dan juga karena pelunasan fasilitas kredit.

OJK melalui keputusan Dewan Komisioner No. 34/KDK.03/2022 menentukan kriteria baru perpanjangan restrukturisasi Covid-19 yang mengatur pemberian perpanjangan restrukturisasi Covid-19 secara lebih ketat. Hal ini berpotensi dapat meningkatkan NPL apabila tidak dikelola dengan baik. Persentase NPL *(Excluding Bank)* Bankwide telah berhasil diturunkan dari level 1,88% per Desember 2022 menjadi 1,06% per Desember 2023 Perbaikan NPL ini salah satunya didukung oleh optimalisasi upaya *Upgrade* Kolektibilitas dan *Collection* pada debitur-debitur NPL di sepanjang 2023. Pada aspek LAR *Include* Covid-19, Bank juga telah berhasil menurunkan LAR *Include* Covid-19 dari 12,10% per Desember 2022 menjadi 9,18% per Desember 2023 sebagai efek dari menurunnya NPL dan portofolio restrukturisasi Covid-19. Ke depannya di 2024, Bank memproyeksikan NPL akan tetap stabil dengan kecenderungan membaik.

PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office, middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book*.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri terdiri dari:

1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu *Asset & Liability Committee* dan *Risk Management and Credit Policy Committee*.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Sedangkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar baik portofolio *trading book* dan *banking book* diatur dalam *Standar Prosedur Treasury* (SPT) *dan Standar Prosedur Asset & Liability Management* (SP ALM).

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – Trading Book

Risiko pasar *trading book* merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Pengelolaan risiko pasar Bank Mandiri dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan unit kerja *treasury*, yang terdiri dari:

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Prinsip *Segregation of Duties*



Pengukuran atas risiko pasar *trading book* dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator serta beberapa indikator internal, diantaranya perhitungan *Value at Risk*, simulasi sensitivitas, serta *stress testing*. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan beberapa jenis limit transaksi pada level *dealer* untuk memastikan eksposur atas transaksi trading tetap sesuai dengan *risk appetite* manajemen.

Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – Banking Book

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perpective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank Mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.

PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Risiko Likuiditas Pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh (1) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau (2) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
2. Risiko Likuiditas Pasar (*Market Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *close out* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui adanya risiko dan mengetahui sumber-sumber risiko likuiditas serta permasalahannya agar risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dimitigasi. Proses identifikasi risiko likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi komponen-komponen neraca dan rekening administratif yang berpengaruh terhadap likuiditas Bank, mengidentifikasi parameter pasar misalnya adanya krisis di pasar serta lainnya.
2. Pengukuran, metode pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (1) Nominal *Stock Based* (Rasio-Rasio Likuiditas) dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas dan (2) *Flow Based* (*Liquidity Gap Analysis*).
3. Pemantauan, dilakukan dengan menggunakan sistem limit untuk memantau indikator-indikator risiko likuiditas.
4. Pengendalian, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan tingkat pendapatan yang diperoleh.

Perangkat dan Metode

Bank Mandiri melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Liquidity Contigency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX, instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.
4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR), USD *Interbank*, suku bunga Rupiah, yield SUN dan UST dengan tenor 10 tahun, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mandiri dapat dilihat dari Rasio *Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Cadangan Likuiditas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan rasio antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih *(net cash outflow)* selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dalam kondisi krisis. Pada Desember 2023 LCR Bank Mandiri mencapai 176,24% *(Bank Only)* dan 169,58% (konsolidasi), di atas dari ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan LCR paling rendah 100%.

Indikator lain yang digunakan Bank Mandiri untuk mengukur kecukupan likuiditas dapat dilihat dari rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia *(Available Stable Funding)* dengan pendanaan stabil yang diperlukan *(Required Stable Funding)*. Per Desember 2023, NSFR Bank Mandiri mencapai 116,59% (Bank Only) dan 118,07% (konsolidasi), di atas ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan NSFR paling rendah 100%.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh bank. Per Desember 2023, RIM Bank Mandiri *(Bank Only)* sebesar 83,73%.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Cadangan likuiditas dimana alat likuid di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank Mandiri memiliki batasan dalam bentuk limit safety level, yaitu proyeksi cadangan likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pada Desember 2023, cadangan likuiditas Bank berada di atas *safety level*.

PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Apabila Bank dapat mengelola Risiko Operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir.

Risiko Operasional secara inheren/melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan organisasi dan merupakan tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai *Risk & Control Owner* memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang optimal sehingga potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam menyusun Strategi Manajemen Risiko Operasional, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank, dengan menjaga eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan internal Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Bersifat komprehensif dan menyeluruh pada semua bagian Bank, serta tetap fokus pada risiko yang material dan atau signifikan serta proses mitigasi yang paling efektif.
3. Bersifat proaktif dalam mengidentifikasi dan mendeteksi potensi kelemahan kontrol dan terjadinya risiko agar risiko dapat senantiasa terminimalisir.
4. Mematuhi ketentuan pemenuhan kecukupan modal risiko operasional yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan risiko yang dihadapi.

Manajemen risiko operasional diimplementasikan melalui lini pertahanan berlapis dimana masing-masing lini pertahanan memiliki peranan dan metodenya masing-masing dalam memerangi risiko operasional didasari oleh prinsip *combined assurance* sehingga keseimbangan antara *risk & reward* juga tercapai.

Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*) bertanggungjawab penuh atas risiko dan implementasi kontrol (*internal control*) sehari-hari untuk memastikan risiko-risiko yang ada termitigasi termasuk melakukan penyempurnaan secara terus menerus atas desain kontrol yang ada menyesuaikan dengan perubahan proses.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:



1. Identifikasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/ aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit, dsb. termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi/ pengendalian.
2. Penilaian, yaitu proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/ signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap *control* secara kuantitatif melalui aktivitas pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*). Penilaian menghasilkan nilai residual risk yang merupakan nilai risiko setelah mempertimbangkan kontrol.
3. Pemantauan, yaitu proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* perangkat/pelaporan yang ada.
4. Pengendalian/Mitigasi Risiko, yaitu proses untuk mengendalikan dan mitigasi sebelum terjadi risk event melalui pelaksanaan prosedur kontrol secara memadai dan konsisten, serta melaksanakan tindaklanjut *(action plan)* atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah *(emerging risk)*.

Perangkat Manajemen Risiko Operasional

Untuk mendukung unit kerja dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank menggunakan tools/ perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

1. *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   Merupakan sebuah register atas *key risks* dan *key controls*, yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara *risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.

2. *Loss Event Database* (LED)
   Merupakan *database* insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindaklanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, serta sebagai salah satu komponen atas perhitungan modal risiko operational *(regulatory capital charge)* metode *Standardized Approach* (SA).

3. *Key Indicator* (KI)
   Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada baik secara *risk based* (*Key Risk Indicator* - KRI) maupun *control based* (*Key Control Indicator* - KCI) dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi (*early warning signal*).

4. *Issue & Action Management* (IAM)
   Merupakan perangkat untuk memantau tindaklanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya: *Control Testing*, Insiden, *Key Indicator* dan *self-identified issue.*

5. *Capital Modelling*
   Merupakan model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut diatas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun *Region*.

Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional bank. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) sesuai ketentuan regulator.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

1. *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC)
   Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/ penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan perkreditan dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMPC.
2. Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko
   Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko sesuai yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Unit Kerja Audit Internal
   Satuan Kerja yang menjalankan fungsi *independent assurance* untuk memastikan semua lini pertahanan beroperasi secara efektif dan seharusnya.
4. Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (*Bankwide/Enterprise*)
   Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.
5. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (*Senior Operational Risk* Sesuai Bidang)
   Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).
6. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*)
   Unit Kerja yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan *control* pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang menjaga *risk appetite* Risiko Operasional Bank agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.

PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada *Region.*

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan/atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan agar risiko hukum yang melekat tersebut tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan hukum Bank Mandiri dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2023 yang berada pada predikat *Low.*

PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja *Customer Care, Legal, Retail Product & Fraud Risk Management, IT Application Development & IT Application Support*, dan *Business Continuity Management*. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemuatan artikel di media konvensional dan konten positif di media sosial.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Group* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Sesuai dengan Standar Pedoman *Corporate Secretary*, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas *Corporate Secretary* yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari *Supervisor*. Untuk mengendalikan hal itu, perusahaan dapat melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau supervisor yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada perusahaan, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media *online* dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralisir persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial perseroan maupun dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi terdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada *Corporate Secretary Group* pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki saluran internal untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti kantor cabang, *Call Center* 14000, *website*, serta akun media sosial resmi perseroan. Seluruh keluhan dan pertanyaan tersebut lalu diteruskan ke *Customer Care Group* untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Tak hanya dari saluran internal tersebut, *Customer Care Group* juga akan menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah yang datang dari sumber eksternal, yaitu melalui media cetak, *online*, elektronik serta media sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja *Customer Care Group* berkoordinasi dengan *Corporate Secretary Group*, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang dimuat di media konvensional dan media sosial.

Corporate Secretary Group juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, *online*, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Untuk tujuan tersebut, *Corporate Secretary Group* juga melaksanakan serangkaian aktivitas komunikasi untuk mendukung program-program pemerintah, seperti Sosialisasi UU Cipta Kerja, Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* serta Pembentukan Bank Syariah BUMN. Hal ini dilakukan dengan mengorganisasi pelaksanaan Pemred *Gathering* dan sejumlah *gathering* khusus dengan beberapa group media.

Tak hanya itu, *Corporate Secretary Group* juga menyiapkan serangkaian aktivitas komunikasi yang melibatkan BUMN-BUMN untuk mendukung pelaksanaan Program Festival Diskon Nasional (FDN) yang merupakan bagian dari program nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dalam kegiatan ini, *Corporate Secretary Group*

tidak hanya menyusun aktivitas kegiatan, jadwal serta keterlibatan setiap BUMN dalam setiap kegiatan FDN.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan *Corporate Secretary Group* kepada penguatan reputasi positif perseroan, terutama di mata *stakeholder* utama.

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

PENGELOLAAN RISIKO STRATEJIK

Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Arah strategi Bank Mandiri telah sejalan dengan *Corporate Plan* yang disusun dengan mempertimbangkan *core competencies Bank* dan mempertimbangkan pola *shifting* bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Di tengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *corporate plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

1. Mendorong pertumbuhan kredit secara hati-hati *(prudent)* ke sektor-sektor industri yang potensial sesuai portfolio *guidance* dengan memperhatikan potensi, kapasitas, dan kapabilitas dari setiap segmen. Disamping itu Bank Mandiri juga melakukan pengelolaan kualitas portfolio kredit dilakukan baik pada *level bankwide*, segmen dan produk untuk mencapai pertumbuhan yang saling bersinergi ditengah tantangan tahun politik dan ketidakmenentuan kondisi ekonomi serta geo-politik internasional.
2. Optimalisasi *Fee Based Income* sebagai pendorong revenue, antara lain melalui peningkatan produktivitas *e-channel, fee based income* yang bersifat recurring & transaksional, serta intensifikasi dalam ekosistem bisnis nasabah eksisting maupun *top player* di masing-masing sektor industri.
3. Pengendalian biaya operasional dan biaya investasi, yakni melalui program prioritisasi atas penggunaan biaya untuk inisiatif strategis OPEX dan CAPEX untuk memastikan *value added* yang diterima Bank, memanfaatkan *shifting customer behavior* melalui digitalisasi layanan yang lebih scalable serta melakukan perbaikan proses bisnis secara berkesinambungan, serta fokus peningkatan produktivitas *resources* yang dimiliki dengan didukung oleh program pengembangan pegawai sejalan dengan semangat perusahaan dalam melakukan digitalisasi dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya ke dalam KPI produktivitas.

Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan prudent namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2024:

1. Mereviu strategi secara berkala (melalui *stress-test* dan *sensibility analysis*) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal untuk memastikan pencapaian leading indicators dari sisi *revenue* dan *cost* untuk masing-masing indikator keuangan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka menjaga ekspansi kredit secara prudent, Bank fokus dan secara selektif memperhatikan sektor-sektor industri yang masih mengalami pertumbuhan positif dan juga *sustainable* dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan *resource* internal sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* Bank Mandiri, dilakukan *monitoring watch list* dan *debitur high risk* dilakukan secara *end to end* untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
2. Terkait tren industri yang mengarah ke digitalisasi, dalam *Corporate Plan* Bank Mandiri 2020-2024 telah terdapat fokus digitalisasi yaitu untuk menjadi

Indonesia's #1 Modern Digital Bank dan memastikan progress *project* IT dapat berjalan sesuai *timeline*.

3. Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan review dan menjaga Co*verage Ratio & Cost of Credit* di level yang optimal untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit yang berdampak pada kinerja Bank.
4. Bank fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA Ratio dan volume CASA yang *sustainable* untuk mendukung ekspansi kredit, dengan cara:
   a. Mengoptimalkan penggunaan Kopra by Mandiri melalui strategi *main operating account* (Kopra Portal dan Kopra H2H) dalam menangkap seluruh ekosistem transaksi nasabah.
   b. Menjaga realisasi *Cost of Fund* (CoF) dengan tetap memperhatikan likuiditas, menjaga pertumbuhan giro melalui solusi transaksional bagi nasabah Pebisnis dan Korporasi, serta meningkatkan *market share* tabungan melalui Livin' sebagai *everyday financial app.*
5. Pemupukan modal yang berasal dari laba ditahan *(Tier-1)* melalui optimalisasi *revenue* dan biaya *overhead*, serta pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas, memberikan *value added*, dan bersifat *long term*.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, baik secara individual maupun konsolidasi, serta secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
   Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi
   Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.
3. Direksi/SEVP
   Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
   Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang diberlakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. *Compliance* & AML-CFT *Group*)
   Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Kepala Unit Kerja
   Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan sistem/proses dan/atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi
   Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control* risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
2. Penilaian
   Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan

3. Pemantauan
   Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.
4. Mitigasi
   Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:
   a. Me-*review* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
   b. Me-*review* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
   c. Me-*review* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2023, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)
   Di tahun 2023 Bank Mandiri telah menetapkan Risk *Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya 4 (empat) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2023, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 2 (dua) kali setiap bulannya dan tidak melampaui *limit* risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.
2. Penilaian Risiko Kepatuhan
   Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan-Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan self assessment risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2023, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 *(low to moderate)*. Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu *compliance risk awareness* pegawai, kualitas data dan monitoring penyampaian laporan kepada regulator.
3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan
   Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
   a. *Monitoring* Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru
      Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Prudential *Meeting* atas regulasi baru, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan melakukan *reminder* atas kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.
   b. *Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi
      Control testing dilakukan oleh *Senior Operational Risk* Unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.
   c. Program Uji Kepatuhan
      Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan *awareness* pada *risk owner* terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).
   d. Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
      Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko kepatuhan
   a. Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas pengenaan sanksi/denda untuk memastikan appetite yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
   b. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
   c. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Peningkatan *compliance risk awareness*
   a. Melakukan uji kepatuhan *(compliance assessment)* untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya.
   b. Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.
3. Penguatan *monitoring* pemenuhan kewajiban regulasi
   a. Melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atas diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator atau hasil analisa atas ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
   b. Melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan action plan unit kerja atas regulasi baru yang berdampak signifikan.
4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
   Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan.
5. *Webinar* Perkreditan
   Forum diskusi ini dilaksanakan bersama Unit Bisnis dan *Unit Risk* guna meningkatkan *awareness* risiko kepatuhan dibidang perkreditan.

PENGELOLAAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri sesuai dengan strategi usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Transaksi Intra-Group dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Transaksi Intra-Group untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Manajemen Risiko Asuransi dilakukan pada Perusahaan Anak dalam grup usaha Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, dalam hal ini AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance (sampai dengan 4 Oktober 2023) dan Mandiri Inhealth. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Perusahaan Anak yang bergerak di bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran risiko asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian (*self-assessment*) Profil Risiko Asuransi Terintegrasi sepanjang tahun 2023 (sampai dengan posisi September 2023) berada pada tingkat risiko *Low to Moderate* (rendah). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Asuransi secara Terintegrasi tergolong rendah selama posisi waktu tertentu di masa datang. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko Asuransi memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

PENGELOLAAN RISIKO KEBERLANJUTAN/LST

Cakupan Manajemen Risiko LST

Penyelarasan aspek LST juga menjadi salah satu prioritas Bank Mandiri dalam transformasi bisnis jangka panjang. Melalui *stream* "*Conduct Sustainable Business*", Bank Mandiri telah menyusun ESG *framework, roadmap* dan inisiatif dengan fokus target pada transisi ke ekonomi rendah karbon, reduksi emisi dan net zero pada operasional bank dan peningkatan dampak sosial dalam mencapai target SDGs.

Untuk mencapai target tersebut, khususnya dalam mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon, Bank Mandiri terus melakukan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko LST termasuk risiko iklim, khususnya pada aspek pembiayaan.

Sistem manajemen risiko LST dalam proses kredit mencakup layanan kredit Bank Mandiri untuk segmen *wholesale* dan ritel. Bank Mandiri menetapkan dan menerapkan Petunjuk Teknis Analisa Lingkungan Hidup dan Sosial dalam Pemberian Kredit yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa lingkungan pada analisa pemberian kredit.

Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup.

Sistem Manajemen Risiko LST

Asesmen risiko LST pada kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit*, *Credit Operation* Unit dan *Credit Risk Management* Unit. Setiap Business Unit melakukan asesmen berdasarkan Portfolio *Guideline* kemudian melakukan proses *pre-approval* menggunakan *credit risk tools* termasuk penerapan aspek-aspek LST, untuk segmen *wholesale* ditetapkan dalam Industry *Acceptance Criteria* (IAC) sedangkan pada untuk segmen ritel, asesmen dilakukan melalui *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk.

Bank Mandiri menetapkan *risk appetite* dan *industry appetite* yang selaras dengan isu LST pada kebijakan Bank yang dituangkan dalam petunjuk teknis Industry *Acceptance Criteria* (IAC) dalam Ketentuan internal No.B3.P1.T16.IAC. Rincian sektor usaha yang dicakup dapat dilihat pada bagian Perbankan Berkelanjutan pada laporan ini.

Business Unit melakukan *due diligence*, jika perlu, pada calon debitur untuk mendalami isu-isu yang terkait Eskalasi diajukan oleh Business Unit kepada pemegang kewenangan memutus kredit dimana fungsi ini dijalankan oleh *Senior VP* hingga jajaran Direksi. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh Business Unit dan *Credit Risk Management* Unit secara independen dengan proses *four-eyes-principles*.

Bank secara periodik melakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *risk management tools* khususnya sektor yang memiliki risiko LST dan iklim tinggi. Setiap *Business Unit* melakukan asesmen yang lebih rinci dan mendalam pada setiap kegiatan usaha untuk menetapkan persyaratan terkait LST dalam IAC dan RAC, termasuk berdasarkan masukan maupun pelibatan dari regulator dan narasumber.

Bank Mandiri menganalisis kinerja portofolio sektoral, dengan menggunakan *sensitivity analysis* yang hasilnya disampaikan pada Forum Direksi dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis internal.

Pengawasan Risiko LST

Kerangka kerja dan tata kelola ESG *Risk Management* di Bank Mandiri melibatkan peran aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Direksi melakukan pemantauan implementasi dan pemenuhan target LST melalui forum *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC), sesuai dengan tugas & kewenangan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. KEP.Dir/009/2021 tentang *Risk Management & Credit Policy Committee. Risk Management and Credit Policy Committee* (RMPC), yang dilaksanakan setiap triwulanan dengan topik kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, sampai pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan implementasi LST, pemenuhan target atau komitmen LST melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR), yang diadakan setiap triwulan dengan topik seperti peninjauan keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Bank Mandiri memantau kepatuhan dalam penyaluran kredit terhadap aspek LST sesuai dengan kebijakan bank, dengan langkah-langkah berikut:

1. Secara berkala memantau pemenuhan persyaratan aspek LST. Bank Mandiri meninjau secara berkala untuk memastikan bahwa kemajuan proyek nasabah sesuai dengan *action plan* yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan, dan prosedur pemberian kredit, Bank Mandiri juga melakukan kaji ulang dan audit secara berkala yang dilakukan oleh Satuan Audit Internal. Bagi debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan minimum tersebut, akan ada mekanisme pemantauan berkala, penentuan rencana aksi dan jadwal yang diperlukan.
2. Mengimplementasikan sistem ALERT (*watchlist*) sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit berdasarkan kinerja keuangan, prospek industri, dan pemenuhan persyaratan LST.
3. Melakukan *annual review* sebagai bentuk *check and balance* kepatuhan terhadap persyaratan kebijakan kredit internal terbaru, termasuk persyaratan aspek LST.

RISIKO IKLIM

Risiko iklim merupakan *emerging risk* yang tertanam pada *key financial risks*, seperti *credit risk, market risk*, dan *operational risk*. Bank Mandiri telah melakukan penilaian terhadap *key financial risk* sebagaimana mestinya dan telah mempertimbangkan aspek LST di dalamnya. Risiko iklim juga tertanam pada setiap jenis risiko lainnya yang dikelola oleh Bank, diantaranya risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional, sehingga Bank Mandiri melakukan proses manajemen risiko secara komprehensif sesuai dengan prosedur yang sudah ada termasuk untuk risiko iklim.

Bank Mandiri telah melakukan *Initial Phase Climate Risk Stress Test* untuk risiko kredit, pasar, dan operasional sesuai panduan dari OJK. Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio kredit yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan; serta portofolio sektoral yang secara karakteristik tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim. Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Bank Mandiri mengelola risiko keuangan terkait iklim, yang dimulai dari identifikasi risiko dan penyusunan *framework* manajemen risiko, termasuk melakukan *scenario analysis*. Hasil analisis risiko iklim menjadi masukan untuk meningkatkan ketahanan Bank terhadap dampak risiko iklim dan penguatan melalui berbagai inisiatif dan penyelarasan aspek LST dalam proses bisnis internal. Dampak perubahan iklim pada keberlanjutan Bank Mandiri berdasarkan periode risiko, termasuk:

1. Dalam jangka pendek (1-2 tahun ke depan). Perubahan iklim dapat memiliki dampak risiko kepada pembiayaan Bank Mandiri melalui potensi dampak perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi yang kurang sesuai, dan pergeseran preferensi konsumen dan investor, yang mengakibatkan transisi dekarbonisasi berpengaruh pada profitabilitas peminjam, arus kas, dan nilai aset.
2. Dalam jangka menengah (5-10 tahun) dan panjang. Dampak iklim yang buruk dan berkepanjangan dapat mengancam lingkungan hidup, seperti bencana banjir, longsor, gelombang panas, krisis bahan makanan dan bencana alam lainnya.

Mitigasi Risiko Iklim

Bank Mandiri berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan mengedepankan prinsip LST untuk menjadi "*Indonesia's Sustainability Champion for Better Future*". Komitmen tersebut merupakan respons Bank Mandiri dalam mendukung aspirasi Pemerintah menuju ekonomi rendah karbon.

Pada sektor yang memiliki risiko iklim tinggi seperti perkebunan, pertambangan dan energi, Bank Mandiri melakukan pemantauan secara intensif dalam pemenuhan aspek LST yang telah diprasyaratkan Bank. Ke depannya, Bank Mandiri akan berupaya untuk melakukan pengukuran dampak risiko iklim yang lebih komprehensif seperti melakukan analisis skenario iklim dan pengujian portofolio kredit pada nasabah terhadap risiko iklim termasuk *transition and physical risk*.

JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Risiko terkait Iklim	Mitigasi
Kenaikan harga bahan baku dan/atau komoditas akibat perubahan iklim, masalah cuaca, atau kegagalan panen	• Melakukan *stress test* dan membuat *watchlist* untuk dimonitor secara berkala dalam menganalisis nasabah-nasabah yang terkena dampak dari isu terkait.
Risiko transisi energi pada negara yang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama seperti di Indonesia	• Bank Mandiri menyesuaikan kebijakan pemberian kredit pada sektor energi yang menggunakan batu bara sesuai rencana transisi energi Pemerintah yaitu tidak ada pembiayaan sektor batu bara mulai 2040.
Acute physical risk yang diakibatkan perubahan iklim yang ekstrem, antara lain seperti banjir, longsor dan kabut asap akibat kebakaran hutan.	• Penerapan *Business Continuity* Plan dan mendirikan *data center* di beberapa tempat berbeda untuk memitigasi gangguan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dan melindungi risiko atas kehilangan data akibat bencana hidrometeorologi. • Implementasi BCM sesuai standar Internasional berdasarkan ISO 22301:2019 untuk mewujudkan organisasi yang resilien dari ancaman potensial internal maupun eksternal melalui kesiapan komponen BETH13 (*Building, Equipment, Technology, Human Resource & 3rd Parties*). • BCM juga berinteraksi dengan lembaga iklim seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), agar dapat mengindentifikasi secara awal dan dapat melakukan *early action* plan serta mensosialisasikan kepada seluruh Mandirian.

Peluang terkait iklim	Respons
Investasi dalam teknologi untuk energi baru terbarukan yang sedang mengalami peningkatan. Menurut catatan Kementerian FSDM, di tahun 2021, penggunaan energi terbarukan mencapai 11,5% dari total energi nasional.	Bank Mandiri membangun kapabilitas internal untuk membantu transisi ke *green energy* pada sektor tersebut. Sampai dengan Desember 2022, Bank Mandiri telah membiayai 10 proyek *renewable energy*

Keterlibatan Badan Tata Kelola pada Risiko Iklim

Koordinasi pengelolaan aspek terkait LST, termasuk risiko iklim, di Bank Mandiri dilakukan oleh ESG Group di bawah Wakil Direktur Utama yang berwenang dalam pengelolaan *framework*, penyelarasan ketentuan yang selaras dengan isu LST dan perubahan iklim, pengelolaan *sustainable portfolio management*, dan strategi operasional Bank yang bertanggung jawab, termasuk fungsi komunikasi dan pelaporan terhadap pihak eksternal dan internal. Laporan dari ESG Unit kemudian diteruskan kepada Direksi secara rutin sesuai kebutuhan dan kepada Dewan Komisaris dengan frekuensi minimal 4 kali per tahun.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aspek LST dan iklim, Direksi berperan dalam fungsi strategis untuk:

1. mengintegrasikan aspek LST secara *bankwide*, menetapkan arah Keuangan Berkelanjutan (S*ustainability*) Bank Mandiri yang mencakup *Framework, Commitment, Strategy,* Inisiatif, *Roadmap* terkait target iklim dan pencapaian SDGs;
2. menjalankan fungsi pengawasan terkait risiko dan peluang LST dan iklim, implementasi Keuangan Berkelanjutan, pemenuhan target dan inisiatif LST berjalan dengan baik;
3. akuntabel dalam memastikan tercapainya aspirasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan; serta
4. membangun kolaborasi dan kemitraan yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan Perseroan untuk mencapai SDGs dan target iklim.

Direksi dalam hal ini dibantu oleh *Risk Management and Policy Committee* (RMPC). Forum dengan *Risk Management and Credit Policy Committee* (RMPC) dilaksanakan setiap triwulanan dengan topik kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, termasuk pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Dewan Komisaris Perseroan mengambil peran penting dalam pengelolaan aspek LST dan iklim terutama untuk memastikan integrasi aspek LST dan iklim dalam tujuan jangka panjang Bank Mandiri termasuk mendorong upaya-upaya yang *beyond compliance* dan adopsi *best practice* dan mengawasi pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim. Untuk menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko (KPR). Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) diadakan setiap triwulan termasuk membahas keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Fungsi dan kewajiban Dewan Direksi dan dalam penerapan keuangan berkelanjutan Bank Mandiri ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Risk Management* & *Credit Policy Committee* dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Badan khusus yaitu ESG Group ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi KEP. DIR/32/2022 tanggal 12 September 2022.

Ketahanan Risiko Iklim

Pada periode pelaporan, Bank Mandiri telah melakukan kajian ketahanan risiko iklim berdasarkan Surat OJK Nomor S-16/PB.013/2023 yang mewajibkan bank KBMI 3 & 4 untuk menilai risiko iklim pada portofolio. Dalam kajian tersebut, risiko terkait iklim dibandingkan dengan penilaian awal yang bersifat kualitatif yang dikaitkan dengan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap peristiwa risiko fisik yaitu banjir untuk portofolio kredit beragunan properti residensial dan komersial serta peristiwa risiko kekeringan/ kebakaran hutan untuk portofolio kepada korporasi dan UMKM untuk sektor kehutanan dan perkebunan.

Asesmen yang dilakukan memberikan gambaran potensi kerugian yang akan terjadi dan dampaknya terhadap risiko kredit, pasar, operasional dan permodalan Bank. Untuk risiko transisi, asesmen dilakukan terhadap portofolio beberapa sektor *high emission* dengan melihat proyeksi dampak dari peningkatan emisi karbon dan perubahan kebijakan pemerintah terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional serta permodalan Bank. Skenario transisi menggunakan skenario NGFS sesuai panduan OJK yaitu *Net Zero* 2050, *Delayed Transition* dan *Current Policies*.

Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan serta portofolio sektoral yang tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim.

Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Kami menganalisis peristiwa risiko iklim kekeringan/ kebakaran hutan/banjir terhadap operasional dan properti Bank Mandiri yang berdasarkan kajian, berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada sistem teknologi dan properti Bank serta gangguan pada mobilitas dan kesehatan pegawai. Pada skenario ini, Bank telah memiliki rencana *mitigasi Disaster Recovery Plan* yang mencakup *contingency plan* untuk *catasthropic event*.

Bank Mandiri akan terus mengembangkan *climate risk stress testing* sesuai dengan arahan regulator dan kebutuhan Bank dalam merencanakan manajemen risiko iklim pada portofolio Perseroan. Sesuai dengan kemajuan teknologi, ke depan diperlukan pengembangan *specific* model dan *analytics* yang digunakan dalam kuantifikasi dampak iklim dan lingkungan, data dan informasi terkini yang lebih detail, skenario dan asumsi sesuai arahan regulator.

PENILAIAN RISIKO BANK

Untuk lebih memahami risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bank melakukan *self-assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulan, dan Laporan Profil Risiko (LPR) yang disusun setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan. *Self-assessment* terhadap tingkat kesehatan Bank merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Peringkat Kesehatan Bank Umum, yang meliputi Penilaian Profil Risiko (termasuk Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko), aspek Rentabilitas, Tata Kelola, dan Permodalan. Penilaian Profil Risiko mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, dan Risiko Kepatuhan. Terdapat dua risiko tambahan khusus untuk penilaian Profil Risiko Terintegrasi, yaitu Risiko Asuransi dan Risiko Transaksi Intra-Grup.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi Desember 2023 adalah peringkat 2 (*Low To Moderate*) dengan Peringkat Risiko Inheren *Low To Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Satisfactory*, dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Pasar	Low	Strong	Low
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Strong	Low
Risiko Operasional	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Hukum	Low	Strong	Low
Risiko Stratejik	Low	Satisfactory	Low
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	Low
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

Keterangan:
Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara individu posisi 31 Desember 2023 belum tersedia karena sedang dalam proses penilaian, dimana *due date* penyampaian kepada OJK adalah pada tanggal 21 Januari 2024.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank Mandiri (baik secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Bank Mandiri dengan baik dan efektif.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Bank Mandiri telah melaksanakan sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian internal seperti audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan pengendalian operasional.

LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Sehubungan dengan penilaian TKB dan LPR secara Individu, selama tahun 2023, Bank Mandiri telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Individu, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2023, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode pelaporan Semester II 2022 dan Semester I 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2022 dan Triwulan I, II, III 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.

SIMULASI KONDISI TERBURUK DAN STRESS TESTING

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mandiri dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim *(exceptional)* tetapi mungkin terjadi *(plausible)*, Bank Mandiri melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan *(contingency plan)* serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bagi Bank Mandiri, stress testing bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian dan ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kontraktual maupun behavioural Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal.

Terdapat 2 (dua) jenis *stress testing* yang dilaksanakan di Bank Mandiri, yaitu *sensitivity/shock analysis* dan *scenario analysis* (historikal maupun hipotesis). Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas yang mana simulasi perhitungannya menggunakan model statistik maupun model finansial yang dikembangkan oleh Bank dengan mengacu kepada *best practices* di industri, misalnya model dan asumsi *stress testing* yang menghubungkan perubahan risiko kredit dengan faktor makro ekonomi.

Secara umum, hasil *stress testing* yang dilakukan sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas antara lain dengan antisipasi yang cepat di sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan ataupun sistem.

Selain pelaksanaan *stress testing* bagi Bank Mandiri secara individu, telah dilaksanakan pula *stress testing* untuk Mandiri Group bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan *stress testing* Mandiri Group menjadi salah satu media komunikasi pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen Bank Mandiri, manajemen Perusahaan Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburukan ekonomi. Skenario stress Testing selalu disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini, dimana tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2023 antara lain bersumber dari kenaikan inflasi dan suku bunga, potensi terjadinya stagflasi ataupun resesi di negara maju, serta kemungkinan adanya eskalasi ketegangan geopolitik.

RENCANA AKSI *(RECOVERY PLAN)*

Berdasarkan ukuran aset, kewajiban dan permodalan, serta tingkat kompleksitas produk dan keterkaitan dengan sistem perbankan, OJK telah menetapkan Bank Mandiri sebagai Bank Sistemik *(Domestic Systematically Important Bank)*.

Sebagai Bank Sistemik, Bank Mandiri menyiapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Recovery Plan yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis atas kondisi krisis (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non viability*). Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK *Recovery Plan*, dokumen *Recovery Plan* pertama Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 21 Maret 2018. Pengkinian Recovery Plan Bank Mandiri tahun 2023-2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada November 2023.

Pada bulan Juni 2023, Bank telah menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) Suboordinasi II yang menggantikan MTN Subordinasi I yang jatuh tempo di Juli 2023. MTN Subordinasi II telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat SR-51/PB.21/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Tanggapan atas Laporan hasil Penerbitan *Medium Term Notes* Subordinasi II Tahun 2023 dan Permohonan Penetapan Instrumen Utang yang akan Diakui sebagai Komponen Modal Pelengkap (*Tier* 2) dalam Rangka *Recovery Plan* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

RENCANA RESOLUSI *(RESOLUTION PLAN)*

Selain penyusunan Rencana Aksi, di tahun 2022 Bank Mandiri untuk pertama kali juga telah menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Ketentuan penyusunan Rencana Aksi bagi Bank Sistemik dan Rencana Resolusi untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tetang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rencana Resolusi akan digunakan oleh LPS apabila upaya pemulihan dalam Rencana Aksi tidak mampu mengembalikan kondisi Bank untuk memenuhi ketentuan minimum regulasi, sehingga statusnya menjadi Bank Gagal. Dengan demikian, Rencana Resolusi berisi informasi mengenai Bank yang sejalan dengan Rencana Aksi yang dilengkapi dengan analisa opsi resolusi dan potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi, serta strategi komunikasi sebelum dilakukannya penanganan permasalahan solvabilitas Bank oleh otoritas resolusi.

Setelah penyampaian pertama kali, Bank berkewajiban untuk melakukan pengkinian dokumen Rencana Resolusi serta menyampaikan hasil pengkinian tersebut kepada otoritas resolusi setiap 2 (dua) tahun. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan bagi Bank Selain Bank Sistemik yang ditunjuk oleh otoritas resolusi diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

PENANGANAN RISIKO SETELAH PANDEMI

1. **Restrukturisasi Debitur terdampak Covid-19**
   Terjadinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 beserta penerapan pembatasan aktivitas usaha, banyak debitur perusahaan mengalami penurunan penjualan maupun laba sehingga mengalami kesulitan arus kas dan likuiditas. Selain itu, banyak debitur individu mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibatnya debitur mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap Bank dan kreditur lainnya, sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19.

   Sebagai bentuk penanganan atas risiko-risiko dimaksud dan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank aktif berperan memberikan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19. Pada posisi Q2 2021 Bank telah memberikan Restrukturisasi Debitur Terdampak Covid-19 sebesar Rp96,5 triliun. Pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam kebijakan pelaksanaan stimulus perekonomian nasional yang selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak Covid-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi, dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 beserta perubahannya yaitu POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan ketentuan internal Bank lainnya.

2. **Pembentukan CKPN untuk Debitur terdampak Covid-19**
   Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 serta perubahannya yaitu POJK No. 17/POJK.03/2021 maka kualitas aset atas debitur yang memperoleh relaksasi atau restrukturisasi terdampak Covid-19 akan tetap lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Selain itu, OJK melalui Surat No. S-7/D.03/2020 memberikan stimulus kepada perbankan dengan menyatakan bahwa debitur dengan skema restrukturisasi akibat adanya pandemi Covid-19 dapat dikategorikan berada pada stage 1 dalam perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71.

   Namun demikian terdapat potensi kualitas kredit kolektibilitas 1 yang diberikan kepada debitur dan pembentukan CKPN berdasarkan kategori stage 1 tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil debitur. Pasca relaksasi berakhir terdapat potensi risiko meningkatnya kredit kolektibilitas 2 dan *Non-Performing Loan* (NPL) yang berpotensi menimbulkan peningkatan CKPN secara signifikan. Maka dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian Bank serta mengantisipasi peningkatan risiko kredit terkait restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, Bank melakukan pembentukan CKPN lebih besar (CKPN *Build Up*) sesuai penilaian tingkat risiko kredit debitur selama periode relaksasi sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit.

3. **Persiapan Pasca Restrukturisasi Covid-19 dan Pemberlakuan Program Relaksasi Terbatas**
   Seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid. Status Covid-19 sebagai pandemi kemungkinan akan bertransisi menjadi endemi, sehingga akan sangat mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha, dan akan terus meningkatkan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam melaksanakan POJK No. 17/POJK.03/2021 secara tertib, Bank telah melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari pandemi Covid-19 serta masih memiliki prospek usaha.

   a. Dalam hal debitur dinilai telah membaik serta telah kembali mampu memenuhi kewajiban finansialnya, Bank melakukan pencabutan flag restrukturisasi Covid-19 (sesuai Surat OJK No. S-19/D.03/2021) pada debitur telah membaik dan memenuhi kriteria.
   b. Dalam hal debitur dinilai masih mampu bertahan, namun masih membutuhkan restrukturisasi, maka Bank dapat memperpanjang skema restrukturisasi sesuai dengan kondisi usaha debitur.

c. Dalam hal debitur dinilai tidak lagi mampu bertahan, Bank mempersiapkan *action plan* pada debitur yang berpotensi *downgrade* menjadi NPL antara lain dengan mempersiapkan skema restrukturisasi normal (di luar POJK No.17/POJK.03/2021) sebagai upaya Bank untuk dapat menyelamatkan usaha debitur.
d. Dalam hal debitur dinilai tidak lagi mampu bertahan, maka Bank akan membentuk cadangan sesuai dengan kondisi usaha debitur. Sebagian besar portofolio Restrukturisasi Covid-19 sudah selesai masa grace period dan debitur telah mulai melakukan pembayaran. Dengan demikian Bank meyakini akan mampu melalui pandemi Covid-19 dengan baik, tanpa terjadinya lonjakan pemburukan kualitas kredit atau *cliff effect*.

Untuk mengakomodir proses transisi serta mengantisipasi dampak terjadinya bencana alam dan non alam (termasuk penyebaran virus) yang menyebabkan penurunan kualitas kredit yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakukan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, yang diikuti dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022.

OJK sebagai regulator mempertimbangkan bahwa meskipun perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan dari dampak pandemi Covid-19 namun terdapat beberapa daerah dan sektor yang memerlukan waktu lebih panjang untuk pemulihan pasca berakhirnya stimulus perekonomian nasional. Dengan demikian, maka OJK menetapkan bahwa Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen UMKM, serta Provinsi Bali merupakan sektor dan daerah yang masih memerlukan perlakuan khusus terkait kredit atau pembiayaan Bank.

Dengan terbitnya ketentuan tersebut, dalam hal terdapat debitur Restrukturisasi Covid-19 yang masih memerlukan perpanjangan restrukturisasi namun tidak *eligible* untuk mendapatkan perpanjangan, maka debitur tersebut akan direstrukturisasi dengan kategori restrukturisasi normal.

4. Penanganan Risiko Pasca Pandemi Covid-19

Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut status pandemi Covid-19 sejak Juni 2023 dan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi. Pasca pandemi Covid-19, mobilitas dan aktivitas usaha mengalami peningkatan sehingga dan terus meningkatkan kondisi perekonomian. Perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid.

Pada posisi Oktober 2023, besarnya portfolio Restrukturisasi Covid-19 telah jauh menurun menjadi sebesar Rp21,1 triliun, jika dibandingkan posisi tertinggi sebesar Rp 96,5 Triliun pada Juni 2021. CKPN *Build Up* yang terbentuk dalam rangka memitigasi risiko kredit atas portfolio ini telah menurun secara natural dari sebesar Rp5,8 triliun pada posisi tertinggi per Desember 2020 menjadi Rp1,3 triliun pada posisi Oktober 2023. Sebagian besar debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran kredit sejalan dengan perbaikan kondisi usaha debitur di masa endemi ini. Sehubungan dengan berakhirnya POJK No. 17/POJK.03/2021 pada 31 Maret 2023, serta evaluasi perkembangan usaha debitur, Bank juga berencana untuk tidak lagi pencadangan CKPN *Build Up*.

Secara *bankwide*, pada Oktober 2023, NPL% sebesar 1,15% dan NPL *Coverage* yang cukup memadai sebesar 379%. Angka ini diproyeksikan akan terjaga hingga akhir tahun 2023. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank cukup menyakini telah berhasil mengelola portofolio ini dengan baik dan mencapai soft landing, dan berakhirnya relaksasi terbatas KDK OJK No. 34/KDK.03/2022 pada 31 Maret 2024 mendatang tidak akan menimbulkan lonjakan yang berarti. (Data Oktober 2023 akan diupate menjadi Desember 2023, dan disampaikan bersamaan dengan data kuantitatif lainnya)

5. Monitoring Kredit Pasca Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi pasca pandemi, Bank terus melakukan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portofolio. Mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui:

a. Analisa *early warning signal* terhadap seluruh debitur dengan perhatian khusus pada debitur ex Restrukturisasi Covid-19.
b. Output *early warning signal* untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana *action plan* yang dimonitor pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Bank senantiasa melakukan monitoring kredit guna menjaga kualitas portfolio kredit yang dikelola.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan tools pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu *Credit Portfolio Risk Group, Market Risk Group,* dan *Operational Risk Group* yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko, Ahmad Siddik Badruddin. Berikut profil group head, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri Tahun 2023.

Profil Satuan Kerja Manajemen Risiko



Upik Trisda Leawaty
Group Head Operational Risk
Usia: 52 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Teknik Arsitektur dari Universitas Indonesia (1995)
- Master of Information Management & System di Monash University Melbourne (2005)
- Certified Wealth Manager (CWM) Program dari Certified Wealth Managers' Association (2020)
- Certificate of Bank Risk Management Level 4 (2021)

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Audit Manager IT & Operation Audit (2014)
- Audit Manager IT Strategy & Governance (2015)
- Group Head Retail Product Delivery & Fraud Risk Group (2017 – sekarang)
- Group Head Operational Risk Group (2023 - sekarang)

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO



Alfanendya Safudi
Group Head Credit Portfolio Risk
Usia: 52 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)
- Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015)
- Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019)

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head of Model Risk Validator (2010-2014).
- Department Head Credit Risk Modelling (2015-2016).
- Department Head Enterprise Risk Management (2016-2018).
- Group Head Credit Portfolio Risk Group (2018-sekarang).



Bily Arkan
Group Head Market Risk
Usia: 44 Tahun
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)

Pengalaman Kerja
Menjabat di Bank Mandiri sebagai:
- Department Head Trading Risk (2012-2016)
- Department Head Asset & Liability Management (2016-2018)
- Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo (2018-2020)
- Group Head Market Risk (2021-sekarang)

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

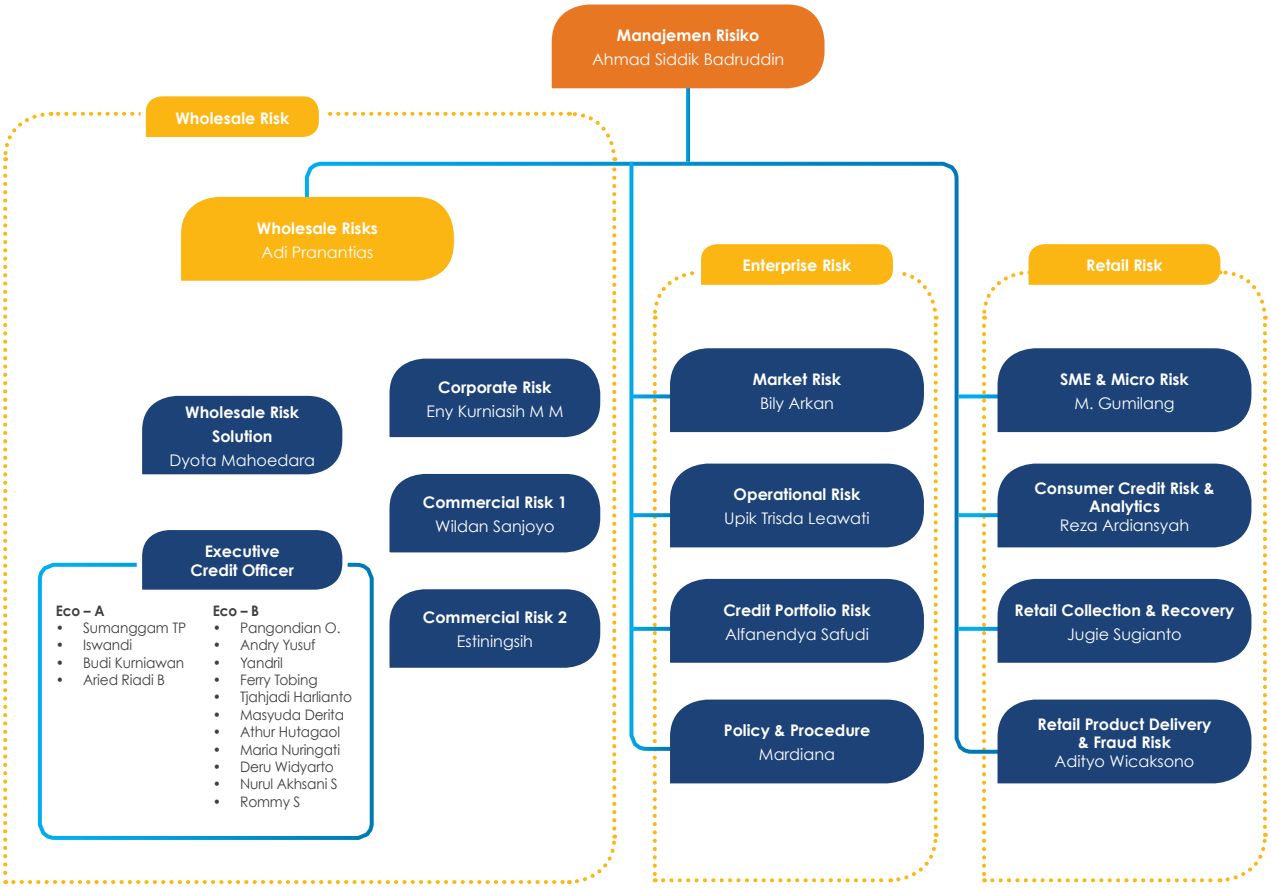

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu *Market Risk Group*, *Operational Risk Group* dan *Credit Portfolio Risk Group* yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Satuan Kerja	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Operational Risk Group (Pengelola Risiko Operasional)	• Merumuskan, mengusulkan, dan memantau *Risk Appetite* Risiko Operasional. • Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi perhitungan beban modal Risiko Operasional *(Regulatory Capital Charge)* sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun ketentuan Basel. Termasuk melakukan evaluasi dan monitoring atas realisasinya. • Merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan *framework* terkait manajemen risiko operasional, berupa prosedur, petunjuk teknis, metodologi & tools. Termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi *framework* manajemen risiko operasional kepada Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). • Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas dan kecukupan implementasi *framework tools* Manajemen Risiko Operasional seperti *Risk & Control Self Assessment* (RCSA), *Key Indicator* (KI), *Loss Event Database* (LED) dan *Issue and Action Management* (IAM) di Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang). • Mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem terkait manajemen risiko operasional *(Operational Risk Management System / ORMS)*. • Mengembangkan dan mengimplementasikan program *risk awareness* terhadap pengelolaan risiko operasional pada seluruh karyawan. • Mengembangkan sistem pelaporan manajemen risiko operasional sesuai *best practices* dan menyampaikan pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Manajemen atau *Risk Management & Credit Policy Committee* dan regulator. • Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional *(Senior Operational Risk* Sesuai Bidang) dan/atau kepada *Risk Management & Credit Policy Committee* dalam rangka minimalisasi risiko operasional. • Memberikan rujukan, mengevaluasi, memberikan rekomendasi, sosialisasi, dan memberikan asistensi implementasi *framework* manajemen risiko operasional kepada Perusahaan Anak.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Credit Portfolio Risk Group (Pengelola Risiko Portofolio Kredit)	• Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, *Credit Risk Tools (Rating & Scoring, Watchlist, Stress Testing* dan *Financial Spreadsheet*) serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta *best practices*. • Menyusun *Portfolio Guideline* sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan *portfolio limit* (per sektor ekonomi/ industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (*risk appetite*). • Melaksanakan *portfolio management* pada skala *bankwide* maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi portfolio kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen *stress testing* dan *sensitivity analysis* sektoral termasuk pengendalian portfolio apabila dibutuhkan. • Mengendalikan risiko kualitas portfolio kredit dan memastikan kecukupan pencadangan kerugian atas portfolio kredit • Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan *risk-based performance*, dengan mengacu kepada *international best practice*, regulasi OJK/BI dan penerapan *Basel* II/III, serta menyusun *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*. • Melakukan/mengkoordinasi proses identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara individu maupun konsolidasi/ terintegrasi, antara lain melalui *Risk Profile, Risk-Based Bank Rating,* dan *Scenario Analysis (Stress Testing)*. • Menjalankan fungsi enterprise model *risk management*, antara lain melalui implementasi model *governance* dan model validation, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator. • Mengelola *database* perkreditan dan *datamart* ERM yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses *modeling, portfolio management* dan implementasi ERM.
Market Risk Group (Pengelola Risiko Pasar)	• Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode *Standard*, metode Internal dan permodelan risiko pasar. • Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas *trading treasury* kepada unit bisnis dan manajemen. • Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi *funding liabilities* dan pembiayaan *asset* Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali. • Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada *portfolio banking book* serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai *risk and return* yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan *shareholder value*. • Melakukan kajian metodologi *pricing* Dana Pihak Ketiga, kredit dan *Funds Transfer Pricing* yang sejalan dengan strategi pengelolaan *asset and liabilities*. • Mengelola sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Alfanendya Safudi	Group Head Credit Portolio Risk	• Indonesia Banking Certification in Risk Management – Level 4 • Financial Risk Manager (FRM) • Chartered Financial Analyst (CFA)
2	Upik Trisda Leawaty	Group Head Operational Risk	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4
3	Bily Arkan	Group Head Market Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 6

Pelaksanaan Tugas Group Manajemen Risiko

Pada tahun 2023, SKMR telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

1. *Project Limit Management System*
2. *Resolution Plan* bagi Bank Sistemik
3. *Enhancement System* untuk perhitungan ATMR Kredit (Penyesuaian *Basel* III *Reforms*)
4. Dynamic *Monitoring System (Early Warning System segmen Wholesale)*
5. *Early Warning Signal* segmen SME
6. Implementasi perubahan acuan *reference rate* LIBOR
7. *Project New Treasury Core System*
8. Pengembangan Operational Risk System salah satunya untuk mengakomodir kebutuhan perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan Standar sesuai ketentuan yang berlaku
9. Program *Operational Risk Awareness*

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio Risk Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT (Tata Kelola Terintegrasi) antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
   a. Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
   c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan stress testing.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2023, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/ terintegrasi yaitu antara lain:

1. Penyusunan *Consolidated Counterparty Limit* (CCL)
2. Pelaksanaan *Stress Testing* Mandiri Group secara rutin setiap Semester
3. Pelaksanaan *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) setiap Triwulan.
4. *Operational Risk Management Alignment*
5. *Alignment* Perhitungan dan Monitoring Risiko Pasar *Trading Book* pada Perusahaan Anak *Insurance,* Sekuritas, dan *Multifinance*

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

EKSPOSUR RISIKO KREDIT

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

a. Bank secara Individu
b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
c. Pengungkapan Tambahan

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

a. Bank secara Individu
b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
c. Pengungkapan Tambahan

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

1. **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah**
   a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual
   b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
2. **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi**
   a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual
   b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
3. **Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak**
   a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual
   b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
4. **Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah**
   a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual
   b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
5. **Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi**
   a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

6. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

a. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual
b. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Non Performing (CRB-A)

1. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

a. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Individu
b. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

2. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing

a. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Individu
b. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

3. Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR3)

a. Bank secara Individu
b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR4)

a. Bank secara Individu
b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

a. Bank secara Individu
b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko (CCR3)

a. Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu
b. Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)

Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)

Pengungkapan Eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau sponsor dan persyaratan permodalannnya (SEC3)

Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya – Bank sebagai investor (SEC4)

Seluruh tabel Eksposur Risiko Kredit dapat dilihat di halaman 854-878 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO PASAR

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

- Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Untuk kepentingan internal, Bank Mandiri juga telah melakukan perhitungan dengan Metode Internal. Perhitungan KPMM dengan metode internal dilakukan dengan perhitungan *Value at Risk* (VaR), yaitu suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mendapatkan nilai VaR, metodologi yang digunakan adalah metode Historical Simulation.

Realisasi *Value at Risk* Bank Mandiri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk*/VaR) - Bank secara Individual

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi *sensitivity analysis* per akhir Desember 2022, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

1. Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual
2. Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing Bank Mandiri. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan *counterparty* yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank Mandiri mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit internal dan regulasi.

- Tabel 7.4 Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Seluruh tabel Eksposur Risiko Pasar dapat dilihat di halaman 886-913 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO LIKUIDITAS

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan jangka panjang menggunakan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individual maupun konsolidasian, di atas batas minimal 100%.

1. Tabel Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio*
2. Tabel Pengungkapan Nilai *Net Stable Funding Ratio*

Seluruh tabel Eksposur Risiko Likuiditas dapat dilihat di halaman 928-932 di Laporan Tahunan ini.

EKSPOSUR RISIKO OPERASIONAL

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional posisi 31 Desember 2022 secara Individu (Bank saja) adalah sebesar Rp133.826.963,69 juta. Sementara ATMR untuk risiko operasional secara konsolidasi dengan Entitas Anak adalah sebesar Rp176.859.897,38 juta.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai ketentuan dari OJK tersebut di atas.

- Tabel 9.1 Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel Eksposur Risiko Operasional dapat dilihat di halaman 849 di Laporan Tahunan ini.

Pendekatan yang digunakan		Posisi 31 Desember 2023		
		Beban Modal	ATMR	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar (Individu)	4.697.622,24	58.720.278,00	133.826.963,69
2	Pendekatan Indikator Dasar (Konsolidasi)	5.466.589,11	68.332.363,88	176.859.897,38

*) untuk Bank yang menggunakan pendekatan indikator dasar dalam menghitung risiko Operasional

Selain itu Bank Mandiri juga telah melakukan Uji Coba untuk perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan *Standardized Approach* (SA) sesuai ketentuan SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku efektif di Januari 2023. Bank Mandiri juga menjadi pilot *project* di Indonesia untuk penerapan implementasi Basel III Reform dengan Pelaporan *Global Quantitative Impact Study* setiap semester yang merupakan simulasi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan metode SA *Basel* III *Reforms* tersebut.

PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

1) Bank secara Individu

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		
		a	b	c	
1	Kredit	10.999.537	1.074.787.890	42.335.379	
2	Surat Berharga	39.496	241.932.677	39.464	
3	Transaksi Rekening Administratif	94.686	363.189.679	1.111.730	
4	**Total**	**11.133.719**	**1.679.910.246**	**43.486.573**	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		
		a	b	c	
1	Kredit	16.133.591	1.343.698.604	43.435.247	
2	Surat Berharga	138.496	363.023.678	45.939	
3	Transaksi Rekening Administratif	118.963	366.466.822	1.111.740	
4	**Total**	**16.391.050**	**2.073.189.104**	**44.592.926**	

3) Pengungkapan Tambahan

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi.

PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

(dalam jutaan rupiah)

	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
	Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	d	e	f	g
	31.133.872	11.201.507		1.043.452.048
	24.850	14.614		241.932.709
	639.952	471.778		362.172.635
	31.798.674	**11.687.899**	**-**	**1.647.557.392**

(dalam jutaan rupiah)

	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
	Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	d	e	f	g
	31.380.450	12.054.797		1.306.721.719
	24.850	21.089		362983729
	639.852	471.888		365442027
	32.045.152	**12.547.774**	**-**	**2.035.147.475**

PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	14.944.030
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	4.989.527
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	734.217
4	Nilai hapus buku	17.863.589
5	Perubahan lain	9.703.282
6	**Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)**	**11.039.033**

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	20.316.214
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	8.402.616
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	895.872
4	Nilai hapus buku	20.871.629
5	Perubahan lain	9.320.758
6	**Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)**	**16.272.087**

3) Pengungkapan Tambahan

Nilai Kredit dan Surat Berharga yang Jatuh Tempo secara Individu dan Konsolidasi pada periode Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan Juni 2023. Secara umum, penurunan terbesar dikontribusi oleh hapus buku Kredit dan Surat Berharga. Item perubahan lain ditambahkan untuk merekonsiliasi nilai total Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

KUANTITATIF

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	27.957.249	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.808.353	59.802.196	9.800.474	175.345	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank	1.619.174	3.960.244	61.481	428	
5	Tagihan berupa *Covered Bond*					
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	7.306.108	-	-	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya					
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	4.877.950	23.923.432	17.419.585	1.882.237	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.041.040	12.162.727	4.027.257	625.202	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	187.271	675.595	-	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.772	52.178	7.140	8.392	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40.898.780	74.921.855	54.211.580	13.650.281	
13	Tagihan kepada Korporasi	68.430.900	308.155.018	66.413.702	41.994.719	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	317.100	7.198.319	1.194.039	116.321	
15	Aset Lainnya					
TOTAL		**130.007.073**	**525.626.597**	**153.810.852**	**58.452.924**	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	-	-	-	364.038.785	64.858.187	456.854.221
	39	92.048	-	18.243.990	815.774	100.738.218
						-
	-	-	-	60.772.902	19.746.249	86.160.477
						-
	-	-	-	722	-	7.309.832
				2.970		2.970
	2.478.621	2.072.633	562.408	111.662	-	53.328.528
	1.123.630	117.928	62.675	375.753	-	20.536.212
	396.806	-	-	-	-	1.259.671
	5.495	507	1.884	400		86.767
	18.099.694	10.091.881	5.667.173	21.319.904	297.722	239.158.870
	25.596.337	16.321.967	2.009.609	121.783.955	53.155.840	703.862.047
	159.358	57.442	39.632	780.741	18	9.862.971
				92.584.977		92.584.977
	47.859.979	**28.754.405**	**8.343.381**	**680.016.759**	**138.873.790**	**1.771.745.761**

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	27.957.249	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.808.353	59.802.196	9.800.474	175.345
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.619.174	3.960.244	61.481	428
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	7.306.108	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	4.877.950	23.923.432	17.419.585	1.882.237
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.041.040	12.162.727	4.027.257	625.202
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	187.271	675.595	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.772	52.178	7.140	8.392
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40.898.780	74.921.855	54.211.580	13.650.281
13	Tagihan kepada Korporasi	68.430.900	308.155.018	66.413.702	41.994.719
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	317.100	7.198.319	1.194.039	116.321
15	Aset Lainnya	-	-	-	-
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	64.401.779	158.008.822	92.686.085	21.912.872
TOTAL		**194.408.852**	**683.635.419**	**246.496.937**	**80.365.796**

Keterangan:
Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Sektor Ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	-	-	-	383.853.769	64.858.187	476.669.205
	39	92.048	-	18.821.553	815.774	101.315.780
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	61.517.270	19.746.249	86.904.845
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	722	-	7.309.832
	-	-	-	2.970	-	2.970
	2.478.621	2.072.633	562.408	159.711	-	53.376.577
	1.123.630	117.928	62.675	375.753	-	20.536.212
	396.806	-	-	-	-	1.259.671
	5.495	507	1.884	30.166.434	-	30.252.801
	18.099.694	10.091.881	5.667.173	64.164.387	297.722	282.003.353
	25.596.337	16.321.967	2.009.609	123.931.293	53.155.840	706.009.385
	159.358	57.442	39.632	1.040.103	18	10.122.333
	-	-	-	98.598.603	-	98.598.603
	13.075.318	6.351.277	834.400	-	-	357.270.553
	60.935.297	**35.105.682**	**9.177.781**	**782.632.566**	**138.873.790**	**2.231.632.121**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	Tagihankepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	12.013.735	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.801.257	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	12.713.952	-	-	-	132	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.890.206	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	15.484.683	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	439.722	-	-	-	784	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	15.049.926	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	2.690.131	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.086.343	4.714.250	-	8.015.175	-	7.308.194	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	39.995	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	29.748	32.545	-	1.360	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi,Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	1.493.580	-	-	24.239.506	79.635.178	617.470	-
	-	-	148.056	-	-	24.722	102.455.326	4.245	-
	-	3.117	4.329.533	604.642	-	6.254.503	129.014.781	3.177.625	-
	-	-	838.547	-	-	144	28.868.159	101	-
	-	-	-	-	-	512	497.082	22	-
	-	699	63.599	75.618	-	223.407	49.556.679	3.609.726	-
	-	-	2.231.054	-	-	39.335.949	53.882.103	358.401	-
	-	-	268.822	-	-	1.979.702	39.459.892	50.033	-
	-	-	2.336.600	-	-	8.526.116	8.997.845	43.524	-
	-	-	478.138	-	-	220.893	24.242.926	1.553	-
	-	3.867	-	-	-	310.552	25.757.565	17.070	-
	-	-	6.013.689	579.411	-	1.882	20.586.831	48.610	-
	-	-	-	-	-	247.885	6.926.716	1.525	-
	-	249	-	-	-	20.457.868	179.854	46.212	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	Tagihankepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
31 Desember 2023								
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	76	-	-	-	-	
16	Pendidikan	52.292.754	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	25.007	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	19.117.369	4.500	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	528.647	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	334	2.662	-	16.592	-	-	
24	Lainnya	381.327.673	17.835.571	-	77.598.703	-	722	
TOTAL		**456.854.221**	**100.738.218**	**-**	**86.160.477**	**-**	**7.309.832**	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi,Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	41.356	-	-	1.375.615	11.587.784	22.821	-
	-	-	-	-	-	15	15.385	-	-
	-	-	-	-	-	132.861	376.097	281	-
	-	-	413.826	-	-	331.084	7.068.370	3.915	-
	-	-	-	-	-	7.458	154.240	2.714	-
	-	1.651	-	-	-	4.288.803	617.292	17.079	-
	-	-	-	-	-	28.534	-	402	-
	-	-	-	-	86.767	87	-	66	-
	-	52.122.156	1.879.412	-	-	131.013.756	8.639.996	1.179.792	-
	2.970	1.196.789	-	-	-	157.018	105.341.945	659.783	92.584.977
	2.970	**53.328.528**	**20.536.212**	**1.259.671**	**86.767**	**239.158.870**	**703.862.047**	**9.862.971**	**92.584.977**

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
31 Desember 2023									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	12.013.735	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.801.257	-	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	12.713.952	-	-	-	132	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.890.206	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	15.484.683	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	439.722	-	-	-	784	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	15.049.926	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	2.690.131	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.086.343	4.714.250	-	8.015.175	-	7.308.194	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	39.995	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	29.748	32.545	-	1.360	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	76	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
	-	1.493.580	-	-	24.239.506	79.635.178	617.470	-	17.674.425
	-	148.056	-	-	24.722	102.455.326	4.245	-	2.395.027
	3.117	4.329.533	604.642	-	6.254.503	129.014.781	3.177.625	-	-
	-	838.547	-	-	144	28.868.159	101	-	4.508.138
	-	-	-	-	512	497.082	22	-	10.369.364
	699	63.599	75.618	-	223.407	49.556.679	3.609.726	-	18.119.125
	-	2.231.054	-	-	39.335.949	53.882.103	358.401	-	16.932.240
	-	268.822	-	-	1.979.702	39.459.892	50.033	-	8.294.883
	-	2.336.600	-	-	8.526.116	8.997.845	43.524	-	2.720.985
	-	478.138	-	-	220.893	24.242.926	1.553	-	-
	3.867	-	-	-	310.552	25.757.565	17.070	-	8.527.502
	-	6.013.689	579.411	-	1.882	20.586.831	48.610	-	3.834.291
	-	-	-	-	247.885	6.926.716	1.525	-	-
	249	-	-	-	20.457.868	179.854	46.212	-	-
	-	41.356	-	-	1.375.615	11.587.784	22.821	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa *Coverage Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
31 Desember 2023									
16	Pendidikan	52.292.754	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	25.007	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	19.117.369	4.500	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	528.647	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	334	2.662	-	16.592	-	-	-	
24	Lainnya	401.142.658	18.413.133	-	78.343.071	-	722	2.970	
TOTAL		**476.669.205**	**101.315.780**	**-**	**86.904.845**	**-**	**7.309.832**	**2.970**	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
	-	-	-	-	15	15.385	-	-	4.487.099
	-	-	-	-	132.861	376.097	281	-	6.804.930
	-	413.826	-	-	331.084	7.068.370	3.915	-	3.250.683
	-	-	-	-	7.458	154.240	2.714	-	-
	1.651	-	-	-	4.288.803	617.292	17.079	-	154.473
	-	-	-	-	28.534	-	402	-	-
	-	-	-	86.767	87	-	66	-	-
	52.122.156	1.879.412	-	-	131.013.756	8.639.996	1.179.792	-	130.010.138
	1.244.838	-	-	30.166.034	43.001.501	107.489.283	919.145	98.598.603	119.187.250
	53.376.577	**20.536.212**	**1.259.671**	**30.252.801**	**282.003.353**	**706.009.385**	**10.122.333**	**98.598.603**	**357.270.553**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023		
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	166.248.785	57.823.686	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	33.892.743	17.032.675	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	65.119.449	14.827.119	
5	Tagihan berupa *Coverage Bond*	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.849.059	2.010.121	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	268.444	2.043.888	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.463.898	3.837.840	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	140.613	70.953	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	487	7.954	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	23.678.992	78.185.950	
13	Tagihan kepada Korporasi	289.375.841	119.224.168	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.447.352	2.172.037	
15	Aset Lainnya	-	-	
TOTAL		**588.485.665**	**297.236.391**	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023			
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	40.269.300	192.512.450	-	**456.854.221**
	14.628.993	35.183.806	-	**100.738.218**
	-	-	-	**-**
	2.321.795	3.892.114	-	**86.160.477**
	-	-	-	**-**
	3.401.375	49.277	-	**7.309.832**
	-	-	2.970	**2.970**
	4.280.097	46.736.098	-	**53.328.528**
	3.000.138	9.234.336	-	**20.536.212**
	393.430	654.675	-	**1.259.671**
	7.337	70.989	-	**86.767**
	78.619.679	58.674.249	-	**239.158.870**
	140.889.978	154.372.059	-	**703.862.047**
	2.811.437	1.432.145	-	**9.862.971**
	-	-	92.584.977	**92.584.977**
	290.623.559	**502.812.199**	**92.587.947**	**1.771.745.761**

ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023	
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak	
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
1	Tagihan Kepada Pemerintah	173.239.175	58.008.541
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	34.449.005	17.032.675
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	65.135.778	15.122.909
5	Tagihan berupa *Coverage Bond*	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.849.059	2.010.121
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	268.575	2.088.907
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.463.898	3.837.840
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	140.613	70.953
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	125.735	28.139.346
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	33.517.119	106.657.174
13	Tagihan kepada Korporasi	290.167.508	119.825.955
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.539.959	2.306.857
15	Aset Lainnya	1.483.098	178.493
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	104.217.166	49.052.662
TOTAL		**712.596.687**	**404.332.432**

Keterangan:
Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Kategori Portfolio mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	31 Desember 2023			
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	40.358.119	192.752.617	12.310.754	**476.669.205**
	14.628.993	35.203.784	1.324	**101.315.780**
	-	-	-	**-**
	2.390.399	3.892.114	363.645	**86.904.845**
	-	-	-	**-**
	3.401.375	49.277	-	**7.309.832**
	-	-	2.970	**2.970**
	4.280.632	46.738.464	-	**53.376.577**
	3.000.138	9.234.336	-	**20.536.212**
	393.430	654.675	-	**1.259.671**
	662.025	1.325.695	-	**30.252.801**
	83.080.840	58.748.220	-	**282.003.353**
	141.643.817	154.372.105	-	**706.009.385**
	2.841.938	1.433.579	-	**10.122.333**
	4.630	-	96.932.382	**98.598.603**
	44.632.841	146.119.500	13.248.384	**357.270.553**
	341.319.177	**650.524.367**	**122.859.459**	**2.231.632.121**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Keterangan	31 Desember 2023				
		Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
1	Tagihan	148.623.607	633.390.954	175.055.807	61.870.786	
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)					
	a. Belum jatuh tempo	16.330.774	44.703.504	13.733.081	1.311.024	
	b. Telah jatuh tempo	1.899.908	20.044.108	5.290.976	314.087	
3	CKPN - *Stage* 1	1.485.534	4.639.460	2.051.900	1.028.303	
4	CKPN - *Stage* 2	1.532.279	9.232.960	3.147.086	305.723	
5	CKPN - *Stage* 3	1.502.201	10.341.859	4.020.818	175.396	
6	Tagihan yang dihapus buku	2.916.908	9.290.260	3.588.070	1.009.876	

ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Keterangan	31 Desember 2023				
		Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
1	Tagihan*	214.384.647	792.517.449	270.959.283	84.082.873	
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)					
	a. Belum jatuh tempo	16.330.774	44.852.942	13.733.081	1.311.024	
	b. Telah jatuh tempo	1.899.908	20.225.698	5.290.976	314.087	
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)**	65.761.040	159.126.496	95.903.476	22.212.087	
4	CKPN - *Stage* 1	1.485.534	6.005.491	2.051.900	1.028.303	
5	CKPN - *Stage* 2	1.532.279	9.469.980	3.147.086	305.723	
6	CKPN - *Stage* 3	1.502.201	10.618.111	4.020.818	175.396	
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.710.959	175.726	7.003.249	475.295	
8	Tagihan yang dihapus buku*	3.726.538	9.641.620	4.389.784	1.184.586	

Keterangan:
*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah
**) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023					
	Wilayah					
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	50.677.715	31.705.025	8.572.542	777.507.840	162.389.113	**2.049.793.389**
	6.752.499	2.163.392	336.464	10.511.933	472.046	**96.314.716**
	502.635	187.835	106.203	1.955.094	94	**30.300.940**
	773.903	261.449	198.824	790.405	554.610	**11.784.388**
	860.528	601.841	56.781	508.286	142.639	**16.388.122**
	285.547	107.930	55.569	408.333	76	**16.897.729**
	579.346	260.308	205.784	13.034	-	**17.863.586**

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023					
	Wilayah					
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	64.070.905	38.174.693	9.415.289	880.647.197	162.389.113	**2.516.641.450**
	6.752.499	2.163.392	336.464	10.511.933	472.046	**96.464.154**
	502.635	187.835	106.203	1.955.094	94	**30.482.530**
	13.393.190	6.469.668	842.747	-	-	**363.708.704**
	773.903	261.449	198.824	790.405	554.610	**13.150.419**
	860.528	601.841	56.781	508.286	142.639	**16.625.142**
	285.547	107.930	55.569	408.333	76	**17.173.981**
	365.918	169.014	10.313	-	-	**9.910.474**
	732.245	368.125	206.731	13.034	-	**20.262.663**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
31 Desember 2023					
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	128.074.810	16.458.041	1.042.082	
2	Pertambangan dan Penggalian	138.439.685	6.726.292	14.498	
3	Industri Pengolahan	189.631.300	11.614.339	11.192.027	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	59.264.663	4.616.993	185	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	544.566	-	52	
6	Konstruksi	86.378.718	14.360.606	7.703.392	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	107.647.368	3.852.354	1.057.950	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	65.984.621	7.428.604	925.708	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	21.195.669	5.399.848	120.833	
10	Informasi dan Komunikasi	29.519.122	84.840	4.701	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	64.545.445	437.140	45.123	
12	Real Estat	34.221.263	6.500.902	51.415	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	7.285.847	7.984	4.369	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	14.175.030	54.199	79.825	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.819.601	-	-	
16	Pendidikan	546.358	20.429	675	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	8.117.456	309.995	11.124	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	169.517	2.075	7.633	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	28.233.629	322.571	49.458	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	29.652	2.786	844	
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	828.734	-	-	
22	Rumah Tangga	201.110.760	5.347.444	3.817.443	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	52.216.639	415.424	227.725	
24	Lainnya	742.812.937	12.351.851	3.943.879	
	Total	**2.049.793.389**	**96.314.716**	**30.300.940**	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -*Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
	1.915.199	845.610	402.025	622.503
	444.598	330.879	10.180	885
	921.638	4.101.864	8.011.940	706.439
	305.107	1.046.281	83	-
	3.725	-	30	-
	707.349	4.014.041	3.597.603	3.464
	1.442.282	827.137	673.288	2.672.843
	329.030	556.611	57.315	53.112
	253.427	871.469	73.047	164.964
	107.081	10.625	2.807	-
	303.768	199.609	27.712	101.495
	286.252	1.214.516	3.606	-
	41.862	570	2.756	2.974
	106.850	7.397	56.153	48.039
	132	-	-	-
	7.135	8.083	393	2.789
	59.765	65.391	7.086	10.047
	1.943	183	4.919	151
	112.620	43.997	29.691	48.626
	279	273	442	1.254
	1.994	-	-	-
	3.497.754	1.494.947	2.343.297	3.376.284
	351.797	20.665	169.700	313.071
	582.804	727.973	1.423.655	9.734.648
	11.784.388	**16.388.122**	**16.897.729**	**17.863.589**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

ii. Pengungkapan Tagihan dan PencadanganBerdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)**	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo		
31 Desember 2023						
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	145.975.559	16.458.041	1.042.082	227.749	
2	Pertambangan dan Penggalian	140.855.811	6.726.292	14.498	3.135	
3	Industri Pengolahan	189.631.300	11.614.339	11.192.027	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	64.034.072	4.616.993	185	79.878	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	12.377.894	-	52	168.536	
6	Konstruksi	106.322.674	14.360.606	7.703.392	578.558	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	125.286.146	3.852.354	1.057.950	614.899	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	74.348.670	7.428.604	925.708	48.957	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	23.958.571	5.399.848	120.833	59.705	
10	Informasi dan Komunikasi	29.519.122	84.840	4.701	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70.555.348	437.140	45.123	32.549	
12	Real Estat	38.134.756	6.500.902	51.415	42.946	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	7.285.847	7.984	4.369	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	14.175.030	54.199	79.825	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.819.601	-	-	-	
16	Pendidikan	5.072.990	20.429	675	19.402	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	15.029.029	309.995	11.124	21.500	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.490.688	2.075	7.633	73.222	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	28.233.629	322.571	49.458	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	190.727	2.786	844	6.445	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
	1.915.199	845.610	402.025	628.803	857.712
	444.598	330.879	10.180	25.569	15.075
	921.638	4.101.864	8.011.940	-	706.439
	305.107	1.046.281	83	309.102	638
	3.725	-	30	1.572.435	118.677
	707.349	4.014.041	3.597.603	2.651.998	111.687
	1.442.282	827.137	673.288	921.966	3.298.865
	329.030	556.611	57.315	290.475	85.405
	253.427	871.469	73.047	113.973	203.712
	107.081	10.625	2.807	-	-
	303.768	199.609	27.712	113.872	105.181
	286.252	1.214.516	3.606	110.587	81.199
	41.862	570	2.756	-	2.974
	106.850	7.397	56.153	-	48.039
	132	-	-	-	-
	7.135	8.083	393	82.959	38.637
	59.765	65.391	7.086	98.972	15.110
	1.943	183	4.919	145.941	76.490
	112.620	43.997	29.691	-	48.626
	279	273	442	8.907	7.773

ii. Pengungkapan Tagihan dan PencadanganBerdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)**	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo		
31 Desember 2023						
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	828.734	-	-	-	
22	Rumah Tangga	201.110.760	5.347.444	3.817.443	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	184.139.622	415.424	227.725	2.207.163	
24	Lainnya	967.264.871	12.501.289	4.125.469	-	
	TOTAL	**2.516.641.450**	**96.464.154**	**30.482.530**	**4.184.644**	

Keterangan:
- Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah *)
- Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" **)
- Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan sektor ekonomi mengacu pada *template* Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
	1.994	-	-	-	-
	3.497.754	1.494.947	2.343.297	-	3.376.284
	351.797	20.665	169.700	2.612.903	1.314.885
	1.948.835	964.993	1.699.907	222.012	10.358.220
	13.150.419	**16.625.142**	**17.173.981**	**9.910.474**	**20.871.629**

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

i. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.289.310	4.322.560	4.387.667	10.999.537
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	39.496	39.496
	TOTAL	**2.289.310**	**4.322.560**	**4.427.163**	**11.039.033**

ii. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.825.585	5.238.019	7.069.987	16.133.591
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	138.496	138.496
	TOTAL	**3.825.585**	**5238019**	**7208483**	**16272087**

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

KUANTITATIF

1) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

i. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Individu

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)	
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	
		a	b	c	
1	Surat Berharga	241.932.677	14.614	39.496	
2	Kredit	1.074.787.890	26.861.649	10.999.537	
	a. Korporasi	722.075.061	17.211.109	5.638.224	
	b. Ritel	352.712.829	9.650.540	5.361.313	
3	Transaksi Rekening Administratif	363.189.679	1.137.753	287.690	

ii. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)	
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	
		a	b	c	
1	Surat Berharga	363.023.678	21.089	138.496	
2	Kredit	1.343.698.604	27.811.178	16.133.591	
	a. Korporasi	722.075.061	17211108,74	5.638.224	
	b. Ritel	621.623.543	10.600.069	10.495.367	
3	Transaksi Rekening Administratif	366.466.822	947.847	118.963	

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

(dalam jutaan rupiah)

	Non Performing (Kualitas KL, D, M)				
		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	d	e	f	g	h
24.850	-	-	-	-	
15.473.730	-	-	-	-	
12.033.662	-	-	-	-	
3.440.068	-	-	-	-	
163.893	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

		Non Performing (Kualitas KL, D, M)				CKPN Eksposur Syariah
		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai				
		Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari		
	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
	d	e	f	g	h	
24.850	-	-	-	-	132.506	
15.624.069	-	-	-	-	9.675.229	
12.033.662	-	-	-	-	-	
3.590.407	-	-	-	-	9.675.229	
163.893	-	-	-	-	32.018	

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing

i.Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Individu

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)		
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
		a	b	c	d	
1	Surat Berharga	241.932.677	14.614	39.496	24.850	
2	Kredit	1.074.787.890	26.861.649	10.999.537	15.473.730	
	a. Korporasi	722.075.061	17.211.109	5.638.224	12.033.662	
	b. Ritel	352.712.829	9.650.540	5.361.313	3.440.068	
3	Transaksi Rekening Administratif	363.189.679	1.137.753	287.690	163.893	

ii.Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)		
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
		a	b	c	d	
1	Surat Berharga	363.023.678	21.089	138.496	24.850	
2	Kredit	1.343.698.604	27.811.178	16.133.591	15.624.069	
	a. Korporasi	722.075.061	17.211.109	5.638.224	12.033.662	
	b. Ritel	621.623.543	10.600.069	10.495.367	3.590.407	
3	Transaksi Rekening Administratif	366.466.822	947.847	118.963	163.893	

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

(dalam jutaan rupiah)

	Stage 1		Stage 2		Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	e	f	g	h	i	j
	241.932.677	14.614	-	-	39.496	24.850
	976.031.424	11.201.507	83.494.398	15.660.142	26.261.605	15.473.730
	634.366.272	4.274.822	73.181.338	13.308.501	20.165.676	11.661.447
	341.665.152	6.926.685	10.313.060	2.351.641	6.095.929	3.812.283
	346.464.208	471.778	12.820.318	476.059	3.999.839	163.893

(dalam jutaan rupiah)

	Stage 1		Stage 2		Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	e	f	g	h	i	j
	291.668.927	21.089	-	-	39.496	24.850
	1.011.837.932	12.054.797	83.643.531	15.756.381	26.443.195	15.624.069
	634.366.272	4.274.822	73.181.338	13.308.501	20.165.676	11.661.447
	377.471.660	7.779.975	10.462.193	2.447.880	6.277.519	3.962.622
	345.948.595	471.888	12.820.623	475.959	3.999.839	163.893

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR3)

1) Bank secara Individu

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	
		a	b	
1	Kredit	1.085.787.427	62.285.170	
2	Surat Berharga	241.972.173	-	
3	**Total**	**1.327.759.600**	**62.285.170**	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	24.511.295	230.419	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Tagihan yang Tidak Dijamin	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	
		a	b	
1	Kredit	1.359.832.195	89.885.708	
2	Surat Berharga	363.162.174	-	
3	**Total**	**1.722.994.369**	**89.885.708**	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	30.037.756	358.799	

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR3)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	c	d	e
	39.019.549	23.265.621	
	-	-	
	39.019.549	**23.265.621**	
	39.055	191.364	

			(dalam jutaan rupiah)
	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	c	d	e
	53.600.441	36.285.267	
	-	-	
	53.600.441	**36.285.267**	
	41.297	317.502	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

1) Bank secara Individu

	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
		a	b	
1	Tagihan kepada Pemerintah	433.363.693	41.685.216	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	82.531.443	65.795.204	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	59.774.718	30.214.062	
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	7.289.111	201.443	
6	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	
7	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum [2)]	510.530.495	169.867.464	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3)]	-	-	
8	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	129.707.791	13.189.564	
9	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	2.970	-	
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	235.428.321	35.208.755	
11	Kredit Beragun Properti	73.000.053	3.771.349	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	53.328.367	700	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	10.252.881	3.559.852	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang PembayarannyaBergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	9.418.805	210.796	
12	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	1.194.520	651.519	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	433.363.693	11.942.984	125.624	0,03%
	79.049.762	17.528.946	36.417.719	37,71%
	-	-	-	0,00%
	59.591.842	14.918.048	19.576.324	26,27%
	7.278.827	20.000	4.210.364	57,69%
	-	-	-	0,00%
	484.571.721	55.071.008	468.303.232	86,78%
	-	-	-	0,00%
	127.565.322	2.419.305	134.912.298	103,79%
	2.970	-	4.455	150,00%
	205.906.804	3.704.648	161.489.453	77,04%
	72.970.571	864.687	53.666.430	72,68%
	53.328.367	161	36.626.390	68,68%
	-	-	-	0,00%
	10.223.399	837.165	9.548.934	86,33%
	9.418.805	27.361	7.491.106	79,30%
	1.194.520	65.152	1.889.507	150,00%

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
		a	b	
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	9.655.369	2.064.829	
14	Aset Lainnya	92.952.370	-	
15	**Total**	**1.635.430.852**	**362.649.404**	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
		a	b	
1	Tagihan kepada Pemerintah	446.695.878	41.685.216	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	83.109.005	65.795.204	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	60.772.597	30.214.062	
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	7.289.111	201.443	
6	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	
7	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum [2)]	512.677.708	169.867.775	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3)]	-	-	
8	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	129.707.791	13.189.564	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	9.424.949	66.843	8.264.535	87,07%
	92.952.370	-	72.085.123	77,55%
	1.573.873.351	**106.601.621**	**960.945.064**	**57,18%**

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Persentase Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	446.695.878	11.942.984	125.624	0,03%
	79.627.325	17.528.946	36.745.127	37,82%
	-	-	-	0,00%
	60.578.721	14.918.048	19.819.697	26,25%
	7.278.827	20.000	4.210.364	57,69%
	-	-	-	0,00%
	486.718.934	55.071.133	470.409.186	86,82%
	-	-	-	0,00%
	127.565.322	2.419.305	134.912.298	103,79%

PENGUNGKAPANEKSPOSURRISIKOKREDITDANDAMPAKTEKNIKMITIGASIRISIKOKREDIT(CR4)

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
		Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
		a	b	
9	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	2.970	-	
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	308.433.807	35.209.960	
11	Kredit Beragun Properti	73.048.102	3.771.349	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	53.376.416	700	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	10.252.881	3.559.852	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang PembayarannyaBergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	9.418.805	210.796	
12	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	1.194.520	651.519	
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	9.914.731	2.064.829	
14	Aset Lainnya	98.598.603	-	
15	Ekposur di Entitas Anak - Syariah	354.066.765	3.203.788	
16	**Total**	**2.085.511.587**	**365.854.708**	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Persentase Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	2.970	-	4.455	150,00%
	278.885.051	3.705.130	208.760.127	73,87%
	73.018.620	864.687	53.683.573	72,66%
	53.376.416	161	36.643.533	68,65%
	-	-	-	0,00%
	10.223.399	837.165	9.548.934	86,33%
	9.418.805	27.361	7.491.106	79,30%
	1.194.520	65.152	1.889.507	150,00%
	9.684.311	66.843	8.513.285	87,31%
	98.598.603	-	77.513.437	78,62%
	313.933.490	2.784.531	145.245.102	45,86%
	1.983.782.572	**109.386.758**	**1.161.831.782**	**55,51%**

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

1) Bank secara Individu

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	
1	Tagihan kepada Pemerintah	456.226.101	628.120	-	

	Kategori Portofolio	20%	50%	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	39.572.116	57.523.266	

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	
4	Tagihan Kepada Bank	53.910.219	5.168.536	26.128.440	391.376	5.016	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	419.227	2.295.959	-	-	4.583.641	

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	456.854.221

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	97.095.381

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	-

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	3.671	0	-	85.607.258
	-	-	-	7.298.827

	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-		-	-	-

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%	
6	Tagihan kepada Korporasi Umum[2]	51.012.952	30.157.227	-	2.426.601		
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3]			-			
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4]					2.428.244	

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	
7	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	2.970	-	

	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	302.667	205.783.043	3.210.722	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	99.186.681	358.538.599		2.039	-	541.324.099
					-	-
		109.511.984	18.044.398		-	129.984.627

	250%	400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	2.970

	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	3.210.722	231.187	0	209.527.619

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	Kategori Portofolio	0%5)	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
	Kredit Beragun Properti										
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		128.399	99.962	4.387.134		2.814.286		1.160.781		
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-		-		-	
9	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		357.378,57						1.111.965	2.655.163	
	tanpa pendekatan pembagian kredit5)										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	Kredit Beragun Properti Komersial yang PembayarannyaBergantung Secara Material pada Arus Kas Properti										
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi[5]										

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	65%5)	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
										-	-
		-	44.737.966	-		-			-	-	53.328.528
										-	-
										-	-
										-	-
			-				-		-	-	-
			1.869.034	-		3.347.863			1.719.160	-	11.060.563
										-	-
										-	-
										-	-
		5.869.187			2.760.011			816.968	-	-	9.446.167
						0			1.259.671	-	1.259.671

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	Kategori Portofolio	50%	100%	
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	5.369.956	1.282.340	

	Kategori Portofolio	0%	20%	
11	Aset Lainnya	20.867.247		

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)	
1	< 40%	603892365,3	67041488,3	
2	40%-70%	98615590,05	79377443,27	
3	75%	277437672,1	35837578,42	
4	80%	2415274,614	457924,854	
5	85%	112233829,2	23166519,96	
6	90%-100%	516513735,9	149359119,2	
7	105%-130%	18531176,78	3337640,74	
8	150%	5791208,155	4071689,098	
9	250%	0	0	
10	400%	0	0	
11	1250%	0	0	
12	**Total Tagihan Bersih**	**1635430852**	**362649403,9**	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	2.839.496		9.491.792

	100%	150%	1250%5)	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	72.085.123				92.952.370

	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
	26,41%	618.373.175
	36,80%	127.069.495
	12,41%	259.394.492
	0,00%	2.428.244
	30,06%	102.322.413
	35,15%	546.204.487
	10,00%	18.861.367
	5,17%	5.821.298
	0,00%	0
	0,00%	0
	0,00%	0
	30,74%	**1.680.474.972**

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

2) BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	
1	Tagihan kepada Pemerintah	476.041.085	628.120	0	

	Kategori Portofolio	20%	50%	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	39.572.116	58.023.574	

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	
4	Tagihan Kepada Bank	55.437.406	5.218.946	25.307.507	496.174	5.016	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	419.227	2.295.959	0	0	4.583.641	

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	0	0	0	0	0	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	0	0		476.669.205

	100	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	77.254	0		97.672.944

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	0	0		0

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	242.970	0		86.708.019
	0	0		7.298.827

	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	0	0		0

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%5)	75%	80%	
6	Tagihan kepada Korporasi Umum[2)]	51.012.952	30.403.309		2.511.213		
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[3)]						
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]					2.428.244	

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	
7	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya		2.970		

	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	307.216	248.149.413	3.433.696	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	99.186.681	360.149.624		207.658		543.471.437
						0
		109.511.984	18.044.398			129.984.627

	400%5)	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
			2.970

	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	454.539	0	252.344.863

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	Kategori Portofolio	0%5)	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
	Kredit Beragun Properti										
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		139.550	104.006	4.398.088		2.821.153		1.174.053		
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				0	0		0		0	
9	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		357.379						1.111.965	2.655.163	
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]										
	Kredit Beragun Properti Komersial yang PembayarannyaBergantung Secara Material pada Arus Kas Properti										
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi[5]										

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	65%5)	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
											0
		1.761	44.737.966	0		0			0	0	53.376.577
											0
											0
											0
			0				0		0	0	0
			1.869.034	0		3.347.863			1.719.160		11.060.563
											0
											0
											0
		5.869.187			2.760.011			816.968	0		9.446.167
						0			1.259.671	0	1.259.671

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	Kategori Portofolio	50%	100%	
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	5.399.186	1.504.465	

	Kategori Portofolio	0%	20%	100%	
11	Aset Lainnya	21.085.166		77.513.437	

	Kategori Portofolio	0%	25%	35%	50%	
12	Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	103.170.615	9.854.950	26.060.136	54.658.255	

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)	
1	< 40%	618.995.806	67041488,3	
2	40%-70%	128.810.537	79377443,27	
3	75%	319.915.411	35838783,42	
4	80%	2.415.275	457924,854	
5	85%	112.456.803	23166519,96	
6	90%-100%	524.314.981	149359430,2	
7	105%-130%	18.531.177	3337640,74	
8	150%	6.004.834	4071689,098	
9	250%	0	0	
10	400%	0	0	
11	1250%	0	0	
12	Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	341.624.169	5.097.139	
13	**Total Tagihan Bersih**	**2.073.068.991**	**367.748.059**	

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	2.847.503		9.751.154

	150%	1250%5)	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
				98.598.603

	75%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	39.108.702	61.826.106	286.037	316.718.022

	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
	26,41%	633.476.616
	36,80%	157.253.442
	12,41%	301.845.474
	0,00%	2.428.244
	30,06%	102.545.387
	35,15%	554.005.856
	10,00%	18.861.367
	5,17%	6.034.924
	0,00%	0
	0,00%	0
	0,00%	0
	54,71%	213.547.407
	30,74%	**1.776.451.309**

RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARY CREDIT RISK (CCR1)

INDIVIDU

	Posisi 31 Desember 2023	*Replacement cost* (RC)	*Potential future exposure* (PFE)	EEPE	
1	SA-CCR (untuk derivatif)	1.920.760	1.431.013		
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)				
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
5	VaR untuk SFT				
6	**Total**	**1.920.760**	**1.431.013**		

KONSOLIDASI

	Posisi 31 Desember 2023	*Replacement cost* (RC)	*Potential future exposure* (PFE)	EEPE	
1	SA-CCR (untuk derivatif)	1.949.694	1.438.086		
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)				
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
5	VaR untuk SFT				
6	**Total**	**1.949.694**	**1.438.086**		**-**

RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARY CREDIT RISK (CCR1)

(dalam jutaan rupiah)

	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
	1,4	4.692.482	2.785.094
		20.153.407	2.535.213
		-	-
		24.845.888	**5.320.307**

(dalam jutaan rupiah)

	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
	1,4	4.742.892	2.800.217
		26.704.227	2.562.649
		31.447.119	**5.362.866**

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu

Posisi 31 Desember 2023

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%	
Tagihan Kepada Pemerintah	11.547.544	-	-	-	-	-	
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kepada Bank	-	-	5.129.370	-	22.951	-	
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
Tagihan kepada Korporasi	-	-	309	-	-	-	
Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*	-	-	-	-	-	-	
Total	**11.547.544**	**-**	**5.129.679**	**-**	**22.951**	**-**	

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

(dalam jutaan rupiah)

	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
	-	-	-	-	-	-	-	-	11.547.544
	-	-	516.673	-	-	-	-	-	516.673
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.945.047	-	-	-	-	-	-	-	11.097.368
	-	-	-	-	-	2.933	-	-	2.933
	-	-	39.864	10.809	74.990	1.553.359	2.039	-	1.681.370
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.945.047	**-**	**556.538**	**10.809**	**74.990**	**1.556.292**	**2.039**	**-**	**24.845.888**

Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

Posisi 31 Desember 2023

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%	
Tagihan Kepada Pemerintah	18.030.343	-	-	-	-	-	
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kepada Bank	-	-	5.129.370	-	73.361	-	
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
Tagihan kepada Korporasi	-	-	309	-	-	-	
Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*	-	-	-	-	-	-	
Eksposur di Entitas Anak - Syariah	-	-	-	-	-	-	
Total	**18.030.343**	**-**	**5.129.679**	**-**	**73.361**	**-**	

RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

(dalam jutaan rupiah)

	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
	-	-	-	-	0	-	-	-	18.030.343
	-	-	516.673	-	0	-	-	-	516.673
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.008.519	-	-	-	0	-	-	-	11.211.250
	-	4.549	-	-	0	2.933	-	-	7.482
	-	-	39.864	10.809	74.990	1.553.359	2.039	-	1.681.370
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.008.519	**4.549**	**556.538**	**10.809**	**74.990**	**1.556.292**	**2.039**	**-**	**31.447.119**

RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2023 **(dalam jutaan rupiah)**

INDIVIDU	Proteksi yang dibeli (*Protection bought*)	Proteksi yang dijual (*Protection sold*)
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Posisi 31 Desember 2023 **(dalam jutaan rupiah)**

KONSOLIDASI	Proteksi yang dibeli (*Protection bought*)	Proteksi yang dijual (*Protection sold*)
Nilai Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* (SEC1)

Posisi 31 Desember 2023

INDIVIDU		Bank sebagai originator			
		Traditional	Sintetis	Sub-total	
1	Retail (total) –antara lain	24.130	-	24.130	
2	Kredit perumahan	24.130	-	24.130	
3	Kartu kredit	-	-	-	
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	
7	Kredit korporasi	-	-	-	
8	Kredit komersil	-	-	-	
9	Sewa dan piutang	-	-	-	
10	Non-retail lainnya	-	-	-	
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			
		Traditional	Sintetis	Sub-total	
1	Retail (total) –antara lain	24.130	-	24.130	
2	Kredit perumahan	24.130	-	24.130	
3	Kartu kredit	-	-	-	
4	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	
5	Re-sekuritisasi	-	-	-	
6	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	
7	Kredit korporasi	-	-	-	
8	Kredit komersil	-	-	-	
9	Sewa dan piutang	-	-	-	
10	Non-retail lainnya	-	-	-	
11	Re-sekuritisasi	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK (SEC1)

(dalam jutaan rupiah)

	Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
	-	-	-	67.848	-	67.848
	-	-	-	67.848	-	67.848
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

	Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
	-	-	-	68.940	-	68.940
	-	-	-	68.940	-	68.940
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK* (SEC2)

Posisi 31 Desember 2022

INDIVIDU		Bank sebagai originator			
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	
2	pinjaman perumahan	-	-	-	
3	kartu kredit	-	-	-	
4	eksposur ritel lainnya	-	-	-	
5	re-sekuritisasi	-	-	-	
6	Non-retail(total) – antara lain	-	-	-	
7	kredit korporasi	-	-	-	
8	kredit komersil	-	-	-	
9	sewa dan piutang	-	-	-	
10	non-retail lainnya	-	-	-	
11	re-sekuritisasi	-	-	-	

KONSOLIDASI		Bank sebagai originator			
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	
1	Retail (total) – antara lain	-	-	-	
2	pinjaman perumahan	-	-	-	
3	kartu kredit	-	-	-	
4	eksposur ritel lainnya	-	-	-	
5	re-sekuritisasi	-	-	-	
6	Non-retail(total) – antara lain	-	-	-	
7	kredit korporasi	-	-	-	
8	kredit komersil	-	-	-	
9	sewa dan piutang	-	-	-	
10	non-retail lainnya	-	-	-	
11	re-sekuritisasi	-	-	-	

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA TRADING BOOK (SEC2)

(dalam jutaan rupiah)

	Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

	Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2023

INDIVIDU		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)				
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	
1	Total eksposur	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
2	Sekuritisasi tradisional	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
4	ritel	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
5	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2023

KONSOLIDASI		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)				
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	
1	Total eksposur	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
2	Sekuritisasi tradisional	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
3	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
4	ritel	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-	
5	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dimana *underlying* sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNNYA (SEC3)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2022

INDIVIDU		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA	
1	Total eksposur	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
2	Sekuritisasi tradisional	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
3	Dimana underlying sekuritisasi	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
4	ritel	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
5	non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	12.114	-	-	-	-	-	-
	12.114	-	-	-	-	-	-
	12.114	-	-	-	-	-	-
	12.114	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2022

KONSOLIDASI		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%	IRB RBA	
1	Total eksposur	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
2	Sekuritisasi tradisional	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
3	Dimana underlying sekuritisasi	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
4	ritel	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
5	non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	12.331	-	-	-	-	-	-
	12.331	-	-	-	-	-	-
	12.331	-	-	-	-	-	-
	12.331	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS *(LIQUIDITY COVERAGE RATIO)* TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
Posisi Laporan : Triwulan IV 2023

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		62 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
2	Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)		344.537.560
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)			
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	476.718.890	34.431.405
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	264.809.685	13.240.484
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	211.909.205	21.190.920
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	598.458.104	180.665.626
	a. Simpanan Operasional	474.295.379	112.206.372
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	124.162.724	68.459.254
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (*unsecured debt*)	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)		-
6.	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari:	328.582.549	99.959.521
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	89.799.722	89.799.722
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	26.937.370	3.932.443
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-

LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan rupiah)

	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
		52hari | 52days				52hari
		360.968.981				451.225.953
	476.076.270	34.500.283			628.095.674	47.932.423
	262.146.873	13.107.344			297.542.877	14.877.144
	213.929.397	21.392.940			330.552.796	33.055.280
	570.372.293	184.896.839			702.248.229	233.937.892
	366.530.563	85.975.577			431.397.192	101.546.368
	203.841.730	98.921.262			267.354.222	128.894.709
	-	-			3.496.815	3.496.815
		-				449.237
	312.235.023	88.229.756			323.666.882	95.862.779
	78.582.966	78.582.966			78.582.966	78.582.966
	-	-			-	-
	-	-			-	-
	26.972.523	3.725.056			28.133.242	3.840.916
	-	-			-	96.682

LAPORAN PERHITUNGAN

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	211.845.457	6.227.356
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
7.	**TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)**		**315.056.551**
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)			
8.	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	1.586.390	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang bersifat lancar (*inflows from fully performing exposures*)	53.547.128	29.709.564
10.	Arus kas masuk lainnya	89.853.741	89.853.741
11.	**TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)**	144.987.259	119.563.305
			***TOTALADJUSTEDVALUE*[1]**
12.	**TOTAL HQLA**		344.537.560
13.	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)**		195.493.246
14.	**LCR (%)**		**176,24%**

Keterangan : [1] Adjusted value dihitung pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan rupiah)

	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
	206.679.535	5.921.734			209.666.559	6.058.101
	-	-			7.284.115	7.284.115
		307.626.878				**378.182.331**
	3.057.644	-			3.239.631	90.994
	54.386.206	30.044.505			65.696.538	36.831.575
	78.672.896	78.672.896			78.796.889	78.734.892
	136.116.746	108.717.401			147.733.058	115.657.461
	TOTALADJUSTEDVALUE[1]		***TOTALADJUSTEDVALUE*[1]**		**TOTALADJUSTEDVALUE[1]**	
		360.968.981				451.225.953
		198.909.477				262.524.870
		181,47%				**171,88%**

LAPORAN NSFR (NSFR) REPORT

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS *(LIQUIDITY COVERAGE RATIO)* TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)
Posisi Laporan : Desember /2023

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	**Modal :**	**219.947.727**	**-**	**-**	**11.502.498**	**231.450.225**
2	Modal sesuai POJK KPMM	219.947.727	-	-	11.502.498	231.450.225
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-
4	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:**	**405.437.249**	**124.657.291**	**2.093.817**	**476.946**	**493.142.789**
5	Simpanan dan pendanaan stabil	269.634.088	4.216.662	75.694	5.953	260.236.074
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	135.803.161	120.440.630	2.018.123	470.992	232.906.714
7	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:**	**507.429.410**	**148.777.926**	**26.096.631**	**68.057.889**	**364.361.724**
8	Simpanan operasional Operational savings	465.350.125	-	-	-	232.675.063
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi Other funding comes from corporate customers	42.079.284	148.777.926	26.096.631	68.057.889	131.686.661
10	**Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung**	**-**	**12.311.424**	**229.922**	**194.947**	**-**
11	**Liabilitas dan ekuitas lainnya :**	**39.779.114**	**-**	**-**	**-**	**375**
12	NSFR liabilitas derivatif					
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	39.779.114	-	-	-	375
14	**Total ASF**					**1.088.955.112**
15	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR**					40.304.440
16	**Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional**	**27.638.639**	**-**	**-**	**-**	**13.819.319**
17	**Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga**	**-**	**156.798.428**	**119.738.424**	**753.054.186**	**764.889.293**
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	5.012.966	-	-	501.297

LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah) |

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2023)					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	236.564.684	**-**	**-**	**12.058.834**	**248.623.518**	
	236.564.684	-	-	12.058.834	248.623.518	**1.1** **1.2**
	-	-	-	-	-	**1,3**
	403.209.034	**125.632.961**	**1.533.663**	**479.671**	**491.776.979**	**2** **3**
	274.833.186	4.290.319	60.792	4.862	265.229.944	**2.1** **3.1**
	128.375.848	121.342.643	1.472.871	474.809	226.547.035	**2.2** **3.2**
	590.968.200	**176.416.261**	**28.434.342**	**67.876.834**	**412.809.457**	**4**
	541.326.366	-	-	-	270.663.183	**4,1**
	49.641.834	176.416.261	28.434.342	67.876.834	142.146.274	**4,2**
	-	**14.159.001**	**204.009**	**99.931**	**-**	**5**
	39.963.311	**-**	**-**	**-**	**597**	**6**
						6,1
	39.963.311	-	-	-	597	**6.2s.d.6.5**
					1.153.210.551	**7**
					43.514.173	**1**
	34.483.261	**-**	**-**	**-**	**17.241.630**	**2**
	-	**208.118.414**	**122.146.551**	**793.263.472**	**816.869.143**	**3**
	-	16.205.580	-	-	1.620.558	**3.1.1**

LAPORAN NSFR

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	18.825.187	6.962.118	64.800.492	71.105.329
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	112.530.384	90.721.968	548.350.692	567.724.264
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	19.568.549	21.417.074	72.950.939	67.910.922
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	35.829	112.384	46.916.589	39.953.207
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	924	3.823	55.377	38.368
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	824.588	521.058	19.980.098	17.655.906
25	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung**	**-**	**12.311.424**	**229.922**	**194.947**	**-**
26	**Aset lainnya :**	**-**	**3.304.659**	**203.999**	**105.070.122**	**108.578.780**
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund pada central counterparty* (CCP)		-			-
29	NSFR aset derivatif		2.775.641			2.775.641
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-			-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	529.018	203.999	105.070.122	105.803.139
32	**Rekening Administratif**				**359.549.519**	**6.646.738**
33	**Total RSF**					**934.238.570**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))**					**116,56%**

LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah) |

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2023)					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	-	26.488.860	7.529.293	65.591.979	73.329.955	3.1.2 3.1.3
	-	139.185.778	87.665.945	575.913.313	602.952.177	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
	-	24.676.366	26.783.022	83.050.605	79.712.588	3.1.4.1
	-	42.710	120.946	48.668.006	41.449.633	3.1.7.2
	-	576	3.423	63.170	43.060	3.1.7.1
	-	1.518.545	43.922	19.976.398	17.761.172	3,2
	-	**14.159.001**	**204.009**	**99.931**	**-**	**4**
	-	**2.489.131**	**206.005**	**101.859.864**	**104.555.001**	**5**
	-				-	5,1
		-			-	5,2
		1.968.893			1.968.893	5,3
		-			-	5,4
	-	520.238	206.005	101.859.864	102.586.107	5.5s.d.5.12
				363.284.366	**6.941.575**	**12**
					989.121.522	**13**
					116,59%	**14**

LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember /2023

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (September/2022)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	**Modal :**	**261.660.083**	**-**	**-**	**13.925.761**	
2	Modal sesuai POJK KPMM	261.660.083	-	-	13.925.761	
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	
4	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:**	**514.724.048**	**168.060.696**	**8.054.658**	**483.293**	
5	Simpanan dan pendanaan stabil	287.735.829	8.017.178	581.534	7.137	
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	226.988.219	160.043.518	7.473.123	476.156	
7	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:**	**564.865.631**	**243.218.633**	**38.314.377**	**91.044.120**	
8	Simpanan operasional	519.390.440	-	-	-	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	45.475.190	243.218.633	38.314.377	91.044.120	
10	**Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung**	**-**	**12.311.424**	**229.922**	**194.947**	
11	**Liabilitas dan ekuitas lainnya :**	**40.856.974**	**15.034.333**	**-**	**5.719.157**	
12	NSFR liabilitas derivatif					
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	40.856.974	15.034.333	-	5.719.157	
14	**Total ASF**					

LAPORAN NSFR

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2022)						
	Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
Item Data Kuantitatif	**275.585.844**	**280.316.351**	**-**	**-**	**14.561.660**	**294.878.011**	
Modal	275.585.844	280.316.351	-	-	14.561.660	294.878.011	1.1 1.2
Instrumen pendanaan stabil lainnya	-	-	-	-	-	-	1.3
Pendanaan ritel dan UMKM	**637.055.482**	**521.723.670**	**169.630.203**	**7.581.098**	**486.519**	**644.697.662**	**2** **3**
Pendanaan stabil	281.524.951	294.590.791	8.462.286	340.319	5.238	288.228.965	2.1 3.1
Pendanaan kurang stabil	355.530.530	227.132.878	161.167.916	7.240.778	481.282	356.468.698	2.2 3.2
Pendanaan dari nasabah non ritel	**461.008.909**	**661.603.278**	**280.356.139**	**40.556.464**	**95.182.210**	**521.408.880**	**4**
Pendanaan stabil	259.695.220	602.877.245	-	-	-	301.438.623	4.1
Pendanaan kurang stabil	201.313.689	58.726.033	280.356.139	40.556.464	95.182.210	219.970.257	4.2
Pendanaan yang saling terkait	**-**	**-**	**14.159.001**	**204.009**	**99.931**	**-**	**5**
Persyaratan lainnya	**5.719.532**	**41.286.140**	**15.454.949**	**-**	**5.549.557**	**5.550.154**	**6**
							6.1
	5.719.532	41.286.140	15.454.949	-	5.549.557	5.550.154	6.2 s.d. 6.5
Total Pendanaan Stabil yang Tersedia	**1.379.369.767**					**1.466.534.707**	**7**

LAPORAN NSFR

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (September/2023)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
15	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR**					
16	**Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional**	**33.846.237**	**1.707.057**	**-**	**-**	
17	**Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga**	**1**	**194.703.434**	**137.580.650**	**998.960.875**	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	5.012.966	-	-	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	21.594.641	8.509.704	66.645.020	
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	1	141.652.525	104.120.459	740.216.264	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	23.689.412	24.205.653	85.281.254	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	35.829	112.384	46.925.723	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	31.992	111.394	38.209.399	
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	2.686.070	521.058	21.683.215	
25	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung**	**-**	**12.311.424**	**229.922**	**194.947**	
26	**Aset lainnya :**	**12.519.151**	**4.106.097**	**305.042**	**109.456.364**	
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)		-			
29	NSFR aset derivatif		2.809.125			
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-			
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	12.519.151	1.296.972	305.042	109.456.364	
32	**Rekening Administratif**		**363.490.748**			
33	**Total RSF**					
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))** **Net Stable Funding Ratio (%)**					

LAPORAN NSFR

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2023)						
	Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	44.147.956					**48.187.068**	**1**
	17.776.647	**37.691.264**	**1.490.625**	**-**	**-**	**19.590.944**	**2**
	989.703.025	**-**	**252.704.460**	**139.045.361**	**1.050.962.880**	**1.053.614.010**	**3**
	501.297	-	16.205.580	-	-	1.620.558	**3.1.1**
	74.139.068	-	29.606.024	9.072.235	67.342.768	76.319.789	**"3.1.2**
	749.102.653	-	174.545.327	98.600.401	776.050.259	3.1.3"	**3.1.4.2 3.1.5 3.1.6**
	81.056.938	-	28.536.182	31.090.743	95.927.939	792.974.184	**"3.1.4.2**
	39.960.971	-	42.710	120.946	48.700.429	3.1.5	**3.1.7.2**
	24.907.802	-	31.211	117.114	41.230.901	3.1.6"	**3.1.7.1**
	20.034.296	-	3.737.426	43.922	21.710.585	94.003.367	**3.1.4.1**
	-	**-**	**14.159.001**	**204.009**	**99.931**	**41.477.192**	**3.1.7.2**
	124.180.314	**5.077.335**	**3.285.771**	**288.149**	**105.035.385**	**26.874.248**	**3.1.7.1**
	-	-				20.344.671	**3.2**
	-		-			-	**4**
	2.809.125		1.997.827			113.680.682	**5**
	-		-			-	**5.1**
	121.371.189	5.077.335	1.287.944	288.149	105.035.385	-	**5.2**
	6.785.248		**366.830.616**			**1.997.827**	**5.3**
	1.182.593.190					**-**	**5.4**
	116.64%					**111.682.855**	**5.5 s.d. 5.12**

TABEL 7.1.
PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Risiko Suku Bunga	425.841	5.323.018			213.507	2.668.838	232.621	2.907.764
1	a. Risiko Spesifik	868	10.844			389	4.858	11.735	146.685
	b. Risiko Umum	424.974	5.312.174			213.118	2.663.980	220.886	2.761.079
2	Risiko Nilai Tukar	264.267	3.303.335			252.828	3.160.355	265.464	3.318.294
3	Risiko Ekuitas *)	-	-			-	-	485	6.059
4	Risiko Komoditas *)	-	-			-	-	-	-
5	Risiko Option	33	413			29	366	29	366
6	CVA	108.276	1.353.449			-	-	-	-
	Total	**798.417**	**9.980.215**			**466.365**	**5.829.558**	**498.599**	**6.232.483**

*) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

TABEL 7.2
PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INTERNAL (VALUE AT RISK/VAR) - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	24.583	47.974	12.661	18.991	30.661	59.043	11.150	37.069
2	Risiko Nilai Tukar	32.655	85.253	3.356	25.636	15.341	51.469	1.981	20.428
3	Risiko Option	7.089	26.108	1.115	2.193	3.064	12.607	70	1.108
	Total	**37.289**	**86.076**	**15.257**	**33.058**	**35.402**	**73.388**	**14.180**	**42.614**

TABEL 7.3A
LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)
Posisi : Desember / 2023
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	**Desember 2023**	**Desember 2022**	**Desember 2023**	**Desember 2022**
Parallel up	(2.202.450)	(8.817.299)	121.234	(2.844.960)
Parallel down	6.127.559	15.982.186	(3.091.515)	(2.508.387)
Steepener	(6.912.287)	(8.180.958)		
Flattener	7.086.259	7.022.267		
Short rate up	3.367.107	2.419.648		
Short rate down	(4.517.455)	(3.116.714)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	6.912.287	8.817.299	3.091.515	2.844.960
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	209.724.274	181.072.852	67.392.637	58.798.950
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 atau *Projected Income*	**3.30%**	**4.87%**	**4.59%**	**4.84%**

TABEL 7.4
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)
Posisi : Desember / 2023
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Analisa Kualitatif

1 Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.
Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi *aset* dan *liabilities* atau strategi *hedging*.

2 Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi.
Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2023, ΔEVE Bank Mandiri Individu sebesar 3,31% masih berada di bawah limit regulator yakni 15%. Penurunan ΔEVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal menjaga likuiditas.

3 Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:
1. Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
2. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

4 Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
Parallel Up	*Shock* suku bunga yang paralel ke atas	√	√

TABEL 7.4
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:			
Skenario	**Penjelasan**	**Estimasi perubahan**	
		Economic value	**Earnings**
Parallel Down	*Shock* suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	*Shock* suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (*short rates down* and *long rates up*)	√	
Flattener	*Shock* suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	*Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	*Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

5 Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

6 Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

7 Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.

Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII:
1. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.
2. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan *non maturing deposit* (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer), *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.

Analisis Kuantitatif

1 Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

√ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun *(Wholesale)*.
√ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (Wholesale).
√ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (Wholesale).
√ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (Wholesale).

2 *Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

√ Repricing maturity terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

TABEL 7.3B
LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi : Desember / 2023
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	**Des-23**	**Des-22**	**Des-23**	**Des-22**
Parallel up	(9,441,540)	(15,142,563)	(217,679)	(3,784,079)
Parallel down	14,395,450	22,835,061	(3,335,916)	(2,609,711)
Steepener	(8,288,576)	(8,778,230)		
Flattener	(6,725,141)	6,058,388		
Short rate up	340,892	(500,632)		
Short rate down	(1,635,207)	(316,160)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	9,441,540	15,142,563	3,335,916	3,784,079
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	258,956,049	223,271,29	95,178,000	81,292,600
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 atau *Projected Income*	3.65%	6.78%	3.50%	4.65%

TABEL 7.4
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM *BANKING BOOK*

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)
Posisi : Desember / 2023
Mata Uang : Rupiah dan Valas

Analisa Kualitatif	
1	**Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.**
	Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat ΔEVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi *aset* dan *liabilities* atau strategi *hedging*.
2	**Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.**
	Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal (ΔEVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2022, ΔEVE Bank Mandiri Konsolidasi sebesar 6,78% berada di bawah limit regulator yakni 15%.
3	**Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.**
	Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut: 1. Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank. 2. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.
4	**Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.**

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
Parallel Up	*Shock* suku bunga yang paralel ke atas	√	√
Parallel Down	*Shock* suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
Steepener	*Shock* suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (*short rates down* and *long rates up*)	√	
Flattener	*Shock* suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
Short Up	*Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
Short Down	*Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

TABEL 7.4
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

5	**Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) – apabila ada.**
	Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS) Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.
6	**Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.**
	Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.
7	**Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII.**
	Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII: 1. Perhitungan ΔEVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan ΔNII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas. 2. Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumer, deposito retail, dan *non maturing deposit* (NMD), telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap ΔEVE dan ΔNII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumer), *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting* NMD. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.
Analisis Kuantitatif	
1	**Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.**
	√ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun (Wholesale). √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (Wholesale). √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (Wholesale). √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (Wholesale).
2	***Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.**
	√ *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.



LAPORAN PELAKSANAAN ESG



Obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan Tahap 1

Rp 5 triliun

Bank Mandiri berperan aktif dalam mencapai tujuan Keuangan Berkelanjutan dengan membentuk Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I sebesar Rp10 Triliun dan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Tahap I sebesar Rp5 Triliun. Obligasi yang telah diterbitkan terdiri dari 2 seri yaitu seri A dan seri B dengan rincian seri A sebesar Rp1,95 triliun dengan tenor 3 tahun dan seri B sebesar Rp3,05 triliun dengan tenor 5 tahun. Adapun penawaran yang masuk mencapai Rp18,7 triliun atau terjadi kelebihan permintaan *(oversubscribed)* sebanyak 3,74 kali.

PENERAPAN **ESG DI BANK MANDIRI**

Bank Mandiri terus berkomitmen dalam mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan memiliki aspirasi menjadi ***"Indonesia's Sustainability Champion for A Better Future"*** yang didukung oleh tiga pilar utama meliputi *Sustainable Banking, Sustainable Operation*, dan *Sustainability Beyond Banking*. Dalam mendorong tercapainya ketiga pilar tersebut, Bank Mandiri telah membentuk delapan inisiatif yang memiliki fokus berbeda.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan aspek LST. Bank Mandiri meyakini bahwa keuangan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai ekonomi yang rendah karbon dan berkeadilan di mana Bank Mandiri hadir menjadi mitra pemerintah dan agen perubahan, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keuangan berkelanjutan sejalan dengan akselerasi yang dilakukan oleh Bank untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini menjadi bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) menuju Net *Zero Emission* (NZE) Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

VISI KEBERLANJUTAN BANK MANDIRI

Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future

KOMITMEN KEBERLANJUTAN BANK MANDIRI

- **Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy**
- **Net Zero Emissions (NZE) Operation by 2030**
- **Catalyzing Multiple Growth for Social Impact to Achieve SDGs**

Kerangka Keberlanjutan Bank Mandiri

Perjalanan Bank Mandiri mendukung terciptanya ekonomi Indonesia yang rendah karbon telah dimulai lima tahun yang lalu, pada saat Bank Mandiri menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2019-2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Mandiri mengambil peran aktif mengembangkan produk dan layanan yang mendukung pembiayaan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan nasabah dan meningkatkan keadilan sosial bagi pelaku usaha yang berada di bagian bawah piramida serta mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST atau ESG) dalam proses/ praktik bisnis Bank.

Bagi Bank Mandiri, nilai keberlanjutan menjadi fondasi dalam melakukan bisnis dan operasional sehingga Bank dapat memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, berkontribusi positif kepada lingkungan dan masyarakat, sekaligus aktif untuk turut serta menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Bank Mandiri memfokuskan inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan selama lima tahun terakhir dengan tujuan meningkatkan pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pengembangan kapasitas, dan mengembangkan sistem manajemen untuk mengelola keuangan berkelanjutan termasuk perubahan-perubahan pada organisasi, manajemen risiko, sistem dan prosedur serta dokumen-dokumen terkait yang diperlukan agar keuangan berkelanjutan dapat berjalan efektif.

Pada periode 2023 - 2027, inisiatif keuangan berkelanjutan Bank Mandiri diisi dengan 14 inisiatif dalam tiga pilar utama yaitu; (1) *Sustainable Banking;* (2) *Sustainable Operation*; dan (3) *Sustainability Beyond Banking*.

Bank Mandiri juga memperoleh pendanaan berbasis LST dengan penerbitan *Sustainability Bond* dan produk-produk pendanaan lainnya. Bank Mandiri telah memiliki kerangka keberlanjutan sejak tahun 2019 yang selaras dengan ketentuan POJK No. 51/ POJK.03/2017 dan *international best practice* lainnya.

Pembentukan ESG Group merupakan salah satu langkah penting bagi Bank Mandiri dalam penerapan keuangan berkelanjutan terutama sebagai *focal point* penyelenggaraan keuangan berkelanjutan di Bank Mandiri. ESG Group sebelumnya adalah *task force* yang ditunjuk oleh Direksi sejak 2019 yang kini bertansformasi menjadi unit permanen penuh waktu di bawah Wakil Direktur Utama. ESG Group bertindak sebagai penanggung jawab keuangan berkelanjutan di Bank Mandiri.

Rincian pencapaian keuangan berkelanjutan pada periode pelaporan 2023 dijabarkan lebih rinci dalam Laporan Keberlanjutan.

JOURNEY TO BECOMING **INDONESIA'S SUSTAINABILITY CHAMPION FOR A BETTER FUTURE**

2023

- Komitmen mendukung NDC pada Mandiri ESG Festival "Bank Mandiri *has committed to achieving NZE (Net Zero Emission) in Operations by 2030, Financing by 2060 (or sooner) and empowering the Digipreneurship*" di acara Mandiri ESG Festival
- *Streamlining* **RAKB 2024-2028** menjadi **8 insiatif**
- Bank Nasional pertama yang mengeluarkan **kartu Bank ramah lingkungan** *(recycled prepaid dan debit card)*
- Sebagai pionir dalam produk *cardless credit card*
- Sebagai pionir ***Digital Carbon Tracking***
- Menerbitkan ***Green Bond Fase*** 1 (Rp5 triliun)
- Memasarkan ESG Mutual Funds
- Member of ***PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)***
- Berpartisipasi dalam **Bursa Karbon Perdana** di Indonesia

2022

- Penetapan **visi &komitmen** keberlanjutan
- **Penyempurnaan 3 pilar** dengan 9 inisiatif
  1. *Sustainable Banking*
  2. *Sustainable Operation*
  3. Sustainability Beyond Banking
- Membentuk **ESG Group** sebagai *control tower implementasi LST*
- ***Nature Based Solution*** melalui konservasi dan restorasi lahan
- ***Credit Policy*** untuk sektor Kelapa Sawit & CPO, Energi, Batu Bara, Tambang dan FMCG
- Transaksi ***ESG Repo* pertama di Indonesia** sebesar US$500 juta

2021

- Anggota ***Task Force* Nasional Keuangan Berkelanjutan**
- Menerbitkan ***Sustainability Bond*** sebesar US$300 juta
- Perhitungan **Emisi Karbon** Operasional

2020

Alignment RAKB & Disclosure Sustainability Report dengan **SDGs, GRI SASB & MSCI**

2019

Penerapan RAKB di 3 Pilar
1. Sustainable Banking
2. Sustainable Operation
3. Sustainable CSR & Financial Inclusion

Total terdiri atas 14 inisiatif

2018

- ***First Movers IKBI*** (Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia)
- **Menyusun RAKB** sesuai POJK 51/2017

PILAR **LINGKUNGAN**

Kepedulian Bank Mandiri menjalankan kegiatan operasional yang mengutamakan keseimbangan lingkungan, terefleksi pada komitmen "*Net Zero Emission (NZE) in Operations by* 2030". Untuk memastikan pencapaian komitmen tersebut, Bank Mandiri telah menyusun strategi dalam melestarikan sumber daya yang diatur oleh tiga pendekatan, yakni: (1) *Green Business Mindset* (2) Pengukuran dan Pemantauan Emisi Karbon Operasional (3) melaksanakan inisiatif karbon netral yaitu *Green Operational* berupa efisiensi penggunaan konsumsi energy dan peralatan kantor yang rendah emisi serta *Carbon Offsetting* dalam bentuk *Nature Based Solution* (NBS) dan pembelian karbon unit.

KINERJA PILAR LINGKUNGAN

Bank pertama di Indonesia yang meluncurkan ***Digital Carbon Tracking***

Bank pertama di Indonesia yang meluncurkan **kartu berbahan ramah lingkungan**

1	Gedung Tersertifikasi Green Building
241	Smart Branch
727	Unit Solar Panel
136	Kendaraan Operasional dengan Electric Vehicles (EV)

PILAR LINGKUNGAN

PENGUKURAN EMISI GRK

Emisi GRK Cakupan 1 dan 2
Bank Mandiri telah mengukur emisi karbon operasional cakupan 1 dan 2, serta menjadikan emisi tahun 2019 sebagai *baseline*. Untuk emisi cakupan 3, Bank Mandiri telah menghitungkan emisi dari pembiayaan *(Financed Emission)* sesuai *Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)*.

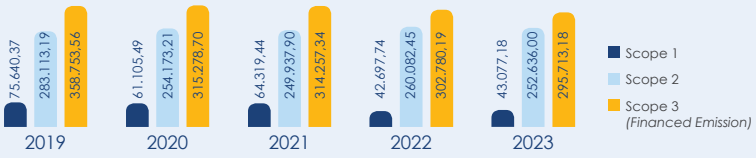

Data historis emisi karbon scope 1&2 Bank Mandiri (tCO2e)

18%
Penurunan Emisi Cakupan-1 dan 2 dibandingkan tahun dasar 2019

18,07 Juta
tCO2e emisi cakupan 3 dari pembiayaan

PENGURANGAN LIMBAH

3R REDUCE REUSE RECYCLE

- Bank Mandiri tidak memproduksi efluen. Air limbah diproses melalui pengolahan limbah
- Fasilitas ini memproduksi air minum berlabel halal, serta air yang digunakan untuk mesin pendingin dan menyirami tanaman

68% Limbah Berbahaya

2023	2022	2021
1.520 Kg	4.400 Kg	4.800 Kg

PENGGUNAAN AIR

- 2 Gedung Recycle Osmosis (Plaza Mandiri dan Menara Mandiri)
- 15% Peningkatan konsumsi air daur ulang di tahun 2023

Penggunaan Air:	2023	2022	2021
	560.911 m^3	328.129 m^3	410.316 m^3

PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS

46% Penghematan Penggunaan Kertas

Menghindari penebangan **23.000** pohon di tahun 2023*

*)Penghematan satu ton kertas setara dengan penyelamatan 20 pohon (Sumber : goinggreentoday)

Kebijakan dan Praktik Ramah Lingkungan

Kebijakan dan praktik ramah lingkungan yang dijalankan sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. Pengurangan Energi dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

Upaya pengurangan konsumsi energi dilakukan melalui serangkaian inisiatif pengurangan dan efisiensi energi pada kegiatan operasional perbankan. Penggunaan energi terbesar Bank adalah pemakaian listrik dan penggunaan bahan bakar minyak untuk transportasi dan listrik cadangan.

Oleh karenanya, Bank berinisiatif mengganti peralatan *air handling unit* (AHU) dengan yang lebih efisien, mengefisienkan penggunaan kendaraan operasional dan menyediakan kendaraan listrik & hibryd untuk menghemat konsumsi BBM, penggunaan lampu LED, mematikan lampu saat jam istirahat, dan mematikan lift tertentu pada hari libur. Saat ini 100% lampu LED telah digunakan pada 241 smart branch, sementara total kendaraan listrik yang telah tersedia hingga akhir 2023 adalah 136 unit.

Bank juga berinisiatif meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dengan telah memasang 727 unit solar panel di beberapa gedung ramah lingkungan yang digunakan.

Bank berhasil mengurangi konsumsi listrik sebesar **0,6%** dari tahun sebelumnya, ditengah meningkatnya intensitas kegiatan operasional dan naiknya skala perusahaan, sementara intensitas **konsumsi energi per pegawai menurun 19,7%** dibandingkan tahun dasar dari **52,40 Gjoule/Pegawai** di tahun 2019 menjadi **42,10 G Joule/Pegawai** di tahun 2023.

PILAR LINGKUNGAN

2. Pengelolaan dan Pengurangan Emisi GRK

Bank Mandiri melakukan penghitungan terhadap emisi GRK Operasional Cakupan-1 yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak dari 4.083 kendaraan operasional, dan terhadap emisi GRK Cakupan-2 yang berasal dari konsumsi listrik pada 2.348 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pencapaian komitmen *"NZE in Operations by 2030"* maka di tahun 2023 Bank Mandiri menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan Digital Carbon Tracking yang mengukur dan memantau seluruh emisi operasional yang dapat diakses oleh *stakeholder* dalam *Corporate Website*.

Platform ini memantau jejak karbon yang dihasilkan maupun emisi yang berhasil dikurangi dari operasional Bank Mandiri pusat hingga ke level kantor regional pada tahap I dan cabang pada tahap II. Pencatatan emisi pada *Digital Carbon Tracking* telah sesuai dengan *Greenhouse Gas* (GHG) *Protocol*. Pada tahun pelaporan, tercatat emisi GRK pada tahun 2023 adalah 295.713 tCO2e, turun sebesar 63.040,38 tCO2e dari tahun 2019 yang berjumlah 358.753 tCO2e atau turun 18% dibandingkan *baseline*.

Tahun 2019 merupakan *baseline* perhitungan emisi operasional dengan aktivitas operasional pre pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi (2020 dan 2021), Bank Mandiri tidak beroperasi dengan penuh karena adanya pembatasan sosial. Upaya Bank Mandiri menurunkan emisi operasional juga terlihat pada penurunan intensitas emisi GRK per karyawan dari 9,18 tCO2e/karyawan di tahun *baseline* (2019) menjadi 7,59 tCO2e/karyawan di tahun 2023.

3. Pembangunan dan Pengembangan Gedung Ramah Lingkungan

Bank Mandiri menerapkan pengembangan Gedung Ramah Lingkungan pada seluruh fasilitas ruang kantor yang digunakan, dengan menetapkan standar-standar gedung ramah lingkungan yang dikembangkan secara bertahap, mencakup diantaranya: optimalisasi pencahayaan sinar matahari, penggunaan lampu LED, penggunaan AC inverter, penggunaan timer untuk menghemat listrik, penggunaan *system Water Recycle with Reverese Osmosis*, penggunaan kaca ber-OTTV *(Overall Thermal Transfer Value)* rendah, dan sebagainya.

Hingga akhir tahun 2023, Bank Mandiri telah memiliki: **1 unit gedung bersertifikat Green Building, 4 Gedung Ramah Lingkungan dan 241 Smart Branch.**

4. *Carbon Offsetting*

Bank Mandiri menyadari untuk menyeimbangkan jejak emisi karbon aktivitas operasional, perlu akitivitas diluar operasional yang dapat mengkompensasi emisi operasional *(carbon offsetting)* antara lain melalui pembelian karbon unit, NBS, dan aksi mitigasi lainnya. Pengurangan karbon dengan cara *offsetting* merupakan opsi terakhir setelah seluruh upaya untuk mengurangi, substitusi, dan efisiensi telah Bank Mandiri lakukan. Dengan pertimbangan jangka waktu yang relatif singkat untuk mencapai *"NZE in Operations by 2030"*, Bank telah memulai inisiatif *carbon offsetting* melalui pembelian karbon unit dan mendorong investasi pada *project Nature Based Solution* (NBS) melalui restorasi dan konservasi lahan.

Pada 26 September 2023, Bank Mandiri berpartisipasi dalam bursa karbon Indonesia dengan membeli 3.027 tCO2 di pasar perdana atau senilai 10% dari total emisi operasional *baseline* yang kedepannya akan dipergunakan untuk kebutuhan Bank melalui mekanisme *retirement efek* unit karbon *(carbon offsetting)*.

Partisipasi Bank Mandiri ini juga merupakan bentuk nyata dukungan pada program strategis Pemerintah atas Perdagangan Karbon Perdana di Indonesia serta meningkatkan kapabilitas pegawai untuk dapat berperan aktif di Bursa Karbon di masa mendatang. Dalam momentum bersejarah ini, Bank Mandiri dipercaya oleh Regulator yaitu OJK sebagai partner sosialisasi dalam seminar nasional persiapan *carbon trading* di 5 kota utama Indoensia.

5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan dengan menerapkan prinsip 3 R *(Reduce, Reuse, Recycle)*, yakni mengoptimalkan program *paperless* dan digitalisasi seperti Livin' Super App, Kopra, dan *Branchless Banking* serta menyediakan menyediakan *Reversed Vending Machine* (RVM) sebagai sarana penukaran sampah plastik botol PET ke mesin dan mendapatkan Livin' poin pada Livin' App, untuk mengelola sampah plastik botol PET.

Inisiatif ini berhasil mengurangi timbulan sampah, seperti **menghemat konsumsi kertas hingga 46%** dari tahun sebelumnya, juga mengurangi timbulan limbah plastik.

Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan pihak ketiga berizin dan bersertifikat untuk mengelola sampah/ limbah B3 lainnya maupun sampah domestik.

6. Pengelolaan Konsumsi Air

Beberapa gedung utama kantor Bank Mandiri telah memiliki *water recycle* untuk proses daur ulang air dan memastikan tidak adanya pencemaran badan air di sekitar lokasi kantor. Bank juga menggunakan *sewage treatment plant* untuk mengelola *efluen*. Air daur ulang ini kemudian digunakan untuk *flushing* toilet, pemeliharaan tanaman, dan lain-lain, sehingga dapat menekan konsumsi air yang dipasok oleh pihak ketiga di area-area tersebut.

Informasi lengkap mengenai pengurangan dampak lingkungan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri yang diterbitkan terpisah namun masih dalam satu kesatuan.

PILAR LINGKUNGAN

Kebijakan Pembiayaan Ramah Lingkungan

Bank Mandiri juga terus berkomitmen untuk tidak memberikan pembiayaan kredit kepada aktivitas usaha/bisnis yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan (*exclusion/ negative list)* sebagai berikut:

a. Penebangan liar;
b. Pembukaan di lahan gambut;
c. Pelanggaran HAM sesuai UU Ketenagakerjaandan ILO Covention;
d. Penyalahgunaan narkoba;
e. Aktivitas usaha yang membahayakan lingkungan,termasuk mengganggu wilayah yang dilindungi seperti situs warisan dunia (UNESCO *World Heritage Site*), situs lahan basah sebagaimana masuk dalam kriteria konvensi Ramsar, dan situs berkeanekaragaman hayati tinggi serta dengan situs yang termasuk pada kategori area yang dilindungi pada IUCN Cat-1 & Cat-2 sebagaimana termasuk pada *Convention on Biological Diversity;*
f. Aktivitas usaha lain yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bserlaku yang meliputi, namun tidak terbatas pada: Pornografi; Perjudian; Pencucian uang; Kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Barang dan jasa lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bank Mandiri secara bertahap melakukan integrasi aspek ESG pada kebijakan perkreditan Bank dengan mensyaratkan pemenuhan kriteria minimum seperti penyaringan positif & negatif terhadap aktivitas bisnis calon debitur. Integrasi dilakukan pada Standar Prosedur Perkreditan yang mewajibkan:

a. Memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berdasarkan sektor industri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen analisa dampak lingkungan (AMDAL) untuk rencana usaha/kegiatan yang diwajibkan atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
b. Memiliki Hasil Penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Izin/Sertifikasi pengelolaan lingkungan terkait lainnya maupun kriteria lingkungan terkait lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Mandiri telah mengembangkan dan menerapkan kebijakan kredit yang mengintegrasikan aspek-aspek LST di dalamnya, serta memberlakukan kebijakan kredit sektoral sebagai ketentuan yang mengikat bagi kegiatan usaha yang dipertimbangkan memiliki risiko LST tinggi.

Pada tahun 2023, Bank Mandiri telah melakukan pengkajian ulang pada sektor prioritas eksisting secara berkala agar selalu mengikuti perkembangan bisnis serta melakukan penambahan aspek Lingkungan dan Sosial pada 6 (enam) sektor baru yaitu Pulp & Paper, Telekomunikasi, Transportasi, Industri Alat Angkut Lainnya (Galangan Kapal), Farmasi & Jasa Kesehatan, serta Minyak & Gas (Migas) yang dituangkan dalam *Industry Acceptance Criteria* (IAC).

Industry Acceptance Criteria Bank Mandiri

Sektor Industri	Kriteria Aspek ESG
Agrikultur (Termasuk Sektor Kelapa Sawit)	Dalam mengelola risiko LST pada sektor pertanian, khususnya perkebunan Kelapa Sawit & CPO, Bank Mandiri mensyaratkan pemenuhan ISPO dan/atau RSPO atau sekurang-kurangnya bukti pendaftaran ISPO dan/atau RSPO dari lembaga sertifikasi terkait. Bank Mandiri juga memperhatikan kebijakan lingkungan dan tenaga kerja debitur (termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja /K3), tata cara pencegahan dan penanganan kebakaran lahan sesuai standar yang berlaku, kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) mencakup kebijakan terkait pembukaan lahan, pelestarian area *High Conservation Value* (HCV), serta Instalasi Pengolahan Limbah (IPL). Pembiayaan tidak akan diberikan kepada perusahaan baru yang akan membuka lahan baru.
Sektor Energi	Dalam mengelola risiko ESG pada sektor Energi dan Penggunaan Energi, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, Bank Mandiri mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan agar selaras dengan strategi coal phase out sesuai dengan RUPTL PLN yang berlaku dan memperhatikan kebijakan debitur terkait lingkungan (emisi karbon, abu batu bara, pengelolaan air dan limbah) dan kebijakan ketenagakerjaan.
Sektor Batu Bara	Dalam mengelola risiko ESG pada sektor Batu bara, khususnya pemasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Bank Mandiri mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan agar selaras dengan strategi *coal phase out* sesuai dengan RUPTL PLN yang berlaku.
Sektor Pertambangan	Dalam mengelola risiko ESG pada sektor Pertambangan, Bank Mandiri mewajibkan debiturnya untuk menerapkan *Good Mining Practice* (Kaidah Pertambangan yang baik) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyertakan Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB) tahun bersangkutan yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM, dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan Kaidah Pertambangan yang Baik serta memiliki kebijakan internal *(code of conduct)* terkait Lingkungan dan Ketenagakerjaan.
Sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG)	Dalam mengelola risiko ESG pada sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), Bank Mandiri mensyaratkan debiturnya memiliki kebijakan lingkungan (seperti penggunaan bahan kimia dan pengelolaan air & limbah) serta memiliki sertifikasi dari Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sektor Minyak dan Gas Bumi	Dalam mengelola risiko ESG pada sektor Minyak dan Gas Bumi, khususnya pada sektor usaha hulu eksploitasi minyak dan gas bumi, Bank Mandiri mensyaratkan upaya untuk melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi, sesuai dengan ketentuan regulator pada lokasi usaha. Untuk perusahaan publik, memiliki *Sustainability Report* atau dokumen sejenis lainnya. Kegiatan Usaha Migas memiliki dokumen yang menyatakan terlaksananya seluruh persyaratan Keselamatan Migas (Instalasi dan Peralatan, Pekerja, Umum dan Lingkungan), khusus penunjang dibuktikan dengan SKUP (Surat Keterangan Usaha Penunjang).
Sektor terkait Keanekaragaman Hayati *(Biodiversity)*	Memenuhi dokumen izin pengelolaan hutan tanaman industri berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Bukan Kayu (IUPHHBK), Rencana Kerja Usaha (RKU) yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak melakukan kegiatan usaha di wilayah yang dinyatakan memiliki keanekaragaman hayati tinggi termasuk situs lahan bahan RAMSAR dan situs IUCN Cat.1 & 2
Sektor Konstruksi	Dalam mengelola risiko LST pada sektor konstruksi, Bank Mandiri mensyaratkan debitur memiliki kebijakan internal *(code of conduct)* terkait Lingkungan dan Ketenagakerjaan. Memiliki kebijakan internal dan standar prosedur (SOP) terkait penanganan kecelakaan untuk operator jalan tol.
Sektor Industri Alat Angkut Lainnya (Galangan Kapal)	Bank Mandiri mensyaratkan debiturnya memiliki upaya untuk melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi, dibuktikan dengan dokumen yang dapat diterima Bank. Untuk perusahaan publik, wajib memiliki laporan keberlanjutan.
Sektor Jasa Kesehatan	Bank Mandiri mensyaratkan debiturnya memenuhi dokumen Izin pengelolaan hutan tanaman industri berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Bukan Kayu (IUPHHBK), Rencana Kerja Usaha (RKU) yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memiliki kebijakan internal mengenai Manajemen Lingkungan dan Manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang dapat diterima Bank.
Sektor Farmasi	Bank Mandiri mensyaratkan debitur produsen farmasi memiliki izin/sertifikasi mengenai lingkungan (disesuaikan dengan risiko dari bahaya yang ditimbulkan limbahnya, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup). Memiliki upaya untuk melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi, dibuktikan dengan dokumen yang dapat diterima Bank.
Sektor Pulp & Paper	Bank Mandiri mensyaratkan debitur memiliki upaya untuk melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi, ketersediaan listrik dan sumber air yang memadai. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)/Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)/serta tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dibuktikan dengan dokumen yang dapat diterima Bank.
Sektor Telekomunikasi	Bank Mandiri mensyaratkan debitur memiliki upaya untuk melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi, dibuktikan dengan dokumen yang dapat diterima Bank (jika ada). Memiliki kebijakan internal terkait privasi data sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta memiliki sistem dan kapabilitas tinggi terkait *cybersecurity* (keamanan siber).

PILAR LINGKUNGAN

Sektor Industri	Kriteria Aspek ESG
Sektor Transportasi	Bank Mandiri mensyaratkan debitur memiliki upaya untuk melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi, dibuktikan dengan dokumen yang dapat diterima Bank.
Sektor Logam	Bank Mandiri mensyaratkan debitur memilki penilaian PROPER minimal Biru dan/ atau minimal memiliki laporan AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Memiliki sertifikasi Manajemen Lingkungan seperti ISO 14001/ISO 45001 atau dokumen sejenis lainnya yang dapat diterima oleh Bank.
Sektor-Sektor yang Sensitif Terhadap Aspek LST	Bank Mandiri menetapkan kebijakan kredit yang mengikat kepada nasabah pada sektor ini agar memperhatikan regulasi dan standar yang berlaku terkait LST, termasuk pemenuhan sertifikasi manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dan Sertifikasi terkait *occupational health safety* seperti ISO 45001atau standar serupa lainnya. Bagi debitur yang belum dapat memenuhi syarat yang ditetapkan, terdapat mekanis memonitoring dan penyusunan rencana aksi dalam rangka peningkatan aspek LST

Dalam rangka meningkatkan aspek LST, Bank menetapkan mekanisme monitoring dan penyusunan *action plan* dengan ketat terhadap debitur yang belum dapat memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pada praktiknya, Bank Mandiri akan melakukan *screening* awal atas risiko ESG sesuai kebijakan yang ada sebelum melakukan proses pemberian kredit kepada debitur. Proses ini dilakukan oleh *Business Unit, Risk Unit, Legal & Compliance, Credit Operations*, hingga Pejabat Pemutus Kredit. Berikut alur pemberian kredit Bank Mandiri dengan mempertimbangkan risiko ESG.

PROSES PERSETUJUAN KREDIT DI BANK MANDIRI

Menetapkan *targeted customer* dengan melakukan:
- *Due Dilligence* terhadap calon debitur melalui *Name Clearence* (KYC dan APU PPT).
- Memenuhi kriteria industri yang prospektif (*Well Known*, dan tidak termasuk dalam *exclusion list)* Bank Mandiri.
- Sesuai dengan industri *Acceptance Criteria* (IAC) yang telah memperhitungkan aspek LST.

Melakukan analisa kredit dengan mereview berbagai aspek:
- Aspek Kualitatif: *Industry and market outlook,* kualitas manajemen perusahaan.
- Dokumen legalitas maupun kepatuhan (AMDAL/ UKL, PROPER, K3 dan peraturan lingkungan lainnya), prospek usaha/ bisnis maupun strategi pemasaran.
- Aspek kuantitatif seperti kinerja keuangan.
- *Risk Assessment* dan Mitigasi risiko termasuk aspek LST atas pemberian kredit.

- Memberikan *legal opinion* dan solusi hukum terkait aspek legal termasuk aspek LST dalam pemberian kredit.
- Melakukan review kebutuhan terhadap aturan internal BMRI dan eksternal (peraturan perundang-undangan) dalam pemberian kredit.

Proses persetujuan kredit dilakukan dalam Forum "Rapat Komite Kredit", yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang yang masing-masing mewakili fungsi *Business Unit* dan Unit Manajemen Risiko yang melakukan pemutusan kredit.

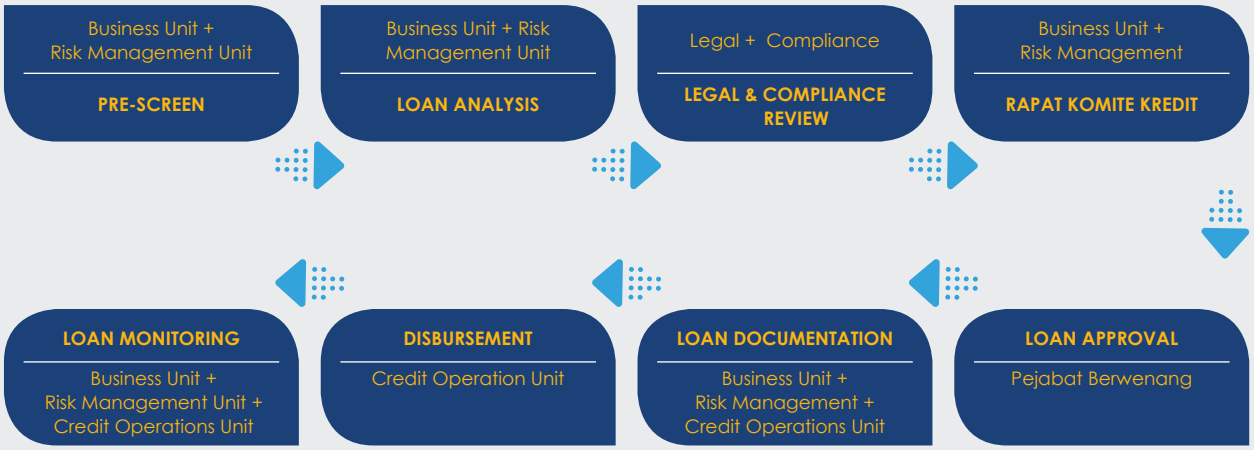

Monitoring kualitas kredit melalui:
- *Periodic call, on site visit*
- Pemenuhan persyaratan kredit
- *Annual review* fasilitas kredit.
- ALERT *(Early Warning System)*
- *Stress Test* dan Analisa Sensitivitas
- *Loan documentary maturity date monitoring*

- *Complience review*
- *Loan Activation*
- *Loan Disbursement*

- **Business Unit:** Pemenuhan dokumen persyaratan kredit dan tandatangan perjanjian kredit.
- **Risk Management Unit:** Melakukan *review* kesesuaian dokumen perjanjian kredit dengan hasil keputusan rapat komite kredit.
- **Credit Operations Unit:** Menyiapkan perjanjian kredit, pengikatan agunan & asuransi, dan *review* pemenuhan syarat kredit.

Pejabat yang memiliki kewenangan memutus kredit terbagi sesuai dengan kategorisasi limit kredit dalam ketentuan internal Bank Mandiri, di mana fungsi ini dijalankan oleh level *Vice President, Senior Vice President,* hingga level direksi.

PILAR LINGKUNGAN

Sampai dengan Desember 2023, nilai penyaluran *Sustainable Financing* sesuai Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK 51/2017 adalah sebagai berikut:

Portofolio Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp Miliar)

NO	Pembiayaan Berkelanjutan (Sesuai KKUB POJK 51/2017)	2023	2022	2021
1	Energi Terbarukan	9.727	6.149	4.281
2	Efisiensi Energi	-	-	-
3	Pencegahan dan pengendalian Polusi	-	-	-
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	102.413	92.956	88.537
5	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-
6	Transportasi Ramah Lingkungan	3.926	3.107	2.028
7	Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	1.171	867	1.214
8	Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-
9	Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi *(Eco-Efficient)*	5.354	3.307	-
10	Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar/Sertifikasi	6.612	16	205
11	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	8.776	5.067	5.255
12	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	126.101	117.295	103.547
	Total Pembiayaan Berkelanjutan	**264.080**	**228.764**	**205.067**
	% Share Pembiayaan Berkelanjutan	**24,32%**	**24,53%**	**24,76%**

PILAR LINGKUNGAN

SUSTAINABLE FINANCING

Green Portofolio	Rp129,2 triliun
Sustainable Portofolio	Rp264,1 triliun
Social Portofolio	Rp134,8 triliun

SUSTAINABLE PRODUCTS

WHOLESALE

Green Loan	Rp3,5 triliun
Sustainability Linked Loan	Rp2,1 triliun
Corporate-in-transition Financing	Rp736 miliar

RETAIL

Financing

Kredit Kendaran Listrik	Rp393 miliar
Kredit Solar Panel	Rp0,61 miliar

Investment

Green Bond	Rp180 miliar
Green Sukuk	Rp3.407 miliar
Reksadana ESG	Rp 17 miliar

SUSTAINABLE FUNDING

Sustainability Bond	USD300 juta
Green Bond Tahap 1	Rp5 triliun
ESG Repo	USD500 juta

Produk-Produk Keuangan Berkelanjutan Bank Mandiri

Bank Mandiri juga memiliki produk keuangan berkelanjutan dalam bentuk *sustainable/green/social bonds*, yaitu penerbitan instrumen pendanaan yang bersifat hutang. Hasil penerbitan obligasi ini akan disalurkan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang berwawasan lingkungan *(green)*, proyek pengembangan sosial *(social)*, atau kombinasi keduanya *(sustainable financing)*.

Sustainable Products

1. ***Wholesale***
   1.1. ***Sustainability Linked Loan (SLL) & Corporate-in-Transition Financing***

   Bank Mandiri juga telah mengambil langkah signifikan untuk mendorong transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon dengan terus berupaya menyediakan berbagai produk berkelanjutan sebagai upaya mendukung nasabahnya, khususnya yang berada di *high carbon intensive sectors*, dengan memberikan solusi keuangan (misalnya *Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing)* yang dapat membantu dekarbonisasi dan mengubah operasi mereka menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan memiliki jejak karbon yang lebih sedikit.

   Bank Mandiri membentuk satuan tugas (satgas) khusus yaitu ESG Desk dengan tujuan menyelaraskan kebutuhan nasabah dengan produk dan pembiayaan berkelanjutan dan pengembangan bentuk keuangan hijau lainnya. Hal ini tertuang dalam dokumen penugasan nomor CBG. CTS/5167/2023. Melalui ESG Desk, Bank Mandiri terus berupaya untuk mengidentifikasi potensi bisnis dan mengembangkan inovasi mengenai pembiayaan berkelanjutan sesuai perkembangan pasar dengan mendorong nasabah untuk memiliki ESG *Financing Framework,* termasuk memberikan *advisory* terkait ESG *Financing* kepada nasabah dalam rangka transisi menuju aktivitas bisnis yang ramah lingkungan.

   Sebagai langkah awal, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dalam bentuk *Sustainability-Linked* Loan (SLL) yaitu jenis instrumen pinjaman yang karakteristik keuangan dan/atau strukturalnya dapat bervariasi tergantung pada apakah *issuer* dapat mencapai tujuan keberlanjutan/ ESG yang telah ditetapkan. Bank Mandiri telah menyalurkan SLL kepada beberapa debitur yang bergerak di sektor dengan intensif tinggi karbon seperti industri semen, peternakan, dan sawit.

   Selain itu bank mandiri telah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk *Corporate-in-Transition Financing,* sesuai dengan *Climate Transition Finance (ICMA CTF)* dari *International Capital Market Association. Corporate-in-Transition Financing* tersebut bertujuan untuk mendukung perusahaan-perusahaan dengan tingkat emisi karbon tinggi dalam upaya dekarbonisasi mereka. Bentuk pembiayaan ini mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan menuju *low carbon economy*.

   Dalam penyaluran *Sustainability Linked Loan & Corporate-in- Transition Financing,* pendanaan yang diberikan mengikuti pendekatan berbasis KPI dan merujuk pada *Framework* ESG dari debitur. Melalui penggunaan indikator kinerja kunci (KPI), pendanaan ini tidak hanya mendukung

proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan, tetapi juga memberikan insentif bagi debitur untuk mencapai tujuan-tujuan ESG yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan semangat kolaboratif antara pemberi pinjaman dan debitur dalam mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan bisnis dan proyek-proyek transisi.

1.2. *Green Loan*

Bank Mandiri aktif berkontribusi dalam percepatan pencapaian ekonomi rendah karbon dengan menyediakan solusi perbankan yang mendukung praktik bisnis ramah lingkungan untuk debitur. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah *Green. Fasilitas* dirancang khusus untuk mendanai proyek dan inisiatif yang memiliki dampak positif pada lingkungan. Pendanaan ini mengikuti Prinsip *Green Loan Principles,* oleh *Loan Market Association (LMA)*.

Komitmen ini ditunjukan pada tahun 2022, Bank Mandiri mengambil langkah signifikan dengan memberikan fasilitas *Green Loan* untuk Industri Komponen Baterai EV di Hong Kong. Dalam perannya sebagai *Mandated Lead Arrangers,* Bank Mandiri memainkan peran sentral dalam mengatur *Green Loan* sindikasi, yang totalnya mencapai USD300 juta. Fasilitas ini ditujukan untuk industri baterai lithium, termasuk riset, pengembangan, pengolahan, produksi, dan penjualan bahan pendahulu untuk katoda. Selain itu, pendanaan ini mencakup bahan untuk daur ulang energi baru dalam kerangka bahan dan energi baru.

2. *Retail*

Selain melalui pembiayaan *Green Loan* pada segmen *Wholesale*, pada segmen *Retail,* Bank Mandiri juga turut berupaya merealisasikan komitmen dukungan pencapaian target pengurangan emisi karbon pada 2030 dan *Net Zero Emission financing* 2060, diantaranya dengan meluncurkan skema pembiayaan untuk pemasangan PLTS atap tenaga surya (*Solar Panel*) serta program kredit kepemilikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

2.1. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Pada program kredit kepemilikan KBLBB, bekerjasama dengan dua entitas anak usaha yaitu Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance, Bank Mandiri melaksanakan program-program *otomotif financing*. Program pembiayaan ini memberikan penawaran khusus baik suku bunga yang kompetitif, persyaratan pengajuan dan metode pembayaran yang relatif mudah (*offline* maupun *online*), serta layanan yang cepat.

Mulai Juli 2022, diluncurkan program spesial dari Mandiri Tunas Finance bagi Nasabah Prioritas dan Private Bank Mandiri dengan *benefit* berupa fasilitas pembiayaan kendaraan mobil baru dengan Bunga Mulai 2,25% Tenor 1 Tahun, LTV maksimum 90%, dan Administrasi sebesar Rp1, dengan fasilitas yang didapat berupa Asuransi minimal *All Risk* 1 tahun. Skema pembiayaan berlaku untuk angsuran dibayar di muka (ADDM), *Unit New Car Passenger,* serta Rate berlaku untuk Nasabah Prioritas dan Private Bank Mandiri.

2.2. Solar Panel

Bank Mandiri menunjukkan komitmen kuat untuk mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, termasuk menyediakan program pembiayaan *solar panel*. Bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya PT Energi Indonesia Berkarya (SUNterra), Bank Mandiri memberikan alternatif pembayaran yang ringan dan mudah dengan adanya program pinjaman tanpa agunan yang murah dan dapat dicicil untuk pemasangan panel surya residensial (*solar panel*). Melalui program ini, nasabah pemegang kartu kredit Bank Mandiri dapat menikmati cicilan sampai dengan 24 kali bayar dengan bunga 0 persen.

PILAR LINGKUNGAN

Berkolaborasi bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan PT LEN Agra Energy, Bank Mandiri juga menyediakan pembiayaan dengan skema kartu kredit atau pinjaman tanpa agunan yang murah dan dapat dicicil bagi nasabah untuk pemasangan panel surya. Melalui skema *payroll,* konsumen dapat mengajukan pinjaman dengan limit maksimal sebesar Rp1 miliar dengan jangka waktu kredit hingga selama 15 tahun. Adapun harga paket solar panel paling murah berukuran 1 kWp senilai Rp20 juta dan paket tertinggi berukuran 5 kWp dengan harga mencapai Rp70 juta (khusus wilayah Jabodetabek).

Dimasa mendatang, Bank Mandiri akan terus mengembangkan berbagai produk berkelanjutan yang menyasar pada berbagai segmen bisnis sesuai dengan *best practices* dan kebutuhan nasabah.

Sustainable Funding

Dalam rangka mendukung pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan, Bank Mandiri juga mendorong penyaluran dana dan investasi berkelanjutan melalui pengembangan beberapa produk pendanaan berkelanjutan *(sustainable funding)*.

Sebagai wujud dukungan tersebut, pada tanggal 19 April 2021 Bank Mandiri menerbitkan *Sustainability Bond* dengan nominal sebesar US$ 300 juta di Singapore Exchange (SGX) dengan tingkat bunga 2,00% per tahun dan tenor 5 tahun. Perolehan pendanaan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali aktivitas usaha berwawasan lingkungan *(green)* dan sosial *(social)*.

Adapun *framework Sustainability Bond* ini telah disusun mengacu pada standar *Sustainability Bond Guidelines* dari *International Capital Market Association* (ICMA) dan selaras dengan *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) *Sustainability Bond Standards, Green Bond Standards,* dan *Social Bond Standards.*

Penerbitan *sustainability bond* ini mendapatkan respon yang sangat baik, dengan *demand order* lebih dari US$2,5 miliar pada saat proses *book building* sehingga terdapat kelebihan permintaan *(oversubscription)* lebih dari 8,3 kali dari rencana jumlah *bond* yang diterbitkan. Hal tersebut menunjukkan apresiasi dan persepsi positif dari investor asing terhadap program kerja dan prospek bisnis Bank Mandiri, khususnya terkait keuangan berkelanjutan. Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional.

Selanjutnya bulan Februari 2022, Bank Mandiri melakukan diversifikasi *sustainable financing instrument,* melalui pendanaan jangka panjang *(wholesale funding)* dengan menerbitkan ESG *Repurchase Agreement* (Repo) pertama di Indonesia dan salah satu first movers di Asia Tenggara. Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sebesar US$500 juta ini juga digunakan untuk membiayai ataupun membiayai kembali aktivitas usaha berwawasan lingkungan *(green)* dan sosial dengan kriteria yang mengacu kepada *Sustainability Bond Framework* Bank Mandiri. Transaksi ESG Repo Bank Mandiri merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis.

Bulan Juni 2023, kembali Bank Mandiri menunjukkan komitmen dukungan bagi tumbuhnya pendanaan program-program keberlanjutan, melalui penawaran *Green Bond* Bank Mandiri tahap I senilai Rp 5 triliun, yang juga mendapatkan sambutan hangat dari para investor.

Penerbitan *Green Bond* Bank Mandiri Tahap I Senilai Rp 5 triliun

Bulan Juni 2023, Bank Mandiri sukses menerbitkan *green bond* tahap I senilai Rp5 triliun. Penerbitan obligasi hijau ini merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I sebesar Rp 10 triliun. Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki jangka waktu tiga tahun dengan kupon 5,80% per tahun, sedangkan Seri B memiliki jangka waktu lima tahun dengan kupon 6,10% per tahun. Pada periode bookbuilding yang berlangsung pada 23 Mei-4 Juni 2023, penawaran green bond tahap I yang masuk mencapai Rp18,7 triliun atau terjadi kelebihan permintaan *(oversubscribed)* sebanyak 3,74 kali.

Setelah memperoleh tanggal efektif pada 21 Juni 2023, green bond Bank Mandiri Tahap I 2023 ini memasuki masa penawaran umum pada 23-26 Juni 2023. Surat utang ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli 2023. Dana yang terhimpun dari hasil Penawaran Umum *Green Bond* dialokasikan minimal 70% untuk melakukan pembiayaan *(finance)* atau pembiayaan kembali *(refinance)* atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 11 kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Informasi lengkap mengenai kebijakan pembiayaan yang memberi dampak lingkungan serta produk-produk keuangan berkelanjutan, dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri yang diterbitkan terpisah namun masih dalam satu kesatuan.

PILAR **SOSIAL**

Pada Pilar Sosial, Bank Mandiri memfokuskan dukungannya pada pengembangan Sumber Daya Manusia, Privasi dan Keamanan Data, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Keuangan Konsumen.

KINERJA PILAR SOSIAL

KEPADA NASABAH KAMI

86,79 Customer Satisfaction Score

100% Resolution Rate Keluhan Nasabah

livin'

Lebih dari **22 juta** pengguna per Desember 2023

Mandiri's super app'to grow retail customer base and at the same time ensuring its stickiness through constant release of features

livin' merchant

63.390 pengguna

Mandiri's enabler to acquire offline merchants, which started as complete point-of-sales platform with huge scalability

livin' SUKHA

1st bank to integrate the services of four e-wallet market leaders into a single, all-inclusive banking app

PILAR SOSIAL

UNTUK MANDIRIAN



38.965
Jumlah Karyawan (Mandirian)

GENDER DIVERSITY

	Laki-laki	Perempuan
BOD & BOC	78%	22%
Manager Level	54%	46%
Total All Employee	48%	52%

5.339.236
Jam pelatihan

89,65% tingkat ketertiban karyawan

UNTUK MASYARAKAT

2,8 juta
Akun Bank Mandiri berhasil dibuka melalui Mandiri Agen

17.935 peserta
Pekerja Migran Indonesia melalui Mandiri Sahabatku

KREDIT USAHA RAKYAT
Rp**62,3** triliun
yang terdiri dari 2,88 juta peminjam

5,9+ juta
orang Penerima manfaat program TJSL dan inklusi keuangan

12.522 petani
di Pamarican dan Kebumen mendapatkan pelatihan dari Program Rice Miling Unit (RMU)

14.139 MSMEs
Telah mendapatkan pelatihan melalui program Rumah BUMN

PILAR SOSIAL

Budaya Keberlanjutan Bagi Mandirian

Penerapan keuangan berkelanjutan diawali dengan peningkatan kapasitas Mandirian untuk menguasai topik-topik LST yang relevan dengan bisnis Bank Mandiri terutama untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan serta adaptasi organisasi untuk mengintegrasikan LST ke dalam sistem dan prosedur perbankan.

Keterlibatan seluruh Mandirian sangat penting untuk menjalankan perubahan-perubahan tersebut melalui pengembangan budaya keberlanjutan, yang diawali dengan membangun kesadaran Mandirian untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dalam kegiatannya sehari-hari. Program-program budaya keberlanjutan meliputi peningkatan kapasitas teknis dan keahlian terkait LST untuk seluruh level pegawai dan unit kerja, melalui *training, workshop, webinar,* maupun sertifikasi.

ESG Group berperan menjadi koordinator LST di lingkungan Bank Mandiri kemudian secara *bankwide Tim Internal Culture* membentuk ESG buddy disetiap unit yang berperan sebagai penanggung jawab dan menjembatani info-info yang berkaitan dengan LST di area kerjanya masing-masing. Kampanye keuangan berkelanjutan juga dilakukan melalui penyebaran informasi kepada nasabah, mitra dan pemasok Bank Mandiri. Pada 2023, Bank Mandiri menyelenggarakan Forum Diskusi Internal sebanyak dua kali yang diikuti oleh seluruh Direksi dan Komisaris. Mandiri University Group telah memfasilitasi *e-learning* ESG *Awareness* Level-1 kepada seluruh pegawai termasuk dalam program ODP, workshop ESG sektoral (nikel & properti), dan pelaksanaan ESG *awareness*.

Per 31 Desember 2023, Bank Mandiri secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam mendukung tercapainya ESG *awareness* di lingkungan internal Bank. Sosialisasi telah dilaksanakan kepada 34 unit kerja dan 12 region, adapun agenda yang dibahas diawali dengan komitmen global dan nasional, ketentuan regulator, dan implementasi LST yang telah dilaksanakan di Bank Mandiri pada masing-masing aspek. Selain itu, sosialisasi juga diselaraskan dengan ruang lingkup pekerjaan dari unit kerja terkait guna memperoleh dukungan dalam mencapai *Net Zero Emission* (NZE) 2030.

Kegiatan yang Mendukung Strategi Berkelanjutan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai komitmen Bank Mandiri menuju *Net Zero Emissions* (NZE) *Operations* tahun 2030 yang memerlukan partisipasi aktif dan kolaborasi seluruh pegawai dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan kegiatan/event/rapat agar dapat mengikuti panduan yang telah disediakan.

NO MORE



Plastik Sekali Pakai/ Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Menyisakan makanan dan minuman

Menggunakan balon dan konfeti dalam pelaksanaan event

SAY YES TO



Menggunakan pitcher/ tumbler untuk dapat dikonsumsi air minum

Memilah sampah sebelum dibuang

Menghemat penggunaan air



Distribusi dokumen internal secara elektronik

Menghemat listrik dan mengatur AC pada suhu 23-25°C

Menggunakan transportasi umum

* Merujuk pada Surat Nomor DCO/1268/2023 dan Surat Nomor DCO/1269/2023 serta Nota Nomor DCO/704/2023 Perihal Imbauan Implementasi Program ESG dalam Rangka Mencapai *Net Zero Emission (NZE) Operations* 2030 dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan/Event/Rapat yang Lebih Ramah Lingkungan yang disampaikan kepada Perusahaan Anak, Region, dan masing-masing unit kerja.

Pengembangan Bagi Mandirian

Guna mendukung pengembangan sumber daya manusia terbaik, Bank Mandiri menerapkan konsep *employee experience lifecycle* untuk mewujudkan *Employer Value Proposition* (EVP) yang sejalan dengan *Corporate Plan* Bank. *Employee experience lifecycle* Bank Mandiri meliputi:

1. ***Organization Structure & Capacity* – Pengembangan Organisasi (*Organization Development*)**
   Pemberian dukungan pengembangan organisasi meliputi pelaksanaan kegiatan desain struktur organisasi dan evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan, dan pemenuhan kebutuhan pegawai (*capacity planning*).

2. ***Recruitment* – Pemenuhan Sumber Daya Manusia**
   Dukungan bagi pengembangan sistem pemenuhan *Human Capital* yang andal, baik melalui sumber internal maupun eksternal, dan strategi menarik minat pegawai (*employee attraction*), antara lain melalui pelaksanaan program:

- MyDigital Academy *Scholarship* bekerja sama dengan Top 10 Universitas/Perguruan Tinggi unggulan di Indonesia dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan beasiswa dari Bank Mandiri. Program ini juga sekaligus menjadi salah satu *channel sourcing* yang efektif dalam mendapatkan *best talent* untuk bekerja di Bank Mandiri.
- *Campus hiring* yang dilakukan secara rutin dengan target lulusan berbagai Universitas/ Perguruan Tinggi dengan tujuan membangun *relationship* dan *win-win collaboration* untuk mendapatkan *best talent* dari kampus.
- Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Kementrian BUMN, dan Diaspora Indonesia melalui program *Internship* bagi para mahasiswa baik di semester akhir maupun yang telah lulus.
- Kompetisi MyDigital Academy bagi mahasiswa terpilih *(student competition)* dari Perguruan Tinggi/Universitas terbaik di Indonesia. Program ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan *employer branding* sekaligus *talent scouting* guna mendapatkan *best talent* untuk bekerja di Bank Mandiri.

3. ***Onboarding***
   Sistem *Onboarding* Pegawai dan Hubungan Kepegawaian yang bersahabat bagi pegawai dan pegawai baru. Dalam rangka digitalisasi sistem *onboarding*, *new onboarding process* dirancang lebih interaktif melalui *gamification-based learning* yang terdiri dari 10 *learning topics* dengan durasi 3 bulan yang dapat diakses secara *online*.

4. ***Learning & Development* – Pelatihan dan Pengembangan**
   Pelatihan dan pengembangan kapabilitas *Human Capital* untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bisnis. Melalui inisiatif tersebut setiap *talent* akan dikembangkan pada area *technical* dan *leadership capabilities*, dengan mekanisme *engage, expose*, dan *educate*. Terhadap setiap *talent* yang diproyeksikan menjadi suksesor, Bank secara khusus akan menyiapkan *Individual Development Plan* (IDP) yang spesifik guna memastikan kesiapan suksesor tersebut. Program pengembangan dilakukan berdasarkan hasil asesmen agar pengembangan yang diberikan sesuai dengan *profiling talent*.

   Program pengembangan specifik yang direncanakan untuk para *talent* adalah *Leadership Development Program*, program beasiswa belajar S2 luar negeri dan dalam negeri, *sharing session* oleh *Top Executive Leader* Indonesia dan Global. Program lainnya adalah Mandiri Young Leaders (MYLead) yang merupakan program akselerasi pengembangan *future leaders* Bank Mandiri dengan *sourcing* dari internal *young talent* yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai calon pemimpin masa depan. Terakhir, pelaksanaan program *coaching* dan *mentoring* untuk meningkatkan *leadership talent* oleh *coach* dan mentor *professional* di bidangnya.

5. ***Performance* – Manajemen Kinerja Individu**
   Sistem penilaian kinerja pegawai dan *feedback* yang akuntabel dan transparan.

6. ***Reward* – Sistem Imbalan (Total *Reward*)**
   Sistem imbalan pegawai yang kompetitif dan tepat sasaran.

7. ***Talent & Succession* – Manajemen Talent dan Suksesi**
   Sistem manajemen *talent* dan suksesi dilaksanakan melalui 4 (empat) proses utama, yaitu:
   - Klasifikasi *Talent* berdasarkan *performance, Leadership Characteristics, Ability, Agility* serta *Engagement*.
   - *Talent Profiling* berdasarkan *track record, technical capability, leadership capability* dan *personality*.
   - *Talent Development* dilaksanakan dengan penyusunan rencana dan menjalankan pengembangan *talent* berdasarkan gap kapabilitas.
   - *Strategic Talent Review* yang memantau pengembangan dan menyiapkan rencana suksesi *incumbent*.

8. ***Retire & Exit* – Pemberhentian Pegawai dan Pensiun**
   Sistem pemberhentian pegawai dan program pensiun.

Kesetaraan Gender

Bank Mandiri senantiasa berperan dalam aspek sosial salah satunya dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Environment, Social, Governance* (ESG), khususnya pada aspek sosial. Pada aspek sosial tersebut, inisiatif yang sejalan dengan pelaksanaan *Respectful Workplace Policy* (RWP) berupa '*Human Rights*', yakni bagaimana perusahaan mengelola dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kegiatan operasional, menerima serta memperlakukan karyawan dengan setara tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin *(gender)*, agama, maupun suku. Kebijakan kesetaraan dan keberagaman ini antara lain diterapkan sejak awal proses penerimaan karyawan, dan dilanjutkan dalam sistem pelatihan dan promosi.

Dalam hal kesetaraan, Bank Mandiri membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan perempuan untuk berkarya. Bank Mandiri memastikan seluruh pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki seluruh jabatan yang ada beserta seluruh kompensasi dan benefitnya.

Tercermin dari jumlah **karyawan perempuan berkontribusi sebanyak 52%** dari total SDM Perseroan. Sedangkan **pejabat perempuan level Manager hingga SVP menyumbang 46%**. Tak sampai di situ, perbandingan gaji dan fasilitas karyawan laki-laki dan perempuan setara 1:1 karena didasarkan pada kinerja.

Lebih jauh, Bank Mandiri juga senantiasa mendukung para karyawan perempuan melalui inisiatif Srikandi Mandiri. Beragam kegiatan yang mendukung inisiatif tersebut, antara lain sesi kepemimpinan perempuan, program mentoring bagi para perempuan, dan lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah pegawai Bank Mandiri adalah 38.940 orang (52,32% perempuan dan 47.68% laki-laki), naik 2% dari tahun lalu yang berjumlah 38.176 orang. Dari jumlah ini, 35.17% perempuan menduduki *top level management*, yaitu *Assistant Vice President* hingga Direktur.

Tabel Pegawai Bank Mandiri merurut status kepegawaian dan jenis kelamin

Keterangan	2023		2022		2021	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Pekerja Tetap	16.601	17.762	16.630	18.017	16.670	18.105
Pekerja Kontrak	1.721	2.416	1.478	1.701	1.288	1.447
Trainee	244	196	214	136	182	148
Total	**18.566**	**20.374**	**18.322**	**19.854**	**18.140**	**19.700**

Turnover Pegawai

Adapun tingkat perputaran pegawai Bank Mandiri di tahun 2023 adalah 5,26% dengan total karyawan masuk adalah 2.797 orang dan total karyawan keluar 2.048 orang. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 4,84%. Bank Mandiri menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan retensi karyawan, salah satunya dengan meningkatkan *employee engagement,* menciptakan lingkungan kerja yang super *happy* dan super *productive*, serta membangun lingkungan kerja yang nyaman.

PILAR SOSIAL

Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Selain mendapatkan *benefit*, karyawan Bank Mandiri juga mendapatkan Pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi dan kompensasi karyawan. Di tahun 2023, jumlah peserta pelatihan adalah 790.101 peserta dengan jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan sebesar 39.517 pegawai yang terdiri dari 18.894 pegawai laki-laki dan 20.623 pegawai perempuan. Adapun jumlah seluruh jam pelatihan pegawai di sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 5.339.236 jam pelatihan dengan rerata jam pelatihan per pegawai adalah 135,1 jam/pegawai atau setara 16,9 hari/pegawai.

Informasi lengkap mengenai pengembangan sumber daya manusia Bank Mandiri dapat dilihat pada sub bab Sumber Daya Manusia di Laporan Tahunan ini.

Inklusi Keuangan

Bank Mandiri turut berpartisipasi aktif dalam upaya inklusi keuangan dengan memperluas dan mempermudah akses layanan keuangan untuk masyarakat. Kemudahan dalam mengakses layanan keuangan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi serta mendorong proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Adapun sasaran inklusi keuangan Bank Mandiri adalah:

1. Masyarakat ekonomi rendah (mikro).
2. Masyarakat menengah ke bawah (*unbanked* dan *underbanked*).
3. Kelompok dengan pendapatan rendah dan tidak teratur.
4. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
5. Penyandang disabilitas.
6. Buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal.
7. Masyarakat pedesaan dan pinggiran.
8. Wilayah dengan keterbatasan jaringan keuangan formal akibat kendala geografis, populasi yang menyebar, maupun rendahnya literasi keuangan.

Dalam rangka membuka akses layanan perbankan sebesar-besarnya, sekaligus berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesejangan sosial, Bank Mandiri berpartisipasi pada program Inklusi Keuangan dengan menyediakan layanan perbankan untuk pengusaha UMKM hingga pelaku usaha mikro.

AKSES KREDIT UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha penting di Indonesia. UMKM merupakan proporsi dan pengguna tenaga kerja langsung terbesar dalam perekonomian. Sebagai tulang punggung perekonomian, Pemerintah mendorong UMKM untuk berinovasi agar naik ke level yang lebih tinggi dan berperan lebih besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dukungan Bank Mandiri kepada UMKM dalam bentuk akses dan permodalan merupakan pengembangan portofolio yang memiliki dampak sosial yang positif karena meningkatkan taraf hidup, peluang kerja, dan pengentasan kemiskinan. Bank Mandiri **mempunyai 1,2 juta debitur UMKM** yang memperoleh **manfaat kredit UMKM sebesar Rp126,1 triliun tumbuh 7,5%** dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut juga diikuti dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di segmen UMKM yang terjaga di level 1,34%. Portofolio kredit UMKM ini mencapai 24,3% dari total portofolio kredit Bank.

Untuk memperdalam pangsa pasar, Bank Mandiri menyediakan penawaran khusus bagi UMKM yang terkait dengan nasabah wholesale Bank Mandiri atau pembiayaan ekosistem. Nasabah Bank Mandiri yang merupakan perusahaan multinasional, perusahaan besar, hingga Badan Usaha Milik Negara menjadi pusat ekosistem ini. UMKM yang termasuk dalam ekosistem dapat memperoleh suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan Program Suku Bunga Kredit Usaha Mikro (KUM) yang berlaku.

Kredit UMKM disediakan dalam bentuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, Bank Mandiri juga menyediakan Kredit Usaha Mikro (KUM) dan berpartisipasi dalam program Pemerintah dengan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di segmen micro banking.

Pada 2023, Bank Mandiri memperluas akses layanan keuangan pada pelaku usaha UMKM sektor perikanan dengan kerja sama dengan start-up perikanan PT Rantai Pasok Teknologi (FishLog). Kerja sama ini memungkinkan mitra-mitra Fishlog pada sektor industri perikanan, baik yang bankable maupun belum *reachable* oleh perbankan konvensional, untuk memiliki skala usaha yang memadai.

Digitalisasi merupakan salah satu isu utama yang harus disikapi oleh pelaku UMKM. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa selama masa pandemi jumlah transaksi *e-commerce* meningkat hampir dua kali lipat dari 80 juta transaksi pada tahun 2019 ke 140 juta transaksi pada bulan Agustus 2022. Ini menunjukkan adaptasi ke transaksi *e-commerce* yang berbasis teknologi digital menjadi keharusan bagi pelaku UMKM seiring terbukanya peluang pasar yang sangat besar (Bank Indonesia, 2022).

PILAR SOSIAL

Bank Mandiri telah merilis aplikasi Livin' Merchant by Mandiri untuk membuka akses pendanaan perbankan *(access to finance)* yang semakin luas kepada usaha produktif kelas mikro. Livin' Merchant merupakan aplikasi kasir alias point on sale (POS) yang akan mendigitalisasi transaksi pembayaran di merchant UMKM; sehingga mereka dapat langsung menerima pembayaran transaksi QRIS dari berbagai Bank dan e-wallet. Saat ini aplikasi Livin' Merchant dapat dinikmati tanpa biaya, bebas biaya transaksi, dan pelaku UMKM dapat melakukan pencairan dana di hari yang sama hingga tiga kali sehari.

Inovasi jaringan distribusi digital Bank Mandiri terdiri dari Livin' App, dengan jumlah pengguna terdaftar sebesar **21 juta pengguna, Livin' Merchant** dengan jumlah ***merchant* terdaftar sekitar 1,4 juta**, *platform* KOPRA yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 95% nasabah *wholesale* Bank Mandiri, dan 241 *Smart Branch* yang merupakan transformasi digital dari kantor-kantor cabang konvensional Bank Mandiri.

Pembiayaan Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Rp Miliar)

No.	Sektor	2023	2022
1	Perkebunan Sawit dan CPO	21.651,18	19.278,91
2	Perdagangan Eceran Makanan, Minuman, dan Rokok	16.881,72	36.772,69
3	Hotel, Restoran, dan Akomodasi	9.971,93	9.380,37
4	Perdagangan Eceran Peralatan Rumah Tangga	8.630,64	8.411,45
5	Pertanian	5.722,69	5.491,57
6	Jasa Usaha Non Keuangan	5.208,41	5.343,10
7	Jasa Sosial dan Lembaga	4.911,95	4.374,70
8	Jasa Transportasi Darat	3.846,86	3.348,76
9	Peternakan dan Pakan Ternak	3.756,88	3.510,38
10	Perdagangan Eceran Tekstil dan Produk Tekstil	3.364,03	3.680,76
11	Lain-Lain	41.548,40	37.702,34
12	**Total**	**125.494,69**	**117.295,03**

AKSES PEMBIAYAAN MIKRO

Bank Mandiri secara konsisten mendorong pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja melalui pembiayaan Kredit Mikro. Dalam penyaluran kredit mikro kepada UMKM, Bank Mandiri memanfaatkan skema hulu-hilir *(close loop)* sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan ekosistem *value chain* nasabah *wholesale* Bank Mandiri.

KINERJA KUR DAN KUM

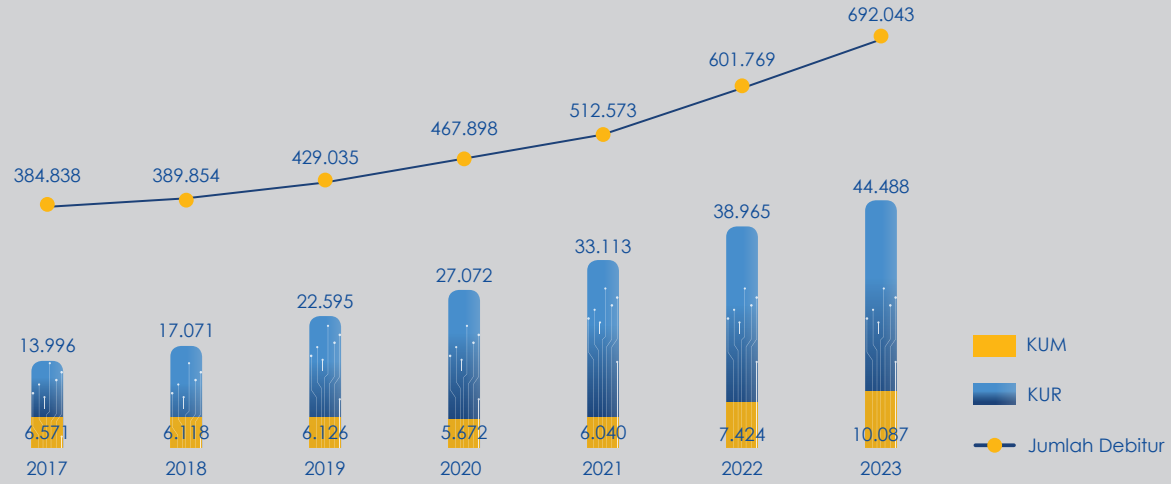



	DEBITUR	
Rp37,35 triliun	**Portofolio**	Rp44,49 triliun
528.942 debitur	**Jumlah**	692.043 debitur
94,22%	**Kolektivitas Lancar**	95,49%
1,12%	**NPL**	1,58%

PILAR SOSIAL

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM sehingga kapasitas dan daya saing usaha turut meningkat.

Bank Mandiri dengan *core competence* sebagai Bank *wholesaler* mengembangkan strategi penyaluran KUR berbasis ekosistem. Dalam strategi ini, Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan perusahaan yang telah menjadi debitur *wholesale* untuk kemudian memberikan rekomendasi mitra kelolaannya untuk dapat dibiayai KUR.

Bank Mandiri melayani tiga jenis KUR, yaitu:
- KUR Retail memiliki kriteria limit kredit di atas Rp25 juta sampai dengan maksimal Rp 200 juta per debitur, dan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.
- KUR Mikro memiliki kriteria limit kredit maksimal sampai dengan Rp25 juta per debitur dan jangka waktu maksimal 2 tahun.
- KUR TKI memiliki kriteria limit kredit maksimal sampai dengan Rp25 juta per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.

Dengan menerapkan strategi penyaluran KUR melalui ekosistem ini, UMKM dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, termasuk penyaluran KUR dengan proses yang cepat.

Adapun dari awal penyaluran tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 Bank Mandiri telah **menyalurkan KUR kepada 2,8 juta debitur** dengan limit penyaluran **sebesar Rp224,91 Triliun.**

KUM Kredit Usaha Mikro (KUM)

Kredit usaha Mikro (KUM) merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Salah satu keunggulan Kredit Usaha Mikro adalah tingkat suku bunga yang bersaing dengan angsuran tetap setiap bulannya dengan syarat pengajuan yang mudah dan proses kredit yang cepat.

Penyaluran KUM merupakan salah satu peran Bank Mandiri dalam membantu UMKM untuk berkembang, memperluas jangkauan, meningkatkan produksi, dan menghadapi persaingan pasar dengan lebih baik sehingga dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah **menyalurkan Kredit Usaha Mikro sebesar Rp15,674 miliar** dengan jumlah debitur aktif **sebanyak 361.270 debitur.**

Pembiayaan kepada Perempuan melalui Kredit UMKM

Perempuan memegang peranan cukup penting dalam kemajuan ekosistem UMKM di Indonesia. Bank Mandiri berkomitmen untuk membantu meningkatkan kapasitas daya saing usaha pelaku UMKM terutama perempuan sehingga dapat berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu memperluas lapangan pekerjaan.

Dalam lima tahun terakhir, Bank Mandiri memiliki portofolio debitur aktif perempuan **pelaku usaha mikro sebanyak 692.043 debitur** dengan **total kredit sebesar Rp44,5 triliun** melalui produk KUR dan KUM. Jumlah tersebut menjadikan debitur perempuan pelaku usaha mikro **Bank Mandiri menempati porsi terbanyak** terhadap total debitur atau sekitar **56,7%** dari total debitur aktif segmen mikro yang sebanyak **1.220.985 debitur.**

Kualitas kredit debitur perempuan juga menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan debitur laki-laki, dengan kolektibilitas lancar sebesar 99,49% dan *Non-Performing Loan* sebesar 1,12% per Desember 2023. Sedangkan kolektibilitas lancar debitur laki-laki sebesar 94,22% dengan *Non-Performing Loan* sebesar 1,58%.

Simpanan Mandiri Makmur (SiMakmur)

Layanan SiMakmur merupakan layanan rekening simpanan perseorangan dalam mata uang rupiah yang memanfaatkan teknologi dan informasi dari Agen Mandiri sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau layanan perbankan dengan mudah. SiMakmur memiliki keuntungan, yaitu bebas minimum saldo rekening dan bebas biaya administrasi bulanan. Nasabah dengan rekening SiMakmur dimudahkan dalam bertransaksi tanpa harus datang ke kantor cabang Bank dan cukup mengunjungi Agen Mandiri terdekat. Layanan SiMakmur telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bank Mandiri terus mendorong inklusivitas bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan Gerakan Akselerasi Ekonomi Inklusif dengan pembukaan 10.000 rekening tabungan baru bagi penyandang disabilitas yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bank Mandiri menyediakan berbagai jenis produk tabungan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah mulai dari Tabungan Now, Tabungan Mitra Usaha, serta Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Informasi lengkap mengenai Inklusi Keuangan Bank Mandiri dapat dilihat pada laporan keberlanjutan Bank Mandiri yang diterbitkan terpisah namun masih dalam satu kesatuan.

PILAR SOSIAL

Perlindungan Konsumen

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Operasional Bank yang mengatur penerapan fungsi perlindungan konsumen yang kemudian dijabarkan kembali pada ketentuan internal di masing-masing unit kerja, sebagai wujud komitmen Bank dalam mendukung terciptanya sistem perlindungan konsumen yang andal serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejak Oktober 2022, Bank Mandiri juga telah membentuk Unit Kerja Perlindungan Konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang bertanggung jawab dalam hal:

1. Mensosialisasikan prinsip Perlindungan Konsumen kepada seluruh Pegawai PUJK.
2. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan Perlindungan Konsumen.
3. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan Perlindungan Konsumen.
4. Melaporkan implementasi serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Perlindungan Konsumen.
5. Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Perlindungan Konsumen.

Selain memiliki kebijakan perlindungan keuangan konsumen, Bank Mandiri juga memiliki kebijakan penagihan hutang yang memuat pemenuhan hak-hak debitur sebagaimana tertuang dalam:

1. Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri dengan perubahan terakhir ditandatangani oleh Direksi dan berlaku sejak 7 Maret 2022.
2. *Standar Prosedur Operasional Credit Collection & Recovery* sebagaimana diubah terakhir pada tahun 2022.
3. Peraturan internal lain yang terkait

Dalam peraturan tersebut, secara umum ditegaskan tata cara penagihan utang dengan tetap melindungi kenyamanan debitur sebagai konsumen. Apabila penagihan dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Penagihan, Bank Mandiri wajib memastikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan debitur dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet.
2. Menginformasikan kepada debitur apabila penagihan atas kewajiban debitur telah diserahkan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Penagihan.
3. Penagihan dilarang dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain debitur;
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili debitur;
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu wilayah domisili debitur.

Selain itu, dalam kebijakan tersebut juga mengatur hak Kreditur untuk:

1. Memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk.
2. Mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui website Bank Mandiri.
3. Mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank.
4. Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Memperoleh informasi tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

Dalam proses penyaluran kredit, Bank Mandiri selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pemantauan portofolio secara berkala. Penerapan proses *due-diligence* dalam proses pemberian kredit, tercermin pada mekanisme eskalasi dalam proses persetujuan dan pemantauan kredit untuk debitur dengan skala besar dan risiko tinggi.

Pada alur proses pemberian kredit Tahap Loan Monitoring, peninjauan kualitas kredit debitur

eksisting dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah mekanisme *Watchlist*. Mekanisme ini digunakan sebagai *Early Warning Signal* dalam menetapkan kualitas kredit yang diberikan, dengan menganalisa 3 aspek yaitu prospek bisnis debitur ke depan, *performance* keuangan, serta *repayment history*.

Apabila berdasarkan proses peninjauan tersebut terdapat indikasi adanya penurunan kualitas, maka Bank Mandiri akan melakukan penyelamatan kredit bermasalah. Suatu upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan.

Penyelamatan kredit dapat berupa Restrukturisasi. Upaya restrukturisasi yang dapat diberlakukan antara lain:
1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara,

Bank Mandiri juga memiliki Komite Bisnis dan Komite *Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)* dengan tugas mengevaluasi produk dan layanan Bank, termasuk memberikan penilaian risiko atas produk dan layanan yang dikeluarkan Bank Mandiri.

Ulasan lengkap mengenai Komite Bisnis dan Komite *Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)* dapat dilihat pada Laporan Tahunan Bank Mandiri Bab Tata Kelola Perusahaan pada uraian Komite Di bawah Direksi.

Bank Mandiri memiliki ketentuan internal tersendiri yang mengatur mengenai aktivitas marketing komunikasi produk dan jasa. Pada ketentuan tersebut, terdapat pengaturan tentang materi komunikasi yang akan disampaikan kepada publik dengan berpedoman dan memperhatikan ketentuan regulator, seperti POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan OJK, sehingga materi komunikasi yang dipublikasikan juga memperhatikan kepentingan konsumen/ nasabah. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas Marketing Komunikasi Produk dan Jasa dilaporkan secara periodik kepada Direksi.

Bank Mandiri menjalankan beberapa program literasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai keuangan dan perbankan. Beberapa program tersebut adalah:
1. Edukasi UMKM Peternakan – "Meraih Peluang Bisnis Ekosistem Peternakan Ayam Petelur"
2. Edukasi UMKM untuk Mendukung Pengembangan Infrastruktur
3. Mandiri Edukasi
4. Edukasi dan Sosialisasi Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
5. Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan untuk Nasabah Payroll
6. Personal *Finance* Webinar
7. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui program kewirausahaan Mandiri Sahabatku
8. Program Literasi Keuangan (SME Group)
    - Mandiri UKM *Center* (UKMC) adalah business model ditargetkan untuk menggarap secara komprehensif potensi bisnis pelaku UKM yang diatur dalam radius tertentu terutama di kota-kota kontributor PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.
    - Mandiri UKMC bertujuan untuk memberikan wadah kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan kredit menjadi lebih cepat dan mudah serta meningkatkan kompetensi pelaku UMKM melalui literasi pendampingan/ pelatihan seperti tax *advisory*, edukasi laporan keuangan, dll

Bank Mandiri juga mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan perlindungan konsumen yang informasinya dapat dilihat pada Laporan Tahunan Bank Mandiri dan laporan Keberlanjutan Bank Mandiri Bab Sumber Daya Manusia.

PILAR SOSIAL

Selain itu, Bank Mandiri memiliki mekanisme penyampaian pengaduan jika nasabah mengalami kendala dalam bertransaksi, keluhan maupun pengaduan lainnya. Bank Mandiri membentuk unit kerja khusus, yaitu *Customer Care Group* untuk memberikan layanan terbaik. Tugas utama unit ini adalah menyelesaikan seluruh pengaduan nasabah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan.

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH



Nasabah diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik lisan maupun tertulis, seperti berikut ini:

Mandiri Call Layanan

24 jam melalui Line

14000

Akun Twitter

@mandiricare
and @bankmandiri

Livechat Whatsapp

0811-8414-000

Website

www.bankmandiri.co.id
dengan memilih menu "contact us".

Facebook Account

"Mandiri Care" dan "Bank Mandiri"

Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Mandiri, baik yang diantar langsung, atau dikirim melalui pos.

Email:
mandiricare@bankmandiri.co.id.

Instagram Account
@bankmandiri

Bank Mandiri di seluruh Indonesia.

Bank Mandiri juga menyediakan media pelaporan pelanggan bernama Letter to CEO (LTC) selain mekanisme tersebut diatas. LTC dikelola oleh pihak ketiga independent dengan tujuan:

1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan *(conflict of interest)*.
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan LTC yang disampaikannya.

Informasi lengkap mengenai sistem dan mekanisme pelaporan pelanggan dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini - Bab Tata Kelola, dan Laporan Keberlanjutan - Bab Layanan dan Kepuasan Pelanggan.

Privasi dan Keamanan Data

Bank Mandiri memprioritaskan pengamanan privasi data nasabah sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Bank melindungi informasi pribadi nasabah melalui penerapan langkah-langkah keamanan teknologi, proses & administratif, organisasi, dan fisik. Bank mengembangkan kode etik/perilaku bisnis termasuk standar pengamanan informasi rahasia nasabah yang harus dijalankan oleh karyawan.

Oleh karena itu, sejak nasabah membuka rekening di Bank Mandiri Group, nasabah wajib mengisi dan memeriksa persetujuan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah juga diperbolehkan untuk menarik persetujuan nasabah kapan saja. Selanjutnya, Bank Mandiri mewajibkan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) bagi pihak ketiga apabila terdapat kerja sama yang menggunakan data nasabah, dan hanya mengirimkan data nasabah sesuai persetujuan nasabah. Bank juga memastikan bahwa penyampaian kampanye mencakup persetujuan nasabah.

Tata kelola pengelolaan data nasabah telah dibentuk dalam kebijakan operasional yaitu Standar Prosedur Manajemen Data dan Pedoman Teknis Operasional penyediaan data internal dan eksternal. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan privasi dan keamanan data (termasuk entitas anak) dapat diakses melalui:

PILAR SOSIAL

Mandiri Group berkomitmen untuk membangun dan memperbarui pertahanan keamanan siber yang andal melalui pengembangan standar persyaratan keamanan sebagai acuan bagi setiap entitas anak berdasarkan Kerangka Kerja Keamanan Siber Bank Mandiri. Setiap entitas anak akan melakukan *self-assessment* dan menyiapkan rencana aksi kepatuhan jika ada kesenjangan dengan pendampingan Divisi CISO. Selanjutnya, rencana aksi masing-masing entitas anak dilaporkan kepada Manajemen Bank Mandiri oleh Direksi entitas anak untuk mendapatkan umpan balik adaptasi pertahanan keamanan siber di Mandiri Group.

Selain itu, dalam rangka melakukan proses harmonisasi data di entitas anak, termasuk privasi dan keamanan data, Mandiri *Subsidiary Management Principle Guideline* (MSMPG) telah mengatur ketentuan pengelolaan data yang dapat diadopsi dan diselaraskan oleh entitas anak. Isu dan topik diskusi terkait pengelolaan data, termasuk privasi dan keamanan data, dilaporkan dan dibahas di komite tingkat dewan, yaitu Data *Steering* Forum. Data *Steering* Forum diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun yang dihadiri oleh Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan dan Strategi, dan Direktur IT.

Terkait pengelolaan kerahasiaan dan keamanan data pribadi, Bank Mandiri telah memiliki dan mengimplementasikan Data *Governance Framework* yang diadopsi dari framework best practice. Beberapa *practice* yang diterapkan antara lain:

1. Nasabah dapat menambah/melengkapi dan mengubah *(rectify, change, control)* data pribadi melalui cabang atau *call center,*
2. Proses masking atas data-data yang sensitif,
3. Pelindungan data sensitif terhadap akses oleh pihak/orang yang tidak berwenang melalui penerapan klasifikasi data
4. Pengamanan atas kebocoran data melalui implementasi *Data Loss Prevention (DLP) tool,*
5. *Secure File Sharing* dengan penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) yang terintegrasi pada teknologi pengelolaan data
6. *Security Awareness* berkala untuk edukasi kepada pegawai dan nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi,
7. Pelindungan data pribadi dari kehilangan, kebocoran, kerusakan melalui kontrol keamanan yang memadai.
8. Data *resiliency* melalui penerapan upaya *backup, switch-over,* dan pelatihan pemulihan bencana

Bank Mandiri meluncurkan Livin' Super Apps dengan fitur *liveness detection* dan *face recognition* untuk meminimalisir penyalahgunaan data nasabah, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi finansial melalui *mobile banking*. Dengan fitur ini, data nasabah langsung tersimpan dalam sistem tanpa melalui bentuk fisik. Nasabah Livin' dapat mengubah/memperbaiki data diri, membuka rekening tabungan dan menggunakan kartu kredit, menarik uang tunai tanpa kartu, memilih

transaksi favorit, *top up* e-money instan, dan pembayaran belanja *online*. Selanjutnya, Bank Mandiri memastikan hak nasabah untuk melakukan perbaikan dan pengendalian data pribadi yang dapat dilakukan di seluruh cabang atau melalui *call center* 14000.

Bank Mandiri melakukan audit secara berkala untuk melakukan fungsi *assurance* atas seluruh aktivitas pengamanan informasi, termasuk pelindungan nasabah, data *privacy*, dan *fraud management*, yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan internal dan regulator. Audit terbagi atas aktivitas berikut:

1. Audit Internal.
   Proses audit internal dilakukan minimal 1x dalam 1 tahun oleh unit khusus IT *Security* Audit yang berada di bawah supervisi Unit Kerja IT Audit (SKAI – Satuan Kerja Audit Internal).
2. Audit Eksternal.
   Proses audit eksternal dilakukan minimal 1x dalam 2 tahun oleh *reputable* konsultan internasional (pihak independent eksternal). Proses audit eksternal ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi aspek kepatuhan pada regulator (BI) atas penerbitan PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Pada 2023, telah dilaksanakan audit eksternal oleh *reputable* konsultan internasional (pihak independent eksternal) dengan cakupan audit meliputi pelindungan nasabah, keamanan informasi & *privacy* data, serta *fraud management*.

Selain itu, telah dilakukan asesmen oleh pihak independent eksternal *assessor* yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait:

1. ***Asesmen Cyber Security Maturity (CSM)*** dengan hasil tingkat kematangan 5 – **"Optimal"** (nilai tertinggi). *Asesmen* CSM merupakan instrument dari BSSN untuk menilai tingkat kematangan keamanan siber suatu organisasi, termasuk di dalamnya penilaian kematangan pengelolaan dan pelindungan kerahasiaan data pribadi (data *privacy*).
2. **Pengukuran Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)** dengan hasil tingkat kematangan 5 – **"Optimise"** (nilai tertinggi). TMPI merupakan alat untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi dalam penanggulangan & pemulihan insiden keamanan siber, termasuk dalam mendeteksi dan merespon apabila terdapat insiden kebocoran data pribadi akibat celah keamanan sistem.

Keseriusan Bank Mandiri dalam memantau keamanan informasi dinyatakan dengan keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi secara langsung dalam topik ini melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan secara berkala. Agenda pembahasan pada rapat komite tersebut antara lain yaitu pelaporan inisiatif ESG aspek *Privacy* & Data *Security* triwulanan, Sistem pengamanan berlapis Bank Mandiri *(multi-layer defense mechanism)*, serta pemenuhan standar *security requirement* Mandiri Group.

Program *Security Awareness* untuk menumbuhkan kesadaran mengenai keamanan informasi dalam perilaku sehari-hari yang pada akhirnya menjadi budaya *(culture)* bank. Bank Mandiri melakukan sertifikasi *security awareness* setiap tahun kepada seluruh pegawai (seluruh level pegawai di kantor domestik dan luar negeri) serta pihak ketiga/ kontraktor. Selain itu juga dilaksanakan program *campaign security awareness* rutin dalam berbagai media yaitu *newsletter* (bulanan), poster (triwulanan), *podcast* (triwulanan), dan *phishing drill* (semesteran). Beberapa topik campaign *security awareness* yang telah dilakukan antara lain mengenai proteksi keamanan data, menjaga kerahasiaan data, tren serangan siber terkini, cara mengidentifikasi dan menghindari *phishing*, dan keamanan bertransaksi *online*.

Selain itu, Bank Mandiri terus meningkatkan *security awareness* nasabah dengan program edukasi melalui berbagai kanal resmi Bank seperti website, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter), YouTube. Contoh edukasi melalui website bankmandiri.co.id dengan tautan Keamanan Transaksi Digital yang memuat edukasi menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, masa berlaku kartu, 3 angka CVV dibelakang kartu, limit kartu, User ID, kata sandi, dan OTP.

PILAR **TATA KELOLA**

Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan prinsip-prinsip GCG, TARIF *(Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fairness),* yang kini telah dkembangkan menjadi empat pilar governansi korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yakni: Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan.

KINERJA PILAR TATA KELOLA

Most Trusted Company

95,22

Bank Mandiri mendapatkan predikat sebagai salah satu **top performers** pada **Corporate Governance & Perception Index (CGPI)**

*)Rating sebelumnya : 95,01

Penguatan Praktik LST

- Pembentukan ESG Group sebagai 'control tower' pelaksanaan implementasi ESG di Bank Mandiri
- ESG Governance Oversight oleh Dewan Komisaris dan Direksi, disupervisi langsung oleh Wakil Direktur Utama, dan dilaporkan kepada Risk Management Policy and Committee (RMPC) dan Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Kebijakan Privasi pada produk Bank Mandiri dan seluruh Perusahaan Anak
- Whistleblowing System – Letter to CEO (WBS-LTC) dikelola pihak eksternal independen

Tata Kelola LST

Bank Mandiri mengelola keberlanjutan secara menyeluruh termasuk dalamnya topik-topik LST dalam kerangka kerja keuangan berkelanjutan untuk mencapai visi keberlanjutan '*Becoming Indonesia's Sustainability Champion for A Better Future*'.

Untuk tujuan tersebut, Perseroan menetapkan organ-organ tata kelola yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan & evaluasi serta pelaksaaan strategi LST secara *bankwide*.

Tugas dan Tanggung Jawab – Direksi & Komisaris
- Melakukan pemantauan & evaluasi atas Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait Manajemen Risiko.
- Memberikan rekomendasi pada Direktur Utama mengenai penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab – ESG Unit
- Menyusun *framework*, komitmen, *roadmap* dan target terkait ESG/*Sustainability*.
- *Monitoring Sustainable Portfolio* Bank Mandiri (sesuai kriteria POJK 51/2017) dan melaporkan Portfolio Bank Mandiri sesuai dengan Taksonomi Hijau Indonesia.
- Mendorong pengembangan jasa/produk Keuangan Berkelanjutan.
- Melakukan *cascading* KPI ESG yang relevan ke seluruh unit.
- Memastikan *disclosure* ESG sesuai *best practice*.
- Internalisasi ESG *awareness* kepada seluruh pegawai.
- Memastikan *alignment* aspek ESG ke dalam seluruh proses bisnis dan ketentuan internal.

STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN



PILAR TATA KELOLA

Penanggung Jawab Keuangan Berkelanjutan

Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah keberlanjutan Perseroan *(Framework, Commitment, Strategy,* Inisiatif, *Roadmap)* terkait perubahan iklim dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs); yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028, disetujui Dewan Komisaris, dan diserahkan kepada regulator pada bulan November setiap tahunnya.

Setiap anggota Direksi memastikan berjalannya RAKB dan pengelolaan topik-topik LST yang relevan di masing-masing direktoratnya sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dalam RAKB. Integrasi dan koordinasi pengelolaan topik-topik LST secara khusus menjadi kewenangan Wakil Direktur Utama dan dilaksanakan oleh ESG Group dengan cakupan sebagai berikut:

1. Pengelolaan ESG *Framework*,
2. Penyelarasan ketentuan yang selaras dengan isu LST dan perubahan iklim,
3. Pengelolaan sustainable portfolio,
4. Strategi operasional yang bertanggung jawab,
5. Fungsi komunikasi dan pelaporan terhadap pihak eksternal dan internal.

Dalam kerangka penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Mandiri telah menambah unit baru yaitu ESG Group, sesuai dengan SK/KOM/05.2/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan dituangkan dalam SK Direksi KEP.DKP/32/2022 tanggal 12 September 2022. ESG Group menjadi penanggung jawab keuangan berkelanjutan sesuai amanat POJK-51/2017. ESG Group adalah unit permanen penuh waktu yang menggantikan gugus tugas keuangan berkelanjutan sebelumnya.

ESG Group merupakan *control tower* implementasi LST di Bank Mandiri dan seluruh entitas anak. ESG Group dipimpin oleh seorang Senior *Vice President* berada di bawah wewenang Wakil Direktur Utama Perseroan. Adapun fungsi harian ESG Group termasuk pengelolaan LST *framework*, penyelarasan ketentuan yang selaras dengan isu LST dan perubahan iklim, pengelolaan sustainable portfolio management, strategi operasional yang bertanggung jawab, termasuk fungsi komunikasi dan pelaporan terhadap pihak eksternal dan internal.

Pengelolaan dan Pengawasan LST

Perseroan memastikan tata kelola LST berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Tata kelola LST dipantau secara terus menerus agar hal-hal yang terkait dengan keberlanjutan terinternalisasi dalam struktur tata kelola Perseroan secara keseluruhan. Bank Mandiri juga telah menetapkan tujuan untuk menangani hal-hal yang terkait dengan LST secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan serta memperhatikan praktik-praktik LST yang diterapkan oleh perbankan dan inisiatif global.

Khusus pengelolaan risiko iklim, Direksi dibantu oleh *Risk Management and Policy Committee* (RMPC) dan dalam pengawasannya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR). Pemantauan risiko iklim dilakukan melalui rapat direksi, *Risk Management and Credit Policy Committee* (RMPC) serta ESG Forum minimal enam kali dalam setahun. Sebagai badan tata kelola tertinggi, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan arah perusahaan melalui kebijakan, strategi, dan sasaran keberlanjutan dalam topik sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk isu perubahan iklim yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan dan strategi Bank Mandiri. Dewan Komisaris dan Direksi aktif melakukan identifikasi dan evaluasi dalam mengelola dampak aspek keberlanjutan dan perubahan iklim tersebut, dengan berkonsultasi pada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, regulator, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Konsultasi ini dapat berupa pertemuan tatap muka, pertemuan daring, maupun melalui laporan-laporan yang diterima. Frekuensi pertemuan atau laporan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi mendelegasikan tanggung jawab untuk mengelola dampak keberlanjutan kepada ESG Unit, yang disupervisi langsung oleh Wakil Direktur Utama, dan melapor kepada *Risk Management Policy and Committee* (RMPC) dan Komite Pemantau Risiko (KPR). Laporan dari ESG Unit kemudian diteruskan kepada Direksi secara rutin sesuai kebutuhan dan kepada Dewan Komisaris dengan frekuensi minimal 4 kali per tahun.

Pengawasan manajemen dalam penegakan *Code of Conduct* meliputi pengawasan oleh Direksi terkait pelaksanaan integritas dan etika yang merupakan bagian dari Penerapan Sistem Pengendalian Internal. Dalam pengawasan, Direksi memastikan tumbuhnya budaya Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, integritas setiap Mandirian, menjadikan manajemen sebagai teladan yang menumbuhkan keterlibatan semua orang serta menjadikan budaya risiko melekat di setiap jenjang organisasi.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

penyaluran dana TJSL sebesar

Rp 174,6 Miliar

Pada tahun 2023, Bank Mandiri kembali menunjukkan besarnya komitmen dukungan pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan merealisasikan penyaluran dana TJSL sebesar Rp174,6 Miliar.

KOMITMEN DAN **KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Bank Mandiri menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjalankan proses bisnis yang sehat dengan senantiasa mempertimbangkan terjadinya keseimbangan kinerja pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan merealisasikan beragam program TJSL yang didukung alokasi anggaran yang memadai. Di tahun 2023, Perseroan berhasil menyalurkan dana TJSL hingga sebesar Rp174,6 Miliar melalui pelaksanaan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya beragam target yang telah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Bank Mandiri menjalankan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud dukungan bagi tercapainya beragam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Pelaksanaan program-program TJSL tersebut merupakan wujud nyata pertanggungjawaban Bank Mandiri kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui pelaksaan beragam kegiatan pembangunan dalam program TJSL, Bank Mandiri menunjukkan tekadnya untuk memenuhi saat ini namun dilakukan tanpa mengurangi, mengorbankan dan menghancurkan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Melalui pelaksanaan program-program TJSL tersebut, Bank Mandiri menunjukkan bahwa pengembangan bisnis saat ini dijalankan dengan mengedepankan keselarasan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Bank Mandiri meyakini, melalui pengembangan dan penguatan nilai-nilai jangka panjang *(longterm value creation)*, fondasi keberlanjutan yang kokoh akan terbangun, sehingga keunggulan bersaing secara berkelanjutan *(sustainable competitive advantage)* dapat terwujud, dan Bank Mandiri dapat memperkuat daya tahan *(strengthen resilience)* yang lebih luas kepada masyarakat dan lingkungan.

Bank Mandiri menjalankan program TJSL mengacu pada ISO 26000 melalui konsep CSV *(Creating Share Value)* dengan karakteristik berbagi manfaat dan nilai. Hal ini selaras dengan Permen Kementerian BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023. Dengan demikian, penerapan program TJSL yang dijalankan Bank Mandiri diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan, serta mendorong usaha mikro dan usaha kecil masyarakat agar berkembang lebih tangguh dan mandiri.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Prinsip Standar ISO 26000



DASAR PENERAPAN TJSL

Program dan kegiatan TJSL senantiasa dilaksanakan dengan mengacu pada Misi Bank serta selaras dengan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Program TJSL juga dijalankan dengan berpedoman pada beragam regulasi, mencakup:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PRINSIP TJSL

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, terdapat empat prinsip agar penerapan program TJSL dilakukan secara sistematis dan terpadu agar pelaksanaan Program TJSL menghasilkan pencapaian kinerja sesuai dengan prioritas dan rencana kerja. Empat prinsip tersebut adalah:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Bank;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Bank.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

PILAR TJSL

Inisiatif strategis TJSL Bank Mandiri disusun didasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola yang sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

STRATEGI PROGRAM TJSL

Program TJSL Bank Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya. Dampak lain yang diharapkan adalah, masyarakat pemilik dan pengguna dana dapat bertransaksi, sehingga perekonomian negara mengalami peningkatan. Oleh karenanya, agar mendatangkan manfaat yang maksimal, Bank Mandiri terlebih dahulu melakukan *assessment* untuk memahami potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut anggaran TJSL untuk tahun pelaporan 2023 menurut Pilar TJSL Bank Mandiri:

Target Program TJSL Bank Mandiri menurut Pilar TJSL - 2023

Pilar	Target (Rp)
Sosial	47.500.000.000
Ekonomi	68.800.000.000
Lingkungan	22.500.000.000
Hukum & Tata Kelola	11.200.000.000
Total	**150.000.000.000**

TUJUAN TJSL

Tujuan Pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri adalah:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Bank dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

RUANG LINGKUP TJSL BANK MANDIRI

Program TJSL Bank Mandiri dijalankan dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat sekitar kegiatan operasional Bank dan masyarakat luas secara selektif. Selama tahun 2023, kegiatan program TJSL Bank Mandiri difokuskan ke dalam 3 (tiga) bidang utama, yaitu bidang Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

STRUKTUR PENGELOLA TJSL

Program TJSL Bank Mandiri dikelola oleh Departemen *Corporate Social Responsibility* yang berada di bawah *Corporate Secretary Group*. Penanggung jawab dari program TJSL ini adalah Direktur Hubungan Kelembagaan.

PENCAPAIAN TJSL 2023

Sebagai bukti atas realisasi komitmen Bank Mandiri dalam penerapan TJSL dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diraih, pada tahun 2023 Bank Mandiri menerima berbagai penghargaan dari pihak ketiga, mencakup antara lain:

Penghargaan bagi Program TJSL Bank Mandiri, 2023

No.	Tanggal	Penghargaan		Pemberi Penghargaan
		Nama Penghargaan	Kategori	
1	Maret 2023	Bronze Winner PR Indonesia Award 2023	Program CSR Sub Kategori Community Based Devploment	PR Indonesia
2	Maret 2023	• Best CSR on MSME UKM Program • Best Program In Education Or Scholarship Category • Best CSR Global Program • The Best CSR Commitment	Indonesia CSR Excellence Award 2023	First Indonesia Magazine
3	Maret 2023	BCOMSS 2023	Kategori Best Millenial TJSL dan Community Involvement	BCOMSS
4	Mei 2023	The Iconomics Indonesia Best CSR Adward 2023 (Indonesia CSR Brand Equity Award 2023)	Indonesia Best CSR Award	The Iconomics
5	Juni 2023	TOP AWARD CSR 2023 CSR Inovation Programs For Sustainable Business Growth & TOP CSR AWARDS 2023 #GOLDEN THROPHY TOP ACHIEVEMENT IS AWARDED TO	CSR Inovation Programs For Sustainable Business Growth	Top Business - Top CSR Award 2023
6	Mei 2023	Anugerah Penghargaan TSLP Tahun 2023	Bidang Pemulihan Ekonomi & Kesehatan di Kota Yogyakarta	Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP)
7	Agustus 2023	Apresiasi Merdeka Awards 2023	Program Inovatif Kemandirian Ekonomi	Merdeka Awards
8	Agustus 2023	PENGHARGAAN INDONESIA TJSL AWARD 2023 (WARTA EKONOMI.CO.ID)	Kategori "BEST TJSL 2023 PROGRAM IN DEVELOPING THE ICONOMIC POTENTIAL OF THE COMMUNITY BY FOSTERING MSMEs"	Warta Ekonomi.co.id
9	Oktober 2023	Anugerah CSR Republika 2023	CSR Bidang UMKM	Republika
10	Desember 2023	IDX Channel Anugerah CSR 2023	Kategori Economic Development Initiatives (Urban Festival)	IDX Channel Anugerah CSR 2023

PROGRAM TJSL BANK MANDIRI

Berikut beberapa program TJSL unggulan yang dijalankan Bank Mandiri sepanjang tahun 2023:

Highlight Progrm TJSL Unggulan Bank Mandiri - 2023

Program	Prioritas	Kategori
Wirausaha Muda Mandiri (WMM)	Pengembangan UMK	
Rumah BUMN (RB) Bank Mandiri	Pengembangan UMK	
Mandiri Sahabatku	Pengembangan UMK	
Mandiri Edukasi	Pendidikan	
Mudik Sehat Bareng BUMN	Lainnya	
Mandiri Entrepreneur Expo	Pengembangan UMK dan Pendidikan	
Peningkatan Infrastruktur UMKM	Pengembangan UMK	
Waste to Energy	Lingkungan	
Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT)	Pengembangan UMK	

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

KALEIDOSKOP PROGRAM TJSL 2023

HIGHLIGHT CSR 2023

Dokumentasi CSR Bulan Januari - Desember 2023

Berikut ini adalah *highlight* beberapa aktivitas program unggulan yang telah dilaksanakan.

Bank Mandiri mendukung Program Pelayanan Kesehatan Papua Tanpa Batas di Distrik Muara Tami, Jayapura dalam Kegiatan Relawan Bakti BUMN

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
 	Kota dan Pemukiman yang Bekelanjutan Kesejahteraan yang baik & Kesejahteraan Pendidikan Bermutu Menghapus Kemiskinan

Mandiri Entrepreneur Expo

Kategori : Sosial Pendidikan	Prioritas SDGs
 	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kick Off Wirausaha Muda Mandiri

Kategori : Sosial Pendidikan	Prioritas SDGs
 	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

WMM Junior 2023

Kategori : Sosial Pendidikan	Prioritas SDGs
 	Pendidikan Berkualitas

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

uRBan Festival 2023

Kategori : Pemberdayaan UMKM

Prioritas SDGs

- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Pendidikan Berkualitas




Mandiri Sahabatku di Hongkong

Kategori : Sosial Kemasyarakatan

Prioritas SDGs

- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Berkurangnya Kesenjangan




Bantuan UMKM Center di Kawasan Wisata Religi, Purwakarta

Kategori : Sosial Kemasyarakatan

Prioritas SDGs

- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Infrastruktur, Industri dan Inovasi




Bank Mandiri Memberikan Bantuan Peralatan, Perlengkapan, dan Renovasi Dapur Bagi Ghara Yayasan Onkologi Anak Indonesia Jakarta

Kategori : Sosial Kemasyarakat , Bidang Kesehatan

Prioritas SDGs

- Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan




Bank Mandiri memberikan Edukasi Pengolahan Sampah dan Kampanye Kebersihan yang mengusung tema Match Day Clean Up melibatkan Relawan serta masyarakat setempat di Stadion Glora Bung Tomo, Kota Surabaya.

Kategori : Sarana Pendidikan

Prioritas SDGs

- Pendidikan Bermutu
- Menjaga Ekosistem Darat




KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Kegiatan Mandiri Pilah Sampah bersama Relawan dan masyarakat sekitar pada Mandiri Jogja Marathon.

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Penanganan Perubahan Iklim
	Menjaga Ekosistem Darat




Bantuan Safari Ramadhan pemberian 133.000 paket Sembako Ramadan kepada yayasan, lembaga dan masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah.

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Menghapus Kemiskinan
	Mengakhiri Kelaparan




Mudik dinanti, Mudik dihati

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Perdamaian Keadilan Kelembagaan yang Tangguh




Bantuan CSR Perlengkapan Rebana di Kota Dumai

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan




Bantuan CSR penghijauan lingkungan pemukiman dengan menyalurkan bantuan infrastruktur kegiatan Urban Farming untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Kenanga, Kelurahan Pela Mampang, Kota Jakarta Selatan

Kategori : Lingkungan	Prioritas SDGs
	Penanganan Perubahan Iklim
	Menjaga Ekosistem Darat
	Kota dan Pemukiman yang Bekelanjutan
	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi




KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bank Mandiri Membangun Ekosistem Kewirausahaan untuk Para Petani Membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) untuk Para Petani di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali

Kategori : Sosial Kemasyarakatan





Prioritas SDGs

- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Menghapus Kemiskinan
- Infrastruktur, Industri dan Inovasi
- Berkurangnya Kesenjangan

Soft Launching Rumah BUMN Medan dan Bogor

Kategori : Sarana Pendidikan





Prioritas SDGs

- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Bantuan 2.600 Takjil Melalui 23 titik Rumah BUMN kepada Yayasan atau panti asuhan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta Masyarakat yang membutuhkan di sekitar Rumah BUMN

Kategori : Sosial Kemasyarakatan





Prioritas SDGs

- Menghapus Kemiskinan
- Mengakhiri Kelaparan

Pelatihan bagi para pelaku UMKM di Rumah BUMN

Kategori : Pemberdayaan UMKM





Prioritas SDGs

- Pekerjaan yang layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Bazar dan Expo yang melibatkan UMKM binaan Rumah BUMN (RB)

Kategori : Pemberdayaan UMKM





Prioritas SDGs

- Pekerjaan yang layak dan Pertumbuhan Ekonomi

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Peresmian Program Tana Lino Lestari II, Pembangunan Sarana Pendidikan Kolaborasi TJSL 23 BUMN di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur

Kategori :	Prioritas SDGs
	Pendidikan Berkualitas





BUMN Grosir

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi





Dukungan bank mandiri dalam rangka peningkatan UMKM makanan khas palembang di kampung lorong roda kota palembang, dilaksanakan sebagai rangkaian hari jadi kota palembang

Kategori : Pemberdayaan UMKM	Prioritas SDGs
	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi





Bantuan CSR Tanggap Bencana

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan
	Mengakhiri Kelaparan
	Menghapus Kemiskinan





Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan





KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bantuan berupa 103 sembako dan 25 Paket Tas Sekolah Anak di Kampung Cariu Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang Cianjur, Jawa Barat kepada korban gempa bumi Cianjur

Kategori : Sosial Kemasyarakatan	Prioritas SDGs
	Pendidikan Berkualitas
	Menghapus Kemiskinan
	Mengakhiri Kelaparan




Bantuan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kawasan UMKM Malalayang Beach di Manado

Kategori : Pemberdayaan UMKM	Prioritas SDGs
	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi




Hijaukan Bumi Kita

Kategori : Lingkungan	Prioritas SDGs
	Penanganan Perubahan Iklim
	Menjaga Ekosistem Darat
	Kota dan Pemukiman yang Bekelanjutan




Kategori : Lingkungan	Prioritas SDGs
	Penanganan Perubahan Iklim
	Menjaga Ekosistem Darat




Bank Mandiri memberikan Perlengkapan Sekolah untuk Pelajar di Perbatasan RI-RDTL kepada pelajar SD di perbatasan RI-RDTL di Belu, Malaka, NTT, di bagikan dua lokasi, Pos Motamasin Jajaran Kipam III dan Pos Motaain.

Kategori : Pendidikan	Prioritas SDGs
	Pendidikan Bermutu




KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

TARGET TJSL

Bank Mandiri memiliki target sebesar Rp150 miliar untuk mendukung pelaksanaan program-program TJSL 2023 pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Realisasi dana yang disalurkan untuk program TJSL sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp174,6 miliar atau naik 116,4% dari alokasi target sebesar Rp150 miliar, yang terdiri dari Rp74,0 miliar atau 49,3% dari realisasi di pilar sosial, Rp70,4 miliar atau 46,9% dari realisasi di pilar ekonomi, Rp23,3 miliar atau 31,4% dari realisasi di pilar lingkungan, dan Rp6,9 miliar atau 9,8% dari realisasi di pilar hukum dan tata kelola. Berikut tabel realisasi program pilar TJSL Bank Mandiri Tahun 2023:

Realisasi Target TJSL Bank Mandiri 2023

Jenis Kegiatan	Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Capaian (Jumlah Program)	2023	
			Realisasi	Target
Pilar Sosial		426	Rp74,0 Miliar	Rp47,5 Miliar
Pilar Ekonomi		280	Rp70,4 Miliar	Rp68,8 Miliar
Pilar Lingkungan		232	Rp23,3 Miliar	Rp22,5 Miliar
Pilar Hukum dan Tata Kelola		23	Rp6,9 Miliar	Rp11,2 Miliar
Total		**961**	**Rp174,6 Miliar**	**Rp150 Miliar**

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

KINERJA PROGRAM TJSL

Wirausaha Muda Mandiri (WMM)

Wirausaha Muda Mandiri (WMM) merupakan program CSR utama Bank Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di Indonesia khususnya di kalangan generasi muda. Dimana wirausaha merupakan elemen penting perekonomian suatu negara dan menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara.

Sasaran utamanya adalah untuk membentuk komunitas wirausaha muda, yang terus bersinergi di dalam program-program Bank Mandiri dan Pemerintah, sehingga sukses menjadi role model bagi para generasi muda di Indonesia yang baru ingin terjun ke dunia wirausaha.

Mengusung *tagline* Berani Jadi Mandiri, Program WMM diharapkan dapat terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas program sehingga dapat berperan langsung sebagai jembatan penghubung ide-ide kreatif yang terukur yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2023, jumlah peserta pendaftaran WMM mencapai kurang lebih 8.291 peserta baik dari peserta *Business Plan* maupun *Business Eksisting* dimana selain adanya acara awarding WMM 2023, akan diselenggarakan juga kegiatan expo yang menampilkan produk unggulan dari alumni WMM yang berasal dari berbagai macam kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya sekedar kompetisi, peserta WMM 2023 akan mendapatkan banyak ilmu baru sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemampuan sebagai pebisnis yang tangguh mulai dari meningkatkan kemampuan *branding*, komunikasi, hingga strategi marketing lainnya serta adanya *Platform* Alumni WMM.

Rumah BUMN (RB) Bank Mandiri

Rumah BUMN (RB) merupakan program peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM sehingga dapat terwujud UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas.

Sasaran yang dicapai adalah untuk meningkatkan UMKM agar naik kelas serta menghasilkan produk dan desain packaging yang unggul dan berkualitas sehingga dapat bersaing baik di skala nasional maupun internasional. Rumah BUMN memiliki fungsi antara lain: Pengembangan UMKM, Satuan Tugas Bencana tingkat provinsi, *Co-Working Space, Basecamp Millenials,* Pemberian KUR/ KUM.

Bank Mandiri mendapat amanah dari Kementerian BUMN untuk mendirikan Rumah BUMN sejak tahun 2017. Pada tahun 2023, Bank Mandiri telah mendirikan 23 Rumah BUMN dengan total 9.702 UMKM di beberapa titik lokasi seperti Kabupaten Kampar (Provinsi Riau) sampai Bintuni (Provinsi Papua Barat) serta kota-kota besar lainnya yaitu Jakarta, Bogor, Medan, Semarang dan Surabaya.

Pada tahun 2023, kegiatan yang telah dilakukan Rumah BUMN diantaranya: Rumah BUMN *Entepreneur Week,* kegiatan akselerasi dalam hal pengembangan bukan hanya kepada UMKM namun juga kepada fasilitator Rumah BUMN berupa pelatihan sertifikasi *coaching* dan inkubasi kepada UMKM (uRBan Festival).

Dalam uRBan Festival tersebut terdapat 15 finalis UMKM binaan Rumah BUMN yang terpilih setelah melewati kurasi di acara uRBan Festival, 3 pemenang memperebutkan hadiah berupa bantuan alat produksi untuk menunjang usahanya. Pada tahun 2023, Kami melakukan pengukuran dampak atau manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat secara langsung dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dengan menggunakan metode SROI di Rumah BUMN Cilegon. Nilai SROI *(Social Return on Investment)* sebesar 2,4 untuk Program Rumah BUMN di Rumah BUMN Cilegon.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Mandiri Sahabatku

Merupakan rangkaian kegiatan pelatihan kewirausahaan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011.

Sasaran yang dituju adalah para PMI dan diharapkan sekembalinya mereka ke tanah air, sudah memiliki bekal kewirausahaan sehingga dapat menjadi pengusaha yang mandiri. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan bukan hanya kepada para PMI namun juga kepada keluarga PMI.

Pelatihan kepada para PMI dilakukan secara *offline* maupun *online* dengan mengumpulkan para PMI dari beberapa negara seperti: HongKong, Singapura, Malaysia serta UAE. Selain pelatihan *offline* dan *online* diadakan juga Program Bapak Asuh yang bersinergi dengan para alumni Wirausaha Muda (WMM) maupun Rumah BUMN untuk memberikan mentoring dan pelatihan berkelanjutan kepada para PMI maupun keluarga yang terpilih.

Mandiri Edukasi

Mandiri Edukasi Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar kepada para pengajar di sekolah serta memberikan pembekalan kepada para siswa sekolah Dasar bagi Mandiri Edukasi 101.

Sasaran Mandiri Edukasi 101 yaitu pengembangan Sekolah Rintisan Pendidikan Karakter di 32 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Indonesia

Pencapaian Mandiri Edukasi yaitu Melakukan pelatihan dan pendampingan Pendidikan Karakter untuk meningkatkan kapasitas SDM Pendidikan dan peran serta Orang Tua siswa dalam meningkatkan pendidikan karakter berwawasan kesehatan di 32 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan 260 titik di Indonesia dengan total 60.000 siswa

Mudik Sehat Bareng BUMN

Sebagai wujud kepedulian sosial, Bank Mandiri melaksanakan kegiatan Mudik bersama bagi masyarakat dan pegawai di sekitar lingkungan perusahaan. Inisiatif kegiatan mudik gratis ini juga merupakan aktivitas sosial wajib Bank Mandiri menjelang Hari Raya Idul Fitri yang secara langsung dapat dimanfaatkan masyarakat umum.

Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain Memberikan bantuan kepada masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman menggunakan moda transportasi umum, khususnya yang berhubungan dengan Bank Mandiri termasuk untuk nasabah dan internal pegawai yang membutuhkan dan wujud kepedulian Bank Mandiri kepada lingkungan sekitar perusahaan.

Dalam penyelenggaraan mudik sehat bareng BUMN pada tanggal 16-19 April 2023 ini Bank Mandiri sukses memberangkatkan 7.000 pemudik yang diselenggarakan di Kantor PBNU, Mabes TNI Cilangkap, Gelora Bung Karno bersama Kementerian BUMN, dan Kantor Kementerian Agama.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Mandiri Entrepreneur Expo

Mandiri Entrepreneur Expo merupakan kegiatan kolaborasi kewirausahaan dengan pesertanya antara lain Finalis uRBan Festival yang merupakan UMKM binaan Rumah BUMN maupun Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Junior dengan pesertanya adalah Siswa Sekolah Dasar dengan 3 kategori yaitu: Siswa SDN Perkotaan, Pedesaan dan 3T serta Madrasah Ibtidaiyah.

Sasaran kegiatan Mandiri *Entrepreneur* Expo ini adalah untuk meningkatkan jiwa *Entrepreneur* sejak usia dini dan diharapkan dapat menghasilkan *entrepreneur* yang unggul dan berkualitas.

Pada kegiatan tersebut diharapkan para peserta dapat menghasilkan produk yang unggul dan berkualitas. 3 pemenang uRBan Festival memperebutkan hadiah berupa bantuan alat produksi untuk menunjang usahanya yaitu Juara 1 Dyah Puspita (Mie Sehat Cempaka), Juara 2 Nastarofika (Ulur Wiji), Juara 3 Sabrina Naula (Recycling Village) dan 3 pemenang WMM Junior yaitu Juara 1 SDN 2 Citatah Kabupaten Bandung Barat, Juara 2 SDN Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Juara 3 SDN Koda Permai Kabupaten Sumbawa.

Peningkatan Infrastruktur UMKM

Program yang bertujuan memperluas akses pasar UMKM dengan melakukan pembangunan tempat promosi UMKM di area publik seperti gelanggang olahraga, cagar budaya atau lokasi publik yang strategis.

Sasaran program ini adalah para UMKM lokal yang memiliki produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat, serta memiliki dampak ekonomi seperti UMKM dengan basis padat karya.

Pencapaian telah dilaksanakan di beberapa lokasi antara lain adalah Pembangunan Pusat UMKM di Kawasan Parkir Timur Gelora Bung Karno dengan mampu memberikan dampak kepada 24 UMKM, Pembangunan Pusat UMKM di Kawasan Cagar Budaya Menara Siger Bakauheni Lampung dengan mampu memberikan dampak kepada 33 UMKM, Pembangunan Pusat UMKM di Kawasan Wisata Religi Purwakarta serta adanya *Creative Corner* di Omah Kurasi, Surabaya.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Waste to Energy

Program *Waste to Energy* adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan untuk meningkatkan *value* dari pemanfaatan sampah organik menjadi Energi/ *Waste to Energy* (WTE) dengan mengembangkan Sentra Kelola Sampah (SEKOLA) sebagai pusat pengembangan dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Pasanggaran, Banyuwangi - Jawa Timur.

Sasaran Program ini adalah mensosialisasikan implementasi pengelolaan sampah khususnya di wilayah Dusun Pancer di Kota Banyuwangi, Indonesia, untuk meningkatkan pemanfaatan sampah organik menjadi Energi/ *Waste to Energy* (WTE) juga Mengembangkan program pengembangan masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya keberlanjutan penanganan sampah domestik di Desa Sumberagung.

Sejak Maret 2022 hingga Maret 2023 pencapaian yang dihasilkan oleh Program WTE adalah sebagai berikut:

a. Instalasi 1 Unit BSF yang mampu mengelola lebih dari 15.700 Kg Sampah Organik
b. Instalasi 10 Biogas yang mampu mengelola lebih dari 11.400 Kg Sampah Organik
c. Lebih dari 250.000 Kg Sampah yang terkelola dengan jenis dari Sampah Organik, Residu dan Anorganik.
d. Lebih dari 235.000 Metric Kg CO2e

Kewirausahaan Petani

Kewirausahaan Petani adalah wujud nyata Bank Mandiri dalam peningkatan inklusivitas dan kesejahteraan petani lokal. Adapun penjelasannya adalah pembangunan infrastruktur fisik berupa gedung, pemberian peralatan dan pelengkapan pengolahan beras, dan pemberian inovasi kelembagaan bagi para petani serta pengembangan bagi para petani, adapun wilayahnya mencakup Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Pamarican, Kebumen dan Jembrana.

Sasaran dari SBPT ini adalah pembentukan kekuatan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis pertanian yang terpadu sehingga diharapkan peningkatan taraf hidup dari para petani, meningkatkan daya beli pedesaan, memutus rantai pasok yang merugikan para petani, dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2023, Kami melakukan pengukuran dampak atau manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat secara langsung dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dengan menggunakan metode *Social Return on Investment* (SROI). Pengukuran SROI tersebut dilakukan pada program : SPBT Pamarican & SPBT Kebumen. Nilai SROI terhadap program SPBT Pamarican sebesar 3,7 dan Nilai SROI terhadap program SPBT Kebumen sebesar 3,2.

Program Bangkit Bersama Mandiri

Program CSR ini bergerak dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan, seperti bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lingkungan serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Sasaran yang dicapai adalah memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraaan masyarakat. Hal ini mengacu pada komitmen Bank Mandiri dalam mewujudkan fungsi sosial seperti bantuan bencana alam dan bencana non alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam & sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan.

Sasaran tersebut selaras dengan sasaran prioritas SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu tujuan kesepuluh atau "Berkurangnya Kesenjangan".

Aktivitas program yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tanggap Bencana

Program yang bergerak dan fokus pada aksi tanggap darurat bencana yang bekerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait.

Sasaran dari aktivitas program ini adalah membantu percepatan aksi penanganan dampak bencana bagi masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak hingga dampak pasca bencana.

Bank Mandiri melakukan peran aktif dalam aksi tanggap bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023, seperti:
- Tanggap Bencana Desa Mulyorejo, Tirto, Pekalongan- Jawa Tengah
- Tanggap Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah
- Tanggap Bencana Gempa Bumi di Kota Jayapura
- Tanggap Bencana Banjir di Kabupaten Pati
- Tanggap Bencana Banjir di Kabupaten Musi Rawas
- Tanggap Bencana Banjir di Kabupaten Lahat
- Tanggap Bencana Longsor di Pulau Serasan Kabupaten Natuna
- Tanggap Bencana Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang
- Tanggap Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Manado
- Tanggap Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lumajang
- Tanggap Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Garut
- Tanggap Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jembarana dan Karangasem
- Tanggap Bencana Banjir di Kudus
- Tanggap Bencana Banjir di Semarang
- Tanggap Bencana Banjir di Padang
- Tanggap Bencana Banjir dan longsor di Sumatera Utara
- Tanggap Bencana Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat

Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri selalu selaras dengan BNPB, kementerian BUMN dan pemerintah daerah terkait sehingga menciptakan dampak positif dan optimal dalam setiap aksi tanggap bencana.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PENYALURAN DANA TJSL

Pada tahun 2023, Bank Mandiri merealisasikan penyaluran dana TJSL total sebesar Rp174,6 Miliar dimana 100% dialokasikan untuk mendukung Program Pendanaan Non UMK, 10% untuk program Wirausaha Muda Mandiri, 1,1% untuk Rumah BUMN, 2,7% untuk Mudik Sehat Bareng BUMN, 0,8% untuk Mandiri Sahabatku. Bank mengalokasikan dana sebesar Rp250 Miliar untuk tahun 2024. Berikut tabel penyaluran dana TJSL Bank Mandiri

Tabel Realisasi Penyaluran Dana TJSL Bank Mandiri, 2021-2023

Program	2023	2022	2021
Mandiri Sahabatku	Rp1,4 Miliar	Rp500 Juta	Rp1,0 Miliar
Wirausaha Muda Mandiri	Rp17,5 Miliar	Rp8,9 Miliar	Rp6,5 Miliar
Rumah BUMN	Rp2,0 Miliar	Rp2,6 Miliar	Rp3,6 Miliar
Mudik Sehat Bareng BUMN*)	Rp4,7 Miliar	Rp3,9 Miliar	-

*) Program baru di tahun 2023



KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP **ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD**

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
A.	**Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham**	
A.1	**Hak Pemegang Saham Dasar**	
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final / tahunan) secara adil dan tepat waktu; Artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari.	411-412
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	529, 545, 546, 549
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, dibuktikan dengan item agenda, untuk menyetujui Remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk direktur / komisaris non-eksekutif?	529, 545, 546, 549
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan Calon Direksi/Komisaris?	529, 545, 546, 549
A.2.3	Apakah perusahaan mengizinkan pemegang saham untuk memilih direktur / komisaris Secara individual?	529, 545, 546, 549
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat?	529, 549, 550, 551, 552
A.2.5	Melakukan risalah RUPST terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan direkam?	549, 550, 551, 552
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk menyetujui, tidak setuju, dan abstain suara untuk semua resolusi / setiap item agenda untuk RUPS terbaru?	551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir?	551, 552
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri RUPS terbaru?	551, 552
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara in absentia?	551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terbaru?	529
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen (scrutineers / inspektur) untuk menghitung dan / atau memvalidasi suara pada RUPS?	550, 551
A.2.12	Apakah perusahaan membuat tersedia untuk umum pada hari kerja berikutnya hasil suara yang diambil selama RUPST / RUPSLB terakhir untuk semua keputusan?	550, 551
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari untuk semua RUPS dan RUPSLB?	550, 551
A.2.14	Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPST/sirkuler dan/ atau pernyataan yang menyertainya?	550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menempatkan item-item pada agenda rapat umum dan/atau untuk meminta rapat umum tunduk pada persentase tertentu?	550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
A.3	**Pasar untuk kontrol perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan.**	
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan hak pemegang saham Persetujuan, apakah Direksi/Komisaris Perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi?	405

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
A.4	**Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi.**	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham untuk terlibat Dengan perusahaan di luar rapat umum?	545 - 547
A.5	**Saham dan hak suara**	
A.5.1	Di mana perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan/ laporan/ bursa efek/ situs web regulator)?	545 - 547
A.6	**Panggilan RUPST**	
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi diajukan pada rapat umum tahunan terbaru Hanya berurusan dengan satu item, yaitu, tidak ada bundling beberapa item ke dalam resolusi yang sama?	550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan tentang RUPS/surat edaran terbaru sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	550, 551
	Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran memiliki rincian sebagai berikut:	
A.6.3	Adalah profil direksi / komisaris (minimal usia, kualifikasi akademik, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di daftar lainnya perusahaan) dalam mencari pemilihan / pemilihan ulang termasuk?	550, 551, 552
A.6.4	Apakah auditor yang mencari penunjukan/penunjukan kembali diidentifikasi dengan jelas?	553, 554, 555, 566, 583, 597, 603, 629, 739 - 742
A.6.5	Apakah dokumen proxy tersedia dengan mudah?	550, 551
A.7	**Perdagangan orang dalam dan transaksi diri yang kasar harus dilarang.**	
A.7.1	Apakah direksi / komisaris wajib melaporkan transaksi mereka di perusahaan saham dalam 3 hari kerja?	175 - 181, 646, 659,
A.8	**Transaksi pihak terkait oleh direktur dan eksekutif kunci.**	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite direksi/komisaris independen untuk meninjau RPT material untuk menentukan apakah mereka demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham?	416 - 422
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/ komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan pada agenda tertentu ketika mereka bertentangan?	N/A
A.8.3	Apakah perusahaan juga memiliki kebijakan pinjaman kepada direksi dan komisaris? Melarang praktik ini atau memastikan bahwa mereka dilakukan dengan basis panjang lengan dan dengan harga pasar?	422
A.9	**Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan**	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa Mereka adil dan panjang lengan?	529, 545, 546, 549
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, adalah Keputusan yang dibuat oleh pemegang saham yang tidak tertarik?	416 - 422
C	**Keberlanjutan dan Ketahanan**	
C.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, dan mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara	950 - 986

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang material bagi Strategi organisasi?	950 - 986
C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah?	950 - 986
C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan yang diakui secara internasional atau standar untuk keberlanjutan (yaitu GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	950 - 986
	Jika sebuah perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus menetapkan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara teratur dalam bentuk yang mudah diakses	
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan di Kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
C.1.6	Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa Laporan / Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
C.2	**Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memungkinkan dialog antara perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang hal-hal keberlanjutan**	
C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan berkumpul Umpan balik tentang hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	Laporan Keberlanjutan
C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan?	Laporan Keberlanjutan
C.3	**Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait iklim**	
	Dewan harus menilai apakah struktur modal perusahaan kompatibel dengan tujuan strategisnya dan selera risiko yang terkait untuk memastikannya tahan terhadap skenario yang berbeda	
C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun bahwa Struktur modal dan utang perusahaan kompatibel dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait?	400 - 402
C.4	**Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.**	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:	
C.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk menangani kesejahteraan pelanggan?	Laporan Keberlanjutan
C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	Laporan Keberlanjutan
C.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
C.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
C.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan?	780
C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi?	980
C.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya pada Lingkungan / Ekonomi dan masalah sosial?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
C.5	**Di mana kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.**	
C.5.1	Apakah perusahaan memberikan detail kontak melalui situs web perusahaan atau Tahunan Laporkan pemangku kepentingan mana (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) yang dapat digunakan untuk menyuarakan keprihatinan dan/ atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	980 - 983
C.6	**Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang.**	
C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
C.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang pelatihan dan program pengembangan untuk karyawannya?	454 - 493
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan hadiah / kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek?	454 - 493
C.7	**Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini.**	
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan pelanggaran hukum dan perilaku tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan	786 - 788
C.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan / orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal / tidak etis dari pembalasan?	786 - 788
D	**Pengungkapan dan Transparansi**	
D.1	**Struktur kepemilikan yang transparan**	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, memegang 5% kepemilikan saham atau lebih?	171 - 181
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial?	171 - 181
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) direksi (komisaris)?	130 – 157, 171 - 181
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior?	130 – 157, 171 - 181
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/induk, entitas anak, asosiasi, usaha patungan dan perusahaan tujuan khusus/kendaraan (SPE)/(SPV)?	184 - 197
D.2	**Kualitas Laporan Tahunan**	
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut:	
D.2.1	Tujuan perusahaan	90 - 91
D.2.2	Indikator kinerja keuangan	28 – 42, 256 - 448
D.2.3	Indikator kinerja non-keuangan	28 – 42, 256 - 448
D.2.4	Kebijakan dividen	411 - 412

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
D.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya dari perusahaan terbuka) dari direktur/ komisaris	130 - 162
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan	
D.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang mengkonfirmasi perusahaan secara penuh Kepatuhan terhadap Kode Tata Kelola Perusahaan dan di mana ada ketidakpatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	511 - 547
D.3	**Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci**	
D.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk non-eksekutif Direksi/Komisaris?	640 - 647
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau lainnya yang diungkapkan kepada publik; dokumen] rincian remunerasi masing-masing direktur/komisaris non-eksekutif?	640 - 647
D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan / praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan gaji lainnya) (yaitu penggunaan jangka pendek dan jangka Panjang insentif dan ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO-nya?	640 - 647
D.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau lainnya yang diungkapkan kepada publik; dokumen] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]?	640 - 647
D.4	**Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT)**	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material?	416 - 421
D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk masing-masing bahan RPT?	416 - 421
D.5	**Direksi dan komisaris berurusan dengan saham perusahaan**	
D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	535, 575, 775, 785
D.6	**Auditor eksternal dan Laporan Auditor**	
	Di mana firma audit yang sama terlibat untuk layanan audit dan non-audit	
D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	217, 739 - 742
D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	217, 739 - 742
D.7	**Media komunikasi**	
	Apakah perusahaan menggunakan mode komunikasi berikut?	
D.7.1	Pelaporan triwulanan	578 - 580, 660 - 674
D.7.2	Situs web perusahaan	90 – 92, 773
D.7.3	Pengarahan analis	43
D.7.4	Pengarahan media/konferensi pers	773
D.8	**Pengarsipan / rilis laporan tahunan / keuangan tepat waktu**	
D.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan / laporan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari dari akhir tahun keuangan?	771
D.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	771
D.8.3	Apakah representasi yang benar dan adil / adil dari keuangan tahunan Pernyataan/laporan yang ditegaskan oleh Direksi/Komisaris dan/atau pejabat Perseroan yang relevan?	1.055 – 1.066

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
D.9	**Situs web perusahaan**	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal-hal berikut:	
D.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulan terakhir)	226, & Website
D.9.2	Materi yang diberikan dalam briefing kepada analis dan media	226, & Website
D.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh	226, & Website
D.9.4	Panggilan RUPST dan/atau RUPSLB	226, & Website
D.9.5	Risalah RUPST dan/atau RUPSLB	226, & Website
D.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, memorandum dan anggaran dasar)	226, & Website
D.10	**Hubungan investor**	
D.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat / kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	729 - 731
E	**Tanggung Jawab Dewan**	
E.1	**Tugas dan Tanggung Jawab Dewan**	
	(Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas)	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan?	564 - 565
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan direksi/komisaris diungkapkan?	568
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas?	565 - 568
	Visi/Misi Perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui?	98 - 103
E.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun?	67 - 85
E.1.6	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	67 - 85
E.2	**Struktur Dewan**	
	Kode Etik atau Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	774 - 779
E.2.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode etik?	774 - 779
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	774 - 779
	Struktur & Komposisi Dewan	
E.2.4	Apakah direktur/komisaris independen membentuk setidaknya 50% dari direksi/komisaris?	576 - 577
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun1 untuk direktur/komisaris independennya? 1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	576 - 577
E.2.6	Apakah perusahaan menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang direktur / komisaris independen / non-eksekutif secara bersamaan?	573 – 575, 651 - 652
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang melayani lebih dari dua dewan perusahaan yang terdaftar di luar grup?	130 - 162
	Komite Nominasi	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	604 - 613

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
E.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen?	604 - 613
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen?	604 - 613
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan / struktur tata kelola / piagam Komite Nominasi?	604 - 613
E.2.12	Apakah dalam rapat kehadiran Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali sepanjang tahun?	604 - 613
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	604 - 613
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	604 - 613
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan Direktur/Komisaris Independen?	604 - 613
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan / struktur tata kelola /piagam Komite Remunerasi?	604 - 613
E.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali sepanjang tahun?	604 - 613
	Komite Audit	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	594 - 603
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	594 - 603
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen?	594 - 603
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	594 - 603
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur / komisaris independen komite Memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	594 - 603
E.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat selama setahun?	594 - 603
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi atas penunjukan, dan pemberhentian auditor eksternal?	594 - 603
E.3	**Proses Dewan**	
	Rapat Dewan dan Kehadiran	
E.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan?	578 - 581
E.3.2	Apakah direksi/komisaris mengadakan rapat minimal enam kali sepanjang tahun?	578 - 581
E.3.3	Apakah masing-masing direksi/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	578 - 581
E.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan dewan?	578 - 581
E.3.5	Apakah direktur / komisaris non-eksekutif perusahaan bertemu secara terpisah setidaknya sekali sepanjang tahun tanpa kehadiran eksekutif?	578 - 581
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah surat-surat dewan untuk rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan?	578 - 581
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	716 - 728
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau kesekretariatan perusahaan praktik dan terus mengikuti perkembangan yang relevan?	716 - 728
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direksi/ komisaris baru?	569, 651

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
E.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/ komisaris baru?	569 – 572, 652 - 655
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terbuka di negara-negara yang undang-undangnya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun2? 2 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	569 – 572, 652 - 655
	Masalah Remunerasi	
E.3.12	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/ atau eksekutif senior?	554
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan kinerja berbasis Remunerasi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penyediaan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	588, 676 - 678
	Internal Audit	
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	732 - 738
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?	732 - 738
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	732 - 738
	Pengawasan Risiko	
E.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka kerja itu?	804 - 849
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan CG mengungkapkan bahwa direksi/ komisaris telah melakukan penelaahan terhadap kontrol material perusahaan (termasuk kontrol operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	804 - 849
E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	804 - 849
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan CG memuat pernyataan dari direksi/ komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/ sistem pengelolaan risiko perusahaan?	743 – 748, 811
E.4	**Anggota Dewan**	
	Ketua Dewan	
E.4.1	Apakah orang yang berbeda mengambil peran sebagai ketua dan CEO?	130 - 157
E.4.2	Apakah ketua merupakan direktur/komisaris independen?	130
E.4.3	Apakah ada direktur mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	130 - 157
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan?	130, 564 - 567
	Direktur Independen Utama	
E.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk seorang Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditentukan?	130
	Keterampilan dan Kompetensi	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi?	130 - 157
E.5	**Kinerja Dewan**	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direksi/komisaris baru?	130 – 157, 578, 655 - 656

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	130 – 157, 578, 655 - 656
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses tentang bagaimana dewan direksi/ komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Pelaksana/Presiden dan manajemen kunci?	169, 470-471, 532, 611-613, 972
E.5.4	Apakah direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden?	486-487, 588, 676-677
	Penilaian Dewan	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian?	588, 676-677
	Penilaian Direktur	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian?	588, 676-677
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian?	588 - 589
	Bonus	
(B)A.	**Hak Pemegang Saham**	
(B) A.1	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham .**	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mengizinkan penggunaan pemungutan suara elektronik yang aman secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?	548 - 551
(B)B.	**Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham**	
(B) B.1	**Panggilan RUPST**	
(B)B.1.1	Apakah perusahaan merilis pemberitahuan RUPST (dengan agenda rinci dan surat edaran penjelasan), seperti yang diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	550 - 551
(B)C.	**Keberlanjutan dan Ketahanan**	
(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	830-833, 959-960
(B).C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/ Sustainability Reporting-nya. Apakah dilakukan assurance secara eksternal?	Laporan Keberlanjutan
(B).C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG pemangku kepentingan?	950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
(B).C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola hal- hal keberlanjutan?	830-833, 950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
(B).C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasandireksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	830-833, 950 – 986 & Laporan Keberlanjutan
(B).C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara direktur eksekutif dan remunerasi manajemen senior dan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	640 - 647
(B).C.1.7	Apakah Whistle Blowing System perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	786 - 788

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
(B)D.	**Pengungkapan dan transparansi**	
(B)D.	**Kualitas Laporan Tahunan**	
(B)D.1.1	Apakah laporan/laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku?	1.055 – 1.060
(B)E.	**Tanggung Jawab Dewan**	
(B) E.1	**Kompetensi dan Keragaman Dewan**	
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan?	130 - 166
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keragaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	636 - 639
(B) E.2	**Struktur Dewan**	
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris independen?	604 - 613
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direksi yang selaras dengan arah strategis perusahaan?	604 - 613
(B) E.3	**Pengangkatan Dewan dan Seleksi Ulang**	
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibentuk oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi / komisaris?	169, 470-471, 532, 611-613, 972
(B) E.4	**Struktur & Komposisi Dewan**	
(B)E.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen membentuk lebih dari 50% dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen?	576 - 577
(B) E.5	**Pengawasan Risiko**	
(B)E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewannya mengidentifikasi risiko utama sehubungan dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan?	499
(B) E.6	**Kinerja Dewan**	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah?	614 - 621
	Penalti	
(P)A.	**Hak Pemegang Saham**	
(P)A.1	**Hak Pemegang Saham Dasar**	
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai menawarkan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham?	545 - 550
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip, tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.	545 - 550
(P)A.2.1	Apakah ada bukti hambatan yang mencegah pemegang saham berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lain?	545 - 550
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	545 - 550
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan item agenda tambahan dan tidak diumumkan ke dalam pemberitahuan RUPST/RUPSLB?	N/A
(P) A.3.2	Apakah Ketua Dewan, Ketua Komite Audit dan CEO menghadiri RUPST terakhir?	550 - 552

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	400 - 402
	Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan:	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham?	545 - 550
(P)A.4.2	Batas Suara?	545 - 550
(P)A.4.3	Hak Suara ganda?	545 - 550
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	400 - 402
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur pegangan silang jelas?	400 – 402, 545 - 550
(P)B	**Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham**	
(P)B.1	Perdagangan orang dalam dan transaksi diri yang kasar harus dilarang.	535, 785
(P)B.1.1	Apakah ada keyakinan perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	N/A-785
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan	400 – 402, 545 - 550
(P)B.2.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait material dalam tiga tahun terakhir?	765-772
(P)B.2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan dengan panjang lengan) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya?	N/A
(P)C	**Peran Pemangku Kepentingan**	
(P)C.1	**Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.**	
(P)C.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan?	N/A-765-772
(P)C.2	Di mana pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.	773
(P)C.2.1	Apakah perusahaan menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang diperlukan untuk peristiwa material?	N/A-765-772
(P)C.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing?	N/A-765-772
(P)D	**Pengungkapan dan Transparansi**	
(P)D.1	Sanksi dari regulator atas laporan keuangan	N/A-765-772
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya?	1.055 – 1.065
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat merugikan" dalam laporan audit eksternalnya?	1.055 – 1.065
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima "disclaimer opinion" dalam laporan audit eksternalnya?	1.055 – 1.065
(P)D.1.4	Apakah perusahaan pada tahun lalu merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi?	1.055 – 1.065
(P)E	**Tanggung Jawab Dewan**	
(P)E.1	**Kepatuhan terhadap aturan daftar, regulasi, dan hukum yang berlaku**	

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Level	Prinsip dan Rekomendasi	Penyajian
(P)E.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan belum mematuhi aturan pencatatan Dan peraturan selain dari aturan pengungkapan selama setahun terakhir?	1.055 – 1.065
(P)E.1.2	Apakah ada contoh di mana direktur/komisaris non-eksekutif telah mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola?	N/A
(P)E.2	**Struktur Dewan**	
(P)E.2.1	Apakah Perseroan memiliki direktur/komisaris independen yang masing-masing menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode1 tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? 1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011	130-157, 563-564, 638, 648-649
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar deskripsi semua direktur mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif?	130-157, 563-564, 638, 648-649
(P)E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris yang melayani di total lebih dari lima dewan direksi perusahaan publik?	130-157, 563-564, 638, 648-649
(P)E.3	**Audit Eksternal**	
(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)?	130-157, 563-564, 638, 648-649
(P)E.4	**Struktur dan Komposisi Dewan**	
(P)E.4.1	Apakah ketua telah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?	130-157, 563-564, 638, 648-649
(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, pembagian kinerja atau bonus?	554, 587-588, 677-678
	LAMPIRAN	
	Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:	
A.2.1	Amandemen konstitusi perusahaan?	545 - 550
A.2.2	Otorisasi saham tambahan?	545 - 550
A.2.3	Pengalihan semua atau secara substansial semua aset, yang pada dasarnya menghasilkan penjualan perusahaan?	N/A
B.1.1	Apakah saham biasa atau biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham?	545 - 550
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia untuk pasar?	554, 587-588, 677-678
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan direksi/komisaris untuk mengungkapkan kepentingannya dalam transaksi dan benturan kepentingan lainnya?	416-421
D.2.6	Rincian kehadiran masing-masing direktur/komisaris dalam seluruh rapat direksi/komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun berjalan	578-581, 660-674

KRITERIA **OJK**

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Umum		
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.		
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.		
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	
	1. Sampul muka;	
	2. Samping;	
	3. Sampul belakang; dan	
	4. Setiap halaman.	
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan.		
Kilas Kinerja		
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:	30
	1. Pendapatan/penjualan;	26-31
	2. Laba bruto;	26-31
	3. Laba (rugi);	26-31
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	26-31
	5. Total laba (rugi) komprehensif;	26-31
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;	26-31
	7. Laba (rugi) per saham;	26-31
	8. Jumlah aset;	26-31
	9. Jumlah liabilitas;	26-31
	10. Jumlah ekuitas;	26-31
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	26-31
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	26-31
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	26-31
	14. Rasio lancar;	26-31
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	26-31
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset;	26-31
	17. Rasio KPMM;	26-31

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	18. Rasio Return on Asset (ROA);	26-31
	19. Rasio Return on Equity (ROE);	26-31
	20. Aset produktif	26-31
	21. Rasio Non-performing Loans (NPL);	26-31
	22. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);	26-31
	23. Cost to Income Ratio (CIR);	26-31
	24. Rasio Net Interest Margin (NIM);	26-31
	25. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);	26-31
	26. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM);	26-31
	27. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan	26-31
	28. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	26-31
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	34-39
	a. Jumlah saham yang beredar;	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	
	d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	40
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	
	b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	
	bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	
	c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	
	d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	
	e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	40

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	40
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat:	
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding);	41
	2. Tingkat bunga/imbalan;	
	3. Tanggal jatuh tempo; dan	
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021.	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi,agar diungkapkan.	
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	52-64
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	57-58
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	58-60
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	63
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	69-83

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	69-83
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	
	f. Struktur organisasi;	
	g. Aktivitas utama;	
	h. Teknologi informasi;	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar;	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor;	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	69-83
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	77-78
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	80
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut:	
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	86-87
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	
	3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	
	4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Profil Perusahaan		
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	90-91
	1. Alamat;	
	2. Nomor telepon;	
	3. Alamat surat elektronik; dan	
	4. Alamat situs web;	
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	94-95
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain:	
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	104
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:	
	1. Visi perusahaan;	100-102
	2. Misi perusahaan;	
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	
	4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan.	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	126
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	128
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	92
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	1. Nama dan jabatan;	130-142
	2. Foto terbaru;	
	3. Usia;	
	4. Kewarganegaraan;	
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	130-142
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	
	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat	
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	143-157
	2. Foto terbaru;	
	3. Usia;	
	4. Kewarganegaraan;	
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/ kontrak) dalam tahun buku;	171
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	171
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	174
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik.	
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	
	4. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
	a. Kepemilikan institusi lokal;	
	b. Kepemilikan institusi asing;	
	c. Kepemilikan individu lokal; dan	
	d. Kepemilikan individu asing;	
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	171
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama.	184
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank		
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	182

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Kronologi pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	198
Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/ atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	211
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	217
	1. Nama dan alamat;	
	2. Periode penugasan;	
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	
	4. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.	
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	218
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/ atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain:	220
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:	184-197
	1. Nama dan alamat entitas anak; dan	
	2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang:	226
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	
	2. Isi Kode Etik;	
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPSdiumumkan;	
	4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	
	5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	
	6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal.	
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	351
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	
	c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	
	d. Profitabilitas	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:	
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	370-381
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	381-388
	3. Ekuitas;	389
	4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan;	390-394
	5. Arus kas;	395
	6. Suku bunga dasar kredit;	439-441
	7. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.	448-453

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang:	
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan	396-398
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	399
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Penjelasan atas:	
	1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	400-403
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan	400-403
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen	400-403
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang:	
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	403
	2. Tujuan dari ikatan tersebut;	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang:	404
	1. Jenis investasi barang modal;	
	2. Tujuan investasi barang modal; dan	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	408-410
	1. Pendapatan/penjualan;	
	2. Laba (rugi);	
	3. Struktur modal (capital structure);	
	4. Pemasaran;	
	5. Pengembangan SDM;	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	
	1. Pendapatan/penjualan;	
	2. Laba (rugi);	
	3. Struktur modal (capital structure);	
	4. Kebijakan dividen;	
	5. Pemasaran;	
	6. Pengembangan SDM;	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	410
	Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.	
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	282
Uraian tentang aspek pemasaran	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	284
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	411-412
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas);	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:	
	1. Total perolehan dana;	415
	2. Rencana penggunaan dana;	
	3. Rincian penggunaan dana;	
	4. Saldo dana; dan	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai:	
	1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	416-421
	2. Nama pihak yang melakukan transaksi;	
	3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada);	
	4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	
	5. Pemenuhan ketentuan terkait;	
	6. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	
	a. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan	
	b. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle);	
	7. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	
	8. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	9. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain:	
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	423-433
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain:	
	1. Perubahan kebijakan akuntansi;	434-435
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai:	
	1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	437-438
	2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	
	3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.	
	Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	
Tata Kelola Perusahaan		
RUPS	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	553-562
	a. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	
	b. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Direksi	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	230, 552, 649,651, 655, 676-678
	Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	
	Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	
	a. prosedur penilaian kinerja; dan	
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Dewan Komisaris	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	227-229, 564-572, 578, 587, 588
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS.	
	Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
	4. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	
	a. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	
	b. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
	a. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	
	c. pihak yang melakukan penilaian; dan	
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	
	a. prosedur penilaian kinerja; dan	
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain:	
	1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	578-579
	2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	578-579
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Paling sedikit memuat:	
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	640-644
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	640-644
	a. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	640-644
	b. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	640-644

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	c. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	644-647
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum		644-647
Komite audit	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	131, 132, 138, 140, 141, 594-596
	2. Usia;	
	3. Kewarganegaraan;	
	4. Riwayat pendidikan;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit;	595
	7. Pernyataan independensi komite audit;	600
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	231-233
	9. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	601
	10. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	602
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik	Paling sedikit memuat:	
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	131, 132, 142, 134, 137
	2. Usia;	
	3. Kewarganegaraan;	
	4. Riwayat pendidikan;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite;	605
	7. Pernyataan independensi komite;	608
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	234-235
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab;	606
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);	606

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	609-610
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	610
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	
	1. Alasan tidak dibentuknya komite; dan	N/R
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris	Paling sedikit memuat:	131, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 615, 623-628
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	2. Usia;	
	3. Kewarganegaraan;	
	4. Riwayat pendidikan;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite;	623
	7. Pernyataan independensi komite;	631
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	244-253
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab;	616
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	616
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	618-619
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	620, 635

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Sekretaris perusahaan	1. Nama;	716
	2. Domisili;	
	3. Riwayat jabatan, meliputi:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	
	c. Riwayat pendidikan;	
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	243
	e. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	721
Unit Audit Internal	1. Nama kepala unit audit internal;	732
	2. Riwayat jabatan, meliputi:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;	
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	735-736
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	244
	5. Struktur dan kedudukan unit audit internal;	733
	6. Uraian tugas dan tanggung jawab;	734
	7. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan	734
	8. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit;	737
Akuntan Publik	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	739-742
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik,	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	743-748
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	804-806
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	804-806
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	835
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	835
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada),	1. Pokok perkara/gugatan;	765-772
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	765-772
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik;	765
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada)		771
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.		773
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik	1. Pokok-pokok kode etik;	774-789

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
	2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	774-789
	3. Penyebarluasan kode etik;	774-789
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	774-789
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	774-789
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/msop) dan/ atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/MSOP) dan/ atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ESOP),	Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	198, 413-414
	1. Jumlah saham dan/atau opsi;	
	2. Jangka waktu pelaksanaan;	
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi	1. Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan	131-142, 144-156, 175, 659
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran;	787
	2. Perlindungan bagi pelapor;	
	3. Penanganan pengaduan;	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan	
	b. Tindak lanjut pengaduan;	
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), Fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	780
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.	
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		636-639
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	529-539
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada).	
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2023 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai:	
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian	523-528
	2. Pihak yang melakukan penilaian	
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria	
	4. Rekomendasi hasil penilaian	
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Informasi Keuangan		
Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang TanggungJawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	LK halaman surat pernyataan Direksi
Opini auditor independen atas laporan keuangan		LK halaman opini
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang:	LK halaman opini
	1. Nama dan tanda tangan;	
	2. Tanggal Laporan Audit; dan	
	3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	LK halaman 1054-1420
	1. Laporan posisi keuangan;	
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	
	3. Laporan perubahan ekuitas;	
	4. Laporan arus kas;	
	5. Catatan atas laporan keuangan;	
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos- pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	LK halaman 1076-1078
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	LK halaman 1081-1084
	1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	
	2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	
	3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	
	4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya:	LK halaman 1114-1203
	1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	
	2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	
	3. Pajak penghasilan;	
	4. Imbalan kerja; dan	
	5. Instrumen Keuangan.	
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	LK halaman 1407-1417
	1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	
	3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	

KRITERIA OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK halaman 1327-1336
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;	
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	
	5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK halaman 1070, 1283-1291, 1500
	1. Metode penyusutan yang digunakan;	
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya;	
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	
	4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangandan reklasifikasi.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK halaman 1418-1422
	2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	
	3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	
	4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	

Kriteria	Penjelasan	Halaman
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan:	LK halaman 1118-1159
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	
	4. Kebijakan manajemen risiko; dan	
	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	
Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	LK halaman surat pernyataan Direksi
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	

MSCI **INDEKS**

Aspek ESG	Masalah Utama	Respon Bank Mandiri	Halaman
Lingkungan	Kebijakan Manajemen Risiko ESG	Kebijakan Manajemen Risiko ESG Bank Mandiri secara konsisten menerapkan pengelolaan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola sesuai prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usaha. Bank Mandiri terus mengintegrasikan aspek-aspek ESG untuk meningkatkan manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi risiko iklim dan sosial saat ini. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan pengembangan prosedur manajemen risiko ESG sebagaimana diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko ESG.	Hal. 127 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Kebijakan kredit terkait pertanian	Kebijakan Kredit untuk Sektor Perkebunan Kelapa Sawit & CPO Dalam mengelola risiko ESG di sektor pertanian, khususnya perkebunan Kelapa Sawit & CPO, Bank Mandiri mewajibkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dipenuhi, atau sekurang-kurangnya, bukti pendaftaran ISPO dari Lembaga Sertifikasi ISPO. Selain itu, Bank Mandiri memperhatikan kebijakan lingkungan dan ketenagakerjaan debitur, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS), prosedur pencegahan dan penanganan kebakaran lahan yang sesuai dengan standar yang berlaku, kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), yang mencakup kebijakan terkait pembukaan lahan, konservasi kawasan High Conservation Value (HCV), dan instalasi Waste Treatment Plant (WWTP).	Hal. 121 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Kebijakan kredit terkait keanekaragaman hayati	Dalam mengelola risiko ESG di sektor Biodiversitas, khususnya di sektor Hutan Tanaman Industri, Bank Mandiri mewajibkan penyampaian dokumen terkait Izin Pengelolaan Hutan Tanaman Industri, seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Hasil Hutan Bukan Kayu, serta Rencana Kerja Usaha yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Hal. 123 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Kebijakan kredit terkait penggunaan energi	Dalam mengelola risiko ESG di sektor Energi dan Penggunaan Energi, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, Bank Mandiri menilai jangka waktu pembiayaan tersebut selaras dengan timeline pemerintah terkait transisi energi dan memperhatikan kebijakan debitur terkait lingkungan (emisi karbon, abu batubara, pengelolaan air dan limbah) serta kebijakan ketenagakerjaan.	Hal. 121 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Kebijakan kredit terkait pertambangan	Di sektor Pertambangan, Bank Mandiri mewajibkan debiturnya untuk menerapkan Good Mining Practices sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Rencana Kerja &; Anggaran Tahunan yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan/atau dokumen terkait lainnya mengenai Good Mining Practices.	Hal. 121 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Kebijakan kredit terkait minyak dan gas	Dalam mengelola risiko ESG di sektor Migas, khususnya di sektor usaha eksploitasi hulu migas, Bank Mandiri mewajibkan pemenuhan dokumen yang menjelaskan status hukum penggunaan lahan di wilayah non-sengketa, Perjanjian Kontrak dan kepatuhan terhadap persyaratan produksi sesuai peraturan perundang-undangan terkait.	Hal. 122 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Keterlibatan Risiko Kredit Grup dalam due dilligence ESG	Bank Mandiri mengidentifikasi risiko ESG dengan melibatkan kelompok risiko kredit dalam proses uji tuntas, mulai dari menentukan nasabah yang ditargetkan, analisis kredit, dan persetujuan hingga pemantauan, sebagaimana tercermin dalam tabel alur proses pinjaman.	Hal. 119-129 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Pemicu uji tuntas ESG dan proses eskalasi risiko didefinisikan dengan jelas	Keterlibatan kelompok risiko kredit dalam proses uji tuntas ESG juga tercermin dalam mekanisme eskalasi dalam proses persetujuan dan pemantauan kredit untuk debitur skala besar dan berisiko tinggi.	Hal.119-129 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Perusahaan melakukan analisis risiko terkait iklim	Ke depan, Bank Mandiri akan berupaya mengukur dampak risiko iklim secara lebih komprehensif, seperti dengan melakukan analisis skenario iklim dan menguji portofolio kredit nasabah terhadap risiko iklim, termasuk transisi dan risiko fisik.	Hal. 278 Laporan Keberlanjutan

MSCI INDEKS

Aspek ESG	Masalah Utama	Respon Bank Mandiri	Halaman
Lingkungan	Pengawasan manajemen risiko ESG dalam kegiatan pembiayaan	Untuk lebih meningkatkan efektivitas inisiatif ESG dan manajemen risiko iklim, Bank Mandiri telah membentuk Grup Environmental, Social &; Governance (ESG) dengan pengawasan langsung terhadap Wakil Direktur Utama. ESG Group berfungsi sebagai menara kontrol untuk implementasi ESG Bank Mandiri, mengelola kerangka kerja, menyelaraskan kebijakan ESG dan perubahan iklim yang berlaku, mengelola Portofolio Berkelanjutan, mengembangkan strategi perbankan &; operasi yang bertanggung jawab, dan mengkomunikasikan/melaporkan kepada pihak eksternal dan internal. Update implementasi ESG, termasuk mitigasi risiko iklim dilaporkan secara berkala kepada komite tingkat Dewan melalui rapat Komite Manajemen Risiko dan Kebijakan (RMPC) dan Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko (RMC)	Hal 119-129, 278 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Bukti keterlibatan tingkat dewan dalam risiko terkait iklim		
Lingkungan	Sistem manajemen formal untuk menilai risiko ESG dalam kegiatan pembiayaan	Direksi bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan dan pemenuhan target ESG melalui forum Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) sesuai dengan tugas & wewenang yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor Kep.Dir/009/2021 tentang Komite Manajemen Risiko & Kebijakan Kredit.	Hal. 278 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Beberapa bukti pembiayaan hijau	Sementara itu, dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sesuai Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 51/2017 sebesar Rp228,7 Tn atau 24,5% dari total kredit, atau meningkat 11,6% dibandingkan tahun 2021.	Hal. 107-109 Laporan Keberlanjutan
Lingkungan	Keterlibatan dalam obligasi hijau	Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan mencapai target keberlanjutan nasional dengan berpartisipasi aktif sebagai pemasar produk investasi berbasis ESG, seperti Green Sukuk dan Green Bond.	Hal. 117 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Pelatihan Karyawan tentang Perlindungan Keuangan Konsumen	Bank Mandiri memberikan pelatihan rutin kepada sekitar 17.000 karyawan front-line sejak tahun 2000 mengenai topik-topik yang berkaitan dengan produk dan layanan Mandiri, penanganan keluhan nasabah yang efektif, dan tema-tema lainnya setiap bulan, untuk meningkatkan pengetahuan di antara seluruh karyawan front-line yang berhubungan langsung dengan nasabah. Ini termasuk post-test untuk memastikan bahwa materi yang disajikan diterima dan dipahami dengan baik.	Hal. 99 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Kebijakan Penagihan Utang	Selain memiliki kebijakan perlindungan keuangan konsumen, Bank Mandiri juga memiliki kebijakan penagihan hutang yang memuat pemenuhan hak-hak debitur sebagaimana tertuang dalam: 1. Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri dengan perubahan terakhir ditandatangani oleh Direksi dan berlaku sejak 7 Maret 2022. 2. Standar Prosedur Operasional Credit Collection & Recovery sebagaimana diubah terakhir pada tahun 2022. 3. Peraturan internal lain yang terkait Dalam peraturan tersebut, secara umum diatur tata cara penagihan utang dengan tetap melindungi kenyamanan debitur sebagai konsumen.	Hal. 155 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Ulasan Produk/Layanan	Komite Tingkat Direksi Bank Mandiri berkomitmen untuk memastikan kualitas dan integritas produk dan layanannya. Untuk tujuan ini, Komite secara teratur melakukan peninjauan, pemantauan dan evaluasi terhadap semua penawaran keuangan, termasuk pengembangan produk baru. Selain itu, Bank Mandiri mengikuti peraturan dan pedoman yang ketat, meminta persetujuan dari otoritas terkait (OJK, Bapepam, dll) sebelum memperkenalkan produk dan layanan keuangan baru.	Hal. 150-151 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Kebijakan/Prosedur Periklanan yang Adil	Bank Mandiri, sebagai mitra keuangan pilihan bagi nasabah, berupaya untuk menawarkan produk dan layanan yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, bank memastikan bahwa semua karyawan, terutama yang berinteraksi langsung dengan nasabah, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tetap mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah.	Hal. 152-153 Laporan Keberlanjutan

MSCI INDEKS

Aspek ESG	Masalah Utama	Respon Bank Mandiri	Halaman
Sosial	Proses Penanganan Keluhan	Bank Mandiri menempatkan prioritas tinggi pada kepuasan nasabah dan menyediakan mekanisme bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan atau mengungkapkan kekhawatiran. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank telah membentuk unit layanan pelanggan khusus, Customer Care Group, untuk menangani dan menyelesaikan semua keluhan pelanggan secara tepat waktu dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Bank Mandiri menyediakan berbagai platform yang dapat diakses oleh nasabah untuk menyampaikan pengaduan	Hal. 157-159 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Opsi Modifikasi Pinjaman	Dalam alur proses pemberian kredit Tahap Loan Monitoring, melihat kualitas kredit debitur eksisting melalui berbagai cara salah satunya mekanisme Watchlist, mekanisme ini digunakan sebagai Early Warning Signal dalam kualitas kredit yang diberikan, yang menganalisa 3 aspek yaitu prospek bisnis debitur ke depan, kinerja keuangan, serta repayment history. Apabila berdasarkan monitoring tersebut terdapat indikasi adanya penurunan kualitas, maka Bank Mandiri akan melakukan penyelamatan kredit bermasalah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan. Penyelamatan kredit dapat berupa Restrukturisasi, dimana Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain, melalui: 1. Penurunan suku bunga kredit; 2. Perpanjangan jangka waktu kredit; 3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;4. Pengurangan tunggakan pokok kredit; 5. Penambahan fasilitas kredit; dan/ atau 6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara,	Hal. 156 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Inisiatif Pendidikan Keuangan dan Penjangkauan Pemangku Kepentingan	Bank Mandiri menyadari peran penting literasi keuangan dalam mempromosikan kekayaan finansial individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Individu dengan keterampilan literasi keuangan yang kuat lebih siap untuk mengelola keuangan mereka dan membuat keputusan yang terinformasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, literasi keuangan dapat dilihat sebagai bentuk investasi di masyarakat. Sejalan dengan keyakinan tersebut, Bank Mandiri secara aktif mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program yang bermitra dengan institusi pendidikan	Hal. 217-221 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Pengawasan Keluhan	Laporan keluhan pelanggan dipantau langsung oleh Direktur Operasi setiap bulan dan dilaporkan kepada regulator.	Hal. 157 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Lingkup dukungan untuk program gelar dan sertifikasi	Selain itu, Bank Mandiri juga mempersiapkan karyawan milenialnya untuk menjadi pemimpin masa depan dengan memberikan beasiswa kepada universitas-universitas terbaik di dunia. Ini termasuk IESE, Yale SOM, ESADE, New York University, Haas Berkeley, Carnegie Mellon, Virginia Darden, dll. Setiap tahunnya, Bank Mandiri mensponsori 25-30 karyawan untuk belajar di luar negeri. Sebagai talenta terbaik, karyawan ini didorong untuk memilih jurusan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Jurusan ini termasuk bisnis digital, keuangan lanjutan, dan ilmu data.	Hal. 170-178 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Tingkat pelaporan keluhan atau prosedur eskalasi	Penerapan tata kelola keberlanjutan yang baik tidak terlepas dari dukungan stakeholder yang memberikan masukan untuk menjaga integritas Bank Mandiri. Pemangku kepentingan dan pihak eksternal dapat menyampaikan keluhan atau laporan melalui sistem whistleblowing yang disebut Letter to CEO (LTC). Sistem ini mendorong transparansi dan mencegah potensi pelanggaran kode etik dan kecurangan, seperti indikasi kecurangan, kecurangan, penggelapan, kebocoran informasi, kejahatan perbankan, korupsi, dan tindakan penipuan lainnya	Hal. 283 Laporan Keberlanjutan

MSCI INDEKS

Aspek ESG	Masalah Utama	Respon Bank Mandiri	Halaman
Sosial	Survei keterlibatan untuk memantau kepuasan karyawan	Bank melakukan survei engagement kepada 18.466 karyawan selama periode Desember 2022, dengan skor 88,06%. Survei dilakukan oleh konsultan independen dengan pengukuran organisasi, kepemimpinan, pengembangan karir, hubungan dan komunikasi, manfaat kompensasi, job fit, kontribusi/kesempatan untuk memberikan yang terbaik dan kelompok kerja.	Hal. 182 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Strategi pengembangan saluran bakat formal (memperkirakan kebutuhan perekrutan, secara aktif mengembangkan kumpulan bakat baru)	Employee Value Proposition (EVP) telah diwujudkan melalui pengelolaan semua fase siklus kerja yang dituangkan dalam Employee Life Cycle (8A), mulai dari desain awal struktur dan kapasitas organisasi, peramalan kebutuhan perekrutan, pembentukan, dan pengembangan talent pool, hingga program pensiun	Hal. 170-178 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Program magang/magang pascasarjana	Bank Mandiri mengembangkan Officer Development Program (ODP) bagi fresh graduate yang akan menjadi karyawan Bank Mandiri. Selain itu, terdapat Staff Development Program (SDP) yang merupakan program pelatihan bagi karyawan yang akan dipromosikan ke posisi pimpinan dan manajerial di Bank Mandiri.	Hal. 170-178 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Bermitra dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan atau memberikan program pelatihan bersama untuk staf	Bank Mandiri bekerja sama dengan Institusi Pendidikan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Modul Pembelajaran Kepemimpinan bagi karyawan seperti National University of Singapore, IMD, IESE, Yale SOM, ESADE, New York University, Haas Berkeley, Carnegie Mellon, Virginia Darden, dan lain-lain. Bank Mandiri berpartisipasi aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Bidang Pengelolaan Inovasi (BLMI) sebagai pembicara.	Hal. 170-178 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Ruang lingkup rencana kepemilikan saham karyawan (ESOP) atau rencana pembelian saham karyawan (ESPP)	Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29 Mei 2003 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 142 tanggal 29 Mei 2003, pemegang saham Bank Mandiri juga menyetujui rencana kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi melalui Program Penjatahan Saham/Employee Stock Allocation (ESA) dan Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen/Management Stock Option Plan (MSOP). Program ESA terdiri dari program Pemberian Saham Bonus (Share Plan Bonus) dan program Penjatahan Saham dengan Diskon (Share Purchase at Discount). Sedangkan program MSOP ditujukan untuk Direksi dan pegawai pimpinan pada tingkatan (grade) atau kriteria tertentu.	Hal. 187 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Tunjangan non-gaji dan keseimbangan kerja/hidup	Manfaat mencakup seluruh karyawan baik Karyawan Tetap maupun karyawan kontraktor	Hal. 255 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Penilaian kinerja reguler dan proses umpan balik	Ikhtisar kinerja merupakan bagian penting dari strategi Departemen Sumber Daya Manusia karena memberikan gambaran umum tentang kinerja dan pencapaian karyawan, yang berguna untuk promosi, rotasi, atau penurunan pangkat karyawan. Proses & Penjelasan Performance Appraisal Feedback Manajemen kinerja di Bank Mandiri tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada penerapan karakteristik budaya dan kepemimpinan pada pengambilan keputusan dan interaksi di tempat kerja, termasuk melalui pelaksanaan survei 360 derajat.	Hal. 181 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Program pelatihan pengembangan khusus pekerjaan	1. Pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan: CISM (Certified Information Security Manager), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27001 Lead Auditor, CISA (Certified Information Systems Auditor), CEH (Certified Ethical Hacker), CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator), serta pelatihan berupa product based knowledge untuk memperdalam keahliannya sistem keamanan Bank Produk. 2. Pelatihan untuk vendor/kontraktor: Pelatihan internal untuk karyawan vendor yang bekerja untuk dukungan operasional.	Hal. 135, 136, 217 Laporan Keberlanjutan

MSCI INDEKS

Aspek ESG	Masalah Utama	Respon Bank Mandiri	Halaman
Sosial	Bukti pelatihan manajerial/ pengembangan kepemimpinan	Terkait implementasi program, Bank Mandiri telah melaksanakan berbagai program kepemimpinan di berbagai tingkatan, mulai dari Officer, Team Leader, Department Head hingga Group Head di tahun 2022	Hal. 174-179 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Tingkat keterlibatan dalam Keuangan Mikro/Asuransi Mikro	Selain memberikan pembiayaan bagi UMKM, Bank Mandiri memberikan pembiayaan bagi korporasi yang memiliki manfaat sosial	Hal. 196-197 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Inovasi dalam Saluran Distribusi Mobile/Online	Aplikasi Livin' dirancang untuk segmen ritel sebagai transformasi digital kami. Livin berfungsi sebagai platform untuk menjangkau berbagai pelanggan ritel, terutama pada populasi yang kurang terlayani di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan. Pelanggan dapat mendaftar melalui aplikasi Livin, yang dilengkapi dengan fitur liveness detection dan face recognition yang terhubung langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Livin juga memiliki banyak fitur lain seperti smart top-up, tarik tunai tanpa kartu, layanan hiburan, QR, dan investasi.	Hal. 198-202 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Jangkauan Points Service (Cabang, ATM, Self-Service, dll)	Layanan digital Bank Mandiri dilengkapi dengan berbagai sarana dan peralatan lain untuk memudahkan nasabah, antara lain: 1. 13.027 unit ATM yang terhubung dengan jaringan domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan jaringan internasional 2. 5,1 juta Merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 3. 190 ribu Merchant Electronic Data Capture (EDC) 4. E-Commerce tersebar di seluruh Indonesia 5. Jaringan SMS e-banking 6. Call Center 14000 7. MITA sebagai layanan chat banking.	Hal. 198-202 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Inovasi dalam Saluran Distribusi Tanpa Cabang Alternatif Lainnya (misalnya koresponden, kemitraan dengan toko ritel / kantor pos)	Mandiri Branchless Agent tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan populasi rendah seperti di pedesaan. Agen Mandiri juga menjadi tangan kanan kami untuk melayani penduduk yang kurang terlayani, yang meliputi pekerja berpenghasilan rendah, pekerja tidak berdokumen, nasabah tanpa jaminan yang cukup, dan lain-lain. Pada tahun laporan, Bank Mandiri membantu distribusi produk perbankan ke seluruh pelosok Indonesia dan memberikan total kesempatan kerja kepada 156.191 Agen Mandiri yang terdiri dari 156.949 individu dan 142 badan hukum. Agen Mandiri berhasil menyediakan rekening dan dana tambahan, sebanyak 2.287.036 rekening dengan volume dana Rp 12,4 Triliun per 31 Desember 2022.	Hal. 210-211 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Ruang lingkup kebijakan perlindungan data perusahaan yang tersedia untuk umum	Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan privasi dan keamanan data (termasuk entitas anak) dapat diakses melalui Bank Mandiri dan situs resmi entitas anak.	Hal. 146-149 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Hak yang diberikan kepada individu terkait kontrol data mereka	Bank Mandiri memastikan hak nasabah untuk melakukan pembetulan dan kontrol data pribadi dapat dilakukan di seluruh cabang atau melalui call center 14000	
Sosial	Kebijakan Keamanan Informasi dan frekuensi audit Sistem	Pada tahun 2022, audit eksternal dilakukan di bidang keamanan, ketahanan sistem, dan privasi data oleh auditor independen bereputasi tinggi. Auditor ini mematuhi praktik terbaik industri dalam pelaksanaan audit. Ruang lingkup audit terdiri dari keamanan informasi yang selaras dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, integritas, otentikasi dua faktor, non-penolakan, dan ketersediaan, serta aspek privasi data dan manajemen penipuan. Untuk memastikan tingkat jaminan yang berkelanjutan, pelaksanaan audit TI oleh pihak eksternal dilakukan setiap tahun.	Hal. 144 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Badan eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab untuk: Privasi dan keamanan Data	Bank Mandiri menunjukkan komitmennya untuk memastikan keamanan informasi dengan secara aktif melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam upaya pemantauan berkala melalui penggunaan komite khusus, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Audit Dewan, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite ini secara teratur membahas dan meninjau topik-topik penting yang terkait dengan keamanan informasi, seperti pelaporan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), penerapan mekanisme pertahanan berlapis-lapis, dan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan di seluruh grup.	Hal. 133, 141-142 Laporan Keberlanjutan
Sosial	Lingkup pelatihan karyawan tentang keamanan data dan/atau risiko & prosedur terkait privasi	Bank Mandiri memberikan pelatihan & sertifikasi untuk mengembangkan soft skill dan hard skill secara berkala (minimal 1 tahun sekali) bagi seluruh karyawan, baik karyawan maupun vendor/kontraktor.	Hal. 135-136 Laporan Keberlanjutan

MSCI INDEKS

Aspek ESG	Masalah Utama	Respon Bank Mandiri	Halaman
Tata Kelola	Pengawasan untuk Masalah Etika	Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, yang berfungsi sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di lingkungan Unit Kerja Kepatuhan, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam KEP. DIR/64/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Unit ini bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pelaporan gratifikasi, yang diawasi langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, bank diwajibkan untuk memberikan laporan triwulanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari komitmennya untuk memberantas korupsi.	Hal. 285 Laporan Keberlanjutan
Tata Kelola	Kebijakan Suap dan Anti Korupsi	Bank Mandiri telah menerapkan 4 Pilar Anti-Fraud Strategy (SAF) yaitu Pencegahan; Deteksi; investigasi, pelaporan, sanksi, dan proses hukum; Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.	Hal. 284 Laporan Keberlanjutan
Tata Kelola	Audit Reguler Standar Etika	Selanjutnya, Bank Mandiri telah membentuk Tim Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sesuai dengan Catatan No. IAU. WCA/CA.242/2022 dari Tim Audit Anti Penyuapan (SMAP), tanggal 15 Agustus 2022, dan ditujukan kepada kelompok yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia, Direktur Treasury dan Perbankan Internasional, dan Audit Internal SEVP.	Hal. 285 Laporan Keberlanjutan
Tata Kelola	Perlindungan Pelapor	Whistleblowing system Bank Mandiri dikelola oleh konsultan pihak ketiga yang independen untuk memastikan independensi dengan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan WBS-LTC; 2. Memberikan rasa aman bagi pelapor; 3. Mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan; 4. Memastikan Independen dan profesionalisme; 5. Mengizinkan pelapor untuk memantau status tindak lanjut laporan WBS-LTC.	Hal. 288-289 Laporan Keberlanjutan
Tata Kelola	Pelatihan Karyawan tentang Standar Etika	Audit dilakukan pada Agustus 2022 untuk menilai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berbasis Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016	Hal. 282, 287 Laporan Keberlanjutan
Tata Kelola	Kebijakan Anti Korupsi untuk Pemasok	Audit dilakukan pada Agustus 2022 untuk menilai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang didasarkan pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Audit SMAP ini dilakukan secara berkala	Hal. 286-287 Laporan Keberlanjutan
Tata Kelola	Kebijakan Terkait Anti Pencucian Uang	Di tengah era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin kompleks melintasi batas-batas yurisdiksi, Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan akan menghadapi konsekuensi kemungkinan dieksploitasi oleh pencuci uang, pemodal terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Hal ini disebabkan, antara lain, ketersediaan berbagai opsi transaksi, baik dari segi produk maupun saluran pengiriman, yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat untuk melakukan kegiatan ilegal mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Mandiri secara konsisten mengembangkan langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko tersebut melalui penerapan Risk-Based Approach (RBA) Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Program Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU CTF PFPWMD) dalam kegiatan operasional dan bisnis Bank.	Hal. 290 Laporan Keberlanjutan

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
31 DECEMBER 2023 AND 2022

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577
www.bankmandiri.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Darmawan Junaidi
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
   Alamat Domisili : Jl. Mini III RT 003/RW 003 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
   Nomor Telepon : 021 - 5245577
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Sigit Prastowo
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
   Alamat Domisili : Jl. Baitis Salmah I No. 16A RT 002/RW 007 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan
   Nomor Telepon : 021 - 5245600
   Jabatan : Direktur

dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. AND SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1. *Name* : *Darmawan Junaidi*
   Office address : *Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190*
   Residential Address : *Jl. Mini III RT 003/ RW 003 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur*
   Telephone : *021 - 5245577*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Sigit Prastowo*
   Office Address : *Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190*
   Residential Address : *Jl. Baitis Salmah I No. 16A RT 002/RW 007 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan*
   Telephone : *021 - 5245600*
   Title : *Director*

in the above positions acted as and on behalf of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") and Subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of the Bank and subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts;*
4. *We are responsible for the Bank and Subsidiaries' internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 31 Januari/*January* 2024

Direktur Utama/*President Director*

Darmawan Junaidi

Direktur/*Director*

Sigit Prastowo

METERAI TEMPEL B3AKX388197986

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audits of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00027/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/I/2024

pwc

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. **Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah**

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 12, Kredit yang Diberikan dan Piutang/Pembiayaan Syariah, atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah adalah sebesar Rp 53.098.619 juta dan ditentukan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku.

   Kami berfokus pada area ini karena saldo cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah mewakili 95% dari total cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan Grup, dimana nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, Grup mengadopsi model kompleks yang menggunakan sejumlah parameter, mengandalkan input data internal dan eksternal, melibatkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan asumsi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

   Kredit yang diberikan

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.c.h, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan, atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan ditentukan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 – Instrumen Keuangan ("PSAK 71").

   Untuk kredit yang tidak mengalami penurunan nilai dan kredit yang mengalami penurunan nilai yang secara individual tidak dianggap signifikan, Grup menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko yang memasukan parameter kunci, termasuk *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), *Exposure at Default* ("EAD"), dengan memperhitungkan informasi perkiraan masa depan dan data eksternal lainnya. Untuk kredit yang diberikan yang secara individual dianggap signifikan, Grup menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian yang diperoleh dari kredit yang diberikan.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Allowance for impairment losses on loans and sharia receivables/financing***

   As described in Note 12, Loans and Sharia Receivable/Financing, to the consolidated financial statements, as at 31 December 2023, the allowance for impairment losses on loans and sharia receivables/financing was Rp 53,098,619 million and was determined based on the applicable Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS").

   We focused on this area because the balance of allowance for impairment losses on loans and sharia receivables/financing represented 95% of the total allowance for impairment losses for the Group's financial assets, which was significant to the Group's consolidated financial statements. Furthermore, to determine the allowance for impairment losses, the Group adopted a complex model that used a number of parameters, relied on internal and external data inputs, involved subjective management judgements and assumptions subject to a high degree of uncertainty.

   Loans

   As described in Note 2.c.h, Allowance for Impairment Losses of Financial Assets, to the consolidated financial statements as at 31 December 2023, the allowance for impairment losses for loans was determined based on Statement of Financial Accounting Standards 71 – Financial Instruments ("SFAS 71").

   For non-impaired loans and for impaired loans which were not considered individually significant, the Group calculated the allowance for impairment losses collectively using a risk parameter model that incorporated key parameters, such as Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), and Exposure at Default ("EAD"), after considering forward-looking information and other external data. For loans that were considered individually significant, the Group calculated the allowance for impairment losses on an individual basis by estimating the expected cash flows to be obtained from the loans.

Piutang/pembiayaan syariah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.c.h, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan, atas laporan keuangan konsolidasian, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* ditentukan berdasarkan PSAK 102 - Akuntansi *Murabahah* ("PSAK 102"). Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman *qardh*, pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, ditentukan berdasarkan PSAK yang berlaku.

Piutang *murabahah* yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko dengan menggunakan parameter-parameter utama yaitu PD dan LGD. Untuk piutang/pembiayaan syariah, yang secara individual nilainya signifikan, Grup menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kredit yang diberikan

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas perhitungan manajemen atas cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan;
- Secara sampel, menguji pengendalian yang relevan atas penentuan rating internal kredit sebagai basis identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai;
- Menguji pengendalian umum dari teknologi informasi ("TI") atas sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai serta pengendalian aplikasi TI atas kelengkapan dan keakuratan data;
- Menguji asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk penentuan PD, LGD dan EAD, termasuk (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) evaluasi data historis dan prakiraan ekonomi makro yang digunakan dengan membandingkan data tersebut dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek ekonomi makro;
- Menguji data input ke model cadangan kerugian penurunan nilai, secara sampel, untuk menilai keakuratan dan kelengkapannya;

Sharia receivables/financing

As described in Note 2.c.h, Allowance for Impairment Losses of Financial Assets, to the consolidated financial statements, the allowance for impairment losses for murabahah receivables was determined based on SFAS 102 - Murabahah Accounting ("SFAS 102"). The allowance for impairment losses for funds of qardh, musyarakah and mudharabah financing, was determined based on the applicable SFAS.

Murabahah receivables, which were not considered individually significant, were assessed using collective allowance for impairment losses by using the risk parameter modelling approach that incorporated key parameters such as PD and LGD. For sharia receivables/financing, which were individually significant, the Group calculated the allowance for impairment losses individually by estimating the expected cash flows.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matters

Loans

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood management's calculation of the allowance for impairment losses for loans;*
- *On a sample basis, testing of the relevant controls over the determination of credit internal ratings as the basis over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment;*
- *Testing the information technology (IT) general controls over the allowance for impairment losses calculation system as well as the IT application controls over the completeness and accuracy of the data;*
- *Testing the significant modelling assumptions used in the allowance for impairment losses model, including the determination of the PD, LGD and EAD, which involved (i) evaluation of the model and methodology used in the quantitative calculation; and (ii) evaluation of the historical data and macroeconomic forecasts used by comparing them with publicly available information on macroeconomic prospects;*
- *Testing, on a sample basis, the data inputs to the allowance for impairment losses model, to assess their accuracy and completeness;*

pwc

- Menguji, secara sampel, keakuratan identifikasi manajemen atas kredit yang diberikan yang mengalami peningkatan signifikan risiko kredit dan gagal bayar dengan mempertimbangkan informasi keuangan dan non-keuangan debitur dan bukti eksternal yang relevan;
- Membandingkan, secara sampel, data tertentu yang digunakan pada perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai, dengan data yang tercatat di sistem perbankan utama Grup pada tanggal pelaporan;
- Secara sampel, melakukan perhitungan matematis ulang atas perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk memeriksa keakuratan nilai tercatat cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan;
- Secara sampel, untuk kredit yang diklasifikasikan sebagai Tahap 2 dan Tahap 3 (kredit dengan cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual), memeriksa kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan pengujian atas asumsi yang digunakan oleh manajemen, jumlah dan waktu estimasi arus kas masa depan yang disiapkan oleh manajemen berdasarkan informasi keuangan debitur dan/atau penjamin, penilaian agunan terbaru dan informasi lain yang tersedia yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan;
- Dengan melibatkan spesialis TI, menguji keakuratan perhitungan jumlah hari tunggakan dari tanggal jatuh tempo kredit dan penilaian atas kolektibilitas kredit berdasarkan jumlah hari tertunggak yang digunakan dalam penentuan PD; dan
- Menilai kecukupan pengungkapan terkait cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- *Testing, on a sample basis, the accuracy of management's identification of loans that experience a significant increase in credit and default risk by considering the debtor's financial and non-financial information and relevant external evidence;*
- *Comparing, on a sample basis, the data used in the allowance for impairment losses calculation with the data recorded in the Group's core banking system at the reporting date;*
- *On a sample basis, performing mathematical re-calculation of the allowance for impairment losses calculation to assess the accuracy of the allowance recorded for impairment losses for loans;*
- *On a sample basis, for loans classified as Stage 2 and Stage 3 (loans where allowance for impairment losses are calculated individually), assessing the adequacy of allowance for impairment losses by testing the assumptions used by management, the amount and timing of estimates of future cash flows prepared by management based on the debtor's and/or guarantor's financial information, the latest collateral valuation and other available information used in calculation of allowance for impairment losses on loans granted;*
- *By involving IT specialists, we tested the accuracy of the number of days past due from the credit due date and assessed the accuracy of credit collectibility based on the number of days past due which used in the determination of the PD; and*
- *Assessing the adequacy of the disclosures related to allowance for impairment losses on loans in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

Piutang/pembiayaan syariah

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman, mengevaluasi dan menguji efektivitas desain serta operasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang dan pembiayaan syariah yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti penurunan nilai;

Sharia receivables/financing

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood, evaluated and tested the design and operating effectiveness of internal controls related to the measurement of impairment losses for sharia receivables and financing that have experienced a significant increase in credit risk or had evidence of impairment;*

- Memeriksa, secara sampel, keakuratan identifikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan terhadap bukti objektif penurunan nilai atas piutang/pembiayaan syariah;
- Memeriksa, secara sampel, kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang dan pembiayaan syariah yang mengalami penurunan nilai, yang dihitung secara individual. Atas sampel tersebut, kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan pengujian atas jumlah dan periode estimasi arus kas masa depan yang disiapkan oleh manajemen, menilai asumsi dan estimasi yang digunakan dengan membandingkan jadwal pembayaran kembali dan tingkat pengembalian yang efektif yang digunakan pada perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dengan informasi yang tertera pada perjanjian piutang/pembiayaan syariah;
- Menilai metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk penentuan PD dan LGD, yang diterapkan sebagai persyaratan PSAK No. 102, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai basis dalam penentuan tingkat PD dan LGD, dengan melibatkan spesialis TI kami;
- Melakukan perhitungan matematis ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kerugian penurunan nilai piutang/pembiayaan syariah, dengan melibatkan spesialis TI kami;
- Melakukan pengujian atas akurasi perhitungan jumlah hari tertunggak dari tanggal jatuh tempo kredit dan pengujian atas kolektibilitas kredit berdasarkan jumlah hari tertunggak;
- Melakukan pengujian atas kelengkapan dan keakuratan data piutang/pembiayaan syariah yang digunakan untuk menilai keandalan data yang digunakan dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai; dan
- Menilai kecukupan pengungkapan terkait cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang/pembiayaan syariah dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- *Testing, on a sample basis, the accuracy of management's identification of significant increases in credit risk against objective evidence of impairment of the sharia receivables/financing;*
- *Testing, on a sample basis, the adequacy of the individual allowance for impairment losses for sharia receivables and financing that had been impaired. For these samples, we assessed the adequacy of allowance for impairment losses by testing the amount and period of estimated future cash flows prepared by management, assessed the assumptions and estimates used by comparing the repayment schedule and effective rate of return used in calculating allowance for impairment losses with information stated in the sharia receivables/financing agreement;*
- *Assessing the methodology and significant modelling assumptions used in the allowance for impairment losses model, including the determination of PD and LGD applied as requirements of SFAS No. 102, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; and (ii) testing the completeness and accuracy of the data used as the basis for determining PD and LGD levels, with the involvement of our IT specialists;*
- *Performing independent mathematical recalculation of the collective allowance for impairment losses for sharia receivables/financing, with the involvement of our IT specialists;*
- *Testing the accuracy of number of days past due from the credit due date and assessing the credit collectibility based on the number of days past due;*
- *Testing the completeness and accuracy of the data for sharia receivables/financing to assess the reliability of the data used to calculate the allowance for impairment losses; and*
- *Assessing the adequacy of the disclosures related to allowance for impairment losses on sharia receivables/financing in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

pwc

2. Pengoperasian dan pengendalian atas sistem Teknologi Informasi (TI) pelaporan keuangan

Grup sangat bergantung pada infrastruktur, sistem, dan pengendalian TI untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan. Lingkungan TI Grup dianggap kompleks dengan mempertimbangkan jumlah dan kompleksitas sistem utama pelaporan keuangan dan kompleksitas antarmuka antar sistem. Pengendalian tingkat entitas TI, pengendalian keamanan siber, dan pengendalian umum TI merupakan bagian penting dari kerangka pengendalian internal Bank. Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian atas sistem teknologi informasi pelaporan keuangan Grup sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kami memperoleh pemahaman pengelolaan sistem TI serta pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kami menilai efektivitas desain, implementasi dan pengoperasian pengendalian utama yang terkait, termasuk:

1. Pengendalian atas manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang dijalankan untuk mengembangkan, menguji dan mengesahkan perubahan pada fungsi dan konfigurasi di dalam sistem;
2. Pengendalian atas keamanan akses: Pengendalian akses pengguna dirancang untuk melaksanakan pemisahan tugas, mengatur penggunaan akun dengan akses istimewa atau proses otorisasi atas perubahan data; dan
3. Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas operasional dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap masalah TI yang muncul telah ditindaklanjuti.

Kami menguji pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti perhitungan otomatis di sistem, pemrosesan transaksi, laporan yang dihasilkan sistem, dan perpindahan data antar sistem. Pengujian kami meliputi inspeksi atas konfigurasi sistem yang relevan disertai dengan pengujian hasil keluaran sistem berdasarkan sampel.

2. Operation and controls of financial reporting Information Technology (IT) systems

The Group is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and financial reporting processes. The IT environment of the Group is considered to be complex due to the number and complexity of the key financial reporting systems and interfaces between systems. IT entity level controls, cybersecurity controls, and IT general controls are important components of the Bank's internal control framework. Therefore, we considered the operation and controls of the Group's financial reporting information technology systems to be a key audit matter.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matters

We understood the IT systems and controls that supported the financial reporting process. We assessed the effectiveness of the design, implementation and operation of the associated key controls, including:

1. *Change management controls: The processes and controls used to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;*
2. *Access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of high privileged accounts or the authorisation process to change the data; and*
3. *IT operation related controls: The controls over operations to manage the financial risks that may arise from any IT operation issues.*

We tested key IT dependent controls supporting the financial reporting process, such as automated system calculations, transaction processing, system generated reports and data interfaces between systems. Our testing included the inspection of the relevant system configurations and supplemented with the testing of the system outputs on a sample basis.

pwc

3. **Estimasi atas liabilitas kepada pemegang polis**

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 35, Liabilitas lain-lain, atas laporan keuangan konsolidasian, nilai cadangan teknis, yang terdiri atas manfaat polis masa depan dari produk non *unit-link* dan estimasi liabilitas klaim, dan terdapat pada liabilitas kepada pemegang polis adalah sebesar Rp 5.969.732 juta pada tanggal 31 Desember 2023.

Kewajiban untuk menentukan penyelesaian klaim masa depan melibatkan penilaian yang kompleks dan subjektif tentang peristiwa masa depan, baik internal maupun eksternal bisnis, di mana perubahan kecil dalam asumsi dapat mengakibatkan dampak material terhadap estimasi kewajiban ini. Manajemen dibantu oleh pakar aktuaris untuk melakukan perhitungan kewajiban tersebut.

Terdapat ketidakpastian yang timbul dari berbagai asumsi aktuaria. Asumsi-asumsi yang dipakai untuk menghitung cadangan liabilitas masa depan pemegang polis dan estimasi liabilitas klaim ditentukan berdasarkan estimasi tingkat mortalita, morbidita, tingkat pembatalan polis, biaya, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.z, Kontrak Asuransi, atas laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, Grup juga menerapkan asumsi margin untuk risiko pemburukan atas produk tersebut.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kami memperoleh pemahaman perhitungan manajemen atas estimasi liabilitas kepada pemegang polis. Kami mengevaluasi keakuratan estimasi liabilitas kepada pemegang polis, dengan melakukan pengujian substantif yang terdiri dari:

- Dengan melibatkan spesialis aktuari kami, menguji asumsi yang digunakan dalam menghitung cadangan teknis, termasuk evaluasi tingkat diskonto, asumsi morbidita dan mortalita, tingkat pembatalan polis, dan alokasi biaya berdasarkan data historis dan informasi yang tersedia untuk umum;
- Mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas tenaga ahli aktuaris yang membantu manajemen untuk melakukan perhitungan atas utang kepada pemegang polis;

3. ***Estimation of liabilities to policyholders***

As described in Note 35, Other Liabilities, to the consolidated financial statements, the technical reserve, which represents future policy benefits from non-unit-linked products and an estimated claim liability and forms part of the liabilities to policyholders, was Rp 5,969,732 million as at 31 December 2023.

The determination of the liabilities for future claim settlements involved complex and subjective assessment of future events, both internal and external to the business, where a small change in assumptions could have a material impact on the estimation of these liabilities. Management was assisted by an actuarial expert in its calculation of the liabilities.

There is also uncertainty arising from various actuarial assumptions. The assumptions used to calculate the policyholder's future liability reserves and the estimated claim liabilities were determined based on the estimates of mortality, morbidity, lapse, expenses, inflation rates and interest rates as described in Note 2.z, Insurance Contracts, to the consolidated financial statements. In addition, the Group also applied margin assumptions to the risk of deterioration over those products.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matters

We understood management's calculation of the estimation of liabilities to policyholders. We evaluated the estimation of liabilities to policyholders, by performing the following procedures:

- *By involving our actuarial expert, testing the assumptions used to determine the technical reserves, which involved evaluation of the discount rates, assumptions of morbidity and mortality, lapse rate and cost allocation based on historical data and publicly available information;*
- *Evaluating the competence, capabilities and objectivity of actuarial experts who assisted management in the calculation of the obligation to policyholders;*

- Memeriksa kelengkapan data yang digunakan untuk menghitung saldo cadangan teknis dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan aktuaria manajemen, buku besar dan buku besar pembantu pada tanggal 31 Desember 2023;
- Dengan melibatkan spesialis aktuari kami, melakukan perhitungan matematis ulang, secara sampel, atas *Gross Premium Reserve* ("GPV") untuk portofolio jangka panjang tradisional dan Cadangan Risiko untuk portofolio *unit-link*, saldo aset reasuransi, kecukupan bruto dan bersih atas cadangan *Incurred but not Recorded ("IBNR")* dan pengujian kecukupan liabilitas untuk portofolio tradisional pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- Menilai kecukupan pengungkapan terkait nilai liabilitas kepada pemegang polis dalam konteks persyaratan pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- *Checking the completeness of the data used to calculate the technical reserve balance by reconciling management's actuarial reports, general ledger and sub-ledgers as at 31 December 2023;*
- *By involving our actuarial expert, performing independent mathematical re-calculation, on a sample basis, of the Gross Premium Reserve ("GPV") for traditional long-term portfolios and Risk Reserves for unit-linked portfolios, reinsurance asset balances, the gross and net adequacy of Incurred but not Recorded ("IBNR") reserves and liability adequacy testing ("LAT") for traditional portfolios as at 31 December 2023; and*
- *Assessing the adequacy of the disclosures related to the liabilities to policyholders in the context of Indonesian Financial Accounting Standards disclosure requirements.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

pwc

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for The Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditors' Responsibilities for The Audit of The Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

pwc

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

pwc

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
31 Januari/*January* 2024

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0229



Bank Mandiri (Persero) Tbk
00027/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/I/2024

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

Daftar Isi/
Table of Contents

Halaman/*Pages*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Statements of Financial Position 1 - 8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 9 - 11

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/
Consolidated Statements of Changes in Equity 12 - 13

Laporan Arus Kas Konsolidasian/
Consolidated Statements of Cash Flows 14 - 17

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian/
Notes to the Consolidated Financial Statements 18 - 431

Informasi Keuangan Entitas Induk/
Parent Entity Financial Information

- Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk/
  Statements of Financial Position - Parent Entity Lampiran/*Appendix* 1
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk/
  Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Entity Lampiran/*Appendix* 2
- Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk/
  Statements of Changes in Equity - Parent Entity Lampiran/*Appendix* 3
- Laporan Arus Kas Entitas Induk/
  Statements of Cash Flows - Parent Entity Lampiran/*Appendix* 4

****

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Kas	2c,2g,62.B.(vii)	26.431.740	27.212.759	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2c,2g,2h,4	108.605.322	107.349.158	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2c,2f,2g,2h,5			*Current accounts with other banks*
Pihak berelasi	56	461.097	110.733	*Related parties*
Pihak ketiga		36.144.993	47.699.252	*Third parties*
		36.606.090	47.809.985	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(32.205)	(20.285)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		36.573.885	47.789.700	*Net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2c,2f,2i,6			*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Pihak berelasi	56	2.049.472	3.080.128	*Related parties*
Pihak ketiga		71.838.685	92.243.984	*Third parties*
		73.888.157	95.324.112	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(957)	(3.601)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		73.887.200	95.320.511	*Net*
Efek-efek	2c,2f,2j,7			*Marketable securities*
Pihak berelasi	56	23.774.139	27.290.577	*Related parties*
Pihak ketiga		70.807.983	55.530.149	*Third parties*
		94.582.122	82.820.726	
Ditambah/(dikurangi): premi yang belum diamortisasi, keuntungan/ (kerugian) - neto yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai		(36.281)	(20.908)	*Add/(less): unamortised premiums, unrealised gains/ (losses) - net from increase/(decrease) in fair value and allowance for impairment losses*
Neto		94.545.841	82.799.818	*Net*
Obligasi pemerintah				*Government bonds*
Pihak berelasi	2c,2f,2k,8,56	309.182.971	329.211.764	*Related parties*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	2c,2f,2l,9			*Other receivables - trade transactions*
Pihak berelasi	56	7.581.513	15.157.619	*Related parties*
Pihak ketiga		18.463.040	18.635.645	*Third parties*
		26.044.553	33.793.264	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(1.494.653)	(1.604.705)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		24.549.900	32.188.559	*Net*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2c,2f,2m,10			*Securities purchased under agreements to resell*
Pihak ketiga		22.692.928	11.705.989	*Third parties*
Tagihan derivatif	2c,2f,2n,11			*Derivative receivables*
Pihak berelasi	56	198.156	110.208	*Related parties*
Pihak ketiga		1.796.775	2.141.933	*Third parties*
Total		1.994.931	2.252.141	*Total*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	2c,2f,2o,12			*Loans and sharia receivables/ financing*
Pihak berelasi	56	238.081.020	199.385.546	*Related parties*
Pihak ketiga		1.121.751.175	973.214.336	*Third parties*
		1.359.832.195	1.172.599.882	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(53.098.619)	(64.612.645)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		1.306.733.576	1.107.987.237	*Net*
Piutang pembiayaan konsumen	2c,2f,2p,13			*Consumer financing receivables*
Pihak berelasi	56	11.542	7.846	*Related parties*
Pihak ketiga		32.738.254	23.749.881	*Third parties*
		32.749.796	23.757.727	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(713.044)	(610.361)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		32.036.752	23.147.366	*Net*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	2c,2q,14			*Net investment finance leases*
Pihak ketiga		5.489.242	5.872.560	*Third parties*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(70.170)	(139.173)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		5.419.072	5.733.387	*Net*
Tagihan akseptasi	2c,2f,2u,15			*Acceptance receivables*
Pihak berelasi	56	2.250.427	1.897.509	*Related parties*
Pihak ketiga		12.543.461	9.884.072	*Third parties*
		14.793.888	11.781.581	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(122.212)	(61.963)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		14.671.676	11.719.618	*Net*
Penyertaan saham	2f,2s,16			*Investments in shares*
Pihak berelasi	56	652.420	1.775.847	*Related parties*
Pihak ketiga		1.209.067	981.747	*Third parties*
		1.861.487	2.757.594	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(34.123)	(68.640)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto		1.827.364	2.688.954	*Net*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Biaya dibayar dimuka	17	2.719.789	1.895.503	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka	2ad,33a	436.532	1.164.925	*Prepaid taxes*
Aset tetap	2r.i,2r.ii,18	82.315.031	77.969.898	*Fixed assets*
Dikurangi: akumulasi penyusutan		(24.337.324)	(21.429.332)	*Less: accumulated depreciation*
Neto		57.977.707	56.540.566	*Net*
Aset takberwujud	2r.iii,19	13.669.071	11.712.040	*Intangible assets*
Dikurangi: akumulasi amortisasi		(7.794.473)	(6.618.431)	*Less: accumulated amortisation*
Neto		5.874.598	5.093.609	*Net*
Aset lain-lain	2c,2t,2v,2af,20	39.474.741	30.444.061	*Other assets*
Dikurangi: penyisihan lainnya		(1.596.320)	(1.746.417)	*Less: allowance for other impairment losses*
Neto		37.878.421	28.697.644	*Net*
Aset pajak tangguhan - neto	2ad,33e	10.179.244	12.045.479	*Deferred tax assets - net*
TOTAL ASET		**2.174.219.449**	**1.992.544.687**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2w	4.484.956	4.056.029	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
Giro dan giro *wadiah*	2c,2f,2x,21			*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Pihak berelasi	56	166.637.832	157.247.418	*Related parties*
Pihak ketiga		385.721.324	361.830.544	*Third parties*
Total		552.359.156	519.077.962	*Total*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	2c,2f,2x,22			*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Pihak berelasi	56	7.540.541	6.850.898	*Related parties*
Pihak ketiga		501.750.948	473.631.868	*Third parties*
Total		509.291.489	480.482.766	*Total*
Deposito berjangka	2c,2f,2x,23			*Time deposits*
Pihak berelasi	56	34.852.981	30.665.985	*Related parties*
Pihak ketiga		254.944.523	265.349.216	*Third parties*
Total		289.797.504	296.015.201	*Total*
Total simpanan nasabah		1.351.448.149	1.295.575.929	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
Giro, giro *wadiah* dan tabungan	2c,2f,2y,24			*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Pihak berelasi	56	183.333	174.243	*Related parties*
Pihak ketiga		6.510.250	5.560.158	*Third parties*
Total		6.693.583	5.734.401	*Total*
Inter-bank call money	2c,2y,25			*Interbank call money*
Pihak berelasi		100.000	-	*Related parties*
Pihak ketiga		7.181.896	4.436.101	*Third parties*
Total		7.281.896	4.436.101	*Total*
Deposito berjangka	2c,2f,2y,26			*Time deposits*
Pihak berelasi	56	384.925	467.025	*Related parties*
Pihak ketiga		3.324.376	4.209.882	*Third parties*
Total		3.709.301	4.676.907	*Total*
Total simpanan dari bank lain		17.684.780	14.847.409	*Total deposits from other banks*
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak *unit-link*	2z,27	29.194.702	29.710.227	*Liabilities to unit-link policyholders*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY** (continued)*
LIABILITAS (lanjutan)				***LIABILITIES** (continued)*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2c,2m,28			*Securities sold under agreements to repurchase liabilities*
Pihak ketiga	65	36.330.064	24.325.475	*Third parties*
Liabilitas derivatif	2c,2f,2n,11			*Derivative payables*
Pihak berelasi	56	76.404	86.933	*Related parties*
Pihak ketiga		2.037.449	2.039.836	*Third parties*
Total		2.113.853	2.126.769	*Total*
Liabilitas akseptasi	2c,2f,2u,29			*Acceptance payables*
Pihak berelasi	57	2.614.261	1.750.123	*Related parties*
Pihak ketiga		12.179.627	10.031.458	*Third parties*
Total		14.793.888	11.781.581	*Total*
Efek-efek yang diterbitkan	2c,2f,2aa			*Debt securities issued*
Pihak berelasi	30,56,65	5.091.435	5.603.550	*Related parties*
Pihak ketiga		45.504.621	40.244.057	*Third parties*
		50.596.056	45.847.607	
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi		(78.292)	(73.468)	*Less: unamortised debt issuance cost*
Neto		50.517.764	45.774.139	*Net*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2c,31c	1.143.758	2.073.429	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Beban yang masih harus dibayar	2c,2af,32	4.799.446	6.493.794	*Accrued expenses*
Utang pajak	2ad,33b	2.690.902	3.590.522	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja	2ai,34,51	11.894.629	12.607.759	*Employee benefit liabilities*
Provisi	63b	286.081	323.365	*Provision*
Liabilitas lain-lain	2c,35	37.399.213	27.336.753	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	2c,2f,2ab,36			*Fund borrowings*
Pihak berelasi	56,65	1.765.624	2.210.704	*Related parties*
Pihak ketiga		93.679.835	60.629.414	*Third parties*
Total		95.445.459	62.840.118	*Total*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY** (continued)*
LIABILITAS (lanjutan)				***LIABILITIES** (continued)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	2c,2f,2ac			*Subordinated loans and marketable securities*
Pihak berelasi	37,56,65	10.000	87.000	*Related parties*
Pihak ketiga		205.735	546.564	*Third parties*
		215.735	633.564	
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi		(564)	(231)	*Less: unamortised issuance cost*
Neto		215.171	633.333	*Net*
TOTAL LIABILITAS		**1.660.442.815**	**1.544.096.631**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER	2f,2ae,38			***TEMPORARY* SYIRKAH *FUNDS***
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
Pihak berelasi	56			*Related parties*
Giro - investasi terikat dan giro *mudharabah* - investasi tidak terikat	38a.1	17.574.469	13.702.232	*Demand deposits - restricted investment and mudharabah - unrestricted investment*
Tabungan - investasi terikat dan investasi tidak terikat - *mudharabah*	38a.2a	191.661	86.070	*Saving deposits - restricted investment and unrestricted investment - mudharabah*
Deposito *mudharabah* - investasi tidak terikat	38a.3	27.906.491	17.857.676	*Mudharabah time deposits - unrestricted investment*
		45.672.621	31.645.978	
Pihak ketiga				*Third parties*
Giro - investasi terikat dan giro *mudharabah musytarakah*	38a.1	14.779.396	9.020.856	*Demand deposits - restricted investments and mudharabah musytarakah*
Tabungan - investasi terikat dan investasi tidak terikat - *mudharabah*	38a.2a	77.508.409	72.183.636	*Saving deposits - restricted investment and - unrestricted investment - mudharabah*
Deposito *mudharabah* - investasi tidak terikat	38a.3	87.541.044	82.418.193	*Mudharabah time deposits -unrestricted investment*
		179.828.849	163.622.685	
Total simpanan nasabah		225.501.470	195.268.663	*Total deposits from customers*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY** (continued)*
DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)				***TEMPORARY* SYIRKAH *FUNDS*** *(continued)*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
Pihak ketiga				*Third parties*
Giro *mudharabah* - investasi tidak terikat	38b	63.394	31.880	*Mudharabah demand deposits - unrestricted investment*
Tabungan *mudharabah* - investasi tidak terikat	38b	580.115	627.646	*Mudharabah saving deposits - unrestricted investment*
Deposito *mudharabah* - investasi tidak terikat	38b	136.693	274.412	*Mudharabah time deposits - unrestricted investment*
Total simpanan dari bank lain		780.202	933.938	*Total deposits from other banks*
TOTAL DANA *SYIRKAH* TEMPORER		**226.281.672**	**196.202.601**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik Entitas Induk				*Attributable equity to the Parent Entity*
Modal saham - nilai nominal Rp125 dan Rp250 (nilai penuh) per lembar saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				*Share capital - Rp125 and Rp250 (full amount) par value per share as of 31 December 2023 and 2022*
Modal dasar - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 127.999.999.999 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 63.999.999.999 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2022				*Authorised capital- 1 Dwiwarna Series A share and 127,999,999,999 Series B common shares as of 31 December 2023 and 1 Dwiwarna Series A share and 63,999,999,999 Series B common share as of 31 December 2022*
Modal ditempatkan dan disetor - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 93.333.333.331 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 46.666.666.665 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2022	40a	11.666.667	11.666.667	*Issued and fully paid-in capital 1 Dwiwarna Series A share and 93,333,333,331 Series B common shares as of 31 December 2023 and 1 Dwiwarna Series A share and 46,666,666,665 Series B common shares as of 31 December 2022*
Tambahan modal disetor/ agio saham	40b	17.643.264	17.643.264	*Additional paid-in capital/ agio*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2e	(146.299)	(60.427)	*Differences arising from translation of financial statements in foreign currencies*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY** (continued)*
EKUITAS (lanjutan)				***EQUITY** (continued)*
Kerugian neto yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan	2j,2k	(1.837.760)	(2.768.553)	*Net unrealised loss from decrease in fair value of financial assets classified as fair value through other comprehensive income - net of deferred tax*
Bagian efektif lindung nilai arus kas	2n	1.429	(3.156)	*Effective portion of cash flow hedges*
Selisih bersih revaluasi aset tetap	2r.i	34.716.693	34.716.693	*Net differences in fixed assets revaluation*
Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	2ai	1.517.183	1.510.016	*Net actuarial gain from defined benefits program - net of deferred tax*
Penghasilan komprehensif lainnya		85.052	85.052	*Other comprehensive income*
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	1g	(97.202)	(97.202)	*Difference in transactions with non - controlling parties*
Saldo laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi - reorganisasi pada tanggal 30 April 2003)				*Retained earnings (accumulated losses of Rp162,874,901 were eliminated against additional paid-in capital/ agio as a result of quasi-reorganisation on 30 April 2003)*
Sudah ditentukan penggunaannya		5.380.268	5.380.268	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		191.923.489	161.606.164	*Unappropriated*
Total saldo laba		197.303.757	166.986.432	*Total retained earnings*
		260.852.784	229.678.786	
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2d,39	26.642.178	22.566.669	*Non-controlling interests in net assets of consolidated Subsidiaries*
JUMLAH EKUITAS		**287.494.962**	**252.245.455**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		**2.174.219.449**	**1.992.544.687**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSE FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	2f,2af,41,56			*Interest income and sharia income*
Pendapatan bunga		113.747.621	95.943.875	*Interest income*
Pendapatan syariah		18.796.849	16.438.243	*Sharia income*
Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah		132.544.470	112.382.118	*Total interest income and sharia income*
Beban bunga dan beban syariah	2f,2af,42,56			*Interest expense and sharia expense*
Beban bunga		(30.664.728)	(20.446.595)	*Interest expense*
Beban syariah		(5.993.168)	(4.032.169)	*Sharia expense*
Total beban bunga dan beban syariah		(36.657.896)	(24.478.764)	*Total interest expense and sharia expense*
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - NETO		**95.886.574**	**87.903.354**	***NET INTEREST AND SHARIA INCOME***
Pendapatan premi	2ag	13.721.691	14.380.273	*Premium income*
Beban klaim	2ag	(11.598.645)	(11.912.575)	*Claim expense*
PENDAPATAN PREMI - NETO		**2.123.046**	**2.467.698**	***NET PREMIUM INCOME***
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - NETO		**98.009.620**	**90.371.052**	***NET INTEREST, SHARIA AND PREMIUM INCOME***
Pendapatan operasional lainnya				*Other operating income*
Provisi dan komisi	2ah,43	20.148.410	18.802.148	*Fees and commissions*
Pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto	2c,2e,2n,44	3.473.796	3.494.409	*Income from fair value through profit or loss classification - net*
Lain-lain	45	16.900.640	11.984.146	*Others*
Total pendapatan operasional lainnya		40.522.846	34.280.703	*Total other operating income*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	2c,46	(11.152.853)	(16.096.382)	*Allowance for impairment losses*
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	2c,31c	918.531	255.268	*Reversal of allowance for estimated losses commitments and contingencies*
Pembalikan/(pembentukan) penyisihan lainnya dan kerugian risiko operasional - neto	2t,47	85.615	(282.073)	*Reversal/(allowance) for other impairment losses and operational risk losses - net*
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah - neto	2j,2k,48	125.295	899.579	*Gain on sale of marketable securities and government bonds - net*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
Beban operasional lainnya	2f,2ai,			*Other operating expenses*
Beban gaji dan tunjangan	49,51,56	(24.423.089)	(24.641.746)	*Salaries and employee benefits expenses*
Beban umum dan administrasi	2r,50	(22.732.894)	(22.102.552)	*General and administrative expenses*
Lain-lain	52	(6.711.508)	(6.515.760)	*Others*
Total beban operasional lainnya		(53.867.491)	(53.260.058)	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL		**74.641.563**	**56.168.089**	***INCOME FROM OPERATION***
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	53	43.318	209.637	*Non operating income/ (expense) - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**74.684.881**	**56.377.726**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
Beban pajak				*Tax expense*
Kini	2ad,33c,33d	(12.907.674)	(11.897.334)	*Current*
Tangguhan	2ad,33c,33e	(1.725.337)	471.976	*Deferred*
Total beban pajak - neto		(14.633.011)	(11.425.358)	*Total tax expense - net*
LABA TAHUN BERJALAN		**60.051.870**	**44.952.368**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	2r.i	-	4.574.057	*Gain on fixed assets revaluation*
(Kerugian)/keuntungan aktuarial program imbalan pasti	2ai	(14.912)	444.272	*Actuarial (loss)/gain from defined benefits program*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(139)	(89.286)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
		(15.051)	4.929.043	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2e	(86.953)	36.152	*Difference arising from translation of financial statements in foreign currencies*
Perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2j,2k	1.125.822	(5.631.137)	*Changes in fair value of financial assets classified as fair value through other comprehensive income*
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	2n	23.030	(7.002)	*Effective portion of cash flow hedges*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(140.759)	1.067.118	*Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss*
		921.140	(4.534.869)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan		**906.089**	**394.174**	***Other comprehensive income for the year - net of income tax***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**60.957.959**	**45.346.542**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				***Net income for the year attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		55.060.057	41.170.637	*Parent Entity*
Kepentingan nonpengendali	2d	4.991.813	3.781.731	*Non-controlling interest*
		60.051.870	**44.952.368**	
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		55.916.730	41.604.619	*Parent Entity*
Kepentingan nonpengendali	2d	5.041.229	3.741.923	*Non-controlling interest*
		60.957.959	**45.346.542**	
LABA PER SAHAM	2aj			***EARNINGS PER SHARE***
Dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)		589,93	441,26	*Basic and diluted (full amount of Rupiah)*

*) Laba per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disajikan kembali sehubungan dengan pemecahan nilai saham (Catatan 2aj).

*Earnings per share for the year ended 31 December 2022 is restated *) in connection with the share split (Note 2aj).*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		2023														
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor/ *Issued and fully paid-in capital*	Tambahan modal disetor/ agio saham/ *Additional paid-in capital/agio*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Difference arising from translation of financial statements in foreign currencies*	Keuntungan/ (kerugian) neto yang belum direalisasi dari kenaikan/ (penurunan) nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net unrealised gain/ (loss) from increase/ (decrease) in fair value of financial assets through other comprehensive income - net of deferred tax*	Bagian efektif lindung nilai arus kas/ *Effective portion of cash flow hedges*	Selisih bersih revaluasi aset tetap/ *Net difference in fixed assets revaluation*	Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net actuarial gain from defined benefits program - net of deferred tax*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ *Difference in transaction with non-controlling parties*	Saldo laba/*Retained earnings*			Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasi/ *Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiaries*	Total ekuitas/ *Total equity*	
												Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		**11.666.667**	**17.643.264**	**(60.427)**	**(2.768.553)**	**(3.156)**	**34.716.693**	**1.510.016**	**85.052**	**(97.202)**	**5.380.268**	**161.606.164**	**166.986.432**	**22.566.669**	**252.245.455**	***Balance as of 1 January 2023***
Penyesuaian saldo laba terkait penerapan PSAK 107 pada Entitas Anak syariah	2b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.350)	(40.350)	(38.053)	(78.403)	*Adjustment of retained earnings related to SFAS No. 107 implementation in sharia Subsidiary*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023 setelah penerapan PSAK 107		**11.666.667**	**17.643.264**	**(60.427)**	**(2.768.553)**	**(3.156)**	**34.716.693**	**1.510.016**	**85.052**	**(97.202)**	**5.380.268**	**161.565.814**	**166.946.082**	**22.528.616**	**252.167.052**	***Balance as of 1 January 2023 after SFAS No. 107 implementation***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	40c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.702.382)	(24.702.382)	-	(24.702.382)	*Dividend payment from 2022 net income*
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen dan perubahan ekuitas Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(927.667)	(927.667)	*Changes in non-controlling interest arising from distribution of dividends and changes in Subsidiary's equity*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.060.057	55.060.057	4.991.813	60.051.870	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	(85.872)	930.793	4.585	-	7.167	-	-	-	-	-	49.416	906.089	*Other comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**11.666.667**	**17.643.264**	**(146.299)**	**(1.837.760)**	**1.429**	**34.716.693**	**1.517.183**	**85.052**	**(97.202)**	**5.380.268**	**191.923.489**	**197.303.757**	**26.642.178**	**287.494.962**	***Balance as of 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		2022															
													Saldo laba/*Retained earnings*				
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor/ *Issued and fully paid-in capital*	Tambahan modal disetor/ agio saham/ *Additional paid-in capital/agio*	Modal saham yang diperoleh dan dimiliki kembali (saham treasuri)/ *Share capital acquired and repossessed (treasury stock)*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Difference arising from translation of financial statements in foreign currencies*	Keuntungan/ (kerugian) neto yang belum direalisasi dari kenaikan/ (penurunan) nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net unrealised gain/(loss) from increase/ (decrease) in fair value of financial assets through other comprehensive income - net of deferred tax*	Bagian efektif lindung nilai arus kas/ *Effective portion of cash flow hedges*	Selisih bersih revaluasi aset tetap/ *Net difference in fixed assets revaluation*	Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net actuarial gain from defined benefits program - net of deferred tax*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ *Difference in transaction with non-controlling parties*	Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total	Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasi/ *Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiaries*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022		**11.666.667**	**17.643.264**	**(150.895)**	**(88.985)**	**1.692.145**	**(370)**	**30.140.345**	**1.217.456**	**85.052**	**(97.202)**	**5.380.268**	**137.198.867**	**142.579.135**	**17.424.670**	**222.111.282**	***Balance as of 1 January 2022***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2021	40c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.816.893)	(16.816.893)	-	(16.816.893)	*Dividend payment from 2021 net income*
Pelepasan saham treasuri	40d	-	-	150.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.895	*Release of treasury stock*
Penambahan kepemilikan dari penerbitan saham baru Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.553	53.553	2.164.564	2.218.117	*Changes from addition of ownership from issuance of Subsidiaries' new shares*
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen dan perubahan ekuitas Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(764.488)	(764.488)	*Changes in non-controlling interest arising from distribution of dividends and changes in Subsidiary's equity*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.170.637	41.170.637	3.781.731	44.952.368	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	28.558	(4.460.698)	(2.786)	4.576.348	292.560	-	-	-	-	-	(39.808)	394.174	*Other comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**11.666.667**	**17.643.264**	**-**	**(60.427)**	**(2.768.553)**	**(3.156)**	**34.716.693**	**1.510.016**	**85.052**	**(97.202)**	**5.380.268**	**161.606.164**	**166.986.432**	**22.566.669**	**252.245.455**	***Balance as of 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga		109.977.225	91.108.970	*Receipts from interest income*
Penerimaan pendapatan syariah		18.639.462	16.194.901	*Receipts from sharia income*
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi		33.870.101	33.182.421	*Receipts from provision, commission and premium income*
Pembayaran beban bunga		(29.551.232)	(20.157.582)	*Payments of interest expense*
Pembayaran beban syariah		(5.925.654)	(3.993.852)	*Payments of sharia expense*
Pembayaran beban klaim asuransi		(11.598.645)	(11.912.575)	*Payments of insurance claim expense*
Penerimaan dari penjualan obligasi pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		198.473.490	279.071.088	*Receipts from the sale of government bonds - measured at fair value through profit or loss*
Pembelian obligasi pemerintah – diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		(207.265.229)	(279.537.515)	*Acquisition of government bonds - measured at fair value through profit or loss*
Pendapatan/(beban) dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto		4.371.516	(1.557.115)	*Income/(expense) from fair value through profit or loss classification - net*
Pendapatan operasional lainnya - lain-lain		5.527.300	3.932.497	*Other operating income - others*
Beban operasional lainnya - lain-lain		(8.868.375)	(7.030.620)	*Other operating expenses - others*
Beban gaji dan tunjangan		(25.143.475)	(22.892.424)	*Salaries and employee benefits expenses*
Beban umum dan administrasi		(18.165.992)	(17.867.331)	*General and administrative expenses*
Pendapatan bukan operasional - neto		34.694	206.816	*Non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(13.729.286)	(11.909.631)	*Payment of corporate income tax*
Arus kas dari aktivitas operasional sebelum perubahan aset dan liabilitas operasional		50.645.900	46.838.048	*Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		1.300.258	702.604	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		(4.523.193)	4.340.432	*Marketable securities - measured at fair value through profit or loss*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (lanjutan)				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES** (continued)*
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional (lanjutan):				*Decrease/(increase) in operating assets (continued):*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan		7.748.711	(4.494.996)	*Other receivables - trade transactions*
Kredit yang diberikan		(173.772.763)	(128.394.061)	*Loans*
Piutang/pembiayaan syariah		(34.331.179)	(38.291.913)	*Sharia receivables/ financing*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(10.986.939)	15.611.011	*Securities purchased under agreements to resell*
Piutang pembiayaan konsumen		(10.159.382)	(5.370.202)	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan		307.195	(1.090.046)	*Net investment finance lease*
Pajak dibayar dimuka		728.393	908.800	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka		(824.286)	(425.252)	*Prepaid expenses*
Aset lain-lain		(8.293.177)	(3.230.934)	*Other assets*
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		12.159.217	8.204.315	*Recovery of written-off financial assets*
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional dan dana *syirkah* temporer:				*Increase/(decrease) in operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Bank konvensional				*Conventional banking*
Giro		34.079.545	119.697.949	*Demand deposits*
Tabungan		28.969.554	58.231.308	*Saving deposits*
Deposito berjangka		(7.185.303)	4.988.760	*Time deposits*
Interbank call money		2.845.795	(573.784)	*Interbank call money*
Liabilitas segera		428.927	(1.324.445)	*Obligations due immediately*
Liabilitas kepada pemegang polis *unit-link*	27	(515.525)	(947.343)	*Liability to unit-link policyholders*
Utang pajak lainnya		(78.008)	740.103	*Other taxes payable*
Liabilitas lain-lain		11.754.709	4.559.959	*Other liabilities*
Bank syariah - dana *syirkah* temporer				*Sharia bank - temporary syirkah funds*
Giro - investasi terikat dan giro *mudharabah musytarakah*		9.662.291	9.436.341	*Demand deposits - restricted investment and mudharabah musytarakah demand deposits*
Tabungan - investasi terikat dan investasi tidak terikat tabungan *mudharabah*		5.382.833	7.794.862	*Saving deposits - restricted investment and mudharabah saving deposits - unrestricted investment*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (lanjutan)				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES** (continued)*
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional dan dana *syirkah* temporer: (lanjutan)				*Increase/(decrease) in operating liabilities and temporary syirkah funds: (continued)*
Deposito *mudharabah* - investasi tidak terikat		15.033.947	2.063.789	*Mudharabah time deposits - unrestricted investment*
Kas neto yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasional		**(69.622.480)**	**99.975.305**	***Net cash (used in)/ provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
(Kenaikan)/penurunan efek-efek - selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		(7.500.467)	10.165.845	*(Increase)/decrease in marketable securities - other than measured at fair value through profit or loss*
Penurunan/(kenaikan) obligasi pemerintah - selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		30.052.757	(44.524.940)	*Decrease/(increase) in government bonds - other than measured at fair value through profit or loss*
Penerimaan dari penjualan aset tetap		242.703	3.943	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	18a	(3.086.377)	(4.007.847)	*Acquisition of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	19	(1.934.659)	(1.091.799)	*Acquisition of intangible assets*
Perolehan aset hak guna		(1.873.647)	(2.126.819)	*Acquisition of right of use assets*
Kenaikan investasi Entitas Anak		(29.770)	(308.314)	*Increase in Subsidiaries' investment*
Divestasi penyertaan Entitas Asosiasi		140.000	-	*Divestment in Associate Entity*
Kas neto yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi		**16.010.540**	**(41.889.931)**	***Net cash provided by/ (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan		16.811.244	3.300.667	*Receipts from debt securities issued*
Pembayaran atas efek-efek yang diterbitkan		(12.065.865)	(4.782.101)	*Payments of debt securities issued*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima		67.056.159	23.013.205	*Receipts from fund borrowings*
Pembayaran atas pinjaman yang diterima		(34.822.471)	(12.180.020)	*Payments of fund borrowings*
Penerimaan dari pinjaman dan efek-efek subordinasi		100.000	-	*Receipts from subordinated loans and marketable securities*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES** (continued)*
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi		(517.151)	(12.900)	*Payments of subordinated loans and marketable securities*
Kenaikan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		11.611.121	18.642.798	*Increase in securities sold under agreements to repurchase liabilities*
Pembayaran dividen	40c	(24.702.382)	(16.816.893)	*Payments of dividends*
Penerimaan dari kepentingan nonpengendali atas penerbitan saham baru Entitas Anak		-	2.164.564	*Receipts from non-controlling interest for issuance of Subsidiaries' new shares*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		**23.470.655**	**13.329.320**	***Net cash provided by financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(30.141.285)**	**71.414.694**	***NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		**(946.566)**	**9.843.138**	***EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**274.889.544**	**193.631.712**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**243.801.693**	**274.889.544**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of year consists of:*
Kas	62.B.(vii)	26.431.740	27.212.759	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4	108.605.322	107.349.158	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5	36.606.090	47.809.985	*Current accounts with other banks*
Investasi jangka pendek likuid dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		72.158.541	92.517.642	*Liquid short-term investments with a period of time maturity of three months or less from the date of acquisition*
Total kas dan setara kas		**243.801.693**	**274.889.544**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian usaha

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Bank Mandiri" atau "Bank") didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian dimaksud telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada Tambahan No. 6859 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Bank Peserta Penggabungan").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Entitas Induk Bank adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN yang merupakan Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara.

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 12, tanggal 16 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0041000 dan surat keputusan No. AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 2023 keduanya tanggal 16 Maret 2023 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0054153.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (hereinafter referred to as "Bank Mandiri" or the "Bank") was established on 2 October 1998 in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 10 of Sutjipto, S.H., under Government Regulation No. 75 Year 1998 dated 1 October 1998. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 dated 2 October 1998 and was published in Supplement No. 6859 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 97 dated 4 December 1998.

Bank Mandiri was established through the merger of PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") and PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo") (hereinafter collectively referred to as the "Merged Banks").

Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, Bank Mandiri is engaged in banking activities in accordance with prevailing laws and regulations. The Bank commenced its operations on 1 August 1999. The Bank's Parent Entity is the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises which is the Ministry within the Indonesian Government that is in charge of fostering state-owned enterprises.

The Articles of Association of Bank Mandiri has been amended several times, the latest amendment under Deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 12, dated 16 March 2023 stated under Notary Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, M.Kn, notary in Jakarta. This amendment has been submitted to and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0041000 and Decision Letter No. AHU-0016584.AH.01.02.Year 2023, both dated on 16 March 2023 and registered on Company's Registry No. AHU-0054153.AH.01.11.Year 2023, dated on 16 March 2023.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan usaha

Pada akhir bulan Februari 1998, Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pemerintah") mengumumkan rencana untuk melakukan restrukturisasi atas Bank Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan rencana restrukturisasi tersebut, Pemerintah mendirikan Bank Mandiri pada bulan Oktober 1998 dengan melakukan penyetoran tunai dan pengalihan saham Pemerintah pada Bank Peserta Penggabungan (Catatan 40a dan 40b). Selisih antara harga transfer dan nilai buku saham pada saat restrukturisasi tidak dihitung karena dinilai tidak praktis. Seluruh kerugian yang timbul selama periode restrukturisasi diakui dalam Program Rekapitalisasi.

Rencana restrukturisasi tersebut dirancang untuk menggabungkan usaha Bank Peserta Penggabungan ke dalam Bank Mandiri pada bulan Juli 1999 dan rekapitalisasi Bank Mandiri. Restrukturisasi Bank Peserta Penggabungan ke dalam Bank Mandiri juga mencakup:

- Restrukturisasi kredit yang diberikan;
- Restrukturisasi aset non-kredit yang diberikan;
- Rasionalisasi kantor cabang di dalam dan luar negeri;
- Rasionalisasi sumber daya manusia.

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 100 tanggal 24 Juli 1999, Bank Peserta Penggabungan secara hukum melakukan penggabungan usaha ke dalam Bank Mandiri. Akta Penggabungan Usaha tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan tersebut dinyatakan sah oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Selatan melalui Surat Keputusan No. 09031827089 tanggal 31 Juli 1999.

Pada tanggal efektif penggabungan usaha:

- Semua aset dan liabilitas Bank Peserta Penggabungan dialihkan ke Bank Mandiri sebagai Bank Hasil Penggabungan;
- Semua operasi dan aktivitas bisnis Bank Peserta Penggabungan dialihkan dan dioperasikan oleh Bank Mandiri;
- Bank Mandiri mendapat tambahan modal disetor sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan 1 (satu) lembar saham yang merupakan sisa saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada masing-masing Bank Peserta Penggabungan (Catatan 40a dan 40b).

Pada tanggal efektif dimaksud, Bank Peserta Penggabungan secara hukum dibubarkan tanpa proses likuidasi dan Bank Mandiri sebagai Bank Hasil Penggabungan menerima seluruh hak dan liabilitas dari Bank Peserta Penggabungan.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

b. Merger

At the end of February 1998, the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Government") announced its plan to restructure the Merged Banks. In connection with the restructurisation plan, the Government established Bank Mandiri in October 1998 through the payment of cash and the transfer the Government's shares of the Merged Banks (Notes 40a and 40b). The difference between the transfer price and the book value of the shares at the time of the restructurisation was not calculated as it was considered not practicable to do so. All losses incurred during the year of restructuring were recognised in the Recapitalisation Program.

The restructurisation plan was designed to merge the Merged Banks' business into Bank Mandiri on July 1999 and the recapitalisation of Bank Mandiri. The restructurisation of the Merged Banks into Bank Mandiri also covered the following:

- *Restructurisation of loans;*
- *Restructurisation of non-loan assets;*
- *Rationalisation of domestic and overseas offices;*
- *Rationalisation of human resources.*

Based on the Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 100 dated 24 July 1999, the Merged Banks were legally merged into Bank Mandiri. The Merger Deed was legalised by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-13.781.HT.01.04.TH.99 dated 29 July 1999 and approved by the Governor of Bank Indonesia in its Decision Letter No. 1/9/KEP.GBI/1999 dated 29 July 1999. The merger was declared effective by the Department Chief of the South Jakarta Ministry of Industry and Trade Office in its Decision Letter No. 09031827089 dated 31 July 1999.

Effective from the date of the merger:

- *All assets and liabilities of the Merged Banks were transferred to Bank Mandiri as the Surviving Bank;*
- *All operations and business activities of the Merged Banks were transferred and operated by Bank Mandiri;*
- *Bank Mandiri received additional paid-in capital amounted to Rp1,000,000 (full amount) or equivalent to 1 (one) share representing the remaining shares owned by the Government in the Merged Banks (Notes 40a and 40b).*

On the effective date, the Merged Banks were legally dissolved without liquidation process and Bank Mandiri, as the Surviving Bank, received all the rights and obligations from the Merged Banks.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Rekapitalisasi

Dalam rangka mengatasi kondisi ekonomi yang memburuk di Indonesia pada sektor perbankan, pada tanggal 31 Desember 1998, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan bank umum agar dapat memenuhi Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* yang selanjutnya disebut "CAR") minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Keikutsertaan bank umum dalam Program Rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, Pemerintah antara lain harus melakukan Program Rekapitalisasi Bank Umum terhadap seluruh Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum yang berstatus "*Bank Take Over*" oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN").

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 (PP No. 52/1999) tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada Bank Mandiri melalui penerbitan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah oleh Menteri Keuangan dengan nilai maksimum Rp137.800.000. Pelaksanaan PP No. 52/1999 diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 389/KMK.017/1999 dan No. 1/10/KEP/GBI tanggal 29 Juli 1999.

Selama Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut belum diterbitkan, pada saat itu Bank Mandiri mengakui adanya "Tagihan kepada Pemerintah" sebesar Rp137.800.000 sesuai dengan penegasan Komitmen Pemerintah melalui surat dari Menteri Keuangan No. S-360/MK.017/1999 tanggal 29 September 1999 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN melalui surat No. S-510/ M-PBUMN/1999 tanggal 29 September 1999.

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 1/1/GBI/DPIP tanggal 11 Oktober 1999 perihal Penerbitan Obligasi/Surat Utang Pemerintah dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia di Bank Mandiri, Bank Indonesia menyetujui tagihan kepada Pemerintah tersebut di atas termasuk dalam modal inti Bank Mandiri *(Tier I)* dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada tanggal 31 Juli 1999 sampai dengan 30 September 1999, dengan syarat bahwa selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 1999, Obligasi/Surat Utang Pemerintah telah diterima oleh Bank Indonesia.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

c. Recapitalisation

In response to the effects of the adverse economic conditions on the banking sector in Indonesia, on 31 December 1998, the Government issued Government Regulation No. 84 Year 1998 regarding Recapitalisation Program for Commercial Banks, which was designed to increase the paid-in capital of commercial banks to enable them to meet the minimum requirement of Capital Adequacy Ratio ("CAR"). The eligibility of commercial banks for inclusion in the Recapitalisation Program is based on requirements and procedures set forth in the Joint Decrees No. 53/KMK.017/1999 and No. 31/12/KEP/GBI dated 8 February 1999 of the Ministry of Finance and the Governor of Bank Indonesia. Based on the Joint Decrees, the Government, among others, shall implement the Recapitalisation Program for Commercial Banks with respect to all State-Owned Banks, Regional Development Banks, and Commercial Banks, with the status of "Bank Take Over", by the Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional or "BPPN").

On 28 May 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 (PP No. 52/1999) regarding additional capital investment by the Government of Republic of Indonesia in Bank Mandiri through issuance of Government Recapitalisation Bonds to be issued then by the Ministry of Finance with a value of up to Rp137,800,000. The implementation of PP No. 52/1999 was set forth in Joint Decrees of the Ministry of Finance and the Governor of Bank Indonesia No. 389/KMK.017/1999 and No. 1/10/KEP/GBI dated 29 July 1999.

While the Government Recapitalisation Bonds had not yet been issued, at the point in time, Bank Mandiri accounted the bonds as "Due from the Government" amounted to Rp137,800,000 in accordance with the Government's Commitment through the Ministry of Finance's letter No. S-360/MK.017/1999 dated 29 September 1999 and the approval of the Ministry of State-Owned Enterprises in letter No. S-510/M-PBUMN/1999 dated 29 September 1999.

Based on Bank Indonesia Letter No. 1/1/GBI/DPIP dated 11 October 1999, concerning the Issuance of Government Bonds/Debentures in connection with the Government of Republic of Indonesia's capital investment in Bank Mandiri, Bank Indonesia agreed to include the above receivable as Bank Mandiri's core capital (Tier 1) for the purposes of calculating its Capital Adequacy Ratio (CAR) as of 31 July 1999 through 30 September 1999, with a condition that not later than 15 October 1999 the Government Bonds/Debentures should have been received by Bank Indonesia.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Rekapitalisasi (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah di Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi, Pemerintah menambah penyertaan modal sampai sejumlah maksimum Rp42.200.000, sehingga penyertaan secara keseluruhan menjadi setinggi-tingginya sebesar Rp180.000.000.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 52 dan No. 97 Tahun 1999 tersebut di atas, maka dalam Perjanjian Rekapitalisasi Sementara antara Pemerintah dengan Bank Mandiri beserta perubahannya, Pemerintah telah mengeluarkan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebesar Rp103.000.000 pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Rp75.000.000 pada tanggal 28 Desember 1999, sehingga pada tanggal 31 Desember 1999 jumlah keseluruhan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian tersebut menjadi sebesar Rp178.000.000.

Berdasarkan Kontrak Manajemen pada tanggal 8 April 2000 antara Bank Mandiri dan Pemerintah, ditetapkan jumlah kebutuhan rekapitalisasi Bank Mandiri adalah sebesar Rp173.931.000 atau lebih kecil dari jumlah Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah. Dari kelebihan tersebut, sebesar Rp1.412.000 digunakan sebagai tambahan modal disetor, sedangkan sisanya sebesar Rp2.657.000 dikembalikan kepada Pemerintah pada tanggal 7 Juli 2000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebanyak 2.657.000 unit.

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-174/MK.01/2003 tanggal 24 April 2003 tentang pengembalian kelebihan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang sebelumnya digunakan sebagai tambahan modal, Bank Mandiri telah mengembalikan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebesar Rp1.412.000 kepada Pemerintah pada tanggal 25 April 2003 (Catatan 40b).

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan ("KMK-RI") No. 227/KMK.02/2003 tanggal 23 Mei 2003 dan KMK-RI No. 420/KMK-02/2003 tanggal 30 September 2003 yang antara lain memutuskan jumlah final tambahan penyertaan modal Pemerintah di Bank Mandiri sebesar Rp173.801.315 (Catatan 40b).

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Recapitalisation *(continued)*

Based on Government Regulation No. 97 year 1999 dated 24 December 1999 concerning the increase in capital investment from the Government in Bank Mandiri in relation to the Recapitalisation Program, the Government increased its capital investment to a maximum of Rp42,200,000, so that the total maximum investment become amounted to Rp180,000,000.

In relation to the implementation of the above Government Regulations No. 52 and No. 97 year 1999, in the Temporary Recapitalisation Agreement between the Government and Bank Mandiri and its amendment, the Government issued Government Recapitalisation Bonds in 2 (two) tranches of Rp103,000,000 on 13 October 1999 and Rp75,000,000 on 28 December 1999 so that as of 31 December 1999 the total Government Recapitalisation Bonds issued in accordance with the aforementioned agreements become amounted to Rp178,000,000.

Based on the Management Contract dated 8 April 2000 between Bank Mandiri and the Government, the total amount of recapitalisation required by Bank Mandiri was Rp173,931,000, or less than the amount of the Government Recapitalisation Bonds. The excess of Rp1,412,000 was used as additional paid-in capital and the remaining excess balance of Rp2,657,000 was returned to the Government on 7 July 2000 in the form of Government Recapitalisation Bonds equivalent to 2,657,000 units.

Based on the Letter from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-174/MK.01/2003 dated 24 April 2003 regarding the return of the excess Government Recapitalisation Bonds, which was previously used as additional paid-in capital, Government Recapitalisation Bonds amounted to Rp1,412,000 were returned to the Government by Bank Mandiri on 25 April 2003 (Note 40b).

The Ministry of Finance of Republic of Indonesia issued Decree Letter ("KMK-RI") No. 227/KMK.02/2003 dated 23 May 2003 and KMK-RI No. 420/KMK-02/2003 dated 30 September 2003 confirmed that the final amount of the addition of the Government's capital investment participation in Bank Mandiri amounted to Rp173,801,315 (Note 40b).

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penawaran umum perdana saham dan kuasi-reorganisasi

Penawaran umum perdana saham Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* yang selanjutnya disebut "IPO") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK"), pada tanggal 2 Juni 2003 dan telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-1551/PM/2003 tanggal 27 Juni 2003.

Nama perusahaan berubah dari semula PT Bank Mandiri (Persero) menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan perubahan Anggaran Dasar yang dilaksanakan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 2 tanggal 1 Juni 2003 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12783.HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6590.

Pada tanggal 14 Juli 2003, Bank Mandiri melakukan IPO atas 4.000.000.000 lembar Saham Biasa Seri B, dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham yang dijual dengan harga Rp675 (nilai penuh) per lembar saham. Penawaran umum kepada masyarakat tersebut merupakan divestasi atas 20,00% saham Bank Mandiri milik Pemerintah (Catatan 40a).

Pada tanggal 14 Juli 2003, sebanyak 19.800.000.000 lembar Saham Biasa Seri B Bank Mandiri telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat persetujuan dari Bursa Efek Jakarta No. S-1187/BEJ.PSJ/07-2003 tanggal 8 Juli 2003 dan Bursa Efek Surabaya No. JKT-028/LIST/BES/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003.

Kuasi-reorganisasi

Untuk menghilangkan konsekuensi negatif karena dibebani dengan saldo rugi, Bank Mandiri melakukan kuasi-reorganisasi sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") tanggal 29 Mei 2003.

Penyesuaian kuasi-reorganisasi telah dibukukan pada tanggal 30 April 2003, saldo rugi sebesar Rp162.874.901 dieliminasi ke akun tambahan modal disetor/agio saham.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

d. Initial public offering of Share and quasi-reorganisation

Initial public offering of Bank Mandiri's share

Bank Mandiri had submitted its registration for an Initial Public Offering ("IPO") to Financial Services Authorities ("FSA"), previously the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution ("Bapepam and LK") on 2 June 2003 and became effective based on the Letter from the Chairman of Bapepam and LK No. S-1551/PM/2003 dated 27 June 2003.

The Bank's name was changed from PT Bank Mandiri (Persero) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. based on an amendment to the Articles of Association which has been executed with Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 2 dated 1 June 2003 and had approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-12783.HT.01.04.TH.2003 dated 6 June 2003 that was published in the State Gazette Republic of Indonesia No. 63 dated 8 August 2003, Supplement State Gazette of Republic of Indonesia No. 6590.

On 14 July 2003, Bank Mandiri sold its 4,000,000,000 Series B common shares through IPO, with a nominal value of Rp500 (full amount) per share with an initial selling price of Rp675 (full amount) per share. The IPO to public represents a divestment of 20.00% of the ownership of the Government's share in Bank Mandiri (Note 40a).

On 14 July 2003, 19,800,000,000 of Bank Mandiri's Series B common shares were listed on the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange based on Jakarta Stock Exchange's Approval Letter No. S-1187/BEJ.PSJ/07-2003 dated 8 July 2003 and Surabaya Stock Exchange's Approval Letter No. JKT-028/LIST/BES/VII/2003 dated 10 July 2003.

Quasi-reorganisation

In order for Bank Mandiri to eliminate the negative consequences of being burdened by accumulated losses, the Bank undertook quasi-reorganisation as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPS-LB") on 29 May 2003.

The quasi-reorganisation adjustments were booked on 30 April 2003, which the accumulated losses of Rp162,874,901 were eliminated against additional paid-in capital/agio.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penawaran umum perdana saham dan kuasi-reorganisasi (lanjutan)

Kuasi-reorganisasi (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan tambahan modal disetor karena adanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 130 tanggal 29 September 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25309.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Oktober 2003 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 910 tanggal 23 Oktober 2003, Tambahan No. 93.

Pada tanggal 30 Oktober 2003, RUPS-LB Bank Mandiri menyetujui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003 tersebut sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 165 tanggal 30 Oktober 2003.

e. Divestasi kepemilikan saham oleh Pemerintah

Pada tanggal 11 Maret 2004, Pemerintah telah melakukan divestasi lanjutan atas 10,00% kepemilikan di Bank Mandiri atau sebanyak 2.000.000.000 lembar Saham Biasa Seri B melalui *private placements* (Catatan 40a).

f. Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi, penawaran umum obligasi dan *medium term notes*, penawaran umum terbatas saham, perubahan modal saham Bank Mandiri dan pembelian kembali saham Bank Mandiri

Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi Bank Mandiri

Pada tanggal 23 Juni 2023, Bank Mandiri menerbitkan *Medium Term Notes* Subordinasi II Bank Mandiri Tahun 2023 dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Bank Mandiri menerbitkan *Medium Term Notes* Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.

Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* Bank Mandiri

Pada tanggal 4 Juli 2023, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 ("Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 efektif sesuai Surat OJK Pasar Modal No. S-137/D.04/2023 tanggal 21 Juni 2023.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***d. Initial public offering of share and quasi-reorganisation** (continued)*

***Quasi-reorganisation** (continued)*

Bank Mandiri's Articles of Association were amended due to the changes in additional paid-in capital as a result of quasi-reorganisation, based on Notarial Deed of Sutjipto, S.H., No. 130 dated 29 September 2003 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-25309.HT.01.04.TH.2003 dated 23 October 2003 and was published in the State Gazette Republic of Indonesia No. 910, Supplement No. 93 dated 23 October 2003.

On 30 October 2003, Bank Mandiri's RUPS-LB approved the quasi-reorganisation as of 30 April 2003, which were notarised by Sutjipto, S.H., in Notarial Deed No. 165 dated 30 October 2003.

e. Divestment of Government share ownership

On 11 March 2004, the Government divested another 10.00% of its ownership in Bank Mandiri which was equivalent to 2,000,000,000 Series B common shares through private placements (Note 40a).

f. Public offering of subordinated bonds and medium term notes, public offering of bonds and medium term notes, limited public offering of shares, changes in share capital of Bank Mandiri and repurchase of Bank Mandiri shares

Public offering of Bank Mandiri subordinated bonds and medium term notes

On 23 June 2023, Bank Mandiri issued Subordinated Medium Term Notes II Bank Mandiri Year 2023 with nominal value of Rp100,000.

On 31 July 2018, Bank Mandiri issued Subordinated Medium Term Notes I Bank Mandiri Year 2018 with nominal value of Rp500,000.

Public offering of Bank Mandiri bonds and medium term notes

On 4 July 2023, Bank Mandiri issued Continuous Green Bond I Bank Mandiri Phase I Year 2023 ("Continuous Green Bond I Phase I") with nominal value of Rp5,000,000. Public offering of Continuous Green Bond I Bank Mandiri Phase I Year 2023 was effective based on Letter of FSA Capital Market No. S-137/D.04/2023 dated 21 June 2023.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi, penawaran umum obligasi dan *medium term notes*, penawaran umum terbatas saham, perubahan modal saham Bank Mandiri dan pembelian kembali saham Bank Mandiri (lanjutan)

Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* Bank Mandiri (lanjutan)

Pada tanggal 4 April 2023, Bank Mandiri menerbitkan *Euro Medium Term Notes* (EMTN) keempat, dengan nilai nominal sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) di *Singapore Exchange* (SGX).

Pada tanggal 19 April 2021, Bank Mandiri menerbitkan EMTN ketiga, yaitu *Sustainability Bond* Bank Mandiri 2021, dengan nilai nominal sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) di SGX.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Bank Mandiri menerbitkan EMTN kedua, dengan nilai nominal sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) dan pada tanggal 11 April 2019, menerbitkan EMTN pertama, dengan nominal sebesar USD750.000.000 (nilai penuh) di SGX.

Pada tanggal 12 Mei 2020, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 efektif sesuai Surat OJK Pasar Modal No. S-133/D.04/2020 tanggal 30 April 2020.

Pada tanggal 21 September 2018, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000.

Pada tanggal 15 Juni 2017, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000 (Catatan 30).

Pada tanggal 30 September 2016, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 efektif sesuai Surat OJK Pasar Modal No. S-530/D.04/2016 tanggal 22 September 2016.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Public offering of subordinated bonds and medium term notes, public offering of bonds and medium term notes, limited public offering of shares, changes in share capital of Bank Mandiri and repurchase of Bank Mandiri shares** (continued)*

***Public offering of Bank Mandiri bonds and medium term notes** (continued)*

On 4 April 2023, Bank Mandiri issued the fourth Euro Medium Term Notes (EMTN), with a nominal value of USD300,000,000 (full amount) in the Singapore Exchange (SGX).

On 19 April 2021, Bank Mandiri issued the third EMTN, namely the Sustainability Bond Bank Mandiri 2021, with a nominal value of USD300,000,000 (full amount) in the SGX.

On 13 May 2020, Bank Mandiri issued the second EMTN with nominal value of USD500,000,000 (full amount) and on 11 April 2019 the Bank issued the first EMTN with nominal value of USD750,000,000 (full amount) in the SGX.

On 12 May 2020, Bank Mandiri issued Continuous Bonds II Bank Mandiri Phase I Year 2020 ("Continuous Bonds II Phase I") with nominal value of Rp1,000,000. Public offering of Continuous Bonds II Bank Mandiri Phase I Year 2020 was effective based on letter of FSA Capital Market No. S-133,D.04/2020 dated 30 April 2020.

On 21 September 2018, Bank Mandiri issued Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase III Year 2018 ("Continuous Bonds I Phase III") with a nominal value of Rp3,000,000.

On 15 June 2017, Bank Mandiri issued Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase II Year 2017 ("Continuous Bonds I Phase II") with a nominal value of Rp6,000,000 (Note 30).

On 30 September 2016, Bank Mandiri issued Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase I Year 2016 ("Continuous Bonds I Phase I") with nominal amount of Rp5,000,000. Public offering of Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase I Year 2016 was effective based on Letter of FSA Capital Market No. S-530/D.04/2016 dated on 22 September 2016.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi, penawaran umum obligasi dan *medium term notes*, penawaran umum terbatas saham, perubahan modal saham Bank Mandiri dan pembelian kembali saham Bank Mandiri (lanjutan)

Penawaran umum terbatas saham Bank Mandiri

Untuk penguatan struktur permodalan, Bank Mandiri meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas ("PUT") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Terkait dengan PUT tersebut, Bank Mandiri telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pertama dan kedua kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK"), pada tanggal 26 Desember 2010 dan tanggal 18 Januari 2011. Bapepam dan LK berdasarkan Surat Pelaksana Ketua Bapepam dan LK No. S-807/BL/2011 tanggal 27 Januari 2011 menyatakan bahwa pendaftaran PUT dengan HMETD Bank Mandiri tersebut telah efektif. Bank Mandiri juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham sesuai hasil keputusan RUPS-LB tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti penerimaan laporan No. AHU-AH.01.10-07446 tanggal 10 Maret 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019617.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011.

Total HMETD yang diterbitkan Bank Mandiri adalah sebanyak 2.336.838.591 lembar saham dengan harga sebesar Rp5.000 (nilai penuh) per lembar yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2011 dan pelaksanaan periode perdagangan HMETD dimulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mandiri, tidak melaksanakan haknya untuk memperoleh HMETD, namun mengalihkannya kepada pemegang saham publik lainnya, sehingga komposisi persentase kepemilikan saham Pemerintah pada Bank Mandiri menjadi berkurang atau mengalami dilusi dari sebesar 66,68% sebelum periode pelaksanaan HMETD menjadi sebesar 60,00% setelah pelaksanaan HMETD.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Public offering of subordinated bonds and medium term notes, public offering of bonds and medium term notes, limited public offering of shares, changes in share capital of Bank Mandiri and repurchase of Bank Mandiri shares** (continued)*

Limited public offering of Bank Mandiri shares

To strengthen the capital structure, the Bank increased its issued and paid-up capital through the Limited Public Offering ("LPO") with Pre-emptive Rights ("HMETD"). Bank Mandiri had submitted the first and second registration statement of this LPO to the Financial Services Authority ("FSA"), previously the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution ("Bapepam and LK") on 26 December 2010 and 18 January 2011. Capital Market Supervisory Board and Financial Institution on 27 January 2011 based on the Bapepam and LK Acting Chief letter No. S-807/BL/2011 stated that the LPO with HMETD of Bank Mandiri had been effective. The Bank also obtained an approval from the shareholders based on the decision of Extraordinary General Meeting of Shareholder dated on 28 January 2011 as notarised by Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM No. 15 dated 25 February 2011 and reported it to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia with the receipt No. AHU-AH.01.10-07446 dated 10 March 2011. The Bank also registered it to company listing No. AHU-0019617.AH.01.09 Year 2011 dated 10 March 2011.

Total number of Pre-emptive Rights issued by Bank Mandiri was 2,336,838,591 shares at a price of Rp5,000 (full amount) per share which had been determined on 25 January 2011 and the execution period of Pre-emptive Rights trading started from 14 February 2011 until 21 February 2011.

The Government of the Republic of Indonesia as the controlling shareholder of Bank Mandiri, did not execute its right to acquire the Pre-emptive Rights, and transferred it to other public shareholders. As a result of this, Government's ownership in Bank Mandiri was reduced or diluted from 66.68%, prior to the execution of Pre-emptive Rights, to 60.00% after the execution of the Pre-emptive Rights.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi, penawaran umum obligasi dan *medium term notes*, penawaran umum terbatas saham, perubahan modal saham Bank Mandiri dan pembelian kembali saham Bank Mandiri (lanjutan)

Perubahan modal saham Bank Mandiri

Rincian perubahan modal saham ditempatkan dan disetor (Catatan 40a) adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Public offering of subordinated bonds and medium term notes, public offering of bonds and medium term notes, limited public offering of shares, changes in share capital of Bank Mandiri and repurchase of Bank Mandiri shares** (continued)*

Changes in share capital of Bank Mandiri

The details of changes in issued and paid-in-share capital (Note 40a) are as follows:

	Total saham/ *Number of shares*	
Setoran awal dalam pendirian oleh Pemerintah di tahun 1998	4.000.000	*Initial capital injection by the Government in 1998*
Penambahan modal disetor oleh Pemerintah di tahun 1999	251.000	*Increase in paid-in capital by the Government in 1999*
	4.251.000	
Penambahan modal disetor oleh Pemerintah di tahun 2003	5.749.000	*Increase in paid-in capital by the Government in 2003*
	10.000.000	
Penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp500 (nilai penuh) per saham melalui *stock split* di tahun 2003	20.000.000.000	*Decrease in par value per share from Rp1,000,000 (full amount) to Rp500 (full amount) per share through stock split in 2003*
Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2004	132.854.872	*Shares from conversion of MSOP I in 2004*
Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2005	122.862.492	*Shares from conversion of MSOP I in 2005*
Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2006	71.300.339	*Shares from conversion of MSOP I in 2006*
Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2006	304.199.764	*Shares from conversion of MSOP II in 2006*
Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2007	40.240.621	*Shares from conversion of MSOP I in 2007*
Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2007	343.135	*Shares from conversion of MSOP II in 2007*
Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2007	77.750.519	*Shares from conversion of MSOP III in 2007*
Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2008	8.107.633	*Shares from conversion of MSOP I in 2008*
Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2008	399.153	*Shares from conversion of MSOP II in 2008*
Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2008	147.589.260	*Shares from conversion of MSOP III in 2008*
Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2009	86.800	*Shares from conversion of MSOP II in 2009*
Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2009	64.382.217	*Shares from conversion of MSOP III in 2009*
Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2010	6.684.845	*Shares from conversion of MSOP II in 2010*
Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2010	19.693.092	*Shares from conversion of MSOP III in 2010*
Penambahan modal melalui PUT dengan HMETD pada tahun 2011	2.336.838.591	*Increase of Capital through Limited Public Offering (LPO) with Pre-emptive Rights in 2011*
Penurunan nilai nominal saham dari Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp250 (nilai penuh) per saham melalui *stock split* di tahun 2017	23.333.333.333	*Decrease of par value of share from Rp500 (full amount) to Rp250 (full amount) per share through stock split in 2017*
Penurunan nilai nominal saham dari Rp250 (nilai penuh) menjadi Rp125 (nilai penuh) per saham melalui *stock split* di tahun 2023	46.666.666.666	*Decrease of par value of share from Rp250 (full amount) to Rp125 (full amount) per share through stock split in 2023*
Total	**93.333.333.332**	***Total***

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi, penawaran umum obligasi dan *medium term notes*, penawaran umum terbatas saham, perubahan modal saham Bank Mandiri dan pembelian kembali saham Bank Mandiri (lanjutan)

Perubahan modal saham Bank Mandiri (lanjutan)

Pemecahan nilai nominal saham Bank Mandiri:

Berdasarkan keputusan RUPS-LB tanggal 21 Agustus 2017 yang dituangkan dalam Akta No. 36, tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., pemegang saham Bank Mandiri antara lain menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Bank dari Rp500 (nilai penuh) per saham menjadi Rp250 (nilai penuh) per saham sehingga modal ditempatkan menjadi sejumlah 46.666.666.666 lembar saham yang terdiri atas 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 46.666.666.665 lembar saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 16 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman S.H., MLI., M.Kn., pemegang saham Bank Mandiri antara lain menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) Bank dari Rp250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp125 (nilai penuh) per saham sehingga modal ditempatkan menjadi sejumlah 93.333.333.332 lembar saham yang terdiri atas 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 93.333.333.331 lembar saham Seri B. Untuk saham Seri A Dwiwarna milik negara Republik Indonesia akan tetap dipertahankan 1 (satu) saham dan sisanya akan diperhitungkan untuk menambah saham Seri B milik Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan *stock split* berlaku efektif pada tanggal 6 April 2023.

Pembelian kembali saham Bank Mandiri

Bank Mandiri melalui surat No. CEO/30/2020 tanggal 18 Maret 2020 mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan pembelian kembali saham Bank Mandiri kepada OJK secara bertahap sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui surat No. S-50/PB.31/2020 tanggal 19 Maret 2020. Selanjutnya, Bank Mandiri telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 20 Maret 2020 sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000. Pembelian kembali tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Public offering of subordinated bonds and medium term notes, public offering of bonds and medium term notes, limited public offering of shares, changes in share capital of Bank Mandiri and repurchase of Bank Mandiri shares** (continued)*

***Changes in share capital of Bank Mandiri** (continued)*

Stock split of Bank Mandiri:

Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPS-LB") dated 21 August 2017 as in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 36 dated 24 August 2017, the shareholders of Bank Mandiri, approved the stock split of the Bank from Rp500 (full amount) per share to Rp250 (full amount) per share which resulted increase in capital into 46,666,666,666 shares consisting of 1 (one) Dwiwarna Series A share and 46,666,666,665 Series B shares.

Based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders ("RUPS") dated 14 March 2023, as recorded in the Notarial Deed of Utiek R. Abdurachman S.H., MLI., M.Kn., No. 12 dated 16 March 2023, the shareholders of Bank Mandiri, among others, approved a stock split of the bank from Rp250 (full amount) per share to Rp125 (full amount) per share. This results in an increase in the issued capital to a total of 93,333,333,332 shares, consisting of 1 (one) Dwiwarna Series A shares and 93,333,333,331 Series B common shares. For the Dwiwarna Series A shares owned by the Republic of Indonesia, 1 (one) share will be retained, and the remaining will be allocated to increase the Series B common shares owned by the Republic of Indonesia. The stock split was effective on 6 April 2023.

Repurchase of Bank Mandiri shares

Bank Mandiri through letter No. CEO/30/2020 dated 18 March 2020 submit a request of approval of treasury stock to FSA gradually with maximum amount Rp2,000,000, and has been approved by FSA through letter No. S-50/PB.31/2020 dated 19 March 2020. Furthermore, Bank Mandiri has declare this information to Indonesia Stock Exchange ("IDX") on 20 March 2020 regarding execution of treasury stock that had been issued and registered in IDX with maximum amount Rp2,000,000. Treasury stock will be executed gradually for 3 (three) months since 20 March 2020 until 19 June 2020.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi dan *medium term notes* subordinasi, penawaran umum obligasi dan *medium term notes*, penawaran umum terbatas saham, perubahan modal saham Bank Mandiri dan pembelian kembali saham Bank Mandiri (lanjutan)

Pembelian kembali saham Bank Mandiri (lanjutan)

Bank Mandiri telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 35.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp150.895. Pada bulan Desember 2022, Bank Mandiri telah melepaskan saham treasuri sebanyak 35.400.000 lembar saham (lihat Catatan 40d).

g. Entitas Anak

Entitas Anak yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Public offering of subordinated bonds and medium term notes, public offering of bonds and medium term notes, limited public offering of shares, changes in share capital of Bank Mandiri and repurchase of Bank Mandiri shares** (continued)*

***Repurchase of Bank Mandiri shares** (continued)*

Bank Mandiri has executed repurchase of Bank Mandiri shares amounted 35,400,000 shares (nominal value Rp250 (full amount) per share) with acquisition price Rp150,895. In December 2022, Bank Mandiri released 35,400,000 treasury shares (see Note 40d).

g. Subsidiaries

Subsidiaries included in the consolidated financial statements as of 31 December 2023 and 2022, are as follows:

Nama Entitas Anak	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Kedudukan/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 2023	2022	*Name of Subsidiaries*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)	Perbankan syariah/ *Sharia banking*	Jakarta	51,47	51,47	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (formerly PT Bank Syariah Mandiri)*
Bank Mandiri (Europe) Limited (BMEL)	Perbankan/ *Commercial banking*	London	100,00	100,00	*Bank Mandiri (Europe) Limited (BMEL)*
PT Mandiri Sekuritas	Sekuritas/*Securities*	Jakarta	99,99	99,99	*PT Mandiri Sekuritas*
PT Bank Mandiri Taspen (dahulu PT Bank Mandiri Taspen Pos)	Perbankan/ *Commercial banking*	Jakarta	51,10	51,10	*PT Bank Mandiri Taspen (formerly PT Bank Mandiri Taspen Pos)*
PT Mandiri Tunas Finance (MTF)	Pembiayaan konsumen/ *Consumer financing*	Jakarta	51,00	51,00	*PT Mandiri Tunas Finance (MTF)*
Mandiri International Remittance Sendirian Berhad (MIR)	Layanan *remittance*/ *Remittance service*	Kuala Lumpur	100,00	100,00	*Mandiri International Remittance Sendirian Berhad (MIR)*
PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	Jakarta	51,00	51,00	*PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	Jakarta	80,00	80,00	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
PT Mandiri Utama Finance (MUF)	Pembiayaan konsumen/ *Consumer financing*	Jakarta	51,00	51,00	*PT Mandiri Utama Finance (MUF)*
PT Mandiri Capital Indonesia (MCI)	Modal ventura/ *Venture capital*	Jakarta	99,99	99,99	*PT Mandiri Capital Indonesia (MCI)*

Total aset Entitas Anak tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (sebelum eliminasi) masing-masing sebagai berikut:

The Subsidiaries' total assets as of 31 December 2023 and 2022 (before elimination) are as follows:

Nama Entitas Anak	Tahun beroperasi komersial/ *Year of commercial operation*	Total aset (sebelum eliminasi)/ *Total assets (before elimination)* 2023	2022	*Name of Subsidiaries*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)	1955	353.624.125	305.727.438	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (formerly PT Bank Syariah Mandiri)*
Bank Mandiri (Europe) Limited	1999	4.047.572	3.765.899	*Bank Mandiri (Europe) Limited*
PT Mandiri Sekuritas	1992	4.725.946	4.141.024	*PT Mandiri Sekuritas*
PT Bank Mandiri Taspen (dahulu PT Bank Mandiri Taspen Pos)	1970	60.537.057	53.894.750	*PT Bank Mandiri Taspen (formerly PT Bank Mandiri Taspen Pos)*
PT Mandiri Tunas Finance	1989	29.727.392	23.742.009	*PT Mandiri Tunas Finance*
Mandiri International Remittance Sendirian Berhad	2009	24.393	24.360	*Mandiri International Remittance Sendirian Berhad*
PT AXA Mandiri Financial Services	1991	41.114.472	40.164.675	*PT AXA Mandiri Financial Services*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	2008	2.824.452	2.706.131	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
PT Mandiri Utama Finance	2015	10.625.581	7.612.738	*PT Mandiri Utama Finance*
PT Mandiri Capital Indonesia	2015	5.155.131	5.774.807	*PT Mandiri Capital Indonesia*
Total		**512.406.121**	**447.553.831**	***Total***

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), PT Bank BRIsyariah Tbk. ("BRIS"), dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* ("CMA") atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, BRIS akan menjadi entitas yang menerima penggabungan secara hukum atau *surviving legal entity* dan seluruh pemegang saham BNIS dan BSM akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Izin Penggabungan diperoleh dari OJK melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan BSM dan BNIS ke dalam BRIS Serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Bank Hasil Penggabungan.

BRIS awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971.

BJA memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.1-4-40 tanggal 3 Juli 1969. Sejak tanggal 16 Oktober 2008, BJA telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia. Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Syariah Indonesia Tbk.** (formerly PT Bank Syariah Mandiri)*

On 12 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), PT Bank BRIsyariah Tbk. ("BRIS"), and PT Bank BNI Syariah ("BNIS") have signed a Conditional Merger Agreement ("CMA") for the business merger of BSM, BRIS, and BNIS (Merger Participating Banks).

Based on CMA, after the effective date of the merger, BRIS will become the surviving legal entity and all shareholders of BNIS and BSM will become shareholders of the entity receiving the amalgamation based on the amalgamation ratio.

The Merger Approval was obtained from the FSA through a copy of the Decree of the FSA Board of Commissioners No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permits to Merge BSM and BNIS into BRIS as well as Permits to Change Names by Using PT Bank BRIsyariah Tbk Business Permit to Become Business Permit in the Name of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Merged Bank.

BRIS was initially established under the name of PT Bank Jasa Arta ("BJA") based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 of Liem Toeng Kie, S.H., notary in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Law of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. J.A.5/70/4 dated 28 May 1970 and has been published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 43 dated 28 May 1971, Supplement No. 242/1971.

BJA obtained its business license to operate as a commercial bank from Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. D.15.1-4-40 dated 3 July 1969. Since 16 October 2008, BJA has obtained license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional bank into a commercial bank based on sharia principles. The changes in name and business activity based on sharia principles from BJA to PT Bank Syariah BRI was based on BJA Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (lanjutan)

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Pada tanggal 27 Desember 2013, PT Bank BRISyariah mendapatkan izin sebagai bank devisa berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013.

Perjanjian Antar Pemegang Saham Bank Hasil Penggabungan tanggal 26 Januari 2021 oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") menyetujui bahwa Bank Mandiri merupakan pihak yang melakukan Pengendalian atas Bank Hasil Penggabungan.

Selanjutnya keputusan RUPSLB BRIS terkait penggabungan BSM dan BNIS kedalam BRIS dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRIsyariah Tbk No. 37 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021 yang berlaku efektif 1 Februari 2021.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Syariah Indonesia Tbk.** (formerly PT Bank Syariah Mandiri) (continued)*

In 2009, PT Bank Syariah BRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on PT Bank Syariah BRI Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta which was subsequently amended by PT Bank Syariah BRI Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 20 dated 17 September 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-53631.AH.01.02.TH2009 dated 5 November 2009. It was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 dated 1 December 2009, Supplement No. 27908 and Decision Letter from the Governor of Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 dated 15 December 2009.

On 27 December 2013, PT Bank BRISyariah obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013.

Agreement between Shareholders of the Merged Bank dated 26 January 2021 by and between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") agreed that Bank Mandiri is a party who exercises control over the Merged Bank.

Subsequently, the decision of the BRIS' EGMS regarding the merger of BSM and BNIS into BRIS was restated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Bank BRIsyariah Tbk. No. 37 dated 14 January 2021 made by Notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This amendment was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 dated 28 January 2021 which was effective on 1 February 2021.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (lanjutan)

Transaksi pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari Bank Mandiri, BNI dan BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian "Tambahan Modal Disetor" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Ekuitas dari PT BRIsyariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai "ekuitas *merging entities*" pada bagian ekuitas. Rincian jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Syariah Indonesia Tbk.** (formerly PT Bank Syariah Mandiri) (continued)*

The transaction for the establishment of PT Bank Syariah Indonesia Tbk is a business combination of entities under common control where the controlling shareholder (ultimate shareholder) of Bank Mandiri, BNI and BRI is the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, transactions are treated based on the pooling of interest method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

The difference between the amount of consideration transferred and the carrying amount of the investment obtained from this transaction is recognized as "Difference in Value from Business Combination Transactions of Entities Under Common Control" and presented as "Additional Paid-in Capital" in the equity section of the consolidated statement of financial position. Prior to the date of the merger, the equity of PT BRIsyariah Tbk. and PT Bank BNI Syariah is presented as "merging entities equity" in the equity section. Details of the amount of consideration transferred and the carrying amount received are as follows:

	Jumlah imbalan yang dialihkan/ *The consideration transferred*	**Jumlah tercatat investasi/ *Investment carrying amount***	**Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital***	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	10.905.424	11.232.496	327.072	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*

Selanjutnya keputusan RUPSLB BRIS antara lain terkait Perubahan Anggaran Dasar Bank dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk No. 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang antara lain perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006268.AH.01.02 tahun 2021, dan telah diterima dan dicatatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0061498 dan No. AHU–AH.01.03.0061501 yang seluruhnya ditetapkan tanggal 1 Februari 2021.

Furthermore, the decisions of the BRIS' EGMS, among others related to the Amendment to the Bank's Articles of Association, were restated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment of the Articles of Association for the Change of Name of PT Bank BRIsyariah Tbk. No. 38 dated 14 January 2021 made before Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notary in Jakarta, which, among others, changed its name to PT Bank Syariah Indonesia Tbk. and this change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0006268.AH.01.02 year 2021, and by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03.061498 and No. AHU-AH.01.03.061501 which are all set on 1 February 2021.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (lanjutan)

Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar BRIS melalui Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai penambahan klasifikasi saham Entitas Anak sehingga mengakibatkan Perubahan Komposisi Kepemilikan Entitas Anak dan Perubahan Pengendalian dari Negara Republik Indonesia yang semula Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar Entitas Anak terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai modal ditempatkan dan disetor PT Bank Syariah Indonesia Tbk. melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu modal ditempatkan dan disetor PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menjadi sebanyak 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.064.630 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Syariah Indonesia Tbk.** (formerly PT Bank Syariah Mandiri) (continued)*

Furthermore, changes to the BRIS' Articles of Association through the Deed of Statement of Amendment to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 146 dated 24 June 2022 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, regarding the addition of the classification of the Subsidiary's shares resulting in a Change in the Composition of Subsidiary's Ownership and a Change in Control from the Republic of Indonesia which was originally Ultimate Controlling Shareholders (PSPT) to Controlling Shareholders (PSP) and has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 dated 22 July 2022 regarding Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Furthermore, the latest changes to the Subsidiary's Articles of Association through the Deed of Statement of Resolutions of the Board of Commissioners Meeting of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 191 dated 29 December 2022 made before Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., as a replacement for Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notary in Jakarta regarding the issued and paid-up capital of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. through the Capital Increase mechanism by Providing Pre-emptive Rights I ("PMHMETD I"), which is PT Bank Syariah Indonesia Tbk.'s issued and paid-up capital become 46,129,260,138 (forty six billion one hundred and twenty nine million two hundred sixty thousand one hundred thirty eight) shares with a total nominal value of Rp23,064,630 and have been received and recorded by the Minister Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 dated 29 December 2022 regarding Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

The Head Office of PT Bank Syariah Indonesia Tbk, is located at The Tower Building, Jalan Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi Sub-district, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

Bank Mandiri (Europe) Limited

Bank Mandiri (Europe) Limited (“BMEL”) didirikan di London, Inggris pada tanggal 22 Juni 1999 berdasarkan “*The Companies Act 1985 of the United Kingdom*”. BMEL didirikan melalui konversi dari Bank Exim cabang London menjadi Entitas Anak yang dimiliki penuh oleh Bank Mandiri dan efektif beroperasi sejak 31 Juli 1999. Sebagai Entitas Anak yang memiliki lisensi Bank Komersial di United Kingdom, BMEL disupervisi oleh *Prudential Regulation Authority* (“PRA”) dan *Financial Conduct Authority* (“FCA”) dibawah naungan Bank of England serta HM Treasury of the United Kingdom.

PT Mandiri Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas (”Mandiri Sekuritas”), dahulu bernama PT Merincorp Securities Indonesia (“MSI”), didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. Mandiri Sekuritas merupakan hasil penggabungan usaha PT Bumi Daya Sekuritas (“BDS”), PT Exim Sekuritas (“ES”) dan PT Merincorp Securities Indonesia (“MSI”) yang ditempuh dengan cara meleburkan BDS dan ES ke dalam MSI. MSI memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan portofolio efek dan penjamin emisi portofolio efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) berdasarkan surat keputusan No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 23 Januari 1992. Penggabungan usaha tersebut berdasarkan Akta No. 116 tanggal 31 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Vita Buena, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2000 berdasarkan Surat Keputusan No. C-18762.HT.01.04-TH.2000 dan izin usaha yang diperoleh MSI sebelumnya masih bisa tetap digunakan oleh PT Mandiri Sekuritas.

PT Mandiri Sekuritas memiliki 99,93% dari total saham PT Mandiri Manajemen Investasi, Entitas Anak yang didirikan tanggal 26 Oktober 2004 dan bergerak di bidang manajemen dan penasehat investasi. Mandiri Sekuritas juga memiliki 100% dari total saham Mandiri Securities Pte. Ltd., perusahaan yang memperoleh lisensi layanan pasar modal untuk jenis usaha *“Dealing in Securities and Advising Corporate Finance and Monetary Authority of Singapore”* berdasarkan lisensi No. CMS100566-1 tanggal 10 November 2016.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

Bank Mandiri (Europe) Limited

Bank Mandiri (Europe) Limited (“BMEL”) was established in London, United Kingdom on 22 June 1999 based on “The Companies Act 1985 of the United Kingdom”. BMEL was established through the conversion of the London branch of Bank Exim into a wholly owned Subsidiary of Bank Mandiri and has been operating effectively since 31 July 1999. As a Subsidiary that has a Commercial Bank license in the United Kingdom, BMEL is supervised by the Prudential Regulation Authority (“PRA”) and The Financial Conduct Authority (“FCA”) is under the supervision of the Bank of England and HM Treasury of the United Kingdom.

PT Mandiri Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri Sekuritas"), formerly known as PT Merincorp Securities Indonesia ("MSI"), incorporated under Act No. 1 dated 2 December 1991 made before notary Sutjipto, S.H. Mandiri Sekuritas is the result of the merger of PT Bumi Daya Sekuritas ("BDS"), PT Exim Sekuritas ("ES") and PT Merincorp Securities Indonesia ("MSI") which was accomplished by merging BDS and ES into MSI. MSI obtained a license as a securities broker and underwriter of the securities portfolio from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam") by its decree letter No. KEP-12/PM/1992 and No. KEP-13/PM/1992 and started its operational activities on 23 January 1992. The merger was based on the Deed No. 116 dated 31 July 2000 made before Notary Ny. Vita Buena, S.H., and which was approved by the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia on 25 August 2000 by Decree No. C-18762.HT.01.01-TH.2000 and business permits obtained previously by MSI can still be used by PT Mandiri Sekuritas.

PT Mandiri Sekuritas owns 99.93% of total shares of PT Mandiri Manajemen Investasi, a Subsidiary that was established on 26 October 2004 and is engaged in investment management and advisory. Mandiri Sekuritas also owns 100% of the total shares of Mandiri Securities Pte. Ltd., a company engage a capital market service license for the business type "Dealing in Securities and Advising Corporate Finance and Monetary Authority of Singapore" based on license No. CMS100566-1 dated 10 November 2016.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Mandiri Sekuritas (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2012, Bank Mandiri melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk tunai pada Mandiri Sekuritas, sebesar Rp29.512. Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat tertanggal 31 Oktober 2012 dan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (*circular resolution*) tertanggal 27 Desember 2012 atas penambahan penyertaan modal tersebut. Setelah dilaksanakannya penambahan penyertaan modal tersebut, porsi kepemilikan Bank Mandiri pada Mandiri Sekuritas meningkat dari 95,69% menjadi 99,99% dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan Mandiri Sekuritas.

PT Bank Mandiri Taspen

PT Bank Sinar Harapan Bali ("BSHB") didirikan sebagai Bank Pasar pada tanggal 23 Februari 1970 dengan nama MAI Bank Pasar Sinar Harapan Bali, kemudian pada tanggal 3 November 1992 Bank ini mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 4 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., notaris di Denpasar dan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/KMK.017/1994 tanggal 10 Maret 1994. Pada tanggal 3 Mei 2008 dilangsungkan penandatanganan Akta Akuisisi antara pemegang saham BSHB dan Bank Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Akta Akuisisi No. 4 tanggal 3 Mei 2008 dibuat oleh I Wayan Sugitha, S.H., Notaris di Denpasar. Penandatanganan Akta Akuisisi ini menandai awal kepemilikan Bank Mandiri atas 80,00% saham BSHB, dimana selanjutnya pengelolaan BSHB akan dilakukan secara terpisah dari Bank Mandiri sebagai bank yang tetap berdiri sendiri (*stand-alone bank*) dengan fokus utama pada pengembangan bisnis Mikro dan Usaha Kecil.

Pada tanggal 24 Juli 2015, OJK telah menyetujui perubahan nama PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi PT Bank Mandiri Taspen Pos dan memberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha dengan nama Bank Mantap. Perubahan nama disertai pula izin perubahan logo dari OJK pada tanggal 31 Juli 2015. Perubahan nama dan logo tersebut telah diumumkan kepada publik pada tanggal 7 Agustus 2015.

Pada tanggal 9 Oktober 2017, Bank Mandiri Taspen Pos mengadakan RUPSLB yang menyetujui perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan nama dari semula bernama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap").

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Mandiri Sekuritas** (continued)*

On 28 December 2012, Bank Mandiri increased its capital investment in form of cash at Mandiri Sekuritas, amounted to Rp29,512. Bank Mandiri obtained approval from Bank Indonesia through its letter dated 31 October 2012 and the circular resolution of shareholders dated 27 December 2012 for the capital investment increment. After the execution of the additional capital investment, the Bank's ownership at Mandiri Sekuritas increased from 95.69% to 99.99% of the total shares issued by Mandiri Sekuritas.

PT Bank Mandiri Taspen

PT Bank Sinar Harapan Bali ("BSHB") was established as the Micro Banking on 23 February 1970 under the name MAI Bank Pasar Sinar Harapan Bali, then on 3 November 1992 the Bank transformed into Limited Liability Company based on Deed No. 4 made before notary Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., Notary in Denpasar and obtained a business license as a commercial bank under the decree letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 77/KMK.017/1994 dated 10 March 1994. On 3 May 2008, shareholders of BSHB and Bank Mandiri signed the acquisition deed as stated in the Acquisition Deed No. 4 dated 3 May 2008 made before notary I Wayan Sugitha, S.H., notary in Denpasar. The signing of the Acquisition deed is the beginning of Bank Mandiri's ownership of 80.00% BSHB shares, wherein the management of BSHB will be carried out separately from Bank Mandiri as a stand-alone bank with the main focus on developing Micro and Small Businesses.

On 24 July 2015, the FSA has approved the name changes of PT Bank Sinar Harapan Bali to PT Bank Mandiri Taspen Pos and given permission to conduct business under the name of Bank Mantap. Name and logo changes approved by FSA on 31 July 2015 and announced to public on 7 August 2015.

On 9 October 2017, Bank Mandiri Taspen Pos held an Extraordinary General Meeting of Shareholders which approved the changes in the composition of shareholders and the changes of name, from PT Bank Mandiri Taspen Pos to PT Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap").

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri Taspen (lanjutan)

Untuk menguatkan ekspansi usaha dan menjadi Bank Nasional yang memiliki jaringan usaha di seluruh pelosok Indonesia, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 53 tanggal 31 Oktober 2016 dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Notaris di Denpasar, yang mana kemudian ditegaskan dengan Penegasan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Maret 2019 mengenai Pemindahan Kedudukan Kantor Pusat Bank. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 11 Maret 2019 No. AHU-AH.01.03-138220 dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan No. AHU-0039461. AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019. Perubahan Anggaran Dasar tersebut juga telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012925.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri Taspen serta telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-5/PB.1/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Rencana Pemisahan dan Pemindahan Alamat Kantor Pusat ("KP"), Bank Mantap memindahkan Kantor Pusatnya yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar-Bali menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Perpindahan kantor pusat tersebut kemudian dilaksanakan secara efektif pada tanggal 11 Maret 2019.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 28 Desember 2020, komposisi kepemilikan saham Bank Mandiri di Bank Mantap menjadi 51,098% dan saham PT Taspen (Persero) menjadi 48,437% serta pemegang saham individual menjadi 0,465%. Perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut berlaku efektif sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan didapatkannya persetujuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta dari sisi administratif dengan dilakukannya laporan perubahan komposisi permodalan ke Otoritas Jasa Keuangan.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Mandiri Taspen** (continued)*

To expand the business and become National Bank that have branches all over Indonesia, based on Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 53 dated 31 October 2016 made by Notary I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H, notary in Denpasar as affirmed by Meeting Affirmation Decision No. 7 dated 5 March 2019 regarding Transfer of Bank's Head Office Location. The Deed has been submitted to Ministry of Law and Human Right of Republic of Indonesia as stated on notification acceptance letter of the change of the Company's Information dated 11 March 2019 No. AHU-AH.01.03.-138220 and registered on the Company register No. AHU-0039461.AH.01.11 year 2019 dated 11 March 2019. The Change of Bank's Article of Association has also been approved based on the Decree of Ministry of Law and Human Right of Republic Indonesia No. AHU-0012925.AH.01.02 year 2019 regarding Approval of Amendments to the Article of Association of PT Bank Mandiri Taspen and has received approval from FSA No. S-5/PB.1/2019 dated 28 January 2019 regarding Separation and Transfer of Head Office Location Plan, Bank Mantap transfer their Head Office from Denpasar-Bali to Central Jakarta. The head office relocation was then carried out effectively on 11 March 2019.

Based on Circular Decision of Shareholder PT Bank Mandiri Taspen dated 16 December 2020 as stated on Deed of General Meeting of Shareholders Resolutions No. 41 dated 28 December 2020, the ownership of Bank Mandiri in Bank Mantap become 51.098%, PT Taspen (Persero) became 48.437%, and individual ownership became 0.465%. The change in the composition of share ownership has been effective since 13 January 2021 with the approval and receipt of notification of the changes to the Article of Association of PT Bank Mandiri Taspen from Ministry Law and Human Right regarding the changes in authorized capital, issued capital and paid-up in capital, and from administrative perspective, by reporting to FSA about the Change of the Shareholder Composition.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri Taspen (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* yang timbul dari akuisisi PT Bank Mandiri Taspen sebesar Rp19.219 diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun dengan pertimbangan atas estimasi manfaat ekonomis atas *goodwill* tersebut. Efektif tanggal 1 Januari 2011, sesuai PSAK 22 (Revisi 2009), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi tapi diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap penurunan nilai *goodwill* tersebut sesuai PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset" (Catatan 2s). Saldo *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp21.043.

PT Mandiri Tunas Finance

PT Mandiri Tunas Finance ("MTF"), dahulu PT Tunas Financindo Sarana ("TFS") adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan konsumen. MTF didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 262 tanggal 17 Mei 1989 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4868.HT.01.01.TH.89 tanggal 1 Juni 1989 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 57, Tambahan No. 1369 tanggal 18 Juli 1989. Kegiatan komersial MTF dimulai tahun 1989. MTF memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dalam bidang sewa menyewa biasa, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 1021/KMK.13/1989 tanggal 7 September 1989, No. 54/KMK.013/1992 tanggal 15 Januari 1992 dan No. 19/KMK.017/2001 tanggal 19 Januari 2001. Sesuai dengan Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM pada tanggal 6 Februari 2009, dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli antara pemegang saham MTF (PT Tunas Ridean Tbk. dan PT Tunas Mobilindo Parama) dengan Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri mengakuisisi 51,00% kepemilikan saham atas MTF melalui pembelian 1.275.000.000 lembar saham MTF (nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga Rp290.000.

Pengalihan 51,00% kepemilikan kepada Bank Mandiri ini telah disahkan dalam RUPS-LB MTF sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPSLB No. 8 tanggal 6 Februari 2009 dan telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-01575 tertanggal 11 Maret 2009. Akuisisi ini juga telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/3/DPB1/TPB1-1 tertanggal 8 Januari 2009.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Mandiri Taspen** (continued)*

Prior to 1 January 2011, goodwill arising from the acquisition of PT Bank Mandiri Taspen amounted to Rp19,219 was amortised using the straight-line method over 5 (five) years with the estimation of economic benefits of the goodwill. Effective on 1 January 2011, in accordance with SFAS No. 22 (Revised 2009), "Business Combinations", goodwill is not amortised but is tested for impairment on annual basis. The Bank periodically evaluates the impairment of goodwill in accordance with SFAS No. 48, "Impairment of Assets" (see Note 2s). The balance of goodwill on 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp21,043.

PT Mandiri Tunas Finance

PT Mandiri Tunas Finance ("MTF"), formerly PT Tunas Financindo Sarana ("TFS") is a company engaged in consumer financing activities. MTF was established based on Notarial Deed of Misahardi Wilamarta, S.H., No. 262 dated 17 May 1989 and approved by the Ministry of Justice through its Decision Letter No. C2-4868.HT.01.01.TH.89 dated 1 June 1989 and published in State Gazette No. 57, Supplement No. 1369 dated 18 July 1989. MTF commenced its commercial activities in 1989. MTF obtained a business license to operate as leasing, factoring and consumer financing company from Minister of Finance in its Decision Letter No. 1021/KMK.13/1989 dated 7 September 1989, No. 54/KMK.013/1992 dated 15 January 1992 and No. 19/KMK.017/2001 dated 19 January 2001. Based on Notarial Deed of Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM, dated 6 February 2009, the Bank entered into a sales and purchase agreement with MTF's shareholders (PT Tunas Ridean Tbk. and PT Tunas Mobilindo Parama) to acquire 51.00% ownership of MTF through purchase of 1,275,000,000 shares of MTF (the nominal value of Rp100 (full amount)) per share amounted to Rp290,000.

The acquisition of 51.00% of MTF shares ownership by Bank Mandiri was approved in the Extraordinary General Shareholders Meeting of MTF as stated in the Minutes of Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 8 dated 6 February 2009 and listed in Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights as affirmed by the Ministry of Law and Human Rights through its Letter No. AHU-AH.01.10-01575 dated 11 March 2009. This acquisition had been approved by Bank Indonesia through the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 11/3/DPB1/TPB1-1 dated 8 January 2009.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Mandiri Tunas Finance (lanjutan)

Perubahan nama TFS menjadi MTF dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2009, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tunas Financindo Sarana No. 181 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-4056.AH.01.02.TH.09 pada tanggal 26 Agustus 2009 dan MTF telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dalam bidang sewa menyewa biasa, anjak piutang dan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-352/KM.10/2009 tanggal 29 September 2009.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* yang timbul dari akuisisi MTF sebesar Rp156.807 diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun dengan pertimbangan atas estimasi manfaat ekonomis atas *goodwill* tersebut. Efektif tanggal 1 Januari 2011, sesuai PSAK 22 (Revisi 2009), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi tapi diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Bank Mandiri secara berkala melakukan evaluasi terhadap penurunan nilai *goodwill* tersebut sesuai PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset" (Catatan 2.r.iii). Saldo *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp96.697.

Mandiri International Remittance Sendirian Berhad

Mandiri International Remittance Sendirian Berhad ("MIR") merupakan Entitas Anak yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Bank Mandiri dan menjadi badan hukum Malaysia sejak tanggal 17 Maret 2009 dengan registrasi No. 850077-P. MIR merupakan perusahaan penyedia jasa pengiriman uang (*remittances*) di bawah ketentuan Bank Negara Malaysia ("BNM"). MIR telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia ("BI") melalui surat No. 10/548/DPB1 tanggal 14 November 2008 dan persetujuan dari BNM untuk melakukan kegiatan operasional melalui surat No. KL.EC.150/1/8562 tanggal 18 November 2009. Pembukaan kantor MIR dilakukan pada tanggal 29 November 2009 yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada tahun 2020, MIR telah memiliki 14 cabang di Malaysia dan telah dapat melayani kiriman uang ke 8 (delapan) negara, yaitu: Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, India, Nepal, Pakistan dan Bangladesh.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Mandiri Tunas Finance** (continued)*

The amendment of the TFS' name to become MTF was undertaken on 26 June 2009, in accordance with a resolution of meeting decision on Notarial Deed of PT Tunas Financindo Sarana No. 181 dated 26 June 2009, notarised by Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. The Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-4056.AH.01.02.TH.09 dated 26 August 2009 and MTF has obtained a business license to operate as leasing, factoring, and consumer financing company from Ministry of Finance in its Decision Letter No. KEP-352/KM.10/2009 dated on 29 September 2009.

Prior to 1 January 2011, goodwill arising from the acquisitions of MTF amounted to Rp156,807 was amortised using the straight-line method over 5 (five) years with the estimation of economic benefits of the goodwill. Effective 1 January 2011, in accordance with SFAS No. 22 (Revised 2009), "Business Combinations", goodwill is not amortised but tested for impairment annually. The Bank periodically evaluates the impairment of goodwill in accordance with SFAS No. 48, "Impairment of Assets" (Note 2.r.iii). The balance of goodwill on 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp96,697.

Mandiri International Remittance Sendirian Berhad

Mandiri International Remittance Sendirian Berhad ("MIR"), a wholly owned Subsidiary of Bank Mandiri and became a Malaysian legal entity since 17 March 2009 based on registration No. 850077-P. MIR is engaged in money remittance service under the regulations of the Bank Negara Malaysia ("BNM"). MIR has obtained an approval from Bank Indonesia ("BI") through letter No. 10/548/DPB1 dated 14 November 2008 and approval from BNM to conduct operational activities through its letter No. KL.EC.150/1/8562 dated 18 November 2009. MIR officially commenced its operations on 29 November 2009 and is currently located in Kuala Lumpur, Malaysia. In 2020, MIR has 14 branches around Malaysia and could provide remittance service to 8 (eight) countries which are Indonesia, Philippines, Thailand, Singapore, India, Nepal, Pakistan and Bangladesh.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT AXA Mandiri Financial Services

PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri") merupakan perusahaan *joint venture* antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") dengan National Mutual International Pty. Limited ("NMI") yang bergerak di bidang asuransi jiwa. AXA Mandiri didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Staco Raharja pada 30 September 1991 dengan Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 179. Akta pendirian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat No. C2-6144.HT.01.01.TH.91 tanggal 28 Oktober 1991. Entitas Anak mendapatkan ijin usaha asuransi jiwa melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.605/KM.13/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Asuransi Jiwa Nasional dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 4 Desember 1991. Nama Entitas Anak lalu berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Mandiri dan selanjutnya berubah menjadi PT AXA Mandiri Financial Services. Perubahan ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. C-28747.HT.01.04.TH.2003 pada tanggal 10 Desember 2003 dan diumumkan pada Lembaran Berita Negara No. 64, Tambahan No. 7728 tanggal 10 Agustus 2004 dengan komposisi pemegang saham NMI sebesar 51,00% dan Bank Mandiri sebesar 49,00%.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Mei 2010 (dalam pasal 7), pemegang saham Bank Mandiri telah menyetujui pembelian saham oleh Bank Mandiri sebesar 2,00% dari total saham yang diterbitkan dan disetor penuh secara langsung dari NMI.

Sebelum tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* yang timbul dari akuisisi AXA Mandiri sebesar Rp40.128 diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun dengan pertimbangan atas estimasi manfaat ekonomis atas *goodwill* tersebut. Efektif tanggal 1 Januari 2011, sesuai PSAK 22 (Revisi 2009), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi tapi diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Bank Mandiri secara berkala melakukan evaluasi terhadap penurunan nilai *goodwill* tersebut sesuai PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset" (Catatan 2s). Saldo *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp37.194.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

PT AXA Mandiri Financial Services

PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri") is a joint venture company between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") and National Mutual International Pty. Limited ("NMI") that is engaged in life insurance. AXA Mandiri was formerly established under the name of PT Asuransi Jiwa Staco Raharja on 30 September 1991 by Notarial Deed No. 179 of Muhani Salim, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia through its letter No. C2-6144.HT.01.01.TH.91 dated 28 October 1991. The subsidiary obtained its life insurance license through General Directorate of Finance Institution Decision Letter No. KEP.605/KM.13/1991 regarding Granting of National Life Insurance Business Permits and officially commenced its operations activities on 4 December 1991. The Subsidiary's name was then changed to PT Asuransi Jiwa Mandiri and subsequently changed to PT AXA Mandiri Financial Services. This change was approved by the Ministry of Justice and Human Rights in its Decision Letter No. C-28747.HT.01.04.TH.2003 dated 10 December 2003, and was published in State Gazette No. 64, Supplement No. 7728 dated 10 August 2004 with shareholders composition consists of NMI 51.00% and Bank Mandiri 49.00%.

At the General Meeting of Shareholders on 17 May 2010 (in article 7), Bank Mandiri shareholders approved the purchase of shares by Bank Mandiri amounting to 2.00% of the total shares issued and fully paid up directly from NMI.

Prior to 1 January 2011, goodwill arising from the acquisition of AXA Mandiri amounted to Rp40,128 was amortised using the straight-line method over 5 (five) years with the estimation of economic benefits of the goodwill. Effective on 1 January 2011, in accordance with SFAS No. 22 (Revised 2009), "Business Combinations", goodwill is not amortised but tested for impairment annually. Bank Mandiri periodically evaluates the impairment of goodwill in accordance with SFAS No. 48, "Impairment of Assets" (Note 2s). The balance of goodwill on 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp37,194.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Mandiri Inhealth") didirikan berdasarkan Akta Notaris NM Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., No. 2 tanggal 6 Oktober 2008 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-90399.AH.01.01 tanggal 26 November 2008. Perusahaan telah mendapatkan Izin Usaha di bidang Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/KM.10/2009 tanggal 20 Maret 2009.

Pada tanggal 27 Februari 2014, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terkait rencana akuisisi Mandiri Inhealth. Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga telah menerima persetujuan rencana akuisisi dari OJK sesuai Surat No. S-37/PB/31/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

Bank Mandiri mengambil alih kepemilikan di Mandiri Inhealth sebesar 80% dengan nilai Rp1.320.000. Saldo *goodwill* dari akuisisi Mandiri Inhealth pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp268.181. Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap penurunan nilai *goodwill* tersebut sesuai PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset" (Catatan 2s).

Pada tanggal 29 Juli 2022, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia telah memperoleh persetujuan dalam Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Tahunan terkait rencana penyertaan modal dan melakukan pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan PT FitAja Digital Nusantara.

Pada tanggal 31 Juli 2022, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia bersama dengan PT Mandiri Capital Indonesia dan PT Metra Digital Investama telah menandatangani Perjanjian Pendirian Perusahaan Patungan. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia telah sah sebagai pemegang saham di PT FitAja Digital Nusantara dengan porsi kepemilikan saham sebanyak 45,14%.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Mandiri Inhealth") was established on 6 October 2008 based on the Notarial Deed No. 2 of NM Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. Inhealth has obtained its license from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its decision letter No. AHU-90399.AH.01.01 dated 26 November 2008. Inhealth obtained its license to operate in life insurance as stated in the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-38/KM.10/2009 dated 20 March 2009.

On 27 February 2014, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. has obtained the approval in the Annual General Meeting of Shareholders related to the acquisition plan of Mandiri Inhealth. Furthermore, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. also has received the approval of the proposed acquisition from FSA in accordance with Letter No. S-37/PB/31/2014 dated 17 April 2014 regarding the Application for Approval for Equity Investment of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. in PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

Bank Mandiri acquired 80% of total shares issued by Mandiri Inhealth amounted to Rp1,320,000. As of 31 December 2023 and 2022 goodwill balance from acquisition of Mandiri Inhealth is amounted to Rp268,181, respectively. The Bank periodically evaluates the impairment of goodwill in accordance with SFAS No. 48, "Impairment of Assets" (Note 2s).

On 29 July 2022, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia obtained approval at the Annual General Meeting of Shareholders regarding the plan to invest in capital and establish a subsidiary or joint venture company, PT FitAja Digital Nusantara.

On 31 July 2022, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia together with PT Mandiri Capital Indonesia and PT Metra Digital Investama signed an Agreement to Establish a Joint Company. With the signing of the agreement, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia is legally a shareholder in PT FitAja Digital Nusantara with percentage of ownership of 45.14%.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (lanjutan)

Perubahan akta terakhir dimuat dalam Akta No.139 tanggal 25 Agustus 2023, dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta. Pemberitahuan telah dicatat ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 30 Agustus 2023 No. AHU-0170890.AH.01.11.Tahun 2023.

PT Mandiri Utama Finance

Pada tanggal 16 April 2014, Bank Mandiri bersama PT Asco Investindo ("ASCO") dan PT Tunas Ridean (Persero) Tbk. ("TURI"), telah menandatangani perjanjian kesepakatan awal untuk mendirikan sebuah perusahaan pembiayaan untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan Bank Mandiri khususnya pada segmen pembiayaan kendaraan bermotor.

Pada tanggal 22 Oktober 2014, Bank Mandiri bersama ASCO dan TURI telah menandatangani perjanjian pemegang saham dimana telah disepakati pendirian suatu perusahaan pembiayaan dengan modal dasar Rp100.000 dengan komposisi kepemilikan adalah Bank Mandiri (51%), ASCO (37%) dan TURI (12%). Selanjutnya, pada 23 Desember 2014 sebagaimana disebutkan dalam suratnya No. S-137/PB.31/2014, Bank Mandiri telah memperoleh izin prinsip penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan baru tersebut dari OJK Pengawasan Bank.

Pada tanggal 21 Januari 2015, telah dilakukan penandatanganan akta pendirian entitas anak baru Bank Mandiri yang diberi nama PT Mandiri Utama Finance ("MUF") yang dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 19 tanggal 21 Januari 2015 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003452.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015. Bersamaan dengan penandatanganan akta pendirian tersebut Bank Mandiri juga melakukan penyetoran modal sebesar Rp51.000 sesuai dengan komposisi kepemilikan saham Bank Mandiri di MUF.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia** (continued)*

The latest deed changes are in Deed No. 139 dated 25 August 2023, made before Mala Mukti, S.H., LL.M., notary in Jakarta. The notification has been recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia according to letter dated 30 August 2023 No. AHU-0170890.AH.01.11.Year 2023.

PT Mandiri Utama Finance

On 16 April 2014, Bank Mandiri and PT Asco Investindo ("ASCO") and PT Tunas Ridean (Persero) Tbk. ("TURI"), signed an agreement of preliminary agreement to set up a finance company to accelerate Bank Mandiri finance portfolio distribution, especially in the segment of vehicle financing.

On 22 October 2014, Bank Mandiri with ASCO and TURI signed a shareholders' agreement for establishment of a finance company with an authorised capital of Rp100,000 and an ownership composition as follows: the Bank Mandiri (51%); ASCO (37%); and TURI (12%). Subsequently, on 23 December 2014, in accordance with letter No. S-137/PB.31/2014 the Bank obtained a principle license of equity participation in the new financing company from Bank Supervision FSA.

On 21 January 2015, the deed of incorporation of a new subsidiary of Bank Mandiri named PT Mandiri Utama Finance ("MUF") has been signed as outlined in the Notarial Deed Ashoya Ratam, SH, M.Kn., No. 19 dated 21 January 2015 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree letter No. AHU-0003452.AH.01.01 Year 2015 dated 26 January 2015. Concurrent with the signing of the deed of incorporation, the Bank also made capital injection amounted to Rp51,000 as stipulated in the Bank's shareholding in MUF.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Mandiri Utama Finance (lanjutan)

Pasca penandatanganan akta pendirian, MUF menyampaikan permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan kepada OJK Institusi Keuangan Non Bank ("OJK IKNB"). Atas permohonan tersebut, OJK IKNB telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-81/D.05/2015 tentang "Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Mandiri Utama Finance" pada tanggal 25 Juni 2015 yang disampaikan melalui surat OJK No. SR-3516/NB.111/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal "Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Utama Finance".

Pada tanggal 24 Agustus 2015, MUF mulai melaksanakan tahapan kegiatan operasional awal melalui kerjasama dengan *dealer-dealer* dan *showroom-showroom* utama serta pencairan pembiayaan kendaraan bermotor kepada nasabah terbatas untuk memenuhi persyaratan OJK IKNB dan pada akhirnya di bulan Januari 2016, MUF telah dapat beroperasi komersial secara penuh melalui jaringan kantor yang sudah mendapatkan izin dari OJK IKNB.

Selanjutnya MUF mengurus izin Unit Usaha Syariah ("UUS") ke OJK-IKNB Syariah dan telah memperoleh izin Unit Usaha Syariah ("UUS") MUF melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-36/NB.223/2018 tentang "Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Mandiri Utama Finance" pada tanggal 27 April 2018 yang disampaikan melalui surat OJK No. S-626/NB.223/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal "Penyampaian Salinan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT Mandiri Utama Finance". Pada tahun 2021, MUF telah melakukan peningkatan alokasi ekuitas dari MUF untuk bisnis Unit Usaha Syariah ("UUS") dari Rp50.000 menjadi Rp75.000.

Sesuai dengan kebijakan mengenai Qanun Aceh, maka MUF pada tanggal 19 November 2021, telah melakukan penutupan Izin Pembiayaan Konvensional untuk Kantor Cabang ("KC") Banda Aceh, namun tetap memiliki Izin Pembiayaan Syariah sebagai Kantor Cabang Unit Syariah ("KC-US") Banda Aceh.

PT Mandiri Capital Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2015, Bank Mandiri bersama PT Mandiri Sekuritas telah mendirikan Entitas Anak baru yang bergerak di bidang modal ventura dengan nama PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI").

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Mandiri Utama Finance** (continued)*

After the signing of the deed, MUF submitted application of financing company business license to FSA - Non-Bank Financial Institutions ("FSA IKNB"). Upon request, the FSA IKNB has issued a decree letter of IKNB Board of Commissioners of the FSA No. KEP-81/D.05/2015 regarding the Granting Approval of Financing Company to PT Mandiri Utama Finance on 25 June 2015 through FSA letter No. SR-3516 /NB.111/2015 dated 26 June 2015, regarding the "Granting Approval of Financing Company to PT Mandiri Utama Finance".

On 24 August 2015, MUF has performed the initial operational activities through cooperation with primary dealers and showroom, as well as vehicle financing disbursement to limited customers to meet the requirements of the FSA IKNB, and fully operated commercially on January 2016 through its branches which already have operational permit from FSA IKNB.

Furthermore, MUF processed the Sharia Business Unit ("UUS") license to FSA-IKNB Sharia and has obtained MUF Sharia Business Unit ("UUS") license through the Decree letter of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-36/NB.223/NB/2018 regarding "Granting the License of Opening Sharia Business Unit of Financing Company to PT Mandiri Utama Finance" dated 27 April 2018 through FSA letter No. S-626/NB.223/2018 dated 15 May 2018 related to "Submission of Transcript of License for Opening Sharia Business Unit of Financing Company to PT Mandiri Utama Finance". In 2021, MUF has increased its equity allocation for the Sharia Business Unit ("UUS") operation from Rp50,000 to Rp75,000.

In accordance with the policy regarding Aceh Qanun, on 19 November 2021, MUF has closed the Conventional Financing License for the Banda Aceh Branch Office ("KC"), but still has Sharia Financing License as the Banda Aceh Sharia Unit Branch Office ("KC-US").

PT Mandiri Capital Indonesia

On 23 June 2015, Bank Mandiri and PT Mandiri Sekuritas have established new subsidiary engaged in venture capital under the name of PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI").

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

g. Entitas Anak (lanjutan)

PT Mandiri Capital Indonesia (lanjutan)

Pendirian perusahaan ditandai dengan penandatanganan akta pendirian antara Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas dimana Bank Mandiri melakukan penyertaan modal sebesar Rp9.900 yang mewakili 99% kepemilikan saham dalam MCI dan PT Mandiri Sekuritas melakukan penyertaan modal sebesar Rp100 yang mewakili 1% kepemilikan saham dalam MCI, sehingga struktur permodalan MCI adalah sebesar Rp10.000.

Penyertaan modal Bank Mandiri dalam rangka Pendirian MCI telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/PB.31/2015 perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam rangka pendirian Perusahaan Modal Ventura pada tanggal 11 Juni 2015.

Pada tanggal 26 Juni 2015, pendirian MCI telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-2445684.AH.01.01. Tahun 2015. MCI telah memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang modal ventura pada tanggal 10 November 2015 melalui surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-113/D.05/2015 sehingga MCI dapat melaksanakan kegiatan operasional secara penuh.

Mandiri Capital Indonesia memiliki 99,99% dari total saham PT Mitra Transaksi Indonesia yang merupakan pengolah pihak ketiga dan penyedia layanan pengakuisisi yang menghadirkan proses dan jaringan *end-to-end* untuk solusi pembayaran di Indonesia, Entitas Anak MCI yang didirikan tanggal 13 Januari 2016 dan bergerak di bidang jasa penunjang usaha terkait jasa keuangan, secara khusus jasa keuangan dalam bidang pembayaran dengan menggunakan kartu.

Terakhir, pada tanggal 27 Desember 2022, MCI telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-0129677.AH.01.02. Tahun 2022 sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 7 tanggal 26 Desember 2022 dimana penyertaan saham Bank Mandiri menjadi sebesar Rp3.358.400 yang mewakili 99,99% kepemilikan saham dalam MCI dan PT Mandiri Sekuritas menjadi sebesar Rp100 yang mewakili 0,01% kepemilikan saham dalam MCI, sehingga struktur permodalan MCI adalah sebesar Rp3.358.500.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***g. Subsidiaries** (continued)*

***PT Mandiri Capital Indonesia** (continued)*

Establishment of the Company was marked by the signing the establishment deed between Bank Mandiri and PT Mandiri Sekuritas in which the Bank invested the capital amounted to Rp9,900, representing 99% share ownership in MCI and PT Mandiri Sekuritas injected capital amounted to Rp100 which represents a 1% share ownership in MCI, therefore the capital structure of MCI amounted Rp10,000.

Bank Mandiri's equity participation in the establishment of MCI was approved by the FSA by its letter No. S-48/PB.31/2015 regarding Application for Approval of Equity Participation of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. for the establishment of Venture Capital Company on 11 June 2015.

As of 26 June 2015, the establishment of MCI was approved by the Minister of Law and Human Rights through letter No. AHU-2445684.AH.01.01. Year 2015. MCI obtained a license to carry out business activities in the venture capital sector on 10 November 2015 through the decree letter of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-113/D.05/2015 stating that MCI may carry out full operational activities.

Mandiri Capital Indonesia owns 99.99% of the total shares of PT Mitra Transaksi Indonesia which is a third party processor and acquirer service provider that provides end-to-end processes and networks for payment solutions in Indonesia, a Subsidiary of MCI which was established on 13 January 2016 and engages in business support services related to financial services, specifically financial services in the field of payment by card.

Lastly, On 27 December 2022, MCI obtained approval for the amendment to the Articles of Association regarding the increase in authorized and issued capital by the Minister of Law and Human Rights with letter No. AHU-0129677.AH.01.02. Year 2022 as stated in Deed No. 7 dated 26 December 2022 in which investment in shares of Bank Mandiri amounted to Rp3,358,400 representing 99.99% share ownership in MCI and PT Mandiri Sekuritas amounted to Rp100 representing 0.01% ownership shares in MCI, so that MCI's capital structure is Rp3,358,500.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Struktur dan manajemen

Kantor pusat Bank Mandiri berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, struktur dan jumlah kantor dalam dan luar negeri Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Kantor wilayah dalam negeri	12	12	*Domestic regional offices*
Kantor cabang dalam negeri:			*Domestic branches:*
Kantor Cabang*)	139	138	*Branch Offices**)
Kantor Cabang Pembantu	2.104	2.225	*Sub-Branch Offices*
Total kantor cabang dalam negeri	**2.243**	**2.363**	***Total domestic branches***
Kantor cabang luar negeri	**6**	**6**	***Overseas branches***

*) Terdapat beberapa Kantor Cabang berfungsi sebagai Kantor Area.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank Mandiri memiliki 6 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, 2 kantor cabang di Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan 1 kantor *remittance* yang berlokasi di Hong Kong.

Untuk mendukung pencapaian aspirasi Bank Mandiri, yaitu menjadi partner finansial pilihan utama nasabah, Bank Mandiri mengelompokkan unit-unit kerja di struktur organisasinya menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Business Units*, berfungsi sebagai motor utama pengembangan bisnis Bank atau unit yang menjadi segmen operasional (Segmen Operasi), yang terdiri dari dua segmen utama yaitu segmen *Wholesale Banking* yang terdiri dari *Corporate Banking, Commercial Banking,* Hubungan Kelembagaan*, Treasury & International Banking* dan segmen *Retail Banking* terdiri dari *Credit Cards*, *Consumer Loans, Micro Personal Loan, Small & Medium Enterprise Banking* dan *Micro Development & Agent Banking.*
2. *Support Functions,* berfungsi sebagai *supporting unit* yang mendukung operasional Bank secara keseluruhan yang terdiri dari *Special Asset Management*, Manajemen Risiko yang membawahi *Wholesale Risk* dan *Retail Risk,* Teknologi Informasi & Operasi yang membawahi *Operation*, Kepatuhan dan SDM, Keuangan dan Strategi, *Internal Audit, Corporate Transformation* dan *Business Transformation.*
3. Bisnis & Jaringan yang berfungsi sebagai unit yang melakukan penjualan produk dan jasa kepada seluruh segmen nasabah Bank Mandiri, terdiri dari 12 Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan *wealth management*.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

h. Structure and management

Bank Mandiri's head office is located on Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, South Jakarta, Indonesia. As of 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri's structure and number of Bank Mandiri's domestic and foreign offices are as follows:

*) *Several branch offices function as area offices.*

As of 31 December 2023, Bank Mandiri has 6 overseas branches located in Cayman Islands, Singapore, Hong Kong, 2 branch offices in Dili Timor Leste, Shanghai (People's Republic of China) and 1 remittance office in Hong Kong.

To support Bank Mandiri in achieving its aspiration to be the primary customers' financial partner, Bank Mandiri divided its organisation structure into strategic business units ("SBU") to three major groups, which are:

1. *Business Units, are responsible as the Bank's main business development or operational segment unit (operating segment), consists of two main segments, namely Wholesale Banking segment which consists of Corporate Banking, Commercial Banking, Government Institutional, Treasury & International Banking and Retail Banking segment which consists of Credit Cards, Consumer Loan, Micro Personal Loan, Small & Medium Enterprise Banking and Micro Development & Agent Banking.*
2. *Support Functions, are responsible as supporting units that provide overall support to Bank's operations consisting of Special Asset Management, Risk Management which supervices Wholesale Risk and Retail Risk, Information Technology & Operation that supervises Operation, Compliance and Human Resources, Strategic and Finance, Internal Audit, Corporate Transformation and Business Transformation.*
3. *Business & Distribution are responsible as unit that selling products and services to all segments of Bank's customers, consisting of 12 Regional Offices that are spread out across Indonesia and wealth management.*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Bank Mandiri telah melakukan perubahan struktur organisasi yang berlaku efektif tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/030/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Struktur Organisasi. Perubahan struktur organisasi Bank Mandiri tersebut dengan menata ulang organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Structure and management** (continued)*

Bank Mandiri has made changes to the organizational structure which took effect on 31 July 2023 as stated in Directors Decree No. KEP.DIR/030/2023 dated 4 August 2023 concerning Organizational Structure. Changes in the organizational structure of Bank Mandiri by rearranging the organization to meet the needs and development of the Bank.

As of 31 December 2023 and 2022, the members of Bank Mandiri's Boards of Commissioners are as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
Komisaris Utama/ Independen	: Muhamad Chatib Basri	Muhamad Chatib Basri	*President Commissioner/ Independent*
Wakil Komisaris Utama/ Independen	: Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	*Vice President Commissioner/ Independent*
Komisaris Independen	: Loeke Larasati A.	Boedi Armanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja	Loeke Larasati A.	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	: Heru Kristiyana	Muliadi Rahardja	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	: Zainudin Amali	-	*Independent Commissioner*
Komisaris	: Rionald Silaban	Rionald Silaban	*Commissioner*
Komisaris	: Arif Budimanta	Arif Budimanta	*Commissioner*
Komisaris	: Faried Utomo	Faried Utomo	*Commissioner*
Komisaris	: Nawal Nely	Nawal Nely	*Commissioner*
Komisaris	: Muhamad Yusuf Ateh	Muhammad Yusuf Ateh	*Commissioner*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 and 2022, the members of Bank Mandiri's Board of Directors are as follows:

		2023	
Direksi			*Board of Directors*
Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar	*Deputy of President Director*
Direktur Manajemen Risiko	:	Ahmad Siddik Badruddin	*Director of Risk Management*
Direktur Kepatuhan dan SDM	:	Agus Dwi Handaya	*Director of Compliance and Human Resources*
Direktur Commercial Banking	:	Riduan	*Director of Commercial Banking*
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Aquarius Rudianto	*Director of Network and Retail Banking*
Direktur Operation	:	Toni E. B. Subari	*Director of Operation*
Direktur Corporate Banking	:	Susana Indah K. Indriati	*Director of Corporate Banking*
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas	*Director of Institutional Relationship*
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo	*Director of Finance and Strategy*
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama	*Director of Information Technology*
Direktur Treasury dan International Banking	:	Eka Fitria	*Director of Treasury and International Banking*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut (lanjutan):

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Structure and management** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, the members of Bank Mandiri's Board of Directors are as follows (continued):

		2022	
Direksi			*Board of Directors*
Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar	*Deputy of President Director*
Direktur Manajemen Risiko	:	Ahmad Siddik Badruddin	*Director of Risk Management*
Direktur Kepatuhan dan SDM	:	Agus Dwi Handaya	*Director of Compliance and Human Resources*
Direktur Treasury dan International Banking	:	Panji Irawan	*Director of Treasury and International Banking*
Direktur Commercial Banking	:	Riduan	*Director of Commercial Banking*
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Aquarius Rudianto	*Director of Network and Retail Banking*
Direktur Operation	:	Toni E. B. Subari	*Director of Operation*
Direktur Corporate Banking	:	Susana Indah K. Indriati	*Director of Corporate Banking*
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas	*Director of Institutional Relationship*
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo	*Director of Finance and Strategy*
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama	*Director of Information Technology*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Komite Audit Bank Mandiri terdiri dari:

As of 31 December 2023 and 2022, the members of Bank Mandiri's Audit Committee are as follows:

	2023	**2022**	
Ketua merangkap anggota	: Heru Kristiyana	Muliadi Rahardja	*Chairman and member*
Anggota	: Muhamad Chatib Basri	Muhamad Chatib Basri	*Member*
Anggota	: Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	*Member*
Anggota	: Loeke Larasati A.	Loeke Larasati A.	*Member*
Anggota	: Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana	*Member*
Anggota	: Rasyid Darajat	Rasyid Darajat	*Member*
Anggota	: Rubi Pertama	Rubi Pertama	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri terdiri dari:

As of 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri's Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	2023	**2022**	
Ketua merangkap anggota	: Muhamad Chatib Basri	Muhamad Chatib Basri	*Chairman and member*
Anggota	: Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	*Member*
Anggota	: Muliadi Rahardja	Muliadi Rahardja	*Member*
Anggota	: Rionald Silaban	Rionald Silaban	*Member*
Anggota	: Arif Budimanta	Arif Budimanta	*Member*
Sekretaris (ex-officio) merangkap anggota	: SEVP/Group Head Human Capital	SEVP/Group Head Human Capital	*Secretary (ex-officio) concurrently a member*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri terdiri dari:

As of 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri's Risk Oversight Committee are as follows:

	2023	**2022**	
Ketua merangkap anggota	: Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	*Chairman and member*
Anggota	: Loeke Larasati A.	Boedi Armanto	*Member*
Anggota	: Nawal Nely	Loeke Larasati A.	*Member*
Anggota	: Arif Budimanta	Nawal Nely	*Member*
Anggota	: Heru Kristiyana	Arif Budimanta	*Member*
Anggota	: Chrisna Pranoto	Chrisna Pranoto	*Member*
Anggota	: Caroline Halim	Caroline Halim	*Member*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri terdiri dari:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Structure and management** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri's Integrated Governance Committee are as follows:

	2023	2022	
Ketua merangkap anggota	: Muhamad Chatib Basri	Muhamad Chatib Basri	*Chairman and member*
Anggota	: Andrinof A. Chaniago	Andrinof A. Chaniago	*Member*
Anggota	: Loeke Larasati A.	Loeke Larasati A.	*Member*
Anggota	: Faried Utomo	Faried Utomo	*Member*
Anggota	: Muhammad Yusuf Ateh	Muhammad Yusuf Ateh	*Member*
Anggota	: Zainudin Amali	-	*Member*
Anggota	: Chrisna Pranoto	Chrisna Pranoto	*Member*
Anggota	: Rasyid Darajat	Rasyid Darajat	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen Bank Mantap*)/ *Representative of Independent Commissioner Bank Mantap*)*	Perwakilan Komisaris Independen Bank Mantap*)/ *Representative of Independent Commissioner Bank Mantap*)*	*Member*
Anggota	: -	Perwakilan Komisaris Independen MAGI*)/ *Representative of Independent Commissioner MAGI*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen Mansek*)/ *Representative of Independent Commissioner Mansek*)*	Perwakilan Komisaris Independen Mansek*)/ *Representative of Independent Commissioner Mansek*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen AMFS**)/ *Representative of Independent Commissioner AMFS*)*	Perwakilan Komisaris Independen AMFS**)/ *Representative of Independent Commissioner AMFS*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen MTF*)/ *Representative of Independent Commissioner* MTF*)	Perwakilan Komisaris Independen MTF*)/ *Representative of Independent Commissioner MTF*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen MUF*)/ *Representative of Independent Commissioner MUF*)*	Perwakilan Komisaris Independen MUF*)/ *Representative of Independent Commissioner MUF*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen MCI*)/ *Representative of Independent Commissioner MCI*)*	Perwakilan Komisaris Independen MCI*)/ *Representative of Independent Commissioner MCI*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris Independen Inhealth*)/ *Representative of Independent Commissioner Inhealth*)*	Perwakilan Komisaris Independen Inhealth*)/ *Representative of Independent Commissioner Inhealth*)*	*Member*
Anggota	: Perwakilan Komisaris BSI*)/ *Representative of Independent Commissioner BSI*)*	Perwakilan Komisaris BSI*)/ *Representative of Independent Commissioner BSI*)*	*Member*
Anggota	: Dewan Pengawas Syariah dari Entitas Anak*)/ *Sharia Supervisory Board from Subsidiary*)*	Dewan Pengawas Syariah dari Entitas Anak*)/ *Sharia Supervisory Board from Subsidiary*)*	*Member*

**) Menyesuaikan dengan Pejabat dari Entitas Anak terkait.

**) *Adjusted to the Officers of the relevant Subsidiaries*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Cakupan manajemen dan karyawan kunci antara lain mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah serta *Senior Executive Vice President* dan *Senior Vice President.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Ketua Internal Audit Bank Mandiri adalah Danis Subyantoro.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri adalah Teuku Ali Usman dan pada tanggal 31 Desember 2022 Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri adalah Rudi As Aturridha.

Jumlah karyawan Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 38.965 orang (31 Desember 2022: sebanyak 38.200 orang) (tidak diaudit).

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Structure and management** (continued)*

Management and key personnel includes the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Risk Oversight Committee, Sharia Supervisory Board as well as Senior Executive Vice President and Senior Vice President.

As of 31 December 2023 and 2022, the Chairperson of Bank Mandiri's Internal Audit was Danis Subyantoro.

As of 31 December 2023 Bank Mandiri's Corporate Secretary was Teuku Ali Usman and as of 31 December 2022 Bank Mandiri's Corporate Secretary was Rudi As Aturridha.

The number of Bank Mandiri employees as of 31 December 2023 was 38,965 persons (31 December 2022: 38,200 persons (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak ("Grup") ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 31 Januari 2024.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak adalah seperti dijabarkan di bawah ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan seluruh instrumen derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of Bank and its Subsidiaries ("Group") were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 31 January 2024.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which comprised of the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Board of Sharia Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and capital market regulation No. VIII.G.7 regarding Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statement of the Bank and Subsidiaries are set out below.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as fair value through other comprehensive income, financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss and all derivative instruments which have been measured at fair value. The consolidated financial statement is prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas-aktivitas operasional, investasi dan pendanaan.

Pos-pos dalam penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Laporan keuangan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah disusun berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 104 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK 107 (Revisi 2021) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*", PSAK 112 Revisi (2021) tentang "Akuntansi Wakaf" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Revisi 2013).

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements *(continued)*

Consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows in operating, investing and financing activities.

Items within other comprehensive income are classified separately, between accounts which will be reclassified to profit or loss and will not be reclassified to profit or loss.

The financial statement of a Subsidiary engaged in sharia banking have been prepared based on with the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Financial Statements for Sharia Banking", SFAS No. 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 (Revised 2016) "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 "Accounting for Musyarakah", SFAS No. 107 (Revised 2021) "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 "Accounting for Wa'd", SFAS No. 112 (Revised 2021) "Accounting for Wakaf" and other prevailing Statement of Financial Accounting Standards, as long as it does not contradict with Sharia principle on Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) (Revised 2013).

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards that requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make judgements in the process of applying the accounting policies of the Group. The area that is complex or requires a higher level of consideration or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the consolidated financial statements is disclosed in Note 3.

All figures in the consolidated financial statements, are rounded and presented in million Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in accounting policies

Unless stated below, the accounting policies for the year ended 31 December 2023 have been applied consistently with the Group consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 which are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Grup yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi. Amendemen ini mengubah "informasi kebijakan akuntansi signifikan" menjadi "informasi kebijakan akuntansi material" dan mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian atau kondisi material lainnya adalah material terhadap laporan keuangan.

- Amendemen PSAK 16 tentang Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan. Amendemen ini mengklarifikasi contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam nilai perolehan aset. Amendemen ini menambahkan pengaturan atas pengakuan hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan sesuai dengan intensi manajemen dalam Laba Rugi serta pengukuran biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 14: Persediaan.

- Amendemen PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi akuntansi. Amendemen PSAK 25 ini memperkenalkan definisi estimasi akuntansi dan mengklarifikasi teknik estimasi dan teknik penilaian merupakan contoh dari teknik pengukuran yang digunakan dalam mengembangkan estimasi akuntansi, serta perubahan dalam estimasi akuntansi sebagai hasil informasi baru atau perkembangan baru yang bukan merupakan koreksi kesalahan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Changes in accounting policies *(continued)*

On 1 January 2023, there are new and revised or amendment towards several standards that are relevant to the Group operation which is effective for application from that date as follows:

- *Amendments to SFAS No. 1 on Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies. This amendment changes "significant accounting policy information" to "material accounting policy information" and clarifies that not all accounting policy information related to material transactions, events or other conditions is material to the financial statements.*

- *Amendment to SFAS No. 16 on Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use. This amendment clarifies the examples of costs that are directly attributable as the acquisition cost of fixed assets. This amendment adds provisions regarding the recognizing of sales proceeds and the acquisition cost of items generated when relocating fixed assets to the required location and condition in accordance with management's intention in the Profit and Loss Statement, as well as measuring the cost of acquisition of those items by applying the measurement requirements in SFAS 14: Inventory.*

- *Amendment to SFAS No. 25 on Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors related to the Definition of Accounting Estimates. This amendment to SFAS No. 25 introducing the definition of accounting estimates and clarifies estimation techniques and valuation techniques are examples of measurement techniques used in developing accounting estimates, as well as changes in accounting estimates resulting from new information or new developments that are not corrections of errors.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Grup yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

- Amendemen PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal. Amendemen PSAK 46 ini mewajibkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

- Perubahan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Hal ini berdampak pada perubahan kebijakan penerapan ijarah multijasa atas akad sewa yang masih berlaku saat awal implementasi PSAK tersebut. Ruang Lingkup dari PSAK 107 tersebut mencakup akad ijarah baik yang digunakan di sektor keuangan atau pun sektor riil. Pengaturan pada PSAK ini termasuk Ijarah Aset, Ijarah Jasa Langsung dan Ijarah Jasa Tidak Langsung. Penerapan PSAK tersebut juga berdampak penambahan saldo laba akibat adanya perbedaan metode pembebanan dari metode penyusutan aset ijarah dengan metode garis lurus (*straight line*) menjadi metode penurunan saldo piutang ijarah porsi pokok. Grup telah membukukan selisih metode pengakuan pendapatan sesuai PSAK 107 sebesar Rp78.403 pada saldo laba per 1 Januari 2023.

Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut di atas tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Changes in accounting policies *(continued)*

On 1 January 2023, there are new and revised or amendment towards several standards that are relevant to the Group operation which is effective for application from that date as follows: (continued)

- *Amendment to SFAS No. 46 on Income Taxes Related to Deferred Tax Assets and Liabilities Arise from a Single Transaction. This amendment to SFAS No. 46 requires that entities recognize both deferred tax assets and liabilities at their initial recognition, such as from lease transactions, in order to eliminate variations in practice in the field for that transaction and similar transactions.*

- *Changes to SFAS No. 107 concerning Ijarah Accounting. This has an impact on changes in the policy for implementing multiservice ijarah on lease contracts that are still valid at the time of the initial implementation of the SFAS. The scope of SFAS 107 covers ijarah contracts both used in the financial sector and the real sector. The arrangements in this SFAS include Asset Ijarah, Direct Service Ijarah and Indirect Service Ijarah. The implementation of this SFAS also has an impact on the addition of retained earnings due to differences in the method of charging from the ijarah asset depreciation method using straight line method to the decreasing of principal portion of outstanding balance ijarah receivables method. The Group has recorded the difference in the revenue recognition method in accordance with SFAS 107 amounting to Rp78,403 in the retained earnings balance as of 1 January 2023.*

The impact of the implementation of the new standards and the adjustments/amendments mentioned above are not material to the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan

A. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup memiliki instrumen keuangan utang dan instrumen keuangan ekuitas. Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tak terbatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payment of Principal and Interest* ("SPPI") dari aset keuangan.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments

A. Financial assets

The Group classified its financial assets in the following categories (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.

The Group has debt financial instruments and equity financial instruments. The Group further measures all equity investments at fair value. On initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to subsequent changes in the fair value of investments in equity instruments in other comprehensive income.

The Group used 2 (two) methods to classify its financial assets, which based on the Group's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets solely payment of principal and interest ("SPPI").

SPPI test

As a first step of its classification process, the Group assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal, for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant element of interest within a arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To perform the SPPI assessment, the Group applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Grup menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Grup mengelola kelompok atas aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Grup tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Grup.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Grup tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasian diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

A. Financial assets *(continued)*

Business model assessment

The Group determines its business model at the level that best reflects how group manages group of financial assets to achieve its business objective.

The Group's business model is not assessed by each instrument, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Group's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Group's initial expectations, the Group does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

(a) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the business model test and the contractual cash flow test show that financial assets entering into classifications are measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Untuk entitas anak asuransi, aset keuangan dikategorikan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika dimiliki untuk mencadangkan liabilitas asuransi yang diukur pada nilai wajar dari aset terkait. Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, penjualan instrumen keuangan dan pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian dicatat di akun pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi – neto pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

A. Financial assets *(continued)*

Business model assessment (continued)

(a) Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

This classification is intended for held for trading financial instruments or at the time of initial recognition has been determined by the Group to be measured at fair value through profit or loss.

A financial asset is classified as held for trading, if it has been acquired or held principally for the purpose of selling or buying in the near term or on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking.

Financial assets for subsidiary in insurance industry classified at fair value through profit or loss if the financial assets are held to cover its insurance liabilities which measure at fair value of the underlying assets. Financial instruments classified into this category are recognized at fair value on initial recognition, transaction costs are recognized directly in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Gains and losses arising from changes in fair value, sale of financial instruments and interest income on financial instruments measured at fair value through profit or loss are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income recorded as income from fair value through profit or loss classification - net.

(b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Financial assets are managed in a business model which objectives will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets and contractual requirements of financial assets which on a certain date received cash flow solely from payment of principal and interest of the amount owed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

(b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lain di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

(c) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

A. Financial assets *(continued)*

Business model assessment (continued)

(b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (continued)

At the initial recognition, debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognized at the fair value plus the transaction costs and subsequently measured at fair value where the gain or loss from changes in fair value, gain or loss from the exchange rate, and impairment, are recognized as other comprehensive income. Dividend from equity instrument is recognized in profit or loss.

Expected credit losses are recognized as additions of other comprehensive income in the statement of financial position (not reducing the number of recorded financial assets in financial statements). Interest income is calculated using the effective interest rate method.

The Group further measures all equity investments at fair value. If group management has chosen to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no reclassification of fair value gains and losses to profit or loss upon derecognition of those investments. Dividends from equity instruments are recognized in profit or loss.

(c) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets are measured at amortised cost if the financial asset is managed in a business model to obtain a contractual cash flow and the contractual arrangement of a financial asset at certain date to obtain cash flow solely from payments of principal and interest of the amount owed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

A. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

(c) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat transaksi efek-efek dan obligasi pemerintah.

B. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan; (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

A. Financial assets *(continued)*

Business model assessment (continued)

(c) Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, the financial assets measured at amortised cost are recognised at the fair value plus the transaction costs and subsequently measured at amortised cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortised cost is recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and is recognised as "Interest income". When the decline in value occurs, the impairment loss is recognised as a deduction to the carrying amount of the financial asset and is recognised in the financial statements as "Allowance for impairment losses".

Recognition

The Bank use transactions date record to transactions in securities and government bonds.

B. Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities into the category of (a) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and; (b) financial liabilities measured at amortised cost.

(a) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

This category comprises of two sub-categories: financial liabilities classified as fair value through profit or loss and financial liabilities designated by the Group as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

B. Liabilitas keuangan (lanjutan)

(a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas nilai wajar melalui laba rugi kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat di akun pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Jika Grup pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di akun pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

B. Financial liabilities *(continued)*

(a) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (continued)

A financial liability is classified as fair value through profit or loss, if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorised as fair value through profit or loss liabilities unless they are designated and effective as hedging instruments.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified as fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as income from fair value through profit or loss - net. Interest expense from financial liability classified as trading are recorded as income from fair value through profit or loss - net.

If the Group designated certain debt securities upon initial recognition as at fair value through profit or loss (fair value option), then this designation cannot be changed subsequently.

Changes of fair value related to financial liabilities designated at fair value through profit or loss are recognised in income from fair value through profit or loss - net. Interest expense from financial liabilities designated at fair value through profit or loss are recorded as income from fair value through profit or loss - net.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

B. Liabilitas keuangan (lanjutan)

(b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
3. Kontrak jaminan keuangan;
4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar;
5. Imbalan kontijensi yang akan diselesaikan dengan kas, dimana Grup bertindak selaku pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai "Beban bunga".

C. Penghentian pengakuan

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

B. Financial liabilities *(continued)*

(b) Financial liabilities at amortised cost

The Group classifies all financial liabilities after initial recognition as measured at amortised cost, except:

1. *Financial liabilities measured at fair value through profit or loss;*
2. *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied;*
3. *Financial guarantee contracts;*
4. *Commitment to providing loans at below market interest rates;*
5. *Contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination.*

At initial recognition, financial liabilities at amortised cost measured at fair value are deducted by transaction cost. After initial recognition, the Group measures all financial liabilities at amortised cost using the effective interest rate method. Effective interest rate amortisation is recognised as "Interest expense".

C. Derecognition

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have expired or matured or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

C. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Agunan yang diserahkan oleh Grup di dalam perjanjian efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas agunan tersebut, berdasarkan kesepakatan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Aset lain-lain - Tagihan atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diagunkan", dimana pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan dilakukan jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir karena kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa atau apabila terdapat perubahan yang substansial dalam persyaratan suatu liabilitas keuangan, maka kontrak liabilitas keuangan sebelum perubahan akan dihapus dan Grup akan mengakui liabilitas keuangan baru.

Hapusbuku

Dalam hal penghapusbukuan aset keuangan merupakan kelanjutan dari tindakan penyelesaian aset keuangan dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapusbuku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat aset keuangan.

Aset keuangan dapat dihapusbuku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat aset keuangan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

C. Derecognition *(continued)*

Derecognition of Financial Assets *(continued)*

Collateral that is submitted by the Group under the agreement of securities sold under agreements to repurchase and securities lending and borrowing transactions are not derecognised because the Group substantially has all the risks and benefits of the collateral, based on the requirement that the repurchase price has been determined at the beginning, so that the criteria for derecognition are not met.

Financial assets that are transferred to third parties but do not qualify for derecognition criteria are presented in the consolidated statements of financial position as "Other assets - Receivables from securities and government bonds pledged as collateral", which the recipient has the right to sell or transfer back.

Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognised when the financial liabilities have expired because the obligations specified in the contract have been released, canceled or expired or if there is a substantial change in the terms of a financial liability, the financial liability contract before the change will be written off and the Group will recognize the new financial liability.

Write-offs

In the case of financial assets' write-off is a continuation of the financial assets' settlement by taking over collaterals, the written-off amount is approximately equal to the difference between the fair value of repossessed assets after taking into account the financial assets' cost of sales and carrying amount.

Financial assets can be written-off when the allowance for impairment losses have been 100% established.

Full write-off is done to the financial assets' carrying amount by debiting the allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

D. Modifikasi atas arus kas aset keuangan

Penilaian apakah modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan menghasilkan atau tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan restrukturisasi aset keuangan tersebut.

Grup mengakui aset keuangan dimodifikasi atau direstrukturisasi secara substansial dan menghasilkan penghentian pengakuan ketika:

(a) aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau
(b) terdapat konversi mata uang.

Grup menilai apakah modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan menghasilkan atau tidak menghasilkan penghentian pengakuan dengan cara berikut:

(a) Modifikasi aset keuangan yang menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan
1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direstrukturisasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) dimana restrukturisasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Grup akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasian pada tanggal modifikasi/restrukturisasi.
2. Selisih nilai tercatat aset keuangan sebelum modifikasi/restrukturisasi dengan nilai wajar aset setelah modifikasi/restrukturisasi diakui di laba rugi.
3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.
4. Grup melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk atau *Puchased or Originated Credit-Impaired* ("POCI") *Financial Asset.*
5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

D. Modification of financial assets cash flow

An assessment of whether a financial asset has been modified or restructured substantially or not substantially derecognised is carried out by a business unit whose authorized to modify or restructure financial assets.

Modifications or restructuring to financial assets are considered substantial and the Group will cease to recognize the original financial assets when:

(a) the financial asset (or portion thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or any portion thereof), either by legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or

(b) there is a currency conversion.

The Group will measure the substantially and not substantially modified financial assets as follows:

(a) Substantial Modification of Financial Assets

1. When the contractual cashflow on a financial asset is restructured or modified (including when a credit is restructured) and the restructuring or modification results in derecognition of the financial asset, therefore the Group will record the financial asset as a new/modified financial asset on the modification/restructuring date.

2. The difference between the gross amount of the initial financial assets and the fair value of the modified or restructuring assets recorded as profit or loss.
3. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event recognized as part of gain or loss on the modification.
4. Group assess whether new/modified financial assets are assets originating from impaired financial assets or Purchased or Originated Credit-Impaired ("POCI") Financial Asset.

5. Recognition of interest income on assets originating from Impaired financial assets is calculated based on an effective interest rate adjusted for credit risk (risk-adjusted effective interest rate) to discount the cash flows of modified financial assets.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

D. Modifikasi atas arus kas aset keuangan (lanjutan)

Grup menilai apakah modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan menghasilkan atau tidak menghasilkan penghentian pengakuan dengan cara berikut (lanjutan):

(b) Modifikasi aset keuangan yang tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan

1. Saat Grup melakukan renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka restrukturisasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas neto kontraktual yang telah dimodifikasi atau direstrukturisasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Grup kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut dengan menggunakan suku bunga efektif awal.
5. Selisih antara jumlah tercatat bruto aset keuangan sebelum dan sesudah modifikasi atau restrukturisasi diakui sebagai kerugian atau keuntungan aset keuangan modifikasian, yang merupakan penyesuaian terhadap jumlah tercatat bruto awal dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan dengan menggunakan suku bunga efektif awal (*unwinding interest*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

D. Modification of financial assets cash flow *(continued)*

The Group will measure the substantially and not substantially modified financial assets as follows (continued):

(b) Non-Substantial Modification of Financial Assets

1. *When the Group renegotiates or modifies contractual cash flows of financial assets (including when loans are restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the restructuring or modification does not result in derecognition of the financial assets.*
2. *The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or restructured contractual cash flows, discounted at the initial effective interest rate.*
3. *The Group then recognizes the gain or loss from the modification (i.e the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.*
4. *Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortised over the remaining term of the modified financial asset using the initial effective interest rate.*
5. *The difference between the gross carrying amount of a financial asset before and after modification or restructuring is recognised as a gain or loss of the modified financial asset, which is an adjustment to the initial gross carrying amount and is amortised over the remaining term of the financial asset using the initial effective interest rate (unwinding interest).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

E. Reklasifikasi aset keuangan

Grup diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Grup tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Grup seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Grup perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Grup akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Grup harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:
(a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
(b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.
(c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda.

Dampak reklasifikasi aset keuangan

Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

E. Reclassification of financial assets

The Group is allowed to reclassify the financial assets owned if the Group changes the business model for managing the financial assets and the Group is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Group's operational activities such as acquiring, disposal or discontinued a line of business. In addition, the Group needs to prove the change of business model to external parties.

The Group will reclassify all financial assets impacted by changes in the business model. The changes of the Group's business model must occur before the reclassification date.

The following are not considered as change in business model:
(a) the change of intention related to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions).
(b) temporary loss of certain markets for financial assets.
(c) the transfer of financial assets between parts of the Group and different business models.

Impact of reclassificaton of financial assets

The Group applies the reclassifications prospectively from the reclassification date. The Groups does not restate gain, losses (including gains and impairment losses), or previously recognised interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

E. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Dampak reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Dampak reklasifikasi aset keuangan pada laba rugi atau ekuitas dan pengukuran awalnya adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

E. Reclassification of financial assets *(continued)*

Impact of reclassificaton of financial assets *(continued)*

The impact of reclassification of financial asset on profit or loss or equity and its initial measurement is as follows:

Reklasifikasi/ *Reclassification*		**Dampak Terhadap Laba Rugi/ *Impact to Profit or Loss***	**Dampak Terhadap Ekuitas/ *Impact to Equity***	**Nilai Tercatat Awal Setelah Reklasifikasi/ *Initial Carrying Amount After Reclassification***
Dari/ *From*	**Ke/ *To***			
FVPL	*Amortised Cost*	-	-	*1.* Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru./ *Fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.* 2. Suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset pada tanggal reklasifikasi./ *Effective interest rate is determined at the fair value of the asset at reclassification date.*
	FVOCI	-	-	1. Aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya./ *Financial assets is measured at fair value.* 2. Suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset pada tanggal reklasifikasi./ *Effective interest rate is determined at the fair value of the asset at reclassification date.*
Amortised Cost	FVPL	Selisih antara nilai tercatat sebelum reklasifikasi dan nilai wajar setelah reklasifikasi./ *Difference in carrying amount before reclassification and fair value after reclassification.*	-	Nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi./ *Fair value is measured at reclassification date.*
	FVOCI	-	Selisih antara nilai tercatat sebelum reklasifikasi dan nilai wajar setelah reklasifikasi./ *Difference in carrying amount before reclassification and fair value after reclassification.*	1. Nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi./ *Fair value is measured at reclassification date.* 2. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak perlu disesuaikan./ *Effective interest rate and expected credit loss is not adjusted.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

E. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Dampak reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Dampak reklasifikasi aset keuangan pada laba rugi atau ekuitas dan pengukuran awalnya adalah sebagai berikut (lanjutan):

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

E. Reclassification of financial assets *(continued)*

Impact of reclassificaton of financial assets *(continued)*

The impact of reclassification of financial asset on profit or loss or equity and its initial measurement is as follows (continued):

Reklasifikasi/ *Reclassification*		**Dampak Terhadap Laba Rugi/ *Impact to Profit or Loss***	**Dampak Terhadap Ekuitas/ *Impact to Equity***	**Nilai Tercatat Awal Setelah Reklasifikasi/ *Initial Carrying Amount After Reclassification***
Dari/ *From*	**Ke/ *To***			
FVOCI	*Amortised Cost*	-	Keuntungan atau kerugian kumulatif dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar./ *Cumulative gain or loss on equity is taken out and adjusted against the fair value of the financial asset*	1. Nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya./ *Fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount by added or deducted the previous cumulative gain or loss.* 2. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak perlu disesuaikan./ *Effective interest rate and expected credit loss is not adjusted.*
	FVPL	Keuntungan atau kerugian kumulatif direklasifikasi dari ekuitas menjadi laba rugi./ *Cumulative gain or loss on equity is reclassified to profit or loss.*		Aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya./ *Financial assets is measured at fair value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

F. Klasifikasi atas instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam klasifikasi tertentu sesuai dengan hasil pengujian model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual. Klasifikasi aset keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

F. Classification of financial instruments

The Group classifies the financial instruments into classes in accordance with the results of business model testing and contractual cashflow characteristics. The classification of financial instrument can be seen in the table below:

Klasifikasi/*Classification*		**Golongan/*Class***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVPL)*	Efek-efek/*Marketable securities*
		Obligasi Pemerintah/*Government bonds*
		Tagihan derivatif (tidak terkait lindung nilai)/ *Derivative receivables - non hedging related*
		Kredit yang diberikan/*Loans*
		Penyertaan saham/*Investments in shares*
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (FVOCI)/ *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI)*	Efek-efek/*Marketable securities*
		Obligasi Pemerintah/*Government bonds*
		Kredit yang diberikan/*Loans*
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*Amortised Cost*)/ *Financial assets measured at amortised cost (Amortised Cost)*	Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*
		Tagihan lainnya - transaksi perdagangan/ *Other receivables - trade transaction*
		Efek-efek/*Marketable securities*
		Obligasi Pemerintah/*Government bonds*
		Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under agreements to resell*
		Piutang pembiayaan konsumen/ *Consumer financing receivables*
		Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah/*Loans and sharia receivable/financing*
		Tagihan akseptasi/*Acceptance receivables*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

F. Klasifikasi atas instrumen keuangan (lanjutan)

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dan rekening administratif dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi liabilitas keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

F. Classification of financial instruments

The Group classifies the financial liabilities and administrative accounts (off balance sheet) into certain classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification of financial liabilites can be seen in the table below :

Klasifikasi/*Classification*		**Golongan/*Class***
	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities measured at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif bukan lindung nilai/ *Derivative payables - non hedging related*
		Giro/*Demand deposits*
		Tabungan/*Saving deposits*
		Deposito berjangka/*Time deposits*
		Inter-bank call money
		Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase*
		Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak *unit-link*/*Liabilities to unit-link policyholders*
Liabilitas akseptasi/*Acceptance payables*		
		Efek-efek yang diterbitkan/*Debt securities issued*
		Pinjaman yang diterima/*Fund borrowings*
		Pinjaman subordinasi/*Subordinated loans*
		Setoran jaminan/*Guarantee deposits*

Klasifikasi/ *Classification*	**Golongan/*Class***
Rekening administratif/ *Administrative accounts*	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan (*committed*)/ *Unused loan facilities (committed)*
	Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan/*Irrevocable letter of credit*
	Garansi yang diberikan yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan/ *Bank guarantees issued that meet the definition of a financial guarantee contract*
	Standby letters of credit

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

G. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
b. hak yang dapat dipaksakan secara hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   i. kegiatan bisnis normal;
   ii. kondisi kegagalan usaha; dan
   iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss)* dalam PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss).*

1. Ruang lingkup penurunan nilai

a) Aset keuangan dalam klasifikasi selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
   1) Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".
   2) Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) sebagai "Keuntungan/Kerugian yang Belum Direalisasikan", dan diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai "Beban Pembentukan Cadangan kerugian penurunan nilai".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

G. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and an intention to settle on a net basis or realised the asset and settle the liability simultaneously. This means that the right to offset:

a. must not be contingent on a future event, and
b. must be legally enforceable in all of the following circumstances:
   i. the normal course of business;
   ii. the event of default; and
   iii. the event of insolvency or bankruptcy.

H. Allowance for impairment losses of financial assets

The implementation of SFAS 71 "Financial Instruments" has changed the method of calculating impairment losses from the incurred loss approach in SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" with the expected credit loss approach.

1. Scope of impairment

a) Financial assets in other than those measured at fair value through profit or loss
   1) Impairment of financial assets at amortised cost is recognised as a deduction from the asset's carrying amount in the consolidated statement of financial position, and recognised in the consolidated income statement as "Allowance for Impairment Losses".
   2) Impairment of financial assets (excluding equity instruments) measured at fair value through other comprehensive income is recognised as an addition to other comprehensive income in the consolidated statement of financial position (not reducing the carrying amount of financial assets in the financial statements) as "Unrealised Gain or Loss " and recognised in the consolidated income statement as "Allowance for Impairment Losses".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

1. Ruang lingkup penurunan nilai (lanjutan)

b) Komitmen Pinjaman atau Kelonggaran Tarik yang Sifatnya Tidak Dapat Dibatalkan (*Committed*)
   1) Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas Bank yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai "Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi", kecuali Grup tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
   2) Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

c) Kontrak Jaminan Keuangan
Penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas Bank sebagai "Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi".

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodik

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Kriteria yang digunakan oleh Grup untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:
a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan bunga atau pokok;
c) Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

1. Scope of Impairment *(continued)*

b) Loan Commitments or Committed Unused Loan Facilities

1) Impairment of loan commitments is recognized as provision for the Bank's liability component which is recorded separately from the related loan assets as "Estimated losses on commitments and contingencies", unless the Group cannot identify it separately.

2) In that case, the impairment of loan commitments and loan assets is recognised together as a deduction from the carrying amount of the assets in the consolidated statement of financial position.

c) Financial Guarantee Contract
Impairment of financial guarantee contracts is recognised as a provision under the Bank's liability component as "Estimated losses on commitments and contingencies".

2. Periodic evaluation on impairment of financial assets

The Group assesses at each reporting date whether there is a significant increase in credit risk or objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

The criteria that the Group uses to determine that there is objective evidence of impairment loss include:
a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;

b) A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
c) The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider if the borrower is not having that financial difficulty;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodik (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Grup untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

d) Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan kualitas aset instrumen keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Selanjutnya, Grup mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko kredit aset keuangan.

a) *Stage* 1

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya seluruh hal berikut, yaitu:

Untuk Jenis Aset Keuangan Non-Surat Berharga:
1) Tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 30 hari;
2) Instrumen keuangan memiliki kualitas 1 atau 2; dan
3) Tidak direstrukturisasi.

Aset Keuangan Surat Berharga:
1) Memiliki peringkat investasi;
2) Tidak terdapat tunggakan kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan
3) Belum jatuh tempo.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

2. Periodic evaluation on impairment of financial assets *(continued)*

The criteria that the Group uses to determine that there is objective evidence of impairment loss include (continued):

d) There is a probability that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;
e) The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
f) Purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflects the credit loss that occurs.

The Group uses additional criteria to determine the quality of financial instrument assets in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks.

Furthermore, the Group classifies financial assets based on the evaluation results, which reflect the level of credit risk of the financial assets.

a) Stage 1

At the evaluation date of impairment, credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition, which can be proven by the occurrence of all of the following, namely:

For Types of Non-Securities Financial Assets:
1) There are no arrears of principal and/or interest for more than 30 days;
2) The financial instrument has a collectability of 1 or 2; and
3) Not restructured.

Securities Financial Assets:
1) Having investment grade;
2) There are no arrears of coupons and/or other similar obligations; and
3) Not yet due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodik (lanjutan)

a) *Stage* 1 (lanjutan)

Atas hal tersebut, Grup akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

b) *Stage* 2

Pada tanggal evaluasi, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan.

Untuk Jenis Aset Keuangan Non-Surat Berharga, dengan terjadi salah satu dari hal berikut:
1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melebihi 30 hari sampai dengan 90 hari;
2) Instrumen keuangan memiliki kualitas 2; atau
3) Terjadi restrukturisasi atas aset keuangan yang tidak menyebabkan pengakuan aset yang berasal dari aset keuangan yang memburuk, dimana sebelum restrukturisasi aset berada pada *stage* 1 atau 2.

Untuk Jenis Aset Keuangan Surat Berharga:
1) Memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi;
2) Tidak terdapat tunggakan kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan
3) Belum jatuh tempo.

Grup akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan pada *stage* ini sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

2. Periodic evaluation on impairment of financial assets *(continued)*

a) Stage 1 (continued)

For this reason, the Group will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of an expected credit loss for 12 months.

b) Stage 2

At the evaluation date, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition which can be proven.

For Types of Non-Securities Financial Assets, if one of the following occurs:
1) There are arrears of principal and/or interest between 30 days to 90 days;
2) The financial instrument has a collectability of 2; or
3) There was a restructuring of financial assets that did not result in the recognition of assets originating from impaired financial assets, which before restructuring the assets were at stage 1 or 2.

For Types of Securities Financial Assets:
1) Has a rating of at least 1 (one) level below investment grade;
2) There are no arrears of coupons and/or other similar obligations; and
3) Not yet due.

At this stage, the Group will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of the expected credit losses over its lifetime.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodik (lanjutan)

c) *Stage* 3 *(Default)*

Pada tanggal evaluasi, terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan.

Untuk Jenis Aset Keuangan Non-Surat Berharga, dengan terjadinya salah satu dari hal berikut, yaitu:
1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari;
2) Instrumen keuangan memiliki kualitas 3, 4, atau 5; atau
3) Terjadi restrukturisasi atas aset keuangan yang tidak menyebabkan pengakuan aset yang berasal dari aset keuangan yang memburuk, dimana sebelum restrukturisasi aset telah berada pada s*tage* 3.

Untuk Jenis Aset Keuangan Surat Berharga:
1) Memiliki peringkat investasi, terdapat tunggakan kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis, dan belum jatuh tempo; atau
2) Kriteria lain yang tidak memenuhi kriteria pada *stage* 1 dan 2 untuk jenis aset keuangan surat berharga.

Grup akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan pada *stage* ini sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Khusus untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual, Grup dapat menetapkan aset keuangan tersebut pada kelompok *stage* 3 (dari sebelumnya ada di kelompok *stage* 2), meskipun aset keuangan dimaksud belum memenuhi kriteria kelompok *stage* 3.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

2. Periodic evaluation on impairment of financial assets *(continued)*

c) Stage 3 (Default)

At the evaluation date, there is objective evidence that the financial asset is impaired which can be proven.

For Types of Non-Securities Financial Assets, if one of the following occurs:
1) There are arrears principal and/or interest of more than 90 days;
2) The financial instrument has a collectability of 3, 4, or 5; or
3) There was a restructuring of financial assets that did not result in the recognition of assets originating from impaired financial assets, where prior to restructuring the assets were at stage 3.

For Types of Securities Financial Assets:
1) Has an investment grade, has arrears of coupons and/or other similar obligations, and has not yet matured; or

2) Other criteria that do not meet the criteria on stage 1 and 2 for types of securities financial assets.

The Group will measure the allowance for losses for financial instruments at this stage at the amount of the expected credit losses over its lifetime.

Specifically for financial assets which impairment value is evaluated individually, the Group may designate these financial assets in the stage 3 group (from the previous stage 2 group), even though those financial assets do not meet the criteria for stage 3 group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodik (lanjutan)

d) Aset yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk *(Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Asset ("POCI"))*

1) Kriteria aset yang dibeli sebagai aset keuangan memburuk

Aset keuangan yang dibeli dikelompokkan sebagai aset keuangan memburuk jika memenuhi kriteria berikut:
a. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan; atau
b. Pembelian aset keuangan dengan diskon sangat besar atau jauh di bawah harga par.

2) Kriteria dan pengukuran aset yang berasal dari aset keuangan memburuk

a. Aset keuangan yang dimodifikasi/renegosiasi dan menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan dikelompokkan sebagai aset yang berasal dari aset keuangan memburuk jika memenuhi kriteria berikut:
1. *Waive* atas tunggakan bunga termasuk dengan Tunggakan Bunga yang Dijadwalkan (TBYD) dan Bunga yang Ditangguhkan (BYDT) sebesar 100% (seratus persen); atau
2. Kredit dikonversi menjadi penyertaan modal sementara.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

2. Periodic evaluation on impairment of financial assets *(continued)*

d) Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Asset ("POCI")

1) The criteria for assets purchased as an impaired financial assets

A purchased financial asset is classified as an impaired financial asset if it meets the following criteria:
a. Loss of active market of financial assets; or
b. Purchase of financial assets at a very large discount or significant below par.

2) Criteria for assets originating from impaired financial assets

a. Financial assets that are modified/renegotiated resulting in derecognition of financial assets are classified as assets originating from impaired financial assets if they meet the following criteria:

1. Waive on interest arrears including Scheduled Interest Arrears and Deferred Interest of 100% (one hundred percent); or

2. Loans are converted into temporary equity participation (temporary investment in shares).

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodik (lanjutan)

d) Aset yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk *(Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Asset ("POCI"))* (lanjutan)

2) Kriteria dan pengukuran aset yang berasal dari aset keuangan memburuk (lanjutan)

b. Pada tanggal pelaporan, Grup hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

c. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

d. Jika aset keuangan terbukti berdasarkan fakta atau informasi yang relevan bahwa aset keuangan membaik, maka Grup akan mencatat di laporan laba rugi sebagai pengurang "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

e. Jika kondisi aset keuangan terbukti memburuk, maka Grup akan mencatat di laporan laba rugi sebagai penambah "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Grup menggunakan kriteria untuk menentukan kategori aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan pengelompokan tingkat risiko aset keuangan di atas. Aset keuangan pada kelompok *stage* 3 dan POCI merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

2. Periodic evaluation on impairment of financial assets *(continued)*

d) Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Asset ("POCI") (continued)

2) Criteria for assets originating from impaired financial assets (continued)

b. At the reporting date, the Group recognizes only the cumulative changes in the lifetime expected credit losses since the initial recognition of the financial asset as an allowance for impairment losses on financial assets purchased or originating from impairment financial assets.

c. At each reporting date, the Group recognizes in profit or loss the amount of changes in lifetime expected credit losses as an impairment gain or loss.

d. If the financial assets are proven based on facts or relevant information that the financial assets are improving, the Group will recognize in the income statement as a deduction for "Allowance for Impairment Losses".

e. If the condition of the financial asset are proven to be impaired, the Group will recognize it in the income statement as an addition to "Allowance for Impairment Losses".

The Group uses criteria to determine the category of financial assets that have impaired based on the grouping of the risk levels of financial assets above. Financial assets in stage 3 group and POCI are financial assets that have impaired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut:

a) Metode Individual

1) Kriteria Individual

Grup mengevaluasi penurunan nilai secara individual apabila Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual dan aset keuangan memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Aset keuangan per debitur memiliki nilai *outstanding* kumulatif lebih dari Rp25.000 (dua puluh lima miliar Rupiah);
b. Kredit segmen *Corporate*, Kelembagaan, *Financial Institutions*, *Commercial*, dan SME *Banking*; dan
c. Aset keuangan termasuk dalam kategori *stage* 2 akibat dari restrukturisasi, *stage* 3, atau POCI.

Grup juga dapat menetapkan aset keuangan untuk dievaluasi secara individual meskipun aset keuangan dimaksud belum memiliki kriteria untuk dievaluasi secara individual.

2) Jika aset keuangan terdapat bukti objektif penurunan nilai dari aset keuangan yang dievaluasi secara individual namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai, maka aset keuangan tersebut tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi aset keuangan yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara individual. Namun, Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut berdasarkan *probability of default* yang dihasilkan dari evaluasi penurunan nilai kredit secara kolektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method

The Group evaluates the impairment using the following methods:

a) Individual Method

1) Individual Criteria

The Group evaluates impairment individually when the Group has reasonable and supportable information to measure the lifetime expected credit losses on an individual instrument and the financial assets have the following criteria:

a. Financial assets per debtor with a cumulative outstanding amount of more than Rp25,000 (twenty five billion Rupiah);
b. Loans for the Corporate, Institutional, Financial Institutions, Commercial, and SME Banking segments; and
c. Financial assets fall into the stage 2 category as a result of a restructuring, stage 3, or POCI.

The Group may also designate financial assets to be evaluated individually even though the financial assets have not yet meet criteria for individual evaluation.

2) If a financial asset has objective evidence of impairment from a financial asset that is evaluated individually but there is no impairment loss, the financial asset is still classified as a financial asset that will be assessed for impairment individually. However, the Group establishes allowance for impairment losses on these financial assets based on the probability of default resulting from a collective evaluation of loans impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

a) Metode Individual (lanjutan)

3) Evaluasi Penurunan Nilai

Evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada konsep estimasi jumlah probabilitas tertimbang kerugian aset keuangan. Konsep tersebut menggunakan pembobotan masing-masing dari 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario normal, dan skenario pesimis.

1. Optimis

Skenario dengan asumsi terdapat kenaikan atau ekspansi dalam perekonomian yang berakibat pada menguatnya nilai variabel seperti pertumbuhan ekonomi meningkat atau apresiasi nilai tukar.

2. Normal

Skenario yang memiliki peluang terbesar untuk terjadi dibandingkan 2 (dua) skenario lainnya. Nilai variabel dalam skenario *baseline* adalah hasil proyeksi dengan asumsi pergerakan ekonomi tanpa adanya peristiwa luar biasa, guncangan atau gejolak ekonomi.

3. Pesimis

Skenario dengan asumsi terdapat pelemahan atau kontraksi dalam perekonomian yang berakibat melemahnya nilai variabel seperti penurunan pertumbuhan ekonomi atau depresiasi nilai tukar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

a) Individual Method (continued)

3) Impairment Evaluation

Individual impairment evaluation is based on the concept of an estimated weighted probability of loss of financial assets. This concept uses the weighting of each of the 3 (three) scenarios, which are the optimistic scenario, the normal scenario, and the pessimistic scenario.

1. Optimistic

A scenario with the assumption that there is an increase or expansion in the economy which results in the strengthening of variable values such as increased economic growth or exchange rate appreciation.

2. Normal

The scenario that has the greatest chance of occurring compared to the other 2 (two) scenarios. The variable value in the baseline scenario is the projection result assuming economic movements without any extraordinary events, shocks or economic turmoil.

3. Pessimistic

Scenarios with the assumption that there is a weakening or contraction in the economy that results in weakening of variable values such as a decrease in economic growth or depreciation of the exchange rate.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

a) Metode Individual (lanjutan)

3) Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

Setiap skenario menghasilkan nilai kini arus kas yang didiskontokan, di mana arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dengan *experienced credit judgement* serta mencerminkan seluruh informasi yang memperhatikan berbagai faktor seperti:

1. Kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (*repayment capacity*).
2. Jenis dan jumlah agunan.
3. Ketersediaan garansi.
4. Prospek usaha nasabah di masa datang.
5. Probabilitas penjualan agunan.
6. Kerugian historis.
7. Faktor makroekonomi yang relevan.

Selisih estimasi jumlah probabilitas tertimbang dengan jumlah *outstanding* aset keuangan mencerminkan jumlah kerugian penurunan nilai individual.

Metode evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada 2 (dua) konsep, yaitu estimasi jumlah kerugian aset keuangan dan estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Metode yang digunakan adalah *discounted cash flow* atau metode *fair value of collateral.* Bank menggunakan metode *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Sulit untuk menentukan jumlah dan waktu penerimaan estimasi *cash flow* yang berasal dari pokok kredit dan/atau bunga dengan andal; dan/atau
3. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

a) Individual Method (continued)

3) Impairment Evaluation (continued)

Each scenario provides a discounted present value of cash flows, where the cash flows are based on all available information with experienced credit judgment and reflect all information that takes into account various factors such as:

1. *Financial strength and the debtor's repayment capacity.*
2. *Type and amount of collateral.*
3. *Availability of warranty.*
4. *Customers' future business prospects.*
5. *Probability of collateral sale.*
6. *Historical losses.*
7. *Relevant macroeconomic factors.*

The difference between the weighted probability and the total outstanding of financial assets reflects the amount of the individual impairment loss.

The individual impairment evaluation method is based on 2 (two) concepts, which are the estimated amount of loss on financial assets and the estimated amount that can be recovered. The method used are discounted cash flow or fair value of collateral method. The Bank uses the fair value of collateral method as future cash flows if it meets one of the following conditions:

1. *Loans is collateral dependent, if loans repayment source only from collateral;*
2. *It is difficult to reliably determine the amount and timing of receipt of the estimated cash flow from loan principal and/or interest; and/or;*
3. *Foreclosure of collateral is likely to occur and is supported by legal binding aspects of collateral.*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

b) Metode Kolektif

1) Kriteria Kolektif

Bank mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif apabila aset keuangan memiliki kesamaan dalam karakteristik risiko aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. Kriteria aset keuangan yang dievaluasi secara kolektif adalah sebagai berikut:

a. Aset keuangan per debitur merupakan aset keuangan *non-performing* atau memiliki *days past due* > 90 hari dan memiliki nilai kumulatif sebesar ≤ Rp25.000 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk Segmen *Corporate*, Kelembagaan, *Financial Institutions*, *Commercial* dan SME *Banking*;
b. Aset keuangan *performing* atau memiliki *days past due* ≤ 90 hari dan tidak direstrukturisasi untuk segmen *Corporate*, Kelembagaan, *Financial Institutions*, *Commercial* dan SME *Banking*; dan
c. Seluruh kredit segmen *Micro Banking* dan *Consumer*.

Secara garis besar, seluruh portofolio kredit yang evaluasi penurunan nilainya tidak dihitung menggunakan metode individual, akan dievaluasi menggunakan metode kolektif.

2) Evaluasi Penurunan Nilai

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada *konsep Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

b) Collective Method

1) Collective Criteria

The Bank assesses impairment collectively if the financial assets share the same risk characteristics of the financial assets with the purpose of facilitating analysis which is designed to allows a significant increase in credit risk to be identified in a timely manner. The criteria for financial assets that are evaluated collectively are as follows:

a. Financial assets per debtor are non-performing financial assets or have days past due > 90 days and have a cumulative value of ≤ Rp25,000 (twenty five billion rupiah) for the Corporate, Institutional, Financial Institutions, Commercial, and SME Banking segments;
b. Performing financial assets or having days past due ≤ 90 days and were not restructured for the Corporate, Institutional, Financial Institutions, Commercial, and SME Banking segments; and
c. All loans in the Micro Banking and Consumer segments.

In general, all loan portfolios for which impairment evaluation is not calculated using the individual method will be evaluated using the collective method.

2) Impairment Evaluation

The evaluation of collective impairment is based on the concepts of Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Exposure at Default (EAD) which consider past, current, and future information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

b) Metode Kolektif (lanjutan)

2) Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

a. *Probability of Default*

Bank menggunakan metode *Basel, Vasicek, Roll Rate Transition Matrix* maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap debitur.

Metode *Basel* dilakukan dengan menentukan hubungan antara PD suatu debitur dengan karakteristik internal dari debitur yang bersangkutan. Model Basel yang telah didapatkan digunakan sebagai dasar penentuan nilai PD dari setiap debitur.

Metode *Vasicek* adalah metode penentuan PD menggunakan formula korelasi aset yang telah ditentukan oleh *Basel Committee*.

Metode *Roll Rate Transition Matrix* menggunakan *historical transition bucket* PD. *Bucket* PD yang digunakan dalam perhitungan *historical* adalah sebagai berikut:
1. *Bucket* 1: *Lancar*
2. *Bucket* 2: 1-30 *days past due* (DPD)
3. *Bucket* 3: 31-60 dpd
4. *Bucket* 4: 61-90 dpd
5. *Bucket* 5: >90 dpd

PD *Forward-Looking Macro Adjustment* adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai PD *forward looking* dari pendekatan baik *Basel* maupun *Roll Rate* berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

b) Collective Method (continued)

2) Impairment Evaluation (continued)

a. Probability of Default

The Bank uses the Basel, Vasicek, Roll Rate Transition Matrix, and other approaches in determining the PD value of each debtor.

The Basel method is performed by determining the relationship between a debtor's PD with the internal characteristics of that debtor. The Basel model that has been obtained is used as the basis for determining the PD value of each debtor.

The Vasicek method is a method of determining PD using the asset correlation formula that has been determined by the Basel Committee.

The Roll Rate Transition Matrix method uses the historical transition bucket PD. PD buckets used in historical calculations are as follows:

1. *Bucket 1: Current*
2. *Bucket 2: 1-30 days past due (DPD)*
3. *Bucket 3: 31-60 dpd*
4. *Bucket 4: 61-90 dpd*
5. *Bucket 5: >90 dpd*

PD Forward-Looking Macro Adjustment is a method used to determine the forward looking PD value of both Basel and Roll Rate approaches based on the historical relationship between the macro economy and the PD value of the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

b) Metode Kolektif (lanjutan)

2) Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

b. *Loss Given Default*

Bank menggunakan metode *Basel* dan *Historical* dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat dipulihkan oleh Bank terhadap debitur *default*. LGD biasa dihitung dengan formula 1-*Recovery Rate. Recovery rate* dihitung mempertimbangkan *Time Value of Money* dari pengembalian kewajiban yang telah default. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *Time Value of Money* dari *Recovery* adalah *Effective Interest Rate* (EIR).

Metode *Basel* dilakukan dengan menentukan hubungan antara LGD suatu debitur dengan karakteristik internal dari debitur yang bersangkutan. Model Basel yang telah didapatkan digunakan sebagai dasar penentuan nilai LGD dari setiap debitur.

Metode *Historical* dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai LGD dalam periode jangka panjang pada segmen yang dimaksud.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

b) Collective Method (continued)

2) Impairment Evaluation (continued)

b. Loss Given Default

The Bank uses Basel and Historical methods in determining the LGD value of each debtor. LGD describes the nominal percentage of the facility that the Bank will not be able to recover against the default debtor. Regular LGD is calculated with formula 1-Recovery Rate. The recovery rate is calculated by considering the Time Value of Money from the recovery of the default obligation. The interest rate used to calculate the Time Value of Money of Recovery is the Effective Interest Rate (EIR).

The Basel method is carried out by determining the relationship between a debtor's LGD and the internal characteristics of the debtor concerned. The Basel model that has been obtained is used as the basis for determining the LGD value of each debtor.

Historical method is done by calculating the average value of LGD in the long term observation period in the respective segment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

b) Metode Kolektif (lanjutan)

2) Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

b. *Loss Given Default* (lanjutan)

Forward-Looking Macro Adjustment pada LGD adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai LGD *forward looking* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai LGD Bank. Jika tidak didapatkan hubungan antara makroekonomi dengan nilai LGD Bank, maka Bank dapat tidak menggunakan *Forward-Looking* dalam penentuan nilai LGD.

c. *Exposure at Default*

Dalam menentukan nilai EAD dari setiap debitur, Bank menggunakan metode *Basel*, *Prepayment Rate* dan *Expected Lifetime*. EAD menggambarkan *exposure* yang akan ditanggung Bank jika terdapat debitur yang *default*.

Metode *Basel* dalam perhitungan EAD dilakukan dengan menentukan hubungan antara EAD suatu debitur dengan karakteristik internal dari debitur yang bersangkutan.

Metode *Prepayment Rate* ialah metode yang mempelajari *behaviour* dari tingkat pembayaran debitur yang lebih besar dibandingkan dengan besaran pembayaran fasilitas yang telah dijadwalkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

b) Collective Method (continued)

2) Impairment Evaluation (continued)

b. Loss Given Default (continued)

Forward-Looking Macro Adjustment in LGD is a method used to determine the forward looking LGD value based on the historical relationship between macroeconomics and the Bank's LGD value. If there is no relationship between macroeconomics and the Bank's LGD value, the Bank may not use Forward-Looking in determining the LGD value.

c. Exposure at Default

In determining the EAD value of each debtor, the Bank uses the Basel, Prepayment Rate, and Expected Lifetime method. EAD describes the exposure that will be borne by the Bank if there is a debtor become defaults.

The Basel method in calculating EAD is performed by determining the relationship between a debtor's EAD and the internal characteristics of the respective debtor.

The Prepayment Rate method is a method that studies the behavior of the debtor's payment rate that is bigger than the scheduled facility payment amount.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

b) Metode Kolektif (lanjutan)

2) Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

c. *Exposure at Default* (lanjutan)

Metode *Expected Lifetime* ialah metode yang mempelajari *behaviour* dari tingkat penyelesaian fasilitas (lunas atau *hapus buku*) debitur dibandingkan dengan jadwal penyelesaian fasilitas.

d. *Expected Credit Loss*

Secara umum formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah pengkalian antara *Probability of Default*, *Loss Given Default*, dan *Exposure at Default*.

Dalam menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai kolektif, Bank menggunakan nilai saldo rekening kredit dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai pada masing-masing *stage* sesuai pada karakteristik *staging*. Metode perhitungan pada masing-masing *stage* adalah sebagai berikut:
1. *Stage* 1: 12-*months* ECL
2. *Stage* 2: *Lifetime* ECL
3. *Stage* 3: *Lifetime* ECL

12-*Months* ECL adalah perhitungan kerugian ekspektasian yang dihitung untuk 1 tahun ke depan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

b) Collective Method (continued)

2) Impairment Evaluation (continued)

c. Exposure at Default (continued)

The Expected Lifetime method is a method that studies the behavior of the debtor's level of settlement (paid off or write off) compared to the facility settlement schedule.

d. Expected Credit Loss

In general, the formula for calculating collective ECL is the multiplication of Probability of Default, Loss Given Default, and Exposure at Default.

In calculating the amount of collective impairment, the Bank uses the loan carrying value which the impairment value is assessed collectively.

Calculation of impairment is done for each stage according to the characteristics of the staging. The calculation method for each stage is as follows:

1. *Stage 1: 12-months ECL*
2. *Stage 2: Lifetime ECL*
3. *Stage 3: Lifetime ECL*

12-Months ECL is the calculation of the expected loss for the next 1 year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

3. Metode penurunan nilai (lanjutan)

Grup melakukan evaluasi penurunan nilai dengan metode sebagai berikut (lanjutan):

b) Metode Kolektif (lanjutan)

2) Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

d. *Expected Credit Loss* (lanjutan)

ECL-*Lifetime* adalah perhitungan kerugian ekspektasian yang dihitung untuk sisa tenor fasilitas.

Dalam perhitungan ECL setiap tahun menggunakan *discount factor* dengan formula yang Grup telah rumuskan.

Probability weighted dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai telah ditentukan oleh Grup mencakup persentase skenario optimis, normal, dan pesimis.

Total rata-rata tertimbang atas estimasi *arus kas* dimaksud menjadi pengurang atas nilai tercatat kredit yang dimana selisihnya akan menjadi cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

4. Pendapatan bunga sebelum dan sesudah penurunan nilai

Sebelum terjadinya penurunan nilai (*stage* 1 & 2), pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

3. Impairment method *(continued)*

The Group evaluates the impairment using the following methods (continued):

b) Collective Method (continued)

2) Impairment Evaluation (continued)

d. Expected Credit Loss (continued)

ECL-Lifetime is the calculation of the expected loss which is calculated for the remaining tenor of the facility.

Every year in calculating the ECL uses the discount factor based on formula that the Group has formulated.

The probability weighted in the calculation of impairment has been determined by the Group which includes the percentage of optimistic, normal, and pessimistic scenarios.

The total weighted of the estimated cash flow becomes a deduction from the carrying amount of the loans, where the difference will be the allowance for impairment on loans.

4. Interest income before and after impairment

Prior to impairment (stage 1 & 2), interest income is calculated using the effective interest method, by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets except for financial assets purchased or originated from impaired financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

4. Pendapatan bunga sebelum dan sesudah penurunan nilai (lanjutan)

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*stage* 3 atau POCI) dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat neto aset keuangan yaitu jumlah saldo setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai untuk:

a) Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan Memburuk ("POCI")

Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.

b) *Stage* 3

Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan, yaitu nilai yang telah dikurangi kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai atau yang disebut dengan *unwinding interest*.

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

4. Interest income before and after impairment *(continued)*

Interest income from impaired financial assets (stage 3 or POCI) calculated by applying an effective interest rate on the net carrying amount of financial assets, which is the outstanding amount after deducting losses due to impairment for:

a) Financial Assets Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets ("POCI")

For these financial assets, the Group applies a risk-adjusted effective interest rate on the amortised cost of the financial assets since initial recognition.

b) Stage 3

For these financial assets, the Group applies an effective interest rate on the amortised cost of financial assets in the reporting period, which is the amount that has been reduced by any impairment losses.

Interest income is subsequently recognised based on of the interest rate used to discount future cash flows in measuring impairment losses or what is known as unwinding interest.

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia

Allowance for impairment losses on murabahah receivable is calculated based on collective method according to SFAS 102 "Accounting for Murabahah" and Interpretation of Financial Accounting Standard ("IFAS") 102 "Impairment Loss for Murabahah Receivables".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

1. Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Tagihan *Reverse Repo* SBSN BI, *Term Deposit* Valas Syariah BI, giro pada bank syariah lain, penempatan pada bank syariah lain, investasi pada surat berharga, penyertaan modal sementara, piutang *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dan pembiayaan syariah lainnya (termasuk pinjaman *qardh*), dan komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit seperti bank garansi dan *letter of credit* ("L/C") yang tidak dapat dibatalkan dan *standby letter of credit.*

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta POJK No. 12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia *(continued)*

(a) Financial assets carried at amortised cost

1. Earning assets consist of current account and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificate (Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)), Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS)), Reverse Repo Receivables State Sharia Certificates (Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) BI, Term Deposit Foreign Currency Sharia BI, current accounts with other sharia banks, placement with other sharia banks, investment in marketable securities, temporary equity participation, murabahah receivables, musyarakah and mudharabah financing and other sharia financing (including funds of qardh, and commitments and contingencies with credit risk, such as bank guarantees, irrevocable letter of credit ("LC") and standby letter of credit.

Allowance for impairment losses of earning assets and non-earning assets for commercial bank conducting business based on sharia principles is regulated on Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 2/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Assessment for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units", and POJK No. 12/POJK.03/2015 dated 21 August 2015 regarding "Prudential Principle Provisions for Sharia Banks and Sharia Commercial Business Units to Stimulate the National Economy".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan POJK tersebut adalah sebagai berikut:

a) Cadangan umum, sekurang- kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBIS dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

b) Cadangan khusus, sekurang- kurangnya sebesar:
- 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
- 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia *(continued)*

(a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

The guidelines for the establishment of allowance for impairment losses on earning assets based on the aforementioned FSA Regulation are as follows:

a) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Sharia Certificates and debt securities issued by the Government based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged and accompanied with the power of attorney to liquidate.

b) Special reserve shall be at least:
- *5% of earning assets classified as Special Mention after deducting collateral value;*
- *15% of earning assets classified as Substandard after deducting collateral value;*
- *50% of earning assets classified as Doubtful after deducting collateral value;*
- *100% of earning assets classified as Loss after deducting collateral value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan POJK tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

c) Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Entitas Anak wajib membentuk penyusutan/ amortisasi terhadap aset *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Khusus untuk kualitas surat berharga dan penempatan pada Entitas Anak ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Sedangkan untuk kualitas penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

2. Untuk *Murabahah*, Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset yang dapat diestimasi secara andal.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia *(continued)*

(a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

The guidelines for the establishment of allowance for impairment losses on earning assets based on the aforementioned FSA Regulation are as follows (continued):

c) The requirement to establish allowance for impairment losses shall not be applicable for earning assets under leasing transactions in the form of ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik. The Subsidiary is required to depreciate/amortize the assets of ijarah muntahiyah bittamlik.

For marketable securities and placements to the Subsidiary, the collectability is classified into 3 (three) categories: current, substandard, and loss. collectabilty of investment in shares is determined into 4 (four) categories: current, substandard, doubtful and loss.

2. For Murabahah, the Subsidiary evaluates whether there is an objective evidence that the financial assets or group of financial assets are impaired. The financial assets or group of financial assets are impaired and the impairment loss occurred only if there is an objective evidence regarding the impairment as a result of one or more events that occurred after initial recognition which impacts the estimated future cash flows that can be reliably estimated.

The allowance for impairment on murabahah receivables is calculated using collective assessment according to SFAS No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Entitas Anak menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”.

Entitas Anak menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1) Piutang murabahah memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual di atas atau sama dengan Rp10.000; dan
2) Piutang murabahah yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang di atas Rp10.000.

Entitas Anak menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1) Piutang murabahah yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2) Piutang murabahah yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan
3) Piutang murabahah yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia *(continued)*

(a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

In accordance with SFAS No. 102 “Accounting for Murabahah” and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Subsidiary calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivables in accordance with IFAS No. 102 “Impairment of Murabahah Receivables”.

The Subsidiary determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:
1) Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful and loss, and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000; and
2) Murabahah receivables that are restructured or had been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000

The Subsidiary determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:
1) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
2) Murabahah receivables which individually have insignificant value; and
3) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah (lanjutan)

(a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Entitas Anak menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Entitas Anak menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD").

(b) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Lihat Catatan 2c.(H).(2) untuk kriteria bukti objektif adanya penurunan nilai.

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia *(continued)*

(a) Financial assets carried at amortised cost (continued)

The Subsidiary uses the migration analysis method which is a statistical analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Subsidiary uses 5 (five) years historical data to compute for the Probablitity of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD").

(b) Financial assets classified as available for sale

The Group assesses at each date of the consolidated statement of financial position whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. Refer to Note 2c.(H).(2) for the criteria of objective evidence of impairment.

A significant or prolonged decline in the fair value of the debt investments below its cost is objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. If any such evidence exists for available for sale financial assets, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is removed from equity and recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If, in a subsequent period, the fair value of a financial asset classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed through the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

H. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

5. Penyisihan kerugian aset produktif Entitas Anak berbasis syariah (lanjutan)

(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

Jaminan keuangan awalnya diakui dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Setelah pengakuan awal, liabilitas Bank atas jaminan tersebut diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah awal, dikurangi amortisasi provisi dan estimasi terbaik dari jumlah yang diharapkan akan terjadi untuk menyelesaikan jaminan tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman transaksi yang sejenis dan kerugian historis masa lalu, dilengkapi dengan penilaian manajemen. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan dengan menggunakan metode garis lurus.

Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dan komitmen berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai amortisasi (nilai tercatat) dan nilai kini atas pembayaran liabilitas yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*) atau nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung berdasarkan data kerugian historis untuk evaluasi penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

H. Allowance for impairment losses of financial assets *(continued)*

5. Allowance for possible losses on earning assets of Subsidiary based on sharia *(continued)*

(c) Financial guarantee contracts and commitments

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the contracts holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans and other banking facilities.

Financial guarantees are initially recognised in the consolidated financial statements at fair value on the date which the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to equal with the provision received because all guarantees are agreed on arm's length terms. Subsequent to initial recognition, the Bank's liabilities under such guarantees are measured at the higher amount between the initial amount, less amortisation of provision recognised, and the best estimates of the amount required to settle the guarantee. These estimation are determined based on experience of similar transactions and history of past losses, supplemented by the judgement from management. The provision income earned is amortised over the period of guarantees using the straight-line method.

The Bank determines impairment losses on financial assets of financial guarantee contracts that have credit risk and commitment based on the value that is higher between the amortised value (carrying value) and the present value of the liabilities that are expected to occur (when payment under the guarantee has become probable) or impairment losses that are calculated based on historical loss data for a collective evaluation of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

I. Investasi pada sukuk

Sebelum pengakuan awal, Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Grup. Klasifikasi dalam investasi sukuk terdiri dari:

- Biaya perolehan

  Jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan terdapat persyaratan kontraktual untuk menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

  Jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk dan terdapat persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pada saat penghentian pengakuan saldo, perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

  Biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

I. Investment in sukuk

Before the initial recognition, the Group determines the classification of investment in sukuk based on the Group's investment objective. Investment in sukuk can be measured as follows:

- *Acquisition cost*

  If the investment is held within a business model that aims to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the returns. The acquisition cost for sukuk ijarah and sukuk mudharabah includes transaction cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortised using straight-line method during the period of the sukuk instrument.

- *Measured at fair value through other comprehensive income*

  If the investment is held within a business model which its primary purpose is to obtain contractual cash flows and sell off sukuk and there is a contractual requirements determined by specific date of payment of principal and/or results. The acquisition cost of sukuk ijarah and sukuk mudharabah includes transaction costs. The difference between the acquisition cost and nominal value is amortised on straight-line basis over the terms of sukuk. The changes in fair value are recognised in other comprehensive income. At the time of derecognition, the changes in fair value in other comprehensive income are reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

- *Measured at fair value through profit or loss*

  The acquisition cost of sukuk ijarah and sukuk mudharabah is measured at fair value through profit or loss excluding transaction costs. For investments in sukuk which are measured at fair value through profit or loss, the difference between the fair value and the carrying amount is recognised in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

J. Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan disajikan sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang timbul dari penerbitan surat berharga dicatat sebagai beban yang ditangguhkan yang disajikan dalam akun "Aset lain-lain" dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu surat berharga.

K. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar. Pengukuran/penetapan nilai wajar bertujuan untuk mengestimasi harga dimana transaksi teratur (*orderly transaction*) untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran.

Ketika tidak terdapat pasar aktif atau harga suatu instrumen keuangan yang identik tidak dapat diobservasi, Grup dapat mengukur nilai wajar menggunakan teknik penilaian sesuai jenis instrumen keuangan.

Grup dapat melakukan pengukuran nilai wajar, dengan hirarki sebagai berikut:

1. Input Level 1, yaitu harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses Grup pada tanggal pengukuran.
2. Input Level 2, yaitu input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
3. Input Level 3, yaitu input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

J. Sukuk mudharabah issued

Sukuk mudharabah issued is recognised at nominal amount. Transaction costs from the issuance of sukuk mudharabah are recognised as deferred expense and presented as "Other assets" and amortised using straight-line over the terms of sukuk mudharabah.

K. Determination of fair value

Fair value is a market based measurement. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction among market participants at the measurement date.

When there is no active market or the price of an identical financial instrument cannot be observed, the Group can measure fair value using valuation techniques according to the type of financial instrument.

The Group can measure fair value, with the following hierarchy:

1. Input Level 1, the quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the Group can access at the measurement date.
2. Input Level 2, the input other than quoted price included in level 1 that can be observed for assets or liabilities, either directly or indirectly.
3. Input Level 3, the unobservable input for an asset or liability.

A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability; or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

K. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, seperti efek-efek dan obligasi pemerintah, ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti Bloomberg, Reuters atau harga yang diberikan oleh broker (harga kuotasian). Investasi dalam unit reksadana dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk efek-efek yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

K. Determination of fair value *(continued)*

The fair value of an asset or a liability should be measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset at its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset at its highest and best use.

The fair value of financial instruments traded in active markets, such as marketable securities and government bonds, is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date using price that published regularly and from credible sources such as quoted market prices from Bloomberg, Reuters or broker's quoted price. Investments in mutual fund units are stated at market value, in accordance with the net value of assets of the mutual funds at the consolidated statement of financial position date.

A financial instrument is deemed to be quoted in an active market if quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from stock exchanges, dealers, and brokers. These prices reflect actual and regular market transactions in a fair transaction. If the criteria above are not met, the active market is declared unavailable. Indications of an inactive market are that there is a large gap between the bid and ask prices or a significant increase in the difference between the bid and ask prices, and there are only a few recent transactions.

For marketable securities with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

K. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Untuk obligasi pemerintah yang tidak memiliki nilai pasar, estimasi nilai wajar ditentukan dengan menggunakan model internal berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan (pendekatan *next-repricing method*) dengan menggunakan faktor deflator.

L. Reformasi acuan suku bunga

Untuk pengukuran instrumen keuangan yang menggunakan biaya perolehan diamortisasi (aset keuangan instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi), perubahan arus kas kontraktual masa depan dari instrumen keuangan tersebut yang terjadi akibat reformasi suku bunga (perubahan suku bunga acuan kontraktual dari sebelumnya suku bunga LIBOR menjadi suku bunga acuan alternatif) akan mengubah tingkat suku bunga efektif instrumen keuangan tersebut. Perubahan arus kas kontraktual tersebut tidak mempengaruhi biaya perolehan diamortisasi instrumen keuangan dimaksud, dan tidak berdampak pada laba atau rugi (penerapan praktis). Penerapan praktis tersebut dapat diterapkan jika dan hanya jika 2 (dua) persyaratan berikut terpenuhi:

1. Perubahan arus kas kontraktual tersebut diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga; dan
2. Suku bunga acuan alternatif pengganti secara ekonomis setara (*economically equivalent*) dengan suku bunga acuan yang digunakan sebelumnya.

d. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank Mandiri dan Entitas Anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh Bank Mandiri.

Pengendalian didapat ketika Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial instruments *(continued)*

K. Determination of fair value *(continued)*

For government bonds with no quoted market prices, a reasonable estimate of the fair value is determined using the internal model based on the present value of expected future cash flows using the next-repricing method with a deflator factor.

L. Interest rate benchmark reform

For the measurement of financial instruments using amortised cost (financial assets of debt instruments classified as amortised cost and fair value through other comprehensive income, as well as financial liabilities measured at amortised cost), changes in the future contractual cash flows of those financial instruments occurs as a result of interest rate reform (change in the contractual benchmark interest rate from the previous LIBOR interest rate to an alternative benchmark interest rate) will change the effective interest rate of the financial instrument. The change in contractual cash flows does not affect the amortised cost of the financial instrument, and has no impact on profit or loss (practical expedient). Such practical expedient can be applied if and only if the following 2 (two) requirements are met:

1. *The change in contractual cash flows is necessary as a direct result of the reform of benchmark interest rates; and*
2. *The alternative reference interest rate is economically equivalent to the previously used benchmark interest rate.*

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statement of Bank Mandiri and its Subsidiaries in which the majority shares are owned or controlled by Bank Mandiri.

Control is presumed to exist where the Bank is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the Subsidiaries and has ability to use its power to affect its returns from its involvement with the Subsidiaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Bank mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Bank memiliki hak berikut ini:
a) Kekuasaan atas Entitas Anak (hak yang ada saat ini yang mempengaruhi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil Entitas Anak).
b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak.
c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Bank.

Pada laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri, semua saldo dan transaksi yang signifikan antar perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi. Kepentingan nonpengendali atas laba bersih Entitas Anak disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasian untuk mendapatkan jumlah laba yang menjadi hak pemilik entitas Bank. Kepentingan nonpengendali dalam aset bersih disajikan sebagai bagian dari ekuitas kecuali kepentingan nonpengendali yang berasal dari konsolidasi atas reksadana disajikan sebagai bagian dari liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali bila dinyatakan lain.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh atau berakhir dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai atau sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut.

Oleh karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Principles of consolidation *(continued)*

The Bank controls the Subsidiaries if and only if the Bank acquires these rights:
a) Authority over the Subsidiaries (has existing rights that affect the current ability to direct the relevant activities, that significantly affect the Subsidiaries' returns).
b) Exposure or rights of variable returns from its involvement with the Subsidiaries.
c) The ability to use its authority over the Subsidiaries to affect the amount of the Bank's returns.

In the consolidated financial statement of Bank Mandiri, all significant inter-company balances and transactions have been eliminated. The non-controlling interest net income of Subsidiaries is presented as a deduction to consolidated net income in order to present the Bank's income. Non-controlling interest in net assets is presented as part of equity in the consolidated statement of financial position, except for non-controlling interest from mutual fund consolidation is presented as part of liabilities in the consolidated statement of financial position.

The consolidated financial statements are prepared using a consistent accounting policy for transactions and events in similar circumstances. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Subsidiaries, unless otherwise stated.

If the control on an entity is obtained or ends in the current year, the entity's net income is included in the consolidated statement of of profit or loss and other comprehensive income from the date of acquisition of the control or until the date the control ceased.

Business combination transaction amongst entities under common control, in the form of transfer of business conducted for the reorganisation of entities under common control, does not represent a change of ownership in terms of economic substance, therefore, there shall be no gain or loss recognised by the group as a whole and by individual entities within the group.

Since the business combination transaction amongst entities under common control does not cause any change in the economic substance of ownership of the transferred business, therefore the transaction is recognised at book value using the pooling interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Sehingga setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Entitas yang menerima/melepas bisnis, dalam kombinasi/pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan/diterima dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis sebagai komponen ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor/agio saham.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung dalam sepengendalian.

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Entitas Anak dan kantor cabang luar negeri

Bank Mandiri menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam mata uang Rupiah. Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan dalam mata uang asing milik cabang dan Entitas Anak luar negeri Bank Mandiri dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan dasar kurs Reuters untuk kurs sebelum 17 Oktober 2022 dan kurs *Refinitiv Eikon* untuk kurs setelah 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

(1) Aset dan liabilitas, komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

(2) Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan terjadinya transaksi.

(3) Akun ekuitas - menggunakan kurs historis pada tanggal transaksi.

(4) Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali akun-akun laba rugi menggunakan kurs tengah rata-rata dan unsur-unsur ekuitas menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing" pada kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Principles of consolidation *(continued)*

Changes in the Bank's ownership interest in Subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as an equity transaction, in this case a transaction with owners in their capacity as owners. Any difference between the amount of the adjusted non-controlling interest and the fair value of the consideration paid or received shall be recognised directly in equity and attributable to the owners of the parent.

The entity that accepts/releases a business in a combination/separation of business amongst entities under common control, shall recognise the difference between benefits being transferred or received and the recorded amount of every business combination transaction as equity and present it under additional paid-in capital/share premium.

Based on SFAS No. 38 (Revised 2012), the elements of the financial statements of the m entities, for the period in which the business combination merged entities under common control occurred and for the comparative period presented, are presented in such a way as if the combination had occurred since the beginning of the period when the entities were under common control.

e. Foreign currency transactions and balances

Subsidiaries and overseas branches

Bank Mandiri maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. For consolidation purposes, the financial statement of the overseas branches and overseas Subsidiaries of Bank Mandiri denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters exchange rate for exchange rates before 17 October 2022 and the Refinitiv Eikon exchange rate for exchange rates after 17 October 2022 as follows:

(1) Assets and liabilities, commitments and contingencies - using the spot rates at the consolidated statement of financial position date.

(2) Revenues, expenses, income and losses - using the average middle rates during each month when the transaction occurs.

(3) Shareholders' equity accounts - using historical rates on the date of transaction.

(4) Statement of cash flows - using the spot rates at the reporting date, except for profit and loss statement balances which are translated using the average middle rates and shareholders' equity balances which are translated using historical rates.

The differences arising from the translation adjustment are presented as "Differences arising from the translation of financial statements" in foreign currencies under the shareholders' equity section in the consolidated statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *spot Revinitif Eikon* pada pukul 15.00 WIB untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2023	2022	
1 Pound Sterling Inggris	19.626,56	18.786,09	*Great Britain Pound Sterling 1*
1 Euro Eropa	17.038,32	16.581,72	*European Euro 1*
1 Dolar Amerika Serikat	15.397,00	15.567,50	*United States Dollar 1*
100 Yen Jepang	10.888,00	11.781,00	*Japanese Yen 100*
1 Dolar Australia	10.520,77	10.577,88	*Australian Dollar 1*
1 Dolar Hong Kong	1.970.73	1.996,55	*Hong Kong Dollar 1*
1 Yuan China	2.170,06	2.238,91	*Chinese Yuan 1*
1 Dolar Singapura	11.676,34	11.592,88	*Singapore Dollar 1*

Mata uang asing lainnya yang tidak diungkapkan di atas tidak dianggap signifikan dalam penjabaran transaksi dalam mata uang asing Bank Mandiri dan Entitas Anak.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank Mandiri dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1) Orang yang:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Foreign currency transactions and balances *(continued)*

Transactions and balances in foreign currencies

Transactions in foreign currencies are recorded into Rupiah by using rates on the date of the transactions. At consolidated statement of financial position date, all foreign currencies monetary assets and liabilities are translated into Rupiah using the Revinitif Eikon spot rates at 3.00 p.m. WIB (Western Indonesian Time) on 31 December 2023 and 2022. The resulting gains or losses are credited or charged to the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used against the Rupiah at the dates of the consolidated statement of financial position are as follows (amounts in full Rupiah):

Other foreign currencies that are not disclosed as above is considered not material in the translation of transaction in foreign currencies of the Bank and Subsidiaries.

f. Transactions with related parties

The Bank and Subsidiaries enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 regarding Related Party Disclosures and capital market regulation No. VIII.G.7 regarding Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies.

A related party is a person or entity that is related to the entity that prepares its financial statements (reporting entity). The related parties are as follows:

1) A person who:
   a) Has control or joint control over the reporting entity;
   b) Has significant influence over the reporting entity; or
   c) The key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
   b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas;
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1); atau
   g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas;
   h) Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

3) Pihak yang bukan merupakan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
   a) Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain;
   b) Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama;
   c) Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas;
   d) Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada Catatan 56.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Transactions with related parties *(continued)*

A related party is a person or entity that is related to the entity that prepares its financial statements (reporting entity). The related parties are as follows (continued):

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following are met:
   a) The entity and the reporting entity are members of the same group;
   b) An entity is an associate or joint venture of the entity;
   c) Both entities are joint ventures from the same third party;
   d) An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefits of employee either from the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified as referred to in point 1); or
   g) A person identified as referred to point 1) letter a) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel;
   h) The entity is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government, which is the Minister of Finance or the local governments which is the shareholder of the entity.

3) Parties which are not related parties are as follows:
   a) Two entities simply because they have the same director or key management personnel or because the key management personnel of one entity have significant influence over the other entity;
   b) Two joint venturers simply because they share joint control of a joint venture;
   c) Fund provider, trade unions, public service, and ministry and agencies of government that does not control, jointly control or have significant influence over the reporting entity, solely in the execution of normal business with the entity;
   d) Customers, suppliers, franchisors, distributors or general agent with whom an entity enter into transaction with significant volumes of business solely because economic dependence due to circumstances

All significant transactions with related parties have been disclosed in Note 56.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Kas dan setara kas

Kas (terutama terdiri dari kas di *khasanah* dan kas di ATM) dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas biaya perolehan diamortisasi.

Giro Wajib Minimum

Pemenuhan Giro Wajib Minimum ("GWM") mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali melalui PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021, dan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.

PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubemur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PADG No.24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang menyatakan bahwa pemenuhan GWM dalam Rupiah Bank Umum Konvensional (BUK) ditetapkan sebagai berikut:

a. Periode 1 Mei 2020 sampai dengan 28 Februari 2022 sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dengan pemenuhan secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).
b. Periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar 5% (lima persen) dengan pemenuhan secara harian sebesar 0% (nol persen) dan secara rata-rata sebesar 5% (lima persen).
c. Periode 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 6% (enam persen) dengan pemenuhan secara harian sebesar 0% (nol persen) dan secara rata-rata sebesar 6% (enam persen).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Cash and cash equivalents

Cash (mainly consists of cash in vault and cash in ATMs) and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks and other short term liquid investments with original maturities of 3 (three) months or less since the date of acquisition.

h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of amortised cost.

The Minimum Statutory Reserve

Fulfillment of the Minimum Statutory Reserves ("GWM") refers to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units as amended 4 (four) times through PBI No.22/3/PBI/2020 dated 24 March 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 dated 28 July 2020, PBI No. 23/16/PBI/ 2021 dated 17 December 2021, and PBI No. 24/4/PBI/2022 dated 25 February 2022.

The PBI is further explained by the Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated 31 May 2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as last amended by PADG No.24/3/PADG/2022 dated 1 March 2022 which states that the GWM in rupiah of Conventional Commercial Banks (CCB) is set as follows:

a. Period 1 May 2020 to 28 February 2022 of 3.5% (three point five percent) with a daily fulfillment of 0.5% (zero point five percent) and an average of 3% (three percent).
b. Period 1 March 2022 to 31 May 2022 is 5% (five percent) with daily fulfillment of 0% (zero percent) and an average of 5% (five percent).
c. Period 1 June 2022 to 30 June 2022 is 6% (six percent) with daily fulfillment of 0% (zero percent) and an average of 6% (six percent).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan)

Giro Wajib Minimum (lanjutan)

Pemenuhan GWM dalam Rupiah untuk Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah ditetapkan sebagai berikut:

a. Periode 1 Mei 2020 sampai dengan 28 Februari 2022 sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dengan pemenuhan secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).
b. Periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar 4% (empat persen) dengan pemenuhan secara harian sebesar 0% (nol persen) dan secara rata-rata sebesar 4% (empat persen).
c. Periode 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dengan pemenuhan secara harian sebesar 0% (nol persen) dan secara rata-rata sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Pemenuhan GWM dalam Rupiah baik untuk Bank Umum Komersial (BUK) maupun Entitas Anak dihitung dengan membandingkan posisi saldo rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) terhadap rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah masing-masing BUK dan Entitas Anak selama periode tertentu.

Pada tanggal 30 Juni 2022, telah diterbitkan PADG lanjutan yaitu PADG No. 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PADG No. 12 tahun 2023. Pada saat PADG No. 24/8/PADG/2022 tersebut berlaku, maka PADG No. 20/10/PADG/2018 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks** (continued)*

The Minimum Statutory Reserve (continued)

Fulfillment of GWM in Rupiah for Subsidiaries that carry out business activities with sharia principles is determined as follows:

a. Period 1 May 2020 to 28 February 2022 is 3.5% (three point five percent) with a daily fulfillment of 0.5% (zero point five percent) and an average of 3% (three percent).
b. Period 1 March 2022 to 31 May 2022 is 4% (four percent) with daily fulfillment of 0% (zero percent) and an average of 4% (four percent).
c. Period 1 June 2022 to 30 June 2022 is 4.5% (four point five percent) with daily fulfillment of 0% (zero percent) and an average of 4.5% (four point five percent).

Fulfillment of GWM in Rupiah for both Conventional Commercial Banks (BUK) and Subsidiaries is calculated by comparing the balance position of Rupiah Demand Deposits accounts at Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) to the average Third Party Funds (TPF) in Rupiah for each BUK and Subsidiary for a certain period.

On 30 June 2022, an extended PADG has been issued, namely PADG No. 24/8/PADG/2022 regarding the implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as last amended by PADG No. 12 year 2023. Upon the effective date of PADG No. 24/8/PADG/22, PADG No. 20/10/PADG/2018 and its amendments are revoked and declared invalid.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan)

Giro Wajib Minimum (lanjutan)

PADG baru tersebut mengatur bahwa pemenuhan GWM dalam Rupiah Bank Umum Konvensional (BUK) ditetapkan sebagai berikut:
a. Secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
b. Secara rata-rata untuk:
   1) Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
   2) Periode 1 September 2022 dan seterusnya sebesar 9% (sembilan persen).

GWM dalam Rupiah untuk Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah wajib dipenuhi sebesar:
a. Secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
b. Secara rata-rata untuk:
   1) Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar 6% (enam persen); dan
   2) Periode 1 September 2022 dan seterusnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketentuan insentif GWM dalam Rupiah yang dituangkan dalam PBI No. 11 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG Nomor 11 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Bank Indonesia memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) GWM dalam Rupiah kepada bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi meliputi: (a) pemberian kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia; (b) pemberian kredit atau pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM); (c) pemberian kredit atau pembiayaan kepada usaha ultra mikro (UMi); (d) pemberian kredit atau pembiayaan berwawasan lingkungan; (e) pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 4% (empat persen).

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks** (continued)*

The Minimum Statutory Reserve (continued)

The new PADG regulates that the fulfillment of Minimum Statutory Reserves in Rupiah for Conventional Commercial Banks (BUK) is determined as follows:
a. On a daily basis of 0% (zero percent); and
b. On average for:
   1) Period 1 July 2022 to 31 August 2022 of 7.5% (seven point five percent); and
   2) Period 1 September 2022 onwards of 9% (nine percent).

GWM in Rupiah for Subsidiaries that carry out business activities with sharia principles must be met as follows:
a. On a daily basis of 0% (zero percent); and
b. On average for:
   1) Period 1 July 2022 to 31 August 2022 of 6% (six percent); and
   2) Period 1 September 2022 onwards of 7.5% (seven point five percent).

In addition, Bank Indonesia is strengthening policies to encourage economic growth through regulations of GWM incentives in Rupiah as stated in PBI No. 11 year 2023 dated 18 September 2023 regarding Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities, as further stipulated through PADG No. 11 year 2023 dated 27 September 2023 regarding Implementation Regulation of Incentives Policy of Macroprudential Liquidity. Bank Indonesia provides GWM Macroprudential Liquidity Incentives Policy (KLM) in Rupiah to banks that provide funds for certain and inclusive economic activities including: (a) granting loans or financing to priority sectors and MSMEs which determined by Bank Indonesia; (b) granting inclusive loans or financing based on achievement of the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM); and/or (c) granting loans or financing to micro ultra business (UMi); (d) granting sustainable loans or financing; (e) other financing determined by Bank Indonesia.

The KLM amount is set at a maximum of 4% (four percent)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial

Penyangga Likuiditas Makroprudensial, selanjutnya disebut PLM, adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam Rupiah. Sedangkan bagi BUS, Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam Rupiah.

Pemenuhan PLM mengacu pada PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021, PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022, PADG Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 , dan PADG No. 18 Tahun 2023 dimana besaran PLM ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam Rupiah dan besaran PLM untuk Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah adalah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK Entitas Anak dalam Rupiah.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks** (continued)*

Macroprudential Liquidity Buffer

Macroprudential Liquidity Buffer, will be mentioned as MLB is a minimum statutory reserve which should be maintain in Rupiah by Conventional Commercial Bank in the form of securities that met certain requirements and the amount will be determined by Bank Indonesia in certain percentage of Conventional Commercial Bank Third Party Fund in Rupiah. For Sharia Conventional Bank Macroprudential Liquidity buffer (MLB Sharia) is minimum statutory reserve which should be maintain by Sharia Commercial Bank in the form of sharia securities that met certain requirements and the amount will be determined by Bank Indonesia in certain percentage of sharia commercial bank's Third Party Funds in Rupiah.

The requirement of latest MLB refers to PBI No. 20/4/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Bank, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as last amended by PBI No. 24/16/PBI/2022 dated 31 October 2022 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Bank, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The PBI is further explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated 28 November 2019, as amended 7 (seven) times to PADG No. 22/11/PADG/2020 dated 29 April 2020, PADG No. 22/30/PADG/ 2020 dated 5 October 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 dated 26 April 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 dated 31 December 2021, PADG No. 24/14/PADG/2022 dated 31 October 2022, PADG No. 10 of 2023 dated 14 September 2023, and PADG No. 18 of 2023, whereby the MLB is determined at 5% (five percent) of BUK deposits in Indonesian Rupiah, and for subsidiaries engaging in business activities based on Sharia principles, the MLB amount is set at 3.5% (three point five percent) of the Subsidiary's third party funds in Indonesian Rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan)

Rasio Intermediasi Makroprudensial

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dahulu disebut sebagai *Loan to Funding Ratio* (LFR). Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, penyebutan LFR berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Peraturan tersebut telah disempurnakan sebanyak 4 (empat) kali menjadi PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, PBI No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021, dan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 5 (lima) kali menjadi PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, PADG No.23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021, dan PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Berdasarkan Peraturan tersebut, RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

a. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing; dan
b. Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank, terhadap:
    a. DPK bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam Rupiah dan Valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
    b. Surat berharga dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
    c. Pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks** (continued)*

Macroprudential Intermediation Ratio

The Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) was formerly known as the Loan to Funding Ratio (LFR). Based on PBI No. 20/4/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units the term LFR changes to Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) with the obligation to fulfill RIM's current account effective on 16 July 2018. The regulation has been amended 4 (four) times to become PBI No. 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated 30 September 2020, PBI No. 23/17/PBI/2021 dated 17 December 2021 and PBI No. 24/16/PBI/2022 dated 31 October 2022. The PBI is further explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated 28 November 2019, as amended 5 (five) times to PADG No. 22/11/PADG/2020 dated 29 April 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 dated 5 October 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 dated 26 April 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 dated 31 December 2021 and PADG No. 24/14/PADG/2022 dated 31 October 2022.

Based on those Regulations, RIM is the ratio of the results of the comparison of:

a. Loans to third party in Rupiah and foreign currencies; and
b. Corporate marketable securities in Rupiah and foreign currencies which meet certain requirements over:
    a. TPF bank in terms of current account, saving account and time deposits in rupiah and foreign currencies excluding interbank fund;
    b. Marketable securities issued by the bank in rupiah and foreign currencies which meet certain requirement which issued for funding; and
    c. Fund borrowing in Rupiah and foreign currencies which met certain requirements that were received by CCB for funding.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan)

Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial

Giro atas pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo pada rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan dana Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-Fast) yang wajib dipelihara oleh Bank. Dalam hal RIM berada dalam kisaran target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah. Sedangkan apabila RIM berada di luar kisaran target RIM, maka Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK dalam Rupiah.

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan:

a. Batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
b. Batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
c. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan:
    1. Sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
    2. Sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki:
        a) Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
        b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
    3. Sebesar 0,1 (nol koma satu), jika BUK memiliki:
        a) Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
        b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
    4. Sebesar 0,15 (nol koma satu lima), jika BUK memiliki:
        a) Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
        b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan:
    1. Sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih besar dari KPMM Insentif; atau
    2. Sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks** (continued)*

Macroprudential Intermediation Ratio Current Accounts

Current accounts for RIM fulfillment, hereinafter referred to as RIM Current Account, are the current accounts balance in Rupiah current accounts. Account at Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) which must be maintained by the Bank. In the event that RIM falls within RIM's target range, RIM's Current Account is set at 0% (zero percent) of TPF in rupiah. Meanwhile, if RIM is outside the range of RIM's target, RIM's current accounts are determined as the result of the multiplication of the Lower Disincentive Parameter or Upper Disincentive Parameter, the difference between RIM and RIM's target, and TPF in rupiah.

The amounts and parameters used in fulfilling RIM Current Account are determined as follows:

a. The lower limit of RIM's Target of 84% (eighty four percent);
b. The upper limit of RIM's Target of 94% (ninety four percent);
c. Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) Incentive of 14% (fourteen percent);
d. The Lower Disincentive Parameters are defined as follows:
    1. Amounting to 0 (zero), if the BUK has gross non-performing loan ratio greater than or equal to 5% (five percent);
    2. Amounting to 0 (zero), if the BUK has:
        a) Gross non-performing loan ratio is less than 5% (five percent); and
        b) CAR is greater than or equal to Incentive CAR
    3. Amounting to 0.1 (zero point one), if the CCB has:
        a) Gross non-performing loan ratio is less than 5% (five percent); and
        b) CAR is greater than incentive CAR and less than or equal to 19% (nineteen percent); and
    4. Amounting to 0.15 (zero point one five), if CCB has:
        a) Gross Non-Performing Loans Ratio is less than 5% (five percent); and
        b) CAR is greater than 19% (nineteen percent); and
e. Upper Disincentive Parameters are determined as follows:
    1. Amounting to 0 (zero), if the Bank has CAR greater than or equal to Incentive CAR; or
    2. Amounting to 0 (zero), if the Bank has CAR smaller than Incentive CAR.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana dalam bentuk *Deposit Facility* (DF), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Pasar Uang Antar Bank, Pasar Uang Antar Bank Syariah, deposito berjangka dan lain-lain.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, seluruh bentuk penempatan pada Bank Indonesia ditetapkan memiliki kualitas lancar.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas biaya perolehan diamortisasi.

j. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari efek-efek yang diperdagangkan di pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), *Negotiable Certificates of Deposits, Medium Term Notes, Treasury Bills* yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain dan Pemerintah Republik Indonesia, wesel ekspor, efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal seperti unit reksadana, serta efek-efek yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham dan obligasi, termasuk obligasi syariah perusahaan.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan diamortisasi.

Investasi dalam unit reksadana dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility, sharia FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)), interbank call money, sharia interbank call money, time deposits and others.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using effective interest rate less any allowance for impairment losses.

In accordance with Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 40/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning the Quality Assessment of Commercial Banks, all forms of placements with Bank Indonesia are determined to have current quality.

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of amortised cost.

j. Marketable securities

Marketable securities consist of securities traded in the money market such as Certificates of Bank Indonesia (Sertifikat Bank Indonesia (SBI)), Sharia Certificates of Bank Indonesia (Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)), Government Treasury Bills (Surat Perbendaharaan Negara (SPN)) Negotiable Certificates of Deposits, Medium Term Notes, Treasury Bills issued by government of other country and Government of Republic of Indonesia, export bills, securities traded on the capital market such as mutual fund units and securities traded on the stock exchanges such as shares and bonds including sharia corporate bonds.

Marketable securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income, and at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets through fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income, and at amortised cost.

Investments in mutual funds units are stated at market value, in accordance with the net assets value of mutual funds at the date of the consolidated statement of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Efek-efek (lanjutan)

Untuk efek-efek yang diperdagangkan di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga pasar kuotasian yang terjadi di bursa efek pada akhir hari pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk efek-efek yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut. Penurunan nilai wajar permanen atas efek-efek untuk biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Pemindahan efek ke klasifikasi dimiliki biaya perolehan diamortisasi dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas dan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif selama sisa umur efek tersebut ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

k. Obligasi pemerintah

Obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Obligasi pemerintah terdiri dari obligasi pemerintah yang diperoleh dalam rangka program rekapitalisasi dan obligasi pemerintah yang dibeli dari pasar.

Obligasi pemerintah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan diamortisasi.

l. Tagihan lainnya - transaksi perdagangan

Tagihan lainnya - transaksi perdagangan adalah tagihan sebagai akibat dari perjanjian pemberian fasilitas perdagangan kepada debitur yang akan ditagih pada saat jatuh tempo.

Tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Marketable securities *(continued)*

Marketable securities which are traded in organised financial markets, the fair value is generally determined by reference to quoted market prices by the stock exchanges at the close of business on the consolidated statement of financial position date. For marketable securities with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset of the marketable securities. Any permanent impairment in the fair value of marketable securities classified as amortised cost and fair value through other comprehensive income is charged to current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassification of marketable securities to amortised cost from fair value through other comprehensive income classification is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded in the equity section and will be amortised up to the maturity date of the marketable securities using the effective interest rate method over the remaining tenor of marketable securities to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

k. Government bonds

Government bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia. Government bonds consist of government bonds from the recapitalisation program and government bonds purchased from the market.

Government bonds are classified as financial assets at fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income and at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income and at amortised cost.

l. Other receivables - trade transactions

Other receivables - trade transactions represent receivables resulting from contracts for trade-related facilities given to customers, which will be reimbursed on maturity.

Other receivables - trade transactions are classified as financial assets at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of amortised cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi.

Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati diperlakukan sebagai pendapatan bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Entitas Anak mencatat transaksi *reverse repo* syariah mengacu ke PSAK 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" yang diterapkan secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Entitas Anak mengklasifikasikan surat berharga syariah dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

n. Tagihan derivatif dan liabilitas derivatif

Seluruh instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs *Revinitif Eikon* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas.

Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Securities purchased under agreements to resell and securities sold under agreements to repurchase liabilities

Securities purchased under agreements to resell are classified as financial assets at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy financial assets of amortised cost.

Securities purchased under agreements to resale are presented as assets in the consolidated statement of financial position at the agreed resale price less unamortised prepaid interest and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the agreed resale price is treated as deferred (unamortised) interest income and amortised as income over the period, commencing from the acquisition date to the resale date using the effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

The Subsidiaries recognised the reverse repo sharia in accordance with SFAS No. 111 regarding "Accounting Wa'd" which applied prospectively. At initial recognition, Subsidiaries classified sharia securities as measured at fair value through other comprehensive income. Gains or losses arising from changes in fair value are recognised in other comprehensive income.

n. Derivative receivables and derivative payables

All derivative instruments (including foreign currency transactions for funding and trading purposes) are recognised in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using Revinitif Eikon rate at reporting date or discounted cash flow method.

Derivative receivables are presented at the amount of unrealised gain from derivative contracts. Derivative payables are presented at the amount of unrealised loss from derivative contracts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Tagihan derivatif dan liabilitas derivatif (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (1) lindung nilai atas nilai wajar, (2) lindung nilai atas arus kas, (3) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (4) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.
2. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi tahun berjalan.
3. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai.
4. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

o. Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Derivative receivables and derivative payables *(continued)*

Gains or losses from derivative contracts are presented in the consolidated financial statements based on its purpose designated upon acquisition, for (1) fair value hedge, (2) cash flow hedge, (3) net investment in a foreign operation hedge, and (4) trading instruments as follows:

1. *Gain or loss on a derivative contract designated and qualified as a fair value hedging instrument and the gain or loss arising from the changes in fair value of hedged assets and liabilities is recognised as gain or loss that can be set off one another during the same accounting period/year. Any difference representing hedge ineffectiveness and directly recognised as gain or loss in current year.*
2. *The effective portion arising from gain or loss of derivative contracts designated as a cash flow hedge instruments is reported as other comprehensive income. The hedge ineffective portion is recognised as a gain or loss in the current year.*
3. *Gain or loss arising from derivative contract that is designated as a net investment hedge in a foreign operation is reported as other comprehensive income, as long as the transactions are effectively recognised as hedge transactions.*
4. *Gain or loss arising from derivative contract that is not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognised as gain or loss in current year.*

Derivative receivables are classified as financial assets at fair value through profit or loss, meanwhile derivative payables are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

o. Loans and sharia receivables/financing

Loans represent provision of cash or cash equivalent receivables based on lending agreements with borrowers, which the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (lanjutan)

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan langsung dan pembiayaan bersama serta penerusan dinyatakan sebesar saldonya sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank Mandiri dan Entitas Anak.

Piutang/pembiayaan syariah

Di dalam kredit yang diberikan termasuk pembiayaan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")), Entitas Anak, berupa piutang, pembiayaan syariah dan pinjaman *qardh*.

Mudharabah adalah kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul maal* atau Entitas Anak) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*, *mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Entitas Anak kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Musyarakah adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Pembiayaan *musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Pembiayaan *musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai marjin yang disepakati. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Loans and sharia receivables/financing *(continued)*

Syndication loans, direct financing and joint financing, and channeling loans are stated at their outstanding balances in proportion to the risks borne by the Bank and its Subsidiaries.

Sharia receivables/financing

Included in loans are financing provided by PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (previously PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")), a Subsidiary, in the form of sharia receivables, sharia financing and funds of qardh.

Mudharabah financing is a co-operation for certain project between first party (malik, shahibul maal or Subsidiary) as owner of fund and second party (amil, mudharib or debtors) as fund manager and the profit will be shared in accordance with percentage as stated in the agreement, meanwhile losses will be borne by the Subsidiary except if the second party does negligence, error or violate the agreement. Mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for possible losses.

Musyarakah financing is a co-operation between two or more parties for a certain business wherein each party provides a portion of fund on condition that the profit shall be shared based on the agreed percentage, whereas losses shall be borne in accordance with the portion of the fund of each party. Permanent musyarakah financing is musyarakah in which the fund portion of each partner is stated explicitly in the contract and remains the same until the contract expires. Declining musyarakah financing (musyarakah mutanaqisha) is musyarakah in which the fund portion of the one of the partners will be transferred in several stages to the other partner, resulting in the declining of fund portion of one of the partner, and at the end of contract, the other partner will become the sole owner of the business. Musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for possible losses.

Murabahah contracts are the financing of goods by confirming purchase price to a buyer and the buyer pays it at a higher price as an agreed profit. Murabahah is the transaction of sales of goods by stating the acquisition cost and income (margin) that has been agreed by the seller and buyer.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (lanjutan)

Piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

Piutang *murabahah* diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi/pendapatan administrasi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan marjin yang ditangguhkan yang dapat direalisasikan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Entitas Anak menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Piutang *istishna* adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*). Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Pinjaman *qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Atas transaksi ini, Entitas Anak mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui pada saat diterima. Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Entitas Anak) yang wajib menanggung atau membayar.

Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Entitas Anak dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini, Entitas Anak mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui pada saat diterima. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldo dikurangi penyisihan kerugian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Loans and sharia receivables/financing *(continued)*

Sharia receivables/financing (continued)

Murabahah receivables is classified as financial assets under loans and receivables according to SFAS No. 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurements".

Murabahah receivables initially is stated at net realizable value plus transaction cost/directly attributable administration fee and additional acquisition cost to acquire those financial assets and after initial recognition, it is measured at amortised cost using the effective interest rate method less the allowance for impairment losses.

Murabahah receivables is stated at the balance of the receivable less realizable deferred margin and allowance for possible losses. The Subsidiary calculates the allowance for impairment loss on receivables according to the murabahah receivables quality based on review on each of receivables balance.

Istishna receivables is the financing of goods in the form of manufacturing the ordered goods with the agreed criteria and specification by both of orderer or buyer (mustashni) and manufacturer or seller (shani). Istishna is presented based on the outstanding billings less allowance for possible losses.

Qardh is borrowings at the condition that the borrower should repay the loan at specified period of time. The Subsidiary will obtain a fee (ujrah) from this transaction, which is recognised upon receipt. qardh included hawalah and rahn financing agreement. Hawalah is transfer of debts from debtors to other party (Subsidiary) which obligates to bear or pay.

Rahn represents the pledge of goods or assets owned by the customer to the Subsidiary for an equivalent amount of money. Assets or goods pledged are appraised based on market value, less a certain deduction percentage. The Subsidiary will obtain a fee (ujrah), which is recognised upon receipt. Qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

Piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Restrukturisasi kredit yang diberikan

Restrukturisasi kredit dilakukan kepada debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui dalam bentuk cadangan kerugian penurunan nilai bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui dalam bentuk cadangan kerugian penurunan nilai apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah lebih kecil dari nilai buku kredit yang diberikan.

Bank memiliki ketentuan internal mengenai debitur yang layak untuk dikeluarkan dari daftar kredit yang direstrukturisasi, yaitu apabila kredit/debitur telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. Kualitas kredit telah dikategorikan Lancar (kolektibilitas 1) sesuai dengan hasil reviu berdasarkan 3 (tiga) pilar penetapan kualitas kredit dari Bank Indonesia;
ii. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas fasilitas kredit berjalan merupakan tingkat suku bunga komersial yang diberikan kepada debitur sesuai dengan segmen kredit yang bersangkutan di atas *base lending rate;*
iii. Tidak terdapat Tunggakan Bunga yang Dijadwalkan Kembali (TBYD) dan Bunga yang Ditangguhkan (BYDT) yang masih belum selesai.

p. Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen Entitas Anak diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Loans and sharia receivables/financing *(continued)*

Sharia receivables/financing (continued)

Loans and sharia receivables/financing are classified as financial assets in loans and receivables category. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets for loans and receivables.

Loan restructuring

Loan restructuring is done for debtors who has potential or experiencing difficulties in fulfilling their obligations. Restructuring includes modification of loan terms, conversion of loans into share/stock or other financial instruments and/or a combination of both.

Losses on loan restructuring due to modification of the terms of the loans are recognised as part of allowance for impairment losses only if the present value of total future cash receipts specified in the new terms of the loans including receipts designated as interest and loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

For loan restructuring which involve a conversion of loans into share/stock or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognised as part of allowance for impairment losses if the fair value of the share or financial instruments received, deducted by estimated expenses to sell the share or other financial instruments, is less than the carrying amount of loans.

The Bank formed internal regulation regarding the debtors that are eligible to be removed from the list of restructured loans, i.e. when the loan/debtor has met the following criterias:

i. Credit quality has been categorised as Current (Collectibility 1) according to the review results by three (3) pillars of credit quality on Bank Indonesia;
ii. The interest rate charged on the current loan facility is the commercial interest rates to debtors in accordance with the relevant credit segments above the base lending rate;
iii. There are no Deferred Delinquency Interest and Deferred Interest which were not yet settled.

p. Consumer financing receivables

The Subsidiaries consumer financing receivables are recognised initially at fair value, plus transaction costs and deducted by yield enhancing income that is directly attributable, and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Piutang pembiayaan konsumen (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen Entitas Anak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, mengubah jatuh tempo, mengubah tenor dan/atau menambah uang muka.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui milik Entitas Anak merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan, yang akan diakui sebagai pendapatan pembiayaan konsumen selama jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*), pendapatan pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*) disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama *without recourse* disajikan secara bersih di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Entitas Anak berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan pembiayaan konsumen".

q. Investasi bersih dalam sewa pembiayaan

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Consumer financing receivables *(continued)*

The Subsidiaries consumer financing receivables are classified at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets classified at amortised cost.

Early termination before end of consumer financing is treated as a cancellation of an receivables' terms existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income at the transaction date.

Loan/financing restructuring can be done by transfer of financing, financing continuation, re-installment payment, change the due date, change the tenor and/or increase the down payment.

Subsidiaries's unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing principal which is recognised as consumer financing income over the term of the contract using effective interest rate.

Consumer financing receivables are net of joint financing receivables after deducted with joint financing portion where joint financing providers bears credit risk in accordance with its portion (without recourse), unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Joint financing receivables that are jointly financed with other parties, bears credit risk in accordance with their financing portion (without recourse) are presented on a net basis in the consolidated statement of financial position. Consumer financing income and interest expense related to joint financing without recourse are also presented on a net basis in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

In joint financing without recourse, the Subsidiaries has the right to set higher interest rates to customers than those that are stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognised as revenue and disclosed part of as "Consumer financing income".

q. Net investment finance leases

Net investment finance leases are classified at amortised cost. Refer to Note 2c to the accounting policy for at amortised cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Investasi bersih dalam sewa pembiayaan (lanjutan)

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

r. Aset tetap, aset dan liabilitas sewa dan aset takberwujud

i. Aset tetap dan perangkat lunak

Pada tanggal 1 April 2016, Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dari model biaya menjadi model revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar.

Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi minimal 3 tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Selisih bersih revaluasi aset tetap" dan disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Selisih bersih revaluasi aset tetap" yang disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain, maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Selisih bersih revaluasi aset tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Grup melakukan revaluasi di tahun 2016 untuk tujuan akuntansi dan pajak dimana entitas memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas dan di-offset pada bagian selisih bersih revaluasi aset tetap.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Net investment finance leases *(continued)*

The lessee has the right option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price which has mutually agreed upon at the commencement of the agreement.

Early termination before end of finance leases' terms is treated as a cancellation of an existing contracts and the resulting gain or loss is recognised in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

r. Fixed assets, leased assets and liabilities, and intangible assets

i. Fixed assets and software

On 1 April 2016, the Group changed their accounting policy relating to land from cost model into revaluation model. Land is stated at fair value.

Appraisal of the land is performed by a certified external independent appraiser. Assessment of those assets are conducted regularly to ensure that the fair value of the revaluated asset is not materially different from its carrying value.

If the fair value of the revalued asset change significantly and fluctuative, it is necessary to revaluate the assets on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revaluate at a minimum every 3 years.

The increase in the carrying value arising from the revaluation of land is recorded as "Net differences in fixed assets revaluation" and is presented as "Other comprehensive income". Any impairment arising from the revaluation is recorded as expense of the current year. If the asset had a balance of "Net differences in fixed assets revaluation" that is presented as "Other Comprehensive Income", then the impairment difference recorded is charged against "Net differences in fixed assets revaluation" and the rest is recognised as expense of the current year.

Group conducted revaluation in 2016, for accounting and tax purposes where the Group obtained approval from the tax authorities. The amount of taxes paid is recognised in other comprehensive income and accumulated in equity offset with the Net differences arising from the revaluation of fixed assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap, aset dan liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

i. Aset tetap dan perangkat lunak (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan aset tetap. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Perangkat lunak diakui sebagai aset tak berwujud.

Penyusutan dan amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud yang diestimasi. Estimasi umur manfaat ekonomis dan persentase penyusutan dan amortisasi per tahun adalah sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan	20	5%	*Buildings*
Perlengkapan, peralatan kantor, komputer dan kendaraan bermotor	4-5	20% - 25%	*Furniture and fixtures, office equipment, computer and vehicles*
Perangkat lunak	5	20%	*Software*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat ekonomis dan metode penyusutan dikaji ulang dan jika tidak sesuai dengan keadaan akan disesuaikan secara prospektif.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam pembangunan telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasikan ke akun aset tetap yang sebenarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Fixed assets, leased assets and liabilities, and intangible assets *(continued)*

i. Fixed assets and software *(continued)*

Fixed assets except for land are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are fulfilled. All other repair and maintenance costs that do not have future economic benefit are recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive incomes as incurred. Software is recognised as intangible assets.

Depreciation and amortisation is calculated using the straight-line method over the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets. The estimated useful lives and percentage of depreciation and amortization per annum are as follows:

Fixed assets are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from their use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the fixed asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year which the fixed asset is derecognised.

The fixed asset's residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, end of at each financial year.

Construction in progress of fixed asset is stated at cost and presented as part of fixed assets. Accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets account when the assets are substantially complete and ready for their intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap, aset dan liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

i. Aset tetap dan perangkat lunak (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2011) tentang "Aset Tetap", biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai diakui sebagai aset tetap. Biaya perolehan tersebut merupakan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh hak atas tanah tersebut termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali.

Hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tersebut kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

PSAK 48 (Revisi 2014) tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari nilai terpulihkan (*recoverable amount*) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset tetap melebihi taksiran nilai terpulihkan dari aset tetap tersebut, nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai terpulihkan dari aset tetap tersebut.

ii. Aset dan liabilitas sewa

Grup telah menerapkan PSAK 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amendemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi penyewa dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Berbeda dengan akuntansi penyewa, persyaratan untuk akuntansi pesewa sebagian besar tidak berubah.

PSAK 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Fixed assets, leased assets and liabilities, and intangible assets *(continued)*

i. Fixed assets and software *(continued)*

In accordance with SFAS No. 16 (Revised 2011) regarding "Fixed Assets", the cost of land rights in the form of right to cultivate, right to build and use rights are recognised as fixed assets. The acquisition cost is the cost that are directly attributable to obtain land rights, including the cost of legal rights to the land when the land was first acquired.

Land rights in the form of right to cultivate, right to build and use rights are not amortised, unless there is evidence to indicate that the extension or renewal of land rights is likely to or definitely not obtained.

SFAS No. 48 (Revised 2014) regarding "Impairment of Assets" requires that the carrying amounts of fixed assets are reviewed at each consolidated statement of financial position date to assess whether they are recorded in excess of their recoverable amounts of the fixed assets. If the carrying value exceeds this estimated recoverable amount, assets are written down to their recoverable amount of the fixed assets.

ii. Leased assets and liabilities

The Group has implemented SFAS No. 73 "Leased" since 1 January 2020.

SFAS No. 73 applies new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by eliminating the distinction between operating and financing leases, and requires recognition of right-of-use assets and recognition of lease liabilities at lease inception for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting are mostly unchanged.

SFAS No. 73 determines whether a contract is, or contains a lease on the basis that the lessee has the right to control the use of the asset for a specified period of time in exchange for certain consideration.

The Group uses a single discount rate for lease portfolios with similar characteristics.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap, aset dan liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

ii. Aset dan liabilitas sewa (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa merupakan jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

- Bangunan	: 20 tahun/*years*	*Building*	-
- Mesin kantor	: 5 tahun/*years*	*Office machines*	-
- Komputer perangkat keras	: 5 tahun/*years*	*Computer hardware*	-
- Komputer perangkat lunak	: 5 tahun/*years*	*Computer software*	-
- Inventaris kantor	: 5 tahun/*years*	*Office equipment*	-
- Inventaris rumah dinas dan mess	: 5 tahun/*years*	*Inventory of official houses and mess*	-
- Kendaraan bermotor	: 5 tahun/*years*	*Motor vehicle*	-

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset".

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Fixed assets, leased assets and liabilities, and intangible assets *(continued)*

ii. Leased assets and liabilities *(continued)*

The Group applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Group recognizes a lease liabilities to make lease payments and rights of use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Group recognised the rights of use assets at the inception date of the lease. The rights of use assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of the lease liabilities. Lease liabilities are the amount of lease payments accrued until the end of the lease term, discounted using the incremental loan interest rate. The cost of lease assets includes the amount of lease liability recognised, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease less lease incentives received. Rights of use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset, as follows:

If ownership of the leased asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful lives of the asset. Rights of use assets are assessed for impairment in accordance with SFAS No. 48 "Impairment of Assets".

At the inception date of the lease, the Group recognizes lease liabilities which measured at the present value of future lease payments to be made over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments) less lease incentive receivables, variable lease payments that are index or interest rate dependent, and the amount expected to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Group and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Group exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not dependent on an index or interest rate are recognised as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap, aset dan liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

ii. Aset dan liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

(a) Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
(b) Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
(c) Memisahkan jumlah pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas konsolidasian.

iii. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak dan *goodwill*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Fixed assets, leased assets and liabilities, and intangible assets *(continued)*

ii. Leased assets and liabilities *(continued)*

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental loan interest rate of the lessee at the inception date of the lease because the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and less lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there are modifications, changes in the term of the lease, changes in lease payments, or changes in the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases with a duration of less than 12 months and leases of low value assets, as well as elements of such leases, partially or wholly do not apply the recognition principles prescribed by SFAS No. 73. The Group will recognize the lease payment on a straight-line basis over the lease term in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is shown under general and administrative expenses in the income statement.

The implementation of SFAS No. 73 payment applies to all leases (except as stated earlier), as follows:

(a) Present right of use assets as part of fixed assets and leased liabilities are presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position, measured at the present value of future lease payments;
(b) Record the depreciation of right of use assets and the interest of lease liability in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and
(c) Separating the total payment into principal (presented in financing activities) and interest (presented in operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

iii. Intangible assets

Intangible assets consist of software and goodwill.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap, aset dan liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

iii. Aset takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dan Entitas Anak dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika diperlukan.

Goodwill diakui apabila terdapat selisih lebih antara harga perolehan dan bagian Bank Mandiri atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi dan disajikan sebagai aset lain-lain. Bank melakukan evaluasi penurunan nilainya secara berkala.

s. Penyertaan saham

Penyertaan saham terdiri dari investasi jangka panjang terutama pada perusahaan non-publik dan penyertaan sementara hasil restrukturisasi kredit pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan.

Penyertaan saham untuk tujuan investasi dengan kepemilikan di bawah 20% dan tidak terdapat pengaruh signifikan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi atau biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi.

Penyertaan sementara akan dihapusbuku dari laporan posisi keuangan konsolidasian apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penyertaan saham untuk tujuan investasi dengan kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih dan terdapat pengaruh signifikan merupakan investasi pada entitas asosiasi. Investasi Bank Mandiri pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat pada investasi pada entitas asosiasi ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian Bank Mandiri atas laba rugi, penerimaan distribusi, perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi setelah tanggal perolehan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Fixed assets, leased assets and liabilities, and intangible assets *(continued)*

iii. Intangible assets *(continued)*

Software purchased by the Bank and Subsidiaries is recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Amortization method, estimated useful life and residual value are reviewed at end of reporting period and adjusted if necessary.

Goodwill is recognised when there is a positive difference between the acquisition cost and the Bank Mandiri's portion of the fair value of identified assets and liabilities at the acquisition date. Goodwill is presented as other assets. The Bank conducts an assessment of goodwill impairment regularly.

s. Investments in shares

Investments in shares represent long-term investments mostly in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans.

Investments in shares under 20% and with no significant control are financial assets classified as fair value through profit/loss or amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for fair value through profit/loss or amortised cost.

Temporary investment is written-off from the consolidated statement of financial position if it has exceeded the 5 year period in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 40/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks.

Investments in shares for investment purposes with a share ownership of 20% or more and with significant influence are investments in associates. The Bank's investment in associates is measured at equity method. The initial recognition of investment in associates is recognized at cost of acquisition. The carrying amount of the investment in associates is adjusted to recognize Bank Mandiri's share of profit or loss, receipt of distributions, and changes directly recognised in the equity of the associates after the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif

Aset non-produktif adalah aset Bank Mandiri dan Entitas Anak, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan untuk rekening antar kantor dan *suspense account*, adalah sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai pemulihan.

u. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

v. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari pendapatan bunga dan provisi dan komisi yang masih akan diterima, tagihan, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, piutang *ijarah,* rekening antar kantor dan lain-lain.

Tagihan terdiri dari tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan Bank Mandiri, tagihan Entitas Anak atas tagihan reksadana dan tagihan kepada pemegang polis.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank Mandiri dan Entitas Anak. AYDA merupakan agunan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada “Aset lain-lain”.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Allowance for possible losses on non-earning assets

Non-earning assets of Bank Mandiri and the Subsidiaries consist of repossessed assets, abandoned properties, inter-office accounts and suspense accounts.

The Group provides an allowance for impairment of repossessed assets and abandoned property equal to the difference between the asset’s carrying amount and its fair value less costs to sell. As for the inter-office account and suspense account, the allowance is equivalent to difference between the carrying value and the recovery value.

u. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are classified as financial assets at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets for financial assets at amortised cost.

Acceptance payables are classified as financial liabilities at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

v. Other assets

Other assets include accrued income for interest, provision and commissions, receivables, repossessed assets, abandonded properties, ijarah, inter-office accounts and others.

Receivables consist of receivables from government bonds pledged by the Bank, mutual fund receivables from Subsidiaries and receivables from policyholders.

Repossessed assets represent assets acquired by Bank Mandiri and Subsidiaries, both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor’s approval to sell the collateral not through auction when the debtor do not fulfill their obligations to Bank Mandiri and Subsidiaries. Repossessed assets represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in “Other Assets”.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Aset lain-lain (lanjutan)

Aset yang tidak digunakan (properti terbengkalai) adalah aset dalam bentuk properti yang dimiliki Bank Mandiri dan Entitas Anak, dimana bagian properti tersebut secara mayoritas tidak digunakan untuk kegiatan usaha operasional Bank Mandiri dan Entitas Anak.

AYDA dan properti terbengkalai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode berjalan pada saat dijual.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suat aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan hibah. Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni sebesar saldo piutang.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dan properti terbengkalai dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Lihat Catatan 2t untuk kebijakan akuntansi atas penyisihan kerugian AYDA dan properti terbengkalai.

w. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada bank lain. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Other assets *(continued)*

Abandoned properties represent Bank and Subsidiaries' fixed assets in the form of properties which majority part of the property were not used for Bank and Subsidiaries' business operational activity.

Repossessed assets and abandoned properties are presented at their net realizable values. Net realizable value is the fair value of the repossessed assets less estimated costs to sell the repossessed assets. Differences between the net realizable value and the proceeds from disposal of the repossessed assets are recognised as current year's gain or loss at the year of disposal.

Ijarah is a contract involving the transfer of right of use (benefit) of an asset for a specific period which the lessee pays rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself. Ijarah muntahiyah bittamlik is the provision of funds to transfer the right of use or benefit of goods or services based on a lease transaction with an option to transfer ownership of the goods to the lessee. The transfer of ownership of the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be executed as a grant. Ijarah revenue receivables are recognised at the due date which equal to the outstanding rent amount and presented at the net realisable value, which is the outstanding balance of the receivables.

Expenses for maintaining repossessed assets and abandoned properties are recognised in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Any permanent impairment loss that occurred will be deducted from the carrying amount and be charged to the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Refer to Note 2t for changes in accounting policy to determine impairment losses on repossessed assets and abandoned properties.

w. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred to customers or other banks. Obligations due immediately are classified as financial liabilities at amortised cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Simpanan nasabah

Simpanan nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat (tidak termasuk bank) kepada Bank dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan ATM atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking, Phone Banking* dan *Internet Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai perolehan diamortisasi sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Termasuk di dalam giro adalah giro dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro *wadiah* serta tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Entitas Anak. Simpanan nasabah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Entitas Anak.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah diperhitungkan dalam jumlah simpanan yang diterima dan diamortisasi sepanjang estimasi umur simpanan tersebut. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) to the Bank and Subsidiaries which operate in banking industry based on a fund deposit agreement. Included in this account are demand deposits, saving deposits, time deposits and other similar deposits.

Demand deposits represent deposits of customers that may be used as instruments of payment, and which may be withdrawn at any time by cheque, Automated Teller Machine card (ATM) or by overbooking through written transfer instruction (bilyet giro) or other orders of payment or transfers.

Saving deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via ATMs or funds transfers by SMS Banking, Phone Banking and Internet Banking when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customers deposits that may only be withdrawn after a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Time deposits are stated at amortised cost in the certificates between the Bank and the holders of time deposits.

Included in demand deposits are wadiah demand deposits and wadiah saving deposits. Wadiah demand deposits can be used as payment instruments and can be withdrawn at any time using cheque and written transfer instruction (bilyet giro). Wadiah demand deposits and wadiah saving deposits earn bonus based on Subsidiary's policy. Wadiah demand deposits and wadiah saving deposits are stated at the Subsidiary's liability amount.

Deposits from customers are classified as financial liabilities at amortised cost. Incremental costs directly attributable to acquistion of deposits from customers are included in the amount of deposits and amortised over the expected life of the deposits. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan *negotiable certificates of deposits*. Simpanan dari bank lain dicatat sebagai liabilitas terhadap bank lain.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan diperhitungkan dalam jumlah simpanan yang diterima dan diamortisasi sepanjang estimasi umur simpanan tersebut. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

z. Kontrak asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis. Risiko asuransi yang signifikan didefinisikan sebagai kemungkinan membayar manfaat yang signifikan kepada tertanggung apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

Entitas Anak menerbitkan kontrak asuransi yang menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis. Entitas Anak mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan membayar manfaat pada saat terjadinya suatu kejadian yang diasuransikan, yang setidaknya 10% lebih besar dari manfaat yang dibayarkan jika kejadian yang diasuransikan tidak terjadi. Jika suatu kontrak asuransi tidak mengandung risiko asuransi yang signifikan, maka kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai kontrak investasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

y. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local or overseas banks, in the form of demand deposits, saving deposits, interbank call money with original maturities of 90 days or less based on agreement, time deposits and negotiable certificate of deposits. Deposits from other banks are recorded as liability to other banks.

Included in the deposits from other banks are sharia deposits in a form of wadiah demand deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortised cost. Incremental costs directly attributable to acquisition of deposits from other banks are included in the amount of deposits and amortised over the expected life of the deposits. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

z. Insurance contract

Insurance contracts is a contract issued by insurance companies which the insurer accepts significant insurance risk from the policyholders. Significant insurance risk is defined as the possibility of paying significantly more benefit to the policyholder upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit payable in a scenario where the insured event does not occur. Scenarios that are considered are those with commercial substance.

The Subsidiaries issue insurance contracts that accepted significant insurance risk from the policyholders. The Subsidiaries defines significant insurance risk as the possibility of having to pay benefits on the occurrence of an insured event of at least 10% more than the benefits payable if the insured event did not occur. When an insurance contract does not have significant insurance risk, it is classified as investment contracts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Entitas Anak menerbitkan kontrak asuransi untuk produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kedua jenis produk ini mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

Produk-produk dari Entitas Anak dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:

- Asuransi jiwa tradisional *non-participating*, memberikan perlindungan untuk menutupi risiko kematian, kecelakaan, penyakit kritis dan kesehatan dari pemegang polis. Jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada saat terjadinya risiko yang ditanggung.
- *Unit-link*, produk asuransi dengan pembayaran premi tunggal maupun reguler yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan kombinasi manfaat proteksi dan manfaat investasi.

Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian diamendemen. Seluruh produk asuransi yang diterbitkan oleh Entitas Anak mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

Entitas Anak memisahkan komponen deposit dari kontrak *unit-link* seperti yang disyaratkan oleh PSAK 62 jika kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi:

- Entitas Anak dapat mengukur komponen "deposit" secara terpisah (termasuk opsi penyerahan melekat, yaitu tanpa memperhitungkan komponen "asuransi");
- Kebijakan akuntansi Entitas Anak tidak mensyaratkan untuk mengakui semua hak dan liabilitas yang timbul dari komponen "deposit".

Entitas Anak tidak memisahkan komponen deposit dikarenakan hanya salah satu kondisi di atas yang terpenuhi.

Pengujian kecukupan liabilitas

Pengujian kecukupan liabilitas dilakukan pada tanggal pelaporan untuk kontrak secara individual ataupun per kelompok produk, ditentukan sesuai dengan cara Entitas Anak memperoleh, memelihara dan mengukur profitabilitas dari kontrak asuransi tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Insurance contract *(continued)*

The Subsidiaries issues insurance contracts for traditional insurance product and investment-linked insurance product. Both of these products have significant insurance risk.

The Subsidiaries's products are divided into the following main categories:

- *Traditional non-participating life insurance, provide protection to cover the risk of death, accident, critical illness, and health of the insured. The basic of sum insured will be paid upon the occurrence of the risks covered.*
- *Unit-link, is the insurance product with single or regular premium payment which is linked to investment products, which provides a combined benefit of protection and investment.*

Once a contract has been classified as an insurance contract, no reclassification could be performed subsequently unless the terms of the agreement are later amended. All insurance products issued by the Subsidiaries has significant insurance risk.

The Subsidiary separates the deposit component from unit-link contract as required by SFAS No. 62 when both the following conditions are met:

- *The Subsidiaries can measure separately the "deposit" component (including any embedded submission option, i.e. without taking into account the "insurance" component);*
- *The Subsidiaries's accounting policies do not require to recognise all rights and obligations arising from the "deposit" component.*

The Subsidiaries does not separate the deposit component because only one of the above conditions is met.

Liability adequacy test

Liability adequacy testing is performed at reporting date for contract individually or group of products determined in accordance with the Subsidiaries's method of acquiring, servicing and measuring the profitability of its insurance contracts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Pengujian kecukupan liabilitas (lanjutan)

Untuk asuransi jiwa, liabilitas kepada pemegang polis khususnya liabilitas untuk klaim masa depan diuji untuk menentukan apakah liabilitas tersebut cukup untuk menutupi semua arus kas keluar di masa depan termasuk semua manfaat yang dijamin dan manfaat tambahan yang dijamin, manfaat partisipasi yang tidak dijamin (jika ada), semua biaya untuk penerbitan polis dan pemeliharaan polis, serta mencerminkan arus kas masuk masa depan yaitu penerimaan premi masa depan, yaitu premi yang diterima di masa depan. Liabilitas dihitung berdasarkan diskonto dari arus kas untuk semua arus kas yang terkait yaitu arus kas keluar dan arus kas masuk seperti yang disebutkan di atas dengan menggunakan seperangkat asumsi estimasi terbaik terkini yang ditetapkan oleh aktuaris Entitas Anak, termasuk asumsi tingkat mortalita, morbidita, tingkat pembatalan polis, biaya, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga, serta asumsi marjin atas risiko pemburukan. Entitas Anak yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa menerapkan metode *Gross Premium Reserve* dalam perhitungan cadangan premi atas manfaat polis masa depan kepada pemegang polis dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan marjin atas risiko pemburukan, sehingga pengujian kecukupan liabilitas tidak diperlukan lagi.

Reasuransi

Entitas Anak mereasuransikan sebagian porsi risikonya kepada perusahaan reasuradur. Jumlah premi yang dibayar atau porsi premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui selama periode kontrak asuransi sesuai dengan proporsi jumlah proteksi reasuransi yang diterima.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim dan *ceded* cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Entitas Anak menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas liabilitas manfaat polis masa depan, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, Entitas Anak mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa Entitas Anak tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Insurance contract *(continued)*

Liability adequacy test (continued)

For life insurance, the liabilities to policyholder in particular the liabilities for future claim is tested to determine whether the liabilities sufficient to cover all related future cash out flow including all guaranteed benefit and guaranteed additional benefit, non-guaranteed participation benefit feature (if any), all expenses for policies issuance and maintenance, as well as reflecting the future cash inflow, i.e. future premium receipt. The liabilities are calculated based on discounted cash flow basis for all related cash flows i.e. both of cash outflows and cash inflows as mentioned above using a set of most recent best estimate assumptions set by the Subsidiaries's appointed actuary, includes mortality, morbidity, lapses, expenses, inflation rates, and interest rate, assumptions as well as margin for adverse deviation assumptions. Subsidiaries operates in life insurance use Gross Premium Reserve in the premium allowance calculation for future policy benefits to the policyholders using actuary assumptions with best estimate and margin for adverse deviation, therefore liability adequacy test is not required.

Reinsurance

The Subsidiaries reinsure a portion of its risk to reinsurance companies. The amount of premium paid or portion of premium from prospective reinsurance transactions is recognised over the reinsurance contract in proportion with the protection received.

Reinsurance assets include balances expected to be recovered from reinsurance companies for ceded liability for future policy benefits, ceded estimated claim liabilities and ceded unearned premiums allowance. Recovery amount from reinsurers are estimated in a consistent manner with the liability associated with the reinsurance policy.

Subsidiaries presents separately reinsurance asset of future policy benefit liabilities, unearned premium allowance, and estimated claim liabilities.

If a reinsurance asset is impaired, the Subsidiaries deducted the carrying amount accordingly and recognises that impairment loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. A reinsurance asset is impaired if there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that the Subsidiary may not receive all amounts due to it is below the requirement of the contract, and the impact on the amounts that the Subsidiary will receive from the reinsurer can be reliably measured.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan dan dihitung dengan menggunakan rumus tertentu oleh aktuaris Entitas Anak.

Entitas Anak menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

Kenaikan/(penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Liabilitas kepada pemegang polis *unit-link* diakui pada saat penerimaan dana dikonversi menjadi unit setelah dikurangi biaya-biaya dan akan bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai aset bersih efektif yang berlaku.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk *unit-link* non-syariah diakui sebagai pendapatan premi bruto dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Liabilitas kepada pemegang polis *unit-link* diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dan dihitung menggunakan metode cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan yang dihitung dengan menggunakan metode harian berdasarkan biaya asuransi atas risiko mortalitas, ditambah cadangan atas akumulasi dana investasi pemegang polis.

Setiap bunga, keuntungan atau kerugian dari kenaikan atau penurunan nilai pasar investasi dicatat sebagai pendapatan atau beban, disertai dengan pengakuan kenaikan atau penurunan liabilitas kepada pemegang polis *unit-link* di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan liabilitas kepada pemegang polis *unit-link* di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk *unit-link* syariah diakui sebagai liabilitas kepada pemegang polis *unit-link* di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi bagian *fee* untuk Entitas Anak dalam rangka mengelola pendapatan dari produk *unit-link*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Insurance contract *(continued)*

Liability for future policy benefits

The liabilities for future policy benefits represent the present value of estimated future policy benefits to be paid to policyholders or their heirs less present value of estimated future premiums to be received from the policyholders and recognised consistently with the recognition of premium income. The liabilities for future policy benefits are determined and computed based on certain formula by the Subsidiaries's actuary.

The Subsidiaries calculate the liability for future policy benefits using Gross Premium Reserve method that reflect the present value of estimated payments of all the guaranteed benefits including all the embedded options available, the present value estimated of all handling costs incurred and also considering the future premium receipt.

Increase/(decrease) in liabilities for future policy benefits is recognised in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The liability to unit-link policyholders is recognised at the time the funds received are converted into units, net of related expenses and will increase or decrease in accordance with effective net asset value.

Funds received from customers for non-sharia unit-link products are recognised as gross premium income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Liabilities to unit-link policyholders are recognised in the consolidated statement of financial position and computed based on unearned premium reserves using daily method from insurance cost of mortality risk plus reserves for the accumulated invested fund of unit-link policyholders.

Any interest, gain or loss due to increases or decreases in market value of investments are recorded as income or expense, with a corresponding recognition of increase or decrease in liability to unit-link policyholders in the statement of profit or loss and other comprehensive income and liability to unit-link policyholders in the consolidated statement of financial position.

Funds received from customers for sharia unit-link products are recognised as liabilities to unit-link policyholders in the consolidated statement of financial position for the amount received net of the portion representing the Subsidiary fees in managing the unit-link product income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Kontrak asuransi (lanjutan)

Risiko yang belum jatuh tempo

Liabilitas untuk manfaat kontraktual yang diharapkan akan timbul di masa depan dicatat pada saat premi diakui. Liabilitas ditetapkan sebagai penjumlahan atas nilai diskonto yang diharapkan dari pembayaran manfaat dan biaya administrasi masa depan yang berkaitan langsung dengan kontrak asuransi, dikurangi dengan nilai diskonto yang diharapkan atas premi teoritis yang dibutuhkan untuk memenuhi manfaat dan biaya administrasi berdasarkan asumsi penilaian yang digunakan (penilaian premi). Liabilitas tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi seperti kematian, persistensi, biaya pemeliharaan dan pendapatan investasi yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dikeluarkan. Sebuah marjin untuk penyimpangan yang merugikan termasuk dalam asumsi yang digunakan.

aa. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dan Entitas Anak, termasuk obligasi, subordinasi *notes, medium term notes*, *traveller's cheques* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) pada pengukuran awal disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan efek-efek yang diterbitkan. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari efek-efek yang diterbitkan.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

ab. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pada pengukuran awal, pinjaman yang diterima disajikan sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Insurance contract *(continued)*

Unexpired risk reserve

A liability for contractual benefits that are expected to be incurred in the future is recorded when the premiums are recognised. The liability is determined as the sum of the expected discounted value of the benefit payments and the future administration expenses that are directly related to the insurance contract, less the expected discounted value of the theoretical premiums that would be required to meet the benefits and administration expenses based on the valuation assumptions used (the premiums valuation). That liability is based on assumptions such as mortality, persistency, maintenance expense and investment income that are established at the time the contract is issued. A margin for adverse deviations is included in the used assumptions.

aa. Debt securities issued

Debt securities issued by the Bank and its Subsidiaries, including bonds, subordinated notes, medium term notes, travelers' cheques and Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA), are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs to the debt securities issued. Subsequently, transactions cost are amortised using effective interest rate up to the maturity of debt securities issued.

Debt securities issued are classified as financial liabilities at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

ab. Fund borrowings

Fund borrowings represent funds received from other banks, Bank Indonesia or other parties with the obligation of repayment in accordance with the requirements of the loan agreement.

Fund borrowings are initially measured at fair value minus directly attributable transaction costs. Fund borrowings are classified as financial liabilities at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Fasilitas pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (PASBI) yang diterima oleh Entitas Anak Syariah diklasifikasikan dalam akun "Pinjaman yang Diterima". Bank Indonesia dan Entitas Anak sepakat melakukan akad wakalah bil ististmar untuk pengelolaan dana dengan agunan berupa surat berharga syariah. Dana yang diterima diakui sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia.

Bank melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan investasi usaha secara keseluruhan (*mutlaqah*). Pengembalian dana kelolaan dan pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dilakukan pada saat pelunasan.

ac. Pinjaman dan efek-efek subordinasi

Pinjaman dan efek-efek subordinasi pada pengukuran awal disajikan sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan pinjaman dan efek-efek subordinasi. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari pinjaman dan efek-efek subordinasi.

Pinjaman dan efek-efek subordinasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

ad. Perpajakan

Bank Mandiri dan Entitas Anak menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014) tentang "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Bank Mandiri dan Entitas Anak memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ab. Fund borrowings *(continued)*

The sharia liquidity management facility of Bank Indonesia (PASBI) received by Sharia Subsidiaries is classified as "Fund Borrowings". Bank Indonesia and the Subsidiary mutually agree to enter into a wakalah bil ististmar contract for fund management, guaranteed by sharia securities. The funds received are recognised as liabilities to Bank Indonesia.

The Bank undertakes fund management for whole business investment activities (mutlaqah). The return of managed funds and the distribution of investments return (ististmar) occur upon maturity.

ac. Subordinated loans and marketable securities

Subordinated loans and marketable securities are initially measured at fair value less directly attributable transaction costs. Subsequently, transactions costs are amortised using the effective interest rate up to the maturity of subordinated loans and marketable securities.

Subordinated loans and marketable securities are classified as financial liabilities at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

ad. Income tax

Bank Mandiri and Subsidiaries apply SFAS No. 46 (Revised 2014) regarding "Income Tax" which requires Bank Mandiri and Subsidiaries to take into account the consequnces of the current and future tax (settlement) from the carrying amount of assets (liabilities) that are recognised in the consolidated statement of financial position, and transactions and other events occured in the current period.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Perpajakan (lanjutan)

Manajemen Grup mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, Bank Mandiri membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Bank Mandiri dan Entitas Anak menerapkan metode liabilitas laporan posisi keuangan (*balance sheet liability method*) untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ad. Income tax *(continued)*

The Group's management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially for those that are subject to further interpretation for its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Futhermore, the Bank establishes provisions based on the if necessary amounts expected to be paid to the tax authorities.

Bank Mandiri and Subsidiaries apply the balance sheet liability method to determine income tax expense. Under the balance sheet liability method, deferred tax assets and liabilities are recognised for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount in the consolidated statement of financial position at each reporting date. This method also requires the recognition of unused future tax benefits, to the extent that realisation of such benefits is probable in the future.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that is probable that future taxable income will be sufficient to compensate deferred tax asset arising from temporary differences.

Deferred tax is calculated using tax rates enacted or substantively applied to the period during which the asset is realised or the liability is settled. The changes to the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to the changes of tax rates are charged in the current year, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income except for transactions which previously have been directly charged or credited to equity.

Adjustments to taxation obligations are recorded when tax assessment letter is received or, if objection/appeal is submitted, adjustments are recognised when the result of objection/appeal is received. Management provides provision for future tax liability at the estimated amount that will be payable to the tax office if there is a probable tax exposure, based on management's assessment as of the date of consolidated statement of financial position. Assumptions and estimation used in the calculation of provision may involve element of uncertainty.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Perpajakan (lanjutan)

Taksiran pajak penghasilan Bank Mandiri dan Entitas Anak dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini *(current tax assets)* dan liabilitas pajak kini *(current tax liabilities)* untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian. Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank Mandiri dan Entitas Anak disajikan sebagai "Utang pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama atau berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

ae. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Entitas Anak. Entitas Anak mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Entitas Anak atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Hubungan antara Entitas Anak dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah* dan akun lain yang sejenis.

1) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Entitas Anak) dalam pengelolaan investasinya.
2) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Entitas Anak tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Entitas Anak. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dan tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ad. Income tax *(continued)*

The estimated corporate income tax of Bank Mandiri and Subsidiaries is calculated for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal income entities cannot be set-off in the consolidated financial statements. Corporate tax payables and other tax payables of Bank Mandiri and Subsidiaries are presented as "Taxes payable" in the consolidated statement of financial position.

Deferred income tax assets and liabilities are offsetted if there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and if the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either for the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

ae. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by a Subsidiary. The Subsidiary has the right to manage and invest funds in accordance with either the Subsidiary's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing.

Relationship between the Subsidiary and the owner of temporary syirkah funds are based on partnership mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah or musyarakah. The examples of temporary syirkah funds are investment funds received from mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah and other similar accounts.

1) Mudharabah muthlaqah represents mudharabah in which the fund owner (shahibul maal) entrusts the fund manager (mudharib/Subsidiary) in managing its investment.
2) Mudharabah muqayyadah represents mudharabah in which the fund owner sets restrictions to the fund manager regarding, among others, the place, the means and/or the object of investment.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Subsidiary does not have any liability to return the fund to the owners when experience losses, except for losses due to the Subsidiary's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah funds also cannot be classified as equity, because of the existence of maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders, such as voting rights and the rights of realised gain from current asset and other non-investment accounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ae. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan konsolidasian, yang memberikan hak kepada Entitas Anak untuk mengelola, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

af. Pendapatan dan beban bunga serta pendapatan dan beban syariah

(i) Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* dicatat dalam "Pendapatan bunga" dan "Beban bunga" di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ae. Temporary syirkah funds *(continued)*

Temporary syirkah funds represent one of the consolidated statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principle that provide right to the Subsidiary to manage fund, including to combine the funds with the other funds.

The owner of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion to the total funds. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

af. Interest income and expense and sharia income and expense

(i) Conventional

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised as "Interest income" and "Interest expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

The effective interest method is a method used for calculating the amortised cost of financial assets and liabilities and method for allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to obtain the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. The calculation includes all commissions, provision and other fees received between parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, subsequently, interest income is recognised for the non-impaired portion of the impaired financial assets using the interest rate used to discount the future cash flows for measuring the impairment loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

af. Pendapatan dan beban bunga serta pendapatan dan beban syariah (lanjutan)

(ii) Pendapatan syariah

Di dalam pendapatan dan beban bunga terdapat pendapatan dan beban berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan pengelolaan dana oleh Entitas Anak sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad *murabahah, istishna, ijarah* dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *mudharabah, musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode tingkat imbal hasil efektif.

Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), pendapatan *murabahah* yang termasuk marjin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil.

Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

af. Interest income and expense and sharia income and expense *(continued)*

(ii) Sharia income

Included in interest income and expense are sharia income and expense based on sharia principle. The Subsidiary's income as a fund manager (mudharib) consists of income from murabahah and istishna transactions, income from ijarah (leasing), income from profit sharing of mudharabah, musyarakah financing and other main operating income.

Murabahah transaction income recognition through deferred payment or installment is executed during the period of the contract based on effective rate of return method (annuity).

According to SFAS No. 102 (Revised 2019), murabahah income which includes deferred margin and administrative income are recognised as income using method that equivalent to the effective rate of return method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, for the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms and condition the financial assets and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the assets and are an integral part of the effective rate of return.

Income from istishna is recognised using the percentage of completion or full completion method.

Income from ijarah is recognised proportionally during the contract period.

Profit sharing income for passive partner in musyarakah is recognised in the period when the profit sharing rights arise in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Profit sharing income for mudharabah is recognised in the period when the profit sharing rights arise in accordance with agreed profit sharing ratio and the recognition based on projection of income is not allowed.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

af. Pendapatan dan beban bunga serta pendapatan dan beban syariah (lanjutan)

(ii) Pendapatan syariah (lanjutan)

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan. Kelebihan pembayaran di atas harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya. Khusus untuk transaksi *ijarah,* setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pelunasan piutang sewa.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Entitas Anak. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima.

(iii) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Pembagian laba dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu dihitung dari pendapatan Entitas Anak yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Entitas Anak, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Entitas Anak yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Entitas Anak sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan yang memakai dana Entitas Anak, seluruhnya menjadi milik Entitas Anak, termasuk pendapatan dari transaksi Entitas Anak berbasis imbalan.

ag. Pendapatan premi dan beban klaim

Pendapatan premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Pendapatan premi kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat polis jatuh tempo.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

af. Interest income and expense and sharia income and expense *(continued)*

(ii) Sharia income (continued)

Any payment from non-performing debtors recognised is treated as the repayment cost or loan/financing principal. Excess payment over the cost or loan/financing principal recognised as income when the cash received. Specific for ijarah transactions, any payment from non-performing debtors recognised as the settlement of ijarah recei.

Customers' (fund owner) share on the return of temporary syirkah funds represent fund owners' share of the profit of Subsidiary derived from managing of such funds under mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah and mudharabah musytarakah principles. The profit sharing is determined on the earned income.

(iii) Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Distribution of profit is based on profit sharing principle which is calculated from the Subsidiary's earned income which in the form of gross profit margin.

Total margin income and profit sharing on financing given to debtors and other productive assets will be distributed to the fund owner and Subsidiary, calculated proportionally according to the fund allocation of fund owner and subsidiary that were used in the financing given to debtors and other productive assets.

Furthermore, available margin income and profit sharing for fund owner from financing facilities given to debtors and other distributed earning assets are distributed to fund owners and depositor as shahibul maal and the Subsidiary as mudharib based on a predetermined and agreed profit sharing with nisbah portion. Margin income and profit sharing from financing facilities given to debtors and other distributed earning assets using the Subsidiary's funds, are entirely shared for the Subsidiary, including income from the Subsidiary's fee-based transactions.

ag. Premium income and claims expenses

Premium income received from short-term insurance contracts is recognised as revenue over the period of risk coverage in proportion to the amounts of insurance protection provided. Premium income from long-term insurance contracts are recognised as revenue when the policy is due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Pendapatan premi dan beban klaim (lanjutan)

Pendapatan premi yang diterima sebelum jatuh tempo polis dicatat sebagai titipan premi di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban klaim dan manfaat terdiri dari klaim yang telah diselesaikan, klaim dalam proses penyelesaian dan estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR). Klaim dan manfaat diakui sebagai beban pada saat terjadinya liabilitas untuk memberikan proteksi. Klaim reasuransi yang diperoleh dari perusahaan reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim dan manfaat pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim dan manfaat.

Jumlah klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, dinyatakan berdasarkan estimasi menggunakan teknik perhitungan teknis oleh aktuaris. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim, sebagai hasil dari evaluasi lebih lanjut dan perbedaan antara estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai biaya tambahan atau pengurang biaya pada periode terjadinya perubahan.

ah. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit, piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan diakui sebagai bagian/(pengurang) dari nilai perolehan kredit, piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Untuk kredit, piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan yang diberikan dan dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung yang belum diamortisasi, diakui pada saat kredit yang diberikan, piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan dilunasi.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ag. Premium income and claims expenses *(continued)*

Premiums income received before the due date of the respective policies are reported as policyholders' deposits in the consolidated statement of financial position.

Claims and benefits expense consist of settled claims, claims that are still in process of settlement and estimates of claims incurred but not yet reported (IBNR). Claims and benefits are recognised as expenses when the liabilities to cover claims are incurred. Claim recoveries from reinsurance companies are recognised and recorded as deduction from claims expenses consistent in the same period with the claim and benefits expenses recognition.

Total claims in process of settlement, including claims incurred but not yet reported, are stated at estimated amounts determined based on the actuarial technical insurance calculations. Changes in estimated claims liabilities as a result of further evaluation and the difference between estimated claims and paid claims are recognised as addition to or deduction from expenses in the period which the changes occurred.

ah. Fees and commissions income

Fees and commissions income and transaction costs that are directly attributable to lending activities, consumer financing receivables and net investment finance lease, are recognised as a part/(deduction) of outstanding loan, consumer financing receivables and net investment finance lease and will be recognised as interest income by amortisation using effective interest rate method.

The directly attributable unamortised fees and commissions balances relating to loans, consumer financing receivables and net investment finance lease which is settled prior to maturity are recognised upon settlement date of such loans, consumer financing and net investment finance lease.

Other fees and commissions income which are not directly related to lending activities or a specific period are recognised as revenue on the transaction date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ai. Imbalan kerja

Liabilitas pensiun

Bank Mandiri menyelenggarakan program pensiun iuran pasti yang pesertanya adalah pegawai aktif Bank Mandiri sejak tanggal 1 Agustus 1999, serta program pensiun manfaat pasti yang berasal dari masing-masing dana pensiun Bank Peserta Penggabungan. Program ini didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan secara berkala.

Liabilitas imbalan pensiun Bank Mandiri dan Entitas Anak dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan dari program pensiun pada usia pensiun normal dengan manfaat yang akan diterima berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dimana telah diperbaharui menggunakan UU Cipta Kerja No. 11/2020 sebagaimana diubah dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang telah diperbaharui pada akhir 2021 setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasinya. Apabila manfaat pensiun lebih kecil dari pada manfaat menurut UU Cipta Kerja No 11/2020, maka Bank dan Entitas Anak membayar kekurangan tersebut.

Program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimum imbalan pensiun. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun sebagaimana tercantum dalam UU No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit* secara reguler untuk periode tidak lebih dari satu tahun. Nilai kini liabilitas manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Employee benefits

Pension liability

Bank Mandiri established a defined contribution pension plan covering substantially all of its eligible active employees since 1 August 1999 and also defined benefit pension plans, which were derived from each of the Merged Banks' pension plan. This program is funded through payment to pension fund's management as defined in the actuarial calculation which done regularly.

Bank Mandiri and Subsidiaries' pension liability has been calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plans with the benefit that will be received as stipulated under the Employment Law No. 13/2003 which has been updated using the Employment Regulations No. 11/2020 as amended by UU No. 6/2023 concerning Government In Lieu Of Law No. 2 Of 2022 Concerning Stipulation Employment Regulations Become Law based on the Collective Labor Agreement which was renewed at the end of 2021 after deducting accumulated employee contributions and the results of its investments. If the pension benefit from the Pension Plans is less than the benefit as required by the Employment Regulations No. 11/2020, the Bank and Subsidiaries will have to pay such shortage.

The pension plan based on the Labor Law is a defined benefit plan because the Labor Law sets a certain formula to calculate the minimum pension benefit. A defined contribution plan is a pension plan that defines an amount of pension contribution based on pension fund regulation and all contribution including investment return are recorded in its account's member as pension benefit as stated in Law No. 4 year 2023 dated 12 January 2023 regarding Development and Strengthening Financial Sector.

The defined benefit pension liability recognised in the consolidated statement of financial position is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statement of financial position date less the fair value of plan assets, adjusted with unrealised actuarial gains or losses and past service cost. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method on a regular basis for periods not exceeding one year. The present value of the defined benefit obligation is determined by discount the estimated future cash outflows using discounting rate of government bonds' yield that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ai. Imbalan kerja (lanjutan)

Liabilitas pensiun (lanjutan)

Akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui yang terjadi diakui sebagai "Penghasilan komprehensif lain" dan disajikan pada bagian ekuitas. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laba rugi.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa dalam laba rugi, bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dalam laba rugi dan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Bunga neto atas imbalan pasti neto merupakan komponen pendapatan bunga dari aset program, biaya bunga atas liabilitas imbalan pasti dan bunga atas dampak batas atas dari aset.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto terdiri dari:
- Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto;
- Setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial.

Liabilitas imbalan jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari cuti besar berimbalan dan penghargaan masa dinas.

Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Prakiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan dan dihitung menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, namun disederhanakan. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Employee benefits *(continued)*

Pension liability *(continued)*

The accumulated unrealised actuarial gains or losses incurred are recognised as "Other comprehensive income" and is presented in the equity section. Past service cost is directly charged to profit or loss.

The post-employment benefits expense recognised during the current year consists of service cost in profit or loss, net interest on the net defined benefit liability in profit or loss or re-measurement of the net defined benefit liabilities in other comprehensive income.

Net interest on the net defined benefit liabilities is the interest income component of plan assets, interest expense of defined benefit liabilities and interest on the effect of asset ceiling.

Remeasurements of the net defined benefit liability consists of:
- *Actuarial gains and losses;*
- *Return on plan assets, excluding amount included in net interest on the net defined benefit liability; and*
- *Any change in effect of the asset ceiling, excluding amount including in net interest on the net defined benefit liability.*

Actuarial gains and losses may arise from the adjustments made based on the experience and changes in actuarial assumption.

Other long-term employment benefit obligations

Other long-term employment benefit obligations consist of paid leave and service awards.

The entitlement of these benefits are provided to the employees if employees work until reaching the retirement age and the completion of a minimum certain service period. The estimated costs for these benefits are accrued over the period of employment of respective employee calculated using similar methodology used for defined benefit pension plans but is simpler. These obligations are calculated annually by qualified independent actuaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ai. Imbalan kerja (lanjutan)

Pembagian tantiem

Bank Mandiri mencatat tantiem dengan menggunakan basis akrual dan membebankannya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

aj. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasian akhir tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor selama tahun berjalan.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang digunakan dalam menghitung laba per saham dasar dan dilusian pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 93.333.333.332 lembar saham, serta 31 Desember 2022 sebesar 93.302.714.482 lembar saham.

ak. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
(a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
(b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
(c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Sesuai dengan PSAK 5 tentang "Segmen Operasi", Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal grup yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional adalah Direksi.

Informasi segmen per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sesuai Keputusan Direksi No. KEP.DIR/014/2020 tanggal 25 Februari 2020, dimana segmen operasi dibagi ke dalam segmen-segmen usaha sebagai berikut: *Corporate Banking, Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, *Retail Banking* (termasuk *Wealth*), *Treasury & International Banking*, Kantor Pusat, Entitas Anak Syariah, Entitas Anak - Asuransi dan Entitas Anak lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Employee benefits *(continued)*

Tantiem distribution

Bank Mandiri records tantiem on an accrual basis and charges it to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year.

aj. Earnings per share

Earnings per share is calculated by dividing the consolidated net profit at end of year with the weighted average number of shares issued and fully paid-in during the year.

The weighted-average number of outstanding shares used in computing basic and diluted earnings per share as of 31 December 2023 is 93,333,333,332 shares and as of 31 December 2022 are 93,302,714,482 shares.

ak. Operating segment

An operating segment is a component of an entity:

(a) That is involved in business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components from the same entity);
(b) Whose operating results are reviewed regularly by decision maker for operational activities for decision making on allocation of resources in respective segment and performance evaluation of works; and
(c) For which separate financial information is available.

In accordance with SFAS No. 5 regarding "Operating Segment", the Group presents operating segment based on internal reports that are presented to the decision-maker for operational activities. The decision maker for operational activities is the Board of Directors.

Segment information as of 31 December 2023 and 2022 onwards presented in accordance with the Board of Directors Decree No. KEP.DIR/014/2020 dated 25 February 2020, In which the operating segments are divided into the following business segments: Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional, Retail Banking (including Wealth), Treasury & International Banking, Head Office, Sharia Subsidiary, Subsidiary - Insurance and Other Subsidiaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Segmen operasi (lanjutan)

Segmen geografis adalah komponen Bank dan Entitas Anak yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Segmen geografis dibagi ke dalam wilayah Indonesia, Asia (Singapura, Malaysia, Hong Kong, Timor Leste dan Shanghai), Eropa Barat (Inggris) dan Cayman Islands.

al. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 24 Maret 2023, alokasi dana tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba dan rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

am. Saham treasuri

Saham treasuri merupakan modal saham yang diperoleh dan dimiliki kembali dari yang sebelumnya telah diterbitkan Bank. Saham treasuri disajikan sebesar nilai yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dan sebagai pengurang dari ekuitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham tersebut selanjutnya dijual kembali, maka nilai yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait disajikan di ekuitas.

an. Penggabungan usaha entitas sepengendali

Transaksi penggabungan usaha antara entitas anak, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dengan PT Bank BRIsyariah Tbk. (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) merupakan penggabungan usaha antar entitas sepengendali. Transaksi penggabungan usaha antar entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis termasuk aset maupun liabilitas terkait dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat investasi dicatat di ekuitas disajikan sebagai bagian dari pos tambahan modal disetor.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ak. Operating segment *(continued)*

A geographical segment represents a component of the Bank and its Subsidiaries that provides services in different economic environment and has a different risk and reward compared to others operating in different economic environment. Geographical segments are divided into Indonesia, Asia (Singapore, Malaysia, Hong Kong, Timor Leste and Shanghai), Western Europe (England) and Cayman Islands.

al. Social and environmental responsibility

Based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 regarding Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises dated 24 March 2023, fund allocation was no longer allocated from retained earnings based on the decision of the General Shareholders Meeting ("RUPS"), instead, it is recognised and charged to the current period consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

am. Treasury shares

Treasury shares are share capital that is acquired and owned back which from shares previously issued by the Bank. Treasury shares are stated at the amount paid, including directly attributable additional costs (less income tax) and as a deduction from equity until the shares are canceled or reissued. When the shares are subsequently sold back, the amount received, less the related transaction surcharge and the related income tax effect, is presented in equity.

an. Business combination of common control entities

The transaction of business combination between subsidiary, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), with PT Bank BRIsyariah Tbk. (BRIS) and PT Bank BNI Syariah (BNIS) is a business combination between entities under common control. Business combination transaction between entities under common control, in the form of business transfer including transfer of the related assets and liabilities in relation to the reorganisation of entities under the same group, do not constitute a change of ownership in terms of economics susbtance. Therefore, the transaction is recognised at carrying value based on the pooling of the interest method. The difference between the total consideration received or paid and the carrying amount of investment is recorded under equity and presented as a component of additional paid in capital.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

an. Penggabungan usaha entitas sepengendali (lanjutan)

Pada informasi keuangan entitas induk, Bank membukukan nilai investasi di entitas baru menggunakan nilai terdahulu, di mana investasi dibukukan sebesar nilai buku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

an. Business combination of common control entities *(continued)*

In the parent entity financial information, the Bank records its investment value in the new entity at cost using the predecessor value, where the investment is recorded at book value.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah estimasi terbaik serta berdasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan efek utang yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dijelaskan di Catatan 2c.

Cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan pihak lawan spesifik dalam seluruh cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari pihak lawan dan nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali dan disetujui secara independen oleh *Credit Risk Management Unit*.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Several estimates and assumptions are created in the preparation of the consolidated financial statements in which management judgment is required in determining the methodology in the valuation of assets and liabilities.

Management makes estimation and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the one next financial year. All estimation and assumptions required in conformity with Statement of Financial Accounting Standard are the best estimation undertaken in accordance with the applicable standards. Estimation and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty

a. Allowances for impairment losses of financial assets

Evaluation of impairment losses on financial assets which recognised at amortised cost and debt securities classified as fair value through other comprehensive income are described in Note 2c.

Allowance for impairment losses related to a specific counterparty as part of the entire allowance for impairment losses are established for receivables that are individually evaluated for impairment based on management's best estimate of the present value of cash flows expected to be received. In calculating the allowance for impairment losses, management makes judgements regarding of the financial condition of the counterparty and the net realizable value of the collateral received. Each impaired asset is evaluated, and its settlement strategy and estimation of cash flows considered recoverable are independently approved by the Credit Risk Management Unit.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian ekspektasian dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis, kondisi ekonomi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi di masa mendatang (*forecasting*). Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, Grup menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan secara aktif dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

c. Imbalan pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 2ai dan 52). Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai liabilitas pensiun.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

***a. Allowances for impairment losses of financial assets** (continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios with similar economic characteristics when there is a significant increase in credit risk or objective evidence to suggest the impairments are exist within the portfolio, but the individual impaired items cannot yet be identified. In determining the need to establish allowance for collective impairment, management considers factors such as credit quality, size of portfolio, credit concentrations, and economic factors. In estimating the required allowance, the assumptions made to determine expected default and loss model and to determine the required input parameters which are based on historical experience and estimated future economic conditions (forecasting). The accuracy of this allowance depends on how precise the estimated future cash flows to determine the individual allowance and the model assumptions and parameters used in determining collective allowance.

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group uses the valuation techniques as described in Note 2c for financial instruments that are traded infrequently and have limited pricing information, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks.

c. Pension benefits

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation uses assumptions such as discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others (refer to Note 2ai and 52). Any changes in those assumptions will impact the liability balance of employee benefit obligations.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

c. Imbalan pensiun (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni *zero coupon bond* yang digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan imbal hasil obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas pensiun yang terkait. Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

d. Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi

Liabilitas kepada pemegang polis (manfaat polis masa depan dari produk non-*unit link* dan estimasi liabilitas klaim) Entitas Anak dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari "Liabilitas lain-lain" berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial yaitu asumsi estimasi terbaik dan marjin atas risiko pemburukan.

e. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Bank tidak memperhitungkan sebagian manfaat aset pajak tangguhan karena manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut tidak dapat terpulihkan di masa yang akan datang.

f. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

***c. Pension benefits** (continued)*

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year, which is zero coupon bond that used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the government bonds' yields denominated in currency and have similar period with payments that will be made and have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability. Other key assumptions for pension obligations mostly are determined based on current market conditions.

d. Insurance liabilities on insurance contracts

Liabilities to policyholders (future policy benefits from non-unit linked products and estimated claim liabilities) of Subsidiaries are recorded in the consolidated statement of financial position as part of "Other liabilities" based on actuarial calculations using actuarial assumptions, which is the best estimate assumptions and margin for risk of deterioration.

e. ***Deferred tax assets***

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, as long as taxable income most likely will be available so that the temporary differences can be utilised. Significant estimation by management are required in determining the amount of deferred tax assets that can be recognised, based on utilisation period and the level of taxable income and future tax planning strategies. The Bank does not consider some of the benefits of deferred tax assets as management believes that those part of deferred tax assets will not be recoverable in the future.

f. Depreciation and estimated useful life of fixed assets

Cost of acquisition of fixed assets are depreciated using the straight-line method based on their estimated economic useful life. Bank's management estimates the useful lives of the fixed assets between 4 (four) to 20 (twenty) years.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

f. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap (lanjutan)

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat atas aset tetap Bank diungkapkan pada Catatan 18.

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank Mandiri dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penurunan nilai aset non-keuangan adalah sebagai berikut:

a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen Bank dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Nilai terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

h. Revaluasi atas nilai wajar tanah

Grup menggunakan spesialis penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah. Tanah dinilai berdasarkan referensi atas bukti berdasarkan pasar, menggunakan nilai yang dapat diukur setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

***f. Depreciation and estimated useful life of fixed assets** (continued)*

Changes in the level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and residual value of assets, and therefore future depreciation charges may be revised.

The carrying value of the Bank's fixed assets is disclosed in Note 18.

g. Impairment of non-financial assets

Bank Mandiri and its Subsidiaries assess impairment of non-financial assets whenever there are events or changes in circumstances indicate that the carrying value of non-financial assets cannot be recovered. Important factors that could cause impairment of non-financial assets are as follows:

a) Performance is not achieved significantly against historical expectations or projected operating results in the future;

b) A significant change in the way of the asset usage or the overall business strategy; and

c) Industry or economic trends are significantly negative.

The Management of the Bank and its Subsidiaries recognise an impairment loss if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. Recoverable amount is the higher value between the fair value minus costs of disposal and the value in use of the asset (or cash-generating unit). Recoverable amount is estimated for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit in which the asset is part of the unit.

h. Revaluations of land

The Group engaged independent valuation specialists to assess fair value of land. Lands were valued by reference to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific market factors such as location and condition of land.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

i. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Grup menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Grup menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Pertimbangan akuntansi yang penting

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak meliputi:

a. Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank dan Entitas Anak telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank dan Entitas Anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank dan Entitas Anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS** (continued)*

***Key sources of estimation uncertainty** (continued)*

i. Determine the contract term with options for extension and termination of the contract - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the term of the lease that cannot be canceled, together with the period covered based on the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably not to do so.

The Group has several lease contracts that include options for extension and termination of the lease terms. The Group applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Group reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

Significant accounting judgements

Accounting judgements that are important in applying accounting policies of the Bank and its Subsidiaries include:

a. Going concern

The Management of the Bank and its Subsidiaries have assessed the ability of the Bank and its Subsidiaries to continue its business and believes that the Bank and Subsidiaries have the resources to continue their business in the future. In addition, management is not aware of any material uncertainties that may cause significant doubt on the ability of the Bank and Subsidiaries to maintain its viability. Therefore, the consolidated financial statements have been prepared on the basis of a going concern.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

b. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Manajemen Bank dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 telah dipenuhi sejak 1 Januari 2020. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2.c.E.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Significant accounting judgements *(continued)*

b. Classification of financial assets and liabilities

The Management of the Bank and its Subsidiaries determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the definitions set under SFAS No. 71 have been fulfilled since 1 January 2020. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognised in accordance with the accounting policy of the Bank and its Subsidiaries as disclosed in Note 2.c.E.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA / ***4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA***

	2023	2022	
Rupiah	95.824.700	95.778.696	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat (Catatan 62.B.(iv))	12.780.622	11.570.462	*United States Dollar (Note 62.B.(iv))*
Total	**108.605.322**	**107.349.158**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") Rupiah dan Mata Uang Asing serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") yang harus dipenuhi Bank adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023 dan 31 December 2022, the Rupiah and Foreign Currency Minimum Statutory Reserves ("GWM") ratios and the Macroprudential Liquidity Buffer ("PLM") ratios that must be met by the Bank are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
GWM*)	6,30%	7,90%	*Primary Minimum Statutory Reserve*)
(i) GWM secara harian	0,00%	0,00%	*(i) Daily Minimum Statutory Reserve*
(ii) GWM secara rata-rata	6,30%	7,90%	*(ii) Average Minimum Statutory Reserve*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	5,00%	6,00%	*Macroprudential Liquidity Buffer*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
GWM	4,00%	4,00%	*Primary Minimum Statutory Reserve*
(i) GWM secara harian	2,00%	2,00%	*(i) Daily Minimum Statutory Reserve*
(ii) GWM secara rata-rata	2,00%	2,00%	*(ii) Average Minimum Statutory Reserve*

*) Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga Bank mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 2,70% dan 1,10%. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang seharusnya masing-masing sebesar 9,00% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 9,00% menjadi sebesar 6,30% pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 6,30%, menjadi sebesar 7,90% pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 7,90%.

*) *The Bank provides funding for specific and inclusive economic activities, allowing the Bank to receive incentives in the form of Rupiah Minimum Statutory Reserves ("GWM") leniency at 2.70% and 1.10% on 31 December 2023 and 2022, respectively. The Rupiah Minimum Statutory Reserves ("GWM") that the Bank requires to meet which should have been 9.00% each on 31 December 2023 and 31 December 2022 with a daily requirement of 0.00% and an average of 9.00%, has been reduced to 6.30% on 31 December 2023, with a daily requirement of 0.00% and an average of 6.30% and has been reduced to 7.90% on 31 December 2022, with a daily requirement of 0.00% and an average of 7.90%.*

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan) / *CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai ketentuan di atas. Rasio GWM Rupiah dan Valuta Asing serta PLM (Bank Mandiri saja) yaitu masing-masing sebesar:

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the ratio as mentioned above. The Rupiah and Foreign Currencies Minimum Statutory Reserves Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer Ratio (Bank Mandiri only), are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
GWM	7,32%	8,53%	*Primary Minimum Statutory Reserve*
(i) GWM secara harian*)	0,00%	0,00%	*(i) Daily Minimum Statutory Reserve*)
(ii) GWM secara rata-rata	7,32%	8,53%	*(ii) Average Minimum Statutory Reserve*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	19,25%	21,14%	*Macroprudential Liquidity Buffer*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
GWM	4,10%	4,10%	*Primary Minimum Statutory Reserve*
(i) GWM secara harian**)	2,00%	2,00%	*(i)Daily Minimum Statutory Reserve***)
(ii) GWM secara rata-rata	2,10%	2,10%	*(ii) Average Minimum Statutory Reserve*

*) Realisasi GWM harian Rupiah posisi 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 7,32% dan 7,56%.
**) Realisasi GWM harian Mata Uang Asing posisi 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 4,10% dan 4,10%.

*) *Realization of daily Rupiah minimum statutory reserve as of 31 December . were 7.32% dan 7.56%,respectively.*
**) *Realization of daily foreign currencies minimum statutory as of 31 December were 4.10% and 4.10%, respectively.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank berkewajiban untuk melakukan pemenuhan Giro RIM masing-masing sebesar 0,68% dan 0,87% dan Bank telah melakukan pemenuhan kewajiban tersebut.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank is obliged to fulfill the RIM Current Account of 0.68% dan 0.87%, respectively, and the Bank has fulfilled these obligations.

5. GIRO PADA BANK LAIN / *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

a. By currency, related parties and third parties:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)	58.804	70.843	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	799.949	566.608	*Third parties*
Total	858.753	637.451	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)	402.293	39.890	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	35.345.044	47.132.644	*Third parties*
Total (Catatan 62.B.(iv))	35.747.337	47.172.534	*Total (Note 62.B.(iv))*
	36.606.090	47.809.985	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(32.205)	(20.285)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**36.573.885**	**47.789.700**	***Net***

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan):

Termasuk dalam mata uang asing adalah terutama mata uang Pound Sterling Inggris, Dolar Amerika Serikat, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Australia, Dolar Hong Kong, Yuan China dan Dolar Singapura.

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

a. By currency, related parties and third parties (continued):

Included in foreign currencies are mainly Great Britain Pound Sterling, United States Dollar, European Euro, Japanese Yen, Australian Dollar, Hong Kong Dollar, Chinese Yuan and Singapore Dollar.

Movements of current account with other banks classified as amortised cost for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	47.024.265	-	-	785.720	47.809.985	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(12.846.864)	-	-	1.226.452	(11.620.412)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	994.542	-	-	12.184	1.006.726	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(163.796)	-	-	(9.706)	(173.502)	*Financial assets derecognised*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(12.016.118)	-	-	1.228.930	(10.787.188)	*Total increase/(decrease) during the year*
Lain-lain**)	(404.982)	-	-	(11.725)	(416.707)	*Others***)
Saldo akhir tahun	**34.603.165**	**-**	**-**	**2.002.925**	**36.606.090**	

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not Implement SFAS 71.*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	24.053.134	-	-	1.388.527	25.441.661	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	21.553.049	-	-	(412.894)	21.140.155	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	58.643	-	-	44.482	103.125	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(212.308)	-	-	(174.908)	(387.216)	*Financial assets derecognised*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	21.399.384	-	-	(543.320)	20.856.064	*Total increase/(decrease) during the year*
Lain-lain**)	1.571.747	-	-	(59.487)	1.512.260	*Others***)
Saldo akhir tahun	**47.024.265**	**-**	**-**	**785.720**	**47.809.985**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not Implement SFAS 71.*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / ***5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*** *(continued)*

b. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *b. By Bank Indonesia's collectibility:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Lancar	858.753	637.451	*Current*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))			*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
Lancar	35.747.337	47.172.534	*Current*
	36.606.090	47.809.985	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(32.205)	(20.285)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**36.573.885**	**47.789.700**	***Net***

c. Tingkat suku bunga rata-rata *(yield)* per tahun / *c. The average interest rate (yield) per annum:*

	2023	2022	
Rupiah	3,62%	0,96%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	2,67%	1,05%	*Foreign currencies (equivalent in Rupiah)*

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain / *d. Movements of allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	20.285	24.043	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 46)	11.800	(5.165)	*Allowance/(reversal) during the year (Note 46)*
Lain-lain[*)]	120	1.407	*Others[*)]*
Saldo akhir tahun	**32.205**	**20.285**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain (lanjutan):

d. Movements of allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows (continued):

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Jumlah/ Total**	
Saldo awal tahun	11.611	-	-	8.674	20.285	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(129)	-	-	11.528	11.399	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	502	-	-	-	502	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(101)	-	-	-	(101)	*Financial assets derecognised*
Total (pembalikan)/ pembentukan tahun berjalan	272	-	-	11.528	11.800	*Total (reversal)/ allowance during the year*
Lain-lain**)	(422)	-	-	542	120	*Others***)
Saldo akhir tahun	**11.461**	**-**	**-**	**20.744**	**32.205**	***Ending balance***

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Jumlah/ Total**	
Saldo awal tahun	6.806	-	-	17.237	24.043	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	4.390	-	-	(9.562)	(5.172)	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	17	-	-	-	17	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(10)	-	-	-	(10)	*Financial assets derecognised*
Total (pembalikan)/ pembentukan tahun berjalan	4.397	-	-	(9.562)	(5.165)	*Total (reversal)/ allowance during the year*
Lain-lain**)	408	-	-	999	1.407	*Others***)
Saldo akhir tahun	**11.611**	**-**	**-**	**8.674**	**20.285**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not Implement SFAS 71.*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

e. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

e. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" are disclosed in Note 62A.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis, mata uang, jatuh tempo dan kolektibilitas Bank Indonesia: / *By type, currency, maturity and Bank Indonesia's collectibility:*

	2023				
	Jatuh tempo/ *Maturity*	**Lancar/ *Current***	**Macet/ *Loss***	**Jumah/ Total**	
Rupiah					***Rupiah***
Bank Indonesia	< 1 bulan/*month*	29.985.352	-	29.985.352	*Bank Indonesia*
Call money	< 1 bulan/*month*	1.155.000	-	1.155.000	*Call money*
Penempatan *"fixed-term"*	≥ 12 bulan ≤ 36 bulan/ ≥ *12 months* ≤ *36 months*	312.102	-	312.102	*Fixed term placement*
Deposito berjangka	< 1 bulan/*month*	1.913.314	-	1.913.314	*Time deposits*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan/ ≥ *1 month*/ ≤ *3 months*	430.895	-	430.895	
	> 3 bulan ≤ 6 bulan/ > *3 months* ≤ *6 months*	49.400	-	49.400	
	> 6 bulan ≤ 12 bulan/ > *6 months* ≤ *12 months*	33.500	-	33.500	
Jumlah		33.879.563	-	33.879.563	*Total*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Bank Indonesia	< 1 bulan/*month*	25.482.035	-	25.482.035	*Bank Indonesia*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan/ ≥ 1 month ≤ 3 months	1.154.775	-	1.154.775	
Call money	< 1 bulan/*month*	6.787.585	-	6.787.585	*Call money*
Penempatan *"fixed-term"*	< 1 bulan/*month*	4.375.738	-	4.375.738	*Fixed term placement*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan/ ≥ *1 months* ≤ *3 months*	135.276	-	135.276	
	> 3 bulan ≤ 6 bulan/ > *3 months* ≤ *6 months*	130.203	-	130.203	
	> 12 bulan < 36 bulan/ > *12 months* < *36 months*	622.602	-	622.602	
	> 36 bulan/ > 36 *months*	265.924	-	265.924	
Deposito berjangka	< 1 bulan/ *month*	1.031.032	-	1.031.032	*Time deposits*
	≥ 3 bulan ≤ 6 bulan/ ≥ *3 months* ≤ *6 months*	11.712	-	11.712	
	> 6 bulan ≤ 12 bulan/ > *6 months* ≤ *12 months*	11.712	-	11.712	
Jumlah (Catatan 62.B.(iv))		40.008.594	-	40.008.594	*Total (Note 62.B.(iv))*
				73.888.157	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai				(957)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto				73.887.200	***Net***

	2022				
	Jatuh tempo/ *Maturity*	**Lancar/ *Current***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ Total**	
Rupiah					***Rupiah***
Bank Indonesia	< 1 bulan/*month*	26.843.755	-	26.843.755	*Bank Indonesia*
Call money	< 1 bulan/*month*	2.375.000	-	2.375.000	*Call money*
Penempatan *"fixed-term"*	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan/ ≥ *1 months* ≤ *3 months*	33.130	-	33.130	*Fixed term placement*
	> 6 bulan ≤ 12 bulan/ > *6 months* ≤ *12 months*	76.732	-	76.732	
Deposito berjangka	< 1 bulan/*month*	983.980	-	983.980	*Time deposits*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan/ ≥ *1 month* ≤ *3 months*	451.200	-	451.200	
	> 3 bulan ≤ 6 bulan/ > *3 months* ≤ *6 months*	13.500	-	13.500	
	> 6 bulan ≤ 12 bulan/ > *6 months* ≤ *12 months*	34.500	-	34.500	
Jumlah		30.811.797	-	30.811.797	*Total*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, jatuh tempo dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan):

***6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS** (continued)*

a. By type, currency, maturity and Bank Indonesia's collectibility (continued):

		2022 (lanjutan)			
	Jatuh tempo/ *Maturity*	**Lancar/ *Current***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ Total**	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Bank Indonesia	< 1 bulan/*month*	39.230.100	-	39.230.100	*Bank Indonesia*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan/ *≥ 1 month ≤ 3 months*	10.508.063	-	10.508.063	
Call money	< 1 bulan/*month*	10.547.054	-	10.547.054	*Call money*
Penempatan *"fixed-term"*	< 1 bulan/*1 month*	1.566.422	-	1.566.422	*Fixed term placement*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan *≥ 1 month ≤ 3 months*	141.245	-	141.245	
	> 3 bulan ≤ 6 bulan *> 3 months ≤ 6 months*	310.474	-	310.474	
	> 6 bulan ≤ 12 bulan/ *> 6 months ≤ 12 months*	284.087	-	284.087	
	> 12 bulan < 36 bulan/ *> 12 months < 36 months*	35.180	-	35.180	
	> 36 bulan/ > 36 months	1.282.230	-	1.282.230	
Deposito berjangka	< 1 bulan/*month*	264.648	-	264.648	*Time deposits*
	≥ 1 bulan ≤ 3 bulan *≥ 1 months ≤ 3 months*	31.462	-	31.462	
	> 6 bulan ≤ 12 bulan *> 6 months ≤ 12 months*	311.350	-	311.350	
Jumlah (Catatan 62.B.(iv))		64.512.315	-	64.512.315	*Total (Note 62.B.(iv))*
				95.324.112	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai				(3.601)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto				**95.320.511**	***Net***

Berikut adalah perubahan penempatan pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Movements of placement with other banks classified as amortised cost for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023			
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	95.324.112	-	-	95.324.112	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2.645.636)	-	-	(2.645.636)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	190.970.424	-	-	190.970.424	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(208.512.008)	-	-	(208.512.008)	*Financial assets derecognised*
Total penambahan tahun berjalan	(20.187.220)	-	-	(20.187.220)	*Total increase during the year*
Lain-lain*)	(1.248.735)	-	-	(1.248.735)	*Others**)
Saldo akhir tahun	**73.888.157**	**-**	**-**	**73.888.157**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, jatuh tempo dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan):

Berikut adalah perubahan penempatan pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

a. By type, currency, maturity and Bank Indonesia's collectibility (continued):

Movements of placement with other banks classified as amortised cost for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows (continued):

	2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	47.785.191	-	-	47.785.191	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	4.634.950	-	-	4.634.950	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	227.878.707	-	-	227.878.707	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(184.867.043)	-	-	(184.867.043)	*Financial assets derecognised*
Total penambahan tahun berjalan	47.646.614	-	-	47.646.614	*Total increase during the year*
Lain-lain*)	(107.693)	-	-	(107.693)	*Others**)
Saldo akhir tahun	**95.324.112**	**-**	**-**	**95.324.112**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

b. By related parties and third parties:

	2023	**2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)	625.019	636.030	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	33.254.544	30.175.767	*Third parties*
Total	33.879.563	30.811.797	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)	1.424.453	2.444.098	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	38.584.141	62.068.217	*Third parties*
Total (Catatan 62.B.(iv))	40.008.594	64.512.315	*Total (Note 62.B.(iv))*
	73.888.157	95.324.112	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(957)	(3.601)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**73.887.200**	**95.320.511**	***Net***

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

c. Penempatan berdasarkan *counterparty:*

c. By counterparty:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Deposit Facility			*Deposit Facility*
Bank Indonesia	29.985.352	26.843.755	*Bank Indonesia*
Call Money			*Call Money*
JP Morgan Chase Bank N.A	200.000	200.000	*JP Morgan Chase Bank N.A*
PT Bank DKI	100.000	100.000	*PT Bank DKI*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	100.000	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	100.000	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah	100.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah*
PT Bank Permata Tbk.	100.000	-	*PT Bank Permata Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	100.000	250.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	50.000	125.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	50.000	150.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat*
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	50.000	100.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	40.000	125.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan and Bangka Belitung*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	15.000	150.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	-	250.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*
PT Bank Aceh Syariah	-	200.000	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	200.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	-	125.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*
Lainnya	150.000	200.000	*Others*
	1.155.000	2.375.000	
Fixed term			*Fixed term*
PT Bank UOB Indonesia	312.102	76.732	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank ANZ Indonesia	-	33.130	*PT Bank ANZ Indonesia*
	312.102	109.862	
Deposito			*Time deposits*
Citibank	389.565	102.200	*Citibank*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	296.829	226.100	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	270.030	162.530	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	220.890	50.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

c. Penempatan berdasarkan *counterparty* (lanjutan)*:*

c. By counterparty (continued):

	2023	2022	
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Deposito (lanjutan)			*Time deposits (continued)*
PT Bank DKI	190.900	121.400	*PT Bank DKI*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Unit Usaha Syariah	178.000	256.500	*PT Bank Pembangun Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Unit Usaha Syariah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	159.000	5.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	143.600	51.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*
PT Bank Nagari	136.900	70.750	*PT Bank Nagari*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	129.900	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Sumatera Utara Tbk	123.600	70.000	*PT Bank Sumatera Utara Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah	52.460	247.400	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah*
PT Bank SulutGO	22.500	-	*PT Bank SulutGO*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	21.245	42.500	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah*
PT Bank Danamon Syariah	9.690	5.000	*PT Bank Danamon Syariah*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	9.000	16.800	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank DKI Syariah	7.500	-	*PT Bank DKI Syariah*
Lainnya	65.500	56.000	*Others*
	2.427.109	1.483.180	
Total Rupiah	33.879.563	30.811.797	*Total Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
USD			*USD*
Term deposits			*Term deposits*
Bank Indonesia	26.636.810	49.738.163	*Bank Indonesia*
Call Money			*Call Money*
Wells Fargo Bank N.A.	3.404.277	5.461.857	*Wells Fargo Bank N.A.*
Bank of New York	1.455.786	1.963.062	*Bank of New York*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.231.760	934.050	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
BNP Paribas S.A	469.426	393.152	*BNP Paribas S.A*
HSBC Bank USA N.A.	226.336	1.203.368	*HSBC Bank USA N.A.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	467.025	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
Lainnya	-	124.540	*Others*
	6.787.585	10.547.054	
Fixed term			*Fixed term*
Bank of New York	1.965.427	-	*Bank of New York*
Standard Chartered Bank	919.871	682.941	*Standard Chartered Bank*
JP Morgan Chase Bank N.A.	713.459	883.376	*JP Morgan Chase Bank N.A.*
BNP Paribas S.A	366.182	374.801	*BNP Paribas S.A*
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	354.131	-	*Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*
Agricultural Bank of China	230.955	233.513	*Agricultural Bank of China*
Bank of Montreal	138.573	147.891	*Bank of Montreal*
Bank of China	123.176	342.485	*Bank of China*
Ing Bank NV	93.860	94.040	*Ing Bank NV*
Nomura Singapura Limitied	66.751	35.341	*Nomura Singapore Limitied*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

c. Penempatan berdasarkan *counterparty* (lanjutan)*:*

c. By counterparty (continued):

	2023	2022	
Mata uang asing (lanjutan)			*Foreign currencies (continued)*
USD (lanjutan)			*USD (continued)*
Fixed term (lanjutan)			*Fixed term (continued)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	467.025	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Lainnya	14.888	-	*Others*
	4.987.273	3.261.413	
Deposito			*Time deposits*
Citibank	499.605	-	*Citibank*
ANZ London	169.367	-	*ANZ London*
PT Bank CTBC	169.367	-	*PT Bank CTBC*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	97.001	264.648	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	61.588	311.350	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	31.462	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
	996.928	607.460	
	39.408.596	64.154.090	
CNY			*CNY*
Fixed term			*Fixed term*
Agricultural Bank of China	347.166	-	*Agricultural Bank of China*
Bank of China	195.305	358.225	*Bank of China*
	542.471	358.225	
EUR			*EUR*
Deposito			*Time deposit*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	34.104	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
	34.104	-	
SGD			*SGD*
Deposito			*Time deposit*
PT Bank UOB Indonesia	23.423	-	*PT Bank UOB Indonesia*
	23.423	-	
Total mata uang asing	40.008.594	64.512.315	*Total foreign currencies*
	73.888.157	95.324.112	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(957)	(3.601)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**73.887.200**	**95.320.511**	***Net***

d. Tingkat suku bunga rata-rata (*yield*) per tahun:

d. Average interest rate (yield) per annum:

	2023	2022	
Rupiah	2,25 %	0,69%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	3,50 %	1,03%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

***6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS** (continued)*

e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain:

e. Movements of allowance for impairment losses on placements with other banks:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	3.601	1.675	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 46)	(2.418)	1.948	*(Reversal)/allowance during the year (Note 46)*
Lain-lain*)	(226)	(22)	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**957**	**3.601**	***Ending balance***

**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

	2023				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	3.601	-	-	3.601	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.217)	-	-	(2.217)	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.677	-	-	1.677	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.878)	-	-	(1.878)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan tahun berjalan	(2.418)	-	-	(2.418)	*Total allowance during the year*
Lain-lain*)	(226)	-	-	(226)	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**957**	**-**	**-**	**957**	***Ending balance***

**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

	2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	1.675	-	-	1.675	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	971	-	-	971	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.058	-	-	2.058	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.081)	-	-	(1.081)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan tahun berjalan	1.948	-	-	1.948	*Total allowance during the year*
Lain-lain*)	(22)	-	-	(22)	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**3.601**	**-**	**-**	**3.601**	***Ending balance***

**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks is adequate.

f. Informasi mengenai pengklasifikasian berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

f. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

g. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penempatan dengan saldo USD4.335.315 (nilai penuh) dan USD2.270.190 (nilai penuh) dijaminkan untuk fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain (Catatan 36d).

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS *(continued)*

g. As of 31 December 2023 and 2022, placements with a balance of USD4,335,315 (full amount) and USD2,270,190 (full amount) were pledged for fund borrowings from other banks (Note 36d).

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga:

7. MARKETABLE SECURITIES

a. By purpose, related parties and third parties:

	2023	2022	
Efek-efek			*Marketable securities*
Pihak berelasi (Catatan 56):			*Related parties (Note 56):*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.138.746	363.281	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10.625.541	14.060.476	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	3.668.508	4.834.818	*At amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan*)	309.017	281.259	*At cost**)
	17.741.812	19.539.834	
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	16.116.963	10.724.161	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	38.208.496	15.277.832	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	2.231.038	3.120.999	*At amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan*)	991.866	10.967.719	*At cost**)
	57.548.363	40.090.711	
Investasi pada *unit-link* **)			*Investments in unit-link contracts* **)
Pihak berelasi (Catatan 56):			*Related parties (Note 56):*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.032.327	7.750.743	*Fair value through profit or loss*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	13.259.620	15.439.438	*Fair value through profit or loss*
	19.291.947	23.190.181	
Total	94.582.122	82.820.726	*Total*
Ditambah/(dikurangi):			*Add/(less):*
Premi yang belum diamortisasi	8.829	18.986	*Unamortised premiums*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek	105.165	1.297	*Unrealised gain on increase in fair value of marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(150.275)	(41.191)	*Allowance for impairment losses*
	(36.281)	(20.908)	
Neto	**94.545.841**	**82.799.818**	***Net***

*) Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak.
**) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

*) *Marketable securities owned by Subsidiariary.*
**) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholders of unit-link contracts of Subsidiary which are presented at fair value.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan):

Berikut adalah perubahan efek-efek dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan biaya perolehan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

a. By purpose, related parties and third parties (continued):

Movements of marketable securities classified as at amortised cost and at cost for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	7.916.557	58.246	-	11.248.978	19.223.781	*Beginning balance*
Pengukuran kembali	(48.951)	-	-	-	(48.951)	*Remeasurement*
Aset keuangan yang baru dibeli	2.078.628	-	-	495.858	2.574.486	*New purchased financial assets*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(3.937.210)	-	-	(10.387.555)	(14.324.765)	*Matured or sold financial assets*
Total (penurunan)/penambahan tahun berjalan	(1.907.533)	-	-	(9.891.697)	(11.799.230)	*Total (decrease)/increase during the year*
Lain-lain**)	(158.895)	-	-	(56.398)	(215.293)	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**5.850.129**	**58.246**	**-**	**1.300.883**	**7.209.258**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	8.409.053	123.325	-	28.499.999	37.032.377	*Beginning balance*
Pengukuran kembali	20.871	-	-	190.000	210.871	*Remeasurement*
Aset keuangan yang baru dibeli	4.624.870	66.461	-	10.741.355	15.432.686	*New purchased financial assets*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(4.591.771)	(131.540)	-	(28.188.710)	(32.912.021)	*Matured or sold financial assets*
Total (penurunan)/penambahan tahun berjalan	53.970	(65.079)	-	(17.257.355)	(17.268.464)	*Total (decrease)/increase during the year*
Lain-lain**)	(546.466)	-	-	6.334	(540.132)	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**7.916.557**	**58.246**	**-**	**11.248.978**	**19.223.781**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan):

Berikut adalah perubahan efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

a. By purpose, related parties and third parties (continued):

Movements of marketable securities classified as fair value through other comprehensive income for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Saldo awal tahun	29.308.811	-	-	-	29.308.811	*Beginning balance*
Pengukuran kembali	(97.095)	-	39.496	-	(57.599)	*Remeasurement*
Aset keuangan yang baru dibeli	913.899	-	-	23.629.746	24.543.645	*New purchased financial assets*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(4.990.318)	-	-	-	(4.990.318)	*Matured or sold financial assets*
Total (penurunan)/penambahan tahun berjalan	(4.173.514)	-	39.496	23.629.746	19.495.728	*Total (decrease)/increase during the year*
Lain-lain**)	19.261	-	-	-	19.261	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**25.154.558**	**-**	**39.496**	**23.629.746**	**48.823.800**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Saldo awal tahun	21.471.277	-	-	194.783	21.666.060	*Beginning balance*
Pengukuran kembali	618.265	-	-	-	618.265	*Remeasurement*
Aset keuangan yang baru dibeli	10.610.334	-	-	-	10.610.334	*New purchased financial assets*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(3.015.142)	-	-	(194.783)	(3.209.925)	*Matured or sold financial assets*
Total (penurunan)/penambahan tahun berjalan	8.213.457	-	-	(194.783)	8.018.674	*Total (decrease)/increase during the year*
Lain-lain**)	(375.923)	-	-	-	(375.923)	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**29.308.811**	**-**	**-**	**-**	**29.308.811**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currencies translation.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia:

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. By type, currency and Bank Indonesia's collectibility:

	2023							
				Nilai wajar/biaya perolehan/biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/at amortised cost*				
	Nilai perolehan/ nilai nominal/ nilai wajar/ *Cost/ nominal value/ fair value*	Premi/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortised premiums/ (discounts)*	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ *Unrealised gains/ (losses)*	Lancar/ *Current*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah								***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi								*Fair value through profit or loss*
Efek-efek								*Marketable securities*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4.648.632	-	26.950	4.675.582	-	-	4.675.582	Bank Indonesia Rupiah Securities
Obligasi	2.429.868	-	5.484	2.435.352	-	-	2.435.352	*Bonds*
Sukuk Bank Indonesia	2.424.704	-	9.578	2.434.282	-	-	2.434.282	*Certificates of Bank Indonesia*
Investasi pada unit-unit reksa dana	577.307	-	-	577.307	-	-	577.307	*Investments in mutual fund units*
Saham	356.161	-	-	356.161	-	-	356.161	*Shares*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	149.957	-	174	150.131	-	-	150.131	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Negotiable certificate of deposit	145.319	-	1.531	146.850	-	-	146.850	*Negotiable certificate of deposits*
Efek Beragun Aset	57.934	-	(2.017)	55.917	-	-	55.917	*Asset-backed security*
	10.789.882	-	41.700	10.831.582	-	-	10.831.582	
Investasi pada *unit-link* *)								*Investments in unit-link contracts* *)
Saham	12.836.391	-	-	12.836.391	-	-	12.836.391	*Shares*
Investasi pada unit-unit reksa dana	1.195.468	-	-	1.195.468	-	-	1.195.468	*Investments in mutual fund units*
Obligasi	692.709	-	-	692.709	-	-	692.709	*Bonds*
	14.724.568	-	-	14.724.568	-	-	14.724.568	
	25.514.450	-	41.700	25.556.150	-	-	25.556.150	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain								*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek								*Marketable securities*
Sukuk Bank Indonesia	20.744.693	-	-	20.744.693	-	-	20.744.693	*Sukuk BI*
Investasi pada unit-unit reksa dana	19.609.721	-	199.478	19.809.199	-	-	19.809.199	*Investments in mutual fund units*
Obligasi	3.041.974	-	1.289	3.003.767	-	39.496	3.043.263	*Bonds*
Saham	162.074	-	-	162.074	-	-	162.074	*Shares*
Obligasi syariah perusahaan	120.890	-	-	120.890	-	-	120.890	*Sharia corporate bonds*
Medium term notes	100.396	-	-	100.396	-	-	100.396	*Medium term notes*
	43.779.748	-	200.767	43.941.019	-	39.496	43.980.515	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi								*At amortised cost*
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi	2.773.000	18	-	2.773.018	-	-	2.773.018	*Bonds*
Wesel ekspor	457.165	-	-	457.165			457.165	*Export bills*
Medium term notes	245.000	-	-	245.000	-	-	245.000	*Medium term notes*
Efek Beragun Aset	68.874	-	-	68.874			68.874	*Asset-backed security*
	3.544.039	18	-	3.544.057	-	-	3.544.057	
Diukur pada biaya perolehan**)								*At cost* **)
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi syariah perusahaan	787.800	-	-	688.800	-	99.000	787.800	*Sharia corporate bonds*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Medium term notes	160.000	-	-	160.000	-	-	160.000	*Medium term notes*
Wesel ekspor	103.083	-	-	103.083	-	-	103.083	*Export bills*
	1.300.883	-	-	1.201.883	-	99.000	1.300.883	
Total	74.139.120	18	242.467	74.243.109	-	138.496	74.381.605	*Total*

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

**) Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak.

*) *Unit-link investments are investments owned by policyholders in Subsidiary unit-link contracts which are presented at fair value.*

**) *Marketable securities owned by Subsidiary.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan):

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. By type, currency and Bank Indonesia's collectibility (continued):

	2023							
				Nilai wajar/biaya perolehan/biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/at amortised cost*				
	Nilai perolehan/ nilai nominal/ nilai wajar/ *Cost/ nominal value/ fair value*	Premi/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortised premiums/ (discounts)*	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ *Unrealised gains/ (losses)*	Lancar/ *Current*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Macet/ *Loss*	Total	
Mata uang asing								***Foreign currencies***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi								*Fair value through profit or loss*
Efek-efek								*Marketable securities*
Treasury bills	6.914.852	-	59.772	6.974.624	-	-	6.974.624	*Treasury bills*
Sekuritas Valas								*Bank Indonesia foreign currency securities*
Bank Indonesia	1.214.911	-	6.803	1.221.714	-	-	1.221.714	
Treasury Bonds	196.192	-	7.127	203.319	-	-	203.319	*Treasury Bonds*
Obligasi	139.872	-	-	139.872	-	-	139.872	*Bonds*
	8.465.827	-	73.702	8.539.529	-	-	8.539.529	
Investasi pada *unit-link* *)								*Investments in unit-link contracts* *)
Investasi pada unit-unit reksa dana	4.567.379	-	-	4.567.379	-	-	4.567.379	*Investments in mutual fund units*
	4.567.379	-	-	4.567.379	-	-	4.567.379	
	13.033.206	-	73.702	13.106.908	-	-	13.106.908	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain								*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi	1.958.130	-	(85.070)	1.873.060	-	-	1.873.060	*Bonds*
Sekuritas Valas								*Bank Indonesia foreign currency securities*
Bank Indonesia	1.544.442	-	-	1.544.442	-	-	1.544.442	
Treasury bills	1.551.717	-	(125.934)	1.425.783	-	-	1.425.783	*Treasury bills*
	5.054.289	-	(211.004)	4.843.285	-	-	4.843.285	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi								*At amortised cost*
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi	966.147	(4.359)	-	961.788	-	-	961.788	*Bonds*
Wesel ekspor	711.892	-	-	711.892	-	-	711.892	*Export bills*
Treasury bills	677.468	13.170	-	690.638	-	-	690.638	*Treasury bills*
	2.355.507	8.811	-	2.364.318	-	-	2.364.318	
Total (Catatan 62.B.(iv))	20.443.002	8.811	(137.302)	20.314.511	-	-	20.314.511	*Total (Note 62.B.(iv))*
	94.582.122	8.829	105.165	94.557.620	-	138.496	94.696.116	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai							(150.275)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto							**94.545.841**	***Net***

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

*) *Unit-link investments are investments owned by policyholders in Subsidiary unit-link contracts which are presented at fair value.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan):

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. By type, currency and Bank Indonesia's collectibility (continued):

	2022							
				Nilai wajar/biaya perolehan/biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/at amortised cost*				
	Nilai perolehan/ nilai nominal/ nilai wajar/ *Cost/ nominal value/ fair value*	Premi/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortised premiums/ (discounts)*	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ *Unrealised gains/ (losses)*	Lancar/ *Current*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah								***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi								*Fair value through profit or loss*
Efek-efek								*Marketable securities*
Investasi pada unit-unit reksa dana	146.827	-	-	146.827	-	-	146.827	*Investments in mutual fund units*
Sukuk Bank Indonesia	300.000	-	288	300.288	-	-	300.288	*Certificates of Bank Indonesia*
Saham	319.871	-	-	319.871	-	-	319.871	*Shares*
Negotiable certificate of deposit	155.415	-	25	155.440	-	-	155.440	*Negotiable certificate of deposits*
Efek Beragun Aset	26.148	-	(2.718)	23.430	-	-	23.430	*Asset-backed security*
	948.261	-	(2.405)	945.856	-	-	945.856	
Investasi pada *unit-link* *)								*Investments in unit-link contracts* *)
Saham	16.854.079	-	-	16.854.079	-	-	16.854.079	*Shares*
Investasi pada unit-unit reksa dana	912.426	-	-	912.426	-	-	912.426	*Investments in mutual fund units*
Obligasi	408.306	-	-	408.306	-	-	408.306	*Bonds*
	18.174.811	-	-	18.174.811	-	-	18.174.811	
	19.123.072	-	(2.405)	19.120.667	-	-	19.120.667	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain								*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek								*Marketable securities*
Investasi pada unit-unit reksa dana	18.846.533	-	197.629	19.044.162	-	-	19.044.162	*Investments in mutual fund units*
Saham	125.889	-	-	125.889	-	-	125.889	*Shares*
Obligasi	3.871.393	-	38.232	3.909.625	-	-	3.909.625	*Bonds*
	22.843.815	-	235.861	23.079.676	-	-	23.079.676	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi								*At amortised cost*
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi	4.030.774	24	-	4.030.798	-	-	4.030.798	*Bonds*
Efek Beragun Aset	102.732	-	-	102.732	-	-	102.732	*Asset-backed security*
Wesel ekspor	985.360	-	-	985.360	-	-	985.360	*Export bills and others*
Medium term notes	245.000	-	-	245.000	-	-	245.000	*Medium term notes*
	5.363.866	24	-	5.363.890	-	-	5.363.890	
Diukur pada biaya perolehan**)								*At cost* **)
Efek-efek								*Marketable securities*
Wesel ekspor dan lainnya	119.194	-	-	119.194	-	-	119.194	*Export bills and others*
Medium term notes	160.000	-	-	160.000	-	-	160.000	*Medium term notes*
Obligasi syariah perusahaan	742.800	-	-	742.800	-	-	742.800	*Sharia corporate bonds*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	690.000	-	-	690.000	-	-	690.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	934.000	-	-	934.000	-	-	934.000	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Sukuk Bank Indonesia	8.602.984	-	-	8.602.984	-	-	8.602.984	*Sukuk Bank Indonesia*
	11.248.978	-	-	11.248.978	-	-	11.248.978	
Total	58.579.731	24	233.456	58.813.211	-	-	58.813.211	*Total*

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

**) Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak.

*) *Unit-link investments are investments owned by policyholders in Subsidiary unit-link contracts which are presented at fair value.*

**) *Marketable securities owned by Subsidiary.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia (lanjutan):

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

b. By type, currency and Bank Indonesia's collectibility (continued):

	2022							
				Nilai wajar/biaya perolehan/biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/at amortised cost*				
	Nilai perolehan/ nilai nominal/ nilai wajar/ *Cost/ nominal value/ fair value*	Premi/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ *Unamortised premiums/ (discounts)*	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ *Unrealised gains/ (losses)*	Lancar/ *Current*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Macet/ *Loss*	Total	
Mata uang asing								***Foreign currencies***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi								*Fair value through profit or loss*
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi	83.232	-	-	83.232	-	-	83.232	*Bonds*
Treasury bills	10.055.949	-	33.199	10.089.148	-	-	10.089.148	*Treasury bills*
	10.139.181	-	33.199	10.172.380	-	-	10.172.380	
Investasi pada *unit-link* *)								*Investments in unit-link contracts* *)
Investasi pada unit-unit reksa dana	5.015.370	-	-	5.015.370	-	-	5.015.370	*Investments in mutual fund units*
	5.015.370	-	-	5.015.370	-	-	5.015.370	
	15.154.551	-	33.199	15.187.750	-	-	15.187.750	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain								*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek								*Marketable securities*
Obligasi	5.262.061	-	(150.277)	5.111.784	-	-	5.111.784	*Bonds*
Treasury bills	1.232.432	-	(115.081)	1.117.351	-	-	1.117.351	*Treasury bills*
	6.494.493	-	(265.358)	6.229.135	-	-	6.229.135	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi								*At amortised cost*
Efek-efek								*Marketable securities*
Wesel ekspor	976.838	-	-	976.838	-	-	976.838	*Export bills and others*
Obligasi	930.143	2.660	-	932.803	-	-	932.803	*Bonds*
Treasury bills	684.970	16.302	-	701.272	-	-	701.272	*Treasury bills*
	2.591.951	18.962	-	2.610.913	-	-	2.610.913	
Total (Catatan 62.B.(iv))	24.240.995	18.962	(232.159)	24.027.798	-	-	24.027.798	*Total (Note 62.B.(iv))*
	82.820.726	18.986	1.297	82.841.009	-	-	82.841.009	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai							(41.191)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto							**82.799.818**	***Net***

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

*) *Unit-link investments are investments owned by policyholders in Subsidiary unit-link contracts which are presented at fair value.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo:

7. *MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

c. By maturity:

	2023	2022	
Efek-efek			*Marketable securities*
Rupiah			*Rupiah*
Tidak mempunyai jatuh tempo	1.095.543	592.587	*No maturity date*
< 1 tahun	33.548.086	15.099.577	*< 1 year*
> 1 < 5 tahun	19.370.592	17.278.208	*> 1 < 5 years*
> 5 < 10 tahun	5.368.544	7.434.548	*> 5 < 10 years*
> 10 tahun	31.787	-	*> 10 years*
Total	59.414.552	40.404.920	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
< 1 tahun	11.514.305	14.426.574	*< 1 year*
> 1 < 5 tahun	3.044.306	3.573.616	*> 1 < 5 years*
> 5 < 10 tahun	1.317.012	979.656	*> 5 < 10 years*
> 10 tahun	-	245.779	*> 10 years*
Total	15.875.623	19.225.625	*Total*
Investasi pada *unit-link*[*)]			*Investments in unit-link contracts*[*)]
Rupiah			*Rupiah*
Tidak mempunyai jatuh tempo	14.031.859	17.766.505	*No maturity date*
< 1 tahun	169.472	17.916	*< 1 year*
> 1 < 5 tahun	488.461	385.368	*> 1 < 5 years*
> 5 < 10 tahun	34.776	5.022	*> 5 < 10 years*
Total	14.724.568	18.174.811	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Tidak mempunyai jatuh tempo	4.567.379	5.015.370	*No maturity date*
Total	19.291.947	23.190.181	*Total*
	94.582.122	82.820.726	
Ditambah/(dikurangi):			*Add/(less):*
Premi yang belum diamortisasi	8.829	18.986	*Unamortised premiums*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek	105.165	1.297	*Unrealised gain on increase in fair value of marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(150.275)	(41.191)	*Allowance for impairment losses*
	(36.281)	(20.908)	
Neto	**94.545.841**	**82.799.818**	***Net***

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

*) *Unit-link investments are investments owned by policyholders in Subsidiary unit-link contracts which are presented at fair value.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan golongan penerbit: / *By issuer:*

	2023	2022	
Efek-efek			*Marketable securities*
Bank Sentral	30.577.382	8.902.984	*Central Bank*
Perusahaan	29.818.539	32.788.198	*Corporate*
Pemerintah	11.770.096	11.992.849	*Government*
Bank	3.124.158	5.946.514	*Banks*
	75.290.175	59.630.545	
Investasi pada *unit-link* *)			*Investments in unit-link contracts* *)
Perusahaan	12.734.238	14.510.661	*Corporate*
Bank	6.546.720	8.661.604	*Banks*
Pemerintah	10.989	17.916	*Government*
	19.291.947	23.190.181	
Total	**94.582.122**	**82.820.726**	***Total***
Ditambah/(dikurangi):			*Add/(less):*
Premi yang belum diamortisasi	8.829	18.986	*Unamortised premiums*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek	105.165	1.297	*Unrealised gain on increase in fair value of marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(150.275)	(41.191)	*Allowance for impairment losses*
	(36.281)	(20.908)	
Neto	**94.545.841**	**82.799.818**	***Net***

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.

*) *Unit-link investments are investments owned by policyholders in Subsidiary unit-link contracts which are presented at fair value.*

e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat: / *Details of bonds by rating:*

	Peringkat*)/*Rating*)			Nilai wajar/biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/ at amortised cost*		
	Lembaga pemeringkat/ *Rating agencies*	2023	2022	2023	2022	
Rupiah						***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi						*Bonds*
Surat Perbendaharaan Negara**)	-	-	-	2.435.352	-	Surat Perbendaharaan Negara**)
Efek beragun aset						*Asset-backed security*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	idAAA	55.917	23.430	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
				2.491.269	23.430	
Investasi pada *unit-link* ***)						*Investment in unit-link contracts****)
Obligasi						*Bonds*
PT Federal International Finance	-	-	-	87.518	11.755	*PT Federal International Finance*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	-	-	73.807	54.628	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT XL Axiata Tbk	-	-	-	60.564	60.709	*PT XL Axiata Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	-	49.899	49.670	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*

*) Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's dan Fitch Ratings.

**) Tidak memiliki peringkat.

***) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar yang tidak diperingkat.

*) *Information on rating of bonds were obtained from Bloomberg, which is based on ratings issued by the rating agencies, such as Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's and Fitch Ratings.*

**) *No rating.*

***) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholder of unit link contracts of Subsidiary which are presented at fair value that is not rated.*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / *7. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat (lanjutan): / *e. Details of bonds by rating (continued):*

	Peringkat*)/*Rating*)			Nilai wajar/biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/ at amortised cost*		
	Lembaga pemeringkat/ *Rating agencies*	2023	2022	2023	2022	
Rupiah (lanjutan)						***Rupiah** (continued)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)						***Fair value through profit or loss** (continued)*
Investasi pada *unit-link* (lanjutan)***)						*Investment in unit-link contracts (continued)****)
Obligasi (lanjutan)						*Bonds (continued)*
PT Indosat Tbk	-	-	-	44.528	40.044	*PT Indosat Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	-	-	42.239	-	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	41.462	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	-	-	-	34.835	-	*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	-	32.385	31.959	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	32.247	-	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	-	-	26.739	10.685	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	-	-	25.895	21.303	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Mayora Indah Tbk	-	-	-	24.432	24.176	*PT Mayora Indah Tbk*
PT Bank Sulawesi Selatan dan Barat	-	-	-	21.848	21.834	*PT Bank Sulawesi Selatan dan Barat*
PT Oto Multiartha	-	-	-	20.994	-	*PT Oto Multiartha*
PT Toyota Astra Financial Services	-	-	-	11.003	-	*PT Toyota Astra Financial Services*
Surat Perbendaharaan Negara**)	-	-	-	10.989	17.916	*Surat Perbendaharaan Negara***)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	-	-	-	10.002	13.969	*PT Tower Bersama Infrastructure Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	-	-	-	-	15.979	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Medikaloka Hermina Tbk	-	-	-	-	10.114	*PT Medikaloka Hermina Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	-	-	-	41.323	23.565	*Others (each below Rp10,000)*
				692.709	408.306	
				3.183.978	431.736	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi						*Bonds*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	idAAA	706.321	1.022.102	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Ratings	AAA(idn)	AAA(idn)	380.819	383.126	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	Pefindo	idAAA(gg)	idAAA(gg)	328.452	339.166	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Pefindo	idA+	-	230.073	-	*PT Bukit Makmur Mandiri Utama*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Fitch Ratings	AAA(idn)	AAA(idn)	221.641	219.799	*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
PT Pegadaian	Pefindo	idAAA	idAAA	202.089	403.320	*PT Pegadaian*
PT XL Axiata Tbk	Fitch Ratings	AAA(idn)	AAA(idn)	124.002	122.597	*PT XL Axiata Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	idAAA	101.111	123.761	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	98.683	349.995	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	82.273	73.138	*PT Indosat Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Fitch Ratings	AA+(idn)	AA(idn)	75.950	158.587	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAA-	idAA-	72.109	71.479	*PT Chandra Asri Petrochemical Tbk*
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Fitch Ratings	AA+(idn)	AA+(idn)	64.354	40.079	*PT Tower Bersama Infrastructure Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	61.061	63.719	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	idAA+	60.534	59.834	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	54.620	56.121	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	50.332	51.953	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pefindo	idCCC	idA	39.496	40.207	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Mayora Indah Tbk	Pefindo	idAA	idAA	38.114	88.113	*PT Mayora Indah Tbk*

*) Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's dan Fitch Ratings.
**) Tidak memiliki peringkat.
***) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar yang tidak diperingkat.

*) *Information on rating of bonds were obtained from Bloomberg, which is based on ratings issued by the rating agencies, such as Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's and Fitch Ratings.*
**) *No rating.*
***) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholder of unit link contracts of Subsidiary which are presented at fair value that is not rated.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat (lanjutan):

7. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Details of bonds by rating (continued):

	Peringkat*)/*Rating*)			Nilai wajar/biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/ at amortised cost*		
	Lembaga pemeringkat/ *Rating agencies*	2023	2022	2023	2022	
Rupiah (lanjutan)						***Rupiah** (continued)*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)						***Fair value through other comprehensive income** (continued)*
Efek-efek (lanjutan)						*Marketable securities (continued)*
Obligasi (lanjutan)						*Bonds (continued)*
PT Maybank Indonesia Finance	Fitch Ratings	AAA(idn)	AA+ (idn)	35.222	36.597	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo	idAAA	-	16.008	-	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	-	idAA	-	200.924	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	Beragam	-	Beragam	-	5.008	*Others (each below Rp10,000)*
Obligasi syariah perusahaan						*Sharia corporate bonds*
PT Samudera Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	-	100.908	-	*PT Samudera Indonesia Tbk*
PT CIMB Niaga Auto Finance	Fitch Ratings	AA(idn)	-	19.981	-	*PT CIMB Niaga Auto Finance*
				3.164.153	3.909.625	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi						*Bonds*
PT Pelabuhan Indonesia IV	Pefindo	idAAA	idAAA	695.000	695.000	*PT Pelabuhan Indonesia IV*
PT Hutama Karya (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA(gg)	idAAA(gg)	580.018	580.024	*PT Hutama Karya (Persero) Tbk*
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAA-	idAA-	482.000	624.170	*PT Chandra Asri Petrochemical Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	idAAA	260.000	460.000	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Perusahaan Pengelola Aset	Pefindo	idAA	idAA	230.000	230.000	*PT Perusahaan Pengelola Aset*
PT Pegadaian	Pefindo	idAAA	-	150.000	-	*PT Pegadaian*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	idAA+	75.000	75.000	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pefindo	idA	idA	63.000	63.000	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	idAAA	50.000	20.000	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Perero) Tbk	Fitch Ratings	AA+(idn)	AA(idn)	49.000	49.000	*PT Bank Tabungan Negara (Perero) Tbk*
PT Federal International Finance	Pefindo	idAAA	-	33.000	-	*PT Federal International Finance*
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Pefindo	idA+	idA+	30.000	30.000	*PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk*
PT BFI Finance Indonesia	Fitch Rating	idAA-	-	30.000	-	*PT BFI Finance Indonesia*
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	idAAA	25.000	25.000	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	13.000	13.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Ratings	-	AAA(idn)	-	500.000	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pefindo	-	idAA-	-	160.000	*PT Jakarta Lingkar Baratsatu*
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Pefindo	-	idA	-	150.000	*PT Dharma Satya Nusantara Tbk*
PT Angkasa Pura II (Persero)	Pefindo	-	idAA+	-	140.000	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Industri Kereta Api (Persero)	Pefindo	-	idBBB+	-	101.106	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	-	idAAA	-	90.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Surat Perbendaharaan Negara**)	-	-	-	-	19.498	*Surat Perbendaharaan Negara**)*
Lain-lain (masing-masing Lain-lain di bawah Rp10.000)	Beragam	Beragam	Beragam	8.000	6.000	*Others (each below Rp10,000)*
Efek beragun aset						*Asset-backed security*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA(sf)	idAAA	68.874	102.732	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
				2.841.892	4.133.530	

*) Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's dan Fitch Ratings.

**) Tidak memiliki peringkat.

*) *Information on rating of bonds were obtained from Bloomberg, which is based on ratings issued by the rating agencies, such as Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's and Fitch Ratings.*

**) *No rating.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / *7. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat (lanjutan): / *e. Details of bonds by rating (continued):*

	Peringkat*)/*Rating*)			Nilai wajar/biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/ at amortised cost*		
	Lembaga pemeringkat/ *Rating agencies*	2023	2022	2023	2022	
Rupiah (lanjutan)						***Rupiah** (continued)*
Diukur pada biaya perolehan**						***At cost****
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi syariah perusahaan						*Sharia corporate bonds*
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	213.800	213.800	*PT Indosat Tbk*
PT XL Axiata Tbk	Fitch Ratings	AAA(idn)	AAA(idn)	195.000	195.000	*PT XL Axiata Tbk*
PT Medco Power Indonesia	Pefindo	idA	idA	150.000	150.000	*PT Medco Power Indonesia*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pefindo	idCCC	idA	99.000	99.000	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Global Mediacom Tbk	Pefindo	idA+	idA+	50.000	50.000	*PT Global Mediacom Tbk*
PT CIMB Niaga Auto Finance	Fitch Ratings	AA(idn)	-	45.000	-	*PT CIMB Niaga Auto Finance*
PT BPD Kalimantan Selatan	Fitch Ratings	A(idn)	A(idn)	35.000	35.000	*PT BPD Kalimantan Selatan*
				787.800	742.800	
Total				**9.977.823**	**9.217.691**	***Total***
Mata uang asing						***Foreign currencies***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi						*Bonds*
PT Sinbad Karya Perdagangan**)	-	-	-	113.418	74.575	*PT Sinbad Karya Perdagangan**)*
PT Millenio Amerta Data**)	-	-	-	26.454	-	*PT Millenio Amerta Data**)*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	-	-	-	-	8.657	*Others (each below Rp10,000)*
				139.872	83.232	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi						*Bonds*
PT Pertamina (Persero)	Moody's	Baa2	Baa2	590.108	3.546.179	*PT Pertamina (Persero)*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Fitch Ratings	BBB-	BBB-	423.949	429.622	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Moody's	Baa2	Baa2	242.663	293.180	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Moody's	Ba3	Ba3	150.121	141.747	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	S&P	BBB	BBB	83.366	83.786	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Saka Energi Indonesia	Moody's	B2	B2	76.004	74.071	*PT Saka Energi Indonesia*
Medco Platinium Road Pte. Ltd	Moody's	-	B1	-	66.393	*Medco Platinium Road Pte. Ltd*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Fitch Ratings	BBB	BBB-	61.286	241.368	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Moody's	Ba3	Ba3	47.886	50.970	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT ABM Investama Tbk	Fitch Ratings	B+	B+	36.182	34.456	*PT ABM Investama Tbk*
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Fitch Ratings	BB-	BB-	33.798	34.121	*PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Moody's	Baa2	Baa2	28.071	27.024	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Indika Energy Tbk	Moody's	Ba3	Ba3	23.255	23.457	*PT Indika Energy Tbk*
PT Delta Dunia Makmur Tbk	Moody's	Ba3	Ba3	22.063	20.200	*PT Delta Dunia Makmur Tbk*
Korea Development Bank	Moody's	Aa2	Aa2	14.863	14.783	*Korea Development Bank*
LMIRT Capital Pte. Ltd	Fitch Rating	B-	-	10.347	-	*LMIRT Capital Pte. Ltd*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	Beragam	Beragam	Beragam	29.098	30.427	*Others (each below Rp10,000)*
				1.873.060	5.111.784	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Efek-efek						*Marketable securities*
Obligasi						*Bonds*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Moodys	Baa3	BBB	226.328	157.778	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Fitch Ratings	BBB-	-	155.156	-	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia IV	Moody's	Baa3	Baa3	154.718	157.012	*PT Pelabuhan Indonesia IV*
PT Indonesia Infrastructure Finance	Moody's	Baa3	Baa3	84.706	41.239	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Moody's	Ba2	Ba2	77.669	80.534	*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*

*) Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's dan Fitch Ratings.
**) Tidak memiliki peringkat.
***) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar yang tidak diperingkat.

*) *Information on rating of bonds were obtained from Bloomberg, which is based on ratings issued by the rating agencies, such as Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's and Fitch Ratings.*
**) *No rating.*
***) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholder of unit link contracts of Subsidiary which are presented at fair value that is not rated.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat (lanjutan):

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

e. Details of bonds by rating (continued):

	Peringkat*)/*Rating*)			Nilai wajar/biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Fair value/at cost/ at amortised cost*		
	Lembaga pemeringkat/ *Rating agencies*	2023	2022	2023	2022	
Mata uang asing (lanjutan)						***Foreign currencies**(continued)*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)						***At amortised cost** (continued)*
Efek-efek (lanjutan)						*Marketable securities (continued)*
Obligasi (lanjutan)						*Bonds (continued)*
Medco Oak Tree Pte Ltd	Moody's	B1	B1	77.413	77.993	*Medco Oak Tree Pte Ltd*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Moody's	Baa2	Baa2	77.308	78.252	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Moody's	Ba2	Ba3	33.984	34.554	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Moody's	Baa3	Baa3	29.888	29.941	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	Moody's	Baa2	Baa2	29.204	28.810	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Moody's	Baa2	Baa2	15.414	15.668	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	S&P	-	BBB	-	231.022	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
				961.788	932.803	
Total				**2.974.720**	**6.127.819**	***Total***

*) Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's dan Fitch Ratings.

*) *Information on rating of bonds were obtained from Bloomberg, which is based on ratings issued by the rating agencies, such as Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Standard and Poor's, Moody's and Fitch Ratings.*

f. Tingkat suku bunga rata-rata (*yield*) per tahun:

f. Average interest rate (yield) per annum:

	2023	2022	
Rupiah	6,33%	5,35%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	3,84%	2,99%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek:

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan biaya perolehan:

g. Movements of allowance for impairment losses on marketable securities:

Movements of allowance for impairment losses on marketable securities measured at amortized cost and acquisition cost:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	41.191	99.504	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 46)	111.547	(22.775)	*Allowance/(reversal) during the year (Note 46)*
Lain-lain*)	(2.463)	(35.538)	*Others*)*
Saldo akhir tahun	**150.275**	**41.191**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currency translation.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek (lanjutan):

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan biaya perolehan (lanjutan):

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

g. Movements of allowance for impairment losses on marketable securities(continued):

Movements of allowance for impairment losses on marketable securities measured at amortized cost and acquisition cost (continued):

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	22.249	1.465	-	17.477	41.191	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.915)	(1.469)	8	114.972	111.596	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.732	-	-	-	1.732	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.781)	-	-	-	(1.781)	*Financial asset derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	(1.964)	(1.469)	8	114.972	111.547	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	(2.463)	-	-	-	(2.463)	*Others***)
Saldo akhir tahun	**17.822**	**(4)**	**8**	**132.449**	**150.275**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	53.908	27.406	115	18.075	99.504	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	17.085	(6.782)	(115)	(598)	9.590	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.031	16.811	-	-	19.842	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(16.237)	(35.970)	-	-	(52.207)	*Financial asset derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	3.879	(25.941)	(115)	(598)	(22.775)	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	(35.538)	-	-	-	(35.538)	*Others***)
Saldo akhir tahun	**22.249**	**1.465**	**-**	**17.477**	**41.191**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek (lanjutan):

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	9.230	13.354	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 46)	21.081	(4.124)	*Allowance/(reversal) during the year (Note 46)*
Lain-lain*)	-	-	*Others**)
Saldo akhir tahun	**30.311**	**9.230**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

g. Movements of allowance for impairment losses on marketable securities (continued):

Movements of allowance for impairment losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income:

*) *Included effect of foreign currency translation.*

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	9.230	-	-	-	9.230	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.525)	-	24.311	-	21.786	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(705)	-	-	-	(705)	*Financial asset derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	(3.230)	-	24.311	-	21.081	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	-	-	-	-	-	*Others***)
Saldo akhir tahun	**6.000**	**-**	**24.311**	**-**	**30.311**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	13.354	-	-	-	13.354	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(4.056)	-	-	-	(4.056)	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.146	-	-	-	1.146	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.214)	-	-	-	(1.214)	*Financial asset derecognised*
Total pembalikan tahun berjalan	(4.124)	-	-	-	(4.124)	*Total reversal during the year*
Lain-lain**)	-	-	-	-	-	*Others***)
Saldo akhir tahun	**9.230**	**-**	**-**	**-**	**9.230**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

h. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

i. Investasi dalam unit reksadana pada Bank Mandiri saja yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***7. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

h. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.

i. Investment in mutual fund of the Bank measured at fair value through other comprehensive income on 31 December 2023 and 2022:

	2023	2022	
Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 45	1.443.842	1.440.607	*Protected Mutual Fund Syailendra Capital Protected Fund 45*
Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama III	1.314.820	1.310.426	*Protected Mutual Fund Manulife Proteksi Dana Utama III*
Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 53	1.022.063	1.017.901	*Protected Mutual Fund Syailendra Capital Protected Fund 53*
Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 52	1.020.817	1.019.454	*Protected Mutual Fund Syailendra Capital Protected Fund 52*
Reksa Dana Terproteksi BNI AM Proteksi Orchid	1.011.260	1.007.620	*Protected Mutual Fund BNI AM Proteksi Orchid*
Reksa Dana Terproteksi BNI AM Proteksi Sunflower	1.009.474	1.009.308	*Protected Mutual Fund BNI AM Proteksi Sunflower*
Reksa Dana Trimegah Terproteksi 21	1.004.005	1.004.287	*Protected Mutual Fund Trimegah 21*
Reksa Dana Terproteksi Panin 17	993.148	993.279	*Protected Mutual Fund Panin 17*
Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Selaras VI	991.745	991.874	*Protected Mutual Fund BNP Paribas Selaras VI*
Reksa Dana Trimegah Terproteksi 24	910.894	908.311	*Protected Mutual Fund Trimegah 24*
Reksa Dana Terproteksi BNI AM Proteksi Rasamala	762.945	760.055	*Protected Mutual Fund BNI AM Proteksi Rasamala*
Reksa Dana Trimegah Terproteksi 26	761.277	757.075	*Protected Mutual Fund Trimegah 26*
Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama II	761.243	759.345	*Protected Mutual Fund Manulife Proteksi Dana Utama II*
Reksa Dana Terproteksi BNI AM Proteksi Magnifera	758.572	756.333	*Protected Mutual Fund BNI AM Proteksi Magnifera*
Reksa Dana Danareksa Proteksi 81	758.318	756.623	*Protected Mutual Fund Danareksa 81*
Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 46	755.171	754.502	*Protected Mutual Fund Syailendra Capital Protected Fund 46*
Reksa Dana Danareksa Proteksi 79	710.878	710.570	*Protected Mutual Fund Danareksa Proteksi 79*
Reksa Dana Terproteksi Panin 26	603.447	603.243	*Protected Mutual Fund Panin 26*
Reksa Dana Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 1	501.931	502.067	*Protected Mutual Fund BMI Indo Proteksi Sinergi 1*
Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Selaras V	501.059	501.138	*Protected Mutual Fund BNP Paribas Selaras V*
Reksa Dana Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 221	497.771	496.576	*Protected Mutual Fund Bahana Centrum Protected Fund 221*
Reksa Dana Terproteksi Bahana Centrum Protected Fund 222	494.800	493.521	*Protected Mutual Fund Bahana Centrum Protected Fund 222*
Reksa Dana Trimegah Terproteksi XI	-	490.047	*Protected Mutual Fund Trimegah XI*
	18.589.480	**19.044.162**	

j. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali masing-masing sebesar USD62.220.523 dan USD55.226.340 (nilai penuh) (Catatan 28).

j. As of 31 December 2023 and 2022, securities with total amount of USD62,220,523 (full amount) and USD55,226,340 (full amount), respectively were sold under repurchase agreements (Note 28).

8. OBLIGASI PEMERINTAH / *8. GOVERNMENT BONDS*

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh Grup dari pasar primer dan sekunder pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

This account consists of bonds issued by Government of the Republic of Indonesia which are obtained by the Group from primary and secondary markets as of 31 December 2023 and 2022, with details as follows:

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related party (Note 56)*
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	180.578.053	*At amortised cost*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ***)	90.640.924	92.532.086	*Fair value through other comprehensive income****)*
Diukur pada biaya perolehan*)	34.541.812	44.213.180	*At cost*)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.078.509	6.972.279	*Fair value through profit or loss*
Investasi pada *unit-link* **)			*Investments in unit-link contracts* **)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	8.726.970	4.916.166	*Fair value through profit or loss*
	309.182.971	**329.211.764**	

*) Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".
**) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.
***) Termasuk sukuk, *project based* sukuk dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*) *Government bonds owned by Subsidiary are classified based on SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*
**) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholders of unit-link contracts of Subsidiary which are presented at fair value.*
***) *Including sukuk, project-based sukuk and retail bonds which are classified as at fair value through other comprehensive income.*

a. Berdasarkan jatuh tempo / *a. By maturity*

Obligasi Pemerintah berdasarkan sisa umur jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The government bonds, by remaining period of maturity, are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	2.296.373	2.403.912	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	3.865.009	2.704.883	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	3.452.661	1.672.415	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	2.326.789	174.954	*Over 10 years*
	11.940.832	6.956.164	
Investasi pada *unit-link* **)			*Investments in unit-link***)*
Kurang dari 1 tahun	171.717	142.890	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	1.507.762	2.235.398	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	4.389.123	2.210.076	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	2.616.743	327.802	*Over 10 years*
	8.685.345	4.916.166	
	20.626.177	11.872.330	

*) Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".
**) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.
***) Termasuk sukuk, *project based* sukuk dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*) *Government bonds owned by Subsidiary are classified based on SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*
**) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholders of Subsidiary's unit-link contracts which are presented at fair value.*
***) *Including sukuk, project based sukuk and retail bonds which are classified as at fair value through other comprehensive income.*

8. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jatuh tempo (lanjutan)

Obligasi Pemerintah berdasarkan sisa umur jatuh temponya adalah sebagai berikut (lanjutan):

8. GOVERNMENT BONDS *(continued)*

a. By maturity (continued)

The government bonds, by remaining period of maturity, are as follows (continued):

	2023	2022	
Rupiah (lanjutan)			***Rupiah*** *(continued)*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ***			***Fair value through other comprehensive income****
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	8.640.353	2.214.055	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	10.414.314	17.502.539	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	37.604.603	37.341.218	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	6.642.427	5.588.365	*Over 10 years*
	63.301.697	62.646.177	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			***At amortised cost***
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	9.217.068	15.890.558	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	46.208.011	52.132.872	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	39.682.824	43.313.092	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	43.266.753	43.501.330	*Over 10 years*
	138.374.656	154.837.852	
Diukur pada biaya perolehan*			***At cost****
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	11.930.564	11.130.042	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	19.977.300	27.845.450	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	1.217.887	3.775.555	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	966.921	966.330	*Over 10 years*
	34.092.672	43.717.377	
Total	**256.395.202**	**273.073.736**	***Total***

*) Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".
**) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.
***) Termasuk sukuk, *project based* sukuk dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*) *Government bonds owned by Subsidiary are classified based on SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*
**) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholders of Subsidiary's unit-link contracts which are presented at fair value.*
***) *Including sukuk, project based sukuk and retail bonds which are classified as at fair value through other comprehensive income.*

8. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jatuh tempo (lanjutan)

Obligasi Pemerintah berdasarkan sisa umur jatuh temponya adalah sebagai berikut (lanjutan):

***8. GOVERNMENT BONDS** (continued)*

a. By maturity (continued)

The government bonds, by remaining period of maturity, are as follows (continued):

	2023	2022	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	7.901	-	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	123.814	14.914	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	1.607	-	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	4.355	1.201	*Over 10 years*
	137.677	16.115	
Investasi pada *unit-link* **)			*Investments in unit-link***)*
1 - 5 tahun	11.432	-	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	9.767	-	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	20.426	-	*Over 10 years*
	41.625	-	
	179.302	16.115	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	3.771.298	2.437.444	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	10.009.244	11.089.589	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	11.858.513	14.892.272	*5 - 10 Years*
Lebih dari 10 tahun	1.700.172	1.466.604	*Over 10 years*
	27.339.227	29.885.909	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			***At amortised cost***
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	271.475	406.571	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	5.363.620	4.080.521	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	18.944.752	20.988.875	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	240.253	264.234	*Over 10 years*
	24.820.100	25.740.201	
Diukur pada biaya perolehan*)			***At cost** *)*
Obligasi Pemerintah			*Government bonds*
Kurang dari 1 tahun	157.283	35.136	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	291.857	460.667	*1 - 5 years*
	449.140	495.803	
Total (Catatan 62.B.(iv))	**52.787.769**	**56.138.028**	***Total (Note 62.B.(iv))***
	309.182.971	**329.211.764**	

*) Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

*) *Government bonds owned by Subsidiary are classified based on SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *8. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	2023					
	Nominal/ biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Nominal/ cost/ at amortised cost*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*	Nilai wajar/ *Fair value*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity dates*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*	
Rupiah						***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	11.654.576	4,00% - 12,00%	11.823.146	15/02/2024 - 15/08/2051	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Obligasi suku bunga mengambang	116.437	6,04%	117.686	25/04/2025	3 bulan/*months*	*Floating rate bonds*
	11.771.013		11.940.832			
Investasi pada *unit-link**)						*Investments in unit-link contracts**)
Obligasi suku bunga tetap	8.685.345	4,00% - 10,50%	8.685.345	10/03/2024 - 15/08/2051	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain **)						***Fair value through other comprehensive income*****)
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	61.566.538	4,00% - 11,00%	63.301.697	15/02/2024 - 15/06/2047	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Mata uang asing						***Foreign currencies***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	137.526	3,20% - 5,95%	137.677	15/01/2024 - 23/09/2061	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*
Investasi pada *unit-link**)						*Investments in unit-link contracts**)
Obligasi suku bunga tetap	41.625	3,55% - 8,50%	41.625	08/01/2026 - 11/01/2048	1 dan 6 bulan/ 1 and 6 *months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	28.795.401	1,00% - 8,50%	27.339.227	15/01/2024 - 20/09/2052	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.
**) Termasuk sukuk, *project based* sukuk dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholders of unit-link contracts of Subsidiary which are presented at fair value.*
**) *Including sukuk, project-based sukuk and retail sukuk which are classified as at fair value through other comprehensive income.*

	2023				
	Nominal/ biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Nominal/ cost/ at amortised cost*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity dates*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***At amortised cost***
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	138.374.656	4,00% - 12,00%	15/02/2024 - 15/06/2042	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada biaya perolehan*)					***At cost****)
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	34.092.672	4,00% - 10,25%	10/03/2024 - 15/04/2043	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***At amortised cost***
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	24.820.100	1,50% - 8,50%	15/01/2024 - 17/02/2037	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada biaya perolehan*)					***At cost****)
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	449.140	2,30% - 4,40%	10/09/2024 - 06/06/2027	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*

*) Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

*) *Government bonds owned by Subsidiary are classified based on SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*

8. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *8. GOVERNMENT BONDS (continued)*

b. Berdasarkan jenis (lanjutan) / *b. By type (continued)*

	2022					
	Nominal/ biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Nominal/ cost/ at amortised cost*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*	Nilai wajar/ *Fair value*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity dates*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*	
Rupiah						***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	6.811.770	4,00% - 12,00%	6.838.806	10/03/2023 – 15/08/2051	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Obligasi suku bunga mengambang	116.437	4,79%	117.358	25/04/2025	3 bulan/*months*	*Floating rate bonds*
	6.928.207		6.956.164			
Investasi pada *unit-link**)						*Investments in unit-link contracts**)
Obligasi suku bunga tetap	4.916.166	4,00% - 11,00%	4.916.166	10/03/2023 – 15/08/2051	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**)						***Fair value through other comprehensive income*****)
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	60.705.506	4,00% - 11,00%	62.646.177	15/05/2023 – 15/02/2044	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Mata uang asing						***Foreign currencies***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						***Fair value through profit or loss***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	15.941	4,45% - 5,13%	16.115	11/02/2024 – 08/01/2045	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah						*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	31.323.436	1,00% - 8,50%	29.885.909	11/01/2023 – 20/09/2052	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*

*) Investasi pada *unit-link* adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar.
**) Termasuk sukuk, *project based* sukuk dan sukuk ritel yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*) *Investments in unit-link contracts are investments owned by policyholders of unit-link contracts of Subsidiary which are presented at fair value.*
**) *Including sukuk, project-based sukuk and retail sukuk which are classified as at fair value through other comprehensive income.*

	2022				
	Nominal/ biaya perolehan/ biaya perolehan diamortisasi/ *Nominal/ cost/ at amortised cost*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rates per annum*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity dates*	Frekuensi pembayaran bunga/ *Frequency of interest payment*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***At amortised cost***
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	154.837.852	4,00% - 12,00%	15/05/2023 - 15/06/2042	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada biaya perolehan*)					***At cost****)
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	43.717.377	4,00% - 10,25%	10/03/2023 – 15/04/2043	1 dan 6 bulan/ *1 and 6 months*	*Fixed rate bonds*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***At amortised cost***
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	25.740.201	1,50% - 8,50%	17/10/2023 – 17/02/2037	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*
Diukur pada biaya perolehan*)					***At cost****)
Obligasi Pemerintah					*Government bonds*
Obligasi suku bunga tetap	495.803	2,30% - 4,40%	01/03/2023 – 06/06/2027	6 bulan/*months*	*Fixed rate bonds*

*) Obligasi Pemerintah yang dimiliki Entitas Anak yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

*) *Government bonds owned by Subsidiary are classified based on SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*

8. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal USD2.245.768.868 (nilai penuh) dan RpNihil (31 Desember 2022: USD1.540.153.393 (nilai penuh) dan Rp1.170.000) telah dijual dengan janji untuk dibeli kembali (Catatan 28).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kolektibilitas Bank Indonesia untuk Obligasi Pemerintah adalah lancar.

***8. GOVERNMENT BONDS** (continued)*

c. Other information

As of 31 December 2023, Government Bonds with total nominal amount of USD2,245,768,868 (full amount) and RpNil (31 December 2022: USD1,540,153,393 (full amount) and Rp1,170,000) were sold under repurchase agreements (Note 28).

As of 31 December 2023 and 2022, Bank Indonesia's collectibility for government bonds is current.

9. TAGIHAN LAINNYA – TRANSAKSI PERDAGANGAN

a. Berdasarkan jenis, mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

9. OTHER RECEIVABLES – TRADE TRANSACTIONS

a. By type, currency, related parties and third parties:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Usance L/C payable at sight	218.270	825.810	*Usance L/C payable at sight*
Tagihan *Supplier Chain Financing*	1.677.687	8.037.934	*Supplier Chain Financing receivables*
Lain-lain	5.253.511	4.715.835	*Others*
	7.149.468	13.579.579	
Pihak ketiga			*Third parties*
Usance L/C payable at sight	1.550.710	1.607.332	*Usance L/C payable at sight*
Tagihan *Supplier Chain Financing*	1.261.694	1.136.264	*Supplier Chain Financing receivables*
Lain-lain	4.004.912	5.048.128	*Others*
	6.817.316	7.791.724	
Total Rupiah	13.966.784	21.371.303	*Total Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Usance L/C payable at sight	385.238	1.508.552	*Usance L/C payable at sight*
Tagihan *Supplier Chain Financing*	44.146	44.635	*Supplier Chain Financing receivables*
Lain-lain	2.661	24.853	*Others*
	432.045	1.578.040	
Pihak ketiga			*Third parties*
Usance L/C payable at sight	4.682.301	3.189.451	*Usance L/C payable at sight*
Lain-lain	6.963.423	7.654.470	*Others*
	11.645.724	10.843.921	
Total mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	12.077.769	12.421.961	*Total foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	26.044.553	33.793.264	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.494.653)	(1.604.705)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**24.549.900**	**32.188.559**	***Net***

9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan):

Berikut adalah perubahan nilai tercatat tagihan lainnya - transaksi perdagangan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

9. OTHER RECEIVABLES - TRADE TRANSACTIONS *(continued)*

a. By type, currency, related parties and third parties (continued):

Movements in carrying amount of other receivables - trade transactions classified as at amortised cost upon stages for the year ended 31 December 2023 and 2022:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	31.593.450	825.526	1.239.865	134.423	33.793.264	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
- *Stage* 1	1.041.364	(1.041.364)	-	-	-	*Stage 1* -
- *Stage* 2	(2.438.768)	2.438.768	-	-	-	*Stage 2* -
Total saldo awal setelah pengalihan	30.196.046	2.222.930	1.239.865	134.423	33.793.264	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.148.854)	(9.360)	(11.845)	138.502	(1.031.557)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	65.805.749	4.060.289	31.584	-	69.897.622	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(70.779.392)	(5.947.900)	(36.328)	-	(76.763.620)	*Financial assets derecognised*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(6.122.497)	(1.896.971)	(16.589)	138.502	(7.897.555)	*Total increase/(decrease) during the year*
Lain-lain**)	(23.232)	179.751	(7.675)	-	148.844	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**24.050.317**	**505.710**	**1.215.601**	**272.925**	**26.044.553**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	26.691.743	1.330.830	1.194.442	81.253	29.298.268	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(451.536)	1.770	91.355	-	(358.411)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	78.200.295	3.561.436	53.721	53.170	81.868.622	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(72.827.760)	(4.659.222)	(55.714)	-	(77.542.696)	*Financial assets derecognised*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	4.920.999	(1.096.016)	89.362	53.170	3.967.515	*Total increase/(decrease) during the year*
Lain-lain**)	(19.292)	590.712	(43.939)	-	527.481	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**31.593.450**	**825.526**	**1.239.865**	**134.423**	**33.793.264**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN (lanjutan)

9. OTHER RECEIVABLES - TRADE TRANSACTIONS *(continued)*

b. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia:

b. By Bank Indonesia's collectibility:

	2023	2022	
Lancar	24.539.740	32.250.518	*Current*
Dalam perhatian khusus	245.783	259.452	*Special mention*
Kurang lancar	-	12.419	*Substandard*
Macet	1.259.030	1.270.875	*Loss*
Total	26.044.553	33.793.264	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.494.653)	(1.604.705)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**24.549.900**	**32.188.559**	***Net***

c. Berdasarkan jatuh tempo:

c. By maturity:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	3.531.550	4.914.242	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	4.867.395	8.979.096	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	5.269.170	6.189.972	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	109.296	1.098.620	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	189.373	189.373	*Over 12 months*
Total Rupiah	13.966.784	21.371.303	*Total Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 bulan	1.872.337	2.835.630	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	6.980.224	4.749.700	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	2.010.227	3.754.340	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	145.324	789	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	1.069.657	1.081.502	*Over 12 months*
Total Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	12.077.769	12.421.961	*Total foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	26.044.553	33.793.264	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.494.653)	(1.604.705)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**24.549.900**	**32.188.559**	***Net***

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan:

d. Movements of allowance for impairment losses on other receivables - trade transactions:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	1.604.705	1.480.721	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 46)	(91.037)	27.813	*Allowance/(reversal) during the year (Note 46)*
Lain-lain*)	(19.015)	96.171	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**1.494.653**	**1.604.705**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currency translation.*

9. TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN (lanjutan)

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya - transaksi perdagangan (lanjutan):

9. OTHER RECEIVABLES - TRADE TRANSACTIONS *(continued)*

d. Movements of allowance for impairment losses on other receivables - trade transactions (continued):

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	81.376	239.125	1.239.865	44.339	1.604.705	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	10.144	(10.144)	-	-	-	*- 12 months expected credit (stage 1) losses*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(17.497)	17.497	-	-	-	*- Lifetime expected credit losses - unimpaired (stage 2)*
Total saldo awal setelah pengalihan	74.023	246.478	1.239.865	44.339	1.604.705	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(32.018)	35.897	4.095	1.385	9.359	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	115.354	557.668	20.157	-	693.179	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(101.944)	(659.062)	(32.569)	-	(793.575)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	(18.608)	(65.497)	(8.317)	1.385	(91.037)	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	(723)	(2.344)	(15.947)	(1)	(19.015)	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**54.692**	**178.637**	**1.215.601**	**45.723**	**1.494.653**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	56.248	185.603	1.194.442	44.428	1.480.721	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(21.417)	27.346	(28.934)	(89)	(23.094)	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	146.377	522.221	53.721	-	722.319	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(104.869)	(510.854)	(55.689)	-	(671.412)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	20.091	38.713	(30.902)	(89)	27.813	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	5.037	14.809	76.325	-	96.171	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**81.376**	**239.125**	**1.239.865**	**44.339**	**1.604.705**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71.
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya -transaksi perdagangan telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables - trade transactions is adequate.

e. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

e. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.

10. TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI / *10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL*

a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased under agreements to resell*

	2023					
Jenis efek	**Tanggal dimulai/ *Starting date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Nilai jual Kembali/ *Resale amount***	**Pendapatan bunga belum direalisasi/ *Unamortised interest***	**Nilai Neto/ *Carrying amount***	***Type of securities***
Pihak ketiga						*Third parties*
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi VR0062	28/12/2023	04/01/2024	11.907.162	5.946	11.901.216	*Bond VR0062*
Obligasi VR0042	29/12/2023	05/01/2024	2.565.178	1.709	2.563.469	*Bond VR0042*
Obligasi VR0038	27/12/2023	03/01/2024	1.770.679	589	1.770.090	*Bond VR0038*
Obligasi VR0054	28/12/2023	04/01/2024	957.852	478	957.374	*Bond VR0054*
Obligasi FR0087	28/12/2023	04/01/2024	662.669	344	662.325	*Bond FR0087*
Obligasi VR0034	27/12/2023	03/01/2024	619.961	206	619.755	*Bond VR0034*
Obligasi FR0059	28/12/2023	04/01/2024	487.541	254	487.287	*Bond FR0059*
Obligasi FR0081	28/12/2023	04/01/2024	477.183	248	476.935	*Bond FR0081*
Obligasi FR0086	29/12/2023	02/01/2024	471.749	77	471.672	*Bond FR0086*
SBI IDSR151124364S	28/12/2023	04/01/2024	471.352	246	471.106	*SBI IDSR151124364S*
Obligasi FR0090	28/12/2023	04/01/2024	462.878	241	462.637	*Bond FR0090*
Obligasi FR0084	28/12/2023	04/01/2024	298.038	156	297.882	*Bond FR0084*
Obligasi FR0100	28/12/2023	04/01/2024	286.974	149	286.825	*Bond FR0100*
Obligasi FR0064	28/12/2023	03/01/2024	283.618	99	283.519	*Bond FR0064*
Obligasi FR0040	27/12/2023	02/01/2024	211.067	36	211.031	*Bond FR0040*
Obligasi FR0081	21/12/2023	04/01/2024	190.774	103	190.671	*Bond FR0081*
Obligasi VR0050	27/12/2023	03/01/2024	96.094	32	96.062	*Bond VR0050*
Saham BMRI	31/08/2023	27/02/2024	810	-	810	*Share BMRI*
Saham BMRI	28/08/2023	23/02/2024	526	-	526	*Share BMRI*
Saham ACES	18/08/2023	14/02/2024	414	1	413	*Share ACES*
Saham ACES	08/12/2023	05/06/2024	303	-	303	*Share ACES*
Obligasi ORI021	27/07/2023	23/01/2024	302	-	302	*Bond ORI021*
Saham WTON	25/09/2023	22/03/2024	282	-	282	*Share WTON*
Saham GGRM	25/09/2023	22/03/2024	263	-	263	*Share GGRM*
Saham BMRI	04/10/2023	01/04/2024	259	-	259	*Share BMRI*
Saham BMRI	27/10/2023	24/04/2024	205	-	205	*Share BMRI*
Saham UNTR	25/07/2023	19/01/2024	185	-	185	*Share UNTR*
Saham BBTN	05/10/2023	02/04/2024	150	-	150	*Share BBTN*
Saham BSDE	25/09/2023	22/03/2024	126	-	126	*Share BSDE*
Saham PWON	25/09/2023	22/03/2024	117	-	117	*Share PWON*
Saham BBTN	25/09/2023	22/03/2024	97	-	97	*Share BBTN*
Saham HMSP	25/09/2023	22/03/2024	88	1	87	*Share HMSP*
Saham ITMG	26/07/2023	22/01/2024	59	-	59	*Share ITMG*
Saham PTBA	13/07/2023	09/01/2024	57	-	57	*Share PTBA*
Saham BJBR	02/11/2023	30/04/2024	56	-	56	*Share BJBR*
Saham PTBA	30/08/2023	26/02/2024	51	-	51	*Share PTBA*
Saham BMRI	26/07/2023	22/01/2024	45	-	45	*Share BMRI*
Saham BBTN	25/07/2023	19/01/2024	33	-	33	*Share BBTN*
Obligasi ORI020	27/07/2023	23/01/2024	33	-	33	*Bond ORI020*
Saham PTBA	14/07/2023	10/01/2024	15	-	15	*Share PTBA*
Obligasi ORI022	27/07/2023	23/01/2024	15	-	15	*Bond ORI022*
Obligasi SR017	27/07/2023	23/01/2024	15	-	15	*Bond SR017*
Saham TOTL	14/07/2023	10/01/2024	14	1	13	*Share TOTL*
Saham HEXA	14/07/2023	10/01/2024	12	-	12	*Share HEXA*
Saham MTEL	14/07/2023	10/01/2024	11	-	11	*Share MTEL*
Saham GGRM	14/07/2023	10/01/2024	5	-	5	*Share GGRM*
Saham ARCI	14/07/2023	10/01/2024	2	-	2	*Share ARCI*
Saham BJTM	14/07/2023	10/01/2024	2	-	2	*Share BJTM*
			22.225.321	10.916	22.214.405	
Pihak ketiga						*Third parties*
Mata uang asing						*Foreign currencies*
Obligasi FR0082	12/12/2023	12/01/2024	479.361	838	478.523	*Bond FR0082*
Total			**22.704.682**	**11.754**	**22.692.928**	***Total***

10. TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (lanjutan)

10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)

a. Securities purchased under agreements to resell (continued)

	2022					
Jenis efek	**Tanggal dimulai/ *Starting date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Nilai jual kembali/ *Resale amount***	**Pendapatan bunga belum direalisasi/ *Unamortised interest***	**Nilai neto/ *Carrying amount***	***Type of securities***
Pihak ketiga						*Third parties*
Rupiah						*Rupiah*
Obligasi FR0081	30/12/2022	03/01/2023	962.762	288	962.474	*Bond FR0081*
Obligasi VR0034	30/12/2022	06/01/2023	957.562	731	956.831	*Bond VR0034*
Obligasi VR0034	26/12/2022	02/01/2023	956.758	146	956.612	*Bond VR0034*
Obligasi VR0086	29/12/2022	12/01/2023	648.562	1.137	647.425	*Bond VR0086*
Obligasi VR0034	26/12/2022	02/01/2023	642.721	98	642.623	*Bond VR0034*
Obligasi VR0057	29/12/2022	26/01/2023	607.464	2.519	604.945	*Bond VR0057*
Obligasi FR0046	30/12/2022	02/01/2023	523.231	72	523.159	*Bond FR0046*
Obligasi FR0059	29/12/2022	03/01/2023	492.316	153	492.163	*Bond FR0059*
Obligasi VR0044	26/12/2022	23/01/2023	483.408	1.764	481.644	*Bond VR0044*
Obligasi VR0077	23/12/2022	20/01/2023	470.342	1.483	468.859	*Bond VR0077*
Obligasi VR0053	26/12/2022	09/01/2023	467.804	596	467.208	*Bond VR0053*
Obligasi FR0081	29/12/2022	02/01/2023	385.142	57	385.085	*Bond FR0081*
Obligasi FR0059	22/12/2022	02/01/2023	344.491	54	344.437	*Bond FR0059*
Obligasi VR0064	28/12/2022	25/01/2023	334.470	1.332	333.138	*Bond VR0064*
Obligasi FR0072	29/12/2022	03/01/2023	309.004	94	308.910	*Bond FR0072*
Obligasi VR0075	28/12/2022	11/01/2023	281.742	449	281.293	*Bond VR0075*
Obligasi VR0065	30/12/2022	27/01/2023	279.264	1.204	278.060	*Bond VR0065*
Obligasi VR0037	27/12/2022	24/01/2023	233.831	893	232.938	*Bond VR0037*
Obligasi FR0059	23/12/2022	02/01/2023	196.492	32	196.460	*Bond FR0059*
Obligasi VR0042	27/12/2022	03/01/2023	190.175	58	190.117	*Bond VR0042*
Obligasi FR0080	28/12/2022	04/01/2023	187.434	90	187.344	*Bond FR0080*
Obligasi VR0079	12/12/2022	09/01/2023	186.245	237	186.008	*Bond VR0079*
Obligasi VR0041	20/12/2022	17/01/2023	186.442	474	185.968	*Bond VR0041*
Obligasi VR0068	07/12/2022	04/01/2023	185.909	88	185.821	*Bond VR0068*
Obligasi FR0087	07/12/2022	09/01/2023	185.351	240	185.111	*Bond FR0087*
Obligasi VR0048	27/12/2022	10/01/2023	144.332	207	144.125	*Bond VR0048*
Obligasi VR0084	06/12/2022	03/01/2023	139.558	44	139.514	*Bond VR0084*
Obligasi VR0069	15/12/2022	12/01/2023	139.605	245	139.360	*Bond VR0069*
Obligasi VR0038	26/12/2022	02/01/2023	122.423	19	122.404	*Bond VR0038*
Obligasi VR0073	08/12/2022	05/01/2023	117.276	75	117.201	*Bond VR0073*
Obligasi VR0049	13/12/2022	10/01/2023	93.689	134	93.555	*Bond VR0049*
Obligasi VR0068	14/12/2022	11/01/2023	93.053	148	92.905	*Bond VR0068*
Obligasi FR0046	10/11/2022	09/02/2023	31.624	193	31.431	*Bond FR0046*
Obligasi FR0088	01/12/2022	02/03/2023	26.851	275	26.576	*Bond FR0088*
Obligasi FR0059	06/12/2022	07/03/2023	19.831	220	19.611	*Bond FR0059*
Obligasi FR0059	29/12/2022	30/03/2023	19.949	309	19.640	*Bond FR0059*
Obligasi FR0059	27/12/2022	28/03/2023	19.910	301	19.609	*Bond FR0059*
Obligasi FR0059	01/11/2022	31/01/2023	19.690	93	19.597	*Bond FR0059*
Obligasi FR0059	13/12/2022	14/03/2023	19.838	243	19.595	*Bond FR0059*
Obligasi FR0046	22/11/2022	21/02/2023	10.544	91	10.453	*Bond FR0046*
Saham PTBA	01/12/2022	30/05/2023	1.535	1	1.534	*Share PTBA*
Saham ITMG	01/12/2022	30/05/2023	1.308	1	1.307	*Share ITMG*
Saham BMRI	22/09/2022	21/03/2023	780	-	780	*Share BMRI*
Saham BMRI	06/09/2022	03/03/2023	714	2	712	*Share BMRI*
Saham WTON	23/09/2022	22/03/2023	338	1	337	*Share WTON*
Saham GGRM	23/09/2022	22/03/2023	239	-	239	*Share GGRM*
Saham BMRI	13/10/2022	11/04/2023	207	-	207	*Share BMRI*
Saham ITMG	10/11/2022	09/05/2023	205	-	205	*Share ITMG*
Saham PWON	23/09/2022	22/03/2023	104	-	104	*Share PWON*
Saham ITMG	16/12/2022	14/06/2023	101	-	101	*Share ITMG*
Saham BSDE	23/09/2022	22/03/2023	99	-	99	*Share BSDE*
Saham BBTN	23/09/2022	22/03/2023	94	1	93	*Share BBTN*
Saham BDMN	23/09/2022	22/03/2023	62	-	62	*Share BDMN*
Total			**11.722.881**	**16.892**	**11.705.989**	***Total***

10. TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (lanjutan)

Berikut adalah perubahan tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi yang seluruhnya adalah klasifikasi *stage* 1 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL** (continued)*

a. Securities purchased under agreements to resell (continued)

Changes in carrying amount of securities purchased under agreements to resell classified as at amortised cost upon stage 1 for the year ended 31 December 2023 and 2022:

	2023			
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying amount*	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	**Nilai tercatat/ *Carrying amount***	
Biaya perolehan diamortisasi				***At amortised cost***
Saldo awal tahun	11.705.989	-	11.705.989	*Beginning balance*
Aset keuangan yang baru dibeli	61.217.202	-	61.217.202	*New purchased financial assets*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(50.230.263)	-	(50.230.263)	*Matured or sold financial assets*
Saldo akhir tahun	**22.692.928**	**-**	**22.692.928**	***Ending balance***

	2022			
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying amount*	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	**Nilai tercatat/ *Carrying Amount***	
Biaya perolehan diamortisasi				***At amortised cost***
Saldo awal tahun	27.317.000	-	27.317.000	*Beginning balance*
Aset keuangan yang baru dibeli	35.103.557	-	35.103.557	*New purchased financial assets*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(50.714.568)	-	(50.714.568)	*Matured or sold financial assets*
Saldo akhir tahun	**11.705.989**	**-**	**11.705.989**	***Ending balance***

b. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia:

b. By Bank Indonesia's collectibility:

	2023	**2022**	
Lancar	22.692.928	11.705.989	*Current*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak dibentuk.

As of 31 December 2023 and 2022, there was no impairment therefore the allowance for impairment losses on securities purchased under agreements to resell was not provided.

c. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

c. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF / *11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES*

Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2023, the summary of derivative transactions is as follows:

Transaksi / *Transactions*	2023		
		Nilai wajar/*Fair value*	
	Nilai kontrak (absolut setara Rupiah)/ *Notional amount (absolute Rupiah equivalent)*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*
Pihak berelasi (Catatan 56) / ***Related parties (Note 56)***			
Terkait nilai tukar / *Foreign currencies related*			
Kontrak berjangka - beli / *Forward - buy*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	229.975	1.777	773
Lain-lain / *Others*	119.107	675	-
Kontrak berjangka - jual / *Forward - sell*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	25.172.445	151.868	3.154
Swap - beli / *Swap - buy*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	7.628.299	11.057	47.997
Swap - jual / *Swap - sell*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	1.151.762	5.332	903
Terkait suku bunga / *Interest rate related*			
Swap - suku bunga / *Swap - interest rate*			
Lain-lain / *Others*	3.891.861	27.447	23.577
Total pihak berelasi / *Total related parties*		198.156	76.404
Pihak ketiga / ***Third parties***			
Terkait nilai tukar / *Foreign currencies related*			
Kontrak berjangka - beli / *Forward - buy*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	17.616.297	905	210.053
Lain-lain / *Others*	3.177.333	55.679	675
Kontrak berjangka - jual / *Forward - sell*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	3.577.577	30.646	1.961
Lain-lain / *Others*	1.639.901	763	11.159
Swap - beli / *Swap - buy*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	49.802.975	200.109	327.435
Lain-lain / *Others*	1.803.780	36.196	5.581
Swap - jual / *Swap - sell*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	43.657.158	265.592	163.798
Lain-lain / *Others*	3.647.738	961	37.020
Option - beli / *Option - buy*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	669.770	53.594	-
Lain-lain / *Others*	-	-	-
Option - jual / *Option - sell*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	669.770	-	30.247
Terkait suku bunga / *Interest rate related*			
Swap - suku bunga / *Swap - interest rate*			
Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar*	31.506.681	590.710	535.912
Lain-lain / *Others*	40.387.460	561.435	713.608
Bond forward - beli / *Bond forward - buy*			
Lain-lain / *Others*	130.000	185	-
Total pihak ketiga / *Total third parties*		1.796.775	2.037.449
Total / ***Total***		**1.994.931**	**2.113.853**

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / *11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (lanjutan):

As of 31 December 2023, the summary of derivative transactions is as follows (continued):

Transaksi	2022			*Transactions*
	Nilai kontrak (absolut setara Rupiah)/ *Notional amount (absolute Rupiah equivalent)*	Nilai wajar/*Fair value*		
		Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	
Pihak berelasi (Catatan 56)				***Related parties (Note 56)***
Terkait nilai tukar				*Foreign currencies related*
Kontrak berjangka - jual				*Forward - sell*
Dolar Amerika Serikat	15.548.789	70.752	36.162	*United States Dollar*
Swap - beli				*Swap - buy*
Dolar Amerika Serikat	8.305.950	22.603	40.550	*United States Dollar*
Swap - jual				*Swap - sell*
Dolar Amerika Serikat	6.665.074	16.853	4.278	*United States Dollar*
Terkait suku bunga				*Interest rate related*
Swap - suku bunga				*Swap - interest rate*
Lain-lain	2.509.848	-	5.943	*Others*
Total pihak berelasi		110.208	86.933	*Total related parties*
Pihak ketiga				***Third parties***
Terkait nilai tukar				*Foreign currencies related*
Kontrak berjangka - beli				*Forward - buy*
Dolar Amerika Serikat	11.666.015	37.466	48.713	*United States Dollar*
Lain-lain	1.805.690	13.836	262	*Others*
Kontrak berjangka - jual				*Forward - sell*
Dolar Amerika Serikat	3.596.162	14.538	3.926	*United States Dollar*
Lain-lain	370.291	6.822	3.064	*Others*
Swap - beli				*Swap - buy*
Dolar Amerika Serikat	14.874.295	326.768	39.431	*United States Dollar*
Lain-lain	2.904.801	15.223	-	*Others*
Swap - jual				*Swap - sell*
Dolar Amerika Serikat	46.564.762	223.497	217.298	*United States Dollar*
Lain-lain	4.584.102	2.700	15.429	*Others*
Option - beli				*Option - buy*
Dolar Amerika Serikat	677.186	63.704	-	*United States Dollar*
Lain-lain	140.000	75.909	-	*Others*
Option - jual				*Option - sell*
Dolar Amerika Serikat	2.233.936	-	22.536	*United States Dollar*
Terkait suku bunga				*Interest rate related*
Swap - suku bunga				*Swap - interest rate*
Dolar Amerika Serikat	43.040.207	1.000.397	777.352	*United States Dollar*
Lain-lain	42.474.817	361.073	911.825	*Others*
Total pihak ketiga		2.141.933	2.039.836	*Total third parties*
Total		**2.252.141**	**2.126.769**	***Total***

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Entitas Anak memiliki kontrak *swap* nilai tukar dan suku bunga yang memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Keuntungan/kerugian atas perubahan nilai wajar sehubungan dengan bagian efektif dari arus kas lindung nilai diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kolektibilitas Bank Indonesia untuk tagihan derivatif adalah lancar.

11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES *(continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, the Subsidiary has cross currency and interest rate swap contracts which meet the criteria and effectively applied as cashflow hedge. The gain/loss from fair value changes related to effective portion of cashflow hedge are recognised as other comprehensive income.

As of 31 December 2023 and 2022, the Bank Indonesia collectability for derivative receivables is current.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas:

a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING

A. Details of loans and sharia receivables/financing:

a. By currency, related parties and third parties:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)	167.743.045	148.421.175	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga*)	932.992.618	793.534.679	*Third parties**)
Total	1.100.735.663	941.955.854	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)	70.337.975	50.964.371	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga**)	188.758.557	179.679.657	*Third parties***)
Total (Catatan 62.B.(iv))	259.096.532	230.644.028	*Total (Note 62.B.(iv))*
	1.359.832.195	1.172.599.882	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(53.098.619)	(64.612.645)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.306.733.576**	**1.107.987.237**	***Net***

*) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "pihak ketiga" pada mata uang Rupiah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp345.413 dan Rp341.552.

**) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "pihak ketiga" pada mata uang asing per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.157.635 dan Rp158.497.

*) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "third party" category in Rupiah currency as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp345,413 and Rp341,552, respectively.*

**) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "third party" category in foreign currencies as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp2,157,635 and Rp158,497, respectively.*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan) / *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)*

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan): / *Details of loans and sharia receivables/financing (continued):*

b. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas Bank Indonesia: / *By type and Bank Indonesia's collectibility:*

2023

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							*Rupiah*
Modal kerja	316.785.774	16.650.280	1.089.742	1.844.987	3.380.063	339.750.846	*Working capital*
Konsumen	284.907.917	10.905.841	1.602.292	1.766.055	1.787.444	300.969.549	*Consumer*
Investasi*)	256.040.232	7.996.955	479.367	751.776	557.217	265.825.547	*Investment*)
Program pemerintah	82.634.275	2.333.056	320.372	362.568	246.081	85.896.352	*Government program*
Sindikasi	57.613.732	553.493	-	-	-	58.167.225	*Syndication*
Karyawan	44.768.536	170.995	18	416	11.784	44.951.749	*Employees*
Ekspor	5.100.758	18.596	-	-	55.041	5.174.395	*Export*
Total	1.047.851.224	38.629.216	3.491.791	4.725.802	6.037.630	1.100.735.663	*Total*
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Investasi	119.995.135	5.390.280	-	-	939.931	126.325.346	*Investment*
Sindikasi**)	67.864.704	3.873.273	333.794	-	-	72.071.771	*Syndication***)
Modal kerja	42.753.144	4.583.064	-	512.217	86.490	47.934.915	*Working capital*
Ekspor	10.590.111	-	-	-	5.842	10.595.953	*Export*
Konsumen	2.166.147	2.306	-	-	94	2.168.547	*Consumer*
Total (Catatan 62.B.(iv))	243.369.241	13.848.923	333.794	512.217	1.032.357	259.096.532	*Total (Note 62.B.(iv))*
	1.291.220.465	52.478.139	3.825.585	5.238.019	7.069.987	1.359.832.195	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(22.594.287)	(18.800.031)	(1.892.707)	(3.606.428)	(6.205.166)	(53.098.619)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.268.626.178**	**33.678.108**	**1.932.878**	**1.631.591**	**864.821**	**1.306.733.576**	***Net***

*) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang Rupiah dengan jenis kredit investasi sebesar Rp345.413.

**) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang asing dengan jenis kredit sindikasi sebesar Rp2.157.635.

*) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the category of "current collectability" in the Rupiah currency with the type of investment credit of Rp345,413.*

**) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "current collectability" category in foreign currencies with a syndication loan type of Rp2,157,635.*

2022

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							*Rupiah*
Modal kerja	250.991.964	10.697.514	979.736	3.063.325	6.645.262	272.377.801	*Working capital*
Konsumen	251.098.043	8.102.973	1.167.506	1.193.778	1.687.887	263.250.187	*Consumer*
Investasi*)	226.470.307	7.911.481	317.884	1.077.416	2.200.218	237.977.306	*Investment*)
Program pemerintah	77.896.456	1.754.495	187.519	252.912	302.022	80.393.404	*Government program*
Sindikasi	40.711.583	553.493	-	-	-	41.265.076	*Syndication*
Karyawan	41.178.248	142.355	241	243	11.438	41.332.525	*Employees*
Ekspor	5.146.401	210.021	-	1.297	1.836	5.359.555	*Export*
Total	893.493.002	29.372.332	2.652.886	5.588.971	10.848.663	941.955.854	*Total*
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Investasi	108.233.714	6.457.629	-	-	169.646	114.860.989	*Investment*
Sindikasi**)	62.210.780	3.530.433	388.533	-	81	66.129.827	*Syndication***)
Modal kerja	33.289.396	4.563.143	-	525.451	2.502.475	40.880.465	*Working capital*
Ekspor	6.593.776	27.163	-	-	-	6.620.939	*Export*
Konsumen	2.151.708	-	-	100	-	2.151.808	*Consumer*
Total (Catatan 62.B.(iv))	212.479.374	14.578.368	388.533	525.551	2.672.202	230.644.028	*Total (Note 62.B.(iv))*
	1.105.972.376	43.950.700	3.041.419	6.114.522	13.520.865	1.172.599.882	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(28.002.738)	(17.487.074)	(2.008.421)	(4.613.690)	(12.500.722)	(64.612.645)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.077.969.638**	**26.463.626**	**1.032.998**	**1.500.832**	**1.020.143**	**1.107.987.237**	***Net***

*) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang Rupiah dengan jenis kredit investasi sebesar Rp341.552.

**) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang asing dengan jenis kredit sindikasi sebesar Rp158.497.

*) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the category of "current collectability" in the Rupiah currency with the type of investment credit of Rp341,552.*

**) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "current collectability" category in foreign currencies with a syndication loan type of Rp158,497.*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan):

c. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas Bank Indonesia:

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

A. Details of loans and sharia receivables/financing (continued):

c. By economic sector and Bank Indonesia's collectibility:

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							*Rupiah*
Perdagangan, restoran, dan hotel	137.847.825	4.810.608	541.032	624.058	695.261	144.518.784	*Trading, restaurant, and hotel*
Pertanian	134.626.317	1.246.457	789.707	225.507	264.402	137.152.390	*Agriculture*
Industri	96.389.797	5.574.697	327.885	1.756.839	2.523.558	106.572.776	*Manufacturing*
Jasa dunia usaha	99.761.989	2.858.468	79.817	75.716	160.574	102.936.564	*Business service*
Konstruksi	80.755.330	8.841.050	27.757	183.092	443.925	90.251.154	*Construction*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi*)	69.830.623	1.061.043	69.738	36.148	46.754	71.044.306	*Transportation, warehousing, and communications*)
Jasa sosial	40.235.685	551.061	21.925	27.952	33.781	40.870.404	*Social service*
Tambang	33.758.498	1.712.255	7.750	7.557	7.575	35.493.635	*Mining*
Listrik, gas dan air	19.834.863	554.285	1.655	269	3.411	20.394.483	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	334.810.297	11.419.292	1.624.525	1.788.664	1.858.389	351.501.167	*Others*
Total	1.047.851.224	38.629.216	3.491.791	4.725.802	6.037.630	1.100.735.663	*Total*
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Tambang**)	69.122.697	65.163	-	-	-	69.187.860	*Mining***)
Industri ***)	59.793.004	6.151.042	-	512.217	1.026.421	67.482.684	*Manufacturing****)
Listrik, gas, dan air	25.797.065	3.491.766	333.794	-	-	29.622.625	*Electricity, gas, and water*
Jasa sosial	36.953.028	-	-	-	-	36.953.028	*Social service*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	20.472.108	455.061	-	-	-	20.927.169	*Transportation, warehousing, and communications*
Jasa dunia usaha	12.439.707	458.492	-	-	5.842	12.904.041	*Business service*
Perdagangan, restoran, dan hotel	9.339.003	68.164	-	-	-	9.407.167	*Trading, restaurant, and hotel*
Konstruksi	1.768.457	3.156.929	-	-	-	4.925.386	*Construction*
Pertanian	4.848.674	-	-	-	-	4.848.674	*Agriculture*
Lain-lain	2.835.498	2.306	-	-	94	2.837.898	*Others*
Total (Catatan 62.B.(iv))	243.369.241	13.848.923	333.794	512.217	1.032.357	259.096.532	*Total (Note 62.B.(iv))*
	1.291.220.465	52.478.139	3.825.585	5.238.019	7.069.987	1.359.832.195	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(22.594.287)	(18.800.031)	(1.892.707)	(3.606.428)	(6.205.166)	(53.098.619)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.268.626.178**	**33.678.108**	**1.932.878**	**1.631.591**	**864.821**	**1.306.733.576**	***Net***

*) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang Rupiah dengan sektor ekonomi pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi sebesar Rp345.413.

**) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang asing dengan sektor ekonomi tambang sebesar Rp1.636.078.

***) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang asing dengan sektor ekonomi industri sebesar Rp521.557.

*) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "current collectability" category in the Rupiah currency with the transportation, warehousing, and communication economic sector amounted to Rp345,413.*

**) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the category of "current collectability" in foreign currencies with the mining economy sector amounted to Rp1,636,078.*

***) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the category of "current collectability" in foreign currencies with the manufacturing economy sector amounted to Rp521,557.*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan) / *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)*

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan): / *Details of loans and sharia receivables/financing (continued):*

c. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas Bank Indonesia: / *By economic sector and Bank Indonesia's collectibility (continued):*

	2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							*Rupiah*
Perdagangan, restoran, dan hotel	124.738.067	5.136.611	593.425	699.554	2.535.107	133.702.764	*Trading, restaurant, and hotel*
Pertanian	117.284.450	1.218.362	147.565	413.580	359.545	119.423.502	*Agriculture*
Industri	87.135.139	6.545.837	445.949	2.613.555	4.294.810	101.035.290	*Manufacturing*
Jasa dunia usaha	76.172.877	2.539.976	128.079	128.439	146.124	79.115.495	*Business service*
Konstruksi	76.736.734	2.949.699	75.331	493.094	149.070	80.403.928	*Construction*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi*)	58.226.250	1.428.492	53.784	20.356	1.548.302	61.277.184	*Transportation, warehousing, and communications**)
Jasa sosial	26.329.757	478.334	11.414	9.059	41.629	26.870.193	*Social service*
Tambang	14.103.302	172.080	5.319	7.498	26.348	14.314.547	*Mining*
Listrik, gas, dan air	16.440.654	556.975	13.316	98	4.192	17.015.235	*Electricity, gas, and water*
Lain-lain	296.325.772	8.345.966	1.178.704	1.203.738	1.743.536	308.797.716	*Others*
Total	893.493.002	29.372.332	2.652.886	5.588.971	10.848.663	941.955.854	*Total*
Mata uang asing							*Foreign currencies*
Tambang**)	71.643.690	66.062	-	-	69.010	71.778.762	*Mining***)
Industri	49.078.510	9.240.341	-	525.451	2.575.053	61.419.355	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	21.408.464	3.530.433	388.533	-	-	25.327.430	*Electricity, gas and water*
Jasa sosial	23.333.551	-	-	-	-	23.333.551	*Social service*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	15.108.933	468.500	-	-	28.139	15.605.572	*Transportation, warehousing, and communications*
Perdagangan, restoran, dan hotel	12.945.523	119.609	-	-	-	13.065.132	*Trading, restaurant, and hotel*
Jasa dunia usaha	8.009.334	19.215	-	-	-	8.028.549	*Business service*
Konstruksi	2.628.999	1.134.208	-	-	-	3.763.207	*Construction*
Pertanian	5.720.538	-	-	-	-	5.720.538	*Agriculture*
Lain-lain	2.601.832	-	-	100	-	2.601.932	*Others*
Total (Catatan 62.B.(iv))	212.479.374	14.578.368	388.533	525.551	2.672.202	230.644.028	*Total (Note 62.B.(iv))*
	1.105.972.376	43.950.700	3.041.419	6.114.522	13.520.865	1.172.599.882	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(28.002.738)	(17.487.074)	(2.008.421)	(4.613.690)	(12.500.722)	(64.612.645)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.077.969.638**	**26.463.626**	**1.032.998**	**1.500.832**	**1.020.143**	**1.107.987.237**	***Net***

*) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang Rupiah dengan sektor ekonomi pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi sebesar Rp341.552.

*) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "current collectability" category in the Rupiah currency with the transportation, warehousing, and communication economic sector amounted to Rp341,552.*

**) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "kolektibilitas lancar" pada mata uang asing dengan sektor ekonomi tambang sebesar Rp158.497.

**) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the category of "current collectability" in foreign currencies with the mining economy sector amounted to Rp158,497.*

d. Berdasarkan jangka waktu: / *By period:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 tahun	128.903.288	114.179.441	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	73.345.493	58.338.259	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	244.535.984	230.681.444	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun*)	653.950.898	538.756.710	*Over 5 years**)
Total	1.100.735.663	941.955.854	*Total*

*) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "lebih dari 5 tahun" pada mata uang Rupiah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp345.413 dan Rp341.552.

*) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "more than 5 years" category in Rupiah currency as of 31 December 2023 and 2022, amounted to Rp345,413 and Rp341,552, respectively.*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan):

d. Berdasarkan jangka waktu (lanjutan):

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

A. Details of loans and sharia receivables/financing (continued):

d. By period (continued):

	2023	2022	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 tahun	29.837.241	30.643.581	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	19.094.608	17.463.622	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	52.755.873	62.383.307	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun**)	157.408.810	120.153.518	*Over 5 years***)
Total (Catatan 62.B.(iv))	259.096.532	230.644.028	*Total (Note 62.B.(iv))*
	1.359.832.195	1.172.599.882	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(53.098.619)	(64.612.645)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.306.733.576**	**1.107.987.237**	***Net***

**) Termasuk kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, berdasarkan kategori "lebih dari 5 tahun" pada mata uang asing per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.157.635 dan Rp158.497.

**) *Including loans measured at fair value through other comprehensive income, on the "more than 5 years" category in foreign currencies as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp2,157,635 and Rp158,497, respectively.*

e. Berdasarkan PSAK 71:

Berikut adalah perubahan nilai tercatat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

e. Based on SFAS 71:

Movements in carrying amount of loans and sharia receivables/financing classified as amortised cost by stage for year ended 31 December 2023 and 2022:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	861.614.135	85.390.165	18.888.528	206.207.005	1.172.099.833	*Beginning balance*
Transfer ke/(dari) *stage* 1	10.275.568	(9.283.371)	(992.197)	-	-	*Transfer to/(from) stage 1*
Transfer ke/(dari) *stage* 2	(29.320.906)	30.515.826	(1.194.920)	-	-	*Transfer to/(from) stage 2*
Transfer ke/(dari) *stage* 3	(3.318.336)	(27.967.374)	31.285.710	-	-	*Transfer to/(from) stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	839.250.461	78.655.246	47.987.121	206.207.005	1.172.099.833	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(92.595.976)	(5.445.408)	(3.367.652)	-	(101.409.036)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	634.785.445	27.841.941	1.306.697	148.091.600	812.025.683	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(371.938.628)	(17.219.147)	(1.597.508)	(113.760.421)	(504.515.704)	*Financial assets derecognised*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(166.418)	(189.101)	(17.885.463)	(2.630.647)	(20.871.629)	*Written-off financial assets*
Kerugian modifikasi arus kas kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	*Losses on modifying cash flows of loans*
Total penambahan/ (penurunan) tahun berjalan	170.084.423	4.988.285	(21.543.926)	31.700.532	185.229.314	*Total increase/ (decrease) during the year*
Saldo akhir tahun	**1.009.334.884**	**83.643.531**	**26.443.195**	**237.907.537**	**1.357.329.147**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) *Not implement SFAS 71*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan):

e. Berdasarkan PSAK 71 (lanjutan):

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

A. Details of loans and sharia receivables/financing (continued):

e. Based on SFAS 71 (continued):

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	745.168.168	87.018.909	23.749.727	170.288.023	1.026.224.827	*Beginning balance*
Transfer ke/(dari) *stage* 1	5.750.409	(4.558.695)	(1.191.714)	-	-	*Transfer to/(from) stage 1*
Transfer ke/(dari) *stage* 2	(19.853.035)	20.345.091	(492.056)	-	-	*Transfer to/(from) stage 2*
Transfer ke/(dari) *stage* 3	(3.029.083)	(14.408.305)	17.437.388	-	-	*Transfer to/(from) stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	728.036.459	88.397.000	39.503.345	170.288.023	1.026.224.827	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(66.442.365)	(2.963.867)	(2.151.596)	-	(71.557.828)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	530.449.877	7.009.079	1.121.233	142.489.531	681.069.720	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(330.337.347)	(6.955.729)	(1.835.273)	(104.197.618)	(443.325.967)	*Financial assets derecognised*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(92.489)	(96.318)	(14.322.202)	(2.372.931)	(16.883.940)	*Written-off financial assets*
Kerugian modifikasi arus kas kredit yang diberikan	-	-	(3.426.979)	-	(3.426.979)	*Losses on modifying cash flows of loans*
Total penambahan/ (penurunan) tahun berjalan	133.577.676	(3.006.835)	(20.614.817)	35.918.982	145.875.006	*Total increase/ (decrease) during the year*
Saldo akhir tahun	**861.614.135**	**85.390.165**	**18.888.528**	**206.207.005**	**1.172.099.833**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) *Not implement SFAS 71*

Berikut adalah perubahan nilai tercatat kredit yang diberikan dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (semua kredit yang diberikan dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah *stage* 1) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Following are the changes in the carrying amount of loans classified as fair value through other comprehensive income (all loans classified as fair value through other comprehensive income are stage 1) for the year ended 31 December 2023 and 2022:

	2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Cadangan kerugian penurunan nilai*)/ *Allowance for impairment losses**)**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Saldo awal tahun	500.049	8.743	*Beginning balance*
Pengukuran kembali	(81.539)	(814)	*Remeasurement*
Aset keuangan yang baru dibeli	2.084.538	3.928	*New financial assets originated or purchased*
Saldo akhir tahun	**2.503.048**	**11.857**	***Ending balance***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada kredit yang diberikan dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain pada pos ekuitas, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya sesuai Catatan 2c.(H).(1).

*) *Allowance for impairment losses on loans classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income under equity, because the carrying amount is presented at fair value in accordance with Notes 2c.(H).(1).*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

A. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah terdiri atas (lanjutan):

e. Berdasarkan PSAK 71 (lanjutan):

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

A. Details of loans and sharia receivables/financing (continued):

e. Based on SFAS 71 (continued):

	2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Cadangan kerugian penurunan nilai*)/ *Allowance for impairment losses**)**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Saldo awal tahun	-	-	*Beginning balance*
Aset keuangan yang baru dibeli	1.217.489	10.691	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(717.440)	(1.948)	*Matured or sold financial assets*
Saldo akhir tahun	**500.049**	**8.743**	***Ending balance***

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada kredit yang diberikan dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain pada pos ekuitas, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya sesuai Catatan 2c.(H).(1).

*) *Allowance for impairment losses on loans classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income under equity, because the carrying amount is presented at fair value in accordance with Notes 2c.(H).(1).*

Rasio kredit bermasalah Bank Mandiri dan Entitas Anak secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 1,19% dan 1,92% (rasio untuk Bank Mandiri saja masing-masing 1,02% dan 1,88%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022), sedangkan rasio kredit bermasalah Bank Mandiri dan Entitas Anak secara neto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,33% dan 0,31% (rasio untuk Bank Mandiri saja sebesar 0,29% dan 0,26%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022). Saldo kredit bermasalah Bank Mandiri dan Entitas Anak termasuk piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan dari Entitas Anak.

The ratio of non-performing loans of Bank Mandiri and its Subsidiaries on a gross basis (before deducted with allowance for impairment losses) as of 31 December 2023 and 2022 are 1.19% and 1.92%, respectively (the ratios for Bank Mandiri only are 1.02% and 1.88% as of 31 December 2023 and 2022, respectively), while the ratio of non-performing loans of Bank Mandiri and its Subsidiaries on a net basis as of 31 December 2023 and 2022 are 0.33% and 0.31%, respectively (the ratios for Bank Mandiri only were 0.29% and 0.26%, as of 31 December 2023 and 2022, respectively). The balance of non-performing loans of Bank Mandiri and its Subsidiaries include consumer financing receivables and net investment finance leases of the Subsidiaries.

Perhitungan rasio kredit bermasalah Bank Mandiri dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional yang diubah terakhir dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, dihitung atas dasar jumlah kredit tidak termasuk kredit yang diberikan pada bank lain sebesar Rp8.417.111 dan Rp6.769.326 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The calculation of non-performing loans ratio for Bank Mandiri and its Subsidiaries as of 31 December 2023 and 2022 are in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 43/SEOJK.03/2016 dated 28 September 2016 regarding Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports, last amended with Financial Services Authority Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 dated 30 June 2020 which is calculated from the loan amount, excluding loan to other banks amounted to Rp8,417,111 and Rp6,769,326 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah:

a. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Entitas Anak masing-masing sebesar Rp237.907.537 dan Rp206.207.005 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri atas:

	2023	2022	
Piutang *murabahah*	136.503.096	124.873.356	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*	90.097.330	71.631.908	*Musyarakah and mudharabah financing*
Pembiayaan syariah lainnya (termasuk pinjaman *qardh*)	11.307.111	9.701.741	*Other sharia financing (including funds of qardh)*
Total	237.907.537	206.207.005	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(9.675.229)	(9.186.762)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**228.232.308**	**197.020.243**	***Net***

b. Tingkat suku bunga rata-rata (*yield*) dan kisaran bagi hasil per tahun adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Tingkat suku bunga rata-rata (*yield*) per tahun:			*Average interest rates (yield) per annum:*
Rupiah	8,50%	8,37%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	6,79%	4,45%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*
Kisaran bagi hasil per tahun:			*Range of profit sharing per annum:*
Piutang *murabahah*	1,04% - 10,37%	0,03% - 11,58%	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *musyarakah*	2,12% - 14,17%	2,10% - 8,08%	*Musyarakah financing*
Pembiayaan syariah lainnya	4,01% - 14,05%	7,94% - 10,59%	*Other sharia financing*

c. Agunan kredit

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank Mandiri dan Entitas Anak. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan tunai untuk kredit yang diberikan dan diblokir untuk tujuan lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp82.768.773 dan Rp64.356.878 (Catatan 21c, 22c, 23e, 24c dan 26d).

12. *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING* *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing:

a. Included in loans are sharia receivables/financing granted by Subsidiary amounted to Rp237,907,537 and Rp206,207,005 as of 31 December 2023 and 2022, respectively which consist of:

b. Average interest rates (yield) and range of profit sharing per annum are as follows:

c. Loan collaterals

Loans and sharia receivables/financing are generally secured by pledged collateral bound with powers of attorney in respect of the rights to sell, time deposits or other collateral acceptable by Bank Mandiri and its Subsidiaries. Deposits from customers and deposits from other banks that were pledged as cash collateral for loans and blocked for other purposes as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp82,768,773 and Rp64,356,878, respectively (Note 21c, 22c, 23e, 24c and 26d).

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

d. Kredit program pemerintah

Kredit program pemerintah terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja permanen, kredit modal kerja dan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ("FLPP"), dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.

Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020, Bank berpartisipasi dalam penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 yang selanjutnya diperbaharui dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Program penyaluran kredit dalam rangka PEN tersebut bersumber dari Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam bentuk deposito dengan tenor 3 bulan sebesar Rp10.000.000 pada tanggal 25 Juni 2020. Dana Pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp39.043.255 sampai dengan tanggal jatuh tempo deposito pada 25 September 2020, dan selanjutnya dana dikembalikan ke Pemerintah.

Berdasarkan evaluasi dan proposal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Dana Pemerintah Tahap II kepada perbankan salah satunya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam bentuk deposito dengan tenor 110 hari, sebesar Rp15.000.000 pada tanggal 25 September 2020, yang telah disalurkan dalam bentuk kredit akumulatif sebesar Rp66.634.884 sampai dengan tanggal jatuh tempo deposito pada 13 Januari 2021. Penempatan Dana Pemerintah Tahap II tersebut telah berakhir dan telah dikembalikan kepada Pemerintah pada tanggal 13 Januari 2021.

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

d. Government program loans

Government program loans consists of investment loans, permanent working capital loans, working capital loans and Liquidity Facility of House Financing (FLPP) which can be partially and/or fully funded by the Government.

In order to accelerate National Economic Recovery Program on 2020, the Bank participates in lending in the National Economic Recovery ("PEN") program in accordance with Ministry of Finance Regulation No. 70/PMK.05/2020 which was subsequently updated with PMK No. 104/PMK.05/2020 dated 6 August 2020. The credit disbursement program of PEN, funded from the Government's placement which one of them is in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, in the form of time deposits with 3 months tenor contract amounted to Rp10,000,000 on 25 June 2020. The Government Fund has been distributed in form of loan amounted to Rp39,043,255 until maturity date of time deposit on 25 September 2020 and the funds was returned to Government.

Based on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.'s evaluation and proposal, and in accordance to PMK No. 104/PMK.05/2020, the Government conducted the Phase II of Placement of Government Funds for banks, one of which was PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., in form of time deposit with placement period of 110 days, amounted to Rp15,000,000 on 25 September 2020, and the funds has been distributed in form of loan with accumulative amounted to Rp66,634,884 until maturity date of time deposit on 13 January 2021. The Governments placement Phase II has ended and the fund was returned to Government on 13 January 2021.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

d. Kredit program pemerintah (lanjutan)

Bank Mandiri juga berperan aktif dalam penyaluran kredit dengan penjaminan kredit UMKM dari pemerintah sesuai PMK No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020. Penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan, yaitu melalui PT Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia. Hingga 30 November 2021, penyaluran kredit UMKM dengan penjaminan kredit dari pemerintah ini disalurkan kepada 13.352 debitur UMKM dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp2,84 triliun.

Pada tahun 2022, program penjaminan kredit UMKM dari pemerintah tersebut dilanjutkan penyalurannya sesuai PMK No. 28/PMK.08/2022 tanggal 30 Maret 2022. Hingga 31 Desember 2022, penyaluran kredit UMKM dengan penjaminan kredit dari pemerintah ini disalurkan kepada 3.030 debitur UMKM dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp148,66 miliar.

e. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain sebagai kreditur. Selain sebagai kreditur, bank juga dapat berperan sebagai agen (agen fasilitas, agen jaminan, agen penampungan) yang menjalankan fungsi administratif untuk kepentingan seluruh kreditur dan debitur.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah persentase pembiayaan Bank Mandiri yang berperan sebagai kreditur dan agen fasilitas adalah masing-masing berkisar antara 1,21% sampai dengan 98,02% dan 1,31% sampai dengan 99,00% dari jumlah total keikutsertaan Bank Mandiri pada kredit sindikasi. Sementara jumlah persentase pembiayaan Bank Mandiri yang berperan hanya sebagai anggota sindikasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing berkisar antara 0,15% sampai dengan 62,50% dan 1,12% sampai dengan 74,26% dari jumlah keseluruhan keikutsertaan Bank Mandiri pada kredit sindikasi.

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

d. Government program loans (continued)

Bank Mandiri also plays an active role in lending with Micro, Small and Medium Enterprises ("MSME") credit guarantees from the government in accordance with PMK No. 71/PMK.08/2020 dated 23 June 2020. Government guarantees are through guarantee business entities, namely through PT Jaminan Kredit Indonesia and PT Asuransi Kredit Indonesia. As of 30 November 2021, MSME loan disbursement with credit guarantees from the government was distributed to 13,352 MSME debtors with a credit disbursement value of Rp2.84 trillion.

In 2022, the MSME loan guarantee program from the government will continue its distribution in accordance with PMK No. 28/PMK.08/2022 dated 30 March 2022. Until 31 December 2022, MSME loan distribution with credit guarantees from the government is distributed to 3,030 MSME debtors with a value of loan disbursement of Rp148.66 billion.

e. Syndication loans

Syndication loans represent loans granted to debtors through joint financing agreements with other banks. The total percentage share of Bank Mandiri as lead arranger in syndication loans as creditor. Apart from being creditor, the Bank also act as an agent (facility agent, guarantee agent, shelter agent) which operates administrative function for all of creditors and debtors' interest.

As of 31 December 2023 and 2022, the percentage of Bank Mandiri financing as a creditor and facility agent is between 1.21% to 98.02% and 1.31% to 99.00% from total participation of Bank Mandiri in syndication loans. While the percentage of Bank Mandiri financing as syndication member as of 31 December 2023 and 2022 is between 0.15% to 62.50% and 1.12% to 74.26% from total participation of Bank Mandiri in syndication loans.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

f. Kredit yang direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022	
Perpanjangan jangka waktu kredit	67.782.195	78.995.530	*Extension of loan maturity dates*
Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit	2.633.310	915.936	*Extension of loan maturity dates and reduction of interest rates*
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain-lain*)	26.569.121	45.623.774	*Extension of loan maturity dates and other restructuring schemes*)
Total**	**96.984.626**	**125.535.240**	***Total****

*) Skema restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari skema restrukturisasi penurunan suku bunga kredit, penjadwalan kembali bunga yang tertunggak dan perpanjangan jangka waktu pembayaran bunga tertunggak.

**) Termasuk baki debet kredit restrukturisasi Covid-19 per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.967.069 dan Rp50.704.100.

Berikut ini adalah jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022	
Lancar	48.610.295	72.521.126	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	38.001.553	34.618.352	*Special mention*
Kurang Lancar	1.967.382	2.015.712	*Substandard*
Diragukan	3.201.907	5.001.561	*Doubtful*
Macet	5.203.489	11.378.489	*Loss*
Total*)	**96.984.626**	**125.535.240**	***Total****

*) Termasuk baki debet kredit restrukturisasi Covid-19 per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.967.069 dan Rp50.704.100.

Total kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.372.778 dan Rp18.395.762.

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

f. Restructured loans

Below are the types and amounts of restructured loans and sharia receivables/financing and as of 31 December 2023 and 2022:

*) *Other restructuring schemes mainly involve reduction of interest rates, rescheduling of unpaid interest and extension of repayment periods for unpaid interest.*

**) *Including the Covid-19 restructuring credit outstanding balance as of 31 December 2023 and 2022, amounted to Rp25,967,069 and Rp50,704,100, respectively.*

Below are the amount of restructured loans and sharia receivables/financing based on collectability as of 31 December 2023 and 2022:

*) *Including the Covid-19 restructuring credit outstanding balance as of 31 December 2023 and 2022, amounted to Rp25,967,069 and Rp50,704,100, respectively.*

Total restructured loans and sharia receivables/financing under non-performing loans ("NPL") category as of 31 December 2023 and 31 December 2022 are amounted to Rp10,372,778 and Rp18,395,762, respectively.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

f. Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan)

Grup telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019" tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dua kali melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tanggal 1 Desember 2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tanggal 10 September 2021. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, baki debet kredit restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp25.967.069 dan Rp50.704.100.

g. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah kepada pihak berelasi

Total kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah kepada pihak berelasi dan persentase terhadap total aset konsolidasian diungkapkan pada Catatan 56.

Termasuk dalam kredit yang diberikan kepada pihak berelasi adalah kredit yang diberikan kepada karyawan kunci Bank Mandiri. Kredit yang diberikan kepada karyawan kunci Bank Mandiri terdiri dari kredit dengan rata-rata tingkat suku bunga sebesar 7,77% per tahun yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor dan/atau rumah dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 28 (dua puluh delapan) tahun yang dibayar melalui pemotongan gaji karyawan setiap bulan.

h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK untuk pihak terkait dan pihak tidak terkait. BMPK dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

i. Bank Mandiri memiliki sejumlah perjanjian penerusan kredit dengan lembaga keuangan internasional (Catatan 61).

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

f. Restructured loans (continued)

The Group has restructured credit for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 regarding "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease" dated 13 March 2020 as amended twice by POJK No. 48/POJK.03/2020 regarding "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease" dated 1 December 2020 and POJK No. 17/POJK.03/2021 regarding Second Amendment of POJK No.11/POJK/03/2020 regarding National Economic Stimulus as Countercyclical for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease on 10 September 2021. As of 31 December 2023 and 2022, the balances for the Covid-19 restructuring credit are Rp25,967,069 and Rp50,704,100, respectively.

g. Loans and sharia receivables/financing to related parties

Total loans and sharia receivables/financing to related parties and its percentage to the total consolidated assets are disclosed in Note 56.

Loans to related parties include loans to Bank Mandiri key employees. The loans to Bank Mandiri key employees consist of interest-bearing amounted to 7.77% per annum which are intended for the acquisition of vehicles and/or houses, and are repayable within 1 (one) to 28 (twenty eight) years through monthly payroll deductions.

h. Legal Lending Limit (LLL)

Regarding the Legal Lending Limit (LLL) on 31 December 2023 and 2022, the Bank did not violate and exceeded the LLL provisions for related parties and non-related parties. LLL is calculated in accordance with Financial Services Authority Regulation - POJK No. 38/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding Legal Lending Limits for Commercial Banks as amended by POJK No. 32/POJK.03/2018 regarding Legal Lending Limits of Loans and Funding for Commerical Banks.

i. Bank Mandiri has several channeling loan agreements with several international financial institutions (Note 61).

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan) / *LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)*

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

j. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

j. Movements of allowance for impairment los loans and sharia receivables/financing

	2023	2022	
Saldo awal tahun[1)]	64.612.645	68.588.680	*Beginning balance[1)]*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 46)	9.788.587	15.442.378	*Allowance during the year (Note 46)*
Penghapusbukuan[2)]	(20.871.629)	(16.883.940)	*Write-offs[2)]*
Lain-lain[*)]	(430.984)	(2.534.473)	*Others[*)]*
Saldo akhir tahun[3)]	**53.098.619**	**64.612.645**	***Ending balance[3)]***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing dan pengakuan pendapatan bunga atas bagian yang tidak mengalami penurunan nilai dari kredit yang mengalami penurunan nilai (Catatan 41).

1) Saldo awal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp39.161.899 dan Rp46.023.479 yang dihitung secara individual dan Rp25.450.746 dan Rp22.565.201 yang dihitung secara kolektif.

2) Penghapusbukuan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.014.928 dan Rp8.467.647 untuk debitur yang dievaluasi secara individual dan Rp10.856.701 dan Rp8.416.293 untuk debitur yang dievaluasi secara kolektif.

3) Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari Rp26.502.710 dan Rp39.161.899 yang dihitung secara individual dan Rp26.595.909 dan Rp25.450.746 yang dihitung secara kolektif.

*) *Included effect of foreign currency translation and implication from interest income recognised on the non-impaired portion of the impaired loans (Note 41).*

1) *Beginning balance as of 31 December 2023 and 2022 is amounted to Rp39,161,899 and Rp46,023,479, respectively, which were calculated using individual assessment and Rp25,450,746 and Rp22,565,201, respectively, which were calculated using collective assessment.*

2) *Write-off as of 31 December 2023 and 2022 is amounted to Rp10,014,928 and Rp8,467,647, respectively, which are calculated using individual assessment and Rp10,856,701 and Rp8,416,293, respectively, which are calculated using collective assessment.*

3) *Ending balance as of 31 December 2023 and 2022, is amounted to Rp26,502,710 and Rp39,161,899, respectively, which were calculated using individual assessment and Rp26,595,909 and Rp25,450,746, respectively, which were calculated using collective assessment.*

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia*)**	**Total**	
Saldo awal tahun	12.334.510	27.535.018	15.556.355	9.186.762	64.612.645	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	1.040.068	(782.859)	(257.209)	-	-	*- 12 months expected credit losses (stage 1)*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(1.147.513)	1.710.658	(563.145)	-	-	*- Lifetime expected credit losses - unimpaired (stage 2)*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(63.955)	(9.212.451)	9.276.406	-	-	*- Lifetime expected credit losses - impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	12.163.110	19.250.366	24.012.407	9.186.762	64.612.645	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.864.358)	(2.877.180)	9.575.956	611.782	4.446.200	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4.811.944	3.067.776	828.217	2.513.931	11.221.868	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.887.053)	(3.453.097)	(539.331)	-	(5.879.481)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	60.533	(3.262.501)	9.864.842	3.125.713	9.788.587	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(166.419)	(189.101)	(17.885.463)	(2.630.646)	(20.871.629)	*Written-off assets*
Unwinding interest	-	-	(319.605)	-	(319.605)	*Unwinding interest*
Lain-lain	(14.284)	(42.383)	(48.112)	(6.600)	(111.379)	*Others*
Saldo akhir tahun	**12.042.940**	**15.756.381**	**15.624.069**	**9.675.229**	**53.098.619**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) *Not implement SFAS 71*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

j. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

j. Movements of allowance for impairment losses on loans and sharia receivables/financing (continued)

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	11.792.422	29.325.283	20.094.001	7.376.974	68.588.680	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(from):						*Transfer to/(from):*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	978.647	(610.172)	(368.475)	-	-	*- 12 months expected credit losses (stage 1)*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(999.756)	1.223.022	(223.266)	-	-	*- Lifetime expected credit losses - unimpaired (stage 2)*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(126.296)	(6.975.955)	7.102.251	-	-	*- Lifetime expected credit losses - impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	11.645.017	22.962.178	26.604.511	7.376.974	68.588.680	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.192.491)	4.273.379	6.771.491	363.978	9.216.357	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4.809.749	1.290.166	985.892	3.772.810	10.858.617	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.952.246)	(1.668.022)	(1.012.328)	-	(4.632.596)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan tahun berjalan	665.012	3.895.523	6.745.055	4.136.788	15.442.378	*Total allowance during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(92.489)	(96.318)	(14.322.202)	(2.372.931)	(16.883.940)	*Written-off assets*
Unwinding interest	-	-	(294.592)	-	(294.592)	*Unwinding interest*
Lain-lain	116.970	773.635	(3.176.417)	45.931	(2.239.881)	*Others*
Saldo akhir tahun	**12.334.510**	**27.535.018**	**15.556.355**	**9.186.762**	**64.612.645**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) *Not implement SFAS 71*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans and sharia receivables/financing is adequate.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

k. Ikhtisar kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan minimum penyisihan kerugian kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah bermasalah adalah sebagai berikut:

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

k. Summary of non-performing loans and sharia receivables/financing based on economic sector and the minimum allowance for loans and sharia receivables/financing impairment losses are as follows:

	Kredit bermasalah (berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)/ *Non-performing loans (based on Financial Services Authority Regulations)*		
	2023	**2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Industri	4.608.282	7.354.314	*Manufacturing*
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.860.351	3.828.086	*Trading, restaurant, and hotel*
Pertanian	1.279.616	920.690	*Agriculture*
Konstruksi	654.774	717.495	*Construction*
Jasa dunia usaha	316.107	402.642	*Business service*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	152.640	1.622.442	*Transportation, warehouse, and communications*
Jasa sosial	83.658	62.102	*Social services*
Tambang	22.882	39.165	*Mining*
Listrik, gas, dan air	5.335	17.606	*Electricity, gas, and water*
Lain-lain	5.271.578	4.125.978	*Others*
	14.255.223	19.090.520	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Industri	1.538.638	3.100.504	*Manufacturing*
Listrik, gas, dan air	333.794	388.533	*Electricity, gas, and water*
Jasa dunia usaha	5.842	-	*Business services*
Tambang	-	69.010	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	-	28.139	*Transportation, warehousing, and communications*
Lain-lain	94	100	*Others*
	1.878.368	3.586.286	
Total	**16.133.591**	**22.676.806**	***Total***

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

k. Ikhtisar kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan minimum penyisihan kerugian kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah bermasalah adalah sebagai berikut (lanjutan):

Total minimum penyisihan kerugian kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang dihitung berdasarkan atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah bermasalah berdasarkan definisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

k. Summary of non-performing loans and sharia receivables/financing based on economic sector and the minimum allowance for loans and sharia receivables/financing impairment losses are as follows (continued):

Total minimum allowance for loans and sharia receivables/financing impairment losses that is calculated based on non-performing loans and sharia receivables/financing, which is based on Financial Services Authority Regulations are as follows:

	Minimum penyisihan kerugian)/ *Minimum allowance for impairment losses*		
	2023	**2022**	
Rupiah			*Rupiah*
Industri	3.451.158	5.668.480	*Manufacturing*
Perdagangan, restoran, dan hotel	1.088.445	2.973.898	*Trading, restaurant, and hotel*
Konstruksi	539.635	406.917	*Constructions*
Pertanian	495.612	588.470	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	210.405	229.555	*Business services*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	75.289	1.566.548	*Transportation, warehousing, and communications*
Jasa sosial	51.046	47.871	*Social services*
Tambang	12.516	30.895	*Mining*
Listrik, gas, dan air	3.794	6.238	*Electricity, gas, and water*
Lain-lain	2.996.400	2.522.209	*Others*
	8.924.300	14.041.081	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Industri	1.282.530	2.837.778	*Manufacturing*
Listrik, gas, dan air	50.069	58.280	*Electricity, gas, and water*
Jasa dunia usaha	5.842	-	*Business service*
Tambang	-	69.010	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	-	28.139	*Transportation, warehousing, and communications*
Lain-lain	94	50	*Others*
	1.338.535	2.993.257	
Total	**10.262.835**	**17.034.338**	***Total***

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

l. Penghapusbukuan kredit macet

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank Mandiri melaksanakan penghapusbukuan kredit macet masing-masing sebesar Rp17.863.589 dan Rp14.285.070 (Bank Mandiri saja). Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

a. Fasilitas kredit telah digolongkan macet;
b. Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari pokok kredit macetnya;
c. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil;
d. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar; dan
e. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan* sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*).

m. Kredit yang dihapusbukukan dicatat di ekstra-komtabel. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Kredit ekstra-komtabel ini tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Ikhtisar mutasi kredit ekstra-komtabel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

l. Written-off of non-performing loans

For year ended 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri written-off non-performing loans amounted to Rp17,863,589 and Rp14,285,070 (for Bank Mandiri only), respectively. The criteria for loan write-offs are as follows:

a. Loan facility has been classified as non-performing;
b. Loan facility has been provided with 100% (one hundred percent) allowance for impairment loss from the loan principal;
c. Collection and recovery efforts have been performed, but the result is unsuccessful;
d. The debtors' business has no prospect or bad performance or they do not have the loan repayment ability; and
e. The write-offs are performed for all loan obligations, including non-cash loan facilities, and the write-offs shall not be written-off partially.

m. Written-off loans are recorded in extra-comptable. The Bank continues pursuing for collection of the written-off loans. These loans are not reflected in the consolidated statement of financial position. A summary of movements of extra-comptable loans for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows (for Bank Mandiri only):

	2023	2022	
Saldo awal tahun	97.501.028	87.324.011	*Beginning balance*
Penghapusbukuan	17.863.589	14.285.070	*Write-offs*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan (*cash recoveries*)	(10.134.741)	(6.335.303)	*Cash recoveries from written-off loans*
Lain-lain*)	(98.524)	2.227.250	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**105.131.352**	**97.501.028**	***Ending balance***

*) Merupakan selisih kurs karena penjabaran mata uang asing, pencatatan kembali aset yang dihapusbuku dan lainnya.

*) *Represents effect of foreign currency translation, re-recognition of written off assets and others*

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

B. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan):

n. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri dengan sistem pembiayaan langsung (*executing*) ke perusahaan pembiayaan dan pembiayaan bersama (*joint financing*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.971.089 dan Rp9.146.755.

o. Nilai tercatat diamortisasi dari kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Kredit yang diberikan (Catatan 12A)	1.359.832.195	1.172.599.882	*Loans (Note 12A)*
Bunga yang masih akan diterima	5.123.412	4.130.866	*Accrued interest receivables*
Pendapatan diterima dimuka yang teratribusi (Catatan 35)	(1.023.992)	(885.978)	*Unearned income (directly attributable) (Note 35)*
Cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 12A.e dan 12B.j)	(53.110.476)	(64.621.388)	*Allowance for impairment losses (Note 12A.e and 12B.j)*
Total	**1.310.821.139**	**1.111.223.382**	***Total***

p. Pada tanggal homologasi, nilai wajar atas saldo kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") sebagai dampak dari restrukturisasi adalah sebesar Rp824.771 atau sebesar 20% dari nilai kontraktual pinjaman. Nilai ini akan terpulihkan secara bertahap sesuai dengan konsep akuntansi setelah tanggal restrukturisasi hingga tanggal jatuh tempo. Bank Mandiri tetap memiliki nilai tagih atas kredit yang diberikan kepada Garuda sebesar Rp4.220.738 sesuai nilai kontraktual pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tidak terdapat penghapusan jumlah tagihan pokok & bunga yang ditangguhkan Bank Mandiri terhadap Garuda.

12. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING *(continued)*

B. Other significant information related to loans and sharia receivables/financing (continued):

n. Loans channelled by Bank Mandiri through direct financing (executing) to multifinance company and joint financing mechanism as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp11,971,089 and Rp9,146,755, respectively.

o. The carrying amount of loans and sharia receivables/financing at amortised cost are as follows:

p. On the date of homologation, fair value of the outstanding loans from Bank Mandiri to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") as a result of the restructuring amounted to Rp824,771 or 20% of the contractual amount. This value will be recovered gradually in accordance with the accounting concept after the restructuring date until the maturity date. Bank Mandiri still has a claim value for loans extended to Garuda of Rp4,220,738 according to the contractual value of the loan as stated in the settlement agreement which has been homologated by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, thus there is no write-off of the principal & deferred interest by Bank Mandiri against Garuda.

13. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *13. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES*

a. Rincian dari piutang pembiayaan konsumen Entitas Anak adalah sebagai berikut:

a. Details of Subsidiary's consumer financing receivables are as follows:

	2023	2022	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	59.389.344	45.821.974	*Consumer financing receivables - gross*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(26.639.548)	(22.064.247)	*Unearned income on consumer financing*
Total	32.749.796	23.757.727	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(713.044)	(610.361)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**32.036.752**	**23.147.366**	***Net***

Angsuran dari saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto per 31 Desember 2023 dan 2022 yang akan diterima dari konsumen berdasarkan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Installments of consumer financing receivables - gross as of 31 December 2023 and 2022 which will be received from customers based on the maturity dates are as follows:

	2023	2022	
Tahun			*Year*
2023	11.223.627	17.404.993	*2023*
2024	19.907.173	13.705.543	*2024*
2025 dan sesudahnya	28.258.544	14.711.438	*2025 and later*
Total	**59.389.344**	**45.821.974**	***Total***

Pada tanggal 4 November 2016, Entitas Anak dan Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilalihan Piutang Pembiayaan dengan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.630.000 sesuai yang telah ditetapkan PKS Pembiayaan Bersama, dimana Entitas Anak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi pembiayaannya *(without recourse*). Perjanjian ini telah diperpanjang dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 dan total pembiayaan menjadi sebesar Rp21.000.000.

On 4 November 2016, Subsidiary and the Bank entered into a Consumer Financing Asset Purchase Agreement with a total financing facility of Rp1,630,000 in accordance with the Joint Financing Agreement, in which the Subsidiary bears credit risk in accordance with its financing portion (without recourse). This agreement has been extended until 28 February 2024, with total facility amounted to Rp21,000,000.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan di tahun 2023. Perubahan terakhir melalui amendemen Pertama Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) Reguler Entitas Anak dan Bank dengan Perseroan No. 022A/PKS-LEG/MTF/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023, dengan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp3.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Entitas Anak dan maksimal 99,00% dari Bank. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

The agreement has been amended in 2023. The latest amendment through First Amendment of Regular Joint Financing Agreement of Subisidiary and Bank with Company No. 022A/PKS-LEG/MTF/II/2023 dated 21 February 2023, within joint financing facility amounted to Rp3,000,000 with a portion of joint financing facility minimum at 1.00% from Subsidiaries and maximum at 99.00% from Bank. The agreement is valid until 20 February 2024.

13. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

a. Rincian dari piutang pembiayaan konsumen Entitas Anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amendemen Perjanjian Kerjasama Kendaraan Bermotor antara Entitas Anak dan Bank tertanggal 31 Desember 2023, dengan fasilitas pembiayaan bersama menjadi sebesar Rp24.000.000 dengan porsi fasilitas pembiayaan bersama sebesar minimal 1,00% dari Entitas Anak dan maksimal 99,00% dari Bank. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Entitas Anak atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 84 bulan.

Termasuk dalam piutang pembiayaan konsumen di atas adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.542 dan Rp7.846 (Catatan 56).

Berikut adalah perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***13. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES** (continued)*

a. Details of Subsidiary's consumer financing receivables are as follows (continued):

The agreement has been amended few times. The latest amendment through Amendment of Motor Vehicle Agreement between Subsidiaries and Bank date 31 December 2023, with a joint financing facility amounted to Rp24,000,000 with a portion of joint financing facility minimum at 1.00% from Subsidiaries and maximum at 99.00% from Bank. The agreement is valid until 28 February 2024.

Financing period for contracts disbursed by the Subsidiaries on motor vehicles ranges from 12 - 84 months.

Included in consumer financing receivables transactions are related parties transactions as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp11,542 and Rp7,846, respectively (Note 56).

Changes in carrying amount of consumer financing receivables classified as amortised upon stages for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Saldo awal tahun	22.712.668	846.480	198.579	23.757.727	*Beginning balance*
Transfer ke/(dari) *stage* 1	239.079	(224.697)	(14.382)	-	*Transfer to/(from) stage 1*
Transfer ke/(dari) *stage* 2	(1.147.403)	1.169.775	(22.372)	-	*Transfer to/(from) stage 2*
Transfer ke/(dari) *stage* 3	(320.229)	(408.192)	728.421	-	*Transfer to/(from) stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	21.484.115	1.383.366	890.246	23.757.727	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(4.408.140)	(489.701)	984.254	(3.913.587)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	17.777.103	158.733	117.832	18.053.668	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.996.525)	(431.253)	(552.921)	(3.980.699)	*Financial assets derecognised*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(12.052)	(61.217)	(1.094.044)	(1.167.313)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	10.360.386	(823.438)	(544.879)	8.992.069	*Total increase/(decrease) during the year*
Saldo akhir tahun	**31.844.501**	**559.928**	**345.367**	**32.749.796**	***Ending balance***

13. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

a. Rincian dari piutang pembiayaan konsumen Entitas Anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

Berikut adalah perubahan nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dengan klasifikasi diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

13. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES *(continued)*

a. Details of Subsidiary's consumer financing receivables are as follows (continued):

Changes in carrying amount of consumer financing receivables classified as amortised upon stages for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows (continued):

	2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Saldo awal tahun	18.139.856	676.126	292.340	19.108.322	*Beginning balance*
Transfer ke/(dari) *stage* 1	38.526	(39.868)	1.342	-	*Transfer to/(from) stage 1*
Transfer ke/(dari) *stage* 2	49.570	(48.280)	(1.290)	-	*Transfer to/(from) stage 2*
Transfer ke/(dari) *stage* 3	(28.666)	56.572	(27.906)	-	*Transfer to/(from) stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	18.199.286	644.550	264.486	19.108.322	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(7.325.476)	196.652	653.266	(6.475.558)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	13.082.246	148.990	88.222	13.319.458	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.239.106)	(119.162)	(115.430)	(1.473.698)	*Financial assets derecognised*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(4.282)	(24.550)	(691.965)	(720.797)	*Written-off financial assets*
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	4.513.382	201.930	(65.907)	4.649.405	*Total increase/(decrease) during the year*
Saldo akhir tahun	**22.712.668**	**846.480**	**198.579**	**23.757.727**	***Ending balance***

b. Rincian dari piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

b. Details of consumer financing receivables by Bank Indonesia's collectibility are as follows:

	2023	**2022**	
Lancar	30.685.547	22.426.377	*Current*
Dalam perhatian khusus	1.718.882	1.127.591	*Special mention*
Kurang lancar	156.031	86.362	*Substandard*
Diragukan	186.996	105.737	*Doubtful*
Macet	2.340	11.660	*Loss*
Total	32.749.796	23.757.727	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(713.044)	(610.361)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**32.036.752**	**23.147.366**	***Net***

13. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) / ***13. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES*** *(continued)*

c. Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen adalah sebagai berikut: / *c. Average of effective interest rate charged to customers are as follows:*

	2023	2022	
Mobil	12,31%	13,79%	*Car*
Sepeda motor	23,72%	24,77%	*Motorcycle*

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut: / *d. Movements of allowance for impairment losses on consumer financing receivables are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	610.361	475.015	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 46)	1.277.661	708.402	*Allowance during the year (Note 46)*
Penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen	-	134.639	*Cash recoveries from written-offs consumer financing receivables*
Penghapusbukuan	(1.167.313)	(720.797)	*Write-offs*
Lain-lain	(7.665)	13.102	*Others*
Saldo akhir tahun	**713.044**	**610.361**	***Ending balance***

	2023				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	415.028	108.061	87.272	610.361	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):					*Transfer to/(from):*
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	21.775	(19.036)	(2.739)	-	*12 months expected credit losses (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	(29.846)	33.759	(3.913)	-	*Lifetime expected credit losses - non-impaired (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(11.465)	(41.738)	53.203	-	*Lifetime expected credit losses - impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	395.492	81.046	133.823	610.361	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(106.754)	151.325	1.224.336	1.268.907	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	234.091	46.747	54.049	334.887	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(55.510)	(83.213)	(187.410)	(326.133)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan tahun berjalan	71.827	114.859	1.090.975	1.277.661	*Total allowance during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(12.052)	(61.217)	(1.094.044)	(1.167.313)	*Written-off financial assets*
Penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	-	*Cash recoveries from written-offs consumer financing receivables*
Lain-lain	4.668	(12.686)	353	(7.665)	*Others*
Saldo akhir tahun	**459.935**	**122.002**	**131.107**	**713.044**	***Ending balance***

13. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut (lanjutan):

13. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES *(continued)*

d. Movements of allowance for impairment losses on consumer financing receivables are as follows (continued):

	2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	302.254	89.607	83.154	475.015	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):					*Transfer to/(from):*
Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1)	1.224	(1.844)	620	-	*12 months expected credit losses (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage* 2)	3.245	(2.971)	(274)	-	*Lifetime expected credit losses - non-impaired (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	1.458	12.628	(14.086)	-	*Lifetime expected credit losses - impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	308.181	97.420	69.414	475.015	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(51.200)	41.100	586.107	576.007	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	172.487	14.085	21.661	208.233	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(17.119)	(23.390)	(35.329)	(75.838)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan tahun berjalan	104.168	31.795	572.439	708.402	*Total allowance during the year*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(4.282)	(24.550)	(691.965)	(720.797)	*Written-off financial assets*
Penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen	-	-	134.639	134.639	*Cash recoveries from written-offs consumer financing receivables*
Lain-lain	6.961	3.396	2.745	13.102	*Others*
Saldo akhir tahun	**415.028**	**108.061**	**87.272**	**610.361**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on consumer financing receivables is adequate.

e. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

e. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.

f. Piutang pembiayaan konsumen yang menjadi jaminan atas efek-efek yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.374.511 dan Rp1.718.119 (Catatan 30).

f. Consumer financing receivables pledged as collateral for debt securities issued as of 31 December 2023 and 2022 are Rp3,374,511 and Rp1,718,119, respectively (Note 30).

g. Piutang pembiayaan konsumen yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.688.988 dan Rp13.515.545 (Catatan 36f).

g. Consumer financing receivables pledged as collateral for fund borrowing as of 31 December 2023 and 2022 are Rp17,688,988 and Rp13,515,545, respectively (Note 36f).

h. Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Entitas Anak menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Entitas Anak.

h. As a collateral to the customer financing receivables, the Subsidiaries received Vehicles Ownership Certificate ("BPKB") from its customer for every vehicle financed by the Subsidiaries.

14. INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN / *14. NET INVESTMENT FINANCE LEASES*

a. Rincian dari investasi bersih dalam sewa pembiayaan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

a. Details of Subsidiaries's net investment finance leases are as follows:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
Piutang sewa pembiayaan bruto	6.345.951	6.761.548	*Gross lease financing receivables*
Piutang sewa pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain *without recourse* - bruto	(28.009)	(102.811)	*Finance lease receivables jointly funded other parties without recourse - gross*
Nilai sisa terjamin	2.672.995	2.551.829	*Guaranteed residual value*
Pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan	(828.700)	(786.177)	*Deferred lease income*
Simpanan jaminan	(2.672.995)	(2.551.829)	*Security deposit*
Total investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.489.242	5.872.560	*Total net investment finance leases*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(70.170)	(139.173)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**5.419.072**	**5.733.387**	***Net***

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Entitas Anak atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 60 bulan.

Financing period for contracts disbursed by the Subsidiaries on motor vehicles ranges between 12 - 60 months.

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Details of investment finance leases - gross, based on the maturity date are as follows:

	2023	2022	
Tahun			*Year*
2023	-	3.524.821	*2023*
2024	3.462.663	2.317.015	*2024*
2025 dan sesudahnya	2.883.288	919.712	*2025 and later*
	6.345.951	6.761.548	
Piutang sewa pembiayaan yang dibiayai bersama pihak-pihak lain *without recourse* - bruto	(28.009)	(102.811)	*Finance lease receivables jointly funded by other parties without recourse - gross*
Nilai sisa terjamin, pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan	(828.700)	(786.177)	*Guaranteed residual value, deferred lease income and security deposit*
Piutang sewa pembiayaan	**5.489.242**	**5.872.560**	***Finance leases receivable***

14. INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

a. Rincian dari investasi bersih dalam sewa pembiayaan Entitas Anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

Berikut adalah perubahan nilai tercatat investasi bersih dalam sewa pembiayaan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage*:

14. NET INVESTMENT FINANCE LEASES (continued)

a. Details of Subsidiaries's net investment finance leases are as follows (continued):

Movements in carrying amount of investment finance leases classified as at amortised cost upon stages are as follows:

	2023				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***At amortised cost***
Saldo awal tahun	5.676.950	168.820	26.790	5.872.560	*Beginning balance*
Transfer ke/(dari) *stage* 1	31.077	(29.625)	(1.452)	-	*Transfer to/(from) stage 1*
Transfer ke/(dari) *stage* 2	(245.387)	248.808	(3.421)	-	*Transfer to/(from) stage 2*
Transfer ke/(dari) *stage* 3	(14.323)	(46.353)	60.676	-	*Transfer to/(from) stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	5.448.317	341.650	82.593	5.872.560	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.876.707)	(71.649)	74.314	(1.874.042)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.484.571	40.857	3.471	2.528.899	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(762.804)	(132.871)	(66.377)	(962.052)	*Financial assets derecognised*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(792)	(409)	(74.922)	(76.123)	*Written-off financial assets*
Total penurunan tahun berjalan	(155.732)	(164.072)	(63.514)	(383.318)	*Total decrease during the year*
Saldo akhir tahun	**5.292.585**	**177.578**	**19.079**	**5.489.242**	***Ending balance***

	2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi					***At amortised cost***
Saldo awal tahun	4.688.485	111.219	24.069	4.823.773	*Beginning balance*
Transfer ke/(dari) *stage* 1	(5.800)	5.001	799	-	*Transfer to/(from) stage 1*
Transfer ke/(dari) *stage* 2	32.725	(36.476)	3.751	-	*Transfer to/(from) stage 2*
Transfer ke/(dari) *stage* 3	4.555	17.387	(21.942)	-	*Transfer to/(from) stage 3*
Total saldo awal setelah pengalihan	4.719.965	97.131	6.677	4.823.773	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.826.079)	61.164	62.590	(1.702.325)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.877.992	31.160	12.811	2.921.963	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(94.859)	(20.534)	(14.199)	(129.592)	*Financial assets derecognised*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(69)	(101)	(41.089)	(41.259)	*Written-off financial assets*
Total kenaikan tahun berjalan	956.985	71.689	20.113	1.048.787	*Total increase during the year*
Saldo akhir tahun	**5.676.950**	**168.820**	**26.790**	**5.872.560**	***Ending balance***

14. INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

14. NET INVESTMENT FINANCE LEASES *(continued)*

b. Rincian dari investasi bersih dalam sewa pembiayaan berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

b. Details of net investment finance leases by Bank Indonesia's collectibility as of are as follows:

	2023	2022	
Lancar	5.257.583	5.676.952	*Current*
Dalam perhatian khusus	212.580	168.819	*Special mention*
Kurang lancar	5.957	8.157	*Substandard*
Diragukan	13.122	18.632	*Doubtful*
Total	5.489.242	5.872.560	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(70.170)	(139.173)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**5.419.072**	**5.733.387**	***Net***

c. Rata-rata suku bunga efektif yang dikenakan kepada konsumen adalah sebagai berikut:

c. Average of effective interest rate charged to customers are as follows:

	2023	2022	
Mobil	13,26%	10,28%	*Car*
Alat berat	11,53%	11,85%	*Heavy equipment*
Mesin	11,89%	12,39%	*Machine*

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai investasi bersih dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

d. Movements of allowance for impairment losses on net investment finance leases are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	139.173	129.967	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 46)	7.120	32.438	*Allowance during the year (Note 46)*
Penerimaan kembali investasi bersih dalam sewa pembiayaan	-	18.027	*Recovery from written-off net investment finance leases*
Penghapusbukuan	(76.123)	(41.259)	*Write-offs*
Saldo akhir tahun	**70.170**	**139.173**	***Ending balance***

14. INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

14. NET INVESTMENT FINANCE LEASES (continued)

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai investasi bersih dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut (lanjutan):

d. Movements of allowance for impairment losses on net investment finance leases are as follows (continued):

	2023				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	95.289	34.345	9.539	139.173	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):					*Transfer to/(from):*
Kerugian kredit ekpektasian 12 bulan (*stage* 1)	2.584	(2.447)	(137)	-	*12 months expected credit losses (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai *(stage* 2)	(4.088)	4.821	(733)	-	*Lifetime expected credit losses - non-impaired (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	(374)	(4.549)	4.923	-	*Lifetime expected credit losses - impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	93.411	32.170	13.592	139.173	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(36.401)	2.691	86.483	52.773	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.213	14.891	1.526	23.630	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(17.360)	(30.462)	(21.461)	(69.283)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/(pembalikan) tahun berjalan	(46.548)	(12.880)	66.548	7.120	*Total allowance/(reversal) during the year*
Penerimaan kembali investasi bersih dalam sewa pembiayaan	-	-	-	-	*Recovery from written-off net investment finance leases*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(792)	(409)	(74.922)	(76.123)	*Written-off financial assets*
Saldo akhir tahun	**46.071**	**18.881**	**5.218**	**70.170**	***Ending balance***

	2022				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	104.092	19.058	6.817	129.967	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):					*Transfer to/(from):*
Kerugian kredit ekpektasian 12 bulan (*stage* 1)	(1.151)	955	196	-	*12 months expected credit losses (stage 1)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai *(stage* 2)	1.661	(2.987)	1.326	-	*Lifetime expected credit losses - non-impaired (stage 2)*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (*stage* 3)	314	3.716	(4.030)	-	*Lifetime expected credit losses - impaired (stage 3)*
Total saldo awal setelah pengalihan	104.916	20.742	4.309	129.967	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(19.054)	17.815	32.613	31.374	*Net remeasurement of losses allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.886	-	-	10.886	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.390)	(4.111)	(4.321)	(9.822)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/(pembalikan) tahun berjalan	(9.558)	13.704	28.292	32.438	*Total allowance/(reversal) during the year*
Penerimaan kembali investasi bersih dalam sewa pembiayaan	-	-	18.027	18.027	*Recovery from written-off net investment finance leases*
Aset keuangan yang dihapusbuku	(69)	(101)	(41.089)	(41.259)	*Written-off financial assets*
Saldo akhir tahun	**95.289**	**34.345**	**9.539**	**139.173**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai investasi bersih dalam sewa pembiayaan telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on net investment finance lease is adequate.

14. INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

e. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62.A.

f. Investasi bersih dalam sewa pembiayaan yang menjadi jaminan atas efek-efek yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp873.111 dan Rp888.925 (Catatan 30).

g. Investasi bersih dalam sewa pembiayaan yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp874.067 dan Rp1.681.888 (Catatan 36f).

14. NET INVESTMENT FINANCE LEASES (continued)

e. *Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.*

f. Net investment finance leases pledged as collateral for debt securities issued as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp873,111 and Rp888,925, respectively (Note 30).

g. Net investment finance lease pledged as collateral for fund borrowings as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp874,067 and Rp1,681,888, respectively (Note 36f).

15. TAGIHAN AKSEPTASI

a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

15. ACCEPTANCE RECEIVABLES

a. By currency, related parties and third parties:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Tagihan kepada bank lain			*Receivables from other banks*
Pihak berelasi (Catatan 56)	533.263	352.448	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	254.190	355.892	*Third parties*
	787.453	708.340	
Tagihan kepada debitur			*Receivables from debtors*
Pihak berelasi (Catatan 56)	848.573	797.282	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	7.549.465	2.971.145	*Third parties*
	8.398.038	3.768.427	
Total Rupiah	9.185.491	4.476.767	*Total Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Tagihan kepada bank lain			*Receivables from other banks*
Pihak berelasi (Catatan 56)	667	-	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	221.627	143.125	*Third parties*
	222.294	143.125	
Tagihan kepada debitur			*Receivables from debtors*
Pihak berelasi (Catatan 56)	867.924	747.779	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	4.518.179	6.413.910	*Third parties*
	5.386.103	7.161.689	
Total mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	5.608.397	7.304.814	*Total foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	14.793.888	11.781.581	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(122.212)	(61.963)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**14.671.676**	**11.719.618**	***Net***

15. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga (lanjutan):

Berikut adalah perubahan nilai tercatat tagihan akseptasi dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage*:

***15. ACCEPTANCE RECEIVABLES** (continued)*

a. By currency, related parties and third parties (continued):

Movements in carrying amount of acceptance receivables classified as at amortised cost upon stages:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	11.267.881	87.483	2.515	423.702	11.781.581	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari) *stage 2*	(23.404)	23.404	-	-		*- Transfer to/(from) stage 2*
Total saldo awal setelah pengalihan	11.244.477	110.887	2.515	423.702	11.781.581	*Total beginning balance transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	46.734	4.765	-	(92.755)	(41.256)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	35.815.000	937.938	1.340	-	36.754.278	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(32.718.932)	(870.327)	(3.855)		(33.593.114)	*Financial assets derecognised*
Lain-lain	(102.329)	(5.272)	-	-	(107.601)	*Others*
Total kenaikan/ (penurunan) tahun berjalan	3.040.473	67.104	(2.515)	(92.755)	3.012.307	*Total increase/ (decrease) during the year*
Saldo akhir tahun	**14.284.950**	**177.991**	**-**	**330.947**	**14.793.888**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) *Not implement SFAS 71*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Biaya perolehan diamortisasi						***At amortised cost***
Saldo awal tahun	8.930.973	1.296.209	1.824	44.438	10.273.444	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	5.183	1.158	-	379.264	385.605	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	34.726.091	1.308.262	8.924	-	36.043.277	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(32.286.918)	(2.628.423)	(8.233)	-	(34.923.574)	*Financial assets derecognised*
Lain-lain	(107.448)	110.277	-	-	2.829	*Others*
Total kenaikan/ (penurunan) tahun berjalan	2.336.908	(1.208.726)	691	379.264	1.508.137	*Total increase/ (decrease) during the year*
Saldo akhir tahun	**11.267.881**	**87.483**	**2.515**	**423.702**	**11.781.581**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71

*) *Not implement SFAS 71*

15. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / ***15. ACCEPTANCE RECEIVABLES** (continued)*

b. Berdasarkan jatuh tempo: / *b. By maturity:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	1.294.293	966.825	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	3.875.992	1.783.794	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	4.015.206	1.725.640	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	-	508	*6 - 12 months*
Total Rupiah	9.185.491	4.476.767	*Total Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 bulan	1.388.088	2.262.567	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	2.167.759	3.048.233	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	1.748.610	1.742.471	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	204.009	250.856	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	99.931	687	*Over 12 months*
Total mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	5.608.397	7.304.814	*Total foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	14.793.888	11.781.581	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(122.212)	(61.963)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**14.671.676**	**11.719.618**	***Net***

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia: / *c. By Bank Indonesia's collectability*

	2023	2022	
Lancar	14.786.829	11.716.282	*Current*
Dalam perhatian khusus	7.059	62.784	*Special mention*
Kurang lancar	-	2.515	*Substandard*
	14.793.888	11.781.581	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(122.212)	(61.963)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**14.671.676**	**11.719.618**	***Net***

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi: / *d. Movements of allowance for impairment losses on acceptance receivables:*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	61.963	196.693	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 46)	59.315	(146.934)	*Total allowance/(reversal) during the year (Note 46)*
Lain-lain*)	934	12.204	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**122.212**	**61.963**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currency translation.*

15. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

***15. ACCEPTANCE RECEIVABLES** (continued)*

d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi (lanjutan):

d. Movements of allowance for impairment losses on acceptance receivables (continued):

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	35.320	19.314	2.515	4.814	61.963	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from) stage 2*
Kerugian kredit ekspektasian Sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (*stage 2)*	(158)	158	-	-	-	*Lifetime expected losses - non-impaired (stage 2)*
Total saldo awal setelah pengalihan	35.162	19.472	2.515	4.814	61.963	*Total beginning balance transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(14.568)	(589)	-	(374)	(15.531)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	74.947	247.444	1.340	-	323.731	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(65.895)	(179.135)	(3.855)	-	(248.885)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	(5.516)	67.720	(2.515)	(374)	59.315	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	271	792	-	(129)	934	*Others***)*
Saldo akhir tahun	**29.917**	**87.984**	**-**	**4.311**	**122.212**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	15.999	177.254	1.824	1.616	196.693	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(12.551)	(3.163)	(537)	3.198	(13.053)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	68.780	251.291	8.923	-	328.994	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(44.450)	(410.193)	(8.232)	-	(462.875)	*Financial assets derecognised*
Total pembentukan/ (pembalikan) tahun berjalan	11.779	(162.065)	154	3.198	(146.934)	*Total allowance/ (reversal) during the year*
Lain-lain**)	7.542	4.125	537	-	12.204	*Others***)*
Saldo akhir tahun	35.320	19.314	2.515	4.814	61.963	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foreign currency translation*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on acceptance receivables is adequate.

e. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62A.

e. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62A.

16. PENYERTAAN SAHAM / *16. INVESTMENTS IN SHARES*

a. Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

a. The detail of investments in shares are as follows:

	2023	2022	
Penyertaan saham			*Investments in shares*
Pihak berelasi (Catatan 56)	652.420	1.775.847	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	1.209.067	981.747	*Third parties*
Total	1.861.487	2.757.594	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(34.123)	(68.640)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.827.364**	**2.688.954**	***Net***

Rincian dari penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The detail of investments in shares as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Nama Perusahaan/ *Investee companies*	Jenis usaha/ *Nature of Business*	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022	
		Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
Metode nilai wajar:/*Fair value method:*					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran/ *Fintech Lending*	15,72%	620.353	15,72%	1.697.394
PT Amartha Nusantara Raya	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran/ *Fintech Lending*	6,06%	254.170	9,10%	191.732
Sleekr Pte.Ltd.	SDM dan Akuntansi/ *HR and Accounting Platform*	3,29%	160.603	3,74%	179.942
PT Ayopop Teknologi Indonesia	Antarmuka Pemrograman Aplikasi Keuangan/ *Open Finance API*	7,44%	138.072	2,24%	51.314
PT Intersoft Solutions	Layanan Digital/ *Digital Service*	16,11%	112.515	13,35%	55.272
Lunaria Annua Holding Pte.Ltd.	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran/ *Fintech Lending*	2,17%	105.211	2,36%	96.122
PT Privy Identitas Digital	Layanan Digital/ *Digital Service*	4,90%	95.201	4,90%	137.681
Qoala Technology Pte. Ltd.	Teknologi Asuransi/ *Insurance Technology*	1,77%	89.555	2,02%	98.749
PT Sinbad Karya Perdagangan	Layanan Digital/ *Digital Service*	3,57%	38.450	-	-
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran/ *Fintech Lending*	17,50%	37.440	17,50%	11.987
PT Crowde Membangun Bangsa	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran/ *Fintech Lending*	12,47%	35.964	12,47%	3.042
PT Agriaku Digital Indonesia	Teknologi Agrobisnis/ *Agricultural Technology*	1,58%	35.673	1,67%	29.626
PT Delos Teknologi Maritim Jaya	Teknologi Agrobisnis/ *Agricultural Technology*	4,61%	27.449	-	-
PT Investree Radhika Jaya	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran/ *Fintech Lending*	2,34%	16.857	2,34%	62.187
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp20.000)/ *Others (each less than Rp20,000)*	Beragam/*Various*	0,01% - 100,00%	46.369	0,01% - 100,00%	55.921

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) / *16. INVESTMENTS IN SHARES (continued)*

a. Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan:

Rincian dari penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

a. The detail of investments in shares are as follows (continued):

The detail of investments in shares as of 31 December 2023 and 2022 are as follows (continued):

Nama Perusahaan/ *Investee companies*	Jenis usaha/ *Nature of Business*	31 Desember/*December* 2023		31 Desember/*December* 2022	
		Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*
Metode biaya dan ekuitas:/*Cost and equity method:*					
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Pelayaran Niaga/ *Shipping Line*	17,67%	32.067	17,67%	32.067
PT AXA Insurance Indonesia (dahulu MAGI)	Asuransi Kerugian/ *General Insurance*	-	-	20,00%	46.385
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp20.000)/ *Others (each less than Rp20,000)*	Beragam/*Various*	0,00015% - 10%	15.538	0,00015% - 10%	8.173
			1.861.487		2.757.594
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai/ *Less: allowance for impairment losses*			(34.123)		(68.640)
Neto/*Net*			**1.827.364**		**2.688.954**

b. Klasifikasi penyertaan saham berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia:

b. Investments in shares by Bank Indonesia's collectibility:

	2023	2022	
Lancar	1.827.394	2.677.099	*Current*
Diragukan	-	46.385	*Doubtful*
Macet	34.093	34.110	*Loss*
	1.861.487	2.757.594	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(34.123)	(68.640)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**1.827.364**	**2.688.954**	***Net***

c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham:

c. Movements of allowance for impairment losses on investments in shares:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	68.640	14.595	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 46)	(33.917)	53.658	*(Reversal)/allowance during the year (Note 46)*
Lain-lain*)	(600)	387	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**34.123**	**68.640**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currency translation.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on investments in shares are adequate.

17. BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *17. PREPAID EXPENSES*

	2023	2022	
Biaya pemeliharaan gedung	724.951	636.656	*Building maintenance fee*
Biaya premi asuransi	454.000	359.648	*Prepaid insurance premium*
Biaya transaksi kredit	335.076	87.416	*Loans transaction fee*
Sewa dibayar dimuka	260.417	292.592	*Prepaid rent*
Biaya kepegawaian	123.986	114.839	*Employment expenses*
Biaya pemeliharaan sistem	64.303	14.935	*System maintenance fee*
Biaya transaksi treasuri	33.872	38.230	*Treasury transaction fee*
Biaya jasa tenaga kerja pihak ketiga	29.089	18.618	*Third-party labor service fee*
Biaya promosi	18.835	2.441	*Promotion fee*
Biaya jasa profesional	3.591	3.756	*Professional fee*
Lain-lain	671.669	326.372	*Others*
Total	**2.719.789**	**1.895.503**	***Total***

Sewa dibayar dimuka terutama merupakan sewa atas bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang Grup dan rumah dinas di seluruh Indonesia. Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu yang dibayar secara periodik, kecuali untuk sewa jangka waktu pendek dan memiliki aset pendasar bernilai rendah.

Prepaid rent mostly consists of rentals on buildings which are used as the Group branch's offices and official residence across Indonesia. Group recognises the right-of-use assets and liabilities for all leases with time contracts, which payable periodically, except for short term list and leases with low value underlying assets.

18. ASET TETAP / *18. FIXED ASSETS*

a. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *a. The details of fixed assets were as follows:*

	2023						
	Saldo awal*)/ *Beginning balance*)	Penambahan/ *Additions*	Revaluasi/ *Revaluation*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir**)/ *Ending balance***)	
Biaya perolehan/nilai revaluasi							*At cost/revaluation value*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	41.356.880	33.518	-	-	27.327	41.417.725	*Land*
Bangunan	11.158.849	154.831	-	(241.080)	824.486	11.897.086	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	15.148.376	403.071	-	(279.005)	314.621	15.587.063	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	250.858	11.322	-	(15.458)	317	247.039	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	3.121.729	2.483.635	-	-	(1.166.751)	4.438.613	*Construction in progress*
	71.036.692	3.086.377	-	(535.543)	-	73.587.526	
Aset hak guna	6.933.206	1.998.278	-	(203.979)	-	8.727.505	*Right of use assets*
	77.969.898	5.084.655	-	(739.522)	-	82.315.031	
Akumulasi penyusutan							*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	4.116.724	652.142	-	(7.036)	-	4.761.830	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	12.789.030	972.153	-	(278.970)	-	13.482.213	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	200.679	16.683	-	(15.458)	-	201.904	*Vehicles*
	17.106.433	1.640.978	-	(301.464)	-	18.445.947	
Aset hak guna	4.322.899	1.772.254	-	(203.776)	-	5.891.377	*Right of use assets*
	21.429.332	3.413.232	-	(505.240)	-	24.337.324	
Nilai buku neto							*Net book value*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah						41.417.725	*Land*
Bangunan						7.135.256	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer						2.104.850	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor						45.135	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan						4.438.613	*Construction in progress*
						55.141.579	
Aset hak guna						2.836.128	*Right of use assets*
						57.977.707	

*) Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat aset tetap yang direvaluasi sebesar Rp35.704.220 terdiri dari Bank sebesar Rp35.272.112 dan Entitas Anak sebesar Rp432.108.

**) Per tanggal 31 Desember 2023 terdapat aset tetap yang direvaluasi sebesar Rp35.704.220 terdiri dari Bank sebesar Rp35.272.112 dan Entitas Anak sebesar Rp432.108.

*) *As of 31 December 2022, fixed assets are revaluated to Rp35,704,220 which consist of Bank amounted to Rp35,272,112 and Subsidiaries amounted to Rp432,108.*

**) *As of 31 December 2023, fixed assets are revaluated to Rp35.704.220 which consist of Bank amounted to Rp35,272,112 and Subsidiaries amounted to Rp432,108.*

18. ASET TETAP (lanjutan)

a. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut (lanjutan):

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

a. The details of fixed assets were as follows (continued):

	2022						
	Saldo awal*)/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir*)/ *Ending balance***)**	
Biaya perolehan/nilai revaluasi							*At cost/revaluation value*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	35.703.009	845.040	4.565.748	-	243.083	41.356.880	*Land*
Bangunan	8.744.626	549.251	-	(1.423)	1.866.395	11.158.849	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	14.041.216	473.980	-	(52.242)	685.422	15.148.376	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	230.748	15.603	-	(944)	5.451	250.858	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	3.799.035	2.123.973	-	(928)	(2.800.351)	3.121.729	*Construction in progress*
	62.518.634	4.007.847	4.565.748	(55.537)	-	71.036.692	
Aset hak guna	4.984.633	2.255.067	-	(306.494)	-	6.933.206	*Right of use assets*
	67.503.267	6.262.914	4.565.748	(362.031)	-	77.969.898	
Akumulasi penyusutan							*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	3.554.636	563.517	-	(1.423)	(6)	4.116.724	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	11.855.255	985.823	-	(52.048)	-	12.789.030	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	185.647	15.970	-	(944)	6	200.679	*Vehicles*
	15.595.538	1.565.310	-	(54.415)	-	17.106.433	
Aset hak guna	2.762.937	1.852.876	-	(292.914)	-	4.322.899	*Right of use assets*
	18.358.475	3.418.186	-	(347.329)	-	21.429.332	
Nilai buku neto							*Net book value*
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah						41.356.880	*Land*
Bangunan						7.042.125	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer						2.359.346	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor						50.179	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan						3.121.729	*Construction in progress*
						53.930.259	
Aset hak guna						2.610.307	*Right of use assets*
						56.540.566	

*) Per tanggal 31 Desember 2021 terdapat aset tetap yang direvaluasi sebesar Rp31.138.472 terdiri dari Bank sebesar Rp30.706.364 dan Entitas Anak sebesar Rp432.108.

**) Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat aset tetap yang direvaluasi sebesar Rp35.704.220 terdiri dari Bank sebesar Rp35.272.112 dan Entitas Anak sebesar Rp432.108.

*) *As of 31 December 2021, fixed assets are revaluated to Rp31,138,472 which consist of Bank amounted to Rp30,706,364 and Subsidiaries amounted to Rp432,108.*

**) *As of 31 December 2022, fixed assets are revaluated to Rp35,704,220 which consist of Bank amounted to Rp35,272,112 and Subsidiaries amounted to Rp432,108.*

Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	**2022**	
Bangunan	2.903.663	2.336.700	*Buildings*
Komputer dan perangkat keras lainnya yang belum terinstalasi	982.019	713.396	*Computers and other hardware that have not been installed*
Tanah	430.513	-	*Land*
Perlengkapan dan inventaris kantor	43.963	47.165	*Office equipment and inventory*
Kendaraan bermotor	22	344	*Vehicles*
Lain-lain	78.433	24.124	*Others*
	4.438.613	**3.121.729**	

18. ASET TETAP (lanjutan)

a. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut (lanjutan):

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk komputer dan perangkat keras lainnya yang belum terinstalasi adalah masing-masing berkisar 22,00% - 85,00%.

Aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

a. The details of fixed assets were as follows (continued):

The estimated percentage of completion of construction in progress as of 31 December 2023 and 31 December 2022 for computers and other hardware that have not been installed was ranging between 22.00% - 85.00%, respectively.

Right of use assets as of 31 December 2023 are as follows:

	2023					
	Saldo 1 Januari/ *January* 2023	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo 31 Desember/ *December* 2023**	
Biaya perolehan						*At cost*
Bangunan	5.815.928	1.740.098	(200.477)	-	7.355.549	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	59.454	3.260	(3.502)	-	59.212	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	1.057.824	254.920	-	-	1.312.744	*Vehicles*
	6.933.206	1.998.278	(203.979)	-	8.727.505	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	3.618.037	1.467.568	(200.274)	-	4.885.331	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	34.665	12.565	(3.502)	-	43.728	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	670.197	292.121	-	-	962.318	*Vehicles*
	4.322.899	1.772.254	(203.776)		5.891.377	
Nilai buku neto						*Net book value*
Bangunan					2.470.218	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer					15.484	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor					350.426	*Vehicles*
					2.836.128	

Aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Right of use assets as of 31 December 2022 are as follows:

	2022					
	Saldo 1 Januari/ *January* 2022	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo 31 Desember/ *December* 2022**	
Biaya perolehan						*At cost*
Bangunan	4.048.156	1.999.439	(231.667)	-	5.815.928	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	29.083	30.371	-	-	59.454	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	907.394	225.257	(74.827)	-	1.057.824	*Vehicles*
	4.984.633	2.255.067	(306.494)	-	6.933.206	
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Bangunan	2.293.803	1.553.974	(229.740)	-	3.618.037	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	12.370	22.295	-	-	34.665	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	456.764	276.607	(63.174)	-	670.197	*Vehicles*
	2.762.937	1.852.876	(292.914)	-	4.322.899	
Nilai buku neto						*Net book value*
Bangunan					2.197.891	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer					24.789	*Furniture and fixtures, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor					387.627	*Vehicles*
					2.610.307	

18. ASET TETAP (lanjutan)

a. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian:

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

a. The details of fixed assets were as follows (continued):

The table below shows the right of use expenses in consolidated statement of profit or loss:

	2023			
	Beban penyusutan aset hak guna/ *Depreciation of right of use assets*	**Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expenses of lease liabilities***	**Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek/ *Expenses related to short term lease***	
Bangunan	1.467.568	41.972	15.149	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	12.565	1.589	12.911	*Furniture and fixture, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	292.121	25.553	2.237	*Vehicles*
Total yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	**1.772.254**	**69.114**	**30.297**	***Total recognised in consolidated statement of profit or loss***

	2022			
	Beban penyusutan aset hak guna/ *Depreciation of right of use assets*	**Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expenses of lease liabilities***	**Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek/ *Expenses related to short term lease***	
Bangunan	1.553.974	37.049	20.596	*Building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	22.295	1.922	4.095	*Furniture and fixture, office equipment and computer*
Kendaraan bermotor	276.607	25.054	2.154	*Vehicles*
Total yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	**1.852.876**	**64.025**	**26.845**	***Total recognised in consolidated statement of profit or loss***

Bank menyewa beberapa aset termasuk kendaraan, rumah dinas, gedung kantor, ruang ATM dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 2 (dua) tahun.

Bank juga memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Bank entered into rental agreement for a number of assets including vehicle, office house, office building, ATM spaces and others. The average lease term is 2 (two) years.

Bank also has a number lease with leases terms 12 months or less and low value underlying asset. Bank applied the exception for the short term leases and low value leases.

18. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Penyerahan (*Build, Operate, Transfer*)

Pada tanggal 28 Desember 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Penyerahan (*Build, Operate, Transfer*) atas aset di Jalan Proklamasi No. 31 Jakarta untuk jangka waktu 30 tahun dengan Mitra Kerjasama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. dalam rangka optimalisasi aset strategis milik Bank Mandiri dengan mengutamakan kerjasama sinergi BUMN.

2. Revaluasi

Revaluasi Tahun 2015 - 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, dengan perubahan pertama melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2016 tanggal 19 Februari 2016, Grup telah menugaskan perusahaan jasa penilai terdaftar untuk melaksanakan penilaian (revaluasi) aset tetap atas tanah.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan (ANA) dan KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun dan Rekan (MBPRU). Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP) poin 17 dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) tahun 2015.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, KJPP memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh KJPP adalah pendekatan pasar dan pendekatan biaya.

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

b. Others

1. The Joint Agreement of Build, Operate, Transfer

On 28 December 2018, the Bank has signed the joint agreement of Build, operate, and transfer for asset at Jl Proklamasi No. 31 Jakarta for 30 years period with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. in order to optimize the strategic assets of Bank Mandiri by prioritizing the cooperation through BUMN synergy.

2. Revaluation

Revaluation year 2015 - 2016

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation (PMK) No. 191/PMK.010/2015 dated 15 October 2015 regarding Revaluation of Fixed Assets for Tax Purposes for Applications Filed in 2015 and 2016, with the first amendment through the Minister of Finance Regulation No. 233/PMK.03/2015 dated 21 December 2015 and the second amendment of the Minister of Finance Regulation No. 29/PMK.03/2016 dated 19 February 2016. The Group has assigned registered independent appraisers to assess (revaluate) its fixed asset (land).

The valuations of land are performed by the external independent appraisers, Public Appraiser Firm (KJPP) Amin, Nirwan, Alfiantori and Partners (ANA) and KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun and Partners (MBPRU). Appraisals are performed based on the Concept and General Principles of Appraisers (KPUP) article 17 in Indonesian Appraisal Standards (SPI) year 2015.

In the fair value measurement of the land, the KJPP consider a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the KJPP are market approach and cost approach.

18. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

2. Revaluasi (lanjutan)

Revaluasi Tahun 2015 – 2016 (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Penilaian dari KJPP MBPRU tanggal 21 Desember 2015 (Entitas Anak) dan 11 April 2016 (Bank) serta KJPP ANA tanggal 13 April 2016 (Bank), nilai aset tetap berikut mengalami kenaikan nilai adalah sebagai berikut:

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

b. Others (continued)

2. Revaluation (continued)

Revaluation year 2015 – 2016 (continued)

Based on the Assessment Report of the KJPP MBPRU dated 21 December 2015 (Subsidiaries) and 11 April 2016 (Bank) and KJPP ANA dated 13 April 2016 (Bank), the value of fixed assets and its increase are as follows:

Aset tetap	Nilai pasar/ *Fair value*	Nilai buku/ *Book value*	Kenaikan nilai (sebelum pajak)/ *Increase in value (before tax)*	*Fixed assets*
Tanah	28.822.150	2.880.116	25.942.034	*Land*

Untuk menentukan nilai pasar tersebut, KJPP ANA dan KJPP MBPRU menggunakan metodologi penilaian Pendekatan Pasar (*Market Approach*) SPI 2015-KPUP 17 dengan metode perbandingan langsung.

To determine the fair value, KJPP ANA and KJPP MBPRU uses the assessment to methodology of Market Approach SPI 2015-KPUP 17 with direct comparison method.

Hasil revaluasi aset tetap untuk Bank tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar melalui Surat Keputusan No. KEP-418/WPJ.19/2016 tanggal 25 Mei 2016. Hasil revaluasi aset tetap Entitas Anak juga telah disetujui oleh DJP pada tanggal 8 Januari 2016.

The results of revaluation of fixed assets of the Bank were approved by the Directorate General of Taxes (DGT) through the Head of Regional Office Large Tax Payer through Decree No. KEP-418/WPJ.19/2016 dated 25 May 2016. The results of revaluation of fixed assets of subsidiary had been approved by the DGT on 8 January 2016.

Revaluasi Tahun 2019

Revaluation Year 2019

Di tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah. Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilaian independen eksternal KJPP Yanuar Bey dan Rekan dan KJPP Iwan Bachron dan Rekan. Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Konsep dan Prinsip Umum Penilaian poin 17 dalam SPI tahun 2018.

In 2019, Bank has performed land revaluation. The valuation of land was performed by external independent appraisers of the KJPP Yanuar Bey and Partners and KJPP Iwan Bachron and Partners. The assessment was performed in accordance with and subject to the provisions of the General Assessment Concepts and Principles article 17 in the SPI of year 2018.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, KJPP memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh KJPP adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya.

In the fair value measurement of the land, the KJPP takes into account the market participants' ability to generate economic benefits to the highest and best use of the assets or by selling assets to other market participants would use the asset on the highest and best use condition. The valuation methods used by KJPP are the market approach, income approach and cost approach.

18. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

2. Revaluasi (lanjutan)

Revaluasi Tahun 2015 - 2016 (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Penilaian dari KJPP Yanuar Bey tanggal 8 Juli 2019 dan KJPP Iwan Bachron tanggal 9 Agustus 2019, nilai aset tetap berikut kenaikan nilainya adalah sebagai berikut:

Aset tetap	Nilai pasar/ *Fair value*	Nilai buku/ *Book value*	Kenaikan nilai (sebelum pajak)/ *Increase in value (before tax)*	*Fixed assets*
Tanah	33.596.578	29.725.630	3.870.948	*Land*

Untuk menentukan nilai pasar tersebut, KJPP Yanuar Bey dan rekan dan KJPP Iwan Bachron dan rekan menggunakan metodologi penilaian Pendekatan Pasar (*Market Approach*) SPI 2018-KPUP 15.2 dengan metode perbandingan langsung.

Revaluasi Tahun 2022

Di tahun 2022, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah. Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilaian independen eksternal KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun dan Rekan dan KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan. Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Konsep dan Prinsip Umum Penilaian poin 17 dalam tahun 2018.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, KJPP memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh KJPP adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Berdasarkan Laporan Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (yang ditandatangani oleh Ir. Muhammad Adil Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert) dengan nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) STTD.PP-83/PM.2/2018) tertanggal 16 Desember 2022 dan KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan (yang ditandatangani oleh Dasa'at Alam Ratu, S.P., MAPPI (Cert) dengan nomor STTD STTD.PP-93/PM.2/2018) tertanggal 19 Desember 2022, nilai aset tetap berikut kenaikan nilainya adalah sebagai berikut:

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

b. Others (continued)

2. Revaluation (continued)

Revaluation year 2015 - 2016 (continued)

Based on the Appraisal Report of KJPP Yanuar Bey on 8 July 2019 and KJPP Iwan Bachron on 9 August 2019, the value of fixed assets and its value increase are as follows:

To determine the fair value, KJPP Yanuar Bey and partners and KJPP Iwan Bachron and partners use the market approach methodology of SPI 2018-KPUP 15.2 using direct comparison method.

Revaluation Year 2022

In 2022, the Bank performed revaluations of land. The valuations of land was performed by external independent appraisers of the KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun and Partners, and Dasa'at Yudistira and Partners. The valuations are performed in accordance with and subject to the provisions of the General Concepts and Principles of Assessment article 17 in the SPI of year 2018.

In assessing the fair value of land, KJPP takes into account the ability of market participants to generate economic benefits with the highest and best use of assets or by selling assets to other market participants who will use assets in the highest conditions and best use. The valuation method used by KJPP is the market approach, income approach and cost approach. Based on the Appraisal Report from, KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun and Partners (Signed by Ir. Muhammad Adil Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert) with Registered Letter (STTD) STTD.PP-83/PM.2/2018) on 16 December 2022 and KJPP Dasa'at Yudistira and Partners (Signed by Dasa'at Alam Ratu, S.P., MAPPI (Cert) with Registered Letter (STTD) STTD.PP-93/PM.2/2018) on 19 December 2022, the value of fixed assets and the increase in value are as follows:

Aset tetap	Nilai pasar/ *Fair value*	Nilai buku/ *Book value*	Kenaikan nilai (sebelum pajak)/ *Increase in value (before tax)*	*Fixed assets*
Tanah	38.639.890	34.074.142	4.565.748	*Land*

18. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

2. Revaluasi (lanjutan)

Untuk menentukan nilai pasar tersebut, KJPP Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun dan Rekan dan KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan menggunakan metodologi penilaian Pendekatan Pasar (*Market Approach*) SPI 2018-KPUP 15.2 dengan metode perbandingan langsung.

3. Penilaian pada nilai wajar aset yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah untuk tanah dengan menggunakan revaluasi, sedangkan untuk bangunan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai revaluasi tanah dan NJOP bangunan yang dimiliki Bank masing-masing bernilai Rp41.432.265 dan Rp5.409.575. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai revaluasi tanah dan NJOP bangunan yang dimiliki Bank masing-masing sebesar Rp41.371.421 dan Rp5.153.212. Pada tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 1 November 2023, terdapat properti terbengkalai yang direklasifikasi menjadi aset tetap. Aset tersebut berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. Kapten PA. Tendean No. 54 Pare-Pare dan Jl. MT. Haryono Kav. 19, Jakarta Selatan dengan total nilai buku sebesar Rp16.546.

4. Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.728.045 dan Rp5.667.200.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen non-keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen non-keuangan:

(i) Tingkat 1: Dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
(ii) Tingkat 2: Teknik valuasi dimana seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
(iii) Tingkat 3: Teknik valuasi dimana seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat tidak dapat diobservasi dari data pasar.

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

b. Others (continued)

2. Revaluation (continued)

To determine market value, the Public Appraiser Firm (KJPP) Muttaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun and Partners and KJPP Dasa'at Yudistira and Partners use Market Approach methodology of SPI 2018-KPUP 15.2 with direct comparison method.

3. Assessment in the fair value of assets owned by the Bank on 31 December 2023 and 2022 uses revaluation method for lands and Sales Value of Taxable Object for Buildings ("NJOP"). As of 31 December 2023, the revaluation value of land and NJOP owned by the Bank was Rp41,432,265 and Rp5,409,575, respectively. As of 31 December 2022, the revaluation value of land and NJOP owned by the Bank was Rp41,371,421 and Rp5,153,212, respectively. On 2 October 2023 and 1 November 2023, there were abandoned properties reclassified as fixed assets. These assets consist of land and buildings located at Jl. Kapten PA. Tendean No. 54 Pare-Pare and Jl. MT. Haryono Kav. 19, South Jakarta, with a total book value of Rp16,546.

4. The value of land based on cost model as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp5,728,045 and Rp5,667,200, respectively.

The table below presents non-financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank to determine and disclose the fair value of non-financial instruments:

(i) Level 1: Quoted prices on active markets for identical assets or liabilities;
(ii) Level 2: Valuation technique in which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly;
(iii) Level 3: Valuation techniques in which all inputs have a significant effect on the recorded fair value that cannot be observed from market data.

2023

	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Tanah	-	41.432.265	-	41.432.265	*Land*

2022

	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Tanah	-	41.371.421	-	41.371.421	Land

18. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

4. Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.728.045 dan Rp5.667.200. (lanjutan)

   Nilai wajar tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar dan estimasi pendapatan dan biaya yang dihasilkan oleh aset. Harga pasar dari tanah yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter.

5. Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2023 sampai tahun 2042. Mengacu pada praktik di masa lampau, Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut.

6. Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank Mandiri telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah, aset dalam pembangunan dan aset sewa) untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam kepada PT Estika Jasa Tama dan PT Asuransi Dayin Mitra keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Krida Upaya Tunggal, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera keseluruhannya adalah pihak berelasi, dengan nilai jumlah pertanggungan asuransi berkisar Rp12.577.853 (31 Desember 2022: Rp11.334.849). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

7. Aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan oleh Bank Mandiri antara lain berupa mesin-mesin kantor, peralatan percetakan, peralatan kantor dan perumahan.

8. Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***18. FIXED ASSETS** (continued)*

b. Others (continued)

4. The value of land based on cost model as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp5,728,045 and Rp5,667,200, respectively. (continued)

   The fair value of land for level 2 is calculated using the comparison of market price approach and estimation of income and expenses generated by the asset. The market price of the land that most closely adjusted for differences in the primary attributes such as asset size, location and usage of assets. The most significant input in this assessment approach is the assumption of the price per meter.

5. Land rights acquired through Leasehold Certificate ("HGB") that can be renewed will expire between 2023 until 2042. Based on past experience, the Group believes that they can extend the HGB.

6. As of 31 December 2023, the Bank has insured its fixed assets (excluding land rights, construction in progress and the leased property) to cover potential losses against fire, theft and natural disaster to PT Estika Jasa Tama and PT Asuransi Dayin Mitra, in their entirety, are third parties in relation to PT Krida Upaya Tunggal, PT Asuransi Kredit Indonesia, and PT Asuransi Jasa Raharja Putera all of these insurance companies are related parties, with total insured amount approximately Rp12,577,853 (31 December 2022: Rp11,334,849). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

7. The fixed assets that have been fully depreciated but still in use by Bank Mandiri consist of several things such as office machine, printing office equipment and office houses.

8. Management believes that there is no indication on impairment of fixed assets as of 31 December 2023 and 2022.

19. ASET TAKBERWUJUD / *19. INTANGIBLE ASSETS*

2023

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balane*	
Nilai Perolehan						***At cost***
Perangkat lunak	9.060.895	322.542	-	568.742	9.952.179	*Software*
Goodwill	787.466	-	-	-	787.466	*Goodwill*
Aset *brand* Yokke	59.334	-	-	22.372	81.706	*Yokke brand assets*
Aset dalam pembangunan	1.804.345	1.612.117	-	(568.742)	2.847.720	*Construction in progress*
	11.712.040	1.934.659	-	22.372	13.669.071	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	6.595.087	1.141.998	-	-	7.737.085	*Software*
Aset *brand* Yokke	23.344	11.672	-	22.372	57.388	*Yokke brand assets*
	6.618.431	1.153.670	-	22.372	7.794.473	
Nilai buku neto						***Net book value***
Perangkat lunak					2.215.094	*Software*
Goodwill					787.466	*Goodwill*
Aset *brand* Yokke					24.318	*Yokke brand assets*
Aset dalam pembangunan					2.847.720	*Construction in progress*
					5.874.598	

2022

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balane*	
Nilai Perolehan						***At cost***
Perangkat lunak	7.155.215	172.647	-	1.733.033	9.060.895	*Software*
Goodwill	787.466	-	-	-	787.466	*Goodwill*
Aset *brand* Yokke	59.334	-	-	-	59.334	*Yokke brand assets*
Aset dalam pembangunan	2.632.746	919.152	(14.520)	(1.733.033)	1.804.345	*Construction in progress*
	10.634.761	1.091.799	(14.520)	-	11.712.040	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	5.511.330	1.083.779	(22)	-	6.595.087	*Software*
Aset *brand* Yokke	11.672	11.672	-	-	23.344	*Yokke brand assets*
	5.523.002	1.095.451	(22)	-	6.618.431	
Nilai buku neto						***Net book value***
Perangkat lunak					2.465.808	*Software*
Goodwill					787.466	*Goodwill*
Aset *brand* Yokke					35.990	*Yokke brand assets*
Aset dalam pembangunan					1.804.345	*Construction in progress*
					5.093.609	

Perangkat lunak diamortisasi selama umur ekonomis yaitu 5 tahun (Catatan 2.r.i).

Software is amortised over its economic useful life, which is 5 years (refer to Note 2.r.i).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, termasuk dalam aset takberwujud adalah aset *brand* Yokke dari Entitas Anak PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) senilai Rp24.318 dan Rp35.990 (neto setelah akumulasi amortisasi) diamortisasi selama umur ekonomis 7 tahun dengan metode garis lurus.

As of 31 December 2023 and 2022, included in intangible assets is the Yokke brand asset from its Subsidiary, namely PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) worth Rp24,318 and Rp35,990 (net - accumulated amortisation) amortised over its economic useful life of 7 years using the straight-line method.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, termasuk dalam perangkat lunak adalah aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp2.847.721 dan Rp1.804.345. Estimasi persentase tingkat penyelesaian perangkat lunak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berkisar 5,00% - 85,00% (31 Desember 2022: 5,00% - 85,00%).

As of 31 December 2023 and 2022, included in the software balance are construction in progress for software amounted to Rp2,847,721 and Rp1,804,345, respectively. The estimated percentage of completion of software as of 31 December 2023 was ranging between 5.00% - 85.00% (31 December 2022: 5.00% - 85.00%).

Goodwill merupakan nilai selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar dari aset bersih yang diakuisisi. Secara berkala, *goodwill* dievaluasi terhadap penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada dari aset takberwujud yang mengalami penurunan nilai.

Goodwill arises from the difference between the cost of acquisition with the fair value of Subsidiaries assets acquired. Goodwill is assessed regularly for impairment. As of 31 December 2023 and 2022, there are no impairment of goodwill.

20. ASET LAIN-LAIN / *20. OTHER ASSETS*

	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Pendapatan yang masih akan diterima	7.560.683	7.423.143	*Accrued income Receivables from customer*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	7.379.308	2.078.851	*Receivables related to ATM and credit card transactions*
Piutang transaksi nasabah	2.951.299	2.311.787	*Receivables from customer transactions*
Aset *ijarah*	2.190.107	1.484.573	*Ijarah assets*
Agunan yang diambil alih	1.112.684	1.145.931	*Repossesed assets*
Uang muka	825.973	347.593	*Advance payment*
Penjualan efek-efek yang masih akan diterima	568.178	225.715	*Receivables from sales of marketable securities*
Biaya akuisisi kontrak asuransi yang ditangguhkan	489.877	499.951	*Deferred insurance contract acquisition fee*
Tagihan kepada pemerintah	461.273	1.411.257	*Receivables from government*
Tagihan biaya kredit dan *trade finance*	322.675	253.109	*Receivables from credit and trade finance fee*
Tagihan kepada pemegang polis	296.989	224.683	*Receivables from policyholders*
Piutang reasuransi dan koasuransi	279.478	242.834	*Reinsurance and coinsurance receivables*
Aset dari *unit-link*	228.088	819.771	*Assets from unit-link*
Piutang *ijarah*	218.400	13.278	*Ijarah receivables*
Setoran jaminan yang dibayarkan	154.428	150.643	*Security deposits paid*
Perlengkapan kantor	137.248	123.927	*Office supplies*
Aset reasuransi	111.904	89.604	*Reinsurance assets*
Properti terbengkalai	80.737	97.284	*Abandoned properties*
Piutang *management fee*	79.565	70.871	*Management fee receivables*
Tagihan spot	2.896	22.901	*Spot receivables*
Tagihan terkait dengan transaksi *remittance*	242	144	*Receivables related to remittance transactions*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	-	1.773.074	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
Lain-lain	3.682.333	2.741.846	*Others*
Total	29.134.365	23.552.770	*Total*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor	3.718.376	-	*Foreign Exchange Term Deposit from Export Activities*
Pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 62.B.(iv))	2.697.497	2.109.350	*Accrued income (Note 62.B.(iv))*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan (Catatan 62.B.(iv))	1.391.944	1.984.881	*Receivables from government bonds pledged as collateral (Note 62.B.(iv))*
Tagihan terkait dengan transaksi *remittance*	902.023	886.575	*Receivables related to remittance transactions*
Tagihan biaya kredit dan *trade finance*	80.347	72.850	*Receivables from credit and trade finance fee*
Setoran jaminan yang dibayarkan	25.225	25.831	*Security deposits paid*
Piutang transaksi nasabah (Catatan 62.B.(iv))	17.837	30.849	*Receivables from customer transactions (Note 62.B.(iv))*
Piutang reasuransi dan koasuransi	8.440	8.397	*Reinsurance and coinsurance receivables*
Uang muka	6.945	4.890	*Advance payment*
Penjualan efek-efek yang masih akan diterima (Catatan 62.B.(iv))	2.533	5.935	*Receivables from sales of marketable securities (Note 62.B.(iv))*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit (Catatan 62.B.(iv))	85	2.023	*Receivables related to ATM transactions and credit card (Note 62.B.(iv))*
Tagihan kepada pemegang polis (Catatan 62.B.(iv))	8	7	*Receivables from policyholders (Note 62.B.(iv))*
Tagihan spot	-	207	*Spot receivables*
Lain-lain	1.489.116	1.759.496	*Others*
Total	10.340.376	6.891.291	*Total*
	39.474.741	30.444.061	
Dikurangi: penyisihan lainnya	(1.596.320)	(1.746.417)	*Less: other allowances*
Neto	**37.878.421**	**28.697.644**	***Net***

20. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Pendapatan yang masih akan diterima terdiri dari bunga yang masih akan diterima dari penempatan, efek-efek, obligasi pemerintah, kredit yang diberikan, tagihan lainnya - transaksi perdagangan serta provisi dan komisi yang masih akan diterima.

Piutang transaksi nasabah terutama merupakan piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek Entitas Anak. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, termasuk di dalam piutang transaksi nasabah adalah piutang yang mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp10.003 dan Rp6.416.

Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

Aset *Ijarah* merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah*, *ijarah* multijasa dan *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") dari Entitas Anak.

Aset dari *unit-link* terkait dengan transaksi piutang portofolio efek dari kontrak *unit-link,* dari reksadana kepada Entitas Anak.

Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit terdiri dari tagihan atas transaksi ATM dalam jaringan ATM Bersama, Prima dan *Link* dan tagihan atas Visa, Master Card dan JCB untuk transaksi kartu kredit.

Tagihan atas Obligasi Pemerintah yang diagunkan merupakan tagihan terkait transaksi *repo to maturity* dengan pihak ketiga, dimana Bank Mandiri mengalihkan obligasi pemerintah ROI 23NN dengan nilai nominal sebesar USD37.000.000 (nilai penuh), ROI 24 dengan nilai nominal sebesar USD40.940.000 (nilai penuh) dan ROI 25 dengan nilai nominal sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) dan kemudian mencatat tagihan sebesar nilai pasar (*market value*) dari ROI 23NN, ROI 24 dan ROI 25 tersebut. Tagihan ini akan diselesaikan secara neto dengan penyelesaian liabilitas Bank Mandiri kepada *counterparty*, sebesar USD24.926.000 (nilai penuh) pada tanggal jatuh tempo 11 Januari 2023, USD31.270.000 (nilai penuh) pada tanggal jatuh tempo 15 Januari 2024 dan USD34.782.000 (nilai penuh) pada tanggal jatuh tempo 15 Januari 2025 (Catatan 36d).

Biaya akuisisi kontrak asuransi yang ditangguhkan terdiri dari biaya akuisisi untuk produk asuransi *unit link back end loading* dan *unit link hybrid* yang ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus dari Entitas Anak.

Tagihan kepada pemegang polis merupakan tagihan Entitas Anak kepada pemegang polis atas premi produk non *unit-link* pemegang polis.

***20. OTHER ASSETS** (continued)*

Accrued income consist of interest accrued from the placement, marketable securities, government bonds, loans, others receivables - trade transactions and fees and commissions.

Receivables from customer transactions mainly consist of receivables arising from securities transactions of Bank's Subsidiaries. As of 31 December 2023 and 2022, included in receivables from customer transactions is an impaired portfolio amounted to Rp10,003 and Rp6,416, respectively.

Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.

Ijarah assets are lease assets from ijarah transaction, ijarah multiservices, ijarah muntahiyah bittamlik ("IMBT") from Subsidiary.

Assets from unit-link is related to receivables from securities portfolio transactions of unit-link contracts in Subsidiary's mutual fund.

Receivables related to ATM and credit card transactions consist of receivable arising from ATM transactions within ATM Bersama, Prima and Link network as well as receivables from Visa, Master Card and JCB as a result of credit card transactions.

Receivables from government bonds pledged as collateral represent receivables related repo to maturity transactions with third parties, ROI 23NN with nominal value of USD37,000,000 (full amount), ROI 24 with nominal value of USD40,940,000 (full amount) and ROI 25 with nominal value of USD50,000,000 (full amount) and recorded receivables equivalent to the market value of ROI 23NN, ROI 24 and ROI 25. The receivables will be settled at net basis with settlement of Bank's liabilities to the counterparty amounted to USD24,926,000 (full amount) due on 11 January 2023, USD31,270,000 (full amount) due on 15 January 2024 and USD34,782,000 (full amount) due on 15 January 2025 (Note 36d).

Subsidiary deferred insurance contract acquisition fee consists of deferred acquisition cost of unit link back end loading and unit link hybrid insurance product and was amortised with straight-line method from Subsidiaries.

Receivables from policyholders represent receivables from the Subsidiary's to its policyholders related to premium of non unit-link products.

20. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penjualan efek-efek yang masih akan diterima merupakan tagihan yang timbul dari transaksi penjualan efek-efek yang jatuh tempo penyelesaiannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2024 dan 3 Januari 2023.

Lain-lain terutama terdiri dari rekening antar kantor, berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga dalam rangka transaksi, antara lain transaksi kliring dan lain-lain.

Mutasi penyisihan kerugian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	1.746.417	1.690.929	*Beginning balance*
(Pembalikan)/penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 47)	(153.700)	187.131	*(Reversal)/allowance during the year (Note 47)*
Lain-lain*)	3.603	(131.643)	*Others**)*
Saldo akhir tahun	**1.596.320**	**1.746.417**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Included effect of foreign currencies translation.*

Manajemen berpendapat bahwa total penyisihan kerugian aset lain-lain telah memadai.

***20. OTHER ASSETS** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, receivables from sales of marketable securities are receivables from sale of marketable securities with maturity date on 2 January 2024 dan 3 January 2023.

Others mainly consist of inter-office accounts, various form of receivables from transaction with third parties, including clearing transactions and others.

Movement of allowance for impairment losses of other assets are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses of other assets is adequate.

21. SIMPANAN NASABAH - GIRO DAN GIRO *WADIAH*

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)	95.956.127	96.693.975	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	270.787.431	234.631.125	*Third parties*
Total	366.743.558	331.325.100	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)	70.681.705	60.553.443	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	114.933.893	127.199.419	*Third parties*
Total (Catatan 62.B.(iv))	185.615.598	187.752.862	*Total (Note 62.B.(iv))*
	552.359.156	**519.077.962**	

Termasuk di dalam saldo simpanan giro adalah giro *wadiah* masing-masing sebesar Rp20.847.524 dan Rp21.797.852 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

21. DEPOSITS FROM CUSTOMERS - DEMAND DEPOSITS AND WADIAH DEMAND DEPOSITS

a. By currencies, related parties and third parties:

Included in demand deposits were wadiah demand deposits amounted to Rp20,847,524 *and Rp21,797,852 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

21. SIMPANAN NASABAH - GIRO DAN GIRO *WADIAH* (lanjutan) / *21. DEPOSITS FROM CUSTOMERS - DEMAND DEPOSITS AND WADIAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

b. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) dan kisaran bagi hasil selama tahun berjalan:

b. Average interest rates (cost of funds) and range of profit sharing per annum:

Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

Average interest rates (cost of funds) per annum:

	2023	2022	
Rupiah	2,64%	1,88%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	1,95%	0,44%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

Kisaran bagi hasil giro *wadiah* per tahun:

Range of profit sharing per annum on wadiah demand deposits:

	2023	2022	
Rupiah	0,02% - 0,03%	0,01% - 0,03%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	0,00% - 0,00%	0,00% - 0,00%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

c. Giro yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan, fasilitas pembayaran transaksi perdagangan (*letter of credit* yang tidak dapat dibatalkan) dan untuk tujuan lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.664.786 dan Rp18.764.324 (Catatan 12B.c dan 31e).

c. As of 31 December 2023 and 2022, demand deposits pledged as collateral and blocked for bank guarantees, loans and trade finance facilities (irrevocable letter of credits) and for other purposes were amounted to Rp24,664,786 and Rp18,764,324, respectively (Notes 12B.c and 31e).

22. SIMPANAN NASABAH - TABUNGAN DAN TABUNGAN *WADIAH* / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS - SAVING DEPOSITS AND WADIAH SAVING DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang, jenis, pihak berelasi dan pihak ketiga:

a. By currencies, type, related parties and third parties:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Tabungan Mandiri	3.749.398	3.641.055	*Mandiri Saving Deposits*
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Mandiri	453.344.562	425.783.273	*Mandiri Saving Deposits*
Tabungan Mandiri Haji	12.545.926	10.396.440	*Hajj Mandiri Saving Deposits*
Total	469.639.886	439.820.768	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Tabungan Mandiri	3.791.143	3.209.843	*Mandiri Saving Deposits*
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Mandiri	35.860.460	37.452.155	*Mandiri Saving Deposits*
Total (Catatan 62.B.(iv))	39.651.603	40.661.998	*Total (Note 62.B.(iv))*
	509.291.489	**480.482.766**	

Termasuk di dalam saldo simpanan tabungan adalah tabungan *wadiah* masing-masing sebesar Rp47.026.374 dan Rp44.214.405 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Included in saving deposits were wadiah saving deposits amounted to Rp47,026,374 and Rp44,214,405 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

22. SIMPANAN NASABAH - TABUNGAN DAN TABUNGAN *WADIAH* (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS - SAVING DEPOSITS AND WADIAH SAVING DEPOSITS (continued)*

b. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun / *b. Average interest rates (cost of funds) per annum:*

	2023	2022	
Rupiah	0,50%	0,51%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	0,18%	0,19%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

c. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah tabungan yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan untuk tujuan lain masing-masing sebesar Rp20.873.344 dan Rp17.766.721 (Catatan 12B.c).

c. As of 31 December 2023 and 2022, total saving deposits pledged as collateral and blocked for loans and other purposes were amounted to Rp20,873,344 and Rp17,766,721, respectively (Note 12B.c).

23. SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO BERJANGKA / *23. DEPOSITS FROM CUSTOMERS - TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga / *a. By currencies, related parties and third parties:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)	32.303.541	27.085.663	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	226.435.645	231.954.064	*Third parties*
Total	258.739.186	259.039.727	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak berelasi (Catatan 56)	2.549.440	3.580.322	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	28.508.878	33.395.152	*Third parties*
Total (Catatan 62.B.(iv))	31.058.318	36.975.474	*Total (Note 62.B.(iv))*
	289.797.504	**296.015.201**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By period:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	128.782.455	135.375.162	*1 month*
3 bulan	103.855.624	90.460.008	*3 months*
6 bulan	18.084.274	22.280.790	*6 months*
12 bulan	7.837.545	10.663.982	*12 months*
Lebih dari 12 bulan	179.288	259.785	*Over 12 months*
Total	258.739.186	259.039.727	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
1 bulan	14.560.090	22.515.474	*1 month*
3 bulan	11.394.345	7.522.823	*3 months*
6 bulan	3.590.857	4.994.714	*6 months*
12 bulan	1.378.351	1.878.389	*12 months*
Lebih dari 12 bulan	134.675	64.074	*Over 12 months*
Total (Catatan 62.B.(iv))	31.058.318	36.975.474	*Total (Note 62.B.(iv))*
	289.797.504	**296.015.201**	

23. SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan) / ***23. DEPOSITS FROM CUSTOMERS - TIME DEPOSITS*** *(continued)*

c. Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo: / *c. By remaining period to maturity date:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	153.424.600	162.151.537	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	90.487.979	75.752.708	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	10.675.783	13.015.942	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	3.705.690	7.218.663	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	445.134	900.877	*Over 12 months*
Total	258.739.186	259.039.727	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 bulan	18.770.698	23.965.592	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	8.360.787	7.483.892	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	3.304.332	4.343.560	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	474.879	1.063.974	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	147.622	118.456	*Over 12 months*
Total (Catatan 62.B.(iv))	31.058.318	36.975.474	*Total (Note 62.B.(iv))*
	289.797.504	**296.015.201**	

d. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun: / *d. Average interest rates (cost of funds) per annum:*

	2023	2022	
Rupiah	3,53%	2,63%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	3,01%	1,01%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

e. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah deposito berjangka yang dibekukan dan diblokir sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan untuk tujuan lain masing-masing sebesar Rp48.901.417 dan Rp38.508.154 (Catatan 12B.c).

e. As of 31 December 2023 and 2022, total time deposits pledged as collateral and blocked for loans and other purposes were amounted to Rp48,901,417 and Rp38,508,154, respectively (Note 12B.c).

24. SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIRO, GIRO *WADIAH* DAN TABUNGAN / *24. DEPOSITS FROM OTHER BANKS - DEMAND DEPOSITS, WADIAH DEMAND DEPOSITS AND SAVING DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga: / *a. By currencies, related parties and third parties:*

	2023	2022	
Giro dan giro *wadiah*			*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Rupiah	13.230	1.662	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	170.019	172.497	*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	183.249	174.159	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	2.380.398	1.904.754	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	2.259.855	1.946.238	*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	4.640.253	3.850.992	
Total	4.823.502	4.025.151	*Total*
Tabungan			*Saving deposits*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Rupiah	84	84	*Rupiah*
	84	84	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	1.869.984	1.709.152	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	13	14	*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	1.869.997	1.709.166	
	1.870.081	1.709.250	
	6.693.583	**5.734.401**	

Termasuk dalam simpanan dari bank lain - giro adalah giro *wadiah* masing-masing sebesar Rp125.337 dan Rp142.388 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Included in deposits from other banks - demand deposits are wadiah demand deposits amounted to Rp125,337 and Rp142,388, as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

b. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) dan kisaran bagi hasil per tahun: / *b. Average interest rates (cost of funds) and profit sharing per annum:*

	2023	2022	
Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:			*Average interest rates (cost of funds) per annum:*
Giro dan giro *wadiah*			*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Rupiah	2,64%	1,88%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	1,95%	0,44%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*
Tabungan			*Saving deposits*
Rupiah	0,50%	0,50%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	0,18%	0,19%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*
Kisaran bagi hasil giro *wadiah* per tahun:			*Range of profit sharing per annum for wadiah demand deposits:*
Rupiah	0,72% - 0,73%	0,72% - 0,75%	*Rupiah*

24. SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIRO, GIRO *WADIAH* DAN TABUNGAN (lanjutan)

c. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 giro, giro *wadiah* dan tabungan dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan dan bank garansi masing-masing sebesar Rp221.698 dan Rp160.387 (Catatan 12B.c dan 31e).

***24. DEPOSITS FROM OTHER BANKS - DEMAND DEPOSITS, WADIAH DEMAND DEPOSITS AND SAVING DEPOSITS** (continued)*

***c.** As of 31 December 2023 and 2022, total demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits from other banks pledged as collateral for loans and bank guarantees were amounted to Rp221,698 and Rp160,387, respectively (Notes 12B.c and 31e).*

25. SIMPANAN DARI BANK LAIN - *INTER-BANK CALL MONEY*

a. Berdasarkan mata uang:

25. DEPOSITS FROM OTHER BANKS - INTER-BANK CALL MONEY

a. By currencies:

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 56):			*Related parties (Note 56):*
Rupiah	100.000	-	*Rupiah*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Rupiah	215.000	200.000	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	6.966.896	4.236.101	*Foreign currencies (Notes 62.B.(iv))*
	7.181.896	4.436.101	
	7.281.896	**4.436.101**	

b. Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo:

b. By remaining period to maturity date:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	315.000	200.000	*Less than 1 month*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 bulan	733.167	2.649.621	*Less than 1 month*
Lebih dari 1 bulan	6.233.729	1.586.480	*Over 1 month*
Total (Catatan 62.B.(iv))	6.966.896	4.236.101	*Total (Note 62.B.(iv))*
	7.281.896	**4.436.101**	

c. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun:

c. Average interest rates (cost of funds) per annum:

	2023	2022	
Rupiah	5,96%	3,71%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	4,51%	2,75%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

26. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA / *26. DEPOSITS FROM OTHER BANKS - TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currencies:*

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 56):			*Related parties (Note 56)*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	384.925	467.025	*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
Pihak ketiga:			*Third parties*
Rupiah	583.710	2.730.970	*Rupiah*
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	2.740.666	1.478.912	*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
	3.324.376	4.209.882	
Total	**3.709.301**	**4.676.907**	***Total***

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By period:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	355.810	2.363.920	*1 month*
3 bulan	189.950	338.950	*3 months*
6 bulan	25.200	25.350	*6 months*
12 bulan	12.750	2.750	*12 months*
Total	583.710	2.730.970	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
1 bulan	153.970	-	*1 month*
3 bulan	538.895	467.025	*3 months*
6 bulan	1.616.685	778.375	*6 months*
12 bulan	-	77.837	*12 months*
Lebih dari 12 bulan	816.041	622.700	*More than 12 months*
Total (Catatan 62.B.(iv))	3.125.591	1.945.937	*Total (Note 62.B.(iv))*
	3.709.301	**4.676.907**	

c. Tingkat suku bunga rata-rata (*cost of funds*) per tahun / *c. Average interest rates (cost of funds) per annum:*

	2023	2022	
Rupiah	3,41%	2,41%	*Rupiah*
Mata uang asing (disetarakan dalam Rupiah)	3,01%	1,01%	*Foreign currencies (equivalent to Rupiah)*

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, deposito berjangka dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp401.803 dan Rp520.310 (Catatan 12B.c).

c. As of 31 December 2023 and 2022, time deposits from other banks pledged as collateral for loans amounted to Rp401,803 and Rp520,310, respectively (Note 12B.c).

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK *UNIT-LINK* / *27. LIABILITIES TO UNIT-LINK POLICYHOLDERS*

Akun ini merupakan liabilitas Entitas Anak kepada pemegang polis pada kontrak *unit-link* Entitas Anak yang ditempatkan pada investasi *unit-link*, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents Subsidiary's liabilities to policyholders on the Subsidiary's unit-link contracts placed in unit-link investment with details as follows:

	2023	2022	
Non-syariah	28.526.959	28.934.947	*Non-sharia*
Syariah	667.743	775.280	*Sharia*
	29.194.702	**29.710.227**	

Investasi pemegang polis pada kontrak *unit-link* di atas memiliki aset pendasar berupa aset keuangan terutama dalam bentuk kas, efek-efek dan obligasi pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, investasi pemegang polis tersebut dicatat sesuai dengan jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Underlying assets of the above policyholders' investment in unit-link contracts are financial assets mainly consist of cash, marketable securities and government bonds. As of 31 December 2023 and 2022, the investment of policyholders were recorded to the related financial assets in the consolidated statements of financial position.

Termasuk di dalam investasi pemegang *unit-link* adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar USD309.102.855 (nilai penuh) dan USD339.134.861 (nilai penuh).

Included in the unit-link policyholders' investments are policyholders' fund in foreign currency as of 31 December 2023 and 2022, amounted to USD309,102,855 (full amount) and USD339,134,861 (full amount), respectively.

Rincian dari investasi *unit-link* non-syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:

The details of non-sharia unit-link investments based ontype the type of contracts are as follows:

	2023	2022	
Prime equity	9.432.738	5.442.516	*Prime equity*
Dynamic money	9.208.435	12.379.566	*Dynamic money*
Equity Fund Offshore	2.218.895	2.378.169	*Equity Fund Offshore*
Attractive money	1.606.195	2.157.013	*Attractive money*
Progressive money	1.585.910	1.681.321	*Progressive money*
Mandiri *Golden Offshore*	1.127.380	1.523.995	*Mandiri Golden Offshore*
Secure money	958.580	1.013.580	*Secure money*
Mandiri *Equity Money*	593.340	663.040	*Mandiri Equity Money*
Balance Fund Offshore	482.263	484.864	*Balance Fund Offshore*
Money market	348.419	270.346	*Money market*
Fixed money	326.603	231.598	*Fixed money*
Excellent equity	259.702	365.597	*Excellent equity*
Mandiri *Flexible Equity Offshore*	103.295	86.267	*Mandiri Flexible Equity Offshore*
Active money	90.686	100.749	*Active money*
Protected money	63.606	85.123	*Protected money*
Mandiri *Fixed Income*	41.199	-	*Mandiri Fixed Income*
Mandiri *Multi Asset Balanced Offshore*	38.625	32.356	*Mandiri Multi Asset Balanced Offshore*
Mandiri *Global Offshore*	20.645	22.071	*Mandiri Global Offshore*
Money Market CS	20.443	16.776	*Money Market CS*
	28.526.959	**28.934.947**	

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK *UNIT-LINK* (lanjutan)

Dynamic money
Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis.

Prime equity
Penempatan dana berbasis kombinasi dengan dasar investasi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui reksadana AXA Maestro Saham.

Equity Fund Offshore
Reksadana berbasis ekuitas dari pasar luar negeri yang dikelola oleh Entitas Anak.

Attractive money
Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif.

Progressive money
Penempatan dana berbasis kombinasi (*balanced fund*) dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif.

Mandiri Golden Offshore
Reksadana berbasis ekuitas dengan dasar investasinya adalah ekuitas yang diperdagangkan di pasar ekuitas luar negeri.

Secure money
Secure money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri.

Mandiri *Equity Money*
Penempatan dana dengan instrumen investasi ekuitas dalam negeri LQ45 melalui reksadana Mandiri Index LQ45 yang dikelola oleh Mandiri Manajemen Investasi ("MMI").

Balance Fund Offshore
Reksadana yang komposisinya campuran ekuitas dan obligasi dari pasar luar negeri yang dikelola oleh Entitas Anak.

27. LIABILITIES TO UNIT-LINK POLICYHOLDERS *(continued)*

Dynamic money
This is an equity fund placement with underlying investments in stocks listed in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through Schroder Dana Prestasi Dinamis Mutual Fund.

Prime Equity
Placement of funds based on combination with the investment in stocks listed in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through AXA Maestro Shares Mutual Fund.

Equity Fund Offshore
Equity-based mutual funds from foreign markets managed by the Subsidiary.

Attractive money
This is an equity fund placement with underlying investments in stocks and bonds traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through Mandiri Mutual Fund Attractive Shares.

Progressive money
This is a balanced fund placement with underlying investments in stocks and bonds traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through Schroder Progressive Balanced Mutual Fund.

Mandiri Golden Offshore
Equity-based mutual funds with underlying investments in equity traded in offshore equity market.

Secure money
Secure money Rupiah is a fixed income based placement of funds with underlying investments in fixed income securities listed in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through Schroder Dana Obligasi Mantap Mutual Fund. Placement of funds in USD through investment in fixed income securities traded on the Indonesia Stock Exchange and other foreign exchanges as well as money market instruments through Investa Dana Dollar Mandiri Mutual Fund.

Mandiri Equity Money
Fund placements with LQ45 domestic equity investment instruments through the Mandiri Index LQ45 mutual fund managed by Mandiri Manajemen Investasi ("MMI").

Balance Fund Offshore
Mutual funds which the composition is a mixture of equity and bonds from foreign markets managed by Subsidiary.

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK *UNIT-LINK* (lanjutan)

Money market
Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang.

Excellent equity
Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil (di luar 20 saham berkapitalisasi terbesar) di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri *Dynamic Equity*.

Fixed money
Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II.

Active money
Penempatan dana berbasis kombinasi (*balanced fund*) dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif.

Mandiri *Flexible Equity Offshore*
Reksadana campuran berbasis ekuitas dan pasar uang pada pasar luar negeri.

Protected money
Penempatan dana berbasis kombinasi (*balanced fund*) dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.

Mandiri *Multi Asset Balanced Offshore*
Reksadana campuran berbasis pasar uang, ekuitas dan surat berharga pasar luar negeri.

Mandiri *Global Offshore*
Reksadana campuran berbasis ekuitas dan pasar uang pada pasar luar negeri.

Mandiri *Fixed Income*
Reksadana berbasis pendapatan tetap dalam mata uang US Dollar, dengan penempatan *underlying* sebagian besar pada Surat Utang Negara Indonesia dalam mata uang US Dollar dan selebihnya dalam instrument Pasar Uang. Reksadana ini dikelola oleh 2 Manajer Investasi, yaitu Architas Asset Management dan Mandiri Manajemen Investasi.

27. LIABILITIES TO UNIT-LINK POLICYHOLDERS *(continued)*

Money market
Placement of money market fund with underlying investments in money market instrument including time deposits and fixed income securities traded in Indonesia Stock Exchange through Mandiri Investa Pasar Uang Mutual Fund.

Excellent equity
This is a share based fund placement with underlying investments in small cap shares (exclude top 20 largest capitalisation shares) listed in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through Mandiri Dynamic Equity Mutual Fund.

Fixed money
This is a fixed income based fund placement with underlying investments in Indonesian Government Bonds and money market instruments through Mandiri Investa Dana Obligasi II Mutual Fund.

Active money
This is a balanced fund placement with underlying investments in stocks and bonds traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments through Mandiri Aktif Mutual Fund.

Mandiri Flexible Equity Offshore
Mixed mutual fund with underlying investments in equity and money market in foreign markets.

Protected money
Placement of funds based on combination (balanced fund) with investments in stocks and bonds traded in the Indonesia Stock Exchange and money market instruments with a maturity of less than 1 year.

Mandiri Multi Asset Balanced Offshore
Mixed mutual fund with underlying investments in money market, equity and foreign market securities.

Mandiri Global Offshore
Mixed mutual funds with underlying investments in equity and money market in foreign markets.

Mandiri Fixed Income
Fixed-income mutual fund denominated in US Dollars, with the majority of its underlying investments in Indonesian government bonds in US Dollars and the remainder in money market instruments. This mutual fund is managed by two Investment Managers, namely Architas Asset Management and Mandiri Investment Management.

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK *UNIT-LINK* (lanjutan)

Money market CS
Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang khususnya deposito berjangka dengan berdasarkan pada prinsip syariah.

Rincian dari investasi *unit-link* syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Attractive money syariah	312.625	457.164	*Attractive money sharia*
Active money syariah	147.159	171.663	*Active money sharia*
Amanah Pendapatan Tetap	140.398	63.714	*Amanah Fixed Income*
Amanah *equity* syariah	34.572	51.474	*Amanah equity sharia*
Advanced commodity syariah	18.229	24.047	*Advanced commodity sharia*
Amanah Pasar Uang Syariah	14.760	7.218	*Amanah Money Market Sharia*
Total	**667.743**	**775.280**	***Total***

Attractive money syariah
Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif.

Active money syariah
Penempatan dana berbasis kombinasi (*balanced fund*) dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif.

Amanah Pendapatan Tetap
Reksadana syariah dengan dasar investasi pada Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara.

Amanah *equity* syariah
Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah.

Advanced commodity syariah
Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus.

Amanah Pasar Uang Syariah
Reksadana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasinya pasar uang syariah dan efek-efek syariah berpendapatan tetap.

27. LIABILITIES TO UNIT-LINK POLICYHOLDERS *(continued)*

Money market CS
This is a fund placement with underlying investments in money market instrument, especially in time deposits based on sharia principles.

The details of sharia unit-link investments based on the type of contracts are as follows:

Attractive money sharia
This is an equity based fund placement with underlying investments in stocks and bonds traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments in accordance with sharia principle through Mandiri Saham Syariah Atraktif Mutual Fund.

Active money sharia
This is a combination based fund with underlying investments in stocks and bonds traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments in accordance with sharia principle through Mandiri Berimbang Syariah Aktif Mutual Fund.

Amanah Fixed Income
Sharia mutual fund with underlying investments of Sukuk and Sharia Government Bonds.

Amanah equity sharia
This is an equity based fund placement with underlying investments in stocks traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments in accordance with sharia principle through BNP Paribas Pesona Amanah Mutual Fund.

Advanced commodity sharia
This is a share based fund placement with underlying investments in shares in the commodity sector and related to commodities traded in Indonesia Stock Exchange and money market instruments in accordance with sharia principle through Mandiri Komoditas Syariah Plus Mutual Fund.

Amanah Money Market Sharia
A fixed income based mutual fund with underlying investments of sharia money market and sharia fixed income marketable securities.

28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / *28. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE LIABILITIES*

2023

Jenis efek	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai beli kembali/ *Buy back value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortised interest expense*	Nilai neto/ *Net value*	*Type of securities*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Pihak ketiga							*Third parties*
FR0056	2.309.509	25/02/2022	18/08/2026	2.633.011	194.026	2.438.985	FR0056
FR0086	1.924.612	25/02/2022	16/03/2026	2.167.742	135.953	2.031.789	FR0086
FR0059	1.959.726	05/09/2023	15/04/2027	2.035.525	35.652	1.999.873	FR0059
FR0086	1.874.012	24/02/2022	13/03/2026	2.111.212	132.335	1.978.877	FR0086
FR0064	1.885.736	05/09/2023	17/04/2028	1.984.147	59.285	1.924.862	FR0064
FR0056	1.613.388	20/10/2023	20/09/2024	1.706.599	72.960	1.633.639	FR0056
FR0084	1.539.391	31/10/2023	01/10/2024	1.629.045	73.111	1.555.934	FR0084
FR0081	1.534.124	20/10/2023	20/09/2024	1.622.755	69.375	1.553.380	FR0081
FR0081	1.465.940	20/10/2023	20/09/2024	1.550.633	66.292	1.484.341	FR0081
FR0059	1.370.734	05/09/2023	15/04/2027	1.428.789	29.525	1.399.264	FR0059
FR0084	1.098.563	05/09/2023	15/01/2026	1.127.814	6.746	1.121.068	FR0084
ROI 30 NEW	882.267	01/11/2023	30/09/2024	931.380	40.143	891.237	ROI 30 NEW
FR0056	832.502	24/02/2022	14/08/2026	948.527	69.440	879.087	FR0056
FR0091	795.002	05/09/2023	04/09/2026	819.842	8.684	811.158	FR0091
FR0090	757.812	24/02/2022	12/02/2027	875.270	74.911	800.359	FR0090
FR0092	769.840	05/09/2023	08/09/2026	793.971	8.486	785.485	FR0092
FR0087	775.430	20/10/2023	20/09/2024	820.012	34.896	785.116	FR0087
FR0091	770.439	17/10/2023	17/09/2024	814.735	34.276	780.459	FR0091
FR0091	744.689	05/09/2023	04/09/2026	767.957	8.134	759.823	FR0091
ROI 30 NEW	720.137	26/10/2023	26/09/2024	761.137	32.824	728.313	ROI 30 NEW
ROI 30 NEW	696.907	26/10/2023	26/09/2024	736.584	31.765	704.819	ROI 30 NEW
ROI 29 NEW	629.936	01/11/2023	30/09/2024	665.003	28.663	636.340	ROI 29 NEW
US455780CY00	484.216	07/07/2022	07/07/2025	536.254	48.097	488.157	US455780CY00
US455780CQ75	415.415	26/04/2023	24/04/2026	491.159	72.435	418.724	US455780CQ75
US71567RAS58	406.845	14/12/2021	13/12/2024	430.729	22.840	407.889	US71567RAS58
US71567RAM88	364.720	14/12/2021	13/12/2024	386.131	20.476	365.655	US71567RAM88
FR0042	350.690	05/09/2023	15/06/2027	365.495	7.564	357.931	FR0042
US455780CQ75	343.936	07/07/2022	07/07/2025	380.898	34.163	346.735	US455780CQ75
FR0090	259.042	05/09/2023	15/03/2027	269.778	5.345	264.433	FR0090
US455780CS32	261.517	07/07/2022	07/07/2025	289.622	25.977	263.645	US455780CS32
US455780CY00	257.762	14/12/2021	13/12/2024	272.894	14.471	258.423	US455780CY00
INDON-280731	252.814	20/12/2021	20/12/2024	267.053	13.340	253.713	INDON-280731
INDOIS-010328	248.413	06/04/2023	06/04/2026	291.803	40.649	251.154	INDOIS-010328
INDOIS-090631	233.882	06/04/2023	06/04/2026	274.735	38.272	236.463	INDOIS-090631
INDOIS-200229	204.780	06/04/2023	06/04/2026	240.549	33.509	207.040	INDOIS-200229
US455780CQ75	198.360	14/12/2021	13/12/2024	210.004	11.136	198.868	US455780CQ75
US71567RAS58	190.738	07/07/2022	07/07/2025	211.236	18.946	192.290	US71567RAS58
INDOIS-290327	189.737	13/12/2021	13/12/2024	200.596	10.173	190.423	INDOIS-290327
US455780CS32	187.203	26/04/2023	24/04/2026	196.225	8.628	187.597	US455780CS32
US455780CV60	181.329	14/12/2021	13/12/2024	191.974	10.180	181.794	US455780CV60
US71567RAP10	165.965	26/04/2023	24/04/2026	221.336	52.953	168.383	US71567RAP10
ADGB-160430	161.576	27/01/2022	13/12/2024	170.020	7.910	162.110	ADGB-160430
QATAR-140329	157.280	15/12/2021	13/12/2024	165.836	8.015	157.821	QATAR-140329
INDON-170138	149.782	06/04/2023	06/04/2026	175.945	24.510	151.435	INDON-170138
INDON-080126	149.171	13/12/2021	13/12/2024	157.709	7.999	149.710	INDON-080126
INDOIS-290326	147.757	15/12/2021	13/12/2024	155.795	7.530	148.265	INDOIS-290326
INDON-151030	145.153	13/01/2022	13/12/2024	153.226	7.563	145.663	INDON-151030
INDON-120331	143.580	06/04/2023	06/04/2026	168.659	23.494	145.165	INDON-120331
US71567RAP10	135.739	07/07/2022	07/07/2025	150.327	13.483	136.844	US71567RAP10
PELIN-25	136.341	08/12/2023	08/03/2024	136.341	-	136.341	PELIN-25
US455780CK06	123.415	07/07/2022	07/07/2025	136.678	12.259	124.419	US455780CK06
INDON-280731	123.014	06/04/2023	06/04/2026	144.501	20.129	124.372	INDON-280731
INDOIS-010328	113.191	03/03/2022	13/12/2024	119.196	5.626	113.570	INDOIS-010328
INDOIS-200229	104.676	13/01/2022	13/12/2024	110.498	5.454	105.044	INDOIS-200229
INDON-240428	102.697	06/04/2023	06/04/2026	120.635	16.805	103.830	INDON-240428
INDON-170237	101.980	06/04/2023	06/04/2026	119.793	16.687	103.106	INDON-170237
INDON-180929	95.837	06/04/2023	06/04/2026	112.577	15.682	96.895	INDON-180929
PERTM-270625	95.867	27/06/2022	27/06/2025	95.867	-	95.867	PERTM-270625
KSA-020233	95.061	13/12/2021	13/12/2024	100.502	5.096	95.406	KSA-020233
INDOIS-230630	79.250	06/04/2023	06/04/2026	93.093	12.969	80.124	INDOIS-230630
ADGB-111027	74.130	13/01/2022	13/12/2024	78.252	3.862	74.390	ADGB-111027
QATAR-160425	73.894	15/12/2021	13/12/2024	77.914	3.766	74.148	QATAR-160425
KSA-291029(SUKUK)	72.252	13/01/2022	13/12/2024	76.270	3.764	72.506	KSA-291029(SUKUK)
US455780CK06	68.430	14/12/2021	13/12/2024	72.448	3.842	68.606	US455780CK06
INDON-110128	68.055	16/02/2022	13/12/2024	71.543	3.268	68.275	INDON-110128
KSA-020233	65.434	03/03/2022	20/12/2024	68.874	3.222	65.652	KSA-020233
INDON-280731	65.274	15/12/2021	13/12/2024	68.824	3.326	65.498	INDON-280731
INDOIS-090626	63.033	20/12/2021	20/12/2024	66.583	3.326	63.257	INDOIS-090626
INDOIS-290327	56.418	06/04/2023	06/04/2026	66.273	9.232	57.041	INDOIS-290327
INDON-151030	44.174	13/12/2021	13/12/2024	46.702	2.368	44.334	INDON-151030
INDON-170237	44.072	16/02/2022	13/12/2024	46.331	2.116	44.215	INDON-170237
INDOIS-010328	43.327	20/12/2021	20/12/2024	45.767	2.286	43.481	INDOIS-010328
US455780CQ75	39.672	14/12/2021	13/12/2024	42.001	2.227	39.774	US455780CQ75
INDOIS-090631	39.537	13/12/2021	13/12/2024	41.800	2.120	39.680	INDOIS-090631
INDON-280731	37.922	20/12/2021	20/12/2024	40.058	2.001	38.057	INDON-280731
INDON-240428	29.303	13/12/2021	13/12/2024	30.980	1.571	29.409	INDON-240428
INDON-140230	27.416	13/12/2021	13/12/2024	28.985	1.470	27.515	INDON-140230
INDON-180929	27.379	16/02/2022	13/12/2024	28.782	1.314	27.468	INDON-180929
KSA-020233	26.174	03/03/2022	13/12/2024	27.562	1.301	26.261	KSA-020233
INDOIS-230630	23.201	13/12/2021	13/12/2024	24.529	1.245	23.284	INDOIS-230630
US71567RAM88	22.467	14/12/2021	13/12/2024	23.786	1.262	22.524	US71567RAM88
INDOIS-200229	15.123	13/12/2021	13/12/2024	15.988	811	15.177	INDOIS-200229
Total mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	35.536.114			38.337.611	2.007.547	36.330.064	*Total foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
Total	**35.536.114**			**38.337.611**	**2.007.547**	**36.330.064**	***Total***

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

28. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE LIABILITIES (continued)

2022

Jenis efek	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai beli kembali/ *Buy back value*	Beban bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortised interest expense*	Nilai neto/ *Net value*	*Type of securities*
Rupiah							***Rupiah***
Pihak ketiga							*Third parties*
FR0082	1.000.000	15/03/2022	14/03/2023	974.836	7.225	967.611	*FR0082*
FR0046	30.000	10/11/2022	09/02/2023	31.621	192	31.429	*FR0046*
FR0088	30.000	01/12/2022	02/03/2023	26.848	273	26.575	*FR0088*
FR0059	20.000	29/12/2022	30/03/2023	19.947	307	19.640	*FR0059*
FR0059	20.000	06/12/2022	07/03/2023	19.829	219	19.610	*FR0059*
FR0059	20.000	27/12/2022	28/03/2023	19.908	299	19.609	*FR0059*
FR0059	20.000	01/11/2022	31/01/2023	19.688	92	19.596	*FR0059*
FR0059	20.000	13/12/2022	14/03/2023	19.836	242	19.594	*FR0059*
FR0046	10.000	22/11/2022	21/02/2023	10.543	90	10.453	*FR0046*
Total Rupiah	1.170.000			1.143.056	8.939	1.134.117	*Total Rupiah*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Pihak ketiga							*Third parties*
FR0056	2.137.300	25/02/2022	18/08/2026	2.652.178	256.973	2.395.205	*FR0056*
FR0086	2.008.000	25/02/2022	16/03/2026	2.183.521	187.830	1.995.691	*FR0086*
FR0086	2.000.000	24/02/2022	13/03/2026	2.126.580	183.038	1.943.542	*FR0086*
FR0081	1.676.000	13/07/2022	13/06/2023	1.604.717	22.921	1.581.796	*FR0081*
FR0073	1.571.000	27/07/2022	27/06/2023	1.602.837	24.860	1.577.977	*FR0073*
FR0082	1.472.000	21/07/2022	06/07/2023	1.338.510	21.462	1.317.048	*FR0082*
FR0087	1.524.000	21/07/2022	06/07/2023	1.338.179	21.457	1.316.722	*FR0087*
FR0091	1.560.000	21/07/2022	06/07/2023	1.337.687	21.449	1.316.238	*FR0091*
FR0056	790.000	24/02/2022	14/08/2026	955.431	92.041	863.390	*FR0056*
FR0091	858.716	09/08/2022	25/07/2023	804.493	15.292	789.201	*FR0091*
FR0091	858.551	10/08/2022	26/07/2023	804.484	15.367	789.117	*FR0091*
FR0090	824.000	24/02/2022	12/02/2027	881.642	95.647	785.995	*FR0090*
Obligasi INDON-072831	691.197	07/07/2022	07/07/2025	542.193	44.070	498.123	*Bond INDON-072831*
Obligasi US71567RAS58	498.160	14/12/2021	13/12/2024	435.499	23.751	411.748	*Bond US71567RAS58*
Obligasi US71567RAM88	389.188	14/12/2021	13/12/2024	390.407	21.292	369.115	*Bond US71567RAM88*
Obligasi INDON-021430	451.458	07/07/2022	07/07/2025	385.116	31.302	353.814	*Bond INDON-021430*
FR0090	400.000	21/07/2022	21/06/2023	344.177	5.157	339.020	*FR0090*
Obligasi INDON-101530	323.026	07/07/2022	07/07/2025	292.829	23.801	269.028	*Bond INDON-101530*
Obligasi US455780CY00	319.134	14/12/2021	13/12/2024	275.916	15.048	260.868	*Bond US455780CY00*
Obligasi INDON-280731	311.350	20/12/2021	20/12/2024	270.010	14.169	255.841	*Bond INDON-280731*
Obligasi US455780CQ75	233.513	14/12/2021	13/12/2024	212.330	11.580	200.750	*Bond US455780CQ75*
Obligasi INDOIS-060931	264.648	07/07/2022	07/07/2025	213.575	17.359	196.216	*Bond INDOIS-060931*
FR0056	200.000	21/07/2022	21/06/2023	195.542	2.931	192.611	*FR0056*
Obligasi INDOIS-290327	202.378	13/12/2021	13/12/2024	202.818	10.807	192.011	*Bond INDOIS-290327*
Obligasi US455780CV60	229.621	14/12/2021	13/12/2024	194.100	10.586	183.514	*Bond US455780CV60*
Obligasi ADGB-160430	155.675	27/01/2022	13/12/2024	171.903	8.403	163.500	*Bond ADGB-160430*
Obligasi QATAR-140329	155.675	15/12/2021	13/12/2024	167.672	8.513	159.159	*Bond QATAR-140329*
Obligasi INDON-080126	155.675	13/12/2021	13/12/2024	159.455	8.496	150.959	*Bond INDON-080126*
Obligasi INDOIS-290326	155.675	15/12/2021	13/12/2024	157.520	7.998	149.522	*Bond INDOIS-290326*
Obligasi INDON-151030	155.675	13/01/2022	13/12/2024	154.923	8.034	146.889	*Bond INDON-151030*
Obligasi INDOIS-062330	182.918	07/07/2022	07/07/2025	151.992	12.354	139.638	*Bond INDOIS-062330*
Obligasi INDON-091829	155.675	07/07/2022	07/07/2025	138.191	11.232	126.959	*Bond INDON-091829*
Obligasi INDOIS-010328	124.540	03/03/2022	13/12/2024	120.516	5.976	114.540	*Bond INDOIS-010328*
Obligasi INDOIS-200229	108.973	13/01/2022	13/12/2024	111.721	5.793	105.928	*Bond INDOIS-200229*
Obligasi PERTM-270625	96.929	27/06/2022	27/06/2025	96.929	-	96.929	*Bond PERTM-270625*
Obligasi KSA-020233	108.973	13/12/2021	13/12/2024	101.616	5.415	96.201	*Obligasi KSA-020233*
FR0077	100.000	21/07/2022	21/06/2023	95.243	1.427	93.816	*FR0077*
FR0070	100.000	21/07/2022	21/06/2023	94.857	1.422	93.435	*FR0070*
FR0081	100.000	21/07/2022	21/06/2023	91.952	1.378	90.574	*FR0081*
FR0086	100.000	21/07/2022	21/06/2023	88.176	1.321	86.855	*FR0086*
Obligasi ADGB-111027	77.838	13/01/2022	13/12/2024	79.119	4.103	75.016	*Bond ADGB-111027*
Obligasi QATAR-160425	77.838	15/12/2021	13/12/2024	78.776	3.999	74.777	*Bond QATAR-160425*
Obligasi KSA-291029	77.838	13/01/2022	13/12/2024	77.115	3.999	73.116	*Bond KSA-291029*
Obligasi US455780CK06	77.838	14/12/2021	13/12/2024	73.250	3.995	69.255	*Bond US455780CK06*
Obligasi INDON-110128	77.838	16/02/2022	13/12/2024	72.336	3.472	68.864	*Bond INDON-110128*
Obligasi KSA-020233	77.838	03/03/2022	20/12/2024	69.637	3.423	66.214	*Bond KSA-020233*
Obligasi INDON-280731	77.838	15/12/2021	13/12/2024	69.586	3.533	66.053	*Bond INDON-280731*
Obligasi INDOIS-090626	77.838	20/12/2021	20/12/2024	67.320	3.532	63.788	*Bond INDOIS-090626*
Obligasi INDON-151030	46.703	13/12/2021	13/12/2024	47.220	2.516	44.704	*Bond INDON-151030*
Obligasi INDON-170237	39.697	16/02/2022	13/12/2024	46.844	2.248	44.596	*Bond INDON-170237*
Obligasi INDOIS-010328	46.703	20/12/2021	20/12/2024	46.274	2.428	43.846	*Bond INDOIS-010328*
Obligasi US455780CQ75	46.703	14/12/2021	13/12/2024	42.466	2.316	40.150	*Bond US455780CQ75*
Obligasi INDOIS-090631	46.703	13/12/2021	13/12/2024	42.263	2.252	40.011	*Bond INDOIS-090631*
Obligasi INDON-280731	46.703	20/12/2021	20/12/2024	40.502	2.126	38.376	*Bond INDON-280731*
Obligasi INDON-240428	31.135	13/12/2021	13/12/2024	31.323	1.669	29.654	*Bond INDON-240428*
Obligasi INDON-140230	31.135	13/12/2021	13/12/2024	29.306	1.562	27.744	*Bond INDON-140230*
Obligasi INDON-180929	31.135	16/02/2022	13/12/2024	29.101	1.396	27.705	*Bond INDON-180929*
Obligasi KSA-020233	31.135	03/03/2022	13/12/2024	27.868	1.382	26.486	*Bond KSA-020233*
Obligasi INDOIS-230630	26.465	13/12/2021	13/12/2024	24.800	1.321	23.479	*Bond INDOIS-230630*
Obligasi US71567RAM88	23.974	14/12/2021	13/12/2024	24.049	1.312	22.737	*Bond US71567RAM88*
Obligasi INDOIS-200229	15.568	13/12/2021	13/12/2024	16.165	863	15.302	*Bond INDOIS-200229*
Total mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))	24.836.086			24.522.757	1.331.399	23.191.358	*Total foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
Total	**26.006.086**			**25.665.813**	**1.340.338**	**24.325.475**	***Total***

29. LIABILITAS AKSEPTASI / *29. ACCEPTANCE PAYABLES*

a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga: / *a. By currencies, related parties and third parties:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Liabilitas kepada bank lain			*Payables to other banks*
Pihak berelasi (Catatan 56)	1.890.413	1.512.348	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	6.473.697	2.202.157	*Third parties*
Liabilitas kepada debitur			*Payables to debtors*
Pihak berelasi (Catatan 56)	118.031	206.010	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	703.350	556.252	*Third parties*
Total	9.185.491	4.476.767	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Liabilitas kepada bank lain			*Payables to other banks*
Pihak berelasi (Catatan 56)	587.133	13.103	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	4.798.970	7.148.586	*Third parties*
Liabilitas kepada debitur			*Payables to debtors*
Pihak berelasi (Catatan 56)	18.684	18.662	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	203.610	124.463	*Third parties*
Total (Catatan 62.B.(iv))	5.608.397	7.304.814	*Total (Note 62.B.(iv))*
	14.793.888	**11.781.581**	

b. Berdasarkan jatuh tempo: / *b. By maturity:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	1.294.293	966.825	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	3.875.992	1.783.794	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	4.015.206	1.725.640	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	-	508	*6 - 12 months*
Total	9.185.491	4.476.767	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Kurang dari 1 bulan	1.388.088	2.262.567	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	2.167.759	3.048.233	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	1.748.610	1.742.471	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	204.009	250.856	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	99.931	687	*More than 12 months*
Total (Catatan 62.B.(iv))	5.608.397	7.304.814	*Total (Note 62.B.(iv))*
	14.793.888	**11.781.581**	

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN / *30. DEBT SECURITIES ISSUED*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Obligasi	4.839.450	4.748.550	*Bonds*
Subordinoted notes syariah *mudharabah*	25.000	455.000	*Subordinated notes sharia mudharabah*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	226.985	400.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
	5.091.435	5.603.550	
Pihak ketiga			*Third parties*
Obligasi	15.440.301	13.550.355	*Bonds*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)	1.401.191	1.675.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Subordinated notes syariah *mudharabah*	175.000	920.000	*Subordinated notes sharia mudharabah*
Cek perjalanan Mandiri	62.799	64.402	*Mandiri travelers' cheques*
Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I	3.608	-	*Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase I*
	17.082.899	16.209.757	
	22.174.334	21.813.307	
Mata uang asing (Catatan 62.B.(iv))			*Foreign currencies (Note 62.B.(iv))*
Pihak ketiga			*Third parties*
Obligasi	28.421.722	24.034.300	*Bonds*
	50.596.056	45.847.607	
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(78.292)	(73.468)	*Less: unamortised debt issuance cost*
Neto	**50.517.764**	**45.774.139**	***Net***

Obligasi / ***Bonds***

Bank Mandiri / *Bank Mandiri*

Rupiah / *Rupiah*

Pada tanggal 4 Juli 2023, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 ("Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

On 4 July 2023, Bank Mandiri issued Continuous Green Bond I Bank Mandiri Phase I Year 2023 ("Continuous Green Bond I Phase I") with total nominal value Rp5,000,000, which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	1.950.000	5,80%	4 Juli/*July* 2026	*Series A*
Seri B	3.050.000	6,10%	4 Juli/*July* 2028	*Series B*

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Bank Mandiri (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk seri A dan 4 Juli 2028 untuk seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri obligasi. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembiayaan (*finance*) atau pembiayaan ulang (*refinance*) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana diubah dengan POJK No. 18/2023 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I menurut Pefindo adalah idAAA *(triple* A).

Pada tanggal 12 Mei 2020, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Bank Mandiri (continued)

Rupiah (continued)

Continuous Green Bond I Phase I is offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount of bonds. The bond interest is paid on quarterly basis with the first interest payment made on 4 October 2023, while the last interest payment and maturity date of the bonds is on 4 July 2026 for Series A and 4 July 2028 for Series B which is also the redemption date of the principal of each series of bonds. The payments of the bonds principal will be fully paid on the maturity date. The trustee of the bond issuance of Continuous I Phase I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. All funds obtained from the issuance of this public offering, after omitting issuance cost, will be used entirely on the financing or refinancing of Environmental Based Business Activity (hereinafter abbreviated as KUBL or Kegiatan Usaha Berwawaan Lingkungan (KUBL) as regulated on Financial Services Authority (FSA) Regulation (POJK) No.60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Regulation of Green Bond as amended by POJK No. 18/2023 concerning Issuance And Requirements Of Sustainability Debt And Sukuk Securities, with allocation of at least 70% (seventy percent) goes to the financing of Environmental Based Business Activity.

As of 31 December 2023, Continuous Green Bond I Phase I rating according to Pefindo is idAAA (triple A).

On 12 May 2020, Bank Mandiri issued Continuous Bonds II Bank Mandiri Phase I Year 2020 ("Continuous Bonds II Phase I") with total nominal value Rp1,000,000, which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	350.000	7,75%	12 Mei/*May* 2025	*Series A*
Seri B	650.000	8,30%	12 Mei/*May* 2027	*Series B*

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ditawarkan dengan nilai 100% (erratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2025 untuk seri A dan 12 Mei 2027 untuk seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri obligasi. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Permata Tbk.

Continuous Bonds II Phase I is offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount of bonds. The bond interest is paid on quarterly basis with the first interest payment was made on 12 August 2020, while the last interest payment and maturity date of the bonds will be on 12 May 2025 for Series A and 12 May 2027 for Series B which is also the redemption date of the principal of each series of bonds. The payments of the bonds principal will be fully paid on the maturity date. The trustee of the bond issuance of Shelf Registration Bonds II Phase I is PT Bank Permata Tbk.

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Bank Mandiri (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menurut Pefindo adalah idAAA *(triple* A).

Pada tanggal 21 September 2018, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000 sebagai berikut:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Bank Mandiri (continued)

Rupiah (continued)

As of 31 December 2023 and 2022 based on Pefindo's rating, the Continuous Bonds II Phase I was rated idAAA (triple A).

On 21 September 2018, Bank Mandiri issued Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase III Year 2018 ("Continuous Bonds I Phase III") with total nominal value Rp3,000,000 as below:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	3.000.000	8,50%	21 September 2023	*Continuous Bond I Phase III*

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 21 September 2023 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi. Pembayaran pokok obligasi telah dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III adalah PT Bank Permata Tbk.

Continuous Bonds I Phase III is offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount of bonds. The bond interest is paid on quarterly basis with the first interest payment was made on 21 December 2018, while the last interest payment and maturity date of the bonds on 21 September 2023 which is also the redemption date of the principal amount of bonds. The payment of the bonds principal fully paid on the maturity date. The trustee of the Continuous Bonds I Phase III issuance is PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 15 Juni 2017, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000 yang terdiri atas 4 (empat) seri:

On 15 June 2017, Bank Mandiri issued Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase II Year 2017 ("Continuous Bonds I Phase II") with total nominal value of Rp6,000,000, which consist of 4 (four) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	1.000.000	8,00%	15 Juni/*June* 2022	*Series A*
Seri B	3.000.000	8,50%	15 Juni/*June* 2024	*Series B*
Seri C	1.000.000	8,65%	15 Juni/*June* 2027	*Series C*
Seri D	1.000.000	7,80%	15 Juni/*June* 2020	*Series D*

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Bank Mandiri (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 15 September 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 15 Juni 2022 untuk Seri A, 15 Juni 2024 untuk Seri B dan 15 Juni 2027 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri obligasi. Obligasi Seri D ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79,3146% (tujuh puluh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari jumlah pokok obligasi dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan untuk seri A telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2016, Bank Mandiri menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdiri atas 3 (tiga) seri:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Bank Mandiri (continued)

Rupiah (continued)

Continuous Bonds I Phase II Series A, Series B and Series C are offered at 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds. The interest of the bond is paid on quarterly basis, with the first payment made on 15 September 2017 while the last interest payment date and maturity date of the bonds are on 15 June 2022 for Series A, 15 June 2024 for Series B and 15 June 2027 for Series C which is also the redemption date of the principal of each series of bonds. Series D bonds are offered without interest at a bid price of 79.3146% (seventy nine point three one four six percent) of the principal amount of bonds and the maturity date is 15 June 2020 date while for series A the maturity date is 15 June 2022. The payments of the bonds principal will be fully paid on the maturity date. The trustee of the Continuous Bonds I Phase II issuance is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

On 30 September 2016, Bank Mandiri issued Continuous Bonds I Bank Mandiri Phase I Year 2016 ("Continuous Bonds I Phase I") with total nominal value of Rp5,000,000 which consist of 3 (three) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	1.100.000	7,95%	30 September 2021	*Series A*
Seri B	1.500.000	8,50%	30 September 2023	*Series B*
Seri C	2.400.000	8,65%	30 September 2026	*Series C*

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 30 September 2021 untuk Seri A, 30 September 2023 untuk Seri B, dan 30 September 2026 untuk seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing seri obligasi. Pembayaran pokok obligasi untuk Seri A dan Seri B telah dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The interest of Continuous *Bonds I Phase I is paid on quarterly basis, with the first interest payment made on 30 December 2016 while the last interest and principal payment date of the bonds are on 30 September 2021 for Series A, 30 September 2023 for Series B and 30 September 2026 for Series C which is also the redemption date the principal of each series of bonds. Principal payment for Series A and Series B fully paid on the maturity date. The trustee for Continuous Bonds I Phase I is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Bank Mandiri (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya jumlah terhutang, Bank Mandiri berkewajiban untuk: (i) memelihara pada setiap saat keadaan keuangan berada dalam kondisi sehat sesuai ketentuan OJK; (ii) mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia; (iii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Bank Mandiri tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank Mandiri.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu bentuk jaminan khusus, kecuali jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yakni seluruh harta kekayaan Bank, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk seluruh perikatan Bank termasuk obligasi tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II menurut Pefindo adalah idAAA (*triple* A).

Mata Uang Asing

Pada tanggal 4 April 2023, Bank Mandiri menerbitkan *Euro Medium Term Notes* (EMTN) keempat dengan nilai nominal sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) di *Singapore Exchange* (SGX) sebagai berikut:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Bank Mandiri (continued)

Rupiah (continued)

During the validity periods of the Bonds and prior to the repayment of the bonds, Bank Mandiri has to comply to: (i) maintain the overall Bank's soundness level as regulated by FSA; (ii) maintain the Bank's soundness level at a minimum in the composite level 3 (three) which is categorised as "Fair", according to internal assessment based upon on Bank Indonesia's regulation; (iii) obtain and comply with permits and approvals (from the government or other parties) and comply to Indonesia's laws and regulations.

Bank Mandiri, without a written approval from the Trustee will not: (i) reducing the Bank's issued and paid up capital except such a reduction is conducted based on regulations from the Government of Indonesia or Bank Indonesia; (ii) change its nature of business; (iii) conducting merger, consolidation, or acquisitions which led to the dissolution of Bank Mandiri.

The bonds are not guaranteed by any form of special guarantee, except for the general guarantee as referred and in accordance with the Article 1131 and Article 1132 of the Indonesian Civil Law, all the assets of the Bank, either moving objects and objects that are not moving, present or future, shall be regarded as securities for the Bank's agreements including those bonds.

As of 31 December 2023 dan 31 December 2022 the Pefindo's rating of Continuous Bonds I Phase I and Phase II is idAAA (triple A).

Foreign Currency

On 4 April 2023, Bank Mandiri issued the fourth Euro Medium Term Notes (EMTN) with nominal value of USD300,000,000 (full amount) in Singapore Exchange (SGX) as follow:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Euro Medium Term Notes	USD300.000.000	5,50%	4 April 2026	*Euro Medium Term Notes*

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Bank Mandiri (lanjutan)

Mata Uang Asing (lanjutan)

Obligasi EMTN keempat ditawarkan dengan nilai 99,58% (sembilan puluh sembilan koma lima delapan persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap semester, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 4 April 2026 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari obligasi. Wali amanat dari penerbitan EMTN adalah Bank of New York Mellon.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat EMTN keempat adalah Baa2 (Moody's) dan BBB- (Fitch Ratings).

Pada tanggal 19 April 2021, Bank Mandiri menerbitkan EMTN ketiga, yaitu *Sustainability Bond* Bank Mandiri 2021, dengan nilai nominal sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) di *Singapore Exchange* (SGX) sebagai berikut:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Bank Mandiri (continued)

Foreign Currency (continued)

The fourth EMTN is offered at 99.58% (ninety-nine point five eight percent) of the principal amount of the bonds. The bond interest is paid on semi-annual basis, with the first interest payment scheduled on 4 October 2023 and the last interest payment and due date of the bond principal on 4 April 2026, which also the due date of the principal amount of the bonds. The trustee of the EMTN bond issuance is Bank of New York Mellon.

As of 31 December 2023, the credit ratings for the fourth EMTN are Baa2 (Moody's) and BBB- (Fitch Ratings).

On 19 April 2021, Bank Mandiri issued the third EMTN, namely Bank Mandiri Sustainability Bond 2021, with total nominal value of USD300,000,000 (full amount) on the Singapore Exchange (SGX) as follows:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Euro Medium Term Notes	USD300.000.000	2,00%	19 April 2026	*Euro Medium Term Notes*

Sustainability Bond Bank Mandiri 2021 ditawarkan dengan nilai 98,913% (sembilan puluh delapan koma sembilan satu tiga persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap semester, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 19 April 2026 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari obligasi. Wali amanat dari penerbitan EMTN adalah Bank of New York Mellon. Dana hasil penerbitan *Sustainability Bond* tersebut akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek atau kegiatan yang berwawasan lingkungan dan sosial, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam *Sustainability Bond Framework* Bank Mandiri.

Bank Mandiri Sustainability Bond 2021 are offered at a value of 98.913% (ninety eight point nine one three percent) of the principal amount of the bonds. Bond interest is paid every semester, with the first interest payment being made on 19 October 2021, while the last interest payment is at the same time the bond maturity on 19 April 2026 which is also the principal repayment date of the bonds. The trustee of the issuance of EMTN is Bank of New York Mellon. The proceeds from the issuance of the Sustainability Bond will be used to finance or refinance projects or activities that are environmentally and socially sound, in accordance with the criteria set out in Bank Mandiri's Sustainability Bond Framework.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat EMTN ketiga adalah Baa2 (Moody's) dan BBB- (Fitch Ratings).

As of 31 December 2023 and 2022, the third EMTN's ratings are Baa2 (Moody's) and BBB- (Fitch Ratings).

Pada tanggal 13 Mei 2020, Bank Mandiri menerbitkan *Euro Medium Term Notes* (EMTN) kedua dengan nilai nominal sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) di *Singapore Exchange* (SGX) sebagai berikut:

On 13 May 2020 Bank Mandiri issued the second EMTN with total nominal value of USD500,000,000 (full amount) on the Singapore Exchange (SGX) as follow:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Euro Medium Term Notes	USD500.000.000	4,75%	13 Mei/*May* 2025	*Euro Medium Term Notes*

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Bank Mandiri (lanjutan)

Mata Uang Asing (lanjutan)

Obligasi *Euro Medium Term Notes* (EMTN) kedua ditawarkan dengan nilai 99,255% (sembilan puluh sembilan koma dua lima lima persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap semester, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 13 November 2020, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 13 Mei 2025 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari obligasi. Wali amanat dari penerbitan EMTN adalah Bank of New York Mellon.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat EMTN kedua adalah Baa2 (Moody's) dan BBB- (Fitch Ratings).

Pada tanggal 11 April 2019, Bank Mandiri menerbitkan *Euro Medium Term Notes* (EMTN) pertama dengan nilai nominal sebesar USD750.000.000 (nilai penuh) di *Singapore Exchange* (SGX) sebagai berikut:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Bank Mandiri (continued)

Foreign Currency (continued)

The second EMTN is offered at 99.255% (ninety nine point two five five percent) of the principal amount of bonds. The interest is paid on semi-annual basis with the first interest payment was made on 13 November 2020, while the last interest payment and maturity date of the bonds principal on 13 May 2025 which is also the redemption date of the principal amount of bonds. The trustee of the EMTN bond issuance is Bank of New York Mellon.

As of 31 December 2023 and 2022, the second EMTN is rated Baa2 (Moody's) and BBB- (Fitch Ratings).

On 11 April 2019 Bank Mandiri issued the first EMTN with total nominal value of USD750,000,000 (full amount) on the Singapore Exchange (SGX) as follow:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Euro Medium Term Notes	USD750.000.000	3,75%	11 April 2024	*Euro Medium Term Notes*

Obligasi *Euro Medium Term Notes* (EMTN) pertama ditawarkan dengan nilai 98,998% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap semester, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 11 April 2024 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari obligasi. Wali amanat dari penerbitan EMTN adalah Bank of New York Mellon.

The first EMTN is offered at 98.998% (ninety eight point nine nine eight percent) of the principal amount of bonds. The interest is paid on semi-annual basis with the first interest payment was made on 11 October 2019, while the last interest payment and maturity date of the bonds principal on 11 April 2024 which is also the redemption date of the principal amount of bonds. The trustee of the EMTN bond issuance is Bank of New York Mellon.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat EMTN pertama adalah Baa2 (Moody's) dan BBB- (Fitch Ratings).

As of 31 December 2023 and 2022, the first EMTN is rated Baa2 (Moody's) and BBB- (Fitch Ratings).

Entitas Anak

Rupiah

Pada tanggal 28 April 2021, Entitas Anak (Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap")) menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2021 ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

Subsidiaries

Rupiah

On 28 April 2021, the Subsidiary (Bank Mandiri Taspen ("Bank Mantap")) issued and registered the Continuous Bonds I Phase II Year 2021 to the Indonesia Stock Exchange with a nominal value of Rp2,000,000 with consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	800.000	6,50%	28 April 2024	*Series A*
Seri B	1.200.000	7,25%	28 April 2026	*Series B*

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran bunga pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 28 April 2024 untuk Seri A dan tanggal 28 April 2026 untuk Seri B.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2021 adalah PT Bank Permata Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Bank Mantap tahun 2021 menurut PT Fitch Ratings Indonesia adalah AA (idn) (*double* A).

Pada tanggal 26 November 2019, Entitas Anak (Bank Mandiri Taspen) menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi I Berkelanjutan Tahap I tahun 2019 ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

Bond interest is paid quarterly, with the first interest payment for each series will be made on 28 July 2021 while the last interest payment as well as the maturity of the bonds will be on 28 April 2024 for Series A and 28 April 2026 for Series B.

The trustee of the issuance of the Continuous Bonds I Phase II Year 2021 is PT Bank Permata Tbk. As of 31 December 2023 and 2022, the rating for the Continuous Bonds I Phase II of PT Bank Mandiri Taspen in 2021 according to PT Fitch Ratings Indonesia is AA (idn) (double A).

On 26 November 2019, the Subsidiary (Bank Mandiri Taspen) issued and registered the Continuous Bond I Phase I Year 2019 to Indonesia Stock Exchange with total nominal value of Rp1,000,000 in which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	700.000	7,90%	26 November 2022	*Series A*
Seri B	300.000	8,20%	26 November 2024	*Series B*

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 26 November 2022 untuk Seri A dan 26 November 2024 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok dari masing-masing obligasi.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Mantap tahun 2019 adalah PT Bank Permata Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Mantap tahun 2019 menurut PT Fitch Ratings Indonesia adalah AA (idn) (*double* A).

Bank Mantap tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank Mantap.

Bonds interest were paid on quarterly basis, with the first interest payment was made on 26 February 2020, while the last interest payment and maturity of the bonds on 26 November 2022 for Series A and 26 November 2024 for Series B which also the date for principal repayment of each bond.

Trustee for Continuous Bond I Phase I PT Bank Mandiri Taspen Year 2019 is PT Bank Permata Tbk. As of 31 December 2023 and 2022, Continuous Bond I Phase I PT Bank Mandiri Taspen Year 2019 is rated AA (idn) (double A) by PT Fitch Ratings Indonesia.

Bank Mantap, without written approval from the Trustee, will not do the following things: (i) reduce issued and paid-up capital unless there are provisions from the Government or Bank Indonesia; (ii) making changes to business fields; (iii) carrying out a merger, consolidation, acquisition with another entity which causes the dissolution of Bank Mantap.

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Pada tanggal 27 September 2023, Entitas anak (PT Mandiri Tunas Finance) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023 (''Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II'') dengan nilai nominal sebesar Rp1.131.110 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	804.175	6,50%	27 September 2026	*Series A*
Seri B	326.935	6,75%	11 September 2028	*Series B*

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Peringkat Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II menurut Pefindo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah idAAA (*Triple* A).

Pada tanggal 11 Juli 2023, Entitas anak (PT Mandiri Tunas Finance) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023 (''Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I'') dengan nilai nominal sebesar Rp691.735 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	439.660	6,00%	11 Juli/*July* 2026	*Series A*
Seri B	252.075	6,25%	11 Juli/*July* 2028	*Series B*

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MTF telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut di atas. Peringkat Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I menurut Pefindo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah idAAA (Triple A).

Pada tanggal 23 Februari 2022, Entitas anak (PT Mandiri Tunas Finance) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022 (''Obligasi Berkelanjutan V Tahap III'') dengan nilai nominal sebesar Rp1.228.055 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	851.440	5,90%	23 Februari/ *February* 2025	*Series A*
Seri B	376.615	6,75%	23 Februari/ *February* 2027	*Series B*

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

On 27 September 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued Continuous Bonds VI Phase II Year 2023 (“Continuous Bonds VI Phase II”) with total nominal value of Rp1,131,110 which consist of 2 (two) series:

The trustee for the issuance of Continuous Bonds VI Phase II is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

As of 31 December 2023 and 2022, based on Pefindo’s rating, Continuous Bonds VI Phase II is rated idAAA (Triple A).

On 11 July 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued Continuous Bonds VI Phase I Year 2023 (''Continuous Bonds VI Phase I'') with a nominal value of Rp691,735 consisting of 2 (two) series:

The trustee for the issuance of Continuous Bonds VI Phase II is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MTF has fulfilled the restrictions required in the agreement above. As of 31 December 2023 and 2022, based on Pefindo’s rating, Continuous Bonds VI Phase I is rated idAAA (Triple A).

On 23 February 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued Continuous Bonds V Phase III Year 2022 (“Continuous Bonds V Phase III”) with total nominal value of Rp1,228,055 which consist of 2 (two) series:

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Wali amanat dari penerbitan obligasi berkelanjutan V Tahap III adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 20 Mei 2021, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap II") ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.850 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

Trustee for Continuous Bonds V Phase III is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

On 20 May 2021, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued and registered Continuous Bonds V Mandiri Tunas Finance Phase II Year 2021 ("Continuous Bonds V Phase II") to the Indonesia Stock Exchange with total nominal value of Rp1,400,850 which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	915.150	7,00%	20 Mei/ *May* 2024	*Series A*
Seri B	485.700	7,65%	20 Mei/ *May* 2026	*Series B*

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Trustee for Continuous Bonds V Phase II is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I") ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp858.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

On 13 August 2020, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued and registered Continuous Bonds V Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2020 ("Continuous Bonds V Phase I") to the Indonesia Stock Exchange with total nominal value of Rp858,000 which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	472.000	8,00%	13 Agustus/ *August* 2023	*Series A*
Seri B	386.000	8,60%	13 Agustus/ *August* 2025	*Series B*

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Obligasi Seri A telah jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2023.

Trustee for Continuous Bonds V Phase I is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Series A Bonds has matured on 13 August 2023.

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh MTF, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang dilunasi pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum, MTF tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset MTF kecuali untuk kegiatan usaha MTF sehari-hari.

The trustee agreement stipulates several restrictions that must be met by the Subsidiary, including providing fiduciary guarantees in the form of consumer financing receivables and total debt to equity ratio not exceeding 10:1. Moreover, as long as the principal of the bonds has not been repaid, the Subsidiary is not permitted, among other things, to enter into a business merger unless it is carried out in the same line of business and sell or transfer more than 50% of the Subsidiary's assets except for the daily business activities of the Subsidiary.

Peringkat Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, II dan III menurut Pefindo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah idAAA (*Triple* A).

As of 31 December 2023 and 2022, based on Pefindo's rating, Continuous Bonds V Phase I, II and III are rated idAAA (Triple A).

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Pada tanggal 26 Juli 2019, Entitas Anak (Mandiri Tunas Finance) menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 (”Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”) ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

On 26 July 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued and registered Continuous Bonds IV Mandiri Tunas Finance Phase II Year 2019 (“Continuous Bonds IV Phase II”) to the Indonesia Stock Exchange with total nominal value of Rp2,000,000 which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	1.342.000	8,90%	26 Juli/*July* 2022	*Series A*
Seri B	658.000	9,50%	26 Juli/*July* 2024	*Series B*

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk. Obligasi Seri A telah jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2022.

The trustee for Continuous Bonds IV Phase II is PT Bank Mega Tbk. Series A Bonds has matured on 26 July 2022.

Dalam perjanjian perwaliamanatan, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Entitas Anak, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Entitas Anak tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Entitas Anak kecuali untuk kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari.

The trustee agreement stipulates several restrictions that must be met by the Subsidiary, including providing fiduciary guarantees in the form of consumer financing receivables and total debt to equity ratio not exceeding 10:1. Moreover, as long as the principal of the bonds has not been repaid, the Subsidiary is not permitted, among other things, to enter into a business merger unless it is carried out in the same line of business and sell or transfer more than 50% of the Subsidiary's assets except for the daily business activities of the Subsidiary.

Pada tanggal 8 Januari 2019, Entitas Anak (Mandiri Tunas Finance) menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”) ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri:

On 8 January 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) issued and registered Continuous Bonds IV Mandiri Tunas Finance Phase I Year 2019 (“Continuous Bonds IV Phase I”) to the Indonesia Stock Exchange with total nominal value of Rp1,000,000 which consist of 2 (two) series:

Obligasi	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap per tahun/ *Fixed interest rate per annum*	Jatuh tempo/ *Maturity date*	*Bonds*
Seri A	800.000	9,40%	8 Januari/ *January* 2022	*Series A*
Seri B	200.000	9,75%	8 Januari/ *January* 2024	*Series B*

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Obligasi Seri A telah jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2022.

The trustee for Continuous Bonds IV Phase I is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Series A Bonds has matured on 8 January 2022.

Peringkat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan Tahap II menurut Pefindo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah idAAA (Triple A).

As of 31 December 2023 and 2022, based on Pefindo’s rating, Continuous Bonds IV Phase I and Phase II are rated idAAA (Triple A).

Pada tanggal 31 Desember 2023, seluruh efek-efek yang diterbitkan oleh PT Mandiri Tunas Finance dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp3.374.511 (31 Desember 2022: Rp1.718.119) (Catatan 13f) dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan sebesar Rp873.111 (31 Desember 2022: Rp888.925) (Catatan 14f).

As of 31 December 2023, all securities issued by PT Mandiri Tunas Finance are secured by consumer financing receivables amounted to Rp3,374,511 (31 December 2022: Rp1,718,119) (Note 13f) and net investment finance leases amounted to Rp873,111 (31 December 2022: Rp888,925) (Note 14f).

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Subordinated notes syariah *mudharabah*

Pada tanggal tanggal 15 Desember 2023, Entitas Anak Bank Syariah Indonesia ("BSI") menerbitkan Sukuk Mudharabah Tahun 2023 sebesar Rp200.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Entitas Anak berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: (a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan. (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) Hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau.

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Perseroan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

Subordinated notes sharia mudharabah

On 15 December 2023, Bank Syariah Indonesia's subsidiary ("BSI") issued the 2023 Mudharabah Sukuk amounting to Rp200,000 with maturity set on 15 December 2028.

Throughout the tenure of the 2023 BSI Subordinated Mudharabah Sukuk and until the full repayment of both principal and profit-sharing, the Subsidiary is obligated to: (i) maintain a Capital Adequacy Ratio ("CAR") of not less than 12%; (ii) ensure that the 2023 Subordinated Mudharabah Sukuk is not owned by more than 49 investors; (iii) submit to the monitoring agent the following: (a) Copies of reports submitted to the Financial Services Authority (OJK), including the bank's health assessment report, no later than 5 (five) business days after the report is submitted to the parties mentioned above. If the Monitoring Agent deems it necessary, based on a written request from the Monitoring Agent, the Company must provide the Monitoring Agent with additional documents related to the above report (if any) no later than 10 (ten) business days after the date the request letter is received by the Company. (b) Annual financial statements audited by public accountants registered with the OJK and submitted to the Monitoring Agent within 5 (five) business days after receiving a request letter from the Monitoring Agent.

All proceeds from the issuance of the Subordinated Mudharabah Sukuk will be used by the Company for its business activities to strengthen the capital structure, taking into account the issuance proceeds as supplementary capital and to enhance the Company's productive assets.

The Subordinated Mudharabah Sukuk is issued without certificates, except for the Jumbo Certificate of Subordinated Mudharabah Sukuk issued in the name of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") as evidence of ownership of Sharia Securities for the benefit of the Subordinated Mudharabah Sukuk Holders. Profit-sharing is calculated by multiplying the Profit-sharing Ratio of the Subordinated Mudharabah Sukuk Holders, where the ratio is 88.55% of the Distributed Income with an indicative profit-sharing rate equivalent to 7.90% per annum. The tenure of the Subordinated Mudharabah Sukuk is 5 (five) years from the Issuance Date. The Subordinated Mudharabah Sukuk is offered at 100% of the Subordinated Mudharabah Sukuk Fund. Profit-sharing is paid quarterly, in line with the Profit-sharing Payment Date.

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Subordinated notes syariah *mudharabah* (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Sukuk Mudharabah Subordinasi menurut Pefindo adalah idAA(sy) (Double A Sharia).

Pada tanggal 22 Desember 2016, Entitas anak, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") (dahulu diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri), telah menerbitkan sukuk *mudharabah* subordinasi BSM Tahun 2016 (sukuk *mudharabah*) dengan nilai nominal Rp375.000. Sukuk *mudharabah* merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk surat pengakuan liabilitas jangka panjang berjangka waktu 7 tahun dengan syarat dan ketentuan:

- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk *mudharabah* dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) BSI senilai 7 (tujuh) kali dana sukuk *mudharabah* dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama satu (1) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan BSI yang belum diaudit.
- Nisbah yang diberikan kepada pemegang sukuk *mudharabah* adalah sebesar 27,07% per tahun dari pendapatan bagi hasil yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Sukuk *mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan kedalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Sukuk *mudharabah* merupakan kewajiban Entitas Anak yang disubordinasi.

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

Subordinated notes sharia mudharabah (continued)

The Trustee for the 2023 BSI Subordinated Mudharabah Sukuk is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

As of 31 December 2023, the rating for the sukuk mudharabah according to Pefindo is idAA(sy) (double A sharia).

On 22 December 2016, the Subsidiary, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") (formerly issued by PT Bank Syariah Mandiri) has issued subordinated sukuk mudharabah BSM Year 2016 ("sukuk mudharabah") with total nominal value of Rp375,000. Sukuk mudharabah are long term securities debt tenor 7 years with the following terms and conditions as follow:

- *Profit sharing is calculated by multiplying the revenue-sharing portion of the sukuk mudharabah holders and revenue which can be shared based on the available last-quarter unaudited financial statements and approved by BSI's Directors no later than 10 (ten) working days prior to the payment date of profit sharing.*
- *The profit sharing was generated from the revenue of BSI's financing portfolio in Rupiah (blended) amounted to 7 (seven) times of sukuk mudharabah funds denominated in Rupiah which held by the issuer, which generated from one (1) quarter as stated in BSI's unaudited financial statements.*
- *The nisbah of the sukuk mudharabah holders' is 27.07% per annum of the profit sharing which is paid on quarterly basis.*

Sukuk mudharabah is not guaranteed by special collateral nor guaranteed by third parties, including not guaranteed by the Republic of Indonesia and is not included in the bank guarantee program implemented by Bank Indonesia or other guarantee institution in accordance to the prevailing law and regulation article 17 paragraph (1) letter f of FSA's Regulation (POJK) No. 21/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Minimum Capital Requirement for Sharia Banks. Sukuk mudharabah are subordinated Subsidiary's liability.

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Subordinated notes syariah *mudharabah* (lanjutan)

Selama berlakunya jangka waktu sukuk *mudharabah* dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, BSM berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa sukuk *mudharabah* ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan *(audited)* selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan *(unaudited*) triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pendapatan Bagi Hasil dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

BSI tanpa persetujuan tertulis Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya BSI.

Bertindak sebagai wali amanat sukuk *mudharabah* adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, peringkat sukuk *mudharabah* menurut Pefindo adalah idAA-(sy) (*double A minus* syariah).

Pada tanggal 17 November 2016, Entitas anak, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Syariah), menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil pada Bursa Efek Indonesia. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,85%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

Subordinated notes sharia mudharabah (continued)

During the validity period of sukuk mudharabah and before the redemption of all of principal and profit sharing, BSI is obliged to: (i) maintain the Capital Adequacy Ratio (CAR) at minimum 12% (twelve percent); (ii) ensure sukuk mudharabah holders at maximum 50 (fifty) investors; (iii) submit to the trustee as follows: the financial statements (audited) at maximum the 4th month after the date of financial statements, quarterly financial statements (unaudited) the 1st month after the date of financial statements at the latest, the financial statements used to calculate the profit sharing and BSI's soundness rating report and self-assessment of Good Corporate Governance implementation to the FSA.

BSI without written approval from the monitoring agent will not do the following: (i) reduce the issued and paid-in capital; (ii) undergo a change in its main business; (iii) undergo a merger, consolidation, reorganization, except such changes are in accordance with regulations from the Government of Indonesia or Bank Indonesia; (iv) conduct a merger, consolidation, acquisition with another entity that will result in the dissolution of BSI.

Acting as the trustee of the mudharabah sukuk is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. As of 31 December 2023 and 2022, the rating for the sukuk mudharabah according to Pefindo is idAA-(sy) (double A minus sharia).

On 17 November 2016, the Subsidiary, PT Bank Syariah Indonesia (formerly issued by PT Bank Rakyat Indonesia Syariah), issued Subordinated Sukuk Mudharabah I Year 2016 amounting to Rp1,000,000 and it was issued at 100.00% of its nominal value using the revenue sharing method on the Indonesia Stock Exchange. The ratio of sukuk holders is 80.2%, which is calculated from gross cash revenue, which is indicated at 11.85%. Profit sharing is paid every 3 (three) months and has matured on 16 November 2023.

The proceeds from the issuance of the Subordinated Sukuk Mudharabah I will be fully utilized to strengthen the capital structure in order to support business development activities in the form of financing distribution. This Subordinated Sukuk Mudharabah I is not guaranteed by special collateral, including not guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties and is not included in the bank guarantee program implemented by the Deposit Insurance Corporation or other guarantee institutions.

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

Subordinated notes syariah *mudharabah* (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran bunga efek-efek yang diterbitkan sesuai dengan jadwal pembayaran bunga selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian efek-efek yang diterbitkan.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA)

Pada tanggal 20 Desember 2023 sampai 29 Desember 2023, Entitas Anak PT Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas *committed line* melalui Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) sebesar Rp1.628.176 dengan jatuh tempo kurang dari satu bulan yang memiliki nilai nisbah sekitar 6,25% - 6,40%. Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya.

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I

Pada tanggal 26 Juni 2023, Entitas Anak (PT Bank Syariah Indonesia Tbk) telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I. PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp3.759, dengan maksimal plafon sebesar Rp100.000. Besarnya nisbah adalah sebesar 36,34% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035. Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama antara BSI dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerjasama tersebut diatur pada Undang-Undang No.4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2020 perihal pembiayaan perumahan melalui Bank atau perusahaan pembiayaan.

***30. DEBT SECURITIES ISSUED** (continued)*

***Bonds** (continued)*

Subsidiaries (continued)

Rupiah (continued)

Subordinated notes sharia mudharabah (continued)

Acting as the trustee for the Subordinated Sukuk Mudharabah I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the Subsidiaries have paid the interest of debt securities issued in accordance to interest payment schedule during the year ended 31 December 2023 and 2022.

During the year ended 31 December 2023 and 2022, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the Subsidiaries have fulfilled the requirements as set out in the agreement of debt securities issued.

Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)

On 20 December 2023 to 29 December 2023, the Subsidiary, PT Bank Syariah Indonesia provided a committed line facility through an Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) amounting to Rp1,628,176 with a maturity of less than one month with a ratio of around 6.25% - 6.40%. This facility is not guaranteed by special collateral, including not guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties.

Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase I

On 26 June 2023, the Subsidiary (PT Bank Syariah Indonesia Tbk) has issued a long term Sukuk Mudharabah Muqayyadah without Public Offering I of PT Bank BSI Tbk for the Year 2023 Phase 1 ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase I") with a nominal value of Rp3,759 and maximum limit of Rp100,000. The profit-sharing ratio is 36.34% indicating approximately 0.55% per annum. Profit sharing is paid every 3 (three) months and will mature on 26 December 2035. The facility is not secured by any specific collateral, including not guaranteed by the Republic of Indonesia or any third parties.

The issuance of the sukuk is carried out as part of the collaboration between BSI and BP Tapera, where BSI is appointed as the Sharia Housing Financing Distributor to BP Tapera participants. This collaboration scheme is regulated under Law No. 4 of 2016 and Government Regulation No. 25 of 2020 regarding housing financing through banks or financing companies.

31. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *31. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Transaksi komitmen dan kontijensi sebagai berikut: / *a. Transactions of commitments and contigencies are as follows:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Bank garansi yang diterbitkan (Catatan 54)	66.733.622	67.983.979	*Bank guarantee issued (Note 54)*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	53.782.999	58.225.671	*Unused loan facilities*)*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan (Catatan 54)	7.916.626	7.373.846	*Outstanding irrevocable letter of credit (Note 54)*
Standby letter of credit (Catatan 54)	2.707.117	2.940.072	*Standby letter of credit (Note 54)*
Total	131.140.364	136.523.568	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Bank garansi yang diterbitkan (Catatan 54)	47.866.831	43.022.528	*Bank guarantee issued (Note 54)*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	33.193.967	25.679.721	*Unused loan facilities*)*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan (Catatan 54)	12.965.346	20.943.435	*Outstanding irrevocable letter of credit (Note 54)*
Standby letter of credit (Catatan 54)	12.052.165	8.890.240	*Standby letter of credit (Note 54)*
Total	106.078.309	98.535.924	*Total*
	237.218.673	**235.059.492**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.

*) *Including unused committed and uncommitted credit card facilities*

Berikut adalah perubahan nilai tercatat atas komitmen dan kontinjensi dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

Movements in carrying amount of commitments and contigencies classified as amortised cost upon stage for the period and year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia*)**	**Total**	
Saldo awal tahun	222.612.365	9.250.636	305.472	2.891.019	235.059.492	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
- *Stage* 1	4.018.909	(3.955.133)	(63.776)	-	-	*Stage 1* -
- *Stage* 2	(8.241.809)	8.314.609	(72.800)	-	-	*Stage 2* -
- *Stage* 3	(25.776)	(780.412)	806.188	-	-	*Stage 3* -
Total saldo awal setelah pengalihan	218.363.689	12.829.700	975.084	2.891.019	235.059.492	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(15.646.437)	(1.312.653)	292	-	(16.958.798)	*Remeasurement of net carrying amount*
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	170.138.089	5.664.912	964.146	2.232.149	178.999.296	*New commitments and contigencies originated or purchased*
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(150.980.403)	(6.677.797)	(303.761)	(1.919.356)	(159.881.317)	*Commitments and contigencies derecognised*
Total kenaikan/ (penurunan) tahun berjalan	3.511.249	(2.325.538)	660.677	312.793	2.159.181	*Total increase/ (decrease) during the year*
Saldo akhir tahun**)	**221.874.938**	**10.504.162**	**1.635.761**	**3.203.812**	**237.218.673**	***Ending balance*****)

*) Tidak menerapkan PSAK 71
**) Termasuk fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan untuk kartu kredit sebesar Rp34.687.343.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Including the unused credit facilities for credit cards amounted to Rp34,687,343.*

31. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *31. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

a. Transaksi komitmen dan kontijensi sebagai berikut (lanjutan): / *a. Transactions of commitments and contigencies are as follows (continued):*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	223.551.457	7.107.360	295.167	1.724.608	232.678.592	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
- *Stage* 1	252.401	(175.246)	(77.155)	-	-	*Stage 1* -
- *Stage* 2	(3.192.940)	3.196.982	(4.042)	-	-	*Stage 2* -
- *Stage* 3	(44.584)	(49.111)	93.695	-	-	*Stage 3* -
Total saldo awal setelah pengalihan	220.566.334	10.079.985	307.665	1.724.608	232.678.592	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2.647.919)	(181.363)	3.743	-	(2.825.539)	*Remeasurement of net carrying amount*
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	191.821.257	5.180.223	98.752	1.881.382	198.981.614	*New commitments and contigencies originated or purchased*
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(187.127.307)	(5.828.209)	(104.688)	(714.971)	(193.775.175)	*Commitments and contigencies derecognised*
Total kenaikan/ (penurunan) tahun berjalan	2.046.031	(829.349)	(2.193)	1.166.411	2.380.900	*Total increase/ (decrease) during the year*
Saldo akhir tahun**)	**222.612.365**	**9.250.636**	**305.472**	**2.891.019**	**235.059.492**	***Ending balance*****)

*) Tidak menerapkan PSAK 71
**) Termasuk fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan untuk kartu kredit sebesar Rp36.533.367.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Including the unused credit facilities for credit cards amounted to Rp36,533,367.*

b. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia: / *b. By Bank Indonesia's collectibility:*

	2023	**2022**	
Lancar	231.413.861	228.260.580	*Current*
Dalam perhatian khusus	5.711.143	6.554.760	*Special mention*
Kurang lancar	4.061	4.209	*Substandard*
Diragukan	53.243	48.627	*Doubtful*
Macet	36.365	191.316	*Loss*
Total	237.218.673	235.059.492	*Total*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.143.758)	(2.073.429)	*Less: allowance for impairment losses*
Komitmen dan kontinjensi - neto	**236.074.915**	**232.986.063**	***Commitments and contingencies - net***

c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi: / *c. Movements of allowance for impairment losses on commitments and contingencies:*

	2023	**2022**	
Saldo awal tahun	2.073.429	2.295.241	*Beginning balance*
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan	(918.531)	(255.268)	*Reversal during the year*
Lain-lain*)	(11.140)	33.456	*Others**)
Saldo akhir tahun	**1.143.758**	**2.073.429**	***Ending balance***

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. / *) *Included effect of foreign currencies translation.*

31. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi (lanjutan):

31. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Movements of allowance for impairment losses on commitments and contingencies (continued):

	2023					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	489.027	1.326.709	228.819	28.874	2.073.429	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
Kerugian kredit ekpektasian 12 bulan	24.437	(19.927)	(4.510)	-	-	*12 months expected credit losses*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai	(12.474)	18.975	(6.501)	-	-	*Lifetime expected credit losses unimpaired*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai	(1.498)	(284.265)	285.763	-	-	*Lifetime expected credit losses impaired*
Total saldo awal setelah pengalihan	499.492	1.041.492	503.571	28.874	2.073.429	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(120.198)	(199.279)	(206.147)	3.246	(522.378)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	227.749	383.547	110.631	-	721.927	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(124.214)	(749.704)	(244.162)	-	(1.118.080)	*Financial assets derecognised*
Total (pembalikan)/ pembentukan tahun berjalan	(16.663)	(565.436)	(339.678)	3.246	(918.531)	*Total (reversal)/ allowance during the year*
Lain-lain**)	(10.941)	(97)	-	(102)	(11.140)	*Others***)
Saldo akhir tahun	**471.888**	**475.959**	**163.893**	**32.018**	**1.143.758**	**Ending balance**

*) Tidak menerapkan PSAK 71
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foregin currencies translation*

	2022					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah*)/ *Sharia**)**	**Total**	
Saldo awal tahun	776.560	1.309.629	191.858	17.194	2.295.241	*Beginning balance*
Pengalihan ke/(dari):						*Transfer to/(from):*
Kerugian kredit ekpektasian 12 bulan	15.255	(12.705)	(2.550)	-	-	*12 months expected credit losses*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya- tidak mengalami penurunan nilai	(207.427)	207.607	(180)	-	-	*Lifetime expected credit losses - unimpaired*
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya- mengalami penurunan nilai	(1.173)	(2.701)	3.874	-	-	*Lifetime expected credit losses - impaired*
Total saldo awal setelah pengalihan	583.215	1.501.830	193.002	17.194	2.295.241	*Total beginning balance after transfer*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(215.556)	118.946	31.747	11.284	(53.579)	*Remeasurement of net carrying amount*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	230.392	914.173	63.862	-	1.208.427	*New financial assets originated or purchased*
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(138.886)	(1.211.438)	(59.792)	-	(1.410.116)	*Financial assets derecognised*
Total (pembalikan)/ pembentukan tahun berjalan	(124.050)	(178.319)	35.817	11.284	(255.268)	*Total (reversal)/ allowance during the year*
Lain-lain**)	29.862	3.198	-	396	33.456	*Others***)
Saldo akhir tahun	**489.027**	**1.326.709**	**228.819**	**28.874**	**2.073.429**	***Ending balance***

*) Tidak menerapkan PSAK 71
**) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.

*) *Not implement SFAS 71*
**) *Included effect of foregin currencies translation*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on commitments and contingencies is adequate.

31. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok "tidak mengalami penurunan nilai" dan "mengalami penurunan nilai" diungkapkan pada Catatan 62.A.

e. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan tunai untuk bank garansi dan *letter of credit* yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.294.275 dan Rp11.363.018 (Catatan 21c dan 24c).

***31. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

d. Information in respect of classification of "non-impaired" and "impaired" is disclosed in Note 62.A.

e. Deposits from customers and deposits from other banks pledged as collateral for bank guarantee and irrevocable letter of credit as of 31 December 2023 and 2022 were amounted to Rp12,294,275 and Rp11,363,018, respectively (Notes 21c and 24c).

32. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / ***32. ACCRUED EXPENSES***

	2023	2022	
Beban bunga	1.922.706	1.565.557	*Interest expense*
Pengadaan aset tetap, perangkat lunak, operasional dan ATM	1.424.041	2.352.674	*Fixed assets, software, operational, and ATM procurement*
Pemasaran	576.801	1.077.634	*Promotions*
Tenaga kerja dan jasa pihak ketiga	168.852	643.082	*Third party labor service and outsourcing expenses*
Jasa profesional	80.914	214.190	*Professional service costs*
Iuran regulator	40.345	68.196	*Regulator fee*
Pelatihan, pakaian dinas dan rekreasi	34.908	61.656	*Training, uniform and recreation*
Pengembangan usaha	-	11.561	*Business development*
Lain-lain	550.879	499.244	*Others*
Total	**4.799.446**	**6.493.794**	***Total***

Termasuk dalam pengadaan aset tetap, perangkat lunak, operasional dan ATM adalah utang kepada pemasok atau *vendor* terkait kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung, peralatan, perangkat lunak, mesin ATM dan sistem Teknologi Informasi Grup. Lain-lain terdiri dari beban yang masih harus dibayar terkait transaksi operasional kegiatan Grup, seperti biaya komunikasi data dan biaya listrik, air dan gas.

Included in the fixed assets, software, operational and ATM procurement are payables to vendors related to operational and maintenance activities for buildings, equipments, software, ATM machines and Information Technology System of the Group. Others consists of accrued expenses related to fees to be paid in relation to Group's operational activities, such as data communication costs and costs of electricity, water and gas.

33. PERPAJAKAN / ***33. TAXATION***

a. Pajak dibayar dimuka / ***a. Prepaid taxes***

	2023	2022	
Bank Mandiri	239.757	979.174	*Bank Mandiri*
Entitas Anak	196.775	185.751	*Subsidiaries*
Total	**436.532**	**1.164.925**	***Total***

33. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***33. TAXATION** (continued)*

b. Utang pajak / **b. Taxes payable**

	2023	2022	
Utang Pajak Kini			***Current income taxes payable***
Bank Mandiri	549.319	796.520	*Bank Mandiri*
Entitas Anak	303.042	459.524	*Subsidiaries*
	852.361	1.256.044	
Utang Pajak Lainnya			***Other taxes payable***
Bank Mandiri			***Bank Mandiri***
Pajak Penghasilan			*Income Tax*
Pasal 25	255.817	673.746	*Article 25*
Pasal 21	248.873	149.892	*Article 21*
Pasal 4 (2)	361.810	250.899	*Article 4 (2)*
Lain-lain	226.360	166.783	*Others*
	1.092.860	1.241.320	
Entitas Anak	745.681	1.093.158	***Subsidiaries***
	1.838.541	2.334.478	
Total	**2.690.902**	**3.590.522**	***Total***

c. Beban/(manfaat) pajak / ***c. Tax expense/(benefit)***

	2023	2022	
Beban pajak - kini:			*Tax expense - current:*
Bank Mandiri	10.015.624	9.329.662	*Bank Mandiri*
Entitas Anak	2.892.050	2.567.672	*Subsidiaries*
	12.907.674	11.897.334	
Beban/(manfaat) pajak - tangguhan:			*Tax expense/(benefit) - deferred:*
Bank Mandiri	1.674.707	(243.655)	*Bank Mandiri*
Entitas Anak	50.630	(228.321)	*Subsidiaries*
	1.725.337	(471.976)	
Total	**14.633.011**	**11.425.358**	***Total***

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2ad, pajak penghasilan untuk Bank Mandiri dan Entitas Anak dihitung untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah.

As explained in Note 2ad, income tax for Bank Mandiri and its Subsidiaries are calculated for each company as a separate legal entity.

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

***33. TAXATION** (continued)*

d. Beban pajak - kini

d. Tax expense – current

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan perhitungan pajak penghasilan dan beban pajak kini untuk Bank Mandiri dan taksiran beban pajak kini Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax as shown in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax calculation and current tax expense for Bank Mandiri and the estimated current tax expense for Subsidiaries are as follows:

	2023	2022	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan nonpengendali	74.684.881	56.377.726	*Consolidated income before tax expense and non-controlling interests*
Dikurangi:			*Less:*
Laba sebelum beban pajak Entitas Anak - setelah eliminasi	(15.860.851)	(13.077.504)	*Income before tax expense of Subsidiaries - after elimination*
Dampak perubahan metode pencatatan investasi dari metode ekuitas ke metode biaya	3.963.179	3.478.211	*Impact of changes in investment recognition from equity method to cost method*
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan non pengendali - Bank Mandiri saja	62.787.209	46.778.433	*Income before tax expense and non-controlling interests - Bank Mandiri only*
Ditambah/(dikurangi) perbedaan permanen:			*Add/(deduct) permanent differences:*
Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak/(pendapatan tidak kena pajak)	(1.331.776)	25.992	*Non-deductible expenses/ (non-taxable income)*
Lain-lain	-	(940)	*Others*
Ditambah/(dikurangi) perbedaan temporer:			*Add/(deduct) temporary differences:*
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penghapusan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	(7.085.029)	1.208.815	*Allowance for impairment losses and write-offs of loans and sharia receivables/ financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan selain kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	(102.868)	(3.400)	*Allowance for impairment losses on financial assets other than loans and sharia receivables/ financing*
Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai dan cadangan atas bonus dan insentif, cuti dan THR pegawai	(531.679)	1.138.748	*Provision for post-employment benefit expense, provisions for bonuses, leave and holiday (THR) entitlements*
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul dari kasus hukum	(20.451)	(13.743)	*Allowance for estimated losses arising from legal cases*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	(932.769)	(233.446)	*Provision for estimated losses on commitments contingencies*
Penyisihan kerugian agunan Yang diambil alih	-	219.824	*Provision for foreclosed collateral losses*
Penyusutan aset tetap	94.238	(17.468)	*Depreciation of fixed assets*
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(146.520)	851	*Unrealised (losses)/gains on (decrease)/increase in fair value of marketable securities and government bonds - fair value through profit or loss*
Penyisihan kerugian properti terbengkalai	(16.547)	-	*Allowance for possible losses of abandoned properties*
Taksiran laba menurut pajak	52.713.808	49.103.486	*Estimated taxable income*
Taksiran beban pajak - kini			*Estimated tax expense - current*
Bank Mandiri	10.015.624	9.329.662	*Bank Mandiri*
Entitas Anak	2.892.050	2.567.672	*Subsidiaries*
Total	12.907.674	11.897.334	*Total*

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak - kini (lanjutan)

Pajak atas laba Bank Mandiri dan Entitas Anak (Grup) sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada Grup dalam jumlah sebagai berikut:

***33. TAXATION** (continued)*

***d. Tax expense - current** (continued)*

Tax on Bank Mandiri and Subsidiaries (Group)'s profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities are follows:

	2023	2022	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan nonpengendali	74.684.881	56.377.726	*Consolidated income before tax expense and non-controlling interest*
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku	15.418.957	11.764.953	*Tax calculated at applicable tax rates*
Dampak pajak penghasilan pada: Bank Mandiri			***Income tax effect of: Bank Mandiri***
Penghasilan tidak kena pajak dan pajak final	(381.257)	(350.892)	*Income not subject to tax and final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	128.219	355.652	*Expenses not deductible for tax purposes*
Taksiran laba menurut pajak	(253.038)	4.760	*Estimated taxable income*
Entitas Anak	(532.908)	(344.355)	*Subsidiaries*
Total dampak pajak penghasilan	(785.946)	(339.595)	*Total tax effect*
Beban pajak penghasilan	**14.633.011**	**11.425.358**	***Income tax expense***

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank Mandiri dan Entitas Anak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ke kantor pajak atas dasar *self-assessment*. Kantor pajak berhak memeriksa atau mengoreksi pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pajak terutang.

According to the taxation laws of Indonesia, Bank Mandiri and Subsidiaries submit the Annual Corporate Income Tax Returns to the tax office on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend taxes within 5 (five) years from the tax due date.

Sejak tahun 2009, Bank Mandiri mengakui kredit yang dihapusbuku sebagai pengurang laba bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan memenuhi tiga ketentuan yang disyaratkan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.03/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tanggal 20 November 2015.

Starting from 2009, Bank Mandiri has recognised written-off loans as deduction of gross profit by fullfiling the three requirements stipulated in UU No. 36 Year 2008 dated 23 September 2008 related Income Tax and Regulation of the Minister of Finance No. 105/PMK.03/2009 dated 10 June 2009 related uncollectible receivables that could be deducted from gross income, which was amended by Regulation of the Minister of Finance No. 57/PMK.03/2010 dated 9 March 2010 and Regulation of the Minister of Finance No. 207/PMK.010/2015 dated 20 November 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021") mengatur bahwa tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% (dua puluh persen) menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2021 dated 29 October 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations ("Law Number 7 Year 2021") stipulates that the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments is 22% (twenty two percent) with effect from the 2022 fiscal year onwards. Thus, the previous tax rate setting of 20% (twenty percent) becomes invalid after this Law is enacted.

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban pajak - kini (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 11 April 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak harus menyampaikan laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek dan laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh untuk setiap Tahun Pajak.

Berdasarkan Surat Keterangan No.DE/I/2024-0194 tanggal 4 Januari 2024 perihal Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan (Formulir Lampiran POJK No. 10/POJK.04/2020) dari PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek atau BAE), yang disampaikan kepada Bank Mandiri, dimana BAE menyatakan Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Bank berkeyakinan bahwa Bank akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sesuai ketentuan perpajakan tersebut di atas, sehingga untuk pajak penghasilan badan Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

***33. TAXATION** (continued)*

***d. Tax expense - current** (continued)*

Based on Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 1983 regarding Income Tax as amended several times, most recently by Law Number 7 Year 2021 and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 Year 2022 dated 20 December 2022 regarding Amandment of Regulations related to Income Tax Sector, domestic taxpayers in the form of public listed companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent) and fulfilling certain requirements, may obtain a rate of 3% (three percent) lower than the highest existing income tax rate.

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2023 dated 11 April 2023 concerning Forms and Procedures for Submitting Reports and Lists of Taxpayers regarding to Fullfillment of Requirements for Reduction of Income Tax Rates for Domestic Taxpayers in the Form of Public Companies, taxpayers must submit monthly reports on share ownership of issuers or public companies and recapitulations that have been reported from the Securities Administration Bureau and reports of share ownership that have special relations as part of the Annual Income Tax Return for each Fiscal Year.

Based on Statement Letter No. DE/I/2024-0194 dated 4 January 2024 concerning Monthly Report of Share Ownership of Issuers or Public Companies and Reported Recapitulation (Form of POJK Appendix No. 10/POJK 04/2020) from PT Datindo Entrycom (Administrative Bureau Securities or BAE), which was submitted to Bank Mandiri, where the BAE stated that Bank Mandiri had complied with the provisions of Article 65 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 Year 2022 dated 20 December 2022 regarding Amandment of Regulations related to Income Tax Sector.

The Bank believes that the Bank will fulfill the requirements to obtain the income tax rate reduction facility for the year ended 31 December 2023 in accordance with the tax provisions mentioned above, so that Bank Mandiri's corporate income tax for the year ended 31 December 2023 is calculated using the tax rate 19%.

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

***33. TAXATION** (continued)*

e. Aset pajak tangguhan – neto

Pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara nilai buku menurut komersial dan menurut pajak adalah sebagai berikut:

e. Deferred tax assets - net

Deferred tax arises from temporary differences between book value based on commercial and tax purposes are as follows:

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balane***	
Bank Mandiri					***Bank Mandiri***
Aset pajak tangguhan:					*Deferred tax assets:*
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	6.363.273	(1.346.156)	-	5.017.117	*Allowance for impairment losses for loans and sharia receivables/financing*
Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai dan cadangan atas bonus dan insentif, cuti dan THR pegawai	1.692.770	(101.018)	(7.796)	1.583.956	*Provisions for post-employment benefit expense, provision for bonuses, leave and holiday (THR) entitlements*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan selain kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	696.917	(33.343)	-	663.574	*Allowance for impairment losses on financial assets other than loans and sharia receivables/financing*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	931.086	-	(119.958)	811.128	*Unrealised gain from increased fair value of marketable securities and government bonds - measured at fair value through other comprehensive income*
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul dari kasus hukum	20.927	(3.886)	-	17.041	*Allowance for estimated losses arising from legal cases*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	36.275	(36.275)	-	-	*Estmated losses on commitments and contingencies*
Penyisihan kerugian properti terbengkalai	16.338	(3.144)	-	13.194	*Allowance for possible losses on abandoned properties*
Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih	53.396	-	-	53.396	*Allowance for possible losses on repossessed asset*
Aset pajak tangguhan	**9.810.982**	**(1.523.822)**	**(127.754)**	**8.159.406**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan:					*Deferred tax liabilities:*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah - nilai wajar melalui laba rugi	(7.827)	(27.839)	-	(35.666)	*Unrealised gain/(loss) from increase/(decrease) in fair value of marketable securities and government bonds - fair value through other comprehensive income*
Nilai buku aset tetap	(125.994)	17.905	-	(108.089)	*Net book value of fixed assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	-	(140.951)	-	(140.951)	*Estmated losses on commitments and contingencies*
Aset pajak tangguhan neto - Bank Mandiri saja	**9.677.161**	**(1.674.707)**	**(127.754)**	**7.874.700**	***Deferred tax assets - Bank Mandiri only***
Aset pajak tangguhan - Entitas Anak	2.368.318	(50.630)	(13.144)	2.304.544	*Deferred tax assets - Subsidiaries*
Total aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	**12.045.479**	**(1.725.337)**	**(140.898)**	**10.179.244**	***Total consolidated deferred tax assets - net***

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan - neto (lanjutan)

Pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara nilai buku menurut komersial dan menurut pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

***33. TAXATION** (continued)*

***e. Deferred tax assets - net** (continued)*

Deferred tax arises from temporary differences between book value based on commercial and tax purposes are as follows (continued):

	2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balane***	
Bank Mandiri Aset pajak tangguhan:					***Bank Mandiri*** *Deferred tax assets:*
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	6.070.489	292.784	-	6.363.273	*Allowance for impairment losses for loans and sharia receivables/finaning*
Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai dan cadangan atas bonus dan insentif, cuti dan THR pegawai	1.530.956	216.363	(54.549)	1.692.770	*Provisions for post-employment benefit expense, provision for bonuses, leave and holiday (THR) entitlements*
Kredit yang dihapusbukukan sampai dengan tahun 2008	256.458	(256.458)	-	-	*Loans written-off until 2008*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan selain kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	697.563	(646)	-	696.917	*Allowance for impairment losses on financial assets other than loans sharia receivables/financing*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	931.086	931.086	*Unrealised gain from increased fair value of marketable securities and government bonds - measured at fair value through other comprehensive income*
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul dari kasus hukum	23.538	(2.611)	-	20.927	*Allowance for estimated losses arising from legal cases*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	80.630	(44.355)	-	36.275	*Estmated losses on commitments and contingencies*
Penyisihan kerugian properti terbengkalai	16.338	-	-	16.338	*Allowance for possible losses on abandoned properties*
Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih	9.757	43.639	-	53.396	*Allowance for possible losses on repossessed asset*
Akumulasi rugi penurunan nilai realisasi bersih agunan yang diambil alih	1.871	(1.871)	-	-	*Accumulated losses arising from differences in net realizable value of repossessed assets*
Aset pajak tangguhan	**8.687.600**	**246.845**	**876.537**	**9.810.982**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan:					*Deferred tax liabilities:*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah - nilai wajar melalui laba rugi	(7.989)	162	-	(7.827)	*Unrealised gain/(loss) from increase/(decrease) in fair value of marketable securities and government bonds - fair value through other comprehensive income*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(109.713)	-	109.713	-	*Unrealised gain from increase in fair value of marketable securities and government bonds - fair value through profit or loss*
Nilai buku aset tetap	(122.642)	(3.352)	-	(125.994)	*Net book value of fixed assets*
Aset pajak tangguhan neto - Bank Mandiri saja	**8.447.256**	**243.655**	**986.250**	**9.677.161**	***Deferred tax assets - Bank Mandiri only***
Aset pajak tangguhan - Entitas Anak	1.907.538	228.321	232.459	2.368.318	*Deferred tax assets - Subsidiaries*
Total aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	**10.354.794**	**471.976**	**1.218.709**	**12.045.479**	***Total consolidated deferred tax assets - net***

Aset pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Deferred tax assets are calculated using applicable tax rate or substantially enacted tax rate at consolidated statement of financial position dates.

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that it is possible that future taxable income will be available to be utilised against the temporary difference, which resulted in deferred tax assets.

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak

Tahun pajak 2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak, pada tanggal 26 November 2019, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2015 sebesar Rp918.160 (termasuk denda) dimana yang disetujui oleh Bank hanya sebesar Rp201.197 dan dicatat sebagai beban pajak kini - tahun sebelumnya di laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019. Pada tanggal 5 Desember 2019, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB PPh Badan dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan yang tidak disetujui sebesar Rp716.963 ke Kantor Pajak pada tanggal 20 Februari 2020.

Pada tanggal 26 November 2019, Bank juga menerima SKPKB atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp28.255 (termasuk denda) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp247.544 (termasuk denda) untuk tahun fiskal 2015. Pada tanggal 5 Desember 2019, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB tersebut. Bank tidak akan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp28.255 dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPN sebesar Rp247.544 ke Kantor Pajak pada tanggal 20 Februari 2020.

Jumlah pembayaran atas SKPKB yang tidak disetujui diatas sebesar Rp964.507 dimana Bank telah mengajukan keberatan, dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 26 Januari 2021, Bank telah menerima hasil putusan keberatan PPh Badan untuk tahun fiskal 2015, yang mengurangi jumlah pajak dalam surat keberatan dari Rp716.963 menjadi Rp544.853. Bank juga telah menerima hasil putusan keberatan PPN untuk tahun fiskal 2015, yang mengurangi jumlah pajak dalam surat keberatan dari Rp247.544 menjadi Rp221.199. Bank tidak setuju dengan hasil putusan keberatan dan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 16 April 2021.

***33. TAXATION** (continued)*

f. Tax assessment letter

Fiscal year 2015

According to the tax audit result from Tax Office, on 26 November 2019, the Bank received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) of Corporate Income Tax for fiscal year 2015 amounted to Rp918,160 (including penalties) which accepted by Bank amounted to Rp201,197 only and recorded as current tax expense - prior year in the 2019 consolidated statement of profit or loss. On 5 December 2019, the Bank has paid all of the underpayment and has submitted an objection letter on the SKPKB of Corporate Income Tax amounted to Rp716,963 to the Tax Office on 20 February 2020.

On 26 November 2019, the Bank also received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21, 23 and 4(2) amounted to Rp28,255 (including penalties) and Value Added Tax (VAT) and Surat Tagihan Pajak (STP) amounted to Rp247,544 (including penalties) for 2015 fiscal year. On 5 December 2019, the Bank has paid the entire SKPKB. Bank will not file an objection to SKPKB PPh Article 21, PPh Article 23 and PPh Article 4 (2) amounted to Rp28,255 and has submitted an objection letter to the SKPKB VAT amounted to to Rp247,544 to the Tax Office on 20 February 2020.

The total payment for the SKPKB that was not approved above amounted to Rp964,507 where the Bank has filed an objection, and recognised as prepaid tax on 31 December 2021 and 2020.

On 26 January 2021, the Bank has received the decision on the objection to Corporate Income Tax for the 2015 fiscal year, which reduces the amount of tax in the objection letter from Rp716,963 to Rp544,853. The Bank also received the decision on the VAT objection for the 2015 fiscal year, which reduced the amount of tax in the objection letter from Rp247,544 to Rp221,199. The Bank does not agree with the objection decision and has submitted an appeal to the Tax Court on 16 April 2021.

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2023, Pengadilan Pajak telah membacakan putusan banding PPh Badan dan PPN. Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding PPh Badan, yang mengurangi jumlah pajak dalam surat banding dari Rp544.853 menjadi RpNihil. Pengadilan Pajak juga mengabulkan seluruhnya permohonan banding PPN, yang mengurangi jumlah pajak dalam surat banding dari Rp221.199 menjadi RpNihil. Pada tanggal 15 September 2023, Kantor Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Banding PPh Badan. Sehubungan dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Bank telah memberikan jawaban dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal 18 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung masih berlangsung.

Tahun pajak 2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak, pada tanggal 17 November 2020, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2016 sebesar Rp1.293.817 (termasuk denda) dimana yang disetujui oleh Bank hanya sebesar Rp175.592 dan dicatat sebagai beban pajak kini - tahun sebelumnya di laporan laba rugi konsolidasi tahun 2020. Pada tanggal 27 November 2020, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB PPh Badan sebesar Rp1.118.225 ke Kantor Pajak.

Pada tanggal 17 November 2020, Bank juga menerima SKPKB atas PPh Pasal 21 sebesar Rp31.492 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp128.766 (termasuk denda) untuk tahun fiskal 2016. Pada tanggal 27 November 2020, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB tersebut. Bank tidak akan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 sebesar Rp31.492 dan SKPKB PPN sebesar Rp128.766. Seluruh kurang bayar tersebut dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2020.

Jumlah pembayaran atas SKPKB yang tidak disetujui di atas sebesar Rp1.118.225 dimana Bank mengajukan keberatan, dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2021. Bank telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan yang tidak disetujui sebesar Rp1.118.225 ke Kantor Pajak pada tanggal 10 Februari 2021.

***33. TAXATION** (continued)*

***f. Tax assessment letter** (continued)*

***Fiscal year 2015** (continued)*

On 9 June 2023, the Tax Court read the verdict of the appeal for Corporate Income Tax (CIT) and Value Added Tax (VAT). The Tax Court fully granted the CIT appeal, which reduced the amount of tax in the appeal letter from Rp544,853 to RpNil. The Tax Court also fully granted the VAT appeal, which reduced the amount of tax in the appeal letter from Rp221,199 to RpNil. On 15 September 2023, the Tax Office submitted judicial review to the Supreme Court regarding the Tax Court decision on Corporate Income Tax (CIT). In relation to the Judicial Review, the Bank has submitted response in the form of Counter Memorial of Judicial Review to the Supreme Court on 18 October 2023, stating that the Tax Court decision is in accordance with the applicable laws and regulations. As of the authorisation date of these consolidated financial statements, the judicial review process at the Supreme Court is still ongoing.

Fiscal year 2016

Based on the result of the tax audit from Tax Office on 17 November 2020, the Bank has received an Underpayment Tax Assessment (SKPKB) on Corporate Income tax for the 2016 fiscal year amounted to Rp1,293,817 (including penalties), which was accepted by the Bank for only Rp175,592 and recorded as current tax expense - prior year in the 2020 consolidated statement of profit or loss. On 27 November 2020, Bank has paid all SKPKB Corporate Income Tax and has submitted an objection letter for the SKPKB amounted to Rp1,118,225 to the Tax Office.

On 17 November 2020, the Bank also received SKPKB on Income Tax Article 21 amounted to Rp31,492 and Value Added Tax (VAT) also the tax collection letter (STP) amounted to Rp128,766 (including penalties) for the 2016 fiscal year. On 27 November 2020, Bank has paid all the SKPKB, and will not submit an objection to SKPKB Article 21 amounted to Rp31,492 and SKPKB VAT amounted to Rp128,766. All underpayments are charged to the 2020 consolidated statement of profit or loss.

The total payment for the SKPKB that was not approved above amounted to Rp1,118,225 where the Bank filed an objection, was recorded as prepaid tax on 31 December 2021. The Bank has submitted an objection letter to the SKPKB for Corporate Income Tax which was not approved amounted to Rp1,118,225 to Tax Office on 10 February 2021.

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 7 Februari 2022, Bank telah menerima hasil putusan keberatan PPh Badan, yang mengurangi jumlah pajak dalam surat keberatan dari Rp1.118.225 menjadi Rp213.760. Pada tanggal 21 Maret 2022, Bank telah menerima pengembalian pajak atas hasil putusan keberatan PPh Badan tersebut sebesar Rp909.489 dan dicatat sebagai pengurang pembayaran pajak dibayar dimuka. Bank tidak setuju dengan hasil putusan keberatan dan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 28 April 2022. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, proses banding di Pengadilan Pajak masih berlangsung.

***33. TAXATION** (continued)*

***f. Tax assessment letter** (continued)*

***Fiscal year 2016** (continued)*

On 7 February 2022, the Bank received the decision on objection to Corporate Income Tax which reduced the amount of tax in the objection letter from Rp1,118,225 to Rp213,760. On 21 March 2022, the Bank received a tax refund for the objection to Corporate Income Tax in the amount of Rp909,489 and recorded it as a deduction from prepaid tax payments. The Bank did not agree with the results of the objection decision and has submitted an appeal to the Tax Court on 28 April 2022. As of the authorisation date of these consolidated financial statements, the appeal process at the Tax Court is still ongoing.

34. LIABILITAS IMBALAN KERJA / ***34. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES***

	2023	2022	
Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai (Catatan 51)	3.553.213	3.251.241	*Provision for post-employment benefit (Note 51)*
Cadangan atas bonus, insentif, cuti dan THR	8.341.416	9.356.518	*Provisions for bonuses, incentive, leave and holiday (THR) entitlements*
Total	**11.894.629**	**12.607.759**	***Total***

Penyisihan biaya uang penghargaan pegawai meliputi uang pensiun dan remunerasi jangka panjang lainnya sesuai dengan kebijakan Bank dan Entitas Anak yang dihitung dengan perhitungan aktuaris.

Provision for post-employment benefit such as pension fund and other long term remuneration are in accordance with the Bank and Subsidiaries' policy which are calculated using actuarial calculation.

35. LIABILITAS LAIN-LAIN / ***35. OTHER LIABILITIES***

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	7.005.683	2.800.422	*Liabilities related to ATM and credit card transactions*
Liabilitas kepada pemegang polis	6.826.438	6.003.177	*Liabilities to policyholders*
Liabilitas kepada pihak ketiga	2.316.954	2.390.734	*Liabilities to third parties*
Utang transaksi nasabah	1.763.561	1.236.438	*Customers transaction payables*
Liabilitas dana pensiun dan JHT pensiun	1.190.519	1.014.286	*Pension fund and pension plan liabilities*
Liabilitas kepada *dealer*	1.035.958	460.916	*Liabilities to dealer*
Pendapatan diterima dimuka yang teratribusi	1.023.992	885.978	*Deferred income (directly attributable)*
Liabilitas sewa	827.903	841.129	*Lease liabilities*
Setoran jaminan	782.525	677.241	*Guarantee deposits*
Liabilitas terkait dengan *unit-link*	721.960	324.717	*Liabilities related to unit-link*
Liabilitas transaksi asuransi	691.011	626.020	*Insurance transaction liabilities*
Pendapatan diterima dimuka yang tidak teratribusi	594.381	590.345	*Deferred income (not directly attributable)*
Liabilitas terkait dengan transaksi transfer nasabah	352.988	642.371	*Liabilities related to customers transfer transactions*
Liabilitas zakat	196.774	145.153	*Zakat liabilities*
Liabilitas terkait dengan transaksi treasuri	72.313	12.065	*Liabilities related to treasury transactions*
Liabilitas terkait dengan transaksi *trade finance*	10.858	3.019	*Liabilities related to trade finance transactions*
Liabilitas *spot*	5.137	23.279	*Spot liabilities*
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul dari kasus hukum	2.989	2.928	*Provision for losses that arise from legal cases*
Pembelian efek-efek yang masih harus dibayar	-	121.394	*Payables from purchase of marketable securities*
Lain-lain	2.894.402	2.671.696	*Others*
Total	28.316.346	21.473.308	*Total*

35. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan) / ***35. OTHER LIABILITIES*** *(continued)*

	2023	2022	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
*Term Deposit*s Valas			*Foreign Exchange Term*
Devisa hasil Ekspor	3.718.375	-	*Deposits from Export Activities*
Liabilitas terkait dengan transaksi *transfer* nasabah (Catatan 62.B.(iv))	2.596.090	2.581.170	*Customers transfer transactions (Note 62.B.(iv))*
Liabilitas terkait dengan transaksi *trade finance*	1.000.360	690.186	*Liabilities related to trade finance transactions*
Setoran jaminan (Catatan 62.B.(iv))	587.877	288.296	*Guarantee deposits (Note 62.B.(iv))*
Pendapatan diterima dimuka yang tidak teratribusi	539.309	480.301	*Deferred income (not directly attributable)*
Liabilitas sewa (Catatan 62.B.(iv))	167.065	26.905	*Lease liabilities (Note 62.B.(iv))*
Liabilitas kepada pihak ketiga	89.225	160.335	*Liabilities to third parties*
Liabilitas transaksi asuransi	19.039	15.183	*Insurance transaction liabilities*
Liabilitas terkait dengan *unit-link*	4.945	8.528	*Liabilities related to unit-link*
Liabilitas *spot*	316	122	*Spot liabilities*
Liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit (Catatan 62.B.(iv))	2	-	*Liabilities related to ATM and credit card transactions (Note 62.B.(iv))*
Liabilitas terkait dengan transaksi treasuri	-	1.003.189	*Liabilities related to treasury transactions*
Lain-lain	360.264	609.230	*Others*
Total	9.082.867	5.863.445	*Total*
	37.399.213	**27.336.753**	

Liabilitas kepada pemegang polis terdiri dari liabilitas Entitas Anak (PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) sebagai berikut:

Liabilities to policyholders consist of liabilities of the Subsidiaries (PT AXA Mandiri Financial Services and PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) as follows:

	2023	2022	
Manfaat polis masa depan dari produk *non unit-link*	5.545.895	4.627.860	*Future policy benefits from non unit-link products*
Premi yang belum merupakan pendapatan	569.282	508.597	*Unearned premiums*
Estimasi liabilitas klaim	423.837	543.326	*Estimated claim liabilities*
Utang klaim	287.424	323.394	*Claim payables*
Total	**6.826.438**	**6.003.177**	***Total***

Liabilitas manfaat polis masa depan adalah jumlah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar manfaat dan klaim di masa yang akan datang kepada pihak sebagaimana dinyatakan dalam polis. Perubahan liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas manfaat polis masa depan telah dihitung menggunakan metode *Gross Premium Reserve* maupun metode harian. Asumsi-asumsi yang dipakai untuk menghitung cadangan liabilitas masa depan pemegang polis dengan *Gross Premium Reserve* adalah berdasarkan asumsi estimasi terbaik tahun 2023 yang meliputi asumsi tingkat mortalita, morbidita, tingkat pembatalan polis, biaya, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga.

Liability for future policy benefits is the amount of funds that must be provided by the insurer to pay benefits and claims in the future to the party as stated in the policy. Changes in liability for future policy benefits are recognised in profit or loss for the year. Liability for future policy benefits has been calculated using the Gross Premium Reserve method and the daily method. The assumptions used to calculate future liability reserves for policyholders with Gross Premium Reserves are based on the best estimate assumptions for 2023 which include assumptions on mortality, morbidity, lapses expenses, inflation rates and interest rates.

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir tahun. Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dihitung dengan menggunakan metode amortisasi harian dengan mempertimbangkan masa pertanggungan polis yang dihitung oleh aktuaris.

Unearned premiums are the portion of premiums that have not been recognised as income because the coverage period is still running at the end of the year. Reserves for unearned premiums are calculated using the daily amortisation method with consideration for the policy coverage period as calculated by the actuary.

35. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Estimasi liabilitas klaim adalah estimasi liabilitas atas klaim-klaim asuransi yang telah terjadi, yaitu klaim-klaim yang belum diajukan oleh *provider*, serta klaim-klaim yang sudah diterima namun belum ditentukan nilai gantinya.

Utang klaim adalah utang atas klaim-klaim asuransi yang telah diterima dan disetujui.

Liabilitas dana pensiun dan JHT pensiun merupakan Liabilitas Entitas Anak (PT Bank Mandiri Taspen) kepada pensiunan, dimana Entitas Anak berperan sebagai penyalur dana pensiun dari nasabah Entitas Anak kepada pensiunan nasabah.

Utang transaksi nasabah sebagian besar terdiri dari utang yang timbul dari transaksi perdagangan efek Entitas Anak.

Term Deposits Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

Liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit terdiri dari liabilitas atas transaksi ATM dalam jaringan ATM Bersama, ATM *Link* dan ATM Prima dan liabilitas kepada *Visa* dan *Master Card* dan JCB untuk transaksi kartu kredit.

Liabilitas terkait dengan *unit-link* merupakan liabilitas *unit-link* kepada pihak ketiga dan liabilitas pemegang dana *unit-link* Entitas Anak (PT AXA Mandiri Financial Services).

Liabilitas terkait dengan transaksi transfer nasabah terdiri dari transaksi pengiriman uang yang masih harus diselesaikan dalam berbagai mata uang dari dan atau ke rekening nasabah.

Setoran jaminan merupakan jaminan uang tunai yang disetorkan oleh nasabah atas transaksi ekspor, impor dan penerbitan bank garansi.

Liabilitas kepada dealer merupakan liabilitas Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance) kepada *dealer* kendaraan bermotor terkait pembiayaan yang diberikan Entitas Anak kepada nasabah.

Pendapatan diterima dimuka yang teratribusi secara langsung terdiri dari pendapatan provisi/komisi kredit dan piutang/pembiyaan syariah yang terkait langsung dengan pemberian kredit dan piutang/pembiyaan syariah yang belum diamortisasi.

Pembelian efek-efek yang masih harus dibayar merupakan utang yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga yang seluruhnya telah dibayarkan masing-masing pada tanggal 2 Januari 2024 dan 3 Januari 2023 untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***35. OTHER LIABILITIES** (continued)*

Estimated claim liability is estimated liability for insurance claims that have occurred, which are claims that have not been submitted by the provider, as well as claims that have been received but the replacement value has not been determined.

Claims payable is an payable of insurance claims that have been received and approved.

Pension fund and pension plan liablities are liabilities of a subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) to retirees, where the Subsidiary acts as a distributor of pension funds from the Subsidiary's customers to the retirees of those customers.

Customer transaction payables mostly consist of payables arising from securities trading transactions of Subsidiaries.

Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.

Liabilities related to ATM and credit card transactions consist of liabilities from ATM transactions within ATM Bersama, ATM Link and ATM Prima network and liabilities to Visa and Master Card and JCB for credit card transactions.

Liabilities related to unit-link represents unit-link liabilities to third parties and liabilities to unit-link fund holders of Subsidiary (PT AXA Mandiri Financial Services).

Liabilities related to customers' transfer transactions represent transfer funds in various currencies that need to be settled from or to customers' accounts.

Guarantee deposit is a cash guarantee deposited by customers related to export, import transaction and issuance of bank guarantees.

Liabilities to dealers are liabilities of the Subsidiaries (PT Mandiri Tunas Finance and PT Mandiri Utama Finance) to motor vehicle dealers related to financing provided by the Subsidiaries to customers.

Directly attributable deferred income consists of income from provisions/commissions of loans and sharia receivables/financing which directly attributable to unamortised loans and sharia receivables/financing granted.

Payable from purchase of marketable securities represent securities purchase transactions which have been fully paid on 2 January 2024 and 3 January 2023 for 31 December 2023 and 2022, respectively.

35. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Pendapatan diterima dimuka yang tidak teratribusi secara langsung terdiri dari pendapatan provisi/komisi kredit dan piutang/pembiyaan syariah yang tidak terkait langsung dengan pemberian kredit dan piutang/pembiyaan syariah yang belum diamortisasi.

Pengungkapan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

***35. OTHER LIABILITIES** (continued)*

Non directly attributable deferred income consists of provisions/commissions of loans and sharia receivables/financing that are not directly attributable to the unamortised loans and sharia receivables/financing granted.

The disclosure of lease liabilities as of 31 December 2023 are as follows:

	2023					
	Saldo 1 Januari/ *January* 2023	Penambahan sewa/ *Additions of lease liabilities*	Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense on lease liabilities*	Liabilitas sewa yang telah dibayarkan/ *Payments of lease liabilities*	Saldo 31 Desember/ *December* 2023	
Kategori aset pendasar						***Underlying assets***
Kendaraan bermotor	386.924	245.240	25.553	(281.229)	376.488	*Vehicles*
Bangunan - rumah dinas	7.671	122.701	454	(117.726)	13.100	*Building - office residence*
Bangunan - gedung kantor	447.110	1.379.002	41.517	(1.276.061)	591.568	*Building - office building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	26.329	3.047	1.589	(17.153)	13.812	*Furniture and fixture, office equipment and computer*
Total	**868.034**	**1.749.990**	**69.113**	**(1.692.169)**	**994.968**	***Total***

	2022					
	Saldo 1 Januari/ *January* 2022	Penambahan sewa/ *Additions of lease liabilities*	Beban bunga atas liabilitas sewa/ *Interest expense on lease liabilities*	Liabilitas sewa yang telah dibayarkan/ *Payments of lease liabilities*	Saldo 31 Desember/ *December* 2022	
Kategori aset pendasar						***Underlying assets***
Kendaraan bermotor	434.809	226.273	25.054	(299.212)	386.924	*Vehicles*
Bangunan - rumah dinas	9.400	8.549	215	(10.493)	7.671	*Building - office residence*
Bangunan - gedung kantor	584.469	61.025	36.834	(235.218)	447.110	*Building - office building*
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer	17.601	12.775	1.922	(5.969)	26.329	*Furniture and fixture, office equipment and computer*
Total	**1.046.279**	**308.622**	**64.025**	**(550.892)**	**868.034**	***Total***

Liabilitas lain-lain terkait sewa berdasarkan jangka waktu

Other liabilities related to leases by period:

	2023	2022	
Jangka pendek	211.261	83.729	*Short term*
Jangka panjang	783.707	784.305	*Long term*
Total	**994.968**	**868.034**	***Total***

Analisis jatuh tempo liabilitas lain-lain terkait sewa sebagai berikut:

Analysis of the maturities of other liabilities related to leases as follows:

	2023	2022	
1 tahun	211.261	83.729	*1 year*
2 tahun	377.366	301.806	*2 years*
3 tahun	228.027	258.503	*3 years*
4 tahun	55.632	32.738	*4 years*
5 tahun	122.682	191.258	*5 years*
Total	**994.968**	**868.034**	***Total***

Lain-lain terutama terdiri dari rekening antar kantor dan liabilitas terkait transaksi perdagangan, titipan dan transaksi yang masih harus diselesaikan.

Others mainly consist of interoffice accounts and liabilities related to trade transactions, deposits and transaction remains to be settled.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA / *36. FUND BORROWINGS*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
(f) Lain-lain (Catatan 56)	1.765.624	2.210.704	*Others (Note 56) (f)*
Pihak ketiga			*Third parties*
(a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)	1.447.824	1.138.633	*Ministry of Public Work and Housing (Kemenpupera) (a)*
(e) Bank Indonesia	11.900.055	-	*Bank Indonesia (e)*
(f) Lain-lain	23.832.807	18.270.535	*Others (f)*
	37.180.686	19.409.168	
Total	38.946.310	21.619.872	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak ketiga			*Third parties*
(b) *Direct off-shore loans*	21.430.599	15.919.032	*Direct off-shore loans (b)*
(c) Fasilitas pendanaan perdagangan	33.254.567	21.130.920	*Trade financing facilities (c)*
(d) *Repo to maturity*	1.017.003	2.969.542	*Repo to maturity (d)*
(f) Lain-lain	796.980	1.200.752	*Others (f)*
Total (Catatan 62.B.(iv))	56.499.149	41.220.246	*Total (Note 62.B.(iv))*
	95.445.459	**62.840.118**	

(a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)

Akun ini merupakan dukungan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembiayaan perumahan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ("FLPP") dengan *sharing* pembiayaan sesuai kesepakatan, saat ini *sharing* pembiayaan yang berlaku adalah 75,00% dana Pemerintah dan 25,00% dana Bank. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut serta sebagai Bank Pelaksana Penyaluran FLPP sejak tahun 2012, tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/SKB/DP/2011 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. DIR.MOU/015/2011 tentang Penyaluran Dana FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, diperbaharui dengan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat No. 07/SKB/M/2012 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. DIR.MOU/003/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama, diperbaharui kembali Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/MoU/Dp/2020 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. DIR.MOU/19/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ("MBR").

(a) Ministry of Public Work and Housing (Kemenpupera)

This account represents Government support to low-income communities for housing financing Liquidity Facility of Housing Financing (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ("FLPP") program, with financing sharing according to the agreement currently the applicable financing sharing of 75.00% funds from Government's fund and 25.00% funds from Bank's fund. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. has been participating as the implementing Bank for FLPP distribution since 2012, as stipulated in the joint aggrement between Ministry of Public Work and Housing No. 13/SKB/DP/2011 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. DIR.MOU/015/2011 regarding the distribution of FLPP fund for housing acquisition through Home Ownership Financing, which renewed by Joint Agreement between the Ministry of Public Work and Housing No. 07/SKB/M/2012 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. DIR.MOU/003/2012 dated 15 February 2012 regarding Amendments of Joint Agreement, then the joint agreement Amendment amended between Ministry of Public Work and Housing No. 29/MoU/Dp/2020 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. DIR.MOU/19/2020 dated 17 December 2020 regarding Distribution of Subsidized Home Ownership Credit for Low-Income Communities ("MBR").

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) (lanjutan)

Pada Tahun 2021 terdapat Pengalihan pengelolaan Dana FLPP yang sebelumnya dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") dialihkan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ("BPTapera") sesuai dengan Perjanjian Tripartit antara PPDPP, BPTapera dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 06/PRJ/Pg/2021, No. 10/PKS/BP-TPR/I/12/2021 dan DIR.PKS/40/2021 Tanggal 24 Desember 2021.

Dalam pelaksanaan program, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama yang diperbaharui setiap tahun selama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut serta menjadi Bank Pelaksana, dengan awal perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional antara Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2012 tentang Penyaluran Dana FLPP Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui KPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ("MBR"), yang telah diperbaharui dengan perjanjian yang terbaru yaitu Perjanjian Kerjasama antara BPTapera dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 57/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan DIR.PKS/55/2022 tentang Penyaluran Dana FLPP melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera/Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tanggal 28 Desember 2022.

Baki debet pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.447.824 dan Rp1.138.633. Fasilitas ini dikenakan tarif tertentu dari Pemerintah. Jangka waktu kredit dan jadwal pelunasannya maksimal 240 bulan (20 tahun) Pengembalian dana (angsuran pokok dan bunga) kepada BPTapera dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

(b) *Direct off-shore loans*

Rincian pinjaman *direct off-shore loans* adalah sebagai berikut:

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(a) Ministry of Public Work and Housing (Kemenpupera) (continued)

In 2021, there was a transfer of management of FLPP Funds which were previously managed by Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ("PPDPP") transferred to Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ("BPTapera") in accordance with the Tripartite Agreement between PPDPP, BPTapera and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 06/PRJ/Pg/2021, No. 10/PKS/BP-TPR/I/12/2021 and DIR.PKS/40/2021 dated 24 December 2021.

In implementing the program, a cooperation agreement was signed which is renewed every year as long as PT Bank Mandiri (Persero) Tbk participated as the Implementing Bank, with the initial cooperation agreement is the Operational Cooperation Agreement between Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat of Public Housing of the Republic of Indonesia in 2012 regarding Distribution of FLPP Funds in the Context of Acquiring a House through Prosperous KPR for Low-Income Communities ("MBR"), which has been updated with the latest agreement, namely the Cooperation Agreement between BPTapera and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 57/PKS/BP-TPR/I/12/2022 and DIR.PKS/55/2022 concerning Distribution of FLPP Funds through Credit/Financing for Prosperous Home Ownership/Prosperous Homes for Low-Income Communities dated 28 December 2022.

Outstanding balance as of 31 December 2023 and 2022 were Rp1,447,824 and Rp1,138,633, respectively. These facilities are subject to a certain rate from the Government. The period of loan and repayment schedule are maximum of 240 months (20 years). Repayment (principal and interest instalment) to BPTapera are carried out no later than 10th of each month.

(b) Direct off-shore loans

The details of direct off-shore loans are as follows:

	2023	2022	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak ketiga			*Third parties*
MUFG Bank	8.421.577	3.113.500	*MUFG Bank*
United Overseas Bank	5.045.612	6.227.000	*United Overseas Bank*
China Development Bank,			*China Development Bank*
- *Tranche A*	2.872.910	4.353.644	*Tranche A* -
- *Tranche B*	1.195.059	1.813.804	*Tranche B* -
Oversea Chinese Banking	2.309.550	-	*Oversea Chinese Banking*
Taishin International Bank	769.850	-	*Taishin International Bank*
Bank of Taiwan	692.865	-	*Bank of Taiwan*
Bank of China	123.176	-	*Bank of China*
Taipei Fubon Commercial	-	388.987	*Taipei Fubon Commercial*
Agence Française de Développement	-	22.097	*Agence Française de Développement*
	21.430.599	**15.919.032**	

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

MUFG Bank, Ltd., Singapura

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(b) Direct off-shore loans (continued)

MUFG Bank, Ltd., Singapore

2023

Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Nilai nominal/*Nominal amount*		
						Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	*Type*
Direct off-shore loans	MUFG Bank Ltd., Singapura/*Singapore*	15 Juni/ *June* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	200.000.000	3.079.400	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	MUFG Bank Ltd., Singapura/*Singapore*	15 Juni/ *June* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	155.000.000	2.386.535	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	MUFG Bank Ltd., Singapura/*Singapore*	17 Desember/ *December* 2024	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.539.700	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	MUFG Bank Ltd., Singapura/*Singapore*	15 Juni/ *June* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	92.000.000	1.416.524	*Direct off-shore loans*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(37.819)	(582)	*Less: Unamortised attributable costs*
						546.962.181	**8.421.577**	

2022

Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Nilai nominal/*Nominal amount*		
						Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	*Type*
Direct off-shore loans	MUFG Bank Ltd., Singapura/*Singapore*	28 Juli/ *July* 2023	7	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.556.750	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	MUFG Bank Ltd., Singapura/*Singapore*	17 Desember/ *December* 2024	12	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.556.750	*Direct off-shore loans*
						200.000.000	**3.113.500**	

Bank Mandiri memperoleh beberapa fasilitas pinjaman tanpa agunan dari MUFG Bank, Ltd., Singapura dengan nominal yang beragam dan tingkat bunga SOFR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri atas pinjaman dengan tenor kurang dari 1 (satu) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2024 dan beberapa pinjaman memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Juni 2026.

Bank Mandiri obtained several unsecured loan facilities from MUFG Bank, Ltd., Singapore with various nominal amounts and SOFR interest rates of 3 (three) months plus a certain margin. The loan facility consists of loans with a tenor of less than 1 (one) year which will mature on 17 December 2024 and several loans with a maturity of more than 1 (one) year which will mature 15 June 2026.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

United Overseas Bank

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(b) Direct off-shore loans (continued)

United Overseas Bank

2023

Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Nilai nominal/*Nominal amount*		*Type*
						Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	15 Mei/*May* 2024	11	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.539.700	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	14 Juni/ *June* 2024	11	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.539.700	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	24 Desember/ *December* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	99.700.993	1.535.096	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	24 Desember/ *December* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	28.000.000	431.116	*Direct off-shore loans*
						327.700.993	**5.045.612**	

2022

Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Nilai nominal/*Nominal amount*		*Type*
						Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	17 Januari/ *January* 2023	1	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	200.000.000	1.556.750	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	17 Januari/ *January* 2023	1	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.556.750	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	18 Agustus/ *August* 2023	8	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.556.750	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	United Overseas Bank Limited, Singapura/*Singapore*	29 September 2023	9	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	100.000.000	1.556.750	*Direct off-shore loans*
						500.000.000	**6.227.000**	

Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman tanpa agunan dari United Overseas Bank Limited, Singapura dengan nominal beragam dan tingkat bunga SOFR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor kurang dari 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2024 sampai 24 December 2026.

Bank Mandiri obtained loan facility without collateral from United Overseas Bank Limited, Singapore with various nominal amounts with the interest rate of SOFR 3 (three) months plus a certain margin. The loan facilities have a tenor less than 1 (one) year and will mature on 15 May 2024 to 24 December 2026.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

China Development Bank

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(b) Direct off-shore loans (continued)

China Development Bank

2023

Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Nilai nominal/*Nominal amount*		*Type*
						Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Tranche A	China Development Bank, Cina/*China*	15 September 2025	120	SOFR (6 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (6 months) + certain margin*	USD	186.666.667	2.874.105	*Tranche A*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(77.644)	(1.195)	Less: *Unamortised attributable costs*
						186.589.023	**2.872.910**	
Tranche B	China Development Bank, Cina/*China*	15 September 2025	120	SOFR (6 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (6 months) + certain margin*	USD	77.621.119	1.195.133	*Tranche B*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(4.777)	(74)	*Less: Unamortised attributable costs*
						77.616.342	**1.195.059**	

2022

Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Nilai nominal/*Nominal amount*		*Type*
						Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Tranche A	China Development Bank, Cina/*China*	15 September 2025	120	LIBOR (6 bulan) + marjin tertentu/ *LIBOR (6 months) + certain margin*	USD	280.000.000	4.358.900	*Tranche A*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(337.624)	(5.256)	Less: *Unamortised attributable costs*
						279.662.376	**4.353.644**	
Tranche B	China Development Bank, Cina/*China*	15 September 2025	120	LIBOR (6 bulan) + marjin tertentu/ *LIBOR (6 months) + certain margin*	USD	116.523.149	1.813.974	*Tranche B*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(10.933)	(170)	*Less: Unamortised attributable costs*
						116.512.216	**1.813.804**	

Pada tanggal 16 September 2015, Bank Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman jangka panjang tanpa agunan dengan China Development Bank (CDB).

Pinjaman tersebut terbagi dalam 2 (dua) fasilitas, yaitu *Tranche* A berupa pinjaman langsung dari CDB dalam valuta USD dengan total fasilitas sebesar USD700.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal perjanjian dengan tingkat bunga LIBOR 6 (enam) bulan ditambah marjin tertentu dan *Tranche* B berupa pinjaman langsung dalam valuta CNY dengan total fasilitas sebesar CNY1.908.420.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal perjanjian dengan tingkat bunga SHIBOR 6 (enam) bulan ditambah marjin tertentu.

On 16 September 2015, Bank Mandiri signed a long-term loan facility without collateral agreement with China Development Bank (CDB).

The loan consists of 2 (two) facilities, which Tranche A Facility is a direct loan from CDB denominated in USD with a total facility of USD700,000,000 (full amount) which will mature in 10 (ten) years since the agreement date with an interest rate of LIBOR 6 (six) months plus a certain margin and Tranche B is a direct loans denominated in CNY with a total facility of CNY1,908,420,000 (full amount) maturing in 10 (ten) years since the agreement date with SHIBOR interest rate of 6 (six) months plus a certain margin.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

China Development Bank (lanjutan)

Pada tanggal 16 Maret 2021, *Tranche* B telah dikonversi menjadi pinjaman dalam valuta USD dengan nilai sebesar USD194.288.681 (nilai penuh) dengan tingkat bunga LIBOR 6 (enam) bulan ditambah marjin tertentu. Tidak terdapat perubahan jatuh tempo fasilitas atas konversi ini.

Pada bulan Juni 2023, Bank telah menandatangani *override agreement* terkait perubahan suku bunga acuan dari LIBOR menjadi SOFR.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(b) Direct off-shore loans (continued)

***China Development Bank** (continued)*

On 16 March 2021, Tranche B was converted into a loan in USD with a total amount of USD194,288,681 (full amount) with an interest rate of 6 (six) months LIBOR plus a certain margin. There is no change in the maturity of the facility for this conversion.

In June 2023, the Bank has signed an override agreement regarding the change in the benchmark interest rate from LIBOR to SOFR.

Oversea Chinese Banking

Oversea Chinese Banking

2023								
						Nilai nominal/*Nominal amount*		
Jenis	**Pemberi Pinjaman/ *Lender***	**Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date***	**Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)***	**Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	**Mata uang/ *Currency***	**Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	***Type***
Direct off-shore loans	Oversea Chinese Banking, Singapura/*Singapore*	24 Desember/ *December* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	150.000.000	2.309.550	*Direct off-shore loans*
						150.000.000	**2.309.550**	

Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman tanpa agunan dari Overseas Chinese Bank Limited, Singapura masing-masing sebesar USD150.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga SOFR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2026.

Bank Mandiri obtained loan facility without collateral from United Overseas Bank Limited, Singapore amounted to USD150,000,000 (full amount), with the interest rate of SOFR 3 (three) months plus certain margin. The loan facilities have a tenor more than 1 (one year) and will mature on 24 December 2026.

Taishin International Bank

Taishin International Bank

2023								
						Nilai nominal/*Nominal amount*		
Jenis	**Pemberi Pinjaman/ *Lender***	**Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date***	**Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)***	**Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	**Mata uang/ *Currency***	**Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	***Type***
Direct off-shore loans	Taishin International Bank, Singapura/*Singapore*	24 Desember/ *December* 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	50.000.000	769.850	*Direct off-shore loans*
						50.000.000	**769.850**	

Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman tanpa agunan dari Overseas Chinese Bank Limited, Singapura masing-masing sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga SOFR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2026.

Bank Mandiri obtained loan facility without collateral from United Overseas Bank Limited, Singapore amounted to USD50,000,000 (full amount), with the interest rate of SOFR 3 (three) months plus certain margin. The loan facilities have a tenor more than 1 (one year) and will mature on 24 December 2026.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

Bank of Taiwan

2023								
						Nilai nominal/*Nominal amount*		
Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	*Type*
Direct off-shore loans	Bank of Taiwan Offshore Banking Taiwan	15 Juni/June 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	35.000.000	538.895	*Direct off-shore loans*
Direct off-shore loans	Bank of Taiwan, Singapura/*Singapore*	15 Juni/June 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	10.000.000	153.970	*Direct off-shore loans*
						45.000.000	**692.865**	

Efektif per tanggal 15 September 2023, Bank Mandiri memiliki *outstanding* fasilitas pinjaman tanpa agunan dari Bank of Taiwan Ltd., Offshore Banking sebesar USD35.000.000 (nilai penuh) dan Bank of Taiwan Ltd., Singapore USD10.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga SOFR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu, yang berasal dari pengalihan sebagian pinjaman MUFG Bank, Ltd., Singapura. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2026.

Effective as of 15 September 2023, Bank Mandiri has an outstanding unsecured loan facility from Bank of Taiwan Ltd., Offshore Banking, amounting to USD35,000,000 (full amount), and from Bank of Taiwan Ltd., Singapore, amounting to USD10,000,000 (full amount), with a SOFR 3 (three) months interest rate plus a certain margin, originating from the transfer of a portion of the loan from MUFG Bank, Ltd., Singapore. The loan facilities have a tenor more than 1 (one year) and will mature on 15 June 2026.

Bank of China

2023								
						Nilai nominal/*Nominal amount*		
Jenis	Pemberi Pinjaman/ *Lender*	Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date*	Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)*	Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Mata uang/ *Currency*	Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	*Type*
Direct off-shore loans	Bank of China, Singapura/*Singapore*	15 Juni/June 2026	36	SOFR (3 bulan) + marjin tertentu/ *SOFR (3 months) + certain margin*	USD	8.000.000	123.176	*Direct off-shore loans*
						8.000.000	**123.176**	

Efektif per tanggal 15 September 2023, Bank Mandiri memiliki outstanding fasilitas pinjaman tanpa agunan dari Bank of China Ltd., Singapura sebesar USD8.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga SOFR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu, yang berasal dari pengalihan sebagian pinjaman MUFG Bank, Ltd., Singapura. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2026.

Effective as of September 15, 2023, Bank Mandiri has an outstanding unsecured loan facility from Bank of China Ltd.,Singapore, amounting to USD8,000,000 (full value) with a SOFR 3 (three) months interest rate plus a certain margin, originating from the transfer of a portion of the loan from MUFG Bank, Ltd., Singapore. The loan facilities have a tenor more than 1 (one year) and will mature on 15 June 2026.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

Taipei Fubon Commercial Bank

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(b) Direct off-shore loans (continued)

Taipei Fubon Commercial Bank

						2022		
						Nilai nominal/*Nominal amount*		
Jenis	**Pemberi Pinjaman/ *Lender***	**Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date***	**Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)***	**Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	**Mata uang/ *Currency***	**Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	***Type***
Direct off-shore loans	Taipei Fubon Commercial Bank Taiwan/*Taiwan*	14 Juli/ *July* 2023	90	LIBOR (3 bulan) + marjin tertentu/ *LIBOR (3 months) + certain margin*	USD	25.000.000	389.188	*Direct off-shore loans*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(12.902)	(201)	*Less: Unamortised attributable costs*
						24.987.098	**388.987**	

Pada tanggal 14 Juli 2020, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman dari Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd - Singapore Branch sebesar USD25.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah marjin tertentu. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023. Pada tanggal 5 April 2023, Bank telah menandatangani *override agreement* terkait perubahan suku bunga acuan dari LIBOR menjadi Term SOFR.

Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar USD25.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Juli 2020 dan telah jatuh tempo sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

On 14 July 2020, Bank Mandiri obtained a loan facility from Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd. - Singapore Branch amounted to USD25,000,000 (full amount) with interest rate of LIBOR 3 (three) months plus a certain margin. This loan facility has a tenor of 3 (three) years and will mature on 14 July 2023. On 5 April 2023, the Bank has signed an override agreement related to the change in the benchmark interest rate from LIBOR to Term SOFR.

Bank Mandiri has made a drawdown of USD25,000,000 (full amount) on 30 July 2020. The transaction already matured on the maturity date.

Agence Française de Développement

Agence Française de Développement

						2022		
						Nilai nominal/*Nominal amount*		
Jenis	**Pemberi Pinjaman/ *Lender***	**Tanggal jatuh Tempo/ *Maturity date***	**Jangka waktu (bulan)/ *Tenor (months)***	**Tingkat suku bunga per tahun/ *Interest rate per annum***	**Mata uang/ *Currency***	**Valuta asing (nilai penuh)/ *Foreign currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	***Type***
Direct off-shore loans	Agence Française de Développement Prancis/*France*	30 September 2023	114	LIBOR (6 bulan) + marjin tertentu/ *LIBOR (6 months) + certain margin*	USD	1.428.571	22.239	*Direct off-shore loans*
Dikurangi: Biaya teratribusi yang belum diamortisasi						(9.124)	(142)	*Less: Unamortised attributable costs*
						1.419.447	**22.097**	

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(b) *Direct off-shore loans* (lanjutan)

Agence Française de Développement (lanjutan)

Pada tanggal 8 November 2013, Bank Mandiri menandatangani fasilitas pinjaman baru yang kedua atau *second line of credit* dari *Agence Française de Développement, Perancis* (AFD) senilai USD100.000.000 (nilai penuh) untuk membantu pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan perubahan iklim dan efisiensi energi. Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 5 tahun sampai 10 tahun (termasuk *grace period*) dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulan ditambah marjin tertentu. Sebagai bagian dari perjanjian pinjaman dimaksud, Bank Mandiri dan AFD juga secara bersama akan membiayai program pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas Bank Mandiri khususnya terhadap topik-topik perubahan iklim dan efisiensi energi. Fasilitas tersebut jatuh tempo tanggal 30 September 2023.

(c) Fasilitas pendanaan perdagangan (*banker's acceptance*)

Pada tanggal 25 Maret 2014, Bank melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD10.000.000 (nilai penuh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023. Penarikan atas pinjaman dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sumber dana untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan di Bank Mandiri.

Fasilitas pendanaan perdagangan merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu mulai dari 30 hari sampai dengan 365 hari dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau SOFR ditambah marjin tertentu. Rincian saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(b) Direct off-shore loans (continued)

***Agence Française de Développement** (continued)*

On 8 November 2013, Bank Mandiri signed a new second loan facility agreement or second line of credit with Agence Française de Développement, France (AFD) amounted to USD100,000,000 (full amount) to assist the financing for projects related to climate change and energy efficiency. This long term facility has a tenor of 5 to 10 years (including grace period) with an interest rate at 6-months LIBOR plus a certain margin. As part of the loan agreement, Bank Mandiri and AFD will finance a training program aimed at building the capacity of the Bank Mandiri especially on the topics of climate change and energy efficiency. The facility mature on 30 September 2023.

(c) Trade financing facilities (bankers' acceptance)

On 25 March 2014, the Bank drawdown the loan amounted to USD10,000,000 (full amount), which was mature on 30 September 2023. The drawdown of the above facilities are intended to fulfill the fund requirement to finance the environmentally friendly projects in Bank Mandiri.

Trade financing facilities represent short-term borrowings with tenors ranging between 30 days to 365 days and with interest rate of LIBOR or SOFR plus a certain margin. The balance as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
CoBank US, Amerika Serikat	4.557.512	4.514.575	*CoBank US, United States*
United Overseas Bank Limited, Singapura	4.110.999	1.108.406	*United Overseas Bank Limited, Singapore*
Bank of Montreal, Kanada	3.689.537	622.700	*Bank of Montreal, Canada*
DBS Bank, Singapura	3.387.340	2.335.125	*DBS Bank, Singapore*
Wells Fargo Bank, Singapura	3.370.576	1.562.821	*Wells Fargo Bank, Singapore*
Emirates NBD Bank, Singapura	3.079.400	-	*Emirates NBD Bank, Singapore*
The Bank of New York Mellon, Singapura	2.845.981	957.401	*The Bank of New York Mellon, Singapore*
MUFG Bank, Ltd., Singapura	1.539.700	753.467	*MUFG Bank, Ltd., Singapore*
CTBC Bank Co. Ltd., Singapura	1.458.712	1.089.725	*CTBC Bank Co, Ltd., Singapore*
Bank of America, N.A, Singapura	1.296.889	-	*Bank of America, N.A. Singapore*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura	1.224.831	1.951.698	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Singapura	1.176.485	2.604.754	*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Singapore*
Bank of America, N.A, Hong Kong	1.054.695	1.684.310	*Bank of America, N.A. Hong Kong*
CIMB Bank, Hong Kong	461.910	358.053	*CIMB Bank, Hong Kong*
Citibank N.A, Hong Kong	-	1.587.885	*Citibank N.A., Hong Kong*
Total	**33.254.567**	**21.130.920**	***Total***

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(d) *Repo to maturity*

Mata uang asing

Pada tanggal 11 Mei 2020, Bank Mandiri melakukan transaksi pinjaman sebesar USD99.774.646 (nilai penuh) melalui skema *cross currency repo to maturity* dengan Standard Chartered Bank - Jakarta (SCB). Dalam transaksi *repo to maturity* ini, Bank Mandiri mengalihkan obligasi pemerintah FR063 kepada SCB. Atas pengalihan obligasi pemerintah FR063 tersebut, Bank Mandiri mengakui tagihan sebesar nilai tunai (*cash value*) FR063 kepada SCB. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) tahun yang telah jatuh tempo sesuai dengan jatuh tempo FR063 yaitu pada tanggal 15 Mei 2023. Pada tanggal jatuh tempo, SCB telah menyerahkan nilai tunai (IDR) ke Bank Mandiri sesuai *face value underlying* ditambah dengan kupon terakhir *underlying*, dan Bank Mandiri telah mengirimkan nilai tunai (USD) ke SCB sebesar jumlah pinjaman ditambah pembayaran bunga pinjaman terakhir.

Pada tanggal 30 Mei 2018, Bank Mandiri melakukan transaksi pinjaman sebesar USD37.000.000 (nilai penuh), USD40.940.000 (nilai penuh) dan USD50.000.000 (nilai penuh) melalui skema *repo to maturity* dengan Nomura Singapore Limited (NSL). Dalam transaksi *repo to maturity* ini, Bank Mandiri mengalihkan obligasi pemerintah ROI 23NN, ROI 24, dan ROI 25 kepada NSL. Atas pengalihan obligasi pemerintah ROI 23NN, ROI 24, dan ROI 25 tersebut, Bank Mandiri mengakui tagihan sebesar nilai tunai (*cash value*) dari ROI 23NN, ROI 24, dan ROI 25 kepada NSL. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) tahun. Pinjaman sebesar USD24.926.000 telah jatuh tempo sesuai dengan tanggal jatuh tempo ROI 23 NN, yaitu 11 Januari 2023, sedangkan pinjaman sebesar USD31.270.000 dan USD34.782.000 akan jatuh tempo sesuai dengan tanggal jatuh tempo ROI 24 dan ROI 25, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 dan 15 Januari 2025. Pada tanggal jatuh tempo, penyelesaian transaksi ini akan dilakukan secara neto dari pinjaman dan tagihan antara Bank Mandiri dan NSL.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, *Repo to maturity* mata uang asing masing-masing sebesar Rp1.017.003 dan Rp2.969.542.

Fasilitas pinjaman dari NSL tersebut dijamin dengan penempatan masing-masing sebesar USD4.335.315 (nilai penuh) (31 Desember 2022: USD2.270.190 (nilai penuh)) (Catatan 6g).

(e) Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2023, Entitas Anak yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI") mendapatkan fasilitas penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas sebesar Rp11.900.055 dengan persentase bagi hasil sebesar 6,25% dan 6,85% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah yang jatuh tempo kurang dari satu bulan dengan nominal sebesar Rp12.500.000.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(d) Repo to maturity

Foreign currency

On 11 May 2020, Bank Mandiri entered into borrowing transaction of USD99,774,646 (full amount) through the cross currency repo to maturity scheme with Standard Chartered Bank - Jakarta Branch (SCB). In this repo to maturity transactions, Bank Mandiri transferred government bonds FR063 to SCB. Upon the transfer of government bonds FR063, Bank Mandiri recognised receivables at the amount of cash value of FR063 to SCB. This borrowing facility has a tenor of 3 (three) years which will mature at the same date of to maturity of FR063 at 15 May 2023. On the maturity date, SCB submit cash value (Rupiah) to Bank Mandiri at the amount of underlying face value plus the last underlying coupon, and Bank Mandiri will send the cash value (USD) to SCB at the borrowing amount plus the last borrowing interest payment.

On 30 May 2018, Bank Mandiri entered into borrowing transaction amounted to USD37,000,000 (full amount), USD40,940,000 (full amount) and USD50,000,000 (full amount) through repo to maturity scheme with Nomura Singapore Limited (NSL). In this repo to maturity transactions, Bank Mandiri transferred government bonds ROI 23NN, ROI 24, and ROI 25 to NSL. Upon the transfer of government bonds ROI 23NN, ROI 24, and ROI 25, Bank Mandiri recognised receivables at the amount of cash value of ROI 23NN, ROI 24 and ROI 25 to NSL. This borrowing facilities have 5 (five), 6 (six), and 7 (seven) years tenor. The borrowings amounted to USD24,926,000 (full amount) has matured according to the ROI 23 NN maturity date, which on 11 January 2023, while the borrowings amounted to USD31,270,000 (full amount) and USD34,782,000 (full amount) will mature according to the ROI 24 and ROI 25 maturity dates, which on 15 January 2024 and 15 January 2025. On the maturity date, settlement of this transaction will be carried out on a net basis from borrowings and receivables between Bank Mandiri and NSL.

As of 31 December 2023 and 2022, Repo to maturity of foreign currencies amounted to Rp1,017,003 and Rp2,969,542, respectively.

*This loan facilities from NSL have guaranteed by placement amounted to USD*4,335,315 *(full amount) (31 December 2022: USD2,270,190 (full amount)) (Notes 6g).*

(e) Bank Indonesia

On 29 and 31 August 2023, the Subsidiary, namely PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI") obtained a funding facility based on sharia principles from Bank Indonesia for liquidity management amounted to Rp11,900,055 with a profit-sharing rate of 6.25% and 6.85% per year. This facility is guaranteed by collateral in the form of sharia securities and will mature in less than one month with nominal Rp12,500,000.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / ***36. FUND BORROWINGS*** *(continued)*

(f) Lain-lain / *(f) Others*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	960.540	1.239.578	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	805.084	971.126	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
	1.765.624	2.210.704	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk.	7.925.272	5.732.180	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	3.993.077	3.048.510	*PT Bank Pan Indonesia Tbk.*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	1.573.619	2.241.928	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	1.464.831	568.732	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	1.443.489	750.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	896.066	585.408	*PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.*
. PT Sarana Multigriya Finansial	716.200	-	*PT Sarana Multigriya Finansial*
PT Bank DKI	693.834	858.862	*PT Bank DKI*
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	607.627	391.260	*PT Bank CIMB Niaga Tbk.*
PT Bank Permata Tbk.	568.383	683.222	*PT Bank Permata Tbk.*
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.	501.487	258.375	*PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.*
PT Bank of India Indonesia Tbk.	443.487	-	*PT Bank of India Indonesia Tbk.*
PT Bank Oke Indonesia Tbk.	388.874	599.577	*PT Bank Oke Indonesia Tbk.*
PT Bank Panin Dubai Syariah	373.487	96.844	*PT Bank Panin Dubai Syariah*
PT Bank QNB Indonesia Tbk.	366.008	241.323	*PT Bank QNB Indonesia Tbk.*
PT Bank UOB Indonesia	337.082	569.683	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank KEB Hana Indonesia	279.783	207.400	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank BTPN	250.000	-	*PT Bank BTPN*
PT Bank BCA Syariah	224.711	234.745	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank Mega Tbk.	216.461	378.577	*PT Bank Mega Tbk.*
PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	159.458	99.730	*PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*
PT Bank Muammalat	117.834	-	*PT Bank Muammalat*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Unit Usaha Syariah	101.351	23.927	*PT Bank Danamon - Indonesia Tbk. Unit Usaha Syariah*
PT Maybank Syariah	65.580	90.542	*PT Maybank Syariah*
PT Bank Victoria International Tbk .	49.994	-	*PT Bank Victoria International Tbk.*
PT Bank Jago Tbk.	49.875	-	*PT Bank Jago Tbk.*
PT Bank DKI Syariah.	24.937	-	*PT Bank DKI Syariah*
PT Bank Central Asia Tbk. - Sindikasi *Onshore*	-	609.710	*PT Bank Central Asia Tbk. - Syndication Onshore*
	23.832.807	18.270.535	
Total	25.598.431	20.481.239	*Total*

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Lain-lain (lanjutan)

(f) Others (continued)

	2023	2022	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
PT Bank Mizuho Indonesia	577.302	-	*PT Bank Mizuho Indonesia*
MUFG Bank, Ltd., Singapura	219.678	373.611	*MUFG Bank, Ltd., Singapura*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	-	778.375	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
The Development Bank of Singapore Limited	-	48.766	*The Development Bank of Singapore Limited*
Total	796.980	1.200.752	*Total*
	26.395.411	**21.681.991**	

Rupiah

Rupiah

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 9 Oktober 2018, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% - 9,50%. Fasilitas tersebut bersifat Kredit Modal Kerja *revolving*. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 9 Oktober 2019 dan telah diperpanjang pada tanggal 4 Oktober 2019 sehingga jatuh temponya sampai dengan 25 Mei 2025.

On 9 October 2018, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained a working capital loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") with a maximum loan limit of Rp250,000, with an interest rate of 8.75% - 9.50%. The facility is a revolving working capital loan. The period of withdrawal of loan facilities is up to 9 October 2019 and has been extended in 4 October 2019, therefore the maturity date will be until 25 May 2025.

Pada tanggal 18 April 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh tambahan plafon fasilitas Kredit Modal Kerja *non-revolving* dari BNI dengan batas maksimum kredit sebesar Rp1.250.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% - 6,80% yang memiliki masa kelonggaran tarik sampai dengan 18 April 2023 dan tenor fasilitas maksimum hingga 4 (empat) tahun. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo tanggal 25 Januari 2027.

On 18 April 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained an additional limit for a non-revolving working capital loan facility from BNI with a maximum credit limit of Rp1,250,000 with an interest rate of 6.50% - 6.80% which has an undrawn period until 18 April 2023 and the tenor of the facility maximum up to 4 (four) years. therefore the maturity date will be until 25 Januari 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari BNI masing-masing sebesar Rp960.540 dan Rp1.239.578.

As of 31 December 2023 and 2022 outstanding fund borrowings from BNI are amounted to Rp960,540 and Rp1,239,578, respectively.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 16 Juni 2021, Entitas Anak (PT Bank Mandiri Taspen) memperoleh fasilitas kredit dari dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”), berupa fasilitas *Term Loan* (*committed*) - *non revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan dengan suku bunga tetap 5,03% per tahun. Pada tanggal 19 Mei 2022, jangka waktu fasilitas ini telah diperpanjang kembali hingga 29 Juni 2025.

On 16 June 2021, the Subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) obtained a credit facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”), in the form of a Term Loan (committed) - non-revolving facility with a maximum amount of Rp500,000. This facility is used to finance the Subsidiary's working capital. This facility has tenor of up to 12 months with interest fix rate of 5.03% per annum. On 19 May 2022, the term of this facility has been extended to 29 June 2025.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 12 Oktober 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan BTN menandatangani perjanjian kredit sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving*. Penarikan fasilitas dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan tenor 3 (tiga) tahun dan dikenakan tingkat suku bunga antara 6,00% - 7,60%. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset Entitas Anak yang dijaminkan atas pinjaman yang diterima.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Entitas Anak telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari BTN masing-masing sebesar Rp805.084 dan Rp971.126.

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada bulan Januari 2020, Entitas Anak (PT Bank Mandiri Taspen) memperoleh fasilitas kredit dari BCA, berupa fasilitas *Term Loan* 1 (*committed*) – *non-revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 12 bulan hingga 20 Januari 2021 dengan suku bunga JIBOR 3 (tiga) bulan + 125bps. Pada tanggal 15 Desember 2021, jangka waktu fasilitas *Term Loan* 1 (*committed*) - *non revolving* telah diperpanjang kembali hingga 20 Januari 2025

Pada bulan Maret 2021, Entitas Anak (PT Bank Taspen) memperoleh fasilitas kredit dari BCA, berupa fasilitas *Term Loan* 3 *(committed) - non revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp250.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan hingga 30 Juni 2022 dengan suku bunga JIBOR 3 bulan + 125bps. Pada tanggal 15 Desember 2021, jangka waktu fasilitas *Term Loan* 3 (*committed*) - *non revolving* telah diperpanjang hingga 31 Maret 2025.

Pada bulan Maret 2022, Entitas Anak (PT Bank Mandiri Taspen) memperoleh fasilitas kredit dari BCA, berupa fasilitas *Term Loan* 4 (*committed*) - *non revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp250.000. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dari tanggal penarikan pertama dengan suku bunga 5,25% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Entitas Anak telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.** (continued)*

On 12 October 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and BTN signed a non-revolving loan agreement amounting to Rp500,000. The facility was drawn on 19 October 2022, with tenor of 3 (three) years and interest rate of 6.00 - 7.60%. The facility will mature on 19 October 2025.

As of 31 December 2023 and 2022, there were no Subsidiary assets used as collateral for fund borrowings.

As of 31 December 2023 and 2022, the Subsidiary has complied with the terms and conditions set out in the loan agreement.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from BTN are amounted to Rp805,084 and Rp971,126, respectively.

PT Bank Central Asia Tbk.

In January 2020, the Subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) obtained a loan facility from BCA, in the form of Term Loan 1 (committed) - non-revolving facility with a maximum amount of Rp500,000. This facility is used to finance the Subsidiary's working capital. This facility has a term of 12 months up to 20 January 2021 which bears interest at JIBOR 3 (three) months + 125bps. On 15 December 2021, the Term Loan 1 (committed) - non revolving has been extended up to 20 January 2025.

On March 2021, the Subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) obtained a credit facility from BCA, in the form of Term Loan 3 (committed) – non-revolving facility with maximum amount of Rp250,000. This facility is used to finance the Subsidiary's working capital. This facility has a term of 12 (twelve) months until 30 June 2022 with a JIBOR interest rate of 3 months + 125bps. On 15 December 2021, the term of the Term Loan 3 (committed) - non-revolving facility has been extended until 31 March 2025.

In March 2022, the Subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) obtained a credit facility from BCA, in the form of a Term Loan 4 (committed) - non-revolving facility with a maximum amount amount of Rp250,000. This facility has a term of 36 (thirty six) months from the date of the first drawdown with an interest rate of 5.25% per annum. As of 31 December 2023 and 2022, the Subsidiary has complied with the terms and conditions set out in the loan agreement.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 20 November 2020 dan 17 April 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan BCA telah menandatangani perjanjian kredit dimana BCA memberikan beberapa fasilitas *Installment Loan* dan Pinjaman Berjangka *Money Market* (PBMM) dengan total limit sebesar Rp11.808.000 yang bersifat *non-revolving* dan *revolving*. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Januari 2027 dengan suku bunga berkisar antara 6,00% - 7,60%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari BCA masing-masing sebesar Rp7.925.272 dan Rp5.732.180.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari BCA - Sindikasi *Onshore* masing-masing sebesar RpNihil dan Rp609.710.

PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 4 Desember 2020, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) mendapat tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin") sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving*. Atas fasilitas tersebut dikenakan suku bunga 8,25% pada saat penarikan. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada bulan 18 Maret 2024.

Pada tanggal 25 Agustus 2021, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) mendapat tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving* serta tambahan Fasilitas *Money Market Line* sehingga menjadi Rp250.000. Atas fasilitas Kredit Modal Kerja dikenakan suku bunga 7,25% pada saat penarikan dengan kelonggaran tarik sampai dengan bulan Februari 2022 dan jatuh tempo pada 3 Februari 2025. Sedangkan untuk fasilitas Kredit *Money Market Line* dikenakan tingkat suku bunga acuan, dengan kelonggaran tariknya jatuh tempo pada bulan 26 Mei 2022.

Pada tanggal 23 Mei 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) mendapat tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving*. Atas fasilitas Kredit Modal Kerja dikenakan suku bunga 6,50% pada saat penarikan dengan kelonggaran tarik sampai dengan 23 Februari 2023. Sedangkan untuk fasilitas Kredit *Money Market Line* yang jatuh tempo bulan 26 Mei 2022, Entitas Anak telah melakukan perpanjangan fasilitas sampai dengan 26 Mei 2023 dengan plafon menjadi sebesar Rp100.000 dan dikenakan tingkat suku bunga acuan.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank Central Asia Tbk.** (continued)*

On 20 November 2020 and 17 April 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and BCA have signed a credit agreement where BCA provides several Installment Loan and Term Money Market (PBMM) loan facilities with a total limit of Rp11,808,000 which are non-revolving and revolving, respectively. These facilities have various maturities and range from January 2024 to January 2027 with interest rate ranging from 6.00% - 7.60%.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from BCA was amounted to Rp7,925,272 and Rp5,732,180, respectively.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from BCA - Onshore Syndication are amounted to RpNil and Rp609,710, respectively.

PT Bank Pan Indonesia Tbk.

On 4 December 2020, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained a non-revolving Working Capital Loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin") amounted to Rp500,000, This facility is subject to interest rate of 8.25% at the time of withdrawal, the facility will mature on 18 March 2024.

On 25 August 2021, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) received an additional non-revolving Working Capital Loan facility of Rp500,000, as well as additional Money Market Line Facility which become Rp250,000. The Working Capital Credit facility bears an interest rate of 7.25% at the time of withdrawal with undrawn portion until February 2022 and will mature on 3 February 2025. Meanwhile, the Money Market Line credit facility bears a benchmark interest rate, with the withdrawal period due in 26 May 2022.

On 23 May 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) received an additional non-revolving Working Capital Credit facility of Rp500,000. The Working Capital Credit facility bears an interest rate of 6.50% at the time of withdrawal with undrawn portion available until 23 February 2023. As for the Money Market Line Credit facility which matures on 26 May 2022, the Subsidiary has extended the facility until 26 May 2023 with a plafond of Rp100,000 and is subject to a reference interest rate.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) mendapat tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving*. Atas fasilitas Kredit Modal Kerja dikenakan suku bunga 7% - 7,25% pada saat penarikan dengan kelonggaran tarik sampai dengan 19 September 2024. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2025.

Pada tanggal 15 November 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan Panin menandatangani perjanjian kredit sebesar Rp2.000.000 yang bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga antara 6,00% - 7,60% dan bersifat tetap. Penarikan pertama dan kedua sebesar Rp2.375.000 dilakukan pada tanggal 16 November 2022 dan 14 Maret 2023 dengan tenor 3 (tiga) tahun. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 14 November 2025 dan 13 Maret 2026.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan Panin menandatangani perjanjian kredit dengan total limit sebesar Rp5.000.000 yang bersifat *non-revolving*. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 14 April 2026 dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,00% - 7,60%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Panin masing-masing sebesar Rp3.993.077 dan Rp3.048.510.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada tanggal 26 September 2019, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) mendapat tambahan fasilitas *Working Capital Loan* yang bersifat *revolving* dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon") sehingga total keseluruhan fasilitas *Working Capital Loan* sebesar Rp150.000 dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2021, tambahan fasilitas *Term Loan* yang bersifat *non-revolving* sebesar Rp3.500.000 dengan suku bunga 6,00% - 7,60% pada saat penarikan serta jatuh tempo pada tanggal 13 November 2024 dan 20 Oktober 2025.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh fasilitas *Term Loan* I dan *Working Capital* dari Danamon dengan batas maksimum kredit masing-masing sejumlah Rp350.000 dan Rp100.000 dengan tingkat suku bunga 9,00% untuk fasilitas *Term Loan* dan suku bunga indikasi 8,00% untuk fasilitas *Working Capital*.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank Pan Indonesia Tbk.** (continued)*

On 19 December 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Uunas Finance) and Panin signed a non-revolving loan agreement amounting to Rp500,000 with fixed interest rates between 7% - 7.25%. At the time of withdrawal with a drawdown flexibility until 19 September 2024. The facility will mature on 23 May 2025.

On 15 November 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and Panin signed a non-revolving loan agreement amounting to Rp2,000,000 with fixed interest rates of 6.00% - 7.60%. The first and second drawdown amounted to Rp2,375,000 were made on 16 November 2022 and 14 March 2023 with tenor of 3 (three) years. These facilities will mature on 14 November 2025 and 13 March 2026.

On August 24 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and Panin signed a loan agreement with a total limit of Rp5,000,000 which is non-revolving. The facility matures on 18 June 2024 until 14 April 2026 with interest rate ranging from 6.00% - 7.60%.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Panin are amounted to Rp3.993.077 and Rp3,048,510, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

On 26 September 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) received an additional revolving Working Capital Loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon") so that the total Working Capital Loan facility is Rp150,000 and matures on 22 January 2021, additional non-revolving Term Loan facilities of Rp3,500,000 with an interest rate of 6.00% - 7.60% on drawdown and will mature on 13 November 2024 and 20 October 2025.

On 30 December 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained Term Loan I and Working Capital facilities from Danamon with a maximum credit limit of Rp350,000 and Rp100,000, respectively, with an interest rate of 9.00% for the Term Loan facility and indicate interest rate of 8.00% for Working Capital facility.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (lanjutan)

Jangka waktu penarikan fasilitas *Term Loan* adalah 12 bulan sejak fasilitas ditandatangani dan fasilitas bersifat *non-revolving*. Sedangkan untuk fasilitas *Working Capital Loan*, jangka waktu penarikan adalah 12 bulan sejak fasilitas ditandatangani dan fasilitas bersifat *revolving*. Jangka waktu penarikan fasilitas *Working Capital Loan* sudah beberapa kali diperpanjang. Sedangkan fasilitas *Term Loan* I akan jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2024. Pada tanggal 21 Desember 2022, Entitas Anak melakukan perpanjangan Fasilitas *Working Capital* dengan jangka waktu penarikan fasilitas sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023. Fasilitas ini telah diperpanjang sementara sampai dengan 30 September 2023. Kemudian Entitas Anak ditanggal yang sama juga memperoleh tambahan fasilitas *Term Loan* dan *Term Loan* Syariah dengan batas maksimum kredit masing-masing sejumlah Rp400.000 dan Rp100.000 dengan tingkat suku bunga 7,00% - 7,25% untuk fasilitas *Term Loan*, dengan jangka waktu penarikan fasilitas *Term Loan* adalah 12 bulan sejak fasilitas ditandatangani dan fasilitas bersifat *non-revolving*. Untuk Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2027.

Pada tanggal 12 Desember 2023, Entitas Anak (Mandiri Utama Finance) memperoleh tambahan fasilitas *Term Loan* dan *Term Loan* Syariah dengan batas maksimum kredit masing-masing sejumlah Rp450.000 dan Rp50.000 dengan tingkat suku bunga tetap 7,3% untuk fasilitas Term Loan, dengan jangka waktu penarikan fasilitas *Term Loan* adalah 12 bulan sejak fasilitas ditanda-tangani dan fasilitas bersifat *non-revolving.*

Pada tanggal 5 November 2020, Entitas Anak memperoleh fasilitas *Term Loan* II Syariah dari Danamon - Unit Usaha Syariah ("UUS") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp50.000 dan tingkat suku bunga 8,75%. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 16 November 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Danamon masing-masing sebesar Rp1.573.619 dan Rp2.241.928.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Danamon Syariah masing-masing sebesar Rp101.351 dan Rp23.927.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank Danamon Indonesia Tbk.** (continued)*

The withdrawal period for the Term Loan facility is 12 months from the time the facility is signed and the facility is non-revolving. Meanwhile, for the Working Capital Loan facility, the withdrawal period is 12 months from the time the facility is signed and the facility is revolving. The withdrawal period for the Working Capital Loan facility has been extended several times. Meanwhile, the Term Loan I facility will mature on 12 October 2024. On 21 December 2022, the Subsidiary extended the Working Capital Facility with a withdrawal period of the facility until 30 August 2023. This facility has been temporarily extended until 30 September 2023. Then the Subsidiary on the same date also obtained additional Term Loan and Sharia Term Loan facilities a limit of maximum loan amounting to is Rp400,000 and Rp100,000 respectively with an interest rate of 7.00% - 7.25% for the Term Loan facility, with the withdrawal period for the Term Loan facility is 12 months from the time the facility is signed and the facility is non-revolving. This facility matures on 13 July 2027.

On 12 December 2023, the Subsidiary (Mandiri Utama Finance) obtained additional Term Loan and Sharia Term Loan facilities with maximum loan limits of Rp450,000 and Rp50,000, respectively, with a fixed interest rate of 7.3% for the Term Loan facility. The withdrawal period for the Term Loan facility is 12 months from the signing date, and the facility is non-revolving.

On 5 November 2020, the Subsidiary obtained Sharia Term Loan II facility from Danamon - Sharia Business Unit ("UUS") with a maximum credit limit of Rp50,000 and an interest rate of 8.75%. The facility will mature on 16 November 2024.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Danamon are amounted to Rp1.573.619 and Rp2.241.928, respectively.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Danamon Syariah was amounted to Rp101,351 and Rp23,927, respectively.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pada tanggal 27 Juli 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh tambahan Fasilitas Pinjaman Berjangka III sejumlah Rp350.000 dengan tingkat suku bunga 7,00% dan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 dengan tenor 48 bulan. Plafon fasilitas Pinjaman Berjangka III bersifat *hybrid* yang dapat digunakan sebagai Kredit Modal Kerja konvensial maupun Syariah. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 29 September 2026.

Pada tanggal 18 Oktober 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) kembali memperoleh tambahan Fasilitas Pinjaman Berjangka IV sejumlah Rp500.000 dengan indikasi tingkat suku bunga 7,25% - 7,50% dan jangka waktu penarikan sampai dengan tanggal 18 April 2024 dan tenor 48 bulan. Adapun plafon fasilitas Pinjaman Berjangka IV bersifat *hybrid* yang dapat digunakan sebagai kredit modal kerja konvensial maupun syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Maybank sebesar Rp1.464.831 dan Rp568.732.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Maybank Syariah sebesar Rp65.580 dan RpNihil.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pada tanggal 23 September 2020, Entitas Anak (PT Bank Mandiri Taspen) memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("BJB"), berupa fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000 dengan suku bunga JIBOR 3 bulan + 130bps. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025.

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan BJB menandatangani perjanjian kredit dimana BJB menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja Umum Lembaga Pembiayaan dengan total limit sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving*. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada bulan Agustus 2026 dengan tingkat suku bunga bunga berlaku *floating rate* selama masa penarikan dan *fixed rate* selama jangka waktu kredit antara 6,00% - 7,60%.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

On 27 July 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained an additional Term Loan III Facility in the amount of Rp350,000 with an interest rate of 7.00% and a drawdown period until 27 January 2023 with a tenor of 48 months. The Term Loan III facility is hybrid in nature which can be used as a conventional or sharia Working Capital Loan. This facility will mature on 29 September 2026.

On 18 October 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) again obtained an additional Term Loan Facility IV amounting to Rp500,000 with an indicative interest rate of 7.25% - 7.50% and a withdrawal period until 18 April 2024, and a tenor of 48 months. The ceiling of the Term Loan Facility IV is hybrid and can be used for both conventional and Sharia working capital credit.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Maybank are amounted to Rp1,464,831 and Rp568,732 respectively.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Maybank Syariah are amounted to Rp65,580 and RpNil respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

On 23 September 2020, the Subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) obtained a credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. ("BJB"), in the form of Term Loan (committed) - non-revolving facility with a maximum amount of Rp500,000 with an interest rate of JIBOR 3 Month + 130bps. This facility is used to finance the Subsidiary's working capital. The facility will mature on 25 March 2025.

On 8 August 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and BJB signed a credit agreement whereby BJB provided a General Working Capital Loan Facility for Financing Institutions with a total limit of Rp500,000 which is non-revolving. The facility will mature in August 2026 with interest rate is a floating rate during the withdrawal period and a fixed rate during the loan term around 6.00% - 7.60%.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, pinjaman dari BJB masing-masing sebesar Rp1.443.489 dan Rp750.000.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

Pada tanggal 22 Februari 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("CCBI") menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000 yang dikenakan tingkat suku bunga 6,50% per tahun. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 22 Agustus 2022 dengan tenor pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp50.000.

Pada tanggal 16 Juni 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan CCBI menandatangani perjanjian kredit sebesar Rp430.000 yang bersifat *non-revolving*. Penarikan fasilitas dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022 dengan tenor 3 (tiga) tahun dan dikenakan tingkat suku bunga antara 6,00% - 7,60%. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari CCBI masing-masing sebesar Rp896.066 dan Rp585.408.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pada tanggal 27 Juli 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") menandatangani perjanjian kredit dimana SMF menyediakan fasilitas *Refinancing* dengan total fasilitas sebesar Rp600.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar antara 6,00% - 7,60%. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari SMF masing-masing sebesar Rp716.200 dan RpNihil.

PT Bank DKI

Pada tanggal 15 Desember 2021, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank DKI ("Bank DKI") menandatangani perjanjian kredit dimana Bank DKI menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja *Executing - Term Loan* dengan total fasilitas sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving*. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan tingkat suku bunga tetap berkisar antara 6,00% - 7,60%.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from BJB are amounted to Rp1,443,489 and Rp750,000 respectively.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

On 22 February 2022, Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("CCBI") signed a non-revolving working capital loan facility agreement with a maximum loan limit of Rp250,000 subject to an interest rate of 6.50% per annum. The term for drawing down the credit facility is until 22 August 2022 with a maximum loan tenor of 48 months from the date of withdrawal on 7 March 2022 amounting to Rp50,000.

On 16 June 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and CCBI signed a non-revolving credit agreement amounting to Rp430,000. The drawdown were made on 15 July 2022 with a tenor of 3 (three) years and bears the interest rate of 6.00% -7.60%. This facility will mature on 15 July 2025.

As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding fund borrowings from CCBI are amounted to Rp896,066 and Rp585,408, respectively.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

On 27 July 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF") signed a credit agreement where SMF provided a Refinancing facility with a total facility of Rp600,000 which is non-revolving and subject to a rate of fixed interest rate of 6.00% - 7.60%. The facility has a maturity date of 28 July 2026.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from SMF are amounting to Rp716,200 and RpNil, respectively.

PT Bank DKI

On 15 December 2021, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Bank DKI ("Bank DKI") signed a credit agreement where Bank DKI provided an Executing Working Capital Loan facility - Term Loan with a total facility of Rp500,000 which is non-revolving. These facilities have various maturities and range from December 2024 to March 2025 with interest rate fixed ranging from 6.00% - 7.60%.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juni 2022, Entitas Anak (PT Bank Mandiri Taspen) memperoleh fasilitas kredit dari Bank DKI, berupa fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai modal kerja Entitas Anak. Fasilitas ini memiliki jangka waktu selama 24 bulan dengan suku bunga JIBOR 3 bulan + margin sebesar 0,95% per tahun.

Pada tanggal 19 Desember 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh fasilitas pinjaman *Executing* dari PT Bank DKI (Unit Usaha Syariah) ("Bank DKI Syariah") dengan batas maksimum kredit sebesar Rp150.000 dengan nisbah bagi hasil ditentukan saat penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas tersebut adalah sampai dengan 19 Juni 2024 dengan tenor pinjaman maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 19 Juni 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank DKI masing-masing sebesar Rp693.834 dan Rp858.862.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 19 Februari 2020, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga") menandatangani perjanjian kredit dimana Bank CIMB Niaga menyediakan fasilitas *Term Loan* dengan total maksimum kredit sebesar Rp300.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,25% pada saat penarikan. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada bulan Februari 2023. Pada tanggal 4 Maret 2023, jangka waktu fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* telah diperpanjang kembali hingga 4 Maret 2025.

Pada tanggal 29 September 2021 dan terakhir pada tanggal 20 Desember 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan Bank CIMB Niaga menandatangani perjanjian kredit dimana Bank CIMB Niaga menyediakan beberapa fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus dengan total fasilitas sebesar Rp900.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar antara 6,00% - 7,60%. pada saat penarikan. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo yang beragam dan berkisar antara bulan Maret 2025 sampai dengan Maret 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank CIMB Niaga masing-masing sebesar Rp607.627 dan Rp391.260.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank DKI** (continued)*

On 15 June 2022, the Subsidiary (PT Bank Mandiri Taspen) obtained a credit facility from Bank DKI, in the form of a Term Loan (committed) - non-revolving facility with a maximum loan amounting to Rp500,000. This facility is used to finance the Subsidiary's working capital. This facility has a term of 24 months with an interest rate of 3 months JIBOR + margin of 0.95% per annum.

On 19 Desember 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank DKI (Unit Usaha Syariah) ("Bank DKI Syariah") signed a credit agreement where by Bank DKI Syariah provides an additional Executing Credit facility with a maximum credit of Rp150,000. The withdrawal period for the facility is 36 (thirty six) months from the effective date the contract was signed. This facility will mature on 19 Juni 2027.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding borrowings from Bank DKI are amounted to Rp693,834 and Rp858,862, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 19 February 2020, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga") signed a loan agreement that Bank CIMB Niaga provides non-revolving Term Loan facility with total limit up to Rp300,000 with 8.25% of fixed interest rate at drawdown. This facility will mature on February 2023. On 4 March 2023, the term of non-revolving Term Loan (committed) facility has been extended again until 4 March 2025.

On 29 September 2021 and most recently on 20 December 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and Bank CIMB Niaga signed a loan agreement where Bank CIMB Niaga provided several Special Transaction Loan facilities with a total facility of Rp900,000 which is non-revolving and is subject to a fixed interest rate of 6.00% - 7.60% upon withdrawal. These facilities have various maturities and range from March 2025 to March 2026.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Bank CIMB Niaga are amounted to Rp607,627 and Rp391,260, respectively.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 25 November 2020, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata") kembali menandatangani tambahan perjanjian kredit dimana Bank Permata menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp250.000 yang bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 8,75%. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022. Pada bulan Februari 2022, jangka waktu fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* telah diperpanjang kembali hingga 1 Agustus 2027.

Pada tanggal 16 Juni 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan Bank Permata menandatangani perjanjian kredit dimana Bank Permata menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp400.000 yang bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga antara 6,00% - 7,60%. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2022. Pada tanggal 16 Juni 2022, jangka waktu fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* telah diperpanjang kembali hingga 16 Juni 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank Permata masing-masing sebesar Rp568.383 dan Rp683.222.

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

Pada tanggal 22 Februari 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja *non-revolving* dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. ("Jtrust") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,25% dengan tenor pinjaman maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan dan jangka waktu penarikan fasilitas kredit sampai dengan 22 Februari 2023. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo tanggal 8 September 2026.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,85% - 7,00% dengan tenor pinjaman maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan dan jangka waktu penarikan fasilitas kredit sampai dengan 31 Januari 2024. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo tanggal 20 Maret 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Jtrust masing-masing sebesar Rp501.487 dan Rp258.375.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

PT Bank Permata Tbk.

On 25 November 2020, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata") signed an additional credit agreement whereby Bank Permata provides a non-revolving Working Capital Credit facility with a maximum credit limit of Rp250,000 and interest rate of 8.75%. The facility will mature on 14 February 2022. In February 2022, the term of the Term Loan facility (committed) - non-revolving has been extended again until 1 August 2027.

On 16 June 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and Bank Permata signed loan agreement which Bank Permata provides a Working Capital Loan facility with a maximum credit limit of Rp400,000 which is non-revolving with an interest rate of antara 6,00% - 7,60%. *This facility will mature on 16 June 2022. On 16 June 2022, the term of the Term Loan facility (committed) - non-revolving has been extended again until 16 June 2025.*

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Bank Permata was amounted to Rp568,383 and Rp683,222, respectively.

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

On 22 February 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained an additional non-revolving Working Capital Credit facility from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. ("Jtrust") with a maximum credit limit of Rp200,000 with an interest rate of 7.25% with a maximum loan tenor of 48 (fourty eight) months from the date of withdrawal and the drawdown period for the loan facility is until 22 February 2023. The facility will mature on 8 September 2026.

On 31 January 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained an additional non-revolving working capital credit facility with a maximum credit of Rp200,000 and interest rate of 6.85% - 7.00% with a maximum loan tenor of 48 (fourty eight) months from the withdrawal date and the drawdown period for the loan facility is until 31 January 2024. This facility will mature on 20 March 2027.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowing from Jtrust are amounting to Rp501,487 and Rp258,375, respectively.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank of India Indonesia, Tbk

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank of India Indonesia, Tbk ("BOII") menandatangani perjanjian kredit dimana BOII menyediakan fasilitas *Demand Loan* Menurun (*Executing*) dengan total fasilitas sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar antara 6,00% - 7,60%. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari BOII sebesar Rp443.487 dan RpNihil.

PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Pada tanggal 23 Maret 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. ("OK Bank") menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000 yang dikenakan tingkat suku bunga 7,00% per tahun. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 23 September 2022 dengan tenor pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 23 Maret 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan OK Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman modal kerja *non-revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp200.000 yang dikenakan tingkat suku bunga 7,00% per tahun. Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sampai dengan 22 Desember 2022 dengan tenor pinjaman maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo tanggal 7 Oktober 2026.

Pada tanggal 6 Juni 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan OK Bank menandatangani perjanjian fasilitas Pinjaman Modal Kerja *Installment non-revolving* dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp500.000. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2025 dengan tingkat suku bunga antara 6,00% - 7,60%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari OK Bank masing-masing sebesar Rp388.874 dan Rp599.577.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh fasilitas pinjaman *Executing* dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("PDS") dengan batas maksimum kredit sebesar Rp450.000 dengan nisbah bagi hasil ditentukan saat penarikan fasilitas sekitar 7%. Jangka waktu penarikan fasilitas tersebut adalah sampai dengan 31 Oktober 2023 dengan tenor pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo tanggal 9 Juni 2027.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

PT Bank of India Indonesia, Tbk

On 2 August 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Bank of India Indonesia, Tbk ("BOII") signed a loan agreement where BOII provides a Reducing Demand Loan (Executing) facility with a total facility of Rp500,000 which is non-revolving and bears a fixed interest rate of 6.00% - 7.60%. The facility will mature on 10 August 2026.

As of 31 December 2023 and 2022, oustanding fund borrowings are amounted to Rp443,487 and RpNil, respectively.

PT Bank Oke Indonesia

On 23 March 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank Oke Indonesia ("OK Bank") signed a non-revolving working capital loan facility agreement with a maximum Loan limit of Rp200,000 which bears an interest rate of 7.00% per annum. The term for withdrawing the credit facility is up to 23 September 2022 with a maximum loan tenor of 48 months from the drawdown date.

On 23 March 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and OK Bank signed a non-revolving working capital loan facility agreement with a maximum credit limit of Rp200,000 which bears an interest rate of 7.00% per annum. The term for withdrawing the credit facility is up to 22 December 2022 with a maximum loan tenor of 48 (fourty eight) months from the drawdown date. The facility will mature on 7 October 2026.

On 6 June 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and OK Bank signed a non-revolving Installment Working Capital Loan facility agreement with a maximum credit limit of Rp500,000. The facility will mature on 15 June 2025 with interest rate of 6.00% - 7.60%

As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding fund borrowing from PT Bank Oke Indonesia are amounted to Rp388,874 and Rp599,577, respectively.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

On 27 October 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained Excecuting loan facility from PT Panin Dubai Syariah Tbk ("PDS") with a maximum credit limit of Rp450,000, which bears profit sharing rate of 7%. The term for drawdown the credit facility is up to 31 October 2023 with a maximum loan tenor of 48 months from the drawdown date. This facility will mature in 9 June 2027.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari PDS masing-masing sebesar Rp373.487 dan Rp96.844.

PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Pada tanggal 4 Oktober 2019, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk. ("QNB") menandatangani perjanjian kredit dimana QNB menyediakan fasilitas *Fixed Loan Facility* dengan total maksimum kredit sebesar Rp500.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,80% pada saat penarikan. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 12 Maret 2023. Pada tanggal 12 Maret 2023, jangka waktu fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* telah diperpanjang kembali hingga 20 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari QNB masing-masing sebesar Rp366.008 dan Rp241.323.

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 23 November 2021, Entitas anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB") menandatangani perjanjian kredit dimana Bank UOB menyediakan fasilitas *Term Loan Sublimit Credit Revolving* dengan total maksimum kredit sebesar Rp600.000 yang bersifat *uncommitted* dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,14% pada saat penarikan. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 21 November 2022. Pada tanggal 27 Mei 2022, jangka waktu fasilitas *Term Loan Sublimit Credit Revolving* telah diperpanjang kembali hingga 21 November 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank UOB masing-masing sebesar Rp337.082 dan Rp569.683.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Pada tanggal 19 Maret 2015 dan terakhir pada tanggal 3 September 2018, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana") menandatangani perjanjian kredit dimana Bank Hana menyediakan beberapa fasilitas *Term Loan* dengan total maksimum fasilitas sebesar Rp400.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50%. Fasilitas tersebut memiliki jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2022. Pada tanggal 20 Desember 2022, jangka waktu fasilitas *Term Loan (committed) - non-revolving* telah diperpanjang kembali hingga 24 Desember 2024.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowing from PDS are amounted to Rp373,487 and Rp96,844, respectively.

PT Bank QNB Indonesia Tbk.

On 4 October 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Bank QNB Indonesia Tbk. ("QNB") signed a loan agreement which Bank QNB provides Fixed Loan facility with total limit amounting to Rp500,000 which is non-revolving and bears a fixed market interest rate of 7.80% at the withdrawal date. This facility will mature on 12 March 2023. On 12 March 2023, the term of Term Loan (committed) - non-revolving has been extended again until 20 December 2024.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from QNB are amounting to Rp366,008 and Rp241,323, respectively.

PT Bank UOB Indonesia

On 23 November 2021, the subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB") signed a credit agreement whereby Bank UOB provides a Term Loan Sublimit Credit facility revolving with a limit value of Rp600,000 which is uncommitted with fixed interest rate of 6.14% at the time of withdrawal. This facility will mature on 21 November 2022. On 27 May 2022, the term of Term Loan Sublimit Credit Revolving facility has been extended until 21 November 2023.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Bank UOB are amounting to Rp337,082 and Rp569,683, respectively.

PT Bank KEB Hana Indonesia

On 19 March 2015 and most recently on 3 September 2018, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana") signed a loan agreement where Bank Hana provided several Term Loan facilities with a total maximum facility of Rp400,000 which is non-revolving and bears a fixed interest rate of 9.50%. This facility has a maturity date of 19 February 2022. On 20 December 2022, the maturity of the Term Loan (committed) - non-revolving facility has been extended to 24 December 2024.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 21 Agustus 2019, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan Bank Hana menandatangani perjanjian kredit dimana Bank Hana memberikan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 yang bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 9,50%. Fasilitas tersebut telah jatuh tempo pada bulan Januari 2023.

Pada tanggal 29 Mei 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan Bank Hana menandatangani perjanjian kredit baru di mana Bank Hana menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp200.000 yang bersifat *non-revolving* dengan tingkat suku bunga 7,25%. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2027.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank Hana masing-masing sebesar Rp279.783 dan Rp207.400.

PT Bank BTPN Tbk.

Pada tahun 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Sekuritas) telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN"). Bank BTPN memberikan fasilitas *Loan on Note* sebesar Rp225.000 atau setara dalam mata uang *USD* dengan maksimum valuta *USD* sebesar 90% dari limit dan Bank Garansi sebesar Rp100.000. Adapun batas nilai gabungan maksimum atas fasilitas *Loan on Note* dan Bank Garansi adalah sebesar Rp225.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 5,95%. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023 dan saat ini dalam proses perpanjangan.

Pada tanggal 24 Mei 2021 dan terakhir diperpanjang pada tanggal 24 Mei 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) mendapat fasilitas *Loan on Note* yang bersifat *revolving* dari PT Bank BTPN Tbk ("BTPN") sehingga total keseluruhan fasilitas *Loan on Note* sebesar Rp300.000. penarikan pertama dilakukan pada tanggal 28 April 2023. Fasilitas tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank BTPN masing-masing sebesar Rp250.000 dan RpNihil.

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 18 November 2020, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh tambahan fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja sehingga total plafon yang diterima dari PT Bank BCA Syariah adalah sebesar Rp200.000 dengan tingkat suku bunga 9,00%. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada bulan Mei 2024.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank KEB Hana Indonesia** (continued)*

On 21 August 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and Bank Hana signed a credit agreement where Bank Hana provided additional Working Capital Credit facilities with a maximum limit of Rp100,000 which is non-revolving with an interest rate of 9.50%. This facility will mature on January 2023.

On 29 May 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and Bank Hana signed a new loan agreement in which Bank Hana provides a Working Capital Loan Facility with a maximum credit limit of Rp200,000 which is non-revolving and with interest rate of 7.25%. This facility will mature on 20 June 2027.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Bank Hana are amounted to Rp279,783 and Rp207,400, respectively.

PT Bank BTPN Tbk.

on 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Sekuritas) has signed a Credit Agreement with PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN"). Bank BTPN provides loan on Note facility of Rp225,000 or the equivalent in USD currency with a maximum USD currency of 90% of the limit and a Bank Guarantee of Rp100,000. The maximum combined value limit for Loan on Note and Bank Guarantee facilities is Rp225,000 with interest rate of 5.95%. This facility is valid until 29 December 2023 and currently in the process of extension*.*

On 24 May 2021, and last extended on 24 May 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) obtained a revolving Loan on Note facility from ("BTPN") with a total facility amount of Rp300,000. The first withdrawal was made on 28 April 2023. The facility has been extended until 30 April 2024.

As of 31 December 2023 and 2022, oustanding fund borrowings from Bank BTPN are Rp250,000 and RpNil, respectively.

PT Bank BCA Syariah

On 18 November 2020, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained an additional Working Capital Loan facility so the total credit limit amounted to Rp200,000 with an interest rate of 9.00% that received from PT Bank BCA Syariah. The facility will mature on May 2024.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank BCA Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari PT Bank BCA Syariah masing-masing sebesar Rp224.711 dan Rp234.745.

PT Bank Mega Tbk.

Pada tanggal 25 Februari 2021, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega") menandatangani perjanjian kredit dimana Bank Mega menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp1.000.000 yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga 8,75%. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank Mega masing-masing sebesar Rp216.461 dan Rp378.577.

PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tanggal 15 Desember 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) dan PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta ("Bank BPD DIY") menandatangani perjanjian kredit dimana Bank BPD DIY menyediakan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum kredit sebesar Rp100.000, yang bersifat *non-revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga 6,80% pada saat penarikan. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif kontrak tersebut ditandatangani. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank BPD DIY masing-masing sebesar Rp159.458 dan Rp99.730.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 29 September 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh fasilitas pinjaman *Executing* dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") dengan batas maksimum kredit sebesar Rp600.000 dengan nisbah bagi hasil ditentukan saat penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas tersebut adalah sampai dengan 29 September 2024 dengan tenor pinjaman maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2028.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

***PT Bank BCA Syariah** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from PT Bank BCA Syariah are amounting to Rp224,711 and Rp234,745, respectively.

PT Bank Mega Tbk.

On 25 February 2021, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank Mega Tbk. ("Bank Mega") signed a credit agreement whereby Bank Mega provides a non-revolving Working Capital Credit facility with a maximum credit of Rp1,000,000 and bears an interest rate of 8.75%. The facility will mature on 25 February 2025.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Bank Mega are amounted to Rp216,461 and Rp378,577, respectively.

PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

On 15 December 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta ("Bank BPD DIY") signed a credit agreement whereby Bank BPD DIY provides an additional Working Capital Credit facility with a maximum credit of Rp100,000, which is non-revolving with interest rate of 6.80% upon withdrawal. The withdrawal period for the facility is 36 (thirty six) months from the effective date the contract was signed. This facility will mature on 15 December 2025.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Bank BPD DIY was amounted to Rp159,458 and Rp99,730, respectively.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

On 29 September 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") signed a credit agreement where by Bank Mualamat provides an additional Executing Credit facility with a maximum credit of Rp600,000. The withdrawal period for the facility until 29 September 2024 with tenor of 48 (fourty eight) months from the effective date the contract was signed. This facility will mature on 29 September 2028.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Rupiah (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk.

Pada tanggal 23 Juni 2021, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) memperoleh fasilitas pinjaman *Money Market Line* dari PT Bank Victoria Internasional Tbk. ("Bank Victoria") dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp250.000 dengan tingkat suku bunga mengikuti suku bunga pasar yang berlaku. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Juni 2022. Atas fasilitas *Money Market Line* yang jatuh tempo tersebut telah di addendum, sehingga jatuh temponya menjadi 23 Juni 2023 dengan penurunan batas maksimum kredit menjadi sejumlah Rp150.000 yang mempunyai tingkat suku bunga mengikuti suku bunga pasar yang berlaku sekitar 5,50% - 6,66%.

Pada tanggal 20 Juli 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Utama Finance) menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman *Money Market Line* dari Bank Victoria, sehingga jatuh tempo fasilitasnya menjadi 24 Juni 2024 dengan tingkat suku bunga mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2024.

Pada tanggal 16 Agustus 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Sekuritas) telah menandatangani perubahan terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan Bank Victoria. Bank Victoria memberikan fasilitas *Money Market Line* dan/atau Pinjaman Subordinasi sebesar Rp250.000. Perjanjian ini sudah diperpanjang dan akan berakhir pada 26 Juni 2024. Tingkat suku bunga atas fasilitas yang berlaku bersifat negosiasi per transaksi atau sekitar 6,10% di bulan Agustus 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank Victoria masing-masing sebesar Rp49.994 dan RpNihil.

PT Bank Jago Tbk.

Pada tanggal 28 Agustus 2023, Entitas Anak (PT Mandiri Sekuritas) telah menandatangani perjanjian perpanjangan fasilitas kredit dengan PT Bank Jago (“Bank Jago”) dimana fasilitas yang diberikan akan berakhir tanggal 17 Juli 2024. Fasilitas yang diberikan Bank Jago yaitu Pinjaman Promes Berjangka sebesar Rp175.000. Besaran bunga adalah tetap selama periode penarikan pinjaman atau berkisar 5,8%, sesuai suku bunga pasar yang berlaku pada saat penarikan pinjaman promes berjangka. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 2 Januari 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Bank Jago masing-masing sebesar Rp49.875 dan RpNihil.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Rupiah (continued)

PT Bank Victoria International Tbk.

On 23 June 2021, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) obtained a Money Market Line loan facility from PT Bank Victoria Internasional Tbk ("Bank Victoria") with a maximum credit limit of Rp250,000 with an interest rate following market interest rates that applicable. This facility matures on 23 June 2022. The Money Market Line facility which has matured has been added to, so that the maturity becomes 23 June 2023 with a reduction in the maximum credit limit to Rp150,000 with an interest rate following the prevailing market interest rate around 5.50% - 6.66%.

On 20 July 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Utama Finance) signed an extension of the Money Market Line loan facility from Bank Victoria, so that the maturity of the facility becomes 24 June 2024 with interest rates following the prevailing interest rates. This facility will mature on 24 June 2024.

On 16 August 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Sekuritas) signed amendments to the credit facility agreement with Bank Victoria. Bank Victoria provides Money Market Line facilities and/or Subordinated Loans amounting to Rp250,000. This agreement has been extended and will mature on 26 June 2024. The interest rate on the applicable facilities is negotiated per transaction or around 6.10% in August 2023.

As of 31 December 2023 and 2022, oustanding fund borrowings from Bank Victoria are Rp49,994 and RpNil, respectively.

PT Bank Jago Tbk.

On 28 August 2023, the Subsidiary (PT Mandiri Sekuritas) has signed a credit facility extension agreement with PT Bank Jago Tbk. ("Bank Jago") where the facility provided will mature on 17 July 2024. The facility provided by Bank Jago is a Term Promissory Loan amounting to Rp175,000. The interest rate is fixed during the loan withdrawal period or around 5.8%, according to the market interest rate in effect at the time of the term promissory loan withdrawal. This loan will mature on 2 January 2024.

As of 31 December 2023 and 2022, oustanding fund borrowings from Bank Jago are Rp49,875 and RpNil, respectively.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Mata uang asing

PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 08 April 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") menandatangani perjanjian kredit sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) yang bersifat *non-revolving*. Penarikan fasilitas dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan tenor 3 (tiga) tahun dan dikenakan tingkat suku bunga tetap 6,98% dengan lindung nilai penuh. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Mizuho masing-masing sebesar Rp577.302 dan RpNihil.

MUFG Bank, Ltd., Singapura

Pada tanggal 13 April 2022, Entitas Anak (PT Mandiri Tunas Finance) dan MUFG Bank Ltd., ("MUFG") menandatangani perjanjian pinjaman dimana MUFG menyediakan fasilitas *Uncommitted Long-Term Loan/Money Market Line* dengan total maksimum kredit sebesar Rp409.459 yang bersifat *revolving* dan dikenakan tingkat suku bunga tetap sebesar USD-SOFR+1,08%-1,20% per tahun pada saat penarikan. Fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 April 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari MUFG masing-masing sebesar Rp219.678 dan Rp373.611.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Entitas Anak (PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan *mudharabah* iB sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank"). Entitas Anak telah melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Agustus 2022. Pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023. Pada tanggal 27 Desember 2023 Entitas Anak melakukan penarikan kembali sebesar Rp776.250 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,40% - 99,60% dan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024. Tidak terdapat agunan yang dijaminkan untuk fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari Maybank masing-masing sebesar RpNihil (*original currency* USDNihil (nilai penuh)) dan Rp778.375 (*original currency* USD50.000.000 (nilai penuh)).

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Foreign currencies

PT Bank Mizuho Indonesia

On 8 April 2022, the Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") signed a loan agreement amounting to Rp50,000,000 (full amount) which is non-revolving facility. The drawdown loan facility was made on 13 February 2023 with a tenor of 3 (three) years and bears a fixed interest rate of 6.98% which fully hedged. This facility will mature on 13 February 2026.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Mizuho was amounted to Rp577,302 and RpNil, respectively.

MUFG Bank, Ltd., Singapore

On 13 April 2022, Subsidiary (PT Mandiri Tunas Finance) and MUFG Bank Ltd., Singapore ("MUFG") signed a loan agreement whereby MUFG provides an Uncommitted Long-Term Loan/Money Market Line facility with a total limit of Rp409,459 which is revolving and bears a fixed interest rate of USD-SOFR1.08%-1.20% year upon drawdown. This facility will matures on 11 April 2025.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from MUFG was amounted to Rp219,678 and Rp373,611, respectively.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

On 29 August 2022, the Subsidiary (PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) obtained an iB mudharabah financing line facility amounting to USD100,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank"). The Subsidiary has made a withdrawal of USD50,000,000 (full amount) on 30 August 2022. The mudharabah financing matures on 30 September 2023. On 27 December 2023, the Subsidiary made a withdrawal of Rp776,250 with a profit-sharing ratio of 0.40% - 99.60%, and this facility will mature on 26 January 2024. No collateral is pledged for this facility.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from Maybank amounted to RpNil (original currency USDNil (full amount)) and Rp778,375 (original currency USD50,000,000 (full amount), respectively.

36. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(f) Lain-lain (lanjutan)

Mata uang asing (lanjutan)

The Development Bank of Singapore Limited

Pada tanggal 6 Maret 2019, Entitas Anak (PT Mandiri Sekuritas) dan The Development Bank of Singapore Limited ("DBS") menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja sebesar USD5.000.000 (nilai penuh) dengan bunga tetap sebesar 3,24% dan 3,14% pada saat periode penarikan kredit. Fasilitas ini ditarik pada bulan Desember 2019 dan tidak memiliki jatuh tempo, dimana fasilitas tersebut akan berlaku hingga pihak Entitas Anak atau DBS menyatakan berakhirnya fasilitas tersebut.

Pada tanggal 20 Maret 2020, Entitas Anak (PT Mandiri Sekuritas) dan DBS menandatangani penambahan fasilitas perjanjian Kredit Modal Kerja *sebesar* USD7.500.000 (nilai penuh) dengan bunga tetap sebesar 3,24% pada saat periode penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pinjaman dari DBS masing-masing sebesar ekuivalen RpNihil dan Rp48.766.

Pinjaman yang diterima oleh PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp17.688.988 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp13.515.545) (Catatan 13g) dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan sejumlah Rp874.067 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp1.681.888) (Catatan 14g).

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank dan bank sindikasi tersebut mensyaratkan Entitas Anak untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Entitas Anak juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti rasio jumlah utang bunga terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Bank Mandiri dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran bunga pinjaman yang diterima sesuai dengan jadwal pembayaran bunga selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank Mandiri dan Entitas Anak telah memenuhi kondisi dan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

***36. FUND BORROWINGS** (continued)*

(f) Others (continued)

Foreign currencies (continued)

The Development Bank of Singapore Limited

On 6 March 2019, the Subsidiary (PT Mandiri Sekuritas) and The Development Bank of Singapore Limited ("DBS") signed a Working Capital Loan facility agreement amounting to USD5,000,000 (full amount) and bears fixed interest rate of 3.24% and 3.14% at withdrawals. This facility has withdrawn on December 2019 and have no maturity date which the facility will mature when the Subsidiary or DBS decided to terminate the agreement.

On 20 March 2020, the Subsidiary (PT Mandiri Sekuritas) and DBS signed an additional Working Capital Loan facility amounted to USD7,500,000 (full amount) with fixed interest rate of 3.24% at the loan drawdown period.

As of 31 December 2023 and 2022, outstanding fund borrowings from DBS amounted to RpNil and Rp48,766, respectively.

Fund borrowings from PT Mandiri Tunas Finance and PT Mandiri Utama Finance are secured by consumer financing receivables amounting to Rp17,688,988 as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp13,515,545) (Note 13g) and net investment in finance leases amounted to Rp874,067 as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp1,681,888) (Note 14g).

The loan facilities from several banks and syndication banks require Subsidiaries to provide written notices in terms of dividend distribution, changes in capital and shareholders, changes in the composition of the board of directors and commissioners, changes in the main business, investments and obtaining new loans from other banks.

In the loan agreement, the Subsidiaries are also required to meet financial requirements such as the ratio of total debt to equity not exceeding a ratio of 10:1 and other reporting obligations.

Bank Mandiri and its Subsidiaries have made interest payments on fund borrowings according to the interest payment schedule for the year ended 31 December 2023 and 2022.

During the year ended 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri and its Subsidiaries have complied with the terms and conditions set forth in the fund borrowings agreement.

37. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI / *37. SUBORDINATED LOANS AND MARKETABLE SECURITIES*

Berdasarkan jenis dan mata uang: / *By type and currency:*

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Medium Term Notes Subordinasi I			*Medium Term Notes Subordinated I*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Pihak berelasi (Catatan 56)	-	87.000	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	-	413.000	*Third parties*
Medium Term Notes Subordinasi II			*Medium Term Notes Subordinated II*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Pihak berelasi (Catatan 56)	10.000	-	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	90.000	-	*Third parties*
Total	100.000	500.000	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Two-step loans (TSL)			*Two-step loans (TSL)*
Pihak ketiga			*Third parties*
Asian Development Bank (ADB) (Catatan 62.B.(iv))	115.735	133.564	*Asian Development Bank (ADB) (Catatan 62.B.(iv))*
	215.735	633.564	
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(564)	(231)	*Less: unamortised issuance cost*
Neto	**215.171**	**633.333**	***Net***

Medium Term Notes Subordinasi I Bank Mandiri / *Medium Term Notes Subordinated I Bank Mandiri*

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan struktur penghimpunan dana jangka panjang serta untuk mendukung ekspansi kredit, pada tanggal 31 Juli 2018, Bank Mandiri menerbitkan *Medium Term Notes* Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018 ("MTN Subordinasi I") sebesar Rp500.000. Pada tanggal 31 Desember 2023, biaya penerbitan MTN Subordinasi I yang belum diamortisasi sebesar RpNihil.

In order to strengthen the capital structure and long-term funding structure, as well as to support the credit expansion, on 31 July 2018, Bank Mandiri issued Subordinated Medium Term Notes I Bank Mandiri 2018 ("Subordinated MTN I") amounted to Rp500,000. On 31 December 2023, the unamortised issuance cost of Subordinated MTN I amounted to RpNil.

MTN Subordinasi I memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2023, diterbitkan tanpa warkat dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Wali amanat dari penerbitan MTN Subordinasi I adalah PT Bank Permata Tbk.

Subordinated MTN I has 5 (five) years in terms and will mature on 31 July 2023, in which issued scriptless with a fixed rate of 8.50% per annum. The Trustee of the issuance of Subordinated MTN I is PT Bank Permata Tbk.

Bunga MTN Subordinasi I dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo MTN Subordinasi I adalah pada tanggal 31 Juli 2023 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok MTN Subordinasi I. Pembayaran pokok MTN Subordinasi I dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. MTN Subordinasi I dapat dicatat sebagai komponen modal pelengkap (Tier 2) sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-109/PB.31/2018 tanggal 20 September 2018.

Interest of Subordinated MTN I is paid on quarterly basis, the first interest payment was made on 31 October 2018 while the last interest payment, in which also the maturity date and the repayment of the principal of Subordinated MTN I is on 31 July 2023. The principal of MTN I will be fully repaid on the maturity date. Subordinated MTN I can be treated as supplementary capital components (Tier 2) according to the approval from FSA through letter No. S-109/PB.31/2018 dated 20 September 2018.

37. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

***Medium Term Notes* Subordinasi I Bank Mandiri** (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang yang harus dibayar, Bank Mandiri berkewajiban untuk: (i) memelihara pada setiap saat keadaan keuangan berada dalam kondisi sehat sesuai ketentuan OJK; (ii) mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan/peraturan OJK dan/atau Bank Indonesia; (iii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Bank Mandiri tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah, Otoritas yang Berwenang atau Bank Indonesia; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha utama; (iii) mengadakan penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank Mandiri.

MTN Subordinasi I tidak dijamin dengan suatu bentuk jaminan khusus, kecuali jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yakni seluruh harta kekayaan Bank Mandiri baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan MTN Subordinasi I selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, peringkat MTN Subordinasi I menurut Pefindo adalah idAA (double A). Pada tanggal 31 Juli 2023, MTN Subordinasi I telah jatuh tempo dan dilunasi.

***Medium Term Notes* Subordinasi II Bank Mandiri**

Dalam rangka memperkuat struktur penghimpunan dana jangka panjang dan mendukung ekspansi kredit, pada tanggal 23 Juni 2023, Bank Mandiri menerbitkan Medium Term Notes Subordinasi II Bank Mandiri Tahun 2023 ("MTN Subordinasi II") sebesar Rp100.000. Pada tanggal 31 Desember 2023, biaya penerbitan MTN Subordinasi II yang belum diamortisasi sebesar Rp564.

MTN Subordinasi II memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2028, diterbitkan tanpa warkat dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% per tahun. Wali amanat dari penerbitan MTN Subordinasi II adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

***37. SUBORDINATED LOANS AND MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***Medium Term Notes Subordinated I Bank Mandiri** (continued)*

Prior to full repayment of the amount outstanding of the MTN, Bank Mandiri is obliged to: (i) maintain at all times soundness of financial condition in accordance to FSA regulation; (ii) maintain a minimum level of soundness composite rating of 3 (three) which is categorised as "Fair", according to internal assessment based on FSA regulation and/or Bank Indonesia; (iii) obtain and comply with all requirements and exercise all necessary things to keep the authority, license and approval (from government or other authorities) comply with requirement in accordance to Republic of Indonesia's law.

Bank Mandiri without written permission from the Trustee shall not: (i) reduce registered capital, issued capital and paid-up capital, except required by the government, authorised by the Authorities or Bank Indonesia; (ii) change the core business; (iii) perform merger, dissolvement and/or taken over by other entity which lead to dissolution of Bank Mandiri.

Subordinated MTN I is not guaranteed by a special collateral, except guarantee which refer to Article 1131 and 1132 of Indonesian Civil Law (UU Hukum Perdata) which covers all the Bank's either moving objects and objects that are not moving, present or future.

There was no breach of the Trustee restrictions agreement on Subordinated MTN I during the year ended on 31 December 2023 and 2022.

As of 31 December 2022, rating of MTN Subordinated I based on Pefindo was idAA (double A). As of 31 July 2023, MTN subordinated I has matured and has been settled.

Medium Term Notes Subordinated II Bank Mandiri

In order to strengthen the–long-term funding structure as well as to support the credit expansion, on 23 June 2023, Bank Mandiri issued Subordinated Medium Term Notes II Bank Mandiri 2023 ("Subordinated MTN II") amounted to Rp100,000. On 31 December 2023, the unamortised issuance cost of Subordinated MTN II amounted to Rp564.

Subordinated MTN II has 5 (five) years in terms and will mature on 23 June 2028, in which issued scriptless with a fixed rate of 6.95% per annum. The Trustee of the issuance of Subordinated MTN II is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

37. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

***Medium Term Notes* Subordinasi II Bank Mandiri** (lanjutan)

Bunga MTN Subordinasi II dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 23 September 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo MTN Subordinasi II adalah pada tanggal 23 Juni 2028 yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok MTN Subordinasi II. Pembayaran pokok MTN Subordinasi II dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 20 Juli 2023, MTN Subordinasi II telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai komponen modal pelengkap (Tier 2) melalui surat No. SR-51/PB.21/2023.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang yang harus dibayar, Bank Mandiri berkewajiban untuk: (i) memelihara pada setiap saat keadaan keuangan berada dalam kondisi sehat sesuai ketentuan OJK; (ii) mempertahankan tingkat kesehatan Bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan/peraturan OJK dan/atau Bank Indonesia; (iii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Bank Mandiri tanpa persetujuan tertulis Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah, Otoritas yang Berwenang atau Bank Indonesia; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha utama; (iii) mengadakan penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank Mandiri.

MTN Subordinasi II tidak dijamin dengan agunan umum sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Bank atau Entitas Anak, Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan pasal 19 ayat (1) hurut f peraturan Otoritas Jasa Keuangan KPMM dan merupakan kewajiban penerbit yang disubordinasi, sesuai dengan pasal 5 Perjanjian Penerbitan MTN Subordinasi.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian perwaliamanatan MTN Subordinasi II selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat MTN Subordinasi II menurut Pefindo adalah idAA (*double* A).

***37. SUBORDINATED LOANS AND MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***Medium Term Notes Subordinated II Bank Mandiri** (continued)*

Interest of Subordinated MTN II is paid on quarterly basis, the first interest payment will be made on 23 September 2023 while the last interest payment, in which also the maturity date and the repayment of the principal of Subordinated MTN II, is on 23 June 2028. The principal of MTN II will be fully repaid on the maturity date. On 20 July 2023, Subordinated MTN II approved as supplementary capital components (Tier 2) according to the approval from FSA through letter No. SR-51/PB.21/2023.

Prior to full repayment of the amount outstanding of the MTN, Bank Mandiri is obliged to: (i) maintain at all times soundness of financial condition in accordance to FSA regulation; (ii) maintain a minimum level of soundness composite rating of 3 (three) which is categorised as "Fair", according to internal assessment based on FSA regulation and/or Bank Indonesia; (iii) obtain and comply with all requirements and exercise all necessary things to keep the authority, license and approval (from government or other authorities) comply with requirement in accordance to Republic of Indonesia’s law.

Bank Mandiri without written permission from the Trustee shall not: (i) reduce registered capital, issued capital and paid-up capital, except required by the government, authorised by the Authorities or Bank Indonesia; (ii) change the core business; (iii) perform merger, dissolvement and/or taken over by other entity which lead to dissolution of Bank Mandiri.

Subordinated MTN II is not guaranteed by a public collateral which refer to Article 1131 and 1132 of Indonesian Civil Law (UU Hukum Perdata) or include special collateral is not guaranteed by Bank or the Subsidiary, Republic of Indonesia or other related parties and not included to bank guarantee program implemented by Deposit Insurance Corporation (LPS) or its substitute. Based on the Law and regarding amendment Article 19 Paragraph (1) letter f of Capital Adequacy Requirement and in accordance with article 5 of the Subordinated MTN Issuance Agreement.

There was no breach of the Trustee restrictions agreement on Subordinated MTN II during the year ended on 31 December 2023.

As of 31 December 2023, rating of MTN Subordinated II based on Pefindo was idAA (double A).

37. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

***Two-step loans* - Asian Development Bank**

Akun ini merupakan fasilitas kredit dari Asian Development Bank ("ADB") kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk disalurkan kepada bank peserta guna membiayai beberapa jenis proyek di Indonesia. Rincian fasilitas ini adalah sebagai berikut:

Fasilitas kredit/ *Loan facility*	Tujuan/ *Purpose*	Jangka waktu/ *Period*
ADB *Loan* 1327 - INO (SF)	Membiayai Proyek Kredit Mikro/*Funding Micro Loan Projects* (PKM)	15 Januari/*January* 2005 - 15 Juli/*July* 2029 dengan angsuran pertama pada tanggal/*with the first installment start on* 15 Januari/*January* 2005

	2023	2022	
ADB *Loan* 1327 - INO (SF)	115.735	133.564	*ADB Loan 1327 - INO (SF)*

Menteri Keuangan melalui surat No. S-596/MK.6/2004 tanggal 12 Juli 2004, telah menyetujui pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro ("PKM") *Loan* ADB No. 1327 - INO ("SF") dari Bank Indonesia kepada Bank Mandiri. Dengan disetujuinya pengalihan PKM tersebut, maka telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-805/DP3/1995 tanggal 27 April 1995 yang diubah dengan amendemen No. AMA-287/SLA-805/DP3/2003 tanggal 22 April 2003 antara Republik Indonesia dan Bank Indonesia menjadi Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan amendemen No. AMA-298/SLA-805/DP3/2004 tanggal 16 Juli 2004.

Pinjaman ADB untuk Proyek Kredit Mikro diberikan dalam mata uang SDR (*Special Drawing Rights*) sebesar SDR15.872.600 (nilai penuh) yang wajib dibayar kembali oleh Bank Mandiri dalam mata uang SDR kepada Pemerintah dalam 50 (lima puluh) kali angsuran setiap enam bulan secara prorata setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, dengan angsuran pertama dilakukan pada tanggal 15 Januari 2005 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2029. Atas pinjaman ADB tersebut, Bank Mandiri dikenakan *service charge* sebesar 1,50% per tahun pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya sejak penarikan pinjaman.

***37. SUBORDINATED LOANS AND MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

Two-step loans - Asian Development Bank

This account represents a loan facility from Asian Development Bank ("ADB") to the Government of the Republic of Indonesia, through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, which are relent to participating banks to finance several projects in Indonesia. The detail of this facility is as follows:

The Minister of Finance through its letter No. S-596/MK.6/2004 dated 12 July 2004, has approved the transfer of management of Micro Credit Project ("PKM") of ADB loans No. 1327 - INO ("SF") from Bank Indonesia to Bank Mandiri. With that approval, an amendment was made on the channelling loan agreement No. SLA-805/DP3/1995 dated 27 April 1995, which was revised by amendment No. AMA-287/SLA-805/DP3/2003 dated 22 April 2003, between the Republic of Indonesia and Bank Indonesia to the Republic of Indonesia and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., with amendment No. AMA-298/SLA-805/DP3/2004 dated 16 July 2004.

The ADB loan for Micro Credit Projects was granted in SDR (Special Drawing Rights) currency in amount of SDR15,872,600 (full amount) which required Bank Mandiri to repay in SDR currency to the Government in 50 (fifty) prorate semi-annual installments every 15 January and 15 July with the first installment paid on 15 January 2005 and will end on 15 July 2029. The ADB loans are subject to a service charge of 1.50% per annum which is charged on every 15 January and 15 July every year starting from its drawdown.

38. DANA *SYIRKAH* TEMPORER

Dana *syirkah* temporer terdiri dari:

a. Simpanan nasabah
   1) Giro
      a. Berdasarkan jenis:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Giro - investasi terikat	169	1	*Demand deposits - restricted investment*
Giro - investasi tidak terikat *mudharabah*	8.329.095	12.456.380	*Demand deposits - unrestricted investment mudharabah*
	8.329.264	12.456.381	

38. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Temporary syirkah funds consists of:

a. Deposits from Customers
   1) Demand Deposits
      a. Based on type:

38. DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer terdiri dari (lanjutan):

a. Simpanan nasabah (lanjutan)

1) Giro (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan):

***38. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS** (continued)*

Temporary syirkah funds consists of (continued):

a. Deposits from Customers (continued)

1) Demand Deposits (continued)

a. Based on type (continued):

	2023	2022	
Rupiah (lanjutan)			*Rupiah (continued)*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro - investasi terikat dan tidak terikat *mudharabah*	11.211.248	8.117.963	*Demand deposits - restricted and unrestricted investment mudharabah*
Giro *mudharabah musytarakah*	589	626	*Demand deposits mudharabah musytarakah*
	11.211.837	8.118.589	
	19.541.101	20.574.970	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Giro - investasi terikat dan tidak terikat *mudharabah*	9.245.205	1.245.851	*Demand deposits - restricted and unrestricted investment mudharabah*
	9.245.205	1.245.851	
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro - investasi terikat dan tidak terikat *mudharabah*	3.567.559	902.267	*Demand deposits - restricted and unrestricted investment mudharabah*
	3.567.559	902.267	
	12.812.764	2.148.118	
	32.353.865	**22.723.088**	

Giro - investasi terikat merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana pada penyaluran dana yang kriterianya telah ditentukan oleh pemilik dana berdasarkan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

The demand deposits - restricted investment represent deposits from third parties which will receive returns from Subsidiary's restricted investment based on the agreed share (nisbah) of the Subsidiary's revenue.

b. Kisaran nisbah bagi hasil untuk giro *mudharabah* - investasi tidak terikat per tahun:

b. Range of profit sharing ratios for demand deposits - unrestricted mudharabah investment per year:

	2023	2022	
Rupiah	3,15% - 3,97%	1,95% - 3,40%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,13% - 5,64%	0,05% - 0,19%	*Foreign currency*

38. DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer terdiri dari (lanjutan):

a. Simpanan nasabah (lanjutan)

2) Tabungan

a. Berdasarkan jenis:

***38. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS** (continued)*

Temporary syirkah funds consists of (continued):

a. Deposits from Customers (continued)

2) Saving Deposits

a. Based on type:

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 56)			*Related parties (Note 56)*
Tabungan - investasi terikat	8.320	731	*Saving deposits - restricted investment*
Tabungan *mudharabah* - investasi tidak terikat			*Mudharabah saving deposits - unrestricted investment*
Tabungan BSI	182.258	84.035	*BSI saving deposits*
Tabungan Investa Cendekia	252	425	*Investa Cendekia saving deposits*
Tabungan *Mabrur*	450	292	*Mabrur saving deposits*
Tabungan Berencana BSI	291	197	*Berencana BSI saving deposits*
Tabungan *Mudharabah* Institusi	90	390	*Mudharabah Institusi saving deposits*
	191.661	86.070	
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan - investasi terikat	2.232.598	2.061.141	*Saving deposits - restricted investment*
Tabungan *mudharabah* - investasi tidak terikat			*Mudharabah saving deposits - unrestricted investment*
Tabungan BSI	61.304.784	57.783.564	*BSI saving deposits*
Tabungan *Mabrur*	11.352.080	9.374.466	*Mabrur saving deposits*
Tabungan Pensiun	1.040.963	1.064.785	*Retirement saving deposits*
Tabungan *Mudharabah* Institusi	900.732	1.148.770	*Mudharabah Institusi saving deposits*
Tabungan Investa Cendekia	489.959	568.028	*Investa Cendekia saving deposits*
Tabungan Berencana BSI	187.202	182.713	*Berencana BSI saving deposits*
Tabungan *Qurban*	91	169	*Qurban saving deposits*
	77.508.409	72.183.636	
Total	**77.700.070**	**72.269.706**	***Total***

Tabungan - investasi terikat merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana pada penyaluran dana yang kriterianya telah ditentukan oleh pemilik dana berdasarkan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

The saving deposits - restricted investment represent deposit from third parties which will receive returns from Subsidiary's revenue, for the usage of channeled funds with criteria determined by the fund owner's according to the previously set and agreed share (nisbah).

Tabungan *mudharabah* - investasi tidak terikat merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

The Mudharabah saving deposits - unrestricted investment represent third parties' deposits which will receive return from Subsidiary's revenue based on the set and agreed share (nisbah).

b. Kisaran nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* - investasi tidak terikat per tahun:

b. Ranging of the annual profit sharing ratio (nisbah) for Mudharabah saving deposits - unrestricted investment:

	2023	2022	
Rupiah	0,66% - 0,69%	0,68% - 0,91%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,23% - 0,23%	0,23% - 0,24%	*Foreign currency*

38. DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer terdiri dari (lanjutan):

a. Simpanan nasabah (lanjutan)

3) Deposito *mudharabah* - investasi tidak terikat

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 56)	27.022.659	17.735.345	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	85.407.012	80.087.363	*Third parties*
	112.429.671	97.822.708	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Pihak berelasi (Catatan 56)	883.832	122.331	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	2.134.032	2.330.830	*Third parties*
	3.017.864	2.453.161	
Total	**115.447.535**	**100.275.869**	***Total***

***38. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS** (continued)*

Temporary syirkah funds consists of (continued):

a. Deposits from Customers (continued)

3) Mudharabah Time Deposit - unrestricted investment

b. Simpanan dari bank lain

b. Deposits from Other Banks

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro *mudharabah* - investasi tidak terikat	63.394	31.880	*Mudharabah demand deposits - unrestricted investment*
Tabungan *mudharabah* - investasi tidak terikat	580.115	627.646	*Mudharabah saving deposits - unrestricted investment*
Deposito *mudharabah* - investasi tidak terikat	136.693	274.412	*Mudharabah time deposits - unrestricted investment*
	780.202	933.938	
Total	**780.202**	**933.938**	***Total***

c. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan deposito dari simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain:

1) Berdasarkan jangka waktu:

c. Other significant information related to the time deposits for deposits from customers and deposits from other banks:

1) By contract period:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
1 bulan	61.878.521	64.518.121	*1 month*
3 bulan	29.154.725	19.666.582	*3 months*
6 bulan	10.333.614	4.250.650	*6 months*
12 bulan	11.062.811	9.661.767	*12 months*
Total	112.429.671	98.097.120	*Total*

38. DANA *SYIRKAH* TEMPORER (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer terdiri dari (lanjutan):

c. Berikut adalah informasi penting lainnya sehubungan dengan deposito dari simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain (lanjutan):

1) Berdasarkan jangka waktu (lanjutan):

	2023	2022	
Mata uang asing			*Foreign currency*
1 bulan	1.736.093	1.904.064	*1 month*
3 bulan	647.481	256.852	*3 months*
6 bulan	102.252	97.899	*6 months*
12 bulan	532.038	194.346	*12 months*
Total	3.017.864	2.453.161	*Total*
	115.447.535	**100.550.281**	

2) Berdasarkan sisa waktu hingga jatuh tempo:

	2023	2022	
Rupiah			*Rupiah*
Kurang dari 1 bulan	70.186.684	72.572.418	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	25.529.426	15.147.698	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	9.352.135	4.837.970	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	7.361.426	5.539.034	*6 - 12 months*
Total	112.429.671	98.097.120	*Total*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Kurang dari 1 bulan	2.254.257	1.960.597	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	265.355	300.290	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	87.922	81.059	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	410.330	111.215	*6 - 12 months*
Total	3.017.864	2.453.161	*Total*
	115.447.535	**100.550.281**	

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

3) Kisaran nisbah bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun:

	2023	2022	
Rupiah	2,48% - 2,55%	2,51% - 3,23%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,23% - 0,30%	0,22% - 0,27%	*Foreign currency*

4) Deposito berjangka *mudharabah* dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing berjumlah Rp1.369.418 dan Rp944.097 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

38. *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS* *(continued)*

Temporary syirkah funds consists of (continued):

c. Other significant information related to the time deposits for deposits from customers and deposits from other banks (continued):

1) By contract period (continued):

2) By remaining period until maturity date:

Mudharabah time deposits represent third parties' deposits which received a profit sharing return from the Subsidiary's income over utilisation of its fund based on an agreed profit sharing ratio (nisbah) set and arranged in mudharabah muthlaqah agreement.

3) Ranging of the annual profit sharing ratio Mudharabah Time Deposits:

4) Mudharabah time deposits with mudharabah muthlaqah agreement that is pledged as collateral for receivables and financing amounted to Rp1,369,418 and Rp944,097 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

39. KEPENTINGAN NONPENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI / *39. NON-CONTROLLING INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES*

Akun ini merupakan kepentingan nonpengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

This account represents non-controlling interests in net assets of consolidated Subsidiaries are as follows:

	2023	2022	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	18.774.081	16.256.603	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*
PT Bank Mandiri Taspen	3.090.371	2.442.097	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Mandiri Tunas Finance	1.974.533	1.495.576	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT AXA Mandiri Financial Services	1.773.435	1.585.781	*PT AXA Mandiri Financial Services*
PT Mandiri Utama Finance	679.424	460.299	*PT Mandiri Utama Finance*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	349.463	325.364	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
PT Mandiri Sekuritas	626	596	*PT Mandiri Sekuritas*
PT Mandiri Capital Indonesia	245	353	*PT Mandiri Capital Indonesia*
Total	**26.642.178**	**22.566.669**	**Total**

40. EKUITAS / *40. EQUITY*

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor / *a. Authorised, issued and fully paid capital*

Modal dasar, ditempatkan dan disetor Bank Mandiri masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Bank's authorised, issued and fully paid capital as of 31 December 2023 and 2022, respectively, are as follows:

	2023				
	Jumlah lembar Saham/ *Number of shares*	Nilai nominal per lembar saham (jumlah penuh)/ *Nominal value per Share (full amount)*	Total nilai saham (jumlah penuh)/ *Share value (full amount)*	Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership*	
Modal dasar					***Authorised capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	125	125	0,00%	*Dwiwarna Series A Share*
Saham Biasa Seri B	127.999.999.999	125	15.999.999.999.875	100,00%	*Series B Common Shares*
Total modal dasar	**128.000.000.000**		**16.000.000.000.000**	**100,00%**	
Modal ditempatkan dan disetor					***Issued and fully paid capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Dwiwarna Series A Share*
Negara Republik Indonesia	1	125	125	0,00%	*Republic of Indonesia*
Saham Seri B					*Series B Common Shares*
Negara Republik Indonesia	48.533.333.333	125	6.066.666.666.625	52,00%	*Republic of Indonesia*
Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	125	933.333.333.250	8,00%	*Indonesia Investment Authority*
Dewan Komisaris:					*Board of Commissioners:*
Rionald Silaban	2.017.700	125	252.212.500	0,00%	*Rionald Silaban*
Arif Budimanta	1.703.900	125	212.987.500	0,00%	*Arif Budimanta*
Faried Utomo	1.703.900	125	212.987.500	0,00%	*Faried Utomo*
Nawal Nely	1.703.900	125	212.987.500	0,00%	*Nawal Nely*
Muhammad Yusuf Ateh	1.261.100	125	157.637.500	0,00%	*Muhammad Yusuf Ateh*
Direksi:					*Board of Directors:*
Darmawan Junaidi	6.762.300	125	845.287.500	0,01%	*Darmawan Junaidi*
Alexandra Askandar	7.425.200	125	928.150.000	0,01%	*Alexandra Askandar*
Ahmad Siddik Badruddin	8.715.900	125	1.089.487.500	0,01%	*Ahmad Siddik Badruddin*
Agus Dwi Handaya	6.755.100	125	844.387.500	0,01%	*Agus Dwi Handaya*
Riduan	7.000.000	125	875.000.000	0,01%	*Riduan*
Aquarius Rudianto	4.137.300	125	517.162.500	0,00%	*Aquarius Rudianto*
Toni Eko Boy Subari	3.117.500	125	389.687.500	0,00%	*Toni Eko Boy Subari*
Susana Indah K. Indriati	4.438.400	125	554.800.000	0,01%	*Susana Indah K. Indriati*
Rohan Hafas	3.000.500	125	375.062.500	0,00%	*Rohan Hafas*
Sigit Prastowo	6.305.100	125	788.137.500	0,01%	*Sigit Prastowo*
Timothy Utama	3.621.900	125	452.737.500	0,00%	*Timothy Utama*
Eka Fitria	170.000	125	21.250.000	0,00%	*Eka Fitria*
Publik (masing-masing dibawah 5%)	37.263.493.632	125	4.657.936.704.000	39,93%	*Public (less than 5%)*
	93.333.333.332		**11.666.666.666.500**	**100,00%**	

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Modal dasar, ditempatkan dan disetor Bank Mandiri masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

***40. EQUITY** (continued)*

***a. Authorised, issued and fully paid capital** (continued)*

The Bank's authorised, issued and fully paid capital as of 31 December 2023 and 2022, respectively, are as follows (continued):

	2022				
	Jumlah lembar Saham/ *Number of shares*	**Nilai nominal per lembar saham (jumlah penuh)/ *Nominal value per Share (full amount)***	**Total nilai saham (jumlah penuh)/ *Share value (full amount)***	**Persentase kepemilikan saham/ *Percentage of ownership***	
Modal dasar					***Authorised capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%	*Dwiwarna Series A Share*
Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	250	15.999.999.999.750	100,00%	*Series B Common Shares*
Total modal dasar	**64.000.000.000**		**16.000.000.000.000**	**100,00%**	
Modal ditempatkan dan disetor					***Issued and fully paid capital***
Saham Seri A Dwiwarna					*Dwiwarna Series A Share*
Negara Republik Indonesia	1	250	250	0,00%	*Republic of Indonesia*
Saham Seri B					*Series B Common Shares*
Negara Republik Indonesia	24.266.666.666	250	6.066.666.666.500	52,00%	*Republic of Indonesia*
Indonesia Investment Authority	3.733.333.333	250	933.333.333.250	8,00%	*Indonesia Investment Authority*
Dewan Komisaris:					*Board of Commissioners:*
Rionald Silaban	553.200	250	138.300.000	0,00%	*Rionald Silaban*
Arif Budimanta	396.300	250	99.075.000	0,00%	*Arif Budimanta*
Faried Utomo	396.300	250	99.075.000	0,00%	*Faried Utomo*
Nawal Nely	396.300	250	99.075.000	0,00%	*Nawal Nely*
Muhammad Yusuf Ateh	174.900	250	43.725.000	0,00%	*Muhammad Yusuf Ateh*
Direksi:					*Board of Directors:*
Darmawan Junaidi	2.206.100	250	551.525.000	0,01%	*Darmawan Junaidi*
Alexandra Askandar	2.700.000	250	675.000.000	0,01%	*Alexandra Askandar*
Ahmad Siddik Badruddin	3.401.600	250	850.400.000	0,01%	*Ahmad Siddik Badruddin*
Agus Dwi Handaya	2.060.700	250	515.175.000	0,01%	*Agus Dwi Handaya*
Panji Irawan	2.025.700	250	506.425.000	0,01%	*Panji Irawan*
Riduan	1.982.000	250	495.500.000	0,00%	*Riduan*
Aquarius Rudianto	1.112.300	250	278.075.000	0,00%	*Aquarius Rudianto*
Toni Eko Boy Subari	602.400	250	150.600.000	0,00%	*Toni Eko Boy Subari*
Susana Indah K. Indriati	912.300	250	228.075.000	0,00%	*Susana Indah K. Indriati*
Rohan Hafas	543.900	250	135.975.000	0,00%	*Rohan Hafas*
Sigit Prastowo	1.393.400	250	348.350.000	0,00%	*Sigit Prastowo*
Timothy Utama	622.100	250	155.525.000	0,00%	*Timothy Utama*
Publik (masing-masing dibawah 5%)	18.645.187.166	250	4.661.296.791.500	39,95%	*Public (less than 5%)*
	46.666.666.666		**11.666.666.666.500**	**100,00%**	

Per 31 Desember 2018 terdapat perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri, dimana kepemilikan saham pada tahun sebelumnya nihil. Kepemilikan saham tersebut dalam rangka pelaksanaan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Bank atas kinerja untuk tahun buku 2017.

As of 31 December 2018, there was a change of ownership of the stock owned by the Board of Commissioners of Bank Mandiri, where the ownership of shares in the prior year was nil. The share ownership was related to the implementation of FSA regulation No. 45/POJK.03/2015, about the Application of Corporate Governance in Granting Remuneration for Commercial Banks, where member of Directors and Non Independent Board of Commissioners are entitled to variable remuneration in form of the Bank's shares for financial performance of 2017.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 69.839.700 lembar saham dan 21.479.500 lembar saham atau 0,07% dan 0,05% dari jumlah lembar saham modal ditempatkan dan disetor.

Shares owned by the Board of Commissioners and Board of Directors for the period/ended 31 December 2023 and 2022 respectively, amounted to 69,839,700 shares and 21,479,500 shares, or 0.07% and 0.05% from the total number of issued and fully paid-in capital shares.

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Penetapan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp4.000.000 oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal pendirian Bank Mandiri, telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembayaran secara tunai melalui Bank Indonesia sejumlah Rp1.600.004.
2. Penempatan dalam saham yang dicatat sebagai penyertaan saham pada Bank Peserta Penggabungan sejumlah Rp599.999 untuk setiap bank atau jumlah keseluruhannya Rp2.399.996, melalui pengalihan saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada setiap Bank Peserta Penggabungan kepada Bank Mandiri, seperti yang telah disebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Bank Peserta Penggabungan. Berdasarkan perjanjian *inbreng* yang telah diaktakan dengan Akta No. 9 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 2 Oktober 1998, Bank Mandiri dan Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk mengalihkan saham-saham tersebut sebagai pembayaran untuk saham baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

Berdasarkan perubahan anggaran dasar Bank Mandiri yang dituangkan dalam Akta No. 98 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 24 Juli 1999, pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal disetor (modal saham) Bank Mandiri dari Rp4.000.000 menjadi Rp4.251.000 dan jumlah tersebut akan dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penambahan sebesar Rp251.000 merupakan hasil konversi dari tambahan modal disetor menjadi modal saham akibat dari adanya kelebihan obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan dalam Program Rekapitalisasi Pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999.

Berdasarkan keputusan RUPS-LB tanggal 29 Mei 2003 yang dituangkan dalam Akta No. 142 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 29 Mei 2003, pemegang saham Bank Mandiri antara lain menyetujui:

(i) Pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO).
(ii) Perubahan struktur permodalan Bank Mandiri.
(iii) Perubahan anggaran dasar Bank Mandiri.

Sehubungan dengan keputusan perubahan struktur permodalan di atas, modal saham ditempatkan dan disetor Bank Mandiri dinaikkan menjadi Rp10.000.000 serta dilakukan *stock split* saham Bank Mandiri yang semula dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar menjadi Rp500 (nilai penuh) per lembar saham. Dengan dilakukannya *stock split* tersebut, jumlah lembar saham modal dasar Bank Mandiri meningkat dari 16.000.000 lembar saham menjadi 32.000.000.000 lembar saham, sedangkan jumlah lembar saham modal ditempatkan dan disetor meningkat dari 10.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) menjadi 20.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) terdiri dari 1 Saham Seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 Saham Biasa Seri B yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

***40. EQUITY** (continued)*

***a. Authorised, issued and fully paid capital** (continued)*

The determination of issued and fully paid capital amounted to Rp4,000,000 by the Government of the Republic of Indonesia at the date of establishment of Bank Mandiri was carried out as follows:

1. Cash payment through Bank Indonesia amounted to Rp1,600,004.
2. Placements in shares recorded as investments in shares of the Merged Banks amounted to Rp599,999 each or totaling Rp2,399,996, through the transfer of shares of the Government of the Republic of Indonesia in each of the Merged Banks to Bank Mandiri, as resolved during the respective Extraordinary General Shareholders' Meetings of the Merged Banks. Based on the inbreng agreement approved by Notarial Deed No. 9 of Notary Sutjipto, S.H., dated 2 October 1998, Bank Mandiri and the Government of the Republic of Indonesia agreed to transfer those shares as payment for new shares to be issued by Bank Mandiri.

Based on the amendments to the Articles of Association of Bank Mandiri which stated in the Notarial Deed No. 98 of Notary Sutjipto, S.H. dated 24 July 1999, the shareholders resolved to increase the paid-in capital (share capital) of Bank Mandiri from Rp4,000,000 to Rp4,251,000 to be entirely paid by the Government of the Republic of Indonesia. The increase of Rp251,000 was a conversion from additional paid-in capital to share capital as a result of an excess from recapitalisation bonds issued under the First Recapitalisation Program based on Government Regulation No. 52 year 1999.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPS – LB") decision dated 29 May 2003, which was documented in Notarial Deed No. 142 of Notary Sutjipto, S.H., dated 29 May 2003, the shareholders approved these following matters:

(i) Execution of Initial Public Offering (IPO).
(ii) Changes in capital structure of Bank Mandiri.
(iii) Changes in articles of association of Bank Mandiri.

In relation to the shareholders decision to change the capital structure, Bank Mandiri increased its issued and fully paid capital to Rp10,000,000 and stock split from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp500 (full amount) per share. Accordingly, the number of authorised shares increased from 16,000,000 shares to 32,000,000,000 shares, and the number of issued and fully paid shares increased from 10,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) to 20,000,000,000 shares with a nominal value of Rp500 (full amount) which consists of 1 Dwiwarna Series A share and 19,999,999,999 Series B common shares which owned by the Republic of Indonesia.

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Berkaitan dengan perubahan struktur permodalan Bank Mandiri, RUPS-LB juga menyetujui penetapan bagian dari dana rekapitalisasi sebesar Rp168.801.315 sebagai agio saham.

Perubahan struktur permodalan tersebut di atas berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 Mei 2003, dengan catatan Bank Mandiri harus melakukan kuasi-reorganisasi yang ditetapkan dalam RUPS selambat-lambatnya pada penutupan buku tahun 2003.

Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahkan kepada siapapun. Saham Seri A Dwiwarna memberikan hak istimewa kepada Negara Republik Indonesia dimana dalam agenda-agenda tertentu, RUPS hanya dapat memutuskan jika pemegang saham Seri A Dwiwarna hadir dan menyetujui usul agenda dimaksud.

Beberapa agenda RUPS yang wajib dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna agar RUPS dapat memutus adalah agenda RUPS yang terkait dengan:
1. Penambahan modal.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Perubahan anggaran dasar.
4. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
5. Pembubaran dan likuidasi.

Perubahan struktur modal sebagaimana disebutkan di atas telah dicantumkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dituangkan dalam akta notaris Sutjipto, S.H., No. 2 tanggal 1 Juni 2003. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-12783.HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003 dan diumumkan pada tambahan No. 6590 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2003.

Kenaikan modal saham ditempatkan dan disetor Bank Mandiri dari Rp4.251.000 menjadi Rp10.000.000 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengembalian sebagian modal disetor sebesar Rp251.000 kepada Pemerintah sebagai bagian dari kelebihan dana rekapitalisasi yang masih ditahan pada Bank Mandiri sebesar Rp1.412.000 dan meningkatkan modal disetor sebesar Rp1.000.000 dari pengkapitalisasian cadangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Konversi Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), selaku Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP-154/M-MBU/2002 tanggal 29 Oktober 2002.

***40. EQUITY** (continued)*

***a. Authorised, issued and fully paid capital** (continued)*

In relation to the change in capital structure of Bank Mandiri, the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPS – LB") also approved the allocation on part of recapitalisation fund amounted to Rp168,801,315 as share premium.

The changes of capital structure that mentioned above became effective started from 23 May 2003, with the conditional requirement that the Bank should conduct a quasi-reorganisation before the end of 2003 as required in the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The Dwiwarna Series A share represents a share owned by the Republic of Indonesia, which is not transferrable. It provides the Republic of Indonesia with the privileges where General Meeting of Shareholders can make decision only if the Dwiwarna Series A shareholder attend and approve certain agendas.

The agenda of General Meeting of Shareholders where the shareholder of Dwiwarna Series A are mandatory to attend and approve are:

1. Increases in capital.
2. Appointment and termination of the Boards of Directors and Commissioners.
3. Amendment of the Articles of Association.
4. Mergers, acquisitions and takeovers.
5. Dissolution and liquidation.

The changes in the capital structure were based on the Minutes of Meeting regarding the Amendment of the Articles of Association (Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar) of PT Bank Mandiri (Persero) as stated in Notarial Deed of Sutjipto, S.H. No. 2 dated 1 June 2003. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C-12783.HT.01.04.TH.2003 dated 6 June 2003 and announced in Appendix No. 6590 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 8 August 2003.

The increase in issued and fully paid capital of Bank Mandiri from Rp4,251,000 to Rp10,000,000 was made through the following:

1. Partial return of fully paid capital of Rp251,000 to the Government as a part of the return of excess recapitalisation fund of Rp1,412,000 which was retained by Bank Mandiri, and an increase in paid-in capital amounted to Rp1,000,000 from the capitalisation of reserves, based on Government Regulation No. 26 year 2003 dated 29 May 2003, regarding the Conversion of the Investment of the Republic of Indonesia into the Paid-in Capital of PT Bank Mandiri (Persero), and Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises ("BUMN"), as the Bank's shareholders', No. KEP-154/M-MBU/2002 dated 29 October 2002.

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Kenaikan modal saham ditempatkan dan disetor Bank Mandiri dari Rp4.251.000 menjadi Rp10.000.000 dilakukan dengan cara sebagai berikut: (lanjutan)

2. Penambahan modal disetor sebesar Rp5.000.000 yang berasal dari tambahan modal disetor berdasarkan KMK-RI No. 227/202.02/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang "Besarnya Nilai Final dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum".

Program manajemen berbasis saham

Berdasarkan Keputusan RUPS - LB tanggal 29 Mei 2003 sebagaimana tertuang dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 142 tanggal 29 Mei 2003, pemegang saham Bank Mandiri juga menyetujui rencana kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi melalui Program Penjatahan Saham/*Employee Stock Allocation* ("ESA") dan Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen/*Management Stock Option Plan* ("MSOP"). Program ESA terdiri dari program Pemberian Saham Bonus (*Share Plan Bonus*) dan program Penjatahan Saham dengan Diskon (*Share Purchase at Discount*). Sedangkan program MSOP ditujukan untuk Direksi dan pegawai pimpinan pada tingkatan (*grade*) atau kriteria tertentu. Biaya dan diskon atas program ESA tersebut menjadi tanggungan Bank Mandiri yang bebannya bersumber dari cadangan yang telah dibentuk. Pengelolaan dan pelaksanaan program ESA dan MSOP dilakukan oleh Direksi, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pada tanggal 14 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia melepaskan 4.000.000.000 lembar sahamnya, yang mewakili 20,00% kepemilikannya di Bank Mandiri, melalui *Initial Public Offering* ("IPO").

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27/2003 tanggal 2 Juni 2003 yang menyetujui divestasi sampai 30,00% atas kepemilikan Pemerintah di Bank Mandiri dan berdasarkan keputusan Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara No. Kep-05/TKP/01/2004 tanggal 19 Januari 2004, Pemerintah Republik Indonesia melakukan divestasi lanjutan atas 10,00% kepemilikan di Bank Mandiri atau sebanyak 2.000.000.000 lembar saham Biasa Seri B pada tanggal 11 Maret 2004 melalui *private placement*.

Pada saat pelaksanaan IPO tanggal 14 Juli 2003, Bank Mandiri memberikan opsi pembelian saham kepada manajemen melalui program MSOP Tahap 1 sebanyak 378.583.785 opsi dengan harga eksekusi sebesar Rp742,50 (nilai penuh) per lembar saham dan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham. Pemberian opsi saham ini dibukukan pada pos ekuitas - opsi saham dengan nilai wajar opsi saham sebesar Rp69,71 (nilai penuh) per lembar. Opsi yang dieksekusi dari MSOP Tahap 1 adalah sebesar 375.365.957 lembar saham sehingga mengakibatkan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp187.683, penambahan agio saham sebesar Rp117.193.

***40. EQUITY** (continued)*

***a. Authorised, issued and fully paid capital** (continued)*

The increase in issued and fully paid capital of Bank Mandiri from Rp4,251,000 to Rp10,000,000 was made through the following: (continued)

2. Increase in fully paid capital of Rp5,000,000 from the additional paid-in capital based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia ("KMK RI") No. 227/202.02/2003 dated 23 May 2003 regarding "The Final Amount and Implementation of the Government's Rights Arising from the Additional Share of the Government of the Republic of Indonesia in PT Bank Mandiri (Persero) in Relation to the Commercial Banking Recapitalisation Program".

Management stock option plan

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPS - LB") held on 29 May 2003, which was notarised by Notary Sutjipto, S.H., in Notarial Deed No. 142 dated 29 May 2003, the Bank's shareholders also agreed on employee and directors stock ownership plan through an Employee Stock Allocation ("ESA") Program and a Management Stock Option Plan ("MSOP"). The ESA program consists of a Share Plan Bonus and a Share Purchase at Discount program. MSOP is designated for Directors and Senior Management at certain levels and based on certain criteria. All costs and discounts related to the ESA program are recognised by the Bank through allocation of reserves. The management and execution of the ESA and MSOP programs are performed by the Board of Directors, while the supervision is performed by the Board of Commissioners.

On 14 July 2003, the Government of the Republic of Indonesia divested 4,000,000,000 shares representing 20.00% of its ownership in Bank Mandiri through an Initial Public Offering ("IPO").

As a follow up action on the Government of Republic of Indonesia Regulation No. 27/2003 dated 2 June 2003, which approved the divestment of the Government ownership in Bank Mandiri of up to 30.00%, and based on a decision of Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara No. Kep-05/TKP/01/2004 dated 19 January 2004, the Government of the Republic of Indonesia divested an additional 10.00% of ownership interest in Bank Mandiri or 2,000,000,000 shares of Series B common shares on 11 March 2004 through private placement.

On 14 July 2003, the date of the IPO, through MSOP Stage 1, the Bank issued 378,583,785 share options for the management with an exercise price of Rp742.50 (full amount) per share and a nominal value of Rp500 (full amount) per share. The share options are recorded in the Shareholders' Equity account - Share Options at fair value amounted to Rp69.71 (full amount) per share options. MSOP Stage 1 has been exercised in total 375,365,957 shares, thereby increasing the total issued and fully paid capital by Rp187,683, and share premium by Rp117,193.

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Program manajemen berbasis saham (lanjutan)

Selanjutnya pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2005 telah disetujui pemberian MSOP Tahap 2 sebanyak 312.000.000 opsi saham. Harga eksekusi per lembar saham adalah sebesar Rp1.190,50 (nilai penuh) untuk pelaksanaan di tahun pertama dan Rp2.493 (nilai penuh) untuk pelaksanaan di tahun kedua dan di tahun berikutnya. Nilai nominal per lembar saham adalah Rp500 (nilai penuh). Pemberian opsi saham ini dibukukan pada pos ekuitas - opsi saham dengan nilai wajar opsi saham sebesar Rp642,28 (nilai penuh) per lembar. Opsi yang dieksekusi dari MSOP Tahap 2 adalah sebesar 311.713.697 lembar saham sehingga mengakibatkan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp155.857 dan penambahan agio saham sebesar Rp425.233.

RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2006 menyetujui pemberian MSOP Tahap 3 sebanyak 309.416.215 opsi saham.

Harga eksekusi opsi per lembar saham MSOP Tahap 3 adalah sebesar Rp1.495,08 (nilai penuh) dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham. Pemberian opsi saham ini dibukukan pada pos ekuitas - opsi saham dengan nilai wajar opsi saham sebesar Rp593,89 (nilai penuh) per lembar. Opsi yang dieksekusi dari MSOP Tahap 3 adalah sebesar 309.415.088 lembar saham sehingga mengakibatkan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp154.707 dan penambahan agio saham sebesar Rp491.651.

Pada tanggal 27 Desember 2010, Bank telah melakukan pendaftaran pertama kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ("PUT") kepada para pemegang saham Bank dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 2.336.838.591 lembar saham seri B. PUT ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui suratnya tertanggal 29 April 2010. Bank telah menyampaikan pemberitahuan mengenai PUT kepada Bank Indonesia melalui surat tertanggal 17 September 2010. PUT ini juga telah diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 tahun 2010 tertanggal 20 November 2010.

PUT telah mendapat persetujuan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-807/BL/2011 tertanggal 27 Januari 2011, dimana PUT menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2011.

***40. EQUITY** (continued)*

***a. Authorised, issued and fully paid capital** (continued)*

Management stock option plan (continued)

The Annual General Meeting of Shareholders on 16 May 2005 approved MSOP Stage 2 amounted to 312,000,000 share options. The exercise price for each share is Rp1,190.50 (full amount) to be exercised in the first year and Rp2,493 (full amount) to be exercised in the second year and the following year. The nominal value per share is Rp500 (full amount). The Bank recorded MSOP Stage 2 in the shareholders' equity account - Share Options with fair value amounted to Rp642.28 (full amount) per share options. MSOP Stage 2 has been exercised in total of 311,713,697 shares thereby increasing the total issued and fully paid capital by Rp155,857 and share premium by Rp425,233.

The Annual General Meeting of Shareholders on 22 May 2006 approved MSOP Stage 3 amounted to 309,416,215 share options.

The exercise price for each share in the MSOP Stage 3 is Rp1,495.08 (full amount) with nominal value of Rp500 (full amount) per share. The Bank recorded MSOP Stage 3 as part of the shareholders' equity account at fair value amounted to Rp593.89 (full amount) per share option. The total option that has been exercised in MSOP Stage 3 was 309,415,088 shares thereby increasing the total issued and fully paid capital by Rp154,707 and share premium by Rp491,651.

On 27 December 2010, Bank Mandiri submitted a first registration to Financial Services Authority ("FSA") (formerly Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam and LK)) in relation to the Limited Public Offering ("LPO") to the Bank's shareholders in respect to the issuance of Pre-emptive Rights ("HMETD") of 2,336,838,591 series B shares. The Limited Public Offering has been approved by the Board of Commissioners through its letter dated 29 April 2010. The Bank has submitted the notification letter regarding the Limited Public Offering to Bank Indonesia through its letter dated 17 September 2010. The Limited Public Offering has been enacted through the Indonesian Government Regulation No. 75 of 2010 dated 20 November 2010.

LPO has been approved by Bapepam-LK through its letter No. S-807/BL/2011 dated 27 January 2011, and the LPO has become effective after obtaining approval in the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 28 January 2011.

40. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (lanjutan)

Program manajemen berbasis saham (lanjutan)

HMETD sebanyak 2.336.838.591 lembar saham diperdagangkan selama periode 14 Februari 2011 - 21 Februari 2011 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp5.000 (nilai penuh) per lembar saham yang mengakibatkan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.168.420.

b. Tambahan modal disetor/agio saham

Tambahan modal disetor/agio saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp17.643.264 berasal dari Penawaran Umum Terbatas ("PUT"), Program Rekapitalisasi (Catatan 1c) dan penjualan kepemilikan saham Bank Mandiri di PT Usaha Gedung Mandiri ("UGM") dan PT Bumi Daya Plaza ("BDP") serta penggabungan usaha Bank Syariah Mandiri ("BSM"), Bank Rakyat Indonesia Syariah ("BRIS") dan Bank Negara Indonesia Syariah ("BNIS") menjadi Bank Syariah Indonesia ("BSI"). Agio saham sebesar Rp17.535.764 termasuk agio yang berasal dari PUT (Catatan 40a) sebesar Rp10.515.774 sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait PUT sebesar Rp274.078. Penambahan agio saham di tahun 2013 sebesar Rp113.817 di laporan keuangan konsolidasian (Rp273.932 di laporan keuangan Entitas Induk) berasal dari pengalihan kepemilikan saham Bank Mandiri di UGM dan BDP kepada entitas-entitas sepengendali, yaitu selisih antara harga jual dengan nilai tercatat penyertaan di laporan keuangan konsolidasian. Penambahan agio saham sebesar Rp327.072 berasal dari penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS menjadi BSI.

Selisih antara harga jual dengan nilai tercatat penyertaan yang dicatat sebagai agio saham di laporan keuangan induk Bank dan laporan konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp273.932 dan Rp113.817.

Berdasarkan hasil dari uji telaah/*due diligence review* yang dilaksanakan atas nama Pemerintah tanggal 31 Desember 1999 dan Kontrak Manajemen ("IMPA") tanggal 8 April 2000, ditetapkan bahwa terdapat kelebihan rekapitalisasi sebesar Rp4.069.000. Bank telah mengembalikan Rp2.657.000 dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah ke Pemerintah pada tanggal 7 Juli 2000 sesuai dengan kontrak manajemen. Sedangkan atas sisa kelebihan sebesar Rp1.412.000 telah dikembalikan kepada Pemerintah pada tanggal 25 April 2003 sesuai dengan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat tanggal 29 Oktober 2002 dan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-154/M-MBU/2002 tanggal 29 Oktober 2002.

Termasuk di dalam jumlah pengembalian sisa kelebihan dana rekapitalisasi sebesar Rp1.412.000 di atas adalah bagian dari modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp251.000.

***40. EQUITY** (continued)*

***a. Authorised, issued and fully paid capital** (continued)*

Management stock option plan (continued)

The Pre-emptive Rights of 2,336,838,591 shares were traded during the period of 14-21 February 2011 with an exercise price of Rp5,000 (full amount) per share which resulted in an additional of issued and paid-up capital amounted to Rp1,168,420.

b. Additional paid-in capital/share premium

The additional paid-in capital/shares premium as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp17,643,264 from the Limited Public Offering (LPO), the Recapitalization Program (Note 1c) and sale of Bank Mandiri's share ownership in PT Usaha Gedung Mandiri ("UGM") and PT Bumi Daya Plaza ("BDP") as well as the business merger of Bank Syariah Mandiri ("BSM "), Bank Rakyat Indonesia Syariah ("BRIS") and Bank Negara Indonesia Syariah ("BNIS") became Bank Syariah Indonesia ("BSI"). The shares premium amounted to Rp17,535,764 including premium from the LPO (Note 40a) amounted to Rp10,515,774 before deducting the costs related to the LPO amounted to Rp274,078. The additional share premium in 2013 amounted to Rp113,817 in the consolidated financial statements (Rp273,932 in the financial statements of the Parent Entity) came from the transfer of ownership of Bank Mandiri's shares in UGM and BDP to entities under common control, i.e. the difference between the selling price and the carrying amount of the investment in the consolidated financial statements. The additional shares premium of Rp327,072 from the merger of BSM, BRIS and BNIS into BSI.

The difference between selling price and book value of shares recorded as share premium in Parent Entity and consolidated financial statements are amounted to Rp273,932 and Rp113,817, respectively.

Based on the results of a due diligence review conducted on behalf of the Government dated 31 December 1999 and Management Contract ("IMPA") dated 8 April 2000, it was decided that there was an excess on recapitalisation amounted to Rp4,069,000. The Bank has refunded Rp2,657,000 of Government Recapitalisation Bonds to the Government on 7 July 2000 pursuant to the Management Contract. The remaining balance of Rp1,412,000 was refunded to the Government on 25 April 2003 based on approval from the shareholders during its meeting on 29 October 2002 and the Ministry of State-Owned Enterprises Decision Letter No. KEP-154/M-MBU/2002 dated 29 October 2002.

The refund for above excess of recapitalisation amounted to Rp1,412,000 includes a portion of issued and fully paid capital of Rp251,000.

40. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor/agio saham (lanjutan)

Pada tanggal 23 Mei 2003, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan (KMK - RI) No. 227/KMK.02/2003 tanggal 23 Mei 2003 dan kemudian diubah dengan KMK-RI No. 420/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 sebagai ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999 dan No. 97 tahun 1999 mengenai jumlah final tambahan penyertaan modal Negara dalam modal Bank Mandiri.

Hal-hal yang diputuskan dalam KMK - RI ini adalah sebagai berikut:
a. Nilai final kebutuhan rekapitalisasi Bank Mandiri adalah sebesar Rp173.801.315;
b. Terhadap dana rekapitalisasi senilai Rp5.000.000 dikonversi dengan 5.000.000 lembar saham baru yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham;
c. Terhadap sisa dana rekapitalisasi senilai Rp168.801.315 dibukukan sebagai agio pada struktur modal Bank Mandiri.

Dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh Bank, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003 sebesar Rp162.874.901 dieliminasi ke akun tambahan modal disetor/agio.

c. Distribusi laba bersih

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan tanggal 14 Maret 2023 dan 10 Maret 2022, para pemegang saham menyetujui distribusi laba bersih tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021	
Dividen	24.702.382	16.816.893	*Dividends*
Laba ditahan			*Retained earnings*
Belum ditentukan penggunaannya	16.468.255	11.211.262	*Unappropriated*
	41.170.637	28.028.155	
Dividen per lembar saham (nilai penuh)	**529,34**	**360,64**	*Dividend per share (full amount)*

Dividen atas laba bersih tahun 2022 sebesar Rp24.702.382 dibayarkan pada tanggal 12 April 2023 dan dividen atas laba bersih tahun 2021 sebesar Rp16.816.893 dibayarkan pada tanggal 6 April 2022. Pembagian dividen tersebut dibukukan sebagai pengurang saldo laba dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian sesuai dengan persetujuan RUPST.

***40. EQUITY** (continued)*

***b. Additional paid-in capital/share premium** (continued)*

On 23 May 2003, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Decree (KMK-RI) No. 227/KMK.02/2003 dated 23 May 2003, which was amended by KMK-RI No. 420/KMK.02/2003 dated 30 September 2003, which provides further guidance on Government Regulations No. 52 year 1999 and No. 97 year 1999 regarding the final additional Government participation in Bank Mandiri's capital.

The following are the matters decided under the KMK-RI:
a. The final Bank Mandiri recapitalisation amount is Rp173,801,315;
b. The recapitalisation fund of Rp5,000,000 is converted into 5,000,000 new shares issued by Bank Mandiri with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share;
c. The remaining recapitalisation fund amount of Rp168,801,315 is recorded as share premium within the capital structure of Bank Mandiri.

Through quasi-reorganisation, the Bank's accumulated losses as of 30 April 2003 amounted to Rp162,874,901 were eliminated against additional paid-in capital/share premium.

c. Distribution of net income

Based on the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") held on 14 March 2023 and 10 March 2022, the shareholders approved the distribution of the 2022 and 2021 net income as follows:

Dividends from 2022 net income amounted to Rp24,702,382 were paid on 12 April 2023 and dividends from 2021 net income amounted to Rp16,816,893 were paid on 6 April 2022. Distribution of dividends were recorded in the Consolidated Statements of Changes in Equity with approval from RUPST.

40. EKUITAS (lanjutan)

d. Saham treasuri

Bank melakukan pembelian kembali saham Bank yang dipicu oleh perlambatan dan tekanan ekonomi baik secara regional dan nasional yang antara lain disebabkan oleh wabah Covid-19. Selanjutnya, kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG") sebesar 18,46%. Selanjutnya, untuk memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan maka OJK mengeluarkan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank untuk melakukan proses pembelian kembali saham (*buyback*).

Dalam hal pembelian kembali saham, Bank mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013") sebagaimana diubah dengan POJK No. 13 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

Pembelian kembali saham Bank dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Juni 2020 dimana pelaksanaan transaksi pembelian saham dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan periode Pembelian Kembali Saham tersebut, Bank membeli kembali 35.400.000 (angka penuh) lembar saham dengan total nilai perolehan sebesar Rp150.895 yang dicatat sebagai saham treasuri yang merupakan pengurang ekuitas.

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi Bank pada tanggal 17 Juni 2022, per tanggal 31 Desember 2022 Bank sudah tidak memiliki saham treasuri. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 10 Maret 2022 antara lain telah disetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) pada tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) Bank sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham, pada tanggal 15 Juni 2022 Bank telah menyelesaikan seluruh proses pengalihan saham hasil *buyback* tersebut kepada pegawai Bank melalui program ESOP sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham kepada 3.036 pegawai.

***40. EQUITY** (continued)*

d. Treasury stock

The Bank buyback its shares which was triggered by a slowdown and economic pressure both regionally and nationally, among others, was caused by the Covid-19 outbreak. Furthermore, the condition of stock trading on the Indonesia Stock Exchange from the beginning of 2020 to 9 March 2020 experienced significant pressure as indicated by a decrease in the Composite Stock Price Index ("IHSG") of 18.46%. Furthermore, in order to provide an economic stimulus and reduce the impact of a significantly fluctuating market, Financial Service Authority (FSA) issued SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, to ease Issuers or Public Companies to carry out corporate action to buy back shares without violating applicable laws and regulations. This is one of the considerations for the Bank to carry out the buyback process.

For the share buyback, the Bank also refers to FSA Regulation No. 2/POJK.04/2013 regarding the Buyback Shares Issued by Issuers or Public Companies in Market Conditions that Flu ctuate Significantly ("POJK No. 2/POJK.04/2013") as amended by POJK No. 13 Year 2023 regarding Policy In Maintaining Performance And Capital Market Stability In Significantly Fluctuating Market Conditions. FSA Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 regarding Other Conditions as Market Conditions with Significant Fluctuation in the Implementation of Share Buybacks Issued by Issuers or Public Companies ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020").

The buyback of the shares were carried out in stages for a period of 3 (three) months starting from 20 March 2020 to 19 June 2020, where the buyback transactions were carried out through the Indonesia Stock Exchange. Until the period of share buyback, the Bank has bought back 35,400,000 (full amount) shares with a total acquisition value of Rp150,895 which are recorded as treasury shares, which are a deduction of equity.

In accordance with the Bank's Disclosure of Information on 17 June 2022, as of 31 December 2022 the Bank no longer owns treasury shares. Based on the decision of the Bank's Annual General Meeting of Shareholders on 10 March 2022, among others, it has been approved the transfer of shares resulting from the buyback in 2020 which are kept as treasury shares of the Bank in the amount of 35,400,000 (thirty five million four hundred thousand) shares, on 15 June 2022 the Bank has completed the entire process of transferring the shares resulting from the buyback to the Bank's employees through the ESOP program in the amount of 35,400,000 (thirty five million four hundred thousand) shares to 3,036 employees

40. EKUITAS (lanjutan)

e. Pengalihan sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada Indonesia Investment Authority

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi telah ditetapkan penambahan penyertaan modal negara kepada Lembaga Pengelola Investasi (dalam hal ini Indonesia *Investment Authority*). Penambahan penyertaan modal tersebut berasal dari pengalihan sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Bank.

Selanjutnya sesuai dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 23 Desember 2021 tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada dan Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, yang dibuat oleh Fathiah Helmi S.H., pengalihan sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Bank kepada Indonesia *Investment Authority* telah efektif setelah ditandantanganinya Akta tersebut pada tanggal 23 Desember 2021.

Pengalihan sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Bank kepada Indonesia Investment Authority sejumlah 3.733.333.333 lembar saham atau sebesar 8%, sehingga saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Bank menjadi sejumlah 24.266.666.666 lembar saham atau sebesar 52%.

***40. EQUITY** (continued)*

e. Transfer of part of the Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Indonesia Investment Authority

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 111 of 2021 concerning the Addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Capital of the Investment Management Institution, it has been stipulated that the addition of the state's equity participation to the Investment Management Institution (in this case the Indonesia Investment Authority). The additional shares participation comes from the transfer of part of the Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Bank.

Furthermore, according to the Notary Deed No. 32 dated 23 December 2021 regarding the Agreement on the Transfer of Rights to the Shares of the Republic of Indonesia in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to and with the purpose of addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Capital of the Investment Management Institution, made by Fathiah Helmi S.H., the transfer of part of the Series B shares belonging to the Republic of Indonesia in the Bank to the Indonesia Investment Authority has been effective after the signing of the Deed on 23 December 2021.

The transfer of part of the Series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Bank to the Indonesia Investment Authority in the amount of 3,733,333,333 shares or 8%, so that the Series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Bank became 24,266,666,666 shares or 52%.

41. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah adalah sebagai berikut:

41. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

Interest income and sharia income are as follow:

	2023	**2022**	
Pendapatan bunga			*Interest income*
Kredit yang diberikan	84.335.234	69.373.441	*Loans*
Obligasi pemerintah	16.410.277	16.771.870	*Government bonds*
Pendapatan pembiayaan konsumen	6.285.050	4.962.803	*Consumer financing income*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.224.536	1.445.773	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	2.742.203	2.795.951	*Marketable securities*
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	712.280	552.983	*Others receivables - trade transactions*
Marjin	32.979	32.373	*Margin*
Lain-lain	5.062	8.681	*Others*
	113.747.621	**95.943.875**	
Pendapatan syariah			*Sharia income*
Keuntungan *murabahah* dan *istishna* bersih	12.646.821	11.446.687	*Net murabahah and istishna*
Bagi hasil *musyarakah*	5.853.512	4.727.321	*Musyarakah profit sharing*
Ijarah bersih	199.037	122.195	*Net ijarah*
Bagi hasil *mudharabah*	97.479	142.040	*Mudharabah profit sharing*
	18.796.849	**16.438.243**	
	132.544.470	**112.382.118**	

41. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH (lanjutan)

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan adalah pendapatan bunga atas bagian yang tidak mengalami penurunan nilai dari kredit yang mengalami penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp319.605 dan Rp294.592 dan pendapatan bunga dari provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit yang diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.744.344 dan Rp2.921.410.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, termasuk dalam pendapatan bunga dan pendapatan syariah di atas adalah pendapatan dari pihak berelasi terkait transaksi obligasi pemerintah dan SPN masing-masing sebesar Rp16.410.277 dan Rp16.771.870 (Catatan 56).

41. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME *(continued)*

Included in interest income from loans is interest income recognised on the non-impaired portion of the impaired loans for the year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp319,605 and Rp294,592 and fees and commissions income directly attributable to lending activities amortised using effective interest rate method for the year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp2,744,344 and Rp2,921,410, respectively.

As of 31 December 2023 and 2022 included in interest income and sharia income was income from transaction with related parties on government bonds and treasury bills amounted to Rp16,410,277 and Rp16,771,870, respectively (Note 56).

42. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH

Rincian beban bunga dan beban syariah terdiri atas:

42. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE

Interest expense and sharia expense are incurred on the following:

	2023	2022	
Beban bunga			*Interest expense*
Giro	10.601.021	5.517.701	*Demand deposits*
Deposito berjangka	9.480.299	7.130.837	*Time deposits*
Pinjaman yang diterima	4.624.638	2.509.641	*Fund borrowings*
Efek-efek yang diterbitkan	2.484.487	2.320.021	*Debt securities issued*
Tabungan	2.082.251	1.983.441	*Saving deposits*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	1.390.571	983.166	*Securities sold under agreements to repurchase (repo)*
Pinjaman dan efek - efek subordinasi	1.461	1.788	*Subordinated loans and marketable securities*
	30.664.728	**20.446.595**	

	2023	2022	
Beban syariah			*Sharia expense*
Deposito *mudharabah*	4.148.029	2.874.965	*Mudharabah time deposits*
Musytarakah - mudharabah musytarakah	812.767	387.406	*Musytarakah - mudharabah musytarakah*
Tabungan *mudharabah*	466.655	564.411	*Mudharabah saving deposits*
Pembiayaan yang diterima	254.035	12.603	*Fund borrowings*
Sertifikat investasi *mudharabah* antarbank	192.366	132.936	*Interbank Mudharabah Investment Certificates*
Investasi terikat	119.316	59.848	*Restricted investments*
	5.993.168	**4.032.169**	
	36.657.896	**24.478.764**	

42. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH (lanjutan)

Termasuk dalam beban bunga dan beban syariah di atas adalah beban bunga dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi terkait beban bunga atas pinjaman yang diterima untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp80.863 dan Rp31.672 (Catatan 56).

42. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE *(continued)*

Included in interest expense and sharia expense are interest expense from related parties transactions related to interest expense of fund borrowing for the year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp80,863 and Rp31,672, respectively (Note 56).

43. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI

43. FEES AND COMMISIONS

	2023	2022	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayan syariah	4.464.991	3.954.380	*Loans and sharia receivables/financing*
Transaksi *e-channel*	3.891.213	3.821.188	*E-channel transactions*
Transaksi simpanan	3.000.540	2.830.370	*Deposit transactions*
Kartu kredit	2.772.976	2.305.867	*Credit cards*
Pengiriman uang, kliring dan inkaso	1.717.102	1.104.758	*Remittances, clearings and collections*
Transaksi perdagangan	1.570.871	1.464.015	*Trade transactions*
Efek-efek	1.274.341	1.337.244	*Marketable securities*
Penasihat Keuangan	398.818	1.288.663	*Financial advisor*
Kustodian dan wali amanat	277.576	248.109	*Custodian and trustee*
Bancassurance dan reksadana	97.000	171.623	*Bancassurance and mutual funds*
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (*ta'wid*)	32.214	31.530	*Restructuring compensation income (ta'wid)*
Lain-lain	650.768	244.401	*Others*
	20.148.410	**18.802.148**	

Lain-lain terutama terdiri dari pendapatan provisi dan komisi dari asuransi terkait kredit/pembiayaan yang diberikan, *fee cash management*, *fee* notifikasi melalui *short message service* (SMS) kepada nasabah, *fee* jasa pelayanan penyaluran pembayaran pajak, dan *fee redemption* Livin' *point*.

Others mainly consist of fees and commissions from loans/financing insurance, cash management fees, short message service (SMS) notification fees to customers, tax payment distribution service fees, and Livin' point redemption fees.

44. PENDAPATAN DARI KELOMPOK NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI - NETO

44. INCOME FROM FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS CLASSIFICATION - NET

	2023	2022	
Keuntungan atas transaksi derivatif - neto	1.760.204	2.734.125	*Gain from derivatives transactions - net*
Keuntungan/(kerugian) dari penjualan - neto	1.017.536	(137.458)	*Gain/(loss) from sales - net*
Pendapatan bunga	641.205	811.673	*Interest income*
Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar - neto	54.851	86.069	*Unrealised gain/(loss) from incrase/decrease in fair value - net*
Perubahan nilai wajar investasi dari Investasi pemegang polis	(933.091)	1.236.623	*Changes in fair value of policyholders' investment*
Penurunan liabilitas kontrak *unit-link*	933.091	(1.236.623)	*Decrease in unit-link contracts liability*
Total	**3.473.796**	**3.494.409**	***Total***

45. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN / *45. OTHER OPERATING INCOME – OTHERS*

	2023	2022	
Penerimaan kembali atas pokok kredit dan piutang/pembiayaan syariah yang telah dihapusbukukan	11.659.856	7.830.026	*Recoveries from written-off loans and sharia receivables/ financing principal*
Pendapatan administrasi dan komisi lainnya	1.883.199	1.962.664	*Other administration and commission income*
Pendapatan dividen reksadana dan investasi saham	935.681	654.297	*Dividend income from mutual fund and shares investment*
Pendapatan denda	874.039	696.574	*Penalty income*
Penerimaan kembali atas bunga kredit yang telah dihapusbukukan	499.361	221.623	*Recovery from written-off interest from loans*
Pendapatan sewa mesin *Electronic Data Capture* (“EDC”)	384.437	65.094	*Electronic Data Capture (“EDC”) rent income*
Keuntungan dari penyertaan	75.238	221.830	*Investment Income*
Pendapatan bea materai	58.961	60.243	*Stamp duty income*
Safety deposit box	38.231	39.901	*Safety deposit box*
Lain-lain	491.637	231.894	*Others*
Total	**16.900.640**	**11.984.146**	***Total***

46. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *46. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	2023	2022	
(Pembentukan)/pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai atas:			*(Allowance)/reversal for provision of impairment losses on:*
Giro pada bank lain (Catatan 5d)	(11.800)	5.165	*Current accounts with other banks (Note 5d)*
Penempatan pada bank lain (Catatan 6e)	2.418	(1.948)	*Placements with other banks (Note 6e)*
Efek-efek (Catatan 7g)	(132.628)	26.899	*Marketable securities (Note 7g)*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan (Catatan 9d)	91.037	(27.813)	*Other receivables - trade transactions (Note 9d)*
Kredit yang diberikan (Catatan 12A.e, 12B.j)	(9.791.701)	(15.451.121)	*Loans (Note 12A.e, 12B.j)*
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 13d)	(1.277.661)	(708.402)	*Consumer financing receivables (Note 13d)*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan (Catatan 14d)	(7.120)	(32.438)	*Net investment finance leases (Note 14d)*
Tagihan akseptasi (Catatan 15d)	(59.315)	146.934	*Acceptance receivables (Note 15d)*
Penyertaan saham (Catatan 16c)	33.917	(53.658)	*Investments in shares (Note16c)*
Total	**(11.152.853)**	**(16.096.382)**	***Total***

47. PEMBENTUKAN PENYISIHAN LAINNYA DAN KERUGIAN RISIKO OPERASIONAL - NETO / *47. PROVISION FOR OTHER ALLOWANCES AND OPERATIONAL RISK LOSSES - NET*

	2023	2022	
(Pembentukan)/pembalikan penyisihan atau beban atas:			*(Allowance)/reversal provision or expenses of:*
Estimasi kerugian yang timbul dari kasus hukum	20.451	11.353	*Estimated losses arising from legal cases*
Kerugian risiko operasional - klien, produk & praktek bisnis	(149)	(821)	*Losses from operational risk - business activity disruption and system failure*
Kerugian risiko operasional - kerusakan aset fisik	(436)	(109)	*Operational Risk Loss Bucket - Physical Asset Damage*
Denda/sanksi	(1.006)	(502)	*Fines/penalty*
Kerugian risiko operasional - gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem	(2.670)	(3.172)	*Operational Risk Loss - Business Disruption and System Failure*
Kerugian risiko operasional - Manajemen eksekusi, pengiriman & pemrosesan	(10.193)	(41.610)	*Losses from operational risk - Management execution, delivering and processing*
Kerugian risiko operasional - kecurangan eksternal	(22.080)	(44.671)	*Losses from operational risk - external fraud*
Kerugian risiko operasional - kecurangan internal	(52.002)	(15.411)	*Losses from operational risk - internal fraud*
Aset lain-lain (Catatan 20)	153.700	(187.130)	*Other assets (Note 20)*
Total	**85.615**	**(282.073)**	***Total***

48. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN EFEK-EFEK DAN OBLIGASI PEMERINTAH - NETO / *48. GAIN ON SALE OF MARKETABLE SECURITIES AND GOVERNMENT BONDS - NET*

	2023	2022	
Obligasi pemerintah	65.666	643.693	*Government bonds*
Efek-efek	59.629	255.886	*Marketable securities*
Total	**125.295**	**899.579**	***Total***

49. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *49. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES*

	2023	2022	
Gaji, upah, pensiun dan tunjangan pajak	13.197.224	12.374.788	*Salaries, wages, pension and tax allowances*
Bonus dan lainnya	3.911.252	5.295.609	*Bonuses and others*
Tunjangan Hari Raya (THR), cuti dan beban terkait lainnya	2.974.092	2.798.097	*Religious holidays allowance, leave and other related expenses*
Kesejahteraan pegawai	1.861.634	1.932.576	*Employee benefits in kind*
Penyisihan cadangan tantiem	1.097.048	832.292	*Provision for tantiem*
Pembentukan penyisihan cadangan uang penghargaan pegawai	890.059	868.322	*Allowance of provision for post-employment benefits*
Pendidikan dan pelatihan	491.780	540.062	*Training and education*
Total	**24.423.089**	**24.641.746**	***Total***

49. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN (lanjutan)

Jumlah gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan kerja jangka panjang Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah, serta *Senior Executive Vice President* dan *Senior Vice President* masing-masing sebesar Rp2.030.660 dan Rp1.837.516 (Catatan 56) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

49. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES *(continued)*

Total gross salaries and allowances, bonus and tantiem, long-term employment benefits of the Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Risk Oversight Committee, Sharia Supervisory Board and Senior Executive Vice President and Senior Vice President are amounted to Rp2,030,660 and Rp1,837,516 (Note 56) for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively, as follows:

	2023				
	Gaji dan Tunjangan/ *Salaries and allowance*	**Bonus dan Tantiem/ *Bonus and tantiem***	**Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term employment benefits***	**Total**	
Dewan Komisaris	87.448	208.595	7.087	303.130	*The Board of Commissioners*
Direksi	268.315	557.623	32.982	858.920	*Directors*
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	7.229	269	231	7.729	*Audit Committee and Risk Oversight Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2.857	4.005	-	6.862	*Sharia Supervisory Board*
Senior Executive Vice President dan *Senior Vice President*	507.297	319.343	27.379	854.019	*Senior Executive Vice Presidents and Senior Vice President*
Total	**873.146**	**1.089.835**	**67.679**	**2.030.660**	***Total***

	2022				
	Gaji dan Tunjangan/ *Salaries and allowance*	**Bonus dan Tantiem/ *Bonus and tantiem***	**Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term employment benefits***	**Total**	
Dewan Komisaris	81.674	179.241	5.959	266.874	*The Board of Commissioners*
Direksi	236.859	465.350	24.670	726.879	*Directors*
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	7.523	432	22	7.977	*Audit Committee and Risk Oversight Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2.906	3.170	-	6.076	*Sharia Supervisory Board*
Senior Executive Vice President dan *Senior Vice President*	466.432	340.129	23.149	829.710	*Senior Executive Vice Presidents and Senior Vice President*
Total	**795.394**	**988.322**	**53.800**	**1.837.516**	***Total***

50. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *50. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2023	2022	
Jasa profesional	4.722.209	5.144.072	*Professional fees*
Barang/jasa pihak ketiga lainnya	3.338.043	2.967.607	*Goods/services provided by third parties*
Promosi	2.303.064	2.077.000	*Promotion*
Perbaikan dan pemeliharaan	1.863.193	1.776.904	*Repairs and maintenance*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 18a)	1.772.254	1.852.876	*Depreciation of right of use assets (Note 18a)*
Penyusutan aset tetap yang dimiliki (Catatan 18a)	1.640.978	1.565.310	*Depreciation of fixed assets (Note 18a)*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 19)	1.153.670	1.095.451	*Amortisation of intangible assets (Note 19)*
Komunikasi	1.145.675	1.454.794	*Communication*
Keperluan kantor	1.118.673	883.617	*Office supplies*
Sewa	813.808	897.454	*Rent*
Transportasi	673.456	602.830	*Transportations*
Listrik, air dan gas	510.922	527.378	*Electricity, water and gas*
Pajak selain pajak penghasilan	249.826	234.587	*Tax other than income tax*
Perjalanan dinas	242.237	172.226	*Traveling*
Zakat	189.730	141.405	*Zakat*
Premi asuransi	182.542	100.714	*Insurance premium*
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	174.673	52.902	*Social and environmental responsibility*
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 18a)	69.114	64.025	*Interest on lease liability (Note 18a)*
Keamanan	43.110	52.054	*Security*
Program pemerintah	22.103	54.108	*Government program*
Rekrutmen	15.031	15.571	*Recruitment*
Lain-lain	488.583	369.667	*Others*
Total	**22.732.894**	**22.102.552**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban promosi termasuk beban hadiah undian dana pihak ketiga masing-masing sebesar Rp51.116 dan Rp55.423.

For the year ended 31 December 2023 and 2022, promotions expenses include the reward/prize expenses of third party funds amounted to Rp51,116 and Rp55,423, respectively.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") merupakan komitmen berkelanjutan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan kepedulian Bank kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bahwa Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja Bank. Pelaksanaan Program TJSL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yaitu dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya dan dilaksanakan dengan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, realisasi pencapaian TJSL berdasarkan anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan (*on balance sheet*) sebesar Rp174.673 dan Rp52.902 sedangkan realisasi pencapaian TJSL berdasarkan penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (*off-balance sheet*) sebesar RpNihil dan Rp84.728.

Social and environmental responsibility ("TJSL") is an ongoing commitment to contribute to economic development and the Bank's concern for the community. Based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 regarding Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises ("SOE") stated that the SOE's TJSL Program is carried out in a systematic and integrated manner to ensure the implementation, success achievement and management of the impact of the SOE's TJSL Program in accordance with the priorities and/or achievement of the objectives of the SOE's TJSL Program which guided by the Bank's work plan. The implementation of the PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TJSL Program is in the form of support and/or other activities and is carried out with a focus on education, environment, and development of micro and small businesses. Realization of the on balance sheet as of 31 December 2023 and 2022 was Rp174,673 and Rp52,902, respectively, while from the off balance sheet as of 31 December 2023 and 2022 were RpNil and Rp84,728, respectively.

50. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Lain-lain terutama terdiri dari beban penelitian & pengembangan, beban *agency*, beban keanggotaan *depository* bank, beban izin perwakilan luar negeri dan beban representasi.

50. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES *(continued)*

Others is consist of research and development expenses, agency expenses, membership fee depository Bank, overseas representative expenses and representation exprenses.

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, uang duka dan santunan duka, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja pegawai dan Bank serta manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-undang di Bidang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Bank Mandiri.

51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY

Under the Bank's policy, other than salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as religious holiday allowance, medical reimbursements, bereavement money and benefits, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees, incentives based on employee's and the Bank's performance and post-employment benefits in accordance with prevailing Employment Law and Bank Mandiri Collective Labor Agreement.

Dana pensiun

Bank Mandiri memiliki 5 (lima) Dana Pensiun yang berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang terdiri dari 1 (satu) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan 4 (empat) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sebagai berikut:

Pension plan

Bank Mandiri has 5 (five) Pension Funds in the form of Employer Pension Funds (DPPK) consisting of 1 (one) Pension Fund that organizes a Defined Contribution Pension Program (PPIP) and 4 (four) Pension Funds that organizes a Defined Benefit Pension Program (PPMP) as follows:

a. Dana Pensiun Bank Mandiri (Program Pensiun Iuran Pasti)

   Dana Pensiun Bank Mandiri yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP) didirikan pada tanggal 1 Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Direksi Bank Mandiri No. 004/KEP.DIR/1999 tanggal 26 April 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP/300/KM.017/1999 tanggal 14 Juli 1999 dan diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1999.

   Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.DIR/4/2022 tanggal 9 Februari 2022. Penyesuaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala oleh Dana Pensiun Bank Mandiri dan telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-246/NB.11/2022 tanggal 25 April 2022 dan diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 7Juni 2022.

a. Bank Mandiri Pension Fund (Defined Contribution Pension Program)

   Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) or Bank Mandiri Pension Fund (Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM)) which was established on 1 August 1999 based on Board of Directors's resolution No. 004/KEP.DIR/1999 dated 26 April 1999 regarding Pension Plan of Bank Mandiri's pension fund. Regulation established by Bank Mandiri pension fund were approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. KEP/300/KM.017/1999 dated 14 July 1999 and was published in the Additional of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated 3 August 1999.

   The regulations for Pension Funds from Bank Mandiri Pension Funds have been last adjusted based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.DIR/4/2022 dated 9 February 2022. The adjustment was made in the framework of implementing Periodic Pension Benefit Payments by the Bank Mandiri Pension Fund and has received approval from the Financial Services Authority based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-246/NB.11/2022 dated 25 April 2022 and announced in the Additional of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated 7 June 2022.

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

a. Dana Pensiun Bank Mandiri (Program Pensiun Iuran Pasti) (lanjutan)

Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta:
1. Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
2. Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Dana Pensiun Bank Mandiri menginvestasikan beberapa sumber keuangannya antara lain pada *deposito on call* Bank Mandiri. Saldo *deposito on call* tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.050 dan Rp9.200. Tingkat suku bunga atas deposito tersebut adalah sama dengan suku bunga atas deposito berjangka pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membayar iuran pensiun masing-masing sebesar Rp570.809 dan Rp538.691.

b. Dana Pensiun Bank Mandiri (Program Pensiun Manfaat Pasti)

Bank Mandiri memiliki 4 (empat) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP) sebagai berikut:
1. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (Bank Bumi Daya),
2. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua (Bank Dagang Negara),
3. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (Bank Exim) dan
4. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (Bank Pembangunan Indonesia).

Peserta program pensiun manfaat pasti adalah mereka yang berasal dari Bank Peserta Penggabungan dengan masa kerja tiga tahun atau lebih pada saat penggabungan yang terdiri dari pegawai aktif bank, mantan karyawan (karyawan yang berhenti bekerja dan tidak mengalihkan haknya ke dana pensiun lain) dan pensiunan.

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

a. Bank Mandiri Pension Fund (Defined Contribution Pension Program) (continued)

The pension contribution is recorded for each members, which jointly borne by the employer and the members:
1. The member is obliged to contribute 5% (five percent) of basic pension income.

2. The employer is obliged to contribute 10% (ten percent) of basic pension income.

The Bank Mandiri's pension funds invest their financial resources including deposits on call at Bank Mandiri. Balance on deposit on call as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp13,050 and Rp9,200, respectively. The interest rate of the deposits are the same with interest rate for third party time deposits.

For the year ended 31 December 2023 and 2022, Bank has paid pension contribution of Rp570,809 and Rp538,691, respectively.

b. Bank Mandiri Pension Fund (Defined Benefit Pension Program)

Four employer's pension funds provide defined benefits program (DPPK-PPMP), which from the merger of 4 (four) legacy banks, namely:
1. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (Bank Bumi Daya),
2. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua (Bank Dagang Negara),
3. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (Bank Exim) and
4. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (Bank Pembangunan Indonesia),

The members of the pension funds are employees from Participating Bank with working period of three years or more at the merger date which were active employees, ex employees (resigned but did not transfer his/her right to other pension fund) and retired members.

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Dana pensiun (lanjutan)

b. Dana Pensiun Bank Mandiri (Program Pensiun Manfaat Pasti) (lanjutan)

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (DPBM Satu), Dana Pensiun Bank Mandiri Dua (DPBM Dua), Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM Tiga) dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) telah mengalami beberapa kali perubahan, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu ("DPBMS")

Dalam rangka penggabungan PT Bank Bumi Daya (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero), telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 021A/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999 yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-394/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DPB1/001/2023 tanggal 15 Maret 2023. Penyesuaian dilakukan dalam rangka pemberian Manfaat Lain dalam Bentuk Manfaat Tambahan Tahun 2023 kepada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu ini, telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/D.05/2023 tanggal 5 April 2023 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dan diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 2023.

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

***Pension plan** (continued)*

b. Bank Mandiri Pension Fund (Defined Benefit Pension Program) (continued)

The regulations for Pension Funds from Dana Pensiun Bank Mandiri Satu (DPBM Satu), Dana Pensiun Bank Mandiri Dua (DPBM Dua), Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM Tiga) and Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) have been changed several times, in order to comply with the applicable laws and regulations, as follows:

1. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu ("DPBMS")

For the purpose of the merger of PT Bank Bumi Daya (Persero) into PT Bank Mandiri (Persero), a Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) No. 021A/KEP.DIR/1999 dated 31 July 1999 was stipulated, which was approved by the Minister based on Decree No. KEP-394/KM.17/1999 dated 15 November 1999, under the name Dana Pensiun Bank Mandiri Satu.

The Pension Fund Regulations of the Dana Pensiun Bank Mandiri Satu have been adjusted recently by Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Number KEP.DPB1/001/2023 dated 15 March 2023. The amendment was made in order to provide Other Benefits in the form of Additional Benefits year 2023 to Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga and Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

The amendment to the Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Mandiri Satu has been authorized by the Financial Services Authority based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-23/D.05/2023 dated 5 April 2023 regarding the Ratification of the Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Mandiri Satu and has been announced in the Additional to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.36 dated 5 May 2023.

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Dana pensiun (lanjutan)

b. Dana Pensiun Bank Mandiri (Program Pensiun Manfaat Pasti) (lanjutan)

2. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua ("DPBMD")

Dalam rangka penggabungan PT Bank Dagang Negara (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero), telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 021B/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-395/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Dua.

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Dua telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DPB2/001/2023 tanggal 15 Maret 2023. Penyesuaian dilakukan dalam rangka pemberian Manfaat Lain dalam Bentuk Manfaat Tambahan Tahun 2023 kepada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Dua ini, telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.05/2023 tanggal 5 April 2023 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Dua dan diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 2023.

3. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ("DPBMT")

Dalam rangka penggabungan PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero), telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 021C/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-396/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DPB3/001/2023 tanggal 15 Maret 2023. Penyesuaian dilakukan dalam rangka pemberian Manfaat Lain dalam Bentuk Manfaat Tambahan Tahun 2023 kepada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

***Pension plan** (continued)*

b. Bank Mandiri Pension Fund (Defined Benefit Pension Program) (continued)

2. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua ("DPBMD")

For the purpose of the merger of PT Bank Dagang Negara (Persero) into PT Bank Mandiri (Persero), a Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) No. 021B/KEP.DIR/1999 dated 31 July 1999 was stipulated, which was approved by the Minister based on Decree No. KEP-395/KM.17/1999 dated 15 November 1999, under the name Dana Pensiun Bank Mandiri Dua.

The Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Dua have been adjusted recently by Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Number KEP.DPB2/001/2023 dated 15 March 2023. The amendment was made in order to provide Other Benefits in the form of Additional Benefits year 2023 to Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga and Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

This amendment to the Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Dua has been authorized by the Financial Services Authority (OJK) based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-24/D.05/2023 dated 5 April 2023 regarding the Ratification of Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Dua and has been announced in the Additional to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.36 dated 5 May 2023.

3. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ("DPBMT")

For the purpose of the merger of PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) into PT Bank Mandiri (Persero), a Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) No. 021C/KEP.DIR/1999 dated 31 July 1999 was stipulated, which was approved by the Minister based on the Decree No. KEP-396/KM.17/1999 dated 15 November 1999, under the name Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.

The Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga have been adjusted recently by Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Number KEP.DPB3/001/2023 dated 15 March 2023. The amendment was made in order to provide Other Benefits in the form of Additional Benefits year 2023 to Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga and Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Dana pensiun (lanjutan)

b. Dana Pensiun Bank Mandiri (Program Pensiun Manfaat Pasti) (lanjutan)

3. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ("DPBMT") (lanjutan)

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ini, telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/D.05/2023 tanggal 5 April 2023 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 2023.

4. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat ("DPBME")

Dalam rangka penggabungan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero), telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) No. 021D/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-397/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.DPB4/001/2023 tanggal 15 Maret 2023. Penyesuaian dilakukan dalam rangka pemberian Manfaat Lain dalam Bentuk Manfaat Tambahan Tahun 2023 kepada Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat ini, telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/D.05/2023 tanggal 5 April 2023 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dan diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 2023.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas manfaat pensiun untuk Bank saja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang tercantum pada laporan dari Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tanggal 4 Januari 2024 dan 3 Januari 2023 dengan metode *Projected Unit Credit*.

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

***Pension plan** (continued)*

b. Bank Mandiri Pension Fund (Defined Benefit Pension Program) (continued)

***3. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga ("DPBMT")** (continued)*

The amendment to the Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga has been authorized by the Financial Services Authority based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-25/D.05/2023 dated 5 April 2023 regarding the Ratification of the Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga and has been announced in the Additional to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.36 dated 5 May 2023.

4. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat ("DPBME")

For the purpose of the merger of PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) into PT Bank Mandiri (Persero), a Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) No. 021D/KEP.DIR/1999 dated 31 July 1999 was stipulated, which was approved by the Minister based on Decree No. KEP-397/KM.17/1999 dated 15 November 1999, under the name Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

The Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Empat have been adjusted recently by Decree of the Board of Directors of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Number KEP.DPB4/001/2023 dated 15 March 2023. The amendment was made in order to provide Other Benefits in the form of Additional Benefits year 2023 to Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga and Dana Pensiun Bank Mandiri Empat.

The amendment to the Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Empat has been authorized by the Financial Services Authority based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-26/D.05/2023 dated 5 April 2023 regarding the Ratification of the Pension Fund Regulations of Dana Pensiun Bank Mandiri Empat and has been announced in the Additional to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.36 dated 5 May 2023.

The actuarial calculation on pension benefits liability for Bank only as of 31 December 2023 and 31 December 2022 were based on estimated actuarial calculation for the year ended 31 December 2023 and 2022 as stated in report of Enny Diah Awal Actuary Consultant Firm dated 4 January 2024 and 3 January 2023 with method of "Projected Unit Credit".

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan) / *51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY (continued)*

Dana pensiun (lanjutan) / ***Pension plan** (continued)*

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The assumptions used for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	DPBMS	DPBMD	DPBMT	DPBME	
Tingkat diskonto	6,70% (2022: 7,30% per tahun/ *7.30% per annum*)	6,70% (2022: 7,30% per tahun/ *7.30% per annum*)	6,70% (2022: 7,30% per tahun/ *7.30% per annum*)	6,70% (2022: 7,30% per tahun/ *7.30% per annum*)	*Discount rate*
Tingkat pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan	8% (2022: 9,5% per tahun/*per annum)*	8% (2022: 9,5% per tahun/*per annum)*	8% (2022: 9,5% per tahun/*per annum)*	8% (2022: 9,5% per tahun/*per annum)*	*Expected rate of return on pension plan assets*
Masa kerja yang digunakan	Per 31 Juli 1999/ *As of 31 July 1999*	Per 31 Juli 1999/ *As of 31 July 1999*	Per 31 Juli 1999/ *As of 31 July 1999*	Per 31 Juli 1999/ *As of 31 July 1999*	*Working period used*
Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang digunakan	Gaji Pokok x Indeks yang terdaftar pada tanggal 31 Juli 1999 yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2002/ *Basic Salary x Index registered on 31 July 1999, which adjusted on 31 December 2002*	Gaji Pokok + Tunjangan lainnya yang terdaftar pada tanggal 31 Juli 1999 yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2002/ *Basic Salary + Other Benefits registered on 31 July 1999, which adjusted on 31 December 2002*	(Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga) x Tunjangan kemahalan cabang yang terdaftar pada tanggal 31 Juli 1999 yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2002/ *(Basic Salary + Family Allowance) x Expensive allowance for branches registered on 31 July 1999, which adjusted on 31 December 2002*	Gaji Dasar yang terdaftar pada tanggal 31 Juli 1999 yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2002/ *Basic Salary registered on 31 July 1999, which adjusted on 31 December 2002*	*Pensionable salary (PhDP) used*
Tingkat kenaikan PhDP	Nihil/*Nil*	Nihil/*Nil*	Nihil/*Nil*	Nihil/*Nil*	*Expected rates of PhDP increase*
Tabel tingkat kematian	80% UN 2010 *Male*	80% UN 2010 *Male*	80% UN 2010 *Male*	80% UN 2010 *Male*	*Mortality rate table*
Tingkat pengunduran diri	Usia 23 - 29 = 10,00% Usia 30 - UPN = 3,50% turun linear s.d. 0,00%/ *Age 23 - 29 = 10.00% Age 30 - Normal Retirement Age = 3.50% decreasing linearly up to 0.00%*	Usia 23 - 29 = 10,00% Usia 30 - UPN = 3,50% turun linear s.d. 0,00%/ *Age 23 - 29 = 10.00% Age 30 - Normal Retirement Age = 3.50% decreasing linearly up to 0.00%*	Usia 23 - 29 = 10,00% Usia 30 - UPN = 3,50% turun linear s.d. 0,00%/ Age 23 - 29 = 10.00% *Age 30 - Normal Retirement Age = 3.50% decreasing linearly up to 0.00%*	Usia 23 - 29 = 10,00% Usia 30 - UPN = 3,50% turun linear s.d. 0,00%/ *Age 23 - 29 = 10.00% Age 30 - Normal Retirement Age = 3.50% decreasing linearly up to 0.00%*	*Turnover rate*
Tingkat kecacatan	10,00% dari tingkat mortalita/ *10.00% of mortality rate*	10,00% dari tingkat mortalita/ *10.00% of mortality rate*	10,00% dari tingkat mortalita/ *10.00% of mortality rate*	10,00% dari tingkat mortalita/ *10.00% of mortality rate*	*Disability rate*
Metode aktuaria	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Actuarial method*
Usia pensiun normal ("UPN")	48 tahun sampai dengan 56 tahun disesuaikan berdasarkan strata/ *48 years old to 56 years depending on the Grades*	56 tahun untuk semua strata/ *56 years old for all Grades*	56 tahun untuk semua strata/ *56 years old for all Grades*	56 tahun untuk semua strata/ *56 years old for all Grades*	*Normal retirement age ("UPN")*
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	Nihil/*Nil*	Nihil/*Nil*	Nihil/*Nil*	2,00% per tahun/*per year*	*Expected rate of pension benefit increase*
Tarif pajak rata-rata	Tarif pajak progresif berdasarkan UU RI No.7 tahun 2021/ *Progressive tax rate based on UU RI No.7* (2022: 3,00% dari imbalan/*of benefit)*	Tarif pajak progresif berdasarkan UU RI No.7 tahun 2021/ *Progressive tax rate based on UU RI No.7* (2022: 3,00% dari imbalan/*of benefit)*	Tarif pajak progresif berdasarkan UU RI No.7 tahun 2021/ *Progressive tax rate based on UU RI No.7* (2022: 3,00% dari imbalan/*of benefit)*	Tarif pajak progresif berdasarkan UU RI No.7 tahun 2021/ *Progressive tax rate based on UU RI No.7* (2022: 3,00% dari imbalan/*of benefit)*	*Average tax rates*

Estimasi nilai kini liabilitas manfaat pensiun dan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The present value of the pension benefit obligations and net fair value of plan assets as of 31 December 2023 are as follows:

	2023				
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	
Nilai kini liabilitas manfaat pensiun	(1.252.727)	(1.383.448)	(570.853)	(439.812)	*Present value of the pension benefit obligation*
Nilai wajar aset program	1.295.271	1.404.869	583.862	586.699	*Fair value of plan assets*
Funded status	42.544	21.421	13.009	146.887	*Funded Status*
Batas aset *(asset ceiling)**)	(42.544)	(21.421)	(13.009)	(146.887)	*Asset ceiling**)
Aset program manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian**)**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Pension plan program assets recognised in consolidated statement of financial position*** **)

*) Tidak terdapat akumulasi kerugian aktuarial bersih dan biaya jasa lalu yang belum diakui serta tidak terdapat nilai kini dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa depan.

**) Tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian karena ketentuan yang disyaratkan dalam PSAK 24 mengenai "Imbalan Kerja" tidak terpenuhi.

**) There are no unrealised accumulated actuarial loss-net nor unrealised past service cost and there are no present value of available future refunds or reductions of future contributions.*

***) There are no plan assets recognised in the consolidated statement of financial position because the requirements under SFAS No. 24 regarding "Employee Benefits" are not fulfilled.*

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan) / *51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY (continued)*

Dana pensiun (lanjutan) / ***Pension plan** (continued)*

Estimasi nilai kini liabilitas manfaat pensiun dan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The present value of the pension benefit obligations and net fair value of plan assets as of 31 December 2022 are as follows:

	2022				
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	
Nilai kini liabilitas manfaat pensiun	(1.321.307)	(1.453.642)	(600.389)	(466.605)	*Present value of the pension benefit obligation*
Nilai wajar aset program	1.420.106	1.465.542	626.880	608.820	*Fair value of plan assets*
Funded status	98.799	11.900	26.491	142.215	*Funded Status*
Batas aset *(asset ceiling)**)	(98.799)	(11.900)	(26.491)	(142.215)	*Asset ceiling*[*)]
Aset program manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian)**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Pension plan program assets recognised in consolidated statement of financial position*** [**)]

*) Tidak terdapat akumulasi kerugian aktuarial bersih dan biaya jasa lalu yang belum diakui serta tidak terdapat nilai kini dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa depan.

**) Tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian karena ketentuan yang disyaratkan dalam PSAK 24 mengenai "Imbalan Kerja" tidak terpenuhi.

*) *There are no unrealised accumulated actuarial loss-net nor unrealised past service cost and there are no present value of available future refunds or reductions of future contributions.*

**) *There are no plan assets recognised in the consolidated statement of financial position because the requirements under SFAS No. 24 regarding "Employee Benefits" are not fulfilled.*

Komposisi aset program dari masing-masing dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

The composition of plan assets from Pension Fund for the year ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023				
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	
Deposito	5%	5%	1%	16%	*Time deposit*
Obligasi	34%	39%	11%	17%	*Bonds*
Penempatan langsung	8%	23%	35%	3%	*Direct placement*
Tanah dan bangunan	28%	4%	31%	0%	*Land and building*
Saham	1%	1%	0%	0%	*Shares*
Surat Berharga Negara	24%	28%	22%	63%	*Treasury bills*
Lain-lain	0%	0%	0%	1%	*Others*
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	***Total***

	2022				
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	
Deposito	8%	6%	2%	10%	*Time deposit*
Obligasi	35%	41%	13%	22%	*Bonds*
Penempatan langsung	8%	20%	31%	3%	*Direct placement*
Tanah dan bangunan	26%	4%	33%	6%	*Land and building*
Saham	2%	2%	0%	0%	*Shares*
Surat Berharga Negara	21%	26%	21%	59%	*Treasury bills*
Lain-lain	0%	1%	0%	0%	*Others*
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	***Total***

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Dana pensiun (lanjutan)

Undang-undang di Bidang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan akuntansi imbalan kerja PSAK No. 24 dengan mengakui cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai (*employee service entitlements*). Bank Mandiri mengakui cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai berdasarkan Undang-undang di Bidang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sejumlah Rp3.469.705 dan Rp3.184.090 (termasuk Rp8.240 yang merupakan pesangon atas pegawai yang sudah berhenti tetapi belum dibayarkan dan telah dikeluarkan dari perhitungan aktuarial) berdasarkan perkiraan biaya uang penghargaan pegawai sebagaimana tercantum dalam laporan aktuaria independen (Catatan 34).

Penyisihan atas tunjangan masa kerja pegawai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan perhitungan hak masa kerja pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan aktuaria independen Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tanggal 4 Januari 2024 dan 3 Januari 2023. Asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

a. Tingkat diskonto: 6,80% (2022: 7,30%) per tahun.
b. Tingkat kenaikan gaji: 8,00%.
c. Tabel tingkat kematian yang digunakan Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019.
d. Tingkat pengunduran diri: Usia 23 - 29 = 10,00% Usia 30 - UPN = 3,50% turun linear s.d. 0,00%.
e. Metode aktuaria adalah *projected unit credit method*.
f. Usia pensiun normal berkisar antara 36 tahun sampai dengan 56 tahun disesuaikan berdasarkan strata.
g. Tingkat kecacatan 10,00% dari kemungkinan orang meninggal pada masing-masing usia.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan berdasarkan laporan aktuaria independen sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

***Pension plan** (continued)*

Labor Law and Bank Mandiri Collective Labor Agreement

Bank Mandiri has implemented an accounting policy for employment benefits SFAS No. 24 to recognise provision for employee service entitlements. Bank Mandiri recognizes provisions for employee long service benefits based on the Employment Law and and Bank Mandiri Collective Labor Agreements for the year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp3,469,705 and Rp3,184,090 (including compensation benefits of Rp8,240 for resigned employees which have not yet been paid and excluded from actuarial calculation), respectively, based on the estimated post employment benefit in the independent actuarial reports (Note 34).

Provision for employee service entitlements as of 31 December 2023 and 2022 are estimated using the employees service entitlements calculation for the year ended 31 December 2023 and 2022 as included in the independent actuarial report of Enny Diah Awal Actuary Consultant Firm dated 4 January 2024 and 3 January 2023, respectively. The assumptions used by the actuary are as follows:

a. Discount rate: 6.80% (2022: 7.30%) per annum.
b. Salary increase rate: 8.00%.
c. Mortality rate table used is Indonesia Mortality 2019.
d. Turnover rate: Age 23 - 29 = 10.00% Age 30 - Normal Retirement Age = 3.50% decreasing linearly up to 0.00%.
e. Actuarial method is projected unit credit method.
f. Normal retirement age between 36 to 56 years according to the grades.
g. Disability rate is 10.00% of death probability at each age.

The amounts recognised in the statement of financial position are determined based on independent actuarial report as follows (Bank Mandiri only):

	2023	2022	
Cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai yang diakui di laporan posisi keuangan	2.066.274	1.879.403	*Provision for post employment benefits presented in statement of financial position*

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Dana pensiun (lanjutan)

Undang-undang di Bidang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Bank Mandiri (lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

***Pension plan** (continued)*

***Labor Law and Bank Mandiri Collective Labor Agreement** (continued)*

The movement in present value of obligation over the year is as follows (Bank Mandiri only):

	2023	2022	
Nilai kini kewajiban pada awal tahun	1.879.403	1.920.311	*Beginning balance of present value of obligation*
Biaya jasa kini	198.515	200.823	*Current service cost*
Biaya pesangon	10.138	33.660	*Severance payment*
Biaya bunga	133.304	139.120	*Interest fee*
Biaya jasa lalu	-	1.603	*Past service cost*
Pembayaran imbalan pasca-kerja	(106.625)	(130.766)	*Benefit paid*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(48.461)	(285.348)	*Actuarial gain*
Nilai kini kewajiban pada akhir tahun	**2.066.274**	**1.879.403**	***Ending balance of present value of obligation***

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan laporan aktuaria independen adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

The amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income based on independent actuarial report are as follows (Bank Mandiri only):

Laba Rugi / ***Profit or loss***

	2023	2022	
Biaya jasa kini	208.653	234.483	*Current service cost*
Biaya bunga	133.304	139.120	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	-	1.603	*Past service cost*
Biaya uang penghargaan pegawai	**341.957**	**375.206**	***Cost of pension benefits***

Penghasilan Komprehensif Lain / ***Other Comprehensive Income***

	2023	2022	
Asumsi keuangan (perubahan asumsi)	91.329	41.455	*Financial assumptions (change in assumptions)*
Penyesuaian pengalaman (demografi dan keuangan)	(139.790)	(326.803)	*Experience adjustment (demographics and finances)*
Keuntungan aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	**(48.461)**	**(285.348)**	***Actuarial gains recognized in other comprehensive income***

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan) / *51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY (continued)*

Dana pensiun (lanjutan) / ***Pension plan** (continued)*

Undang-undang di Bidang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Bank Mandiri (lanjutan) / ***Labor Law and Bank Mandiri Collective Labor Agreement** (continued)*

Rekonsiliasi cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai adalah sebagai berikut: / *Reconciliations of provision for post employment benefits are as follows:*

	2023	2022	
Bank Mandiri			***Bank Mandiri***
Cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai awal tahun	1.879.403	1.920.311	*Beginning balance of provision for post employment benefits*
Biaya selama tahun berjalan	341.957	375.206	*Expenses during the year*
Pembayaran manfaat	(106.625)	(130.766)	*Payments of benefits*
Keuntungan aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(48.461)	(285.348)	*Recognition of actuarial gain in other comprehensive income*
Cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai akhir tahun (Bank Mandiri saja)	**2.066.274**	**1.879.403**	***Ending balance of provision for post employment benefits (Bank Mandiri only)***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai	**1.395.191**	**1.296.447**	***Provision for post employment benefits***
Total cadangan atas tunjangan masa kerja pegawai (Catatan 34)	**3.461.465*)**	**3.175.850*)**	***Total provision for post employment benefits (Note 34)***

*) Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah tersebut tidak termasuk pesangon atas pegawai yang telah berhenti tetapi belum dibayarkan sebesar Rp8.240 yang telah dikeluarkan dari perhitungan aktuarial.

*) *As of 31 December 2023 and 2022, the amount does not include unpaid severance for resigned employees which have not yet been paid amounted to Rp8,240, which was excluded from actuarial calculation.*

Nilai kini liabilitas yang didanai, nilai wajar aset program dan surplus pada program untuk lima tahun terakhir yaitu (Bank Mandiri saja): / *The present value of funded benefit obligations, fair value of plan assets and the surplus on the program for the last five years, which are (Bank Mandiri only):*

	31 Desember/*December*					
	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.066.274	1.879.403	1.920.311	2.811.930	2.984.609	*Present value of defined benefit obligations*
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Defisit program	2.066.274	1.879.403	1.920.311	2.811.930	2.984.609	*Deficit in the plan*
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	139.790	114.748	309.589	228.319	330.750	*Experience adjustments on plan liabilities*
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	-	-	-	-	*Experience adjustments on asset program*

Apresiasi Pensiun / ***Pension Appreciation***

Bank Mandiri memberikan program apresiasi pensiun kepada pegawai yang memasuki usia pensiun normal (56 tahun). Program ini berlaku bagi pegawai yang telah memasuki masa kerja 10 tahun. Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas program apresiasi pensiun per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria sebesar Rp83.508 dan Rp67.151 (Catatan 34). / *Bank Mandiri provides pension appreciation programs to employees who enter normal retirement age (age 56). This program is eligible for employees who have entered their ten years of service period. The present value for provision of pension appreciation program as of 31 December 2023 and 2022 based on an actuarial calculation amounted to Rp83,508 and Rp67,151, respectively (Note 34).*

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Apresiasi Pensiun (lanjutan)

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat diskonto: 6,90% (2022: 7,30%)
b. Harga emas: Rp1.120.000 (2022: Rp1.012.000) (nilai penuh)
c. Tingkat kenaikan harga emas: 10,00% (2022: 8,00%)
d. Tabel tingkat kematian yang digunakan Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019
e. Tingkat kecacatan 10% dari kemungkinan orang meninggal pada masing-masing usia
f. Tingkat pengunduran diri: Usia 23 - 29 = 10,00% Usia 30 - UPN = 3,50% turun linear s.d. 0,00%.
g. Usia pensiun normal yaitu ketika pekerja mencapai usia 56 tahun
h. Metode aktuaria adalah *projected unit credit method*.

Mutasi nilai kini kewajiban pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

***Pension Appreciation** (continued)*

The assumptions used for the year ending 31 December 2023 and 2022 are as follows:

a. Discount rate: 6.90% (2022: 7.30%).
b. Gold price: Rp1,120,000 (2022: Rp1,012,000) (full amount).
c. Increment rate of gold price: 10.00% (2022: 8.00%).
d. Mortality rate table used is Indonesia Mortality 2019.
e. Disability rate is 10% of death probability at each age.
f. Turnover rate: Age 23 - 29 = 10.00% Age 30 - Normal Retirement Age = 3.50% decreasing linearly up to 0.00%.
g. Normal retirement age is until age of 56 years.
h. Actuarial method used is projected unit credit method.

The movement in present value of obligation over the year is as follows (Bank Mandiri only):

	2023	2022	
Nilai kini kewajiban pada awal tahun	67.151	62.781	*Beginning balance of present value of obligation*
Biaya selama tahun berjalan	14.471	11.261	*Expenses during the year*
Pembayaran manfaat	(5.545)	(5.140)	*Benefit paid*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	7.431	(1.751)	*Actuarial (gain)/losses through other comprehensive income*
Nilai kini kewajiban pada akhir tahun (Catatan 34)	**83.508**	**67.151**	***Ending balance of present value of obligation (Note 34)***

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan laporan aktuaria independen adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja):

The amounts recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income based on independent actuarial report are as follows (Bank Mandiri only):

Laba Rugi / ***Profit or Loss***

	2023	2022	
Biaya jasa kini	9.771	6.745	*Current service cost*
Biaya bunga	4.700	4.516	*Interest cost*
Biaya apresiasi pensiun	**14.471**	**11.261**	***Cost of pension appreciation***

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan) / *51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY (continued)*

Penghasilan Komprehensif Lain / ***Other Comprehensive Income***

	2023	2022	
Asumsi keuangan (perubahan asumsi)	9.620	(866)	*Financial assumptions (change in assumptions)*
Penyesuaian pengalaman	(2.189)	(885)	*Experience adjustment*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	**7.431**	**(1.751)**	***Actuarial (gains)/losses recognised in other comprehensive Income***

Rekonsiliasi PVDBO (Bank Mandiri saja): / *Reconciliation of PVDBO (Bank Mandiri only):*

	2023						
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	**UUK TK dan/*and* PKB BMRI**	**Apresiasi Pensiun/ *Pension appreciation***	
PVDBO pada awal tahun	1.321.307	1.453.643	600.389	466.605	1.879.403	67.151	*Beginning balances of PVDBO*
Biaya jasa kini	-	-	-	-	198.515	9.771	*Current service cost*
Biaya bunga atas PVDBO	90.056	99.689	41.260	32.005	133.304	4.700	*Interest cost of PVDBO*
Biaya jasa lalu	-		-	-	-	-	*Past service cost*
Biaya pesangon	-		-	-	10.138	-	*Severance pay*
Pembayaran imbalan dari aset program	(175.312)	(176.085)	(70.365)	(56.355)	(106.625)	(5.545)	*Benefit payments from plan assets*
(**Keuntungan)/kerugian aktuarial dari PVDBO**:							***Actuarial (gain)/losses from PVDBO:***
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi ekonomis	44.285	51.437	21.085	18.707	91.329	9.620	*(Gain)/losses on change of assumption in economic*
(Keuntungan)/Kerugian atas penyesuaian pengalaman (*experience adjustment)*	(27.609)	(45.236)	(21.516)	(21.150)	(139.790)	(2.189)	*(Gain)/losses on experience adjustment*
PVDBO pada akhir tahun	**1.252.727**	**1.383.448**	**570.853**	**439.812**	**2.066.274**	**83.508**	***Ending balances of PVDBO***

	2022						
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	**UUK TK dan/*and* PKB BMRI**	**Apresiasi Pensiun/ *Pension appreciation***	
PVDBO pada awal tahun	1.391.911	1.555.396	648.544	483.878	1.920.311	62.781	*Beginning balances of PVDBO*
Biaya jasa kini	-	-	-	-	200.823	6.745	*Current service cost*
Biaya bunga atas PVDBO	88.495	100.012	41.755	30.770	139.120	4.516	*Interest cost of PVDBO*
Biaya jasa lalu	-	-	-	-	1.603	-	*Past service cost*
Biaya pesangon	-	-	-	-	33.660	-	*Severance pay*
Pembayaran imbalan dari aset program	(181.026)	(169.254)	(68.983)	(62.751)	(130.766)	(5.140)	*Benefit payments from plan assets*
(**Keuntungan)/kerugian aktuarial dari PVDBO**:							***Actuarial (gain)/losses from PVDBO:***
(Keuntungan)/kerugian atas perubahan asumsi ekonomis	(35.997)	(44.465)	(20.065)	(12.007)	41.455	(866)	*(Gain)/losses on change of assumption in economic*
(Keuntungan)/Kerugian atas penyesuaian pengalaman (*experience adjustment)*	57.924	11.954	(862)	26.715	(326.803)	(885)	*(Gain)/losses on experience adjustment*
PVDBO pada akhir tahun	**1.321.307**	**1.453.643**	**600.389**	**466.605**	**1.879.403**	**67.151**	***Ending balances of PVDBO***

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan) / *51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY (continued)*

Rekonsiliasi atas aset program (Bank Mandiri saja): / *Reconciliation of plan assets (Bank Mandiri only):*

	2023				
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	1.420.106	1.465.542	626.880	608.820	*Beginning fair value of plan assets*
Pembayaran imbalan dari aset program	(175.312)	(176.085)	(70.365)	(56.355)	*Benefit payments from plan assets*
Pendapatan bunga atas aset program	97.269	100.557	43.194	42.387	*Interest income in plan assets*
Hasil aset program (tidak termasuk pendapatan bunga)	(46.792)	14.855	(15.847)	(8.153)	*Result of plan assets (exclude interest income)*
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	**1.295.271**	**1.404.869**	**583.862**	**586.699**	***Ending fair value plan assets***

	2022				
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	1.530.656	1.592.830	653.055	654.604	*Beginning fair value of plan assets*
Pembayaran imbalan dari aset program	(181.026)	(169.254)	(68.983)	(62.751)	*Benefit payments from plan assets*
Pendapatan bunga atas aset program	97.929	102.558	42.062	42.379	*Interest income in plan assets*
Hasil aset program (tidak termasuk pendapatan bunga)	(27.453)	(60.592)	746	(25.412)	*Result of plan assets (exclude interest income)*
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	**1.420.106**	**1.465.542**	**626.880**	**608.820**	***Ending fair value plan assets***

Mutasi penghasilan komprehensif lainnya: / *Movements in other comprehensive income:*

Mutasi penghasilan komprehensif lainnya untuk Bank Mandiri saja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: / *Movements in other comprehensive income for the Bank Mandiri only for the year ended 31 December 2023 and 2022 as follows:*

	2023						
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	**UUK TK dan/*and* PKB BMRI**	**Apresiasi Pensiun/ *Pension appreciation***	
Akumulasi keuntungan aktuarial awal tahun	-	-	-	-	1.821.130	4.592	*Accumulated of actuarial gains on beginning year*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial tahun berjalan	-	-	-	-	48.461	(7.431)	*Actuarial gain/(loss) of the current year*
Akumulasi keuntungan/(kerugian) aktuarial akhir tahun	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.869.591**	**(2.839)**	***Accumulated actuarial gains/(loss) on ending year***

	2022						
	DPBMS	**DPBMD**	**DPBMT**	**DPBME**	**UUK TK dan/*and* PKB BMRI**	**Apresiasi Pensiun/ *Pension appreciation***	
Akumulasi keuntungan aktuarial awal tahun	-	-	-	-	1.535.782	2.841	*Accumulated of actuarial gains on beginning year*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial tahun berjalan	-	-	-	-	285.348	1.751	*Actuarial gain/(loss) of the current year*
Akumulasi keuntungan/(kerugian) aktuarial akhir tahun	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.821.130**	**4.592**	***Accumulated actuarial gains/(loss) on ending year***

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan)

Jatuh tempo dari manfaat pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut untuk UUK No. 13/2003:

***51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY** (continued)*

Employee benefits liabilities maturing on 31 December 2023 and 2022 related to UUK No. 13/2003 are as follows:

	2023	**2022**	
Tahun ke-1	182.474	158.350	*Year 1*
Tahun ke-2	211.216	189.223	*Year 2*
Tahun ke-3	293.287	246.688	*Year 3*
Tahun ke-4	332.295	331.017	*Year 4*
Tahun ke-5	380.269	380.023	*Year 5*
Tahun ke-6 dan seterusnya	9.439.553	8.074.873	*Year 6 and others*
Total	**10.839.094**	**9.380.174**	***Total***

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti adalah 7,15 dan 10,42 tahun, dan kewajiban iuran pasti adalah 11,33 dan 15,57 tahun per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The average duration of the defined benefit obligation is 7.15 and 10.42 years and the defined contribution obligation is 11.33 and 15.57 years as of 31 December 2023 and 2022, respectively.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas manfaat pensiun untuk Bank saja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 didasarkan atas estimasi perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang tercantum pada laporan dari Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tanggal 4 Januari 2024 dan 3 Januari 2023 dengan metode *Projected Unit Credit.*

Actuary's calculation of employee pension benefits for Bank only as of 31 December 2023 and 2022 were based on estimated actuarial calculation for the year ended 31 December 2023 and 2022, that listed in the report from the Enny Diah Awal Actuary Consultant Firm dated 4 January 2024 and 3 January 2023 using the Projected Unit Credit method.

Penyisihan atas tunjangan masa kerja pegawai pada tanggal 31 Desember 2023 and 2022 Entitas Anak telah dihitung oleh aktuaria independen sebagaimana tercantum dalam laporan aktuaria independen sebagai berikut:

Provision for employee service entitlements of Subsidiaries as of 31 December 2023 and 2022 were calculated by an independent actuary as included in the independent actuarial report as follows:

Nama Entitas Anak/ ***Name of Subsidiaries***	**Aktuaria independen/** ***Independent actuary***	**2023**	***2022***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mouritz/ *Steven & Mouritz Actuarial Consultant Office*	15 Desember/ *December* 2023	9 Januari/ *January* 2023
PT Mandiri Sekuritas	Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mouritz/ *Steven & Mouritz Actuarial Consultant Office*	3 Januari/ *January* 2024	30 Desember/ *December* 2022
PT Bank Mandiri Taspen	Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Sutama/ *Nandi and Sutama Actuarial Consultant Office*	19 Januari/ *January* 2024	6 Januari/ *January* 2023
PT Mandiri Tunas Finance	Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits/ *Steven & Mouritz Actuarial Consultant Office*	2 Januari/ *January* 2024	2 Januari/ *January* 2023
PT AXA Mandiri Financial Services	Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits/ *Steven & Mouritz Actuarial Consultant Office*	5 Januari/ *January* 2024	11 Januari/ *January* 2023
PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia	Kantor Konsultan Aktuaria Nurichwan/ *Nurichwan Actuarial Consulting Office*	3 Januari/ *January* 2024	2 Januari/ *January* 2023
PT Mandiri Utama Finance	Kantor Konsultan Aktuaria Bambang Sudrajad/ *Bambang Sudrajad Actuarial Consultant Office*	15 Januari/ *January* 2024	31 Desember/ *December* 2022

51. DANA PENSIUN DAN PESANGON (lanjutan) / *51. PENSION PLAN AND SEVERANCE PAY (continued)*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut (Bank Mandiri saja) (tidak diaudit):

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in actuarial assumptions are as follows (Bank Mandiri only) (unaudited):

	2023	2022	
Perubahan asumsi:			*Changes of assumptions:*
Kenaikan 1% tingkat diskonto	(1.934.239)	(1.714.955)	*1% increase in discount rate*
Penurunan 1% tingkat diskonto	2.215.459	2.112.449	*1% decrease in discount rate*

52. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN - NETO / *52. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS - NET*

	2023	2022	
Premi asuransi untuk program penjaminan dana nasabah	2.878.304	2.677.069	*Insurance premiums on third party funds guarantee program*
Beban provisi dan komisi	1.091.973	973.805	*Fees and commissions expenses*
Iuran regulator	958.286	861.434	*Regulator fee*
Beban terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	773.748	492.891	*Fees related to credit card and ATM transaction*
Kompensasi tenaga pemasaran asuransi	304.118	312.418	*Insurance marketing personnel compensation*
Fee bancassurance	145.369	187.065	*Bancassurance fee*
Komisi asuransi kelompok	68.423	74.634	*Group insurance commisions*
Beban keanggotaan	57.411	53.149	*Membership fee*
Beban transaksi RTGS, *remittance* dan kliring	57.392	47.122	*Fees from RTGS, remittance and clearing transactions*
Kerugian penurunan nilai aset *ijarah*	13.389	111.239	*Impairment loss on ijarah asset*
Beban potongan *margin murabahah*	-	22.056	*Murabahah margin deduction expense*
Lain-lain	363.095	702.878	*Others*
	6.711.508	**6.515.760**	

Lain-lain terutama terdiri dari beban transaksi perdagangan efek dan beban administrasi bank.

Others mainly consist of securities trading transaction expenses and bank administration expenses.

53. PENDAPATAN/(BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO / *53. NON-OPERATING (EXPENSE)/INCOME - NET*

	2023	2022	
Laba atas penjualan aset tetap	8.624	2.821	*Gain on sale of fixed assets*
Biaya penarikan aset sitaan	(118.961)	(42.267)	*Foreclosed assets withdrawal cost*
Lain-lain - neto	153.655	249.083	*Others - net*
Neto	**43.318**	**209.637**	***Net***

54. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *54. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Akun-akun di bawah ini merupakan akun yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian ekstra-komtabel (*off balance sheet*):

The following accounts represent accounts which are recorded as off-balance sheet:

	2023	2022	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen:			*Commitment payables:*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)			*Unused loan facilities*)*
Pihak berelasi (Catatan 56)	(82.892.633)	(75.635.375)	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	(133.451.445)	(121.899.606)	*Third parties*
	(216.344.078)	(197.534.981)	
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan (Catatan 31):			*Outstanding irrevocable letter of credit (Note 31):*
Pihak berelasi (Catatan 56)	(8.039.096)	(13.991.579)	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	(12.842.876)	(14.325.702)	*Third parties*
	(20.881.972)	(28.317.281)	
Liabilitas komitmen - neto	**(237.226.050)**	**(225.852.262)**	***Commitment payables - net***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi:			*Contingent receivables:*
Garansi yang diterima dari bank lain	29.226.582	28.052.019	*Guarantees received from other banks*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	10.576.751	12.467.774	*Interest receivable on non-performing assets*
Lain-lain	34.338	34.355	*Others*
	39.837.671	40.554.148	
Liabilitas kontinjensi:			*Contingent payables:*
Garansi yang diberikan dalam bentuk:			*Guarantees issued in the form of:*
Bank garansi (Catatan 31):			*Bank guarantees (Note 31):*
Pihak berelasi (Catatan 56)	(38.002.449)	(36.092.991)	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	(76.598.004)	(74.913.516)	*Third parties*
	(114.600.453)	(111.006.507)	
Standby letter of credit (Catatan 31)			*Standby letter of credit (Note 31)*
Pihak berelasi (Catatan 56)	(6.810.499)	(5.810.458)	*Related parties (Note 56)*
Pihak ketiga	(7.948.783)	(6.019.854)	*Third parties*
	(14.759.282)	(11.830.312)	
Lain-lain	(3.268.517)	(2.154.323)	*Others*
Total	(132.628.252)	(124.991.142)	*Total*
Liabilitas kontinjensi - neto	**(92.790.581)**	**(84.436.994)**	***Contingent payables - net***
	(330.016.631)	**(310.289.256)**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* yang belum digunakan.

*) *Include unused committed and uncommitted loans facilities*

55. TRANSAKSI-TRANSAKSI MATA UANG ASING

Nilai wajar dari transaksi berjangka dan *swap* pertukaran mata uang asing disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai tagihan/liabilitas derivatif (Catatan 11).

Rincian transaksi pembelian dan penjualan tunai *(spot)* mata uang asing (Bank Mandiri saja, tidak terdapat transaksi spot pada Entitas Anak) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

55. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

The fair value of forward and cross currency swap transactions are presented as derivative receivables/payables in the consolidated statement of financial position (Note 11).

Details of the outstanding buy and sell foreign currency spot transactions (Bank Mandiri only, there are no spot transactions in Subsidiaries) as of 31 December 2023 dan 31 December 2022 are as follows:

	2023				
	Spot* - Beli/*Spot - Buy		***Spot* - Jual/*Spot - Sell***		
Mata uang asal	**Mata uang asal (nilai penuh)/ *Original currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	**Mata uang asal (nilai penuh)/ *Original currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	***Original currency***
Dolar Amerika Serikat	187.499.271	2.886.926	146.507.666	2.255.779	*United States Dollar*
Lain-lain*)		83.065		196.243	*Others**)
		2.969.991		**2.452.022**	

	2022				
	Spot* - Beli/*Spot - Buy		***Spot* - Jual/*Spot - Sell***		
Mata uang asal	**Mata uang asal (nilai penuh)/ *Original currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	**Mata uang asal (nilai penuh)/ *Original currency (full amount)***	**Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent***	***Original currency***
Dolar Amerika Serikat	214.415.000	3.337.906	219.939.000	3.423.900	*United States Dollar*
Lain-lain*)		266.667		249.199	*Others**)
		3.604.573		**3.673.099**	

*) Terdiri dari berbagai mata uang asing.

*) *Consist of various currencies*

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- **Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama:**

  Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian.

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties:

- ***Related party relationship as the controlling shareholder:***

  The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry.

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi oleh karena kepemilikan dan/atau kepengurusan:**

  - Sifat dari hubungan

***56. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship by ownership and/or management:***

  - Nature of relationship

No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*
a. Bank Mandiri sebagai pendiri/*Bank Mandiri as a founder*					
1	Dana Pensiun Bank Mandiri	3	Dana Pensiun Bank Mandiri 2	5	Dana Pensiun Bank Mandiri 4
2	Dana Pensiun Bank Mandiri 1	4	Dana Pensiun Bank Mandiri 3		
b. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (sejak tanggal 19 Desember 2013)/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri (since 19 December 2013)*					
6	PT Bumi Daya Plaza				
c. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (sejak tanggal 19 Desember 2013)/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri (since 19 December 2013)*					
7	PT Pengelola Investama Mandiri				
d. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri (sejak tanggal 19 Desember 2013)/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri (since 19 December 2013)*					
8	PT Usaha Gedung Mandiri				
e. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 1/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri 1*					
9	PT Estika Daya Mandiri				
f. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 2/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri 2*					
10	PT Asuransi Staco Mandiri (dahulu PT Asuransi Staco Jasapratama)				
g. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 3/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri 3*					
11	PT Mulia Sasmita Bhakti				
h. Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri 4/*Controlled by Dana Pensiun Bank Mandiri 4*					
12	PT Krida Upaya Tunggal	13	PT Wahana Optima Permai		
i. Dipengaruhi secara signifikan oleh Bank Mandiri/*Significantly influenced by Bank Mandiri*					
14	Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare)				

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain adalah penyertaan saham, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman dan efek-efek subordinasi, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, simpanan nasabah, dan bank garansi.

Nature of related party transaction consists of investment in shares, debt securities issued, fund borrowings and subordinated loans, loans and sharia receivables/financing, customer deposits, and bank guarantees.

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi dengan entitas Pemerintah** (lanjutan)**:**

  - Sifat dari hubungan

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship with government related entities*** *(continued)**:***

  - Nature of relationship

No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*
a. Entitas Anak dari BUMN/*Subsidiary of State Owned Enterprise*					
1	EPC Energy Singapore Pte. Ltd	57	PT Balai Pustaka	113	PT Damar Bahtera Laju Abadi
2	Indometal London Ltd	58	PT Banggai Bahtera Laju Abadi	114	PT Danareksa Capital
3	KSO Hutama – Wika – Adipatria (Irigasi Kapuas)	59	PT Bangkit Bahtera Laju Abadi	115	PT Danareksa Finance
4	Maurel et Prom	60	PT Bangun Persada Jambi Energi	116	PT Dasaplast Nusantara
5	MIND ID TRADING Pte Ltd	61	PT Bank Hibank Indonesia	117	PT Dayamitra Telekomunikasi
6	PHE ONWJ LLC	62	PT Bank Raya Indonesia (dahulu PT BRI Agroniaga Tbk)	118	PT Dharma Lautan Nusantara
7	PHE OSES	63	PT Banyan Koalindo Lestari	119	PT Dirgantara Indonesia
8	PT Abipraya Nusantara Energi	64	PT Batubara Bukit Kendi	120	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
9	PT Adhi Commuter Properti	65	PT Baturaja Multi Usaha	121	PT Dok dan Perkapalan Waiame
10	PT Adhi Persada Beton	66	PT Barung Bahtera Laju Abadi	122	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa
11	PT Adhi Persada Gedung	67	PT Belitung Intipermai	123	PT Electronic Data Interchange Indonesia
12	PT Adhi Persada Properti	68	PT Benggala Bahtera Laju Abadi	124	PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
13	PT Administrasi Medika	69	PT Bepondi Bahtera Laju Abadi	125	PT Elnusa Geosains Indonesia
14	PT Aero Globe Indonesia	70	PT Berdikari	126	PT Elnusa Oilfield Services
15	PT Aero Systems Indonesia	71	PT Berdikari Logistik Indonesia	127	PT Elnusa Petrofin
16	PT Aero Wisata	72	PT Berdikari United Livestock	128	PT Elnusa Tbk
17	PT Aerofood Indonesia	73	PT Berkah Multi Cargo	129	PT Elnusa Trans Samudera
18	PT Aerojasa Cargo	74	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	130	PT Eltran Indonesia
19	PT Aerotrans Service Indonesia	75	PT BGR Logistik Indonesia	131	PT Emas Antam Indonesia
20	PT Agro Sinergi Nusantara	76	PT Bhirawa Steel	132	PT Energi Agro Nusantara
21	PT Akses Pelabuhan Indonesia	77	PT Bima Sepaja Abadi	133	PT Energi Biomasa Indonesia
22	PT Alam Lestari Nusantara	78	PT BNI Asset Management	134	PT Energi Pelabuhan Indonesia
23	PT Alor Bahtera Laju Abadi	79	PT BNI Life Insurance	135	PT Energy Management Indonesia
24	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	80	PT BNI Sekuritas	136	PT Equiport Inti Indonesia
25	PT Aneka Tambang Tbk	81	PT Borneo Alumina Indonesia	137	PT Farmalab Indoutama
26	PT Angkasa Pura Aviasi	82	PT Borneo Edo International	138	PT Feni Haltim
27	PT Angkasa Pura Hotel	83	PT Brantas Adya Surya Energi	139	PT Finnet Indonesia
28	PT Angkasa Pura I	84	PT Brantas Cakrawala Energi	140	PT Gadang Hidro Energi
29	PT Angkasa Pura II	85	PT Brantas Energi	141	PT Gag Nikel
30	PT Angkasa Pura Kargo	86	PT Brantas Energi Mandiri	142	PT Gagas Energi Indonesia
31	PT Angkasa Pura Logistic	87	PT Brantas Hidro Energi	143	PT Gapura Angkasa
32	PT Angkasa Pura Properti	88	PT Brantas Mahalona Energi	144	PT Garam
33	PT Angkasa Pura Propertindo	89	PT Brantas Nipajaya Energi	145	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
34	PT Angkasa Pura Retail	90	PT Brantas Prospek Energi	146	PT Gema Hutani Lestari
35	PT Angkasa Pura Sarana Digital	91	PT Brantas Prospek Enjineering	147	PT GIEB Indonesia
36	PT Angkasa Pura Solusi	92	PT Brass Bahtera Laju Abadi	148	PT GIH Indonesia
37	PT Angkasa Pura Solusi Integra	93	PT BRI Multifinance Indonesia	149	PT Gitanusa Sarana Niaga
38	PT Angkasa Pura Support	94	PT Bromo Steel Indonesia	150	PT Graha Investama Bersama
39	PT Antam Resourcindo	95	PT Bukit Asam Medika	151	PT Graha Sarana Duta
40	PT Ararkula Bahtera Laju Abadi	96	PT Bukit Asam Prima	152	PT Graha Yasa Selaras
41	PT Aru Bahtera Laju Abadi	97	PT Bukit Asam Tbk	153	PT Grahaniaga Tata Utama
42	PT Artha Daya Coalindo	98	PT Bukit Energi Investama	154	PT Griyaton Indonesia
43	PT Askrindo Mitra Utama	99	PT Bukit Energi Service Terpadu	155	PT Gunung Gajah Abadi
44	PT Asuransi BRI Life	100	PT Bukit Multi Investama	156	PT Gunung Kendaik
45	PT Asuransi Jasa Indonesia	101	PT Bukit Multi Properti	157	PT HaKaAston
46	PT Asuransi Jasindo Syariah	102	PT Bukit Prima Bahari	158	PT Haleyora Power
47	PT Asuransi Jiwa IFG	103	PT Bumi Sawindo Permai	159	PT Haleyora Powerindo
48	PT Asuransi Jiwa Taspen	104	PT Cibaliung Sumber Daya	160	PT Hasta Kreasi Mandiri
49	PT Asuransi Kredit Indonesia	105	PT Cinere Serpong Jaya	161	PT HK Infrastruktur
50	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	106	PT Citilink Indonesia	162	PT HK Realtindo
51	PT Badak Arun Solusi	107	PT Citra Lautan Teduh	163	PT Hotel Indonesia Group
52	PT Bahana Artha Ventura	108	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	164	PT Hotel Indonesia Natour
53	PT Bahana Securities	109	PT Cogindo Daya Bersama	165	PT Hotel Indonesia Properti
54	PT Bahana TCW Investment Management	110	PT Cut Meutia Medika Nusantara	166	PT Hutama Marga Waskita
55	PT Bakti Timah Medika	111	PT Dahana	167	PT Igasar
56	PT Balai Lelang Artha Gasia (Beku Operasi)	112	PT Damanusa Bahtera Laju Abadi	168	PT Indo Ridlatama Power

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi dengan entitas Pemerintah** (lanjutan)**:**

  - Sifat dari hubungan (lanjutan)

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship with government related entities*** *(continued)**:***

  - Nature of relationship (continued)

No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*
a. Entitas Anak dari BUMN/*Subsidiary of State Owned Enterprise* (lanjutan/*continued*)					
169	PT Indofarma Global Medika	217	PT Jasamarga Tollroad Maintenance	265	PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
170	PT Indofarma Tbk	218	PT Jasamarga Tollroad Operator	266	PT Krakatau Pipe Industries (sebelumnya KHI Pipe Industries)
171	PT Indonesia Chemical Alumina	219	PT Jasamarga Transjawa Tol	267	PT Krakatau Sarana Infrastruktur
172	PT Indonesia Coal Resources	220	PT Jasaraharja Putera	268	PT Krakatau Tirta Industri
173	PT Indonesia Comnets Plus	221	PT Jawa Satu Power	269	PT Lamong Energi Indonesia
174	PT Indonesia Ferry Property	222	PT Jembatan Nusantara	270	PT Lamong Nusantara Gas
175	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	223	PT KA Logistik	271	PT Laras Astra Kartika
176	PT Indonesia Papua Metal dan Mineral	224	PT KA Pariwisata	272	PT LEN Rekaprima Semesta
177	PT Indonesia Power	225	PT KA Properti Manajemen	273	PT LEN Railway Systems
178	PT Indonesian Air & Marine Supply	226	PT Kalimantan Agro Nusantara	274	PT LEN Telekomunikasi Indonesia
179	PT Indopelita Aircraft Service	227	PT Kalimantan Jawa Gas	275	PT Limbong Hidro Energi
180	PT Industri Karet Nusantara	228	PT Kalimantan Medika Nusantara	276	PT Liran Bahtera Laju Abadi
181	PT Industri Kemasan Semen Gresik	229	PT Kaltim Daya Mandiri	277	PT Makassar Coastal City
182	PT Industri Nabati Lestari	230	PT Kaltim Industrial Estate	278	PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara
183	PT Infomedia Nusantara	231	PT Kaltim Jasa Sekuriti	279	PT Marga Sarana Jabar
184	PT Infomedia Solusi Humanika	232	PT Kaltim Kariangau Terminal	280	PT Marga Trans Nusantara
185	PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	233	PT Kawasan Berikat Nusantara	281	PT Mega Citra Utama
186	PT Inhutani I	234	PT Kawasan Industri Gresik	282	PT Melon Indonesia
187	PT Inhutani V	235	PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	283	PT Menara Maritim Indonesia
188	PT INKA Multi Solusi	236	PT Kawasan Industri Makassar	284	PT Meratus Jaya Iron & Steel
189	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	237	PT Kawasan Industri Medan	285	PT Merese Mandalika Nusantara
190	PT International Mineral Capital	238	PT Kawasan Industri Terpadu Batang	286	PT Merpati Training Centre
191	PT Inti Bagas Perkasa	239	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	287	PT Metra Digital Investama
192	PT IPC Terminal Petikemas	240	PT KBN Graha Medika	288	PT Metra Digital Media
193	PT ITCI Kayan Hutani	241	PT KBN Prima Logistik	289	PT Metranet
194	PT ITDC Nusantara Properti	242	PT Kereta Commuter Indonesia	290	PT Metraplasa
195	PT ITDC Nusantara Utilitas	243	PT Kertas Padalarang	291	PT MGPA Nusantara Jaya
196	PT ITDC Nusantara Xplorin	244	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	292	PT Miangas Bahtera Laju Abadi
197	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	245	PT Kilang Pertamina Balikpapan	293	PT Minahasa Brantas Energi
198	PT Jalin Pembayaran Nusantara	246	PT Kilang Pertamina International	294	PT Mirtasari Hotel Development
199	PT Jambi Prima Coal	247	PT Kimia Farma Apotek	295	PT Mitra Cipta Polasarana
200	PT Jaminan Kredit Indonesia	248	PT Kimia Farma Diagnostik	296	PT Mitra Dagang Madani
201	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	249	PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia	297	PT Mitra Kerinci
202	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	250	PT Kimia Farma Tbk	298	PT Mitra Proteksi Madani
203	PT Jasa Prima Logistik	251	PT Kimia Farma Trading dan Distribution	299	PT Mitra Rajawali Banjaran
204	PT Jasa Raharja	252	PT Kliring Berjangka Indonesia	300	PT Mitra Tekno Madani
205	PT Jasamarga Bali Tol	253	PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia	301	PT Mitra Tour & Travel
206	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	254	PT Kodja Terramarin	302	PT Mitrasraya Adhijasa
207	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	255	PT Krakatau Baja Konstruksi (sebelumnya PT Krakatau Wijatama)	303	PT Mitratani Dua Tujuh
208	PT Jasamarga Japek Selatan	256	PT Krakatau Bandar Samudra	304	PT Multi Terminal Indonesia
209	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	257	PT Krakatau Daya Listrik	305	PT Multimedia Nusantara
210	PT Jasamarga Jogja Bawen	258	PT Krakatau Engineering	306	PT Nasional Hijau Lestari
211	PT Jasamarga Kualanamu Tol	259	PT Krakatau Global Trading (sebelumnya PT Krakatau National Resources)	307	PT Nikel Halmahera Timur (NHT)
212	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	260	PT Krakatau Information Technology	308	PT Nindya Beton
213	PT Jasamarga Manado Bitung	261	PT Krakatau Jasa Industri (sebelumnya PT Purna Sentana Baja)	309	PT Nindya Karya
214	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	262	PT Krakatau Jasa Logistik	310	PT Nusa Karya Arindo
215	PT Jasamarga Related Business	263	PT Krakatau Medika	311	PT Nusa Pratama Property
216	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	264	PT Krakatau Niaga Indonesia	312	PT Nusantara Batulicin

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi dengan entitas Pemerintah** (lanjutan)**:**

  - Sifat dari hubungan (lanjutan)

***56. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship with government related entities** (continued)**:***

  - Nature of relationship (continued)

No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*
a. Entitas Anak dari BUMN/*Subsidiary of State Owned Enterprise* (lanjutan/*continued*)					
313	PT Nusantara Medika Utama	369	PT Perkebunan Nusantara XII	425	PT PIM Prima Medika
314	PT Nusantara Regas	370	PT Perkebunan Nusantara XIII	426	PT Pindad
315	PT Nusantara Sebelas Medika	371	PT Perkebunan Nusantara XIV	427	PT Pindad Enjiniring Indonesia
316	PT Nusantara Sukses Investasi	372	PT Permata Graha Nusantara	428	PT Pindad Medika Utama
317	PT Nusantara Terminal Services	373	PT Permodalan Nasional Madani	429	PT PINS Indonesia
318	PT Nusantara Turbin dan Propulsi	374	PT Persada Sokka Tama	430	PT PJB Investasi
319	PT Nutech Integrasi	375	PT Perta Arun Gas	431	PT PJB Service
320	PT Optima Nusa Tujuh	376	PT Pertagas Niaga	432	PT PLN Batubara
321	PT Paguntaka Cahaya Nusantara	377	PT Pertamina Bina Medika	433	PT PLN Gas dan Geothermal
322	PT PAL Indonesia	378	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	434	PT PLN Tarakan
323	PT PAL Marine Service	379	PT Pertamina EP	435	PT PLNBB Niaga
324	PT Palawi Risorsis	380	PT Pertamina EP Cepu Alas Dara dan Kemuning	436	PT PNM Investment Management
325	PT PANN Pembiayaan Maritim	381	PT Pertamina Gas	437	PT Pos Logistik Indonesia
326	PT Patra Drilling Contractor	382	PT Pertamina Geothermal Energy	438	PT Pos Properti Indonesia
327	PT Patra Jasa	383	PT Pertamina Hulu Energi	439	PT PP Energi
328	PT Patra Logistik	384	PT Pertamina Hulu Indonesia	440	PT PP Infrastruktur
329	PT Patra Nusa Data	385	PT Pertamina Hulu Mahakam	441	PT PP Presisi Tbk
330	PT Patra Trading	386	PT Pertamina Hulu Rokan	442	PT PP Properti Jababeka Residen
331	PT Pefindo Biro Kredit	387	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	443	PT PP Properti Tbk
332	PT Pegadaian	388	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	444	PT PP Semarang Demak
333	PT Pegadaian Galeri Dua Empat	389	PT Pertamina International Shipping	445	PT PP Tirta Riau
334	PT Pekanbaru Permai Propertindo	390	PT Pertamina International Timor SA	446	PT PP Urban Tbk
335	PT Pelabuhan Bukit Prima	391	PT Pertamina Lubricants	447	PT PPA Finance
336	PT Pelabuhan Tanjung Priok	392	PT Pertamina Malaysia EP	448	PT PPA Kapital
337	PT Pelayanan Energi Batam	393	PT Pertamina Marine Engineering	449	PT Pratama Mitra Sejati
338	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	394	PT Pertamina Marine Solution	450	PT Prima Armada Raya
339	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	395	PT Pertamina Patra Niaga	451	PT Prima Husada Cipta Medan
340	PT Pelindo Daya Sejahtera	396	PT Pertamina Pedeve Indonesia	452	PT Prima Indonesia Logistik
341	PT Pelindo Energi Logistik	397	PT Pertamina Port and Logistic	453	PT Prima Layanan Nasional Enjinering
342	PT Pelindo Husada Citra	398	PT Pertamina Power Indonesia	454	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang
343	PT Pelindo Jasa Maritim	399	PT Pertamina Retail	455	PT Prima Medica Nusantara
344	PT Pelindo Marine Service	400	PT Pertamina Training dan Consulting	456	PT Prima Multi Terminal
345	PT Pelindo Multi Terminal	401	PT Pertamina Trans Kontinental	457	PT Prima Pengembangan Kawasan
346	PT Pelindo Properti Indonesia	402	PT Pertani Properti	458	PT Prima Power Nusantara
347	PT Pelindo Terminal Petikemas	403	PT Peruri Digital Security	459	PT Prima Terminal Peti Kemas
348	PT Pelita Air Service	404	PT Peruri Properti	460	PT Propernas Griya Utama
349	PT Pelita Indonesia Djaya Corporation	405	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	461	PT Pupuk Indonesia Energi
350	PT Pemalang Batang Toll Road	406	PT Perusahaan Pengelola Aset	462	PT Pupuk Indonesia Logistik
351	PT Pembangkitan Jawa Bali	407	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	463	PT Pupuk Indonesia Niaga (sebelumnya PT Mega Eltra)
352	PT Pendawa Lestari Perkasa	408	PT Pesonna Indonesia Jaya	464	PT Pupuk Indonesia Pangan
353	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	409	PT Pesonna Optima Jasa	465	PT Pupuk Iskandar Muda
354	PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	410	PT Peteka Karya Tirta	466	PT Pupuk Kalimantan Timur
355	PT Pengerukan Indonesia	411	PT Petrokimia Gresik	467	PT Pupuk Kujang Cikampek
356	PT Perjaya Bravo Energi	412	PT Petrokimia Kayaku	468	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
357	PT Perikanan Indonesia	413	PT Petronesia Benimel	469	PT Purantara Mitra Angkasa Dua
358	PT Perkebunan Mitra Ogan	414	PT Petrosida Gresik	470	PT Puspetindo
359	PT Perkebunan Nusantara I	415	PT PG Rajawali I	471	PT Pusri Agro Lestari
360	PT Perkebunan Nusantara II	416	PT PG Rajawali II	472	PT Putra Indo Tenaga
361	PT Perkebunan Nusantara IV	417	PT PGAS Solution	473	PT Railink
362	PT Perkebunan Nusantara V	418	PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	474	PT Rajawali Citramass
363	PT Perkebunan Nusantara VI	419	PT PGN LNG Indonesia	475	PT Rajawali Nusindo
364	PT Perkebunan Nusantara VII	420	PT Phapros Tbk	476	PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
365	PT Perkebunan Nusantara VIII	421	PT PHE Abar	477	PT Rantepao Hidro Energi
366	PT Perkebunan Nusantara IX	422	PT PHE Metana Kalimantan B	478	PT Ratah Timber
367	PT Perkebunan Nusantara X	423	PT PHE Metana Sumatera 5	479	PT Reasuransi Nasional Indonesia
368	PT Perkebunan Nusantara XI	424	PT PHE West Madura Offshore	480	PT Reasuransi Syariah Indonesia

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi dengan entitas Pemerintah** (lanjutan)**:**

  - Sifat dari hubungan (lanjutan)

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship with government related entities*** *(continued)**:***

  - Nature of relationship (continued)

No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*
a. Entitas Anak dari BUMN/*Subsidiary of State Owned Enterprise* (lanjutan/*continued*)					
481	PT Recon Sarana Utama	524	PT Semen Gresik	567	PT Telkom Landmark Tower
482	PT Rekadaya Elektrika	525	PT Semen Indogreen Sentosa	568	PT Telkom Satelit Indonesia
483	PT Rekaindo Global Jasa	526	PT Semen Indonesia Aceh	569	PT Telkomsel Ekosistem Digital
484	PT Rekayasa Cakrawala Resources	527	PT Semen Indonesia Beton	570	PT Terminal Petikemas Surabaya
485	PT Rekayasa Engineering	528	PT Semen Indonesia Distributor	571	PT Terminal Teluk Lamong
486	PT Rekayasa Industri	529	PT Semen Indonesia International	572	PT Tiar Daya Hidro
487	PT Rekind Daya Mamuju	530	PT Semen Indonesia Logistik	573	PT Timah Agro Manunggal
488	PT Reksasentosa Dinamika	531	PT Semen Kupang Indonesia	574	PT Timah Industri
489	PT Reska Multi Usaha	532	PT Semen Padang	575	PT Timah Investasi Mineral
490	PT Riset Perkebunan Nusantara	533	PT Semen Tonasa	576	PT Timah Karya Persada Properti
491	PT Rolas Nusantara Mandiri	534	PT Senggigi Pratama Internasional	577	PT Timah Tbk
492	PT Rolas Nusantara Medika	535	PT Sepatim Batamtama	578	PT Tirta Tangsel Mandiri
493	PT Rolas Nusantara Tambang	536	PT Sepoetih Daya Prima	579	PT Tracon Industri
494	PT Rumah Sakit Pelabuhan	537	PT SIER	580	PT Trans Jabar Tol
495	PT Rumah Sakit Pelni	538	PT SIER Puspa Utama	581	PT Tugu Pratama Interindo
496	PT Sabre Travel Network Indonesia	539	PT Sigma Cipta Caraka	582	PT Tugu Reasuransi Indonesia
497	PT Sahung Brantas Energi	540	PT Sigma Cipta Utama	583	PT TWC BP dan RB
498	PT Saka Energi Bangkanai Barat	541	PT Sigma Utama	584	PT United Tractors Semen Gresik
499	PT Saka Energi Indonesia	542	PT Sinergi Gula Nusantara	585	PT Varia Usaha Bahari
500	PT Sang Hyang Seri	543	PT Sinergi Informatika Semen Indonesia	586	PT Varia Usaha Beton
501	PT Sarana Aceh Ventura	544	PT Sinergi Mitra Investama	587	PT Varia Usaha Dharma Segara
502	PT Sarana Agro Nusantara	545	PT Sinergi Perkebunan Nusantara	588	PT Varia Usaha Lintas Segara
503	PT Sarana Bandar Logistik	546	PT Sinkona Indonesia Lestari	589	PT Waskita Beton Precast Tbk
504	PT Sarana Bandar Nasional	547	PT Sintas Kurama Perdana	590	PT Waskita Bumi Wira
505	PT Sarana Bengkulu Ventura	548	PT Solusi Bangun Andalas	591	PT Waskita Fim Perkasa Realti
506	PT Sarana Jabar Ventura	549	PT Solusi Bangun Beton	592	PT Waskita Karya Infrastruktur
507	PT Sarana Jakarta Ventura	550	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	593	PT Waskita Karya Realty
508	PT Sarana Jambi Ventura	551	PT Solusi Energy Nusantara	594	PT Waskita Sangir Energi
509	PT Sarana Jateng Ventura	552	PT Sri Pamela Medika Nusantara	595	PT Waskita Sriwijaya Tol
510	PT Sarana Jatim Ventura	553	PT Sucofindo	596	PT Waskita Toll Road
511	PT Sarana Kalbar Ventura	554	PT Sucofindo Advisory Utama	597	PT Waskita Wado Energy
512	PT Sarana Kalsel Ventura	555	PT Sucofindo Episi	598	PT Wege Solusi Proklamasi
513	PT Sarana Kaltim Ventura	556	PT Sumberdaya Arindo	599	PT Widar Mandripa Nusantara
514	PT Sarana Multigriya Finansial	557	PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia	600	PT Widya Tirta Selaras
515	PT Sarana Papua Ventura	558	PT Surveyor Indonesia	601	PT Wijaya Karya Aspal
516	PT Sarana Riau Ventura	559	PT Surya Energi Indotama	602	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
517	PT Sarana Sulsel Ventura	560	PT Swadharma Sarana Informatika	603	PT Wijaya Karya Beton Tbk
518	PT Sarana Sulut Ventura	561	PT Tanjung Alam Jaya	604	PT Wijaya Karya Bitumen
519	PT Sarana Surakarta Ventura	562	PT Telekomunikasi Indonesia International	605	PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
520	PT Sari Valuta Asing	563	PT Telekomunikasi Selular	606	PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
521	PT Sarinah	564	PT Telemedia Dinamika Sarana	607	PT Wijaya Karya Realty
522	PT Satria Bahana Sarana	565	PT Telkom Akses	608	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
523	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	566	PT Telkom Data Ekosistem (TDE) (sebelumnya PT Sigma Tata Sadaya)	609	PT Wijaya Karya Serang Panimbang

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi dengan entitas Pemerintah** (lanjutan)**:**

  - Sifat dari hubungan (lanjutan)

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship with government related entities*** *(continued)**:***

  - Nature of relationship (continued)

No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*	No.	Pihak berelasi/*Related parties*
a. Entitas Anak dari BUMN/*Subsidiary of State Owned Enterprise* (lanjutan/*continued*)					
610	PT WIKA Industri Manufaktur	613	PT Wisma Seratus Sejahtera	616	Timah International Investment Pte Ltd
611	PT WIKA Komponen Beton	614	PT Yasa Industri Nusantara		
612	PT WIKA Krakatau Beton	615	Saka Indonesia Pangkah BV		
b. Entitas Asosiasi dari BUMN/*Associate Company of State Owned Enterprise*					
617	PT Fintek Karya Nusantara				
c. Badan Usaha Milik Negara/*State Owned Enterprise*					
618	Perum BULOG	644	PT Brantas Abipraya (Persero)	670	PT PANN (Persero)
619	Perum Damri	645	PT Danareksa (Persero)	671	PT PDI Pulau Batam (Persero)
620	Perum Jasa Tirta I	646	PT Djakarta Lloyd (Persero)	672	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
621	Perum Jasa Tirta II	647	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	673	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
622	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	648	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	674	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
623	Perum LPPNPI	649	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	675	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
624	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	650	PT Hutama Karya (Persero)	676	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
625	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	651	PT Iglas (Persero)	677	PT Pertamina (Persero)
626	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	652	PT Indah Karya (Persero)	678	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
627	Perum Perhutani	653	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	679	PT Pos Indonesia (Persero)
628	Perum Perumnas	654	PT Indra Karya (Persero)	680	PT Primissima (Persero)
629	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	655	PT Industri Baterai Indonesia	681	PT Pupuk Indonesia (Persero)
630	PT Amarta Karya (Persero)	656	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	682	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
631	PT ASABRI (Persero)	657	PT Industri Kereta Api (Persero)	683	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
631	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	658	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	684	PT Sarana Multi Infrastruktur
633	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	659	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	685	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
634	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	660	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	686	PT Semen Kupang (Persero)
635	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	661	PT Istaka Karya (Persero)	687	PT Taspen (Persero)
636	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	662	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	688	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
637	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	663	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	689	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
638	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	664	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	690	PT Virama Karya (Persero)
639	PT Barata Indonesia (Persero)	665	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	691	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
640	PT Bina Karya (Persero)	666	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	692	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
641	PT Bio Farma (Persero)	667	PT LEN Industri (Persero)	693	PT Yodya Karya (Persero)
642	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	668	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)		
643	PT Boma Bisma Indra (Persero)	669	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)		
d. Lembaga Jaminan Sosial/*Social Security Institution*					
694	BPJS Kesehatan	695	BPJS Ketenagakerjaan	696	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
e. Lembaga Keuangan/*Financial Institution*					
697	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	698	PT Indonesia Infrastruktur Finance	699	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam rangka menjalankan bisnis normalnya, Bank Mandiri memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

- **Hubungan pihak berelasi dengan entitas Pemerintah** (lanjutan)**:**

  Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, obligasi pemerintah, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman dan efek-efek subordinasi, fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan, bank garansi, *letter of credit* yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dan *standby letter of credit.*

  Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup juga melakukan transaksi pembelian atau penggunaan jasa seperti biaya telekomunikasi, biaya listrik, dan biaya lainnya dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah.

- **Hubungan manajemen atau karyawan kunci Bank Mandiri:**

  Gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah serta *Senior Executive Vice President* dan *Senior Vice President* (Catatan 49) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.030.660 dan Rp1.837.516 atau 3,77% dan 3,45% dari jumlah beban operasional lainnya konsolidasian.

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

In the normal course of business, Bank Mandiri entered into certain significant transactions with the following related parties (continued):

- ***Related parties relationship with government related entities*** *(continued)**:***

  Nature of transactions with government related entities are current accounts with other bank, placements with other banks, marketable securities, government bonds, other receivables - trade transaction, securities purchased under agreements to resell, derivative receivables, loans and sharia receivables/financing, consumer financing receivables, acceptance receivables, investment in shares, derivative payables, deposit from customers, deposits from other bank, acceptance payables, debt securities issued, fund borrowings, subordinated loans and subordinated marketable securities, unused loan facility, guarantees issued in the form of bank guarantee and irrevocable letter of credit, and standby letter of credit.

  In the ordinary course of its business, the Group also purchases or pays for services, such as telecommunication expense, utility expense, and other expenses to government related entities.

- ***Transactions with management and key personnel of Bank Mandiri***

  Total gross salaries and allowances, bonus and tantiem, long-term employment benefits of the Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Risk Oversight Committee, Sharia Supervisory Board, and Senior Executive Vice President, and Senior Vice President (Note 49) for the year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp2,030,660 and Rp1,837,516 or 3.77% and 3.45% of total consolidated other operating expenses, respectively.

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

***56. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of transactions with related parties as of 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	2023	2022	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain (Catatan 5a)	461.097	110.733	*Current accounts with other banks (Note 5a)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 6b)	2.049.472	3.080.128	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 6b)*
Efek-efek (Catatan 7a)	23.774.139	27.290.577	*Marketable securities (Note 7a)*
Obligasi pemerintah (Catatan 8)	309.182.971	329.211.764	*Government bonds (Note 8)*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan (Catatan 9a)	7.581.513	15.157.619	*Other receivables - trade transactions (Note 9a)*
Tagihan derivatif (Catatan 11)	198.156	110.208	*Derivative receivables (Note 11)*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (Catatan 12A.a)	238.081.020	199.385.546	*Loans and sharia receivables/financing (Note 12A.a)*
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 13a)	11.542	7.846	*Consumer financing receivables (Note 13a)*
Tagihan akseptasi (Catatan 15a)	2.250.427	1.897.509	*Acceptance receivables (Note 15a)*
Penyertaan saham (Catatan 16a)	652.420	1.775.847	*Investments in shares (Note 16a)*
Total aset kepada pihak-pihak berelasi	584.242.757	578.027.777	*Total assets with related parties*
Total aset konsolidasian	**2.174.219.449**	**1.992.544.687**	***Total consolidated assets***
Persentase total aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	**26,87%**	**29,01%**	***Percentage of total assets with related parties to total consolidated assets***

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

56. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

Details of transactions with related parties as of 31 December 2023 and 2022, are as follows (continued):

	2023	2022	
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro dan giro *wadiah* (Catatan 21a)	166.637.832	157.247.418	*Demand deposits and wadiah demand deposits (Note 21a)*
Tabungan dan tabungan *wadiah* (Catatan 22a)	7.540.541	6.850.898	*Saving deposits and wadiah saving deposit (Note 22a)*
Deposito berjangka (Catatan 23a)	34.852.981	30.665.985	*Time deposits (Note 23a)*
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
Giro, giro *wadiah* dan tabungan (Catatan 24a)	183.333	174.243	*Demand deposits, wadiah demand deposit and saving deposits (Note 24a)*
Inter-bank call money (Catatan 25a)	100.000	-	*Inter-bank call money (Note 25a)*
Deposito berjangka (Catatan 26a)	384.925	467.025	*Time deposits (Note 26a)*
Liabilitas derivatif (Catatan 11)	76.404	86.933	*Derivative payables (Note 11)*
Liabilitas akseptasi (Catatan 29a)	2.614.261	1.750.123	*Acceptance payables (Note 29a)*
Efek-efek yang diterbitkan (Catatan 30)	5.091.435	5.603.550	*Debt securities issued (Note 30)*
Pinjaman yang diterima (Catatan 36)	1.765.624	2.210.704	*Fund borrowings (Note 36)*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi (Catatan 37)	10.000	87.000	*Subordinated loans and marketable securities (Note 37)*
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	219.257.336	205.143.879	*Total liabilities with related parties*
Total liabilitas konsolidasian	**1.660.442.815**	**1.544.096.631**	***Total consolidated liabilities***
Persentase total liabilitas kepada pihak - pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	**13,20%**	**13,29%**	***Percentage of total liabilities with related parties to total consolidated liabilities***
Dana *syirkah temporer* (Catatan 38)	**45.672.621**	**31.645.978**	***Temporary syirkah funds (Note 38)***
Persentase terhadap total dana *syirkah temporer*	**20,18%**	**16,13%**	***Percentage to total temporary syirkah funds***

56. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

***56. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

	2023	2022	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan bunga dari obligasi pemerintah dan SPN (Catatan 41)	16.410.277	16.771.870	*Interest income from government bonds and treasury bills (Note 41)*
Persentase terhadap pendapatan bunga dan pendapatan syariah	**12,38%**	**14,92%**	***Percentage to interest income and sharia income***
Beban bunga pinjaman yang diterima (Catatan 42)	80.863	31.672	*Interest expense from fund borrowings (Note 42)*
Persentase terhadap beban bunga dan beban syariah	**0,22%**	**0,13%**	***Percentage to interest expense and sharia expense***

	2023	2022	
Komitmen dan kontinjensi (Catatan 54)			*Commitments and contingencies (Note 54)*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	82.892.633	75.635.375	*Unused loan facilities*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	8.039.096	13.991.579	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	38.002.449	36.092.991	*Guarantees issued in the form of bank guarantee*
Garansi yang diberikan dalam bentuk *standby letter of credit*	6.810.499	5.810.458	*Guarantees issued in the form of standby letter of credit*
Total komitmen dan kontinjensi untuk pihak berelasi	135.744.677	131.530.403	*Total commitments and contingencies for related parties*
Total komitmen dan kontinjensi konsolidasian - neto	**330.016.631**	**310.289.256**	***Total consolidated commitments and contingencies - net***
Persentase total komitmen dan kontinjensi kepada pihak-pihak berelasi terhadap total komitmen dan kontinjensi - neto	**41,13%**	**42,39%**	***Percentages of total commitments and contingencies with related parties to total commitments and contingencies -net***

57. INFORMASI SEGMEN / *57. SEGMENT INFORMATION*

Grup telah menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambilan keputusan operasional (Catatan 2ak).

The Group has presented its operating segments in a manner consistent with the internal reporting provided for operational decision making (refer to Note 2ak).

Di bawah ini penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen per 31 Desember 2023 dan 2022:

The following describes the operations in each reportable segments as of 31 December 2023 and 2022:

- *Corporate Banking* : termasuk kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah korporasi, baik BUMN dan badan usaha swasta dengan skala besar./
  including loans, customer deposits and other transactions which belong to corporate customers, including state-owned and private enterprises to large scale.

- *Commercial Banking* : termasuk kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah komersial dengan skala menengah./
  including loans, customer deposits and other transactions belong to commercial customer to medium scale.

- Hubungan Kelembagaan/ *Government Institution* : termasuk kredit yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi - transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN./
  including loans, customer deposits and other transactions which belong to government entities and pension plan of state-owned enterprises.

- *Retail Banking* (terdiri dari segmen konsumer/individual, segmen mikro & bisnis dan *wealth*)/ *Retail Banking (consists of consumer/individual segment and micro & business and wealth segment)* : termasuk kredit yang diberikan kepada badan usaha atau individu dengan skala mikro hingga kecil, produk dan jasa lainnya seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah mikro dan kecil serta merupakan kredit pembiayaan konsumsi termasuk kredit kepemilikan rumah, kartu kredit serta produk dan jasa lainnya seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah perorangan./
  including loans granted to business entities or individuals with micro-scale to small, products or other services such as deposits, payment transactions and other transactions which belong to micro and small customers also consumer finance loans, including mortgage loans, credit cards and other products and services such as deposits, payment transactions and other transactions which belong to individual customers.

- *Treasury & International Banking* : segmen *treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market, fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, dan Kantor Luar Negeri./
  treasury segment associated with treasury activities of the Bank include foreign exchange, money market, fixed income, international banking business, capital markets, and the Overseas Branches.

- Kantor Pusat/*Head Office* : terutama mengelola aset dan liabilitas Grup selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya./
  mainly managing the assets and liabilities of the Group other than those managed by other operating segments including accepting the cost allocation for the provision of the centralizing services to other segments as well as income/costs that are not allocated to other segments reporting.

- Entitas Anak - Syariah/ *Subsidiaries - Sharia* : seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah./
  including all transactions conducted by a Subsidiary engaged in sharia banking.

- Entitas Anak - Asuransi/ *Subsidiaries - Insurance* : seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kerugian./
  including all transactions conducted by Subsidiaries engaged in life insurance, health insurance, and general insurance.

- Entitas Anak - selain Syariah dan asuransi/ *Subsidiaries - other than sharia and insurance* : seluruh transaksi Entitas Anak yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, layanan *remittance*, sekuritas, perbankan, dan modal ventura./
  including all transactions of Subsidiaries engaged in consumer finance, remittance services, securities, and banking.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

57. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *57. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Keterangan	2023											Description
	Corporate Banking	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Government Institutional*	*Retail Banking*	*Treasury & International Banking*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Entitas Anak - Syariah/ *Subsidiary - sharia*	Entitas Anak - asuransi/ *Subsidiaries -insurance*	Entitas Anak - selain asuransi dan Syariah/ *Subsidiaries - other than insurance and sharia*	Penyesuaian dan Eliminasi***) *Adjustment and Elimination***)c	Total	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian												***Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan bunga dan syariah**)	45.062.477	22.918.692	8.057.705	73.572.015	23.955.016	273.499	22.266.780	456.576	12.396.296	(76.414.586)	132.544.470	*Interest and sharia income **)*
Beban bunga dan syariah**)	(30.279.973)	(16.104.740)	(4.928.572)	(27.618.272)	(21.432.754)	(265.903)	(5.993.167)	-	(4.466.631)	74.432.116	(36.657.896)	*Interest and sharia expense **)*
Pendapatan bunga dan syariah - neto	14.782.504	6.813.952	3.129.133	45.953.743	2.522.262	7.596	16.273.613	456.576	7.929.665	(1.982.470)	95.886.574	*Net interest and sharia income*
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	-	-	2.677.680	-	(554.634)	2.123.046	*Net premium income*
Pendapatan bunga dan syariah dan premi - neto	14.782.504	6.813.952	3.129.133	45.953.743	2.522.262	7.596	16.273.613	3.134.256	7.929.665	(2.537.104)	98.009.620	*Net interest, sharia and premium income*
Pendapatan operasional lainnya:												*Other operating income:*
Pendapatan provisi dan komisi	2.802.116	828.477	485.844	7.397.841	282.570	3.909.218	2.766.757	-	2.333.237	(657.650)	20.148.410	*Fees and commission*
Lainnya	396.415	145.282	45.618	5.933.469	2.754.747	7.315.708	2.014.757	1.282.189	2.184.912	(1.698.661)	20.374.436	*Others*
Total	3.198.531	973.759	531.462	13.331.310	3.037.317	11.224.926	4.781.514	1.282.189	4.518.149	(2.356.311)	40.522.846	*Total*
Pembalikan/ (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya	2.046.409	1.650.569	(12.738)	(9.013.714)	(26.561)	(33.011)	(3.220.873)	-	(1.538.788)	-	(10.148.707)	*Reversal of/ (allowance for) impairment losses on financial assets and others*
Keuntungan dari penjualan efek- efek dan obligasi pemerintah	-	-	-	-	-	47.701	74.434	19.340	(16.180)	-	125.295	*Gain on sale of marketable securities and government bonds - net*
Beban operasional lainnya:												*Other operating expenses:*
Beban gaji dan tunjangan	(223.524)	(341.091)	(110.771)	(2.347.645)	(146.412)	(12.889.547)	(5.035.077)	(562.463)	(3.321.193)	554.634	(24.423.089)	*Salaries and employee benefit expenses*
Beban umum dan administrasi	(95.607)	(110.462)	(171.253)	(2.033.553)	(127.053)	(11.965.900)	(4.748.386)	(900.857)	(2.579.823)	-	(22.732.894)	*General and administrative expenses*
Lainnya	(563.287)	(261.325)	(153.238)	(1.821.926)	(338.731)	(1.792.243)	(725.852)	(1.206.267)	(521.296)	672.657	(6.711.508)	*Others - net*
Total	(882.418)	(712.878)	(435.262)	(6.203.124)	(612.196)	(26.647.690)	(10.509.315)	(2.669.587)	(6.422.312)	1.227.291	(53.867.491)	*Total*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	-	-	-	-	-	98.094	100	-	(54.876)	-	43.318	*Non-operating income/(expense) - net*
Beban pajak	-	-	-	-	-	(11.690.331)	(1.695.729)	(256.165)	(990.786)	-	(14.633.011)	*Tax expense*
Laba bersih	**19.145.026**	**8.725.402**	**3.212.595**	**44.068.215**	**4.920.822**	**(26.992.715)**	**5.703.744**	**1.510.033**	**3.424.872**	**(3.666.124)**	**60.051.870**	*Net income*
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:												***Net income attributable to:***
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991.813	*Non-controlling interest*
Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.060.057	*Parent Entity*
Laporan posisi keuangan konsolidasian												***Consolidated statement of financial position***)
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah - bruto	409.857.020	237.952.186	72.741.580	358.074.141	7.162.500	-	237.907.537	-	42.066.502	(5.929.271)	1.359.832.195	*Loans and sharia receivables/ financing - gross*
Total aset	424.358.483	229.139.153	73.595.383	240.050.664	307.078.639	414.628.061	353.624.125	43.938.924	114.843.074	(27.037.057)	2.174.219.449	*Total assets*
Giro dan giro *wadiah*	(256.481.994)	(91.227.532)	(63.703.665)	(115.236.424)	(4.902.962)	(980.003)	(20.847.525)	-	(1.192.752)	2.213.701	(552.359.156)	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	(16.495.482)	(21.306.778)	(1.062.603)	(414.655.290)	(190.222)	-	(47.026.375)	-	(8.554.739)	-	(509.291.489)	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	(26.777.108)	(37.227.044)	(33.127.841)	(149.488.496)	(6.772.458)	(2.509.694)	-	-	(35.470.457)	1.575.594	(289.797.504)	*Time deposits*
Total simpanan nasabah	(299.754.584)	(149.761.354)	(97.894.109)	(679.380.210)	(11.865.642)	(3.489.697)	(67.873.900)	-	(45.217.948)	3.789.295	(1.351.448.149)	*Total deposit from customers*
Total liabilitas	(300.286.798)	(150.621.915)	(99.279.109)	(681.149.184)	(55.329.532)	(163.775.636)	(88.202.768)	(38.734.998)	(95.226.939)	12.164.064	(1.660.442.815)	*Total liabilities*

*) Sesuai dengan segmen-segmen operasi Bank Mandiri (catatan 2ak).
**) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi.
***) Termasuk eliminasi *internal transfer pricing* atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap Entitas Anak.

*) *In accordance with operating segments of Bank Mandiri (Note 2ak).*
**) *Include component of internal transfer pricing among operating segments.*
***) *Include elimination of internal transfer pricing or reclassification among operating segments and elimination for Subsidiaries.*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

57. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *57. SEGMENT INFORMATION (continued)*

2022

Keterangan	*Corporate Banking*	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Government Institutional*	*Retail Banking*	*Treasury & International Banking*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Entitas Anak - Syariah/ *Subsidiary - sharia*	Entitas Anak - asuransi/ *Subsidiaries -insurance*	Entitas Anak - selain asuransi dan Syariah/ *Subsidiaries - other than insurance and sharia*	Penyesuaian dan Eliminasi***) *Adjustment and Elimination****)c*	Total	*Description*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian												***Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan bunga dan syariah*)	29.999.243	16.292.295	4.453.246	58.823.019	20.898.828	298.082	19.687.046	363.593	10.208.820	(48.642.054)	112.382.118	*Interest and sharia income *)*
Beban bunga dan syariah**)	(16.304.561)	(8.854.226)	(2.650.349)	(23.458.737)	(17.446.151)	(212.674)	(4.032.169)	-	(3.429.472)	51.909.575	(24.478.764)	*Interest and sharia expense **)*
Pendapatan bunga dan syariah - neto	13.694.682	7.438.069	1.802.897	35.364.282	3.452.677	85.408	15.654.877	363.593	6.779.348	3.267.521	87.903.354	*Net interest and sharia income*
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	-	-	2.886.272	-	(418.574)	2.467.698	*Net premium income*
Pendapatan bunga dan syariah dan premi - neto	13.694.682	7.438.069	1.802.897	35.364.282	3.452.677	85.408	15.654.877	3.249.865	6.779.348	2.848.947	90.371.052	*Net interest, sharia and premium income*
Pendapatan operasional lainnya:												*Other operating income:*
Pendapatan provisi dan komisi	2.404.288	764.847	360.542	6.901.623	520.797	3.145.773	2.507.051	-	2.842.500	(645.273)	18.802.148	*Fees and commission*
Lainnya	388.254	144.152	48.701	4.801.775	3.299.449	3.398.103	1.360.143	1.037.323	2.218.724	(1.218.069)	15.478.555	*Others*
Total	2.792.542	908.999	409.243	11.703.398	3.820.246	6.543.876	3.867.194	1.037.323	5.061.224	(1.863.342)	34.280.703	*Total*
Pembalikan/ (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya	(1.078.508)	(1.984.881)	(15.925)	(7.436.292)	3.909	(22.840)	(4.119.048)	-	(1.469.602)	-	(16.123.187)	*Reversal of/ (allowance for) impairment losses on financial assets and others*
Keuntungan dari penjualan efek- efek dan obligasi pemerintah	-	-	-	-	-	696.462	114.642	27.242	61.233	-	899.579	*Gain on sale of marketable securities and government bonds - net*
Beban operasional lainnya:												*Other operating expenses:*
Beban gaji dan tunjangan	(176.725)	(303.368)	(96.897)	(2.345.298)	(137.792)	(12.987.631)	(4.948.878)	(506.384)	(3.557.347)	418.574	(24.641.746)	*Salaries and employee benefit expenses*
Beban umum dan administrasi	(89.590)	(89.296)	(168.560)	(1.445.613)	(110.430)	(12.127.172)	(4.437.736)	(913.666)	(2.720.489)	-	(22.102.552)	*General and administrative expenses*
Lainnya	(435.343)	(218.615)	(151.904)	(1.517.449)	(389.435)	(1.989.311)	(724.848)	(1.300.987)	(448.541)	660.673	(6.515.760)	*Others - net*
Total	(701.658)	(611.279)	(417.361)	(5.308.360)	(637.657)	(27.104.114)	(10.111.462)	(2.721.037)	(6.726.377)	1.079.247	(53.260.058)	*Total*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	-	-	-	-	-	113.094	98.449	-	(1.906)	-	209.637	*Non-operating income/(expense) - net*
Beban pajak	-	-	-	-	-	(9.086.007)	(1.254.621)	(278.369)	(806.361)	-	(11.425.358)	*Tax expense*
Laba bersih	**14.707.058**	**5.750.908**	**1.778.854**	**34.323.028**	**6.639.175**	**(28.774.121)**	**4.250.031**	**1.315.024**	**2.897.559**	**2.064.852**	**44.952.368**	*Net income*
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:												***Net income attributable to:***
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.781.731	*Non-controlling interest*
Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.170.637	*Parent Entity*
Laporan posisi keuangan konsolidasian**) **												***Consolidated statement of financial position****)*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah – bruto	364.163.362	196.304.490	44.119.013	322.250.318	5.801.787	81	206.207.005	-	37.392.602	(3.638.776)	1.172.599.882	*Loans and sharia receivables/ financing - gross*
Total aset	382.797.323	179.089.341	44.971.040	313.385.081	318.811.657	331.277.620	305.727.438	42.870.806	98.955.587	(25.341.206)	1.992.544.687	*Total assets*
Giro dan giro *wadiah*	(260.843.103)	(82.519.567)	(43.765.257)	(101.871.549)	(5.045.475)	(3.946.286)	(21.797.853)	-	(1.164.001)	1.875.129	(519.077.962)	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	(12.153.395)	(15.592.192)	(850.155)	(157.981.554)	(198.973)	(241.590.679)	(44.214.405)	-	(7.901.413)	-	(480.482.766)	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	(40.636.468)	(36.819.680)	(20.359.234)	(42.673.131)	(4.760.793)	(121.556.835)	-	-	(31.871.718)	2.662.658	(296.015.201)	*Time deposits*
Total simpanan nasabah	(313.632.966)	(134.931.439)	(64.974.646)	(302.526.234)	(10.005.241)	(367.093.800)	(66.012.258)	-	(40.937.132)	4.537.787	(1.295.575.929)	*Total deposit from customers*
Total liabilitas	(321.701.933)	(138.032.614)	(66.083.263)	(668.925.401)	(38.306.214)	(126.040.049)	(75.813.992)	(38.197.072)	(81.660.894)	10.664.801	(1.544.096.631)	*Total liabilities*

*) Sesuai dengan segmen-segmen operasi Bank Mandiri (catatan 2ak).
**) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi.
***) Termasuk eliminasi *internal transfer pricing* atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap Entitas Anak.
****) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*) *In accordance with operating segments of Bank Mandiri (Note 2ak).*
**) *Include component of internal transfer pricing among operating segments.*
***) *Include elimination of internal transfer pricing or reclassification among operating segments and elimination for Subsidiaries.*
****) *For the year ended 31 December 2022*

57. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *57. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Segmen geografis / *Geographical segment*

Operasional utama Grup dikelola di wilayah Indonesia, Asia (Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Shanghai, Malaysia), Eropa Barat (Inggris), dan Cayman Islands. Informasi yang berkaitan dengan segmen berdasarkan geografis dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

The Group's main operations is managed in Indonesia, Asia (Singapore, Hong Kong, Timor Leste, Shanghai, Malaysia), West Europe (England), and Cayman Islands. Information concerning the geographical segments of the Group is set out in the table below:

Informasi segmen geografis untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

Information on geographical segment for the year ended 31 December 2023:

	2023					
	Indonesia	**Asia**	**Eropa Barat/ *West Europe***	**Cayman Islands**	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain konsolidasian						***Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan bunga dan syariah	126.198.202	4.408.807	167.059	1.770.402	132.544.470	*Interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah	(33.676.303)	(2.184.649)	(103.294)	(693.650)	(36.657.896)	*Interest and sharia expense*
Pendapatan bunga dan syariah - neto	92.521.899	2.224.158	63.765	1.076.752	95.886.574	*Net interest and sharia income*
Pendapatan premi - neto	2.123.046	-	-	-	2.123.046	*Net premium income*
Pendapatan bunga dan syariah dan premi - neto	94.644.945	2.224.158	63.765	1.076.752	98.009.620	*Net interest, sharia and premium income*
Pendapatan operasional lainnya:						*Other operating income:*
Pendapatan provisi dan komisi	19.690.608	421.664	-	36.138	20.148.410	*Fees and commisions*
Lainnya	20.043.935	229.068	11.736	89.697	20.374.436	*Others*
Total	39.734.543	650.732	11.736	125.835	40.522.846	*Total*
(Pembentukan)/pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya	(9.868.305)	(269.532)	(6.513)	(4.357)	(10.148.707)	*(Allowance for)/reversal of impairment losses on financial assets and others*
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	125.295	-	-	-	125.295	*Gain on sale of marketable securities and government bonds - net*
Beban operasional lainnya:						*Other operating expenses:*
Beban gaji dan tunjangan	(24.154.647)	(216.132)	(36.322)	(15.988)	(24.423.089)	*Salaries and employee benefit expenses*
Beban umum, administrasi dan lainnya	(29.244.031)	(163.475)	(17.827)	(19.069)	(29.444.402)	*General, administrative expenses and others*
Total	(53.398.678)	(379.607)	(54.149)	(35.057)	(53.867.491)	*Total*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	950.259	(427.329)	-	(479.612)	43.318	*Non operating income/ (expense) - net*
Beban pajak	(14.371.652)	(258.604)	(2.755)	-	(14.633.011)	*Tax expense*
Laba bersih	**57.816.407**	**1.539.818**	**12.084**	**683.561**	**60.051.870**	***Net income***
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:						***Net income attributable to:***
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	4.991.813	*Non-controlling interest*
Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	55.060.057	*Parent Entity*
Laporan posisi keuangan konsolidasian						***Consolidated statement of financial position***
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah- bruto	1.273.106.236	57.617.329	715.716	28.392.914	1.359.832.195	*Loans and sharia receivables/* financing - *gross*
Total aset	2.044.454.812	88.426.438	4.047.572	37.290.627	2.174.219.449	*Total assets*
Giro dan giro *wadiah*	(544.200.253)	(7.917.572)	(241.331)	-	(552.359.156)	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	(506.286.183)	(3.005.306)	-	-	(509.291.489)	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	(286.387.272)	(3.410.232)	-	-	(289.797.504)	*Time deposits*
Total simpanan nasabah	(1.336.873.708)	(14.333.110)	(241.331)	-	(1.351.448.149)	*Total deposit from customers*
Total liabilitas	(1.570.259.063)	(71.526.098)	(3.240.265)	(15.417.389)	(1.660.442.815)	*Total liabilities*

57. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *57. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Segmen geografis (lanjutan) / *Geographical segment (continued)*

Informasi segmen geografis untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: / *Information on geographical segment for the year ended 31 December 2022:*

	2022					
	Indonesia	**Asia**	**Eropa Barat/ *West Europe***	**Cayman Islands**	**Konsolidasian/ *Consolidated***	
Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain konsolidasian						***Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan bunga dan syariah	109.132.266	2.261.743	92.028	896.081	112.382.118	*Interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah	(23.581.286)	(674.160)	(37.706)	(185.612)	(24.478.764)	*Interest and sharia expense*
Pendapatan bunga dan syariah - neto	85.550.980	1.587.583	54.322	710.469	87.903.354	*Net interest and sharia income*
Pendapatan premi - neto	2.467.698	-	-	-	2.467.698	*Net premium income*
Pendapatan bunga dan syariah dan premi - neto	88.018.678	1.587.583	54.322	710.469	90.371.052	*Net interest, sharia and premium income*
Pendapatan operasional lainnya:						*Other operating income:*
Pendapatan provisi dan komisi	18.405.858	383.725	-	12.565	18.802.148	*Fees and commisions*
Lainnya	15.303.005	129.916	9.956	35.678	15.478.555	*Others*
Total	33.708.863	513.641	9.956	48.243	34.280.703	*Total*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya	(15.847.746)	(260.140)	(1.716)	(13.585)	(16.123.187)	*Allowance for impairment losses on financial assets and others*
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	832.153	64.180	-	3.246	899.579	*Gain on sale of marketable securities and government bonds - net*
Beban operasional lainnya:						*Other operating expenses:*
Beban gaji dan tunjangan	(24.397.802)	(203.764)	(28.298)	(11.882)	(24.641.746)	*Salaries and employee benefit expenses*
Beban umum, administrasi dan lainnya	(28.412.582)	(159.507)	(22.833)	(23.390)	(28.618.312)	*General, administrative expenses and others*
Total	(52.810.384)	(363.271)	(51.131)	(35.272)	(53.260.058)	*Total*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	530.320	(162.519)	-	(158.164)	209.637	*Non operating income/ (expense) - net*
Beban pajak	(11.182.908)	(240.817)	(1.633)	-	(11.425.358)	*Tax expense*
Laba bersih	**43.248.976**	**1.138.657**	**9.798**	**554.937**	**44.952.368**	***Net income***
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:						***Net income attributable to:***
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	3.781.731	*Non-controlling interest*
Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	41.170.637	*Parent Entity*
Laporan posisi keuangan konsolidasian[*)]						***Consolidated statement of financial position***[*)]
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah- bruto	1.101.016.066	50.305.418	481.634	20.796.764	1.172.599.882	*Loans and sharia receivables/ financing - gross*
Total aset	1.883.672.684	74.896.834	3.765.899	30.209.270	1.992.544.687	*Total assets*
Giro dan giro *wadiah*	(511.480.446)	(7.324.681)	(272.835)	-	(519.077.962)	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	(477.616.764)	(2.866.002)	-	-	(480.482.766)	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	(293.304.321)	(2.710.880)	-	-	(296.015.201)	*Time deposits*
Total simpanan nasabah	(1.282.401.531)	(12.901.563)	(272.835)	-	(1.295.575.929)	*Total deposit from customers*
Total liabilitas	(1.482.146.120)	(50.463.373)	(2.993.330)	(8.493.808)	(1.544.096.631)	*Total liabilities*

*) Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. / *) *For the year ended 31 December 2022*

58. RASIO KECUKUPAN MODAL *(CAPITAL ADEQUACY RATIO)* / *58. CAPITAL ADEQUACY RATIO*

Pengelolaan risiko melalui modal

Kebijakan permodalan Bank Mandiri adalah secara *prudent* memenuhi *regulatory capital requirement*, melakukan diversifikasi sumber permodalan untuk mengantisipasi rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profil *risk-return* yang optimal, termasuk penempatan dan penyertaan pada Entitas Anak dalam rangka memenuhi ekspektasi *stakeholder* termasuk investor dan regulator.

Bank Mandiri memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik dalam mendukung pertumbuhan bisnis pada kondisi normal maupun untuk mengantisipasi terjadinya kondisi *stress*.

Dalam perhitungan kecukupan modal, Bank mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang diubah oleh POJK No.34/POJK.03/2016 dan POJK No.27/POJK.03/2022.

Untuk perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Bank menggunakan Pendekatan Standar yang mengacu kepada Basel III *Reforms* (*Standardized Approach*) untuk Risiko Kredit yang efektif mulai Januari 2023. Untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan Metode Pengukuran Standar Basel II (*Standardized Measurement Method*) dan secara internal menggunakan *Value at Risk*. Untuk Risiko Operasional, Bank mengacu kepada Pendekatan Standar sesuai Basel III *Reforms* yang berlaku efektif mulai Januari 2023.

Hasil perhitungan ATMR (Kredit, Operasional, dan Pasar) serta Rasio Kecukupan Modal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Bank Mandiri saja) adalah sebagai berikut:

Capital risk management

Bank Mandiri's capital policy is prudently complied with the regulatory capital requirement, diversifying its capital resources to anticipate long-term strategic plans and efficiently allocate capital to business segments that have the potential to provide an optimal risk-return profile, including placement and investment in Subsidiaries in order to meet stakeholder's expectations including investors and regulators.

Bank Mandiri ensures it has sufficient capital to meet credit risk, market risk and operational risk, both in supporting business growth in normal conditions and anticipating stress conditions.

In calculating capital adequacy, the Bank refers to POJK No. 11/POJK.03/2016 regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks, as amended by POJK No. 34/POJK.03/2016 and POJK No. 27/POJK.03/2022.

For or the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA), the Bank employs Standardized Approach, which in accordance with Basel III Reforms (Standardized Approach) for Credit Risk, which effective since January 2023. For Market Risk, the Bank employs Basel II Standardized Measurement Method and employs Value at Risk internally. For Operational Risk, the Bank employs Standardized Approach which in accordance with Basel III Reforms, which effective since January 2023.

The calculation result of Risk Weighted Assets (Credit, Operational and Market) and Capital Adequacy Ratio (CAR) as of 31 December 2023 and 2022 (Bank Mandiri only) are as follows:

	2023	**2022**	
Modal:			*Capital:*
Modal inti	209.724.274	181.072.852	*Core capital*
Modal pelengkap	12.264.005	10.771.601	*Supplementary capital*
Jumlah modal untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar	**221.988.279**	**191.844.453**	*Total capital for credit risk, operational risk, and market risk*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit[1]	964.706.719	846.394.763	*Risk-Weighted Assets for credit[1]*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) operasional[2]	58.720.278	133.826.964	*Risk-Weighted Assets for operational[2]*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) pasar[3]	9.980.215	5.829.558	*Risk-Weighted Assets for market[3]*
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar	**1.033.407.212**	**986.051.285**	*Total Risk-Weighted Assets for credit, operational risk, and market risk*

1 Mengacu pada SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, SEOJK No. 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar dan POJK No. 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum./*Referring to SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 regarding Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets ("RWA") for Credit Risk Using the Standardized Approach, SEOJK No. 48/SEOJK.03/2017 regarding Guidelines for Calculation of Net Receivables of Derivative Transactions in Risk-Weighted Asset Calculations for Credit Risk Using the Standardized Approach and POJK No. 11/POJK.03/2019 regarding Prudential Principles in Assets Securitization Activities for Commercial Banks*.

2 Mengacu pada SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum./*Referring to SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 regarding Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using the Standardized Approach for Commercial Banks*.

3 Mengacu pada SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar./*Referring to SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 regarding Guidelines for the Use of Standardized Method in Calculation of Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks by Taking Market Risk Into Account*.

58. RASIO KECUKUPAN MODAL *(CAPITAL ADEQUACY RATIO)* (lanjutan)

Pengelolaan risiko melalui modal (lanjutan)

	2023	2022	
CAR untuk modal inti	20,29%	18,36%	*CAR for core capital*
CAR untuk risiko kredit, operasional dan pasar	21,48%	19,46%	*CAR for credit risk, operational risk and market risk*
CAR minimum modal inti[4]	6,00%	6,00%	*Minimum CAR core capital[4]*
CAR minimum sesuai profil risiko[5]	9,76%	9,86%	*Minimum CAR based on risk profile[5]*

Rasio kecukupan modal Bank secara konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar masing-masing adalah 21,99% dan 19,65%.

***58. CAPITAL ADEQUACY RATIO** (continued)*

***Capital risk management** (continued)*

The Bank's capital adequacy ratio on a consolidated basis as of 31 December 2023 and 2022 including credit risk, operational risk and market risk are 21.99% and 19.65%, respectively.

59. RASIO ASET PRODUKTIF BERMASALAH, RASIO PEMENUHAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN RASIO KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL

Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif (termasuk Rekening Administratif) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Bank Mandiri saja) adalah masing-masing sebesar 0,68% dan 1,09%. Untuk rasio kredit bermasalah lihat Catatan 12.A.d.

Rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibentuk oleh Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 183,26% dan 194,70%.

Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif (termasuk Rekening Administratif) dan rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Rasio kredit usaha mikro dan kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 8,90% dan 9,52%.

59. NON-PERFORMING EARNING ASSETS RATIO, ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING ASSETS FULFILLMENT RATIO, MICRO AND SMALL BUSINESS LOANS RATIO AND LEGAL LENDING LIMIT

Non-performing earning assets to total earning assets ratio (including Administrative Accounts) as of 31 December 2023 and 2022 (Bank Mandiri only) are 0.68% and 1.09%, respectively. For Non-Performing Loan (NPL) ratio refer to Note 12.A.d.

The ratio of total allowance for impairment losses on earning assets provided by Bank Mandiri as of 31 December 2023 and 2022 compared to the minimum allowance for impairment losses on earning assets under the guidelines prescribed by Bank Indonesia as of 31 December 2023 and 2022 are 183.26% and 194.70%, respectively.

The ratio of non-performing earning assets to total earning assets (including Administrative Accounts) and the ratio of total allowance for impairment losses on earning assets is calculated in accordance with SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 dated 30 June 2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

The ratio of small-scale and micro business loans to total loans provided by Bank Mandiri for the year ended as of 31 December 2023 and 2022 are 8.90% and 9.52%, respectively.

[4] Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2022 tentang Perubahan kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak./*Based on POJK No. 27/POJK.03/2022 concerning the second amendment to POJK Number 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Requirements for Commercial Banks, Banks are required to provide core capital of at least 6% (six percent) of RWA both individually and consolidated with subsidiary company.*

[5] CAR minimum untuk risiko-risiko utama Pilar 1 dan risiko-risiko tambahan Pilar 2 (*capital add-on*) berdasarkan metode *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)./ *Minimum CAR for Pillar 1 main risks and Pillar 2 additional risks (capital add-on) based on the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) method.*

60. KEGIATAN JASA KUSTODIAN DAN WALI AMANAT

Kegiatan Jasa Kustodian

Bank Mandiri telah memberikan Jasa Kustodian sejak tahun 1995. Surat izin operasi telah diperbaharui oleh Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Kustodian Bank Mandiri merupakan bagian dari unit kerja *Financial Institutions Business Group* dimana jasa-jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian transaksi *(settlement)* jual dan beli efek dengan maupun tanpa warkat (*scripless*).
b. Penyimpanan *(safekeeping)* dan administrasi *(administration)* atas efek-efek maupun dokumen berharga lainnya.
c. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sampai dengan hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).
d. Perwalian (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
e. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh kustodian Bank Mandiri.

Untuk memenuhi kebutuhan *investor* dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen efek-efek, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan menyediakan beragam layanan:
a. Kustodian umum untuk melayani *investor* yang melakukan investasi pada instrumen pasar modal maupun pasar uang di Indonesia.
b. Kustodian lokal untuk *American Depository Receipts* (ADR) dan *Global Depository Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi dari saham perusahaan yang terdaftar di bursa lokal dan luar negeri (*dual/multi listing*).
c. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi pada Surat Utang Negara (SUN, baik Obligasi Negara maupun Surat Perbendaharaan Negara) serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
d. Kustodian *mutual fund* (reksadana) dan *discretionary fund* (kontrak pengelolaan dana) yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi.
e. Kustodian *Euroclear* bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di *Euroclear Operations Centre*, Brussels. Kustodian Bank Mandiri merupakan *direct member* dari *Euroclear*.
f. Kustodian Pinjam Meminjam Efek *(securities lending and borrowing)* bagi nasabah yang ingin memaksimalkan hasil investasinya dengan meminjamkan efek-efeknya (saham) kepada perusahaan sekuritas melalui perantara dan penjaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI).
g. Kustodian *Exchange Traded Fund* (ETF) yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi dimana unit penyertaannya diperdagangkan di bursa.
h. Jasa Kustodian Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diterbitkan oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka transaksi sekuritisasi aset yang dimiliki perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

60. CUSTODIAN SERVICES AND TRUST OPERATIONS

Custodian services

Bank Mandiri started providing Custodian Services since 1995. The operating license for Custodian Services was renewed by Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board based on Decree No. KEP.01/PM/Kstd/1999 dated 4 October 1999. Bank Mandiri's Custodian, which is the part of Financial Institutions Business Group, provides a full range of Custodian Services as follows:
a. Settlement and handling services for script and scripless trading transactions;
b. Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;
c. Corporate action services which starting from administrating the safekeeping of customer's ownership right on marketable securities until that right become effective in the customer's account;
d. Proxy services for its customers' in General Meeting of Shareholders and General Meeting of Bondholders;
e. Reporting and information submission related to the customers' marketable securities and/or other valuable assets which are kept and administered by Bank Mandiri's custodian.

In order to fulfill the investors' needs in investing on various marketable securities instruments, Bank Mandiri's Custodian facilitate it through provisions of various services as follow:
a. General custodian which provide services for investors who are investing in capital market or money market in Indonesia.
b. Local custodian for American Depository Receipts (ADR) and Global Depository Receipts (GDR) which is needed by the investors to convert the companies' shares which are listed in local and overseas stock exchange (dual/multi listing).
c. Sub-Registry which provide services for investors that conduct transaction and investment in Government Bonds (either in form of Bonds or Treasury Bills) and Bank Indonesia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia (SBI)).
d. Custodian for mutual funds and discretionary fund issued and managed by investment manager;
e. Custodian of Euroclear for customer who is conducting investment and settlement of securities transactions registered at the Euroclear Operations Centre, Brussels, Bank Mandiri's Custodian is a direct member of Euroclear.
f. Securities lending and borrowing as services for customers who want to maximise their investment return by lending their securities to securities companies through intermediary and guarantee of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI).
g. Custodian for Exchange Traded Fund (ETF) which issued and managed by an investment manager where the unit of participation will be traded on stock exchange.
h. Custodian for Asset Backed Securities (Efek Beragun Aset (EBA)) in the form of Collective Investment Contract (Kontrak Investasi Kolektif (KIK)) which was issued by the investment manager and custodian bank in relation to asset securitisation transactions owned by banks or other financial institutions.

60. KEGIATAN JASA KUSTODIAN DAN WALI AMANAT (lanjutan)

Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kustodian Bank Mandiri memiliki 16.846 dan 14.662 nasabah yang terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusi/badan hukum lain maupun perseorangan. Nilai portofolio berdasarkan mata uang yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp583.282.609, USD2.844 juta (nilai penuh) dan EUR0,6 juta (nilai penuh) dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp815.382.074, USD2.626 juta (nilai penuh) dan EUR1,94 juta (nilai penuh). Aset yang disimpan dalam kegiatan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak.

Bank Mandiri mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Wali Amanat

Bank Mandiri telah memberikan Jasa Wali Amanat sejak tahun 1983. Surat izin operasi untuk kegiatan wali amanat telah diperbaharui dan didaftarkan kembali ke Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan No. 17/STTD-WA/PM/1999 tertanggal 27 Oktober 1999. Jasa-jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Jasa wali amanat dan agen pemantau untuk penerbitan Obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN)
b. Jasa agen pengelola rekening penampungan
c. Jasa agen pembayaran
d. Jasa penampungan dana IPO/*Initial Public Offering*
e. Jasa agen penjaminan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Bank Mandiri selaku Wali Amanat mengelola 111 emisi Obligasi dan MTN dengan nilai emisi berdasarkan mata uang sebesar Rp69.296.068 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengelola 83 emisi Obligasi dan MTN dengan nilai emisi sebesar Rp77.771.685.

Baik wali amanat maupun kustodian Bank Mandiri telah mendapat sertifikasi standar mutu pelayanan ISO 9001:2015.

***60. CUSTODIAN SERVICES AND TRUST OPERATIONS** (continued)*

***Custodian services** (continued)*

As of 31 December 2023 and 2022, Bank Mandiri's Custodian has 16,846 and 14,662 customers, respectively, which consist of pension funds, insurance companies, banks, foundation, securities companies, mutual funds, other institution/legal entity and individual customer. Total portfolio by currencies as of 31 December 2023 are amounted to Rp583,282,609, USD2,844 million (full amount) and EUR0.6 million (full amount), and as of 31 December 2022 are amounted to Rp815,382,074, USD2,626 million (full amount) and EUR1.94 million (full amount). Assets kept in custodian services activities are not included in the consolidated financial statement of Bank Mandiri and its Subsidiaries.

Bank Mandiri has insured the customer's portfolio kept in custodians against potential losses arising from safekeeping and transfer of securities in accordance with the Financial Services Authority's regulation.

Trustee Agent Operations

Bank Mandiri has been providing Trustee Agent Operations Services since 1983. The operating license for trust services was renewed and re-registered in Decree of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board based on Decree No. 17/STTD-WA/PM/1999 dated 27 October 1999. The type of services are as follows:

a. Trustee agent for bonds and MTN issuance
b. Escrow agent
c. Paying agent
d. Initial Public Offering/IPO (receiving bank)
e. Security agent

As of 31 December 2023, Bank Mandiri as the Trustee manage 111 customers with the total value of bonds and MTN issued based on currency amounted Rp69,296,068 and for the year ended 31 December 2022 managed 83 customers with the total value of bonds and MTN issued amounted Rp77,771,685.

Both Bank Mandiri's trustee operations and custodian services have received quality certification ISO 9001:2015.

60. KEGIATAN JASA KUSTODIAN DAN WALI AMANAT (lanjutan)

Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan *(Trust)*

Merupakan layanan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik nasabah (*settlor)* berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank Mandiri sebagai *trustee* dan nasabah untuk kepentingan pihak yang menerima manfaat (*beneficiary*).

Bank Mandiri telah mendapatkan izin prinsip dan surat penegasan layanan *trust* berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-1 tanggal 26 April 2013 dan No. 15/32/DPB1/PB1-1 tanggal 28 Agustus 2013.

Fungsi dari Layanan *Trust* Bank Mandiri adalah sebagai:

a. Agen pembayar (*paying agent*) yaitu kegiatan menerima dan melakukan pemindahan uang dan/atau dana, serta mencatat arus kas masuk dan kas keluar untuk dan atas nama nasabah (*settlor*).
b. Agen investasi (*investment agent*) yaitu kegiatan menempatkan, mengkonversi, dan mengadministrasikan penempatan dana untuk dan atas nama nasabah (*settlor*).

Layanan *Trust* Bank Mandiri juga mengelola nasabah dari berbagai segmen, mencakup *oil and gas company, corporate* dan *commercial*, juga nasabah *non-profit organization* untuk kegiatan pendistribusian hasil penjualan gas, jual-beli/akuisisi perusahaan, penampungan untuk dana bantuan luar negeri dan sebagainya.

60. CUSTODIAN SERVICES AND TRUST OPERATIONS *(continued)*

Trust Services

Bank's trust service is the custodian services of customer's assets portfolio (settlor) based on a written agreement between the Bank Mandiri as the trustee and customer's for the benefits of beneficiary.

Bank Mandiri has obtained the license principle and confirmation letter for the trust services based on Bank Indonesia's Letter No. 15/30/DPB1/PB1-1 dated 26 April 2013 and No. 15/32/DPB1/PB1-1 dated 28 August 2013.

Functions of Bank Mandiri Trust Service are:

a. Paying agent is the activity of receiving and transferring money and/or funds, as well as recording cash in and cash out for and on behalf of the customer (settlor).

b. Investment agent is the activity of placing, converting, and administering the placement of funds for and on behalf of the customer (settlor).

Bank Mandiri's Trust Service also managing customers from various segments, including oil and gas company, corporate and commercial, as well as non-profit organization customers for the distribution of gas sales proceeds, company sales/acquisition, and pooling of funds for foreign aid and others.

61. KREDIT PENERUSAN (*CHANNELING LOANS*)

Kredit penerusan berdasarkan sumber dana dan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

61. CHANNELING LOANS

Channeling loans based on sources of funds and economic sectors are as follows:

	2023	2022	
Pemerintah:			*Government:*
Pertanian	163.293	173.403	*Agriculture*
Industri	14.543	14.543	*Manufacturing*
	177.836	**187.946**	

61. KREDIT PENERUSAN (*CHANNELING LOANS*) (lanjutan)

Bank Mandiri telah ditunjuk untuk menatausahakan kredit kelolaan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dengan beberapa skema yang saat ini (*existing*) yaitu sebagai berikut:

1. Penerusan pinjaman Kementerian Keuangan dalam berbagai mata uang dari beberapa lembaga keuangan bilateral dan multilateral untuk membiayai proyek-proyek Pemerintah melalui BUMN, BUMD dan Pemda, antara lain: *Asian Development Bank, Banque Français & Credit National*, *Barclays*, BNP Paribas, BNP Paribas & CAI Belgia, Calyon & BNP Paribas, Commonwealth Development Corporation ("CDC") NES, Export Finance and Insurance Corporation ("EFIC") Australia, International Development Association ("IDA"), *International Bank for Reconstruction and Development, Japan Bank for International Cooperation, Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Nederland Urban Sector Loan & De Nederlanse Inveseringsbank voor Ontwikkelingslanden NV*, Pemerintah Swiss, RDI - KI, Spanyol, U.B Denmark, US *Export Import Bank* dan *Overseas Economic Cooperation Fund*. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.05/2015 tanggal 6 Maret 2015 bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 pengelolaan penatausahaan pinjaman luar negeri dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kecuali pinjaman dalam bentuk *Project* Aid BI.

2. Penerusan pinjaman eksproyek Perusahaan Inti Rakyat ("PIR") tetap ada kepada petani dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek *Nucleus Estate & Smallholder* ("NES") ADB, PIR Khusus dan PIR Lokal. Bank Mandiri sebagai penatausaha pengembalian Piutang Negara pada Petani PIR tetap ada, dimana Kementerian Keuangan sebagai pengelola pengembalian piutang negara kepada petani dan Kementerian Pertanian sebagai pengelola teknis pelaksanaan proyek PIR tetap ada. Untuk penyaluran pinjaman Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan ("PIR-Bun") sudah tidak dilakukan lagi.

3. Penerusan Pinjaman Dana Reboisasi Hutan Tanaman Industri ("DRHTI") dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK"). Terhitung sejak tahun 1999, KLHK telah menghentikan penyaluran Dana Reboisasi dalam rangka Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tersebut, sehingga pinjaman DRHTI yang saat ini dikelola di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah *existing* Pinjaman DRHTI yang berasal dari Bank Peserta Penggabungan.

***61. CHANNELING LOANS** (continued)*

Bank Mandiri has been appointed to administer the loans received by the Government of the Republic of Indonesia through several existing schemes as follows:

1. Channeling loans from the Ministry of Finance in various currencies from several bilateral and multilateral financial institutions to finance Government projects through State Owned Enterprises, Region Owned Enterprises and Regional Government, such as: Asian Development Bank, Banque Français & Credit National, Barclays, BNP Paribas, BNP Paribas & CAI Belgium, Calyon & BNP Paribas, Commonwealth Development Corporation ("CDC") NES, Export Finance and Insurance Corporation ("EFIC") Australia, International Development Association ("IDA"), International Bank for Reconstruction and Development, Japan Bank for International Cooperation, Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Nederlands Urban Sector Loan & De Nederlanse Inveseringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, Swiss Government, RDI - KI, Spain, UB Denmark, US Export Import Bank and Overseas Economic Cooperation Fund. However, based on the Regulation of the Minister of Finance No. 40/PMK.05/2015 dated 6 March 2015, stated starting from 1 October 2015 the administration of overseas loans are managed by the Ministry of Finance, except loans in the form of BI Project Aid.

2. Channeling loans from former of Perusahaan Inti Rakyat ("PIR") are still exists to farmers for community plantation development which includes the Nucleus Estate & Smallholder ("NES") ADB project, Special PIR and Local PIR. Bank Mandiri as the administrator for the repayment of receivables to PIR Farmers continues to exist, whereas the Ministry of Finance is managing the repayment of receivables to farmers and the Ministry of Agriculture is managing the technical execution of the PIR Project still exist. The distribution of Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan ("PIR-Bun") loans has stopped.

3. Channeling loans of Industrial Plantation Forest Reforestation ("DRHTI") from the Ministry of Environment and Forestry ("KLHK"). Since 1999, the Ministry of Environment and Forestry has stopped distributing the Reforestation Loans for Industrial Plantation Forests, therefore the DRHTI loans which are currently managed by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. are existing DRHTI Loans which were inherited from Participating Bank.

61. KREDIT PENERUSAN (*CHANNELING LOANS*) (lanjutan)

Kredit penerusan tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena Bank Mandiri dan Entitas Anak tidak menanggung risiko atas kredit tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut di atas, Bank Mandiri bertugas melakukan penagihan kepada debitur dan menyetorkan kembali kepada Pemerintah pembayaran pokok kredit, termasuk bunga dan beban-beban lainnya serta pengelolaan dokumentasi kredit. Sebagai gantinya, Bank Mandiri akan menerima jasa perbankan *(banking fee)* yang berkisar antara 0,50% - 2%.

61. CHANNELING LOANS *(continued)*

Channeling loans are not presented in the consolidated statement of financial position since the credit risk are not borne by the Bank and its Subsidiaries. In accordance to the agreement mentioned above, Bank Mandiri is responsible to bill the debtors and made payments to the Government in the principal, including the interest and other charges such as loan documentation management. As compensation, Bank Mandiri receives banking fee which varies from 0.50% - 2%.

62. MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan dari OJK, Bank Indonesia serta *best practices* yang diterapkan di perbankan internasional. Bank Mandiri menggunakan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank. Penerapan ERM akan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan *stakeholders*.

ERM adalah sebuah proses pengelolaan risiko yang melekat dalam proses bisnis Bank, artinya pengelolaan risiko menjadi bagian yang menyatu dalam pengambilan keputusan bisnis Bank sehari-hari. Dengan ERM, Bank akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Selain itu, ERM juga menerapkan pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan Entitas Anak untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan dan nilai perusahaan berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang memiliki cakupan seluruh industri keuangan.

Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Kerangka pengelolaan risiko Bank tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), dalam kerangka pengelolaan risiko ini, diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai *business enabler* sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor *prudential principle* dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

62. RISK MANAGEMENT

Bank Mandiri implements independent risk management in accordance with standards that refer to the regulations of FSA, Bank Indonesia regulation and international banking best practices. Bank Mandiri adopts the Enterprise Risk Management (ERM) concept as comprehensive and integrated risk management strategy which is customised with the Bank's business and operational needs. ERM implementation provides value added benefits to the Bank's and its stakeholders.

ERM is a risk management process embedded in business strategies and operations that are integrated in the Bank's daily business decision making processes. With ERM, the Bank establishes a systematic and comprehensive risk management framework (credit risk, market risk, and operational risk) by connecting the capital management and business processes with the risks in holistic approach. In addition, ERM also applies integrated risk management for the Subsidiaries, to maximise the effectiveness of supervision and value creation to the Bank based on POJK No.17/POJK.03/2014 regarding implementation of integrated risk management for financial conglomerates which are appropriate for the whole financial industries.

The Bank's risk management framework is based on POJK No. 18/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks and Ministerial Regulation of State-owned Enterprise No. PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Bank's risk management framework is included in Risk Management Policy (KMNR), which consists of various policies to support risk management function as a business enabler for business growth within the corridor of prudential principle by adopting the ideal risk management processes (identification - measurement - monitoring - risk control) at all organisation levels.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Sebagai bagian dari proses ERM, Bank Mandiri menerapkan *Risk Appetite Statement* ("RAS"). RAS merupakan jenis dan tingkat risiko yang sanggup diambil/dihadapi Bank yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Penerapan RAS juga disinkronkan dengan pemantauan indikator *Recovery Plan* Bank Mandiri (mengacu pada POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik). Adapun *Risk Appetite Statement* Bank Mandiri sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

As part of the ERM process, Bank Mandiri applies a Risk Appetite Statement ("RAS"). RAS represents type and level of risk that the Bank is able to take/face within its risk capacity in order to achieve business objectives. The application of RAS is also synchronised with monitoring of Bank Mandiri's Recovery Plan indicators (refer to POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Bank Systemic Recovery Plans). The Bank Mandiri Risk Appetite Statement is as follows:

Dimensi/*Dimensions*	***Statement***
Rentabilitas/*Rentability*	Menjaga laba yang stabil serta *sustain* sesuai dengan tingkat risiko yang diambil./ *Maintain a stable and sustainable profit in accordance with the level of risk taken.*
Permodalan/*Capital*	Menjaga permodalan yang kuat untuk mendukung risiko bisnis yang dihadapi dan memenuhi ketentuan Regulator./ *Maintain capital to support the business risks and comply with regulator requirements.*
Likuiditas dan Pendanaan/ *Liquidity and Funding*	Menjaga posisi likuiditas yang kuat dalam berbagai kondisi *stress./Maintain a strong liquidity position under a variety of stressful conditions.* Menjaga pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi dengan baik./*Maintain stable and well-diversified funding.*
Risiko Kredit/*Credit Risk*	Menjaga kualitas portofolio dan konsentrasi kredit sesuai *appetite* Bank./*Maintain portfolio quality and credit concentration according to the Bank's appetite.* Menjaga biaya kredit pada level yang optimum./*Maintain credit costs at optimum levels.*
Risiko Pasar/*Market Risk*	Menjaga eksposur risiko pasar yang timbul, baik dari aktivitas *trading book* maupun *banking book,* berada dalam *appetite* yang ditetapkan manajemen./ *Maintain market risk exposure arising from both trading book and banking book activities within the level of appetite set by management.*
Risiko Operasional/ *Operational Risk*	Menjaga batas toleransi terhadap *fraud* eksternal, *fraud* internal serta isu terkait sistem IT dan kerahasiaan data sesuai *appetite* Bank*./Maintain intolerance to external fraud, internal fraud and issues related to IT systems and data confidentiality according to the Bank's appetite.*
Risiko Kepatuhan/ *Compliance Risks*	Menjaga batas toleransi atas pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi (yang berakibat sanksi/denda) sesuai *appetite Bank./Maintain intolerance for violation of regulatory compliance (which results in sanctions/fines) according to the Bank's appetite.*
Risiko Hukum/ *Legal Risk*	Menjaga potensi kerugian akibat tuntutan hukum pada tingkat yang rendah./ *Maintain potential losses due to lawsuits at a low level.*
Risiko Reputasi/ *Reputation Risk*	Menjaga reputasi Bank melalui produk dan layanan yang handal./ *Maintain the Bank's reputation through reliable products and services.*

Seluruh risiko-risiko yang dihadapi Bank diukur dan dipantau secara rutin, baik melalui metode pengukuran internal maupun melalui penyusunan laporan profil risiko secara triwulanan dan laporan tingkat kesehatan Bank secara semesteran, untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank termasuk risiko Entitas Anak secara konsolidasi.

All risks that faced by the Bank are measured and monitored on regular basis through internal measurement method, quarterly risk profile report and semiannually Bank's soundness report in order to describe all the embedded risks in the Bank's business activities, including consolidated Subsidiaries risks.

Grup tidak terekspos risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas pada investasi pemegang unit link, dikarenakan semua risiko ditanggung langsung oleh masing-masing pemegang polis.

There are no market risk, credit risk and liquidity risk exposed to the Group for policyholders' investments in unit-linked contract, since all credit risk is directly borne by each policyholder.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap aktivitas manajemen risiko Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan melalui pembentukan komite di bawah supervisi Dewan Komisaris, yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Adapun komite di bawah supervisi Direksi terdiri dari *Asset & Liabilities Committee* (ALCO), *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC), *Integrated Risk Committee* (IRC), *Capital & Subsidiaries Committee* (CSC), *Business Committee* (BC), *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC), *Human Capital Policy Committee* (HCPC), *Policy & Procedure Committee* (PPC), *Credit Committee*/Rapat Komite Kredit (RKK), *Transformation Committee* (TC), dan *Social & Enviromental Responsibility Committee* (SERC).

Dari 11 komite yang berada di bawah supervisi Direksi, terdapat 4 komite yang berkaitan langsung dengan pengelolaan manajemen risiko yaitu RMPC, IRC, ALCO dan PPC. Adapun fungsi dan tugas masing-masing komite adalah sebagai berikut:

1. *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC)

   Melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Selain itu juga merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan.

2. *Integrated Risk Committee* (IRC)

   Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Bank Mandiri sebagai Entitas Utama membentuk IRC sebagai wujud penerapan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Anggota IRC mencakup Direksi Entitas Utama dan Entitas Anak.

3. *Asset & Liabilities Committee* (ALCO)

   Menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Selain itu pada kondisi tekanan/krisis keuangan, ALCO juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan indikator risiko dan keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* serta mengusulkan aktivasi *Recovery Plan* dalam hal indikator-indikator tersebut melampaui batasan yang ditetapkan.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners on risk management activities, directly and indirectly, is implemented through the establishment of committees at the level of the Board of Commissioners which are Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee. The Executive Committee under the supervision of the Board of Directors consists of Asset & Liability Committee (ALCO), Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC), Integrated Risk Management Committee (IRC), Capital & Subsidiaries Committee (CSC), Business Committee (BC), Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC), Human Capital Policy Committee (HCPC), Policy & Procedure Committee (PPC), Credit Committee (Rapat Komite Kredit (RKK), Transformation Committee (TC), and Social & Enviromental Responsibility Committee (SERC).

From 11 Executive Committees supervised under Board of Directors, 4 committees directly involved with risk management, i.e. RMPC, IRC, ALCO, and PPC. All functions and key responsibilities are as follows:

1. *Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)*

   Conducting risk identification, measurement, and monitoring, establishing policies and risk management strategies. In addition, formulating credit policies, overseeing the implementation of credit policies, monitoring the development and conditions of the credit portfolio and also providing recommendations for improvement.

2. *Integrated Risk Committee (IRC)*

   Provide recommendation to the Board of Directors in order to develop integrated risk management regulations and revised or refined the standards for integrated risk management based on the results of evaluation process. Bank Mandiri as Parent Entity has formed IRC committee as an application of POJK No. 17/POJK.03/2014 about Integrated Risk Management for Financial Group. Member of IRC includes Boards of Directors of Parent Entity and Subsidiaries.

3. *Asset & Liabilities Committee (ALCO)*

   Manages Bank's strategic management of asset and liabilities, interest rate, liquidity and other areas related to the asset and liability management of the Bank. Furthermore in condition of financial stress/crisis, ALCO has the function and responsibility to monitor Bank's risk and financial indicators which state in the Recovery Plan in which these indicators exceed the set limits.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dari 11 komite yang berada di bawah supervisi Direksi, terdapat 4 komite yang berkaitan langsung dengan pengelolaan manajemen risiko yaitu RMPC, IRC, ALCO, dan PPC. Adapun fungsi dan tugas masing-masing komite adalah sebagai berikut (lanjutan):

4. *Policy & Procedure Committee* (PPC)

PPC adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Bank dalam bentuk kebijakan dan/atau prosedur serta pengaturan pemberian kewenangan kepada pejabat Bank secara *ex-officio*.

Komite di bawah supervisi Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan serta pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan adalah Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.

A. Risiko kredit

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tercermin di beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Tata Kelola dan Struktur Organisasi

Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end* yang secara lebih rinci dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Direktorat Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait dalam melakukan manajemen risiko terintegrasi untuk bertanggung jawab dalam mengelola 10 jenis risiko yang dihadapi Bank beserta Entitas Anak, serta membahas dan mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko. Struktur organisasi Direktorat Manajemen Risiko terdiri dari *Risk Taking Unit* dan *Independent Risk Management Unit*. *Risk Taking Unit* menjalankan fungsi *four-eyes principle*, sedangkan Independent *Risk Management Unit* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko. Bank Mandiri menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen.

2. Aktivitas-aktivitas terkait Pengelolaan Risiko Kredit

A. Segmen *Wholesale*

Proses pengelolaan kredit di segmen *Wholesale* diawali dengan menentukan target pasar melalui *Loan Portfolio Guideline* yang menetapkan *Industry Classification* (menarik, netral, dan selektif) dan *Industry Limit* yang sesuai, serta memilih dan menyaring target nasabah melalui *Industry Acceptance Criteria* dan *Name Clearance* untuk menghasilkan *pipeline* debitur yang berkualitas.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

From 11 Executive Committees supervised under Board of Directors, 4 committees directly involved with risk management, i.e. RMPC, IRC, ALCO and PPC. All functions and key responsibilities are as follows (continued):

4. Policy & Procedure Committee (PPC)

PPC is a committee that assist the Board of Directors in arrangement of Bank's Regulations in the form of policies and/or procedures, as well as arrangement of granting authority to Bank's executives on an ex-officio basis.

Committees formed under Board of Commissioners including Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, and Audit Committee, which have tasks and responsibilities to review and evaluate the policy and implementation of Bank's risk management, as well as providing inputs and recommendations to the Board of Commissioners in order to carry out the monitoring roles.

A. Credit risk

In distributing its credit, Bank Mandiri always prioritizes the principle of prudence which is reflected in several aspects, including the following:

1. Governance and Organisational Structure

Bank Mandiri is always guided by the Bank Mandiri Credit Policy in managing credit risk end-to-end which is outlined in more detail in the form of Credit Procedure Standards (SPK) and Product Manuals.

The Risk Management Directorate together with related work units carry out integrated risk management to be responsible for managing 10 types of risks faced by the Bank and its Subsidiaries, as well as discussing and proposing risk management policies and guidelines. The organizational structure of the Risk Management Directorate consists of the Risk Taking Unit and the Independent Risk Management Unit. The Risk Taking Unit carries out the function of the four-eyes principle, while the Independent Risk Management Unit is directly responsible to the Risk Management Director. Bank Mandiri places the credit analysis function carried out by independent business units and credit risk units.

2. Activities related to Credit Risk Management

A. Wholesale Segment

The credit management process in the Wholesale segment begins with determining the target market through the Loan Portfolio Guideline which determines the appropriate Industry Classification (attractive, neutral, and selective) and Industry Limits, as well as selecting and filtering target customers through Industry Acceptance Criteria and Name Clearance to produce a suitable debtor pipeline. quality

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tercermin di beberapa aspek antara lain sebagai berikut (lanjutan):

2. Aktivitas-aktivitas terkait Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

A. Segmen *Wholesale* (lanjutan)

Proses selanjutnya adalah melakukan *credit risk assessment* menggunakan serangkaian *credit risk tools* (*credit risk rating*, *spreadsheet*, CPA, NAK, dan sebagainya) yang kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (melalui Rapat Komite Kredit) dengan *four-eyes principle* yang melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management* Unit secara independen. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan, dimana proses pemutusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme.

Setelah proses *disbursement* kredit, risiko kredit dan potensi kegagalan debitur harus senantiasa dimonitor dan dideteksi secara dini (*Early Warning Signals*) antara lain dengan menggunakan *ALERT* (*watchlist*) *tools* dan apabila debitur berpotensi bermasalah maka perlu dilakukan penanganan lebih lanjut antara lain mencakup aktivitas *collection, recovery* maupun restrukturisasi.

B. Segmen *Retail*

Dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses monitoring dilakukan secara portofolio.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

A. *Rating System*

Bank Mandiri memiliki *Rating System* yang dikenal dengan BMRS (Bank Mandiri *Rating System*). BMRS yang telah dikembangkan oleh Bank terdiri dari *Rating System* untuk segmen *Corporate and Commercial Banking*, *Rating System* untuk segmen SME, dan *Rating System* untuk *Financial Institution* (Bank). Dengan menggunakan *Rating System* untuk *Financial Institution* (Bank), Bank dapat melakukan identifikasi dan pengukuran risiko Bank *Counterparty* yang dapat ditoleransi dalam memberikan fasilitas *Credit Line*.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

In distributing its credit, Bank Mandiri always prioritizes the principle of prudence which is reflected in several aspects, including the following (continued):

2. Activities related to Credit Risk Management (continued)

A. Wholesale Segment (continued)

The next process is to carry out a credit risk assessment using a series of credit risk tools (credit risk rating, spreadsheet, CPA, NAK, etc.) which is then decided by the Authority Holder to Decide on Credit (through a Credit Committee Meeting) with a four-eyes principle involving the Business Unit and Independent Credit Risk Management Unit. The four-eyes principle mechanism is carried out by the Credit Committee in accordance with the limits of authority, where the credit termination process is carried out through the RKK mechanism.

After the credit disbursement process, the debtor's credit risk and potential failure must always be monitored and detected early (Early Warning Signals), including by using ALERT (watchlist) tools and if the debtor has potential problems, further handling needs to be carried out, including collection, recovery activities, and restructuring.

B. Retail Segment

By considering its mass market characteristics, the credit process is carried out more automatically using a credit risk scorecard, referring to the Risk Acceptance Criteria for each product, and processed through an automated work-flow (loan factory). The monitoring process is carried out in a portfolio manner.

3. Credit Worthiness Assessment

A. Rating System

Bank Mandiri has a Rating System known as BMRS (Bank Mandiri Rating System). The BMRS that has been developed by the Bank consists of a Rating System for the Corporate and Commercial Banking segment, a Rating System for the SME segment, and a Rating System for Financial Institutions (Banks). By using the Rating System for Financial Institutions (Banks), Banks can identify and measure the risk that Counterparty Banks can tolerate in providing Credit Line facilities.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tercermin di beberapa aspek antara lain sbb. (lanjutan):

3. Penilaian Kelayakan Kredit (lanjutan)

B. *Credit Scoring*

Bank Mandiri juga memiliki *Credit Scoring* yang berbeda untuk setiap segmen, terdiri dari: *SME Scoring, Micro Scoring*, dan *Consumer Scoring*. Bank Mandiri juga mulai mengembangkan *generic credit scoring* menggunakan data internal (transaksi, *funding,* maupun *lending*) untuk nasabah *Existing-to-Bank* ("ETB") yang memungkinkan proses kredit secara *seamless* melalui aplikasi Livin'.

Model yang telah dikembangkan oleh Bank, baik itu *model* risiko kredit dan non kredit, divalidasi secara internal oleh *Model Validator*, yaitu fungsi yang independen dan terpisah dari fungsi pengembang *model*. Hal ini dilakukan untuk meyakini kualitas dan validitas *model*. Selain validasi, hal lainnya yang diterapkan terkait pengelolaan risiko *model* yaitu penerapan kerangka tata kelola pengelolaan *model* (*Model Risk Management*).

4. Monitoring Kredit

Pengelolaan risiko kredit Bank terutama diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi kategori *Non-Performing Loan* (NPL), serta mengelola penggunaan modal yang optimal melalui identifikasi unit bisnis, segmen, produk, wilayah yang memberikan nilai tambah bagi Bank. Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi.

Bank melakukan identifikasi dan deteksi dini terhadap debitur *Corporate* dan *Commercial* dengan kolektibilitas 1 dan 2 melalui *ALERT Tools*. Dalam melakukan penilaian dan monitoring kualitas kredit, Bank mengacu kepada ketentuan Regulator dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan revieu atas Pilar 3 yaitu prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur. Berdasarkan hasil analisa tersebut, Bank menetapkan *account strategy* dan *action plan* secara dini untuk mencegah terjadinya gagal bayar.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

In distributing its credit, Bank Mandiri always prioritizes the principle of prudence which is reflected in several aspects, including the following (continued):

3. Credit Worthiness Assessment (continued)

B. Credit Scoring

Bank Mandiri also has different Credit Scoring for each segment, consisting of: SME Scoring, Micro Scoring, and Consumer Scoring. Bank Mandiri is also starting to develop generic credit scoring using internal data (transactions, funding and lending) for Existing-to-Bank ("ETB") customers that enables seamless credit process through Livin' aplication .

The models that have been developed by the Bank, both credit and non-credit risk models, are validated internally by the Model Validator, which is a function that is independent and separate from the model developer function. This is done to ensure the quality and validity of the model. Apart from validation, another thing that is implemented regarding model risk management is the implementation of a model management governance framework (Model Risk Management).

4. Credit Monitoring

The Bank's credit risk management is primarily directed at improving the balance between healthy credit expansion and prudent credit management to avoid a decline in quality or becoming a Non-Performing Loan (NPL), as well as managing optimal capital use through identifying business units, segments, products, areas that provide added value for the Bank. In addition, in implementing credit concentration risk management at the debtor level, Bank Mandiri consistently monitors the Maximum Lending Limit (BMPK). In general, the credit process and credit risk management at Bank Mandiri has been carried out end-to-end and integrated.

The Bank carries out early identification and detection of Corporate and Commercial debtors with collectibility 1 and 2 through ALERT Tools. In assessing and monitoring credit quality, the Bank refers to Regulator provisions by prioritizing the principle of prudence by reviewing Pillar 3, namely business prospects, financial performance and debtor's ability to pay. Based on the results of this analysis, the Bank determines an account strategy and action plan early to prevent the occurrence of default.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tercermin di beberapa aspek antara lain sbb. (lanjutan):

5. Agunan

Jenis agunan yang diterima Bank terdiri dari benda bergerak (antara lain agunan tunai, piutang dagang, persediaan barang, mesin, dan surat berharga), benda tak bergerak (antara lain tanah, bangunan, dan mesin), serta penjaminan (*personal/corporate guarantee*). Untuk menjamin fasilitas kredit, Bank mengutamakan agunan dalam bentuk aset tetap berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Nilai agunan yang digunakan Bank sebagai jaminan kredit adalah nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal (*Credit Operation Unit*) dan penilai eksternal rekanan Bank atau penilai eksternal bukan rekanan Bank yang telah ditunjuk pejabat pemegang kewenangan di *Business Unit/Credit Recovery Unit*.

6. *Stress Test*

Untuk memantau kualitas dan menguji elastisitas kualitas portofolio (NPL dan *yield*) terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi yang dapat berdampak pada kecukupan modal Bank, Bank secara rutin maupun *ad-hoc* melakukan *stress test* terhadap seluruh portofolio kredit baik per kelompok debitur besar, segmen bisnis, industri maupun produk dengan berbagai *skenario*.

Dengan *stress test* ini, Bank dapat memahami kemungkinan potensi negatif terhadap kinerja bisnis Bank Mandiri dan mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian portofolio dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kualitas portofolio kredit dan kecukupan modal Bank terjaga dengan baik. Bank Mandiri mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian portofolio dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kualitas portofolio kredit dan kecukupan modal Bank terjaga dengan baik.

7. *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*

Bank Mandiri sebagai bank sistemik telah menyusun *Recovery Plan* sebagaimana diatur pada POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi *(Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. *Recovery Plan* adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik, termasuk di antaranya opsi pemulihan (*recovery options*) yang akan diambil Bank Sistemik dalam merespon tekanan keuangan (*financial stress*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta menjaga kelangsungan usahanya (*viability*). Pengkinian *Recovery Plan* Bank Mandiri tahun 2023-2024 telah disampaikan kepada OJK pada November 2023.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

In distributing its credit, Bank Mandiri always prioritizes the principle of prudence which is reflected in several aspects, including the following (continued):

5. Collateral

The types of collateral accepted by the Bank consist of movable objects (including cash collateral, trade receivables, inventories of goods, machinery, and securities), immovable objects (including land, buildings, and machinery), as well as guarantees (personal/corporate guarantee). To guarantee credit facilities, the Bank prioritizes collateral in the form of fixed assets in the form of land or land and buildings. The value of the collateral used by the Bank as credit collateral is the value of the collateral assessed by an internal appraiser (Credit Operation Unit) and an external appraiser who is a partner of the Bank or an external appraiser who is not a partner of the Bank who has been appointed by an authorized officer in the Business Unit/Credit Recovery Unit.

6. Stress Test

To monitor quality and test the elasticity of portfolio quality (NPL and yield) to changes in economic variables that can impact the Bank's capital adequacy, the Bank routinely and ad-hoc carries out stress tests on the entire credit portfolio, both per large debtor group, business segment, industries and products with various scenarios.

With this stress test, the Bank can understand the possible negative potential for Bank Mandiri's business performance and anticipate it early and take portfolio control steps and the most optimal solutions as a short-term and long-term strategy so that the quality of the Bank's credit portfolio and capital adequacy are well maintained. Bank Mandiri anticipates early and takes portfolio control measures and the most optimal solutions as a short-term and long-term strategy so that the quality of the credit portfolio and the Bank's capital adequacy are well maintained.

7. Recovery Plan and Resolution Plan

Bank Mandiri as a systemic bank has prepared a Recovery Plan as regulated in POJK No. 14/POJK.03/2017 regarding Action Plans (Recovery Plan) for Systemic Banks. Recovery Plan is a plan to overcome financial problems that may occur at Systemic Bank, including recovery options that Systemic Bank will take in response to financial stress to prevent, restore or improve financial conditions and maintain business continuity (viability). Bank Mandiri's updated Recovery Plan for 2023-2024 was submitted to the FSA in November 2023.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

7. Recovery Plan dan *Resolution Plan* (lanjutan)

Selain itu, Bank Mandiri juga telah menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum yang merupakan strategi resolusi yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") dalam menangani Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal apabila serangkaian langkah perbaikan kondisi keuangan yang telah ditetapkan dalam *Recovery Plan* tidak dapat mengembalikan atau memperbaiki kondisi keuangan Bank.

Manajemen Risiko Kredit dalam Kondisi Endemi COVID-19

Selama masa pandemi covid-19 berlangsung, Bank Mandiri secara aktif berpartisipasi dalam berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah antara lain penyaluran dana berdasarkan penempatan uang negara pada Bank, penjaminan kredit, dan subsidi bunga. Diantara program tersebut adalah program untuk debitur terdampak Covid-19 berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 serta perubahan keduanya POJK No.17/POJK.03/2021 yang telah berakhir pada Maret 2023, maupun Keputusan Dewan Komisioner ("KDK") OJK No. 34/KDK.03/2022 terkait sektor, segmen serta wilayah yang masih memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank yang masih berlaku hingga Maret 2024.

Seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut status pandemi Covid-19 sejak Juni 2023 dan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi. Hal tersebut diikuti dengan perkembangan ekonomi yang menunjukkan arah pemulihan yang semakin baik. Perbaikan ini juga tercermin perbaikan portfolio Restrukturisasi Covid-19, dimana sebagian besar debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran kredit sejalan dengan perbaikan kondisi usaha debitur di masa endemi ini. Portfolio ini telah mengalami penurunan dari posisi tertinggi sebesar Rp96,5 Triliun pada Juni 2021 menjadi sebesar Rp17,2 Triliun pada posisi Desember 2023. Secara bankwide, pada Desember 2023, NPL% sebesar 1,02% dan NPL *Coverage* yang memadai sebesar 384,78%. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank cukup menyakini telah berhasil mengelola portofolio ini dengan baik dan mencapai soft landing, dan berakhirnya relaksasi terbatas KDK OJK No. 34/KDK.03/2022 pada 31 Maret 2024 mendatang tidak akan menimbulkan lonjakan yang berarti.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

7. Recovery Plan and Resolution Plan (continued)

Apart from that, Bank year Mandiri has also prepared a Resolution Plan in accordance with the Deposit Insurance Corporation Regulation Number 1 of 2021 regarding Resolution Plans for Commercial Banks, which is a resolution strategy that will be taken into consideration by the Deposit Insurance Corporation ("LPS") in dealing with designated banks. as a failed Bank if a series of steps to improve the financial condition set out in the Recovery Plan are unable to restore or improve the Bank's financial condition.

Credit Risk Management in Endemic COVID-19 Condition

During the covid-19 pandemic, Bank Mandiri actively participated in various national programs initiated by the Government to boost economy recovery (Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)), including Government fund's distribution, loan guarantees, and interest subsidies. Among those programs was a program for debtors affected by Covid-19 which was regulated based on POJK No.11/POJK.03/2020 as well as it's second POJK No.17/POJK.03/2021 which ended in March 2023, and also the OJK Board of Commissioners Decree ("KDK") No.34/KDK.03/2022 regarding sectors, segments, and regions that still require special treatment for credit or bank financing which is still valid until March 2024.

As the Covid-19 pandemic was well managed, the government decided to revoke the Covid-19 pandemic status at June 2023 and declare that Indonesia has entered an endemic period. This was followed by economic developments and recovery. This improvement is also reflected in the improvement in the Covid-19 Restructuring portfolio, where the majority of debtors have fulfilled their credit payment obligations in line with the improvement in debtor business conditions during this endemic period. This portfolio has decreased from its highest position of IDR96.5 Trillion in June 2021 to IDR17.2 Trillion in December 2023. At bankwide level, in December 2023, NPL% was 1.02% and adequate NPL Coverage was 384 .78%. Taking into account these conditions, the Bank is quite confident that it has succeeded in managing this portfolio well and achieved a soft landing, and the end of the limited relaxation of OJK KDK No. 34/KDK.03/2022 on 31 March 2024 will not cause a significant spike.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

Eksposur maksimum risiko kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports

Maximum credit risk exposures on financial assets are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral and other credit supports as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Giro pada Bank Indonesia	108.605.322	107.349.158	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	36.573.885	47.789.700	*Current Account with Other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	73.887.200	95.320.511	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek[**)]			*Marketable securities[**)]*
Pemerintah			*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.613.295	10.089.149	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.425.783	1.117.351	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	690.638	720.769	*Amortised cost*
Non-pemerintah			*Non-government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.752.030	1.028.671	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	47.383.080	28.189.646	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.200.667	7.232.607	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	1.186.153	11.231.444	*At cost*
Obligasi pemerintah[***)]			*Government bonds[***)]*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.078.509	6.972.279	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	90.640.924	92.532.086	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	180.578.053	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	34.541.812	44.213.180	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	24.549.900	32.188.559	*Other receivables - trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.692.928	11.705.989	*Securities purchased under agreements to resell*
Tagihan derivatif	1.994.931	2.252.141	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah[*)]			*Loans and sharia receivables/financing[*)]*
Korporasi	471.902.013	392.944.033	*Corporate*
Komersial	221.359.876	172.687.792	*Commercial*
Retail	385.239.379	345.335.169	*Retail*
Syariah	228.232.308	197.020.243	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	32.036.752	23.147.366	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.419.072	5.733.387	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	14.671.676	11.719.618	*Acceptance receivables*

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail,* dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail and Sharia.*
**) *Excluding marketable securities which are the investment from the Subsidiaries policyholder's unit-link which has no credit risk exposure.*
***) *Excluding government bonds which are the investment from the Subsidiaries' policyholder's unit-link which has no credit risk exposure.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Maximum credit risk exposures on financial assets are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral and other credit supports as of 31 December 2023 and 2022 are as follows (continued):

	2023	2022	
Aset lain-lain			*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	10.258.180	9.532.493	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	2.960.484	2.334.250	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	7.379.393	2.080.874	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	296.997	224.690	*Receivables from policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih akan diterima	570.711	231.650	*Receivables from sales of marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	1.391.944	3.757.955	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	2.025.730.598	**1.847.260.813**	

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif setelah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to administrative accounts net after allowance for impairment losses as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Bank garansi yang diterbitkan	113.766.176	109.339.109	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	86.748.253	83.626.620	*Unused loan facilities**)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	20.827.041	28.214.783	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	14.733.445	11.805.551	*Standby letter of credit*
	236.074.915	**232.986.063**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.

*) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities*

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum aset keuangan atas risiko kredit bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

The above table represents the maximum financial assets exposure on credit risk for Bank Mandiri and Subsidiaries as of 31 December 2023 and 2022, without taking into account any collateral held or other credit support. For financial assets in the consolidated statement of financial position, the exposures set out above are based on carrying amounts as reported in the consolidated financial statements.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Mandiri dan Entitas Anak pada nilai bruto (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai, agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank Mandiri dan Entitas Anak telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis dimana kantor pencatatan transaksi dilakukan.

62. *RISK MANAGEMENT (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following table breaks down Bank Mandiri and its subsidiaries's credit exposure at their gross amounts (without taking into account any allowance for impairment losses, collateral held or other credit support), as categorised by geographical region as of 31 December 2023 and 2022. In the following table, Bank Mandiri and its Subsidiaries have allocated exposures based on the geographical area where the transactions are recorded.

	2023						
	Jawa dan/*and* Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lain-lain*)/ *Others***	Total	
Giro pada Bank Indonesia	108.605.322	-	-	-	-	108.605.322	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	28.796.884	5	428	-	7.808.773	36.606.090	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	62.117.730	190.000	65.000	150.000	11.365.427	73.888.157	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek**)							*Marketable securities**)*
Pemerintah							*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.680.822	-	-	-	3.932.473	9.613.295	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	1.425.783	1.425.783	*Fair value through OCI*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-	690.638	690.638	*Amortised cost*
Non-pemerintah							*Non Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.757.095	-	-	-	-	9.757.095	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	46.477.179	-	-	-	920.838	47.398.017	*Fair value through OCI*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	4.248.945	-	-	-	968.792	5.217.737	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	1.300.883	-	-	-	-	1.300.883	*At cost*
Obligasi pemerintah***)							*Government Bonds**)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.078.509	-	-	-	-	12.078.509	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	90.640.924	-	-	-	-	90.640.924	*Fair value through OCI*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	-	-	-	-	163.194.756	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	34.541.812	-	-	-	-	34.541.812	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	25.844.392	-	-	-	200.161	26.044.553	*Other receivables-trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.692.928	-	-	-	-	22.692.928	*Securities purchased under agreements to resell*
Tagihan derivatif	1.862.557	-	-	-	132.374	1.994.931	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah*)							*Loans and sharia receivables/ financing*)*
Korporasi	341.746.589	37.314.490	6.504.337	19.951.960	83.137.199	488.654.575	*Corporate*
Komersial	157.186.462	36.714.332	25.446.684	10.688.853	3.808.823	233.845.154	*Commercial*
Retail	255.253.187	70.280.790	31.016.720	33.195.531	9.678.701	399.424.929	*Retail*
Syariah	146.698.505	56.042.446	15.646.467	11.727.492	7.792.627	237.907.537	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	20.243.294	4.962.397	3.976.394	3.378.503	189.208	32.749.796	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	4.831.865	262.417	246.374	125.414	23.172	5.489.242	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	13.126.393	-	-	-	1.667.495	14.793.888	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain							*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	8.133.984	427.858	168.667	353.436	1.174.235	10.258.180	*Accrued Income*
Piutang transaksi nasabah	2.969.136	-	-	-	-	2.969.136	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	7.379.393	-	-	-	-	7.379.393	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	296.997	-	-	-	-	296.997	*Receivables to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih harus diterima	568.178	-	-	-	2.533	570.711	*Receivables from sales of marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	1.391.944	-	-	-	-	1.391.944	*Receivable from government bonds pledged as collateral*
	1.577.666.665	**206.194.735**	**83.071.071**	**79.571.189**	**134.919.252**	**2.081.422.912**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail*, dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
****) Lain-lain termasuk portofolio di daerah Papua dan cabang luar negeri.

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail and Sharia.*
**) *Excluding securities which are the investment of the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
****) *Others include portfolios in Papua and overseas branches.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

A. Risiko kredit (lanjutan) / *A. Credit risk (continued)*

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan) / *(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)*

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)*

a) Sektor geografis (lanjutan) / *a) Geographical sectors (continued)*

2022

	Jawa dan/*and* Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Lain-lain*)/ *Others***	Total	
Giro pada Bank Indonesia	107.349.158	-	-	-	-	107.349.158	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	43.225.797	10	566	-	4.583.612	47.809.985	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	81.180.835	700.000	225.000	275.000	12.943.277	95.324.112	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek **)							*Marketable securities***)*
Pemerintah							*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.507.855	-	-	-	3.581.294	10.089.149	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	1.117.351	1.117.351	*Fair value through OCI*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	19.498	-	-	-	701.271	720.769	*Amortised cost*
Non-pemerintah							*Non Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.029.087	-	-	-	-	1.029.087	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	27.224.107	-	-	-	967.353	28.191.460	*Fair value through OCI*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	6.247.291	-	-	-	1.006.743	7.254.034	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	11.248.978	-	-	-	-	11.248.978	*At cost*
Obligasi pemerintah ***)							*Government Bonds***)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.972.279	-	-	-	-	6.972.279	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	92.532.086	-	-	-	-	92.532.086	*Fair value through OCI*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	180.578.053	-	-	-	-	180.578.053	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	44.213.180	-	-	-	-	44.213.180	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	33.655.400	-	-	-	137.864	33.793.264	*Other receivables-trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.705.989	-	-	-	-	11.705.989	*Securities purchased under agreements to resell*
Tagihan derivatif	2.127.025	-	-	-	125.116	2.252.141	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah*)							*Loans and sharia receivables/ financing*)*
Korporasi	289.304.101	33.347.378	4.928.154	17.905.950	68.109.846	413.595.429	*Corporate*
Komersial	132.126.167	33.740.244	18.965.216	5.472.005	3.334.118	193.637.750	*Commercial*
Retail	232.434.832	62.917.394	26.331.082	29.096.756	8.379.634	359.159.698	*Retail*
Syariah	125.804.353	48.745.224	14.830.907	10.418.466	6.408.055	206.207.005	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	15.345.010	3.739.164	2.446.988	2.083.416	143.149	23.757.727	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.520.201	154.308	136.227	38.777	23.047	5.872.560	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	10.343.592	-	-	-	1.437.989	11.781.581	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain							*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	7.997.397	383.472	140.808	257.790	753.026	9.532.493	*Accrued Income*
Piutang transaksi nasabah	2.342.636	-	-	-	-	2.342.636	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	2.080.874	-	-	-	-	2.080.874	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	224.690	-	-	-	-	224.690	*Receivables to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih harus diterima	225.715	-	-	-	5.935	231.650	*Receivables from sales of marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	3.757.955	-	-	-	-	3.757.955	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	1.483.324.141	**183.727.194**	**68.004.948**	**65.548.160**	**113.758.680**	**1.914.363.123**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail,* dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
****) Lain-lain termasuk portofolio di daerah Papua dan cabang luar negeri.

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail and Sharia.*
**) *Excluding securities which are the investment of the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
****) *Others include portfolios in Papua and overseas branches.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative accounts are as follows:

	2023						
	Jawa dan/*and* Bali	**Sumatera**	**Kalimantan**	**Sulawesi**	**Lain-lain****)/ *Others*****)**	**Total**	
Rekening administratif							*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	111.755.316	461.562	52.231	61.121	2.270.223	114.600.453	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	47.457.497	6.832.486	1.499.775	427.547	30.759.661	86.976.966	*Unused loan facilities**)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	19.847.952	-	-	-	1.034.020	20.881.972	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	13.985.388	69.604	-	-	704.290	14.759.282	*Standby letter of credit*
	193.046.153	**7.363.652**	**1.552.006**	**488.668**	**34.768.194**	**237.218.673**	

	2022						
	Jawa dan/*and* Bali	**Sumatera**	**Kalimantan**	**Sulawesi**	**Lain-lain****)/ *Others*****)**	**Total**	
Rekening administratif							*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	108.918.922	451.747	43.760	35.217	1.556.861	111.006.507	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	51.820.764	7.465.032	305.565	561.768	23.752.263	83.905.392	*Unused loan facilities**)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	25.316.143	-	-	-	3.001.138	28.317.281	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	11.036.469	75.594	-	-	718.249	11.830.312	*Standby letter of credit*
	197.092.298	**7.992.373**	**349.325**	**596.985**	**29.028.511**	**235.059.492**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.
**) Lain-lain termasuk portofolio di daerah Papua dan cabang luar negeri.

*) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities*
**) *Others include portfolios in Papua and overseas branches.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai bruto (tanpa memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai, agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal |31 Desember 2023 dan 2022.

62. RISK MANAGEMENT (continued)

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following table describe Bank's credit exposure at gross amounts (without taking into account any allowance for impairment losses, collateral held or other credit support), as categorised by industry sectors as of 31 December 2023 and 2022.

2023

	Pemerintah/ *Government*	Lembaga keuangan/ Bank/ *Financial institution/ Bank*	Industri/ *Manufacturing*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia usaha/ *Business services*	Lain-lain *****)/ *Others*****)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	108.605.322	-	-	-	-	108.605.322	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	36.606.090	-	-	-	-	36.606.090	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	73.888.157	-	-	-	-	73.888.157	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek **)								*Marketable securities***)*
Pemerintah								*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.613.295	-	-	-	-	-	9.613.295	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.425.783	-	-	-	-	-	1.425.783	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	690.638	-	-	-	-	-	690.638	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	-	-	-	-	-	-	-	*At cost*
Non-Pemerintah								*Non Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	9.494.926	29.812	13	79.588	152.756	9.757.095	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	43.576.589	144.021	380.819	632.716	2.663.872	47.398.017	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	1.868.037	512.000	245.000	1.659.736	932.964	5.217.737	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	-	433.084	75.000	85.000	213.800	493.999	1.300.883	*At cost*
Obligasi pemerintah***)								*Government Bonds***)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.078.509	-	-	-	-	-	12.078.509	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	90.640.924	-	-	-	-	-	90.640.924	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	-	-	-	-	-	163.194.756	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	34.541.812	-	-	-	-	-	34.541.812	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	-	1.544.564	-	-	-	24.499.989	26.044.553	*Other receivables-trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	22.688.379	-	-	4.549	-	22.692.928	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	-	28.932	-	-	-	1.965.999	1.994.931	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah*)								*Loans and sharia receivables/ financing*)*
Korporasi	59.690.119	6.526.940	244.885.113	31.304.254	92.736.188	53.511.961	488.654.575	*Corporate*
Komersial	-	1.596.142	75.274.796	51.693.660	73.043.037	32.237.519	233.845.154	*Commercial*
Retail	-	58.970	21.657.576	41.134.628	100.253.211	236.320.544	399.424.929	*Retail*
Syariah	20.953.214	5.869.696	11.796.536	17.868.523	20.150.979	161.268.589	237.907.537	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	52.708	95.885	116.525	74.139	102.359	32.308.180	32.749.796	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.077	9.599	66.330	77.552	34.129	5.296.555	5.489.242	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	-	1.415.573	2.262.557	13.466	-	11.102.292	14.793.888	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain								*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	5.818.797	1.747.831	1.552.173	237.239	289.233	612.907	10.258.180	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	-	27.808	-	-	-	2.941.328	2.969.136	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	-	-	-	-	-	7.379.393	7.379.393	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	-	296.997	-	-	-	-	296.997	*Receivables to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih harus diterima	-	570.711	-	-	-	-	570.711	*Receivable from sales of marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	-	1.391.944	-	-	-	-	1.391.944	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	398.705.632	**318.342.176**	**358.372.439**	**143.114.293**	**289.199.525**	**573.688.847**	**2.081.422.912**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail,* dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
****) Lain-lain termasuk perdagangan, restoran dan hotel, tambang, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, konstruksi, listrik, gas dan air dan jasa sosial.

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail, and Sharia.*
**) *Excluding marketable securities from investment from the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
****) *Others including trading, restaurant and hotel, mining, transportation, warehousing and communication, construction, gas and water, and social services.*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

A. Risiko kredit (lanjutan) / *A. Credit risk (continued)*

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan) / *(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)*

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)*

b) Sektor industri (lanjutan) / *b) Industry sectors (continued)*

2022

	Pemerintah/ *Government*	Lembaga keuangan/ Bank/ *Financial institution/ Bank*	Industri/ *Manufacturing*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia usaha/ *Business services*	Lain-lain[*****)]/ *Others*[*****)]	Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	107.349.158	-	-	-	-	107.349.158	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	47.809.985	-	-	-	-	47.809.985	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	95.324.112	-	-	-	-	95.324.112	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek [**)]								*Marketable securities*[**)]
Pemerintah								*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	10.089.149	-	-	-	-	-	10.089.149	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.117.351	-	-	-	-	-	1.117.351	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	720.769	-	-	-	-	-	720.769	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	-	-	-	-	-	-	-	*At cost*
Non-Pemerintah								*Non Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	815.982	49.622	15	56.103	107.365	1.029.087	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	21.334.966	193.713	383.126	535.857	5.743.798	28.191.460	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	2.235.973	830.276	895.000	1.822.036	1.470.749	7.254.034	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	-	10.091.178	75.000	85.000	213.800	784.000	11.248.978	*At cost*
Obligasi pemerintah[***)]								*Government Bonds*[***)]
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.972.279	-	-	-	-	-	6.972.279	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	92.532.086	-	-	-	-	-	92.532.086	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	180.578.053	-	-	-	-	-	180.578.053	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	44.213.180	-	-	-	-	-	44.213.180	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	-	1.468.118	-	-	-	32.325.146	33.793.264	*Other receivables-trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	11.700.209	-	-	5.780	-	11.705.989	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	-	24.534	-	-	-	2.227.607	2.252.141	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah[*)]								*Loans and sharia receivables/ financing*[*)]
Korporasi	36.803.888	4.123.179	215.975.575	27.974.352	90.085.767	38.632.668	413.595.429	*Corporate*
Komersial	-	1.447.934	67.193.073	45.854.201	54.012.838	25.129.704	193.637.750	*Commercial*
Retail	-	63.591	19.425.839	37.036.601	92.308.475	210.325.192	359.159.698	*Retail*
Syariah	15.932.932	5.089.744	10.762.989	14.278.885	19.037.076	141.105.379	206.207.005	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	60.292	103.275	183.382	68.042	201.907	23.140.829	23.757.727	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	11.533	4.439	156.104	99.729	134.199	5.466.556	5.872.560	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	-	1.933.290	2.944.507	95.976	-	6.807.808	11.781.581	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain								*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	1.140.261	192.703	411.544	151.247	269.463	7.367.275	9.532.493	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	-	174.015	-	-	-	2.168.621	2.342.636	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	-	-	-	-	-	2.080.874	2.080.874	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	-	224.690	-	-	-	-	224.690	*Receivables to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih harus diterima	-	231.650	-	-	-	-	231.650	*Receivable from sales of marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	-	3.757.955	-	-	-	-	3.757.955	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	390.171.773	**315.500.680**	**318.201.624**	**126.922.174**	**258.683.301**	**504.883.571**	**1.914.363.123**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail*, dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
****) Lain-lain termasuk perdagangan, restoran dan hotel, tambang, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, konstruksi, listrik, gas dan air dan jasa sosial.

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail and Sharia.*
**) *Excluding marketable securities from investment from the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
****) *Others including trading, restaurant and hotel, mining, transportation, warehousing and communication, construction, gas and water, and social services.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative accounts items are as follows:

2023

	Pemerintah/ *Government*	**Lembaga keuangan/ Bank/ *Financial institution/ Bank***	**Industri/ *Manufacturing***	**Pertanian/ *Agriculture***	**Jasa dunia usaha/ *Business services***	**Lain-lain *****)/ *Others******)**	**Total**	
Rekening administratif								*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	3.750	30.646.861	33.567.311	560.228	2.919	49.819.384	114.600.453	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	25.393.231	2.337.331	4.726.587	1.950.683	-	52.569.134	86.976.966	*Unused loan facilities*)*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	-	650.808	2.496.570	147.711	4.056.376	13.530.507	20.881.972	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	-	299.776	2.879.219	18.443	1.988.446	9.573.398	14.759.282	*Standby letter of credit*
	25.396.981	**33.934.776**	**43.669.687**	**2.677.065**	**6.047.741**	**125.492.423**	**237.218.673**	

2022

	Pemerintah/ *Government*	**Lembaga keuangan/ Bank/ *Financial institution/ Bank***	**Industri/ *Manufacturing***	**Pertanian/ *Agriculture***	**Jasa dunia usaha/ *Business services***	**Lain-lain *****)/ *Others******)**	**Total**	
Rekening administratif								*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	5.651	28.553.435	37.980.468	432.204	128.209	43.906.540	111.006.507	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	19.019.863	6.342.239	5.598.095	2.019.315	38.300	50.887.580	83.905.392	*Unused loan facilities*)*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	-	444.973	7.666.483	614.352	562.288	19.029.185	28.317.281	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	-	195.251	2.902.534	-	1.716.834	7.015.693	11.830.312	*Standby letter of credit*
	19.025.514	**35.535.898**	**54.147.580**	**3.065.871**	**2.445.631**	**120.838.998**	**235.059.492**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.

**) Lain-lain termasuk perdagangan, restoran dan hotel, tambang, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, konstruksi, listrik, gas dan air, dan jasa sosial.

*) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities*

**) *Others including trading, restaurant and hotel, mining, transportation, warehousing, construction, gas and water, and social services*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

A. Risiko kredit (lanjutan) / *A. Credit risk (continued)*

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan) / *(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)*

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)*

c) Kualitas kredit dari aset keuangan / *c) Credit quality of financial assets*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: / *As of 31 December 2023 and 2022, exposure to credit risk on financial assets are as follows:*

	2023						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*[1)]	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*[1)]**	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*[2)]**	**Total**	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Impairment provision***	**Neto/ *Net***	
Giro pada Bank Indonesia	108.605.322	-	-	108.605.322	-	108.605.322	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	36.606.090	-	-	36.606.090	(32.205)	36.573.885	*Current account with other bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	73.888.157	-	-	73.888.157	(957)	73.887.200	*Placement with Bank Indonesia and others bank*
Efek-efek [*)]							*Marketable securities [**)]*
Pemerintah							*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.613.295	-	-	9.613.295	-	9.613.295	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.425.783	-	-	1.425.783	-	1.425.783	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	690.638	-	-	690.638	-	690.638	*Amortised cost*
Non-pemerintah							*Non-government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.757.095	-	-	9.757.095	(5.065)	9.752.030	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	47.358.521	-	39.496	47.398.017	(14.937)	47.383.080	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.210.062	-	7.675	5.217.737	(17.070)	5.200.667	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	1.201.883	-	99.000	1.300.883	(114.730)	1.186.153	*At cost*
Obligasi pemerintah [***)]							*Government Bonds [***)]*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.078.509	-	-	12.078.509	-	12.078.509	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	90.640.924	-	-	90.640.924	-	90.640.924	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	-	-	163.194.756	-	163.194.756	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	34.541.812	-	-	34.541.812	-	34.541.812	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	20.174.990	4.610.533	1.259.030	26.044.553	(1.494.653)	24.549.900	*Other receivables trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.692.928	-	-	22.692.928	-	22.692.928	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	1.994.931	-	-	1.994.931	-	1.994.931	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah[*)]							*Loans and sharia receivables/financing[*)]*
Korporasi	471.110.250	1.500.901	16.043.424	488.654.575	(16.752.562)	471.902.013	*Corporate*
Komersial	226.464.604	3.258.298	4.122.252	233.845.154	(12.485.278)	221.359.876	*Commercial*
Retail	380.194.807	12.952.603	6.277.519	399.424.929	(14.185.550)	385.239.379	*Retail*
Syariah	216.034.831	1.703.542	20.169.164	237.907.537	(9.675.229)	228.232.308	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	30.685.548	1.718.882	345.366	32.749.796	(713.044)	32.036.752	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.257.583	212.580	19.079	5.489.242	(70.170)	5.419.072	*Net Investment finance leases*
Tagihan akseptasi	14.793.888	-	-	14.793.888	(122.212)	14.671.676	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain							*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	10.258.180	-	-	10.258.180	-	10.258.180	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	2.959.133	-	10.003	2.969.136	(8.652)	2.960.484	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	7.379.393	-	-	7.379.393	-	7.379.393	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	296.997	-	-	296.997	-	296.997	*Receivable to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih harus diterima	570.711	-	-	570.711	-	570.711	*Sale of accrued marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	1.391.944	-	-	1.391.944	-	1.391.944	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	2.007.073.566	**25.957.339**	**48.392.008**	**2.081.422.912**	**(55.692.313)**	**2.025.730.599**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail*, dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
1) Merupakan kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai stage 1 dan 2 sesuai dengan PSAK 71 serta pembiayaan syariah dan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah dimana cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK 102 (Revisi 2019).
2) Termasuk dalam kategori "mengalami penurunan nilai" adalah kredit yang dikategorikan sebagai stage 3 sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" serta kredit dengan kolektibilitas non-performing loan dan kredit yang dihitung secara individual yang diberikan oleh Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah senilai Rp20.169.164 dengan cadangan kerugian penurunan nilai senilai Rp6.841.842, dimana cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK 102 (Revisi 2019) (Catatan 2c.(H).(2) dan Catatan 2c.(H).(5)).

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail, and Sharia.*
**) *Excluding marketable securities from investment from the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
1) *Including loans that are categorized as stages 1 and 2 in accordance with SFAS No. 71 and sharia financing from Subsidiary engaged in sharia banking where allowance for impairment losses is calculated based on Financial Services Authority Regulationss and SFAS No. 102 (Revised 2019).*
2) *Included in "impaired" portfolio are loans classified as stage 3 in accordance with SFAS No. 71 "Financial Instrument", loans with non performing loan collectibility and loans evaluated by using individual and collective assessment of Subsidiary engaged in sharia banking amounted to Rp20,169,164 with allowance for impairment losses amounted to Rp6,841,842 which is calculated based on Financial Services Authority Regulations and SFAS No. 102 (Revised 2019) (Note 2c.(H).(2) and Note 2c.(H).(5)).*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

62. RISK MANAGEMENT (continued)

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

	2022						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*[1)]	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*[1)]**	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*[2)]**	**Total**	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Impairment provision***	**Neto/ *Net***	
Giro pada Bank Indonesia	107.349.158	-	-	107.349.158	-	107.349.158	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	47.809.985	-	-	47.809.985	(20.285)	47.789.700	*Current account with other bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	95.324.112	-	-	95.324.112	(3.601)	95.320.511	*Placement with Bank Indonesia and others bank*
Efek-efek [**)]							*Marketable securities[**)]*
Pemerintah							*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	10.089.149	-	-	10.089.149	-	10.089.149	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.117.351	-	-	1.117.351	-	1.117.351	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	720.769	-	-	720.769	-	720.769	*Amortised cost*
Non-pemerintah							*Non-government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.029.087	-	-	1.029.087	(416)	1.028.671	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	28.191.460	-	-	28.191.460	(1.814)	28.189.646	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	7.254.034	-	-	7.254.034	(21.427)	7.232.607	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	11.248.978	-	-	11.248.978	(17.534)	11.231.444	*At cost*
Obligasi pemerintah [***)]							*Government Bonds[***)]*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.972.279	-	-	6.972.279	-	6.972.279	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	92.532.086	-	-	92.532.086	-	92.532.086	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	180.578.053	-	-	180.578.053	-	180.578.053	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	44.213.180	-	-	44.213.180	-	44.213.180	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	26.623.921	5.886.049	1.283.294	33.793.264	(1.604.705)	32.188.559	*Other receivables trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.705.989	-	-	11.705.989	-	11.705.989	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	2.252.141	-	-	2.252.141	-	2.252.141	*Derivatives receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah[*)]							*Loans and sharia receivables/financing[*)]*
Korporasi	409.062.600	-	4.532.829	413.595.429	(20.651.396)	392.944.033	*Corporate*
Komersial	181.279.431	2.698.316	9.660.003	193.637.750	(20.949.958)	172.687.792	*Commercial*
Retail	344.821.806	9.642.196	4.695.696	359.159.698	(13.824.529)	345.335.169	*Retail*
Syariah	180.532.461	1.126.868	24.547.676	206.207.005	(9.186.762)	197.020.243	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	22.426.377	1.127.591	203.759	23.757.727	(610.361)	23.147.366	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.676.952	168.819	26.789	5.872.560	(139.173)	5.733.387	*Net Investment finance leases*
Tagihan akseptasi	11.779.066	-	2.515	11.781.581	(61.963)	11.719.618	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain							*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	9.532.493	-	-	9.532.493	-	9.532.493	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	2.336.220	-	6.416	2.342.636	(8.386)	2.334.250	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	2.080.874	-	-	2.080.874	-	2.080.874	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	224.690	-	-	224.690	-	224.690	*Receivable to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih harus diterima	231.650	-	-	231.650	-	231.650	*Sale of accrued marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	3.757.955	-	-	3.757.955	-	3.757.955	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	1.848.754.307	**20.649.839**	**44.958.977**	**1.914.363.123**	**(67.102.310)**	**1.847.260.813**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail*, dan *Syariah*.

**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.

***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.

1) Merupakan kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai stage 1 dan 2 sesuai dengan PSAK 71 serta pembiayaan syariah dari Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah dimana cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK 102 (Revisi 2019).

2) Termasuk dalam kategori "mengalami penurunan nilai" adalah kredit yang dikategorikan sebagai stage 3 sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" serta kredit dengan kolektibilitas non-performing loan dan kredit yang dihitung secara individual yang diberikan oleh Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah senilai Rp24.547.676 dengan cadangan kerugian penurunan nilai senilai Rp6.936.588, dimana cadangan kerugian penurunan nilai dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PSAK 102 (Revisi 2019) (Catatan 2c.(H).(2) dan Catatan 2c.(H).(5)).

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail, and Sharia.*

**) *Excluding marketable securities from investment from the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*

***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*

1) *Including loans that are categorized as stages 1 and 2 in accordance with SFAS No. 71 and sharia financing from Subsidiary engaged in sharia banking where allowance for impairment losses is calculated based on Financial Services Authority Regulationss and SFAS No. 102 (Revised 2019).*

2) *Included in "impaired" portfolio are loans classified as stage 3 in accordance with SFAS No. 71 "Financial Instrument", loans with non performing loan collectibility and loans evaluated by using individual and collective assessment of Subsidiary engaged in sharia banking amounted to Rp24,547,676 with allowance for impairment losses amounted to Rp6,936,588 which is calculated based on Financial Services Authority Regulations and SFAS No. 102 (Revised 2019) (Note 2c.(H).(2) and Note 2c.(H).(5)).*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur risiko kredit atas rekening administratif terbagi atas:

62. RISK MANAGEMENT (continued)

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, exposure to credit risk on administrative accounts are as follows:

	2023						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Impairment provision***	**Neto/ *Net***	
Rekening administratif							*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	113.280.206	-	1.320.247	114.600.453	(834.277)	113.766.176	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	86.395.292	559.040	22.634	86.976.966	(228.713)	86.748.253	*Unused loan facilities*)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	20.589.092	-	292.880	20.881.972	(54.931)	20.827.041	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	14.759.282	-	-	14.759.282	(25.837)	14.733.445	*Standby letter of credit*
	235.023.872	**559.040**	**1.635.761**	**237.218.673**	**(1.143.758)**	**236.074.915**	

	2022						
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Impairment provision***	**Neto/ *Net***	
Rekening administratif							*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	110.774.344	-	232.163	111.006.507	(1.667.398)	109.339.109	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	83.274.830	560.464	70.098	83.905.392	(278.772)	83.626.620	*Unused loan facilities*)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	28.314.070	-	3.211	28.317.281	(102.498)	28.214.783	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	11.830.312	-	-	11.830.312	(24.761)	11.805.551	*Standby letter of credit*
	234.193.556	**560.464**	**305.472**	**235.059.492**	**(2.073.429)**	**232.986.063**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.

*) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan *rating internal* sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, details of the quality of financial assets that are neither past due or nor impaired based on internal ratings are as follows:

	2023			
	Tidak dalam pengawasan[1)]/ *Not under monitoring[1)]*	**Dalam Pengawasan[2)]/ *Under Monitoring[2)]***	**Total**	
Aset				*Assets*
Giro pada Bank Indonesia	108.605.322	-	108.605.322	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	36.606.090	-	36.606.090	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	73.888.157	-	73.888.157	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek **)				*Marketable securities **)*
Pemerintah				*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.613.295	-	9.613.295	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.425.783	-	1.425.783	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	690.638	-	690.638	*Amortised cost*
Non-pemerintah				*Non Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	9.757.095	-	9.757.095	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	47.358.521	-	47.358.521	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.048.743	161.319	5.210.062	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	1.201.883	-	1.201.883	*At cost*
Obligasi pemerintah ***)				*Government Bonds ***)*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.078.509	-	12.078.509	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	90.640.924	-	90.640.924	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	-	163.194.756	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	34.541.812	-	34.541.812	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	11.620.219	8.554.771	20.174.990	*Other receivables- trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.692.928	-	22.692.928	*Securities purchased under agreements to resell*
Tagihan derivatif	1.994.931	-	1.994.931	*Derivatives receivables*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan *rating internal* sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, details of the quality of financial assets that are neither past due or nor impaired based on internal ratings are as follows (continued):

	2023			
	Tidak dalam pengawasan[1)]/ *Not under monitoring[1)]*	**Dalam Pengawasan[2)]/ *Under Monitoring[2)]***	**Total**	
Aset (lanjutan)				*Assets (continued)*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah[*)]				*Loans and sharia receivables/ financing[*)]*
Korporasi	367.373.222	103.737.028	471.110.250	*Corporate*
Komersial	226.273.152	191.452	226.464.604	*Commercial*
Retail	370.692.768	9.502.039	380.194.807	*Retail*
Syariah	216.034.831	-	216.034.831	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	30.685.548	-	30.685.548	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.257.583	-	5.257.583	*Net Investment finance leases*
Tagihan akseptasi	13.153.358	1.640.530	14.793.888	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain				*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	10.258.180	-	10.258.180	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	2.959.133	-	2.959.133	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	7.379.393	-	7.379.393	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	296.997	-	296.997	*Receivables to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih akan diterima	570.711	-	570.711	*Sale of accrued marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	1.391.944	-	1.391.944	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	1.883.286.427	**123.787.139**	**2.007.073.566**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail,* dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
1) Tidak dalam pengawasan (*monitoring*), tidak terdapat keraguan atas pengembalian aset keuangan.
2) Dalam pengawasan (*monitoring*).

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail, and Sharia.*
**) *Excluding marketable securities from investment from the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
1) *Not under monitoring, there is no doubt on the return of financial assets.*
2) *Under monitoring*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan *rating internal* sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, details of the quality of financial assets that are neither past due or nor impaired based on internal ratings are as follows (continued):

	2022			
	Tidak dalam pengawasan[1)]/ *Not under monitoring[1)]*	**Dalam Pengawasan[2)]/ *Under Monitoring[2)]***	**Total**	
Aset				*Assets*
Giro pada Bank Indonesia	107.349.158	-	107.349.158	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	47.809.985	-	47.809.985	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	95.324.112	-	95.324.112	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek [**)]				*Marketable securities [**)]*
Pemerintah				*Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	10.089.149	-	10.089.149	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.117.351	-	1.117.351	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	720.769	-	720.769	*Amortised cost*
Non-pemerintah				*Non Government*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.029.087	-	1.029.087	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	28.191.460	-	28.191.460	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	7.054.487	199.547	7.254.034	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	11.248.978	-	11.248.978	*At cost*
Obligasi pemerintah [***)]				*Government Bonds [***)]*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.972.279	-	6.972.279	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	92.532.086	-	92.532.086	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	180.578.053	-	180.578.053	*Amortised cost*
Diukur pada biaya perolehan	44.213.180	-	44.213.180	*At cost*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	14.479.250	12.144.671	26.623.921	*Other receivables- trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.705.989	-	11.705.989	*Securities purchased under agreements to resell*
Tagihan derivatif	2.252.141	-	2.252.141	*Derivatives receivables*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan *rating internal* sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, details of the quality of financial assets that are neither past due or nor impaired based on internal ratings are as follows (continued):

	2022			
	Tidak dalam pengawasan[1)]/ *Not under monitoring[1)]*	**Dalam Pengawasan[2)]/ *Under Monitoring[2)]***	**Total**	
Aset (lanjutan)				*Assets (continued)*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah[*)]				*Loans and sharia receivables/ financing[*)]*
Korporasi	315.533.620	93.528.980	409.062.600	*Corporate*
Komersial	133.369.046	47.910.385	181.279.431	*Commercial*
Retail	338.531.189	6.290.617	344.821.806	*Retail*
Syariah	180.532.461	-	180.532.461	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	22.426.377	-	22.426.377	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.676.952	-	5.676.952	*Net Investment finance leases*
Tagihan akseptasi	5.757.981	6.021.085	11.779.066	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain				*Other assets*
Pendapatan yang masih akan diterima	9.532.493	-	9.532.493	*Accrued income*
Piutang transaksi nasabah	2.336.220	-	2.336.220	*Receivables from customer transactions*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	2.080.874	-	2.080.874	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Tagihan kepada pemegang polis	224.690	-	224.690	*Receivables to policyholders*
Penjualan efek-efek yang masih akan diterima	231.650	-	231.650	*Sale of accrued marketable securities*
Tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan	3.757.955	-	3.757.955	*Receivables from government bonds pledged as collateral*
	1.682.659.022	**166.095.285**	**1.848.754.307**	

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail,* dan *Syariah*.
**) Tidak termasuk efek-efek yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
***) Tidak termasuk obligasi pemerintah yang merupakan investasi dari pemegang polis *unit-link* Entitas Anak yang tidak memiliki risiko kredit.
1) Tidak dalam pengawasan (*monitoring*), tidak terdapat keraguan atas pengembalian aset keuangan.
2) Dalam pengawasan (*monitoring*).

*) *Segments of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail and Sharia.*
**) *Excluding marketable securities from investment from the Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
***) *Excluding government bonds from investments from Subsidiary's unit-link policyholders with no credit risk.*
1) *Not under monitoring, there is no doubt on the return of financial assets.*
2) *Under monitoring*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kualitas kredit dari rekening administratif yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan *rating internal* sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, details of the credit quality of administrative accounts that are neither past due nor impaired based on internal ratings are as follows:

	2023			
	Tidak dalam pengawasan[1)]/ *Not under monitoring[1)]*	**Dalam Pengawasan[2)]/ *Under Monitoring[2)]***	**Total**	
Rekening administratif				*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	76.928.610	36.363.198	113.291.808	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan[*)]	83.194.108	3.201.184	86.395.292	*Unused loan facilities[*)]*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	13.229.070	7.360.022	20.589.092	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	14.235.742	511.938	14.747.680	*Standby letter of credit*
	187.587.530	**47.436.342**	**235.023.872**	

	2022			
	Tidak dalam pengawasan[1)]/ *Not under monitoring[1)]*	**Dalam Pengawasan[2)]/ *Under Monitoring[2)]***	**Total**	
Rekening administratif				*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	72.551.766	38.222.578	110.774.344	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan[*)]	78.953.595	4.321.235	83.274.830	*Unused loan facilities[*)]*
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	20.422.315	7.891.755	28.314.070	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	11.517.444	312.868	11.830.312	*Standby letter of credit*
	183.445.120	**50.748.436**	**234.193.556**	

) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.
1) Tidak dalam pengawasan (*monitoring*), tidak terdapat keraguan atas pengembalian aset keuangan.
2) Dalam pengawasan (*monitoring*).

) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities.*
1) *Not under monitoring, there is no doubt on the recovery of the financial assets.*
2) *Under monitoring.*

Bank Mandiri:
Terdapat pertimbangan tertentu terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, belum terdapat keterlambatan dalam pembayaran cicilan pokok dan bunga pada saat jatuh temponya. Termasuk dalam jumlah tersebut adalah *credit exposure* atas efek-efek (wesel ekspor), tagihan lainnya - transaksi perdagangan dan tagihan akseptasi dengan kolektibilitas Bank Indonesia dua (dalam perhatian khusus) tanpa memiliki tunggakan per 31 Desember 2023 dan 2022.

Bank Mandiri:
There are certain considerations in relation to the debtor's ability in repaying the loan at maturity date. However, up to 31 December 2023 and 2022, there was no late payment in terms of principal installment as well as interest at maturity date. This amount includes credit exposure on marketable securities (export bills), other receivables - trade transactions and acceptance receivables with Bank Indonesia's collectibility at two (special mention) but with no overdue as of 31 December 2023 and 2022.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Entitas Anak:
Merupakan aset keuangan yang pernah mengalami tunggakan sebelumnya, akan tetapi tidak terdapat tunggakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Analisa umur aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

A. Credit risk (continued)

(i) Maximum exposure to credit risk without considering collateral held and other credit supports (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

c) Credit quality of financial assets (continued)

Subsidiaries:
Financial assets which have experienced past due in the past but no overdue as of 31 December 2023 and 2022.

Aging analysis of financial assets that were past due, but not impaired as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023				
	1 - 30 hari/ *1 - 30 days*	**31 - 60 hari/ *31 - 60 days***	**61 - 90 hari/ *61 - 90 days***	**Total**	
Aset					***Assets***
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	4.610.533	-	-	4.610.533	*Other receivables trade transactions*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah					*Loans and sharia receivables/financing*
Korporasi	1.500.901	-	-	1.500.901	*Corporate*
Komersial	1.669.806	730.874	857.618	3.258.298	*Commercial*
Retail	6.909.852	3.612.109	2.430.642	12.952.603	*Retail*
Syariah	789.132	486.125	428.285	1.703.542	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	1.138.500	331.825	248.557	1.718.882	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	106.897	42.875	62.808	212.580	*Net investment finance leases*
	16.725.621	**5.203.808**	**4.027.910**	**25.957.339**	

	2022				
	1 - 30 hari/ *1 - 30 days*	**31 - 60 hari/ *31 - 60 days***	**61 - 90 hari/ *61 - 90 days***	**Total**	
Aset					***Assets***
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	5.886.049	-	-	5.886.049	*Other receivables trade transactions*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah					*Loans and sharia receivables/financing*
Korporasi	-	-	-	-	*Corporate*
Komersial	859.990	465.725	1.372.601	2.698.316	*Commercial*
Retail	5.148.313	2.718.989	1.774.894	9.642.196	*Retail*
Syariah	577.240	306.724	242.904	1.126.868	*Sharia*
Piutang pembiayaan konsumen	764.575	212.442	150.574	1.127.591	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	71.894	22.893	74.032	168.819	*Net investment finance leases*
	13.308.061	**3.726.773**	**3.615.005**	**20.649.839**	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

A. Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai beserta cadangan kerugian penurunan nilainya berdasarkan kelas aset sebagai berikut:

62. RISK MANAGEMENT (continued)

A. Credit risk (continued)

(ii) Loans

The gross amount of impaired loans, along with the provision for impairment, by class of asset as of 31 December 2023 and 2022, are summarised in the tables below:

2023*)

	Korporasi/ *Corporate*	Komersial/ *Commercial*	*Retail*	Syariah/ *Sharia*	Total	
Mengalami penurunan nilai (dievaluasi secara individual)**						***Impaired (assessed individually)****
Nilai bruto	16.043.424	4.101.590	109.596	2.323.473	22.578.083	*Gross amount*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.045.859)	(3.599.794)	(45.638)	(1.261.290)	(12.952.581)	*Allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	7.997.565	501.796	63.958	1.062.183	9.625.502	*Carrying amount*
Mengalami penurunan nilai (dievaluasi secara kolektif)**						***Impaired (assessed collectively)****
Nilai bruto	-	20.662	6.167.923	17.845.691	24.034.276	*Gross amount*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(15.794)	(3.916.986)	(5.580.552)	(9.513.332)	*Allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	-	4.868	2.250.937	12.265.139	14.520.944	*Carrying amount*
Total nilai bruto	16.043.424	4.122.252	6.277.519	20.169.164	46.612.359	*Total gross amount*
Total cadangan kerugian penurunan nilai	(8.045.859)	(3.615.588)	(3.962.624)	(6.841.842)	(22.465.913)	*Allowance for impairment losses*
Total nilai tercatat	**7.997.565**	**506.664**	**2.314.895**	**13.327.322**	**24.146.446**	***Total carrying amount***

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail*, dan *Syariah*.

**) Merupakan debitur restrukturisasi dan kredit bermasalah yang dikategorikan sebagai *stage* 3 sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan kredit dengan kolektibilitas *non performing loan* dan kredit yang dihitung secara individual yang diberikan oleh Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah senilai Rp20.169.164 dengan cadangan kerugian penurunan nilai senilai Rp6.841.842.

*) *Segment of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail, and Sharia.*

**) *Represents restructured and non performing debtors which categorized as stage 3 in accordance with SFAS 71 "Financial Instruments" and loans with collectability of non-performing loans and loans that are calculated individually provided by a Subsidiary engaged in Sharia Banking amounting to Rp20,169,164 with allowance for losses impairment amounting to Rp6,841,842.*

2022*)

	Korporasi/ *Corporate*	Komersial/ *Commercial*	*Retail*	Syariah/ *Sharia*	Total	
Mengalami penurunan nilai (dievaluasi secara individual)**						***Impaired (assessed individually)****
Nilai bruto	4.532.748	9.521.626	277.106	2.929.652	17.261.132	*Gross amount*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.678.272)	(8.579.571)	(252.410)	(1.445.702)	(13.955.955)	*Allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	854.476	942.055	24.696	1.483.950	3.305.177	*Carrying amount*
Mengalami penurunan nilai (dievaluasi secara kolektif)**						***Impaired (assessed collectively)****
Nilai bruto	81	138.377	4.418.590	21.618.024	26.175.072	*Gross amount*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65)	(129.350)	(2.916.690)	(5.490.886)	(8.536.991)	*Allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	16	9.027	1.501.900	16.127.138	17.638.081	*Carrying amount*
Total nilai bruto	4.532.829	9.660.003	4.695.696	24.547.676	43.436.204	*Total gross amount*
Total cadangan kerugian penurunan nilai	(3.678.337)	(8.708.921)	(3.169.100)	(6.936.588)	(22.492.946)	*Allowance for impairment losses*
Total nilai tercatat	**854.492**	**951.082**	**1.526.596**	**17.611.088**	**20.943.258**	***Total carrying amount***

*) Segmen untuk manajemen risiko dikelompokkan menjadi Korporasi, Komersial, *Retail*, dan *Syariah*.

**) Merupakan debitur restrukturisasi dan kredit bermasalah yang dikategorikan sebagai *stage* 3 sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan kredit dengan kolektibilitas *non performing loan* dan kredit yang dihitung secara individual yang diberikan oleh Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perbankan syariah senilai Rp24.547.676 dengan cadangan kerugian penurunan nilai senilai Rp6.936.588.

*) *Segment of risk management are classified into Corporate, Commercial, Retail, and Sharia.*

**) *Represents restructured and non performing debtors which categorized as stage 3 in accordance with SFAS 71 "Financial Instruments" and loans with collectability of non-performing loans and loans that are calculated individually provided by a Subsidiary engaged in Sharia Banking amounting to Rp24,547,676 with allowance for losses impairment amounting to Rp6,936,588.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas

(i) Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Untuk mengukur besarnya risiko likuiditas, Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain adalah rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") pada Bank Indonesia dan kas, Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM"), cadangan likuiditas, Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"), *Liquidity Coverage Ratio* ("LCR"), *Net Stable Funding Ratio* ("NSFR"), dan ketergantungan terhadap pendanaan nasabah besar.

GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia atau surat berharga yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). PLM merupakan persentase kepemilikan surat berharga Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka, antara lain SBI, SDBI, SBN, dan SRBI.

Pada tanggal 31 Desember 2023 (Bank Mandiri saja), posisi GWM Rupiah rata - rata adalah sebesar 7,32% dari total DPK Rupiah, sesuai dengan limit yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Giro RIM adalah sebesar 0,68% dan PLM adalah sebesar 19,25% dari total DPK Rupiah. Sementara untuk posisi GWM valas rata-rata adalah sebesar 4,10% dari total DPK valuta asing sesuai dengan limit yang ditetapkan.

Cadangan likuiditas adalah alat likuid Bank di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank memiliki batasan dalam bentuk limit *safety level*, yaitu proyeksi cadangan likuiditas Bank untuk 1 bulan ke depan. Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan likuiditas berada di atas *safety level*.

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2023, RIM Bank Mandiri saja sebesar 83,73%.

LCR merupakan rasio antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek Bank dalam kondisi krisis. Pada tanggal 31 Desember 2023, LCR Bank Mandiri saja sebesar 176,24%.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk

(i) Liquidity risk management

Liquidity risk represents the Bank's inability to fulfill all financial liabilities when they become due from its financing cash flows and/or high quality liquid assets that can be pledged, without negatively impacting the Bank's activities and financial condition.

The Bank's liquidity risk is measured through several indicators, which are minimum statutory reserve ratio ("GWM") in Bank Indonesia and cash, Macroprudential Liquidity Reserve ("PLM"), liquidity reserve, Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM"), Liquidity Coverage Ratio ("LCR"), Net Stable Funding Ratio ("NSFR") and dependency on large customer deposits.

GWM is a minimum deposits required to be maintained by the Bank in the form of current accounts with Bank Indonesia or marketable securities in which the amount is determined by Bank Indonesia based on certain percentage from total deposits from customers. PLM is an ownership percentage in Rupiah marketable securities which can be used in open market operations i.e, SBI, SDBI, SBN, and SRBI.

As of 31 December 2023 (Bank Mandiri only), the Bank maintained average Rupiah GWM of 7.32% from total outstanding deposit from customers denominated in Rupiah in accordance with the regulated limit, while for RIM ratio is 0.68% and PLM ratio of 19.25% from the outstanding deposit from customer denominated in Rupiah. Meanwhile for the foreign currency, the Bank maintained average foreign exchange GWM at 4.10% from the outstanding deposits from customer denominated in foreign currency in accordance with the regulated limit.

Liquidity reserve is the Bank's liquidity on top of GWM to anticipate unscheduled liquidity needs. In managing the liquidity reserve, Bank has liquidity reserve limit in the form of safety level limit, which represents the Bank's liquidity reserve projection for one following month. As of 31 December 2023, the liquidity reserve balance is above the safety level.

RIM is a ratio of loans and qualified marketable securities owned by the Bank to the customer deposits, qualified debt securities issued by the Bank and qualified borrowing received by the Bank. As of 31 December 2023, the Banks's RIM is 83.73%.

LCR is a ratio between High Quality Liquid Assets (HQLA) with the estimation of total net cash outflow for the next 30 (thirty) days under a crisis scenario, LCR is used to improve the short-term liquidity of the Bank under a crisis conditions. As of 31 December 2023, the Bank's LCR is 176.24%.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(i) Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

NSFR merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*). Pada tanggal 31 Desember 2023, NSFR Bank Mandiri saja sebesar 116,59%.

Kondisi likuiditas Bank di masa mendatang diproyeksikan melalui metodologi *liquidity gap*, yang merupakan *maturity mismatch* antara komponen-komponen aset dan liabilitas (termasuk *off balance sheet*), yang disusun ke dalam periode waktu (*time bucket*) berdasarkan *contractual maturity* ataupun *behavioral maturity*. Pada tanggal 31 Desember 2023, proyeksi likuiditas Bank sampai dengan 12 bulan ke depan berada dalam posisi surplus. Meskipun proyeksi likuiditas 12 bulan ke depan surplus, Bank selalu mempersiapkan alternatif *funding* apabila kondisi likuiditas pasar menjadi ketat atau tidak sesuai dengan prediksi Bank.

Untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrim (krisis) terhadap kondisi likuiditas, Bank melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala. Hasil *stress testing* yang dilakukan telah dipaparkan kepada Manajemen. Hasil *stress testing* menunjukkan bahwa Bank dapat bertahan pada kondisi krisis likuiditas.

Meskipun hasil *stress testing* menunjukkan bahwa risiko likuiditas dapat dikelola dengan baik, Bank memiliki *Liquidity Contingency Plan* (LCP) yang meliputi strategi pendanaan dan strategi *pricing* dalam kondisi krisis, antara lain pinjaman pasar uang, *repo*, pinjaman bilateral, FX *swap* dan *wholesale funding*. Dalam LCP, penetapan kondisi likuiditas dan strategi-strategi pendanaan telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

Dalam rangka mengantisipasi timbulnya risiko likuiditas akibat adanya perubahan faktor ekonomi global, Bank Mandiri memonitor indikator - indikator eksternal di antaranya: indONIA, suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate), *yield* SUN 10 tahun, *outstanding* likuiditas perbankan Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), *rate interbank call money*, *yield* UST 10 tahun, nilai tukar USD/IDR, *Credit Default Swap* (CDS) 5 tahun Indonesia, serta informasi pasar terkini.

Pelaporan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sejak tanggal-tanggal tersebut. Secara historis, terdapat bagian dari simpanan dalam jumlah yang cukup besar yang diperpanjang pada saat jatuh tempo. Selain itu, jika terdapat keperluan likuiditas, obligasi pemerintah (portofolio diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain) dapat dicairkan dengan menggunakannya sebagai jaminan dalam pasar antar Bank.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(i) Liquidity risk management (continued)

NSFR is a ratio comparing the available stable funding to required stable funding. As of 31 December 2023, the Bank's NSFR is 116.59%.

The Bank uses liquidity gap methodology to project its liquidity conditions for the future. Liquidity gap is basically a maturity mismatch between components of assets and liabilities (including off-balance sheet), which are classified into time bucket based on their contractual maturity or behavioral maturity. As of 31 December 2023, the Bank's liquidity forecast up to next 12 months is at a surplus position. Even in the surplus position for the next 12 months, the Bank always prepares for alternative funding to anticipate tight liquidity in the market or the liquidity is not as expected.

To determine the impact of changes in market factors and internal factors under extreme conditions (crisis) to the liquidity, the Bank conducts stress testing of liquidity risk on a regular basis. The results of stress testing performed was presented to the Management. The stress testing result showed that the Bank will be able to survive under liquidity crisis conditions.

Although the stress testing result showed liquidity risk is well managed, Bank has Liquidity Contingency Plan (LCP) in crisis condition which covers funding strategy and pricing strategy including money market borrowing, repo, bilateral borrowing, FX swap and wholesale funding. In LCP, determination of liquidity situations and funding strategies have considered internal and external conditions.

To anticipate liquidity risks due to volatility of global economic condition, Bank Mandiri monitors external indicators, including indONIA, BI Rate, 10-years SUN Yield, Rupiah Banking Liquidity Outstanding, Composite Stock Price Index (IHSG), Rate Interbank Call Money, 10-years UST Yield, USD/IDR Exchange Rate, Indonesia's 5-years Credit Default Swap (CDS) and the current market informations.

The maturity profile as of 31 December 2023 and 2022 are based on the remaining period from these dates. Historically, there were a large portion of deposits to be renewed upon maturity. In addition, if there is a need for liquidity, Government Bonds (at fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income) can be exercised by utilizing as collateral in interbank market.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan) / *B. Market risk and liquidity risk (continued)*

(i) Manajemen risiko likuiditas (lanjutan) / *(i) Liquidity risk management (continued)*

Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan dengan metode arus kas *discounted* adalah sebagai berikut:

The maturity profile of financial assets and liabilities presented using discounted cash flows method are as follows:

2023

Keterangan	Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*	⩽ 1 bulan/ *⩽1 month*	> 1 bulan - ⩽ 3 bulan/ *> 1 month ⩽3 months*	> 3 bulan ⩽ 6 bulan/ *> 3 month ⩽6 months*	> 6 bulan - ⩽ 12 bulan/ *> 6 month ⩽12 months*	> 1 tahun - ⩽ 3 tahun/ *> 1 year - ⩽ 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	*Description*
Aset									***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	108.605.322	-	108.605.322	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bruto	36.606.090	-	36.606.090	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks - gross*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	73.888.157	-	70.730.056	1.720.946	191.315	45.212	934.704	265.924	*Placement with Bank Indonesia and other banks - gross*
Efek-efek - bruto	94.696.116	19.450.792	19.295.305	9.554.791	7.388.010	9.074.004	11.241.024	18.692.190	*Marketable securities - gross*
Obligasi Pemerintah	309.182.971	-	939.676	5.856.981	4.088.461	25.578.916	67.948.299	204.770.638	*Government bonds*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan - bruto	26.044.553	-	5.403.887	11.847.619	7.279.397	254.620	-	1.259.030	*Other receivables-trade transactions - gross*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bruto	22.692.928	-	22.689.183	2.772	973	-	-	-	*Securities purchased under resale agreements - gross*
Tagihan derivatif - bruto	1.994.931	-	323.226	228.972	199.312	249.941	261.623	731.857	*Derivative receivables - gross*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah - bruto	1.359.832.195	-	17.537.485	26.692.023	44.755.115	81.852.120	166.149.946	1.022.845.506	*Loans and sharia receivables/financing - gross*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	32.749.796	-	892.289	1.672.539	2.457.908	4.816.199	20.186.250	2.724.611	*Consumer financing receivables - gross*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bruto	5.489.242	-	298.722	581.208	807.607	1.346.953	2.324.275	130.477	*Net Investment finance leases - gross*
Tagihan akseptasi - bruto	14.793.888	-	2.682.381	6.043.751	5.763.816	204.009	99.931	-	*Acceptance receivables - gross*
Aset lain-lain - bruto*)	22.866.361	296.998	15.785.032	347.421	465.207	992.615	2.679.499	2.299.589	*Other asset - gross*)
	2.109.442.550	19.747.790	301.788.654	64.549.023	73.397.121	124.414.589	271.825.551	1.253.719.822	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(55.690.787)								*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**2.053.751.763**								***Total***
Liabilitas									***Liabilities***
Simpanan nasabah									*Deposits from customers*
Giro dan giro *wadiah*	552.359.156	-	552.359.156	-	-	-	-	-	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	509.291.489	-	509.291.489	-	-	-	-	-	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	289.797.504	-	172.195.298	98.848.767	13.980.114	4.180.569	592.756	-	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain									*Deposits from other banks*
Giro, giro *wadiah* dan tabungan	6.693.583	-	6.693.583	-	-	-	-	-	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	7.281.896	-	1.048.167	3.005.523	1.688.506	1.539.700	-	-	*Interbank call money*
Deposito berjangka	3.709.301	-	1.009.890	935.100	323.840	624.430	692.865	123.176	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	36.330.064	-	-	136.341	-	14.661.443	14.785.558	6.746.722	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	2.113.853	-	400.480	183.367	364.358	272.274	265.291	628.083	*Derivatives liabilities*
Liabilitas akseptasi	14.793.888	-	2.682.381	6.043.751	5.763.816	204.009	99.931	-	*Acceptance liabilities*
Efek-efek yang diterbitkan	50.517.764	-	1.840.975	4.160.591	15.495.383	-	23.231.784	5.789.031	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	4.799.446	-	3.766.151	-	-	1.033.295	-	-	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain **)	14.371.118	287.424	11.718.324	1.370.402	-	211.261	783.707	-	*Other liabilities***)
Pinjaman yang diterima	95.445.459	-	17.156.358	9.331.354	14.934.345	10.812.227	37.678.617	5.532.558	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	215.171	-	9.643	-	-	9.643	38.574	157.311	*Subordinates loans and marketable securities*
	1.587.719.692	287.424	1.280.171.895	124.015.196	52.550.362	33.548.851	78.169.083	18.976.881	
Perbedaan jatuh tempo	**521.722.858**	**19.460.366**	**(978.383.241)**	**(59.466.173)**	**20.846.759**	**90.865.738**	**193.656.468**	**1.234.742.941**	***Maturity gap***
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai	**466.032.071**								***Net positions, net of allowance for impairment losses***

*) Aset lain-lain terdiri dari pendapatan yang masih akan diterima, tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan, piutang transaksi nasabah, penjualan efek-efek yang masih akan diterima, tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit, dan tagihan kepada pemegang polis.

**) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang transaksi nasabah, liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit, setoran jaminan, pembelian efek-efek yang masih harus dibayar, liabilitas terkait dengan transaksi transfer nasabah, liabilitas sewa dan utang klaim.

*) *Other assets consists of accrued income, receivables from government bonds pledged as collateral, receivables from customer transactions, receivables from sales of marketable securities, receivables related to ATM and credit card transactions and receivables from policyholders.*

**) *Other liabilities consists of customers transfer transaction, liabilities related to ATM and credit card transactions, guarantee deposits, lease liabilities, liabilities related to customer transfer transactions and claim payables.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(i) Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan dengan metode arus kas *discounted* adalah sebagai berikut (lanjutan):

62. RISK MANAGEMENT (continued)

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(i) Liquidity risk management (continued)

The maturity profile of financial assets and liabilities presented using discounted cash flows method are as follows (continued):

2022

Keterangan	Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 bulan - ≤ 3 bulan/ *> 1 month ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 6 bulan/ *> 3 month ≤ 6 months*	> 6 bulan - ≤ 12 bulan/ *> 6 month ≤ 12 months*	> 1 tahun - ≤ 3 tahun/ *> 1 year - ≤ 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	*Description*
Aset									***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	107.349.158	-	107.349.158	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bruto	47.809.985	-	47.809.985	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks - gross*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	95.324.112	-	81.810.959	11.165.100	323.974	706.669	35.180	1.282.230	*Placement with Bank Indonesia and other banks - gross*
Efek-efek - bruto	82.841.009	23.374.462	12.759.977	5.481.946	9.021.588	2.324.150	8.556.992	21.321.894	*Marketable securities - gross*
Obligasi Pemerintah	329.211.764	-	-	854.583	17.422.721	16.383.303	64.931.125	229.620.032	*Government bonds*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan - bruto	33.793.264	-	7.749.872	13.728.796	9.944.312	1.099.409	-	1.270.875	*Other receivables-trade transactions - gross*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bruto	11.705.989	-	11.533.697	168.938	3.354	-	-	-	*Securities purchased under resale agreements - gross*
Tagihan derivatif - bruto	2.252.141	-	293.403	253.438	204.392	206.227	634.496	660.185	*Derivative receivables - gross*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah - bruto	1.172.599.882	-	41.831.368	32.818.682	182.421.845	54.482.041	129.299.057	731.746.889	*Loans and sharia receivables/financing - gross*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	23.757.727	-	690.737	1.268.075	1.841.129	3.576.810	7.952.509	8.428.467	*Consumer financing receivables - gross*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bruto	5.872.560	-	288.622	556.040	800.244	1.412.962	2.664.162	150.530	*Net Investment finance leases - gross*
Tagihan akseptasi - bruto	11.781.581	-	3.229.392	4.832.027	3.468.111	251.364	687	-	*Acceptance receivables - gross*
Aset lain-lain - bruto*)	18.170.299	224.689	10.218.610	311.590	672.047	717.761	1.442.316	4.583.286	*Other asset - gross*)
	1.942.469.471	**23.599.151**	**325.565.780**	**71.439.215**	**226.123.717**	**81.160.696**	**215.516.524**	**999.064.388**	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(67.102.310)								*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**1.875.367.161**								***Total***
Liabilitas									***Liabilities***
Simpanan nasabah									*Deposits from customers*
Giro dan giro *wadiah*	519.077.962	-	519.077.962	-	-	-	-	-	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	480.482.766	-	480.482.766	-	-	-	-	-	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	296.015.201	-	186.117.129	83.236.600	17.359.502	8.282.637	1.019.333	-	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain									*Deposits from other banks*
Giro, giro *wadiah* dan tabungan	5.734.401	-	5.734.401	-	-	-	-	-	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	4.436.101	-	2.849.621	492.560	626.895	467.025	-	-	*Interbank call money*
Deposito berjangka	4.676.907	-	2.802.981	467.452	783.225	311.900	311.349	-	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.325.475	-	-	1.134.117	11.419.307	4.328.826	4.278.588	3.164.637	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	2.126.769	-	192.749	331.139	154.570	295.520	676.279	476.512	*Derivatives liabilities*
Liabilitas akseptasi	11.781.581	-	3.229.392	4.832.027	3.468.111	251.364	687	-	*Acceptance liabilities*
Efek-efek yang diterbitkan	45.774.139	-	1.939.402	-	-	6.313.745	26.852.710	10.668.282	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	6.493.794	-	5.480.043	-	-	1.013.751	-	-	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain **)	9.538.761	323.394	7.381.795	965.537	-	-	868.035	-	*Other liabilities***)
Pinjaman yang diterima	62.840.118	-	6.028.817	253.082	7.313.682	11.049.753	24.368.616	13.826.168	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	633.333	-	9.539	-	-	509.308	38.157	76.329	*Subordinates loans and marketable securities*
	1.473.937.308	**323.394**	**1.221.326.597**	**91.712.514**	**41.125.292**	**32.823.829**	**58.413.754**	**28.211.928**	
Perbedaan jatuh tempo	**468.532.163**	**23.275.757**	**(895.760.817)**	**(20.273.299)**	**184.998.425**	**48.336.867**	**157.102.770**	**970.852.460**	***Maturity gap***
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai	**401.429.853**								***Net positions, net of allowance for impairment losses***

*) Aset lain-lain terdiri dari pendapatan yang masih akan diterima, tagihan atas obligasi pemerintah yang diagunkan, piutang transaksi nasabah, penjualan efek-efek yang masih akan diterima, tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit, dan tagihan kepada pemegang polis.

**) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang transaksi nasabah, liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit, setoran jaminan, pembelian efek-efek yang masih harus dibayar, liabilitas terkait dengan transaksi transfer nasabah, liabilitas sewa dan utang klaim.

*) *Other assets consists of accrued income, receivables from government bonds pledged as collateral, receivables from customer transactions, receivables from sales of marketable securities, receivables related to ATM and credit card transactions and receivables from policyholders.*

**) *Other liabilities consists of customers transfer transaction, liabilities related to ATM and credit card transactions, guarantee deposits, lease liabilities, liabilities related to customer transfer transactions and claim payables.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan) / *B. Market risk and liquidity risk (continued)*

(i) Manajemen risiko likuiditas (lanjutan) / *(i) Liquidity risk management (continued)*

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas keuangan sesuai kontrak berdasarkan arus kas *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The following maturity table provides information regarding contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flows as of 31 December 2023 and 2022 as follows:

2023

Keterangan	Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*	⩽ 1 bulan/ *⩽ 1 month*	> 1 bulan - ⩽ 3 bulan/ *> 1 month ⩽ 3 months*	> 3 bulan ⩽ 6 bulan/ *> 3 month ⩽ 6 months*	> 6 bulan - ⩽ 12 bulan/ *> 6 month ⩽ 12 months*	> 1 tahun - ⩽ 3 tahun/ *> 1 year - ⩽ 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	*Description*
Liabilitas									***Liabilities***
Simpanan nasabah									*Deposit from customers*
Giro dan giro *wadiah*	553.337.122	-	553.337.122	-	-	-	-	-	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	509.472.004	-	509.013.106	76.016	72.636	95.584	138.457	76.205	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	290.687.025	-	172.635.462	98.506.723	14.518.899	4.424.315	601.626	-	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain									*Deposits from other banks*
Giro, giro *wadiah* dan tabungan	6.699.949	-	6.699.949	-	-	-	-	-	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	7.431.438	-	766.698	3.368.967	1.730.129	1.565.644	-	-	*Interbank call money*
Deposito berjangka	3.830.443	-	1.201.045	948.084	336.032	1.214.114	131.168	-	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	38.337.611	-	-	136.341	-	15.354.025	15.888.241	6.959.004	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	1.493.546	-	736.342	141.834	260.070	110.773	84.881	159.646	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	14.793.888	-	2.682.381	6.043.751	5.763.816	204.009	99.931	-	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	53.067.478	-	232.629	133.214	16.763.283	1.394.701	27.021.030	7.522.621	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	4.799.446	-	3.766.151	-	-	1.033.295	-	-	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	14.371.118	287.424	11.718.324	1.370.402	-	211.261	783.707	-	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	97.890.211	-	15.754.464	9.403.206	15.320.290	11.591.168	39.826.261	5.994.822	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	246.846	-	10.219	1.152	1.728	13.098	52.395	168.254	*Subordinated loans and marketable securities*
Total	**1.596.458.125**	**287.424**	**1.278.553.892**	**120.129.690**	**54.766.883**	**37.211.987**	**84.627.697**	**20.880.552**	***Total***

2022

Keterangan	Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*	⩽ 1 bulan/ *⩽ 1 month*	> 1 bulan - ⩽ 3 bulan/ *> 1 month ⩽ 3 months*	> 3 bulan ⩽ 6 bulan/ *> 3 month ⩽ 6 months*	> 6 bulan - ⩽ 12 bulan/ *> 6 month ⩽ 12 months*	> 1 tahun - ⩽ 3 tahun/ *> 1 year - ⩽ 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	*Description*
Liabilitas									***Liabilities***
Simpanan nasabah									*Deposit from customers*
Giro dan giro *wadiah*	519.777.663	-	519.777.663	-	-	-	-	-	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	480.648.134	-	480.019.332	350.911	117.920	63.061	64.928	31.982	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	296.436.255	-	186.335.025	82.038.829	18.513.528	8.512.927	1.035.946	-	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain									*Deposits from other banks*
Giro, giro *wadiah* dan tabungan	5.738.669	-	5.738.669	-	-	-	-	-	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	4.523.557	-	2.916.320	502.377	635.426	469.434	-	-	*Interbank call money*
Deposito berjangka	4.781.196	-	2.848.035	485.142	790.673	329.932	327.414	-	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	25.665.813	-	-	1.143.056	12.145.349	4.535.200	4.502.277	3.339.931	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	1.826.945	-	466.677	201.024	139.064	246.698	517.386	256.096	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	11.781.581	-	3.229.393	4.832.027	3.468.110	251.364	687	-	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	49.247.840	-	64.402	89.198	403.580	5.652.838	28.417.942	14.619.880	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	6.493.794	-	5.480.043	-	-	1.013.751	-	-	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	9.538.761	323.394	7.381.795	965.537	-	-	868.035	-	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	63.790.899	-	6.293.873	195.769	7.393.685	9.552.554	25.703.218	14.651.800	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	661.653	-	13.079	7.080	10.620	516.388	38.157	76.329	*Subordinated loans and marketable securities*
Total	**1.480.912.760**	**323.394**	**1.220.564.306**	**90.810.950**	**43.617.955**	**31.144.147**	**61.475.990**	**32.976.018**	***Total***

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(i) Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari rekening administratif sesuai kontrak berdasarkan arus kas *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(i) Liquidity risk management (continued)

The following maturity table provides information regarding contractual maturities of administrative accounts based on undiscounted cash flows as of 31 December 2023 and 2022 as follows:

2023

Keterangan	Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*	⩽ 1 bulan/ *⩽1 month*	> 1 bulan - ⩽ 3 bulan/ *> 1 month ⩽3 months*	> 3 bulan ⩽ 6 bulan/ *> 3 month ⩽6 months*	> 6 bulan - ⩽ 12 bulan/ *> 6 month ⩽12 months*	> 1 tahun - ⩽ 3 tahun/ *> 1 year - ⩽3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	*Description*
Rekening Administratif									*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	114.600.453	-	114.600.453	-	-	-	-	-	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	86.976.966	-	86.976.966	-	-	-	-	-	*Unused loan facilities*)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	20.881.972	-	5.438.044	7.153.328	3.134.565	1.780.902	3.375.133	-	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	14.759.282	-	14.759.282	-	-	-	-	-	*Standby letter of credit*
	237.218.673	**-**	**221.774.745**	**7.153.328**	**3.134.565**	**1.780.902**	**3.375.133**	**-**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.

*) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities*

2022

Keterangan	Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*	⩽ 1 bulan/ *⩽1 month*	> 1 bulan - ⩽ 3 bulan/ *> 1 month ⩽3 months*	> 3 bulan ⩽ 6 bulan/ *> 3 month ⩽6 months*	> 6 bulan - ⩽ 12 bulan/ *> 6 month ⩽12 months*	> 1 tahun - ⩽ 3 tahun/ *> 1 year - ⩽3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	*Description*
Rekening Administratif									*Administrative accounts*
Bank garansi yang diterbitkan	111.006.507	-	111.006.507	-	-	-	-	-	*Bank guarantees issued*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan*)	83.905.392	-	83.905.392	-	-	-	-	-	*Unused loan facilities*)
Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	28.317.281	-	7.420.829	13.204.528	3.876.944	2.108.466	1.050.190	656.324	*Outstanding irrevocable letter of credit*
Standby letter of credit	11.830.312	-	11.830.312	-	-	-	-	-	*Standby letter of credit*
	235.059.492	**-**	**214.163.040**	**13.204.528**	**3.876.944**	**2.108.466**	**1.050.190**	**656.324**	

*) Termasuk fasilitas kredit *committed* dan *uncommitted* kartu kredit yang belum digunakan.

*) *Include unused committed and uncommitted credit card facilities*

(ii) Manajemen risiko suku bunga *portfolio banking book*

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan mengoptimalkan struktur laporan posisi keuangan Bank untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Bank. Pengendalian risiko pasar *banking book* dilakukan dengan menetapkan *limit* yang mengacu pada ketentuan Regulator dan internal yang dimonitor secara mingguan maupun bulanan oleh *Market Risk Management Unit*.

(ii) Interest rate risk management on banking book portfolio

Market risk is the risk of balance sheet position and administrative accounts, including derivative transactions, resulted from changes in market conditions, including changes in option price risk.

Managing market risk on banking book is performed by optimising the structure of the Bank's statement of financial position to obtain maximum yield of return at acceptable risk level to the Bank. The monitoring of market risk on banking book is performed by setting a limit which is refer to the regulator requirements and the internal policies, which are monitored on a weekly and monthly basis by the Market Risk Management Unit.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(ii) Manajemen risiko suku bunga *portfolio banking book* (lanjutan)

Sumber risiko suku bunga *banking book* adalah *repricing risk* (*repricing mismatch* antara komponen aset dan liabilitas), *basis risk* (penggunaan suku bunga acuan yang berbeda), *yield curve risk* (perubahan bentuk dan *slope yield curve*) dan *option risk* (pelunasan kredit atau pencairan deposito sebelum jatuh tempo). Bank menggunakan *repricing gap* dan melakukan *sensitivity analysis* guna memperoleh proyeksi perubahan *Net Interest Income* ("NII").

a. Sensitivitas terhadap pendapatan bunga - neto

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas pendapatan bunga - neto Bank Mandiri untuk 1 (satu) tahun ke depan terhadap pergerakan suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang memiliki suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Bank Mandiri saja) yaitu:

	Peningkatan 400 bps/ *Increased by 400 bps*	**Penurunan 400 bps/ *Decreased by 400 bps***	
31 Desember 2023			***31 December 2023***
Menambah/(mengurangi) pendapatan bunga - neto (Rp miliar)	121,23	(3.091,51)	*Increase/(decrease) net interest income (Rp billion)*

	Peningkatan 400 bps/ *Increased by 400 bps*	**Penurunan 400 bps/ *Decreased by 400 bps***	
31 Desember 2022			***31 December 2022***
Menambah/(mengurangi) pendapatan bunga - neto (Rp miliar)	(2.844,96)	(2.508,39)	*Increase/(decrease) net interest income (Rp billion)*

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan pada tanggal pelaporan keuangan.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(ii) Interest rate risk management on banking book portfolio (continued)

The sources of banking book's interest rate risk are repricing risk (repricing mismatch between asset and liability components), basis risk (usage of different interest rate reference), yield curve risk (changes in shape and slope of the yield curve) and the option risk (loan repayment or redeem of deposit before maturity). The Bank uses the repricing gap and performs sensitivity analysis to obtain the projected Net Interest Income ("NII").

a. Sensitivity of net interest income

The table below shows the sensitivity of net income for the next 1 year to interest rate movement of interest bearing assets and liabilities of Bank Mandiri as of 31 December 2023 and 2022 (Bank Mandiri only) as follows:

The above projections assumed that all other variables are held constant at reporting date.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(ii) Manajemen risiko suku bunga *portfolio banking book* (lanjutan)

b. Sensitivitas pendapatan bunga untuk kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas pendapatan bunga untuk kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atas perubahan tingkat suku bunga (Bank Mandiri saja) yaitu:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(ii) Interest rate risk management on banking book portfolio (continued)

b. Sensitivity of interest income from financial assets classified at fair value through other comprehensive income

The table below shows the sensitivity of Bank Mandiri's interest income from available for sale marketable securities to movement of interest rates as of 31 December 2023 and 2022 which will be due in 12 (twelve) months due to interest rate changes (Bank Mandiri only) as follows:

	Peningkatan 400 bps/ *Increased by 400 bps*	**Penurunan 400 bps/ *Decreased by 400 bps***	
31 Desember 2023			***31 December 2023***
Menambah/(mengurangi) pendapatan bunga (Rp miliar)	211,72	(212,08)	*Increase/(decrease) interest income (Rp billion)*

	Peningkatan 400 bps/ *Increased by 400 bps*	**Penurunan 400 bps/ *Decreased by 400 bps***	
31 Desember 2022			***31 December 2022***
Menambah/(mengurangi) pendapatan bunga (Rp miliar)	197,38	(195,37)	*Increase/(decrease) interest income (Rp billion)*

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan pada tanggal pelaporan keuangan.

Sensitivitas pendapatan bunga untuk kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, tidak memperhitungkan efek dari lindung nilai dan tindakan-tindakan Bank Mandiri untuk mengurangi risiko atas tingkat suku bunga. Dalam kenyataannya, Bank Mandiri secara proaktif melakukan mitigasi atas efek prospektif pergerakan tingkat suku bunga.

The above projections assumed that all other variables are held constant at reporting date.

The sensitivities of interest income from fair value through other comprehensive income without considering the effect off hedging and actions that Bank Mandiri would take to mitigate the impact of this interest rate risk. In practice, Bank Mandiri proactively seeks to mitigate the effect of prospective interest movements.

c. Eksposur Bank Mandiri terhadap risiko tingkat suku bunga (*repricing gap*)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan aset dan liabilitas keuangan Bank Mandiri pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang lebih dulu antara tanggal *repricing* secara kontraktual (*contractual repricing*) atau tanggal jatuh tempo:

c. Bank Mandiri's exposure to interest rate risk (repricing gap)

The tables below summarise Bank Mandiri's financial asset and liabilities at carrying amounts categorised by earlier of contractual repricing date or maturity dates:

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan) / *B. Market risk and liquidity risk (continued)*

(ii) Manajemen risiko suku bunga *portfolio banking book* (lanjutan) / *(ii) Interest rate risk management on banking book portfolio (continued)*

c. Eksposur Bank Mandiri terhadap risiko tingkat suku bunga (*repricing gap*) (lanjutan) / *c. Bank Mandiri's exposure to interest rate risk (repricing gap) (continued)*

2023

	Dikenakan bunga/*Interest bearing*										
	Kurang dari sama dengan 1 bulan/ *Less than or equal to 1 month*	Lebih dari 1 bulan tapi tidak lebih dari 3 bulan/ *Over 1 month but not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tapi tidak lebih dari 1 tahun/ *Over 3 months but not more than 1 year*	Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 2 tahun/ *Over 1 year but not more than 2 years*	Lebih dari 2 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun/ *Over 2 years but not more than 3 years*	Lebih dari 3 tahun tapi tidak lebih dari 4 tahun/ *Over 3 years but not more than 4 years*	Lebih dari 4 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun/ *Over 4 years but not more than 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Tidak dikenakan bunga/ *Non interest bearing*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	108.605.322	108.605.322	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	34.531.618	-	-	-	-	-	-	-	2.074.472	36.606.090	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.184.180	1.417.743	78.823	-	-	-	-	-	17.207.411	73.888.157	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	22.838.409	7.271.250	9.799.260	5.322.235	4.246.938	8.232.473	2.228.168	6.167.194	28.590.189	94.696.116	*Marketable securities*
Obligasi pemerintah	936.853	5.792.369	16.768.419	22.549.891	28.136.168	13.652.381	10.117.146	167.590.272	43.639.472	309.182.971	*Government bonds*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	5.403.887	11.847.619	7.534.017	-	-	-	-	1.259.030	-	26.044.553	*Other receivables - trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.689.183	2.772	973	-	-	-	-	-	-	22.692.928	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	6.819	-	261.822	169.585	92.038	43.732	448.145	55.226	917.564	1.994.931	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah[*)]	217.328.322	507.823.263	215.974.740	55.468.468	32.162.877	15.190.784	10.272.960	67.703.244	237.907.537	1.359.832.195	*Loans and sharia receivables/ financing[*)]*
Piutang pembiayaan konsumen	1.216.323	2.344.176	9.310.284	9.500.663	6.086.582	3.138.168	1.089.394	64.206	-	32.749.796	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	301.803	587.456	2.182.092	1.642.968	643.162	116.788	14.973	-	-	5.489.242	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	14.793.888	14.793.888	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	15.785.032	347.421	4.183.583	992.615	2.679.499	2.299.589	-	-	296.998	26.584.737	*Other assets*
	376.222.429	537.434.069	266.094.013	95.646.425	74.047.264	42.673.915	24.170.786	242.839.172	454.032.853	2.113.160.926	
Simpanan nasabah											*Deposits from customers*
Giro dan giro wadiah	310.235.906	6.233.119	28.049.036	37.398.714	37.398.714	37.398.714	37.398.714	37.398.714	20.847.525	552.359.156	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan Wadiah	128.443.425	9.466.517	42.425.476	56.434.347	56.390.124	56.365.914	56.369.579	56.369.733	47.026.374	509.291.489	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	174.166.615	96.239.651	15.319.326	4.071.912	-	-	-	-	-	289.797.504	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain											*Deposits from other banks*
Giro, giro wadiah dan tabungan	2.163.848	123.848	557.317	743.089	743.089	743.089	743.089	743.089	133.125	6.693.583	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	4.358.522	2.235.673	687.701	-	-	-	-	-	-	7.281.896	*Interbank call money*
Deposito berjangka	1.932.928	985.930	790.443	-	-	-	-	-	-	3.709.301	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	14.797.950	1.647.789	13.137.601	4.821.862	1.924.862	-	-	36.330.064	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	28.975	7.717	373.278	156.490	108.802	24.643	430.159	17.685	966.104	2.113.853	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	14.793.888	14.793.888	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	-	200.000	17.162.101	9.247.021	16.436.111	2.021.773	3.668.974	-	1.781.784	50.517.764	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	4.799.446	4.799.446	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	11.718.324	1.370.402	3.718.375	211.261	783.707	-	-	-	287.424	18.089.493	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	6.734.351	12.168.860	34.416.051	10.253.388	15.133.164	1.122.090	885.004	2.056.247	12.676.304	95.445.459	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	215.171	-	215.171	*Subordinated loans and marketable securitites*
	639.782.894	129.031.717	158.297.054	120.164.011	140.131.312	102.498.085	101.420.381	96.800.639	103.378.974	1.591.438.067	
Total *repricing gap* suku bunga	**(263.560.465)**	**408.402.352**	**107.796.958**	**(24.517.586)**	**(66.084.048)**	**(59.824.170)**	**(77.249.595)**	**146.038.533**	**350.653.879**	**521.655.858**	***Total interest repricing gap***

[*)] Termasuk piutang/dan pembiayaan Entitas Anak yang menjalankan usaha secara syariah dimana menerima imbalan berupa margin dan bagi hasil

[*)] *Represent receivables/and financing from subsidiary engaged in sharia business which earn margin and profit sharing.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan) / *B. Market risk and liquidity risk (continued)*

(ii) Manajemen risiko suku bunga *portfolio banking book* (lanjutan) / *(ii) Interest rate risk management on banking book portfolio (continued)*

c. Eksposur Bank Mandiri terhadap risiko tingkat suku bunga (*repricing gap*) (lanjutan) / *c. Bank Mandiri's exposure to interest rate risk (repricing gap) (continued)*

2022

	Dikenakan bunga/*Interest bearing*										
	Kurang dari sama dengan 1 bulan/ *Less than or equal to 1 month*	Lebih dari 1 bulan tapi tidak lebih dari 3 bulan/ *Over 1 month but not more than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tapi tidak lebih dari 1 tahun/ *Over 3 months but not more than 1 year*	Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 2 tahun/ *Over 1 year but not more than 2 years*	Lebih dari 2 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun/ *Over 2 years but not more than 3 years*	Lebih dari 3 tahun tapi tidak lebih dari 4 tahun/ *Over 3 years but not more than 4 years*	Lebih dari 4 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun/ *Over 4 years but not more than 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Tidak dikenakan bunga/ *Non interest bearing*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	107.349.158	107.349.158	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	46.942.493	-	-	-	-	-	-	-	867.492	47.809.985	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	59.871.447	18.189.718	813.977	-	-	-	-	-	16.448.970	95.324.112	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	27.304.503	4.753.460	11.373.818	2.232.774	5.178.828	4.164.373	7.949.157	7.984.497	11.899.599	82.841.009	*Marketable securities*
Obligasi pemerintah	-	1.758.432	32.327.315	26.903.013	20.823.660	28.892.146	13.370.029	156.176.410	48.960.759	329.211.764	*Government bonds*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	7.730.659	13.705.811	10.994.926	-	-	-	-	1.227.446	134.422	33.793.264	*Other receivables - trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	11.553.946	148.690	3.353	-	-	-	-	-	-	11.705.989	*Securities purchased under resale agreements*
Tagihan derivatif	112	109.292	91.418	368.201	425.929	181.088	34.449	382.663	658.989	2.252.141	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah*)	159.404.187	440.731.032	179.148.448	51.263.505	33.819.636	20.251.016	16.303.925	65.471.128	206.207.005	1.172.599.882	*Loans and sharia receivables/ financing*)
Piutang pembiayaan konsumen	911.436	1.734.186	6.932.199	7.142.114	4.268.099	2.052.898	696.598	20.197	-	23.757.727	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	293.167	565.276	2.227.257	2.013.057	697.891	70.431	5.481	-	-	5.872.560	*Net investment finance leases*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	11.781.581	11.781.581	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	10.218.610	311.590	672.047	717.761	1.442.316	4.583.286	-	-	224.689	18.170.299	*Other assets*
	324.230.560	482.007.487	244.584.758	90.640.425	66.656.359	60.195.238	38.359.639	231.262.341	404.532.664	1.942.469.471	
Simpanan nasabah											*Deposits from customers*
Giro dan giro wadiah	291.820.938	5.787.582	26.044.120	34.725.494	34.725.494	34.725.494	34.725.494	34.725.494	21.797.852	519.077.962	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan Wadiah	117.250.557	9.319.616	40.540.150	53.847.818	53.841.562	53.825.574	53.816.266	53.826.818	44.214.405	480.482.766	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	188.200.251	79.765.659	19.333.948	8.715.253	90	-	-	-	-	296.015.201	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain											*Deposits from other banks*
Giro, giro wadiah dan tabungan	1.804.288	106.660	479.968	639.958	639.958	639.958	639.958	639.958	143.695	5.734.401	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	470.171	492.560	3.273.370	-	200.000	-	-	-	-	4.436.101	*Interbank call money*
Deposito berjangka	2.805.712	763.255	796.589	311.351	-	-	-	-	-	4.676.907	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.620	1.115.477	9.584.004	3.942.252	1.680.640	7.197.522	785.960	-	-	24.325.475	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	21.009	273.015	386.856	533.048	258.488	63.631	27.676	315.472	247.574	2.126.769	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	11.781.581	11.781.581	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	-	-	5.173.294	17.299.323	9.228.989	8.619.250	2.003.283	-	3.450.000	45.774.139	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	6.493.794	6.493.794	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	7.381.795	965.537	-	-	868.035	-	-	-	323.394	9.538.761	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	7.570.990	8.949.929	29.103.550	7.336.634	4.778.940	2.872.123	314.577	1.135.000	778.375	62.840.118	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	633.333	-	633.333	*Subordinated loans and marketable securitites*
	617.345.331	107.539.290	134.715.849	127.351.131	106.222.196	107.943.552	92.313.214	91.276.075	89.230.670	1.473.937.308	
Total *repricing gap* suku bunga	**(293.114.771)**	**374.468.197**	**109.868.909**	**(36.710.706)**	**(39.565.837)**	**(47.748.314)**	**(53.953.575)**	**139.986.266**	**315.301.994**	**468.532.163**	***Total interest repricing gap***

*) Termasuk piutang/dan pembiayaan Entitas Anak yang menjalankan usaha secara syariah dimana menerima imbalan berupa margin dan bagi hasil

*) *Represent receivables/and financing from subsidiary engaged in sharia business which earn margin and profit sharing.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(ii) Manajemen risiko suku bunga *portfolio banking book* (lanjutan)

Untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar pada kondisi ekstrim (krisis) terhadap pendapatan dan modal, Bank melakukan *stress testing* risiko pasar *banking book* secara berkala.

(iii) Manajemen *pricing*

Bank menerapkan kebijakan *pricing* baik untuk produk dana maupun produk kredit. Kebijakan *pricing* merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan *Net Interest Margin* ("NIM") dan sekaligus mendukung Bank menguasai *market share* dengan mempertimbangkan kondisi persaingan.

Bank secara konsisten berupaya menerapkan strategi sebagai *market leader* dalam hal *pricing* pendanaan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan kebutuhan dana, Bank dapat menerapkan strategi agresif (lebih besar dari pesaing utama) atau defensif (sama atau lebih kecil dari pesaing utama).

Dalam menetapkan suku bunga kredit, Bank menerapkan *risk based pricing* yaitu pemberian suku bunga kredit kepada nasabah bervariasi berdasarkan tingkat risiko kreditnya. Dalam rangka meminimalkan risiko suku bunga, maka suku bunga kredit disesuaikan dengan suku bunga sumber dana pembiayaan. Selain biaya dana, suku bunga kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya *overhead*, premi risiko kredit dan marjin keuntungan Bank dengan tetap memperhatikan *competitiveness* dengan pesaing utama. Suku bunga kredit dapat berupa suku bunga mengambang (*floating rate*) atau suku bunga tetap (*fixed rate*) untuk tenor tertentu.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(ii) Interest rate risk management on banking book portfolio (continued)

To assess the impact of changes in interest rates and exchange rates at extreme conditions (crisis) to earnings and capital, the Bank conducts stress testing on the market risk of banking book regularly.

(iii) Pricing management

The Bank implements pricing policy for loans or deposit products. The pricing policy is one of the Bank's strategy to maximise Net Interest Margin ("NIM") and to support the Bank to dominate the market share by considering the competition condition.

The Bank consistently manages to apply the strategy as market leader in terms of fund pricing. However, considering the liquidity conditions and funding needs, the Bank may implement an aggressive strategy (greater than major competitors) or defensive (equal to or smaller than major competitors).

In determine interest rates, the Bank implements risk-based pricing by providing a range of interest rate of loan to customers based on credit risk level. In order to minimize interest rate risk, the loan interest rate is adjusted with interest rate from cost of funds. Other than cost of funds, loan interest rates are determined with consideration to overhead costs, credit risk premiums and profit margins as well as taking into account the Bank's competitiveness with its major competitors. Interest rates for loan can be either a floating or a fixed rate for certain tenors.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan nilai tukar di pasar yang berlawanan pada saat Bank memiliki posisi terbuka. Bank menerapkan manajemen risiko nilai tukar yang memadai sehingga terhindar dari kerugian akibat perubahan atau volatilitas nilai tukar. Risiko nilai tukar berasal dari transaksi valuta asing dengan nasabah atau *counterparty* yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Neto ("PDN") sesuai dengan limit internal dan ketentuan Bank Indonesia.

Perhitungan PDN pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang mengatur mengenai penghapusan peraturan PDN 30 menit. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, rasio PDN secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing yang dinyatakan dalam Rupiah ditambah dengan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam rekening administratif, untuk setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah, sedangkan PDN untuk laporan posisi keuangan adalah selisih bersih jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam mata uang asing yang dinyatakan dalam Rupiah. Terhitung tanggal 20 Maret 2020 sesuai dengan Surat BI No. 22/53/DPPK/Srt/B, transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* ("DNDF") disertakan ke dalam perhitungan PDN.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management

Exchange rate risk represents potential loss arising from unfavourable exchange rate movements in the market when the Bank has an open position. The Bank applies a proper foreign exchange risk management to avoid loss arising from exchange rate changes or volatility. Exchange rate risk arises from foreign exchange currency transactions with customer or counterparty which leads to an open position in foreign currency or structural positions in foreign currencies due to capital investment. The Bank manages exchange rate risk by monitoring and managing the Net Open Position ("NOP") in accordance with internal limits and the regulation of Bank Indonesia.

The calculation of the net open position as of 31 December 2023 and 2022 is based on Bank Indonesia's Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated 1 July 2010 which amended by Bank Indonesia's Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated on 29 May 2015 regarding removal implementation NOP 30 minutes. In accordance with Bank Indonesia Regulation, the overall NOP ratio is the total absolute amount from the net difference between assets and liabilities for each foreign currency on statement of financial position which presented in Rupiah added with the net difference between receivables and payables of commitments and contingencies for each foreign currency recorded in administrative which presented in Rupiah. The net open position for the statement of financial position is the net difference between total assets and liabilities for each foreign currency which presented in Rupiah. As of 20 March 2020, in accordance with BI Letter No. 22/53/DPPK/Srt/B, Domestic Non-Deliverable Forward ("DNDF") transactions are included in the NOP calculation.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

a. Posisi devisa neto

Posisi devisa neto Bank Mandiri saja berdasarkan mata uang (dinyatakan dalam Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

a. Net open position

Net open position of Bank Mandiri by currencies (expressed in Rupiah) as of 31 December 2023 as follows:

Mata uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currency*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)*)**				***OVERALL (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***)***
Dolar Amerika Serikat	658.885.858	658.829.939	55.919	*United States Dollar*
Euro Eropa	17.924.221	16.122.873	1.801.348	*European Euro*
Dolar Singapura	3.594.607	3.438.009	156.598	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	17.300.152	17.588.924	288.772	*Japanese Yen*
Dolar Australia	1.689.872	1.670.540	19.332	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	1.449.552	1.342.238	107.314	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	106.466	211.512	105.046	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	14.744.111	14.527.848	296.025*)	*Others*
Total			2.830.354	*Total*
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	528.192.185	525.158.737	3.033.448	*United State Dollar*
Euro Eropa	16.242.207	9.062.486	7.179.721	*European Euro*
Dolar Singapura	2.935.575	3.119.047	(183.472)	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	6.194.585	7.269.832	(1.075.247)	*Japanese Yen*
Dolar Australia	1.612.334	567.094	1.045.240	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	849.372	309.567	539.805	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	106.466	103.794	2.672	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	12.294.149	11.080.137	1.214.012	*Others*
Total			11.756.179	*Total*
Total Modal (Catatan 58)			221.988.279	*Total Capital (Note 58)*
Rasio PDN (laporan posisi keuangan)			5,30%	*NOP ratio (statement of financial position)*
Rasio PDN (keseluruhan)			1,28%	*NOP ratio (overall)*

Rasio PDN pada tanggal 31 Desember 2023 jika menggunakan modal bulan November 2023 adalah sebagai berikut:

Net Open Position ratio as of 31 December 2023 if calculated using November 2023 capital as follows:

Modal bulan November 2023/*November 2023 Capital*	214.772.668
Rasio PDN (laporan posisi keuangan)/*NOP ratio (Statement of financial position)*	5,47%
Rasio PDN (keseluruhan)***) /*NOP ratio (overall)***)*	1,32%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya.
**) Merupakan penjumlahan dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya.
***) Perhitungan posisi devisa neto bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2010, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

**) Represents total absolute amount of difference between assets and liabilities from other foreign currencies.*
***) Represents total amount of difference between assets and liabilities from other foreign currencies.*
****) The calculation of Bank's net open position is based on Bank Indonesia's regulation No. 12/10/PBI/2010 dated 1 July 2010 and Bank Indonesia's regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015 regarding the Fourth amendment of Bank Indonesia's regulation No. 5/13/PBI/2003 regarding net open position for Commercial Banks. Under the regulation, starting on 1 July 2010, the Bank is only required to keep the net open position of a maximum of 20% of total capital.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

a. Posisi devisa neto (lanjutan)

Posisi devisa neto Bank Mandiri saja berdasarkan mata uang (dinyatakan dalam Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

a. Net open position (continued)

Net open position of Bank Mandiri by currencies (expressed in Rupiah) as of 31 December 2022 as follows:

Mata uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currency*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)*)**				***OVERALL (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***)***
Dolar Amerika Serikat	524.409.895	508.580.003	15.829.892	*United States Dollar*
Euro Eropa	10.844.334	9.992.720	851.614	*European Euro*
Dolar Singapura	2.640.684	2.543.488	97.196	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	2.402.384	4.127.125	1.724.741	*Japanese Yen*
Dolar Australia	769.369	769.738	369	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	393.129	320.493	72.636	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	428.447	472.419	43.972	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	6.252.849	6.220.348	150.817*)	*Others*
Total			18.771.237	*Total*
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	413.985.655	359.986.571	53.999.084	*United State Dollar*
Euro Eropa	7.724.690	3.663.825	4.060.865	*European Euro*
Dolar Singapura	2.150.185	2.413.548	(263.363)	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	1.892.054	1.675.413	216.641	*Japanese Yen*
Dolar Australia	558.428	257.983	300.445	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	364.771	195.646	169.125	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	426.890	376.015	50.875	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	5.961.568	5.082.317	879.251**)	*Others*
Total			59.412.923	*Total*
Total Modal (Catatan 58)			191.844.453	*Total Capital (Note 58)*
Rasio PDN (laporan posisi keuangan)			30,97%	*NOP ratio (statement of financial position)*
Rasio PDN (keseluruhan)			9,78%	*NOP ratio (overall)*

Rasio PDN pada tanggal 31 Desember 2022 jika menggunakan modal bulan November 2022 adalah sebagai berikut:

Net Open Position ratio as of 31 December 2022 if calculated using November 2022 capital as follows:

Modal bulan November 2022/*November 2022 Capital*	188.535.596
Rasio PDN (laporan posisi keuangan)/*NOP ratio (Statement of financial position)*	31,51%
Rasio PDN (keseluruhan)***) /*NOP ratio (overall)***)*	9,96%

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya.
**) Merupakan penjumlahan dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya.
***) Perhitungan posisi devisa neto bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2010, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

**) Represents total absolute amount of difference between assets and liabilities from other foreign currencies.*
***) Represents total amount of difference between assets and liabilities from other foreign currencies.*
***\) The calculation of Bank's net open position is based on Bank Indonesia's regulation No. 12/10/PBI/2010 dated 1 July 2010 and Bank Indonesia's regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015 regarding the Fourth amendment of Bank Indonesia's regulation No. 5/13/PBI/2003 regarding net open position for Commercial Banks. Under the regulation, starting on 1 July 2010, the Bank is only required to keep the net open position of a maximum of 20% of total capital.*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *62. RISK MANAGEMENT (continued)*

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan) / *B. Market risk and liquidity risk (continued)*

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan) / *(iv) Foreign exchange risk management (continued)*

b. Eksposur Bank Mandiri atas risiko nilai tukar mata uang asing / *b. Bank Mandiri exposure to foreign currency exchange rate risk*

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Grup atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan Grup pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

The table below summaries the Group's exposure of foreign currency exchange rate risk as of 31 December 2023 and 2022, Included in the table are the Group's financial instruments at carrying amount, categorised by currencies.

2023

	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	Euro Eropa/ *European Euro*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*	Yen Jepang/ *Japanese Yen*	Dolar Australia/ *Australian Dollar*	Yuan China/ *Chinese Yuan*	Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound-sterling*	Lain-lain/ *Others*	Total	
Aset										***Assets***
Kas	1.784.628	411.511	195.452	63.301	308.730	4.286	62.835	380.577	3.211.320	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	12.780.622	-	-	-	-	-	-	-	12.780.622	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	21.647.171	4.785.409	693.995	2.484.498	238.174	3.861.548	641.562	1.394.980	35.747.337	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	39.408.595	34.104	23.423	-	-	542.472	-	-	40.008.594	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	20.013.249	-	278.097	893	-	22.272	-	-	20.314.511	*Marketable securities*
Obligasi pemerintah	51.651.407	1.136.362	-	-	-	-	-	-	52.787.769	*Government bonds*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	11.926.761	83.473	14.264	13.964	-	38.089	1.218	-	12.077.769	*Other receivables - trade transactions*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	478.523	-	-	-	-	-	-	-	478.523	*Securities sold under agreements to repurchase*
Tagihan derivatif	1.282.658	28.434	-	52.395	435	3.619	9.389	-	1.376.930	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah	249.203.231	5.815.518	442.690	1.643	805.990	2.823.484	-	3.976	259.096.532	*Loans and sharia receivables/ financing*
Tagihan akseptasi	4.381.757	551.561	3.241	47.404	-	296.548	-	327.886	5.608.397	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	4.002.652	79.052	507	159	11.376	16.039	23	96	4.109.904	*Other assets*
Total aset	**418.561.254**	**12.925.424**	**1.651.669**	**2.664.257**	**1.364.705**	**7.608.357**	**715.027**	**2.107.515**	**447.598.208**	***Total asset***
Liabilitas										***Liabilities***
Simpanan nasabah										*Deposits from customers*
Giro dan giro *wadiah*	177.046.247	3.580.250	406.399	936.610	62.103	3.251.028	42.362	290.599	185.615.598	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	35.560.169	501.079	609.628	2.564.440	166.223	104.176	103.513	42.375	39.651.603	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	29.776.332	20.323	623.214	109.047	22.086	470.257	1.394	35.665	31.058.318	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain										*Deposits from other banks*
Giro. giro wadiah dan tabungan	2.427.071	641	1.192	443	-	495	-	45	2.429.887	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	4.927.040	-	-	-	-	2.039.856	-	-	6.966.896	*Interbank call money*
Deposito berjangka	3.125.591	-	-	-	-	-	-	-	3.125.591	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	36.330.064	-	-	-	-	-	-	-	36.330.064	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	1.322.233	27.742	5.252	1.286	2.088	3.655	4.195	7.054	1.373.505	*Derivative payable*
Liabilitas akseptasi	4.381.757	551.561	3.241	47.404	-	296.548	-	327.886	5.608.397	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	28.421.722	-	-	-	-	-	-	-	28.421.722	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	981.490	1.268	25.641	146	140	32.538	360	7.410	1.048.993	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	1.759.754	241.369	204.655	22.725	69.560	933.179	19.810	99.982	3.351.034	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	56.499.149	-	-	-	-	-	-	-	56.499.149	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	115.735	-	-	-	-	-	-	-	115.735	*Subordinated loans and marketable securities*
Total liabilitas	**382.674.354**	**4.924.233**	**1.879.222**	**3.682.101**	**322.200**	**7.131.732**	**171.634**	**811.016**	**401.596.492**	***Total liabilities***
Laporan posisi keuangan bersih	**35.886.900**	**8.001.191**	**(227.553)**	**(1.017.844)**	**1.042.505**	**476.625**	**543.393**	**1.296.499**	**46.001.716**	***Net statement of financial position***
Rekening administratif bersih	**(5.747.875)**	**(5.378.490)**	**340.070**	**786.474**	**(1.025.908)**	**(130.300)**	**(432.491)**	**(975.166)**	**(12.563.685)**	***Administrative accounts - net***

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

b. Eksposur Bank Mandiri atas risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Grup atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan Grup pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang (lanjutan).

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

b. Bank Mandiri exposure to foreign currency exchange rate risk (continued)

The table below summaries the Group's exposure of foreign currency exchange rate risk as of 31 December 2023 and 2022, Included in the table are the Group's financial instruments at carrying amount, categorised by currencies. (continued)

	2022									
	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	**Euro Eropa/ *European Euro***	**Dolar Singapura/ *Singapore Dollar***	**Yen Jepang/ *Japanese Yen***	**Dolar Australia/ *Australian Dollar***	**Yuan China/ *Chinese Yuan***	**Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound-sterling***	**Lain-lain/ *Others***	**Total**	
Aset										***Assets***
Kas	1.091.335	364.359	617.527	45.618	349.762	6.050	38.631	171.214	2.684.496	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	11.570.462	-	-	-	-	-	-	-	11.570.462	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	40.486.950	1.510.937	667.211	1.763.801	206.781	1.476.989	328.183	731.682	47.172.534	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	64.154.089	-	-	-	-	358.226	-	-	64.512.315	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	23.702.693	-	299.119	3.245	-	22.741	-	-	24.027.798	*Marketable securities*
Obligasi pemerintah	54.132.814	2.005.214	-	-	-	-	-	-	56.138.028	*Government bonds*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	11.999.880	380.702	-	-	-	39.955	1.424	-	12.421.961	*Other receivables - trade transactions*
Tagihan derivatif	1.776.578	24.419	-	5.623	449	1	324	3.064	1.810.458	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah	224.375.901	3.039.050	510.967	-	1.765	2.716.345	-	-	230.644.028	*Loans and sharia receivables/ financing*
Tagihan akseptasi	6.542.642	272.256	7.765	65.816	2.148	85.453	-	328.734	7.304.814	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	4.062.533	48.914	443	173	21	20.920	41	-	4.133.045	*Other assets*
Total aset	**443.895.877**	**7.645.851**	**2.103.032**	**1.884.276**	**560.926**	**4.726.680**	**368.603**	**1.234.694**	**462.419.939**	***Total asset***
Liabilitas										***Liabilities***
Simpanan nasabah										*Deposits from customers*
Giro dan giro *wadiah*	183.659.852	1.567.152	378.961	981.868	58.596	923.787	58.323	124.323	187.752.862	*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Tabungan dan tabungan *wadiah*	37.509.967	1.445.995	797.745	476.033	170.238	134.651	111.877	15.492	40.661.998	*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Deposito berjangka	35.652.385	58.378	983.388	106.988	21.515	96.260	8.545	48.015	36.975.474	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain										*Deposits from other banks*
Giro, giro wadiah dan tabungan	2.116.637	628	965	480	-	39	-	-	2.118.749	*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Interbank call money	2.646.475	-	-	-	-	1.589.626	-	-	4.236.101	*Interbank call money*
Deposito berjangka	1.945.937	-	-	-	-	-	-	-	1.945.937	*Time deposits*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	23.191.358	-	-	-	-	-	-	-	23.191.358	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas derivatif	1.190.246	13.171	-	2.574	1.256	-	12	198	1.207.457	*Derivative payable*
Liabilitas akseptasi	6.542.642	272.256	7.765	65.816	2.148	85.453	-	328.734	7.304.814	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	24.034.300	-	-	-	-	-	-	-	24.034.300	*Debt securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	838.514	-	16.459	158	140	35.105	54	7.828	898.258	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	1.842.393	184.711	152.810	40.481	4.626	576.125	12.248	82.977	2.896.371	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	41.220.246	-	-	-	-	-	-	-	41.220.246	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	133.564	-	-	-	-	-	-	-	133.564	*Subordinated loans and marketable securities*
Total liabilitas	**362.524.516**	**3.542.291**	**2.338.093**	**1.674.398**	**258.519**	**3.441.046**	**191.059**	**607.567**	**374.577.489**	***Total liabilities***
Laporan posisi keuangan bersih	**81.371.361**	**4.103.560**	**(235.061)**	**209.878**	**302.407**	**1.285.634**	**177.544**	**627.127**	**87.842.450**	***Net statement of financial position***
Rekening administratif bersih	**(41.741.447)**	**(3.209.250)**	**360.559**	**(1.941.382)**	**(300.815)**	**(94.847)**	**(96.489)**	**(846.750)**	**(47.870.421)**	***Administrative accounts - net***

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

	2023		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Aset			***Assets***
Kas			***Cash***
Dolar Amerika Serikat	1.784.628	115.908	*United States Dollar*
Euro Eropa	411.511	24.152	*European Euro*
Dolar Australia	308.730	29.345	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	195.452	16.739	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	63.301	581.383	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	62.835	3.202	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	12.068	6.124	*Hong Kong Dollar*
Yuan China	4.286	1.975	*Chinese Yuan*
Lain-lain	368.509	23.934	*Others*
	3.211.320	802.762	
Giro pada Bank Indonesia			***Current accounts with Bank Indonesia***
Dolar Amerika Serikat	12.780.622	830.072	*United States Dollar*
Giro pada bank lain			***Current accounts with other banks***
Dolar Amerika Serikat	21.647.171	1.405.934	*United States Dollar*
Euro Eropa	4.785.409	280.862	*European Euro*
Yuan China	3.861.548	1.779.466	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	2.484.498	22.818.681	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	693.995	59.436	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	641.562	32.688	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Australia	238.174	22.638	*Australian Dollar*
Dolar Hong Kong	67.369	34.185	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	1.327.611	86.225	*Others*
	35.747.337	26.520.115	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			***Placement with Bank Indonesia and other banks***
Dolar Amerika Serikat	39.408.595	2.559.498	*United States Dollar*
Yuan China	542.472	249.980	*Chinese Yuan*
Euro Eropa	34.104	2.002	*EuropeanEuro*
Dolar Singapura	23.423	2.006	*Singapore Dollar*
	40.008.594	2.813.486	
Efek-efek			***Marketable securities***
Dolar Amerika Serikat	20.013.249	1.299.816	*United States Dollar*
Dolar Singapura	278.097	23.817	*Singapore Dollar*
Yuan China	22.272	10.263	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	893	8.202	*Japanese Yen*
	20.314.511	1.342.098	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2023		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Obligasi pemerintah			***Government bonds***
Dolar Amerika Serikat	51.651.407	3.354.641	*United States Dollar*
Euro Eropa	1.136.362	66.694	*European Euro*
	52.787.769	3.421.335	
Tagihan lainnya - transaksi Perdagangan			***Other receivables - trade transactions***
Dolar Amerika Serikat	11.926.761	774.616	*United States Dollar*
Euro Eropa	83.473	4.899	*European Euro*
Yuan China	38.089	17.552	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	14.264	1.222	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	13.964	128.251	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	1.218	62	*Great Britain Pound Sterling*
	12.077.769	926.602	
Tagihan atas efek-efek yang dibeli Dengan janji dijual kembali			***Securities purchased under agreements to resell***
Dolar Amerika Serikat	478.523	31.079	*United States Dollar*
Tagihan derivatif			***Derivative receivables***
Dolar Amerika Serikat	1.282.658	83.306	*United States Dollar*
Yen Jepang	52.395	481.218	*Japanese Yen*
Euro Eropa	28.434	1.669	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	9.389	478	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	3.619	1.668	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	435	41	*Australian Dollar*
	1.376.930	568.380	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah			***Loan and sharia loan/financing***
Dolar Amerika Serikat	249.203.231	16.185.181	*United States Dollar*
Euro Eropa	5.815.518	341.320	*European Euro*
Yuan China	2.823.484	1.301.109	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	805.990	76.609	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	442.690	37.913	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	1.643	15.090	*Japanese Yen*
Lain-lain	3.976	258	*Others*
	259.096.532	17.957.480	
Tagihan akseptasi			***Acceptance receivables***
Dolar Amerika Serikat	4.381.757	284.585	*United States Dollar*
Euro Eropa	551.561	32.372	*European Euro*
Yuan China	296.548	136.654	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	47.404	435.378	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	3.241	278	*Singapore Dollar*
Lain-lain	327.886	21.295	*Others*
	5.608.397	910.562	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2023		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Aset lain-lain			***Other assets***
Dolar Amerika Serikat	4.002.652	259.964	*United States Dollar*
Euro Eropa	79.052	4.640	*European Euro*
Yuan China	16.039	7.391	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	11.376	1.081	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	507	43	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	159	1.460	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	23	1	*Great Britain Pound Sterling*
Lain-lain	96	6	*Others*
	4.109.904	274.586	
Total aset	**447.598.208**	**56.398.557**	***Total asset***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah			***Deposits from customers***
Giro dan giro *wadiah*			*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Dolar Amerika Serikat	177.046.247	11.498.750	*United States Dollar*
Euro Eropa	3.580.250	210.129	*European Euro*
Yuan China	3.251.028	1.498.128	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	936.610	8.602.223	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	406.399	34.805	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	62.103	5.903	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	42.362	2.158	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	5.105	2.590	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	285.494	18.542	*Others*
	185.615.598	21.873.228	
Tabungan dan tabungan *wadiah*			*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Dolar Amerika Serikat	35.560.169	2.309.552	*United States Dollar*
Yen Jepang	2.564.440	23.552.902	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	609.628	52.211	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	501.079	29.409	*European Euro*
Dolar Australia	166.223	15.800	*Australian Dollar*
Yuan China	104.176	48.006	*Chinese Yuan*
Pound Sterling Inggris	103.513	5.274	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	10.570	5.363	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	31.805	2.066	*Others*
	39.651.603	26.020.583	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Dolar Amerika Serikat	29.776.332	1.933.905	*United States Dollar*
Dolar Singapura	623.214	53.374	*Singapore Dollar*
Yuan China	470.257	216.702	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	109.047	1.001.534	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	35.665	18.097	*Hong Kong Dollar*
Dolar Australia	22.086	2.099	*Australian Dollar*
Euro Eropa	20.323	1.193	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	1.394	71	*Great Britain Pound Sterling*
	31.058.318	3.226.975	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2023		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Liabilitas (lanjutan)			***Liabilities** (continued)*
Simpanan dari bank lain			***Deposits from other banks***
Giro, giro *wadiah* dan tabungan			*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Dolar Amerika Serikat	2.427.071	157.633	*United States Dollar*
Dolar Singapura	1.192	102	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	641	38	*European Euro*
Yuan China	495	228	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	443	4.069	*Japanese Yen*
Lain-lain	45	3	*Others*
	2.429.887	162.073	
Interbank call money			*Interbank call money*
Dolar Amerika Serikat	4.927.040	320.000	*United States Dollar*
Yuan China	2.039.856	940.000	*Chinese Yuan*
	6.966.896	1.260.000	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Dolar Amerika Serikat	3.125.591	203.000	*United States Dollar*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			***Securities sold under agreements to repurchase***
Dolar Amerika Serikat	36.330.064	2.359.555	*United States Dollar*
Liabilitas derivatif			***Derivative payables***
Dolar Amerika Serikat	1.322.233	85.876	*United States Dollar*
Euro Eropa	27.742	1.628	*European Euro*
Dolar Singapura	5.252	450	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	4.195	214	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	3.655	1.684	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	2.088	198	*Australian Dollar*
Yen Jepang	1.286	11.811	*Japanese Yen*
Lain-lain	7.054	458	*Others*
	1.373.505	102.319	
Liabilitas akseptasi			***Acceptance payables***
Dolar Amerika Serikat	4.381.757	284.585	*United States Dollar*
Euro Eropa	551.561	32.372	*European Euro*
Yuan China	296.548	136.654	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	47.404	435.378	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	3.241	278	*Singapore Dollar*
Lain-lain	327.886	21.295	*Others*
	5.608.397	910.562	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2023		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Liabilitas (lanjutan)			***Liabilities** (continued)*
Efek - efek yang diterbitkan			***Debt securities issued***
Dolar Amerika Serikat	28.421.722	1.845.926	*United States Dollar*
Beban yang masih harus dibayar			***Accrued expenses***
Dolar Amerika Serikat	981.490	63.746	*United States Dollar*
Yuan China	32.538	14.994	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	25.641	2.196	*Singapore Dollar*
Dolar Hong Kong	7.400	3.755	*Hong Kong Dollar*
Euro Eropa	1.268	74	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	360	18	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	146	1.341	*Japanese Yen*
Dolar Australia	140	13	*Australian Dollar*
Lain-lain	10	1	*Others*
	1.048.993	86.138	
Liabilitas lain-lain			***Other liabilities***
Dolar Amerika Serikat	1.759.754	114.292	*United States Dollar*
Yuan China	933.179	430.025	*Chinese Yuan*
Euro Eropa	241.369	14.166	*European Euro*
Dolar Singapura	204.655	17.528	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	69.560	6.612	*Australian Dollar*
Yen Jepang	22.725	208.716	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	19.810	1.009	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	12.117	6.148	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	87.865	5.707	*Others*
	3.351.034	804.203	
Pinjaman yang diterima			***Fund borrowings***
Dolar Amerika Serikat	56.499.149	3.669.491	*United States Dollar*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi			***Subordinated loans and marketable securities***
Dolar Amerika Serikat	115.735	7.517	*United States Dollar*
Total liabilitas	**401.596.492**	**62.531.570**	***Total liabilities***

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2022		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Aset			***Assets***
Kas			***Cash***
Dolar Amerika Serikat	1.091.335	70.103	*United States Dollar*
Euro Eropa	364.359	21.974	*European Euro*
Dolar Australia	349.762	33.128	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	617.527	53.268	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	38.631	2.056	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	45.618	387.217	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	31.520	15.787	*Hong Kong Dollar*
Yuan China	6.050	2.702	*Chinese Yuan*
Lain-lain	139.694	8.973	*Others*
	2.684.496	595.208	
Giro pada Bank Indonesia			***Current accounts with Bank Indonesia***
Dolar Amerika Serikat	11.570.462	743.245	*United States Dollar*
Giro pada bank lain			***Current accounts with other banks***
Dolar Amerika Serikat	40.486.950	2.600.736	*United States Dollar*
Euro Eropa	1.510.937	91.121	*European Euro*
Yuan China	1.476.989	659.691	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	1.763.801	14.971.573	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	667.211	57.554	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	328.183	17.469	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Australia	206.781	19.585	*Australian Dollar*
Dolar Hong Kong	186.132	93.227	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	545.550	35.044	*Others*
	47.172.534	18.546.000	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			***Placement with Bank Indonesia and other banks***
Dolar Amerika Serikat	64.154.089	4.121.027	*United States Dollar*
Yuan China	358.226	160.000	*Chinese Yuan*
	64.512.315	4.281.027	
Efek-efek			***Marketable securities***
Dolar Amerika Serikat	23.702.693	1.522.575	*United States Dollar*
Dolar Singapura	299.119	25.802	*Singapore Dollar*
Yuan China	22.741	10.157	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	3.245	27.544	*Japanese Yen*
	24.027.798	1.586.078	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2022		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Obligasi pemerintah			***Government bonds***
Dolar Amerika Serikat	54.132.814	3.477.297	*United States Dollar*
Euro Eropa	2.005.214	120.929	*European Euro*
	56.138.028	3.598.226	
Tagihan lainnya - transaksi Perdagangan			***Other receivables - trade transactions***
Dolar Amerika Serikat	11.999.880	770.829	*United States Dollar*
Euro Eropa	380.702	22.959	*European Euro*
Yuan China	39.955	17.846	*Chinese Yuan*
Pound Sterling Inggris	1.424	76	*Great Britain Pound Sterling*
	12.421.961	811.710	
Tagihan derivatif			***Derivative receivables***
Dolar Amerika Serikat	1.776.578	114.121	*United States Dollar*
Yen Jepang	5.623	47.729	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	324	17	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	1	-	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	449	43	*Australian Dollar*
Euro Eropa	24.419	1.473	*European Euro*
Lain-lain	3.064	197	*Others*
	1.810.458	163.580	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah			***Loan and sharia loan/financing***
Dolar Amerika Serikat	224.375.901	14.413.098	*United States Dollar*
Euro Eropa	3.039.050	183.277	*European Euro*
Yuan China	2.716.345	1.213.244	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	1.765	167	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	510.967	44.076	*Singapore Dollar*
	230.644.028	15.853.862	
Tagihan akseptasi			***Acceptance receivables***
Dolar Amerika Serikat	6.542.642	420.276	*United States Dollar*
Euro Eropa	272.256	16.419	*European Euro*
Yuan China	85.453	38.167	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	65.816	558.662	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	7.765	670	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	2.148	203	*Australian Dollar*
Lain-lain	328.734	21.117	*Others*
	7.304.814	1.055.514	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2022		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Aset lain-lain			***Other assets***
Dolar Amerika Serikat	4.062.533	260.963	*United States Dollar*
Euro Eropa	48.914	2.950	*European Euro*
Yuan China	20.920	9.344	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	21	2	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	443	38	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	173	1.468	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	41	2	*Great Britain Pound Sterling*
	4.133.045	274.767	
Total aset	**462.419.939**	**47.509.217**	***Total asset***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah			***Deposits from customers***
Giro dan giro *wadiah*			*Demand deposits and wadiah demand deposits*
Dolar Amerika Serikat	183.659.852	11.797.646	*United States Dollar*
Euro Eropa	1.567.152	94.511	*European Euro*
Yuan China	923.787	412.606	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	981.868	8.334.335	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	378.961	32.689	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	58.596	5.550	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	58.323	3.105	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	7.570	3.792	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	116.753	7.500	*Others*
	187.752.862	20.691.734	
Tabungan dan tabungan *wadiah*			*Saving deposits and wadiah saving deposits*
Dolar Amerika Serikat	37.509.967	2.409.505	*United States Dollar*
Yen Jepang	476.033	4.040.684	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	797.745	68.813	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	1.445.995	87.204	*European Euro*
Dolar Australia	170.238	16.124	*Australian Dollar*
Yuan China	134.651	60.141	*Chinese Yuan*
Pound Sterling Inggris	111.877	5.955	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	11.768	5.894	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	3.724	239	*Others*
	40.661.998	6.694.559	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Dolar Amerika Serikat	35.652.385	2.290.181	*United States Dollar*
Dolar Singapura	983.388	84.827	*Singapore Dollar*
Yuan China	96.260	42.994	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	106.988	908.140	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	48.015	24.049	*Hong Kong Dollar*
Dolar Australia	21.515	2.038	*Australian Dollar*
Euro Eropa	58.378	3.521	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	8.545	455	*Great Britain Pound Sterling*
	36.975.474	3.356.205	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2022		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Liabilitas (lanjutan)			***Liabilities** (continued)*
Simpanan dari bank lain			***Deposits from other banks***
Giro, giro *wadiah* dan tabungan			*Demand deposits, wadiah demand deposits and saving deposits*
Dolar Amerika Serikat	2.116.637	135.965	*United States Dollar*
Dolar Singapura	965	83	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	628	38	*European Euro*
Yen Jepang	480	4.074	*Japanese Yen*
Yuan China	39	17	*Chinese Yuan*
	2.118.749	140.177	
Interbank call money			*Interbank call money*
Dolar Amerika Serikat	2.646.475	170.000	*United States Dollar*
Yuan China	1.589.626	710.000	*Chinese Yuan*
	4.236.101	880.000	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Dolar Amerika Serikat	1.945.937	125.000	*United States Dollar*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			***Securities sold under agreements to repurchase***
Dolar Amerika Serikat	23.191.358	1.489.729	*United States Dollar*
Liabilitas derivatif			***Derivative payables***
Dolar Amerika Serikat	1.190.246	76.457	*United States Dollar*
Euro Eropa	13.171	794	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	12	1	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	2.574	21.849	*Japanese Yen*
Dolar Australia	1.256	119	*Australian Dollar*
Lain-lain	198	13	*Others*
	1.207.457	99.233	
Liabilitas akseptasi			***Acceptance payables***
Dolar Amerika Serikat	6.542.642	420.276	*United States Dollar*
Euro Eropa	272.256	16.419	*European Euro*
Yuan China	85.453	38.167	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	65.816	558.662	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	7.765	670	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	2.148	203	*Australian Dollar*
Lain-lain	328.734	21.117	*Others*
	7.304.814	1.055.514	

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

c. The balance of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows (continued):

	2022		
	Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)/ *Rupiah Equivalent (in million)*	**Mata uang asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currencies (in thousand)***	
Liabilitas (lanjutan)			***Liabilities** (continued)*
Efek - efek yang diterbitkan			***Debt securities issued***
Dolar Amerika Serikat	24.034.300	1.543.877	*United States Dollar*
Beban yang masih harus dibayar			***Accrued expenses***
Dolar Amerika Serikat	838.514	53.863	*United States Dollar*
Yuan China	35.105	15.680	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	16.459	1.420	*Singapore Dollar*
Dolar Hong Kong	7.819	3.916	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	54	3	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	158	1.341	*Japanese Yen*
Dolar Australia	140	13	*Australian Dollar*
Lain-lain	9	1	*Others*
	898.258	76.237	
Liabilitas lain-lain			***Other liabilities***
Dolar Amerika Serikat	1.842.393	118.348	*United States Dollar*
Yuan China	576.125	257.323	*Chinese Yuan*
Euro Eropa	184.711	11.140	*European Euro*
Dolar Singapura	152.810	13.181	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	4.626	438	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	12.248	652	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	40.481	343.612	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	4.919	2.463	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	78.058	5.014	*Others*
	2.896.371	752.171	
Pinjaman yang diterima			***Fund borrowings***
Dolar Amerika Serikat	41.220.246	2.647.840	*United States Dollar*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi			***Subordinated loans and marketable securities***
Dolar Amerika Serikat	133.564	8.580	*United States Dollar*
Total liabilitas	**374.577.489**	**39.560.856**	***Total liabilities***

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko nilai tukar (lanjutan)

d. Sensitivitas terhadap laba bersih

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank Mandiri saja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu:

	Peningkatan 5%/ *Increased by 5%*	**Penurunan 5%/ *Decreased by 5%***	
31 Desember 2023			***31 December 2023***
Menambah/(mengurangi) laba bersih	2,796	(2,796)	*Increase/(decrease) net income*

	Peningkatan 5%/ *Increased by 5%*	**Penurunan 5%/ *Decreased by 5%***	
31 Desember 2022			***31 December 2022***
Menambah/(mengurangi) laba bersih	2.699.954	(2.699.954)	*Increase/(decrease) net income*

Proyeksi di atas hanya mengasumsikan perubahan nilai tukar mata uang asing Dolar Amerika Serikat sedangkan nilai tukar mata uang asing lainnya tidak berubah. Dolar Amerika Serikat merupakan komponen terbesar mata uang asing yang dimiliki Bank. Proyeksi dalam hal ini juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan pada tanggal pelaporan keuangan.

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Penilaian/valuasi juga merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk mengelola hampir semua risiko perbankan termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Proses valuasi dilakukan atas seluruh posisi trading book termasuk efek-efek yang dimiliki Grup dalam portofolio diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(iv) Foreign exchange risk management (continued)

d. Sensitivity to net income

The table below shows the sensitivity of Bank Mandiri's net income to movement of foreign exchange rates as of 31 December 2023 and 2022:

The projection above assumes only changes in foreign currency exchange rate of US Dollar while other foreign exchange rates remain unchanged. US Dollars is the major foreign exchange rate held by the Bank. The projection also assumes that all other variables are held constant at reporting date

(v) Fair value of financial assets and liabilities

Valuation is also an important component to manage most risks in banking industry including market risk, credit risk and liquidity risk. Valuation process is performed for all trading book position including marketable securities owned by the Group's portfolio measured at fair value through other comprehensive income.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- *Input* selain harga yang kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2);
- *Input* untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2023 dan 2022:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

The table below shows analysis of financial instruments carried at fair value based on method of valuation levels. The difference at each level of assessment methods is described as follows:

- *Quoted prices (not adjusted) from active market for asset or liability which are the same/identical (Level 1);*
- *Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the asset and liability, either directly (as a price) or indirectly (derived from prices) (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable information) (Level 3);*

The table below shows the Group's assets and liabilities that are measured at fair value as of 31 December 2023 and 2022:

	2023					
		Nilai wajar/*Fair value*				
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total	
Aset yang diukur sebesar nilai wajar						***Assets measured at fair value***
Efek-efek						*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	38.636.604	34.402.874	4.233.730	-	38.636.604	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	48.823.800	6.150.423	42.673.377	-	48.823.800	*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi pemerintah						*Government bonds*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	20.805.479	18.727.231	2.078.248	-	20.805.479	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	90.640.924	83.264.895	7.376.029	-	90.640.924	*Fair value through other comprehensive income*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah						*Loans and sharia receivables/financing*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.503.048	-	-	2.503.048	2.503.048	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan derivatif	1.994.931	-	1.994.931	-	1.994.931	*Derivative receivables*
Penyertaan saham	1.813.882	16.036	797.068	1.000.778	1.813.882	*Investments in shares*
Liabilitas yang diukur sebesar nilai wajar						***Liabilities measured at fair value***
Liabilitas derivatif	2.113.853	-	2.113.853	-	2.113.853	*Derivative payables*

	2022					
		Nilai wajar/*Fair value*				
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total	
Aset yang diukur sebesar nilai wajar						***Assets measured at fair value***
Efek-efek						*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	34.225.185	34.046.316	178.869	-	34.225.185	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui Penghasilan komprehensif lain	29.308.811	10.065.641	19.243.170	-	29.308.811	*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi pemerintah						*Government bonds*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	11.888.445	10.805.944	1.082.501	-	11.888.445	*Fair value through profit or loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	92.532.086	89.258.887	3.273.199	-	92.532.086	*Fair value through other comprehensive income*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah						*Loans and sharia receivables/financing*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	500.049	-	-	500.049	500.049	*Fair value through other comprehensive income*
Tagihan derivative	2.252.141	-	2.176.232	75.909	2.252.141	*Derivative receivables*
Penyertaan saham	2.670.969	34.781	2.310.479	325.709	2.670.969	*Investments in shares*
Liabilitas yang diukur sebesar nilai wajar						***Liabilities measured at fair value***
Liabilitas derivatif	2.126.769	-	2.126.769	-	2.126.769	*Derivative payables*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, untuk aset dan liabilitas yang dimiliki pada akhir tahun laporan diukur pada nilai wajar secara berulang, Bank dan Entitas Anak tidak memiliki transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 dari hierarki. Selain itu pada posisi tanggal yang sama, tidak terdapat Surat Berharga yang masuk ke dalam Tingkat 3.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain) ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai kuotasian dapat dengan mudah dan secara berkala tersedia dari suatu bursa, pedagang efek, atau *broker*, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga-harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan reguler pada tingkat yang wajar. Harga pasar kuotasian untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran sekarang. Instrumen-instrumen tersebut termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam tingkat 1 umumnya meliputi investasi ekuitas dan surat hutang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif meliputi derivatif *over the counter* dan obligasi pemerintah yang tidak aktif ditentukan dengan teknik penilaian internal.

Teknik-teknik penilaian tersebut memaksimumkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari entitas. Seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi dari pasar, oleh karena itu instrumen tersebut termasuk dalam tingkat 2. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih data tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam tingkat 3.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, assets and liabilities held at the end of the reporting year are measured at fair value on a recurring basis. The Bank and its Subsidiaries have no transfers between Level 1 and Level 2 of the hierarchy. In addition at the same date, there is no Marketable Securities included in Level 3

The fair value of financial instruments traded in active markets (such as marketable securities which are measured at fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income) was determined based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active if the information regarding price quotations can be easily obtained and regularly available from an exchange, securities dealer or broker, the market price of a particular industry assessors, regulators and those price reflects actual and regular market transactions at a fair value. Quoted market price for financial assets owned by the Group are using current offering price. These instruments are included in level 1. The instruments included in level 1 generally include investments in shares in IDX and debt securities classified as held for trading and fair value through other comprehensive income.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (include over-the-counter derivatives and inactive government bonds) are determined by internal valuation techniques.

The valuation techniques maximise the use of observable market data when available and as far as possible to minimise the use of specific estimates of the entity. If all the inputs needed to determine the fair value of financial instruments are observable from market, therefore the instrument is included in level 2. Instead, if one or more data is not based on observable market data, these instrument are included in level 3.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank Mandiri memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As of 31 December 2023 and 2022, the carrying value of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	2023					
		Nilai wajar/*Fair value*				
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total	
Aset yang disajikan sebesar nilai wajar						***Assets disclosed at fair value***
Efek-efek*)						*Marketable securities*)*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.891.305	4.199.720	1.713.094	-	5.912.814	*At amortised cost*
Diukur pada biaya peroleh	1.186.152	-	1.186.152	-	1.186.152	*At cost*
Obligasi pemerintah*)						*Government bonds*)*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	163.194.756	163.360.833	-	-	163.360.833	*At amortised cost*
Diukur pada biaya peroleh	34.541.812	-	34.541.812	-	34.541.812	*At cost*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	1.304.230.527	-	382.503.647	920.117.961	1.302.621.608	*Loans and sharia receivables/financing*
Piutang pembiayaan konsumen	32.036.752	-	30.511.471	-	30.511.471	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.419.072	-	5.010.212	-	5.010.212	*Net investment finance leases*
Liabilitas yang disajikan sebesar nilai wajar						***Liabilities disclosed at fair value***
Efek-efek yang diterbitkan	50.517.764	-	50.226.241	-	50.226.241	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	95.445.459	-	95.039.435	-	95.039.435	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	215.607	-	215.607	-	215.607	*Subordinated loans and marketable securities*

	2022					
		Nilai wajar/*Fair value*				
	Nilai tercatat / *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Total	
Aset yang disajikan sebesar nilai wajar						***Assets disclosed at fair value***
Efek-efek*)						*Marketable securities*)*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	7.953.376	5.894.865	2.060.201	-	7.955.066	*At amortised cost*
Diukur pada biaya peroleh	11.227.960	-	11.227.960	-	11.227.960	*At cost*
Obligasi pemerintah*)						*Government bonds*)*
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	180.578.053	180.668.045	-	-	180.668.045	*At amortised cost*
Diukur pada biaya peroleh	44.213.180	-	43.528.296	-	43.528.296	*At cost*
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	1.107.487.188	-	345.846.640	761.337.878	1.107.184.518	*Loans and sharia receivables/financing*
Piutang pembiayaan Konsumen	23.147.366	-	20.185.615	-	20.185.615	*Consumer financing receivables*
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.733.387	-	5.175.740	-	5.175.740	*Net investment finance leases*
Liabilitas yang disajikan sebesar nilai wajar						***Liabilities disclosed at fair value***
Efek-efek yang diterbitkan	45.774.139	-	45.510.364	-	45.510.364	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	62.840.118	-	62.937.396	-	62.937.396	*Fund borrowings*
Pinjaman dan efek-efek Subordinasi	633.333	-	640.288	-	640.288	*Subordinated loans and marketable securities*

*) Efek-efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki Entitas Anak sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

*) *Marketable securities and government bonds owned by Subsidiary in accordance with SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".*

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk *Deposit Facility*, FASBI Syariah, *Call Money*, penempatan "*fixed term*", deposito berjangka dan lain-lain.

Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan *overnight* dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(ii) Efek-efek dan obligasi pemerintah (diukur pada biaya perolehan dan biaya perolehan diamortisasi)

Nilai wajar untuk efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan dan biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode valuasi internal.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placement with Bank Indonesia and other banks, other receivables - trading transactions, securities purchased under agreements to resell, acceptance receivables and other assets

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements in the form of deposit facility, sharia FASBI, call money, fixed-term placements, time deposits and others

The carrying amount of current accounts, placements and overnight deposits, which uses floating rate, is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of fixed interest bearing placements, other receiveables - trading transactions, securities purchased under agreements to resell, acceptance receivables and other assets is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the remaining maturity is below one year, the carrying amount of fixed interest bearing placements, other receiveables - trading transactions, securities purchased under agreements to resell, acceptance receivables and other assets is a reasonable approximation of fair value.

(ii) Government Securities and Bonds (measured at cost and amortised cost)

The fair value for government securities and bonds measured at cost and amortised cost is determined based on market prices or intermediary (broker)/dealer quotes. If this information is not available, the fair value is estimated using market prices of similar credit, maturity and yield securities or evaluated using internal valuation methods.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat setelah dikurangi dengan beban penurunan nilai. Estimasi nilai wajar dari kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Nilai wajar dari kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang diharapkan pada tingkat suku bunga pasar terkini.

(iv) Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar simpanan yang bisa ditarik kembali sewaktu-waktu, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terutang/nilai tercatat ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar simpanan dengan tingkat suku bunga tetap, liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari simpanan dengan tingkat bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

(iii) Loans and Sharia Receivables/Financing, Consumer Financing Receivables and Net Investment in Finance Leases

Loans and sharia receivables/financing, consumer financing receivables and net Investment in finance leases are recorded at carrying amount net of charges for impairment. The estimated fair value of loans and sharia receivables/financing, consumer financing receivables, and net investment in finance leases represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. The fair value of loans and consumer financing receivables is determined by discounting the expected future cash flows at current market interest rates.

(iv) Deposits from customers and other banks, securities sold under agreements to repurchase, acceptance payables and other liabilities

The estimated fair value of deposits that can be withdrawn at any time, includes non-interest bearing deposits, is the payable amount/carrying amount when the payable is paid.

The estimated fair value of fixed interest bearing deposits, securities sold under agreements to repurchase, acceptance payables and other liabilities not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. As the remaining maturity is below one year, the carrying amount of fixed interest bearing deposits, acceptance payables and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman dan efek-efek subordinasi

Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

(vi) *Value at Risk* (VaR)

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar *trading*, Bank menerapkan prinsip *segregation of duties* dengan cara melakukan pemisahan antara unit *front office* (melaksanakan transaksi *trading*), unit *middle office* (melaksanakan proses manajemen risiko serta menyusun kebijakan dan prosedur) dan unit *back office* (melaksanakan proses *settlement* transaksi).

Analisa risiko pasar atas aktivitas *trading treasury* dilakukan secara harian menggunakan pendekatan sesuai *best practice* yang ada dan mengacu pada ketentuan internal dan eksternal yang berlaku, salah satunya melalui perhitungan VaR.

VaR adalah potensi kerugian maksimum dari posisi portofolio Bank (*open position*) dengan *confidence level* dan *holding period* tertentu dalam kondisi pasar yang normal. Metode perhitungan VaR yang digunakan bank yaitu metode *Historical Simulation* yang tidak membutuhkan asumsi bahwa pergerakan faktor pasar terdistribusi normal. Bank menghitung VaR berdasarkan 250 hari data faktor pasar historis.

Realisasi VaR 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

(v) Debt securities issued, fund borrowings and subordinated loans and marketable securities

The aggregate fair values are calculated based on quoted market prices. When information is not available, a discounted cash flow model is used based on the current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

(vi) Value at Risk (VaR)

The implementation of managing market risk of trading, the Bank's applies segregation of duties principle by separation front office unit (conduct trading transaction), middle office unit (conduct process of risk management as well as develop policies and procedures) and back office unit (conduct process of settlement transaction).

Daily market risk analysis of trading treasury activities using best practice approach by consider internal and external policies, such as through calculation of VaR.

VaR is the maximum potential loss from the Bank's portfolio position (open position) with a certain confidence level and holding period under normal market conditions. The VaR calculation method used by the bank is the Historical Simulation method which does not require the assumption that the movement of market factors is normally distributed. The bank calculates VaR based on 250 days of historical market factor data.

VaR realisation as of 31 December 2023 and 2022 (unaudited) are as follows:

	2023				
	VaR Rata-rata/ *Average VaR*	**VaR Maksimum/ *Maximum VaR***	**VaR Minimum/ *Minimum VaR***	**VaR Akhir Periode/ *End of period VaR***	
Jenis risiko					***Type of risk***
Risiko suku bunga*)	24.583	47.974	12.661	18.991	*Interest rate risk*)
Risiko nilai tukar	32.655	85.253	3.356	25.636	*Foreign exchange risk*
Total	**37.289**	**86.076**	**15.257**	**33.058**	***Total***

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(vi) *Value at Risk* (VaR) (lanjutan)

Realisasi VaR 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut (lanjutan):

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(vi) Value at Risk (VaR) (continued)

VaR realisation as of 31 December 2023 and 2022 (unaudited) are as follows (continued):

	2022				
	VaR Rata-rata/ *Average VaR*	VaR Maksimum/ *Maximum VaR*	VaR Minimum/ *Minimum VaR*	VaR Akhir Periode/ *End of period VaR*	
Jenis risiko					***Type of risk***
Risiko suku bunga*)	30.661	59.043	11.150	37.069	*Interest rate risk*)
Risiko nilai tukar	15.341	51.469	1.981	20.428	*Foreign exchange risk*
Total	**35.415**	**73.388**	**14.180**	**42.614**	***Total***

*) Hanya posisi *trading book.*

*) *Only trading book position*

Bank melakukan *backtesting* untuk memastikan keakuratan metode perhitungan VaR dalam memprediksi laba/rugi aktivitas *treasury*. Metode *backtesting* dilakukan dengan membandingkan laba/rugi harian dengan nilai VaR yang dihitung oleh Bank.

Hasil *backtesting* periode Desember 2023 menunjukkan bahwa perhitungan VaR yang telah dilakukan akurat, dimana jumlah penyimpangan P/L terhadap *daily* VaR masih dapat diterima.

The Bank performs backtesting to ensure the accuracy of the VaR calculation method in predicting the profit/loss of treasury activities. Backtesting method compares the daily profit/loss with the VaR calculated by the Bank.

Backtesting result for the period December 2023 shows that the VaR calculation has been performed accurately, where the number of irregularities of Profit/Loss to the daily VaR is still acceptable.

(vii) Manajemen kas

Kas terdiri atas:

(vii) Cash management

Details of cash are as follows:

	2023		2022		
	Jumlah ekuivalen nosional mata uang asing (dalam ribuan)/ *Notional amount of foreign currency equivalent (in thousands)*	Rupiah	Jumlah ekuivalen nosional mata uang asing (dalam ribuan)/ *Notional amount of foreign currency equivalent (in thousands)*	Rupiah	
Rupiah	-	23.220.420	-	24.528.263	*Rupiah*
Mata uang asing					*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	115.908	1.784.628	70.103	1.091.335	*United States Dollar*
Dolar Singapura	16.739	195.452	53.268	617.527	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	29.345	308.730	33.128	349.762	*Australian Dollar*
Euro Eropa	24.152	411.511	21.974	364.359	*European Euro*
Yuan China	1.975	4.286	2.702	6.050	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	581.383	63.301	387.217	45.618	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	3.202	62.835	2.056	38.631	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	6.124	12.068	15.787	31.520	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	23.934	368.509	8.973	139.694	*Others*
	802.762	**26.431.740**	**595.208**	**27.212.759**	

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo kas tersebut, sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), masing-masing sebesar Rp7.012.615 dan Rp7.615.386.

As of 31 December 2023 and 2022, the cash balance, including money at the ATM (Automatic Teller Machine), amounted to Rp7,012,615 and Rp7,615,386, respectively.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(viii) Dampak Reformasi Acuan Suku Bunga

Pada tahun 2017, *Financial Conduct Authority* (FCA) Inggris mengumumkan rencana untuk menghentikan penggunaan LIBOR pada akhir tahun 2020. Pada November 2020, ICE *Benchmark Administration* (IBA) mengumumkan secara resmi rencana untuk menghentikan publikasi suku bunga acuan LIBOR. Sebagai tanggapan atas kondisi terbaru, pada tanggal 5 Maret 2021, FCA mengumumkan rencana penundaan sebagian penghentian publikasi suku bunga acuan LIBOR oleh IBA tersebut yang akan diadakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. Pada 31 Desember 2021 untuk suku bunga acuan LIBOR semua tenor dalam mata uang GBP, EUR, CHF dan JPY serta dalam mata uang USD untuk tenor 1 (satu) minggu dan 2 (dua) bulan.
2. Pada 31 Desember 2023 untuk suku bunga acuan LIBOR dalam mata uang USD untuk tenor *Overnight*, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan.

Eksposur risiko Bank yang secara langsung terdampak dari reformasi acuan suku bunga terdiri dari *portfolio* kredit korporasi, transaksi derivatif dan *borrowing* yang menggunakan suku bunga acuan USD LIBOR.

Saat ini Bank telah berencana menggunakan suku bunga acuan *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR) atau suku bunga acuan lain yang disepakati untuk menggantikan suku bunga acuan USD LIBOR. Terkait suku bunga acuan SOFR, terdapat beberapa perbedaan antara USD LIBOR dan SOFR. USD LIBOR adalah "*term rate*", yang berarti USD LIBOR dipublikasikan untuk beberapa periode pinjaman (sebagai contoh 3 (tiga) bulanan atau 6 (enam) bulanan) dan bersifat "*forward looking*" (LIBOR dipublikasikan pada awal periode), sedangkan SOFR merupakan suku bunga acuan yang bersifat "*backward looking*", berdasarkan suku bunga *overnight* dari transaksi *actual*, dan dipublikasikan pada akhir periode *overnight*. Selain itu, LIBOR merupakan tingkat suku bunga yang telah memperhitungkan *credit spread*, sementara SOFR saat ini adalah suku bunga yang hampir *risk free* berdasarkan transaksi pasar *repurchase agreement* (repo) US Treasury. Untuk melakukan transisi atas kontrak dan perjanjian yang saat ini mengacu ke USD LIBOR menjadi mengacu ke suku bunga acuan alternatif (SOFR), diperlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa kedua suku bunga acuan tersebut secara ekonomis setara.

Pada tahun 2020, Bank telah membentuk komite, yang terdiri dari unit kerja Treasury, Kredit, Risk, IT, Legal, Compliance, dan Keuangan untuk menyusun strategi transisi USD LIBOR. Komite Transisi LIBOR ini dibentuk untuk meminimalisasi potensi disrupsi bisnis dan memitigasi risiko operasional, hukum, kepatuhan serta keuangan. Inisiatif transisi LIBOR mempertimbangkan perubahan pada sistem informasi, proses, manajemen risiko, dan model valuasi instrumen keuangan serta mengkaji dampak akuntansi dan perpajakan.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(viii) Impact of Interest Rate Benchmark Reform

In 2017, the UK Financial Conduct Authority (FCA) announced plans to stop using LIBOR by the end of 2020. In November 2020, the ICE Benchmark Administration (IBA) officially announced plans to stop publishing the LIBOR benchmark interest rate. In response to the latest conditions, on 05 March 2021, FCA announced a plan to partially suspend the publication of the LIBOR benchmark interest rate by the IBA which will be held in 2 (two) stages as follows:

1. *As of 31 December 2021, the reference interest rate is LIBOR for all tenors in GBP, EUR, CHF and JPY and in USD for 1 (one) week and 2 (two) months tenors.*
2. *On 31 December 2023, the reference interest rate is LIBOR in USD for the Overnight tenor, 1 (one) month, 3 (three) months, 6 (six) months and 12 (twelve) months.*

The Bank's risk exposures that are directly affected by the interest rate benchmark reform consist of a portfolio of corporate loans, derivative transactions and borrowing using the USD LIBOR benchmark interest rate.

Currently, the Bank plans to use the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark interest rate or other agreed benchmark interest rate to replace the USD LIBOR benchmark interest rate. Regarding the SOFR benchmark interest rate, there are several differences between USD LIBOR and SOFR. USD LIBOR is the "term rate", which means that USD LIBOR is published for several loan periods (for example 3 (three) months or 6 (six) months) and is "forward looking" (LIBOR is published at the beginning of the period), while SOFR is the rate "backward-looking" benchmark interest rate, based on the overnight interest rate of actual transactions, and published at the end of the overnight period. In addition, LIBOR is an interest rate that has taken into account credit spreads, while SOFR is currently an almost risk free interest rate based on US Treasury repurchase agreement (repo) market transactions. In order to make the transition of contracts and agreements that currently refer to USD LIBOR to refer to the alternative benchmark interest rate (SOFR), adjustments are needed to ensure that the two benchmark interest rates are economically equivalent.

In 2020, the Bank has formed a committee, consisting of Treasury, Credit, Risk, IT, Legal, Compliance, and Finance work units to formulate a USD LIBOR transition strategy. The LIBOR Transition Committee was formed to minimize the potential for business disruption and mitigate operational, legal, compliance and financial risks. The LIBOR transition initiative considers changes to information systems, processes, risk management and financial instrument valuation models and examines the impact of accounting and taxation.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(viii) Dampak Reformasi Acuan Suku Bunga (lanjutan)

Dari segi manajemen risiko pasar, Bank telah mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada aspek - aspek antara lain perubahan *market data*, yang selanjutnya berdampak pada hasil perhitungan *mark to market*, perhitungan dan monitoring VaR, dan perhitungan lain - lain terkait risiko pasar. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, Bank telah melakukan penyesuaian pada sistem manajemen risiko pasar dan ketentuan internal terkait, serta telah melaporkan realisasi *enhancement* pada sistem ke Regulator.

Dalam hal kaitannya dengan risiko likuiditas, perubahan atas suku bunga acuan LIBOR menjadi suku bunga acuan alternatif lain juga dapat berdampak pada kondisi likuiditas Bank. Dalam hal ini, perubahan nominal pembayaran bunga kredit, transaksi derivatif dan/atau bunga pinjaman dapat berpengaruh pada nilai arus kas yang diterima atau dibayarkan oleh Bank, antara lain yang terukur dalam indikator *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Namun demikian, dampak tersebut diperkirakan tidak signifikan mempengaruhi kondisi likuiditas Bank secara keseluruhan.

Sebagai bentuk mitigasi risiko pasar, per posisi 31 Desember 2023, Bank telah mengidentifikasi kebutuhan perubahan pada sistem informasi dan Bank telah melakukan penyesuaian pada sistem tersebut. Bank juga telah melakukan kajian yang dibutuhkan dalam proses transisi terkait proses dan model valuasi instrumen keuangan. Saat ini Bank telah melakukan komunikasi dengan *counterparty* dan/atau nasabah yang terdampak untuk memberikan informasi terkini terkait perubahan yang mungkin terjadi akibat dari reformasi acuan suku bunga, secara khusus USD LIBOR, baik melalui sosialisasi, diskusi maupun tertulis. Bank telah mengidentifikasi area yang memiliki risiko yang signifikan terhadap penghentian USD LIBOR, yaitu melakukan pengembangan pada sistem informasi dan penyesuaian proses bisnis untuk dapat mengakomodasi penggunaan suku bunga acuan alternatif, melakukan amendemen kontrak/*repapering* dan/atau melakukan kajian *fallback clause* pada kontrak *existing*. Selain melakukan usaha berkelanjutan dalam pemantauan kondisi terkini terkait transisi USD LIBOR, Bank juga telah melakukan diskusi lebih intensif dengan pelaku industri baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri dalam rangka *benchmark* serta komunikasi dengan Regulator untuk memastikan transisi perubahan suku bunga acuan dari USD LIBOR ke suku bunga acuan alternatif berjalan dengan baik, sekaligus meminimalisasi risiko yang muncul dari proses transisi tersebut. Sebagai tindak lanjut jangka panjang, Bank akan secara berkelanjutan menilai dan mempersiapkan mitigasi atas risiko yang akan timbul dari transisi USD LIBOR dimaksud.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(viii) Impact of Interest Rate Benchmark Reform (continued)

In terms of market risk management, the Bank has identified and anticipated changes that will occur in aspects including changes in market data, which in turn will have an impact on the results of the mark to market calculation, VaR calculation and monitoring, and other calculations related to market risk. With regard to these changes, the Bank has made adjustments to the market risk management system and has reported system enhancement realisation to the regulator.

In terms of liquidity risk, changes in the LIBOR benchmark interest rate to another alternative benchmark interest rate may also have an impact on the Bank's liquidity condition. In this case, changes in the nominal payment of credit interest, derivative transactions and/or loan interest may affect the value of cash flows received or paid by the Bank, including those measured in the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) indicators. However, this impact is not expected to significantly affect the Bank's overall liquidity condition.

As a form of market risk mitigation, as of 31 December 2023, the Bank has identified the need for changes to the information system and the Bank has made adjustments to the system. The Bank has also conducted studies needed in the transition process related to the process and model of the valuation of financial instruments. Currently, the Bank has communicated with affected counterparties and/or customers to provide the latest information regarding changes that may occur as a result of the reform of the interest rate reference, specifically USD LIBOR, either through socialization, discussion or in writing. The Bank has identified areas that have a significant risk of discontinuing USD LIBOR, namely developing information systems and adjusting business processes to accommodate the use of alternative reference interest rates, conducting contract amendments/repapering and/or reviewing fallback clauses on existing contracts. In addition to carrying out continuous efforts in monitoring the latest conditions related to the USD LIBOR transition, the Bank has also conducted more intensive discussions with industry players both from within and outside the country in the context of benchmarking and communication with Regulators to ensure the transition of changes in the benchmark interest rate from USD LIBOR to alternative interest rates went well, also to minimize the risk arising from the transition process. As a long-term follow-up, the Bank will continuously assess and prepare for mitigation of the risks that will arise from the said USD LIBOR transition.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

B. Risiko pasar dan risiko likuiditas (lanjutan)

(viii) Dampak Reformasi Acuan Suku Bunga (lanjutan)

Berikut adalah informasi kuantitatif tentang instrumen keuangan yang belum beralih ke acuan suku bunga alternatif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang menunjukkan secara terpisah aset keuangan non derivatif kredit korporasi, liabilitas keuangan non derivatif *borrowing* dan derivatif (Bank Mandiri saja).

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

B. Market risk and liquidity risk (continued)

(viii) Impact of Interest Rate Benchmark Reform (continued)

The following is quantitative information about financial instruments that have not yet switched to alternative reference rates as of 31 December 2023 and 31 December 2023, which separately shows non-derivative corporate credit financial assets, borrowing, and derivative non-derivative financial liabilities (bank only).

	2023		
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	
Non Derivatif			***Non Derivatives***
Kredit yang diberikan	-	-	*Loans*
Pinjaman yang diterima	-	-	*Fund borrowings*
	Nilai kontrak USD nilai penuh/ *Contract Value Full USD*	**Nilai wajar/ *Fair Value***	
Derivatif			***Derivatives***
Tagihan derivatif	177.050.000	110.120	*Derivatives receivables*
Liabilitas derivatif	20.000.000	(18.463)	*Derivatives liabilities*

	2022		
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	
Non Derivatif			***Non Derivatives***
Kredit yang diberikan	101.863.963	-	*Loans*
Pinjaman yang diterima	-	(6.189.545)	*Fund borrowings*
	Nilai kontrak USD nilai penuh/ *Contract Value Full USD*	**Nilai wajar/ *Fair Value***	
Derivatif			***Derivatives***
Tagihan derivatif	1.303.785.646	978.504	*Derivatives receivables*
Liabilitas derivatif	1.104.892.187	(848.192)	*Derivatives liabilities*

C. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Pengelolaan atas risiko operasional secara efektif dapat menekan kerugian akibat risiko operasional.

Dalam rangka mengelola risiko operasional secara efektif, Bank menyusun kerangka kerja yang mengacu pada regulasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Basel dan *best practice* di industri baik lokal maupun global. Bank saat ini telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional Manajemen Risiko Operasional, yang meliputi aspek *governance* maupun sistem pelaporan.

C. Operational risk

Operational risk is a risk due to inadequacy and/or dysfunctional internal process, human error, systems failure or external factors which impact the Bank's operations. The effectiveness of operational risk management can reduce losses due to operational risk.

In order to the achieve the effectiveness of operational risk management, the Bank has established a framework based on Bank Indonesia, Financial Services Authority, Basel and best practice in both local and global industries. The Bank has implemented Bank Mandiri's Risk Management Policy, Standard Operating Procedures for Operational Risk Management and Technical Guidelines for Operational Risk Management covering both aspects of governance and reporting systems.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

C. Risiko operasional (lanjutan)

Managing risk through operation

Dalam pengelolaan risiko operasional, Bank telah:
(i) Menetapkan *risk governance* pengelolaan risiko operasional.
(ii) Menetapkan kebijakan dan prosedur serta melakukan *review* secara berkala.
(iii) Menetapkan operational *risk appetite statement.*
(iv) Menyusun metodologi dan perangkat pengelolaan risiko operasional.
(v) Mengembangkan dan mengimplementasikan program *Risk Awareness* pengelolaan risiko operasional terhadap seluruh karyawan.
(vi) Mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan *Operational Risk Management System*.
(vii) Menjalankan implementasi pengelolaan risiko operasional ke seluruh unit kerja (Kantor Pusat dan Kantor Wilayah) termasuk implementasi *Operational Risk Management Tools* (ORM *Tools).*
(viii) Melaksanakan *monitoring* dan pelaporan internal maupun eksternal (regulator).
(ix) Mengembangkan kompetensi standar untuk pegawai yang terlibat dalam aktivitas implementasi kerangka kerja manajemen risiko operasional.

Pelaksanaan *operational risk governance* dilakukan melalui:
(i) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
(ii) Pelaksanaan pengelolaan risiko operasional disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko yang didukung dengan keterlibatan:

- *Risk Management & Credit Policy Committee*
- Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional
- Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional
- Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko
- Unit Kerja Kepatuhan
- Unit Kerja Internal Audit

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur internal dalam Manajemen Risiko Operasional yang mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko, yang menjadi landasan implementasi manajemen risiko.

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

C. Operational risk (continued)

Managing risk through operation

In managing operational risk, the Bank has:
(i) Established risk governance of operational risk management.
(ii) Established policies and procedures and conducts periodic review.
(iii) Established operational risk appetite statement.
(iv) Designed methodologies and tools for operational risk management.
(v) Developed and implemented Risk Awareness Program for managing operational risk for all employees.
(vi) Designed, developed, and implemented Operational Risk Management System.
(vii) Implemented the operational risk management to the all units (Head Office and Regional Offices) including the operational risk management tools (ORM Tools).
(viii) Performed monitoring and reporting for internal and external (regulator).
(ix) Developed standard competencies for employees involved in the implementation of operational risk management framework activities.

The implementation of operational risk governance begins with:
(i) Active monitoring by Board of Commissioners and Directors
(ii) The implementation of operational risk management is supervised by Director of Risk Management which supported by the involvement of:

- *Risk Management & Credit Policy Committee*
- *Operational Risk Management and Development Unit*
- *Operational Risk Management Unit*
- *Business Unit and Risk Controlling Unit*
- *Compliance Unit*
- *Internal Audit Unit*

The Bank has established internal policies and procedures for Operational Risk Management referred to as Risk Management Policy, which is the basis of risk management implementation.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

C. Risiko operasional (lanjutan)

Managing risk through operation (lanjutan)

Terkait dengan *ORM Tools, ORM Tools* yang dipergunakan Bank adalah:

(i) *Risk & Control Self Assessment* (RCSA), merupakan sebuah register atas identifikasi risiko dan kontrol utama dari proses bisnis yang ada di Bank, yang secara periodik dilakukan penilaian/*assessment* terhadap *inherent risk rating* dan efektivitas kontrol baik melalui pengujian kontrol *(Control Testing)* maupun secara konsensus. Penilaian *inherent risk rating* dan *control rating* menghasilkan nilai *residual risk* dan menjadi bagian dari profil risiko operasional. Tingkat risiko residual dijaga seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.

(ii) *Loss Event Database*, merupakan *database* insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindak lanjut perbaikan kedepannya, serta sebagai salah satu komponen untuk perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge)* metode *Standardized Approach* (SA).

(iii) *Key Indicator* (KI), merupakan *early warning signal* dalam pengelolaan risiko operasional dengan tujuan agar upaya mitigasi dapat segera ditentukan dan dilaksanakan sebelum sebuah risiko terjadi. KI mengindikasikan besar kecilnya kemungkinan suatu risiko akan terjadi (*risk based*) atau mengindikasikan besar kecilnya kemungkinan suatu kontrol tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya *(control based).* KI ditetapkan ambang batasnya *(threshold)* dan dicatat skor realisasinya secara berkala.

(iv) *Issue & Action Management* (IAM), merupakan perangkat untuk memantau tindak lanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan dari berbagai sumber, seperti dari hasil *Control Testing*, hasil *monitoring Key Indicator*, terjadinya insiden, teridentifikasinya suatu permasalahan *(self-identified issue)* dan lainnya.

(v) *Capital Modelling,* merupakan model perhitungan modal risiko operasional *(regulatory capital charge)* sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagai *output* dari proses Manajemen Risiko Operasional, akan dihasilkan profil risiko operasional yang di *review* oleh unit Internal Audit, dipresentasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) dan Profil Risiko yang disampaikan kepada Regulator secara periodik. Selain itu, dalam rangka pengelolaan risiko operasional terdapat laporan pengelolaan risiko operasional yang disampaikan kepada manajemen sebagai sarana monitoring dan bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan prioritas.

62. RISK MANAGEMENT *(continued)*

C. Operational risk (continued)

Managing risk through operation *(continued)*

The ORM Tools used by the Bank are:

(i) Risk & Control Self Assessment (RCSA), is a register of risk identification and main control of the business processes within the Bank, where inherent risk rating and control effectiveness either through control testing or by consensus are periodically assessed. The testing of inherent risk rating and control rating generated residual risk value which become a component of operational risk profile. The residual risk level is minimized by taking necessary mitigations before risk occurs.

(ii) Loss Event Database, is a database of operational risk incidents which recorded on risk based basis as a lesson learned, remediation monitoring and future improvements, also as a component for calculation of operational risk capital calculation (regulatory capital charge) with the Standardized Approach (SA) method.

(iii) Key Indicator (KI), is an early warning signal in operational risk management with the aim that mitigation efforts can be immediately determined and implemented before a risk occurs. KI indicates the probability that a risk will occur (risk based) or indicates the probability that a control is not implemented properly (control based). KI is set a threshold (threshold) and its realization score is recorded periodically.

(iv) Issue & Action Management (IAM), is a tool to monitor follow-up action that have been designed on identified issues through various activities, such as Control Testing, incident, key indicator monitoring result, self identified issued and other.

(v) Capital Modelling, an operational capital calculation model (regulatory capital charge) that complies with applicable regulations.

As the output of Operational Risk Management process, each unit generates operational risk profile reviewed by Internal Audit unit and presented to the Board of Commissioners and directors, and submitted to the regulators periodically in the form of Risk Based Bank Rating and Risk Profile. In addition, in order to manage operational risk, there is an operational risk management reports that are submitted to management as a monitoring tool and consideration for priority decision making.

62. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

C. Risiko operasional (lanjutan)

Managing risk through capital

Sesuai ketentuan, Bank menggunakan *Standardized Approach* (SA)/Pendekatan Standar sesuai SEOJK No. 06/SEOJK.03/2020 untuk perhitungan beban modal risiko operasional. Perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar dilakukan setiap tahun berdasarkan data Komponen Kerugian Risiko Operasional selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan data Komponen Indikator Bisnis selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hasil perhitungan dari beban modal risiko operasional Bank Mandiri (Bank Mandiri saja) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.697.622,24 sedangkan secara konsolidasian (Bank Mandiri dengan perusahaan anak) adalah sebesar Rp5.466.589,11. Berdasarkan nilai beban modal risiko operasional tersebut, nilai ATMR risiko operasional pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.720.278 (Bank Mandiri saja) dan Rp68.332.363,88 (konsolidasian).

***62. RISK MANAGEMENT** (continued)*

C. Operational risk (continued)

Managing risk through capital

According to the regulations, the Bank utilizes the Standardized Approach (SA) in accordance with SEOJK No. 06/SEOJK.03/2020 for operational risk capital charges calculation. The calculation of the Risk Weighted Assets (RWA) using Standardized Approach is performed annually based on Operational Risk Loss Components data for the last 10 (ten) years and Business Indicator Components data for the last 3 (three) years. The result of calculation of operational risk capital charges for Bank Mandiri (Bank Only) as of 31 December 2023 amounted to Rp4,697,622.24 while for consolidation (Bank Mandiri and its subsidiaries) amounted to Rp5,466,589.11. Based on these operational risk capital charges values, RWA for operational risk as of 31 December 2023 amounted to Rp58,720,278 (Bank Only) and Rp68,332,363.88 (consolidated).

63. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING

a. Perjanjian *integrated banking system* dengan *vendor*

Pada tanggal 28 Mei 2019, Bank Mandiri mengadakan perjanjian dengan *vendor* untuk menambah fitur eMAS sesuai perjanjian *Application Management* 2019 menggunakan *system blanket order* dengan nilai maksimum sebanyak 6.141 *mandays*. Pada tanggal 31 Desember 2023 dari nilai kontrak sebesar USD4.898.670,82 (nilai penuh), Bank telah melakukan pembukuan sebagai aset tetap sebesar USD4.869.245,87 (nilai penuh) dengan estimasi penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 99,40%.

Pada tanggal 25 Mei 2021, Bank Mandiri mengadakan perjanjian dengan *vendor* untuk menambah fitur eMAS sesuai perjanjian *Application Management* 2021 menggunakan *system blanket order* dengan nilai maksimum sebanyak 1.870 *mandays*. Pada tanggal 31 Desember 2023 dari nilai kontrak sebesar USD1.513.307,45 (nilai penuh), Bank telah melakukan pembukuan sebagai aset tetap sebesar USD1.501.340,95 (nilai penuh) dengan estimasi penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 99,21%.

Pada tanggal 18 November 2021, Bank Mandiri mengadakan perjanjian dengan *vendor* untuk menambah fitur eMAS sesuai perjanjian *Application Management* 2022 menggunakan *system blanket order* dengan nilai maksimum sebanyak 1.870 *mandays*. Pada tanggal 31 Desember 2023 dari nilai kontrak sebesar USD1.626.226,15 (nilai penuh), Bank telah melakukan pembukuan sebagai aset tetap sebesar USD1.589.068,08 (nilai penuh) dengan estimasi penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 97,72%.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Integrated banking system agreement with vendor

On 28 May 2019, Bank Mandiri entered into an agreement with vendors to enhance eMAS features related to the 2019 Application Management agreement with the blanket order system with a maximum contract value of 6,141 mandays. On 31 December 2023 the payment realisation amounted to USD4,898,670.82 (full amount) and the Bank has recorded the payment realisation as a fixed asset amounted to USD4,869,245.87 (full amount) with the estimated project completion on 31 December 2023 is 99.40%.

On 25 May 2021, Bank Mandiri entered into an agreement with vendors to add eMAS features according to the 2021 Application Management agreement using a blanket order system with a maximum contract value of 1,870 mandays. On 31 December 2023, out of a contract value amounted to USD1,513,307.45 (full amount) the Bank has recorded it as fixed assets amounted to USD1,501,340.95 (full amount) with the estimated project completion position on 31 December 2023 is 99.21%.

On 18 November 2021, Bank Mandiri entered into an agreement with vendors to add eMAS features according to the 2022 Application Management agreement using a blanket order system with a maximum contract value of 1,870 mandays. On 31 December 2023, out of a contract value amounted to USD1,626,226.15 (full amount) the Bank has recorded it as fixed assets amounted to USD1,589,068.08 (full amount) with the estimated project completion on 31 December 2023 is 97.72%.

63. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)

a. Perjanjian *integrated banking system* dengan *vendor* (lanjutan)

Pada tanggal 19 Oktober 2022, Bank Mandiri mengadakan perjanjian dengan *vendor* untuk menambah fitur eMAS sesuai perjanjian *Application Management* 2023 menggunakan *system blanket order* dengan nilai maksimum sebanyak 350 *mandays*. Pada tanggal 31 Desember 2023 dari nilai kontrak sebesar USD397.094,54 (nilai penuh), Bank telah melakukan pembukuan sebagai aset tetap sebesar USD340.965,74 (nilai penuh) dengan estimasi penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 85,87%.

Perikatan antara Bank Mandiri dengan pihak terkait telah mengikuti syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

b. Perkara hukum

Bank saat ini masih menghadapi permasalahan hukum diantaranya dengan debitur dan/atau pemilik dana sebagai akibat adanya perselisihan perjanjian yang telah diputus oleh Pengadilan dimana Bank dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp6.871. Saat ini Bank masih dalam proses/upaya hukum keberatan terhadap putusan.

Jumlah klaim terhadap Bank Mandiri atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp541.727 dan Rp695.233. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank Mandiri telah membentuk cadangan masing-masing sebesar Rp90.893 dan Rp111.298 dan berpendapat bahwa cadangan yang dibentuk telah memadai.

c. *Trade Agreement* dengan Asian Development Bank

Pada tanggal 25 November 2009, Bank Mandiri telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan *Asian Development Bank* ("ADB") melalui *Trade Finance Facilitation Program* ("TFFP"), yaitu *Confirmation Bank Agreement* ("CBA") dan *Issuing Bank Agreement* ("IBA").

Berdasarkan CBA dan IBA, Bank Mandiri dapat bertindak baik sebagai *confirming* bank maupun sebagai *issuing* bank bagi transaksi ekspor impor nasabah dengan basis *Letter of Credit* ("L/C"). Sebagai *confirming* bank, Bank Mandiri dapat diberikan jaminan oleh ADB atas L/C yang diterbitkan oleh *issuing* bank dan sebagai *issuing* bank maka Bank Mandiri dapat diberikan *confirmation guarantee* oleh ADB atas L/C yang diterbitkan.

63. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Integrated banking system agreement with vendor *(continued)*

On 19 October 2022, Bank Mandiri entered into an agreement with vendors to add eMAS features according to the 2023 Application Management agreement using a blanket order system with a maximum contract value of 350 mandays. On 31 December 2023, out of a contract value amounted to USD397,094.54 (full amount) the Bank has recorded it as fixed assets amounted to USD340,965.74 (full amount) with the estimated project completion on 31 December 2023 is 85.87%.

Bank Mandiri and related parties have complied the mutually agreed terms and conditions.

b. Legal matters

Currently, the Bank has a number of outstanding litigation cases, including lawsuits with debtors and/or fund owners due to disputes that had been decided by the Court where the Bank was convicted by the Court to pay compensation amounted to Rp6,871. Currently, the Bank is still in the legal process to appeal against the decision.

The Bank's total potential financial exposure arising from outstanding lawsuits as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp541,727 and Rp695,233, respectively. As of 31 December 2023 and 2022, the Bank has provided a provision amounted to Rp90,893 and Rp111,298, respectively and believes that the provision is adequate.

c. Trade Agreement with Asian Development Bank

On 25 November 2009, Bank Mandiri has signed a contractual agreement with Asian Development Bank ("ADB") through Trade Finance Facilitation Program ("TFFP") which are Confirmation Bank Agreement ("CBA") and Issuing Bank Agreement ("IBA").

Based on CBA and IBA, Bank Mandiri can act either as confirming bank or issuing bank for customers import-export transactions with Letter of Credit (L/C) arrangement. As a confirming bank, Bank Mandiri can request a guarantee from ADB for L/C issued by issuing bank and as issuing bank, therefore Bank Mandiri can obtain confirmation guarantee from ADB for L/C that has been issued.

63. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)

c. *Trade Agreement* dengan Asian Development Bank (lanjutan)

Skema TFFP tersebut merupakan program ADB untuk memfasilitasi transaksi perdagangan berbasis L/C di negara-negara berkembang Asia untuk mendorong tingkat pertumbuhan volume perdagangan. Dengan menjadi partisipan dalam TFFP ini, Bank Mandiri memiliki peluang untuk *trade* volume dan membuka bisnis baru khususnya dengan bank dari negara-negara yang termasuk dalam program ADB.

***63. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***c. Trade Agreement with Asian Development Bank** (continued)*

TFFP scheme is a program initiated by ADB to facilitate the L/C based trade transactions within Asian developing countries to increase the trade-volume growth. Becoming a participant in this program, Bank Mandiri will have an easier access to increase its trade volume and to open new business opportunities especially to countries in ADB program.

64. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah telah membentuk lembaga penjaminan independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") untuk menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000 (nilai penuh).

Suku bunga simpanan LPS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah dan masing-masing sebesar 2,25% dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.

64. GOVERNMENT GUARANTEE FOR PAYMENT OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 24 year 2004 dated 22 September 2004 as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 3 year 2008 concerning Amendments to Law No. 24 year 2004 regarding the Deposit Insurance Corporation. The Government of Republic Indonesia has established an independent agency called Deposit Insurance Corporation ("LPS"), LPS guarantee public funds, including funds from other banks in form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other equivalent deposits.

Based on the LPS No. 1/PLPS/2023 dated 22 May 2023 regarding the Deposit Guarantee Program, the maximum guaranteed amount for each customer in one bank is Rp2,000,000,000 (full amount).

The interest rate of LPS as of 31 December 2023 and 2022 for deposits denominated in Rupiah is 4.25% and 3.75%, respectively, for deposits denominated in foreign currencies is 2.25% and 1.75%, respectively.

65. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

65. CHANGES IN FINANCING ACTIVITIES

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flow are as follow:

	1 Januari 2023/ *1 January 2023*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-arus kas/*Non-cash flow*: Selisih kurs/ *Differences due to exchange rate*	Non-arus kas/*Non-cash flow*: Lainnya/ *Others*	31 Desember 2023/ *31 December 2023*	
Efek-efek yang diterbitkan	45.774.139	4.745.379	(46.047)	44.293	50.517.764	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	62.840.118	32.233.688	366.834	4.819	95.445.459	*Fund borrowing*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	633.333	(417.151)	(678)	(333)	215.171	*Subordinated loans and marketable securities*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.325.475	11.611.121	(352.682)	746.150	36.330.064	*Securities sold under agreements to repurchase liabilities*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**133.573.065**	**48.173.037**	**(32.573)**	**794.929**	**182.508.458**	***Total liabilities from financing activities***

65. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

65. CHANGES IN FINANCING ACTIVITIES (continued)

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flow are as follow (continued):

	1 Januari 2022/ *1 January 2022*	Arus kas/ *Cash flow*	Non-arus kas/*Non-cash flow*: Selisih kurs/ *Differences due to exchange rate*	Non-arus kas/*Non-cash flow*: Lainnya/ *Others*	31 Desember 2022/ *31 December 2022*	
Efek-efek yang diterbitkan	45.138.342	(1.481.434)	2.186.689	(69.458)	45.774.139	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	51.398.940	10.833.185	605.872	2.121	62.840.118	*Fund borrowing*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	637.143	(12.900)	8.858	232	633.333	*Subordinated loans and marketable securities*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.427.998	18.642.798	254.679	-	24.325.475	*Securities sold under agreements to repurchase liabilities*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**102.602.423**	**27.981.649**	**3.056.098**	**(67.105)**	**133.573.065**	***Total liabilities from financing activities***

66. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU/REVISI

Amendemen dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") - Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI"), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama periode berjalan diungkapkan di bawah ini. Grup bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada *IFRS Accounting Standards*, lokal, dan syariah.

- Amendemen PSAK 201 tentang "Penyajian Laporan Keuangan" terkait "Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan". Penerapan amendemen tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan perubahan tanggal berlaku efektifnya Amendemen PSAK 201 tentang "Penyajian Laporan Keuangan" terkait "Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" yang sebelumnya berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 menjadi 1 Januari 2024.

66. NEW (REVISED) FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Amendments and Improvements of Indonesian Financial Accounting Standards and Interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("FASB") - Institute of Indonesia Chartered Accountants ("IAI"), but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Effective on 1 January 2024:

- *Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendement to SFAS and IFAS number, are effective on 1 January 2024. KSPKI regulate the SFAS pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendement to SFAS and IFAS number determine the number for SFAS and IFAS which refering to IFRS Accounting Standards, local accounting standards, and syariah accounting standards.*

- *Amendments to SFAS No. 201 on "Presentation of Financial Statements" regarding "Non-Current Liabilites with Covenant". The implementation effective on 1 January 2024 in accordance with the amended effective date of SFAS No. 201 Amendments on "Presentation of Financial Statements" for "Classification of Liabilites as Current or Non-current" from effective on 1 January 2023 to 1 January 2024.*

66. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU/REVISI (lanjutan)

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan):

- Amendemen PSAK 116 tentang "Sewa" terkait Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik. Amendemen tersebut mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 16 tentang "*Lease*" terkait "*Lease Liability in a Sale and Leaseback*". Penerapan amendemen ini dimulai untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan lebih dini diperkenankan.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 117 tentang "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 109 tentang "Instrumen Keuangan" dan PSAK 115 tentang "Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan".

Grup masih dalam proses melakukan evaluasi atas dampak dari amendemen dan PSAK baru tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

66. NEW (REVISED) FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

Effective on 1 January 2024 (continued):

- *Amendments to SFAS No. 116 on "Lease" for Lease Liabiliy in a Sale and Leaseback. This amendment adopts all the regulation in IFRS 16 Amendment on "Lease" regarding "Lease Liability in a Sale and Leaseback". This implementation starts on 1 January 2024 and early implementation is permitted.*

Effective on 1 January 2025:

- *SFAS No. 117, "Insurance Contract", adopted from IFRS 17, is effective 1 January 2025, with early adoption permitted for entities that have also applied SFAS No. 109 concerning "Financial Instruments" and SFAS No. 115 concerning "Revenue and Contracts with Customers".*

The Group is still in the process of evaluating the impact of the amendments and new SFAS mentioned above to the Group's consolidated financial statements.

67. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan

Informasi yang disajikan pada lampiran 1 - 4 merupakan informasi keuangan tambahan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Entitas Induk, yang menyajikan penyertaan Bank pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

67. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Supplementary Financial Information

The additional information presented in appendix 1 - 4 is a supplementary financial information of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., the Parent Entity, which presents the Bank's investment in its Subsidiaries using cost method.

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ASET			***ASSETS***
Kas	20.866.568	20.852.885	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	88.445.303	86.598.997	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain			*Current accounts with other banks*
Pihak berelasi	396.623	31.735	*Related parties*
Pihak ketiga	33.719.245	46.485.781	*Third parties*
	34.115.868	46.517.516	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(11.459)	(11.515)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	34.104.409	46.506.001	*Net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Pihak berelasi	1.231.760	1.868.100	*Related parties*
Pihak ketiga	54.043.680	76.495.525	*Third parties*
	55.275.440	78.363.625	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(870)	(3.431)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	55.274.570	78.360.194	*Net*
Efek-efek			*Marketable securities*
Pihak berelasi	13.513.049	17.260.960	*Related parties*
Pihak ketiga	29.479.847	27.610.657	*Third parties*
	42.992.896	44.871.617	
Ditambah/(dikurangi): premi yang belum diamortisasi, keuntungan/ (kerugian) - bersih yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai	141.975	60.735	*Add/(less): unamortised premiums, unrealised gains/(losses) - net from increase/(decrease) in fair value and allowance for impairment losses*
Neto	43.134.871	44.932.352	*Net*
Obligasi pemerintah			*Government bonds*
Pihak berelasi	239.245.751	262.007.141	*Related parties*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan			*Other receivables - trade transactions*
Pihak berelasi	7.422.335	15.152.746	*Related parties*
Pihak ketiga	18.349.293	18.506.095	*Third parties*
	25.771.628	33.658.841	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.448.930)	(1.560.367)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	24.322.698	32.098.474	*Net*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			*Securities purchased under agreements to resell*
Pihak ketiga	16.205.580	6.312.523	*Third parties*

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ASET (lanjutan)			***ASSETS*** (*continued*)
Tagihan derivatif			*Derivative receivables*
Pihak berelasi	198.156	110.208	*Related parties*
Pihak ketiga	1.767.841	2.117.400	*Third parties*
Total	1.965.997	2.227.608	*Total*
Kredit yang diberikan			*Loans*
Pihak berelasi	216.274.701	178.984.137	*Related parties*
Pihak ketiga	869.512.726	753.654.914	*Third parties*
	1.085.787.427	932.639.051	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(42.323.522)	(54.267.417)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	1.043.463.905	878.371.634	*Net*
Tagihan akseptasi			*Acceptance receivables*
Pihak berelasi	2.162.339	1.863.350	*Related parties*
Pihak ketiga	12.300.602	9.494.529	*Third parties*
	14.462.941	11.357.879	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(117.900)	(57.149)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	14.345.041	11.300.730	*Net*
Penyertaan saham			*Investments in shares*
Pihak berelasi	14.994.607	15.063.607	*Related parties*
Pihak ketiga	5.025	5.043	*Third parties*
	14.999.632	15.068.650	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(44.534)	(80.335)	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	14.955.098	14.988.315	*Net*
Biaya dibayar dimuka	1.424.099	1.032.325	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar dimuka	239.757	979.174	*Prepaid taxes*
Aset tetap	69.604.803	66.392.486	*Fixed assets*
Dikurangi: akumulasi penyusutan	(18.194.545)	(16.185.489)	*Less: accumulated deprecitation*
Neto	51.410.258	50.206.997	*Net*
Aset takberwujud	10.314.331	9.270.638	*Intangible assets*
Dikurangi: akumulasi amortisasi	(6.505.920)	(5.597.283)	*Less: accumulated amortisation*
Neto	3.808.411	3.673.355	*Net*
Aset lain-lain	28.305.188	20.746.169	*Other assets*
Dikurangi: penyisihan lainnya	(541.819)	(539.972)	*Less: allowance for other impairment losses*
Neto	27.763.369	20.206.197	*Net*
Aset pajak tangguhan - neto	7.874.700	9.677.161	*Deferred tax assets - net*
TOTAL ASET	**1.688.850.385**	**1.570.332.063**	***TOTAL ASSETS***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	4.482.945	4.054.700	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro			*Demand deposits*
Pihak berelasi	163.938.319	156.431.305	*Related parties*
Pihak ketiga	368.594.262	341.559.932	*Third parties*
Total	532.532.581	497.991.237	*Total*
Tabungan			*Saving deposits*
Pihak berelasi	7.513.973	6.826.334	*Related parties*
Pihak ketiga	446.196.403	421.540.614	*Third parties*
Total	453.710.376	428.366.948	*Total*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi	31.620.995	28.833.694	*Related parties*
Pihak ketiga	224.281.646	237.972.447	*Third parties*
Total	255.902.641	266.806.141	*Total*
Total simpanan nasabah	1.242.145.598	1.193.164.326	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
Giro dan tabungan			*Demand deposits and saving deposits*
Pihak berelasi	170.735	276.263	*Related parties*
Pihak ketiga	6.448.469	5.400.942	*Third parties*
Total	6.619.204	5.677.205	*Total*
Interbank call money			*Interbank call money*
Pihak ketiga	6.966.896	4.236.101	*Third parties*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak ketiga	2.737.290	3.506.345	*Third parties*
Total simpanan dari bank lain	16.323.390	13.419.651	*Total deposits from other banks*
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			*Securities sold under agreements to repurchase liabilities*
Pihak ketiga	36.097.856	24.228.547	*Third parties*

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			***LIABILITIES AND EQUITY** (continued)*
LIABILITAS (lanjutan)			***LIABILITIES** (continued)*
Liabilitas derivatif			*Derivative payables*
Pihak berelasi	76.404	86.933	*Related parties*
Pihak ketiga	2.037.449	2.039.836	*Third parties*
Total	2.113.853	2.126.769	*Total*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance payables*
Pihak berelasi	2.536.269	1.693.426	*Related parties*
Pihak ketiga	11.926.672	9.664.453	*Third parties*
Total	14.462.941	11.357.879	*Total*
Efek-efek yang diterbitkan			*Debt securities issued*
Pihak berelasi	3.619.950	3.949.550	*Related parties*
Pihak ketiga	37.264.571	32.049.152	*Third parties*
	40.884.521	35.998.702	
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(67.622)	(63.194)	*Less: unamortised debt issuance cost*
Neto	40.816.899	35.935.508	*Net*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	1.111.730	2.044.500	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Beban yang masih harus dibayar	2.395.417	4.211.850	*Accrued expenses*
Utang pajak	1.642.179	2.037.840	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja	8.417.409	8.977.843	*Employee benefit liabilities*
Provisi	286.081	323.365	*Provision*
Liabilitas lain-lain	22.115.368	14.844.598	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima			*Fund borrowings*
Pihak berelasi	665.346	570.638	*Related parties*
Pihak ketiga	57.149.992	41.158.127	*Third parties*
Total	57.815.338	41.728.765	*Total*
Pinjaman dan efek-efek subordinasi			*Subordinated loans and marketable securities*
Pihak berelasi	10.000	87.000	*Related parties*
Pihak ketiga	205.735	546.564	*Third parties*
	215.735	633.564	
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(564)	(231)	*Less: unamortised issuance cost*
Neto	215.171	633.333	*Net*
TOTAL LIABILITAS	**1.450.442.175**	**1.359.089.474**	***TOTAL LIABILITIES***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			***LIABILITIES AND EQUITY** (continued)*
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik Entitas Induk			*Attributable equity to the Parent Entity*
Modal saham - nilai nominal Rp125 dan Rp250 (nilai penuh) per lembar saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			*Share capital - Rp125 and Rp250 (full amount) par value per share as of 31 December 2023 and 2022*
Modal dasar - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 127.999.999.999 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 63.999.999.999 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2022			*Authorised capital- 1 Dwiwarna Series A share and 127,999,999,999 Series B common shares as of 31 December 2023 and 1 Dwiwarna Series A share and 63,999,999,999 Series B common share as of 31 December 2022*
Modal ditempatkan dan disetor - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 93.333.333.331 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2023 dan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 46.666.666.665 lembar saham biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2022	11.666.667	11.666.667	*Issued and fully paid-in capital 1 Dwiwarna Series A share and 93,333,333,331Series B common shares as of 31 December 2023 and 1 Dwiwarna Series A share and 46,666,666,665 Series B common shares as of 31 December 2022*
Tambahan modal disetor/ agio saham	18.941.550	18.941.550	*Additional paid-in capital/ agio*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(434.437)	(361.753)	*Differences arising from translation of financial statements in foreign currencies*
Kerugian neto yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan	(1.926.827)	(2.737.402)	*Net unrealised loss from decrease in fair value of financial assets through other comprehensive income - net of deferred tax*
Selisih bersih revaluasi aset tetap	34.487.954	34.487.954	*Net differences in fixed assets revaluation*
Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	1.512.069	1.478.835	*Net actuarial gain from defined benefits program - net of deferred tax*
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052	*Other comprehensive income*
Saldo laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi - reorganisasi pada tanggal 30 April 2003)			*Retained earnings (accumulated losses of Rp162,874,901 were eliminated against additional paid-in capital/ agio as a result of quasi-reorganisation on 30 April 2003)*
Sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	168.695.914	142.301.418	*Unappropriated*
Total saldo laba	174.076.182	147.681.686	*Total retained earnings*
TOTAL EKUITAS	**238.408.210**	**211.242.589**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.688.850.385**	**1.570.332.063**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			***INCOME AND EXPENSE FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga	97.831.188	82.402.327	*Interest income*
Beban bunga	(26.604.466)	(17.296.790)	*Interest expense*
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**71.226.722**	**65.105.537**	***NET INTEREST INCOME***
Pendapatan operasional lainnya			*Other operating income*
Provisi dan komisi	15.706.065	14.097.870	*Fees and commissions*
Pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto	2.790.171	3.152.807	*Income from fair value through profit or loss classification - net*
Lain-lain	13.801.068	8.927.628	*Others*
Total pendapatan operasional lainnya	32.297.304	26.178.305	*Total other operating income*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(6.288.672)	(10.533.173)	*Allowance for impairment losses*
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	921.730	266.506	*Reversal of allowance for estimated losses commitments and contingencies*
Pembentukan penyisihan lainnya dan kerugian risiko operasional - neto	(22.103)	(267.870)	*Allowance for other impairment losses and operational risk losses - net*
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	47.701	696.462	*Gain on sale of marketable securities and government bonds*
Beban operasional lainnya			*Other operating expenses*
Beban gaji dan tunjangan	(16.058.990)	(16.047.712)	*Salaries and employee benefits expenses*
Beban umum dan administrasi	(14.503.827)	(14.030.660)	*General and administrative expenses*
Lain-lain	(4.930.750)	(4.702.056)	*Others*
Total beban operasional lainnya	(35.493.567)	(34.780.428)	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL	**62.689.115**	**46.665.339**	***INCOME FROM OPERATION***
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	98.094	113.094	*Non operating income/ (expense) - net*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**62.787.209**	**46.778.433**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
Beban pajak			*Tax expense*
Kini	(10.015.624)	(9.329.662)	*Current*
Tangguhan	(1.674.707)	243.655	*Deferred*
Total beban pajak - neto	(11.690.331)	(9.086.007)	*Total tax expense - net*
LABA TAHUN BERJALAN	**51.096.878**	**37.692.426**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	4.574.057	*Gain on fixed assets revaluation*
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	41.030	287.101	*Actuarial gain from defined benefits program*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.796)	(54.550)	*Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss*
	33.234	4.806.608	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(72.683)	(68.731)	*Difference arising from translation of financial statements in foreign currencies*
Perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	930.532	(5.307.062)	*Changes in fair value of financial assets classified as fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(119.958)	1.040.800	*Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss*
	737.891	(4.334.993)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	**771.125**	**471.615**	***Other comprehensive income for the year - net of income tax***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**51.868.003**	**38.164.041**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM			***EARNINGS PER SHARE***
Dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	547,47	403,98	*Basic and diluted (full amount of Rupiah)*

*) Laba per saham pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disajikan kembali sehubungan dengan pemecahan nilai saham (Catatan 2aj)

*Earnings per share for the year ended 31 December 2022 *) is restated in relation to the stock split (Note 2aj)*

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023											
	Modal ditempatkan dan disetor/ *Issued and fully paid-in capital*	Tambahan modal disetor/ agio saham/ *Additional paid-in capital/agio*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Difference arising from translation of financial statements in foreign currencies*	Keuntungan/ (kerugian) neto yang belum direalisasi dari kenaikan/ (penurunan) nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net unrealised gain/(loss) from increase/ (decrease) in fair value of financial assets through other comprehensive income - net of deferred tax*	Selisih bersih revaluasi aset tetap/ *Net difference in fixed assets revaluation*	Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net actuarial gain from defined benefits program - net of deferred tax*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*			Total ekuitas/ *Total equity*	
								Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	**11.666.667**	**18.941.550**	**(361.753)**	**(2.737.402)**	**34.487.954**	**1.478.835**	**85.052**	**5.380.268**	**142.301.418**	**147.681.686**	**211.242.589**	***Balance as of 1 January 2023***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.702.382)	(24.702.382)	(24.702.382)	*Dividend payment from 2022 net income*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	51.096.878	51.096.878	51.096.878	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(72.684)	810.575	-	33.234	-	-	-	-	771.125	*Other comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**11.666.667**	**18.941.550**	**(434.437)**	**(1.926.827)**	**34.487.954**	**1.512.069**	**85.052**	**5.380.268**	**168.695.914**	**174.076.182**	**238.408.210**	***Balance as of 31 December 2023***

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022												
	Modal ditempatkan dan disetor/ *Issued and fully paid-in capital*	Tambahan modal disetor/ agio saham/ *Additional paid-in capital/agio*	Modal saham yang diperoleh dan dimiliki kembali (saham treasuri)/ *Share capital acquired and repossessed (treasury stock)*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Difference arising from translation of financial statements in foreign currencies*	Kerugian neto yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net unrealised loss from decrease in fair value of financial assets through other comprehensive income - net of deferred tax*	Selisih bersih revaluasi aset tetap/ *Net difference in fixed assets revaluation*	Keuntungan neto aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Net actuarial gain from defined benefits program - net of deferred tax*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*			Total ekuitas/ *Total equity*	
									Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	**11.666.667**	**18.941.550**	**(150.895)**	**(293.022)**	**1.528.860**	**29.913.897**	**1.246.284**	**85.052**	**5.380.268**	**121.425.885**	**126.806.153**	**189.744.546**	***Balance as of 1 January 2022***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.816.893)	(16.816.893)	(16.816.893)	*Dividend payment from 2022 net income*
Saham treasuri	-	-	150.895	-	-	-	-	-	-	-	-	150.895	*Treasury stock*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.692.426	37.692.426	37.692.426	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(68.731)	(4.266.262)	4.574.057	232.551	-	-	-	-	471.615	*Other comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**11.666.667**	**18.941.550**	**-**	**(361.753)**	**(2.737.402)**	**34.487.954**	**1.478.835**	**85.052**	**5.380.268**	**142.301.418**	**147.681.686**	**211.242.589**	***Balance as of 31 December 2022***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga	94.123.502	77.592.699	*Receipts from interest income*
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	15.706.065	14.097.870	*Receipts from provision, commission and premium income*
Pembayaran beban bunga	(25.567.859)	(17.005.710)	*Payments of interest expense*
Penerimaan dari penjualan obligasi pemerintah - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	198.395.896	278.867.971	*Receipts from the sale of government bonds - measured at fair value through profit or loss*
Pembelian obligasi pemerintah – diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(200.469.433)	(277.071.573)	*Acquisition of government bonds - measured at fair value through profit or loss*
Pendapatan/(beban) dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto	3.559.790	(1.408.422)	*Income/(expense) from fair value through profit or loss classification - net*
Pendapatan operasional lainnya - lain-lain	3.595.327	2.592.325	*Other operating income - others*
Beban operasional lainnya - lain-lain	(7.040.948)	(5.567.680)	*Other operating expenses - others*
Beban gaji dan tunjangan	(16.578.394)	(14.903.220)	*Salaries and employee benefits expenses*
Beban umum dan administrasi	(11.369.509)	(10.818.734)	*General and administrative expenses*
Pendapatan bukan operasional - neto	95.115	110.519	*Non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(10.680.754)	(9.221.948)	*Payment of corporate income tax*
Arus kas dari aktivitas operasional sebelum perubahan aset dan liabilitas operasional	43.768.798	37.264.097	*Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:			*Decrease/(increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.054.578	1.154.996	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(5.289.249)	(2.440.006)	*Marketable securities - measured at fair value through profit or loss*
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	7.887.213	(4.441.826)	*Other receivables - trade transactions*
Kredit yang diberikan	(171.011.962)	(122.237.237)	*Loans*
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(9.893.057)	15.824.166	*Securities purchased under agreements to resell*

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (lanjutan)			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES** (continued)*
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional (lanjutan):			*Decrease/(increase) in operating assets (continued):*
Pajak dibayar dimuka	739.417	909.344	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	(391.774)	(223.493)	*Prepaid expenses*
Aset lain-lain	(6.939.338)	(998.419)	*Other assets*
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	10.134.741	6.335.303	*Recovery of written-off financial assets*
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:			*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Bank konvensional			*Conventional banking*
Giro	35.334.666	119.657.314	*Demand deposits*
Tabungan	25.492.105	47.556.948	*Saving deposits*
Deposito berjangka	(11.672.555)	1.438.914	*Time deposits*
Interbank call money	2.730.795	(673.784)	*Interbank call money*
Liabilitas segera	428.245	(1.325.774)	*Obligations due immediately*
Utang pajak lainnya	269.469	38.264	*Other taxes payable*
Liabilitas lain-lain	9.843.763	6.169.254	*Other liabilities*
Kas neto yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasional	**(67.514.145)**	**104.008.061**	***Net cash (used in)/ provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penurunan/(kenaikan) efek-efek - selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.950.959	(6.520.013)	*Decrease/(increase) in marketable securities - other than measured at fair value through profit or loss*
Penurunan/(kenaikan) obligasi pemerintah - selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	25.790.497	(32.591.302)	*Decrease/(increase) in government bonds - other than measured at fair value through profit or loss*
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2.981	2.483	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	(1.961.615)	(1.885.056)	*Acquisition of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(1.043.693)	(831.403)	*Acquisition of intangible assets*
Perolehan aset hak guna	(1.295.978)	(1.775.410)	*Acquisition of right of use assets*
Setoran modal ke Entitas Anak	-	(4.590.889)	*Paid-in capital to Subsidiaries*
Divestasi penyertaan di Entitas Asosiasi	140.000	-	*Divestment in Associate Entity*
Kas neto yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	**28.583.151**	**(48.191.590)**	***Net cash provided by/ (used in) investing activities***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari efek-efek yang diterbitkan	9.362.750	-	*Receipts from debt securities issued*
Pembayaran atas efek-efek yang diterbitkan	(4.480.000)	(1.000.101)	*Payments of debt securities issued*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	30.977.214	10.116.382	*Receipts from fund borrowings*
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(15.264.106)	(9.705.029)	*Payments of fund borrowings*
Penerimaan dari pinjaman dan efek-efek subordinasi	100.000	-	*Receipts from subordinated loans and marketable securities*
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi	(517.151)	(12.900)	*Payments of subordinated loans and marketable securities*
Kenaikan liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	11.474.780	18.630.298	*Increase in securities sold under agreements to repurchase liabilities*
Pembayaran dividen	(24.702.382)	(16.816.893)	*Payments of dividends*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**6.951.105**	**1.211.757**	***Net cash provided by financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(31.979.889)**	**57.028.228**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	**(818.781)**	**9.413.094**	***EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**229.632.271**	**163.190.949**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**196.833.601**	**229.632.271**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF THE PARENT ENTITY

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:			*Cash and cash equivalents at the end of year consists of:*
Kas	20.866.568	20.852.885	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	88.445.303	86.598.997	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	34.115.868	46.517.516	*Current accounts with other banks*
Investasi jangka pendek likuid dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	53.405.862	75.662.873	*Liquid short-term investments with a period of time maturity of three months or less from the date of acquisition*
Total kas dan setara kas	**196.833.601**	**229.632.271**	***Total cash and cash equivalents***



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
Telp : 14000, +62-21-52997777
Fax : +62-21-52997735
www.bankmandiri.co.id